

TIDAK DIPERDAGANGKAN UNTUK UMUM



KONGRES BAHASA INDONESIA IV

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta
1962



KONGRES BAHASA INDONESIA IV

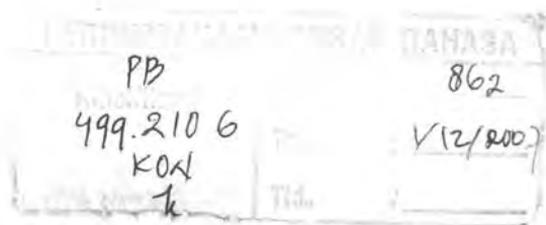


Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta
1992

Penyunting : A. Murad
S.R.H. Sitanggang

Tata Letak dan Perwajahan : Djamari

ISBN : 979 459 2536



Hak cipta pada
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Kongres Bahasa Indonesia IV diselenggarakan pada tanggal 21–26 November 1983 di Jakarta dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda. Kongres itu bertujuan memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi pemerintahan, sarana pengembangan kebudayaan, sarana pendidikan dan pengajaran, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Penerbitan buku ini dapat dimanfaatkan, antara lain, sebagai sarana kerja dan buku acuan bagi mahasiswa, guru, tenaga peneliti, tenaga ahli, dan masyarakat umum.

Buku *Kongres Bahasa Indonesia IV* ini, selain berisi seluruh makalah yang disajikan, juga memuat putusan, daftar panitia, dan daftar peserta Kongres. Pada tahun 1985 sebahagian makalah kongres itu pernah diterbitkan oleh Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan judul *Kongres Bahasa Indonesia 1*, sedangkan sebahagian lagi menurut rencana awal akan diterbitkan dalam *Kongres Bahasa Indonesia 2*. Dengan pertimbangan agar mahasiswa, peneliti, para pakar, dan masyarakat umum dapat memiliki bahan kongres itu secara utuh, diterbitkanlah buku ini.

Penerbitan buku ini dimungkinkan oleh bantuan dan usaha dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemimpin Proyek Pengembangan Bahasa dan

Sastra tahun 1985, Dr. Hans Lapoliwa, beserta seluruh staf yang mengusahakan diterbitkannya *Kongres Bahasa Indonesia I*. Ucapan terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada Drs. Hasjmi Dini, Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang telah menyediakan dana rutin untuk penerbitan buku ini.

Jakarta, Februari 1992

Kepala Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa

Hasan Alwi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
Pidato Pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. DR. Nugroho Notokusanto pada Upacara Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia IV Jakarta, 21 November 1983.....	1
1. Membangun Bahasa Pembangunan Emil Salim.....	7
2. Peranan Pemuda dalam Pembinaan Bahasa Indonesia A. Gafur.....	22
3. Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Komunikasi Pemerintah dan Pembangunan Soepardjo Rustam.....	29
4. Bahasa Hukum Sebagai Objek dan Subjek Pembangunan Nasional Ali Said.....	41
5. Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pembinaan Kehidupan Beragama H. Ahmad Ludjito.....	48
6. Pengembangan Bahasa Indonesia di Dalam Dunia Penerangan di Indonesia Harmoko.....	58

7. Penggunaan Bahasa Indonesia di Lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, dan di Dalam Lalu Lintas Kegiatan Sehari-hari Achmad Tahir.	70
8. Antara Kenyataan dan Harapan Ki Soeratman	84
9. Peranan Guru Bahasa Indonesia dalam Menyukkseskan Pembangunan Nasional I. Umar Suparno	94
10. Bahasa Administrasi Sebagai Bahasa Pelayanan Bambang Sugema	113
11. Pengembangan Bahasa Indonesia dan Pembangunan Buku Harris M. Nasution.	123
12. Berlakukan Pepatah "Sambil Menyelam Minum Air" dalam Pembinaan Ilmu dan Teknologi Melalui Pembakuan Istilah? Mien A. Rifai	132
13. Bahasa Indonesia Menghadapi Penterjemahan Ali Audah	142
14. Bahasa Nasional Sebagai Sarana Komunikasi untuk Mencapai Tujuan Nasional Jusuf A. Feisal	155
15. Perkembangan Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Komunikasi Masyarakat P.W.J. Nababan	165
16. Kesesuaian Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Komunikasi dan Teknologi Masa Kini M.M. Purbo – Hadiwidjoyo.	178
17. Dengan Bahasa (Indonesia) Sebagai Sarana Kita Naikkan Derajat Bangsa (Indonesia) B.M. Diah	193
18. Meningkatkan Bobot dan Kadar Pengamalan Kesadaran Nasional Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Secara Baik dan Benar Imam Sukarsono	207
19. Mari Kita Laksanakan Cita-Cita Sumpah Pemuda Samsuri	220

20. Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah Dilihat Dari Segi Sisiopolitiko-linguistik Jos Daniel Parena	233
21. Disiplin Nasional dan Pemakaian Bahasa Indonesia Nurdin Yatim	246
22. Angka Statistik Sebagai Salah Satu Indikator Masalah Kebahasaan: dengan Menampilkan Perkembangan Bahasa Indonesia Sebagai Kasus Khusus Husen Abas	256
23. Reaksi Subjektif Terhadap Bahasa Indonesia Baku dan Non Baku: Sebuah Pengkajian Sikap Bahasa Asim Gunarwan	273
24. Peranan Koran-Koran Indonesia Dalam Pengembangan Bahasa Indonesia Sayuti Kurnia	288
25. Pemanfaatan Potensi Ungkapan Bahasa Daerah Dalam Rangka Pemantapan Fungsi Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Komunikasi Massa Suwito	301
26. Pembakuan Dalam Bidang Unomastik Khususnya Dalam Penamaan Kesatuan Geografis Panuti Sujiman	314
27. Menuju Tata Bahasa Normatif Soepomo Poedjosoedarmo	326
28. Usaha-Usaha Pemantapan Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pembangunan Nasional Melalui Pendidikan Formal Tingkat Dasar dan Menengah Dardji Darmodihardjo	339
29. Potensi Kosakata Bahasa Jawa Untuk Memperkaya Kosakata Bahasa Indonesia Sarjana Hadiatmaja	352
30. Pemanfaatan Celah Morfologis Dalam Pengembangan Bahasa Soenjono Dardjowidjojo	364
31. Vokal Dalam Bahasa Indonesia Salah Satu Aspek Pembakuan Lafal B. Karno Ekowardono	383
32. Nonkalimat di Dalam Ragam Tulis Ilmiah Bahasa Indonesia: Sebuah Studi Kasus Yayah B. Lumintintang	395

33. Pengindonesiaan Istilah Olahraga Asvi Warman Adam	410
34. Kamus Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pembakuan Bahasa Serta Sumber Acuan Penggunaan Bahasa yang Baik dan Benar Adi Sunaryo	422
35. Beberapa Permasalahan Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Ilmiah Kedokteran Ahmad W. Pratiknya dan Soemiati Ahmad Muhammad	433
36. Mengkaji Pembakuan Bahasa Indonesia Ramelan	451
37. Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Kartun I Dewa Putu Wijana	468
38. Situasi Kebakuan Bahasa Indonesia Suardi Sapani	483
39. Menuju ke Pendidikan Bahasa yang Komunikatif A.M. Slamet Sowandi	496
40. Sikap Positif Sebagai Sarana Memanfaatkan Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia Mukidi Adisumarto	510
41. Keterampilan Membaca Perspektif: Bahan Eksperimental Pengajar- an Membaca Cepat Bagi Siswa Sekolah Menengah Zaini Machmud	523
42. Hambatan Afektif Dalam Pendidikan Bahasa Indonesia Baku Susilo Supardo	537
43. Apakah Khasanah Prosa Mutakhir Kita Mengisi "Humaniora Masuk Kurikulum" Satyagraha Hoerip	548
44. Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Sekolah Kejuruan M. Suratman M.	558
45. Pemanfaatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Pedesaan Bagi Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Sunardji	568
46. Memantapkan Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pendidikan dan Pengajaran I Gusti Ngurah Oka	583

47. Upaya Memantapkan Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Pengantar di Perguruan Tinggi Kunardi Hardjoprawiro.	595
48. Pembinaan Kemampuan Berbicara Sebagai Sarana Komunikasi Ilmiah Bagi Mahasiswa Maidar Arsjad.	605
49. Apresiasi Puisi Anak di Lingkungan Keluarga Sumardi.	619
50. Masalah Pengajaran Bahasa Indonesia di Daerah Dwibahasa dan Alternatif Pemecahannya H. Sappena Mustarim.	645
51. Usaha Meningkatkan Proses Belajar Mengajar Sastra Indonesia Nani Tuloli.	658
52. Keputusan Kongres Bahasa IV	673
** Sambutan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Pada Upacara Penutupan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta pada Tanggal 26 November 1983	683
** Susunan Panitia Kongres Bahasa Indonesia IV Jakarta, 21-26 November 1983	687
** Daftar Peserta Kongres Bahasa Indonesia IV	695



**PIDATO
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROF. DR. NUGROHO NOTOSUSANTO
PADA UPACARA PEMBUKAAN
KONGRES BAHASA INDONESIA IV
JAKARTA, 21 NOVEMBER 1983**

Marilah kita mengucapkan puji dan syukur yang tulus ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah, dan rido-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Mudah-mudahan niat baik dan usaha pembangunan bangsa kita di-rahmati-Nya.

Hasil Keputusan Politik

Hadirin yang saya muliakan,

Kongres Bahasa Indonesia IV, yang insya Allah akan kita mulai pada hari ini, diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda. Masalah bahasa Indonesia memang berkaitan erat dengan keputusan politik dalam bentuk Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh Kongres Pemuda-pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Oleh karena itu, penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda memang beralasan.

Sumpah Pemuda pada dasarnya adalah keputusan politik yang diambil oleh para pemuda dan bukan oleh para ahli bahasa atau ahli sastra. Keputusan politik itu memantapkan perjuangan Generasi 1908 dengan menyatakan kebulatan tekad mengenai tunggalnya tanah tumpah darah kita, tunggalnya bangsa kita, dan tunggalnya bahasa persatuan kita. Keputusan itu menentukan identitas kita sebagai bangsa, yang mencerminkan ciri-ciri khas kita se-

bagai bangsa dan yang membedakan bangsa kita dari bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, pencetus Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu merupakan peristiwa yang sangat menentukan di dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa kita.

Sebagai peristiwa sejarah, pencetus Sumpah Pemuda itu tentulah tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan lanjutan peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya, terutama perjuangan nasional sejak tahun 1908 dengan terbentuknya Budi Utomo. Ia berkaitan dengan keputusan politik tahun 1918 yang menetapkan bahwa bahasa Indonesia (pada waktu itu, disebut bahasa Melayu) dapat digunakan sebagai bahasa kerja Dewan Rakyat (*Volksraad*). Selanjutnya, ia juga berhubungan erat dengan peristiwa-peristiwa nasional sesudah tahun 1928. Penerbitan majalah *Pujangga Baru* oleh Sutan Takdir Alisjahbana dan kawan-kawan pada tahun 1933, misalnya, memantapkan dan menjabarkan unsur ketiga Sumpah Pemuda, yaitu "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Dengan majalah itu bahasa Indonesia dibina dan dikembangkan di kalangan masyarakat.

Keputusan politik tahun 1928 itu diperkuat lagi dengan keputusan politik tahun 1945. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "bahasa negara ialah bahasa Indonesia". Dengan demikian, kita lihat bahwa Sumpah Pemuda 1928 memberikan kepada bahasa Indonesia kedudukan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional kita dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kepada bahasa Indonesia kedudukan sebagai bahasa negara.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai sarana identitas nasional kita, sarana pemersatuan kita sebagai bangsa, dan sarana perhubungan antardaerah dan antarbudaya. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa pemerintahan, bahasa pengantar kependidikan, bahasa pengantar media massa, dan sarana pendukung pengembangan ilmu dan teknologi.

Selain itu, bahasa Indonesia sebagai unsur budaya nasional memungkinkan kita membina dan mengembangkan budaya nasional kita. Kedudukan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa negara, berarti kedudukan sebagai sarana perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Struktur Keluargaan

Sebagai saran perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara kita yang didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia memperlihatkan suatu struktur sosial yang bercorak *kekeluargaan*. Menurut ketentuan di dalam batang-tubuh maupun penjelasan Undang-

Undang Dasar 1945, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasar atas asas kekeluargaan atau bersifat kekeluargaan. Karena itulah amat menarik bahwa menurut kenyatannya struktur sosial bahasa Indonesia bercorak kekeluargaan.

Yang saya maksudkan adalah bahwa dalam bahasa Indonesia sebutan-sebutan bagi sesama warga masyarakat menggunakan peristilahan kekeluargaan, seperti *bapak, ibu, kakak, abang, dan adik*; dari bahasa daerah diambil sebutan *mas, mbakyu, diajeng, uni, akang, ceu*; dari bahasa asing diambil sebutan *oom* dan *tante*. Sebutan itu digunakan juga terhadap mereka yang bukan kerabat! Seorang anak penjual surat kabar tidak ragu-ragu untuk menyebutkan seseorang yang naik mobil bagus; *oom* atau *tante*.

Juga di dalam lingkungan yang secara resmi memakai sebutan "burge-lijk" seperti *tuan, nyonya, dan nona*, seperti dalam penerbangan pesawat Garuda, begitu pramugari meletakkan alat bicaranya dan bertatap-muka dengan para penumpang, ia memakai sebutan *bapak ibu, kakak, adik*, dan lain sebagainya. Dulu dalam lingkungan ABRI juga dipergunakan sebutan resmi *tuan-tuan* dalam pelbagai pendidikan. Akan tetapi, sejak zaman Orde Baru sebutan itu secara resmi disesuaikan dengan praktik nonformalnya, dan dipakailah sebutan saudara-saudara.

Sudah jelas bahwa bahasa Indonesia tidak mengenal sebutan feodalistik seperti *bendoro, gusti, duli, tuanku, hamba, dan patik*.

Baik dalam Kongres Bahasa yang lalu, maupun dalam pelbagai pertemuan di bidang linguistik maupun pertemuan yang membahas bahasa Indonesia, secara berulang-ulang diusulkan agar-supaya kita meninggalkan sebutan-sebutan kekeluargaan seperti *bapak, ibu, saudara*, dan lain sebagainya dan sebagai gantinya menggunakan sebutan *tuan, nyonya, nona*, dan lain sebagainya. Namun, usaha itu setiap kali pula tidak diterima karena memang tidak sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat kita yang berjiwa kekeluargaan. Bahkan ada yang mencoba mendiskreditkan semangat kekeluargaan itu dengan menyebutkan bahwa kekeluargaan adalah feodalistik! Sudah barang tentu pihak yang berkata demikian mengalami alinea dari masyarakat Indonesia dan menjadi orang asing di negeri sendiri. Semangat kekeluargaan lain dari semangat feodalistik dan lain pula dari semangat berjuasi atau *burgerlijk*.

Berdasarkan kenyataan seperti itu, kita semua harus bertindak dengan hati-hati dan cermat di dalam usaha pembinaan bahasa Indonesia. Jangan sampai pembinaan bahasa Indonesia itu dilakukan dengan tidak mengindahkan watak bahasa Indonesia itu dan hendak membengkokkan pertumbuhannya secara paksa ke arah yang tidak alamiah. Harus ada keselarasan dan keseimbangan antara *dasar* dan *ajar*, atau dalam bahasa asingnya, antara *nature* and *nurture*.

Calon Bahasa Dunia

Bahasa Indonesia tumbuh dari bahasa Melayu dan berkembang sesuai dengan kebahasaan, yaitu keadaan yang multilingual, di Indonesia. Unsur serapan, baik unsur serapan dari berbagai bahasa daerah maupun unsur serapan dari bahasa asing, yang ada di dalam bahasa Indonesia sekarang merupakan ciri khas yang membedakannya dari bahasa asalnya, yaitu bahasa Melayu. Namun, ciri dasar bahasa asalnya itu tetap menonjol di dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Dalam kaitan ini, kita dapat meninjau peranan bahasa kita itu dari segi kawasan yang lebih luas, yaitu kawasan bangsa serumpun di Asia Tenggara.

Selain di Indonesia, dengan nama bahasa Indonesia, bahasa Melayu telah berkembang juga sebagai bahasa nasional dengan nama bahasa Malaysia di Malaysia. Bahasa Melayu juga digunakan di Singapura dan Brunei. Dalam waktu yang tidak lama lagi Brunei sebagai negara merdeka akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kenegaraannya. Dengan demikian, bahasa Melayu secara umum merupakan bahasa perhubungan antarnegara dan antarbangsa di kawasan bangsa serumpun di Asia Tenggara. Selanjutnya berdasarkan kekayaan budaya yang melatarbelakanginya, besarnya jumlah penuturnya, dan luasnya kawasan penggunaannya dapatlah dikatakan bahwa bahasa kita memiliki potensi berkembang menjadi salah satu bahasa dunia pada waktu yang akan datang.

Sarana Pembangunan Nasional

Kongres Bahasa Indonesia IV ini diselenggarakan dengan tujuan menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional dan temanya adalah "Dengan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Kita Sukseskan Pembangunan Nasional". Dalam hubungan ini, sejalan dengan kedudukan, fungsi, dan potensi perkembangan bahasa Indonesia seperti yang telah saya kemukakan, kita perlu membina bahasa Indonesia dan mutu penggunaannya di dalam segenap lapisan masyarakat kita. Dengan kata lain, kita perlu meningkatkan usaha pengejawantahan unsur ketiga Sumpah Pemuda 1928, yaitu "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Kita perlu menempatkan bahasa Indonesia pada kedudukan yang terhormat di dalam kehidupan kita sebagai bangsa.

Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983) mengarahkan bahwa "pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar" dan bahwa "pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai

salah satu identitas nasional". Garis-garis Besar Haluan Negara juga menetapkan bahwa "pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia perlu makin ditingkatkan dan diperluas sehingga mencakup semua lembaga pendidikan dan menjangkau masyarakat luas". Sesuai pula dengan tujuan dan tema Kongres Bahasa Indonesia IV ini, kita dan setiap warga negara Indonesia berkewajiban melaksanakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Di samping membina bahasa Indonesia dan mutu penggunaannya di dalam masyarakat kita, kita perlu pula mengembangkannya dari segala segi, seperti fonologi, morfologi, leksikon, sintaksis, dan semantik, sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia itu benar-benar memiliki kemampuan sebagai sarana pengungkapan perasaan yang sehalus-halusnya serta sebagai bahasa pemerintahan, bahasa pendukung ilmu dan teknologi modern, bahasa pengantar kependidikan, dan bahasa media massa yang dapat diandalkan. Bahasa Indonesia perlu kita per kaya dengan mengembangkan unsur-unsurnya sendiri dan, apabila perlu, dengan menyerap unsur-unsur bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing.

Kongres ini merupakan forum yang tepat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan operasional mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa nasional kita itu. Apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu? Faktor-faktor apa yang menghambat usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia selama ini? Jalan apakah yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan itu? Program, strategi, dan sarana apa yang diperlukan? Faktor-faktor apa yang menunjang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia selama ini? Bagaimana usaha itu dapat ditingkatkan? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan lain yang bertalian dengannya merupakan bahan masukan yang sangat berharga bukan saja bagi Pemerintah, terutama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan juga bagi segenap lapisan masyarakat kita. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan potensi perkembangannya adalah tanggung jawab kita semua.

Purnakata

Mudah-mudahan Kongres Bahasa Indonesia IV ini mencapai hasil yang sebaik-baiknya, sesuai dengan harapan kita semua. Mudah-mudahan usaha kita selama kongres ini berlangsung diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita diberi-Nya kekuatan lahir dan batin serta petunjuk di dalam usaha kita membangun bangsa kita pada waktu di hadapan kita.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan bahwa Kongres Bahasa Indonesia IV dibuka dengan resmi.

Saya ucapkan selamat berkongres.

Terima kasih.

Prof. Dr. Nugroho Notosusanto

MEMBANGUN BAHASA PEMBANGUNAN

Emil Salim

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengambil keputusan politik dengan menugaskan mandataris MPR menyusun rencana pembangunan supaya tahap tinggal landas tercapai dalam Pelita Keenam pada tahun 2000 nanti. Untuk mewujudkan keputusan politik ini, berbagai kegiatan perlu diarahkan ke tujuan ini.

Berbagai kegiatan ini menghadapi tantangan permasalahan yang cukup besar. Menjelang tahun 2000 ini jumlah penduduk akan bertambah besar, meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang harus dihasilkan dari sumber daya alam Indonesia yang persediaannya tidak bertambah besar.

Untuk menjawab tantangan permasalahan itu, penduduk harus bisa diubah menjadi unsur pendorong pembangunan. Sedangkan sumber daya alam diarahkan pengelolaannya agar mampu menopang pembangunan jangka panjang secara berkelanjutan.

Perubahan penduduk dan pola pengelolaan sumber daya alam seperti ini memerlukan peran serta dan keterlibatan penduduk dalam arus perubahan ini. Untuk itu diperlukan arus komunikasi secara intensif dan terus-menerus dalam masyarakat menumbuhkan pengertian, dan pemahaman tentang cara penyelesaian masalah, dorongan motivasi berbuat dan langkah bertindak. Dalam berkomunikasi ini bahasa memegang peranan menentukan.

Dalam makalah ini akan ditelusuri keadaan bahasa Indonesia dalam masyarakat kita dan kebutuhan mengembangkan bahasa Indonesia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan di masa depan.

Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Masyarakat

Sungguhpun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara kita, pemakaian bahasa Indonesia dalam rumah tangga sehari-hari belumlah terlalu luas. Sebanyak 12% dari penduduk berjumlah 146,7 juta (1980) memakai bahasa Indonesia sehari-hari.

Sebanyak 59,4 juta jiwa (40%) menggunakan bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-hari. Disusul dengan bahasa Sunda digunakan oleh sebanyak 22,1 juta jiwa (15%). Bahasa Madura dipakai oleh 6,9 juta jiwa (5%) disusul oleh bahasa Minang oleh 3,5 juta jiwa (2%), bahasa Bugis oleh 3,3 juta jiwa (2%), bahasa Batak oleh 3,1 juta jiwa (2%), bahasa Bali oleh 2,5 juta jiwa (2%) dan bahasa Banjar oleh sebanyak 1,7 juta jiwa (1%), seperti tampak pada Tabel 1.

Bahasa Jawa dan Sunda dipakai oleh lebih dari separoh (55%) jumlah penduduk. Hal ini masuk akal karena jumlah penduduk pulau Jawa adalah 62% dari seluruh jumlah penduduk.

Bahasa Madura, Minang, Bugis, Batak, dan Bali mempunyai satu ciri yang sama, yaitu bahasa-bahasa daerah ini dipakai oleh suku bangsa yang suka merantau dan berlayar ke luar daerah asalnya. Dengan demikian bahasa-bahasa daerah para perantau ini ikut tersebar ke luar daerah asalnya.

Yang menarik adalah bahwa bahasa daerah itu masih banyak dipakai oleh penduduk di bawah umur 15 tahun sehingga bahasa daerah itu diperkirakan masih terpelihara sampai tahun 2000. Sebanyak 41,1 juta anak di bawah umur 15 tahun masih memakai bahasa daerah dalam pergaulannya sehari-hari. Jumlah itu merupakan 68% dari seluruh jumlah penduduk berumur di bawah 15 tahun, yaitu 60,0 juta jiwa di tahun 1980.

Pemakaian bahasa Batak oleh anak-anak di bawah umur 15 tahun ini tercatat lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan pemakaian bahasa daerah lain oleh kelompok umur yang sama sehingga kedudukan bahasa Batak dalam urutan bahasa daerah cenderung naik dari urutan tujuh sekarang menjadi enam di tahun 2000 nanti.

Selama dasawarsa tujuh puluhan jumlah penduduk yang dapat berbahasa Indonesia bertambah, baik dalam persentase maupun dalam jumlah, seperti tampak pada Tabel 3. Kemampuan berbahasa Indonesia lebih tinggi di kalangan laki-laki daripada perempuan dan lebih tinggi di kota dari pada di desa. Secara keseluruhan di tahun 1980 jumlah penduduk Indonesia yang tidak paham berbahasa Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 39% dari jumlah penduduk Indonesia. Keadaan tahun 1980 sudah lebih maju dibandingkan dengan keadaan tahun 1971 ketika sebanyak 59% jumlah penduduk yang tidak memahami bahasa Indonesia.

Jumlah penduduk yang tidak paham berbahasa Indonesia tersebar di

berbagai daerah seperti tampak di Tabel 4. Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara mempunyai persentase penduduk paling tinggi (48%) yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Sedangkan kepulauan Maluku merupakan persentase penduduk terendah (11%) yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Jika daerah disusun menurut urutan ketidaktahuan berbahasa Indonesia seperti dalam tabel 5, enam daerah memiliki persentase ketidaktahuan berbahasa Indonesia di atas rata-rata nasional (39%). Daerah-daerah ini adalah Nusa Tenggara Barat (53%), Jawa Tengah (50%), Jawa Timur (49%), Nusa Tenggara Timur (43%), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (41%).

Daerah yang paling rendah persentase ketidaktahuan berbahasa Indonesia di atas rata-rata nasional (39%) mempunyai pula beberapa persamaan. *Pertama*, taraf keniraksaraannya pun menunjukkan persentase tinggi di atas rata-rata nasional (29%); *kedua*, produk domestik regional bruto propinsi per penduduk di tahun 1978 juga tergolong rendah.

Ketidaktahuan berbahasa Indonesia untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur diimbangi oleh kepeahaman berbahasa Jawa. Keadaan ini pula mungkin menerangkan mengapa banyak kata-kata Jawa dan kata-kata Sanskerta masuk dalam perbendaharaan kata-kata bahasa Indonesia.

Ketidaktahuan berbahasa Indonesia untuk daerah Nusa Tenggara Barat berjalan sejajar dengan indikator kesejahteraan rakyat lainnya seperti tingginya fertilitas penduduk, tingginya tingkat kematian penduduk termasuk tingkat kematian bayi, tingginya tingkat keniraksaraan, dan rendahnya tingkat pendapatan domestik regional bruto propinsi per jiwa penduduk.

Keadaan Nusa Tenggara Timur agak sedikit lebih baik dari Nusa Tenggara Barat, tetapi juga menderita berbagai kekurangan di bidang kependudukan seperti tingkat kematian termasuk kematian bayi, tingkat fertilitas, dan lain-lain. Dua daerah Nusa Tenggara ini memiliki kondisi lingkungan hidup yang paling tidak menguntungkan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Musim kemarau yang panjang rata-rata sembilan bulan, dengan gangguan hawa kering dari daratan pada pasir Australia, keadaan lahan yang kurang subur dan persediaan air permukaan yang terbatas, mempengaruhi tingkat kesejahteraan di daerah ini sehingga agaknya berpengaruh pada kemampuan berbahasa Indonesia yang masih rendah.

Berdasarkan data statistik tahun 1980 beberapa kesimpulan dapat ditarik tentang keadaan bahasa Indonesia di tanah air kita. *Pertama*, bahasa Jawa dan Sunda masih luas dipakai melebihi jumlah penduduk berbahasa Indonesia. Pemakaian bahasa daerah masih akan berlanjut karena 68% dari jumlah penduduk berumur di bawah 15 tahun diketahui menggunakan bahasa daerahnya dalam percakapan sehari-hari; *kedua*, angka persentase penduduk Indonesia yang tidak berbahasa Indonesia cukup tinggi, yaitu 39% dari seluruh jumlah penduduk di tahun 1980. Angka ini lebih rendah dibanding-

kan dengan 59% tidak paham berbahasa Indonesia di tahun 1971; *ketiga*, ketidakpahaman berbahasa Indonesia terdapat di daerah-daerah yang tinggi tingkat keniraksaraannya dan rendah pendapatan regional per jiwa penduduknya. Sebaliknya juga menarik bahwa daerah yang rendah ketidakpahaman berbahasa Indonesia, rendah pula tingkat keniraksaraannya dalam persentase dan tinggi pula pendapatan regional per jiwa penduduk.

Antara pemahaman berbahasa Indonesia, tingkat keniraksaraan, dan pendapatan daerah per jiwa penduduk tampaknya terdapat hubungan. Semakin besar jumlah penduduk di daerah yang memahami bahasa Indonesia semakin rendah pula tingkat keniraksaraannya dan semakin besar pula pendapatan daerah per jiwa penduduk.

Dari gambaran ini nyatalah bahwa pemahaman bahasa daerah sungguhpun penting, tidaklah cukup. Bahasa Indonesia perlu dipahami pula. Pandai membaca dan menulis huruf Latin tampaknya berkaitan dengan pemahaman berbahasa Indonesia. Oleh karena persentase keniraksaraan di daerah umumnya lebih rendah daripada persentase ketidakpahaman berbahasa Indonesia, dapatlah disimpulkan bahwa mereka yang dapat membaca dan menulis huruf Latin umumnya dapat pula berbahasa Indonesia. Akan tetapi, sebaliknya mereka yang dapat berbahasa Indonesia tidak selalu bisa pula membaca dan menulis huruf Latin.

Tingkat keniraksaraan yang rendah dan pemahaman berbahasa Indonesia yang tinggi mempengaruhi tingkat pendapatan daerah per jiwa penduduk. Kecakapan membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia agaknya membuka kemungkinan lebih luas untuk meningkatkan pendapatan. Sebaliknya pendapatan daerah yang tinggi membuka kemungkinan perluasan fasilitas pemberantasan buta huruf dan pendidikan menurunkan ketidakpahaman berbahasa Indonesia. Dari gambaran itu nyatalah bahwa bahasa berkaitan erat dengan pembangunan dalam hubungan timbal-balik.

Menuju Tinggal Landas Tahun 2000

Dengan keputusan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (1983) supaya bangsa Indonesia mencapai tahapan tinggal landas dalam Pelita Keenam (2000), berbagai kegiatan Pelita Keempat dan Kelima harus ditujukan ke jurusan ini.

Untuk mencapai tahapan tinggal landas itu kegiatan pembangunan perlu diperluas supaya lebih beraneka ragam. Sampai sekarang kegiatan masyarakat terletak terutama di bidang pengolahan bahan mentah, terutama di sektor pertanian dan pertambangan. Bagian terbesar ekspor kita pun terdiri dari bahan mentah, seperti minyak bumi, karet, kopi, teh, dan timah. Dengan kegiatan mengolah bahan mentah seperti itu bagian terbesar penduduk kita atau 82% jumlah penduduk tinggal di daerah pedesaan (1980).

Dengan perlunya kegiatan pembangunan diperluas dan lebih beraneka ragam akan lahir berbagai kegiatan baru. Sektor industri dan sektor jasa perlu semakin ditingkatkan sehingga bahan mentah dan bahan baku dapat diolah di dalam negeri.

Kegiatan industri dan jasa biasanya berlangsung lebih banyak di kota. Lalu terjadilah gerak pindah penduduk ke kota menawarkan jasa-jasanya di luar sektor pertanian. Jumlah penduduk kota cenderung bertambah sehingga lahir pula berbagai kelakuan hidup perkotaan yang semula belum banyak menonjol dalam kelakuan hidup masyarakat pedesaan.

Meluasnya kegiatan pembangunan mencakup sektor pertanian, industri, jasa, dan sebagainya mempengaruhi perubahan struktur ekonomi. Apabila semula peranan sektor pertanian sangat besar dalam struktur ekonomi Indonesia; lambat laun peranan ini diimbangi oleh sektor industri, jasa, dan lain-lain.

Munculnya sektor-sektor baru itu juga melahirkan kelompok-kelompok masyarakat baru, seperti kelompok industriawan, penjual jasa asuransi, perbankan, angkutan, perdagangan, dan lain-lain pelayanan jasa. Penduduk kota semakin bertambah mendorong lahirnya desa menjadi kota kecil, kota kecil menjadi kota besar dan kota besar menjadi kota metropolitan.

Beraneka ragam kegiatan itu menimbulkan naiknya mobilitas penduduk, secara horizontal dari desa ke kota atau dari daerah satu ke daerah lain dan secara vertikal dari tingkat kedudukan satu ke tingkat kedudukan lebih tinggi. Semua itu berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat sehingga dapatlah diramalkan bahwa masyarakat Indonesia di tahun 2000 memiliki banyak hal baru yang belum kita ketahui di tahun 1950 atau 1980 ini.

Mungkin timbul pertanyaan apakah berbagai perubahan ini perlu, mengapa kita tidak bertahan pada struktur ekonomi dan struktur kehidupan sosial yang lama dan sama. Perubahan perlu kita laksanakan karena sesungguhnya didesak oleh kenyataan yang berubah. Menjelang tahun 2000 Indonesia akan mengalami pertambahan penduduk antara 60 juta (taksiran rendah) dan 70 juta (taksiran tinggi) dalam masa 1980–2000 dan membawa jumlah penduduk Indonesia dari 150 juta jiwa sekarang menjadi 216 atau 222 juta jiwa di tahun 2000.

Pertambahan penduduk ini bukan diakibatkan oleh kegagalan pelaksanaan program keluarga berencana. Bahkan dalam perkiraan jumlah penduduk di tahun 2000 sudah tersimpul perkiraan bahwa tingkat kelahiran akan terus turun-dengan rata-rata 2–2,5% setahun, sebagai hasil pelaksanaan program keluarga berencana.

Yang menjadi masalah bahwa tingkat kematian, khususnya tingkat kematian bayi Indonesia masih tergolong tinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar 98 bayi per 1.000 jiwa kelahiran, Thailand dan Filipina berhasil mencapai tingkat kematian bayi menjadi 53 bayi per 1.000 kelahiran di

tahun 1981. Malaysia berhasil menurunkannya menjadi 30 bayi per 1.000 kelahiran, sedangkan Singapura mencapai 12 bayi per 1.000 kelahiran. Karena negara-negara tetangga dapat mencapai angka lebih rendah, jelaslah bahwa hal ini secara ilmiah dapat pula dicapai Indonesia. Kita harus berusaha keras supaya tingkat kematian bayi dapat lebih diturunkan pula.

Tingkat kematian bayi adalah indikator yang peka sekali terhadap keadaan lingkungan hidup yang kotor, keadaan konsumsi makanan tidak bergizi, lingkungan pemukiman yang tidak sehat, tingkat pendidikan yang rendah, dan sebagainya sehingga wajar pula apabila menurunnya tingkat kematian bayi merupakan hasil kegiatan pembangunan yang secara menyeluruh mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Akan tetapi, pengaruh dari menurunnya tingkat kematian bayi adalah bertambah penduduk secara mencolok pula. Penduduk yang bertambah ini terdapat kebanyakan di pulau Jawa sehingga masalah penyebaran penduduk secara lebih merata menjadi semakin penting.

Penduduk yang bertambah juga memberi tekanan kepada daya dukung lingkungan yang memang sudah jenuh sehingga ancaman terhadap kerusakan lingkungan semakin besar. Oleh karena itu, perlu diusahakan cara-cara berproduksi lain yang tidak terlalu banyak bergantung pada pengolahan sumber daya alam tanah dan air. Ini berarti perlu digesernya kegiatan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.

Kedudukan Indonesia di simpang lintas internasional mengakibatkan Indonesia menghadapi saingan internasional yang gencar. Untuk mengatasi semua ini, kita perlu meningkatkan daya saing Indonesia di bidang ekonomi, teknologi, dan pembangunan umumnya.

Berbagai desakan keadaan ini, seperti pertambahan penduduk, tekanan pada daya dukung alam yang sudah jenuh, dan semakin gencarnya saingan internasional — mengakibatkan Indonesia harus merombak strukturnya menuju keanekaragaman kegiatan ekonomi di bidang pertanian, industri, dan jasa. Perubahan struktur sosial itu menyertai proses perombakan struktur ekonomi ini.

Dampak negatif proses pembangunan banyak sekali. Khusus di bidang lingkungan hidup dapat diperkirakan timbulnya dampak negatif seperti (1) rusaknya lingkungan alam akibat terkurasnya sumber daya alam; (2) teknologi dan proses produksi yang menghasilkan produk sampingan berupa limbah industri, pencemaran air, udara, tanah, dan kebisingan; (3) pemusatan penduduk dalam pemukiman yang padat sehingga menimbulkan pemusatan sampah dan tinja rumah tangga, kotorannya air, rumah-rumah yang pengap, berjangkitnya penyakit menular, dan sebagainya.

Dampak positif pembangunan kepada lingkungan hidup adalah (1) meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan, dan kemungkinan memperbaiki

tingkat kesejahteraan sehingga memungkinkan perbaikan lingkungan hidup; (2) semakin beranekaragamnya kegiatan membuka kesempatan memilih pekerjaan yang lebih luas bagi penduduk, dan berkat keanekaragaman lapangan kerja seperti ini memungkinkan lebih stabilnya ekosistem tanah-air; (3) kemungkinan menaikkan mutu hidup semakin terbuka sehingga mengangkat pula kadar mutu lingkungan hidup.

Khusus di bidang kependudukan dapat pula diperkirakan timbulnya dampak negatifnya seperti (1) meningkatnya wilayah pergeseran dan pertikaian (konflik) antarpenduduk yang semakin banyak jumlahnya; (2) hilangnya kepercayaan diri, timbulnya rasa keterasingan diri dalam masyarakat, dan kecenderungan untuk melarikan diri dari kenyataan melalui penghisapan ganja, alkohol, bunuh-diri, atau rasa berontak terhadap tekanan kehidupan sehingga mendorong perbuatan melanggar norma susila, pembunuhan dan lain-lain kelakuan pembangkangan; (3) timbulnya kesenjangan antara tingkat pendapatan dan kehidupan antara kota dan desa, antara karyawan perindustrian serta jasa dengan pertanian, antara yang berpendidikan tinggi dengan yang tidak, antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, dan seterusnya.

Dampak positif di bidang kependudukan adalah (1) meningkat pendapatan dan kesempatan memperoleh pendidikan, perbaikan kesehatan dan mutu hidup pada umumnya; (2) meningkatnya mobilitas penduduk antar-daerah sehingga memperkuat rasa persatuan, kesadaran berbangsa serta kerukunan nasional; (3) tumbuhnya rasa percaya pada diri sendiri, kualitas fisik dan nonfisik meningkat, harga diri dan martabat kemanusiaan semakin berkembang.

Masalah pokok sekarang adalah bagaimana mengusahakan kegiatan pembangunan dengan memperkecil dampak negatif dan memperbesar dampak positif pada masyarakat.

Peranan Bahasa dalam Pembangunan

Indonesia beruntung memulai kegiatan pembangunan agak lambat, baru di permulaan tahun tujuh puluhan. Dengan demikian Indonesia dapat belajar dari kekeliruan pola pembangunan negara berkembang lainnya. Berdasarkan pelajaran dari pembangunan negara-negara berkembang lahir kebutuhan memadukan segi lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH Nomor 4 Tahun 1982) mengungkapkan keharusan kita melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Makna pokok pembangunan seperti ini adalah *pertama*, penggunaan sumber daya alam sebija-sana mungkin, memperhitungkan berbagai kemungkinan penggunaannya

dengan aneka ragam teknologi serta proses produksi yang memperhitungkan dampaknya kepada masyarakat; *kedua*, memperhitungkan dimensi jangka panjang supaya sumber daya alam bisa digunakan menunjang pembangunan secara berkelanjutan dan berguna bagi generasi sekarang dan nanti; *ketiga*, arah tujuan pembangunan adalah meningkatkan mutu hidup, mengangkat derajat manusia dalam keselarasan hubungan antara diri manusia dengan Tuhan Maha Pencipta, antara manusia dengan masyarakat dan antara manusia dengan lingkungan alam.

Peranan penduduk yang semulanya dilihat lebih berat sebagai faktor penghambat pembangunan, perlu dikembangkan menjadi faktor penunjang pembangunan. Untuk itu pembangunan tidak hanya menjadikan manusia sebagai sasaran pembangunan, mengusahakan terpenuhinya berbagai keperluan hidupnya, tetapi menjadikan manusia juga sebagai subjek penentu pembangunan. Dalam kaitan ini nilai kualitas manusia perlu ditumbuhkan sehingga dengan pengembangan segala kemampuan fisik dan nonfisik sang manusia Indonesia bisa menjadi penggerak pembangunan.

Pembangunan berwawasan lingkungan dan penduduk yang berkembang kemampuan kualitasnya memerlukan perubahan penglihatan manusia terhadap pembangunan. Pembangunan bukan lagi merupakan usaha peningkatan barang dan kemajuan lahiriah saja, tidak pula merupakan usaha mengejar kepuasan batiniah saja, tetapi merupakan keselarasan antara keduanya.

Kedudukan manusia tidaklah lagi menjadi pusat kehidupan alam, tetapi manusia merupakan bagian dari kehidupan alam, dengan Tuhan Maha Pencipta sebagai titik pusat kehidupan alamiah dan rohaniah. Perubahan penglihatan manusia seperti itu memerlukan pemahaman, pengertian, penghayatan dan pembangkitan motivasi dalam diri manusia dan masyarakat mau menerima dan melaksanakan perubahan ini.

Untuk memungkinkan itu komunikasi memegang peranan sentral. Gagasan dan paham baru harus bisa dikomunikasikan kepada masyarakat, dan bahasa menjadi wahana komunikasi ampuh untuk memungkinkan proses pengalihan, pengertian, penumbuhan pemahaman, pendalaman penghayatan, dan pembangkitan motivasi manusia dan masyarakat untuk menerima dan melaksanakan perubahan dan pembaharuan.

Dalam kaitan ini lingkungan hidup memerlukan perbendaharaan kata dan bahasa yang mudah dicerna masyarakat umum. Lingkungan hidup di satu pihak bukan bidang baru bagi masyarakat bangsa kita. Falsafah hidup yang terdapat dalam hati sanubari masyarakat kita di daerah sudah banyak memuat prinsip-prinsip yang dianut lingkungan hidup.

Daerah Minangkabau mengenal "alam takambang sebagai guru".⁴ Daerah Bali mengenal keserasian hidup segitiga antara Tuhan, manusia, dan alam. Ungkapan Sosrokartono tentang kehidupan, ketentuan-ketentuan hukum

adat masyarakat korps Kewang di Maluku, pandangan hidup masyarakat Baduy di daerah Banten – semua itu membuktikan bahwa hakikat lingkungan hidup sudah dipahami masyarakat kita.

Sementara itu lahir ancaman baru terhadap lingkungan berpangkal pada teknologi modern yang serba baru dan belum kita kenal sehingga lahir kebutuhan menampung permasalahan lingkungan hidup yang baru ini dalam perbendaharaan kata-kata dan bahasa Indonesia. Pencemaran, pencagaran, daur ulang, daya lenting, plasma nutfah adalah beberapa di antara banyak kata-kata yang tumbuh dalam kamus bahasa lingkungan hidup.

Menurut pengalaman, berbagai kata baru ini tidak mempunyai masalah apabila kata-kata itu berdiri lepas dan tidak dalam kaitan dengan hubungan antarmanusia sehingga tidak memiliki bobot nilai tertentu.

Salah satu contoh adalah pengertian *dampak*, yang bisa berkembang menjadi *dampak negatif* dan *dampak positif*. Di tanah air kita tumbuh suatu citra bahwa *dampak* selalu mengandung makna negatif sehingga ada gagasan untuk menukarnya dengan kata lain. Kata *lestari* yang sering dipakai dalam lingkungan hidup melahirkan citra seolah-olah lingkungan hidup menentang perubahan dan pembangunan. Tumbuhnya makna berbobot nilai tertentu terhadap kata-kata yang semulanya netral, semakin kentara jika kita ikuti perkembangan makna kata-kata di bidang kependudukan.

Pembangunan menimbulkan pelapisan sosial dalam masyarakat sehingga menghasilkan penggunaan kata-kata yang semulanya netral, tetapi tumbuh memiliki makna bobot nilai tertentu. Kata *bapak* tidak lagi memiliki makna kepala rumah tangga, tetapi sudah beralih menjadi pemimpin atau pihak atasan.

Akhir-akhir ini sering dipakai kata *berkenan* yang mencerminkan perbedaan kedudukan antara pihak atasan dengan bawahan. Menarik pula mengikuti pemakaian kata *barangkali* sebagai usaha memperlunak kalimat atau menyelubungi ketajaman pikiran.

Gejala ini melukiskan bahwa bahasa Indonesia mampu menyerasikan diri dengan perkembangan kelakuan hidup sosial. Masalahnya sekarang adalah apakah bahasa Indonesia mampu pula memperkecil kesenjangan yang diperkirakan bakal timbul dalam proses pembangunan, melalui pengembangan istilah-istilah dan kata-kata yang lebih serasi.

Perkembangan bahasa di Kanada, Srilangka, India, Irlandia, Belgia dan lain-lain membuktikan bahwa bahasa bisa menjadi alat pemecah persatuan. Kesenjangan yang tumbuh dalam masyarakat diperkuat oleh bahasa.

Bagi Indonesia dengan bahasa daerah yang cukup banyak menjadi tantangan, bisakah bahasa Indonesia mempertahankan kedudukannya sebagai alat pemersatu. Sering diperoleh kesan bahwa bahasa daerah lebih mampu menumbuhkan keakraban daripada bahasa Indonesia. Mungkinkah keakraban

bisa pula ditumbuhkan dalam penggunaan bahasa Indonesia?

Apabila diikuti penggunaan bahasa prokem oleh generasi muda, yang sulit dipahami generasi tua, timbullah pertanyaan apakah ini tidak melukiskan keterasingan yang menimpa generasi muda sebagai produk sampingan dari perubahan sosial?

Bahaya keterasingan kelompok juga bisa muncul apabila bahasa Indonesia banyak menggunakan kata-kata Sanskerta dalam berbagai perbendaharaan kata-kata di bidang sosial politik. Seorang dari luar Jawa akan merasa terpesona dan sekaligus ganjil membaca berbagai nama dalam ruangan gedung MPR di Jakarta sehingga ini memberi petunjuk supaya pengindonesiaan kata-kata dari bahasa daerah lain perlu diperhitungkan gejala keterasingan.

Perkembangan masyarakat kita di masa depan penuh dengan tantangan permasalahan yang tidak kecil. Perubahan struktur ekonomi dan struktur masyarakat, bertambahnya jumlah penduduk yang cukup besar, meningkatnya tingkat mobilitas horisontal dan vertikal dalam lingkungan masyarakat kita membuka kemungkinan timbulnya guncangan dan perbenturan-perbenturan dalam masyarakat.

Masyarakat Indonesia memiliki bahasa persatuan di samping bahasa daerah yang cukup besar pemakaiannya dalam masyarakat kita. Pemakaian bahasa Indonesia yang meningkat diikuti oleh meningkatnya kemampuan membaca dan menulis huruf Latin dan meningkatnya pendapatan daerah per jiwa penduduk. Antara kemampuan berbahasa Indonesia, tingkat keniraksaraan penduduk serta pendapatan daerah per jiwa penduduk terdapat hubungan timbal balik.

Bahasa memegang peranan penting dalam pembangunan dengan perubahan ini. Khusus di bidang lingkungan hidup dan kependudukan tumbuh kebutuhan untuk mengembangkan gagasan dan penglihatan pembangunan berwawasan lingkungan dan penduduk dengan bobot kualitas yang meningkat.

Untuk ini perlu dikembangkan perbendaharaan kata dan bahasa Indonesia yang turut memperbesar dampak positif dan memperkecil dampak negatif pembangunan kepada masyarakat. Dalam kaitan ini perlu diusahakan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Berkembangnya bahasa Indonesia menjadi bahasa pembangunan, mampu mengalihkan pengertian, menumbuhkan pemahaman dan motivasi untuk mengembangkan pembangunan berwawasan lingkungan dan penduduk berkualitas hidup melalui wahana bahasa dalam masyarakat.
- (2) Mencegah berkembangnya bahasa Indonesia sebagai alat yang mempertajam perbedaan dan kesenjangan antara kelompok masyarakat, antara desa dan kota dan sebagainya, dan mengembangkan bahasa Indonesia

sebagai alat pemersatu di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya ganda.

- (3) Berkembangnya bahasa daerah dan budaya bahasa mengisi semangat bhinneka tunggal ika, menghasilkan keanekaragaman ekosistem yang mempertinggi stabilitas sistem ini. Di atas semua itu bahasa Indonesia menjadi pemacu pembangunan daerah dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa.
- (4) Dalam rangka pengisian itu para pengasuh dan pembina bahasa Indonesia perlu mengembangkan keahlian dan kephahaman berbahasa Indonesia ini.

TABEL 1

PENDUDUK MENURUT BAHASA YANG DIPAKAI SEHARI-HARI,
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, DI KOTA DAN DESA 1980

Bahasa	Penduduk	
	Bahasa Dipakai Sehari-hari di Rumah dalam Ribuan Jiwa	Dalam Persentase Terhadap Jumlah Seluruh Penduduk Indonesia
1. Jawa	59.357	40
2. Sunda	22.110	15
3. Indonesia	17.505	12
4. Madura	6.914	5
5. Minang	3.546	2
6. Bugis	3.322	2
7. Batak	3.107	2
8. Bali	2.481	2
9. Banjar	1.662	1
10. Lain-lain	25.653	18
11. Tak Jelas	1.118	1
Jumlah	146.775	100

TABEL 2

PENDUDUKAN MENURUT GOLONGAN UMUR DAN BAHASA YANG DIPAKAI SEHARI-HARI
DALAM RIBUAN JIWA, 1980

Bahasa	Usia							Tak Terjawab	Jumlah (%)
	0-4	5-9	10-14	15-24	25-49	50+			
1. Jawa	7.904	8.217	7.145	11.429	17.003	7.650	9	59.357(40)	
2. Sunda	3.335	3.324	2.682	4.045	6.241	2.479	4	22.110(15)	
3. Indonesia	2.692	2.446	2.145	4.103	4.874	1.243	2	17.505(12)	
4. Madura	880	951	649	1.117	2.391	926	1	6.914(5)	
5. Minang	544	519	434	648	893	472		3.546(2)	
6. Bugis	466	531	405	573	971	376	—	3.322(2)	
7. Batak	516	495	435	587	740	334	—	3.107(2)	
8. Bali	317	363	297	459	707	338	—	2.481(2)	
9. Banjar	242	259	195	317	475	174	—	1.662(1)	
10. Tak Terjawab	185	178	132	204	311	108	—	1.118(1)	
11. Lain-lain	4.109	3.949	3.102	4.767	7.025	2.698	3	25.653(18)	

Sumber: Biro Pusat Statistik, Seri S Nomor 2, 1983

TABEL 3
 PERSENTASE PENDUDUK DAPAT BERBAHASA INDONESIA
 LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI KOTA DAN DESA
 1970-1980

	1970	1980
1. Kota	72	81
Laki-laki	75	84
Perempuan	68	
2. Desa	34	55
Laki-laki	39	60
Perempuan	29	49
3. Kota dan Desa	41	61
Laki-laki Laki-laki	46	66
Perempuan	36	56

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1983

TABEL 4
 PENDUDUK MENURUT PROPINSI DAN TIDAK BISA BERBAHASA INDONESIA
 DALAM RIBUAN JIWA, 1980

	Jumlah Penduduk Tidak Dapat Berbahasa Indonesia	Dalam Persentase	Jumlah Penduduk
1. Daerah Istimewa Aceh	947	36	2.610
2. Sumatera Utara	1.861	22	8.351
3. Sumatera Barat	1.235	17	3.406
4. Riau	576	27	2.164
5. Jambi	458	32	1.444
6. Sumatera Selatan	1.397	30	4.628
7. Bengkulu	282	37	768
8. Lampung	1.504	32	4.624
Sumatera	8.260	29	27.995
9. DKI Jakarta Raya	34	05	6.481

	Jumlah Penduduk Tidak Dapat Berbahasa Indonesia	Dalam Persentase	Jumlah Penduduk
10. Jawa Barat	10.380	39	27.995
11. Jawa Tengah	12.419	50	25.367
12. Daerah Istimewa Yogyakarta	1.130	41	2.750
13. Jawa Timur	14.322	49	29.169
Jawa	38.543	42	91.217
14. Bali	1.178	48	2.470
15. Nusa Tenggara Barat	1.454	53	2.724
16. Nusa Tenggara Timur	1.171	43	2.737
Bali, Nusa Tenggara	3.803	48	7.931
17. Kalimantan Barat	909	37	2.485
18. Kalimantan Tengah	365	38	954
19. Kalimantan Selatan	812	39	2.063
20. Kalimantan Timur	261	21	1.215
Kalimantan	2.347	35	6.717
21. Sulawesi Utara	381	18	2.115
22. Sulawesi Tengah	293	23	1.284
23. Sulawesi Selatan	1.600	22	7.416
24. Sulawesi Tenggara	363	38	942
Sulawesi	2.637	22	11.757
25. Maluku	162	11	1.408
Maluku	162	11	1.408
26. Irian Jaya	401	36	1.107
Irian Jaya	401	36	1.107
Jumlah	56.153	39	148.132

Sumber: Biro Pusat Statistik, Seri S Nomor 2, 1983

TABEL 5

URUTAN PROPINSI YANG TIDAK DAPAT BERBAHASA INDONESIA
DALAM PERSENTASE JUMLAH, PENDUDUK PROPINSI
DIHADAPKAN DENGAN TARAF KENIRAKSARAAN DAN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI

	Tidak dapat Berbahasa Indonesia 1980 dalam Persentase	Taraf Keniraksaraan dalam Persentase (1980)	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita 1978 dalam Ribuan Rupiah
1. Nusa Tenggara Barat	53	45	50
2. Jawa Tengah	50	34	75
3. Jawa Timur	49	37	75
4. Bali	48	38	84
5. Nusa Tenggara Timur	43	35	44
6. Daerah Istimewa Yogyakarta	41	30	62
7. Jawa Barat	39	26	86
8. Kalimantan Selatan	39	22	86
9. Sulawesi Tenggara	38	31	66
10. Kalimantan Tengah	38	21	106
11. Kalimantan Barat	37	42	91
12. Bengkulu	37	25	-
13. Daerah Istimewa Aceh	36	25	69
14. Irian Jaya	36	48	105
15. Jambi	32	24	82
16. Lampung	32	22	81
17. Sumatera Selatan	30	18	112
18. Riau	27	23	99
19. Sulawesi Tengah	23	18	66
20. Sumatera Utara	22	16	111
21. Sulawesi Selatan	22	38	86
22. Kalimantan Timur	21	24	272
23. Sulawesi Utara	18	-	-
24. Sulawesi Barat	17	18	-
25. Maluku	11	17	95
26. DKI Jakarta Raya	-	12	224
Indonesia	38	29	-

Sumber: Biro Pusat Statistik, Seri 5 Nomor 2, 1983

PERANAN PEMUDA DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

A. Gafur

Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga

Pendahuluan

Kongres Bahasa Indonesia IV ini, seperti juga halnya dengan Kongres Bahasa Indonesia III pada tahun 1978 yang lalu, diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda. Kaitan antara penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda bukanlah kaitan secara kebetulan. Kaitan antara kedua peristiwa ini memiliki nilai dan makna yang tersendiri di dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Nilai dan makna itu adalah nilai dan makna politik, nilai dan makna sosial, serta nilai dan makna budaya.

Masalah yang ingin saya ketengahkan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah masalah kaitan antara Kongres Bahasa Indonesia dan Sumpah Pemuda serta masalah peranan pemuda dalam pembinaan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara kita. Kedua masalah ini memiliki hubungan yang erat sekali dan merupakan masalah nasional kita.

Kongres Bahasa Indonesia dan Sumpah Pemuda

Kongres Bahasa Indonesia adalah salah satu usaha pengejawantahan isi dan semangat Sumpah Pemuda, yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai putusan Kongres Pemuda-pemuda Indonesia tahun 1928 di Jakarta. Khususnya, Kongres Bahasa Indonesia adalah salah satu usaha

pengejawantahan ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928, yang menyatakan kebulatan tekad kebahasaan para pemuda, yaitu "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia".

Di samping Kongres Bahasa Indonesia, usaha-usaha pengejawantahan ikrar ketiga Sumpah Pemuda itu mencakup pendidikan dan pengajaran, terutama pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal, pembinaan bahasa Indonesia melalui media massa, terutama melalui radio dan televisi, penyuluhan bahasa Indonesia di berbagai instansi pemerintah dan swasta, masyarakat umum, organisasi massa, dan organisasi kepemudaan, termasuk organisasi kesiswaan dan organisasi kemahasiswaan. Sebagian usaha-usaha itu dilaksanakan secara nasional dan terpadu, sebagian lagi dilaksanakan sendiri-sendiri atas dasar kemauan dan kesadaran sendiri dengan mengingat bahwa Sumpah Pemuda 1928 itu menyangkut kepentingan kita bersama sebagai bangsa, kepentingan setiap golongan, kepentingan setiap generasi, baik generasi dewasa maupun generasi muda, dan kepentingan setiap warga negara Indonesia.

Pada tahun 1978 Kongres Bahasa Indonesia untuk pertama kali diselenggarakan dalam kaitan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, yang sejak tahun itu pula dijadikan sekaligus Hari Pemuda dengan persetujuan Presiden Soeharto. Kongres itu adalah Kongres Bahasa Indonesia III. Pada tahun 1980 Pemerintah (dalam hal ini Menteri Muda Urusan Pemuda) menetapkan bahwa bulan Oktober setiap tahun dijadikan Bulan Bahasa dengan tidak bermakna bahwa kegiatan pembinaan dan pengembangan tidak dilaksanakan dalam bulan-bulan yang lain. Penetapan bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa bertujuan menonjolkan kaitan yang erat antara Sumpah Pemuda dan masalah bahasa Indonesia.

Berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan dilaksanakan selama bulan Oktober sejak bulan Oktober 1980 itu di seluruh Indonesia — baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Dalam hal ini, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bertindak sebagai koordinator.

Kegiatan Bulan Bahasa tahun 1983 bertema "Melalui Bahasa Indonesia sebagai Sarana, Kita Sukseskan Pembangunan Nasional". Sejalan dengan isi dan semangat Sumpah Pemuda 1928, tujuan Bulan Bahasa 1983 adalah (1) menumbuhkan dan meningkatkan sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia, (2) meningkatkan kegairahan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, dan (3) meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dan apresiasi sastra dalam segenap lapisan masyarakat. Tujuan Bulan Bahasa itu sejalan pula dengan amanat yang digariskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983) baik mengenai pembinaan, pengembangan, dan pengajaran bahasa Indonesia maupun mengenai pengembangan bahasa daerah.

Dua di antara sepuluh kegiatan Bulan Bahasa 1983 adalah pertemuan Bahasa dan Sastra untuk Guru Sekolah Dasar dan Kongres Bahasa Indonesia IV ini. Pertemuan Bahasa dan Sastra untuk Guru Sekolah Dasar itu, khususnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diselenggarakan dengan keyakinan bahwa pembinaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda harus dimulai sedini mungkin, mulai dari tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun berada dalam masa yang peka dan subur bagi pembentukan watak, kepribadian dan tingkah lakunya, termasuk tingkah, kebiasaan, dan keterampilan berbahasa secara baik dan benar. Selain itu, guru sekolah dasar berada pada kedudukan dan kesempatan yang istimewa karena guru sekolah dasar pada umumnya adalah guru kelas. Mereka adalah guru yang mengasuh mata pelajaran bahasa Indonesia dan sekaligus mengasuh mata pelajaran lain. Dengan demikian, mereka benar-benar dapat berfungsi sebagai panutan dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Apa yang diajarkan mereka melalui mata pelajaran bahasa Indonesia diterapkan mereka sebagai bahasa pengantar dalam mengajarkan mata pelajaran lain. Murid mereka memperoleh pengetahuan kognitif mengenai bahasa Indonesia, memperoleh latihan keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan sekaligus memiliki model penutur bahasa Indonesia yang baik sekurang-kurangnya selama murid mereka itu berada di sekolah. Guru sekolah dasar terhindar dari ketidaksesuaian antara apa yang diajarkan oleh guru bahasa Indonesia dan bahasa yang digunakan oleh guru mata pelajaran lain, seperti yang sering terjadi pada tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Ketidaksesuaian itu harus kita atasi karena semua guru, apa pun mata pelajaran yang diasuhnya, adalah pengajar dan pembina bahasa Indonesia. Akhirnya, dalam hubungan dengan pelaksanaan program wajib belajar, yang insya Allah akan kita mulai pada tahun depan, yaitu tahun pertama masa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) IV, guru sekolah dasar memainkan peranan yang menentukan.

Kongres Pemuda-pemuda Indonesia tahun 1928 merupakan arena politik dan dihadiri oleh para pemuda Indonesia. Putusan itu merupakan pernyataan kebulatan tekad politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, putusan Kongres Pemuda-pemuda Indonesia tahun 1928 itu, yaitu putusan mengenai tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan kita, adalah putusan politik yang diprakarsai dan diambil oleh para pemuda Indonesia untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Putusan tidak saja mencerminkan, tetapi juga membuktikan bahwa jiwa dan semangat kepeloporan pemuda. Dengan demikian, jelaslah bahwa putusan mengenai bahasa, adalah putusan nasional bangsa kita, bukan putusan para ahli bahasa atau para guru bahasa saja. Oleh karena itu, masalah bahasa Indonesia adalah masalah nasio-

nal kita, masalah segenap lapisan masyarakat kita, masalah yang menyangkut kepentingan kita semua.

Sejalan dengan Kongres Pemuda-pemuda Indonesia tahun 1928 itu, Kongres Bahasa Indonesia adalah peristiwa nasional. Kita amati kenyataan bahwa Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Solo, Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan, Kongres Bahasa Indonesia III pada tahun 1978 di Jakarta, dan Kongres Bahasa Indonesia IV ini diikuti oleh para peserta yang mewakili berbagai lapisan masyarakat kita, berbagai profesi, dan berbagai keahlian. Sebagai peristiwa nasional, Kongres Bahasa Indonesia bukanlah peristiwa kebahasaan semata-mata. Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia menarik perhatian segenap lapisan masyarakat kita baik di dalam maupun di luar negeri, bahkan menarik minat pengamat dari negara lain, baik di kawasan Asia Tenggara maupun di kawasan lain di dunia. Kongres Bahasa Indonesia merupakan forum yang memungkinkan kita sebagai bangsa menelaah dan menelaah kembali masalah bahasa Indonesia serta pembinaan dan pengembangannya dengan meninjaunya dari segala segi dan dalam hubungan dengan kehidupan kita sebagai bangsa. Kongres Bahasa Indonesia merupakan forum yang memungkinkan kita memberikan sumbangan dan bahan masukan yang amat berharga kepada usaha kita membina dan mengembangkan bahasa nasional dan bahasa negara kita itu sehingga ia benar-benar menjadi bahasa yang dapat diandalkan dan bahasa negara yang ampuh. Di sinilah letak kaitan kesenyawaan antara Kongres Bahasa Indonesia dan Sumpah Pemuda 1928.

Peranan Pemuda dalam Pembinaan Bahasa Indonesia

Peranan pemuda dalam pembinaan bahasa Indonesia sejalan dengan jiwa dan semangat kepeloporannya. Seperti saya kemukakan tadi, Sumpah Pemuda 1928 itu sendiri adalah putusan yang diprakarsai dan diambil oleh para pemuda, yang sekaligus mendokumentasikan sumbangan dan peranan pemuda dalam pembinaan bahasa Indonesia. Hingga saat ini jiwa dan semangat kepeloporan pemuda itu tetap menyala dalam melaksanakan pembangunan dalam segala bidang dan dalam mempersiapkan diri sebagai generasi yang akan melanjutkan dan meningkatkan pembangunan bangsa kita pada waktu yang akan datang.

Jiwa dan semangat kepeloporan pemuda itu kita bina dan kita kembangkan melalui berbagai program kepemudaan, baik program nasional maupun program internasional. Program nasional kepemudaan mencakup program dalam hubungan dengan organisasi kesiswaan, seperti organisasi siswa intra sekolah (OSIS), gerakan Pramuka, organisasi kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus, organisasi kepemudaan non-mahasiswa,

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), organisasi keolahragaan, dan program pembauran bangsa.

Pemuda sebagai generasi penerus, dalam usahanya mempersiapkan diri, tentu tidak dapat mengembangkan kepribadian, kemampuan, dan pengalamannya dengan hidup menyendiri dalam lingkungan bangsa sendiri dan mengabaikan pergaulan dengan para pemuda sebagai generasi penerus dari negara lain di dunia. Pemuda memerlukan pergaulan pemuda antarbangsa tidak hanya demi pergaulan itu sendiri, tetapi juga karena pergaulan itu memberikan kesempatan kepadanya mengadakan studi perbandingan, belajar dari pengalaman pemuda negara lain, memperluas cakrawala pandangannya di dalam forum internasional, mengembangkan kepribadian dan kepemimpinannya di panggung antarbangsa, dan berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai pandangan hidup dasar negara, dan sekaligus ideologi serta Undang-Undang Dasar 1945.

Kebutuhan dalam hubungan dengan pergaulan antarbangsa itu dipenuhi dengan melaksanakan program internasional kepemudaan, seperti program pertukaran kunjungan pemuda, program pertukaran duta seni dan budaya, program keolahragaan, dan keikutsertaan dalam berbagai forum atau pertemuan internasional kepemudaan.

Dalam kaitan dengan pembinaan bahasa Indonesia, Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983) menggariskan bahwa "pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar". Ini adalah ketetapan nasional yang harus dilaksanakan secara nasional pula. Pemuda, baik secara nyata maupun secara potensial, dapat memainkan peranan yang menentukan di dalam pelaksanaan ketetapan nasional itu.

Kegiatan pemuda dalam hubungan dengan berbagai program kepemudaan, baik nasional maupun internasional, menghendaki kemampuan berkomunikasi, yang berarti kemampuan menggunakan bahasa seefektif dan seefisien mungkin. Pada tingkat nasional pemuda harus mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Pada tingkat internasional pemuda harus mampu berkomunikasi dengan menggunakan salah satu bahasa yang dilazimkan di dalam pergaulan antarbangsa juga secara baik dan benar. Penggunaan kedua bahasa itu harus dikuasainya sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pencampuradukan kedua bahasa itu dan khususnya, bahasa Indonesia yang digunakannya tidak dipengaruhi secara negatif oleh bahasa asing itu.

Kemampuan berpikir dan bernalar dengan cermat dan tepat, yang harus dimiliki oleh pemuda sebagai generasi penerus, dicerminkan oleh kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tidak saja secara baik dan benar tetapi juga secara cermat dan tepat. Di dalam berkomunikasi dan

mengembangkan kemampuannya berkomunikasi itu, pemuda secara tidak langsung memainkan peranannya dalam pembinaan bahasa Indonesia. Peranan yang sama dimainkan oleh pemuda melalui berbagai kegiatan kepemudaan, seperti kegiatan kesenian — terutama drama, deklamasi, dan membaca puisi —, sayembara mengarang, dan lomba pidato, baik yang dilaksanakan dalam hubungan dengan kegiatan lembaga pendidikan dan Bulan Bahasa maupun yang dilaksanakan dalam kaitan dengan organisasi kepemudaan. Lomba pidato yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda ke-55 tahun 1983 — bulan yang lalu — memperlihatkan bukan saja minat yang besar melainkan juga kesungguhan peserta lomba pidato itu di dalam usahanya mengembangkan kemampuannya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Secara potensial, pemuda dapat memainkan peranan yang menentukan di dalam pembinaan bahasa Indonesia dan peningkatan mutu penggunaannya di dalam masyarakat kita. Potensi itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Jiwa dan semangat kepeloporan pemuda dapat mendobrak gejala negatif dalam bentuk penggunaan kata-kata asing yang tidak diperlukan di dalam masyarakat kita dewasa ini, terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta. Gejala negatif itu terlihat dengan jelas di dalam penggunaan kata-kata asing di dalam nama pusat pertokoan, nama toko, nama gedung, dan nama badan usaha lain. Gejala negatif itu harus didobrak dan — sebagai gantinya — penggunaan bahasa Indonesia, bahasa nasional kita sendiri, harus ditingkatkan sejalan dengan usaha kita meningkatkan penggunaan barang-barang produksi dalam negeri. Dalam hubungan ini, pemuda memerlukan dukungan dan kerja sama berbagai pihak dan segenap lapisan masyarakat kita. Seperti saya kemukakan tadi, masalah pembinaan bahasa Indonesia memang bukan masalah golongan atau profesi tertentu saja atau masalah generasi muda saja. Oleh karena itu, pemuda dapat dan harus merupakan salah satu komponen di dalam keseluruhan sistem pembinaan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pemuda dapat dan harus dilibatkan secara aktif di dalam pembinaan bahasa nasional kita itu. Dalam kaitan ini, peranan lembaga pendidikan — mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat perguruan tinggi —, baik formal maupun nonformal, dan peranan organisasi kepemudaan perlu ditingkatkan. Jiwa dan semangat kepeloporan pemuda perlu dimanfaatkan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya demi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, demi pembinaan dan pengembangan kebudayaan kita, dan demi pembangunan bangsa dan negara kita pada umumnya.

Penutup

Kongres Bahasa Indonesia IV ini perlu merumuskan sistem pembinaan

dan pengembangan bahasa Indonesia sedemikian rupa sehingga terdapat mekanisme kerja sama nasional dengan melibatkan pemuda sebagai generasi penerus pembangunan bangsa kita. Mekanisme itu harus memungkinkan pemuda dan lapisan masyarakat kita yang lain memainkan peranan yang menentukan di dalam usaha kita melestarikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda 1928.

BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

Soepardjo Rustam
Menteri Dalam Negeri

Presiden Soeharto: Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1981:

"Kalau Pembangunan ingin sukses jelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat".

Menteri Dalam Negeri: Mekanisme pelaksanaan tugas segenap jajaran Departemen Dalam Negeri dari pusat sampai ke daerah:

"Laporan ke atas"

"Koordinasi ke samping"

"Instruksi ke bawah dan pengawasan"

1. Pendahuluan

Memenuhi maksud surat Panitia Kongres Bahasa Indonesia IV, Nomor 5/KBI/1983, tanggal 18 Agustus 1983 insya Allah bersama ini telah dapat kami sampaikan suatu kertas kerja yang mengemukakan masalah-masalah bahasa Indonesia yang berkaitan erat dengan tugas-tugas pokok dan fungsi Departemen Dalam Negeri dan kasus-kasus yang kami hadapi disebabkan salah tafsir, perbedaan pengertian, dan tidak atau belum memahami bahasa Indonesia dengan baik, dan sebagainya di dalam bahasa komunikasi pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, kami kemukakan pula tentang pentingnya peranan bahasa Indonesia di dalam menyukkseskan pelaksanaan tugas-tugas pembinaan umum pemerintahan dalam negeri, meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa dalam rangka memantapkan ketahanan

nasional. Oleh sebab itu, atas perhatian panitia dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kertas kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pembahasan dilakukan pada masalah-masalah yang kami temui dan alami di lapangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehari-hari dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- a. pendekatan peraturan perundang-undangan;
- b. pendekatan kemasyarakatan;
- c. pendekatan pembangunan;
- d. pendekatan kebiasaan dan tingkah laku;
- e. pendekatan proses perubahan ekologi.

Bertitik tolak dari tema kongres serta pedoman dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh kongres, maka kertas kerja ini kami beri judul "Bahasa Indonesia sebagai Sarana Komunikasi Pemerintahan dan Pembangunan".

Untuk dapat memahami masalah-masalah yang akan kami ketengahkan lebih lanjut baik kiranya dijelaskan terlebih dahulu tentang tugas-tugas pokok dan fungsi-fungsi Departemen Dalam Negeri, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, beberapa pengertian dan peristilahan bahasa pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Beberapa Pengertian

- (1) *Desentralisasi* adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.
- (2) *Dekosentrasi* adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.
- (3) *Tugas Pembantuan* adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
- (4) *Otonom daerah* adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) *Daerah otonom* selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga-

nya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) *Pemerintah daerah* adalah kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.
- (7) *Pemerintahan di daerah* adalah meliputi segala usaha dan kegiatan aparatur pemerintah pusat yang bertugas di daerah.
- (8) *Urusan pemerintahan umum* adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketenteraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan, dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah.

2) Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Dalam Negeri

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 44-45 Tahun 1974, tugas pokok Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Apabila dijabarkan lebih lanjut, tugas-tugas termaksud meliputi bidang pembinaan sosial politik dalam negeri, pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan ideologi Pancasila, bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah pembangunan daerah, pembangunan masyarakat desa dan agraria.

Dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah ditetapkan lebih lanjut bahwa Departemen Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya, baik yang mengenai urusan rumah tangga daerah maupun mengenai tugas pembantuan. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri selaku pembantu Presiden dan selaku pimpinan Departemen Dalam Negeri berwenang melakukan pengawasan umum atas jalannya pemerintahan daerah yaitu menerima dan mengolah pertanggungjawaban kepala daerah serta mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan wewengannya dan melaporkannya kepada Presiden mengenai hal yang prinsip dan penting.

3) Prinsip-prinsip Pokok tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara, dan dalam membina stabilitas politik dan kesatuan bangsa, hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata

dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan-perkembangan dan pembangunan daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditarik beberapa intisari pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut.

(1) **Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab**

Nyata dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

Bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air atau tidak bertentangan dengan pengarah-pengarah yang telah diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dapat menjamin perkembangan-perkembangan dan pembangunan daerah.

(2) **Harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya**

Di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah digariskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah agar berorientasi kepada pembangunan dalam arti luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Jadi, pada hakikatnya otonomi daerah itu merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

(3) **Pengarah-pengarah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah itu sebenarnya merupakan perwujudan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dan meliputi tiga hal sebagai berikut.**

- a. serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;
- b. menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan;
- c. menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

(4) **Harus dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi**

Rumusan ini secara prinsip berbeda dengan rumusan yang terkandung dalam penjelasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXI/MPRS/1966, yang mana dekonsentrasi dinyatakan

sebagai komplemen saja. Oleh sebab itu, di dalam kebijaksanaan Orde Baru, asas dekonsentrasi bukan sekedar komplemen atau pelengkap terhadap asas desentralisasi, tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, akan terjaminlah keserasian hubungan pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan serta peningkatan stabilitas politik dan ketahanan nasional yang tinggi.

4) Prinsip-prinsip Pokok tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

Sebagai konsekuensi prinsip sama pentingnya asas desentralisasi dan dekonsentrasi dilaksanakan bersama-sama di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, berikut ini kami jelaskan prinsip penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri di daerah sebagai berikut.

- (1) Harus dapat menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
- (2) Harus dapat dilaksanakan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
- (3) Harus dapat mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
- (4) Harus dapat meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pembinaan stabilitas politik dan kesatuan bangsa.

5) Pelaksanaan Tugas-tugas Instansi Vertikal Berada di Bawah Koordinasi Kepala Wilayah

Di dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana dijelaskan di atas, dalam diri kepala daerah terdapat dua fungsi, yaitu pertama fungsi sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah; kedua fungsi sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Di dalam hal yang terakhir inilah terdapat hubungan kerja instansi-instansi vertikal dan kepala daerah dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah. Dalam praktiknya antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi vertikal itu begitu juga antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan instansi vertikal, sangat erat hubungannya satu sama lain. Oleh karena itu, untuk mencapai dayaguna dan hasilguna sangat perlu sekali penyelenggaraan urusan-urusan itu dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya. Pejabat yang berwenang dan berkewajiban untuk menyelenggarakan koordinasi

nasi tersebut adalah kepala wilayah. Berhubung dengan itu di dalam melaksanakan tugasnya instansi-instansi vertikal departemen-departemen dan bukan departemen yang ditempatkan di daerah berada di bawah koordinasi kepala wilayah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh sebab itulah, di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa kepala wilayah dalam semua tingkat adalah sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan di daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri dan bidang moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai mata uang dan sebagainya. Ia berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas instansi-instansi vertikal departemen-departemen dan bukan departemen serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan perkataan lain bahwa penguasa tunggal adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan.

2. Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Pemerintahan

1) Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional

Di dalam membicarakan masalah peningkatan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, maka ingatan kita kembali kepada sejarah lahirnya Budi Utomo (1908), yang pada mulanya hanya membawakan aspirasi nasional dan aspirasi kesejahteraan yang terbatas, tetapi setelah melalui tahap-tahap perkembangan yang penuh perjuangan aspirasi itu bermuara pada aspirasi Sumpah Pemuda dan lagu kebangsaan Indonesia Raya (1928), yang berisi pengakuan atas satunya bangsa, satunya tanah air, dan satunya bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia merupakan wujud perpautan kembali bangsa Indonesia setelah berabad-abad tercerai-berai.

Namun, sebagai pengaruh sampingan pembangunan nasional yang sedang kita lakukan pada waktu ini tidaklah dapat dimungkiri pula timbulnya proses komunikasi dan integrasi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam suku bangsa, agama, dan adat istiadat dapat menimbulkan beberapa kemungkinan. Bila diarahkan dengan cepat, proses ini akan dapat memperkaya perbendaharaan budaya bangsa dengan unsur yang dinamik, serta membuka wawasan budaya yang lebih luas. Akan tetapi, bila tanpa diarahkan akan dapat pula menumbuhkan sikap eksklusivisme kedaerahan, dan cenderung menjurus kepada desintegrasi dalam kehidupan kebudayaan, dan membahayakan kelestarian kesatuan dan persatuan bangsa, yang akan lebih terasa jika penguasaan serta penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan dan persatuan dengan benar dan baik mulai menunjukkan kemundurannya.

Dalam mencari pedoman kongkret bagi pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa dan identitas nasional perlu adanya suatu asas untuk menjadi landasan dalam menyusun langkah-langkah serta kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pembinaannya. Asas termaksud tidak dapat lain adalah Pancasila yang pada dasarnya merupakan hasil keseluruhan perenungan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia terhadap kenyataan-kenyataan sosial, yang diangkat menjadi dasar kehidupan bangsa dan negara, dan oleh karenanya akan mampu memberikan landasan motivasi, serta pengarah dalam pengembangan bahasa Indonesia sebagai bagian kebudayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan menurut Pancasila itu dalam mencapai wujud masyarakat yang dicita-citakan secara konsepsional berorientasi kepada asas-asas keseimbangan, asas-asas kekeluargaan dan asas-asas kerakyatan.

Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pengembangan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional masih sangat perlu sekali dibarengi dengan peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa dengan sistem pendidikan yang mampu menunjang usaha mengejar ketinggalan teknologi, ilmu dan manajemen, serta usaha merangsang partisipasi masyarakat untuk turut serta aktif dalam pembangunan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing dengan kerja sama yang nyata dalam mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, dapatlah diharapkan terwujudnya ketahanan nasional di bidang sosial budaya khususnya bahasa Indonesia, yaitu kondisi dinamika suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial bangsa dan negara.

2) Masalah Bahasa Indonesia dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Departemen Dalam Negeri

(1) Di dalam mengikuti seminar-seminar, rapat-rapat kerja atau rapat-rapat koordinasi di tingkat pusat dengan departemen-departemen atau bukan departemen pengalaman menunjukkan bahwa pada umumnya para aparatur pemerintahan masih banyak yang belum mampu mempunyai penafsiran yang sama, apalagi memahami dan menghayati akan prinsip-prinsip, istilah-istilah, pengertian-pengertian yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Malahan ada yang berpendapat lebih tegas lagi dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Departemen Dalam Negeri, masih banyak kekosongan

dan kekurangannya, sedangkan pihak lainnya menilai bahwa Undang-Undang itu perlu ditinjau kembali dan sebagainya. Menurut hemat kami bahwa pemikiran demikian itu perlu dipertanyakan apakah penafsirannya dikaitkan dengan suatu kepentingan tertentu dalam pola sikap yang masih berkotak-kotak atau mungkin juga pemakaian istilah-istilah atau perumusan-perumusan bahasa Indonesia di dalam undang-undang itu yang belum baik benar.

Karena yang mempunyai perbedaan pengertian itu adalah aparaturnya pemerintah sendiri yang dalam kedudukannya selaku tenaga pemikir, perencana dan pelaksana dalam semua pembangunan, bukanlah tidak mungkin pula hal itu akan menjadi hambatan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini sangat terasa sekali apabila pembicaraan dan komunikasi dengan departemen-departemen teknis itu mengenai masalah penyerahan urusan-urusan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya, sebab jika suatu urusan itu telah diserahkan oleh departemen teknis kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya, urusan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah baik mengenai perencanaan dan pelaksanaan maupun mengenai pembiayaannya. Kedudukan departemen teknis tersebut dalam urusan itu hanyalah tinggal semata-mata melakukan pembinaan di dalam pengembangannya lebih lanjut.

Berhubung dengan itu, kiranya dapatlah kami tegaskan bahwa kesalahpahaman penafsiran dan perbedaan pengertian yang dimaksud di atas tidak saja terdapat pada tingkat pusat, tetapi juga dialami oleh kepala daerah selaku kepala wilayah di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam melaksanakan koordinasi terhadap instansi-instansi vertikal, meminta laporan dan keterangannya tentang segala rencana dan kegiatan yang dilakukan sehingga wewenang koordinasi kepala wilayah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam perkembangan selanjutnya hal itu ada yang berakibat tidak tercapainya sasaran suatu proyek pembangunan ataupun pelaksanaannya yang tidak serasi dengan pembangunan daerah, sedangkan yang lainnya lagi terdapat pula bahwa suatu pembangunan itu sudah selesai dikerjakan, tetapi belum dapat dimanfaatkan dan sebagainya.

Menurut hemat kami timbulnya hambatan-hambatan itu karena perbedaan penafsiran dan perbedaan pengertian serta hakikat penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu selain banyak disebabkan aspek-aspek lainnya, menurut pengalaman kami mungkin juga disebabkan karena pengaruh bahasa Indonesia yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, kami memandang hal demikian itu merupakan masalah prinsipil bagi Departemen Dalam Negeri karena menimbulkan hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan tugasnya. Atas dasar pengalaman yang terurai di atas kiranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mempunyai nasib sama, seyogianya perlu

dimasyarakatkan melalui pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dipahami dan dihayati oleh semua aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah.

(2) Dalam rangka pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa Departemen Dalam Negeri melaksanakan program pembauran antara golongan pribumi dan nonpribumi (Cina, Arab, India, Pakistan) dengan wadahnya RT/RW. Sasaran yang hendak dicapai ialah untuk menciptakan kondisi saling pengertian agar terjalin kerja sama yang erat, guna memperlancar pertumbuhan kerukunan, kebersamaan dan kesetiakawanan antara semua unsur bangsa. Selain itu, adalah untuk mewujudkan terselenggaranya komunikasi lahir batin antara pribadi dan kelompok yang berkembang secara alamiah atas dasar motivasi yang sama. Pelaksanaan program itu banyak mengalami kesulitan karena golongan nonpribumi tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, sedangkan yang lainnya ada pula yang tidak mengerti bahasa Indonesia sama sekali. Apabila berada dalam golongannya, mereka menggunakan bahasa golongannya masing-masing.

(3) Masalah komunikasi antara pemerintah dengan rakyat pedesaan terdapat pula hambatan-hambatan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Hal ini kami alami di lapangan, antara lain, ketika diadakan ujian para calon kepala desa. Para calon tersebut tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengisi formulir-formulir yang diajukan kepada mereka karena tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Kadang-kadang jawaban mereka tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi, tidak menyambung sehingga mereka tidak lulus, sedangkan mereka ini adalah figur yang disegani dan mendapat dukungan masyarakatnya. Sebaliknya, jika dipilih yang muda-muda yang mampu berbahasa Indonesia, tidak mendapat dukungan sama sekali. Jadi, hambatannya dalam hal ini adalah masalah bahasa Indonesia.

(4) Karena rakyat pedesaan tidak/belum memahami bahasa Indonesia dengan baik, banyakkah kebijaksanaan pemerintah yang belum terlaksana dengan baik. Sebagai contoh kiranya dapat kami berikan suatu pengalaman lapangan tentang pengumuman pemerintah kecamatan untuk wajib lapor bagi orang-orang yang lebih dari 24 jam bertamu di suatu rumah warga. Dalam hubungan ini kebetulan tertangkap seorang yang tidak melaporkan diri karena telah bertamu lebih dari 24 jam. Ketika ditanya kepada warga tempat ia bertamu, mengapa ia tidak melaporkan tamunya itu, ia hanya menjawab bahwa ia tidak tahu dan tidak mengerti adanya pengumuman pemerintah itu. Di samping jawabannya itu terbayang pada air mukanya bahwa ia tidak merasa bersalah apa-apa dan tidak merasa menyesal atas keadaan itu, dan hal

ini terjadinya ialah karena masalah bahasa Indonesia yang belum mereka pahami. Kalau kita menyatakan kepada masyarakat pedesaan sehubungan dengan suatu permohonan mereka, "akan dipertimbangkan", bagi masyarakat pedesaan hal itu dipahami sebagai suatu janji yang telah pasti dan akan menuntunya terus-menerus pada setiap kesempatan; maka di sini terdapat masalah bahasa Indonesia yang belum baik pemahamannya. Hambatan-hambatan yang kami uraikan di atas itu hanya baru mengenai pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan belum lagi jika pembicara mempergunakan istilah-istilah asing atau dengan kependekan-kependekan seperti *approach* partisipasi, koordinasi, Mendikbud, Depdagri dan sebagainya. Dalam hal ini aparaturnya seolah-olah berbicara hanya untuk dirinya sendiri.

Komunikasi pemerintahan dengan rakyat terasing seperti rakyat di Irian Jaya, Timor Timur, dan di Kepulauan Mentawai tentunya lebih berat lagi daripada rakyat di pedesaan tersebut di atas karena mereka itu sama sekali tidak mengetahui bahasa Indonesia. Hubungan pemerintah dengan mereka itu dilakukan melalui penerjemah bahasa daerahnya masing-masing. Selain hal-hal yang terurai di atas kami kemukakan pula bahasa-bahasa yang telah mantap dipahami oleh masyarakat luas baik di kota-kota maupun di pedesaan adalah istilah *landreform*, *landuse*, dan *agraria*. Pemakaian ketiga istilah termaksud telah berjalan dengan baik dan lancar sebagai sarana dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Departemen Dalam Negeri di bidang pertahanan. Kalau kita menyebut *landreform*, rakyat telah menyerap artinya, yaitu pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah, dan begitu pula jika disebut *landuse* akan segera dipahami rakyat bahwa itu adalah tata penggunaan tanah, demikian pula dengan istilah *agraria* sudah populer dan mungkin telah membudaya. Apakah mengenai istilah-istilah tersebut sudah waktunya untuk dibakukan kami mohonkan pertimbangan forum kongres yang mulia.

(5) Kiranya perlu juga kami kemukakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ialah terdapatnya suatu kenyataan bahwa di daerah-daerah perkotaan masyarakat berbicara dalam bahasa campuran, yaitu bahasa Indonesia dan bercampur dengan bahasa daerah dan bahasa asing misalnya dengan bahasa Cina *cepek*, *nopek*, *lu* dan *gua* dan sebagainya, sedangkan jika kita datang di daerah-daerah pedesaan masyarakat berkomunikasi dengan bahasa daerah masing-masing. Apakah hal demikian itu merupakan suatu hambatan atau tantangan bagi kita semua di dalam pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seyogianya permasalahan ini kami serahkan kepada penilaian para ilmuwan bahasa, tetapi kami melihat hal ini dari sudut pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri mengenai penghayatan kesatuan dan persatuan bangsa adalah suatu hambatan.

3. Kesimpulan dan Saran

1) Kesimpulan

Penggunaan bahasa Indonesia yang belum baik dan benar telah menimbulkan perbedaan penafsiran dan perbedaan pengertian terhadap prinsip-prinsip serta hakikat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur Pemerintah sendiri baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.

Komunikasi pemerintahan dengan rakyat-rakyat di pedesaan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena mereka belum memahami atau sama sekali tidak memahami bahasa Indonesia.

Keadaan-keadaan yang tersebut di atas banyak sedikitnya telah menimbulkan hambatan-hambatan bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Departemen Dalam Negeri.

2) Saran

Sebaiknya melalui rencana pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dimaksudkan pula rencana upaya pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang merupakan landasan pokok bagi peningkatan kesatuan dan persatuan bangsa, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di seluruh pelosok tanah air di dalam rangka pemantapan ketahanan nasional.

Sebaiknya di dalam rencana upaya pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu diprioritaskan terlebih dahulu kepada para aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah sehingga tercipta suatu pengertian dan pemahaman yang seragam mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sebaiknya diadakan pembakuan mengenai istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang telah diserap oleh rakyat banyak di samping melakukan penertiban terhadap kependekan-kependekan (akronim) dan pemakaian istilah-istilah asing yang belum populer penggunaannya.

Sebaiknya diadakan penelitian yang mendalam mengenai bahasa-bahasa daerah guna menciptakan suatu bahasa komunikasi pemerintahan yang serasi antara bahasa-bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga dapat menyentuh serta menyerap inspirasi rakyat pedesaan serta memperkokoh penghayatan kesatuan dan persatuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, Sutan Takdir. 1956. *Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta
Departemen Dalam Negeri. 1978. *Penghayatan Kesatuan Bangsa*. Buku I dan
II. Jakarta.
- . 1979. *Pokok-pokok Rumusan Hasil Komunikasi Penghayatan Kesatu-
an Bangsa Tingkat Nasional dan Wilayah*. Jakarta
- . 1980. *Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
(PKK)*. Jakarta
- . 1982. *Pokok-pokok Kebijakan Departemen Dalam Negeri dalam
hubungan Pencapaian Peningkatan Ketahanan Nasional*. Jakarta.
- . 1982a. *Program Peningkatan Peranan RT/RW dalam Proses Pem-
bauran*. Buku I dan II. Jakarta
- . 1982. *Implementasi Wawasan Nusantara dalam Penyelenggaraan Tugas
Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta.
- . 1982. *Membangun Politik Dalam Negeri*. Jakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974.
- Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1984.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983.
- Pidato Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 1981.
- Undang-Undang Dasar 1945.

BAHASA HUKUM SEBAGAI OBJEK DAN SUBJEK PEMBANGUNAN NASIONAL

Ali Said

Menteri Kehakiman

1. Pengantar

Merupakan kewajiban mutlak bagi kita selaku manusia-manusia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa untuk di dalam menyongsong Kongres Bahasa Indonesia IV ini mendahulukan sembah puji syukur ke hadirat-Nya serta memohon kiranya pertemuan akan tertuntun ke arah diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya.

Kemudian, izinkanlah saya untuk selain berucap tulus terima kasih kepada para penyelenggara atas undangan, menyampaikan pula penghargaan yang tinggi atas diacarakannya secara khusus pembahasan suatu segi dari bahasa Indonesia yang erat kaitannya dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada Departemen Kehakiman.

Hubungan dan kedudukan Departemen Kehakiman dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan baik memang mempunyai arti tersendiri karena selain sebagai sarana komunikasi pemerintahan, bahasa Indonesia merupakan bahasa hukum nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan di bidang hukum, baik dalam perumusan peraturan perundang-undangan, dalam keputusan-keputusan badan peradilan, dalam penyusunan kontrak maupun perumusan akta-akta lainnya.

Selanjutnya marilah kita sentuh masalah yang akan dibahas oleh kongres ini yang bertemakan "Bahasa Hukum sebagai Objek dan Subjek Pembangunan Nasional".

2. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Hukum

Sejarah hukum di negara kita sempat mencatat bahwa pada masa penjajahan Belanda, di samping hukum adat yang hidup di berbagai lingkungan dan menggunakan bahasa daerah masing-masing, terdapat perangkat-perangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda dalam bahasa Belanda. Namun, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, gerakan kebangkitan nasional yang bermula di tahun 1908 telah mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sehingga baik Proklamasi Kemerdekaan maupun Undang-Undang Dasar 1945 telah langsung terumus dalam bahasa Indonesia dan tidak lagi dalam bahasa asing/Belanda yang pada dasarnya lebih baik dikuasai oleh para pemimpin revolusi kemerdekaan kita.

Perumusan Pasal 36 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara telah menyebabkan komunikasi di bidang pemerintahan, termasuk penerbitan rumusan peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan UUD 1945, langsung menggunakan bahasa Indonesia sehingga bahasa hukum dalam perundang-undangan nasional dalam kenyataan adalah bahasa Indonesia sejak proklamasi. Lebih dari itu, bagi peraturan perundang-undangan produk kolonial yang masih diperlakukan dan terumus dalam bahasa Belanda, berangsur-angsur diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekalipun tidak dilakukan secara resmi.

Dengan dipergunakannya bahasa Indonesia di lapangan pengadilan, keputusan hakim pun dituangkan dalam bahasa Indonesia. Demikian pula dengan bahasa hukum bidang perjanjian dan penyusunan akta oleh pihak-pihak yang berkontrak atau dalam akta notaris.

Pelajaran ilmu dan tata hukum di fakultas hukum, sudah sejak didirikannya Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (1946) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1950), menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan yang paling menggembirakan adalah bahwa sejak dekade 70-an, penulisan-penulisan dalam ilmu dan tata hukum Indonesia sudah berkembang dengan cepat dan telah dibuat dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah digunakan dan menjadi bahasa hukum negara kita sejak kurang lebih 38 tahun yang lalu.

3. Bahasa Hukum Indonesia

Simposium Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai Bahasa dan Hukum pada tahun 1974 telah berhasil mencatat pandangan yang menyatu mengenai arti dan kedudukan bahasa hukum Indonesia. Beberapa catatan di antaranya adalah *pertama*, bahwa bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang digunakan di dalam kehidupan hukum Indonesia dan karena fungsinya memiliki karakteristik tersendiri. *Kedua*, sebagai bahasa, bahasa

hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat estetika. *Ketiga*, bahwa sifat khas bahasa hukum itu terletak pada kekhususan istilahnya, misalnya penciptaan istilah-istilah badan hukum (zona otonomi eksklusif dan lain-lain), komposisi dan gayanya, antara lain komposisi dan gaya dalam perundang-undangan, keputusan hakim, akta notaris atau dalam konvensi internasional. *Keempat*, bahwa bahasa hukum itu milik seluruh masyarakat dan bukan semata-mata milik para ahli hukum. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia dalam peraturan perundang-undangan itu harus mudah dipahami oleh para anggota masyarakat.

4. Inventarisasi Permasalahan

Dalam upaya pembangunan hukum nasional sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, terdapat setidaknya-tidaknya 3 program utama yang meminta prioritas penanganannya, yaitu pembinaan hukum, penyempurnaan sarana dan prasarana penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum. Untuk mudahnya, di dalam memasalahkan bahasa hukum ini akan diikuti urutan program-program utama tersebut.

Dalam kaitan dengan pembangunan dan pembinaan hukum, baik dalam kegiatan melalui perancangan undang-undang maupun melalui jurisprudensi dan perjanjian, masalah bahasa hukum yang perlu memperoleh perhatian adalah masalah *pembakuan istilah*. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan sarana dan prasarana penegakan hukum masalah penerjemahan menjadi penting sekali, sedangkan dalam kaitannya dengan program peningkatan kesadaran hukum, masalah *penguasaan bahasa Indonesia*-lah yang perlu diperhatikan.

a. Masalah Pembakuan Istilah

Dari kegiatan inventarisasi peristilahan hukum, masih banyak dijumpai bahwa tidak setiap istilah menafsirkan satu konsep pemikiran. Masih ditemui adanya satu istilah yang menafsirkan lebih dari satu konsep pemikiran, misalnya kata/istilah *pertanggung* dalam arti jaminan/borg dan sebagai terjemahan asuransi. Sebaliknya, untuk satu konsep pemikiran dipergunakan lebih dari satu istilah, misalnya *tindak pidana* atau *perbuatan pidana* untuk menggantikan/menterjemahkan istilah *strafbaarfeit*.

Bagi dunia ilmu pengetahuan keadaan sedemikian itu cukup menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Namun, dilihat dari segi praktis, lebih-lebih bagi suatu negara yang sedang membangun, dalam kondisi tidak atau belum ada pembakuan dalam peristilahan (standarisasi), akan merupakan pemborosan waktu, tenaga, dan dana, baik bagi para pejabat administrasi pemerintah maupun bagi para pihak yang berperkara di muka pengadilan. Oleh

karena itu, upaya pembakuan istilah harus merupakan kegiatan yang diprioritaskan.

b. Upaya Terjemahan Peraturan Perundang-Undangan

Dengan berlandaskan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan belum diubah atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai tetap berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah peninggalan pemerintah Hindia Belanda dan berbahasa Belanda, yang sebagian besar materinya berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan lainnya berkaitan dengan kodifikasi, yaitu AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*), BW (*Burgerlijke Wetboek*), WvK (*Wetboek van Koophandel*), WvS (*Wetboek van strafrecht*), HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*).

Para pejabat pemerintah, jaksa dan hakim, pada masa pertama pemerintah RI pada umumnya sempat memperoleh pendidikan sebelum Perang Dunia II dan menguasai bahasa Belanda. Akan tetapi, para pejabat generasi baru yang lahir setelah tahun 1935 dan mulai mendapat pendidikannya pada masa pemerintahan Jepang sama sekali tidak berkesempatan memperoleh pendidikan dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.

Masalah yang timbul adalah kesulitan penerapan ketentuan-ketentuan hukum yang terumuskan dalam bahasa Belanda itu di dalam praktik. Upaya penerjemahan di satu pihak ternyata lamban dan tidak dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Di lain pihak upaya mewajibkan para pejabat untuk belajar lagi bahasa Belanda mengalami kesulitan pula. Upaya memasukkan pelajaran penguasaan bahasa hukum Belanda ke dalam kurikulum fakultas hukum pun baru diterima dalam dekade 70-an.

Karena pihak pemerintah tidak secara resmi membakukan penerjemahan, upaya dilakukan oleh para ahli secara perorangan. Hasil-hasil terjemahan inilah yang kemudian dipergunakan oleh para pejabat dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam keadaan terdapat terjemahan undang-undang yang berlainan arti dan maknanya, dan dalam hal yang bersangkutan sama sekali tidak dapat mengkaji rumusan bahasa aslinya, timbullah permasalahan terjemahan mana yang akan dipilih oleh para pengambil keputusan itu.

Sebenarnya ada alternatif bagi pemerintah untuk memilih salah satu terjemahan yang terbaik, atau untuk kembali melakukan terjemahan bersama. Telah diupayakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional penerjemahan *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) dan sejumlah peraturan lainnya. Terjemahan yang disebut pertama bahkan telah diterbitkan.

Dalam pada itu Garis-garis Besar Haluan Negara telah memilih kebijaksanaan untuk langsung memperbaharui kodifikasi-kodifikasi yang telah ada itu. Dengan upaya pembaharuan ini dimaksudkan agar masalah terjemahan pun dapat sekaligus dilaksanakan.

c. Keterbatasan Daya Penerimaan Bahasa Hukum oleh Masyarakat Desa

Masalah ini sebenarnya masalah umum dalam sarana komunikasi pemerintahan, yaitu penguasaan bahasa Indonesia yang sangat terbatas oleh penduduk di pedesaan. Banyak di antara mereka yang masih "buta" bahasa Indonesia disamping "buta aksara". Upaya yang telah ditempuh adalah dengan mempergunakan bahasa daerah/bahasa setempat sebagai alat terjemahan yang dilakukan oleh dan melalui kepala-kepala desa atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Untuk pemerataan pengetahuan mengenai hukum nasional, kegiatan penyuluhan hukum yang telah dikembangkan sejak Pelita III ini, sewajarnya mempertimbangkan dan karenanya memberikan perhatian yang lebih kepada masalah buta aksara dan buta bahasa Indonesia pada Pelita-Pelita mendatang.

5. Penetapan Kebijakan Langkah Kegiatan

a. Pembakuan Istilah Hukum

Dalam kaitannya dengan program nasioal di bidang pembangunan dan pembinaan hukum sebagaimana digariskan untuk Pelita IV, khusus dalam upaya pembaharuan kodifikasi dan penyusunan perundang-undangan lainnya, kegiatan pembakuan istilah hukum semakin menuntut prioritas penanganannya.

Dengan berlandaskan pada *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebenarnya langkah-langkah maju telah dapat diambil dengan derap yang mantap. Hanya masalah personalia para petugas pembakuan dan sarana penunjangnya hingga kini masih menjadi penghambat yang tidak mudah untuk diatasi.

Pemikiran untuk lebih memantapkan upaya pembakuan istilah hukum ini, dengan mewedahi kegiatannya secara struktural dalam tubuh Badan Pembinaan Hukum Nasional, (dewasa ini sedang dipelajari) perlu mendapat perhatian kita bersama, karena ternyata sudah bahwa kegiatan tersebut benar-benar memerlukan sarana dan prasarana penunjang yang memadai demi terlaksananya tugas secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

b. Upaya Penerjemahan

Dewasa ini sambil menunggu berhasilnya program pembinaan hukum nasional secara menyeluruh, kebijaksanaan untuk menerjemahkan peraturan perundang-undangan dari masa lampau masih tetap dirasakan sebagai kebutuhan yang bermanfaat. Tentu saja harus dilakukan secara pilihan, terbatas pada jenis-jenis peraturan yang dalam praktik sangat diperlukan bagi perkembangan hak dan kewajiban asasi warganegara.

Sejalan dengan tingkat pertumbuhan hubungan regional maupun internasional kini dan memperkirakan perkembangannya diwaktu yang akan datang, upaya penerjemahan berbagai konvensi internasional atau peraturan perundang-undangan tertentu dari negara tetangga dan negara sahabat (khususnya di bidang lalu lintas perekonomian) akan sangat bermanfaat bagi program peningkatan kemampuan penegakan hukum maupun bagi program pembinaan hukum melalui perundang-undangan. Akan sangat bermanfaat pula kiranya untuk menerjemahkan ke dalam bahasa asing (Inggeris) hukum nasional kita yang baru.

c. Bahasa Indonesia dalam Penerangan/Penyuluhan Hukum

Bertolak dari kenyataan masih cukup banyaknya anggota masyarakat yang buta aksara dan buta bahasa nasional, perlu diberikan perhatian khusus oleh para ahli dan petugas penerangan serta para ahli dan petugas penyuluhan hukum. Untuk meningkatkan keberhasilan komunikasi di bidang hukum dan pemerintahan, perlu ditingkatkan program penerangan dan penyuluhan hukum agar kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang buta aksara dan buta bahasa nasional di pelosok-pelosok pedalaman dan pedesaan. Selain melalui publikasi peraturan perundang-undangan nasional perlu dilakukan pula melalui media lisan dan media gambar, dijelaskan melalui tokoh-tokoh masyarakat dengan terjemahan dalam bahasa daerah atau bahasa lokal masing-masing agar lebih berhasil.

6. Penutup

Saya telah mencoba untuk mengetengahkan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi oleh Departemen Kehakiman dalam melaksanakan isi Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa hukum.

Mudah-mudahan penyajian masalah ini dapat menggugah para hadirin serta kongres untuk mengkajinya lebih mendalam dan mengembangkannya lebih jauh.

Semoga Tuhan Seru Sekalian Alam senantiasa memberikan petunjuk-Nya dan melimpahkan rida-Nya. Amien.

BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA PEMBINAAN KEHIDUPAN BERAGAMA

H.Ahmad Ludjito

Departemen Agama

1. Pendahuluan

Kenyataan sosial budaya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa yang beragama, sehubungan dengan itu kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran dan perkembangan agama-agama besar: Hindu, Budha, Islam, Kristen (Protestan dan Katolik). Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan sosial budaya bangsa Indonesia juga sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai agama.

Agama merupakan ketentuan-ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa yang mengandung nilai-nilai luhur, mulia, dan suci yang dihayati dan diamalkan oleh para pemeluknya masing-masing, dan merupakan faktor yang berpengaruh dalam usaha bangsa Indonesia untuk menyukkseskan pembangunan nasional.

Agama di Indonesia mempunyai arti/posisi dan peranan serta fungsi yang sangat penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut.

- a. Sebagai *faktor motivatif*, agama memberi dorongan batin/motif, akhlak dan moral yang mendasari dan melandasi cita-cita dan perbuatan manusia dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan, termasuk usaha dalam pembangunan bangsa.
- b. Agama, sebagai *faktor kreatif dan inovatif* memberikan dorongan semangat untuk bekerja kreatif dan produktif dengan penuh dedikasi untuk membangun kehidupan dunia yang lebih baik sebagai sarana kehidupan akhirat yang baik pula. Oleh karena itu, di samping bekerja kreatif dan

produktif, agama mendorong pula terhadap pembaharuan dan penyempurnaan (inovatif).

- c. Agama merupakan *faktor integratif*, baik individual maupun sosial, dalam arti bahwa agama mengintegrasikan dan menyerasikan segenap aktivitas manusia, baik sebagai orang seorang maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam fungsinya yang integratif ini, serta dalam konteks pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama mempunyai peranan sebagai faktor pemantap stabilitas dan ketahanan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa demi keberhasilan pembangunan nasional di samping akan lebih memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa juga peningkatan kehidupan beragama.
- d. Dalam fungsinya sebagai *faktor sublimatif*, agama berfungsi menyahdukan dan menguduskan perbuatan manusia sehingga segala perbuatan manusia, bukan saja yang bersifat agamis, tetapi juga setiap perbuatan yang dijalankan dengan tulus ikhlas dan penuh pengabdian karena keyakinan agama, akan merupakan bagian pelaksanaan ibadah dari insani terhadap Sang Pencipta/Al-Khaliq/Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar itu, membangun juga berarti beribadah.
- e. Agama sebagai *sumber inspitasi* budaya bangsa Indonesia telah melahirkan berbagai hasil budaya fisik maupun nonfisik, antara lain berupa gaya arsitektur bangunan, tata cara pergaulan, seni budaya di samping sumbangannya terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Kelima arti dan peranan agama tersebut merupakan kekuatan transendental yang menuntut para pemeluknya untuk mewujudkannya secara nyata dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam upaya pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama bagi seluruh penghuni Kepulauan Nusantara yang terdiri dari pelbagai suku dan keturunan dengan bahasa dan adat-istiadat serta budaya yang beraneka ragam, peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (sesuai dengan Sumpah Pemuda) dan sekaligus sebagai bahasa negara (pasal 36 UUD 1945) serta sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan (UUD No. 4 Tahun 1950 jo UU No. 12 Tahun 1954) merupakan faktor penentu; bahasa sebagai alat komunikasi antarmanusia, baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat merupakan sarana dominan bagi berhasilnya pembinaan kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam uraian selanjutnya secara berurutan akan disampaikan gambaran mengenai pembinaan kehidupan beragama, peranan dan perkembangan bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pembinaan kehidupan ber-

agama, beberapa masalah tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan beragama, dan kesimpulan serta saran-saran sebagai penutup.

2. Pembinaan Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama di Indonesia secara konstitusional ditegaskan dalam rumusan Pancasila dalam Pembukaan dan Pasal 29 UUD 1945. Landasan idil Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, yang sila pertamanya adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sila pertama ini ditegaskan bahwa "Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna kewajiban pemerintah dan para penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur". Untuk mewujudkan amanat dalam UUD 1945 itu, pemeliharaan budi pekerti kemanusiaan yang luhur tidak dapat dilepaskan dari usaha membina dan mengembangkan kehidupan beragama bangsa kita karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan, bahkan merupakan sasaran pokok ajaran agama. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sehubungan dengan itu, dalam membina dan mengembangkan kehidupan beragama, negara/pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, melainkan sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan, serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang, bergairah dan bersemarak, serasi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam membina kehidupan beragama dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto, telah menegaskan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beragama; masyarakat Pancasila yang ingin kita bangun bersama bukanlah masyarakat tanpa agama, lebih-lebih bukan masyarakat yang anti agama. Sebagai negara Pancasila kita tidak menganut paham sekuler sehingga negara dan pemerintah sama sekali bersikap tidak memperdulikan prikehidupan beragama bangsa kita. Oleh karena itu, pemerintah tidak menempatkan usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama sebagai masalah masyarakat dan umat beragama semata-mata. Di lain pihak, negara kita juga bukan negara agama dalam arti didasarkan atas salah satu agama.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbineka, berbeda dalam suku bangsa yang memiliki bahasa, kebudayaan dan kesenian daerah adat-istiadat setempat, juga berbeda dalam agama yang kita peluk dan kita yakini masing-masing. Namun, perbedaan-perbedaan itu bukanlah untuk dipertentangkan,

melainkan harus diserasikan untuk mencapai cita-cita bersama menuju kebahagiaan sebagai satu bangsa karena di dalam kebinekaannya itu bangsa Indonesia juga telah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia; mempunyai satu bahasa persatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia; hidup dalam satu negara, yaitu negara Republik Indonesia; mempunyai satu pemerintah Republik Indonesia.

Untuk maksud-maksud di atas itulah Departemen Agama didirikan, sebagai salah satu ciri dari negara Pancasila yang bukan teokratis juga bukan sekuler.

3. Perkembangan Bahasa Indonesia dan Pembinaan Kehidupan Beragama

Bahasa Indonesia telah dikenal sejak dipergunakan oleh penduduk pantai Timur Sumatera, Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya yang mula-mula dikenal sebagai bahasa Melayu yang dipergunakan secara lisan secara turun-temurun. Tulisan yang mula-mula dikenal dan dipergunakan untuk menuliskan bahasa Indonesia pada permulaan abad Masehi adalah berasal dari India Selatan yang dikenal dengan nama huruf Palawa. Bersamaan dengan itu pula bahasa Sanskerta dan Pali yang mengikuti masuknya agama Hindu dan Budha ke Indonesia ikut menyumbang perkembangan bahasa Melayu.

Ketika agama Islam masuk ke Indonesia, bahasa Arab dan tulisannya ikut juga memperkaya bahasa Indonesia, demikian juga bahasa Parsi. Tulisan Arab dipergunakan untuk menuliskan bahasa Melayu, menggantikan tulisan atau huruf Palawa. Bersamaan waktu dengan penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara, bahasa Indonesia juga ikut tersebar karena bahasa itu dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam perkembangan agama tersebut. Di samping itu, ketika perdagangan sudah mulai ramai, kapal-kapal yang pergi ke Asia Selatan dan Asia Timur atau sebaliknya, selalu melewati Selat Malaka dan singgah di kota-kota sekitarnya. Kaum pedagang itu pun dengan demikian ikut juga mengambil bagian dalam pengembangan bahasa Melayu karena sedikit ataupun banyak mereka berhubungan dengan penduduk asli kota-kota itu dan mengetahui bahasanya.

Pada abad ke-16 penyebaran bahasa Melayu sudah demikian luasnya. Ini dibuktikan oleh catatan yang dibuat oleh Pigafetta, seorang awak kapal pimpinan Magelhaenz. Dalam perjalanan menuju Indonesia melalui Amerika, kapal dari Eropa itu berlabuh di Maluku. Pigafetta membuat catatan tentang keadaan setempat. Di antara yang dicatat itu ialah bahasa yang dipergunakan oleh penduduk di tempat itu. Dari catatan itu kemudian diketahui bahwa bahasa yang dipergunakan oleh penduduk Maluku pada waktu itu tidak lain adalah bahasa Melayu juga. Kata-kata yang dicatat oleh Pigafetta itu mirip

benar, kalau tidak boleh dikatakan sama dengan kata-kata bahasa Indonesia yang sekarang. Dari catatan-catatan yang dibuat sesudahnya oleh orang-orang lain, kemudian juga diketahui bahwa bahasa Melayu memang penyebarannya sudah jauh dari daerah aslinya di sekitar selat Malaka. Bahasa itu sudah dikenal dan dipergunakan di kota-kota pantai di seluruh wilayah Indonesia, dan bahkan di beberapa kota di luar wilayah Indonesia dan Malaysia.

Kita ketahui bahwa bangsa Eropa yang mula-mula datang dan menjajah Indonesia adalah bangsa Portugis. Itu terjadi pada abad ke-16. Pada akhir abad itu datang pula bangsa Belanda dan sejak itu kedudukan Portugis di Indonesia makin terdesak oleh Belanda, sampai akhirnya tinggal sebagian dari sebuah pulau kecil (Timor) saja yang masih dijajah oleh Portugis. Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Indonesia.

Demikianlah, maka bahasa Melayu oleh pemerintah kolonial Belanda disahkan pemakaiannya sebagai bahasa penghubung di wilayah Indonesia yang waktu itu sebagai wilayah Hindia Belanda. Langkah itu diikuti dengan pembakuan. Ditentukan bahwa bahasa Melayu yang dianggap baku (standar) ialah bahasa Melayu yang dipergunakan di Kepulauan Riau, atau yang pada waktu itu dikenal dengan nama bahasa Melayu Tinggi. Jadi, kalau ada perbedaan antara kata-kata setempat, misalnya lain di Palembang lain pula di Banjarmasin, maka yang diambil adalah yang di kepulauan Riau itu.

Kecuali pembakuan dalam bentuk lisan, juga dan terutama, pembakuan dalam tulisan. Diketahui, karena bahasa Melayu sudah secara luas digunakan oleh masyarakat di berbagai tempat dan di pelbagai suku, tidak jarang terdapat perbedaan dalam tulisan dan ejaannya. Oleh pemerintah Belanda ditunjuk Ch. Van Ophuysen untuk menyusun dan membakukan ejaannya, dan karena sebelumnya bahasa Melayu sudah dituliskan dengan huruf Arab Melayu, Ch. Van Ophuysen tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Ia tinggal menggantikan huruf Arab Melayu itu dengan huruf Latin dan menambah huruf hidup yang dalam sistem ejaan dengan huruf Arab Melayu tidak ada. Hasil karya Ch. Van Ophuysen itu kemudian dinyatakan berlaku oleh pemerintah Belanda pada tahun 1901. Pada tahun 1947 pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ejaan yang berlaku untuk menuliskan bahasa Indonesia adalah Ejaan Republik Indonesia, bukan lagi ejaan Ch. Van Ophuysen. Ejaan itu sekarang dikenal dengan nama Ejaan RI atau ejaan Suwandi (pada waktu itu Mr. Suwandi adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang menandatangani surat keputusan yang meresmikan ejaan tersebut).

Kemudian ejaan Suwandi ini disempurnakan dengan Ejaan Baru (Yang Disempurnakan) yang dipergunakan juga di Malaysia. Dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia seperti dikemukakan di atas, menunjukkan adanya partisipasi agama di dalam perkembangan bahasa Melayu yang kemudian

menjadi bahasa Indonesia, baik dari segi percepatannya maupun dari luas daerah yang dijangkaunya.

Contoh-contoh di bawah ini merupakan beberapa bukti yang lebih kongkret.

- a. Tersebarinya kitab-kitab agama Islam semacam *Sabilah Muhtadin* karangan Syekh Arsyad Al-Banjari dan kitab *Sairus Salikin* karangan Abdus Samad Al-Palembani yang ditulis sekitar abad 18 telah dibaca oleh umat Islam Indonesia dan Malaysia. Kitab-kitab tersebut ditulis dalam bahasa Melayu huruf Arab, yang disebut *huruf Melayu* (di daerah-daerah yang berbahasa Melayu) atau *huruf Pegon* (di Jawa) dan *huruf Jawi* (di Malaysia).
- b. Juga Bible pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Abdullah bin Abdulkadir Munysi di Malaka. Tentulah paling kurang telah menjadi bacaan kalangan Kristen di Indonesia.
- c. Lahirnya organisasi-organisasi yang membawa aspirasi Islam, seperti Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama yang bersifat lokal, lewat kongres, brosur-brosur, khotbah dan ceramah telah pula secara intensif menyebarkan dan memasyarakatkan bahasa Melayu/Indonesia, semenjak sebelum kemerdekaan.
- d. Secara tidak langsung lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara yang sampai abad 16 pada umumnya berada di tangan orang-orang Islam, lewat hubungan dagang mereka juga telah ikut menyebarkan bahasa Melayu sehingga ketika orang-orang Portugis, Inggris, dan Belanda masuk ke Nusantara, mereka mendapatkan bahwa bahasa Melayu telah menjadi linguafranka di wilayah tersebut.
- e. Pada waktu ini sudah jelas pemakaian bahasa Indonesia dalam pembinaan agama baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga agama swasta dan perorangan (para juru dakwah, misionaris, pendeta, pedanda) semakin intensif dan meluas, baik dalam bentuk khotbah, ceramah di berbagai tempat dan lewat media massa TVRI maupun radio, maupun yang tertulis dalam berbagai media. Intensitas dan meluasnya pemakaian bahasa Indonesia dalam pembinaan kehidupan agama itu berjalan secepat dan seluruh pembangunan nasional sehingga tanpa disadari kadang-kadang terlibat dalam pemakaian yang dapat menyebabkan kerawanan dalam pergaulan antarumat beragama.
- f. Kenyataan menunjukkan bahwa cukup banyak "kata-kata agama" yang telah memperkaya kosa kata bahasa Indonesia, terutama bahasa Al-Quran di samping juga bahasa-bahasa kitab suci lainnya. Hanya penyesuaian kosa kata ini dengan ejaan bahasa Indonesia kadangkala menimbulkan berbagai kejanggalan, terutama di kalangan para pembina agama.

4. Beberapa Masalah tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Beragama

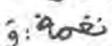
Sebagaimana disampaikan di muka bahasa merupakan sarana pokok dalam komunikasi antarmanusia. Bahasa itu akan sangat komunikatif bila antara penutur dan penerima terdapat kesepakatan dalam makna dan arti setiap kata yang dipakainya. Sebaliknya, perbedaan tanggapan, dan pemahaman terhadap makna arti kata-kata dari suatu ungkapan, sebagian apalagi seluruhnya, tentu akan mengakibatkan terjadinya salah komunikasi antara kedua belah pihak, yang dalam hal-hal tertentu mungkin dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif. Hal ini akan sangat terasa bila terjadi dalam kehidupan beragama, yang sering dianggap sebagai sesuatu yang "rawan". Di antara kata-kata yang masih perlu mendapatkan kesepakatan secara bulat dalam kehidupan antarumat beragama adalah penggunaan kata-kata tertentu, yang dapat disebut sebagai "kata-kata agama" atau lebih tepat "ragam bahasa fungsional agama" karena di samping berasal dari bahasa agama tertentu juga karena salah penggunaannya akan dapat mengakibatkan kerawanan. Masalah lain adalah transliterasi dari huruf asing ke huruf bahasa Indonesia, yang sebagiannya memang sukar untuk ditransliterasikan dengan tepat sehingga tak akan salah ucap lagi. Hal ini banyak terdapat dalam transliterasi dari huruf Arab.

Demikian besar pengaruh ragam bahasa fungsional agama dalam kehidupan agama di masyarakat sehingga pemakaiannya pun terikat oleh pengertian yang bercorak khusus dari ajaran suatu agama, bahkan kadangkala erat berkaitan dengan masalah akidah. Dalam hal demikian, dirasakan perlunya dikembangkan semacam kode etik dalam penggunaannya agar pemakaian kata-kata tertentu dari suatu agama tidak menimbulkan reaksi dari "pemilik" kata-kata tersebut. Hal itu demi pemantapan serta pelestarian kerukunan hidup antarumat beragama yang menjadi salah satu sasaran pembinaan kehidupan agama.

Di bawah ini kami sampaikan beberapa contoh guna memperjelas pernyataan tersebut.

- a. Sebagaimana telah disebutkan di atas cukup banyak kata-kata yang berasal dari "bahasa-bahasa agama" (bahasa asing yang erat berkaitan dengan agama) yang telah dijadikan kata-kata bahasa Indonesia dan ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia. Karena sudah secara umum dianggap menjadi bahasa Indonesia, secara bebas pula setiap orang, dari golongan agama apa pun, menggunakannya dalam kaitannya dengan kehidupan agama masing-masing. Ternyata dari pengalaman selama ini hal tersebut kadangkadangkang menimbulkan kegelisahan, atau setidaknya-tidaknya kekurangserasian hubungan dalam pergaulan antaragama. Misalnya, kita sering mendengar

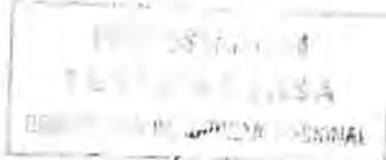
kata *almarhum* 'yang mendapat rahmat Allah' digunakan untuk menyebut seseorang yang telah meninggal dunia, tanpa pandang agama apa pun yang dipeluknya (bahkan pernah terjadi untuk menyebut tokoh PKI pun digunakan istilah tersebut). Hal ini ternyata telah menimbulkan rasa kurang wajar, di kalangan umat Islam, karena istilah tersebut erat kaitannya dengan masalah tauhid (teologi). Barangkali kata mendiang dapat menggantikannya untuk dipakai secara umum tanpa menimbulkan reaksi negatif. Begitu juga akhir-akhir ini kata-kata *zakat* dan *wakaf* telah pula digunakan untuk menunjuk perbuatan amal sosial bagi agama nonIslam, sedangkan kita tahu bahwa kata zakat adalah salah satu dari rukun Islam, fondamen pokok ajaran Islam. Senada dengan itu penggunaan kata *ulama* dan *ibadah*. Di kalangan umat Islam pun terdapat pendapat yang tidak setuju dengan penggunaan istilah *sembahyang* yang berasal dari *sembah* dan *hiyang* yang berasal dari agama Hindu dan lebih tepat menggunakan kata *shalat*.

- b. Memang peraturan perundangan yang melarang tidak ada, tetapi kiranya ada semacam rasa agama dalam beberapa kata-kata, atau sebagai makna subjektif dari kata-kata tersebut, di samping maknanya yang objektif, sehingga segolongan umat beragama "mengklaim kata-kata tertentu sebagai kata-kata agama yang hanya dapat digunakan oleh "pemiliknya". Oleh karena itu, penggunaan oleh sekelompok agama lain, tentulah akan menimbulkan ketidakserasian. Sebagai contoh kongkret adalah protes umat Islam yang pernah diajukan terhadap pemakaian kata *madrasah* untuk sekolah agama nonIslam karena dianggap akan membingungkan umat. Demikian juga umat Hindu di Bali pernah protes karena penggunaan kata *Pura Agung* sebagai nama dari salah satu rumah ibadah nonHindu. Tentunya hal yang sama akan terjadi pada umat beragama lainnya bila penggunaan kata-kata tertentu yang dianggap "monopoli" suatu agama tertentu dilakukan oleh pengikut agama lain.
- c. Masalah lain adalah masalah transliterasi. Menurut ejaan bahasa Indonesia yang diperbaharui kosakata asing yang telah diserap ke dalam perbendaharaan kosakata Indoensia ejaannya tidak didasarkan atas ejaan bahasa aslinya, tetapi disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Hal ini memang bermanfaat untuk menghindari salah ucap, misalnya kata *hadlirin* (حاديث) sering dibaca *had-lirin* oleh mereka yang tidak tahu bahasa Arab. Maka dengan menuliskannya menjadi *hadirin*, ucapannya akan lebih mendekati kata aslinya. Demikian juga kata *ridlo*, yang kemudian menjadi *rido* dan *rela*. Namun, ternyata kata *ni'mat* (ditulis dengan "Aoe" yang artinya bertentangan bila ditulis dengan *nikmat* (pakai ) *ni'mat* =

karunia, *nikmat* = kemurkaan).*)

Khusus mengenai ayat-ayat Al-Quran diperlukan ketentuan tersendiri dalam transliterasi ke huruf Latin, untuk menghindari salah baca, yang merupakan hal yang esensial bagi umat Islam. Demikian juga tentunya transliterasi dari huruf Sanskerta dan Pali bagi umat Hindu dan Budha. Khusus untuk transliterasi huruf Arab ke Indonesia, IAIN Jakarta pernah mengadakan seminar, juga Proyek Penerbitan Al-Quran Departemen Agama telah memberikan pedoman tulisan itu. Namun, sementara ini belum berlaku secara nasional, karena ternyata penerbit-penerbit kitab suci Al-Quran di Indonesia masih menggunakan transliterasi yang berbeda-beda.

*) Jarang nama Bapak Menteri Agama, Munawir Sjadzali, diucapkan dengan tepat yang dalam bahasa aslinya  , tetapi sering diucapkan Syadzali.



5. Kesimpulan dan Saran-saran

Sebagai penutup uraian ini kami sampaikan kesimpulan, saran-saran sebagai berikut.

Bahwa bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh Kepulauan Nusantara terdiri dari pelbagai suku dan keturunan dengan bahasa dan adat-istiadat yang beraneka ragam dengan adanya perbedaan agama yang dipeluk oleh masing-masing warga negara tidak menjadi penyebab perpecahan yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara, tetapi justru menjadi perekat bagi lima titik temu yang sudah ada, yaitu satu bangsa, satu bahasa, satu negara, satu ideologi, dan satu pemerintahan.

Secara langsung ataupun tidak agama telah ikut mengembangkan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan rasa keagamaan dan rasa kebangsaan setiap warga negara Indonesia, dan dalam menghadapi pelbagai variasi pengembangan dan penyempurnaannya bahasa Indonesia bertugas untuk menjembatani kemajemukan yang ada di kalangan pemakainya sehingga ragam kosakata yang berkaitan dengan ajaran pokok agama tertentu tidak menimbulkan komunikasi yang memang serasi di antara para pemeluk agama yang berbeda.

Sehubungan dengan hal itu, dan karena adanya ciri-ciri yang khas dalam kaitannya dengan ibadah dan keimanan, agama memerlukan beberapa kata atau "istilah" tersendiri yang merupakan ragam fungsional agama dan yang hanya berlaku bagi agama tertentu. Karena kata-kata atau istilah ini sangat akrab berkaitan dengan nilai-nilai keyakinan serta rasa keagamaan pada masing-masing pemeluk agama, pemakaian oleh agama lain akan menimbulkan kekurangserasian dalam pergaulan antarumat beragama. Untuk itu, diperlukan adanya pedoman atau konsensus antarumat beragama tentang penggunaan istilah-istilah yang khusus itu. (Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama pernah menjadwalkan masalah ini untuk dibicarakan bersama, tetapi sampai sekarang belum terlaksana).

Untuk membantu mempermudah membaca berbagai kitab suci diperlukan transliterasi ke huruf Latin (huruf bahasa Indonesia) dan untuk ini diperlukan adanya *Pedoman Standar* (Badan Litbang Agama dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama telah menjadikannya sebagai salah satu program kegiatan tahun 1983-1985).

Akhirnya untuk lebih memantapkan penanganan masalah-masalah tersebut di atas kami kira perlu ada kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Badan Litbang Agama serta Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.

Demikian sekedar sumbangan pada kongres yang penting ini semoga ada manfaatnya.

PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA DI DALAM DUNIA PENERANGAN DI INDONESIA

Harmoko

Menteri Penerangan

Pendahuluan

Terlebih dahulu saya menyampaikan kegembiraan dan penghargaan atas terselenggaranya Kongres Bahasa Indonesia IV yang merupakan suatu rangkaian usaha pembangunan bahasa Indonesia sehingga makin dapat meningkatkan peranannya di dalam ruang lingkup pembangunan nasional.

Tujuan kongres ini adalah memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi pemerintahan, sarana pengembangan kebudayaan, sarana pendidikan dan pengajaran, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Untuk mencapai tujuan itu masalah bahasa dan sastra Indonesia akan dibahas dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan nasional serta ditinjau pula dari segi komunikasi massa dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi modern.

Kongres Bahasa Indonesia IV bertemakan "Dengan bahasa Indonesia sebagai sarana, kita sukseskan Pembangunan Nasional". Hal ini jelas menggambarkan betapa erat hubungan bahasa Indonesia dengan kesinambungan pembangunan yang kita laksanakan sekarang ini.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 khususnya pada butir yang menyangkut kebudayaan antara lain mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar. Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu sarana identitas nasional.

Bertolak dari tujuan dan tema kongres serta berlandaskan amanat TAP MPR tersebut, dalam kesempatan ini saya ingin mengajukan suatu kertas kerja dengan judul "Pengembangan Bahasa Indonesia di dalam Dunia Penerangan di Indonesia". Dengan judul tersebut saya ingin mengemukakan pelbagai upaya yang dilakukan oleh jajaran penerangan dalam usaha pengembangan bahasa Indonesia dan dalam rangka penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi melalui berbagai media komunikasi.

Saya menyadari bahwa walaupun kesadaran umum untuk memajukan bahasa Indonesia cukup besar, kendala-kendala juga masih kita jumpai. Mengingat bahwa bahasa merupakan cermin kehidupan dalam proses pergaulan yang dinamis, perkembangan bahasa mengandung dinamika yang arah dan kecenderungannya memerlukan perhatian. Demikian pula dengan bahasa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang sebagai sarana komunikasi maupun selaku salah satu perwujudan tingkat kehidupan budaya bangsa, bahasa Indonesia tidak jarang menghadapi hambatan, di samping dorongan-dorongan yang mendukung pertumbuhannya.

Hambatan-hambatan tersebut acapkali tidak disadari karena di dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari kealpaan-kealpaan dapat timbul tanpa menyebabkan terganggunya arus komunikasi meskipun bila dipandang dari sudut bahasa sebenarnya telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang cukup berarti.

Sesuai dengan bidang kehidupan yang saya alami, yaitu bidang komunikasi dan penerangan, yang akan saya bicarakan di sini adalah masalah bahasa Indonesia dengan titik berat pada fungsinya sebagai sarana komunikasi.

Dalam kertas kerja saya yang berjudul "Pengembangan Bahasa Indonesia di dalam Dunia Penerangan di Indonesia" saya mencoba menguraikan dan menyajikan pengamatan-pengamatan sekilas yang mengandung beberapa masalah yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari para ahli bahasa.

Jajaran penerangan yang bertugas melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi untuk menyebarkan sesuatu ide kepada masyarakat luas, sekaligus merupakan unsur yang ikut menciptakan kebudayaan, menumbuhkan bahasa dan bertanggung jawab terhadap maju atau mundurnya bahasa Indonesia.

Izinkanlah saya di dalam kertas kerja ini mengemukakan beberapa hal mengenai:

- a. bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi;
- b. penggunaan dan pengembangan bahasa Indonesia oleh berbagai media komunikasi dan permasalahannya;
- c. sumbangan jajaran penerangan dalam pengembangan bahasa Indonesia;

- d. kesimpulan dan himbauan yang berkaitan dengan pengembangan bahasa Indonesia dalam komunikasi dan untuk menjadi pemikiran kita semua, khususnya dalam kerangka kegiatan Kongres Bahasa Indonesia.

1. Bahasa Indonesia sebagai Sarana Komunikasi

Bahasa Indonesia, sebagai salah satu perwujudan budaya bangsa, mempunyai sejarah perkembangan yang unik, bahasa Indonesia lahir jauh mendahului kemerdekaan kita. Pada tanggal 28 Oktober 1928 di dalam rapat perkumpulan berbagai organisasi pemuda, telah dicetuskan sikap politik yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia merupakan salah satu butir pernyataan yang erat hubungannya dengan persatuan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia.

Setelah itu bahasa Indonesia tumbuh sebagai bahasa perjuangan politik kebangsaan, Bahasa Indonesia telah digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi di antara para perintis kemerdekaan, dan sebagai upaya untuk meletakkan dasar kesadaran bersama terhadap nilai penting persatuan dan kesatuan.

Pada saat sekarang ini apabila kita merenungkan kembali ke masa lampau, kita dapat membayangkan betapa beratnya perjuangan bahasa Indonesia, baik sebagai cerminan kehidupan budaya maupun sebagai sarana komunikasi sosial.

Bahasa Indonesia, sebagai cerminan budaya, harus berhadapan dengan keadaan bahwa bahasa-bahasa daerah telah tumbuh dengan akar yang kuat di pelbagai suku bangsa dan hidup di dalam proses komunikasi sehari-hari di kalangan masyarakat luas, terutama di kalangan masyarakat umum.

Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi massa, pada waktu itu belum memiliki bentuk yang kokoh seperti sekarang, harus pula berdampingan dengan bahasa-bahasa asing.

Dari segi bahasa, masa penjajahan Jepang di Indonesia mempunyai arti yang cukup penting, terutama di dalam hal memajukan bahasa Indonesia.

Penghapusan penggunaan bahasa Belanda telah mempercepat pemakaian bahasa Indonesia terutama di kalangan atas. Para cendekiawan kita yang memiliki kesadaran nasional tidak pula menyalakan kesempatan untuk memperkokoh dan memperluas perkembangan bahasa Indonesia. Anjuran tugas untuk menggunakan bahasa Indonesia di kantor-kantor merupakan salah satu faktor penting mempercepat pengembangan pemakaian bahasa Indonesia di kalangan resmi atau di kalangan atas masyarakat. Tidak jarang pada waktu itu kita mendengar orang-orang terpelajar yang menguasai berbagai bahasa asing dan bahasa daerah sebagai "bahasa ibu" giat belajar bahasa Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tonggak sejarah amat penting bagi bahasa Indonesia karena dengan tegas bangsa Indonesia telah mencantumkan bahwa "bahasa negara adalah bahasa Indonesia" (UUD 1945 Bab XV, Pasal 36). Oleh sebab itu, bahasa Indonesia dengan kokoh telah mempunyai landasan konstitusional sehingga pengembangan bahasa Indonesia menjadi sangat luas sejalan dengan pengembangan budaya bangsa Indonesia.

Saya teringat kepada Seminar Politik Bahasa Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1975, yang antara lain merumuskan dengan jelas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Kemudian menjelaskan juga kedudukan bahasa-bahasa daerah sebagai pendukung pengembangan bahasa nasional.

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai

- a. lambang kebanggaan nasional;
- b. lambang identitas nasional;
- c. alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya;
- d. alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah.

Di dalam fungsi bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara, berfungsi sebagai

- a. bahasa resmi kenegaraan;
- b. bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan;
- c. bahasa resmi di dalam hubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan;
- d. bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.

Sedangkan bahasa-bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa tetap dipelihara dengan fungsi pokok pengembangan budaya daerah yang memperkaya kebudayaan nasional.

Dengan fungsi-fungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, saya melihat bahasa Indonesia dari sudut pandangan komunikasi sosial, yang fungsi-fungsi tersebut dikembangkan melalui hubungan antarmanusia dengan jalan saling berkomunikasi, saling berbicara, dengan demikian saling menggunakan bahasa bagi pembinaan kesatuan pendapat, dalam memecahkan berbagai permasalahan dan menentukan pemikiran-pemikiran serta pandangan-pandangan yang positif.

Komunikasi sosial dalam pengertian umum berarti suatu proses hubungan antarmanusia untuk memperlancar kebersamaan di dalam kehidupan. Komunikasi sosial dilakukan orang dengan menggunakan lambang-lambang yang paling sempurna di dalam proses komunikasi, yaitu bahasa karena bahasa mampu melambangkan benda-benda kongkret, pikiran dan perasaan

yang merupakan suatu hal bersifat abstrak.

Karena saling bertukar lambang-lambang melalui bahasa, terjadi proses komunikasi. Proses komunikasi berisi pembicaraan yang terus-menerus sehingga membawa masyarakat kepada taraf hidup budaya tertentu.

Komunikasi sosial dalam pengertian terbatas dikaitkan dengan kegiatan memberi dan menerima penerangan, yang dewasa ini kita lakukan, pengertiannya sama dengan komunikasi sosial secara umum. Proses komunikasi di dalam kegiatan penerangan juga tetap memberikan fungsi yang penting terhadap komunikasi timbal balik. Namun, kegiatan penerangan sering dianggap sebagai suatu kegiatan komunikasi searah, tentu saja hal ini tidak benar.

Masyarakat Indonesia juga telah sungguh-sungguh mendayagunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Secara timbal balik bahasa Indonesia telah mampu dipergunakan sebagai sarana komunikasi antarwarga negara Indonesia. Sebaliknya, proses komunikasi sendiri juga ikut memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa nasional dan akan terus berkembang sebagai bahasa ilmu pengetahuan.

Dalam hal kesempurnaan bahasa Indonesia di dalam mendukung fungsinya sebagai sarana komunikasi, masalah yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan bahasa tertulis. Tampaknya pembakuan bahasa Indonesia memang dengan penuh tanggung jawab telah kita laksanakan, demikian juga dalam media massa, tetapi masih perlu ditingkatkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Penggunaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia oleh Berbagai Media Komunikasi dan Permasalahannya

Penggunaan bahasa Indonesia di tanah air sebagai sarana komunikasi sosial, setelah memasuki zaman kemerdekaan selama lebih dari 38 tahun, menunjukkan tingkat kemajuan yang semakin baik.

Komunikasi antarwarga negara Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa dan dari wilayah berjauhan serta yang memiliki bahasa daerah beraneka ragam, selama ini tidak tampak dijumpai hambatan. Dengan demikian, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar hubungan sosial telah cukup mampu menjadi sarana.

Bahasa Indonesia, sejak tahun 1945, dinyatakan sebagai bahasa negara senantiasa diperhatikan pembinaan dan penyempurnaannya, terutama di dalam usaha pembakuan-pembakuan tata bahasa, ejaan ataupun istilah. Sementara itu, media komunikasi massa sangat besar dukungannya dalam melaksanakan garis-garis pembakuan yang dihasilkan oleh para ahli bahasa kita di setiap tahapan.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam media komunikasi menunjukkan

kemajuan dan pengembangan sangat pesat. Pada beberapa media komunikasi massa dapat disebut secara singkat sebagai berikut.

a. Media Pers

Pers nasional yang terbit di Indonesia dewasa ini terdapat 273 penerbitan, terdiri dari surat kabar harian, berkala, majalah serta buletin. Dari jumlah penerbitan pers tersebut kira-kira 4,40% terbit dalam bahasa daerah.

Penerbitan pers Indonesia pada umumnya secara kualitatif telah berusaha menggunakan pembakuan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pemberitaan, ulasan, tajuk rencana dan karangan umumnya telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik. "Pojok" sebagai keistimewaan pers Indonesia, yang semula sering diisi dengan gaya bahasa dialek daerah, sekarang umumnya telah menggunakan bahasa Indonesia, tetapi karena pers mempunyai ruangan terbatas, kepala berita untuk menarik perhatian, dilihat dari sudut bahasa ada beberapa yang kurang sesuai dengan pembakuan umum. Cara penyusunan kepala berita merupakan ciri khusus bagi surat kabar.

Gaya bahasa dalam pers memerlukan syarat dayaguna dan hasilguna tinggi, yang memerlukan susunan yang singkat, padat, dan jelas.

Pers Indonesia sebagai media komunikasi massa menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana, juga ikut mendukung pengembangan dalam arti penyempurnaan bahasa Indonesia, yaitu dengan memuat ulasan ataupun menyediakan ruang pembinaan bahasa Indonesia sebagai upaya untuk menyebarluaskan pembakuan yang telah disepakati bersama oleh para ahli di samping sebagai usulan-usulan yang perlu diperhatikan oleh para ahli bahasa. Menurut pengamatan saya, sedemikian jauh tidak terdapat kecenderungan pers nasional kita yang dapat merugikan pertumbuhan bahasa Indonesia, bahkan sebaliknya pers Indonesia senantiasa menjadi pendukung bagi penyearluasan usaha penyempurnaan bahasa.

b. Media Radio

Radio Republik Indonesia dengan 49 buah stasiun di seluruh Indonesia menyelenggarakan siaran menyebarluaskan kebijaksanaan pembangunan nasional dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar.

Komunikasi dengan sarana bahasa Indonesia cukup dimengerti secara luas oleh seluruh masyarakat. Namun, karena tujuan penerangan adalah agar isi penerangan dapat dipahami oleh masyarakat luas, RRI masih menyediakan penyiaran berita dalam bahasa daerah. Dari 49 stasiun RRI, 41% menyiarkan warta berita dengan bahasa daerah di samping menggunakan bahasa Indonesia karena waktu penyiaran terbatas, yaitu antara 10 hingga 15 menit setiap hari.

Siaran pedesaan dan siaran-siaran lokal masih menggunakan bahasa

daerah, baik sebagian maupun keseluruhannya, atau menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek daerah karena siaran-siaran ini ditujukan untuk masyarakat yang setiap harinya menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Bahasa Indonesia yang baik harus digunakan di dalam siaran RRI sehingga dapat dijadikan patokan oleh media massa lainnya.

Radio non-RRI yang jumlahnya lebih dari 560 buah stasiun lokal dan tersebar di seluruh Indonesia, dalam siarannya masih ada yang menggunakan bahasa Indonesia yang kurang sempurna.

Di dalam pengantar siaran sering digunakan bahasa percakapan sehari-hari yang kurang mengindahkan pembakuan. Untuk mengatasi hal tersebut, di setiap wilayah telah kita adakan Badan Pembina Siaran Nonpemerintah, secara fungsional melakukan pembinaan dan pembinaan agar mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik.

c. Media Televisi

Televisi merupakan media komunikasi massa muda usia, memiliki sifat-sifat khusus sebagai media yang cepat dapat langsung didengar dan dilihat.

Pengelolaan televisi di Indonesia hanya diselenggarakan oleh pemerintah, maka sejak semula penggunaan bahasa selalu diusahakan agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siaran televisi Indonesia sangat berjasa dalam menyebarluaskan bahasa persatuan guna mengembangkan jiwa kesatuan yang lebih kokoh. TVRI sebagai sarana komunikasi juga berfungsi mengadakan pembinaan bahasa karena di dalam siaran TVRI diadakan terus-menerus acara pembinaan bahasa Indonesia. Siaran televisi yang menggunakan bahasa daerah semata-mata hanya suatu pelengkap untuk mencerminkan kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Penggunaan bahasa Indonesia, di dalam siaran Televisi Republik Indonesia semakin ditingkatkan sehingga seni budaya daerah yang disajikan dengan menggunakan bahasa nasional dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

d. Media Film

Film Indonesia dewasa ini pada umumnya telah menggunakan bahasa yang cukup baik. Film Indonesia terutama yang bertema hiburan, yang hanya ingin memancing tertawa para penonton, seringkali menggunakan bahasa kurang baik, bila dilihat dari tata bahasanya tetapi dari segi komunikasi memenuhi syarat karena mudah dimengerti. Permasalahan ini juga dialami media-media lain.

Dari beberapa penyorotan tentang penggunaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam media komunikasi, dapat disimpulkan bahwa media

komunikasi telah menggunakan bahasa Indonesia yang cukup mendorong bagi terbinanya bahasa Indonesia dengan baik.

Media komunikasi cukup sadar tidak ingin menciptakan penyimpangan bahasa Indonesia yang mendasar dan tidak terdapat kecenderungan media massa untuk tidak menggunakan kaidah bahasa yang baku, bahkan sekarang ini tidak ada media massa mengembangkan bahasa "Indonesia pasar" seperti halnya di masa lampau.

Bagaimana kita mengembangkan pertumbuhan bahasa Indonesia selaku produk kebudayaan dan pendukung proses komunikasi sosial adalah masalah kita bersama. Para ahli bahasa perlu mempererat hubungan dan dukungan timbal balik dengan dunia komunikasi sosial sehingga setiap penyempurnaan bahasa Indonesia akan segera tersebar luas dalam masyarakat.

Saya juga perlu menjelaskan peranan bahasa dalam komunikasi langsung antarpribadi. Di dalam proses komunikasi langsung, pada umumnya kita telah mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Kata-kata yang berasal dari bahasa asing biasanya digunakan jika memang belum terdapat padanan dalam bahasa Indonesia yang tepat. Apabila terdapat sedikit penyimpangan terutama di dalam pengucapan lisan, kemungkinan disebabkan oleh suatu kebiasaan yang memang sukar untuk diubah, tetapi hal tersebut bukan merupakan suatu penyimpangan yang mendasar. Dibandingkan dengan lima, sepuluh atau lima belas tahun lalu, penggunaan bahasa asing yang kurang perlu dewasa ini pemakaiannya sudah berkurang. Satu hal yang ingin saya kemukakan ialah mengenai makin banyaknya penggunaan bahasa-bahasa singkatan atau akronim.

Di dalam proses komunikasi, baik lisan maupun tertulis penggunaan akronim tampak semakin banyak di kalangan kita. Dari segi komunikasi, penggunaan bahasa akronim dapat menolong memudahkan penyebutan terhadap pengertian tertentu. Akan tetapi, di samping itu dirasakan bahwa komunikasi menjadi terhambat karena adanya suatu akronim sehingga isi komunikasi menjadi terputus.

Pada umumnya menurut pandangan saya penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi telah mengalami kemajuan sejalan dengan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri.

Dalam perkembangan pembinaan bahasa Indonesia dewasa ini saya melihat bahwa para ahli bahasa demikian tekun berupaya untuk lebih penyempurnaan bahasa Indonesia sesuai dengan disiplin ilmiah, sedangkan masyarakat pemakai bahasa Indonesia juga telah menunjukkan niat baik untuk menggunakannya secara benar. Walaupun demikian, kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan lain karena bahasa merupakan hasil proses budaya bangsa yang senantiasa berkembang.

3. Sumbangan Jajaran Penerangan dalam Pengembangan Bahasa Indonesia

Peranan Departemen Penerangan dan jajaran penerangan dalam pengembangan bahasa Indonesia, didasarkan atas fungsi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 55A/KEP/MENPEN/1975 yang meliputi 4 fungsi utama yaitu:

1. memantapkan pembinaan kesatuan, persatuan, dan jiwa bangsa;
2. mensukseskan pembangunan nasional melalui Repelita;
3. menggalang ketahanan nasional bagi terwujudnya stabilitas nasional;
4. tugas-tugas khusus yang beruang lingkup nasional.

Dalam hubungan dengan fungsi pertama, yaitu memantapkan pembinaan kesatuan, persatuan, dan jiwa bangsa, UUD 1945 telah menggariskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang rakyatnya terdiri dari sejumlah suku bangsa, adat-istiadat dengan tradisi kehidupannya masing-masing, hidup dalam semangat kesatuan dan persatuan sebagai satu bangsa.

Pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia harus mencakup manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai semangat persatuan sebagai satu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang dilaksanakan pada hakikatnya adalah pembangunan semangat atau sikap kejiwaan manusia Indonesia seutuhnya dengan tata nilai berdasarkan Pancasila. Membangun sikap kejiwaan berdasarkan Pancasila adalah membangun budaya nasional dengan dukungan unsur-unsur budaya daerah dalam perwujudan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam hubungan kebijaksanaan tersebut, khususnya dalam pengembangan bahasa Indonesia untuk mewujudkan persatuan, kesatuan, dan jiwa bangsa, Departemen Penerangan melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut.

a. Kebijaksanaan ke dalam.

Kebijaksanaan ini mengharuskan setiap pejabat Departemen Penerangan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam surat-menyurat maupun dalam komunikasi lisan. Kebijaksanaan ini terus diterapkan sampai kepada aparat terbawah yang melaksanakan operasional penerangan di dalam masyarakat.

b. Penerbitan Khusus Untuk Daerah Pedesaan (PKUDP) yang dilaksanakan pada awal Pelita II, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, mempunyai tujuan antara lain membantu pemberantasan buta huruf gaya baru, yaitu buta huruf Latin, *buta bahasa Indonesia*, buta pengetahuan dasar dan buta informasi.

PKUDP ini selanjutnya ditingkatkan menjadi Program Koran Masuk Desa (KMD) yang diatur dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 203A/KEP/MENPEN/1979. Dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan

Nomor 203A/KEP/MENPEN/1979 tersebut secara tegas dinyatakan bahwa salah satu tujuan KMD adalah "Pemerataan memperoleh pendidikan, dalam hal ini pendidikan nonformal melalui media pers sebagai sarana pendidikan umum yang murah dan efektif".

- c. Dalam setiap pendidikan yang dilaksanakan Departemen Penerangan, baik pendidikan jenjang maupun teknis/khusus, pada kurikulumnya selalu dicantumkan pelajaran Bahasa Indonesia dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat pusat dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ditingkat wilayah.
- d. Setiap tahun Departemen Penerangan bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan festival pertunjukan tradisional (sosiodrama) dalam rangka pembinaan kesenian rakyat yang komunikatif. Salah satu persyaratan bagi peserta adalah bahwa naskah dan dialog harus menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar pertunjukan rakyat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat lebih memasyarakatkan secara nasional sehingga setiap suku bangsa di Indonesia mengetahui dan menghayati kebudayaan suku bangsa lainnya.
- e. Dalam kaitan izin produksi film, Direktorat Bina Film Departemen Penerangan selalu memberikan pengarahan kepada produser agar di dalam memproduksi film senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- f. Menyadari bahwa komunikasi merupakan bidang yang sangat penting di dalam kehidupan, maka peranan komunikasi itu menjadi lebih penting lagi di tengah usaha bangsa kita dalam pembangunan nasional dewasa ini.

Bersamaan dengan peningkatan komunikasi dalam kehidupan kita, ilmu dan praktik komunikasi juga berkembang terus selaras dengan usaha peningkatan kesadaran orang akan pentingnya bidang itu. Salah satu sektor yang menjamin terus perkembangan dan pematapan komunikasi ialah bidang tata istilah. Walaupun bahasa Indonesia sudah dipakai dalam berbagai bidang kehidupan dan cabang ilmu pengetahuan selama lebih kurang setengah abad, dalam bidang ilmu dan praktik komunikasi tata istilah belum dikembangkan secara sistematis. Di bidang ini penggunaan istilah didasarkan semata-mata pada pertimbangan "bagaimana praktisnya saja" dan orang menggunakan istilah yang beraneka ragam untuk mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat tertentu dalam bidang komunikasi. Di samping itu, kebiasaan mempergunakan bahasa asing pun masih ada. Pemakaian dan penggunaan aneka istilah dapat mengungkapkan hal-hal yang berbeda; dengan kata lain belum ada pembakuan istilah di bidang komunikasi dalam bahasa Indonesia yang

disertai dengan penjelasan makna atau arti istilahnya. Keadaan demikian ini menimbulkan berbagai macam kesulitan, kepincangan, kesalahpahaman, baik bagi ilmuwan maupun bagi praktisi dalam melakukan tugasnya.

Pengembangan komunikasi di negara kita dapat dipisahkan dari perkembangan bahasa nasional, sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat bangsa yang merdeka. Dilandasi keyakinan bahwa ilmu dan praktik komunikasi dapat dimantapkan serta dikembangkan Departemen Penerangan mengambil prakarsa menyusun sebuah leksikon (daftar istilah kamus sederhana) sebagai usaha untuk membakukan peristilahan, yang dapat dijadikan pegangan bagi praktisi dan ilmuwan di bidang komunikasi.

Berdasarkan pendirian tersebut Departemen Penerangan menjalin kerja sama dengan Lembaga Linguistik Fakultas Sastra Universitas Indonesia untuk inventarisasi dan menyusun perangkat istilah komunikasi lengkap dengan padanannya serta deskripsinya dalam bahasa asing. Kegiatan pengembangan ini telah dilakukan beberapa lama melalui tahap-tahap sebagai berikut.

- a) Tahun 1977: Penyusunan leksikon komunikasi edisi pertama.
- b) Tahun 1979: Edisi kedua dengan perbaikan dan penyempurnaan.
- c) Tahun 1981: Kedua edisi tersebut diketengahkan dalam suatu lokakarya ke-1 yang menghasilkan edisi III.
- d) Edisi III ini menjadi bahan pengkajian tim perumus yang terdiri dari kelompok-kelompok umum, pers, grafika, radio-televisi, dan film.
- e) Hasil pekerjaan tim perumus dimaksud disajikan dalam Lokakarya II tahun 1982.
- f) Perbaikan, penyempurnaan dan penambahan oleh peserta lokakarya ditampung dan disunting oleh suatu panitia pengelola.

Hasil akhir hingga saat ini telah tersusun sekitar 1500 istilah komunikasi yang meliputi bidang-bidang umum, pers, grafika, radio-televisi, dan film.

Tindak lanjut yang digariskan Lokakarya II dan perlu dilaksanakan sekarang adalah mengadakan uji coba sebelum istilah-istilah dalam Leksikon Komunikasi tersebut disebarluaskan kepada masyarakat. Pada kesempatan Kongres Bahasa ini dengan senang hati saya menyerahkan hasil sementara penyusunan Leksikon Komunikasi Indonesia kepada para ahli bahasa untuk mendapat telaahan agar lebih mantap sebelum disebarluaskan kepada masyarakat.

4. Penutup

Saya perlu menggarisbawahi pada penutup uraian ini agar kita bersama-sama senantiasa meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bertanggung jawab.

Demikian pula halnya dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi sosial, marilah kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik

dan benar, serta mencegah penyimpangan pemakaian bahasa yang tidak perlu. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengandung dinamika tinggi; oleh karena itu, kita berkewajiban menjaga agar dinamika itu tetap bergerak di dalam ruang lingkup pembakuan yang sebenarnya. Ini tidak berarti kita harus melakukan pengekangan, yang perlu dilakukan ialah pengembangan bahasa dalam kerangka pemikiran pembangunan budaya nasional.

Di bidang komunikasi, saya mengharapkan agar para ahli bahasa dapat membuat bahasa Indonesia untuk menampung perkembangan dan kebutuhan, hal tersebut perlu diungkapkan karena dewasa ini di dunia komunikasi telah terjadi perkembangan dan kemajuan yang cepat akibat penemuan teknologi-teknologi baru sehingga dalam kita memberikan komunikasi dan penerangan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, tepat dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Saya percaya, para ahli bahasa telah siap dengan konsepsi-konsepsi pengembangan bahasa Indonesia yang akan dibahas di dalam Kongres Bahasa ke IV sekarang ini, sejalan dengan derap pembangunan nasional yang semakin cepat kemajuannya. Di bidang pengembangan bahasa senantiasa berpangkal tolak dari strategi pembangunan nasional, yaitu, bahwa pada Pelita IV nanti kita akan meletakkan landasan pembangunan yang kokoh, dalam rangka memantapkan Pelita V sehingga pada Pelita VI dapat mencapai momentum pengembangan bahasa dengan landasan yang makin kokoh.

Saya menilai pola pikir strategi pembangunan nasional telah menjwai pemikiran para ahli bahasa yang terus sibuk mengadakan usaha penyempurnaan. Hal ini berarti pula melakukan pembangunan, karenanya pengembangan bahasa Indonesia, dalam kita mengisi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 senantiasa menjadi perhatian kita bersama.

Akhirnya saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga Kongres Bahasa Indonesia IV dapat mencapai hasil yang diharapkan demi peningkatan kemajuan nusa, bangsa dan negara.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI LINGKUNGAN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI, DAN DI DALAM LALU LINTAS KEGIATAN KEDINASAN SEHARI-HARI

Achmad Tahir

Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi

Pendahuluan

Pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada departemen kami Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dapat menyampaikan sebuah kertas kerja pada Kongres Bahasa Indonesia IV ini.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (selanjutnya kami singkat PPPB) selaku penyelenggara kongres ini membatasi permasalahan yang hendak kami kemukakan pada hal-hal yang berkaitan erat dengan tugas kami sehari-hari di departemen. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang hendak kami bahas dalam dua bagian. Pertama, penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan pariwisata, pos dan telekomunikasi. Kedua, Penggunaan bahasa Indonesia dalam lalu lintas kegiatan sehari-hari.

Permasalahan yang dibahas dikaitkan dengan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan umum.

Agar kertas kerja ini lebih sederhana dan lebih mudah diikuti, maka pendapat dan saran kami mengenai permasalahan yang dikemukakan langsung kami sertakan sebagai bagian atau mengikuti pembahasan. Mengingat panjang halaman yang ditentukan panitia bagi kertas kerja ini hanya sekitar 20 halaman, pembahasan kami tujukan kepada hal-hal yang kami pandang penting untuk diketengahkan. Intisari pembahasan dan saran-saran kami sajikan dalam bab Kesimpulan.

1. Penggunaan Bahasa Indonesia di Lingkungan Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

a. Pariwisata

a) Sebutan-sebutan di Lingkungan Kepariwisataan dan Gejala Penyingkatan

Sebutan *pariwisata* sebagai sebutan *tourism* dalam bahasa Inggris bersumber dari *tiga bahasa*, yakni Sansekerta, Kawi, dan Jawa. Dalam bahasa Sansekerta, *pari* adalah suatu awalan yang berarti 'di sekitar, dari semua penjuru, dalam segala hal', sedangkan *wisata* berasal dari bahasa Kawi, berarti 'pergi'. Ahli-ahli bahasa kita seperti Amin Singgih dan J.S. Badudu sepakat mengartikan pariwisata sebagai 'pergi berkeliling'.

Pada waktu akhir-akhir ini banyak muncul gabungan kata dalam bahasa Indonesia dengan kata pertama wisata sebagai padanan dari sebutan-sebutan dalam bahasa Inggris:

<i>merine</i>	— wisata bahari
<i>religion tourism</i>	— wisata ibadah
<i>hunting tourism</i>	— wisata buru
<i>cultural tourism</i>	— wisata budaya
<i>youth tourism</i>	— wisata remaja
<i>touris product</i>	— produk wisata
<i>tourism destination area</i>	— daerah tujuan wisata

Jadi segala sebutan *tourism* dan *tourist* dalam bahasa Inggris dialihkan menjadi *wisata* dalam bahasa Indonesia. *Bahari*, *ibadah*, *berburu*, dan *budaya* adalah objek yang dilihat atau dituju oleh para wisatawan.

Tapi *remaja* dan *domestik* dalam pengertian di atas bukan objek yang dilihat atau dituju, tapi jenis wisatawan yang melakukannya. Oleh karena itu, sebutan yang tepat kami kira adalah *wisatawan remaja* (bukan *wisata remaja*) dan *wisatawan domestik* (bukan *wisata domestik*). Demikian juga padanan yang tepat untuk *tourist destination area* adalah *daerah tujuan wisatawan*, bukan *daerah tujuan wisata*.

Mengingat terjemahan *tourism* adalah *pariwisata*, maka sebutan nama-nama yang lain itu seharusnya adalah: *pariwisata bahari*, *pariwisata ibadah*, *pariwisata buru*, dan *pariwisata budaya*. Masalahnya sekarang samakah pengertian *pariwisata* dengan *wisata*?

Kecenderungan memperpendek kata-kata tertentu merupakan salah satu gejala yang terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari sekarang ini.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Pariwisata ada direktorat yang diberi nama *Direktorat Bina Perjalanan Wisata*, *Direktorat Bina Akomodasi dan Aneka Wisata*.

Demikian pula di beberapa departemen lain digunakan sebutan bina, seperti *Direktur Bina Sarana Usaha*, *Direktur Bina Produksi*, *Direktur Bina Kewiraswastaan*. Namun di berbagai departemen lain, sebutan yang digunakan bukan bina tapi *pembinaan* seperti: *Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat*, *Direktur Pembinaan Kesenian*, *Direktur Pembinaan Kesiswaan*.

Ada pula departemen yang selain menggunakan sebutan bina, juga menggunakan sebutan *pembinaan*.

Di Departemen Penerangan, selain ada *Direktur Pembinaan Hubungan Masyarakat*, ada pula *Direktur Bina Wartawan*. Departemen Tenaga Kerja mempunyai Direktorat Jenderal yang menggunakan sebutan *bina*, yakni *Direktorat Jenderal Binalindung Tenaga Kerja* dan *Direktorat Jenderal Binaguna*. Akan tetapi, direktorat-direktorat yang berada di bawahnya menggunakan sebutan *pembinaan*, seperti *Direktorat Pembinaan Hubungan Ketenagakerjaan*, *Direktur Pembinaan Norma Perlindungan Tenaga Kerja*, *Direktur Pembinaan Program Tenaga Kerja*, *Direktur Pembinaan Keahlian Kejuruan Tenaga Kerja*. Ini mengesankan seolah-olah pengertian *bina* lebih umum dari *pembinaan*.

Tampak bahwa di lingkungan pemerintahan sendiri tidak ada keseragaman penggunaan sebutan. Hal ini hendaknya dapat ditertibkan karena sebutan yang berbeda-beda tersebut membingungkan para pecinta bahasa Indonesia dan juga orang-orang asing yang tengah mempelajari bahasa Indonesia.

Menurut pendapat kami sebutan yang tepat pada nama-nama jabatan tersebut adalah *pembinaan*, bukan *bina*. Ada kecenderungan menyederhanakan sebutan *pembinaan* menjadi *bina* (seperti juga pariwisata menjadi wisata) adalah karena hal-hal berikut.

- (a) Terpengaruh oleh bahasa pers yang cenderung mengembalikan kata imbuhan kepada kata dasarnya terutama pada judul-judul berita (di-sebabkan terbatasnya kolom halaman yang tersedia).
- (b) Terpengaruh oleh kecenderungan penyingkatan kata-kata yang tengah berjangkit sekarang seperti:

informasi	→	info
memorandum	→	memo
lokomotif	→	lok
helikopter	→	heli
- (c) Terpengaruh oleh keinginan untuk memilih sebutan yang enak dan praktis (*euphony*).
- (d) ikut-ikutan.

Kantor Menteri Negara Pendayagunaan (dulu Penertiban) Aparatur Negara (Menpan) selaku lembaga kenegaraan yang menangani hal-hal yang

berkaitan dengan struktur dan organisasi departemen tidak pula menyaring sebutan-sebutan tersebut menurut pengertian bahasa Indonesia yang benar.

b) Penggunaan Kata-kata Asing

Sebutan-sebutan dalam bahasa asing banyak digunakan di lingkungan perhotelan, terutama hotel-hotel berbintang. Malahan nama-nama petugas dan bagian-bagian yang ada di dalam hotel menggunakan sebutan-sebutan bahasa Inggris, seperti *manager, room boy, bell boy, servant, receptionist, front office, house keeping, breakfast, laundry, room rate, service charge, lavatory, bill, lobby*.

Sebutan-sebutan asing ini juga banyak digunakan di lingkungan biro-biro perjalanan. Penggunaan sebutan-sebutan asing ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada wisatawan-wisatawan asing untuk berkomunikasi. Akan tetapi, seperti sering dikemukakan di media massa, banyak orang yang berkeberatan dengan sebutan-sebutan asing itu. Alasannya, sebagian besar pengunjung hotel pada umumnya orang Indonesia dan tidak semua wisatawan itu tahu bahasa Inggris.

Selain itu, penggunaan sebutan-sebutan yang "serba asing" itu mengesankan seolah-olah kita berada di Inggris atau Amerika, tidak di tanah tumpah darah Indonesia sendiri.

Masing-masing pihak yang berbeda pendapat mengenai hal ini tentu mempunyai alasan dan dalihnya masing-masing. Namun, yang terang penggunaan sebutan-sebutan asing itu tidaklah didasarkan atas sesuatu instruksi dari pemerintah. Kami setuju upaya memasyarakatkan bahasa Indonesia dalam segala bidang kegiatan kehidupan hendaknya lebih digalakkan; penggunaan sebutan-sebutan asing dibatasi pada hal-hal yang penting saja atau menyangkut sebutan-sebutan yang sulit mencari padanannya dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah pengertian sebenarnya.

Agar hal itu memberikan hasil yang maksimal, kami sarankan sebagai berikut.

- a) Dikeluarkan suatu instruksi atau keputusan pemerintah, umpamanya dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) mengenai pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia hingga mempunyai kekuatan hukum dan mengikat lembaga-lembaga pemerintah serta aparat-aparat negara untuk mengindahkannya.
- b) PPPB hendaknya lebih tanggap mengikuti perkembangan terjadinya "penyulusupan-penyulusupan" kata-kata asing baru dalam komunikasi dan percakapan sehari-hari masyarakat kita (seperti dapat diketahui melalui media massa yang ada), cepat-cepat mencarikan dan mempublikasikan padanannya dalam bahasa Indonesia.

Patut dihargai ikhtiar yang dilakukan PPPB pada akhir-akhir ini yang menyebarkan himpunan "kata-kata baru" melalui pers. Akan tetapi, publikasi yang dilakukan itu kami anggap belum cukup memadai, baru sebagian kecil masyarakat saja yang sempat mengetahuinya. Usaha pemasyarakatan kata-kata baru tersebut (sebagian merupakan padanan kata-kata asing yang sedang populer dalam masyarakat) hendaknya dapat semakin diperluas, tidak saja melalui pers, tetapi juga melalui jalur-jalur komunikasi lainnya.

Amat sayang, publikasi padanan kata-kata yang dilakukan PPPB melalui pers tersebut, selain kurang juga agak kasep diterima masyarakat. Suatu kata asing sudah demikian populer ditulis atau diucapkan orang, baru keluar padanan katanya dari PPPB sehingga orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan kata-kata asing tersebut merasa berat menggantinya dengan padanan kata itu.

Dewasa ini sering kita dengar atau kita baca sebutan-sebutan dalam bahasa Inggris, seperti *catering*, *claim pulsa*, *cleaning service*, *filter*, *foto copy*, *overhead projector*, *real estate*, *search and rescue (SAR)*, *stabilo*, *tissue*, *video*. Kalau tidak kunjung masyarakat dapat mengetahui padanan katanya, dapat diperkirakan lama-kelamaan masyarakat akan memperlakukan statusnya sebagai "warga bahasa Indonesia".

2. Pos dan Telekomunikasi

Menyangkut penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan pos dan telekomunikasi, ada tiga hal yang kami ketengahkan dalam kertas kerja ini, yakni gabungan kata, penyingkatan kata-kata, dan penggunaan kata asing.

a) Gabungan Kata

Di lingkungan pos sudah menjadi kebiasaan gabungan kata yang berkaitan dengan pos banyak yang ditulis serangkai, seperti bendapos, bulkpos-paket, kantongpos, kantorpos, monopolipos, peralatanpos, rumahpos, tromlo-pos. Baik di lingkungan pos, maupun di lingkungan telekomunikasi, nama-nama kota atau tempat ditulis serangkai, seperti *Pematangsiantar*, *Padangpanjang*, *Tanjungkarang*, *Tulungagung*, *Palangkaraya*, *Ujungpandang*.

Menurut ketentuan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (selanjutnya kami singkat PUEBI saja), gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus bagian-bagiannya umumnya ditulis terpisah. Hanya gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai.

Petunjuk yang diberikan PUEBI, menurut hemat kami tidak cukup jelas. Orang dapat memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang apa yang dimaksud dengan "kata majemuk", "istilah khusus", dan "sudah diang-

gap satu kata" itu. Oleh karena itu, agaknya baik bila PPPB mempertimbangkan kembali pendapat sebagian ahli bahasa Indonesia (seperti Dra. Siti Chamdiah dalam bukunya *Teori Bahasa Indonesia*, yang antara lain juga digunakan oleh harian *Kompas*, seperti dapat dilihat pada tajuk-tajuk rencananya) bahwa untuk memudahkan dan mempercepat penulisan, serta untuk mengurangi keragu-raguan, sebaiknya semua gabungan kata, baik yang asli, yang diberi imbuhan ataupun yang berulang, ditulis serangkaian saja semuanya.

Dengan demikian, penulisan gabungan-gabungan kata yang sudah lama diterapkan di lingkungan pos dan telekomunikasi itu tidak menyalahi ketentuan-ketentuan penulisan bahasa Indonesia.

b) Penyingkatan Kata-kata

Seperti juga di lingkungan lainnya, di lingkungan pos dan telekomunikasi telah lama menjadi kebiasaan untuk menyingkat kata, terutama kata-kata khas pos dan telekomunikasi yang sering digunakan dalam lalu lintas pekerjaan sehari-hari. Namun, singkatan itu biasanya huruf pertamanya saja yang huruf besar, selebihnya huruf kecil.

Misalnya: *Kptb Bandungsetiabudi*: Kantor Pos Tambahan Jalan Setia Budi Bandung.

Kdpos jakarta : Kepala Daerah Pos dan Giro I Jakarta

Jtupos Suratno : Juru Tata Usaha Pos Suratno

Diroppo : Direktur Operasi Pos

Diruttel : Direktur Utama Perusahaan Umum Telekomunikasi

Dirmudadpegtel : Direktur Muda Tata Usaha & Kesejahteraan Personil (Perumtel)

Pusdiklatbangtel : Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Perumtel

Pinprosarpen : Pimpinan Proyek Sarana Penunjang.

Agaknya orang-orang yang bekerja di lingkungan Perum Pos dan Giro dan Perumtel saja yang paham dengan singkatan-singkatan tersebut. Kami setuju tiap-tiap instansi atau jawatan yang besar seperti halnya Perum Pos & Giro dan Perumtel tersebut membuat singkatan-singkatan untuk memudahkan hubungan kerja antara sesama mereka. Akan tetapi, singkatan-singkatan tersebut hendaknya hanya berlaku untuk kalangan mereka saja, sedangkan pers umpamanya tidak perlu ikut-ikutan mengutipnya.

Di dalam kenyataan, singkatan-singkatan tersebut sering kita lihat muncul di surat-surat kabar hingga cenderung untuk memasyarakat (karena persupun rupanya menyenangi sebutan yang pendek dan praktis). Yang menyedihkan lagi singkatan-singkatan tersebut juga diucapkan oleh penyiar radio dan televisi. Hal ini ikut mendorong lahirnya macam-macam singkatan dalam

lalu lintas sehari-hari penggunaan bahasa Indonesia yang dapat membingungkan para pemakai bahasa (karena demikian banyaknya).

Sungguhpun kami menyetujui jawatan atau instansi membuat singkatan-singkatan yang berlaku untuk kalangan mereka sendiri, kami menyarankan agar PPPB mengeluarkan semacam "pedoman umum penyingkatan" bagi mereka hingga singkatan-singkatan yang dilahirkan (terutama instansi resmi) didasarkan patokan yang berlaku umum itu.

c) Penggunaan Kata-kata Asing

Kemajuan pesat yang dicapai Indonesia dalam bidang pertelekomunikasi pada dasarnya yang lalu telah melahirkan pula aneka ragam sebutan asing. Banyak di antara sebutan asing itu yang hingga kini tetap dituliskan dan diucapkan dalam bentuk aslinya tanpa banyak muncul kata padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya: *circuit switching, digital, direct dialing, facsimile, gentex, cabel, coaxial, metaconta, PABX, radio-sonde, remote control, terrestrial*.

Kami menyadari bahwa penyusupan kata-kata asing dalam bahasa Indonesia melalui sebutan-sebutan telekomunikasi hanya merupakan bagian terkecil saja karena seluruh bidang teknik dan keilmuan disusupi oleh sebutan-sebutan asing. Hendaknya juga dikeluarkan suatu "pedoman umum pengalihan kata-kata asing ke dalam bahasa Indonesia" seperti halnya "pedoman umum penyingkatan" yang kami sarankan di atas. Yang sudah ada pedomannya di dalam PUEBI adalah penulisan unsur serapan bahasa asing sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

Dalam kaitan ini kiranya perlu dipertimbangkan gagasan Prof. Ir. Herman Johannes bahwa awalan-awalan dan akhiran-akhiran tertentu di dalam bahasa Inggris ditentukan padanannya dalam bahasa Indonesia.

Contoh:

(a) Awalan *a-*, *an-*, *in-*, *non-*, dan akhiran *-less* serta bentuk-bentuk lain yang berarti atau tidak memiliki, diberi awalan *nir* dalam bahasa Indonesia.

<i>apathy</i>	— nirasa
<i>anonymous</i>	— nirnama
<i>inanimate</i>	— nirnyawa
<i>nondegree</i>	— nirgelar
<i>voiceless</i>	— nirsuara

(b) Yang berpengertian 'kurang' diterjemahkan menjadi *tuna*, seperti:

<i>deaf</i>	— tunarungu
<i>amoral</i>	— tunasusila
<i>roofless</i>	— tunawisma

- (c) Awalan *an-*, *in-*, atau *non-* yang berarti 'bukan' diterjemahkan menjadi *tan*
- | | |
|------------------|--------------|
| <i>nonmental</i> | — tanlogam |
| <i>inorganik</i> | — tanorganik |
- (d) awalan *a-*, *ab-*, *il-*, *im-*, *in-*, *ir-*, *un-*, *non-*, *de-*, dan *dis-* yang berarti 'tidak' diterjemahkan menjadi *tidak*.
- | | |
|----------------------|--------------|
| <i>asosial</i> | — taksosial |
| <i>abnormal</i> | — takbiasa |
| <i>impure</i> | — taksuci |
| <i>insufficient</i> | — takcukup |
| <i>irregular</i> | — takteratur |
| <i>non-essential</i> | — takpenting |
| <i>unable</i> | — takpuas |
- (e) Awalan *nara-* dipakai untuk menterjemahkan sebutan *person* dalam bahasa Inggris.
- | | |
|-------------------------|--------------|
| <i>convicted person</i> | — narapidana |
| <i>resource person</i> | — narasumber |
- (f) Akhiran *-en*, *-and*, dan *-ent* yang berarti di....kan atau sebutan-sebutan yang mengandung arti demikian diterjemahkan dengan menggunakan sisipan *-in-*.
- | | |
|-------------------|-------------|
| <i>addent</i> | — tinambah |
| <i>divident</i> | — binagi |
| <i>integrant</i> | — rinangkum |
| <i>son in law</i> | — minantu |

Pengalihan dengan cara demikian dimaksudkan agar padanan Indonesia atas kata-kata asing itu lebih rasional dalam rangka ketepatan, keseragaman, kesedapan bunyi, dan keringkasannya.

3. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Lalu Lintas Kegiatan Kedinasan Sehari-hari

a. Surat-Menyurat

a) Sebutan 'yang Terhormat (Yth)'

Dalam surat-menyurat, baik surat biasa maupun surat dinas (termasuk nota dinas dan memo), masih dilazimkan menggunakan sebutan *Kepada Yth* untuk si alamat yang dituju.

Arti awalan *ter* dalam sebutan tersebut adalah *sangat* atau *paling* (bentuk superlatif). Berarti *Yang Ter* tersebut *satu* dari semua yang dituju (tingkatan yang ada):

Dalam praktik berbahasa sehari-hari sebutan itu digunakan untuk semua orang. Bahkan surat seorang atasan yang ditujukan kepada bawahannya juga menggunakan sebutan *Kepada Yth.* Jadi tidak cocok dengan hakikat pengertian yang sebenarnya.

Sehubungan dengan itu, kami menyarankan agar sebutan sopan-santun yang sudah dilazimkan itu tidak lagi dipakai dalam surat-menyurat maupun pidato-pidato. Untuk menyatakan rasa hormat kepada sejumlah bapak tertentu di dalam pertemuan-pertemuan, agaknya lebih tepat menggunakan sebutan *Yang dihormati* ... kepada masing-masing bapak tersebut, daripada menyebut *Yang terhormat*....

Demikian juga di dalam alam kemerdekaan dan demokrasi sekarang ini, rasanya cukup sopan menyebut *kepada* ... saja. Untuk mengungkapkan rasa hormat kita, maka dapat dicantumkan sebutan *Dengan hormat* pada alinea pertama surat (yang justru banyak dihapuskan dalam surat-surat dinas sekarang).

Jadi, contoh surat yang kami sarankan tersebut adalah demikian:

Kepada
Bapak
di
.....

Dengan hormat,
.....

b) Kerangka Surat Dinas

Hingga saat ini belum kita lihat adanya keseragaman kerangka surat-surat dinas di lingkungan pemerintah. Lihat saja bentuk kepala surat, nomor surat, dan stempel yang beraneka ragam yang dibuat oleh tiap-tiap departemen. Bahkan perbedaan itu juga terjadi antara direktorat-direktorat jenderal di lingkungan departemen yang sama.

Ahli-ahli bahasa kita dari PPPB juga tidak memberikan tuntunan yang persis sama mengenai kerangka surat dinas. Sebagai contoh dapat kami kemukakan bahasa dalam surat PPPB nomor S/S/KBI/83, tanggal 18 Agustus 1983 yang ditujukan kepada kami berkaitan dengan penulisan kertas kerja ini dapat dilihat, *si alamat* ditempatkan di sebelah kiri, sejajar dengan *nomor surat, lampiran, dan perihal.*

J.S. Badudu dalam bukunya *Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar* memberikan tuntunan, si alamat itu ditempatkan di sebelah kanan. Berbeda dengan kebanyakan surat dinas yang kita kenal, sebutan salam pembukaan digunakan adalah *Yang Terhormat* (bukan *Kepada Yth*), tanggal surat tanpa didahului nama kota (tempat), antara nama penulis surat dan jabatannya tidak diberi bergaris dan tanpa NIP (tidak pula digunakan huruf-huruf kapital).

Menurut hemat kami, yang ideal adalah bila semua surat dinas mempunyai kerangka dan pola yang baku, tidak berbeda antara departemen yang satu dengan departemen yang lain. Bila ada perbedaan, perbedaan itu tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pola yang baku itu.

b. Penomoran Naskah

Belum pula terlihat adanya keseragaman dalam penomoran naskah, baik naskah dinas maupun naskah ilmiah. Masing-masing penulis menurutkan selernya sendiri-sendiri, yang menunjukkan belum adanya pegangan umum mengenai ini. Kami kemukakan beberapa contoh.

a) Penomoran naskah didasarkan atas perselang-selingan bentuk angka dan huruf yang ada, dengan contoh kerangka demikian

- ```

1.
A.
 1.
 a.
 1)
 a).
 (a)
 2.
B.

```

- b) Pola penomorannya sama dengan di atas, tapi dimulai dengan huruf A (bukan angka Romawi I).
- c) Pola penomoran dimulai dengan Arab 1 (bukan angka Romawi I maupun huruf A).
- d) Pola penomoran menggunakan salah satu cara di atas, tapi pemilahan sesudah angka-angka yang bersangkutan ditambah dengan urutan angka-angka.

Contoh:

- I. ....  
 A. ....  
 B. ....  
 1. ....  
 1.1. ....  
 1.2. ....  
 1.2.1. ....  
 1.2.2. ....  
 1.2.3. ....  
 2. ....  
 IV. ....

- e) Penggunaan sebutan bab (umpamanya Bab V) dan pemilihan di dalam subbab menggunakan sebutan paragraf (umpamanya 12).  
 f) Baik bab maupun subbab tidak menggunakan nomor.  
 g) Subjudul atau subbab dimulai dari nomor 01 (biasanya untuk pengantar atau pendahuluan), selanjutnya digunakan nomor urutan 02, 03, 04, .... setelah no. 9 baru digunakan nomor biasa 10, 11, 12, .....
- h) Pemilihan menggunakan tanda-tanda baca tertentu seperti kurung (--), tanda pisah (—), tanda tambah (+) atau tanda bintang (\*) bukan.

1. ....  
 — ....  
 — ....  
 2. ....  
 \* ....  
 + ....

- i) Variasi dari bermacam cara tersebut.

Menurut pendapat kami, masyarakat perlu diberi tuntunan, pola penomoran mana yang baik digunakan sebagai bagian usaha kita untuk membakukan penulisan bahasa Indonesia yang benar. Menurut hemat kami pola penomoran seperti dicantumkan pada butir a) di atas adalah yang terbaik.

### c. Penggunaan Huruf Kapital

Di dalam PUEBI disebutkan bahwa ada 13 jenis kata yang mengharuskan penulisan huruf kapital (huruf besar) pada huruf pertamanya. Akan tetapi, di dalam praktik penulisan sehari-hari bahasa Indonesia ada kata-kata

yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, yakni sebagai berikut.

- 1) Judul buku atau artikel, judul bab dan judul subbab.
- 2) Kata-kata yang dituju atau dianggap penting dalam suatu kalimat.  
Contoh: PENJABAT ialah orang yang (pada suatu waktu) menjabat suatu pekerjaan.
- 3) Kata-kata kependekan.  
Contoh: DEPPEN, KAPERJANKA, DIRJENPAR, KAPUSDIKLAT.
- 4) Nama kota *si alamat*, kata-kata yang dicantumkan pada *perihal*, nama jabatan atau nama penulis surat dalam surat-surat dinas.

Malahan ada kecenderungan naskah-naskah pidato seorang pejabat seluruhnya ditulis dengan huruf kapital (hingga penggunaan huruf kapital pada 13 jenis huruf pertama kata yang digariskan PUEBI itu tidak dapat digunakan untuk naskah pidato itu.

Kami kita PPB juga perlu memberikan tuntunan mengenai ini.

#### d. Penulisan Kata-kata Penting

Selain dengan menggunakan huruf-huruf kapital, penulisan kata-kata yang dituju atau yang dianggap penting dalam suatu kalimat juga menggunakan cara-cara lain, seperti berikut.

- a) Merenggangkan huruf-huruf.  
Contoh: s e m e s t a.
- b) menggarisbawahi (bila tulisan tangan atau ketikan) atau menghitamkannya (bila huruf cetak). Atau juga dicetak dengan huruf miring.  
Contoh: *semesta*.
- c) Menempatkan antara tanda petik atau tanda petik tunggal  
Contoh: "semesta", 'semesta'.

Karena cara yang bermacam-macam ini, masyarakat pemakai bahasa tulis menjadi ragu, cara apa yang baik dan baku digunakan. Seyogyanya PPPB juga memberikan tuntunan mengenai ini.

#### e. Penggunaan Sebutan Anda bagi Orang Kedua

Sebenarnya banyak sebutan yang dapat digunakan untuk orang kedua yang setaraf dalam bahasa Indonesia, seperti: *saudara, kamau, engkau, kau*. Akan tetapi, dalam pembicaraan yang dianggap "sopan", dirasakan berat menggunakan sebutan-sebutan itu. Sebutan *Saudara* hanya banyak digunakan biasanya adalah langsung menyebut nama yang bersangkutan atau menggunakan sebutan *Pak* (baik diikuti nama ataupun tidak) walaupun yang diajak bicara tersebut setaraf atau di bawah taraf orang yang mengajak bicara (baik dalam pengertian umur maupun pangkat).

Pada akhir-akhir ini sudah mulai banyak digunakan orang sebutan *Anda* untuk orang kedua tersebut.

Karena sebutan *Anda* ini cukup sopan serta hormat yang dapat digunakan untuk orang kedua yang setaraf maupun tidak setaraf (juga sebagai padanan sebutan *you, jij* atau *situ*), kami sarankan agar sebutan *Anda* itu dapat dijadikan sebutan resmi untuk orang kedua serta ditempuh usaha-usaha untuk memasyarakatkannya. Untuk orang kedua jamak, kami kira lama-kelamaan orang akan terbiasa dengan sebutan *Para Anda, Anda-anda semuanya*, dan lain-lain.

### Kesimpulan

Sebagai kesimpulan uraian-uraian kami di atas, dalam rangka pembakuan bahasa Indonesia perlu diterbitkan suatu keputusan presiden (hingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua instansi dan aparat pemerintah) yang memuat antara lain:

- a. pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia;
- b. pedoman umum penyingkatan;
- c. pedoman umum pengalihan kata-kata asing ke dalam bahasa Indonesia;
- d. pedoman umum tata naskah (termasuk di dalamnya pembakuan kerangka surat-surat dinas dan penomoran naskah).

Materi konsep keputusan presiden tersebut hendaknya dapat dibahas pada Kongres Bahasa Indonesia IV ini atau pertemuan ilmiah lainnya yang diselenggarakan oleh PPPB yang khusus membahas hal tersebut.

### Penutup

Demikian kertas kerja ini kami sampaikan di hadapan Kongres Bahasa Indonesia IV ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kongres ini dan bagi pembinaan bahasa Indonesia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chamdiah, Siti. 1970. *Teori Bahasa Indonesia*. Djakarta: Fa Gadjah Mada.
- Badudu, J.S. 1983. *Inilah Bahasa Indonesia yang Benar*. Jakarta: PT Gramedia.
- Johannes, Herman. 1981. "Gagasan Gaya Bahasa Keilmuan". Dalam *Analisis Kebudayaan* Tahun 1, nomor 3. Jakarta: Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Pustaka.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Singgih, Amin. 1978. *Bahasa Bangsa Indonesia*. Jakarta: NV Harapan Nusa.

## ANTARA KENYATAAN DAN HARAPAN

Ki Soeratman

*Pengamatan sekilas penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai segi kehidupan dalam masyarakat Yogyakarta sebagai upaya pendahuluan untuk menjadikan anjuran penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar sebagai suatu gerakan.*

### Pendahuluan

Dalam musyawarah nasional suatu organisasi tertentu salah seorang utusan daerah mengusulkan agar kata *Panitia ad hoc* diganti istilah dalam bahasa Indonesia, adapun *reasoningnya* ialah ... dan seterusnya. Sudah barang tentu usul tersebut mengundang gelak tertawa para peserta lainnya karena ada hal yang bertentangan. Satu segi usulnya menghendaki agar ada sikap kemurni-murnian, sedangkan segi lain secara tidak sadar dalam pengusulannya itu masih terselip di dalamnya kata *reasoning* yang artinya kurang lebih sama dengan alasan.

Seorang peserta lain yang duduk dekat penulis memberi komentar, "selain di mimbar bahasa Indonesia dalam TV, sebenarnya di manakah bahasa kita telah digunakan secara baik dan benar?" Komentar itu mendorong penulis untuk merenungkan masalahnya, dan secara sepintas berpendapat untuk berkecenderungan menyatakan bahwa dalam masyarakat luas memang hal tersebut belum sepenuhnya kita lakukan.

Fungsi suatu bahasa dalam kehidupan manusia merupakan alat untuk berkomunikasi. Selain itu bahasa juga menjadi sarana untuk menata pola berpikir manusia, di samping itu juga merupakan alat untuk menyatakan

rasa indah manusia, yang kemudian berwujud dalam seni bahasa, kesusastraan, dan ungkapan lainnya. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia telah melengkapi dirinya dengan berbagai kaidah dan ketentuan-ketentuan baku lainnya sebagai patokan dan pedoman penggunaannya bagi setiap pemakainya.

Bangsa Indonesia yang kehadirannya terdiri atas berbagai suku bangsa dan memiliki bahasa daerah masing-masing dalam kehidupan sehari-harinya paling sedikit harus menggunakan dwibahasa, yaitu bahasa daerahnya dan bahasa persatuannya. Dihubungkan dengan keperluan pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan, sebagian warga masyarakatnya wajib memperkaya dirinya dengan berbagai bahasa asing.

Anggapan sebagian bangsa kita bahwa bahasa Indonesia itu mudah, barangkali disebabkan bahasa tersebut adalah bahasa sendiri, serta sikap memudahkan (*gemampang*, Jawa) dalam mempelajari bahasa Indonesia merupakan salah satu penyebab kurangnya mereka itu memperhatikan kaidah dan ketentuan-ketentuan baku dalam berbahasa Indonesia sehingga mereka itu tidak berbahasa secara baik dan benar.

Dalam pergaulan masyarakat mereka lebih mengutamakan fungsi komunikasi sehingga mereka bukannya mengutamakan untuk berucap secara baik dan benar, melainkan sudah dipandang cukup memadai jika dalam berwawan-bicara itu satu sama lain sudah saling dapat mengerti maknanya. Suatu keganjilan sering terjadi ialah bahwa orang asing yang benar-benar mempelajari bahasa Indonesia dengan tekun, mereka itu akan lebih berkemampuan menggunakan bahasa Indonesia lebih tertib berpedoman kaidah-kaidah yang benar dan menggunakannya secara baik. Hal demikian itu biasa terjadi karena mereka memiliki disiplin yang cukup tinggi dalam menaati kaidah-kaidah bahasa yang dipelajarinya.

#### **Kenyataan yang Kita Hadapi**

Sumpah Pemuda 1928 merupakan salah satu tonggak sejarah yang penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia terutama dalam menempa seluruh suku bangsa menjadi satu bangsa Indonesia. Secara khusus ikrar untuk menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, merupakan landasan dasar bagi terwujudnya dan proses pengembangan bahasa Indonesia selanjutnya. Tanpa pernyataan tersebut, kiranya warna perjuangan bangsa akan berbeda dan proses persatuan serta kesatuan masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk mewujudkannya.

Dengan Sumpah Pemuda tersebut memang tidak dengan sendirinya segera terbentuk bahasa persatuan Indonesia yang lengkap sempurna, dengan segala kaidah dan hukum kebahasaannya. Sumpah Pemuda sekedar melahirkan kesadaran perlunya satu bahasa persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan bahasa daerah masing-masing.

Dengan kesadaran tersebut sebagai modal dasarnya, bangsa Indonesia berkesempatan mengembangkan bahasa persatuan itu menuju terpenuhinya persyaratan kebahasaan yang baku dan bisa dijadikan pedoman bagi penggunaannya secara baik dan benar.

Karena bahasa itu hidup, dalam proses perkembangannya bahasa juga akan berpengaruh dan menerima pengaruh dari keadaan lingkungannya, termasuk juga bahasa-bahasa lain yang bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat. Mengenai pengaruh kebahasaan ini bagi bahasa Indonesia ada dua macam kelompok bahasa, yaitu bahasa daerah setempat dan bahasa asing yang digunakan oleh sebagian warga masyarakat.

Pengaruh bahasa daerah pemakai bahasa Indonesia tidak mudah dihindari karena terbawa oleh sifat kodrat manusia yang sangat ditentukan perkembangan kepribadiannya oleh keadaan lingkungannya. Sedikitnya logat atau aksen kedaerahannya akan sangat mempengaruhi ucapan seseorang sehingga mendengar ucapan bahasa Indonesia seseorang, kita sering dengan mudah menentukan asal-usul kedaerahan seseorang.

Secara teori memang mudah dikemukakan bahwa jika kita secara sungguh-sungguh memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, kita pasti akan mudah pula mengungkapkan segala isi hati kita dengan bahasa yang baik dan benar. Akan tetapi, mengucapkan kata-kata dengan tanpa terpengaruh oleh "pembawaan" seseorang memang tidak demikian mudah. Kalau bahasa tulisnya *kan*, terucapkan *ken* sudah pasti bukan karena kesulitan, melainkan terbawa oleh suatu kebiasaan. Ki Hadjar Dewantara pandai menulis artikel dengan baik, tetapi jika beliau berpidato bukannya akhiran *kan* diucapkan *ken*, tetapi kata *dengar* pun diucapkannya menjadi *denger*.

Adapun pengaruh bahasa asing itu pada umumnya berkaitan dengan peristilahan ilmu yang sudah baku sehingga kalau harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan merupakan suatu uraian yang panjang. Kata-kata *radio*, *komputer* dan sejenisnya memang tidak perlu diterjemahkan manakala benda tersebut sudah terbiasa dipahami pengertiannya. Selain itu, cara berpikir yang sudah terbiasa dengan menggunakan kaidah bahasa asing (meskipun tidak kebanyakan orang), sering terpengaruh pula dalam ungkapan sisipan-sisipan bahasa asing tersebut. Mungkin bisa terjadi pula bahwa penggunaan beberapa kata berasal dari bahasa asing dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa dengan demikian akan lebih memberi kesan "intelektual" atau lebih bersifat "akademik".

Betapapun kita selalu menganjurkan dan mendapat anjuran agar kita selalu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, di mana saja dan kapan saja, tetapi apa yang diuraikan di muka adalah kenyataan yang kita jumpai dalam masyarakat kita. Kalau kita ingin melacak lebih ajuh, kita akan menemukan penggunaan bahasa Indonesia yang belum sesuai dengan

yang apa kita harapkan itu di berbagai bidang kehidupan seperti dalam ruang pendidikan dari yang rendah hingga yang tinggi, hidup perkantoran, dalam dunia perdagangan, kehidupan berorganisasi, dan pergaulan luas.

### **Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Masyarakat Luas Dalam Dunia Pendidikan**

Seorang guru SD negeri atas suatu pertanyaan menjelaskan bahwa pada umumnya para guru di kelas SD tersebut telah berusaha sungguh-sungguh untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Mereka sadar bahwa segala perilakunya akan menjadi suri teladan bagi para anak didiknya. Namun, jika melihat hasilnya, ternyata belum memadai.

Dalam pergaulan antarmurid masih banyak digunakan bahasa daerahnya, dan demikian pula pergaulan antarpara guru pada waktu di luar jam mengajar. Hal demikian dipandang sebagai pertanda belum berhasilnya usaha tersebut. Seorang kepala sekolah SD swasta menguraikan hal yang sama, yaitu belum dapat dilaksanakannya penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar di sekolahnya. Akan tetapi, Pak Kepala itu berpendapat bahwa hasil pendidikan bahasa Indonesia tersebut mungkin sekali hasilnya baru akan diketahui di masa mendatang, pada saat anak didiknya itu di sekolah menengah atau di perguruan tinggi. Kalau ditinjau dari keterampilan berbahasa boleh dikatakan sudah lumayan, tetapi untuk menggunakannya secara terus-menerus di berbagai lingkungan, rupanya belum cukup memadai. Keadaan rumah tangga dan keadaan orang tua masing-masing kurang menjadi penunjang untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Di kalangan pendidikan menengah penguasaan pengertian bahasa sudah lebih maju. Cara berpikir anak-anak sudah bisa dibawa ke arah analitik sangat membantu. Namun, anggapan bahwa bahasa Indonesia itu masalah gampang merupakan suatu hambatan. Anak didik masih belum bisa menyadari bahwa bahasa Indonesia itu memang tidak mudah. Biasanya kesadaran itu timbulnya agak terlambat, yaitu pada saat mereka harus menempuh suatu EBT (ujian).

Keadaan anak tingkat menengah atas sangat mudah dirasakan oleh para dosen di perguruan tinggi. Pada umumnya para dosen itu mengeluh tentang kemampuan bahasa para mahasiswanya. Seorang dosen fakultas teknik suatu universitas negeri mengemukakan bahwa dalam latihan membuat kertas kerja ternyata hampir seluruhnya mahasiswanya belum mampu menyusun kalimat yang tepat. Kalimat-kalimatnya belum mampu mengungkapkan isi hatinya.

Suatu kesulitan bagi kalangan dosen dalam menyajikan perkuliahannya ialah masih sangat terbatasnya peristilahan yang berkaitan dengan bidang ilmu masing-masing. Demi kepentingan kejelasan dalam penyajian tersebut, dosen terpaksa menggunakan alat bantu yang berupa bahasa asing atau juga

bahasa daerah. Hal demikian menjadi penyebab mengapa para dosen belum sepenuhnya dapat berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Seorang dosen fakultas sastra mengungkapkan keprihatinannya bahwa di lingkungan fakultasnya penggunaan bahasa Indonesia masih dapat disebutnya kurang bersungguh-sungguh, bahkan mungkin semrawut. Hal ini dikemukakan terutama bahasa antarpada mahasiswa. Dosen ini berpengharapan seogianya masyarakat fakultas sastra itu dapat dijadikan teladan mengenai masalah kebahasaan ini bagi fakultas lainnya.

### Dalam Dunia Perkantoran

Seorang pegawai dinas yang mengurus masalah ternak menjelaskan bahwa dalam lingkungan dinas terasa sekali kurangnya usaha untuk berbahasa yang baik dan benar. Hanya mengenai hal yang menyangkut kedinasan resmi bahasa memang diperhatikan, misalnya dalam hal surat-menyurat, persiapan pidato kepala dinasnya, dan keupacaraan.

Dalam pergaulan antarpegawai, sampai-sampai juga dengan kepala dinas, lebih banyak digunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Kejadian demikian dianggap memang wajar karena bahasa daerah Jawa yang masih mengenal *unggah-ungguh* (tingkat-tingkat dalam pergaulan) dirasa merupakan bahasa yang paling tepat untuk bergaul dengan atasan yang sekaligus sudah terasa adanya penghormatan.

Pegawai tersebut yang juga seorang dokter hewan, merasa lebih aman jika berhubungan dengan kepalanya dengan menggunakan bahasa Jawa. Dengan demikian, bahasa Indonesia di lingkungan tersebut baru merupakan "bahasa resmi" dan bukan bahasa pergaulan sehari-hari.

Seorang sekretaris wilayah daerah kabupaten juga mengemukakan bahwa di lingkungan perkantornya bahasa Indonesia masih merupakan bahasa resmi, sedangkan masyarakat dinas tersebut pergaulan antarpenghuni-nya kebanyakan menggunakan bahasa Jawa. Hal ini bisa terjadi karena kebanyakan pegawai dinas tersebut berasal dari suku Jawa. Sekretaris itu juga menduga bahwa di daerah lain pun mungkin juga terjadi hal yang sama, misalnya di daerah Pasundan, Batak, Minangkabau, Makasar, dan Bali.

Bapak Camat di suatu kotamadya menjelaskan bahwa di kantornya penggunaan bahasa Indonesia agak lumayan. Hal demikian dimungkinkan karena tugas kantor kecamatan itu melayani kepentingan warga masyarakat yang memang terdiri atas berbagai suku bangsa kita. Ini merupakan suatu keuntungan. Semua pegawai di lingkungan kecamatan telah ditugasi agar dalam melayani masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta bersikap sopan.

Dengan demikian, dalam kantor kecamatan itu bahasa Indonesia diusahakan untuk bisa digunakan secara baik dan benar. Akan tetapi, antar-

pegawai kecamatan itu penggunaan bahasa juga lebih banyak bercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Hal ini mengandung suasana santai dan tidak terlalu "resmi".

### **Dalam Dunia Perdagangan**

Seorang pemilik toko di kampung seorang pribumi mengatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia tergantung dari siapa pembelinya. Karena pembeli itu bermacam-macam, ada suku Jawa, ada suku lainnya, bahkan ada pula peranakan atau nonpribumi, pada dasarnya digunakan bahasa Indonesia. Meskipun demikian, bahasa yang digunakannya juga bukan bahasa yang menurutnya disebut "bahasa sekolah". Maksudnya tiada lain adalah sekedar untuk memudahkan berkomunikasi, dan dapat mencapai tujuan, yaitu berlangsungnya proses jual beli.

Seorang kenalan pemilik toko di jalan protokol yang nonpribumi, tetapi warganegara Indonesia, mengatakan bahwa pada umumnya di tokonya berlaku bahasa Indonesia, yang dikenakan sebagai "bahasa dagang". Yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang tidak terlalu ketat berpegang kepada kaidah dan hukum kebahasaan.

Antara tauke dengan para pramuniaga digunakan bahasa Indonesia tetapi antarpada pramuniaga digunakan bahasa campuran, Jawa dan Indonesia. Jadi, jelas kiranya bahwa dalam hubungan demikian itu yang diutamakan adalah segi komunikatifnya.

Dalam keadaan yang lebih majemuk seperti masyarakat pasar, penggunaan bahasa benar-benar "seenaknya" dalam arti asal dapat memperlancar proses jual beli. Di sini tidak dapat dituntut digunakannya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seolah-olah dalam keadaan demikian hal itu tidak terlalu penting. Segi yang kurang menguntungkan dalam keadaan demikian adalah sulit dikembangkannya kesadaran untuk berbahasa yang baik. Buat para pedagang arti bahasa tiada lain adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk memperlancar proses jual beli itu. Selebihnya tidak perlu dihiraukan, apalagi mengenai kaidah dan hukum-hukumnya.

Meskipun demikian, di berbagai kesempatan yang ada, tampak adanya usaha dari beberapa orang pedagang yang ingin menggunakan bahasa Indonesia secara baik, tetapi mereka memang tidak hendak mempersulit diri dengan mempelajarinya secara lebih mendalam. Mereka menghendaki yang serba praktis.

### **Dalam Kehidupan Berorganisasi**

Seorang pengurus salah satu organisasi pelajar menegaskan bahwa dalam organisasinya telah digunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Hal ini diusahakan dalam rapat-rapat pengurus maupun anggota. Juga dalam pem-

buatan catatan rapat, diusahakan agar sejauh mungkin digunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Akan tetapi, di samping hidup keorganisasian yang resmi itu, para anggotanya itu selalu berbahasa yang santai dalam berkomunikasi antara seorang dengan yang lain. Meskipun oleh para guru selalu dianjurkan untuk berbahasa yang baik sehari-hari, kenyataan adalah sukar. Alasannya kalau terlalu "resmi" rasanya kurang akrab dan kurang santai. Bagi para remaja alasan demikian cukup dimengerti. Bahkan kabarnya di Jakarta para remaja itu sempat membuat bahasa khusus sendiri yang dikenal sebagai bahasa Prokem.

Di kalangan organisasi profesi lain lagi halnya. Di kalangan organisasi yang menghimpun para petani, dalam rapat pengurusnya digunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, jika harus terjun ke lapangan, bahasa yang paling komunikatif adalah bahasa daerah setempat. Dengan bahasa yang dapat dimengerti para anggotanya, segala program dapat dilaksanakan dengan tertib dan berhasil. Jadi, bagi organisasi yang bergerak di pedesaan demi kepentingan para anggotanya, terpaksa digunakan bahasa Indonesia secara resmi, tetapi jika diperlukan juga dengan bahasa daerah setempat. Ini yang akan menjamin keberhasilan.

Di kalangan organisasi kalangan guru sudah barang tentu harus dipenuhi digunakannya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat diketahui dari berbagai kegiatan rapat-rapat, baik rapat pengurus maupun rapat anggota. Di kalangan tersebut tidak ada alasan untuk tidak digunakannya bahasa Indonesia secara baik dan benar. Namun, kenyataan menunjukkan pula bahwa jika terjadi pembicaraan antara anggotanya yang sesuku, masih sering pula terdengar pembicaraan dengan bahasa daerahnya. Akan tetapi, hal demikian tidak terlampaui mengganggu terhadap usaha menggalakkan digunakannya bahasa Indonesia secara baik dan benar. Di kalangan guru sudah cukup kesadaran untuk menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa budaya, bahasa ilmu, dan bahasa pergaulan.

### **Dalam Pergaulan Masyarakat Luas**

Dalam ruang lingkup ini pelakunya sangat majemuk. Wajar jika dalam pergaulan itu juga tidak menentu bahasa apa yang digunakan. Akan tetapi, dapat diteliti secara seksama jika kelompok masyarakat itu majemuk (heterogen), kelompok itu berkecenderungan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya, dalam perkumpulan olahraga, kesenian, dan kepramukaan pada umumnya digunakan bahasa Indonesia. Apakah bahasa yang digunakan itu sudah memenuhi persyaratan benar dan baik, masih bisa dipersoalkan.

Dalam asrama mahasiswa yang penghuninya juga bermacam asal daerahnya, bisa dipastikan bahwa yang mereka gunakan adalah bahasa Indonesia. Memang lambat laun ada kecenderungan bagi semua pihak untuk menyesuaikan diri dengan keadaan daerah setempat. Akhirnya terjadilah penggunaan bahasa campuran. Dari proses kebudayaan yang demikian itulah dimungkinkan terjadinya perubahan dan perkembangan nilai, yang memungkinkan timbul dan tumbuhnya nilai budaya yang baru.

Seorang tukang becak mengemukakan pendapatnya bahwa baginya penggunaan bahasa seperlunya, yang ia mengerti, sekedar untuk alat komunikasi dengan calon penumpangnya. Bisa berhubungan dengan baik hingga terjadi tawar-menawar meskipun digunakannya bahasa yang kurang baik dan tidak sempurna. Bahkan tarif tertentu dalam bahasa Inggris pun ia hafalkan karena wilayah kerjanya di jalan protokol yang memungkinkan adanya wisatawan asing berminat menggunakan becaknyanya.

Dia bangga mendengar keterangan bahwa dengan bahasa Indonesia itu kita saling bisa berhubungan dengan rekan-rekan seluruh tanah air. Dia berkehendak untuk bisa menguasai bahasa persatuan itu, tetapi ia bingung ke mana mesti belajar. Dengan penguasaan bahasa itu ia mengharapkan bisa mengikuti berita melalui koran, dan mengerti apa yang terjadi dalam masyarakatnya.

Demikianlah beberapa cukilan dari usaha pengamatan secara sekilas ini belum teliti betul sehingga kemungkinan kesimpulannya belum tentu tepat, semoga ada gunanya.

### **Kesimpulan dan Saran**

Dari wawancara dengan berbagai pihak untuk mendapatkan gambaran sejauh mana lingkungan tertentu tersebut menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dapat dibuat kesimpulan sementara sebagai berikut.

Anjuran untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar untuk kepentingan pembinaan bahasa Indonesia menuju kesempatannya adalah tepat. Akan tetapi, hendaknya kita jangan berpengharapan bahwa seluruh rakyat akan berkemampuan untuk melaksanakannya. Hendaknya kita anggap cukup andaikata sebagian besar warga masyarakat yang belum sepantasnya mampu menggunakannya secara baik dan benar merasa terpenggil dan melaksanakannya.

Kenyataannya kalangan dunia pendidikan memang sudah ada usaha untuk mewujudkan anjuran tersebut meskipun diketemukan hambatan di sana-sini, tetapi hal tersebut tidak harus menimbulkan kekhawatiran lebih-lebih kecemasan. Lebih tinggi tingkat pendidikan yang kita temui, ternyata kesadaran untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar lebih mantap.

Di kalangan berbagai kehidupan seperti perkantoran, perdagangan dan pergaulan masyarakat luas, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan resmi. Pada umumnya bahasa itu mendapat kedudukan yang cukup terhormat. Namun, pada umumnya mengenai penggunaannya yang tidak resmi banyak dilakukan secara santai.

Untuk kepentingan resmi, baik tulisan maupun lisan, ketentuan baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan mendapat perhatian cukup. Akan tetapi, dalam bahasa lisan lebih banyak digunakan berdasarkan pertimbangan praktis, ditinjau dari kedudukannya sebagai alat komunikasi.

Untuk lebih menggiatkan usaha mewujudkan anjuran tersebut, hendaknya kita laksanakan dengan suatu gerakan berdasarkan suatu pengertian bahwa pembinaan dan usaha menjadikan bahasa persatuan kita satu-satunya bahasa nasional yang lengkap sempurna menjadi tanggungjawab kita bersama, dan karenanya harus melibatkan kita semua.

Guna mewujudkan gerakan tersebut beberapa saran dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Untuk dapat melaksanakannya secara mantap dan terpadu hendaknya diperhatikan beberapa persyaratan berikut.

Mengenai penguasaan bahasa yang lengkap secara akademik memang merupakan bagian tugas dari para ahlinya. Akan tetapi, untuk memiliki keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan hak dari semua pihak. Yang sangat diperlukan adalah adanya tekad, disiplin, kecermatan, dan usaha yang sungguh-sungguh.

Kita harus bertekad untuk dapat berbahasa yang baik dan benar. Disiplin untuk menaati semua kaidah dan ketentuan kebahasaan menjadikan kita akan menggunakan bahasa teratur yang, baik dan benar. Kita mesti cermat jangan sampai membuat kesalahan dengan memandang remeh bahasa Indonesia dan berusaha menguasainya secara tekun.

Mengenai gerakan yang akan merupakan serangkaian kegiatan dalam usaha menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar dapat dilaksanakan sebagai berikut.

Usaha yang paling efektif adalah melalui dunia pendidikan. Karena pentingnya kedudukan guru proses penyebaran kemampuan berbahasa yang baik dan benar, maka di semua lembaga pendidikan guru harus ditingkatkan pendidikan berbahasa Indonesia (SPG, SGO, IKIP, FKJ).

Dalam berbagai tingkat pendidikan diselenggarakan lomba mengarang dan berpidato. Demikian pula pada tiap akhir tahun pendidikan diberikan semacam hadiah bagi para siswa yang menunjukkan kegiatan yang menonjol dalam berbahasa Indonesia.

Kepada segenap pemimpin kenegaraan dan kemasyarakatan diimbau untuk bersedia menjadi teladan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Di tiap RW dan RT pada berbagai kesempatan diadakan lomba mengarang dan berpidato. Untuk keperluan semacam itu, perlu kiranya diimbau agar berbagai pihak bisa turut membantu penyelenggaraannya.

Anjuran kepada semua organisasi profesi untuk secara konsekuen menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam kehidupan organisasinya.

Berbagai lomba penulisan karya ilmiah atau penulisan buku yang selama ini sudah sering diadakan oleh lembaga seperti LIPI, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan BKK-BN hendaknya dapat dilanjutkan dan dikembangkan.

Bahasa Indonesia hendaknya juga dimasukkan dalam persyaratan pokok dalam penerimaan pegawai negeri/swasta dan kenaikan tingkat para pegawai.

Dalam kehidupan kelembagaan legislatif supaya juga diusahakan peningkatan usaha, mulai berbagai tingkat kegiatan seperti pernyataan pendapat, penyusunan laporan sampai hasil yang berwujud undang-undang supaya dapat disusun berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran untuk mengusahakan adanya gerakan untuk mewujudkan anjuran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai suatu kenyataan. Andaikata gerakan semacam ini berhasil 25%, kiranya bahasa Indonesia kita sepuluh tahun kemudian sudah akan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Semoga.

## **PERANAN GURU BAHASA INDONESIA DALAM MENYUKSESKAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**I. Umar Suparno**

Persatuan Guru Republik Indonesia

PGRI merasa berbahagia dan bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan dan ridonya pada saat ini PGRI dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam Kongres Bahasa Indonesia IV yang sangat mulia ini. Oleh karena itu, PGRI sangat berterima kasih kepada panitia penyelenggara kongres atas undangan, atas kesempatan yang diberikan kepada PGRI untuk menyampaikan makalah dalam forum Kongres Bahasa Indonesia IV ini.

PGRI sebagai organisasi kaum pendidik yang lahir di tengah-tengah perjuangan bangsanya dalam mempertahankan dan menegakkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 menyambut dengan penuh antusias terhadap terlaksananya Kongres Bahasa Indonesia IV ini, lebih-lebih setelah mengetahui bahwa Kongres Bahasa Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-55 Sumpah Pemuda yang sangat terkenal itu.

PGRI menyadari bahwa antara bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda, Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan organisasi kaum pendidik yang disebut PGRI ada alur benang merah putih yang membawa amanat suci perjuangan bangsa Indonesia, yaitu perjuangan di dalam menegakkan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka dengan identitas nasionalnya, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sesuai dengan permintaan dan pengarahan panitia penyelenggara kongres, PGRI akan ikut berperan serta dengan menyumbangkan pemikiran dengan judul "Peranan Guru Bahasa Indonesia dalam Menyuksekan Pembangunan Nasional". Pemikiran PGRI itu akan dituangkan dalam makalah ini dengan sistematika sebagai berikut.

- a. pendahuluan,
- b. permasalahan,
- c. pembahasan,
- d. langkah-langkah,
- e. kesimpulan dan saran, dan
- f. penutup.

PGRI berharap semoga pemikiran yang disumbangkan kepada kongres ini berguna bagi pengembangan bahasa Indonesia yang melambungkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di dalam mewujudkan, membina, dan mempertahankan kerukunan dan ketahanan nasional yang tangguh dan kokoh.

### **Pendahuluan**

Dewasa ini bangsa Indonesia telah berada dalam tahap perjuangan mengisi kemerdekaan dengan jalan melaksanakan pembangunan amanat penderitaan rakyat, yaitu mencapai dan mewujudkan masyarakat adil makmur, lahir batin, berdasarkan Pancasila. Dalam tahapan mengisi kemerdekaan ini, kita bangsa Indonesia telah berhasil melaksanakan Pelita I, II, dan III seperti yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia lewat MPR dan dituangkan dalam GBHN 1973, 1978.

Kongres ini dilaksanakan justru dalam tahun terakhir Pelita III dan diambang pintu memasuki tahun pertama Pelita IV. Sidang Umum MPR Maret 1983 telah menghasilkan pula Tap II/MPR/1983 tentang GBHN yang merupakan kesinambungan dari GBHN sebelumnya dan setelah menggairahkan arah dan tujuan Pelita IV yang akan dimulai pada bulan April 1984. Berdasarkan GBHN 1983 telah ditetapkan tekad bangsa Indonesia, yaitu pada Pelita IV ini harus sudah dicapai kerangka dasar masyarakat adil dan makmur dan kerangka dasar itu akan dimantapkan pada Pelita V sehingga pada Pelita VI bangsa Indonesia sudah tinggal landas untuk mewujudkan dan mengembangkan masyarakat adil dan makmur. Dari GBHN 1983, hal-hal yang perlu kita tonjolkan, kita catat dan kita pegang antara lain adalah.

- a. hakikat pembangunan nasional kita adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya;
- b. pembangunan nasional penjabaran pelaksanaan Pancasila;
- c. segala sesuatu yang sifatnya menyangkut ideologi negara yang sering menimbulkan ketegangan nasional yang sangat membahayakan persatuan, kesatuan dan keutuhan nasional, harus sudah dapat diselesaikan secara tuntas dalam Pelita IV;
- d. generasi muda harus menjadi generasi penerus yang lebih baik, yaitu suatu

generasi yang tanggap terhadap aspirasi perjuangan bangsanya, yang dapat mewarisi dan menghayati jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur 1945.

Setelah kita memahami apa yang dikehendaki oleh lembaga tertinggi negara kita sebagai penjelmaan kekuasaan seluruh rakyat Indonesia, kita terkenang atau teringat peristiwa pada 55 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, saat diselenggarakan Kongres Pemuda yang mencetuskan Sumpah Pemuda yang keramat itu. PGRI memahami dan menyadari bahwa 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia karena pada hari Sumpah Pemuda itu tercetuslah tekad bangsa Indonesia untuk membangun integritas bangsa. Isi Sumpah Pemuda adalah pernyataan luhur pemuda Indonesia yang isinya adalah *satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia*.

Oleh karena itu, hakikat Sumpah Pemuda tiada lain adalah tahapan gelombang pasang dari perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Dari Sumpah Pemuda itulah gerak dan arah serta wujud perjuangan bangsa Indonesia menjadi lebih konkret, yaitu *mencapai Indonesia merdeka*.

PGRI menyadari bahwa berkat Sumpah Pemuda itu bangsa Indonesia meneruskan perjuangannya dengan memupuk, membina, dan mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terwujud satu kesatuan nasional yang mahadahsyat. Puncak perjuangan itu adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yang merupakan pintu gerbang kehidupan bangsa Indonesia di dalam kemerdekaan yang dijalani sampai dewasa ini dan untuk selama-lamanya. Kita bangsa Indonesia menyadari bahwa isi Sumpah Pemuda itu merupakan mutiara pusaka mulia yang harus dipertahankan, dikeramatkan, sebagai sumber utama bagi kekuatan bangsa Indonesia di dalam mempertahankan eksistensinya. Menyadari hal yang demikian itu, PGRI sebagai organisasi kaum guru yang menyandang tiga tugas suci (tugas kemanusiaan, tugas profesi dan tugas civic) selalu menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa kepada anak didiknya yang merupakan tunas-tunas bangsa yang akan melanjutkan perjalanan hidup bangsanya.

Mengenai bahasa Indonesia, PGRI menyadari bahwa itu merupakan suatu mutiara dari Sumpah Pemuda yang harus diperjuangkan, dikembangkan, dibina secara terus-menerus oleh setiap warga bangsa Indonesia, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam hidupnya sehari-hari dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, lingkungan pergaulan dengan bangsa lain yang memungkinkan.

Menyadari akan tugasnya dalam kehidupan bangsa, PGRI pun dalam perjalanan perjuangannya telah berhasil menampilkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam forum persidangan internasional. Hal ini terjadi pada waktu PGRI menjadi tuan rumah Kongres Guru Sedunia ke-27

(WCOTP) di Indonesia pada tanggal 26 Juli s.d. 2 Agustus 1978. Dalam kongres tersebut PGRI memberanikan diri mengusulkan dan mengusahakan bahasa Indonesia dijadikan salah satu bahasa pengantar persidangan dalam kongres tersebut. Pada waktu itu penyelenggara menyadari akan berbagai kesulitan baik sarana maupun tenaga. Akan tetapi, PGRI berpendirian, justru sejalan dengan kegiatan menyongsong peringatan setengah abad Sumpah Pemuda, maka peristiwa kongres guru sedunia itu dijadikan pula salah satu titik tolak dalam upaya penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi internasional. Ternyata usaha PGRI tiadalah sia-sia. Dalam praktiknya berjalan lancar dan baik. Dalam penghayatan PGRI peristiwa semacam itu dapat menggugah harga diri pada delegasi Indonesia dan membangkitkan kebanggaan nasional. Hal lain yang dapat memperkuat kebanggaan nasional kita adalah kebersamaan para delegasi guru-guru dari negara yang tergabung dalam ASEAN langsung berbahasa Indonesia/Malaysia di dalam membicarakan soal-soal tertentu.

Dalam mencatat sukses itu PGRI tidak dapat melupakan jasa dan prestasi Prof. Dr. Amran Halim dibantu oleh Drs. Anton Hilman dan Drs. Zainal Abidin yang telah berhasil menggembleng para penerjemah kita dalam waktu 1,5 bulan sehingga mampu berpartisipasi dan berintegrasi dengan tim penerjemah internasional yang sudah berpengalaman.

Dewasa ini setelah melampaui berbagai tahapan, selaras dengan tugas kewajiban dan tingkat kemajuan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Ibarat seorang gadis yang lahir di pedesaan dahulu hidup di lingkungan masyarakat desa, kemudian belajar dan bergaul di kalangan kota dari yang kecil sampai yang besar dan kemudian belajar dan bergaul di masyarakat ibu kota negara sampai kepada kota internasional. Tentu saja setelah dewasa gadis ini akan menampilkan berbagai perubahan dan perkembangan yang selaras dengan keperluan penampilannya.

Dalam proses perkembangan bahasa Indonesia yang diibaratkan gadis tadi, guru pada umumnya dan guru bahasa Indonesia khususnya mempunyai peranan yang penting dalam menentukan perkembangan bahasa Indonesia itu. Ibarat gadis tadi, guru bahasa Indonesia ikut menjaga dan mengarahkan agar gadis itu berkembang secara teratur tidak bertentangan dengan watak dasar lingkungan dan bangsanya. Perkembangannya membawa dan memancarkan harmoni yang indah.

Salah satu bidang sasaran pembangunan nasional adalah bidang sosial budaya. Di dalam bidang itu terdapat sasaran pembangunan mengenai bahasa dan sastra Indonesia. Suksesnya pembangunan nasional berarti suksesnya pembangunan mengenai bahasa dan sastra Indonesia. Sebaliknya, pembangunan terhadap bahasa dan sastra Indonesia harus mendukung suksesnya

pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan terhadap bahasa dan sastra Indonesia harus *selaras, seirama, serasi* dengan arah pembangunan nasional. Dalam hal ini kiranya guru pada umumnya dan guru bahasa Indonesia pada khususnya mempunyai kesempatan untuk ikut mensukseskan pembangunan nasional.

### Permasalahan

Pada tahun 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda telah diikrarkan adanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia merupakan lambang persatuan dan kesatuan bangsa. Karena bahasa adalah wahana dari isi jiwa pemakainya yang mengandung unsur cipta, rasa, dan karya, materi bahasa tersebut tidaklah statis, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan fungsinya. Pada tahun 1928 itu kelahiran bahasa Indonesia telah diakui, tetapi mengenai tetap tegaknya eksistensi bahasa Indonesia itu agar mampu menjadi wahana budaya bangsa Indonesia masih harus diperjuangkan terus sebab kita mengetahui beban tugas bahasa Indonesia makin lama makin banyak makin kompleks, dan makin berat. Dalam pertumbuhannya menjadi bahasa persatuan, bahasa Indonesia ini bergerak maju di tengah-tengah bahasa daerah yang beribu-ribu jumlahnya dengan latar belakang sejarah dan sosial yang beraneka ragam. Bahasa daerah itu di samping memberikan kekuatan dan sumbangan tenaga terhadap tumbuhnya bahasa Indonesia, juga tidak sedikit menimbulkan hambatan-hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia yang sehat dan segar.

Setelah perjuangan bangsa Indonesia mencapai titik kulminasi pada 17 Agustus 1945, yaitu berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sumpah Pemuda tahun 1928 mendapat legalitasnya dalam konstitusi negara Republik Indonesia secara resmi. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa bahasa daerah yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik, bahasa-bahasa itu akan dipelihara dan dihormati juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Secara yuridis formal sudah jelas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia, demikian juga bahasa daerah.

Bahasa adalah lembaga kebudayaan dan juga lembaga sosial. Oleh karena itu, pertumbuhan bahasa Indonesia mencerminkan atau dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan dan masyarakatnya. Dalam proses inilah timbul permasalahan yang berkaitan satu sama lain secara beruntun yang justru menunjukkan adanya dinamika dari kehidupan bahasa itu sendiri. Permasalahan itu dalam proses pembangunan adalah hal yang wajar, justru dengan permasalahan itu, kita ditantang untuk mengatasinya.

Dalam mengatasi permasalahan itu kita akan teruji sejauh mana kita bangsa Indonesia ini terkait secara konsisten dengan jiwa dan semangat perjuangan pada waktu mengikrarkan Sumpah Pemuda yang ingin menciptakan integritas bangsa secara integralistik. Permasalahan yang menentang kita antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana menjaga dan mempertahankan bahasa Indonesia tetap sebagai integritas bangsa yang memancarkan jiwa dan semangat persatuan bangsa Indonesia demi kesatuan dan keutuhannya dengan bernafaskan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Bagaimana membina, mengusahakan, dan mengembangkan bahasa Indonesia sehingga makin mampu dan mantap melaksanakan tugas sucinya (*mission sarce*-nya) sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa budaya, bahasa ilmu pengetahuan, bahasa administrasi, bahasa perundang-undangan, bahasa perdagangan, dan sebagainya yang mampu memikul tugas segala aspek kehidupan.
- c. Bagaimana mengusahakan, menjaga agar dalam perkembangannya bahasa Indonesia tetap memiliki watak dasar atau tetap berpijak pada kepribadiannya sendiri.
- d. Bagaimana mengusahakan dan menjaga agar terjadi sinkronisasi antara bahasa Indonesia di dalam dunia pendidikan dan bahasa Indonesia yang terjadi secara praktis di dalam masyarakat.
- e. Bagaimana mengakomodasikan unsur bahasa daerah sehingga tidak mengganggu, menghambat bahkan merusak bahasa Indonesia, tetapi hendaklah betul-betul memperkaya dan memperkuat bahasa Indonesia.

Kiranya permasalahan yang tersebut di atas itu merupakan tantangan terus-menerus bagi bangsa Indonesia sejak diikrarkan bahwa bangsa Indonesia memiliki dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Tantangan itu mengundang kita untuk selalu berpikir dan berjuang mencari jalan mengatasinya. Forum seperti sekarang ini adalah suatu upaya yang tepat karena dalam forum kongres bahasa Indonesia ini kita, bangsa Indonesia, secara nasional memfokuskan perhatiannya kepada bahasa Indonesia sebagai milik nasional.

## Pembahasan

Bapak Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya di depan Sidang DPR-RI pada tanggal 16 Agustus 1972 mengatakan sebagai berikut.

*"Dalam pada itu, kita perlu memelihara semua unsur-unsur yang menyatukan dan menjadi kekuatan bangsa kita, unsur-unsur yang menjadi jiwa bangsa dan kebudayaan kita sendiri, yang menunjukkan Indonesia adalah Indonesia. Dalam hal ini, kita tidak mungkin berbicara tentang Indonesia tanpa bahasa Indonesia. Sungguh, kita dan generasi-generasi*

*yang akan datang berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin dan generasi-generasi terdahulu yang telah melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928”.*

Selanjutnya Bapak Presiden dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa Sumpah Pemuda adalah putusan sejarah yang amat penting yang telah ikut melahirkan bangsa Indonesia. Beliau mengatakan bahwa sulit dibayangkan kesulitan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia yang 134 juta tersebar di wilayah seluas dari London ke Istanbul, yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan kebudayaan daerah, tidak memiliki bahasa nasional yang satu. Bapak Presiden menandakan bahwa beruntung sekali dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang belum juga memiliki bahasa nasional atau yang menggunakan beberapa di bawah satu atap perumahan negara mereka.

Kita menyadari bahwa negara kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau besar kecil tersebar di atas bentangan laut dan lautan yang semuanya merupakan satu rangkaian kepulauan yang dihuni oleh lebih seratus lima puluh juta manusia, terdiri dari berpuluh-puluh suku bangsa. Tiap suku bangsa mempunyai adat istiadat, nilai-nilai keyakinan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda pula. Hal tersebut merupakan kenyataan yang tidak dapat kita hindari, tetapi harus kita terima dengan penuh rasa bangga dan penuh tanggung jawab. Keadaan yang serba majemuk itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa bila kita melepaskan rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara. Sebaliknya, kalau kita selalu waspada/mawas diri meneliti kedudukan kita sebagai warga negara/bangsa yang penuh tanggung jawab terhadap kehidupan bangsa, keadaan yang demikian itu dapat dijadikan sumber kekuatan bangsa untuk memperkaya khasanah budaya bangsa. Dalam keanekaragaman dan kemajemukan yang berbeda-beda itu dapat ditemukan sejumlah nilai yang sama yang dapat dijadikan kekuatan bagi kehidupan bangsa, sebagai penopang atau penyangga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, keanekaragaman itu perlu dibina dan dikembangkan guna mewujudkan kebudayaan bangsa yang mencerminkan pribadi bangsa.

Di atas telah disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa Sumpah Pemuda adalah putusan sejarah yang ikut melahirkan bangsa Indonesia. Kiranya perlu kita sadari bahwa Sumpah Pemuda pun bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian sejarah dari masa ke masa yang mendahulunya. Peristiwa sebelum Sumpah Pemuda yang wajib kita catat adalah kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tanda lahirnya Kebangkitan Nasional.

Kebangkitan Nasional bergerak setapak demi setapak, fase demi fase menjaral ke seluruh nusantara, hidup di tengah-tengah kelompok suku bangsa yang telah kena isolasi sosial akibat politik penjajah. Makin lama makin me-

nampakkan kekuatannya untuk meneruskan perlawanan dengan cara baru, yaitu berjuang untuk merebut kembali kedudukannya sebagai suatu masyarakat budaya yang bebas merdeka. Mulailah timbul gerakan kedaerahan dan keagamaan, mulailah gerakan kebudayaan, pendidikan dan sosial, kemudian menuju gerakan politik yang sifatnya persatuan, kesatuan dan kebangsaan. Gerakan-gerakan itu mula-mula berbeda antara yang satu dengan yang lain, tetapi bertemu pada muara yang sama ialah persatuan dan kesatuan, kebangsaan atau nasionalisme. Gerakan itu bersifat Bhineka Tunggal Ika. Paham dan cita-cita kebangsaan atau nasionalisme mulai tumbuh dan berkembang dan ekspresinya mencetuskan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dalam peristiwa itu diikrarkan suatu sumpah yang merupakan ungkapan kesadaran kebudayaan dan cita-cita kebudayaan bagi subjek budaya nusantara. Naskah pernyataan itu keseluruhannya adalah sebagai berikut.

Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu,  
tanah air Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa  
Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa  
Indonesia.

Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu merupakan pernyataan penuh kesadaran bahwa masyarakat nusantara adalah satu subjek budaya Indonesia yang akan dan harus memperjuangkan nasibnya di masa-masa mendatang. Satu nusa, berarti diungkapkan secara sadar adanya keyakinan satu tanah air, satu lingkungan alam, satu kondisi geografis. Satu bangsa, berarti diungkapkan secara sadar adanya pengakuan dan keyakinan bahwa mereka adalah satu kesatuan kondisi rakyat, satu kondisi demografis, satu subjek budaya yang disebut bangsa Indonesia. Satu bahasa berarti diungkapkan secara sadar adanya keyakinan atau pengakuan bahwa mereka mempunyai satu kebudayaan, yaitu kebudayaan nusantara yang kemudian disebut kebudayaan Indonesia. Bukanlah bahasa merupakan sarana komunikasi yang menjadi wahana segala sikap, persatuan, nilai dan cita-cita? Jadi, di balik Sumpah Pemuda itu muncullah kekuatan nasional, yaitu adanya kesadaran satunya masyarakat bangsa Indonesia dan satunya budaya bangsa Indonesia.

Kebangkitan Nasional sungguh merupakan tonggak sejarah baru yang menggerakkan roda sejarah perjuangan yang lebih luas, roda sejarah perjuangan dunia modern. Dari sinilah terjadi proses generatif kultural bangsa kita yang lebih maju, lebih kompleks dan lebih modern. Proses ini tiada mudah. Ini merupakan perjuangan yaitu suatu proses yang ditempa atau digembleng oleh berbagai peristiwa dan masalah. Kebangkitan Nasional yang melahirkan Sumpah Pemuda tahun 1928 itu melahirkan satu tekad bangsa, mengarahkan perjuangannya kepada satu titik, yaitu mencapai Indo-

nesia merdeka. Dari gerakan kebudayaan meningkat kepada gerakan politik karena bangsa Indonesia sebagai subjek kebudayaan akan dapat mengemban kebudayaan bila ada kemerdekaan politik.

Dari Sumpah Pemuda itulah kini bangsa Indonesia hidup sebagai satu bangsa besar yang merdeka, mendiami wilayah dari Sabang sampai Merauke, berkebudayaan nasional dengan berbahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia.

Selanjutnya Bapak Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya yang disebutkan di atas menegaskan betapa kewajiban kita dan tanggung jawab kita terhadap bahasa Indonesia. Beliau menandaskan sebagai berikut.

*"Memiliki bahasa nasional mengharuskan adanya kecintaan kepada bahasa nasional itu dan kecintaan kepada bahasa nasional mengharuskan adanya pembinaan yang teratur. Bahasa itu hidup dan berkembang. Tanpa pembinaan, hidupnya tanpa arah. Melalaikan pembinaan sama buruknya dengan membiarkan bahasa yang kita cintai itu rusak."*

Tidak perlu disangsikan lagi, pembinaan bahasa nasional kita adalah mutlak; malahan ia merupakan bagian daripada pembinaan bangsa kita. Pembinaan bahasa Indonesia adalah tanggung jawab nasional; bukan hanya beban pemikiran ahli-ahli bahasa saja, bukan hanya urusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Di dalam membina, memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia yang menjadi kebanggaan nasional kita, ada beberapa hal yang patut kita catat, yaitu hal-hal berikut.

- a. Bahasa Indonesia sendiri secara kualitatif dan kuantitatif dalam keterbatasan sehingga untuk melaksanakan tugas sebagai bahasa nasional bahasa resmi dan bahasa kebudayaan masih memerlukan perluasan vokabulari dan unsur-unsur bahasa lainnya.
- b. Bahasa Indonesia hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat negara berkembang yang saja baru lepas dari penjajahan yang menyebabkan rakyatnya menderita tiga buta. Tiga buta itu adalah *buta huruf dan angka, buta bahasa Indonesia, buta pendidikan dasar*. Dalam keadaan yang demikian tidak sedikit pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Pola pikir masyarakat yang diwarnai oleh tiga buta itu memancar dalam pola bahasanya.
- c. Pengetahuan, kepandaian, keterampilan, dan kemahiran warga masyarakat dari berbagai kalangan dalam menggunakan bahasa Indonesia berasal dari berbagai sumber. Ada yang bersumber dari pergaulan sehari-hari, ada yang bersumber dari usaha belajar sendiri, ada pula yang bersumber dari membaca surat kabar dan majalah, ada lagi yang bersumber dari mendengarkan radio dan TV. Di samping itu ada yang memang bersumber dari pendidikan. Warga masyarakat yang menguasai bahasa Indonesia bersumber dari

pendidikan ini pun masih berbeda-beda berhubung tingkat dan jenis pendidikannya. Berdasarkan sumber yang berbeda-beda itu, terjadilah keragaman bahasa Indonesia dalam penggunaan. Secara idial memang diharapkan penggunaan bahasa Indonesia di dalam praktiknya bersumber dari proses pendidikan. Akan tetapi, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup dan digunakan oleh masyarakat bhineka dan sangat luas, maka terjadilah jarak keserasian antara bahasa Indonesia dalam kalangan pendidikan dan bahasa Indonesia dalam masyarakat sehari-hari. Jarak ini makin lama makin sempit setelah makin banyak warga masyarakat yang melewati proses pendidikan. Di sini proses pendidikan memegang peranan penting di dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia yang diharapkan.

Dari hal-hal tersebut di atas kaum pendidik atau guru, secara umum atau secara khusus menempati posisi yang sangat mempengaruhi bahkan menentukan corak pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Hal ini kiranya bukan hal yang terlalu dilebih-lebihkan. Masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi yang dalam proses kedewasaannya mengalami pendidikan formal di sekolah. Makin hari masyarakat yang terdidik makin banyak dan pada waktunya semuanya mengalami pendidikan di sekolah. Kalau sudah tercapai tingkatan yang demikian berarti penguasaan bahasa Indonesia bagi semua warga masyarakat bersumber dari pendidikan di sekolah. Ini berarti semua warga masyarakat mengalami proses pendidikan formal dengan salah satu bidang studinya adalah bahasa Indonesia. Lagi pula mereka mendapatkan latihan berbahasa Indonesia setiap hari karena bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pendidikan. Dengan dasar pemikiran seperti itu, fungsi dan profesi guru pada umumnya dan guru bahasa Indonesia pada khususnya mempunyai peranan penting di dalam menyukseskan pembangunan bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui hakikat pembangunan nasional kita adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, para guru dengan perantaraan bahasa Indonesia dapat melakukan pembangunan oleh kaum guru ini, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan. Pertama, bahasa Indonesia sebagai objek dan kedua, bahasa Indonesia sebagai sarana. Sebagai objek pembangunan, guru mempunyai peranan ganda di dalam membina bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia yang berhasil menyebabkan bahasa Indonesianya sendiri tumbuh dan berkembang teratur, kemampuan bahasa para siswa menjadi baik yang membawa kepada cara berpikir teratur dan mengakibatkan cara berpikir masyarakat pun teratur pula.

Sebagai sarana, bahasa Indonesia menjadi kunci pintu gerbang ke dunia ilmu pengetahuan yang beraneka ragam itu yang mampu meningkatkan kualitas pribadi. Guru tidak akan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya mana-

kala tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik pula. Dalam membahas peranan guru untuk menyukseskan pembinaan bahasa Indonesia yang mempunyai arti menyukseskan pembangunan nasional, PGRI melihatnya dari beberapa sudut pandangan.

#### **Pertama, dari Sudut Sejarah Perjuangan Bangsa**

Dari sudut ini guru selalu dapat membina semangat kebangsaan dan selalu dapat menumbuhkan jiwa cinta tanah air yang dapat mempertebal harga diri dan kebanggaan nasional. Hal itu dimungkinkan karena bahasa Indonesia adalah satu di antara tiga mutiara pusaka isi Sumpah Pemuda. Melalui bahasa Indonesia ini, guru pada umumnya atau guru Bahasa Indonesia pada khususnya dapat mengintegrasikan secara langsung sejarah perjuangan bangsanya kepada aparat anak didik sehingga rasa ikut memiliki bahasa Indonesia ini terus terjalin. Dari rasa dan sikap ikut memiliki ini dapat tumbuh dan berkembang rasa cinta dan sikap mempertahankan serta semangat untuk membina bahasa Indonesia.

#### **Kedua, dari Sudut Materi Bahasa Indonesia**

Materi bahasa Indonesia terdiri dari beberapa unsur, yaitu antara lain tata bunyi, vokabular (kosa kata), morfologi, (bentuk kata) dan tata kalimat (sintaksis). Karena dalam taraf perkembangan dan pertumbuhan, unsur-unsur tersebut di atas banyak menantang kita untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan mana yang dapat menguntungkan bahasa Indonesia, dan pertumbuhan perkembangan mana yang merugikan dan merusak bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, unsur-unsur materi bahasa itu makin membaku. Dalam hal menuju pembakuan bahasa Indonesia ini, guru pada umumnya dan khususnya guru bahasa Indonesia berperanan menentukan. Secara umum penggunaan bahasa Indonesia oleh kaum guru relatif mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia sehingga sedikit banyak memberi suri teladan kepada anak didik, sedangkan guru bahasa Indonesia sudah barang tentu memberikan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang semestinya, yang sesuai dengan hukum-hukum yang telah dibakukan oleh para pemikir bahasa Indonesia dan lembaga yang berwenang. Hasil karya kaum pendidik atau kaum guru ini akan mewarnai corak bahasa Indonesia di masyarakat. Karena di dalam masyarakat juga ada dinamika bahasa yang menghasilkan bentuk-bentuk baru, sering juga timbul gejala bahasa yang tidak selaras, tidak sesuai, tidak cocok dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh guru bahasa Indonesia. Hal ini tidak mengapa karena di negara kita sudah ada lembaga yang berwajib dan berwenang menangani pertumbuhan perkembangan bahasa Indonesia, yaitu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,

maka peranan guru bahasa Indonesia menjadi salah satu mata rantai dalam siklus pembinaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, dapat dirumuskan sebagai berikut: dalam masyarakat terjadi praktik bahasa dengan segala variasinya. Praktik bahasa itu diteliti dan dievaluasi oleh Pusat Bahasa dengan hasil mana yang dibakukan dan mana yang dianggap penyimpangan yang harus dicegah. Hasil Pusat Bahasa ini dimasyarakatkan oleh guru bahasa Indonesia lewat pengajaran bahasa Indonesia kepada anak didik. Anak didik mempraktikkan pengetahuannya itu dalam masyarakat.

Di samping siklus di atas ada pula pembinaan oleh masyarakat sendiri, yaitu kalangan pemikir/ahli bahasa, kalangan pers dan lainnya. Ini pun dapat juga ditransformasikan oleh guru kepada anak didik. Siklus semacam di atas itu dalam saat-saat tertentu dipertemukan dalam forum bahasa Indonesia seperti sekarang ini. Jadi, dilihat dari sudut materi bahasa Indonesia peranan guru bahasa Indonesia menjadi *agent of change* yang dapat dimasyarakatkan dan dapat pula mencegah suatu gejala pertumbuhan perkembangan.

### Ketiga, dari Sudut Sastra

Sastra adalah budaya bangsa dengan bahasa sebagai alatnya. Sastra dengan segala bentuknya (sajak, prosa lyris, prosa, drama, dan lain-lain) berisi curahan isi jiwa pengarangnya. Isi jiwa ini merupakan kekayaan rohaniah dari bangsa yang memilikinya. Kekayaan rohaniah itu bagi pengarangnya merupakan keterampilan dan prestasi di alam pemikiran yang mengandung pesan spiritual yang dapat disampaikan kepada masyarakat pembacanya dari masa ke masa. Dari sudut pembacanya, kekayaan rohaniah yang tersimpan di dalam sastra merupakan sumber informasi, sumber kekuatan spiritual yang tiada habis-habisnya. Di dalam karya sastra kita jumpai nilai kultural yang harus kita lestarikan ataupun sebaliknya. Dari sudut sastra ini guru bahasa Indonesia dapat berbuat banyak bagi pembangunan. Dia sendiri dapat berkarya di bidang sastra secara produktif yang dapat menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada bangsanya. Bukanlah pengarang-pengarang kita zaman Balai Pustaka umumnya berasal dari kalangan guru? Di samping itu secara konsumtif guru bahasa Indonesia dapat menyerap isi karya sastra yang kemudian dapat ditransformasikan kepada para siswa sebagai sarana pembentukan pribadi yang diharapkan, sedangkan terhadap para siswanya, guru bahasa Indonesia dapat memperoleh dan mengarahkan agar para siswa yang yang berbakat sastra dapat berkembang menjadi sastrawan sesuai dengan bakatnya. Di samping itu dapat pula ia mengarahkan para siswa suka dan gemar menikmati isi karya sastra dengan membaca sendiri. Dalam kerangka usaha yang demikian, guru bahasa Indonesia mendorong terbentuknya *masyarakat baca, masyarakat tulis, dan masyarakat belajar*.

#### Keempat, dari Sudut Ilmu Pengetahuan

Bahasa adalah kunci untuk membuka khasanah pengetahuan. Kalau di dalam karya sastra terdapat pengetahuan dan nilai spiritual kultural, di dalam buku ilmu pengetahuan terdapat pengetahuan dan teknologi dari berbagai disiplin. Hanya dengan bahasalah kita dapat menguasai ilmu tersebut. Dalam hal ini pun guru bahasa Indonesia dapat mendorong para siswa suka dan gemar membaca kitab ilmu pengetahuan. Suka membaca adalah proses belajar-mengajar secara pribadi yang berlangsung terus-menerus selama hidup.

#### Kelima, dari Sudut Sosial

Dengan melewati bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia selalu dapat mengarahkan terciptanya jiwa persatuan dan kesatuan dalam rangka membina dan mempertahankan keutuhan/kerukunan nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang merupakan pancaran sifat masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Dengan lewat bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia dapat ikut memantapkan pelaksanaan wawasan nusantara.

#### Keenam, dari Sudut Pendidikan

Pendidikan adalah proses penanaman nilai, pembentukan sikap. Ia merupakan proses internalisasi nilai agar anak dapat menghayati nilai rohaniah yang selanjutnya memancar dalam pola tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam proses pendidikan ini guru bahasa Indonesia dapat ikut mengambil bagian lewat pengajaran bahasa Indonesia kita jumpai bentuk-bentuk bahasa yang sudah sudah membaku merupakan ungkapan nilai spiritual yang digali dan diangkat dari pengalaman hidup nenek moyang. Nilai-nilai ini diabadikan dalam bentuk ungkapan, peribahasa, pepatah petiti, perumpamaan, ibarat, pemeo, pengandaian, dan sebagainya. Dengan memperkenalkan dan mendalami isi ungkapan-ungkapan itu guru bahasa Indonesia sudah ikut berperan melaksanakan perintah GBHN bidang pendidikan yang antara lain sebagai berikut.

*"Dalam rangka pelaksanaan nasional perlu diperluas dan ditingkatkan usaha-usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat".*

Di bawah ini ditunjukkan beberapa contoh bentuk ungkapan yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang dapat digarap oleh guru bahasa Indonesia untuk menanamkan nilai sebagai usaha memperluas dan meningkatkan pelaksanaan P-4 Ekaprasetia Pancakarsa:

- a. *Bulat air dalam pembuluh, bulat kata dalam murakat* (nilai demokrasi Pancasila).
- b. *Tangan mencencang, bahu memikul* (nilai tanggung jawab).

- c. *Duduk sama rendah, berdiri sama tegak* (nilai kesamaan harkat dan martabat).
- d. *Duduk di bawah-bawah, mandi di hilir-hilir* (nilai sopan santun tanpa kehilangan harga diri).
- e. *Datang tampak muka, pergi tampak punggung* (nilai keterbukaan, terusterang dan kejujuran).
- f. *Berani karena benar takut karena salah* (nilai kebenaran).
- g. *Air jernih ikannya jinak* (nilai ketenteraman sosial, stabilitas nasional).
- h. *Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri* (nilai cinta tanah air).
- i. *Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampau* (nilai efisien dan produktif).
- j. *Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah* (nilai keadilan sosial).
- k. *Itu merupakan suratan tangan* (nilai Ketuhanan Yang Maha Esa).

Demikianlah pembahasan kita terhadap peranan guru bahasa Indonesia dalam menyukseskan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya.

### Langkah-langkah yang Perlu Diambil

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa guru pada umumnya dan guru bahasa Indonesia pada khususnya memiliki posisi dan fungsi yang sangat strategis dalam menyukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu, agar posisi dan fungsi itu makin lebih berhasil guna dan tepat guna, oleh guru itu sendiri dan oleh yang berwajib pun perlu ditempuh beberapa langkah yang tepat. Langkah itu ialah sebagai berikut.

a. Guru sendiri harus menyadari dan memahami akan tiga tugas suci yang ada padanya. Dengan memahami tiga tugas suci itu, mereka akan memahami adanya tanggung jawab terhadap tiga tugas tadi. Tiga tugas suci itu adalah tugas kemanusiaan, tugas profesi, dan tugas civic. Dalam tugas kemanusiaan ini guru bahasa Indonesia secara sadar akan mendorong, membawa anak didik untuk selalu gemar membaca bacaan yang berfaedah bagi pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara manusia. Secara kodrati anak didik memerlukan bimbingan dan tuntutan di dalam perkembangannya. Oleh karena itu, sikap suka membaca yang ada pada anak didik sudah merupakan proses memperoleh bimbingan dan tuntutan. Dalam tugas profesi, guru harus selalu meningkatkan prestasinya. Guru bahasa Indonesia harus memiliki dan menguasai materi bahasa Indonesia yang masih di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan metodologi mengajarnya yang juga selalu tumbuh dan berkembang, kiranya dalam hal metodologi yang melibatkan siswa belajar secara aktif. Dengan disadarinya adanya tugas profesi ini, hasil

belajar dalam bidang bahasa Indonesia akan menjadi lebih memenuhi harapan, sedangkan tugas civic yaitu tugas guru bahasa Indonesia sebagai warga negara. Dalam kaitan ini guru bahasa Indonesia akan selalu ikut memproses terbentuknya warga negara yang baik, yaitu warga negara yang Pancasilais, patriotis, nasionalistis. Bahasa Indonesia sebagai lambang integritas bangsa selalu memiliki kesempatan untuk membentuk jiwa anak didik menjadi nasionalis yang bersemangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam langkah yang pertama ini di samping usaha dari pribadi-pribadi para guru, perlu kiranya pemerintah selalu berusaha meningkatkan kesadaran kaum guru itu lewat penataran-penataran.

b. Peningkatan minat baca anak didik. Guru di dalam ikut menyukseskan pembangunan nasional dapat menempuh jalan membina dan meningkatkan minat baca anak didik. Karena itu, guru bahasa Indonesia harus tepat memilih bahan bacaan dan memberikan tugas membaca serta mengadakan penilikan dan penilaian terhadap anak didik.

c. Di samping meningkatkan minat baca, guru bahasa Indonesia harus dapat meningkatkan minat dan kemampuan menulis. Menulis adalah kegiatan berpikir. Oleh karena itu, kalau anak didik kita mampu dan besar minatnya untuk berkarya tulis-menulis akan tercapailah warga negara yang mampu membudayakan tulisan. Ini berarti juga terciptalah masyarakat yang teratur tertib susunan pikirannya dan berdisiplin di dalam tingkah lakunya. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto, di depan Sidang Paripurna DPR-RI 16 Agustus 1972 menegaskan: *"Pembakuan bahasa mendidik pemakai bahasa berbahasa dengan tertib. Bahasa yang tertib menunjukkan cara berpikir dan bertindak yang tertib juga. Dan ketertiban itu merupakan dasar nokok dari hidup bermasyarakat yang berkebudayaan dan sejahtera"*.

d. Meningkatkan keterampilan berbahasa yang teratur, baik lisan maupun tertulis. Biasanya orang suka melepaskan diri dari norma-norma bahasa, di dalam berbahasa lisan. Hal itu dalam batas kewajaran dapat diterima, tetapi dalam hal-hal tertentu kalau dibiarkan lanjut akan merusak bahasa Indonesia. Dalam hal yang demikian guru bahasa Indonesia memiliki legalitas untuk menegur memperbaiki dan memperingati para anak didik.

e. Melaksanakan dan menggalakkan apresiasi seni sastra di kalangan para siswa. Apresiasi seni sastra adalah langkah kegiatan menghayati karya seni sastra bangsanya. Dari langkah ini akan tercipta sikap mengagumi yang membawa rasa bangga terhadap bangsanya. Sikap mental yang demikian itu bagian dari sikap mental manusia seutuhnya.

f. Mengintegrasikan pelajaran bahasa Indonesia dengan penggunaan bahasa dalam media massa, pers, radio, dan TV. Pengintegrasian ini sangat perlu karena para siswa dibawa kepada suatu situasi yang berkembang dan

berlanjut. Kemampuan para siswa di dalam menyaring pertumbuhan bahasa akan makin meningkat.

g. Mengintegrasikan pelajaran bahasa Indonesia dengan bahasa yang dipergunakan oleh para pemimpin. Para pemimpin mempunyai peranan juga di dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Akan tetapi, tidak semua pertumbuhan dan perkembangan bahasa seperti halnya dalam media massa bersifat normatif. Dengan pengintegrasian ini anak didik menjadi tahu mana yang baik dan mana yang kurang atau tidak baik.

Kiranya masih banyak lagi langkah-langkah yang dapat diambil oleh guru bahasa Indonesia di dalam ikut menyukseskan pembangunan nasional lewat bahasa Indonesia ini.

### Kesimpulan dan Saran

Dari uraian yang disajikan oleh Pengurus Besar PGRI ini mengenai "Peranan Guru Bahasa Indonesia dalam Menyukseskan Pembangunan Nasional" dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut.

### Kesimpulan

Menyuksesan pembinaan bahasa Indonesia berarti menyuksesan sebagian pembangunan nasional yang hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Dalam membina bahasa Indonesia agar menjadi bahasa nasional yang tertib teratur dan mampu menjalankan tugasnya di dalam segala aspek kehidupan, guru pada umumnya dan guru bahasa Indonesia pada khususnya mempunyai posisi strategis dan fungsi efektif.

Guru bahasa Indonesia adalah komunikator bahasa antara bahasa Indonesia dalam masyarakat dan bahasa Indonesia di kalangan pendidikan sehingga jarak di antara keduanya makin hari makin sempit.

Bahasa Indonesia menjadi lambang integritas bangsa Indonesia yang merupakan bentuk ungkapan perjuangan budaya bangsa yang memancarkan semangat persatuan, kesatuan bangsa serta membawakan kebangsaan nasional.

Melalui bahasa Indonesia, guru dapat mentransformasikan nilai-nilai moral Pancasila kepada para siswa, sesuai dengan P-4 Ekaprasetia Pancakarsa.

Dengan bahasa Indonesia sebagai sarana, guru bahasa Indonesia dapat ikut berusaha membawa bangsa Indonesia ke dalam forum Internasional maupun regional.

Bahasa Indonesia tetap terbuka menerima unsur dari luar demi tugasnya, tetapi unsur dari luar itu jangan merusak pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri.

### Saran

Perlu adanya usaha yang terus-menerus dari yang berwajib untuk membina dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan berbahasa bagi guru pada umumnya dan guru bahasa Indonesia khususnya.

Perlu adanya pengawasan, bimbingan, supervisi khusus kepada pelaksanaan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah.

Perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan kuantitasnya dan kualitasnya.

Perlu ditingkatkan kegiatan membaca dan menulis di sekolah-sekolah, baik secara kurikulai, maupun secara ekstra kurikulai.

### Penutup

Demikianlah penyajian PGRI di dalam ikut serta menyukseskan pembangunan nasional lewat forum Kongres Bahasa Indonesia yang dimulikan ini. Terima kasih atas segala perhatian Saudara dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan/kekeliruan/kesalahan di dalam penyajian ini.

Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Rosidi, Ajip. 1973. *Pembinaan Minat Baca*. Jakarta: Panitia Buku Internasional DKI.
- Prawiranegara, Alamsjah Ratu. 1982. *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta.
- Moertopo, Ali. 1972. *Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun*. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.
- , 1974. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS.
- , 1978. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: CSIS.
- S. Budhisantoso. 1981. "Peranan Keluarga dan Pembinaan Budaya Bangsa." Dalam *Analisa Kebudayaan I/II*, 1981/1982.
- Joeseof, Daoed. 1981. "Aspek-aspek Kebudayaan yang Harus dikuasai Guru". Dalam *Analisis Kebudayaan I/II*, 1981.
- Hazairin. 1981. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Binaaksara.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia. *Himpunan Pidato Presiden RI Bidang Polkam-Ekuin-Kesra Tahun 1980*. Jakarta.
- Keterangan Pemerintah tentang RAPBN Tahun 1983/1984 pada Sidang DPR 1983*. Republik Indonesia.
- Koentjoroningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Poerbopranoto, Koentjoro. 1973. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Jakarta-Bandung: PT Eresco.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: PT Gramedia.
- , 1982. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- C.A. Perusan. 1976. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Gunung Mulia.

*Pidato Kenegaraan Presiden RI Soeharto di Depan Sidang DPR, 16 Agustus 1982.*

Samsuri. 1977. *Analisa Bahasa*. Jakarta: Erlangga.

Kartodirdjo, Sartono. 1978. *Sejarah Nasional Indonesia I*. Jakarta: Balai Pustaka.

-----, 1977. *Sejarah Nasional II*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sekretaris Jenderal MPR. 1978. *Ketetapan-ketetapan MPR RI*. Jakarta: Setjen MPR RI.

Panitia Seminar Pancasila. 1959. *Seminar Pancasila ke-1*.

Suwito, 1938. *Sosiolinguistik*. Surakarta: Henary Offset.

Taman Siswa. 1981. *Taman Siswa 30 tahun*. Yogyakarta.

-----, 1982. *Taman Siswa 60 tahun*. Yogyakarta: Percetakan Taman Siswa.

Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia. 1978. *UUD 1945, P-4 dan GBHN*. Jakarta.

-----, 1978. *Buku Materi Pelengkap Penataran*. Jakarta.

## **BAHASA ADMINISTRASI SEBAGAI BAHASA PELAYANAN**

**Bambang Sugema**

Lembaga Administrasi Negara  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

### **Pendahuluan**

#### **a. Tugas dan Fungsi Lembaga Administrasi Negara**

Ditegaskan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1971 "Lembaga Administrasi Negara (LAN) berfungsi membantu Presiden dalam menyempurnakan, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan dayaguna administrasi negara sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan dalam arti seluas-luasnya".

Selanjutnya dijabarkan dalam Keppres tersebut bahwa dalam menyelenggarakan rungsi tersebut, LAN mengemban tugas:

- a) menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dari segi ilmiah kepada Presiden mengenai penyempurnaan pembagian tugas, struktur organisasi dan tata kerja departemen-departemen dan badan-badan pemerintah lainnya;
- b) merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara;
- c) merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan pegawai negeri termasuk memberi petunjuk serta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan latihan dalam lingkungan departemen-departemen dan badan-badan pemerintah lainnya;
- d) memberikan pertimbangan-pertimbangan di bidang administrasi kepada instansi-instansi pemerintah lainnya yang memerlukan dan dipandang perlu oleh lembaga;

- e) menyelenggarakan hubungan dan kerja sama di bidang administrasi negara dengan instansi-instansi di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah menurut peraturan-peraturan yang berlaku;
- f) memperkembangkan serta memajukan ilmu administrasi negara di Indonesia termasuk dalam hal ini mengeluarkan buku-buku pedoman yang bersifat teknis administrasi di bidang tata administrasi pemerintahan.

Dari rumusan dalam Keppres tersebut tampak bahwa fungsi atau tugas LAN adalah "pelayanan". Ini diberikan melalui penerapan dan pengembangan administrasi berdayaguna. Namun, makalah dengan substansi kajian tentang bahasa Indonesia tidaklah sepenuhnya disusun dari kacamata tugas pokok LAN secara keseluruhan sebab untuk menyusun makalah seperti ini memerlukan waktu yang lebih longgar. Padahal, faktor kelonggaran waktu tersebut pada saat ini tidak tersedia. Oleh karena itu, makalah yang disusun hanya secara elementer dari kacamata tugas LAN di bidang pendidikan dan latihan, lebih khusus lagi hanya dari kacamata Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (STIA-LAN RI) sebagai salah satu satuan organisasi (unit) pendidikan dan latihan pada LAN. Tentang STIA-LAN RI ini disajikan pada Bab II.

Jadi perlu diberikan pembatasan bahwa makalah ini hanyalah disusun sebagai hasil pengalaman STIA-LAN RI (bukan dari LAN secara keseluruhan), dalam pengajaran bahasa Indonesia yang tercakup dalam kurikulum sebagai mata kuliah dasar diberikan selama 4 semester terus-menerus. Makalah ini disusun atas permintaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan suratnya No. 5/S/KBI/83 dalam rangka rencananya untuk menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia IV pada tanggal 22–26 November 1983.

#### **b. Bahasa sebagai Sarana Komunikasi yang Paling Berhasilguna**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang luas tersebut di atas, LAN sangat bergantung kepada (salah satunya) pemakaian dan *penggunaan bahasa yang mudah dan dapat dicerna* dengan baik dengan tidak mengubah dan menyimpang dari aturan bahasa Indonesia yang baku yang dalam istilah populer sekarang dinamakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik mengandung makna bahwa dalam pemilihan kata, penggunaan ragam bahasa, cukup memudahkan pihak lain dalam mencerna dan menanggapi serta memahaminya, sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang selalu mengikuti pola dan aturan bahasa yang baku.

Sesuai dengan fungsi dan tugas LAN tentunya diperlukan suatu bahasa administrasi yang cukup memudahkan dalam rangka menjamin kelancaran

jalannya administrasi pemerintahan sehingga terciptanya suatu pemerintahan yang bersih, berhasilguna dan berdayaguna. Hal ini akan sulit tercapai jika sarana utamanya, yaitu bahasa tidak menunjangnya. Jelasnya bahasa administrasi harus benar-benar mencerminkan hakikat administrasi, yaitu "pelayanan" yang merupakan tugas dan fungsi dari LAN sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Agar "pelayanan" terlaksana dengan baik, artinya tepat pada sasaran, diperlukan *komunikasi* yang baik. Komunikasi yang baik hanya dimungkinkan dengan penggunaan bahasa yang baik pula. Jadi, bahasa adalah sarana komunikasi yang paling berhasilguna.

Dalam hubungan ini bagaimanakah kita pada dewasa ini menciptakan bahasa "pelayanan" dalam rangka menunjang kelancaran pembangunan. Dalam rangka itu mulalah kertas kerja ini kami beri judul "Bahasa Administrasi sebagai Ragam Bahasa Pelayanan".

### c. Sistematika Penulisan

Proses administrasi modern pada hakikatnya adalah memudahkan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. "Memudahkan" di sini tentunya dengan tetap berpegang teguh kepada segala norma tata kerja, koordinasi, peraturan perundangan yang berlaku dan sebagainya. "Memudahkan" dalam arti pelayanan harus terlaksana, baik dalam tugas-tugas pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan.

Agar sesuai dengan tugas dan fungsi LAN, serta dalam rangka memudahkan para pembaca dan peminat bahasa untuk mengikuti penyajiannya, makalah yang berjudul "Bahasa Administrasi sebagai Ragam Bahasa Pelayanan" ini penulis susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

**Bagian Pendahuluan** menguraikan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara, bahasa sebagai sarana komunikasi administrasi yang paling efektif, dan sistematika penulisan.

**Bagian Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Republik Indonesia (STIA-LAN RI)** menguraikan STIA-LAN RI sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan serta penjelasan tentang pengajaran bahasa Indonesia di STIA-LAN RI.

**Bagian Permasalahan bahasa Indonesia** menguraikan perlunya pembakuan bahasa, ketidaksejajaran dalam pembakuan istilah.

**Bagian Kesimpulan dan Saran** menguraikan kesimpulan-kesimpulan uraian dalam bab sebelumnya dan mengajukan beberapa bahan pertimbangan dalam pembinaan bahasa Indonesia pada masa yang akan datang.

### c. Pengajaran Bahasa Indonesia di STIA-LAN RI

Seperti telah dinyatakan di muka bahwa bahasa Indonesia adalah sarana paling efektif dalam komunikasi administrasi, dan bahasa administrasi harus

mencerminkan bahasa pelayanan sehingga benar-benar administrasi berperan maksimal dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan. Salah satu unit sebagai pelaksanaan tugas pokok LAN adalah *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi* yang bertugas menyiapkan tenaga ilmiah yang berkualifikasi sarjana dalam ilmu administrasi. Menyadari betapa berat beban yang dipikul para pemikir administrasi lulusan STIA-LAN RI, penyaji berkeyakinan bahasa yang baik dan benar akan mampu membantu meringankan beban yang berat tersebut. Penulis berkeyakinan dengan penguasaan bahasa yang memadai akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan ataupun tugas-tugas pelayanan. Selain itu, bahasa memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan arah dan jalannya kehidupan manusia, dengan kata lain bahasa mempunyai *power*. Pemakaian bahasa yang salah akan dapat menyesatkan seseorang. Sebaliknya, dengan bahasa yang baik dan digunakan dengan arif akan menjadikan seseorang bijaksana.

Menyadari betapa pentingnya bahasa dalam komunikasi antar-manusia, dalam dunia administrasi, STIA-LAN RI dalam kurikulumnya menyediakan 4 semester untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Silabus mata kuliah bahasa Indonesia di STIA-LAN RI lebih menekankan aspek *komunikatif administrasi* daripada segi teoritis kebahasaan, tanpa mengabaikan pola dan kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Harapan yang ingin dicapai dari pelajaran bahasa Indonesia di STIA-LAN RI tersebut adalah agar para lulusan memiliki kemampuan yang memadai dalam penguasaan bahasa Indonesia yang pada gilirannya kelak akan turut membantu memudahkan dalam memberikan pelayanan administrasi sehingga tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tidak terhambat.

#### a. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – Lembaga Administrasi sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan

Berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1971 (sesuai juga Keppres Nomor 34/1972 serta Inpres Nomor 15/1974), antara lain ditegaskan bahwa LAN mempunyai tugas "merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan pegawai negeri, termasuk memberi petunjuk, serta melakukan penguasaan atas penyelenggaraan pendidikan dan latihan dalam lingkungan departemen-departemen dan badan-badan pemerintah lainnya".

Kemudian terbit Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 003/LAN/SET/HK/1975, yang dalam pasal 11 menetapkan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (STIA-LAN RI) yang merupakan satu pusat pendidikan tinggi pegawai negeri bertugas memberikan pendidikan akademik kepada pegawai negeri di bidang administrasi, merumuskan kebijaksanaan teknis,

memberikan bimbingan dan pembinaan serta mengawasi seluruh pendidikan akademik pegawai negeri yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

Dari kutipan di atas tampak bahwa STIA-LAN RI bukan saja bertugas menyelenggarakan sendiri pendidikan tinggi kedinasan, tetapi berkewajiban juga membina pendidikan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah lainnya. Dalam hubungan ini dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan, STIA-LAN RI pertama-tama harus mampu menjadikan dirinya sebagai acuan lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam *disiplin (ilmu) administrasi* yang diselenggarakan instansi-instansi pemerintah.

#### **b. Perkuliahan Bahasa Indonesia di STIA-LAN RI**

Perkuliahan bahasa Indonesia di STIA-LAN RI seperti telah diuraikan di muka tidak ditujukan agar para lulusannya menguasai teori bahasa Indonesia secara mendalam, karena pengajaran seperti itu adalah menjadi tugas fakultas sastra. Pengajaran bahasa Indonesia di STIA-LAN RI lebih ditujukan kepada kemampuan berbahasa Indonesia yang memadai dan berpola kepada kaidah kebahasaan yang baku dalam disiplin administrasi.

Tujuan ataupun hasil yang akan dicapai melalui kuliah bahasa Indonesia selama 4 semester di STIA-LAN RI adalah kemampuan praktis berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, silabusnya disusun sebagai berikut.

- a) sejarah perkembangan bahasa Indonesia,
- b) ejaan,
- c) gejala bahasa,
- d) alat-alat eksplisit bahasa,
- e) politik bahasa Nasional,
- f) diksi,
- g) komposisi, meliputi paragraf, kerangka karangan, dan penyusunan karangan,
- h) kalimat efektif,
- i) definisi.

#### **c. Permasalahan Bahasa Indonesia**

Ingin penyaji mengemukakan pendapat bahwa perkembangan pengetahuan bahasa Indonesia termasuk paling pesat dibanding pengetahuan lainnya, terutama di Indonesia, bahkan termasuk pula di dunia perguruan tinggi non-fakultas bahasa. Perkembangan yang demikian itu sangat membanggakan dengan harapan semoga makin pesat lagi pada masa-masa datang sehingga tercapailah harapan bahasa Indonesia selain menjadi bahasa resmi dan bahasa nasional juga benar-benar menjadi bahasa ilmiah dan bahasa teknologi modern.

Menyimak keadaan sehari-hari masalah kebahasaan itu, ternyata di sana-sini ditemukan adanya ketidaksejajaran, baik yang disebabkan para pemakai bahasa pada umumnya, maupun karena kekurangcermatan lembaga yang bertugas dalam bidang pembinaan bahasa. Dalam kesempatan ini penulis berharap agar dalam pembakuan tetap berpegang teguh kepada watak asli bahasa Indonesia, baik fonemnya maupun unsur-unsur bahasa lainnya. Dewasa ini tampaknya pembakuan bahasa kurang memperhatikan asli watak bahasa Indonesia itu.

Karena itu sebenarnya ada juga kekhawatiran penyaji bahwa kalau pembakuan tersebut kurang diperhatikan, bagian terbesar bangsa kita akan tidak mampu lagi menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar.

#### a. Pembakuan Bahasa Indonesia

##### a) Pembakuan Sintaksis

Dalam pembakuan sintaksis penulis (penyaji) berpendapat bahwa para pembina bahasa sudah cukup berusaha sehingga pada umumnya pola kalimat bahasa kita sudah sesuai dengan kaidahnya. Walaupun masih sering kita baca dan dengar orang dalam kesempatan berbicara resmi menggunakan kalimat yang tidak berpola kalimat bahasa Indonesia yang baku, maka hal demikian tentunya disebabkan kekurangcermatan dan rasa bahasa pemakai bahasa itu yang tipis. Berikut ini beberapa contoh kalimat yang ditulis di depan kantor-kantor pemerintah yang tidak berpola kalimat bahasa Indonesia baku:

*Dengan semangat 17 Agustus 1945 kita menyiapkan untuk melaksanakan Pelita IV. Seharusnya: Dengan semangat 17 Agustus 1945 kita siapkan pelaksanaan Pelita IV. atau*

*Dengan semangat 17 Agustus 1945 kita siap melaksanakan Pelita IV.*

*Dirgahayu RI 38. Seharusnya: Dirgahayu RI.*

##### b) Pembakuan Susunan Kata

Penulis (penyaji) yakin para pembina bahasa telah berbuat banyak tentang penulisan susunan kata bahasa Indonesia, yaitu harus berhuruf *diterangkan-menerangkan (DM)* meskipun dalam praktik sehari-hari masih saja banyak pemakai bahasa tidak mengindahkan kaidah pokok bahasa kita. Dengan mudah kita lihat contoh-contoh susunan kata yang tidak baku, antara lain, *Kartika Plaza, President Hotel, Siltan Hotel*, dan lain-lain.

### c) Pembakuan Kata/Istilah

Dalam bahasa Indonesia mungkin yang paling banyak membutuhkan perhatian adalah dalam hal pembakuan kata atau istilah, baik yang diambil dari bahasa kita sendiri (daerah) maupun hasil serapan dari bahasa asing.

Pembakuan kata/istilah ini sangat penting dilakukan terutama agar bahasa Indonesia mampu menyerap segala kepentingan permasalahan teknologi modern.

Permasalahan pembakuan istilah dalam bahasa kita dewasa ini sangat rumit dan tidak mudah dipahami oleh para sarjana sekalipun, apalagi oleh masyarakat umum. Berikut ini dapat penulis kemukakan pembentukan istilah sebagai bahan perbandingan:

#### (a) Hasil Serapan Lama

|                  |         |                 |
|------------------|---------|-----------------|
| <i>fatsal</i>    | menjadi | <i>pasal</i>    |
| <i>figir</i>     | menjadi | <i>pikir</i>    |
| <i>akhli</i>     | menjadi | <i>ahli</i>     |
| <i>voorchot</i>  | menjadi | <i>persekot</i> |
| <i>chauffeur</i> | menjadi | <i>sopir</i>    |
| <i>almari</i>    | menjadi | <i>lemari</i>   |
| <i>asbab</i>     | menjadi | <i>menjadi</i>  |
| <i>stroop</i>    | menjadi | <i>sirop</i>    |
| <i>sauveneir</i> | menjadi | <i>supenir</i>  |
| <i>bureau</i>    | menjadi | <i>biro</i>     |

#### (b) Hasil Serapan Dewasa Ini

|                        |         |                     |                   |
|------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| <i>khusus</i>          | menjadi | <i>khusus</i>       | (Jadi tetap saja) |
| <i>service</i>         | menjadi | <i>servis</i>       |                   |
| <i>success</i>         | menjadi | <i>sukses</i>       |                   |
| <i>system/systeem</i>  | menjadi | <i>sistem</i>       |                   |
| <i>psychology</i>      | menjadi | <i>psikologi</i>    |                   |
| <i>effective</i>       | menjadi | <i>efektif</i>      |                   |
| <i>analysis</i>        | menjadi | <i>analisis</i>     |                   |
| <i>neveau</i>          | menjadi | <i>nivo</i>         |                   |
| <i>organization</i>    | menjadi | <i>organisasi</i>   |                   |
| <i>standardization</i> | menjadi | <i>standarisasi</i> |                   |
| <i>coordination</i>    | menjadi | <i>koordinasi</i>   |                   |
| <i>cooperation</i>     | menjadi | <i>koperasi</i>     |                   |

dan lain-lain.

Memperhatikan pembentukan istilah seperti contoh di atas tampak bahwa bentuk istilah hasil bahasa Indonesia terdahulu lebih mencerminkan kaidah fonemik bahasa Indonesia, sebaliknya pembakuan istilah yang dilakukan dewasa ini menunjukkan keaburan fonemik bahasa kita. Selain itu pada bahasa kita dewasa ini ada kecenderungan mengikuti fonem bahasa asing terutama dalam nama-nama bulan. Mengapa nama *Pebruari* diubah menjadi *Februari*, *Nopember* menjadi *November*, bukankah nama *Pebruari* dan *Nopember* itu adalah nama Indonesia meskipun hasil serapan dari bahasa asing?

Dalam kaitan ini kiranya ketegasan dari instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan bahasa untuk segera mengeluarkan pembakuan istilah yang benar-benar berdasar fonemik bahasa Indonesia. Di samping itu, penulis lihat juga bahwa di antara pemikir dan ilmuwan bahasa kita belum sependapat tentang pembakuan istilah ini. Ada ahli bahasa kita menulis *analisis* sedangkan ahli lainnya masih menulis *analisa*.

#### b. Ketidaksejajaran dalam Pembentukan Istilah

Dengan mudah kita dapat pembenturan istilah yang tidak sejajar dengan kaidah bahasa kita, umpamanya sebagai berikut.

Kata *ahli* yang baku dalam bahasa kita berasal dari bahasa Arab *akhli*. Bunyi *kh* diserap menjadi *h* karena bunyi *kh* itu lebih dekat dengan fonem bahasa kita *h*. Sebanding dengan itu kata *khusus* dari bahasa Arab juga diserap ke dalam bahasa kita menjadi *khusus*. Mengapa bukan *husus*?

Kata *psikologi* hasil serapan dari kata Inggris *psychology*. Bukanlah *ch* dalam kata *psychology* juga lebih dekat dengan bunyi *h*, kata *architec* diserap ke dalam bahasa kita *arsitek* (?).

Kata *service* dari bahasa Inggris menjadi *servis*, bentuk katanya adalah *diservis*, *serviskan*, *menyervis*, *menyerviskan*.

Kata *success* (Inggris) diserap ke dalam bahasa kita menjadi *sukses*. Bentuk katanya adalah *sukseskan*, *disukseskan*, *suksesnya*, *mensukseskan*.

Dari dua contoh di atas (*servis* dan *sukses*) tampak ketidaksejajaran pembentukan katanya. Kata bentuknya *menyervis* sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia awalan *me* diikuti bunyi *s*, *s* menjadi luluh, sedangkan kata *sukses* mengapa menjadi *mensukseskan*? Bukankah harus *menyukseskan*(?).

Kita lihat, yang lain lagi. Yang penulis maksudkan adalah bentuk kata *photo* dan *photocopy* menjadi:

|           |               |                |
|-----------|---------------|----------------|
| difoto    | memfotokan    | memfotokopikan |
| difotokan | difotokopi    | fotokopinya    |
| memfoto   | difotokopikan |                |
| memfoto   | memfotokopi   |                |

Di samping itu, mengapa bunyi *v* dan *f* tidak diserap saja ke dalam fonem bahasa kita yang asli *p*. Dalam bentukan kata-kata *foto* menjadi *memfoto* akan bermakna *meletakkan*, *memberi* atau *menyematkan* foto. Padahal yang dimaksud adalah mengambil gambar yang dilakukan berulang-ulang. Pengertian itu akan dapat dipenuhi dengan kata *memoto*, hal tersebut dapat dilakukan jika bunyi *f* diserap menjadi *p* sebab awalan *me* diikuti *p*, *p* akan luluh *memoto* bukan *mempoto*.

#### 4. Kesimpulan dan Saran-saran

##### a. Kesimpulan

Penulis bukan seorang ahli bahasa oleh karena itu kesempatan untuk menyajikan kertas kerja dalam Kongres Bahasa IV yang mulia ini, benar-benar suatu penghargaan yang tidak ternilai. Namun, kiranya panitia dan peserta kongres yakin bahwa penulis meskipun bukan ahli, tetapi mohon dicatat sebagai pecinta bahasa Indonesia yang terdepan.

Kertas kerja ini disusun sesuai dengan bidang tugas penulis sebagai praktisi bahasa sehingga kertas kerja ini lebih mencerminkan bahasa Indonesia *keseharian*.

Sebagai orang yang berkecimpung dalam ilmu administrasi, ilmu yang mengembangkan berhasilnya tugas-tugas pelayaran, penulis *mengakui* bahwa bahasa Indonesia merupakan wahana komunikasi yang paling efektif untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu administrasi di Indonesia yang sekaligus menunjang berhasilnya pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Ini lebih memperkuat keyakinan penulis bahwa bahasa administrasi sebagai ragam bahasa pelayaran.

Dari uraian di atas ternyata bahasa kita perkembangannya demikian maju dan sangat membanggakan. Dalam perkembangan yang pesat itu penulis merasakan adanya hal positif maupun yang negatif. Kenegatifannya terutama dalam pembentukan istilah-istilah baru yang cukup rumit dicerna oleh para cendekiawan sekalipun, apalagi oleh sebagian terbesar anggota masyarakat kita.

Keadaan demikian bukan saja berakibat akan sangat sedikit di antara kita yang mampu berbahasa yang baik dan benar, baik lisan maupun tertulis, lebih jauh dari itu akan menghambat pembangunan karena sarana penyampaian informasi yang utama, haitu bahasa dapat menimbulkan kesenjangan.

##### b. Saran-saran

Peranan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang hingga saat ini umum mengetahui, sangat berjasa dalam membina bahasa Indonesia. Penulis berharap agar keberhasilan

tersebut terus ditingkatkan sampai dengan bahasa Indonesia benar-benar menjadi bahasa ilmiah dan teknologi modern, di samping bahasa nasional dan bahasa resmi.

Momentum kegairahan masyarakat akan bahasa Indonesia saat ini sangat besar dan sangat menggembirakan kita semua. Penulis sarankan agar segera dapat dimulai atau dilanjutkan kampanye besar-besaran agar segera dapat dimulai atau dilanjutkan kampanye besar-besaran tentang keharusan menggunakan istilah bahasa Indonesia, selagi masih tersedia kata bahasa Indonesia untuk keperluan itu. Umpamanya, kita tidak perlu lagi memakai kata *tailor* alih-alih kata *penjahit*; *barbershop* alih-alih kata *pemangkas rambut*.

Cukup berasalan kalau penulis khawatir jika pada suatu saat ada seseorang mencari tukang cukur tidak dapat menemukannya karena yang ada hanya *babershop*.

Satu hal lagi kata serapan dari bahasa asing seperti *fotokopi* sesuai dengan hukum bahasa kita (DM) mestinya *kopifoto*, penulis sarankan agar dibakukan saja menjadi *kopifoto*. Mungkin pertama-tama terasa janggal, seperti dulu *mobrig* (*mobil brigade*) diubah menjadi *brimob* (*brigade mobil*), waktu baru diubah memang terasa janggal, bagaimana sekarang (?)

Dalam pembentukan istilah, penulis sarankan agar fonem hang berasal dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan sejauh mungkin disesuaikan dengan fonem bahasa kita, sebaliknya serap saja ke dalam fonem bahasa kita. Hal tersebut penting supaya bahasa kita dapat mudah dan cepat dipahami oleh bangsa kita seluas-luasnya.

Pengakuan dan keyakinan tentang pentingnya bahasa administrasi sebagai ragam bahasa pelayanan, hendaklah didukung pula oleh langkah-langkah nyata pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, misalnya melalui:

- a. kerja sama yang terpadu antara LAN dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam penulisan dan menerbitkan buku-buku administrasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik;
- b. menghidupkan lagi tim (yang pernah ada sebelum tahun 1965) penyusunan peristilahan (*glossary*) ilmiah dalam ilmu administrasi dalam bahasa Indonesia yang baku.

## **PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA DAN PEMBANGUNAN BUKU**

**Harris M. Nasution**

**Ikatan Penerbit Indonesia**

### **Pendahuluan**

Dalam rangka berlangsungnya Kongres Bahasa Indonesia IV, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengharapkan kesediaan kami untuk menulis sebuah kertas kerja yang akan disajikan dalam konores tersebut.

IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) adalah satu organisasi profesi penerbit swasta yang didirikan sejak 17 Mei 1950. Tujuan IKAPI adalah meningkatkan penerbitan buku secara kuantitatif dan kualitatif. IKAPI aktif melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan perbukuan sebagai usaha industri, sejajar dengan sikap moral untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dewasa ini IKAPI berada dalam naungan pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kami memilih judul "Mengembangkan Bahasa dan Pembangunan Buku" untuk kertas kerja ini adalah untuk dua tujuan utama yang saling berkaitan. Pertama, pengembangan bahasa Indonesia, memelihara dan mempergunakannya dengan baik dan benar, merupakan cita-cita dan pelaksanaan yang dituntut kepada semua anggota dalam usaha penerbitan buku. Kedua, pembangunan buku, dan mengandung makna membina, mendirikan, membangkitkan, dan menegakkan. Ke arah itulah ditujukan pelaksanaan cita-cita dalam bidang perbukuan, pembangunan!

Tidak mudah untuk menulis/menyajikan suatu kertas kerja dalam satu forum kongres bahasa. Terasa beratnya untuk menyusun kata demi kata mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, para ahli bahasa yang hadir dalam kongres ini akan maklum dan dapat memperbaiki

kesalahan susunan kata dan kalimat, justru kami sebagai penerbit, belum termasuk dalam jajaran yang berpengalaman cukup dalam tata bahasa.

Berbicara soal bahasa, kita tidak melepaskan diri dari soal buku. Buku menjadi sayap perkembangan bahasa. Buku adalah bahasa tulisan. Buku berbicara dengan bahasa tanpa suara. Bicara buku dapat disimpan dan apabila diperlukan ia selalu bersedia untuk diajak bicara.

Banyak kata-kata semboyan yang diberikan kepada buku. Buku adalah guru yang tak pernah jemu. Buku adalah guru yang baik, tanpa pernah bertemu muka. Buku menjadi sarana pokok untuk menyimpan dan menyebarkan khazanah dunia ilmu pengetahuan. Tahun Buku Internasional tahun 1972, Konferensi Umum UNESCO, telah memproklamasikan semboyan, "Buku untuk semua orang".

Buku adalah produk industri yang mempunyai fungsi tersendiri dibandingkan dengan produk lainnya. Ia bukan hanya barang dagangan yang bertujuan komersial. Buku harus membawakan idealisme yang diperlukan oleh masyarakat dalam menunjang mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, buku pun harus diproduksi secara terpadu, antara mengarang/penerjemah, penerbit, ilustrator, pencetak, toko buku, dan konsumen membaca. Kehilangan salah satu partner, berarti gagalnya produksi.

Terdapat hubungan yang erat antara bahasa dan buku.

### **Permasalahan**

Terdapat tugas dan kewajiban yang berat pada kita dalam menunjang pelaksanaan Pelita IV yang segera kita masuki. Di dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983. Bidang Kebudayaan dan Bidang Pendidikan, yang bertalian dengan masalah pengembangan bahasa dan penerbitan buku, terdapat hal berikut:

#### **Bidang Kebudayaan**

- a. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar.
- b. Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu sarana identitas nasional.

#### **Bidang Pendidikan**

- a. Pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia perlu makin ditingkatkan dan diperluas sehingga mencakup semua lembaga pendidikan dan menjangkau masyarakat luas.
- b. Kepustakaan serta penerbitan, penulisan dan penerjemahan buku dan terbitan lainnya, perlu lebih ditingkatkan jumlah dan mutunya sehingga dapat lebih menunjang program-program pendidikan dan pembangunan bangsa.

Dari kutipan di atas sudah jelas tugas yang harus kita jalankan bertalian dengan pengembangan bahasa dan peningkatan perbukuan.

Dalam usaha pengembangan bahasa, memang sudah ada modal dasar yang kita miliki, warisan tak ternilai harganya, yaitu Sumpah Pemuda. Dalam suasana kongres bahasa seperti yang berlangsung sekarang kita makin terkesan akan arti dan jasa para pemuda Indonesia yang telah mendapat anugerah pemikiran dari Allah Swt, untuk mencetuskan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dengan susunan kalimat yang sederhana:

Berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.

Mereka adalah pelopor, pejuang dan representasi kehendak dan sikap masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan beraneka ragam bahasa.

Sejak Sumpah Pemuda itu dicetuskan, kedudukan bahasa Indonesia berada dalam kondisi stabil. Suku bangsa yang mempunyai bahasa daerah, walaupun dalam jumlah mayoritas, berikhlas hati dan melaksanakan dalam praktik, untuk mempergunakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa suku daerah minoritas. Inilah satu kebanggaan rohani. Jika dibandingkan dengan negara tetangga atau negara berkembang lainnya yang belum berhasil mempunyai satu bahasa kesatuan, kita bersyukur dan bahagia.

Pemikiran manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, memasyarakatkan idiologi negara, melaksanakan usaha demi usaha dalam pembangunan, disalurkan melalui bahasa, baik lisan maupun tulisan. Tanpa bahasa yang cukup tangguh untuk menguraikan dan menjabarkan semua tujuan, bisa terjadi kebekuan. Karena itu, sudah tidak dapat dimungkiri lagi bahwa bahasa memerlukan kesempurnaan dan kekuatan untuk mencapai tujuan pembangunan dan maksud membangkitkan manusia Indonesia seutuhnya.

Bagaimana usaha memantapkan perkembangan bahasa untuk dapat mencapai setiap warga negara? Bagaimana supaya bahasa ibu yang keramat itu dapat dihayati, dimengerti, dibaca dan diucapkan? Bagaimana pula supaya bahasa yang dalam perkembangan ini mampu menguraikan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir?

Dalam kenyataan, pertanyaan di atas tentu sudah ada yang terjawab, tetapi masih memerlukan penyempurnaan. Kongres IV ini di antaranya akan mengarah ke sana.

Kami sebagai penerbit buku, dihubungkan dengan para penulis, pengarang atau penerjemah, masih menghadapi kesulitan dalam penulisan naskah-naskah untuk perguruan tinggi atau teknologi. Hal itu terbentur pada kemampuan istilah yang belum memadai atau karena si penulis sendiri belum mampu menjangkau pembentukan istilah baru. Istilah atau pembentukan istilah baru yang telah ditetapkan oleh Pengembangan Bahasa belum tersebar luas sebagaimana diharapkan. Perlu satu usaha terpadu antara Pusat

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan penerbit, pengarang dan penerjemah untuk mencapai tujuan tersebut. Penerbit yang mempunyai staf editor bersama-sama dengan pengarang dan penerjemah dapat memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan perkembangan bahasa.

Tercatat dalam sejarah bahwa tidak sedikit penerbit buku yang aktif dan berjasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, membantu penyebaran dan perkembangan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu ini. Nama penerbit Balai Pustaka tercatat di antaranya.

Diketahui bahwa sudah banyak buku yang diterbitkan langsung oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tentang berbagai petunjuk, baik ejaan yang disempurnakan maupun tentang istilah ataupun kata-kata baru. Namun, menyebarkan buku tersebut amat terbatas. Apakah tidak lebih baik, manakala cetak lanjutan dari buku-buku tersebut, yang hak ciptanya berada di tangan (tim atau Departemen?), ditawarkan kepada penerbit swasta, langsung atau melalui koordinasi IKAPI.

Patut disukuri adanya kerja keras tanpa pamrih dari para ahli bahasa, khususnya tenaga-tenaga yang terhimpun dalam Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Namun, betapapun derasnya perkembangan itu kalau tidak diiringi dengan derasnya arus penyampaian dan penjangkauan terhadap orang atau masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan bahasanya, hal ini akan kurang baik. Masih cukup banyak terdapat pemakaian bahasa Indonesia yang tidak benar dan tidak baik, tulisan atau lisan. Hal ini dijumpai pada surat-surat kabar ataupun buku atau dalam ucapan-ucapan pidato. Masalahnya karena mereka belum terjangkau oleh pembinaan dan pengembangan.

Semua orang tentu ingin mempergunakan bahasa yang baik dan benar. Mempergunakan bahasa yang salah itu tidak disengaja. Masalahnya adalah karena si pemakai tidak serius mengikuti perkembangan bahasa atau perkembangan bahasa itu sendiri tidak sampai kepada si pemakai.

Usia bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sudah mencapai umur yang cukup tua, 55 tahun. Peranan waktu yang demikian lanjut, seharusnya kita sudah sampai pada pengembangan penyempurnaan. Seharusnya memang kita sudah harus merasa malu manakala masih terdapat pemakaian bahasa dalam bacaan sehari-hari, surat kabar, majalah atau buku, jauh dari baik dan benar, bahkan dalam ejaan pun banyak terdapat kekeliruan.

Terasa perlunya penetapan politik bahasa nasional yang memberi arah, praktis dan mengharuskan penggunaan bahasa secara konsekuen, bahasa yang baik dan benar dalam tindakan.

Seperti telah diuraikan tadi, peranan pers dan buku cukup penting dalam pengembangan bahasa.

Data sementara yang tercatat pada IKAPI, tahun-tahun terakhir ini

adalah sekitar 4.000 judul buku yang diterbitkan setiap tahun. Jumlah ini belum termasuk buku-buku yang diterbitkan oleh pemerintah/departemen-departemen dan lain-lainnya. Sebutkanlah bahwa tahun yang lalu diterbitkan 5.000 judul buku dengan oplah rata-rata 5.000 eksemplar. Perkiraan itu berarti ada 14 judul buku yang terbit setiap hari dikaitkan 5.000 eksemplar atau 70.000 buku. Buku itu diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Masalahnya apakah buku itu yang nota bene bisa menjadi tolak ukur bagi pembacanya dalam pemakaian bahasa yang baik dan benar, sudah mempergunakan bahasa baku sebagaimana diharapkan? Buku itu akan dibaca, disimpan dalam lemari pribadi atau perpustakaan dan diulang lagi membacanya oleh satu atau banyak orang.

Manakala buku yang sampai setiap hari ke tangan pembaca adalah sekian jumlahnya, penyebaran dan penerbitan surat kabar, majalah masih berlipat ganda, jutaan lembar. Sampai di mana pengaruh pemakaian bahasa yang kurang baik dan benar, jika terdapat dalam bacaan tersebut, terhadap pembaca?

Memang ada alasan yang dapat dimajukan oleh pengasuh surat kabar tentang terdapatnya pemakaian kata yang tidak menurut tata bahasa, yaitu penyusunan berita/tulisan dalam surat kabar perlu mengejar waktu. Berbeda dengan penyusunan buku, terdapat cukup waktu. Namun, harus dipertanyakan, sejauh mana batas waktu bahwa pemakaian bahasa dalam surat kabar atau buku harus dapat menjadi pembimbing bagi pembaca.

Dari dua media yang cukup tangguh untuk membantu pengembangan bahasa, yaitu buku dan surat kabar, ada satu kepastian, ialah buku atau surat kabar yang mempunyai susunan bahasa yang baik dan benar, positif akan menunjang pembinaan bahasa. Sebaliknya, kedua media tersebut dapat merusak, sekurang-kurangnya meragukan, mengelirukan dan memperlambat perkembangan.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam usaha pengembangan bahasa ialah masalah minat baca. Masyarakat yang banyak membaca dapat mempercepat tercapainya pembinaan dan pengembangan bahasa.

Minta (*interest*) membaca adalah karena dorongan keinginan, sikap, perasaan, perhatian, dan sebagainya. Karena itu, ada faktor yang harus digalakkan untuk sampai kepada minat membaca. Termasuk dalam faktor itu adalah fisik buku, isi ilustrasi/disain, susunan bahasa dan faktor harga yang relatif murah, dapat terjangkau oleh kantong masyarakat umum.

Sudah sering terjadi pembahasan bahwa minat baca dalam masyarakat kita, (*reading interest, reading habit*), masih rendah. Benarkah demikian?

Menurut hemat kami, pembahasan dalam hal ini dapat diberikan dalam penempatan dua hal.

Pertama, dibandingkan dengan negara maju, seperti Jepang dan Inggris masyarakat kita masih jauh ketinggalan.

Kedua, pengalaman menunjukkan bahwa pada masa-masa akhir ini, setiap ada pameran buku, baik di daerah atau diibukota, minat terhadap buku dan pembelinya cukup memuaskan. Minat baca itu ada dan bergerak di tengah masyarakat.

Sambutan masyarakat terhadap adanya pameran buku di daerah mengembirakan. Banyak buku yang diterbitkan oleh para penerbit yang kebanyakan berada di ibu kota (Jakarta) tidak sampai penyebarannya ke daerah. Hal itu adalah karena masalah teknis. Di antaranya adalah karena mahalnya ongkos kirim, berbeda dengan ongkos kirim yang rendah untuk koran dan majalah. Penyebab lainnya adalah karena pelaksanaan aturan perdagangan yang harus melalui toko buku setempat. Toko-toko buku masih kurang jumlahnya dan mempunyai modal yang relatif lemah. Untuk toko buku dan penerbit masih sulit mendapat sentuhan kredit bank bahwa buku tidak dapat dijadikan agunan.

Minat membaca bukanlah bakat yang terbawa lahir. Ia harus dibiasakan, diusahakan, dipelajari, dijadikan sikap dan harus diyakinkan sebagai salah satu faktor untuk mencapai keberhasilan. Orang yang sudah sampai pada taraf minat membaca, menjadikan ia gemar membaca, tentu ia akan dapat mencapai prestasi tinggi, makin besar motivasi dan makin tinggi hasil kerja dan kesuksesannya.

Adanya minat membaca di tengah masyarakat, akan lebih memudahkan usaha pengembangan dan pembinaan bahasa melalui media bacaan.

## Pembahasan

Dasar yang paling berharga sudah ada pada kita: sumpah untuk menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Aparat pemerintah yang berusaha membina dan mengembangkan bahasa itu pun sudah bergerak sewajarnya.

Para ahli bahasa cukup dan meyakinkan. Alat penyebaran, radio, televisi, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan.

Masih tersendat-sendat pembinaan dan pengembangan bahasa itu? Sudahkan ada target atau program dan jangka waktu yang ditentukan sehingga pengembangan itu sudah *take off* atau sudah *landing* atau masih di landasan menunggu penumpang?

Gerakan pengembangan bahasa tidak dapat dicapai hanya dengan aktivitas suatu lembaga atau instansi. Usaha harus terpadu dengan mengikutsertakan tenaga-tenaga yang diperlukan. Hal itulah yang tentu mendorong Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk mengadakan kongres yang

sekarang sedang berlangsung. Kongres itu akan menentukan dan mengambil keputusan penting dan menggariskan program pelaksanaan pengembangan.

Putusan dalam kongres ini tentu penting. Namun, pelaksanaan program akan lebih penting lagi. Menurut hemat kami, program itu pun harus dijadikan/dijalankan secara terpadu, lanjutan dari jiwa kongres ini.

Dalam pembahasan ini, kami dari IKAPI akan mengkhususkan diri dalam hal yang berkaitan dengan tugas organisasi profesi kami sebagai penerbit buku.

IKAPI sebagai organisasi yang berada dalam pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sudah positif dapat menempatkan diri sebagai partner dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa, bersama-sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Khusus dalam menerbitkan buku yang berkaitan dengan pengembangan bahasa, IKAPI akan mendudukan masalah, sebagai pendukung, mendahulukan idiologi pembangunan bangsa melebihi tujuan komersial segi usaha. Untuk itu IKAPI menyediakan diri dalam kedudukan yang wajar, untuk ikut berpartisipasi menyebarkan menerbitkan buku yang bertalian dengan pembinaan dan pengembangan bahasa.

Dalam pelaksanaannya tentu banyak hal yang perlu menjadi perhatian, di antaranya sebagai berikut.

- a. Naskah-naskah/buku yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang diterbitkan secara terbatas supaya diserahkan izin penerbitannya kepada anggota-anggota IKAPI sebagai koordinator, dengan ketentuan yang dapat dimusyawarahkan melaksanakannya.
- b. Untuk menjangkau harga penjualan yang relatif murah sehingga dapat tersebar luas, secara bersama-sama harus diusahakan:

a) bahan baku

- a) bahan baku kertas yang bebas bea atau yang memperoleh subsidi, khusus untuk buku yang bertalian isi dengan pembinaan/pengembangan bahasa;
- b) ongkos kirim khusus untuk buku tersebut diberikan keringanan, minimal seperti ongkos kirim yang diberikan kepada surat kabar;
- c) harga penjualan ditentukan secara bersama;
- d) kredit permodalan akan lebih memperlancar tujuan usaha ini.

Rencana tersebut dapat dijadwalkan, berlaku selama program pengembangan dalam Pelita IV. Naskah-naskah buku yang dimaksudkan tidak hanya

terbatas pada kepunyaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi mencakup semua naskah/buku yang berisi pelajaran/pengembangan bahasa, termasuk kamus dan lain-lain.

Pemakaian bahasa tidak terbatas pada satu kelompok tertentu. Tidak mungkin kalau pelaksanaan pemakaian hang baik dan benar itu hanya dikuasai oleh anak didik atau guru-guru atau lingkungan intelektual saja. Perkembangan bahasa yang terjadi sekarang cukup deras arusnya dipandang dari segi pemakaian istilah-istilah baru. Karena itu, penyebarluasan pun harus bersifat deras, aktif, dan menyeluruh. Penyebaran via buku adalah salah satu usaha yang efektif.

Segala ketetapan yang telah diambil oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, buku-buku petunjuk yang disusun oleh para ahli bahasa, keputusan-keputusan hang diambil di dalam kongres ini, harus tersebar luas untuk menjadi pedoman dan pegangan. Rakyat Indonesia berpenduduk 150 juta lebih. Sebutkanlah seperlima dari jumlah itu harus mengetahui dan mempunyai pedoman pemakaian bahasa yang baku. Bukankah itu berarti harus tersedia buku pedoman dan buku petunjuk lainnya sebesar sekian juta yang diperlukan. Apakah artinya jika oplah buku untuk penyebaran bahasa itu hanya berkisar 5.000 eksemplar saja? Di sinilah letaknya uluran tangan pemerintah bersama-sama swasta melakukan aksi, aktif seperti disebutkan sebelumnya.

Buku-buku yang diterbitkan dengan bahasa hang dapat merusak tertib bahasa baku pun harus mendapat perhatian hang ketat. Buku hang ketat seperti ini banyak terdapat karena wujud penerbitan hang hanya komersial.

Khusus dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, kami ingin mengimbau supaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Kongres IV tidak hanya memperhatikannya setengah-setengah atau hanya sekedar putusan hang tidak pernah terjangkau oleh pelaksanaan. Dasar tugas yang digariskan dalam GBHN cukup jelas. Bahasa daerah harus dipelihara sebagai bagian kebudayaan nasional yang hidup.

Kami dari penerbit buku sekarang ini sudah merasakan betapa sulitnya untuk memperoleh naskah atau penulis yang dapat menyusun bahasa daerah yang "baku", utamanya bahasa daerah di luar pulau Jawa. Bahasa daerah Jawa, Sunda, masih memadai ahli dan penulisnya, tetapi beberapa bahasa daerah lainnya telah ada hang dikhawatirkan akan musnah perlahan-lahan.

Memperhatikan bahwa penerbitan buku bahasa daerah, tentu terbatas oplahnya, pihak pemerintah sudah sewajarnya untuk mengeluarkan tangan. Penerbit swasta hang menerbitkan buku bahasa daerah wajar untuk memperoleh subsidi. Tujuan ini pun dapat dicapai jika penerbit milik pemerintah dikerahkan secara aktif untuk mencapai tujuan menggalakkan pemeliharaan bahasa daerah.

Bahasa daerah banyak berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan setempat dan bernilai tinggi. Bahasa daerah ada yang lebih mantap pemakaiannya ketimbang bahasa nasional, khususnya untuk daerah tempat bahasa itu berkembang. Prinsipnya bahasa daerah adalah penunjang perkembangan kebudayaan nasional. Perkembangan bahasa nasional seharusnya sejajar dengan perkembangan bahasa daerah.

### Kesimpulan dan Usul

Bahasa Indonesia adalah sarana untuk menyukkseskan pembangunan nasional. Bahasa daerah sebagai alat perhubungan masyarakat pemakainya dan sebagai penunjang pertumbuhan kebudayaan nasional, hendaklah diintensifkan pemeliharaan dan perkembangannya.

Jangka waktu Pelita IV supaya dijadwalkan sebagai "gerak masyarakat" memantapkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, mempergunakannya dengan baik dan benar.

Sesuai Kongres Bahasa Indonesia IV hendaklah dibentuk gerakan lanjutan terpadu antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan unsur swasta yang dapat menunjang pelaksanaan program.

Penerbitan buku-buku yang menunjang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah hendaklah digalakkan; mendapat subsidi dari pemerintah; penyebaran dengan oplah besar; harga yang relatif murah.

Risalah, naskah, buku, bertalian dengan bahasa, yang milik/hak ciptanya berada di tangan pemerintah dapat diterbitkan oleh penerbit swasta berdasarkan tujuan/ketentuan di atas.

Pendirian perpustakaan sekolah, desa dan umum dan pelaksanaan pameran buku, perlu digalakkan bersama-sama dengan tujuan membangun minat baca.

Pembangunan buku adalah sarana yang positif menunjang pembinaan dan pengembangan bahasa.

## **BERLAKUKAH PEPATAH "SAMBIL MENYELAM MINUM AIR" DALAM PEMBINAAN ILMU DAN TEKNOLOGI MELALUI PEMBAKUAN ISTILAH?**

**Mien A. Rifai**

Lembaga Biologi Nasional – LIPI, Bogor

### **Pendahuluan**

Berdasarkan kearifannya, para ahli perancang pengembangan dan rekayasa bahasa Indonesia telah mengambil kebijaksanaan untuk meluaskan cakrawala cakupan bidang tugas yang ditanganinya. Salah satu langkah nyata dalam kaitan ini adalah pembakuan istilah-istilah keilmuan, yang kegiatannya mendapat prioritas yang diutamakan. Karena itu, tidaklah mengherankan jika buku *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* dikeluarkan bersamaan waktunya dengan penerbitan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*.

Keputusan untuk mendahulukan penanganan istilah-istilah keilmuan ini patut mendapat pujian dan dukungan karena dalam dunia modern ini ilmu dan teknologi telah merasuk dan terserap dalam kehidupan sehari-hari segenap lapisan masyarakat. Lagi pula kelompok ilmuwan seperti sudah ditunjukkan pada kesempatan terdahulu (Rifai, 1981) merupakan kelompok penentu kepesatan perkembangan kebudayaan bangsa. Berdasarkan ciri kehidupan kecendekiaan yang berpegang teguh pada asas ketepatan yang tinggi dapatlah diharapkan bahwa pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan dibantu oleh kaum cerdik cendekiawan ini: kebiasaan mereka untuk berkomunikasi secara tepat, tegas dan gamblang pasti akan mempengaruhi seluruh pemakai bahasa Indonesia melalui contoh nyata yang diteladankan oleh

mereka. Akan tetapi, haruslah diakui bahwa dunia kaum ilmuwan ini merupakan lingkungan sempit tersendiri yang seringkali terpisah dari masyarakat yang mendukungnya. Dalam jangka pendek pengaruh mereka terhadap pola kebiasaan berbahasa lingkungannya tidaklah sebesar dampak yang diakibatkan oleh wartawan, seniman populer ataupun juru dakwah yang mempunyai hubungan langsung dengan masa hadirin yang sangat besar jumlahnya. Adapun dampak jangka panjangnya tidaklah diragukan lagi sebab sifat hasil karya para ilmuwan yang langgeng melestarikan dan tahan ujian zaman itu akan tetap terus terpakai/terpatri bekasnya.

Tugas ilmuwan di negara sedang berkembang seperti Indonesia ini memang berat karena sebagai pemandu kepesatan kemajuan di pundak mereka lah terpusatkan beban untuk mengembangkan ilmu dan teknologi sebagai bagian pembangunan kebudayaan bangsa. Di samping kewajiban membina ilmu mereka diharuskan pula memberikan sumbangsih dalam memelihara bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui karya-karya mereka. Dengan sendirinya mereka memerlukan dukungan semua pihak dalam segala bentuk pengejawantahan hidup bangsa berbudaya dan berdaulat. Untuk memuaskan dahaga kemelitan mereka agaknya sudah waktunya untuk dipertanyakan adakah dampak yang disumbangkan para perancang pengembangan bahasa Indonesia terhadap pembinaan ilmu dan teknologi itu sendiri? Berikut ini akan disajikan hasil penelaahan kasus pembinaan dan pengembangan biologi khususnya dalam kaitannya dengan pembakuan peristilahannya.

### Dari Lintasan Panggung Sejarah Biologi Indonesia

Alam hayati di sekitar kita telah lama mempesona kaum terpelajar Indonesia. Seperti diungkapkan oleh Zoetmulder (1883) para pujangga zaman keemasan kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa dulu secara cerdas menggunakan khazanah flora dan fauna Indonesia dalam mengandaikan berbagai fenomena emosi jiwa manusia. Baik secara tersirat maupun tersurat dalam pelbagai prasasti, hikayat dan semacamnya kekayaan alam hayati yang melimpah itu telah dimanfaatkan oleh nenek moyang kita untuk mendukung kebudayaan masa silam yang keagungan bekas peninggalannya dapat disaksikan sampai hari ini. Banyak pengetahuan kuno itu yang sampai pada kita melalui tradisi penurunan pusaka warisan secara lisan sehingga sering kita menerima potongan-potongan yang tidak utuh lagi. Karena berlebihan rasa hormat terhadap kesatuan petuah pusaka orang tua dan asingnya logika falsafah Aristoteles, banyak sekali pengetahuan yang mampu memberikan kemudahan pada nenek moyang kita itu tidak berkembang untuk mencukupi tuntutan kehidupan masa kini yang kian meningkat. Sekalipun dibukukan (misalnya *Serat Centhini*) isinya tidak pernah dipertanyakan berdasarkan penalaran ilmiah, apalagi karena bukunya itu sendiri adakalanya dikeramatkan.

Kita harus berterima kasih kepada perangkum asing seperti Rumphius yang dalam bukunya *Herbarium Amboinense* untuk pertama kali merekam secara ilmiah pemanfaatan sumber daya hayati Indonesia. Berdasarkan buku ini banyaklah kesimpulan umum yang bisa diambil, pencarian bahan sumber daya baru berdasarkan kekerabatan alamiahnya, pengalihan teknologinya dan pengujian kandungan khasiatnya secara sewajarnya. Sekalipun ditulis dalam bahasa Latin dan bahasa Belanda, pengacuan pada nama dan istilah daerah setempat serta *lingua franca* yang berlaku saat itu menyebabkan buku ini sebagai sumber rujukan yang amat berharga untuk pengembangan biologi di Indonesia.

Dalam bidang biologi, bahasa Melayu baku telah muncul dalam tulisan ilmiah yang terbit beberapa saat sebelum Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ketika Dr. C. van Overeen (1925) memperkenalkan jamur *Laetiporus miniatus* dalam bahasa Jerman, maka disertakannya pula ringkasannya dalam bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Sayang sekali ilmuwan yang sangat berpotensi ini meninggal dalam usia muda sehingga ancang-ancang pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang biologi itu tidak diteruskan orang untuk waktu yang lama sekali.

Batu dasar pemaparan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi biologi ditanam oleh pemerintah penjajahan Jepang yang tidak menghendaki dipakainya bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah. Sebagai jalan pintas diterjemahkannya sebuah buku pelajaran ilmu hayat tulisan Noordenboks ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan dalam tahun 1943. Buku terjemahan ini ternyata mempunyai dampak yang panjang terhadap pendidikan biologi di Indonesia. Pengaruhnya sangat terasa pada buku-buku pelajaran ilmu hayat hasil karya bangsa Indonesia sesudah perang kemerdekaan. Pola pendekatan, gaya penyajian, kedalaman penggarapan bahkan materi bahan pelajarannya umumnya dianut orang sampai berlakunya Kurikulum 1975, ketika masalah lingkungan hidup dan kependudukan mulai mendapat penekanan. Dapatlah dimengerti jika sebagian besar istilah biologi yang dipakai dalam buku terjemahan itu bertahan sampai sekarang ini.

Untuk memenuhi kebutuhan buku pendidikan biologi di SLTA diterjemahkanlah buku pelajaran botani karya Dr. K.B. Boedijin dan J.R. Kurepus oleh S. Setiadiredja (1955) dan buku pelajaran zoologi karya C. Hilstvoogd dan H.C. Delsmar oleh R.G. Indrajana (1957). Pemilihan kedua buku sangat tepatnya karena keduanya ditulis berdasarkan bahan yang ada di lingkungan hidup kita. Sampai sekarang pun buku-buku pelajaran biologi untuk SLTA yang disiapkan oleh Depdikbud masih menggunakan bahan-bahan contoh yang sama secara cermat telah dipilih oleh para penulis buku-buku tersebut. Boleh dikatakan bahwa bekal pengetahuan dasar biologi yang dimiliki para ahli biologi, pertanian, kehutanan, perikanan, kedokteran dan

lain-lain di Indonesia sekarang ini dapat ditelusuri urat akarnya pada buku-buku terjemahan tadi. Seperti tercantum pada kata pengantar buku tersebut, dalam proses penerjemahannya besarlah jasa yang disumbangkan almarhum Prof. Ir. Kusnoto Setyodiwirjo, putra Indonesia pertama yang menjadi direktur lembaga-lembaga yang sekarang tergabung dalam Lembaga Biologi Nasional — LIPI. Dengan rajin beliau menghimpun istilah-istilah yang telah dipakai orang dan menyarankan istilah-istilah baru yang sebaiknya dipergunakan berdasarkan pengalamannya dalam memberikan kuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Untuk perguruan tinggi buku-buku teks biologi berbahasa Indonesia sampai sekarang masih terhitung langka dan hal ini menimbulkan masalah tersendiri. Jika sampai di SLTA terdapat buku pegangan yang dipakai secara luas di seluruh Indonesia, untuk perguruan tinggi pembakuan isi, bahan, kedalaman dan pendekatan serta peristilahan terpulang kepada para pengajar masing-masing di setiap perguruan tinggi. Keseragaman beberapa istilah memang terlihat hanya sampai SLTA saja, sedangkan di atas itu istilah asing seringkali dipakai dalam bentuk aslinya. Karena itu, di samping istilah mulut daun atau gagang kita menemukan pula bentukan *stomata* serta *alga*. Logat setempat pun dapat dengan terjadi suburnya tergantung kepada kuatnya kepribadian, karisma dan otoritas seseorang tokoh.

Untungnya ketidakseragaman istilah ini tidak mengendorkan minat orang untuk berkarya dan sekalipun bergerak dengan pelan-pelan biologi bertindak maju, merintis jalan bagi generasi berikutnya. Akan tetapi, keadaan lingkungan tidaklah memberikan dukungan yang diinginkan sehingga kecepatan pembinaannya tidaklah berjalan secepat seperti diharapkan.

### Kata Hati, Ucapan, dan Penerbitan

Sebagai bagian ilmu-ilmu alamiah, biologi itu dapat terbina dan pesat pengembangannya bila setiap ahlinya giat menggali dan mengungkapkan penemuan baru serta selalu mencetuskan gagasan dan teori yang orisinal untuk menumbangkan dan mengganti konsep-konsep usang yang tak dapat dipertahankan lagi. Untuk itu semua pakar biologi dituntut agar menguasai segala sesuatu yang telah dilakukan orang sebelumnya, mengikuti perkembangan hal-hal yang dipermasalahkan ahli-ahli masa kini dan mampu melihat arah yang dituju bidang spesialisasi yang ditekuninya di masa depan.

Seseorang berhak disebut sebagai peneliti biologi jika ia sudah memberikan sumbangsih yang nyata dalam upaya mengembangkan cabang ilmu pilihannya itu. Karena itu, sesudah mengidentifikasi dan mengisolasi suatu masalah penelitian, seorang biologian biasanya akan mengikuti jalan penalaran pikirannya sendiri dalam memilih pola pendekatan yang akan dipakai untuk memecahkan masalah itu. Andaikata ia berhasil menyelesaikan per-

soalan yang dihadapinya ia akan bertanya pada dirinya apakah hasil kesimpulannya itu tidak mengulangi apa yang sudah diketahui umum. Ia perlu mengetahui pendapat orang lain sebelum lebih jauh melangkah untuk mengumumkan hasil penelitiannya secara luas dan lestari. Mau tidak mau ia harus berkomunikasi dengan sesama ilmuwan sejenisnya: secara bertahap mula-mula ia akan mendiskusikan hasil dan pendapatnya bersama teman sejawat di lingkungan kerjanya, kemudian berusaha mendapatkan masukan dari kalangan yang lebih luas lagi. Ia dapat melakukan ini dengan menulis surat kepada tokoh lain yang dikenalnya, seperti yang dilakukan Antoni van Leewenhoek dulu sewaktu melakukan pertukaran surat dengan Royal Society di London. Secara formal ia dapat mengemukakan penemuannya dalam forum pertemuan ilmiah yang sekarang sudah diorganisasi dalam pelbagai bentuk mulai dari seminar, simposium, loka karya, kongres dan entah apa lagi.

Jika dari pelbagai masukan yang diterimanya ternyata bahwa hasil penemuannya ilmu akan makin berkembang si peneliti berkewajiban menerbitkannya agar umat manusia dapat mengambil keuntungan dari jerih payahnya. Suatu penelitian yang berhasil yang tidak diterbitkan haruslah dipandang sebagai suatu tindakan kriminal (Rifai, 1981). Selain memperbesar penyebaran, penerbitan juga menjamin terekamnya hasil penelitian itu secara abadi dalam khazanah ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Perekaman karya ilmiah itu memerlukan keterampilan khusus karena sudah merupakan seni tersendiri. Polanya sudah dibakukan, gaya penyajiannya mengikuti cara-cara tertentu sedangkan logatnya dibatasi pula oleh derajat keteknisannya. Sifat ilmu yang lugas, jelas dan singkat mengharuskan dipakainya istilah ilmiah yang tidak meragukan pengertiannya. Sekalipun demikian masih diinginkan agar karya tulis ilmiah yang diterbitkan itu tidak bersifat bacaan yang kering dan kaku tetapi haruslah tetap merupakan suatu karya yang hidup dan enak dibaca. Keteraturan, ketertiban dan kelancaran isi tulisan ilmiah hendaklah mencerminkan keseluruhan gerak kata hati ungkapan pengujian dan kewajiban tulisan yang didasarkan pada mendarah dagingnya sikap kecendekiaan dan keilmuan penulisnya. Selain ketepatan penggunaan istilah keilmuan yang tidak dapat ditawar lagi, dalam karya tulisnya seorang ilmuwan dituntut untuk memilih ungkapan-ungkapan secara cermat. Tidaklah dapat dipungkiri lagi bahwa seorang ilmuwan harus memiliki kamus istilah dan kamus umum bahasa yang terbaik yang dapat dijangkaunya.

### Kisah Sukses Sebuah Istilah

Jika diperkenankan membuat parafrase salah satu cukilan sajak Shakespeare dalam *Romeo and Juliet* //, 2:43-44, bab ini agaknya pantas diberi motto: *What's in a term, that which we call a germ/By any other word would*

*act as bad*". Orang tidak pernah meragukan kemahiran Shakespeare bermain dengan kata-kata, tetapi keberhasilan suatu istilah ditentukan oleh kemampuan kata yang dipilih untuk mengemban makna yang ingin diungkapkan. Selain itu masalah konotasi dan eufoni juga dipersyaratkan oleh *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Di samping itu, banyak faktor yang juga ikut menentukan nasib suatu istilah yang diperkenalkan orang seperti terlihat pada kasus istilah plasma nutfah.

Pesatnya pertambahan jumlah penduduk telah menyebabkan gagasannya upaya untuk mencukupi keperluan pangannya dan menyediakan tempat tinggalnya. Bibit unggul diciptakan, kawasan hutan dibabat untuk dijadikan areal persawahan ataupun daerah pemukiman. Bibit unggul mendesak bibit lokal/tradisional sehingga yang terakhir ini dilupakan orang dan perluasan daerah pertanian ataupun permukiman menyebabkan cepatnya kemusnahan kerabat jenis-jenis tanaman pertanian. Padahal dalam setiap populasi bibit lokal ataupun kerabat jenis budidaya tanaman itu mengandung substansi yang mengatur sifat keturunan yang dapat dipindah-pindahkan melalui perkawinan silang, untuk merakit bibit unggul baru yang memiliki sifat-sifat baru yang diinginkan sesuai dengan tuntutan masa. Substansi inilah yang merupakan sumber daya genetika yang dalam bahasa Inggris terkenal dengan nama *germplasm*.

Lebih kurang dua dasa warsa yang lalu para ahli biologi mengamati penuh keprihatinan menghilangkan substansi tadi secara pelan-pelan. Gerakan pengawetan alam dan upaya ekologi yang saat itu menjadi mode tidaklah mempan membendung proses pelangkaan sumber daya yang amat penting bagi kelangsungan pertanian di dunia ini. Bersamaan dengan pudarnya pamor pengawetan alam dan ekologi itu – yang terakhir sekarang berganti umbul-umbul menjadi lingkungan hidup – diperkenalkan upaya pelestarian *germplasm* itu, suatu gerakan internasional yang didukung badan-badan PBB.

Bahwa pengikisan dan pengerosian sumber daya genetika itu berlangsung pula di Indonesia disadari juga oleh biologiwan Indonesia. Pemerintah berhasil diyakinkan akan perlunya upaya nasional untuk kerawanan yang dapat timbul. Dengan sendirinya diperlukan seperangkat istilah untuk penampung kegecaraan komunikasi yang timbul oleh kegiatan ini. Dengan persetujuan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pada tahun 1975 diperkenalkan istilah *plasma nutfah* yang keasingannya tidak kalah dari kemurnian konsep yang ingin disampaikannya. Akan tetapi, istilah ini dipandang lebih baik daripada istilah *plasma germa* yang pernah muncul dalam salah satu tulisan *Kompas* pada masa itu.

Dibentuknya Komisi Pelestarian Plasma Nutfah Nasional dengan surat keputusan Menteri Pertanian RI telah menyebabkan istilah ini menjadi resmi. Sulitnya masalahnya dan kesukaran pelafalannya tidak mengurangi kecende-

rungan orang-orang untuk menggunakan istilah itu dalam berbagai kesempatan, bahkan dalam sidang Kabinet Republik Indonesia! Walaupun komisi itu sendiri tidak banyak bergembar-gembor, kegiatannya yang mantap dalam mengajak masyarakat membantu usaha pelestarian plasma nutfah itu menyebabkan luasnya tingkatan pemakaian istilahnya. Belasan kursus penataran dan puluhan ceramah di pelbagai pelosok tanah air telah ikut mempopulerkan istilah ini sehingga pembakuannya tidaklah merupakan masalah lagi.

Jika istilah-istilah keilmuan yang lain memiliki separuh saja keberhasilan yang dikenyam istilah *plasma nutfah*, alangkah ringan tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

### Yang Tergugah dan yang Meremehkan

Sejak Kantor Pengajaran zaman penjajahan Jepang menerbitkan buku *Ilmoe Toemboeh-toemboehan* pada tahun 1943 sampai diresmikannya Ejaan Yang Disempurnakan, telah ratusan tulisan dalam bidang biologi yang dihasilkan orang dalam bahasa Indonesia. Tidak adanya pedoman dalam masalah pembentukan dan penggunaan istilah dengan sendirinya telah menimbulkan kesimpangsiuran yang menyebabkan tersendat-sendatnya kemajuan yang dicapai bidang ini. Tidaklah mengherankan untuk menjumpai suatu konsep seperti *genus*, misalnya, diterjemahkan dengan 9 macam istilah yang berbeda-beda. Kita masih harus merasa beruntung bahwa orang mau menulis dalam bahasa Indonesia, setidak-tidaknya untuk keperluan pendidikan.

Anggapan akan keuniversalan biologi juga telah tidak membantu mempercepat upaya pengembangan ilmu ini di Indonesia. Sehubungan dengan itu banyak hasil karya ilmiah orang Indonesia yang dituangkan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya karena ini menyebabkan pengakuan internasional yang segera terhadap sesuatu penemuan. Malahan sampai beberapa tahun yang lalu beberapa ilmuwan Indonesia masih berpendapat bahwa tulisan ilmiah dalam bahasa asing harus mendapat bobot penilaian yang berbeda bila dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan prestasi karier seseorang. Pemikiran inilah yang menyebabkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memberikan angka nilai yang lebih tinggi terhadap karya tulis ilmiah berbahasa asing itu, seperti tercermin dalam salah satu peraturan penilaian jenjang jabatan penelitian di Indonesia. Kesadaran bahwa hal ini tidak benar telah menyebabkan dihapusnya perbedaan penilaian itu sejak tahun 1980.

Sejalan dengan upaya pembakuan peristilahan yang dilancarkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, beberapa perkembangan telah ikut mendukung kegiatan ini. Membaiknya perekonomian bangsa memungkinkankan para ilmuwan melakukan kegiatan terencana dalam bidang ilmunya. Penelitian mulai mapan dilakukan orang dan dengan itu segala akibat sam-

pingnya: lahirnya perhimpunan profesi, adanya pertemuan-pertemuan ilmiah yang diorganisasi perhimpunan-perhimpunan tadi serta dikeluarkannya risalah pertemuan yang memuat kumpulan makalah, serta terbitnya beberapa majalah ilmiah baru.

Kemampuan perangkat pembina ilmu ini telah menghilangkan keraguan biologiwan Indonesia untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara langsung. Di balik itu ada gejala yang kurang sehat, yaitu mundurnya penguasaan bahasa asing oleh para lulusan perguruan tinggi kita. Ini merupakan masalah yang pelik yang memerlukan pemecahan tersendiri.

Jika dulu disertasi doktor biologi dalam bahasa Indonesia dapat dihi-tung dengan jari sebelah tangan, maka berkat adanya program nyata dari pemerintah akhir-akhir ini terjadi peningkatan yang mencolok dalam jumlah promosi yang ditulis orang. Ini semua memang belum menyebabkan suara biologiwan Indonesia terdengar cukup lantang dalam forum internasional karena sampai sekarang belum terbentuk "aliran pemikiran" di Indonesia yang membuktikan telah mapannya kepesatan kemajuan suatu bidang spesialisasi yang didukung pendalaman beberapa orang. Akan tetapi, jika gejala yang sekarang terjadi berkembang terus sesuai dengan kemajuan perkembangan ilmu, akan datang saatnya ketika ilmuwan luar negeri akan berpayah-payah membaca *semua* hasil karya orang Indonesia dalam bahasa Indonesia, seperti terlihat sekarang dari usaha para ilmuwan barat untuk memahami monografi jamur yang ditulis ahli-ahli Jepang dalam bahasa Jepang.

Jika dikaji secara seksama, di belakang keberhasilan munculnya karya-karya berbahasa Indonesia ini disebabkan kegigihan beberapa orang penyunting yang berpengalaman/berpengaruh dalam bidangnya masing-masing. Mereka ini umumnya tidak muncul ke permukaan, tetapi bekasnya terlihat dan dapat dirasakan. Mereka tergolong orang-orang yang mau berpayah-payah belajar menguasai bahasa Indonesia, rajin mencatat istilah-istilah yang baru dimunculkan, tidak segan membuka kamus, cermat dalam berbicara dan mempunyai rasa bahasa yang tinggi. Suatu lingkungan yang tidak memiliki seorang penyunting biasanya menghasilkan karya-karya yang berisikan kalimat rancu yang tidak menunjukkan kejernihan jalan pikiran. Pada umumnya keadaan begini muncul bila lingkungan itu berpegang pada anggapan bahwa bahasa Indonesia itu mudah karena merupakan bahasa ibu yang dianggap sudah dikuasainya sejak kecil. Akan tetapi, bila disimak ketepatan pilihan kata atau istilah yang dipakai dalam tulisan mereka, serta ditelaah kalimat dan paragraf ataupun judul karangannya, akan segera terlihat kejanggalannya. Lingkungan ini biasanya tidak merasa risau bila suatu tulisan itu terkontaminasi frase atau kata-kata asing. Malahan terpampangnyanya unsur asing itu dianggapnya sebagai penunjuk bahwa penulisnya mampu berbahasa asing. Agaknya memang sulit untuk mengatasi kesenangan akan unsur-unsur asing

ini sebab Zoetmulder (1983) sudah menulis bahwa para rakawi kita zaman dulu pun senang akan kata-kata asing. Akibatnya kakawin *Nagarakertagama* Hayam Wuruk oleh Prapañca dikisahkan mengejar hewan perburuan yang tidak ada dalam hutan Jawa!

Jadi untuk ketepatan dan keilmiahannya bahasa yang dipakai para ilmuwan Indonesia perlu adanya penyunting-penyunting tangguh. Masalahnya adalah menampilkan mereka ke permukaan untuk berfungsi secara lebih aktif. Pada saat ini di Indonesia penyunting memang merupakan komoditas yang langka.

### Melihat ke Depan

Semua orang menyadari bahwa pembakuan istilah bukanlah pekerjaan yang ringan. Dampaknya tidaklah dapat cepat dirasakan, apalagi kalau seseorang mengecilkan faktor waktu dalam usaha pembinaan. Sekalipun demikian, dalam dasawarsa terakhir ini beberapa perkembangan yang secara kebetulan bermunculan bersama telah membuktikan bahwa istilah mempunyai peranan yang tidak kecil dalam usaha membina dan mengembangkan suatu ilmu.

Pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk yang konservatif sifatnya. Sangatlah sulit untuk mengajar seseorang yang terbiasa dengan istilah *tumbuh pengganggu* agar menggantinya dengan *gulma* (yang hanya satu kata, kalau diketik menghemat 14 ketukan, dapat dijabarkan/diturunkan dengan lebih luas dan lebih mudah dan lain-lain). Akan tetapi, bagi dunia ilmu di Indonesia saat ini merupakan saat yang paling bahagia karena kita dapat membuat rencana yang matang dalam mengembangkan ilmu itu melalui perencanaan perkembangan istilahnya. Jumlah tulisan yang ada relatif masih sedikit sehingga kita dapat mengganti istilah yang sudah terbiasa dipakai, tetapi ternyata tidak sesuai dengan asas yang benar, tanpa takut hal itu akan mempunyai pengaruh tidak menguntungkan di belakang hari. Kita yang sudah terbiasa dengan istilah kurang benar harus merelakan diri mengubah kebiasaan dengan memakai istilah yang lebih baik. Istilah yang disodorkan pada generasi mendatang hendaklah merupakan istilah yang tepat; mereka janganlah diminta untuk meneruskan kesalahan yang telah mengganggu generasi kita ini.

Mengingat dampak jangka panjangnya itu kita harus sadar bahwa membina istilah sama artinya dengan mengembangkan ilmu itu sendiri. Kalau pembakuan istilah yang kita idam-idamkan itu gagal maka berarti kita mengerem laju kecepatan pengembangan ilmu di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1943. *Ilmoe Toemboeh-toemboehan*. Jakarta: Kantor Pengajaran.
- Boedijn, K.B. et.al. (Penerjemah). 1957. *Buku Ilmu Binatang*. Jakarta: J.B. Wolters.
- Rifai, M.A. 1973. *Kode Internasional Tatanama Tumbuh-tumbuhan*. Bogor: Herbarium Bogoriense – LBN.
- . 1981. "The Leterary Aspects of Scientific Publications; The Case in Indonesia." Makalah dalam VI ASANAL conference, Denpasar.
- Van Overeem, C. 1925. "Polyporanceae". Dalam *Overeem & Weese, Icones Fungorum Malayensium*. Wien: Mykologischen Museums.
- Zoetmulder, P.J. 1983. *Kalanguwan* (diterjemahkan oleh Dick Hartoko). Jakarta: Jambatan.

## **BAHASA INDONESIA MENGHADAPI PENTERJEMAHAN**

**Ali Audah**

Himpunan Penerjemah Indonesia

### **Pendahuluan**

Adanya organisasi penerjemahan, baik di negara yang maju maupun dalam negara sedang berkembang, berdirinya organisasi penerjemahan internasional seperti FIT yang beranggotakan sebagian organisasi tersebut, begitu juga perhatian UNESCO yang cukup besar terhadap dunia penerjemahan, tentulah karena hal ini makin lama makin terasa penting dalam perkembangan dan pengembangan dunia kebudayaan. Dalam pertukaran ilmu pengetahuan dan pengalaman peranan penerjemahan turut menentukan. Sebagian besar buku yang beredar di Indonesia masih dalam bahasa asing, bahasa yang kurang dikuasai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kampus. Sudah sama kita ketahui bahwa bangsa Indonesia angkatan sebelum perang Dunia II jauh lebih baik penguasaan bahasa asingnya, terutama bahasa Belanda, daripada angkatan sekarang meskipun sarjana dan kaum terpelajarnya sekarang lebih banyak. Saya tidak akan membahas apa sebab terjadi demikian. Pengajaran bahasa asing di Indonesia memang bukan jaminan bahwa hasilnya akan melahirkan mereka yang benar-benar akan memahami pesan yang terkandung di dalam buku-buku itu.

Tidak mudah orang akan dapat menguasai satu dua atau lebih bahasa asing yang sama kuatnya dengan penguasaan bahasa sendiri. Oleh karena itu, beraalasan sekali kalau kita akan katakan bahwa yang pertama-tama dan terutama harus kita lakukan ialah membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Perlu sekali kita menanamkan gairah dan kebanggaan berbahasa Indo-

nesia kepada murid-murid sejak dari kanak-kanak sampai kepada mahasiswa termasuk para pengajar di perguruan tinggi. Dengan demikian, diharapkan mereka yang menguasai dan yang tidak menguasai bahasa asing mempunyai gairah dan hasrat yang sama dalam membaca buku-buku terjemahan. Bagaimana kita harus meyakinkan diri kita bahwa yang selama ini kita kagumi bukanlah asingnya, tetapi ilmu dan pengalaman yang disampaikan kepada kita (Sapardi, 1977:204).

Dalam usaha kita membicarakan penerjemahan, juga tidak lepas dari pembicaraan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia karena penerjemahan juga adalah masalah kebahasaan. Akan tetapi, sampai berapa jauh tugas penerjemahan itu dapat diikutsertakan dan dapat berperan, itulah yang ingin kita lihat. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia adalah peningkatan segala usaha kemasyarakatan sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia itu digunakan oleh masyarakat kita dengan keyakinan bahwa bahasa Indonesia sama kerennya, sama agungnya dengan bahasa mana pun di muka bumi ini, sedangkan yang dimaksud dengan pengembangan bahasa adalah peningkatan mutu bahasa Indonesia itu sehingga bahasa Indonesia memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Beban yang diberikan kepada bahasa Indonesia adalah tugas sebagai bahasa nasional, beban yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai bahasa negara, beban yang diberikan oleh dunia pendidikan kita adalah sebagai pengantar pendidikan, beban yang diberikan oleh ilmu pengetahuan kita adalah sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sanggupkah bahasa Indonesia melaksanakan tugas-tugas itu? Semua usaha memperkaya bahasa Indonesia ini bertujuan mengembangkan kesanggupan dan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan sebagai bahasa pengantar (Halim, 1981:84).

### **Peranan Buku dalam Pendidikan dan dalam Masyarakat**

Meskipun berkat teknologi modern sarana pengajaran sering juga dilengkapi dengan media audiovisual seperti rekaman suara, televisi, *slide* film, radio dan alat-alat lain, komponen buku pelajaran masih tetap menjadi unsur pokok dalam proses pendidikan. Meskipun alat audio visual yang lebih baru dipergunakan secara luas, buku-buku tidaklah dikesampingkan (Barker dan Escarpit, 1976:201). Kegiatan para penerbit menerbitkan terjemahan buku-buku ilmu pengetahuan populer untuk anak-anak dan remaja, patutlah kita hargai walaupun jumlahnya masih sedikit sekali, seperti yang juga dapat kita baca dalam saran dan laporan UNESCO (Pearce, 1974) (*At present very few translations are published in bahasa Indonesia. In the field of populer science etc. translations could do much to provide for needs*).

Patut kita akui bahwa kita memang belum sepenuhnya mampu menyajikan karya asli ilmu pengetahuan populer, dan walaupun ada jumlahnya sedikit sekali. Usaha Yayasan Buku Utama sejak 1974 dengan memberikan hadiah kepada buku terbaik untuk fiksi dan nonfiksi setiap tahun akan sangat bermanfaat karena selain memberi dorongan kepada penulis karya asli, juga sekaligus mempopulerkan karya penulisan demikian.

Akan tetapi, cukuplah kita hanya menunggu karya asli itu saja untuk mengisi perpustakaan kita? Selain jumlah yang masih sangat terbatas, patut juga kita akui bahwa ragamnya pun masih terbatas pula. Perpustakaan kita di mana-mana lebih banyak berisi buku ilmu dalam bahasa asing. Sebagian besar buku yang ada di sana ditulis dalam bahasa Inggris, beberapa puluh dalam bahasa Belanda dan hanya kira-kira dua atau tiga persen dari jumlah yang ada ditulis dalam bahasa Indonesia (Sapardi, 1977:202).

### **Berbagai Buku Perlu Diterjemahkan**

Sejak pertengahan 1974 Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan telah mengemukakan gagasan sekitar pengadaan buku ilmiah baik penulisan asli ataupun terjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Tahun berikutnya gagasan ini dituangkan dalam bentuk pertemuan yang lebih luas, diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa unsur yang terdiri dari konsorsium perguruan tinggi negeri, organisasi yang memiliki penerbit, penerjemahan dan lain-lain diikutsertakan. Yang menjadi pokok pembahasan ialah soal penulisan dan penerjemahan buku bidang ilmu dan teknologi. Dalam program itu termasuk juga penerjemahan makalah dan risalah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing. Gagasan dan rencana yang terpuji ini rupanya memang tidak begitu mudah diwujudkan dalam kenyataan. Tentu banyak kendala yang tak dapat kita duga meskipun tidak berarti rencana itu tidak berjalan sama sekali.

Meskipun memang tidak bertindak sebagai badan eksekutif, seperti kita ketahui bersama, dengan Keputusan Presiden No. 5/1978, telah terbentuk sebuah lembaga yang khusus menangani segala masalah perbukuan di Indonesia, yaitu Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN), yang bertanggung jawab kepada Menteri P dan K, dan diketuai oleh Ketua BP3K.

Sesuai dengan pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada rapat badan tersebut baru-baru ini antara lain bagan berikut ini dapat kita lihat!

| Kegiatan yang harus dilaksanakan     | Jenis buku yang diperlukan | Sains dan Teknologi | Ilmu Sosial dan Budaya | Agama |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------|
| 1. Buku apa yang harus ditulis       |                            |                     |                        |       |
| 2. Buku apa yang harus diterjemahkan |                            |                     |                        |       |
| 3. Buku apa yang harus diimpor       |                            |                     |                        |       |

Dalam bagan itu dapat kita lihat bahwa hampir semua jenis buku itu kita perlukan, dengan catatan bahwa di dalam pengembangan perbukuan hendaknya diarahkan kepada lebih perbanyak judul daripada eksemplar. Di dalam pelaksanaan yang telah dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja tahun ini sudah diharapkan dapat disusun daftar judul buku misalnya 1.000 judul tiap kotak 1.

Andaikata rencana ini sudah bisa dilaksanakan semua, dapat kita bayangkan betapa besar kesibukan yang akan kita hadapi.

#### a. Buku Sains dan Teknologi

Dalam pengertian ini selain buku sains dan teknologi dapat kita takrifkan juga buku ilmu pengetahuan pada umumnya, termasuk di dalamnya ilmu sosial dan budaya. Selama ini sudah berjalan kegiatan penerjemahan buku bidang sains dan teknologi, sebagian besar dilakukan oleh perorangan dan diterbitkan oleh penerbit swasta. Dalam kegiatan penerjemahan ini akan kita lihat sampai berapa jauh bahasa Indonesia mampu mengalihbahasakan kosakata, istilah, dan ungkapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Sampai sekarang memang belum ada suatu lembaga yang secara khusus mengadakan penilaian mengenai hasil terjemahan itu, tetapi juga sampai sekarang belum ada keluhan secara umum mengenai ketidakmampuan kita menerjemahkan. Buku terjemahan sains dan teknologi yang sekarang beredar dapat dikatakan diterima oleh masyarakat dengan baik, dipergunakan sebagai bahasa teks, buku bacaan penunjang, buku rujukan, dan sebagainya, sebagai sesuatu yang

wajar, dapat dimengerti malah sangat membantu masyarakat luas, khususnya masyarakat kampus. Beberapa judul di antaranya sudah mengalami cetak ulang. Anggapan yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia belum mampu dihadapkan pada karya ilmiah untuk diterjemahkan karena sering terbentur pada istilah teknis ilmiah yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, bertentangan dengan kenyataan. Adanya anggapan yang berlebihan bahwa menerjemahkan ilmu itu hanya akan mengkhianati ilmu, sama dengan ungkapan bahasa Itali yang terkenal dalam dunia linguistik: *traduttore traditore* (penterjemah itu pengkhianat). Hughes (1966:12–13) menjelaskan bahwa ungkapan itu memang ada benarnya. Soalnya, karena perbedaan bahasa akan membawa perbedaan struktur pula. Seorang penterjemah takkan dapat mengalihkan struktur yang asal itu sepenuhnya ke dalam terjemahannya dengan menggunakan seperangkat satuan (kata-kata dan kalimat-kalimat) yang sama dan mau menerjemahkan kata dengan kata yang sama pula. Karena dalam hal ini bahasa-bahasa Eropa pada umumnya mempunyai hubungan yang dekat satu sama lain, penterjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, hampir masih dalam bentuk struktur yang sama.

Seorang penterjemah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya dan akan memikul amanat yang sungguh-sungguh untuk menyampaikan ilmu dan pikiran yang ada dalam buku yang diterjemahkan itu. Akan tetapi dia tidak dapat dituntut harus menerjemahkan kata, kalimat, ungkapan dan struktur bahasa sumber. Dia dituntut menggunakan bahasa sasaran (bahasa Indonesia) yang tepat untuk mengalihkan karya ilmiah dan menguasai istilah dan kosakata yang sesuai dengan yang dimaksud. Jika istilah dan kata itu belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, di sinilah kewajiban penterjemah "menciptakan" sendiri istilah dan kosakata itu, yang mungkin diambil dari bahasa Melayu klasik, dari bahasa daerah atau dari bahasa asing yang ejaannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Bahasa karangan ilmiah harus memenuhi syarat-syarat khusus di samping kaidah-kaidah umum bahasa Indonesia (Johannes, 1978) yang dalam beberapa rumusannya berlaku juga untuk penterjemahan, yakni bahwa bahasa karangan ilmiah harus dibedakan dengan bahasa sastra; istilah-istilah yang khusus ditakrifkan khusus pula sehingga kata yang sama dalam bahasa ilmiah dan dalam bahasa umum dapat berbeda artinya; tingkatan bahasa yang dipakai ialah tingkat bahasa resmi; bahasa keilmuan tenang dan gahari (*moderate*); penggunaan kata-kata yang mubazir dihindari. Jelasnya bahasa keilmuan harus lugas, lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada dengan perasaan. Ini dapat kita pakai sebagai dasar-dasar umum.

Di samping itu, penggunaan bahasa dalam penterjemahan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran perlu disesuaikan juga dengan sifat, isi, dan



Pernah dipermasalahkan orang apakah yang menjadi hambatan maka penerjemahan buku di Indonesia secara umum masih tersendat-sendat. Satu pihak mengatakan bahwa dananya sudah tersedia, mana tenaga penerjemahnya. Yang lain mengatakan tenaga sudah siap, mana dana dan buku yang akan diterjemahkan. Tentu bukan maksud kita akan mencari mana yang benar. Yang jelas agaknya, fasilitas penerjemahan itu sudah ada – dana, tenaga, dan buku. Sebenarnya (Simatupang, 1978) dana yang tersedia untuk tahun 1976/1977 belum terpakai seluruhnya; begitu pula dana untuk tahun 1977/1978. Akan tetapi, itulah yang belum tergarap hingga sekarang. Program ini sangat penting bukan saja yang menyangkut tenaga dan dana, tapi juga soal pembidangan kerja. Perguruan tinggi tetap perlu dimanfaatkan menurut bidang masing-masing. Masalah imbalan berupa honorarium dan royalti, dan kesibukan beberapa tenaga akan dapat diatasi. Adanya usaha penerjemahan karya ilmiah yang dicoba digiatkan dari kalangan perguruan tinggi, konsorsia yang memilih judul buku yang akan diterjemahkan dan penerjemahannya ditawarkan kepada dosen-dosen yang dianggap ahli dalam bidang yang bersangkutan, tapi kenyataan menunjukkan bahwa usaha dalam bidang ini tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan – barangkali karena kita terlalu membatasi pada tenaga-tenaga dalam lingkungan perguruan tinggi yang umumnya memang sudah terlalu sibuk. Di luar mereka masih ada penerjemah profesional dan setengah profesional yang kita harapkan dapat bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi atau lembaga-lembaga lain. Dalam beberapa hal, meskipun ragam yang diterjemahkan dari bahasa sumber yang sama, bidang berbeda, tidak menutup kemungkinan perlunya ada latihan-latihan khusus buat mereka.

### **Berpacu dengan Waktu**

Yang tidak kurang pentingnya dan perlu mendapat perhatian kita dalam hal penerjemahan buku ilmiah ialah soal mengejar waktu. Perkembangan (Audah, 1982) ilmu dan teknologi dewasa ini bergerak begitu cepat, sedangkan buku yang akan menunjang ke arah itu masih dalam bahasa asing yang umumnya belum dapat dicerna oleh mahasiswa dan pelajar. Untuk mengejar ketinggalan kita dalam bidang ini, penerjemahan buku ilmiah secara besar-besaran perlu sekali dipercepat. Kita dituntut oleh ilmu dan teknologi itu segera bertindak. Kita lihat misalnya kapan buku itu diterbitkan di luar, kapan akan sampai ke Indonesia, kapan akan mulai diterjemahkan, dan kapan pula akan diterbitkan. Kita sudah akan jauh ketinggalan dari bangsa yang menghasilkan ilmu dan buku-buku itu. Padahal bangsa lain, Jepang misalnya – sekedar contoh – tidak lagi menunggu buku itu dikirim dari luar, tetapi mereka datang sendiri memburu ke tempat asalnya, lalu segera dibawa pulang untuk kemudian diterjemahkan dan diterbitkan di tanah air. Mereka menya-

dari betapa pentingnya ilmu dan pengalaman yang ada di dalam buku-buku itu bagi kemajuan dan pembangunan bangsa dan negaranya.

Dengan adanya usaha penerjemahan itu jelas kita akan mendapat keuntungan ganda, dari pelbagai segi — materi, sosial, dan kultural. Bagi penerbit hal ini akan merupakan salah satu bahan baku dalam pengembangan industri mereka, yang dengan sendirinya akan melibatkan pula tenaga kerja penerbitan, percetakan, dan toko buku; masyarakat ilmiah, tenaga pengajar, mahasiswa dan masyarakat umum akan juga terbantu. Dalam hal ini sebenarnya berlaku juga untuk segala macam penerjemahan, dan sumbangan penerjemahan pada pengembangan bahasa Indonesia akan sangat terasa.

Bahasa Indonesia, yang dalam penulisan karya ilmiah masih banyak memerlukan apa yang biasa disebut bahasa keilmuan, mau tidak mau dengan jalan penerjemahan akan menyadari sendiri kekurangan-kekurangan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia akan melatih diri berbicara dalam bahasa ilmu dan teknologi. Seperti halnya dengan bahasa-bahasa lain, yang sekarang sudah maju, pada mulanya juga tertatih-tatih dalam menerjemahkan, khususnya buku ilmiah. Hal ini akan kita rasakan bila kita sudah terjun langsung ke "lapangan". Kita akan melihat dengan tiba-tiba kata-kata baru yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, dan kita harus "menciptakan" padanan itu dalam kata-kata baru. Dengan jalan ini bahasa Indonesia justru diperkaya.

Hasil terjemahan demikian itu dapat dipertanggungjawabkan selama dikerjakan oleh ahlinya dan menurut bidang masing-masing. Meskipun pada mulanya mungkin ada sesuatu yang terasa agak janggal, lambat laun akan diterima oleh masyarakat sebagai hal yang wajar.

## **b. Karya Cerita Rekaan**

Kalau ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bahasa penerjemahan karya ilmiah dan nonfiksi lainnya, syarat-syarat demikian berlaku juga untuk bahasa penerjemahan karya cerita rekaan (fiksi), yakni novel, cerita pendek, puisi, atau drama. Di atas sudah disebutkan bahwa bahasa keilmuan lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada dengan perasaan. Ini tidak berarti bahwa dalam menerjemahkan sastra kita tidak menggunakan pikiran! Kadar perasaan yang ada dalam bahasa sastra, dalam ungkapan-ungkapan majasi, kata-kata dan kalimat yang oleh bahasa keilmuan dianggap mubazir, dalam bahasa sastra ia kadang turut menentukan mutu.

Bahasa Indonesia dalam berhadapan dengan penerjemahan bahasa sastra juga merupakan ujian, sampai berapa jauh kemampuan bahasa perasaan dalam penerjemahan itu berkomunikasi dengan perasaan bahasa sumber. Ungkapan perasaan dan majasi yang tersimpan dalam bahasa sumber itu

tidak sama dengan ungkapan perasaan dan majasi dalam bahasa Indonesia. Di sini seorang penerjemah karya sastra tidak saja dituntut kemampuan bahasanya, tetapi juga kemampuan kreativitasnya menggunakan bahasa. Kita berpikir dan merasa bangsa dengan bahasa kreativitas penerjemahan tidak sekedar menyalin kata-kata dan pengertian-pengertian, tapi juga sudah merupakan karya tersendiri. Ia harus menciptakan keindahan dalam bahasa Indonesia yang tidak mengurangi amanat yang ada dalam bahasa sumber. Terasa ada kenikmatan kita membaca karya sastra terjemahan yang demikian itu. Satu karya terjemahan biasa dianggap berhasil apabila ia merupakan "reproduksi" dan seperti apa adanya dari yang diterjemahkan dengan menggunakan bahasa terjemahan yang hidup dan bergaya. Dalam sejarah sastra tidak sedikit karya-karya terjemahan yang begitu hidup dan sedap dibaca sehingga orang lupa bahwa ia membawa karya terjemahan. Judul buku aslinya kadang juga sudah tidak dikenal dan penerjemahnya lebih dikenal daripada nama pengarang asal.

Sumbangan pada pengembangan bahasa Indonesia lebih-lebih kita rasakan dalam penerjemahan karya sastra. Sambil mengadakan penulisan asli karya sastra Indonesia seperti, yang dilakukan oleh Balai Pustaka sekitar tahun dua puluhan, penerjemahan karya sastra juga digiatkan. Kita tetap tertarik membaca karya terjemahan itu, dan nyatanya sudah mengalami cetak ulang sampai beberapa kali.

Sebelum Perang Dunia II penerjemahan sastra modern Indonesia sering dilakukan tidak langsung dari bahasa asal melainkan sudah melalui "jembatan" terjemahan kedua atau ketiga. Itu pun (Audah, 1975) masih terbatas sekali, baik macam, jumlah dan jangkauannya. Pada waktu itu penerjemahan dilakukan melalui bahasa Belanda meskipun yang diterjemahkan itu sastra Perancis, Inggris, atau Rusia misalnya, di samping sastra Belanda sendiri, dengan tidak mengurangi bahwa memang ada yang langsung. Juga sudah dapat dipastikan bahwa sebagai bukan hasil terjemahan sepenuhnya dalam arti harfiah, melainkan sudah berupa saduran, diringkaskan atau diceritakan kembali.

Barangkali tidak berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa lahirnya Pujangga Baru dan Angkatan 45 tidak lepas dari pengaruh sastra terjemahan. Sekurang-kurangnya pengaruh dari luar, melalui karya terjemahan yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain.

Sesudah Indonesia merdeka ada beberapa di antaranya yang diterjemahkan langsung dari bahasa Inggris atau Perancis. Dari bahasa-bahasa lain masih melalui bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Belakangan ini, setelah kegiatan penerjemahan makin meningkat, karya sastra dunia sebagian besar diterjemahkan langsung dari bahasa asal. Tolstoi diterjemahkan dari bahasa Rusia, Lorca dari bahasa Spanyol, Iqbal dari bahasa Persia atau Urdu, dan

sastra Arab dari bahasa Arab meskipun sebagian besar buku-buku agama. Penerjemahan langsung dari bahasa asal memang selalu mesti diusahakan untuk menghindari adanya "distorsi" dan memperluas jangkauan kita berkomunikasi langsung. Belakangan ini ada kecenderungan orang menerjemahkan karya yang dulu sudah diterjemahkan.

### Sastra Daerah

Memang pada hemat penulis masalah penerjemahan adalah masalah kebahasaan juga. Dalam pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah penerjemahan telah memperlihatkan peranannya sebagai penunjang (Hoed, 1978:317).

Sama halnya dengan sastra dunia sastra daerah pun perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangkauan ini akan cukup luas. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan bahasa daerah, dalam pengembangan bahasa nasional karya sastra daerah sudah sewajarnya diperkenalkan, pertama-tama kepada bangsa Indonesia. Orang Minahasa akan mengenal sastra Aceh misalnya, melalui hasil terjemahan bahasa Indonesia. Begitu juga sastra Batak, Madura, Bali, Sunda, Jawa dan seterusnya, akan dapat saling diperkenalkan melalui penerjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia akan terasa lebih penting sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu.

Langkah ke arah ini belakangan sudah mulai terlihat melalui penulisan-penulisan baik dalam majalah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah.

### c. Buku Agama

Selain karya sastra, penerjemahan yang sudah cukup tua usianya di Indonesia ialah buku agama. Orang mengenal Quran dalam terjemahan bahasa Melayu/Indonesia yang pertama pada pertengahan abad ke-17 oleh Abdul Rauf Alfansuri. Walaupun mungkin ditinjau dari sudut ilmu bahasa Indonesia modern belum sempurna, pekerjaan itu adalah besar jasanya sebagai pekerjaan perintis jalan (Al Quran dan Terjemahannya, 1980:45). Di samping terjemahan dalam bahasa Melayu/Indonesia, terdapat juga terjemahan Quran dalam bahasa-bahasa daerah. Hampir bersamaan waktunya dengan itu juga buku-buku tasawuf sudah lama dia terjemahkan dalam bahasa daerah. Kita belum memiliki datanya yang lebih terperinci mengenai sejarah penerjemahan buku-buku agama lain, yang sudah tentu akan meliputi juga literatur agama yang lain ada di Indonesia. Seperti halnya dalam menghadapi penerjemahan buku-buku ilmiah dan karya sastra, penerjemahan buku-buku agama ke dalam bahasa Indonesia tidaklah banyak menemui kesulitan.

Dalam perkembangan selanjutnya sampai saat ini penerjemahan buku agama dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia memperlihatkan adanya kemajuan yang makin pesat dan beraneka ragam. Dilihat dari segi bahasa Indonesia mutu terjemahan juga tampaknya sudah lebih baik.

Bagaimana juga penerjemahan buku-buku takkan berakhir selama manusia masih berpikir dan penerbitan buku dalam dunia internasional masih terus berkembang.

#### Catatan

1. Pengarahan Mendikbud pada rapat pleno BPPBN tanggal 28 September 1983 di Jakarta.
2. Anton M. Moeliono dalam Seminar Penerjemahan Bidang Hukum, diselenggarakan oleh HPI bekerja sama dengan Erasmus Huis, tanggal 10–12 Januari 1983 di Jakarta.
3. Keterangan ini diperoleh dari dr. Elias Effendi, penerjemahnya sebagai anggota Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI).
4. Bidang ilmu menurut klasifikasi UDC/DDC.  
72 = Filsafat/Teori Ilmu Pengetahuan  
11 = Logika  
12 = Matematika  
21 = Astronomi dan Astrofisika  
22 = Fisika  
23 = Kimia  
24 = Biologi  
25 = Ilmu Pengetahuan tentang Bumi dan Ruang (termasuk Oseanografi)  
61 = Psikologi

## DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Ali, 1982. "Buku-buku Ilmiah Masih Perlu Diterjemahkan". Dalam *Pustaka Kita, Dari Pameran ke Kultur Membaca*. Frans M. Parera (ed.) Jakarta: Panitia Pameran Buku Internasional IKAPI.
- , 1975. "Beberapa Masalah Penterjemahan". Dalam *Berita HPI* 1975 No. 1. Jakarta.
- , 1975. *Peranan Penterjemahan dalam Pengembangan Sastra Indonesia*. Jakarta: Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Al Quran dan Terjemahannya*. 1980. Jakarta: Departemen Agama RI. Barker & Escarpit, 1982. *Haus Buk (The Book Haunger)*. Sunindyo, penerjemahan. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Cowley, Malcolm, 1962. "American Books Abroad Dalam *Literary History of the United States*. Robert E. Spiller, Willard Throp, Thomas H. Johnson dan Henry Seidol Canby, Editor. New York: The Macmillan Company.
- Damono, Sapardi Djoko, 1977. "Masalah Penterjemahan dalam Bahasa Indonesia". Dalam *Berita H.P.I.* No. 7 Jakarta.
- Halim, Amran, 1981. "Peranan Penerjemahan dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa". Dalam *Budaya, Bahasa dan Penerjemahan*. Oesman Rahman, penyunting. Jakarta: Sekolah Tinggi Penerjemah Nasional.
- Hoed, B.H. 1978. "Penataran Penterjemah dan Politik Bahasa Nasional". Dalam *Berita H.P.I.* 1978 No. 11. Jakarta.
- Hughes, John P. 1966. *The Science of Language*. New York: Random House.
- Johannes, H. 1978. *Gaya Bahasa Keilmuan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- Pearce, Douglas, 1974. *Book Development*. Paris: UNESCO. Dicitak Pusat Grafika Indonesia.
- Simatupang, Maurits, 1978. *Penterjemahan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sukra, Yuhara dkk. 1982. "Keadaan Perbukuan Bidang Sains di Indonesia". Laporan Penelitian. Jakarta: Proyek Pengembangan Perpustakaan Pusat Pembinaan Perpustakaan.

## **BAHASA NASIONAL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL**

**Jusuf A. Feisal**  
IKIP Bandung

### **Pendahuluan**

#### **1. Kemampuan Dasar dan Penampilan Kebahasaan**

Kemampuan dasar manusia untuk berbahasa merupakan kemampuan yang sejalan dengan potensi hidup manusia; sarana ujaran (*artuculatory organs*) sekaligus berfungsi sebagai alat hidup (bernafas, makan-minum, pencernaan, merasa dan perkembangan badani). Meskipun demikian, kemampuan dan tingkat perkembangan ujaran sebagai penampilannya selain erat hubungannya dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan kreativitas seseorang, sangat erat hubungannya dengan pertimbangan individu yang dilandasi oleh nilai-nilai tertentu (budaya, agama, profesi, hubungan-peran, dan lain-lain).

Perkembangan bahasa secara genetik sangat dipengaruhi oleh kondisi objektif tersebut di atas, tetapi secara normatif perkembangan bahasa dibakukan dan dikembangkan oleh suatu badan atau kelompok masyarakat yang mewakili strata sosial tertentu dengan kerangka nilai budaya yang sudah disiapkan yang mengacu kepada kepentingan-kepentingan tertentu, sedangkan secara deskriptif perkembangan bahasa tersebut ditentukan oleh kesepakatan dan penerimaan sosial yang dilandaskan kepada pertimbangan pribadi dan sosial serta nilai-nilai budaya sehingga merupakan suatu kerangka pragmatik sosial yang secara struktural historis mengandung pengertian dan tafsiran linguistik dan kognitif para pelaku ujarannya sendiri.

Istilah bahasa nasional dalam judul makalah ini digunakan dengan kerangka berpikir seperti tersebut di atas, yaitu bahasa tersebut adalah bahasa standar yang dikembangkan baik secara normatif maupun secara deskriptif. Istilah nasional dipakai untuk mencerminkan perbedaan pengertian dengan istilah Indonesia yang berarti terdapat di kepulauan Indonesia karena pengertian tersebut bisa digunakan untuk bahasa-bahasa seperti bahasa daerah yang terdapat di Indonesia, tetapi tidak berfungsi sebagai bahasa nasional yang merupakan bahasa standar, kecuali sumbangannya dalam perkembangan bahasa nasional tersebut (bunyi, kosakata, sintaksis, dan makna).

Sarana komunikasi adalah alat verbal untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang mengandung data, hubungan antardata dan makna konseptual dalam bentuk lisan atau bahasa tulisan sehingga terjadi kontak, saling pengertian dan saling isi (interaksi) dalam suatu konteks tertentu yang sedikitnya mengandung unsur psikologi, sosiologik dan fisik. Konteks psikologik merupakan dimensi terpadu dalam proses komunikasi yang melibatkan aspek sikap dan motivasi serta kesejarahan, pengalaman dan pengetahuan. Dimensi sosiologik meliputi status dan peran hubungan, norma budaya dan moral sosial, sedangkan dimensi fisik melibatkan ruang dan tempat terjadinya proses komunikasi. Ketiga dimensi ini merupakan unsur-unsur terpadu dalam satu proses penyebaran informasi dan pembentukan pola-pola interaksi dalam satu konteks yang dapat menetapkan makna beserta nuansa-nuasannya, baik dalam bentuk pesan, bujukan maupun perintah.

Tujuan komunikasi secara sejajar, bertingkat atau bercabang tidak hanya dimaksudkan untuk menyampaikan suatu maksud atau konsep, tetapi juga dimaksudkan untuk menerima arus balik yang merupakan kesan, pengertian, dan konsep yang merupakan masukan bagi perbaikan, perkembangan, dan pembaharuan konsep atau makna dan konsepsi suatu perilaku budaya (tujuan nasional).

Cita-cita nasional sebagaimana kita lihat dalam paragraf empat Pembukaan UUD 1945 ialah "Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...." Realisasi tujuan nasional ini tidak hanya bergantung kepada landasan yang harus terbentuk terlebih dahulu dan mendasari cita-cita tersebut, seperti dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan seluruh bangsa Indonesia, Kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, tetapi juga dipahami asal mula terjadinya dan suasana terbentuknya kode ujaran tersebut sehingga memahami maksudnya atau aliran-aliran pikiran yang terkandung di dalamnya dengan mengingat

pula dinamika kehidupan masyarakat dan negara yang selalu tumbuh dan berkembang (proses perubahan).

## 2. Teori Komunikasi dan Proses Sosialisasi

Jika diteropong teori komunikasi, sebagaimana dirumuskan oleh Watzlawick dan kawan-kawan (1967), komunikasi adalah setiap unit perilaku yang berfungsi menyampaikan informasi secara sepihak dan tidak memungkinkan timbulnya kesimpangsiuran yang disebut pesan (*message*). Seperangkat pertukaran pesan antarindividu secara timbal-balik disebut interaksi (*interaction*). Akhirnya pada tingkat ulang yang tinggi komunikasi manusia ini dilahirkan pola interaksi (*patterns of interaction*).

Pesan membawa kesan, demikianlah dalam komunikasi manusiawi pesan berarti isi pesan. Pesan ini sering secara kategorik diungkapkan dalam simbol kebahasaan yang jelas yang mengacu kepada makna yang sederhana, gamblang dan terang. Akan tetapi, ada kalanya pesan ini harus diungkapkan dengan cara yang rumit, melelahkan dan tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman karena luasnya konsep makna yang terkandung pada simbol kebahasaan tersebut atau dalamnya konsepsi yang terdapat pada kaitan antar-makna yang terkandung dalam seperangkat simbol kebahasaan atau struktur kalimat sehingga menuntut si penutur melengkapinya dengan unsur-unsur saru bahasa (*para linguistic features*) yang bersifat nada, sikap-badani, rangka (*tone, postural, contextual*), jarak, bau, raba (*distance, olfactory, tactile*), semangat dan mimik (DeVito, 1970).

Kerumitan pesan tersebut akan terasa lebih serius apabila si penerima atau pendengar tidak menggunakan rujukan yang sama atau memiliki persepsi yang berbeda, baik yang bersifat objektif atau bersifat judgemental, terutama apabila si penutur mengabaikan sama sekali adanya pihak si penerima, pendengar atau "kawan" berinteraksi (*communication gap*). Hal ini juga mungkin terjadi karena berlakunya pengabaian nilai (*value ignorance*), pengabaian norma budaya dan pragmatik yang terpadu dengan pihak pendengar tersebut sehingga tidak terjadi proses pertukaran informasi (*exchange of message*) dan karena itu kehilangan pengertian (*cognitive deficit*) yang disebabkan tidak adanya umpan balik. Dengan demikian, proses sosialisasi (timbal-balik) mengalami hambatan atau sama sekali terhenti.

## 3. Koreselerasi antara Masyarakat Bahasa, Ujaran (Bahasa) dan Makna (Tujuan) Menurut Pandangan Hipotesis Difisit Lawan Konsep Kebinekaan (Variability Concept)

Masyarakat Bahasa (*speech Community*) menurut Fishman (1969) ialah sekelompok penutur yang anggotanya menggunakan sekurang-kurangnya sebuah ragam bahasa (*speech variety*) berikut norma-norma penggunaannya

yang tepat, yang seringkali secara fungsional merupakan sumber kebahasaan yang berbeda bergantung kepada jaringan interaksi perilaku bahasa yang berbeda pula.

Bahasa secara potensial merupakan simbol suara yang bersifat arbitrer dan digunakan untuk komunikasi manusia, khususnya pada masyarakat bahasa tertentu dan oleh karena itu merupakan milik masyarakat tersebut, sedangkan ujaran adalah penampilan aktual bahasa yang merupakan produk perorangan dalam proses komunikasi yang nyata (lihat pandangan Ferdinand de Saussure sebagaimana dikutip oleh DeVito (1969).

Makna pada hakikatnya merupakan tujuan ungkapan atau ujaran yang memungkinkan mengacu kepada benda, peristiwa, konsep atau penilaian. Oleh karena itu, makna ada kalanya berbentuk kosakata, hubungan antar-kosakata, pernyataan, hubungan antarpernyataan yang ditetapkan oleh maksud atau pertimbangan si penutur dan si pendengar. Selain daripada itu, makna seringkali meliputi bukan hanya unsur-unsur tersebut di atas, tetapi juga unsur budaya yang dijalin dalam suatu bentuk dan struktur tertentu yang disebut pragmatik. Di dalam kenyataannya pemilihan kosakata, bentuk dan struktur ujarannya yang baik dan benar, menurut hipotesis difisit harus merujuk kepada satu bentuk dan struktur standar yang secara normatif ditetapkan oleh sekelompok para ahli dan digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang dimasyarakatkan melalui suatu proses pendidikan. Setiap kelompok masyarakat yang mengharapkan untuk bisa berkomunikasi dengan kelompok masyarakat tersebut di atas harus berusaha untuk menguasai bentuk dan struktur ujaran tersebut atau dengan perkataan lain kelompok masyarakat yang memiliki ujaran standar masyarakat kelompok tersebut dapat berintegrasi dengan kelompok pemilik ujaran standar tersebut.

Sebaliknya menurut teori konsep kebinekaan, teori hipotesis defisit tersebut dalam kenyataannya tidak melahirkan integrasi sosial, tetapi justru mengesahkan dan memperkuat adanya kelompok ujaran tertentu yang berstatus lebih tinggi daripada kelompok ujaran lain yang dipandang lebih rendah. Kelompok ujaran yang lebih rendahlah yang harus melestarikan kepentingan kelompok ujaran yang lebih tinggi. Tinggi rendahnya status atau martabat kelompok ujaran diukur dari suatu kelompok tertentu yang kebetulan memiliki kesempatan dan otoritas, padahal adanya berbagai kelompok ujaran dalam masyarakat adalah suatu kenyataan kultural yang terpadu dengan norma-norma budayanya dan oleh karena itu mempunyai hak hidup dan hak untuk dimengerti oleh kelompok lainnya yang secara deskriptif kaidah-kaidah kebahasaannya hendaknya dirumuskan secara menyeluruh yang masing-masing martabat dan keunikannya dihormati dan dibakukan

yang akhirnya digunakan dalam satu kerangka masyarakat ujaran yang lebih luas dalam lintasan antarkelompok dan dalam wadah nasional (Dittmar, 1976).

Dalam kerangka pikiran inilah istilah bahasa nasional dipergunakan dalam judul makalah ini.

#### 4. Analisis Bahasa

Bahasa atau ujaran pada dasarnya memiliki bentuk, isi dan tujuan. Bentuk bahasa dapat diurut mulai dari adanya bentuk struktur bunyi yang merupakan unit-unit bunyi yang membentuk arti dan bunyi atau unit yang memiliki arti. Selanjutnya bentuk dan struktur kosakata yang terdiri dari unit-unit bunyi yang merupakan simbol suatu benda, konsep, peristiwa, dan evaluasi yang memiliki makna tersendiri secara terpisah atau dalam hubungannya dengan kosakata yang lain dalam satu struktur kalimat dan atau makna yang dimilikinya secara khusus karena keterkaitannya dengan kosakata yang lain dalam suatu konteks atau situasi (waktu dan *setting*). Selain daripada itu dalam struktur kalimat yang menggambarkan susunan tempat kosakata terdapat juga susunan kalimat yang mempertimbangkan tidak hanya susunan tempat kosakata, tetapi pilihan kosakata atau frasa dilihat dari efektivitas pencapaian maksud, yaitu gaya bahasa dan pragmatik tertentu. Selain dari itu, penggunaan aksent, tinggi rendah bunyi, sambungan bunyi antarkata (*junction*), nada dan irama bahasa, merupakan bentuk lain yang memberi makna tersendiri yang sering dibantu kedalaman maknanya oleh mimik (air muka) maupun sikap dan gerak badani yang dalam bahasa tulisan hal itu diungkapkan oleh tanda baca seperti koma, titik koma, tanda seru, tanda tanya, dan titik.

Isi ungkapan secara garis besarnya terbagi ke dalam makna harfiah (tersurat) dan makna lisan/kiasan (tersirat), makna rujukan (denotasi) dan dalam makna kosakata (leksis) yang biasanya dibakukan dalam suatu indeks (kamus). Selanjutnya isi atau makna sintaksis yang ketetapan maknanya ditetapkan oleh posisi kosakata dalam kalimat dan diatur oleh ketentuan tata bahasa. Meskipun di dalam kenyataan penggunaan ujaran atau bahasa sering terjadi penyimpangan dari atau ketidaklengkapan aturan kebahasaan, sebenarnya kalimat-kalimat tersebut tetap memperoleh arti yang seharusnya karena kalimat-kalimat tersebut dapat dialihbentukkan ke dalam kalimat lain yang merupakan maksud yang sebenarnya (*surface vs deep structure*).

Isi atau makna juga terjadi karena kosakata atau frasa tidak hanya karena hubungannya dengan kosakata atau frasa yang lain, tetapi karena masuknya faktor waktu dan *setting*. (susunannya dengan lingkungan) atau dalam konteks tertentu. Dalam keadaan seperti ini pengungkapan maksud

yang sama dilakukan dengan menggunakan frasa atau kalimat yang berbeda atau ungkapan (kalimat) sama mempunyai arti yang berbeda hanya karena ungkapan atau kalimat tersebut berada dalam konteks dan atau situasi yang berbeda. Akhirnya, makna seperti halnya makna kontekstual di atas dapat diungkapkan melalui bentuk dan atau struktur ujaran khusus yang merujuk kepada keunikan fungsi (register), alat (media), dan atau daerah (dialek).

Tujuan ujaran identik dengan tujuan komunikasi karena ujaran adalah salah satu bentuk komunikasi yang riil yaitu untuk menyajikan data atau informasi sebagai laporan dan untuk menyampaikan keterangan tentang data atau informasi yang merupakan harapan atau perintah. Karena bentuk kegiatan komunikasi tidak hanya berlaku secara verbal, tetapi meliputi seluruh bentuk perilaku budaya, maka proses komunikasi, termasuk komunikasi verbal atau kalimat bertujuan untuk memancing umpan balik yang merupakan pengertian, harapan dan aspirasi pendengar untuk perbaikan makna atau konsep, konsep maupun perkembangan dan atau perubahannya sesuai dengan dinamika pendengar atau kelompok pendengar (masyarakat). Yang terakhir ini merupakan proses pembentukan makna, isi atau tujuan ujaran dengan pendekatan deskriptif yang berbeda dengan pendekatan normatif.

Proses sosialisasi bentuk dan struktur ujaran, atau dengan perkataan lain proses komunikasi yang menyajikan data dan informasi secara normatif-sepihak, dapat dilakukan melalui berbagai macam bentuk pendidikan, percontohan, retorika, permainan simulasi, dan sebagainya, sedangkan proses sosialisasi timbal balik dilakukan dalam bentuk-bentuk pola interaksi yang menerima arus balik seperti dalam bentuk tanya jawab, diskusi, simposium, dan seminar, pengumpulan dan pencatatan pendapat.

Ketidakpastian makna dan atau tujuan (*entropy*) karena perbedaan konsep atau konsepsi suatu ujaran yang disebabkan kesalahpahaman, perbedaan persepsi dan perbedaan tujuan akan mengakibatkan terjadinya salah-komunikasi (miskomunikasi) bahkan kesenjangan komunikasi (*communication gap*) atau sekurang-kurangnya akan terjadi nuansa dan varian yang dapat menimbulkan kebingungan (*confusion*), frustrasi dan atau sikap masa bodoh yang disebabkan oleh tidak adanya pengertian. Hal ini dapat berlanjut kepada suatu keadaan hampa nilai (*anomie*) sehingga ujaran atau komunikasi dan interaksi kehilangan bentuk struktur dan arah. Sebagai akibatnya, ujaran (bahasa nasional) kehilangan fungsinya.

Kalau kita perhatikan formula teori komunikasi dan kebahasaan sebagai landasan pendapat analisis dan konsepsi atau teori dan rumusan tujuan nasional serta isi tafsirnya, sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu dan kita hubungkan pula dengan GBHN 1983–1988 Bab III yaitu Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Sub A ayat 3 yang berbunyi:

"Setelah pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965 dapat digagalkan, berkat lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kesadaran dan keteguhan rakyat pada landasan falsafah Pancasila, maka Orde Baru dengan perjuangan yang sungguh-sungguh telah berhasil menciptakan stabilitas nasional, baik di bidang politik, untuk selanjutnya melakukan serangkaian pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terus-menerus, menyeluruh, terarah dan terpadu, bertahap dan berencana, sebagai satu-satunya jalan untuk mengisi kemerdekaan serta menciptakan *tujuan nasional*. Semua usaha dan perjuangan itu akan terwujud apabila seluruh bangsa setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Apabila kita rujuk pula Pola Dasar Pembangunan Nasional sebagaimana termaktub dalam GBHN 1983–1988 Bab II Sub A yang berbunyi:

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai".

Jelaslah bahwa pencapaian tujuan nasional hendaknya menjamin/terpeliharanya lingkungan tujuan nasional tersebut yang antara lain terdiri atas.

- a. unsur kesejahteraan tentang asal-usul terjadinya rumusan dan alam pikiran yang melatarbelakangi rumusan tujuan nasional tersebut;
- b. maksud (makna dan tujuan) rumusan setiap kata dan kalimat (ujaran);
- c. pedoman dasar pencapaian tujuan nasional;
- d. pelaksanaan teknis pencapaian tujuan nasional tersebut;
- e. dinamika yang tumbuh di dalam lingkungan bangsa dan negara;
- f. dinamika yang berpengaruh dari luar dalam lingkungan antarbangsa (dunia).

Hal ini berarti bahwa penggunaan bahasa nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional hendaknya diusahakan terbentuknya kalimat, pernyataan tentang pernyataan (*statements about statements*) yang tidak hanya berbentuk pesan (*message*) yang menyampaikan data dan atau informasi yang bersifat normatif, tetapi diusahakan penggunaan kalimat yang demikian rupa sehingga menimbulkan interaksi, dialog, saling isi yang dapat menghasilkan umpan balik yang merupakan masukan untuk penyempurnaan dan atau perubahan, bahkan bahasa nasional seyogianya memungkinkan tingkat komunikasi yang lebih tinggi, yaitu terjadinya pola-pola interaksi yang bervariasi, tidak monolitik dan dogmatik.

Lebih daripada itu, interaksi adalah suatu sistem yang terdiri dari se-

perangkat objek yang memiliki keterkaitan dengan objek lain beserta seluruh atributnya. Dengan perkataan lain, komunikasi atau interaksi sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen yang merupakan bagian sistem, atribut komponen dan keterkaitannya satu sama lain (*relationship between components and between their attributes*).

Sesuai dengan rumusan interaksi sebagai suatu sistem terbuka, ia harus memenuhi syarat-syarat:

- a. menyeluruh, tidak unilateral, artinya sistem tersebut tidak berperilaku sebagai suatu komposit unsur yang bebas, tetapi secara pekat menyatu dengan keseluruhan;
- b. memungkinkan adanya umpan balik melalui jalur putaran sistem tersebut ujaran-ujaran yang mengandung konsepsi serta keterkaitannya dengan dinamika lingkungan disalurkan;
- c. memungkinkan tercapainya *equifinality*, yaitu gerak maju dengan perubahan dalam suatu sistem, setelah mengalami periode tertentu, perubahan dan atau perkembangan atau modifikasi ujaran, konsep, makna dan tujuan tidak lagi terikat kepada pewaktuan yang terlalu kaku dan kondisi sebelumnya, tetapi lebih ditentukan oleh parameter sistem tersebut.

## 5. Kesimpulan dan Anjuran

Sebagai akibat konsepsi ini yang diturunkan dari teori kebahasaan, komunikasi dan sosialisasi yang tidak terpaku hanya kepada pendekatan normatif, tetapi juga menggunakan pendekatan deskriptif, hal-hal tersebut di bawah ini sangat mungkin akan terjadi (sebagai konsekuensi dari kebenaran suatu sistem terbuka, yaitu.

- a. bahasa atau ujaran sebagai sarana komunikasi dan interaksi yang *baik* dan *benar* merupakan bahasa standar yang dibakukan secara normatif;
- b. meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan masukan baru yang terdiri dari kosakata, frasa, pernyataan dan pernyataan tentang pernyataan yang mengonseptualisasikan dan mengonsepsionalisasikan makna atau pengertian baru yang lahir dari dinamika masyarakat dan budaya;
- c. demikian halnya dengan bentuk dan struktur ujaran tujuan nasional hendaknya merupakan ujaran standar yang dibakukan secara normatif;
- d. akan tetapi, tetap membuka kemungkinan masukan baru yang lahir dan tumbuh dari dinamika masyarakat dan budaya.

Apabila teori itu dijadikan pedoman pelaksanaan proses komunikasi, interaksi atau sosialisasi tujuan nasional sudah dapat diperhitungkan/diprediksikan bahwa bukan saja tidak akan terjadi miskomunikasi, kesenjangan komunikasi atau hampa komunikasi tetapi justru akan terjadi harmoni antara bahasa sebagai sarana komunikasi dengan tujuan nasional sebagai

objek komunikasi dan lingkungan serta atributnya dalam suatu keterkaitan sistem yang berjalan dan lestari.

Untuk memungkinkan hal ini perlu dilakukan peningkatan keterbukaan, objektivitas, keluwesan, kesabaran, dan tingkat kecerdasan yang menunjukkan kebijaksanaan. Tidak tertutup, eksklusif, penuh ketidakpercayaan dan tidak saling menutup kemungkinan berdialog dan berinteraksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- DeVito, Joseph A. 1970. *The Psychology of Speech and Language*. New York: Random House, Inc.
- Dittmar, Norbert. 1976. *Sosiolinguistics*, Edward Arnold Ltd.
- Fishman, Joshua A. 1969. *The Sociology of Language*. Massachusetts: Newbury House Publisher, Inc.
- Inglehart, RF dan M. Woodward. 1979. "Language Conflicts and Political Community" dalam *Language and Social Context*, Pier Paolo Giglioli (ed.), Auckland; Penguin Books.
- MPR, 1983. *GBHN dan P4* (1983–1988 dan 1978–1983). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , *P4, GBHN dan UUD 1945*. 1978. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Watzlawick, Paul. ed. al. 1967. *Pragmatics of Human Communication*, New York: W.W. Norton & Company Inc.

## **PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI MASYARAKAT**

**P.W.J. Nababan**  
IKIP Jakarta

### **Pendahuluan**

Pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia mengikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk berjuang akan tercapainya "satu nusa: Indonesia; satu bangsa: Indonesia; satu bahasa persatuan: Indonesia". Dengan demikian, secara konseptual, lahirlah nusa, bangsa dan bahasa Indonesia. Sewaktu perwujudan nusa dan bangsa Indonesia sedang diperjuangkan, bahasa Indonesia sudah lahir dengan nyata dan sejak Sumpah Pemuda itu mulai diasuh, dikembangkan dan dipelihara oleh pejuang-pejuang Indonesia.

Dalam masa penjajahan politis, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia mengalami banyak kesukaran. Namun, dapat dicatat bahwa pada dekade 1930 sudah lebih banyak penerbitan dalam bahasa Indonesia, baik surat-surat kabar maupun buku-buku. Patut dicatat dalam kaitan ini penerbitan majalah *Pujangga Baru* di bawah pimpinan Sutan Takdir Alisjahbana, dibantu oleh Armyn Pane dan Amir Hamzah (Abas, 1978:111).

Salah satu puncak usaha pembina-pembina bahasa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ialah penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo pada tahun 1938. Dalam Kongres Bahasa Indonesia I itu diusulkan antara lain:

- a. membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi;
- b. pembaharuan ejaan, pengembangan istilah-istilah dan penyusunan tata

bahasa baru sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia;  
 c. pendirian suatu Institut Bahasa Indonesia (Moeliono, 1982).

Tidak mengherankan bahwa hasil-hasil kongres itu tidak terselenggara karena tidak ada organisasi atau lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengimplementasi keputusan-keputusan itu. Namun, kongres itu berhasil mengikatkan serta meluaskan kesadaran orang akan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat dan kekuatan pemersatu dalam perjuangan menuju tercapainya nusa dan bangsa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928.

Selama zaman kolonial Belanda, bahasa Indonesia masih dalam kedudukan yang terpojok sebab bahasa Belanda satu-satunya bahasa yang diberi status resmi. Dalam masa pendudukan Jepang, posisi bahasa Indonesia menjadi lebih penting dan luas, karena bahasa Belanda jarang/dilarang pemerintah Jepang, sedangkan bahasa Jepang tidak/belum diketahui orang. Jadi, terpaksa bahasa Indonesia yang dipakai dalam fungsi-fungsi resmi seperti pemerintahan, pengadilan, dan juga di sekolah-sekolah. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia segera meluas di seluruh Indonesia secara nyata.

Pemerintah Jepang membentuk Komisi Bahasa Indonesia pada akhir tahun 1942, tetapi tidak diberi fasilitas-fasilitas yang memungkinkan komisi itu bekerja dengan baik, malah mereka membubarkan komisi pada tanggal 30 April 1945 (Johannes, 182). Walaupun demikian, komisi ini menghasilkan daftar istilah untuk berbagai bidang yang sempat diterbitkan oleh S.T. Alisjahbana dengan Poestaka Rakyat dalam Oktober 1945. Mungkin yang lebih penting dan berguna bagi perkembangan bahasa Indonesia ialah naskah Kamus Umum Bahasa Indonesia" (yang kemudian diterbitkan W.J.S. Purwadarminta dengan Balai Pustaka).

Kemerdekaan Indonesia membuat kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia secara yuridis menjadi penuh dan lengkap dengan pasal 36, Bab XV, UUD 1945, yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia secara nyata dan benar menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi Indonesia, yang dipakai dalam semua kegiatan resmi negara dan pemerintahan; demikian juga dalam pendidikan dan juga kegiatan sosioekonomi yang bersifat supradarerah. Perubahan kedudukan, fungsi, dan penggunaan bahasa Indonesia ini dapat diduga akan membawa perubahan dalam berbagai pola berbahasa orang Indonesia.

Dalam kertas kerja ini saya ingin membicarakan pola penggunaan bahasa Indonesia, khususnya sebagai "bahasa pertama" atau bahasa yang dipelajari penuturnya dalam lingkungan rumah tangga (yang secara tradisional juga disebut "bahasa ibu"). Sumber utama bagi pengkajian ini ialah data yang terkumpul oleh survei yang dilaksanakan suatu tim dari Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

dalam tahun 1980–1982. Sebelumnya, kiranya ada gunanya kita lihat beberapa hasil Sensus Penduduk Indonesia.

### Pola Kebahasaan dalam Sensus Penduduk Indonesia 1980

Dalam buku *Hasil Sub-Sampel Sensus Penduduk 1980 (SPI)* diperlihatkan bahwa lebih dari 61% penduduk Indonesia mampu berbahasa Indonesia (lihat Tabel 1). Jumlah ini terdiri dari rata-rata persentase dari yang terendah 50.8 (Jawa Timur) sampai yang tertinggi 99.5% (DKI Jaya). Dalam tabel ini, Indonesia dibagi atas 5 wilayah:

- a. Jawa Madura,
- b. Sumatra,
- c. Kalimantan,
- d. Sulawesi, dan
- e. Kepulauan lain.

Dari kelima wilayah ini, Sumatra mempunyai persentase yang tertinggi (71.7%) penduduk yang dapat berbahasa Indonesia. Rupanya, dalam bidang ini dimasukkan penutur-penutur bahasa daerah Melayu yang ada di Sumatra Timur, Riau, Jambi, dan Palembang. Jawa-Madura mempunyai persentase yang terendah, yaitu 58%. Ini barangkali agak mengherankan karena Jawa mempunyai penduduk yang relatif lebih banyak di kota dibanding dengan pedesaan.

TABEL 1  
PERSENTASE PENDUDUK YANG BISA BERBAHASA INDONESIA  
MENURUT PROPINSI/PULAU 1980

| Propinsi/Pulau    | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki +<br>Perempuan |
|-------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| (1)               | (2)       | (3)       | (4)                      |
| 1. Jawa – Madura  | 63.8      | 52.3      | 58.0                     |
| a. DKI Jakarta    | 99.5      | 99.4      | 99.5                     |
| b. Jawa Barat     | 66.0      | 57.2      | 61.6                     |
| c. Jawa Tengah    | 58.8      | 45.0      | 51.8                     |
| d. DI. Yogyakarta | 67.1      | 52.1      | 59.5                     |
| e. Jawa Timur     | 57.7      | 44.0      | 50.7                     |
| 2. Sumatra        | 74.3      | 69.1      | 71.7                     |
| 3. Kalimantan     | 68.1      | 59.3      | 63.8                     |
| 4. Sulawesi       | 66.3      | 60.7      | 63.5                     |
| 5. Kepulauan Lain | 66.0      | 52.9      | 59.5                     |
| Indonesia         | 66.4      | 56.4      | 61.4                     |

Sumber: Seri D, Sensus Penduduk Indonesia 1980, Biro Pusat Statistik

- Kita umumnya menganggap lebih banyak bahasa Indonesia digunakan di kota daripada di pedesaan. Perbandingan penduduk umur 5 tahun ke atas antara kota dan pedesaan di Jawa-Madura ialah 1 : 3, sedangkan di Sumatra ialah 1 : 4, di Kalimantan 2 : 7, di Sulawesi 1 : 5, dan kepulauan lain 1 : 7 (lihat tabel 8 dalam SPI 1980). Kemungkinan keterangannya ialah bahwa
- a. di luar Jawa-Madura banyak terdapat orang pedesaan yang menyatakan tahu bahasa Indonesia karena tahu berbahasa daerah Melayu, seperti bahasa Melayu Manado, Kupang, Ambon, bahasa Banjar dan bahasa-bahasa Melayu di Sumatra.
  - b. di Jawa-Madura terdapat konsentrasi penduduk pedesaan yang lebih homogen berbahasa daerah.

Persentase penduduk Indonesia yang mampu berbahasa Indonesia adalah 60.8% dalam SPI 1980 (Tabel 2). Pada SPI 1971, persentase penutur bahasa Indonesia ialah 40.8%, dan biro Pusat Statistik memproyeksikan kenaikan persentase dalam tahun 1981 kepada 49.66%. Jadi, kenyataan ada kelebihan 11% lebih daripada proyeksi statistik. Proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 1981 adalah 140 juta. Ini tidak sebanyak penduduk dalam SPI 1980, yang berjumlah 146 juta, tetapi perbedaannya tidak sebesar perbedaan proyeksi penutur bahasa Indonesia.

Perbedaan yang lebih besar dalam jumlah penutur bahasa Indonesia kemungkinan sekali karena kurang dihitung cepatnya bertambah jumlah pelajar di sekolah. Umpamanya dalam 2 tahun, antara 1975 dan 1977, jumlah pelajar bertambah 14.5% (BP3K, 1979), sedangkan penambahan penduduk yang diproyeksikan dalam 10 (sepuluh) tahun adalah kurang dari 28%. Ini saja sudah cukup membuat perbedaan yang besar antara kenyataan dan proyeksi. Lagi pula ada juga kiranya pengaruh dari pesatnya berkembang telekomunikasi dan media massa, yang ikut juga berperan dalam bertambahnya penutur bahasa Indonesia, atau paling sedikit mempertahankan kemampuan berbahasa Indonesia para penonton, pendengar, dan pembaca.

TABEL 2  
 PERSENTASE PENDUDUK YANG DAPAT BERBAHASA INDONESIA  
 MENURUT DAERAH KOTA/PEDESAAN, UMUR DAN JENIS KELAMIN  
 1971 dan 1980

|                 | 1971      |           |       | 1980      |           |        |
|-----------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|
|                 | Laki-laki | Perempuan |       | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| (1)             | (2)       | (3)       | (4)   | (5)       | (6)       | (7)    |
| Daerah Kota     |           |           |       |           |           |        |
| 0-9             | 51.3      | 51.4      | 51.4  | 55.1      | 55.6      | 55.3   |
| 10-49           | 87.4      | 78.7      | 83.0  | 96.8      | 91.5      | 94.8   |
| 50 +            | 73.1      | 51.5      | 61.9  | 83.5      | 59.1      | 70.8   |
| Tak Terjawab    | 99.4      | 98.9      | 99.5  | 80.1      | 66.2      | 73.1   |
| Jumlah          | 75.3      | 68.4      | 71.9  | 84.2      | 78.8      | 81.5   |
| Daerah Pedesaan |           |           |       |           |           |        |
| 0-9             | 16.6      | 16.4      | 16.5  | 22.9      | 23.4      | 24.1   |
| 10-49           | 54.2      | 38.9      | 46.3  | 82.1      | 67.8      | 74.8   |
| 50 +            | 32.0      | 14.2      | 22.8  | 50.8      | 20.8      | 35.4   |
| Tak Terjawab    | 100.0     | 100.0     | 100.0 | 49.1      | 25.7      | 38.7   |
| Jumlah          | 39.4      | 29.3      | 34.3  | 60.5      | 49.3      | 54.8   |
| Kota + Pedesaan |           |           |       |           |           |        |
| 0-9             | 22.2      | 21.9      | 22.1  | 29.6      | 30.0      | 29.8   |
| 10-49           | 60.4      | 46.1      | 53.0  | 85.7      | 73.3      | 79.4   |
| 50 +            | 38.2      | 19.9      | 28.7  | 57.0      | 28.2      | 42.2   |
| Tak Terjawab    | 99.4      | 98.9      | 99.2  | 54.7      | 34.6      | 45.5   |
| Jumlah          | 45,7      | 36.0      | 40.8  | 65.8      | 55.9      | 60.8   |

Sumber: Seri D, Sensus Penduduk 1971 dan Sensus Penduduk 1980  
 Biro Pusat Statistik

### Pola Perolehan Bahasa Indonesia

Orang belajar bahasa secara informal, atau sambil lalu, dalam suatu lingkungan bahasa terutama untuk keperluan berkomunikasi dengan orang-orang dalam lingkungan kebahasaan itu. Jikalau belajar bahasa ini dilakukan untuk pertama kali dan biasanya di kalangan rumah tangga/keluarga, bahasa yang dipelajari itu disebut *bahasa ibu (mother tongue)*, *bahasa asli (native language)*, atau *bahasa pertama (first language)*. Kita akan pakai di sini istilah *bahasa pertama*.

Dalam Sensus Penduduk Indonesia 1980 dipakai istilah *bahasa yang dipakai sehari-hari*, yang kita anggap sama dengan *bahasa pertama* yang kita

pakai di sini, mengikuti peristilahan survei Proyek Penelitian Pusat Bahasa tersebut di atas. Akan tetapi, bahasa yang dipakai sehari-hari agaknya mempunyai implikasi lebih langsung kepada tingkat kemampuan daripada bahasa pertama. Dengan kata lain, pada umumnya lebih terjamin adanya tingkat kemampuan yang memadai dalam pengertian *bahasa yang dipakai sehari-hari*, sedangkan kemampuan berbahasa seseorang dalam *bahasa pertama* dapat saja berkurang bergantung pada frekuensi dan situasi penggunaan bahasa itu. Namun, dengan catatan di atas, kita akan memakai kedua istilah itu seperti sama.

Dalam Sensus Penduduk Indonesia 1980 tercatat 11.93% penduduk yang memakai *bahasa Indonesia sehari-hari* (lihat Tabel 3 di bawah). Bilangan ini sama dengan perkiraan dalam Tabel 12.3 dari Seri S, SPI 1980, yang mencatat jumlah 17.640.621. SPI 1971 mencatat 48.3 juta orang yang *tahu bahasa Indonesia*. Jadi, secara perbandingan dapat diperkirakan ada 11.363.311 orang yang memakai bahasa Indonesia sehari-hari. Berdasarkan SPI 1971 itu, Latief (1979) memberikan perkiraan jumlah *penutur bahasa Indonesia* dengan jarak yang cukup aman, yaitu dari 20 sampai dengan 60 juta. Perkiraan ini agaknya membayangkan kemampuan *berbahasa kedua* dari yang serendah-rendahnya sampai yang amat baik.

Tabel 4 memberikan ikhtisar perolehan bahasa Indonesia:

- a. sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua,
- b. oleh orang dewasa dan anak-anak,
- c. di kota besar dan kota kecil,

di 13 propinsi, termasuk DKI Jaya, yang dimaksud dengan orang dewasa ialah yang berumur 25 tahun ke atas dan anak-anak terdiri dari murid-murid sekolah dasar dan SMP. Jika kita anggap anak-anak berumur antara 6—15 tahun, perbedaan umur antara golongan dewasa dan golongan anak ialah paling sedikit 10 tahun (25—15 tahun). Kalau rata-rata umur golongan dewasa ialah kira-kira 35 tahun dan golongan anak kira-kira 11 tahun, perbedaan umur rata-rata antara dewasa dan anak-anak ialah 24 tahun. Kota besar ialah ibu kota kedua belas propinsi dan Jakarta Raya. Kota kecil ialah satu kota kecamatan yang jauhnya antara 20 dan 30 km dari ibu kota. di DKI Jaya, kota kecil berarti pinggiran kota.

Seluruh responden berjumlah 2071 orang terdiri dari 1409 dewasa dan 662 anak (lihat Tabel 5 di bawah). Di kota besar, ada 821 responden dewasa 409 anak. Di kota kecil 588 dewasa dan 253 anak. Di antara yang berbahasa Indonesia sebagai bahasa pertama (B1), 41 dewasa dan 100 anak di kota besar; dewasa dan 41 anak di kota kecil. Di antara yang berbahasa Indonesia sebagai bahasa kedua (B2), 666 dewasa dan 286 anak di kota besar; 487 dewasa dan 199 anak di kota kecil.

**TABEL 3**  
**PERSENTASE PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR**  
**DAN BAHASA YANG DIPAKAI SEHARI-HARI 1980**

| Golongan<br>umur | Bahasa yang dipakai sehari-hari |       |       |      |      |      |      |      |      |      |                   |             |
|------------------|---------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|-------------|
|                  | Indonesia                       | Jawa  |       |      |      |      |      |      |      |      | Tidak<br>Terjawab | Jumlah      |
| (1)              | (2)                             | (3)   | (4)   | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12)              | (2) – (12)  |
| 0 – 4            | 12,70                           | 37,30 | 15,74 | 4,15 | 2,44 | 2,57 | 1,50 | 2,20 | 1,14 | 0,87 | 19,39             | 21.190.672  |
| 5 – 9            | 11,52                           | 38,70 | 15,65 | 4,48 | 2,34 | 2,44 | 1,71 | 2,50 | 1,22 | 0,84 | 18,60             | 21.231.927  |
| 10 – 14          | 12,17                           | 40,55 | 15,22 | 3,68 | 2,47 | 2,47 | 1,69 | 2,30 | 1,10 | 0,75 | 17,60             | 17.619.034  |
| 15 – 24          | 14,51                           | 40,41 | 14,30 | 3,95 | 2,08 | 2,42 | 1,62 | 2,02 | 1,12 | 0,72 | 16,85             | 28.284.780  |
| 25 – 49          | 11,71                           | 40,48 | 15,00 | 5,74 | 1,78 | 2,14 | 1,70 | 2,33 | 1,14 | 0,75 | 16,87             | 41.630.698  |
| 50 +             | 7,40                            | 45,85 | 14,76 | 5,51 | 1,99 | 2,81 | 2,01 | 2,24 | 1,04 | 0,64 | 16,06             | 16.798.967  |
| Tak<br>Terjawab  | 10,77                           | 43,70 | 18,16 | 3,03 | 1,16 | 1,22 | 1,09 | 1,60 | 0,60 | 0,72 | 17,95             | 20.398      |
| Jumlah           | 11,93                           | 40,44 | 15,06 | 4,71 | 2,12 | 2,42 | 1,69 | 2,26 | 1,13 | 0,76 | 17,48             | 146.776.473 |

Sumber: Biro Pusat Statistik, Sensus Penduduk 1980.

TABEL 4 BAHASA INDONESIA

| Nama propinsi<br>KB & KK | B 1 & B2<br>Dewasa<br>Anak2 | Dewasa |      |        |      | Anak-anak |      |       |      |
|--------------------------|-----------------------------|--------|------|--------|------|-----------|------|-------|------|
|                          |                             | B1     |      | B2     |      | B1        |      | B2    |      |
|                          |                             | Jml.   | %    | Jml.   | %    | Jml.      | %    | Jml.  | %    |
| Bali                     | KB                          | —      | —    | 77/78  | 99   | —         | —    | 24/24 | 100  |
|                          | KK                          | —      | —    | 39/40  | 97,5 | —         | —    | 22/22 | 100  |
| 1. Jawa Tengah           | KB                          | 4/69   | 5,7  | 64/69  | 92,7 | 9/32      | 28,1 | 21/32 | 65,6 |
|                          | KK                          | —      | —    | 52/55  | 98,2 | 1/20      | 5    | 19/20 | 95   |
| 2. Kalimantan Selatan    | KB                          | —      | —    | 51/52  | 98   | 5/37      | 13,5 | 32/37 | 86   |
|                          | KK                          | 3/86   | 3,5  | 82/86  | 95   | 3/14      | 21   | 10/14 | 71   |
| 3. Irian Jaya            | KB                          | 8/47   | 17   | 8/47   | 17   | 5/18      | 27,8 | 4/18  | 22,2 |
|                          | KK                          | 6/116  | 9,5  | 75/116 | 64,6 | 25/46     | 54,3 | 16/46 | 34,8 |
| 4. Sulawesi Selatan      | KB                          | 5/73   | 6,8  | 57/73  | 78,1 | 19/42     | 45,2 | 22/42 | 52,4 |
|                          | KK                          | —      | —    | 31/42  | 73,8 | 1/10      | 10   | 8/10  | 80   |
| 5. Jawa Barat            | KB                          | 2/42   | 4,7  | 37/42  | 88   | 3/46      | 6,5  | 42/46 | 91,3 |
|                          | KK                          | —      | —    | 4/4    | 100  | 2/5       | 40   | 2/5   | 40   |
| 6. Maluku                | KB                          | 4/83   | 4,8  | 72/83  | 86,7 | 2/27      | 7,4  | 26/27 | 96,3 |
|                          | KK                          | —      | —    | 32/38  | 84,2 | —         | —    | 21/21 | 100  |
| 7. Sulawesi Utara        | KB                          | —      | —    | 36/60  | 60   | 3/30      | 10   | 24/30 | 80   |
|                          | KK                          | 1/57   | 1,7  | 40/57  | 70,2 | 1/25      | 4    | 20/25 | 80   |
| 8. Riau                  | KB                          | —      | —    | 71/83  | 85,5 | —         | —    | 21/21 | 100  |
|                          | KK                          | 2/46   | 4,2  | 40/46  | 86,9 | —         | —    | 22/22 | 100  |
| 9. Sumatra Utara         | KB                          | 8/90   | 8,8  | 78/90  | 86   | 35/48     | 72,9 | 13/48 | 27   |
|                          | KK                          | —      | —    | 10/11  | 91   | 1/15      | 6,6  | 14/15 | 93,3 |
| 10. Sumatra Selatan      | KB                          | 1/65   | 1,5  | 50/65  | 77   | 2/34      | 6    | 25/34 | 73,5 |
|                          | KK                          | —      | —    | 31/36  | 86,1 | —         | —    | 20/20 | 100  |
| 11. DKI Jakarta          | KB                          | 9/37   | 24,3 | 27/37  | 73   | 16/29     | 55,2 | 12/29 | 41,4 |
|                          | KK                          | —      | —    | 6/6    | 100  | 6/17      | 35,3 | 10/17 | 58,8 |
| 12. NTT                  | KB                          | —      | —    | 38/42  | 90,5 | 1/21      | 4,8  | 20/21 | 95,2 |
|                          | KK                          | 2/51   | 3,9  | 45/51  | 88,2 | 1/16      | 6,3  | 15/16 | 93,7 |

Sumber: Tabel-tabel "Penelitian Kedwibahasaan", Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Keterangan:

1. B1 = bahasa pertama

B2 = bahasa kedua

KB = kota besar

KK = kota kecil

2. Setiap pecahan menunjukkan R/N, dalam hal ini:

R = responden yang menjawab

N = jumlah semua responden

TABEL 5

|        | B1          |           |             | B2          |            |              |
|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|
|        | KB          | KK        | Jml.        | KB          | KK         | Jml.         |
| D      | 41<br>821   | 19<br>588 | 60<br>1409  | 666<br>821  | 487<br>588 | 1153<br>1409 |
|        | 5%          | 3,2%      | 4,3%        | 81,1%       | 82,8%      | 81,8%        |
|        |             |           |             |             |            |              |
| A      | 100<br>409  | 41<br>253 | 141<br>662  | 286<br>409  | 199<br>253 | 485<br>662   |
|        | 24,4%       | 16,2%     | 21,3%       | 69,9%       | 78,6%      | 73,2%        |
|        |             |           |             |             |            |              |
| Jumlah | 141<br>1230 | 48<br>841 | 201<br>2071 | 952<br>1230 | 686<br>841 | 1638<br>2071 |
|        | 11,5%       | 7,1%      | 8,8%        | 88,9%       | 68,5%      | 79,1%        |
|        |             |           |             |             |            |              |

#### Perolehan Bahasa Indonesia

Dalam tabel ini, kita dapat lihat hal-hal berikut.

- Cukup besar perbedaan persentase anak belajar bahasa Indonesia sebagai B1 dengan orang dewasa: 24,4% dengan 5% di KB dan 16,2% dengan 3,2% di KK; secara keseluruhan perbedaannya ialah 21,3% dengan 4,3%. Ini berarti bahwa ada kecenderungan yang jelas akan bertambahnya penerusan bahasa Indonesia sebagai B1.
- Kita dapat lihat juga bahwa kecenderungan itu lebih nyata di KB daripada di KK. Hal ini tampaknya berhubungan dengan pola berbahasa setiap hari di KB, yang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia untuk media dalam berbagai lingkungan kebahasaan (*language domain*). Ini berhubungan erat rupanya dengan heterogenitas kebahasaan yang biasanya jauh lebih besar di KB daripada di KK karena lebih banyak orang pendatang dari daerah lain di KB daripada di KK.

c. Sehubungan dengan perolehan bahasa Indonesia sebagai B1, perolehan bahasa Indonesia sebagai B2 tentu berkurang. Dengan hal ini pun kelihatan lebih besar kecenderungan perubahan ini di KB daripada di KK.

Kalau kita kaji lebih teliti Tabel 4 di atas, kita akan melihat bahwa kecenderungan semakin banyak orang belajar bahasa Indonesia sebagai B1 tidaklah sama besarnya di semua propinsi. Di antara ke-13 daerah itu, ada enam propinsi yang menunjukkan perubahan yang cukup besar di KB: Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Irian Jaya. Daerah-daerah yang menunjukkan perubahan yang cukup jelas di KK hanyalah Irian Jaya dan DKI Jaya, dan pada tingkat yang lebih rendah, juga Kalimantan Selatan. Daerah Jawa Barat (40%—0%) dan Sulawesi Selatan (10%—0%) menunjukkan perbedaan persentase yang besar, tetapi itu hanya disebabkan oleh kecilnya jumlah respon.

Daerah-daerah yang lain: Bali, Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur tidak menunjukkan kecenderungan yang jelas. Lima daerah di antaranya barangkali dapat dimengerti dengan adanya bahasa daerah Melayu di daerah itu yang mengakibatkan orang salah identifikasi bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu daerah itu. Daerah Bali dan Jawa Barat mungkin dapat dimengerti karena kedua daerah ini cukup tinggi homogenitas penduduknya (dibanding daerah-daerah lain), dan terdapat juga dukungan yang kuat untuk pengajaran dan pemakaian bahasa daerah dalam masyarakat kedua daerah itu.

Namun, secara keseluruhan kelihatan kecenderungan perubahan untuk bertambahnya jumlah penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Ini ternyata dibarengi oleh semakin meluasnya lingkungan kebahasaan pemakaian bahasa Indonesia, termasuk dalam lingkungan keluarga dan hubungan intrasuku. Sebenarnya ini tidaklah mengherankan dalam keadaan masyarakat Indonesia merdeka ini karena .

- a. kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang begitu penting dan meluas sebagai bahasa nasional dan bahasa negara (Halim, 1976: 20,22);
- b. meningkatnya mobilitas geografis orang Indonesia, yang menghasilkan masyarakat yang heterogen terutama di kota-kota besar yang tentu menuntut penggunaan bahasa komunikasi lebih luas dari bahasa daerah;
- c. terbukanya mobilitas sosial yang membuat orang makin ingin dan perlu meraih ilmu dan keterampilan yang dapat dicapai hanya dengan bahasa Indonesia;
- d. bertambahnya kegiatan usaha dan perdagangan antardaerah yang dapat dikerjakan hanya dengan bahasa Indonesia.

Jadi, dapat dimengerti bahwa banyak orang tua yang membiarkan, malah menyekolahkan, anaknya mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama (sendirian atau bersama-sama dengan bahasa daerah) guna memudahkan

anaknya memperoleh keuntungan yang dapat dicapai dengan penguasaan bahasa Indonesia (Bernstein, 1964).

### **Dampak Meluasnya Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap Bahasa Daerah**

Sebaliknya, ada orang yang menganggap bahwa meluasnya penggunaan bahasa Indonesia mempunyai dampak negatif terhadap hidup dan perkembangan bahasa daerah. Mereka kuatir meluasnya penggunaan bahasa Indonesia akan mengurangi ruang hidup bahasa daerah dan akhirnya akan meleysapkannya. Untuk menghindari efek negatif seperti itu, dianjurkan peningkatan pengajaran bahasa daerah. Saya kira sedikit orang yang akan keberatan terhadap peningkatan pengajaran bahasa daerah di sekolah. Untuk itu yang paling penting ialah merencanakan kurikulum dan bahan pengajaran bahasa daerah agar sasarannya benar dan berguna. Janganlah kiranya bertambah beban kurikulum anak-anak pelajar tanpa memperoleh kegunaan yang selaras dengan dana dan tenaga yang dipakai.

Namun, berbicara tentang kemungkinan merana dan lenyap suatu bahasa, kiranya agak sukar dibayangkan bahwa suatu bahasa yang mempunyai beberapa puluh ribu penutur yang berpusat dalam beberapa tempat akan lenyap dalam waktu yang pendek. Melihat kasus-kasus yang ada di negeri lain, rasanya tidak perlu ditakuti kemusnahan suatu bahasa selama daerah basisnya, tempat orang memakai bahasa itu untuk berkomunikasi setiap hari. Sebagai suatu contoh dapat kita ambil bahasa Welsh. Bahasa ini dihadapkan dengan bahasa Inggris yang dominan secara sosial, politis, dan ekonomis selama lebih kurang 1500 tahun, 500 tahun di antaranya dalam persentuhan bahasa yang intensif. Sekarang bahasa Welsh masih ada, malah seperti mengalami semacam "keremajaan kedua" dengan bertambahnya jumlah eka-bahasawan Welsh dari 26.100 pada tahun 1961 menjadi 32.700 pada tahun 1971 setelah mengalami kemunduran yang terus-menerus dari 508.000 pada tahun 1981 menjadi 26.100 pada tahun 1961 (Lewis, 1981:117). Lewis (hal. 127) juga menyebut penyebab utama dari berkurangnya pemakaian Welsh ialah industrialisasi, urbanisasi, imigrasi, dan pemerintahan sentral. Padahal butir 1,2 dan 4 di atas diinginkan penduduk untuk kemajuan ekonomi mereka.

Contoh yang lain tentang bahasa-bahasa yang bertahap hidup dalam keadaan sosiolinguistik yang negatif ialah yang terdapat di Amerika Serikat. Setelah orang dan bahasa-bahasa Indian hampir lenyap dalam abad ke-19, ada kelihatan penambahan sebanyak 46,5% dari 1950 ke 1960 dan sebanyak 51,4% dari tahun 1960 ke 1970 (Lewis: 166). Demikian juga banyak bahasa-bahasa pendatang ke Amerika Serikat (di luar bahasa Inggris) masih dipakai sebagai bahasa kelompok oleh lebih dari 10 kelompok etnis. Pada tahun 1975 hampir 28 juta ( $\pm 17\%$ ) orang Amerika menyatakan memakai bahasa lain dari

bahasa Inggris dalam masa kanak-kanak (Lewis: 180).

Dalam kedua contoh di atas ada tekanan sosial politik dan ekonomi terhadap berkembangnya bahasa-bahasa itu dapat bertahan hidup. Di Indonesia, tidak ada tekanan sosiopolitik terhadap suatu bahasa daerah. Yang mungkin ada ialah semacam desakan ekonomi dalam pandangan orang tua yang melihat adanya keuntungan dalam bidang ekonomi dengan jangkauan nasional (bukan jangkauan daerah) jika anaknya menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Ini tidak berarti bahwa bahasa daerah tidak usah dibina, dikembangkan dan digunakan. Pembinaan bahasa daerah perlu untuk dapat menangani kehidupan modern suku dan daerah yang bersangkutan. Menurut hemat saya, bahasa daerah amat perlu dibina sebagai sarana utama dalam pembudayaan anak-anak ke dalam kebudayaan dan kepribadian daerahnya yang menjadi dasar bagi kepribadian nasional seseorang (Nababan, 1983).

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembicaraan di atas ialah bahwa meluasnya perolehan dan pemakaian bahasa Indonesia tidak merugikan penuturnya. Juga kita simpulkan bahwa keadaan itu tidak atau belum tentu akan melenyapkan suatu bahasa daerah.

## Penutup

Di atas telah kita lihat sepintas lalu perkembangan bahasa Indonesia dari:

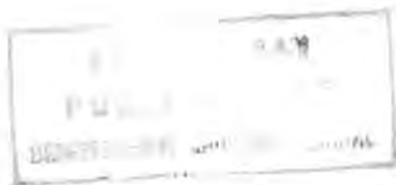
- a. penetapannya (dalam Sumpah Pemuda 1928) menjadi bahasa pemersatu dalam perjuangan mencapai kemerdekaan;
- b. pembinaan dan pengembangannya dalam kurun waktu prakemerdekaan 1928–1945;
- c. pembinaan dan pengembangannya sejak tahun 1945. Secara khusus kita tinjau pola kebahasaan dalam dekade 1971–1980, dan perolehan bahasa yang diungkapkan oleh penelitian kedwibahasaan dari Pusat Bahasa.

Hasil survei kedwibahasaan ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan bertambahnya perolehan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dan meluasnya penggunaan bahasa Indonesia sampai kepada lingkungan keluarga dan daerah.

Akhirnya kita pertanyakan apa meluasnya perolehan dan penggunaan bahasa Indonesia Indonesia ini tidak akan mengancam kehidupan bahasa daerah. Jawabannya yang kita simpulkan dari peninjauan beberapa kasus ialah bahwa, dalam keadaan sosiolinguistik di Indonesia ini, tidak ada alasan untuk meresahkan keadaan itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Husen. 1978. "Bahasa Indonesia as a Unifying Language of Wider Communication. A Historical and Sociolinguistic Perspective". Manila: Ateneo – Philippine Normal College Consortium.
- Bernstein, B. 1964. "Elaborated and Restricted Codes: Their Social Origins and Some Consequences". Dalam J.J. Gumperz dan D. Hymes (ed.). *The Ethnography of Communication*. American Anthropologist, Jilid 66, bagian 2.
- Biro Pusat Statistik. *Sensus Penduduk Indonesia 1980*. Jakarta.
- Halim, A. (ed). 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Johannes, H. 1982. "Membina Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa yang Ilmiah, Indah, dan Lincah". Dalam *Analisis Kebudayaan*. Tahun II, No. 3.
- Latief, A. 1979. "Survey on Sociocultural Aspects of Foreign Language Teaching in Indonesia". Report RELC.
- Lewis, E.G. 1981. *Bilingualism and Bilingual Education*. Oxford: Pergamon Press Ltd.
- Moeliono, A.M. 1982. "Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa". Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nababan, P.W.J. 1983. "Tujuan dan Bahan Pengajaran Bahasa Daerah". Seminar Penulisan Bahan Pengajaran Sekolah Dasar. Yogyakarta Mei 30 – Juni 3, 1983. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.



## **KESESUAIAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI MASA KINI**

**M.M. Purbo-Hadiwidjoyo**

### **Pendahuluan**

Perkembangan bahasa Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini benar-benar luar biasa. Tanpa banyak yang menyadari, kita telah menuju dengan langkah yang pasti ke bahasa Indonesia yang baku, yang mampu membawakan ilmu dan teknologi masa kini. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran sekilas mengenai ragam bahasa yang terpakai dalam ilmu dan teknologi, termasuk di dalamnya ilmu kebumihan.

Saya merasa sangat beruntung karena mendapatkan kepercayaan dan kesempatan dari berbagai pihak untuk menangani pernaskahan bidang itu hingga berupa terbitan. Semula perintisan dilakukan hanya dalam bidang geologi yang sifatnya umum, tetapi kemudian melebar ke bidang yang bersifat terapan, dan akhirnya juga di luar bidang itu. Bahan yang tertera di bawah berasal dari terbitan atau yang dalam persiapan untuk diterbitkan.

Dilihat dari cakupannya, yang dibahas berkisar dari kalimat, ungkapan dan ujaran, hingga istilah. Jika dianggap perlu, sebagai pembandingan dikemukakan juga terjemahan atau padanannya dalam bahasa Inggris.

Dalam hubungan ini perlu kiranya saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Drs. Soetaryo Sigit, Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi, yang menyerahkan selama bertahun-tahun peredaksian 'Buku Tahunan Pertambangan Indonesia' kepada saya; kepada Drs. Rab Sukamto, Kepala Subdirektorat Pemetaan Regional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, untuk mempercayakan penelaahan dan

peredaksian peta geologi Indonesia, skala 1 : 100.000 (Jawa) dan 1 : 250.000 (luar Jawa) beserta penjelasannya; kepada Prof. Dr. Amran Halim. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan stafnya untuk kepercayaan ikut menangani peristilahan ilmu kebumian, khususnya bidang Hidrologi, dalam rangka Panitia Kerja Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia. Dan akhirnya, kepada Penerbit ITB, terutama Kepala dan Ketua Dewan Redaksinya, Drs. Adjat Sakri, M.Sc., yang telah memungkinkan saya menumbuhkan berbagai gagasan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, ragam ilmu dan teknik, melalui perbincangan dan percobaan selama bertahun-tahun. Buku saya, *Menyusun Laporan Teknik* (1983) juga diterbitkan oleh Penerbit ITB.

### Menuturkan Gagasan Secara Ringkas, Tetapi Jelas

Dalam ilmu dan teknologi sangatlah penting jika gagasan dapat dituliskan dengan ringkas, tetapi jelas. Jika yang dituturkan itu menyangkut banyak angka, pemakaian tanda baca yang tepat dapat saja membantu. Di bawah ini contohnya:

"... Hasil kilang secara keseluruhan dalam tahun 1981 berjumlah 193.742.936 barrel, naik 0,5 persen dari angka tahun 1980 yang besarnya 192.850.747 barrel. Berikut ini adalah gambaran mengenai perangkaan selama dua tahun terakhir; angka untuk 1980 ditempatkan di antara kurung; bensin pesawat terbang, 124.362 barrel (149.743 barrel) atau turun 16,9 persen; minyak pesawat terbang 1.665.135 barrel (1.850.663 barrel) atau turun 10,6 persen; bensin mobil, 24.294.154 barrel (24.029.659 barrel) atau naik 3,7 persen; minyak tanah, 36.029.939 barrel (34.138.081 barrel) atau naik 5,5 persen; minyak solar 26.270.714 barrel (27.143.178 barrel) atau turun 3,2 persen; minyak diesel, 5.992.899 barrel (6.982.807 barrel) atau turun 14,2 persen; dan minyak bakar, 20.941.088 barrel (19.062.135 barrel) atau naik 9,8 persen...."

Sebagai pembanding di bawah ini naskah (teks) Inggrisnya:

"... Total refinery output in 1981 was 193,742,936 barrels, up 0,5 percent from the figure of 1980 of 192,805,747 barrels. The following is a picture of the last two years; the figures of 1980 are shown in parentheses: aviation gas, 124,362 barrels (149,743 barrels) or down 16,9 percent; aviation turbo, 1,665,135 barrels (1,850,663 barrels) or down 10,6 percent; mogas, 24,924,154 barrels (24,036,659 barrels) or up 3.7 percent; kerosene, 36,025,939 barrels (34,138,081 barrels) or up 5.5 percent; automotive diesel oil, 26,270,714 barrels (27,143,174 barrels) or down 3.2 percent; industrial diesel oil, 5,992,899

barrels (6,982,807 barrels) or down 14.2 percent; and fuel oil, 20,941,088 barrels (10,062,135 barrels) or up 9.8 percent...."

(Diambil dari *Buku Tahunan Pertambangan Indonesia 1981*)

Geologi merupakan salah satu ilmu yang memiliki 'bahasanya' yang bersifat khas. Ini terutama dapat kita saksikan pada perian batuan, misalnya, yang selain menggunakan peristilahan yang hanya dipahami oleh orang dari bidangnya, juga gaya bahasanya yang mirip surat kawat. Di bawah ini contohnya:

Batuan Gunungapi Kalimiseng: lava dan breksi, dengan sisipan tufa, batupasir, batulempung dan napal; kebanyakan bersusunan basal dan sebagian andesit; kelabu tua hingga kelabu kehijauan; umumnya tansatmata; kebanyakan terubah, amigdaloid dengan mineral sekunder karbonat dan silikat; sebagian lavanya menunjukkan struktur bantal....'

Sebagai pembanding, di bawah ini Inggrisnya:

'Kalamiseng Volcanics: lava and breccia, intercalated with tuff, sandstone, claystone and marl, mostly basaltic in composition and partly andesitic; dark gray to greenish gray; generally aphanitic; commonly altered, amygdaloidal with secondary minerals of carbonate and silicate; part of the lava shows pillow structure ....'

(Dari Sukamto, 1982, *Geologi Lembar Ujung Pandang, Benteng dan Sinjai*).

Tidak semua uraian geologi sulit ditangkap oleh orang awam, bahkan kata atau ungkapan yang digunakan juga berasal dari bahasa sehari-hari. Di bawah ini contohnya:

'... Bentuk morfologi yang menonjol di lembar ini ialah kerucut gunungapi padam Lompobatang, yang menjulang mencapai ketinggian 2867 m di atas muka laut. Kerucut gunung itu yang dari kejauhan masih memperlihatkan bentuk aslinya, menempati lebih kurang sepertiga daerah lembar ...'

Kata seperti *menonjol* dan *menjulang* dengan segera dapat menimbulkan kesan akan sesuatu yang berbeda dengan selebihnya. Digunakannya kata *kerucut* sebenarnya mengikuti kebiasaan yang terdapat dalam bahasa asing. Sebagai pembanding di bawah ini terjemahan Inggrisnya yang juga ditampilkan bersama-sama dalam terbitan yang bersangkutan (Sukamto, 1982):

'... The most conspicuous geomorphic feature in this quadrangle is the cone of the extinct Lompobatang volcano which towers to a height of 2876 m above sealevel. The volcanic edifice whose cone from afar still bears its original shape, occupies some one-third of the land area of the quadrangle...'

## Kerja Sama Kebahasaan dengan Malaysia yang Mendorong Pemanjapan Bahasa Ilmu dan Teknologi

Sebagaimana diketahui, sejak akhir tahun 1972 kerja sama dalam bidang kebahasaan antara Indonesia dan Malaysia memperoleh wadah yang tetap dalam bentuk pertemuan yang disebut Majelis Bahasa Indonesia—Malaysia (MBIM). Setiap tahun Majelis bersidang dua kali sekali di Indonesia dan sekali di Malaysia. Setiap persidangan ada acaranya tertentu yang sebelumnya sudah diperseetujui kedua belah pihak. Pada awalnya yang menjadi pokok pembahasan berkisar pada ejaan, istilah, dan tata bahasa. Baru pada persidangan yang ketujuh, Pebruari 1976 di Kuala Lumpur, dilibatkan sejumlah ahli yang mewakili bidangnya masing-masing. Pada setiap persidangan yang dibahas peristilahan dari sekitar enam bidang, tetapi sekali waktu mungkin lebih dan sekali waktu kurang.

Kelompok Hidrologi mendapat kesempatan yang jauh lebih banyak daripada kelompok yang lain, yaitu sebanyak 12 kali, dalam selama jangka waktu tiga tahun, 1980—1982. Hal ini disebabkan adanya bantuan keuangan Unesco. Selama jangka waktu itu yang dibicarakan selain peristilahan juga definisinya.

Kesempatan yang baik itu membuahkan hasil yang semula tidak diperkirakan. Salah satu hal yang sangat penting ialah tumbuhnya pengertian di kedua pihak bahwa forum MBIM hanya dapat bermanfaat jika setiap permasalahan dapat dikaji secara objektif dan dicarikan penyelesaiannya.

Masalah peristilahan dapat diselesaikan dengan memuaskan. Pada waktu Kelompok Hidrologi bertemu untuk pertama kalinya, istilah Indonesia yang sama dengan istilah Malaysia hanya sekitar 35 persen. Angka ini tidak banyak bedanya dengan hasil yang diperoleh kelompok yang lain. Akan tetapi, selepas setiap pertemuan berikutnya, persentase itu terus naik, mula-mula tidak seberapa dan kemudian makin banyak. Demikianlah, pada waktu proyek dinyatakan selesai pada akhir tahun 1982, istilah kedua belah pihak yang sama sudah melebihi 90 persen. Jika suatu istilah tidak dapat dibuat sama benar, paling tidak sudah sangat mendekati. Sekedar ilustrasi di bawah ini dipaparkan beberapa contohnya.

Salah satu contoh yang sangat baik ialah bagaimanakah menemukan padanan istilah Indonesia dan Malaysia untuk istilah Inggris *discharge*. Di Indonesia sudah sejak kira-kira akhir abad yang lalu orang mulai mengenal istilah *debit*. Istilah itu dipungut dari bahasa Perancis, tetapi lewat bahasa Belanda digunakan untuk menyatakan air (yang mengalir melewati suatu penampang) setiap satuan waktu. Dalam bahasa aslinya, Perancis, kata itu dibebani berbagai makna selain yang tertera di atas, di antaranya juga (banyaknya) yang dijual, hak jual, cara berbicara. Di Malaysia sudah dengan

sendirinya orang lebih dulu berpaling ke bahasa Inggris. Jadi sudah sewajarnya jika mereka mula-mula menerima istilah *discas*.

Pihak Indonesia menyadari akan kelemahan menggunakan *debit* untuk *discharge* sebab yang *di-discharge* tidak hanya air, tetapi gas atau bahkan barang yang keras pun bisa. Oleh karena itu, menjembatani kesulitan itu pihak Indonesia mengusulkan kata *pelepasan*. Jangankan membicarakan usul itu, mengucapkannya pun pihak Malaysia tidak mau! Tentu saja mereka tidak mau karena kata itu pada mereka menimbulkan konotasi yang tidak seronok sebab maknanya 'dubur'!

Akhirnya dimunculkan kata *luah* yang berasal dari bahasa Minangkabau, yang maknanya lebih kurang 'muntah'. Begitu mendengar kata itu semua anggota Kelompok Hidrologi, baik yang mewakili Indonesia maupun Malaysia, memberikan persetujuannya. Selain pendek, dari kata itu dapat diturunkan berbagai kata yang lain, seperti *meluah(kan)* (tindak atau kerjanya), *peluahan* (prosesnya), dan *luahan* (hasil proses itu). Kalau perlu, *peluah* pun mungkin pula, yaitu untuk alat yang berfungsi meluahkan. Yang rupanya ikut berperan dalam persetujuan penerimaan kata itu ialah bunyinya yang cukup enak. Ada sekelompok kata Indonesia (dan Malaysia) yang mirip dengan *luah*, seperti *buah*, *kuah*, *ruah*, *tuah*.

Demikianlah, satu halangan telah dapat disingkirkan. Memang, masih akan memerlukan waktu, terutama di Indonesia, untuk memasyarakatkan istilah itu. Proses itu dapat dipercepat jika badan resmi seperti Departemen Pekerjaan Umum, bidang pendidikan, dan pers ikut mempopulerkannya.

Contoh lain yang akan saya kemukakan di sini ialah padanan untuk istilah Inggris *pump*. Di Indonesia, kita menggunakan kata *pompa* yang dipungut dari kata Belanda *pomp*. Untuk mempertahankan konsonan *p*, di belakang dibubuhi *a*. Dari kata dasar itu kemudian dapat dibuat *memompa* (Inggris: *to pump* atau dalam hal tertentu, *pumping*), *pemompaan* (prosesnya, yang Inggrisnya biasanya *pumping*), dan *pompaan* (pompage).

Di Malaysia, kata Inggris itu diucapkan sebagai *pam*, dan itu pulalah yang pada mulanya mereka terima sebagai istilah. Pada saat dari kata itu perlu diturunkan kata jadian yang lain, terasa timbul kejanggalan: *mengepam* atau *memam*? Lalu, *pemanan* dan *paman*? Melihat kenyataan itu, pihak Malaysia akhirnya menerima *pampa*, dan turunannya *memampa*, *pemampaan* dan *pampaan*. Meskipun belum sama, jelas kita sudah sangat dekat.

Dengan cara itu selangkah demi selangkah masalah peristilahan dapat diselesaikan. Akan tetapi, tidak semua dapat diatasi dengan mudah. Istilah atau kata sehari-hari yang sudah sangat lazim tidak akan mungkin diubah atau diganti dengan tiba-tiba; bahkan ejaannya pun sulit untuk diubah. Contohnya: *ais* dan *salji* di Malaysia dan *es* dan *salju* di Indonesia; *percubaan*

dan *perbezaan* di Malaysia dan *percobaan* dan *perbedaan* di Indonesia.

Masalah yang berhubungan dengan ungkapan dan kalimat juga sudah banyak yang dapat diselesaikan. Di bawah ini beberapa contohnya:

Dalam bahasa Indonesia kita sudah terbiasa menyatakan, misalnya:

*Banyaknya aliran berubah dengan waktu.*

Tanpa kita sadari, kita mengambilalih kebiasaan bahasa Barat, Inggris atau Belanda. Ungkapan yang digunakan oleh pihak Malaysia ialah:

*Banyaknya aliran berubah mengikut waktu.*

Sebenarnya, kita pun dapat menyatakan:

*Banyaknya aliran berubah mengikuti waktu.*

atau mungkin pula:

*Banyaknya aliran berubah sejalan dengan waktu.*

Akan tetapi, ungkapan yang terakhir ini tentu saja terlalu panjang.

Selama menggarap definisi hidrologi, kami menjumpai banyak ungkapan serupa yang perlu diselesaikan, dan banyak pula yang ternyata lewat perbincangan dapat diselesaikan. Bagaimana hasilnya, dapat dinilai dari apa yang telah terbit atau akan terbit dalam waktu mendatang.

Pada penyelesaian definisi digunakan acuan yang berasal dari Unesco, yaitu *International Glossary of Hydrogeology* (1978) dan *International Glossary of Hydrogeology* (1974). Hal itu dengan sendirinya sangat memudahkan pekerjaan Kelompok Hidrologi. Sebaliknya, ada tuntutan agar definisi Malaysia dan Indonesia benar-benar setara dengan Inggrisnya. Sebagai misal, dalam bahasa Inggris terdapat definisi:

*Macro-permeability*: Permeability of a rock or soil due mainly to the existence of large cracks and fissures.

Salinan Malaysianya ialah:

*Makro-ketelapan*: Ketelapan batuan atau tanah terutamanya disebabkan oleh wujudnya retakan dan rekahan yang besar.

dan versi Indonesianya:

*Kelulusan makro*: Kelulusan batuan atau tanah terutama yang disebabkan oleh adanya retak dan celah yang besar.

Meskipun kita melihat perbedaan istilah dan ungkapan, kedua definisi itu untuk masing-masing penutur bahasa, Malaysia dan Indonesia, untuk saat ini terasa yang paling dapat diterima.

Demikianlah beberapa hasil yang telah dapat diperoleh Kelompok Hidrologi yang bekerja dalam rangka MBIM. Hasil yang dicapai adalah buah kerja sama sekelompok orang dengan berbagai latar belakang keahlian, tetapi yang menekuni air, dan dibantu oleh ahli bahasa.

## Pengalaman Menangani Naskah di Penerbit ITB

Penerbit ITB termasuk salah satu di antara beberapa badan dalam lingkungan universitas negara yang bertugas menerbitkan naskah, terutama buku ajar. Sejak didirikannya pada tahun 1974, Penerbit ITB menganggap perlu adanya suatu dewan redaksi. Salah satu tugasnya, menentukan apakah suatu naskah yang masuk layak untuk diterbitkan. Setelah itu, mulailah proses peredaksian.

Dapat dipahami, tidak semua naskah yang masuk dapat diterbitkan. Banyak pula yang terpaksa mengalami perbaikan berat, sebelum akhirnya dapat naik ke percetakan. Umumnya naskah yang dapat terbit sebelumnya sudah pernah beredar berupa diktat atau tulisan lain yang cukup lengkap.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa kebiasaan menulis belum merata dalam lingkungan perguruan tinggi kita dan yang akhirnya menulis, ternyata memiliki banyak kekurangan. Tiga hal dapat dikatakan cukup mencolok dalam naskah yang sampai sekarang kami jumpai. Ini menyangkut baik naskah asli, maupun yang terjemahan.

Pertama ialah mengenai bangun (struktur) kalimat. Sering dapat dijumpai kalimat yang tidak lengkap, atau kalimat yang terlampau panjang. Tidak jarang pula semua itu disebabkan tidak terdapat perbedaan antara gaya bahasa tulis dan gaya bahasa lisan.

Hal yang lain menyangkut kosa kata. Dapat dikatakan, banyak di antara penulis (dan calon penulis) yang kosa katanya sangat terbatas. Misalnya, sekali seorang penulis menggunakan kata *mengemukakan*, tanpa disadari yang ia pakai secara terus-menerus juga kata itu saja. Padahal, setiap kali dapat saja ia memanfaatkan kata yang lain meskipun mungkin maknanya agak berbeda, seperti *memaparkan*, *mengutarakan*, *membahas*, *memerikan*.

Yang ketiga menyangkut peristilahan. Mereka yang belum menggunakan istilah Indonesia sebenarnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama ialah mereka yang memang tidak mengetahui bahwa usaha pengindonesiaan istilah sudah mencapai tahap yang sangat jauh. Kelompok ini biasanya dengan mudah dapat diajak untuk menyesuaikan dengan semua yang telah menjadi ketentuan. Kelompok kedua ialah mereka yang menunjukkan sikap ragu hati; mereka tidak yakin bahwa istilah Indonesia dapat benar-benar menyampaikan pesan sebagaimana mereka ingini. Kelompok ini biasanya lebih sulit untuk diyakinkan bahwa kunci pemahaman bahan terletak pada kejelasan pengertian sebagaimana dibawakan oleh definisi suatu istilah, dan bukan pada kenyataan istilah itu asing atau Indonesia.

Sekedar ilustrasi di bawah ini disajikan beberapa nukilan, yang menggambarkan berbagai kelemahan para penulis kita. Yang pertama saya peroleh

dari seorang peserta pada salah satu penataran nasional penulisan buku ajar dengan permintaan untuk dibahas bersama; selebihnya saya ambil dari buku saya yang saya sebut di atas (Purbo-Hadiwidjono, 1983).

- a. *Data yang dikumpulkan dari sensus atau penelitian survei, di mana terdapat keterangan tentang fertilitas dapat dihitung tingkat fertilitas.*
- b. *Banyaknya masalah-masalah di daerah aliran sungai akan memberikan tanggung jawab beberapa instansi dalam pengelolaan dan pemeliharaannya.*
- c. *Adapun jumlah instalasi bor (drilling rig) yang digunakan adalah 54 buah, di mana 12 di antaranya digunakan di lepas pantai (offshore).*
- d. *Untuk memenuhi kekurangan itu perlu penambahan produksi dengan jalan pembangunan pabrik kertas baru, mengimport kertas dari luar negeri, dan yang terpenting meningkatkan produksi dari pabrik-pabrik kertas yang sudah ada, agar dapat mencapai kapasitas design sehingga kebutuhan kertas dapat terpenuhi.*
- e. *Dengan meng-Upgrade jalan-jalan tersebut dengan lapisan Aspal Buton setelah 4 cm diharapkan jalan akan tahan 5-10 tahun. Pertimbangan untuk melapisi jalan-jalan tersebut adalah di samping jalan-jalan tersebut adalah jalan ekonomi, juga untuk mengakhiri kerusakan-kerusakan jalan tiap tahun, yang disebabkan oleh frekuensi maupun beratnya kendaraan yang melewati jalan-jalan tersebut semangkin meningkat. Sedangkan konstruksi jalannya lama sudah tidak mampu memikul beban tersebut.*

Kalimat yang pertama sulit untuk diperbaiki. Di sini penulis mendapat kesulitan pada cara membangun kalimat yang wajar, dan yang lebih berat lagi, tidak menguasai pengertian yang hendak ia ungkapkan. Jika suatu naskah penuh dengan kalimat sejenis itu, dengan sendirinya naskah itu tidak mungkin dapat diterima.

Kalimat kedua menyangkut mantik, yang ketiga dan keempat memerlukan penerangan ekonomi bahasa dan penertiban istilah, dan yang terakhir selain itu juga penataan kembali. Keempat kalimat terakhir itu kiranya dapat dituturkan kembali sebagai berikut.

- a. Karena banyaknya masalah di daerah aliran sungai, tanggung jawab pengelolaannya dibebankan kepada beberapa instansi.
- b. Instalasi bor yang digunakan berjumlah 54 buah, 12 di antaranya terpakai di lepas pantai.
- c. Untuk memenuhi kekurangan itu perlu dibangun pabrik kertas baru, diimport kertas, dan yang terpenting, produksi pabrik kertas yang sudah ada ditingkatkan.

- d. Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal Buton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanannya 5–10 tahun. Pertimbangan untuk langkah itu ialah mengingat akan sifatnya sebagai jalan ekonomi, dan juga menghindari kerusakan setiap tahun akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya makin meningkat. Konstruksi yang lama tidak sesuai lagi untuk beban yang sekarang.

Pada saat ini pemerintah dengan sekuat tenaga sedang menggiatkan penerbitan buku ajar dan selain itu mengalihbahasakan buku asing. Menghadapi semua itu, pihak Penerbit ITB baru-baru ini telah menerbitkan sebuah buku petunjuk bagi pengarang, penyunting, dan korektor (Sakri, 1983). Tujuannya tidak lain agar ditemukan landasan yang sama bagi ketiga unsur yang menangani penerbitan. Dengan jalan itu diharapkan, paling tidak semua naskah yang masuk ke Penerbit ITB sudah mengikuti bakuan tertentu. Salah satu hal yang sedang diusahakan oleh penerbit ITB ialah terwujud *gaya selingkung*, istilah yang dicoba untuk menyalin istilah Inggris *house style*.

Dalam banyak hal gaya selingkung ITB memang sejalan dengan buku saya. Akan tetapi, ada beberapa pokok yang berbeda, seperti cara menulis pustaka. Penyebabnya, tidak lain, karena yang pertama berpandangan ke dalam, sedangkan yang kedua ke luar dengan menunjukkan berbagai alternatif yang mungkin dapat dipilih.

### Rangkuman dan Penutup

Di atas telah saya tampilkan beberapa pengalaman saya menangani naskah bidang ilmu dan teknologi dan melibatkan diri dalam pembinaan peristilahan dalam bahasa Indonesia. Dalam ilmu dan teknologi bahasa berfungsi sebagai sarana untuk berkomunikasi, sedangkan istilah tidak lain merupakan lambang bagi suatu anggitan atau konsepsi. Persyaratan untuk komunikasi bersuai dan sangkil tidak lain ialah sarana yang memadai dan lambang yang tepat, yang dipersetujui baik oleh pemberi pesan maupun penerima pesan-pesan itu. Dalam hal ini dikatakan bersuai karena dengan usaha yang sekecil-kecilnya dijangkau yang sejauh-jauhnya; dan sangkil karena langsung menuju ke sasaran.

Kedua kita dewasa ini masih diliputi berbagai kekurangan, juga yang menyangkut komunikasi bidang ilmu dan teknologi. Di satu pihak terdapat tuntutan yang sangat tinggi, yang harus dipenuhi dalam waktu yang kerap kali sangat singkat. Di pihak lain kita jumpai kondisi yang sering pula mengabur atau menghambat setiap usaha meluluskan tuntutan itu.

Di satu pihak terdapat keharusan untuk alih teknologi, untuk penge-

tahuan, alihketerampilan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di pihak lain kita saksikan bahwa kondisi kita belum ideal. Meskipun strategi besar sudah dicanangkan, perinciannya masih perlu dijabarkan.

Demikianlah dalam bidang kebahasaan ini kita melihat adanya jurang yang terus meningkat dalam jumlah maupun mutu, dan di pihak lain yang harus memenuhi tuntutan itu yang belum siap. Sebagaimana diuraikan di atas, bahasa Indonesia dengan peristilahannya memberi harapan yang cerah dapat berfungsi dengan baik menjadi sarana komunikasi ilmu dan teknologi masa kini.

Dengan gambaran seperti itu sebagai latar belakang, Penerbit ITB berusaha untuk ikut merintis jalan yang dapat ditawarkan kepada peminat untuk mencoba menjembatani jurang itu. Bentuknya berupa pedoman yang dapat digunakan pada waktu orang hendak menyusun naskah. Sebagaimana setiap aturan yang dibuat manusia tidak ada yang sempurna, demikian pula pedoman itu tentu masih penuh kekurangan.

Pedoman dan aturan saja tidak mungkin akan dapat menolong setiap usaha. Yang tidak kalah pentingnya tentu saja semua yang tersangkut dalam usaha itu, dalam hal ini penutur bahasa Indonesia pada umumnya, dan khususnya mereka yang hendak menulis naskah dalam bidang ilmu dan teknologi.

Sebagai lampiran disajikan sejumlah istilah dan kata yang sedikit atau banyak sudah mulai dimasyarakatkan, terutama lewat bahan terbitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia. 1982. *Buku Tahunan Pertambangan Indonesia 1981*. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purbo-Hadiwidjoyo, M.M. 1983. *Menyusun Laporan Teknik*. Cetakan 1. Bandung: Penerbit ITB.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Hidrologi*. Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Hidrogeologi*. Jakarta.
- Sakri, A. 1983. *Petunjuk bagi Pengarang, Penyunting dan Korektor*. Bandung: Penerbit ITB.
- Sukamto, R. 1982. *Geologi Lembar Ujung Pandang, Benteng dan Sinjai*. (The Geology of the Ujung Pandang, Benteng and Sinjai Quad). Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi WHO—UNESCO. 1974.
- International Glossary of Hydrology*. Geneva UNESCO. 1978. *International Glossary of Hydrogeology*. Paris.

## LAMPIRAN

## 1. Perangkat istilah Inggris dengan padanan Indonesianya

(Dicoba diterapkan dalam Kamus Hidrogeologi (dalam penerbitan) dan Kamus Hidrologi (dalam persiapan)).

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| instrument            | alat         |
| instrumentation       | peralatan    |
| gadget                | acang        |
| tool                  | perkakas     |
| device                | gawai        |
| apparatus             | radas        |
| gauge (Amerika; gage) | sukat        |
| meter                 | peukur       |
| utensil               | perabot      |
| appliance             | masin        |
| equipment             | perlengkapan |
| accessory             | lengkapan    |

## 2. Kata Inggris dengan padanan Indonesianya yang medan maknanya diusahakan untuk disesuaikan

(Dicoba diterapkan dalam Kamus Hidrogeologi dan Kamus Hidrologi, dan juga lewat terbitan PPPG).

| Kata-pokok | Kerja                                                                                         | Padanan Inggris | Proses    | Hasil  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|
| coba       | mencoba<br>(menggunakan atau melakukan sesuatu untuk mengetahui persifatan atau kemampuannya) | to try          | percobaan | cobaan |
| uji        | menguji<br>(mencoba untuk mengetahui atau menentukan tingkat kesanggupan atau kemampuannya)   | to test         | pengujian | ujian  |

|                   |                                                                                             |                            |               |              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| amat              | mengamati<br>(melihat dengan teliti)                                                        | to observe                 | pengamatan    | amatan       |
| periksa           | memeriksa<br>(mengamati dengan teliti)                                                      | to observe                 | pemeriksaan   | periksaan    |
| selidik           | menyelidik(i)                                                                               | to examine                 |               |              |
| <b>Kata-pokok</b> | <b>Kerja</b>                                                                                | <b>Padanan<br/>Inggris</b> | <b>Proses</b> | <b>Hasil</b> |
| selidik           | menyelidik(i)<br>(memeriksa dengan teliti dan mencari keterangan yang berhubungan)          | to investigate             | penyelidikan  | selidikan    |
| sidik             | menyidik<br>(memeriksa dengan pertolongan sidik, yaitu gawai untuk memeriksanya)            | to probe                   | penyidikan    | sidikan      |
| tinjau            | meninjau<br>(memeriksa sebidang lahan atau daerah; memandang suatu masalah secara sepintas) | to recon-<br>noitre        | peninjauan    | tinjauan     |
| jelajah           | menjelajah<br>(memeriksa cara sepintas suatu daerah atau wilayah, atau suatu masalah)       | to explore                 | penjelajahan  | jelajahan    |

|                   |                                                                                                                 |                        |               |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| sigi              | menyigi<br>(memeriksa dengan tujuan tertentu; menentukan perbatasan, luas, kedudukan corak alam atau masalah)   | to survey              | penyigian     | sigian       |
| telusur           | menelusur<br>(mengamati atau melihat untuk menentukan persifatan atau khuluk sebenarnya)                        | to search              | penelusuran   | telusuran    |
| kaji              | mengaji<br>(dengan menggunakan pikiran secara tajam, mempelajari dan memperhatikan benar-benar, dan dari dekat) | to study               | pengajian     | kajian       |
| <b>Kata-pokok</b> | <b>Kerja</b>                                                                                                    | <b>Padanan Inggris</b> | <b>Proses</b> | <b>Hasil</b> |
| teliti            | meneliti<br>(menelusuri dan mempelajari dengan sungguh-sungguh untuk menemukan keterangan yang mendasar)        | to research            | penelitian    | telitian     |

**3. Padanan kata Indonesia untuk kata Inggris yang maknanya**  
(Telah banyak dimanfaatkan, juga dalam Kamus Hidrogeologi dan Kamus Hidrologi)

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| to diffuse     | menghambur                |
| to disperse    | menyerak                  |
| to distribute  | menyebar, memarah (kartu) |
| to spread      | melampar                  |
| to scatter     | menebar                   |
| to assimilate  | membraur                  |
| to disseminate | membebar                  |

**4. Kata Indonesia yang jarang dipakai, yang digunakan untuk menyalin kata Inggris sehari-hari**

(Berasal dari Poerwadarminta, 1978, dan dimanfaatkan dalam Kamus Hidrologi dan kamus Hidrogeologi, serta penerbitan ITB)

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ajuk, meng | to assess                  |
| cergas     | dynamic                    |
| pegun      | stationary                 |
| piantan    | 24 hours (Belanda: etmaal) |
| sangkal    | effective                  |
| senak      | stagnant                   |
| sentara    | transient                  |
| sepaling   | extreme                    |
| tangkal    | file                       |
| tegun      | static                     |

## **DENGAN BAHASA (INDONESIA) SEBAGAI SARANA KITA NAIKKAN DERAJAT BANGSA (INDONESIA)**

**B.M. Diah**

Pemimpin Umum Harian Merdeka

"Dengan Bahasa sebagai Sarana Kita Naikkan Derajat Bangsa" saya pakai sebagai judul kertas kerja ini. Dasar pemikiran judul ini ialah tema dan tujuan Kongres Bahasa Indonesia sebagai Sarana Kita Sukseskan Pembangunan Nasional".

Kedua soal berkaitan mesra satu pada lain. Menerima masalah pembangunan sebagai persoalan berwajah seribu muka membuat pembinaan bahasa nasional kita sebagai syarat mutlak mencapai tujuan menjadikannya sarana menaikkan derajat bangsa. Landasannya terletak di bidang kebudayaan dan pendidikan. Orang yang pandai memakai bahasanya adalah orang yang berkebudayaan, orang yang berpendidikan, orang yang dapat membawa bangsa dan negaranya ke derajat yang tinggi.

Bahasa nama kumpulan tanda-tanda yang tampak dan terdengar, yang dipergunakan oleh manusia secara bersama-sama sebagai sarana memberikan pengertian dan pemahaman tentang kenyataan di dunia luas dan kehidupan dalam jiwa mereka. Pembangunan nasional barulah mungkin mencapai titik tertinggi apabila alat pendekatannya atau penghampirannya, yaitu bahasa, dibina, diasuh, diperkaya, dipelihara, dihormati, bahkan dijunjung tinggi, lebih daripada harta kekayaan apa pun yang dimiliki karena dari bahasa orang mengenal pendidikan dan kebudayaan seseorang. Buruk orang, buruk bahasa, kata pepatah, dan tentu pula sebaliknya, buruk bahasa, buruk orang. Ini sebagai metafor.

Bahasa merupakan jembatan antara orang seorang, antara golongan warga, suku, antara perkempungan, antara rakyat, antara satu lapisan dengan lapisan lain dalam pergaulan dan masyarakat. Bahasa yang terpelihara, terbina dan kaya merupakan alat perhubungan yang sangat bermanfaat bagi orang ramai (alat komunikasi massa), sarana pengembangan ilmu pengetahuan, perkakas memahami dan memperdalam teknologi modern, kewajiban-kewajiban sosial-politik, maupun pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam pergaulan hidup dikenal istilah bahasa sopan. Bangsa Belanda mengatakan bahwa seseorang itu beradab tinggi apabila ia dapat mempergunakan bahasa beradab *bahasa Belanda sopan – Beschaafd Hollands*. Bahasa Inggris sopan ialah bahasa raja – *Kings English*, atau *Oxford English*. Bahasa Jerman tinggi – *hoch Deutsch* atau bahasa Perancis murni – *Francais pure*. Kita, bangsa Indonesia, mengenal juga bahasa Indonesia tinggi, atau Indonesia sopan. Dahulu ada bahasa Melayu tinggi, bahasa sopan.

Dari kedudukan bahasa dalam masyarakat, nyatalah bahwa bahasa memiliki watak sosial. Seperti manusia dalam pergaulan sosial, demikian pula bahasa haruslah tunduk pada norma-norma, tata-cara, dan peraturan yang mengatur pemakaian alat pergaulan itu, yang berpekerti sosial itu. Tidaklah dapat diterima jika ada orang sendiri-sendiri menentukan peraturan bahasa (itu). Saya ingin nyatakan di sini bahwa walaupun sudah ada berbagai ragam usaha membersihkan atau memurnikan, dan juga menuju usaha memakai bahasa yang baik dan benar, menurut perasaan saya lebih banyak orang memakai bahasa Indonesia sesuka hatinya. Seakan-akan mereka itu boleh saja merusak bahasa karena menganggap tidak ada peraturan dan norma-norma yang harus dihormatinya tentang pemakaiannya. Ini tidak saja terjadi di kalangan umum seperti di bidang pers, ahli-ahli pidato, penulis-penulis dari berbagai lembaga umum, tetapi juga dari kalangan pemerintah, yaitu pejabat-pejabat tinggi dan rendah (pegawai negeri). Lebih celaka lagi, dalam keadaan sekarang dapat dikatakan bahwa juga di kalangan guru-guru sekolah rendah, sekolah dasar, banyak sekali yang tidak memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bayangkan, jika guru tidak dapat memakai bahasa yang baik dan benar, bagaimana pula ia dapat mengajar bahasa baik dan benar itu pada murid-muridnya?

Ahli bahasa Indonesia, seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Yus Badudu, M. Ramlan, dan Sumantri berpendirian bahwa hanyalah dengan usaha yang sebesar-besarnya sangat mungkin dapat dijaga dan sekaligus diperbaiki bahasa kita yang hendak dipermodern dan diseragamkan (standarisasi) jika diletakkan secara ketat dasar-dasar bahasa di sekolah-sekolah, dari rendah sampai menengah, demikian pula dalam pergaulan, dengan bahasa lisan. Pada waktu

ini terdapat kecenderungan memakai bahasa menurut selera masing-masing pemakai sehingga menjadi kacau-balau dan centang-perenang. Pembangunan nasional bertujuan menaikkan derajat bangsa. Ia bersifat membangkitkan kembali norma-norma hidup sebagai bangsa menuju perbaikan dan perubahan sosial dan nilai-nilai. Orang luar membuat penilaian tentang kita sebagai bangsa melalui bahasa. Manusia Indonesia tidak hidup dari nasi saja. Pembangunan tidak dibatasi dengan kemajuan dan kesejahteraan jasmaniah saja. Juga pengisian dan pembaharuan nilai-nilai rohaniah sangat penting, bahkan lebih utama daripada kemajuan dan kesejahteraan benda saja. Ada orang asing yang mengukur kedalaman kebudayaan bangsa Indonesia dari sudut sosio ekonomi. Karena itu, mereka meremehkan bangsa kita. Ada yang bersikap bahasa Indonesia bahasa mudah. "Gampang"! Jauh panggang dari api. Dari kewajiban memakai prefiks, sufiks dan simulfiks pada kata-kata, baik kata kerja, sifat, maupun benda, dalam pembentukan kalimat, sebenarnya bahasa Indonesia sama sulit dan sempurna dengan bahasa Rusia.

### **Bahasa sebagai Sarana Mempertinggi Kebudayaan Bangsa**

Karena bangsa tidak hidup dengan nasi saja, maka kita sebagai bangsa, dengan bimbingan pimpinan nasional berusaha dengan segala jalan menunjukkan hal-hal di bidang sosial dan kebudayaan, di samping pembangunan ekonomi dan keuangan. Dalam kebangkitan kebangsaan manusia Indonesia mempunyai kesanggupan menempuh cita-cita yang dikandungnya sejak ia dengan sungguh-sungguh ingin mengadakan perubahan dalam kehidupan sosial dan kebudayaannya. Jika suatu bangsa sanggup memajukan bidang sosial dan kebudayaannya dengan ketekunan, maka menyempurnakan dan memperindah, dan memperkokoh norma-norma dan tata cara pemakaian bahasa tidak pula sulit. Pada hakikatnya pemugaran bahasa hanya satu bagian dari perbaikan besar yang dilakukan di bidang sosial dan kebudayaan sebagai rencana teratur untuk kebangkitan bangsa. Pembangunan ekonomi dan perubahan nilai-nilai kehidupan sosial budaya itu adalah usaha sejarah (historis) sebagai bangsa merdeka mencapai derajat yang lebih tinggi. Banyak di antara pemuka-pemuka kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia tidak sempurna; bahwa bahasa ini tidak dapat dipakai untuk memperdalam bidang ekonomi, perdagangan, industrialisasi dan teknologi. Bahkan juga masih kurang sempurna jika dipakai di bidang politik. Yang pertama timbul di kalbu saya ialah apakah orang yang berkata demikian itu mengerti apa itu bahasa Indonesia? Sudah sanggupkah manusia ini membuat sebuah karangan dalam bahasa Indonesia? Mengertikah dia apa yang dimaksudkan dengan tata bahasa? Betapa banyakkah ia memiliki pengetahuan tentang kata-kata di

bahasa Indonesia? Artinya, berapa banyak kata-kata berada dalam "kamus"-nya sendiri atau perbendaharaan kata yang dimilikinya? Karena banyak sekali kekurangannya mengenai bahasa sendiri, dicarinya segala hal tentang bahasa Indonesia agar alasannya tampak kuat. Dengan mudah kita menudingnya, menyalahkannya semua itu pada perilakunya sendiri. Akan tetapi, jujurkah kita semua jika berbuat demikian? Saya pikir, tidak! Sebabnya ialah karena lembaga-lembaga yang berkewajiban memajukan bahasa Indonesia di masa kini dan dahulu sangat kurang produktif. Dalam pekerjaan saya sebagai wartawan saya tidak pernah dilanda oleh banjir buku pengetahuan bahasa Indonesia, makalah-makalah apalagi buku-buku tentang kesusastraan dan ceritera-ceritera yang (agak) berbobot. Benar-benar tampak kemiskinan kita akan hal-hal yang ada hubungannya dengan perkembangan bahasa untuk menaikkan derajat bangsa. Walaupun demikian, perlu kita memberikan juga penghargaan pada penerbitan-penerbitan yang diusahakan oleh badan-badan penerbitan bukan pemerintah yang melaksanakan pekerjaannya atas dasar tekanan kewajiban nasionalnya. Buku-buku memang sudah ada di "pasar buku", atau dikenal juga dengan "bursa buku", tetapi dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih 150 juta jiwa, jumlah yang dihasilkan segala penerbitan itu, maupun yang dikuasai Pemerintah masih tidak sebanding. Kalau saya katakan kita masih tergolong miskin dalam produksi buku-buku bernilai, maupun dalam bahagian dasar bahasa, seperti tata bahasa, ilmu bahasa, analisa bahasa, morfologi, kamus, sintaks, etimologi, dan lain-lain pengetahuan mengenai bahasa yang diperlukan untuk menyusun bahasa dan sastra yang sempurna dan menggambarkan sekaligus derajat dan harkat bangsa, ada juga sebabnya.

Ahli-ahli bahasa tidak begitu kerap mengadakan perundingan, seminar ataupun perundingan-perundingan kecil oleh lembaga-lembaga maupun kumpulan-kumpulan pencinta bahasa sehingga pertumbuhan bahasa Indonesia dilepaskan kepada perkembangan alamiah, dan jika ada waktu dibantu oleh unsur-unsur resmi maupun setengah resmi. Saya anjurkan supaya kebiasaan ini diubah. Pendirian ini dapat diperkuat oleh data-data yang diberikan penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia IV ini. Bahasa Indonesia diterima sebagai bahasa persatuan dalam Kongres Pemuda tahun 1928. Ini suatu langkah revolusioner. Hanyalah karena bangsa Indonesia masih hidup di bawah kekuasaan Belanda, tidaklah ia mempunyai peluang tanpa kendala memajukan dan melaksanakan keputusan Sumpah Pemuda itu. Lagi pula, penerimaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan lebih banyak bersifat politik daripada sosial budaya. Ini dapat dibuktikan dari bahasa yang dipakai untuk merumuskan keputusan pertemuan itu. "Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoengdjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia."\*) Kalau

\*) Lihat dokumen keputusan "Kongres Pemoeda-pemoeda Indonesia tahun 1928".

dalam lain keputusan dinyatakan bahwa "mengakoe bertoempah darah yang satoe" dan "mengakoe berbangsa satoe", mengenai bahasa hanyalah menjunjung bahasa persatuan. Tentu dalam keputusan ini telah terkandung keinsyafan bahwa bahasa Indonesia juga diakui sebagai bahasa persatuan. Pernyataan ini yang juga dapat dianggap sebagai sikap simbolik tidak dapat menjamin kemajuan bahasa Indonesia. Bahasa Belanda adalah bahasa yang dominan dalam kehidupan bangsa Indonesia masa itu, termasuk pemuda-pemudanya, walaupun sudah bersumpah menjunjung tinggi bahasa persatuannya. Sarana untuk memajukan bahasa nasional itu tidak ada. Pemuda Indonesia yang masih di bangku sekolah haruslah dapat memakai dengan lancar bahasa Belanda sebelum dapat beralih kepada pemakaian bahasa Indonesia. Pegawai negeri harus berbahasa Belanda dalam berhubungan satu dan lain. Kaum menak-menak Indonesia dan lapisan atasnya di zaman penjajahan itu tidak dapat berbuat lain selain mempergunakan bahasa Belanda.

Dalam kehidupan sehari-hari, membaca surat kabar Belanda, mendengarkan radio dalam bahasa Belanda dan sebagainya untuk mendapatkan tempat "terhormat" dalam strata sosial di masa penjajahan. Pers Indonesia dan semua kumpulan-kumpulan yang memakai bahasa Indonesia, yang dianggap oleh penjajahan Belanda sebagai bahasa Melayu saja, tidak mendapatkan tempat yang berarti sedikit pun dalam susunan sosial di zaman itu. Inilah gambaran nasib bahasa Indonesia ketika secara simbolis ditempatkan di atas kepala kaum muda Indonesia sejak tahun 1928. Hanya pers Indonesia dan pergerakan kebangsaan menjadi sarana yang utama bagi perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekurang-kurangnya yang mendekati istilah itu. Ada juga satu keuntungan yang memungkinkan bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai dikehendaki oleh Sumpah Pemuda. Di sekolah-sekolah rendah (atau dasar) yang diadakan pemerintah jajahan untuk bangsa Indonesia diberikan mata pelajaran bahasa Melayu. Selama tujuh tahun, dari tingkat satu sampai tingkat tujuh anak-anak Indonesia mempelajari bahasa ibu, bahasa Indonesia. Sayang bahwa sampai di situ sajalah kesempatan anak Indonesia mempelajari bahasanya. Tentu mata pelajaran ini juga tidak begitu menjadi jaminan bagi anak Indonesia untuk naik jenjang sekolah karena yang dipentingkan ialah bahasa Belanda. Akibatnya, perhatian lebih tertuju pada belajar bahasa Belanda sungguh-sungguh. Di lain daerah khususnya daerah Jawa dan Sunda pelajaran bahasa Melayu disertai juga dengan pelajaran bahasa daerah. Bagaimana anak-anak daerah itu menempatkan bahasa Melayu dalam tingkat "prioritas"-nya tidaklah dapat diketahui. Akan tetapi, bahwa mempelajari bahasa Melayu dengan leluasa tentulah agak berkurang karena otak yang muda itu disuruh menghafalkan juga bahasa Melayu di samping bahasa daerahnya. Mereka

tentulah lebih mengenal bahasa daerahnya karena sehari-hari didengarnya ayah dan ibunya memakainya.

Kongres Bahasa Indonesia yang pertama terjadi pada tahun 1938 di Solo. Juga usaha ini indah pada niatnya dan harapannya. Pemerintah Hindia Belanda tentulah tidak membantu kongres ini terlaksana dengan baik. Menghalangi pun tidak, tetapi akibat yang dramatik tidak terdapat sesudah kongres bahasa yang pertama itu. Masih tetap tidak ada bimbingan ilmiah untuk mengembangkan bahasa. Pers Indonesia masih tetap sarana utama. Wartawan-wartawan Indonesia menjadi pejuang memajukan bahasa Indonesia menurut cara dan selera mereka masing-masing. Seorang pemuka dunia wartawan Indonesia, sekretaris jenderal Persatuan Jurnalis Indonesia (nama serikat wartawan di masa itu) Soedarjo Tjokrosiswojo (S. Tj. S.), seorang putera Solo sangat berjasa menyebarkan kata-kata baru ke dalam bahasa Indonesia. Antara lain perkataan *tanpa* (menggantikan kata Belanda *zonder*), *panitera* (menggantikan kata Belanda *sekretariaat*), dan lain-lain kata asal kata Jawa memperkaya perbendaharaan kata Indonesia. Inilah hasil pemikiran Saudara S. Tj. S. itu. Jangka waktu 10 tahun dari 1928 sampai 1938 tidak sangat memperluas khatulistiwa bahasa Indonesia. Terlalu kuat lawan dan kendala, lebih tegas, halangan yang dihadapinya. Pemerintah Hindia Belanda memusuhi bahasa Indonesia karena mereka menyadari dan tahu benar bahwa bahasa itu, jika lebih sempurna, lebih maju kedudukannya, akan menjadi tombak perjuangan bangsa Indonesia mencapai kedudukan yang mulia, antara lain sebagai bangsa merdeka. Walaupun demikian, bahasa Indonesia dianggap sarana komunikasi, sarana perhubungan yang dapat dipergunakan, walaupun tidak sempurna, untuk mencapai orang ramai yang harus diberikan bimbingan di bidang politik.

Setelah Belanda menyerah, dan Indonesia diduduki oleh Jepang, terdapatlah peluang yang baik bagi bangsa Indonesia mengenal bahasanya lebih mendalam. Bahasa Belanda dilarang dipakai. Bahasa Indonesia dimajukan. Tentu tidak demikian keinginan Jepang. Akan tetapi, untuk memaksa bangsa Indonesia mempergunakan bahasa Jepang pastilah tidak mungkin dalam waktu yang sangat singkat sejak mereka datang ke Indonesia. Sarana penghubung antara penjajah baru dan bangsa Indonesia ialah bahasa Indonesia. Surat kabar bahasa Belanda juga tidak ada lagi. Bahasa Melayu-Tionghoa pun sudah tidak boleh terbit. Bahasa Melayu-Tionghoa ini di zaman Belanda satu "dialek" yang mengganggu perkembangan bahasa Indonesia karena surat kabar Melayu Tionghoa ini banyak pula dibaca oleh bangsa Indonesia, atau bangsa "pribumi" atau "bumiputera". Walaupun demikian, ada kata-kata yang diambil untuk memperkaya perbendaharaan bahasa

Indonesia seperti *justeru*, *kendatipun*, dan sebagainya. Di zaman Jepang memang secara alamiah lagi terus berkembang bahasa Indonesia. Tanpa ada ahli-ahli bahasa yang memberikan bimbingan pada pemakaian bahasa Indonesia. Hanyalah ada ahli-ahli seperti Armijn Pane, Sanusi Pane, Sutan Takdir Alisjahbana, Dayoh, dan lain-lain pencinta dan pemupuk serta pemurni bahasa Indonesia yang turun ke medan perjuangan bahasa tanpa ada yang menyokong mereka. Semua dilakukan atas rasa kebangsaan yang mendalam bahwa satu bangsa yang ingin menjadi bangsa besar haruslah memiliki bahasanya sendiri yang berarti, yang mempunyai segala kemungkinan, baik di bidang pengembangan pikiran-pikiran sosial budaya, sosial politik, ekonomi dan sebagainya. Mereka itulah dapat dikatakan pahlawan-pahlawan yang berjuang tanpa balas.

Dari tahun 1954 sampai 1966, yaitu 12 tahun barulah ada gerak lagi untuk memajukan bahasa kita. Di Jakarta diadakan simposium bahasa dan kesusastraan Indonesia, yang diikuti dua tahun kemudian dengan seminar bahasa Indonesia di tahun 1968. Antara 1968 dan 1978 — jangka waktu 10 tahun — terjadi delapan kali seminar dan konferensi bahasa Indonesia. Antara Kongres ke-3 dan yang keempat yang sekarang ini diadakan dua seminar dalam jangka waktu lima tahun. Usaha bermusyawarah dan berseminar untuk memajukan bahasa nasional cukup banyak, tetapi tidak terlalu banyak. Mungkin penyelenggara tidak menganggap perlu lebih banyak waktu dipakai untuk mempersoalkan bahasa Indonesia ini, tetapi sebenarnya kondisi dan keadaan yang kita semua hadapi masa kini haruslah membuat kita sering mengadakan seminar maupun simposium atau kesempatan bertemu membicarakan keadaan bahasa Indonesia dalam ruang lingkup masa sekarang.

Dewasa ini terjadi proses perubahan cepat di semua bidang kehidupan. Karena itu, bahasa pun menghadapi berbagai tantangan baru di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, industri, teknologi dan sebagainya. Jika tidak banyak diperbincangkan keadaan dan perkembangan bahasa Indonesia karena pengaruh-pengaruh dari luar baik dari masyarakat ilmuwan, penerbitan, bahkan juga masyarakat anak-anak sekolah, dari dasar sampai tinggi, belum lagi diperhitungkan akibat-akibat komunikasi yang frekuensinya semakin banyak antara manusia dan manusia mengenai semua masalah kemasyarakatan dan kehidupan, kita tidak dapat menjaga agar bahasa Indonesia tidak dikacaukan oleh golongan-golongan di bangsa sendiri yang tidak merasa bertanggung jawab tentang bahasa kita.

Jika dipelajari sejarah bahasa Indonesia, dari bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan, dapat dikatakan bahwa kekuasaan penjajah tidak dapat mengacau dan merusak bahasa kita. Kekuatan kebudayaan kita, termasuk juga bahasa-bahasa daerah, selain daripada bahasa Melayu yang diwarisi

turun-temurun dari satu angkatan ke lain angkatan memang mengalami gangguan, tetapi tidak merusakkan. Yang benar ialah bahasa itu tidak mendapat tempat yang layak baginya, sebagai unsur kebudayaan satu rakyat yang berjumlah besar.

Walaupun pada suatu masa kita didesak memakai bahasa Belanda dan Jepang untuk mendapatkan kedudukan sosial yang tinggi karena kita masih tetap berpegang pada kebudayaan kita, termasuk bahasa, bahasa kita masih tetap dapat kita tempatkan sesuai tempatnya. Sebaliknya, dalam masa kini, pada masa kita dapat hidup sebagai bangsa merdeka, bahaya kelongsoran mengancam bahasa Indonesia. Ketika saya memberikan ceramah di salah sebuah universitas di Yogyakarta, saya membicarakan masalah kebangsaan, dan segala sesuatu yang menunjukkan kita mempunyai perasaan kebangsaan, tetapi, kata saya, dengan tujuan menggugah perasaan mahasiswa, di lembaga ini saya melihat bahwa seakan-akan tidak ada perasaan demikian. Kamar kecil, di sini ditandai dengan kata-kata asing: *ladies* dan *gentlemen*. Juga pemerintah kita membangun dan menamakan perusahaan bajanya dengan nama *Krakatau Stell*, padahal *Baja Krakatau* lebih enak didengar. Alasan apa pun yang akan dimajukan untuk membela sikap ini, pemerintah Jepang, atau Tiongkok atau Algeria atau Argentina tidak akan memakai bahasa asing untuk keperluan berhubungan di dunia dagang internasional. Kehormatan nasionalnya melarang mereka memakai bahasa asing. Jika berada di Jalan Kuningan sekarang, kita akan menjumpai berbagai papan pengumuman dalam bahasa Inggris. Gedung-gedung yang sedang dibangun menjajakan sarana untuk dipergunakan sebagai ruang kantor. Untuk keperluan itu mereka tidak memakai bahasa Indonesia, tetapi bahasa asing. Maksudnya menawarkan ruang itu untuk pengusaha-pengusaha asing yang ada di Indonesia, atau yang akan membuka kantornya di sini. Apakah artinya ini? Bahasa Indonesia diperyahudikan. Mereka yang kebetulan bukan Indonesia asli tidak menganggap bahasa kita sebagai alat komunikasi yang menguntungkan mereka. Karena pemerintah tidak mempunyai undang-undang yang melarang memakai bahasa asing di negeri kita untuk berkomunikasi umum, bukan terarah sebagai di TV, bahasa Indonesia diremehkan oleh bangsa sendiri, atau warga sendiri. Ini tragis, menyedihkan, dalam satu negara merdeka sebagai negara Indonesia.

Kenyataan seperti demikian membangkitkan perasaan pada kita seakan-akan negara kita bahagian dari *British Empire*, atau salah satu negara bagian Amerika Serikat, dan bahasa perantaranya bahasa Inggris, seperti di Hawaii, Singapura atau Hongkong!

Bahasa Indonesia, karena itu, tidak saja harus dijaga perkembangannya oleh ahli-ahli bahasa, kita, bahkan juga harus didudukkan ke singgasana yang mulia dan dilindungi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan undang-

undang. Unsur-unsur yang mengambil keputusan dalam pemerintah haruslah menyadari bahwa bahasa Indonesia dipelajari juga sekarang di beberapa universitas di Amerika Serikat, Australia, Belanda, dan juga di Moskowa, Praha dan lain-lain negara penting di dunia. Pertanyaan timbul apakah mereka dapat memberikan pelajaran bahasa kita yang benar dan baik, jika kita di Indonesia sendiri tidak melindungi bahasa kita, tidak menjaga standardisasinya, baik di bidang tata bahasa, seperti morfologi, sintaksisnya, bahkan juga perbendaharaan bahasa seperti kata-kata yang dikemukakan dan yang dibakukan ataupun yang telah mewarga. Kesatuan struktural dan hukum bahasa harus diutamakan. Seperti dikatakan terlebih dahulu, perhatian pada bahasa kita sangat perlu, mengingat bahwa sebagai bagian dari kehidupan bangsa yang mengalami proses perubahan yang cepat terjadi, baik kemasyarakatan maupun kebudayaan dengan segala akibat sampingan, baik pertentangan maupun ketimpangan, membuat watak bahasa menjadi dinamis.

Kita memiliki peluang yang sangat baik melalui bahasa menjadi bangsa besar. Salah satu rencana atau konsep modern dalam pembangunan bangsa dan negara, untuk mempercepat mempersatukan bangsa di bidang sosial dan kebudayaan, dasar segala perkembangan menjadi bangsa besar, ialah memiliki satu bahasa yang berkesanggupan sebagai kekuatan mempersatukan. Tidaklah berlebihan jika dianjurkan agar diciptakan satu gerak dinamis membangun bahasa. Dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh ini, mendinamiskan proses pembangunan bahasa, baik melalui seminar, simposium, pers harian dan berkala, alat-alat perhubungan atau komunikasi lain, baik cetak maupun elektronik, dapatlah kita menjadikan bahasa sebagai sarana meninggikan kebudayaan kita. Watak sosial bahasa menyebabkan bahwa harus ada tata cara dan pengaturan yang baku untuk pemakaian bahasa sebagai unsur penghubung dan pernyataan pikiran dan pendapat membina segala segi kehidupan satu bangsa dan masyarakat yang hidup.

### **Bahasa sebagai Alat Komunikasi**

Tujuan kongres memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai:

- a. sarana komunikasi pemerintahan;
- b. sarana pengembangan kebudayaan;
- c. sarana pendidikan dan pengajaran;
- d. sarana pelaksanaan wajib belajar;
- e. sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Ini semua dirangkum menjadi sarana pembangunan nasional. Kongres ingin mencapai tujuan itu dengan juga *membahas bahasa dan sastra* dalam hubung-

annya dengan *pembangunan nasional*. Masalah ini hendak ditinjau pula dari segi:

- 1) komunikasi massa, dan
- 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modern.

Dari persoalan-persoalan yang dikemukakan dan yang akan ditangani oleh kongres, dan hasilnya secara *optimum* yang ingin dicapai hanyalah dapat terjadi melalui sarana abstrak, yaitu bahasa, pada tingkat pertama. Alat-alat kongkret yang lain hanyalah sebagai alat pembantu.

Demikianlah secara umum susunan dan urutan persoalan jika sekiranya kita harus membahas masalah bahasa dalam hubungannya dengan pembangunan nasional. Jika dikaitkan masalah bahasa ini dengan hak *berkomunikasi*, sebagai hal yang menjadi persoalan dan pembicaraan dalam UNESCO beberapa tahun terakhir, dengan sendirinya persoalan ini menjadi lebih mendalam maupun luas jangkauannya dan ruang lingkupnya. Menyinggung hak berkomunikasi itu bahwasanya kita sebagai bangsa telah memiliki suatu kedudukan dalam pengertian emansipasi yang sempurna. Dengan emansipasi ini saya maksudkan bahwa kita sudah menjadi bangsa dewasa dan matang. Jika membicarakan bahasa untuk sarana komunikasi, hak yang terjalin dalam komunikasi itu dengan tujuan yang tercatat dari 1 sampai 5 membuat kita menjadi bangsa dan negara, nasional yang memiliki segala kelengkapan (atribute), bahasa yang dipergunakan sebagai sarana itu seharusnya yang telah sempurna, telah dapat menjangkau segala persoalan yang dibawa kelengkapan negara kita. Ini tentulah tidak semudah seperti yang tertulis di sini. Walaupun demikian, kita harus berani bertolak dari titik yang saya kemukakan itu. Dengan nilai bahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pemerintahan berarti kita sebagai bangsa telah memiliki bahasa politik.

Bahasa dan politik telah dapat berdiri berdampingan dan baru-membaur dalam kerangka komunikasi. Artinya, bahasa politik, termasuk bahasa pemerintahan, telah kita pergunakan. Masyarakat ramai dapat terjamah jika dihubungi oleh pemerintah dengan mempergunakan bahasa sebagai sarana, yang dapat dipahami, yang baku. Sebaliknya demikian pula, jika masalah hak-*the right*-untuk mengadakan komunikasi diselipkan dalam persoalan ini. Hak rakyat mendapatkan komunikasi, dan hak rakyat mengadakan komunikasi dengan pemerintah. Inilah yang dinamakan antaraksi yang positif. Keafdolan hubungan timbal-balik yang bernama komunikasi itu sangat tergantung pada bahasa: perumusannya dalam pemikiran; pemikiran yang dilahirkan hasil pertukaran pendapat (*conversation, discussion*); antarmain dalam arti dasar (semantik) kata-kata, istilah dan bahasa yang dipakai; kebiasaan sosial dan intelektual dan watak penerima (atau pendengar) penerangan sebagai unsur-unsur antaraksi tersebut yang telah membentuk keterangan atau penerangan

pihak pemerintah, maupun rakyat atau wakilnya dengan memakai bahasa untuk keperluan itu. Selanjutnya penetapan kepercayaan hasil antarmain itu yang menentukan pula nilai hubungan itu. Dari seluruh antaraksi ini, tidak dapat tidak bahasa menjadi sarana yang sangat utama. Karena sarana ini memiliki budipekerti dan watak sosial, ia berdayaguna yang tinggi efek dan nilainya.

Tanpa mempersoalkan hak, tetapi hanya soal komunikasi saja, dengan bahasa sebagai sarana, baik komunikasi itu untuk pemerintahan maupun untuk mencapai orang ramai atau massa, soal ini diakui sebagai sumber yang diperlukan untuk pergaulan sosial. Untuk kemanusiaan bersama. Piagam universal mengenai hak-hak manusia mengakui kenyataan ini sejak tahun 1948. Sejak saat itu komunikasi diakui sebagai sumber kemanusiaan yang sangat diperlukan, esensial. Dalam perdebatan di salah satu sidang UNESCO yang saya hadiri di Manila tahun 1978 ada yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang tidak selamanya diakui antara sumber, keperluan (kebutuhan) dan hak. Jika keperluan bagi perikemanusiaan akan sumber komunikasi itu tidak dapat disediakan atau diadakan, terjadilah frustrasi. Dalam negara seperti kita, dirasakan keperluan yang sangat besar akan komunikasi itu, yang meliputi rencana pemerintahan mengenai keluarga berencana, pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan masyarakat sampai pada pengembangan ilmu pengetahuan. Di beberapa negara sumber komunikasi ini sangat besar dan mudah diberikan, tetapi di lain negara ia tertutup dan dihalangi untuk dipergunakan. Perbedaan dalam menikmati sumber komunikasi ini, yang diperlukan dan yang menjadi hak perikemanusiaan menyebabkan dicari cara-cara bagaimana sumber-sumber itu dapat dipergunakan agar efektif dan berdayaguna yang sebaik-baiknya diperoleh untuk mendapat hak penyertaan dalam pembangunan yang seimbang.

Jika kita mengumpulkan semua tujuan kongres ini sebagai satu usaha untuk pembentukan budi pekerti sosial kita, dan sarananya ialah bahasa, kita akan mengalami kesulitan yang dikandung masyarakat kita sendiri. Bahasa yang mempunyai watak sosial menunjukkan kepada kita bahwa masih terdapat berbagai saku kebudayaan yang satu dan lain masih berbeda. Saku kebudayaan majemuk ini haruslah dapat kita atasi segera agar tercapai cita-cita menjadikan bangsa kita maju karena mempunyai alat penghubung yang dapat "dipakai" oleh semua lapisan masyarakat. Mau atau tidak haruslah diakui bahwa terdapat satu stratifikasi nasional dalam masyarakat. Demikian pula bahasa mempunyai stratifikasi sosial. Warga dan keluarga yang bertingkat pengetahuan tanpa dasar pendidikan tidak memakai bahasa sulit. Bahkan tanpa terikat pada norma dan kendala tata bahasa. Warga menengah dan atas karena berkedudukan dalam strata sosioekonomi yang tinggi memakai bahasa

tinggi dan sopan dengan sifat yang lebih abstrak (Roeder, 1966). Sementara itu, mobilitas sosial sangat lamban gerakannya karena jurang antara golongan miskin dan kaya makin melebar dari masa ke masa dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Manusia mempunyai kesanggupan membentuk simbol-simbol dan kata-kata yang mewakili fenomena (rupa) dunia dalam dan luar. Kesanggupan ini adalah wataknya yang sangat menonjol. Pada proses menelaah dan mengetahui di alam pikirannya akan lingkungannya, manusia mengembangkan sistem-sistem dengan simbol atau bahasa yang membentuk dan mengubah lingkungannya itu. Kata-kata memberikan kepadanya alat cetakan untuk rencana dan pikiran, demikian juga simbol yang memantulkan keyakinan nilai. Simbol tidak serupa dengan tanda, seperti angka yang mempunyai isi tetap. Simbol dan rencana mengandung sifat keterbukaan yang dibatasi oleh pengertian-pengertian. Hanya bahasa, sifat kegunaannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosialnya. Demikianlah interpretasi yang diberikan oleh Claus Mueller dalam bukunya *The Politics of Communication* (Mueller, 1976) mengenai bahasa dalam arti kata yang umum, dipandang dari sudut sosiologi politik bahasa. Akan tetapi, bahasa dan kesadaran politik (pemerintahan), kesadaran pendidikan, kesadaran kebudayaan, kesadaran menyadap pengetahuan dan teknologi haruslah berjalan bersamaan. Demikian pula cara ini menentukan bagaimana seseorang berhubungan dengan lingkungannya. Karl Marx dan Friedrich Engles memberikan perumusan tentang bahasa, yang antara lain dikatakan oleh mereka bahwa bahasa sama tuanya dengan kesadaran. Bahasa ialah kesadaran yang praktis karena bahasa, seperti juga kesadaran hanyalah lahir karena keperluan, keharusan mengadakan perhubungan dengan lain manusia (Marx, 1969).

Dari pemikiran ini nyatalah bahwa manusia yang memiliki kesanggupan memakai bahasa dan sanggup menanggapi dinamik lingkungannya akan dapat pula berkecimpung dalam komunikasi politik, kebudayaan, ekonomi dan sebagainya untuk memperbaiki citranya sendiri dan juga lingkungannya. Tidaklah salah jika saya katakan di sini bahwa bagi kita sebagai bangsa yang muda, tetapi berkebudayaan tua, termasuk pemilihan bahasa itu perlu menyadari bahwa kita harus sanggup "memilih bahasa", dalam arti bahwa bahasa yang akan dipergunakan adalah yang dapat menentukan derajat bangsa di antara bangsa-bangsa yang berkebudayaan. Sebagaimana juga di Rusia dan Amerika Serikat, bahasa (menjadi) alat perubahan dan perjuangan. Dan seorang ahli bahasa Rusia, L.O. Reznikoa, menyatakan "Ilmu Marx mengajarkan kepada kita bahwa bahasa tidak saja menyatakan dirinya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat ampuh yang dapat dipergunakan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan terutama sekali budi pekerti, demikian juga akhirnya, kenyataan jasmaniah (Reznikow).

Melalui pikiran yang terkembang di sini, yang berasal dari luar dan dalam, saya dapat menyimpulkan bahwa dengan bahasa sebagai sarana kita dapat, bahkan sanggup, menaikkan derajat bangsa kita. Menaikkan derajat sebagai "kenyataan jasmaniah" adalah bahagian yang terakhir dan yang puncak dari sukses pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. Takdir. 1965. *The Failure of Modern Linguistics in The Face of Linguistics Problems of The Twentieth Century*. Kuala Lumpur: University of Malaya.
- Badudu, J.S. 1963. *Pelik-pelik Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Prima.
- , 1980. *Membina Bahasa Indonesia Baku*. Bandung: Pustaka Prima.
- Harms, L.S. dan Jim Richstad (Ed.), 1977. *Envolving Perspective on The Right to Communicate*. East-West Centre.
- Marx, Karl dan Friedrich Engels. 1969. *The Guman Ideology*. New York: International Publishers.
- Mills, C. Wright. 1963. *Power, Politics and People, The Horowith Language, Logic and Culture*. Oxford University Press.
- Mueller, Claus. 1976. *A Study in The Political Sociology of Language, Socialization, and Legitimation* Oxford University Press.
- Ramlan, M. 1967. *Ilmu Bahasa Indonesia: Morfologi, Suatu Tinjauan Deskriptif*. Yogyakarta: U.P. Indonesia.
- Reznikow, L.O. *Contributions Aux Problems*.
- Roeder, Peter M. 1966. *Sprache, Sozialstaln und Bildungschausen*.

## MENINGKATKAN BOBOT DAN KADAR PENGAMALAN KESADARAN NASIONAL MELALUI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SECARA BAIK DAN BENAR

Imam Sukarsono

### Pendahuluan

Di dalam karyanya yang pertama, yang berjudul *Max Havelaar*, E. Douwes Dekker, yang menggunakan nama samaran Multatuli, salah seorang penyala semangat kebangkitan nasional bangsa Indonesia, melukiskan keindahan kepulauan Nusantara sebagai sebuah ikat pinggang batu permata berwarna biru yang bergerak mengitari khatulistiwa. Setiap orang Indonesia yang normal pasti bangga mendengar pujian yang dialamatkan kepada tanah airnya. Ada satu hal lagi yang juga membuat setiap orang Indonesia bangga, yaitu kenyataan bahwa bangsa Indonesia termasuk di dalam kelompok lima besar di dunia dari jumlah penduduknya. Seorang penulis Barat yang turut menyumbangkan karya untuk penerbitan buku yang berjudul *National Security* dengan anak judul *Political, Military and Economic Strategies In The Decade Ahead* terbitan Frederick A. Praeger pada tahun 1963 di New York, melihat bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang bukan saja jumlah penduduknya yang besar, melainkan juga ambisinya. Lepas dari alasan yang digunakan oleh penulis tersebut untuk memberikan kualifikasi "berambisi besar" itu (di dalam karya tersebut alasan itu memang tidak dikemukakan-nya) pembuat kertas kerja ini berpendapat bahwa bangsa Indonesia patut menyambut pemberian kualifikasi demikian dengan perasaan bangga dan gembira sebab Undang-Undang 1945 di dalam pembukaannya telah menegaskan kebulatan tekad bangsa Indonesia akan ikut melaksanakan keter-

tiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bukankah kebulatan tekad demikian memperlihatkan ambisi besar di dalam arti yang positif? Masih banyak hal lain yang melukiskan kebesaran bangsa dan tanah air Indonesia. Akan tetapi, untuk keperluan pembuatan makalah ini kiranya tiga hal yang telah disinggung di muka cukuplah sudah. Bangsa Indonesia sadar pula bahwa hanya menonjolkan kebanggaan dan kegembiraan saja tidaklah banyak hal yang dapat dinikmatinya dari kebesaran itu. Oleh karena itu, cukup lama ia membanting tulang dan memeras keringat di dalam pemenuhan kewajiban yang dibebankan oleh kualifikasi "besar" tersebut. Di bidang kebahasaan, khususnya yang menyangkut bahasa Indonesia, bangsa Indonesia telah menanam sejumlah tiang pancang sejarah. Tanpa mengurangi arti dan peranan tiang pancang sejarah yang berbentuk lain, untuk keperluan penyajian kertas kerja ini penyaji membatasi diri dengan hanya menyetengahkan tiang pancang sejarah yang berbentuk kongres di samping tiang pancang sejarah yang terpenting, yakni Sumpah (Keramat) Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928.

Kongres Bahasa Indonesia I dilangsungkan di kota Solo pada tahun 1938. Tahun 1954 ditandai dengan Kongres Bahasa Indonesia II di kota Medan dan Kongres Bahasa Indonesia III merupakan salah satu ciri tahun 1978 dengan ibukota Jakarta sebagai tuan rumahnya. Kongres Bahasa Indonesia IV akan segera tampil sebagai salah satu peristiwa penting yang menandai tahun 1983. Selaku seorang tenaga bantu sukarela di bidang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, pembuat kertas kerja ini memandang kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Panitia Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia IV untuk menyumbangkan pikiran kepada kongres sebagai suatu kehormatan yang harus ditanggapinya sebaik mungkin. Karena penyaji kertas kerja ini bukan seorang pakar bahasa Indonesia, melainkan hanya seorang yang di dalam penggunaan sehari-hari bahasa Indonesia senantiasa berusaha memperlihatkan sikap berbahasa yang dapat memenuhi tuntutan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, maka apabila di dalam makalah ini tidak dapat ditemukan bobot ilmiah penyajian seperti yang lazim mewarnai karya seorang sarjana bahasa, kekurangan ini harus dipulangkan kepada kenyataan bahwa penyaji bukan seorang sarjana bahasa Indonesia. Namun, dengan menyadari kekurangan yang melekat pada dirinya ia berdoa semoga kertas kerja yang disajikannya dapat memenuhi harapan panitia penyelenggara. Kertas kerja ini disusun dengan sistematisa berikut.

- a. Pendahuluan
- b. Bahasa Nasional sebagai Sarana untuk Mencapai Tujuan Nasional
- c. Bobot dan Kadar Pengamalan yang Tidak Memadai

- d. Tantangan Repelita IV
- e. Ringkasan dan Saran.

### **Bahasa Nasional sebagai Sarana untuk Mencapai Tujuan Nasional**

Peranan sebagai penopang atau pemikul yang umum suatu kebudayaan dipegang oleh bahasa. Dapat juga dikatakan bahwa bahasa merupakan suatu produk sekaligus juga suatu alat yang paling umum yang dihasilkan oleh suatu kebudayaan. Fungsi yang paling elementer dan sekaligus paling umum di dalam suatu masyarakat dilaksanakan oleh bahasa. Suatu alat untuk menyatakan pendapat, itulah bahasa. Di samping itu, ia juga merupakan suatu alat di tangan penggunaannya untuk memahami pendapat orang lain. Oleh karena itu, jelaslah bahwa apabila orang berbicara tentang hubungan antar-orang, mau tidak mau alat yang disebut bahasa itu pasti tidak akan lepas dari ingatannya. Di dalam, oleh, dan dengan masyarakat setiap kata yang diucapkan tumbuh serta berkembang. Menyatakan pendapat dan memahami suatu hal bukan sekedar berbicara dan mendengar, melainkan lebih dari itu.

Pembentukan pikiran tidak dapat dilepaskan dari pernyataan pendapat. Dengan kata lain pengertian pembentukan pikiran lengket dengan pengertian pernyataan pendapat. Memahami sesuatu mengandung pengertian dapat menangkap atau mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang lain. Pengertian-pengertian dan pola-pola pikiran dapat dibentuk hanya dengan penggunaan alat yang disebut bahasa. Juga oleh alat itu seseorang dimungkinkan mengamati menghayati dan mengamalkan secara teratur pengalaman-pengalaman hidupnya. Suatu sistem yang beraturan dan mengandung pengertian-pengertian serta bentuk-bentuk pernyataan pendapat, itulah bahasa, ia memungkinkan pemikiran yang teratur dan sebaliknya ia juga dilahirkan dan diberi kemungkinan berkembang oleh pemikiran yang teratur. Manusia belajar membentuk pola-pola pikiran dengan bantuan masyarakat karena di dalam masyarakat itu ia belajar memahami apa yang dimaksudkan oleh sesama anggota masyarakat. Jadi, dapatlah dikemukakan bahwa masyarakat melahirkan bahasa dan bahasa melahirkan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Kesamaan bahasa tidak saja berarti bahwa para pemakainya dapat saling memahami, tetapi juga mengandung arti suatu taraf tertentu di dalam kesesuaian berpikir. Dengan demikian, jelaslah betapa tinggi kadar vitalitas bahasa di dalam setiap masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat modern beraspirasi membentuk diri menjadi suatu bangsa, suatu nasion yang merdeka dan berdaulat, sungguh mengasyikkan dan menariklah penelitian untuk memahami posisi bahasa milik suatu bangsa, suatu nasion.

Bahasa milik suatu nasion, manakala ia mampu memberikan kemungkinan kepada semua anggota nasion untuk saling memahami dan saling ber-

komunikasi, dapat disebut bahasa nasional bangsa itu. Untuk mengetahui di mana posisi bahasa nasional di dalam pembentukan bangsa, penyaji kertas kerja ini mengajak para peserta kongres mendekati lebih dahulu kesadaran nasional. Menurut Frederick Herzt, seorang psikolog-sosiolog, kesadaran nasional dapat dianalisis menjadi empat unsur. Unsur ketiga yang melukiskan empat jenis aspirasi nasional terdiri atas empat butir. Butir ketiga dan keempat mengandung inti yang dijadikan titik tolak di dalam penelitian posisi bahasa. Butir ketiga melukiskan suatu usaha keras untuk menampilkan keterpisahan, perbedaan, kepribadian, keaslian dan keistimewaan/kekhasan. Sikap menjunjung tinggi bahasa nasional dicatat oleh Herzt sebagai suatu contoh yang amat berbobot tentang usaha keras ini.

Perjuangan suatu bangsa untuk membedakan diri dari bangsa-bangsa lain dilukiskan oleh butir keempat, butir ini mendasari butir-butir yang lain. Dikemukakan pula oleh Herzt bahasa kesadaran nasional yang memotori gerakan-gerakan nasional merupakan tempat kandungan semangat perjuangan terpadu untuk mewujudkan kesatuan, kemerdekaan, kepribadian, dan prestise, sedangkan sasaran utama gerakan-gerakan nasional ialah kebebasan politik, emansipasi kultural, kemerdekaan ekonomi, dan kesamaan sosial. Bahwa kesadaran nasional memberikan posisi kepada bahasa nasional sebagai tali tradisional yang paling utama untuk mengikat dan mempersatukan masyarakat, sebagai sarana untuk mendidik rakyat supaya rakyat memiliki semangat solidaritas dan sebagai lambang kepribadian nasional, oleh psikolog-sosiolog tersebut dijelaskan pula secara mantap.

Perjuangan-perjuangan nasional yang bergandeng tangan erat dengan perjuangan pengamalan paham demokrasi mulai makin menonjol sejak abad 19 dan bahasa menjadi lambang kedaulatan nasional, kemerdekaan serta prestise. Dalam pada itu sejarah pun mencatat peristiwa-peristiwa yang berekor perang yang menghancurkan kesatuan pelbagai bangsa sebagai akibat pertentangan atau konflik yang dikorbankan oleh fanatisme bahasa. Tiap-tiap sukunya ingin menempatkan bahasa ibunya pada posisi yang lebih tinggi daripada posisi bahasa ibu suku yang lain. Abad ke-20 yang hampir berakhir ini pun menjadi saksi pergaulan beberapa bangsa dengan kesulitan dan kericuhan yang diakibatkan oleh fanatisme bahasa. Kesulitan dan kericuhan itu tidak jarang menempatkan kelangsungan hidup bangsa tersebut di dalam taruhan. Sejumlah bangsa yang mencapai kemerdekaan sesudah perang dunia kedua dan terdiri atas pelbagai suku yang masing-masing mempunyai bahasa ibu terpaksa menggunakan bahasa bangsa yang pernah menjajah mereka sebagai bahasa resmi, karena mereka tak mampu melahirkan sebuah bahasa nasional yang diterima oleh semua suku. Di Afrika bahasa bekas bangsa penjajah yang sampai sekarang masih digunakan sebagai bahasa

resmi bangsa-bangsa yang telah merdeka itu ialah bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Di Asia bahasa Inggris pun masih menempati posisi sebagai bahasa resmi di beberapa negara yang dahulu menjadi jajahan bangsa Inggris.

Bangsa Indonesia harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya berupa "pelita" yang sejak pagi-pagi di dalam suasana dan alam penjajahan telah menyala dan menerangi hati nurani-nya; kecintaan tiap-tiap suku bangsa kepada bahasa ibunya tidak pernah merosot menjadi fanatisme bahasa. Oleh karena tiap-tiap suku bangsa Indonesia sadar bahwa gerakan nasional yang telah berlangsung selama dua puluh tahun sejak hari kebangkitan nasional 20 Mei 1908 kurang memuaskan disebabkan oleh belum adanya satu bahasa yang dapat digunakan olehnya sebagai sarana untuk memahami secara mantap apa yang dimaksudkan oleh suku bangsa yang lain, tergeraklah hati pemuda Indonesia untuk menghilangkan hambatan ini dan pada tanggal 28 Oktober 1928 diangkatlah bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal tersebut merupakan wadah pengangkatan itu.

Sumpah Pemuda merupakan salah satu faktor yang amat penting di dalam pergerakan nasional yang akhirnya berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Jelaslah bahwa apa yang dilukiskan oleh psikolog-sosiolog Herzt tentang arti suatu bahasa nasional bagi suatu bangsa telah dibuktikan oleh bangsa Indonesia di dalam perjuangan nasionalnya. Bangsa Indonesia menggunakan bahasa nasionalnya, yakni bahasa Indonesia sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan nasional.

### **Bobot dan Kadar Pengamalan yang Tidak Memadai**

Apakah bangsa Indonesia cukup puas dengan hanya memberikan kepada bahasa Indonesia peranan sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan nasional? Pertanyaan ini dapat dijawab secara tegas, tidak. Bangsa Indonesia tidak tinggal diam setelah bahasa Indonesia diangkatnya menjadi bahasa persatuan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang Indonesia sebab apalah arti perkataan "menjunjung tinggi" yang keluar dari mulut setiap kali ia mengucapkan Sumpah Pemuda kalau perkataan itu tidak diikuti perbuatan yang serasi. Secara berangsur-angsur bahasa Indonesia dipupuk, dipelihara, dan dikembangkan sesuai dengan irama perjuangan bangsa.

Di dalam alam dan suasana penjajahan Belanda kesempatan untuk pengembangan bahasa Indonesia praktis tidak ada karena yang ditempatkan pada posisi kelas satu oleh pemerintah kolonial tak lain dan tak bukan hanya bahasa Belanda. Nama bahasa Indonesia hanya dikenal oleh dan di kalangan "orang-orang pergerakan". Di luar kalangan itu orang menggunakan nama bahasa Melayu. Pemerintah jajahan menempatkan bahasa Melayu setingkat

dengan setiap bahasa daerah yang lain. Setelah Belanda meninggalkan bumi Indonesia sebagai akibat kalah perang dan bangsa Jepang sebagai bangsa yang menang perang tampil sebagai penjajah baru mulailah bahasa Indonesia merasakan hembusan angin segar. Pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Di samping bahasa Jepang, bahasa Indonesia beroleh tempat yang terhormat. Sejak saat itu orang-orang Indonesia yang sangat mahir berbahasa Belanda tetapi "tidak mahir berbahasa Indonesia" terpaksa belajar bahasa Indonesia. Makin cerahlah prospek bahasa Indonesia sejak saat itu. Apa yang dahulu belum pernah dikemukakan di dalam bahasa Indonesia sejak saat itu harus tampil di dalam bahasa Indonesia. Jadi, mudahlah dipahami bahwa di dalam zaman penjajahan Jepang itu mulai tampak kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 tentu dapat juga dicatat sebagai tiang pancang sejarah di dalam perkembangan bahasa Indonesia, oleh karena bangsa Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya harus membenahi diri. Pembenahan diri mengandung pengertian pengaturan, yaitu pengaturan di dalam rangka pembentukan bangsa, nasion, dan negara Indonesia.

Kalau orang berbicara tentang negara, ia akan dapat melihat tiga unsur yang menonjol di dalam kegiatan atau kerja negara, yaitu

- a. kehidupan masyarakatnya dengan pelbagai ragam,
- b. penggunaan kekuasaan untuk memungkinkan pembuatan aturan-aturan yang diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut,
- c. kaidah-kaidah atau norma-norma yang harus ditaati atau ditunduk di dalam pembuatan aturan-aturan itu.

Ketiga unsur ini pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di dalam kegiatan-kegiatan pembuatan aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang baru saja merdeka, bulan-bulan pertama sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah mulai berhadapan dengan kebutuhan akan kata-kata dan istilah-istilah baru bahasa Indonesia. Bahwa penemuan kata-kata dan istilah baru itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, dapat dibuktikan oleh bentuk peraturan perundangan yang diterbitkan di dalam periode 1945–1950. Bukan hanya penemuan kata-kata dan istilah-istilah baru yang tampak sebagai suatu pekerjaan yang tidak mudah, melainkan juga penyusunan kalimat yang baik menurut aturan bahasa Indonesia merupakan suatu beban yang tidak ringan bagi mereka yang terlibat di dalam pembuatan peraturan perundangan tersebut. Jadi, jelas pulalah bahwa tertib masyarakat menuntut adanya peraturan perundangan yang baik. Oleh karena peraturan perundangan yang baik menuntut penggunaan bahasa yang baik, mau tidak mau dari hari ke hari bahasa Indonesia harus disempurnakan. Menyempurnakan bahasa Indonesia

berarti pula secara konsisten memupuk, memelihara, dan mengembangkan bahasa Indonesia. Membina atau memupuk, memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia secara konsisten mengandung arti menghayati dan mengamalkan posisi bahasa Indonesia sebagai unsur ketiga di dalam Sumpah Pemuda.

Di dalam zaman Orde Lama kegiatan untuk membenahi bahasa Indonesia melalui forum yang berbentuk kongres telah dilakukan dua kali, yakni di Solo dan di Medan, seperti yang telah disinggung di muka. Orde Baru dapat membanggakan diri sebagai pemenang, andaikata Orde Lama dan Orde Baru dikompetisikan di dalam kegiatan memajukan bahasa nasional, karena di dalam zaman Orde Baru di samping Kongres Bahasa Indonesia III yang dilangsungkan di Jakarta pada tahun 1978 pelbagai kegiatan yang lain seperti seminar, lokakarya turut menandai Orde Baru. Peristiwa yang patut dicatat sebagai motor untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pembenahan bahasa Indonesia di dalam zaman Orde Baru ialah pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 1967. Di dalam pidato tersebut kepala negara mengajak seluruh bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan salah satu badan/lembaganya yang namanya telah berubah beberapa kali dan sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (disingkat Pusat Bahasa) patut diberi acungan ibu jari sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukannya di dalam rangka pembenahan bahasa Indonesia. Salah satu kegiatan yang patut digarisbawahi secara agak khusus ialah penyuluhan yang dilakukan antara lain melalui layar TV Stasiun Pusat Jakarta. Dengan segala kegiatan itu bangsa Indonesia diajak mengamalkan kesadaran nasional melalui salah satu unsurnya. Bukankah, seperti yang telah disinggung oleh psikolog-sosiolog Hertz, bahasa nasional merupakan salah satu butir di dalam salah satu unsur kesadaran nasional? Dengan mengikrarkan niat menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda menghayati posisi bahasa Indonesia di dalam kesadaran nasionalnya. Setelah penghayatan pengamalannya yang perlu diamati. Sudah mantapkah hasil yang dicapai melalui pengamalan itu?

Memang cukup banyak kemajuan yang dapat dicatat sejak pemerintah (dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pusat Bahasanya) melancarkan kegiatan-kegiatan pembenahan. Namun, di samping hasil yang menggembirakan itu, menurut pendapat penyaji kertas kerja ini, kenyataan yang mengandung rasa prihatin masih belum dapat dilenyapkan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih terlampau banyak orang Indonesia yang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar sekalipun pengamat hanya membatasi diri pada aturan-aturan dasar/elementer

tata bahasa. Semua lapisan masyarakat mulai dari yang terbawah sampai yang teratas di semua bidang kegiatan, kecuali mereka yang bergerak di bidang studi bahasa Indonesia, dihindangi kekurangan itu. Satu hal yang menyedihkan ialah sikap orang Indonesia yang suka mengemukakan alasan pemaaf bahwa bahasa Indonesia sedang berkembang apabila ada orang lain yang mengoreksi kesalahannya berbahasa Indonesia. Juga alasan pemaaf "salah kaprah" (hal yang salah, tetapi karena hampir semua orang melakukannya sehingga seolah-olah harus dianggap "tidak salah") sering dikemukakan oleh orang-orang seperti itu. Setiap orang yang menguasai aturan bahasa Indonesia dengan kualifikasi "sedang" saja pasti menggelengkan kepala manakala ia membaca karya tulis siswa sekolah lanjutan atas atau mahasiswa. Kalimat yang mengandung kesalahan elementer bertebaran di dalam karya tersebut. Siaran-siaran radio, TVRI dan tulisan-tulisan di dalam media pers sampai detik ini masih diganggu oleh kesalahan di dalam penerapan aturan-aturan elementer itu. Kiranya baik apabila penyaji kertas kerja ini menampilkan beberapa contoh kalimat yang salah.

- a. *Dengan<sup>+</sup>) pembukaan jembatan baru itu memungkinkan<sup>+</sup>) peningkatan kegiatan ekonomi di desa-desa yang tandus.*
- b. *Jumlah<sup>+</sup>) peserta yang berumur dua puluh tahun berjumlah<sup>+</sup>) lima ribu orang.*
- c. *Dalam<sup>+</sup>) upacara yang sederhana itu dihadiri<sup>+</sup>) juga oleh Gubernur.*
- d. *Penyerahan<sup>+</sup>) hadiah-hadiah perlombaan membaca puisi diserahkan<sup>+</sup>) oleh Direktur.*
- e. *Penandatanganan perjanjian antara Pem. R.I. dan Pem. Jepang masing-masing<sup>+</sup>) dilakukan oleh Dirjen ... dari pihak Indonesia dan ... dari pihak Jepang.*
- f. *Pada hari ini tanggal 15 ... oleh<sup>+</sup>) saya, panitera pada Pengadilan Negeri ... atas perintah ... akan melakukan<sup>+</sup>) pelelangan ....*

#### Catatan

Tanda <sup>+</sup>) menunjukkan letak kesalahan.

Masih cukup banyak jenis kesalahan yang dapat dibaca atau didengar setiap hari. Akan tetapi, beberapa contoh di atas ini cukuplah sudah untuk keperluan penyajian kertas kerja ini. Kenyataan tersebut mengundang pertanyaan mengapa, setelah kemerdekaan bangsa Indonesia berumur 38 tahun, kelemahan penguasaan bahasa Indonesia seperti yang diperlihatkan oleh contoh di atas belum juga lenyap? Apakah sebabnya? Di samping kemampuan yang menyedihkan seperti yang telah disinggung di muka ada satu hal lagi yang juga mengundang keprihatinan, yaitu sikap yang menempatkan bahasa nasional tidak sebagai "tuan rumah" di negeri sendiri. Cukup banyak orang

Indonesia yang takluk kepada sikap seperti ini yang merajalela di dalam diri mereka. Di dalam banyak hal mereka menempatkan bahasa Indonesia di bawah bahasa asing (khususnya bahasa Inggris). Secara populer sikap mereka itu dapat disebut "keinggris-inggrisan". Di ibukota dan di kota-kota besar yang lain di Indonesia bertebaran penggunaan kata atau istilah bahasa asing untuk hal-hal yang sebenarnya dapat disebut dengan kata atau istilah yang telah lama ada di dalam kosa kata bahasa Indonesia. Inilah beberapa contoh penggunaan kata atau istilah bahasa asing yang tidak pada tempatnya itu:

Jaya Furniture, Rapih Furniture, Sarmidi Barber's Shop, Lely's Beauty Salon — For Ladies and Gents, Jatinegara Building, Kwitang Building, Glodok Building, Harbour Health Center, Kebayoran Community Center, Jatinegara Youth Center, Dirjen ... Cup.

Kenyataan bahwa praktik tersesat di dalam penggunaan kata bahasa asing seperti yang diperlihatkan oleh contoh di atas ini diikuti (dicontoh) mentah-mentah oleh daerah-daerah, melipatandakan keprihatinan.

Ada lagi sikap tersesat yang kadarnya, menurut anggapan penyaji kertas kerja ini, lebih tinggi daripada kadar ketersesatan yang dilukiskan di dalam contoh di atas. Ketersesatan yang kadarnya lebih tinggi ini mencukil pertanyaan tidakkah sikap tersebut memperlihatkan suatu erosi kesadaran nasional, dalam hal ini erosi yang datang dari salah satu unsurnya. Sikap seperti ini sering dipandang oleh iklan pencaharian tenaga yang mengisi halaman-halaman surat kabar. Pemasang iklan, yaitu pihak yang mencari tenaga, menyatakan dirinya sebagai perusahaan nasional. Tenaga yang dicarinya orang/warga negara Indonesia, tetapi bahasa yang digunakannya di dalam iklan itu bahasa Inggris. Alangkah ganjilnya! Apakah pemasang iklan itu mengira bahwa bahasa Inggris telah diangkat menjadi bahasa resmi kedua? Sungguh benar-benar tersesat perkiraan seperti itu. Apakah dengan kecaman yang dialamatkan kepada praktik tersesat di dalam penggunaan bahasa asing itu penyaji kertas kerja ini mengajak para peserta kongres menjauhi bahasa asing dan memusatkan perhatian hanya kepada bahasa Nasional? Oh, jauh dari maksud seperti itu. Ia justru sangat senang melihat pemuda-pemuda giat belajar bahasa asing sebab makin banyak bahasa asing dikuasai oleh orang-orang Indonesia pasti makin halus atau muluslah jalan yang merekaalui untuk mencapai kemajuan. Akan tetapi, gairah dan semangat belajar bahasa asing itu tidak boleh memojokkan atau menurunkan bahasa nasional ke posisi di bawah posisi bahasa asing. Oleh karena kenyataan dewasa ini masih diwarnai secara mencolok oleh kedua jenis kelemahan yang telah ditonjolkan di muka, yakni kelemahan yang dipantulkan oleh penggunaan bahasa Indonesia yang menyalahi aturan-aturan dasarnya yang sangat elementer dan kelemahan yang didemonstrasikan oleh sikap "kebahasa asing-asingan"

tidaklah salah apabila orang mencatat bahwa dewasa ini, yakni sampai akhir Pelita III, bobot dan kadar pengamalan kesadaran akan posisi bahasa Indonesia sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan nasional sangat tidak memadai.

#### **Tantangan Repelita IV**

Tema yang ditetapkan untuk Kongres Bahasa Indonesia IV ini berbunyi "Dengan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Kita Sukseskan Pembangunan Nasional". Setiap kali orang berbicara tentang pembangunan nasional, mau tidak mau ia pasti berbicara juga tentang Pelita yang sedang berjalan dan apabila Pelita yang sedang berjalan itu akan segera berakhir Repelita lanjutannya pasti menjadi sasaran perhatiannya pula. Keadaan seperti inilah yang dewasa ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak lama lagi Pelita III akan berakhir dan kegiatan-kegiatan untuk menyusun Repelita IV telah dimulai. Di bidang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia Bab II kertas kerja ini telah melukiskan secara kualitatif hasil yang telah tercapai. Jelas, para penanggung jawab di bidang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, dibantu oleh orang-orang lain yang berminat, menghadapi tantangan yang cukup berat di dalam Repelita IV.

Memang tugas pembinaan dan pengembangan itu meliputi pelbagai bidang kegiatan, misalnya bidang pengajaran bahasa, bidang pembakuan aturan, bidang penyuluhan dan lain-lain. Akan tetapi, menurut pendapat penyaji kertas kerja ini tanpa mengurangi arti bidang-bidang kegiatan yang lain, bidang kegiatan yang perlu dicurahi perhatian ekstra ialah bidang kegiatan yang memungkinkan rata-rata orang Indonesia di dalam waktu yang tidak terlalu lama menguasai bahasa Indonesia menurut aturan-aturan dasar/elementernya. Program jangka pendek dan jangka panjang yang lebih mantap perlu disusun. Di dalam penyusunan program ini perbaikan sistem pengajaran bahasa Indonesia di pelbagai lingkungan perlu diberi prioritas tinggi. Kegiatan penyuluhan pun perlu dilipatgandakan. Alangkah baik apabila di tiap-tiap lingkungan kerja ada sukarelawan-sukarelawan "polisi bahasa Indonesia". Setiap orang yang merasa memiliki pengetahuan sekadarnya tentang suatu aspek tertentu penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar wajib membantu orang lain yang sedang ada di dekatnya apabila pada orang lain tersebut tampak kesalahan di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Hubungan atasan-bawahan tidak perlu dipermasalahkan di dalam kegiatan koreksi timbal balik ini. Si A yang kebetulan pada suatu aspek tertentu memiliki bekal yang lebih baik daripada bekal yang dipunyai B tanpa diminta harus mengoreksi B apabila B pada aspek tersebut tampil dengan hal-hal yang salah. Pada aspek tertentu yang lain si B-lah yang harus mengoreksi A karena B memiliki bekal yang lebih daripada bekal yang dipunyai A. Meskipun A,

misalnya, di dalam kedinasan berkedudukan lebih tinggi daripada B, kegiatan saling mengoreksi itu harus dapat dilakukan secara mulus.

Pelafalan yang salah, misalnya *kan* yang dilafalkan *ken*, *tetap* yang dilafalkan *tesep*, *dapat* yang dilafalkan *dapet* patut dicatat sebagai salah satu mata acara di dalam putaran kegiatan koreksi timbal balik itu. Masih ada hal-hal lain yang dapat merindukan kehadiran tata bahasa Indonesia yang baku, kiranya tepat apabila di dalam penyusunan program tersebut pembakuan tata bahasa pun ditempatkan pada barisan terdepan. Mudah-mudahan dengan program yang lebih mantap dan lebih berbobot di dalam waktu yang tidak terlampau lama orang tidak akan membaca atau mendengar lagi kalimat seperti yang ditulis di bawah ini.

a. *Harga eceran daripada bahan baku ini bervariasi...*

b. *Semua orang telah sibuk membantu M, kesibukan mana mengakibatkan...*

Seerti telah diperlihatkan oleh kedua contoh di atas ini, kata *daripada* dan kata *mana* sering digunakan pada tempat yang salah. Sekali lagi, apa yang dikemukakan oleh penyaji kertas kerja ini (dengan menyertakan beberapa contoh) merupakan kenyataan yang menuntut percepatan/penanganan. Kalau penanganan ini tetap berlangsung menurut pola yang berlaku sampai saat ini, orang tidak boleh optimistis akan dapat mencapai hasil yang mengembirakan di dalam waktu yang singkat. Tidak kalah pentingnya dengan penyusunan program untuk memungkinkan rata-rata orang Indonesia di dalam waktu yang tidak terlalu lama menguasai bahasa Indonesia menurut aturan-aturan dasar/elementernya, pengikisan wabah yang sedang melanda sejumlah besar orang Indonesia yang daya tahannya rendah perlu diprogramkan serentak dengan program yang disebut pertama. Akan tetapi, kejutan dengan penerapan sanksi yang serasi kiranya patut dipertimbangkan di dalam penyusunan program pengikisan wabah ini. Adapun yang dilukiskan sebagai wabah tak lain dan tak bukan kegandrungan tersesat kepada bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.

Pengikutsertaan pemuda di dalam program ini perlu dipertimbangkan secara serius. Pengalaman telah membuktikan bahwa pelbagai masalah yang mula-mula dipandang amat sulit akhirnya terpecahkan juga setelah pemuda mendobraknya. Hendaknya kongres ini pada akhir sidangnya nanti dapat mengambil putusan yang berisi antara lain rekomendasi kepada pemerintah tentang program-program yang disarankan di atas.

### Ringkasan dan Saran

Penyaji kertas kerja melihat pemberian kesempatan untuk menyum-

bangkan pikirannya sebagai suatu kehormatan yang perlu ditanggapinya sebaik mungkin.

Bahasa merupakan penopang kebudayaan suatu bangsa. Bahasa nasional merupakan salah satu butir penting di dalam satu unsur yang turut membentuk kesadaran nasional. Demikian pulalah posisi bahasa Indonesia terhadap bangsa Indonesia.

Kenyataan bahwa masih cukup banyak orang Indonesia yang tidak/kurang mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar menurut aturan-aturan dasar/elementer dan masih banyak orang Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia pada posisi di bawah posisi bahasa asing (khususnya bahasa Inggris) membuktikan bahwa bobot dan kadar pengamalan kesadaran akan posisi bahasa Indonesia di dalam pembentukan bangsa dan pembentukan watak tidak memadai.

Repelita IV perlu diisi dengan program yang lebih mantap untuk menutup kekurangan-kekurangan yang masih menandai akhir Pelita III.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barentsz, J. *Inleiding Tot de Wetenschap der Politiek.*  
Bouman. *Grondslagen der Samenleving.*  
Dekker, E. Douwes, *Max Havelaar*  
Hertz, Frederick. *Nationality in History and Politics.*  
Praeger, A. Frederick. 1963. *National Security-Political Military and Economic Strategics in the Decade Ahead.* New York.  
William, Colliens. *Inter Encyclop of The Social Sciences.*

## MARI KITA LAKSANAKAN CITA-CITA Sumpah Pemuda

Samsuri  
IKIP Malang

### Pengantar

Bagian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang menyatakan bahasa Indonesia dijunjung sebagai bahasa kesatuan bangsa Indonesia, merupakan suatu pemecahan masalah kebahasaan nasional yang cemerlang bagi kita, sekaligus menunjukkan betapa gandrungnya pendiri-pendiri negara Republik Indonesia pada waktu itu akan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Bahasa Indonesia itu diinginkan sebagai alat komunikasi antarsuku dan sekaligus alat kebudayaan yang tunggal. Pemecahan masalah bahasa kesatuan/persatuan itu demikian pentingnya sehingga kita sekarang ini terlepas dari malapetaka perpecahan karena bahasa kesatuan/persatuan, seperti yang masih terdapat di berbagai negara biarpun negara-negara itu telah lama mengenyam kebahasaan politik.

Masalah bahasa memang merupakan hal yang sensitif, dan hal itu dapat dilihat pada berbagai peristiwa keguncangan politik karena soal bahasa (nasional). Di Filipina, yang dari jauh kelihatan tenang, di dalam negeri sendiri tidaklah demikian mengenai soal bahasa nasional itu. Suku-suku yang tidak berbahasa Tagalog, yang dijadikan bahasa nasional Filipina dengan nama Pilipino, baik secara terang-terangan maupun tidak banyak yang menyangsikan kebijaksanaan pemilihan bahasa itu sebagai bahasa nasional, dan mereka itu sering menyatakan bahwa bahasa Inggris cukup baik dipakai sebagai bahasa pemerintahan, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Di India tidak jarang terjadi huru-hara karena tiap daerah mempunyai bahasa daerah

yang diresmikan sebagai bahasa resmi daerah itu di samping bahasa Hindi biarpun bahasa Inggris masih tetap memegang peranannya sebagai alat komunikasi nasional. Bahasa Inggris di India telah demikian dalamnya tumbuh di masyarakat sehingga orang-orang India sendiri mengandaikan sebuah bahasa Inggris dialek India, yaitu bahasa Inggris yang mereka pakai. Orang-orang Tamil, umpamanya, mempertanyakan kelebihan bahasa Hindi atas bahasanya, yaitu bahasa Tamil, yang secara tertulis dan lisan mempunyai tradisi sastra yang sangat tinggi. Bahkan, dalam negara yang tampaknya mantap, seperti Kanada, masalah bahasa Perancis yang dianggap bahasa Kedua di Kanada, sedangkan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama dalam komunikasi negara itu, sering menimbulkan perdebatan dan keributan politik di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya berbahasa Perancis. Demikian beberapa contoh masalah kebahasanasionalan di negara-negara yang kurang beruntung dibandingkan dengan negara kita.

Bahasa merupakan alat atau wahana kebudayaan, dan bahasa Indonesia ialah alat atau wahana kebudayaan Indonesia. Terdapat hubungan yang erat sekali antara perkembangan bahasa dan perkembangan kebudayaan yang diwahanainya. Dapat dinyatakan di sini bahwa bahasa dan pemakaiannya merupakan cermin kebudayaan itu. Yang menjadi masalah ialah bahwa bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang berkembang mengikuti perkembangan kebudayaan dari tahap yang satu ke tahap yang lain, seperti bahasa Inggris, yang terus mengikuti perkembangan Inggris dari zaman primitif, melalui zaman kebangkitan dan berbagai zaman praindustri, sampai pada zaman industri atau modern sekarang ini. Kebudayaan Indonesia sendiri seakan-akan muncul dan diinginkan sebagai kebudayaan modern dalam masyarakat modern dengan pendidikan tingginya, ilmu pengetahuan dan teknologi modern, pemerintahan modern, pendek kata seluruh kehidupan dalam masyarakat itu lebih banyak dipengaruhi oleh nalar daripada emosi. Karena bahasa Indonesia boleh dikatakan ditempel dari bahasa yang boleh dikatakan mewahanai kebudayaan praindustri, khususnya prailmiah, bahasa nasional kita benar-benar mempunyai misi yang berat karena harus berkembang secara luar biasa, dapat menjadi alat kebudayaan modern dalam masyarakat modern. Beribu-ribu konsep baru harus diserap, di samping harus tegak sebagai bahasa Indonesia yang ditempel dari bahasa Melayu. Lagi pula, ber-puluh juta warga negara Indonesia tidak mendapat pendidikan bahasa Indonesia yang baik sehingga di sini pun bahasa Indonesia menjadi "bulan-bulan" pemakainya. Hal itu ditambah pula oleh keadaan masyarakat Indonesia yang secara psikologis tidak menguntungkan perkembangan bahasa Indonesia, yaitu bahwa masyarakat Indonesia cenderung tipis sekali disiplinnya. Pengaruh timbal-balik antara perkembangan kebudayaan dan bahasa Indonesia sangat merugikan perkembangan bahasa Indonesia sendiri.

Apabila kita berbicara tentang bahasa Indonesia seakan-akan kita hanya menghadapi sebuah bahasa Indonesia saja, padahal sebenarnya ada beberapa bahasa Indonesia, atau berbagai dialek bahasa Indonesia, di samping bahasa Indonesia baku. Pada hemat penulis, bahasa Indonesia baku ialah bahasa Indonesia yang dicita-citakan oleh Sumpah Pemuda, yaitu bahasa yang mempersatukan suku-suku yang terdapat di Indonesia menjadi sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dengan kata lain, bahasa Indonesia baku ialah bahasa Indonesia yang dipakai oleh semua warga negara Indonesia, yang dalam komunikasi tidak atau sedikit mungkin menimbulkan salah paham. Oleh karena itu, bahasa Indonesia baku ialah bahasa Indonesia yang sedikit terpengaruh oleh bahasa daerah dan bahasa asing sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan salah paham. Sebuah contoh. Seorang Jawa berasal dari Klaten, Jawa Tengah, datang ke Jakarta dan bertemu kawan lamanya, seorang yang berasal dari Ujung Pandang. Orang dari Klaten itu banyak urusannya di Jakarta, dan karena itu berkata kepada kawannya itu, "Besok saja saya datang ke rumahmu karena sekarang ini saya masih sibuk." Keesokan harinya sang kawan lama dengan keluarganya mengelu-elukan kedatangan kawan dari Klaten itu, tetapi berapa pun lamanya ditunggu, kawan dari Klaten itu tidak kunjung datang hari itu. Orang Klaten itu bukanlah pembohong, tetapi karena bahasa Indonesianya memakai kata *besok* dengan pengertian bahasa Jawa 'kelak', terjadilah kerusakan komunikasi. Demikianlah pengaruh bahasa daerah, yang mungkin kecil saja, dapat merusakkan komunikasi. Oleh karena itu, kalimat yang dipakai orang dari Klaten itu tidak termasuk bahasa Indonesia baku.

Mungkin banyak orang Indonesia yang terpelajar tidak memperoleh pendidikan bahasa Indonesia secara formal, tetapi mereka sebagai warga negara Indonesia dibebani kewajiban untuk segera mungkin menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat pada bahasa Indonesia maupun pada pemakaiannya. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu merupakan ciri warga negara Indonesia yang baik dan ciri orang Indonesia terpelajar, yang mempunyai tanggung jawab kesatuan dan persatuan bangsa. Di negara-negara yang telah berkembang, seperti Amerika Serikat atau Inggris, setahu penulis semua warga negara yang terpelajar mempunyai ciri penguasaan bahasa Inggris yang baku. Terlebih yang menduduki jabatan yang cukup tinggi mempunyai kewajiban untuk memakai bahasa Inggris yang baku dan baik. Pada hemat penulis, kewajiban semacam itu terlebih lagi diletakkan pada kita sebagai warga negara yang sedang berkembang untuk menguasai bahasa Indonesia baku. Kita mestilah mempunyai kebanggaan untuk menguasai dan menggunakan bahasa Indonesia baku, sebagai alat komunikasi yang mengacu ke kebudayaan

nasional, di samping penguasaan kita akan bahasa Indonesia yang tidak baku. Hal-hal yang dijelaskan di atas ini semua adalah imperatif, hal-hal yang seharusnya kita lakukan dalam masyarakat kita yang sedang membangun ini, tetapi bagaimana kenyataannya?

### Penguasaan dan Penggunaan Bahasa Indonesia

Secara kebahasaan (kontrastif) tidak ada alasan bagi orang-orang Indonesia untuk tidak menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perbedaan struktural antara bahasa-bahasa daerah dan bahasa Indonesia tidaklah jauh benar, seperti perbedaan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, baik dalam bidang fonologi, pembentukan kata, maupun bidang tata kalimat. Beberapa contoh adalah sebagai berikut. Ucapan kata-kata *akan*, *datang*, dan *menerangkan* kiranya dapat dilakukan dengan baik oleh siapa pun, termasuk anak-anak di sekolah taman kanak-kanak. Akan tetapi, alih-alih ucapan yang sederhana seperti kata-kata di atas, orang-orang Indonesia tertentu mengucapkan sebagai *aken*, *dateng*, dan *menerangkan*, yang mengingatkan kita akan ucapan bahasa Indonesia yang dipakai dalam suasana tertentu, umpamanya di pasar. Jadi, bukanlah bahasa Indonesia baku. Penulis menyadari bahwa pengaruh ucapan bahasa daerah memang besar, tetapi tidaklah sedemikian besarnya sehingga kita tidak dapat mengucapkan bunyi-bunyi bahasa Indonesia itu sesuai dengan kaidah-kaidah fonologi bahasa Indonesia. Jika orang-orang yang mengucapkan kata-kata di atas sebagai *aken*, *dateng*, dan *menerangkan* dapat mengucapkan kata *makan*, *sarang*, *merayakan* sesuai dengan kaidah-kaidah fonologi bahasa Indonesia, sebenarnya tidak ada alasan mereka itu mengucapkan kata-kata di atas menyimpang dari kaidah-kaidah fonologi bahasa Indonesia.

Demikian pula dalam bidang tata bahasa, sebenarnya perbedaan antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia tidak besar biarpun memang ada. Dengan sedikit usaha di pihak pemakai bahasa Indonesia, kami yakin pemakai bahasa Indonesia dengan baik. Pembentukan kata-kata seperti *menerapkan* dan *penerapan* dari kata *terap*, umpamanya, tidaklah di luar kemampuan pemakai bahasa Indonesia pada umumnya sehingga orang tidak perlu geleng-geleng melihat bentuk *mentrapkan* atau *mengetrapkan*, dan *pentrapan* atau *pengetrapan* karena pemakai bahasa Indonesia pada umumnya dengan mudah dapat membentuk kata-kata *menerangkan* dan *penerangan*, dari kata *terang*, dan bukanlah *mentrangkan* atau *mengetrangkan*, dan *pentrangan* atau *pengetrangan*. Demikian pula pembentukan kalimat-kalimat sederhana seperti 1—3 di bawah ini.

1. Dengan tim penyusun yang baru tersebut menghasilkan beberapa perubahan, antara lain ....<sup>1)</sup>

2. *Kepada peserta dikenakan biaya pameran sebesar 350.000 rupiah.<sup>1)</sup>*
3. *Kita harus berusaha memperbesar terhadap peningkatan ekspor komoditi non-BBM.<sup>1)</sup>*

mestinya dapat dikerjakan tanpa kesukaran dan kesalahan karena kebanyakan struktur bahasa daerah tidak berapa berbeda dari struktur bahasa Indonesia. Alih-alih kalimat 1–3 di atas, pemakai bahasa Indonesia dapat dengan mudah mengatakan (menuliskan):

- 1a. *Tim penyusun yang baru tersebut menghasilkan beberapa perubahan, antara lain....*
- 2a. *Peserta dikenakan biaya pameran sebesar 350.000 rupiah.*
- 3a. *Kita harus berusaha memperbesar peningkatan ekspor komoditi non-BBM*

Mungkin dalam bahasa lisan terdapat pengucapan kalimat-kalimat 1–3 di atas karena dalam bahasa lisan orang mudah membuat kesalahan kecil seperti kerancuan atau kontaminasi, pemakaian kata depan yang kurang tepat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang penulis kutip di atas berasal dari majalah dan siaran TVRI, yang dibacakan oleh seorang pejabat. Dengan kata lain, ketiganya adalah kalimat-kalimat tertulis sehingga kesalahan kecil seperti di atas dapat dengan mudah dihindarkan.

Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa kemungkinan penulis-penulis kalimat-kalimat di atas itu kurang berpendidikan. Baiklah kami ambil beberapa kalimat yang kami kutip dari laporan akhir penelitian berbagai sarjana yang belajar di perguruan tinggi di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti berikut.

4. *Pada bagian di atas (III–IV) memberikan gambaran betapa pentingnya peranan Karjeng Panembahan Cokrodiningrat.*
5. *Dalam masyarakat yang sedang berkembang ada kecenderungan memiliki tingkat fertilitas yang tinggi.*
6. *Dua aliran besar yang mendominasi pemikiran sosiologi modern, yaitu aliran fungsional dan aliran konflik, saling memiliki kelemahan di samping kekuatannya masing-masing.*

Pada kalimat (4) terdapat kelebihan kata depan *pada*; pada (5) diselipkan kata *bahwa penduduk* di antara kata *kecenderungan* dan kata *memiliki*, atau terdapat kelebihan kata depan *dalam* diganti kata *ada* dengan awalan *ber*; sedangkan pada (6) kata *saling* perlu diganti dengan kata *sama-sama*. Tampaklah kesalahan-kesalahan kecil sebenarnya, tetapi karena pemakai-pemakainya adalah sarjana-sarjana kesilapan itu menjadi sangat besar.

Namun, hendaklah kita ingat bahwa penulisan sebuah karangan, betapa-

pun pendeknya tidak hanya berurusan dengan pembentukan kata-kata dan kalimat-kalimat saja. Dari bacaan penulis yang berupa laporan-laporan akhir penelitian yang dihasilkan oleh Proyek Penelitian Madura, yang kami koordinasikan, terdapat kekeliruan tentang penggunaan kata depan, pembentukan kata dan kalimat, sampai pada soal-soal verbositas, tautologi, dan lain sebagainya. Apabila Dr. Sunardji dalam disertasinya, *Pengajaran Mengarang di SMP*, menganjurkan perbaikan-perbaikan, kami terpaksa berpendapat bahwa pelajaran mengarang di perguruan tinggi masih diperlukan sekali.

Perlu kami nyatakan di sini bahwa dari pengamatan penulis tentang penggunaan bahasa Indonesia pemakaian bahasa nasional kita mengalami kenaikan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang pertama dapat dilihat pada pemakaian bahasa Indonesia oleh rakyat kita di desa-desa dan bertambahnya penerbitan majalah dan koran baru selama lima tahun terakhir ini. Adapun peningkatan kualitas dapat dilihat pada penggunaan bahasa Indonesia yang relatif baik dalam majalah-majalah dan surat-kabar. Majalah *Tempo*, umpamanya, menggunakan bahasa Indonesia yang cukup baik. Demikian juga majalah *Optimis*, biarpun editorialnya kadang-kadang memakai bahasa Indonesia yang penulis kualifikasikan sebagai *kolokial* karena memakai kata-kata seperti *lha*, *sepertinya*, *repotnya*, *yang namanya*, yang merupakan pungutan (terjemahan) dari bahasa Jawa. Rupanya media massa kita telah sadar bahwa pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu sekali bagi pembinaan penguasaan bahasa Indonesia oleh rakyat kita, khususnya yang belum pernah memperoleh pendidikan bahasa Indonesia yang baik. Namun, penulis tidak dapat menerangkan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia oleh RRI dan TVRI karena kecuali penulis tidak selalu mengikuti karena program-programnya tidak menarik, penulis tidak mempunyai data observasi yang cukup. Hanya bahasa Indonesia yang dipakai oleh penyiar-penyiar, khususnya pembaca-pembaca berita, penulis rasa masih perlu ditingkatkan. Bentukkan kalimat-kalimat, seperti pemakaian kata depan *terhadap*, *daripada*, dan lain-lain yang keliru, ucapan dan khususnya intonasi sangat kurang menunjukan bahasa Indonesia yang baku.

Apabila penggunaan bahasa Indonesia dalam majalah-majalah dan koran-koran (tertentu) boleh dikatakan cukup baik, bagaimana penggunaan bahasa nasional kita dalam bidang lain? Memang agak mengejutkan bahwa ternyata penggunaan bahasa Indonesia oleh kebanyakan sarjana kita masih kurang baik. Paling tidak dari laporan-laporan akhir penelitian dan dari makalah-makalah seminar yang diadakan oleh Proyek Penelitian Madura, kami terpaksa menyimpulkan hal di atas. Tentulah dapat diperdebatkan, apakah data yang penulis miliki itu mewakili penguasaan bahasa Indonesia para sarjana seluruh Indonesia. Penulis sendiri ingin menjawab, mudah-mudahan

tidak karena kami ingin sekali sampai pada suatu kesimpulan bahwa bahasa Indonesia para sarjana Indonesia benar-benar dapat dibanggakan. Hal ini ada sangkut-pautnya dengan tugas para sarjana di perguruan tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila bahasa yang dipakai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidak baik, bagaimana kita dapat mengharapkan pertumbuhan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kita?

Penulis agak masgul melihat penggunaan bahasa Indonesia oleh para pejabat pada umumnya, yang diwawancarai TVRI dan disiarkan melalui media massa itu. Tampak dengan nyata penguasaan bahasa Indonesia lisan pejabat-pejabat itu kurang baik. Dengan sengaja hal ini tidak banyak kami kemukakan karena data bahasa para pejabat itu tidak dapat kami peroleh, tetapi seandainya pernyataan kami itu dibantah, sebenarnya dengan mudah kita dapat menyaksikan penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik itu, khususnya pada siaran berita jam tujuh malam, yang oleh beberapa orang disebut "Siaran Pejabat" karena TVRI selalu mengemukakan berita-berita mengenai pejabat-pejabat, dari Presiden, melalui para menteri dengan Dirjen-Dirjennya, sampai dengan para gubernur. Pemakaian bahasa Indonesia yang kurang membanggakan itu merangkum pula pembacaan "laporan keberhasilan tugas", jadi penggunaan bahasa Indonesia tulisan, oleh para pejabat itu. Apabila apa yang kami lihat itu betul, yaitu bahwa contoh yang diberikan oleh kebanyakan pejabat tinggi dan oleh kebanyakan cerdik pandai kita dalam pemakaian bahasa Indonesia itu kurang membanggakan, kami takut bahwa apa yang biasa disebut dengan "generasi penerus" tidak dapat memetik contoh kedisiplinan yang tinggi dalam penggunaan bahasa Indonesia, dan penguasaan "generasi penerus" akan bahasa Indonesia itu kelak malahan lebih buruk.

Hal yang mengecewakan di atas itu tentang penguasaan bahasa Indonesia tidak dikurangi oleh masih banyaknya orang Indonesia yang suka memasukkan kata-kata asing dalam bahasa Indonesia mereka biarpun kata-kata dan konsep-konsepnya dalam bahasa Indonesia terdapat pula. Keadaan itu lebih diperburuk oleh penggunaan kata-kata, nama-nama dan semboyan-semboyan dari bahasa asing, seperti dari bahasa Sanskrit, yang jelas menunjukkan ketidaknasionalan. Kita hendaknya ingat bahwa pemakaian kata-kata, nama-nama, dan semboyan-semboyan dalam bahasa Indonesia akan jauh merasuk ke dalam hati sanubari kita daripada kata-kata, nama-nama, dan semboyan-semboyan asing yang tidak kita pahami itu. Hal itu semua memang menyangkut sikap masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia dan penggunaannya, yang akan kami uraikan di bawah ini.

## Sikap Masyarakat Indonesia terhadap Bahasa Indonesia

Telah kami jelaskan bahwa terdapat hal-hal yang menggembirakan pada pemakaian bahasa Indonesia, baik secara kuantitatif, yaitu dengan peningkatan jumlah pemakai bahasa nasional kita, khususnya di desa-desa, maupun secara kualitatif, yaitu dengan peningkatan disiplin dalam menerapkan kaidah-kaidah pemakaian bahasa Indonesia baku, khususnya oleh majalah-majalah dan koran-koran tertentu. Sayangnya masih terdapat lebih banyak sektor masyarakat kita yang penguasaan dan penggunaannya akan bahasa nasional kita belum dapat dibanggakan. Jelas kiranya bahwa hal itu mencerminkan sikap masyarakat kita yang kurang positif terhadap bahasa Indonesia baku dan pemakaiannya.

Kita ketahui bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional termasuk salah satu bagian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan yang sejelas-jelasnya diinginkan agar bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempersatukan berbagai suku bangsa menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Namun, dalam GBHN tahun 1978 maupun tahun 1983 tidak terdapat bahasa Indonesia sebagai unsur penting Wawasan Nusantara, sedangkan Wawasan Nusantara pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat persatuan/kesatuan kita.<sup>2)</sup> Hal itu pun merupakan cermin pula betapa sikap masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Jika wakil-wakil rakyat yang terhormat tidak lagi merasa perlu untuk memakai bahasa Indonesia sebagai simpai persatuan dan kesatuan kita, dapatkah kita mengharapkan masyarakat Indonesia akan menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta menggunakannya sesuai dengan kaidah-kaidahnya?

Dalam keadaan kebudayaan kita, baik bidang politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, administrasi, keamanan, dan lain sebagainya berjalan dengan disiplin yang minim, mau tidak mau alatnya, yaitu bahasa Indonesia mencerminkan pemakaian yang setara pula, yaitu dengan disiplin yang minim. Yang menjadi masalah dalam penggunaan bahasa Indonesia sekarang ialah dapatkah kita biarkan apa yang biasa disebut dengan "generasi penerus" mewarisi nilai ini, yaitu kedisiplinan pemakaian bahasa Indonesia yang rendah, dari apa yang biasa disebut dengan "generasi perintis"? (yang sebenarnya merupakan konsekuensi saja dari rendahnya disiplin kehidupan kita pada umumnya!). Penggunaan bahasa oleh anak-anak kita tidak dapat "keluar" dari penggunaan bahasa dalam masyarakat, yang merangkul keluarga, sekolah, dan masyarakat pada umumnya. Di sekolah mungkin ibu dan bapak guru berusaha meningkatkan dan membina pemakaian bahasa murid-muridnya, tetapi waktu di luar sekolah pemakaian bahasa itu tidak lagi dikendalikan oleh para guru sehingga mau tidak mau bahasa yang dipakai oleh murid-murid itu tidak (jauh) berbeda dari bahasa yang dipakai oleh masyarakat

umum. Hal itu akan demikian, jika semua guru menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tetapi jika hanya guru-guru bahasa Indonesia saja yang menguasai bahasa nasional kita dengan baik dan benar, akibatnya akan lebih buruk lagi bagi penguasaan bahasa Indonesia oleh murid-murid sebab hanya dalam jam-jam pelajaran bahasa Indonesia saja anak-anak kita menggunakan bahasa nasional dengan baik dan benar, sedangkan waktu selebihnya penggunaan bahasa Indonesia mereka tidak terkendalikan dan memakai dan meniru bahasa yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya.

Seperti penulis uraikan di atas, dari laporan-laporan akhir penelitian sarjana-sarjana di perguruan tinggi di Jawa Timur dan Jawa Tengah penulis mendapat gambaran bahwa penguasaan bahasa Indonesia oleh kebanyakan dosen-dosen kita di perguruan tinggi tidak dapat dikatakan menggembirakan. Pertanyaan yang segera timbul ialah, bagaimana dengan bahasa Indonesia para mahasiswa kita? Kami hanya mendengar dari rekan-rekan yang biasa membimbing penulisan tesis atau skripsi bahwa bahasa Indonesia para mahasiswa kurang baik, dan karena itu mata kuliah mengarang mesti diberikan, tidak saja di tingkat pertama, melainkan sebaiknya selama pendidikan mereka di perguruan tinggi itu. Sikap kebanyakan dosen dan mahasiswa terhadap bahasa Indonesia dan pemakaiannya mestilah diubah jika masyarakat kita menginginkan melepaskan diri dari ketidakbebasan dari dunia luar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka itu hendaklah sadar benar bahwa penguasaan bahasa Indonesia merupakan *conditio sine quanon* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, yang dibebankan oleh GBHN pada perguruan tinggi. Jalan menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia hanya satu, yaitu melalui penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Orang dapat mengumpulkan pengetahuan yang berlimpah-limpah melalui bahasa asing, tetapi bagaimana mengembangkannya di Indonesia?

Bagaimana sikap para orang tua terhadap bahasa Indonesia dan penggunaannya penulis tidak dapat berbicara karena penulis tidak mempunyai data tentang hal itu, atau tidak pernah mengadakan observasi tentang sikap orang tua Indonesia terhadap bahasa Indonesia dan penggunaannya. Orang tua yang masih berpegang teguh pada kebudayaan daerah agaknya akan menghendaki putera-puterinya untuk memakai bahasa daerah, alih-alih bahasa nasional, dan karena itu penggunaan bahasa Indonesia akan terlihat sangat sedikit dalam keluarga-keluarga seperti itu. Namun, karena koran-koran banyak yang dicetak dalam bahasa Indonesia, ada kemungkinan anak-anak dalam keluarga seperti di atas itu masih menggunakan bahasa Indonesia biarpun secara pasif. Di samping itu, media massa yang lain, yaitu RRI dan TVRI, akan memainkan peranannya pula dalam memberikan kesempatan

kepada anak-anak di rumah untuk mendengarkan bahasa Indonesia. Warga negara yang modern akan mengusahakan penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang seimbang di rumah, dalam arti diskusi-diskusi yang mungkin diadakan di keluarga diadakan dalam bahasa Indonesia, sedangkan hal-hal yang boleh dikatakan bersifat kebudayaan daerah dibicarakan dalam bahasa daerah. Untuk mengetahui lebih tepat lagi memang diperlukan penyelidikan sosiolinguistik tentang pemakaian bahasa di keluarga-keluarga di Indonesia. Dalam hal ini, khususnya untuk membina penguasaan bahasa Indonesia di dalam keluarga, peranan buku-buku dalam bahasa Indonesia sangat penting, dan sekaligus kebiasaan membaca dapat dipupuk dengan baik, yang merupakan modal dalam menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Harapan-harapan

Sebenarnya kita boleh mengucapkan syukur bahwa media massa yang penting, yaitu majalah dan koran, telah sadar akan fungsinya dalam memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengingat luasnya daerah penyebaran koran dan majalah itu, kita boleh menilai bahwa kira-kira sepertiga dari masalah kita telah terpecahkan. Apabila pada waktu yang sama RRI dan TVRI mengikuti contoh yang baik itu dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pula, kita dapat mengatakan bahwa 50% masalah penguasaan bahasa Indonesia dapat dipecahkan. Mudah-mudahan Departemen Penerangan dengan menterinya yang masih muda dan sangat gesit itu segera mengikuti jejak majalah dan koran kita. Apabila BBC di Inggris dapat menghidangkan bahasa Inggris yang bagus melalui penyiar-penyiarannya, pembaca-pembaca warta beritanya, melalui wartawan-wartawannya yang terkenal berbahasa Inggris yang bagus dan bersih dari kesalahan, sehingga akhirnya dianggap oleh umum bahwa bahasa Inggris baku ialah bahasa Inggris BBC, tentulah Departemen Penerangan kita dapat berbuat yang sama dalam memelihara penggunaan bahasa Indonesia, yang tidak saja baik dan benar, tetapi juga bagus. Siapa tahu bahwa kelak masyarakat kita sampai ke kesimpulan bahwa bahasa Indonesia baku ialah bahasa Indonesia Departemen Penerangan?

Bagaimana dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kita? Tentulah kita akan merasa "risi", jika seandainya jajaran Depdikbud (Masyallah!) akan ketinggalan dalam memelihara disiplin penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika demikian, lalu masyarakat akan bertanya, apa gunanya Depdikbud memelihara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Maafkan, kami tidak tahu akronimnya!)? Kami berharap agar paling tidak para guru (semua guru, dan tidak hanya guru bahasa Indonesia) dan

para dosen (termasuk dosen bahasa Indonesia!), serta semua pejabat, dari Menteri Depdikbud sampai ke kepala-kepala sekolah dasar, dan dari rektor sampai ke ketua-ketua jurusan, tidak saja menggunakan bahasa lisan, tetapi juga bahasa Indonesia tulisan yang baik dan benar. Jika hal itu tercapai, penulis yakin bahwa para murid dan mahasiswa, yang merupakan apa yang disebut "generasi penerus", akan mengikuti jejak "generasi perintis" untuk memiliki disiplin pemakaian bahasa Indonesia yang setinggi-tingginya. Hanya dengan demikian kita dapat nanti mengatakan bahwa pekerjaan pendidikan kita berhasil biarpun baru dalam bidang pendidikan penguasaan bahasa Indonesia baku saja.

Yang berikut ialah dalam bidang politik, yaitu pemerintahan dan perwakilan rakyat. Dari Presiden sampai dengan lurah di seluruh Indonesia orang mestilah memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Para menteri dan seluruh jajarannya sampai eselon yang serendah-rendahnya, pendek kata seluruh aparatur pemerintahan, mesti menerapkan disiplin yang tinggi dalam penggunaan bahasa Indonesia baku, mungkin sebagai latihan untuk menerapkan disiplin dalam berbagai bidang tugas mereka. Di balik itu, kadar tinggi rendah disiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia baku akan menunjukkan ketinggian disiplin mereka dalam berbagai tugas mereka. Demikian pula para wakil rakyat yang terhormat di MPR dan DPR, baik pusat maupun daerah I dan II, semuanya mesti menjadi contoh bagi yang mewakilinya dalam disiplin mereka untuk memakai bahasa Indonesia baku agar dengan mudah dicontoh oleh para rakyat yang memerlukan teladan bagaimana membangun tanah air dan bangsa ini, termasuk pembangunan bahasa nasional yang tidak boleh dilupakan seumur hidupnya. Pidato-pidato para wakil rakyat yang terhormat mestilah dalam bahasa Indonesia baku, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan sesuai dengan santun bahasa Indonesia.

Mungkin ada orang yang bertanya, apa yang diperlukan, informasi yang jelas biarpun bahasa Indonesianya kurang, atau bahasa Indonesia yang baik, tetapi informasinya kurang jelas? Jawaban penulis sampaikan informasi yang benar dan jelas dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti telah penulis singgung di atas, bahasa Indonesia ada beberapa ragamnya. Kaidah-kaidah santun bahasa ialah penggunaan bahasa sesuai dengan situasi wacana. Pada waktu seorang Dirjen menjelaskan masalah kepada orang-orang di pasar, situasinya berbeda dengan sang Dirjen itu memberi keterangan kepada para mahasiswa di sebuah kampus. Dalam keadaan begitu sang Dirjen mestilah tahu memakai bahasa yang mana. Akan tetapi, kelirulah dia apabila dalam dua situasi yang berbeda itu sang Dirjen memakai bahasa Indonesia yang sama saja.

Kami kira tidak perlu kami jelaskan bahwa peningkatan disiplin dalam

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menyangkut seluruh rakyat, khususnya yang telah mengenyam pendidikan, baik formal maupun nonformal. Kita mesti selalu ingat pameo: bahasa menunjukkan bangsa. Artinya, orang dapat dilihat tinggi rendah budi pekertinya dari bahasa yang dipakainya. Bahasa seorang pejabat yang tinggi tentulah berbeda dari bahasa orang gelandangan. Namun, Sumpah Pemuda tahun 1928 ditujukan kepada semua rakyat Indonesia, yang amanatnya ialah pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar karena bahasa Indonesia ialah pemersatu bangsa.

#### Catatan

- (1) Dua kalimat pertama itu penulis ambil dari majalah *Optimis*, No. 43, Agustus 1983, sedangkan yang ketiga ialah sebuah berita dari TVRI.
- (2) Surat penulis bertanggal 12 April 1983 kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang mengingatkan tidak termuatnya bahasa Indonesia dalam GBHN 1978 sebagai unsur penting Wawasan Nusantara, dan reformulasi kami tentang pasal 1,b dan 2,b dalam Wawasan Nusantara, untuk juga menunjukkan erat hubungan antara bahasa Indonesia, sebagai alat kebudayaan, dan kebudayaan Indonesia, termasuk bidang politik, dijawab oleh Sekretaris Jenderal MPR dengan suratnya 18 April 1983, yang menyatakan bahwa saran kami akan diteruskan kepada Badan Pekerja MPR yang akan bertugas menyusun Rancangan Ketetapan MPR tentang GBHN Periode 1988–1993 yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kridalaksana, Harimurti. 1974. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Ende-Flores: Penerbit Nusa Indah.
- Pride, J.B. dan Janet Holmes (ed.). 1972. *Sociolinguistics*. Penguin Books.

## BAHASA INDONESIA DAN BAHASA DAERAH DILIHAT DARI SEGI SOSIOPOLITIKOLINGUISTIK

Jos. Daniel Parera  
IKIP Jakarta

### Pendahuluan

Kenyataan akan adanya beberapa bahasa atau kelompok bahasa dalam satuan daerah geografis atau dalam satu ikatan persatuan berbentuk negara akan membawa problem dalam daerah dan persatuan itu sendiri. Problem itu memerlukan pemecahan dan pengambilan kebijaksanaan yang tepat untuk memelihara antarhubungan yang baik dan wajar di antara para penutur bahasa-bahasa tertentu itu. Problem dan tindakan kebijaksanaan yang dihadapi dapat dibedakan sebagai berikut.

- a. Problem dan tindakan politik: pada satu saat diperlukan satu tindakan untuk menghadapi problem nasional dalam soal komunikasi berbahasa. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas ditentukan salah satu di antara pelbagai bahasa yang hidup dalam daerah kesatuan itu menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional dan atau bahasa resmi. Tindakan ini tergolong dalam tindakan politik. Dalam uraian selanjutnya akan tampak bagaimana tindakan politik dalam soal bahasa ini dilaksanakan berdasarkan beberapa pertimbangan dan dengan pelbagai cara.
- b. Problem dan tindakan sosiolinguistik: Berdasarkan tindakan politik tersebut di atas, akan ada dan terjadi pergeseran sosial dalam berbahasa sebagai kelanjutan perbedaan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan agama para pendukung bahasa-bahasa tersebut di atas itu. Tindakan politik juga

berdasarkan tingkah laku sosial masyarakat berbahasa antarsesamanya. Uraian penulis selanjutnya akan menjelaskan maksud problem dan tindakan sosiolinguistik ini.

- c. Problem dan tindakan linguistik: Kenyataan adanya beberapa bahasa dalam satu daerah geografis atau satu bentuk kesatuan negara akan membawa pula problem linguistik atau bahasawi. Adanya variasi bahasa dan pemakaian dalam tutur sebagai hasil interferensi dan juga sebagai satu dorongan naluriah untuk menyesuaikan diri dalam tindakan berbahasa antara sesama kelompok yang berbeda bahasa.

Keseluruhan tindakan, dalam menghadapi problem tersebut di atas penulis satukan dengan pengertian sosiopolitiklinguistik. Pembicaraan mengenai masalah ini akan lebih berat kepada soal sosial-politik daripada pada soal linguistik. Problem dan tindakan tersebut di atas kiranya telah menjadi kenyataan pula di Indonesia. Walaupun bangsa dan negara Indonesia belum selesai dan belum seluruhnya menjamah problem dan mengambil tindakan tersebut di atas, situasi Indonesia terasa lebih menguntungkan daripada negara yang sedang berkembang lainnya, termasuk negara bangsa tetangga Indonesia.

Salah satu warisan sosial politik yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia ialah sikap patriotik dan penuh kesadaran serta toleransi dari para pejuang bangsa dalam menentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan dan bahasa resmi Republik Indonesia. Untuk itu kedudukan bahasa Indonesia mendapatkan hak yuridis, politik utama dan pertama dengan pengukuhan dalam pasal 36 UUD 1945. Kendatipun demikian, warisan patriotik dan toleransi sering terganggu dan dirasakan belum teguh benar. Untuk beberapa waktu lamanya para pembina dan peminat sosio-politik masih enggan dan waswas membicarakan secara pasti dan bertanggung jawab hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Republik Indonesia. Terkaitlah sudah bahasa dan bangsa, bahasa dan suku, bahasa dan daerah. Pembicaraan dan pembahasan secara linguistik sudah sering diadakan dan sering menjadi objek yang baik bagi para linguis, tetapi setapak demi setapak kelihatan penghindaran dari pembicaraan yang menyangkut masalah hubungan secara sosial dan politik. Patriotisme dan toleransi Angkatan 45 belum terwaris secara dalam pada generasi penerus.

Penulis berpendapat bahwa keberanian dan kesepakatan menghadapi problem dan tindakan sosial politik para pejuang bangsa yang dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 36 dan penjelasannya perlu dibina dan dikembangkan terus. Pembicaraan hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai problem dan tindakan, kebijaksanaan yang ditempuh didasarkan dan

didorong oleh keberanian yang dimiliki oleh para pejuang bangsa, didasarkan pula pada rasa persatuan dan kebangsaan bangsa Indonesia. Ada kemauan politik.

Hal lain yang perlu penulis kemukakan pula dalam pendahuluan ini ialah pembicaraan mengenai problem dan tindakan pengisian pasal 36 UUD 1945 harus dimasalahkan dan dibicarakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia memasalahkannya dalam satu nafas dan satu kerangka, ialah persatuan bangsa. Bangsa Indonesia membicarakan hubungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan tujuan persatuannya dan ia bertanggung jawab atas persatuan itu sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai komitmen terhadap persatuan dan bangsanya. Penulis kemukakan persoalan ini berdasarkan pada pengalaman bahwa sering orang asing secara teoritis membicarakannya pula. Orang asing menghadapi masalah ini sebagai objek ilmu belaka.

Orang asing/sarjana asing tidak terlibat dalam persatuan bangsa. Para sarjana asing akan membicarakannya dari sudut ilmu dan kurang mempunyai motivasi bangsa Indonesia yang tertentu, dan malah mungkin bertentangan dengan tujuan pembicaraan bangsa Indonesia sendiri. Penulis kemukakan ini karena hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Indonesia bukanlah hubungan antara mayoritas dan minoritas. Bangsa Indonesia bukanlah berasal dari bahasa golongan atau suku mayoritas. Di sinilah letak keunikan hubungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dapat penulis katakan bahwa hubungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah adalah hubungan batiniah, hubungan antara persatuan bangsa dan kebangsaan Indonesia.

### **Landasan Hukum**

Untuk memberikan dasar hukum dan dasar persatuan bagi tindakan politik dalam hubungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Indonesia, penulis kutip pasal yang berhubungan dengan itu dalam UUD 1945; penulis kaitkan dengan apa yang dikatakan tentang itu dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lalu penulis beri komentar.

#### **a. Bunyi pasal 32 UUD 1945.**

##### **Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia**

##### **Penjelasan:**

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan

baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

b. Bunyi pasal 36 UUD 1945.

**Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia**

Penjelasan:

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan.

c. GBHN, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, mengenai Kebudayaan Nasional

a) Meningkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan nasional dan kesatuan nasional, termasuk menggali dan memupuk kebudayaan daerah sebagai unsur-unsur penting yang memperkaya dan memberi corak kepada kebudayaan nasional.

b) Membina dan memelihara tradisi-tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai-nilai perjuangan dan kebanggaan serta kemanfaatan nasional untuk mewariskan kepada generasi muda.

c) Pembinaan kebudayaan nasional harus sesuai dengan norma-norma Pancasila.

d) GBHN, Tap MPR Nomor II/MPR/1983, tentang Kebudayaan.

Di samping itu untuk mencegah tumbuhnya nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal, juga ditujukan untuk menanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif serta di lain pihak cukup memberikan masyarakat untuk menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan, selama tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa.

a) Nilai budaya Indonesia, yang mencerminkan nilai luhur bangsa, harus dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan.

b) Kebudayaan nasional terus dibina dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila.

c) Dengan tumbuhnya kebudayaan bangsa yang berkepribadian dan berkesadaran nasional, sekaligus dapat dicegah nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit serta ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif, sedangkan di lain pihak ditumbuhkan

kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaruan dalam proses pembangunan.

- d) Tanggung jawab sosial dan disiplin nasional dibina dan dikembangkan secara lebih nyata, dalam usaha untuk memperkokoh kesetiakawanan nasional, lebih menanamkan sikap mental tenggang rasa, hemat dan sederhana, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan kesatria.
- e) Usaha-usaha pembaruan bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi maupun sosial dan budaya, dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan serta memantapkan ketahanan nasional.
- f) Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar.
- g) Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu sarana identitas nasional.
- h) Dalam pembinaan kesenian perlu dikembangkan tumbuhnya kreativitas seniman yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- i) Pembinaan kesenian daerah ditingkatkan dalam rangka mengembangkan kesenian nasional agar dapat memperkaya kesenian Indonesia beraneka ragam.
- j) Tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional tetap dipelihara dan dibina untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak khas kepada kebudayaan nasional.

#### Uraian dan Komentar Antarhubungan Pasal-pasal dan GBHN

Pasal 32 (mengenai kebudayaan) dan pasal 36 (mengenai bahasa) mempunyai hubungan yang erat. Hubungan itu lebih jelas tampak dalam penjelasan masing-masing pasal. "Kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa", demikian bunyi salah satu kalimat penjelasan pasal 32. "Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan" demikian bunyi sebuah kalimat penjelasan pasal 36 UUD 45.

Karena bahasa merupakan bagian kebudayaan (dengan istilah sekarang salah satu unsur kebudayaan) dan bahasa merupakan alat komunikasi pendukung utama serta perekam kebudayaan sebuah bangsa, suku, marga, pri-

badi dalam bentuk tutur dan sebagainya dan tidak ada bangsa yang tidak mempunyai bahasa (walaupun sangat sederhana). Oleh karena itu, bahasa pun merupakan puncak dari kebudayaan bangsa (di sini daerah-daerah pemilik dan penutur bahasa tertentu) dan merupakan buah usaha budi bangsa (daerah tersebut). Itu sebabnya sebunyi dengan penjelasan pasal-pasal tersebut di atas, bahasa-bahasa daerah yang dihormati dan dipelihara negara, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Juga di sini perlu diisi pengertian dan sebagainya" dalam penjelasan pasal 36 (bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya). Dan sebagainya memuat semua bahasa yang masih mempunyai pendukungnya dan penuturnya dalam wilayah Republik Indonesia. Jika kita membaca GBHN tahun 1983 khusus mengenai kebudayaan nasional, tampak belum ada penghalusan dan pemberian garis besar kebijaksanaan pasal 36 UUD 45 atau mengenai bahasa. Penyebutan bahasa nasional dapat diartikan bahwa bahasa Indonesia hanya menjadi bahasa resmi dalam komunikasi fungsional bangsa Indonesia. Apakah bahasa negara idem dito bahasa nasional? Di lain pihak orang dapat mengatakan sebagai berikut. Bahasa-bahasa daerah di Indonesia adalah bahasa nasional, adalah bahasa bangsa Indonesia, sedangkan salah satu bahasa daerah di sini bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Bagaimana proses ia menjadi bahasa negara tidak perlu dipersoalkan lagi. Semua orang telah tahu.

Jika penulis membaca beberapa undang-undang dasar/konstitusi negara-negara yang mengenal dan mempunyai beberapa bahasa dalam negaranya (dan sering mereka bedakan atas bahasa mayoritas dan minoritas), akan jelas pula bahwa dibedakan antara bahasa nasional dan bahasa negara.

Walaupun konstituante hasil Pemilu Indonesia tahun 1956 telah dibubarkan, penulis masih dapat mencatat salah satu konsep mereka mengenai bahasa. Golongan E dari penggolongan Konstituante dengan nomor urut (10) membuat perumusan mengenai bahasa sebagai berikut.

#### Perumusan Bahasa (No. 12/K/1958)

- a. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia; disertai dengan penjelasan. "Yang dimaksud dengan bahasa negara ialah bahasa resmi, bahasa Kebangsaan bangsa Indonesia"
- b. Pemakaian, pemeliharaan dan perkembangan bahasa daerah diatur dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang. Pemakaian pengertian bahasa nasional mungkin untuk dibedakan dengan bahasa daerah. Sedangkan pemakaian bahasa negara terasa pada pelaksanaan dari atas oleh sebagian orang bukan merupakan atribut terhadap bahasa, melainkan sebuah momen biasa yang dapat digantikan dengan Republik Indonesia. Hubungannya menyatakan hubungan milik dalam arti yang luas. Dalam hubungan

dengan pembicaraan mengenai bahasa daerah penulis mengusulkan pemakaian bahasa nasional sebagai variasi untuk bahasa Indonesia.

### **Kedudukan Bahasa Indonesia dan Konstataasi Kenyataan**

Penataan kembali kedudukan bahasa Indonesia secara geografis, sosiologis terhadap bahasa daerah mungkin masih ada gunanya. Kiranya tidak dapat disangkal bahwa sejak Sumpah Pemuda bahasa Indonesia telah menjalankan fungsinya yang amat penting dalam pernyataan-pernyataan kebangsaan, dan sebagai alat komunikasi sosial dalam perjuangan kesatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan hak juridis politis bahasa Indonesia seperti penulis sebutkan di atas dapatlah dicatat wewenang bahasa Indonesia sebagai berikut.

- a. Bahasa Indonesia mempunyai wewenang dan hak untuk menyebar dan meluas ke seluruh wilayah Republik Indonesia.
- b. Bahasa Indonesia mempunyai wewenang dan hak untuk secara horisontal dan vertikal memasuki strata-strata sosial dan sektor pembedangan apa saja dalam struktur masyarakat Indonesia (sampai lapisan yang paling bawah dan terperinci).

Dengan kewenangan seperti itu penulis masih dapat memberikan beberapa konstataasi sebagai berikut.

- a. Secara geografis dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia telah mencapai seluruh wilayah Republik Indonesia baik melalui sistem pendidikan maupun melalui sistem pemerintahan, pers, radio dan bentuk media massa lainnya.
- b. Akan tetapi, secara sosial dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia belum mencapai sarannya. Ia belum turun sampai lapisan masyarakat, baik tingkat tinggi, menengah maupun tingkat bawah. Dengan pengertian ia belum menjadi bahasa pergaulan/percakapan walaupun dengan pelbagai variasi. Mungkin kenyataan ini tidak/belum secara terbuka diakui, tetapi dalam kebijaksanaan yang terpenggal-penggal ada pengakuan bahwa bahasa Indonesia belum menjamah lapisan-lapisan masyarakat Indonesia secara penuh. Penulis mencatat beberapa kebijaksanaan yang pada satu pihak diterima sebagai unsur penghambat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia akan tetapi pada pihak yang lain diterima sebagai satu kenyataan perlu diperhatikan pula.

Beberapa contoh kebijaksanaan dapat penulis kemukakan sebagai berikut.

- a. Di beberapa daerah pendidikan sekolah dasar selama tiga tahun pertama

- dilaksanakan dalam bahasa daerah; bahasa daerah dipakai sebagai bahasa pengantar. Kebijaksanaan ini tetap masih diterima dan dibenarkan.
- b. Taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak di daerah pun selalu mengantarkan bimbingannya dalam bahasa daerah. Nyanyian diadakan dalam bahasa daerah. Kenyataan ini pun menjalar sampai ke kota besar, seperti Jakarta.
  - c. Bahasa daerah dipergunakan dalam siaran pedesaan.
  - d. Dengan adanya studio televisi di daerah/ibu kota propinsi, diadakan pula siaran daerah baik berupa kesenian maupun penerangan. Lenong di TVRI Jakarta juga mempergunakan dialek Jakarta.
  - e. Adanya izin penerbitan harian dan majalah dalam bahasa daerah. Paling kurang ada pula kolom atau rubrik yang khusus untuk bahasa daerah/karangan dalam bahasa daerah.
  - h. Pengajaran bahasa daerah masih diizinkan dalam beberapa daerah untuk tingkat SMA.
  - i. Pengajaran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dipergiat dan diutamakan.
  - j. Di pesantren-pesantren bahasa Arab telah diajarkan pada permulaan pendidikan dan bahasa Indonesia menjadi nomor dua dalam perhatian anak didik.

Kenyataan di atas ini penulis sebutkan sebagai contoh. Ia merupakan akibat situasi konkret dan juga karena kebijaksanaan yang tertentu pula. Dengan demikian, pengembangan bahasa Indonesia untuk masuk sampai ke lapisan masyarakat berjalan lamban sekali. Kenyataan yang lebih umum menunjukkan bahwa dalam pergaulan antar sesama suku, daerah, terasa lebih akrab, lebih umum, lebih menunjukkan persamaan daripada perbedaan jika dipergunakan bahasa daerah.

Penulis dapat mengatakan bahwa bahasa Indonesia pada dewasa ini baru memenuhi tugasnya sebagai bahasa resmi bahasa negara, bahasa yang menjalankan fungsi kenegaraan secara umum. Ia belum menjadi bahasa tutur dan bahasa budaya bangsa.

### **Bahasa Daerah dalam Masyarakat**

Hal yang perlu dicatat pada dewasa ini di Indonesia ialah bahwa bahasa daerah masih memegang peranan penting dalam hubungan tindak berbahasa masyarakat Indonesia. Bahasa daerah merupakan salah satu puncak warisan budaya daerah atau setempat. Perbedaan antara daerah, suku di Indonesia masih dicirikan oleh pelbagai hal (seperti makanan, pakaian, agama, struktur keluarga) dan juga termasuk bahasa. Penulis kemukakan fungsi bahasa daerah dalam masyarakat sebagai berikut.

### a. Bahasa Daerah Memegang Fungsi Utama

Dalam situasi dan peristiwa tertentu jelas tampak bahasa daerah memegang fungsi utama. Pernyataan adat-istiadat dalam segala bentuknya tetap dinyatakan dalam bahasa daerah. Manifestasi kesenian (dalam arti luas) tetap dan malah lebih mantap dinyatakan dalam bahasa daerah. (baca: Abud Prawirasumantri, *Budaya Djaja*, nomor 76, tahun 7, September 1974, hal. 531–537. "Pemakaian Bahasa Sunda dalam Pemerintah Daerah di Jawa Barat").

### b. Bahasa Daerah Memegang Fungsi Pembantu

Fungsi pembantu bahasa daerah terjadi pada saat, situasi, peristiwa bahasa-bahasa daerah dipakai berdampingan dengan bahasa Indonesia. Situasi seperti ini dijumpai oleh Abud Prawirasumantri pada pelaksanaan tugas para pamong desa di Jawa Barat. Dalam komunikasi resmi antara rakyat dengan pemerintah biasanya digunakan bahasa Indonesia, tetapi pada situasi tertentu dan dengan motivasi tertentu digunakan bahasa daerah. Dalam fungsi pembantu ini pula penulis masukkan pengajaran dan pendidikan dengan bahasa daerah pada permulaan pendidikan di taman kanak-kanak dan juga pada pendidikan 3 tahun pertama sekolah dasar.

### c. Bahasa Daerah Memegang Fungsi Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan ini ialah bahasa daerah yang dipergunakan dalam situasi kekeluargaan saja. Di luar lingkungan ini bahasa daerah tidak dipergunakan, kecuali dalam keadaan khusus tertentu. Dalam fungsi ini dimasukkan pula fungsi bahasa daerah dalam hubungan rahasia. Jika kita lihat secara kasar dan kita catat secara umum saja, jelas tampak bahwa bahasa daerah di Indonesia masih menjalankan ketiga fungsi tersebut di atas. Kemungkinan ini akan selalu terbuka dan terjadi. Bahasa Indonesia, dialek-dialek bahasa Indonesia, bahasa daerah dan variasi-variasinya di Indonesia akan tetap berlangsung.

Dalam hubungan ini penulis tunjukkan dua hasil observasi yang telah diadakan dalam rangka bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Pertama karangan/observasi Nancy Tanner: "Speech and Society among the Indonesian Elite, A Case Study of a Multilingual Community". (*Antropological Linguistics*, Vol. 9, number 3, hal. 15–40, March 1967). Kedua karangan Abud Prawirasumantri: "Pemakaian Bahasa Sunda dalam Pemerintahan Desa di Jawa Barat". *Budaya Djaja*, 76, tahun ke 7, September 1974, hal. 531–537). Dua artikel ini menarik perhatian dan membuktikan betapa besar peranan komunikasi bahasa daerah antar-penutur dan pendukungnya. Kiranya observasi dan survei pemakaian bahasa daerah semacam ini lebih banyak lagi di-

lakukan karena ia memberikan bahan dalam pembentukan kebijaksanaan pembinaan bahasa di Indonesia.

### **Bahasa Indonesia dan Wawasan Nusantara**

Setelah kami bicarakan beberapa hal dalam hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, kiranya perlu konsep pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dirangkaikan dengan konsep pembinaan wawasan nusantara. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN telah memberikan pula garis besar penghalusan wawasan nusantara, khusus dalam hubungan dengan perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Penghalusan itu berbunyi sebagai berikut.

- a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
- b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

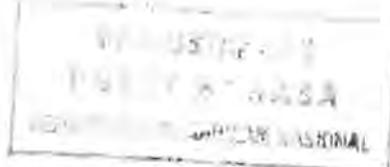
Terhadap penghalusan ini ingin penulis tambahkan khusus mengenai bahasa Indonesia, mengingat penting dan besarnya peranan bahasa Indonesia dalam rangka pembinaan wawasan nusantara kesatuan bangsa secara sosial budaya. Lalu penulis tambahkan sebagai berikut.

- c. Bahwa bahasa bangsa adalah satu, yaitu bahasa Indonesia, adanya pelbagai macam bahasa daerah di Indonesia menunjukkan kekayaan bangsa dan menjadi modal serta landasan pembinaan bahasa Indonesia bahasa daerah sebagai pernyataan dan pendukung kebudayaan daerah yang pelbagai ragamnya itu akan dipelihara oleh bangsa sejauh dan selama ia dapat dinikmati oleh bangsa.

Pernyataan tersebut di atas itu memberikan motivasi umum kepada pembinaan bahasa bangsa. Semua itu adalah pernyataan politis bangsa. Tugas kita sekarang ini ialah memberi isi kepada pernyataan politis tersebut di atas itu.

### **Sikap Siosipolitikolinguistik antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah**

Ada suatu keuntungan bagi Republik Indonesia bahwa bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang satu mayoritas penduduk/pendukung di Indonesia. Akan tetapi, tingkah laku berbahasa dalam hubungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah ditentukan oleh tingkah laku sosial, hubungan sosial budaya,



ekonomis dan politis antarpemutur bahasa daerah dan pemakai bahasa Indonesia. Tingkah laku sosial ini menentukan pula variasi berbahasa para pemutur dan pendukung tersebut. Secara teoritis dapat disebutkan beberapa sikap sosiopolitikolinguistik pemakainya sebagai berikut.

#### a. Sikap Pluralistis

Secara sadar dan tidak sadar, sikap pluralistis dalam berbahasa di Indonesia masih berlangsung. Pemakaian bahasa daerah secara sosial politis belum dan tidak mendapatkan tantangan apa pun. Malah beberapa kebijaksanaan mengizinkannya. Kesempatan hidup berdampingan dan penggunaan berdampingan dengan bahasa Indonesia masih diperlakukan secara wajar. Mungkin itu sesuai dengan bunyi pasal 36 UUD 45 dan penjelasannya. Sampai di mana sikap pluralistis ini berlangsung diperlakukan satu kebijaksanaan politik bahasa ansional.

#### b. Sikap Integratif

Sikap integratif menyatakan satu kecenderungan untuk sepenuhnya mempergunakan bahasa Indonesia, dan bahasa daerah lama kelamaan secara gramatika sama sekali melebur dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

#### c. Sikap Asimilatif

Sikap asimilatif atau pembauran dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia akan menghilangkan sama sekali identitas bahasa daerah. Sikap asimilatif ini dapat dilaksanakan secara paksaan, secara persuasi atau melalui sistem pendidikan.

Sikap lain yang ekstrim tidak penulis sebutkan di sini karena hal ini menurut penilaian kami tidak akan berlaku dalam masyarakat Pancasila bangsa Indonesia. Sikap sosiopolitikolinguistik ini erat berhubungan dengan sikap sosiokultural para pendukungnya. Sikap ini dapat bersifat aktif dan pula bersikap pasif. Sikap ini pun dapat diterima sebagai penguasaan posisi dan kedudukan bahasa daerah dengan romantisme dan kebanggaan akan nilai budaya yang tersimpan dalam bahasa daerah. Sejauh mana arah pluralistis, sikap integratif dan atau asimilatif ini dikembangkan dan berkembang akan ditentukan oleh masyarakat sendiri. Faktor-faktor yang ikut menentukan sikap-sikap ini dapat disebut, seperti faktor pemerintah dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terpusat mengenai masalah bahasa ini. Akan tetapi, di samping faktor kebijaksanaan pemerintah sikap-sikap ini akan ditentukan pula oleh mobilitas penduduk, pendukung bahasa-bahasa, dimensi kebudayaan bahasa daerah tertentu, dimensi kekuasaan pendukung bahasa daerah. Ini

semua akan menentukan sikap politik berbahasa dalam hubungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara geografis dan sosial tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat pula dielakkan. Untuk maksud tersebut kiranya pendapat dan harapan mengenai pembinaan dan penempatan bahasa daerah dalam kerangka keseluruhan pembinaan bahasa Indonesia perlu lebih banyak dikemukakan dan dibicarakan secara terang, wajar, objektif, dan penuh tanggung jawab.

Keuntungan lain sikap sosiopolitikolinguistik dari pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia pada dewasa ini ialah bahwa kita generasi Indonesia baik generasi Sumpah Pemuda maupun generasi 45 apalagi generasi penerus tidak mempunyai ikatan kultural, psikologis, sosial dengan bahasa Indonesia di masa yang silam. Masalah yang timbul dalam kerangka pembinaan bahasa daerah ialah ikatan dan kaitan kultural, sosial dan psikologis antara pendukungnya dengan bahasa daerah. Dalam hubungan inilah penulis sebutkan faktor-faktor lain yang menentukan sikap sosiopolitikolinguistik pendukung bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Penulis mencatat bahwa sikap pendukung bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia sudah jelas. Ini satu modal dan keuntungan yang tidak terbandingkan di dunia ini. Akan tetapi, yang belum jelas/pasti ialah sikap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah. Hal inilah masih perlu ditentukan dalam masa-masa yang datang sebagai bahan tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

### Penutup

Pembicaraan penulis ini hanya sekedar sumbangan pikiran kepada mereka-mereka yang berwenang dalam hal pembinaan dan pengembangan bahasa. Juga penulis buat untuk umum karena masalah pembinaan dan pengembangan bahasa, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah, secara intensif dan menyeluruh pada satu saat berhadapan dengan politik/kebijaksanaan nasional mengenai bahasa. Ini akan mengenai dan menyangkut *rasa* dan *rasio* masyarakat Indonesia pendukungnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fishman, A. Joshua. 1972. *Reading in the Sociology of Language*. Mouton The Hague. Third Printing.
- Halim, Amran. 1975. "Fungsi Politik Bahasa Nasional". *Budaya Djaja*, tahun ke-8, no. 82, Maret 75.
- Haugen, Einar. 1974. "The Curse of Babel" dalam *Dialogue*, vol. 7, no. 2, 1974.

## DISIPLIN NASIONAL DAN PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA

Nurdin Yatim

Direktur Pusat Bahasa  
Universitas Hasanuddin

### Pendahuluan

Sebagai sebuah makalah yang menyoroti masalah disiplin nasional dalam hubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, ada baiknya kalau terlebih dahulu di sini dilihat kadar *disiplin* itu sendiri dari segi bahasa, baik secara etimologis maupun secara sosiosemantis. Kata *disiplin* berasal dari kata *descepline* (OF, ME), *disciplina-descipulus-disciple* (L), yang berarti murid, orang menuntut pelajaran. Ini juga berarti pengikut suatu aliran. Perkembangan semantik kata ini dalam bahasa-bahasa Barat telah membawanya kepada pengertian sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari secara akademis. Kata disiplin juga diartikan sebagai latihan-latihan yang diberikan kepada seseorang untuk membina watak (karakter), efisien, keteraturan, serta kemampuan kontrol diri seseorang (Goralnik, 1972).

Secara sosiosemantis dalam bahasa Indonesia, kata disiplin dipahami sebagai:

- a. latihan batin dan watak bagi seseorang dengan maksud agar segala perbuatannya selalu menaati tata tertib (di sekolah atau kemiliteran);
- b. ketaatan pada aturan dan tata tertib (dalam kemiliteran, dan sebagainya) (Poerwadarminta, 1976).

Pengertian yang didapati dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* itu disebut pengertian yang bersifat sosiosemantis karena pengertian inilah yang dikenal

secara umum oleh masyarakat penutur bahasa Indoneisa. Pengertian lain, pengertian sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari secara akademis hanya dikenal oleh kelompok masyarakat kecil, kelompok masyarakat intelektual, yang memiliki kaitan kehidupan dengan dunia perguruan tinggi.

Kelompok masyarakat intelektual telah berkenalan dengan sejumlah disiplin dalam perguruan tinggi. Setiap disiplin mempunyai otoritas tersendiri yang terjabar dalam terminologi, metodologi, serta bidang telaah masing-masing. Oleh karena itu, sangatlah wajar kalau pergaulan dengan disiplin-disiplin ini telah memberikan kepada kita penghayatan yang lebih jelas dan nyata terhadap makna sosiosemantis kata disiplin dalam bahasa Indonesia.

Kalau kita memfokuskan pandangan kita kepada ilmu bahasa itu sendiri sebagai disiplin, akan terlihatlah bahwa bahasa itu sendiri berdisiplin (dalam pengertian sosiosemantis BI). Bahasa adalah sebuah atau sejumlah sistem/aturan (Dinnen, 1967) yang harus diikuti (diindahkan) oleh pemakai (penutur) bahasa itu agar terjalin saling mengerti atas pesan-pesan komunikasi yang disampaikan oleh para interlocutor. Tanpa ketaatan terhadap aturan tata tertib bahasa, tanpa disiplin dalam penggunaannya, kemungkinan kesalahpahaman akan sangat tinggi, bahkan sangat mungkin seorang interlocutor tidak dapat mengerti apa yang dimaksud oleh interlocutor lainnya.

### Bahasa Nasional

Setiap bangsa berusaha mengembangkan bahasa nasionalnya masing-masing. Ada sejumlah bangsa yang melakukan usaha ini hanyalah dengan meneruskan tradisi pemakaian bahasa yang telah lama digunakan dan mempunyai nilai kesejarahan yang panjang sejajar dengan perkembangan bangsa itu sendiri. Ada pula sejumlah bangsa yang mengembangkan bahasa nasionalnya dari bahasa asing yang telah lama berfungsi komunikatif dalam masyarakat itu. Sementara itu, sejumlah bangsa tertentu masih saja berjuang untuk memberikan posisi sewajarnya kepada bahasa nasionalnya.

Bahasa Indonesia, bahasa nasional bangsa Indonesia, mempunyai sejumlah keistimewaan baik dalam sejarahnya, maupun dalam perkembangannya hingga kepada bentuknya sekarang ini. Bahasa ini adalah hasil kesepakatan sosial yang dimulai dengan kesepakatan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan interetnik (*lingua franca*) di nusantara. Tanpa paksaan dalam bentuk apa pun, bahasa Melayu diterima sebagai bahasa perhubungan yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi antara berbagai suku bangsa yang masing-masing memiliki latar belakang bahasa dan budaya masing-masing. Kesepakatan sosial ini ditingkatkan pada tahun 1928 dengan memasukkannya sebagai salah satu dari tiga unsur Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan pernyataan kesepakatan sosial bahwa bahasa persatu-

an yang disepakati itu adalah bahasa Indonesia. Kesepakatan sosial ini ditingkatkan lagi dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kesepakatan sosial ini seterusnya digaribawahi pada tahun 1978 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang menggariskan bahwa "pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar" (Halim, 1980).

Tidaklah setiap bahasa nasional di dunia ini berfungsi selengkap dan seluas bahasa Indonesia. Di Singapura misalnya, bahasa nasional mereka adalah bahasa Melayu, tetapi bahasa resminya ada empat, yakni bahasa Inggris, Mandarin, Melayu dan Tamil. Lebih khusus lagi, bahasa kerja di negeri ini hanya dua yakni bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Sementara itu, banyak bahasa nasional yang belum lagi berfungsi baik sebagai bahasa pemer-satu. Hal ini dapat ditunjuk dalam situasi-situasi yang terdapat di Filipina dengan konsep bahasa Pilopinonya, dan di India dengan bahasa Urdhu yang belum lagi mencapai tingkat kesepakatan sosial yang memadai.

Pengertian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional perlu dipahami dalam jbaran yang lebih khusus. Dalam politik bahasa nasional (Halim, 1976) diuraikan kedudukannya, yaitu sebagai (1) lambang kebanggaan kebangsaan, (2) lambang identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4) alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya. Sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, bahasa Indonesia dimaklumi pula sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, perlu pula diketahui penjabarannya, yakni fungsi-fungsinya sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Kejelasan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara telah meletakkan dasar disiplin tersendiri dalam penggunaan bahasa Indonesia bagi seluruh bangsa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia ini perlu diketahui dengan jelas karena hal ini sangat bermanfaat untuk memberikan jangkauan nasional terhadap komunikasi pembangunan kita, sekaligus memberikan situasi yang menguntungkan terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri.

### Disiplin dalam Penggunaan Bahasa Indonesia

Agar pendekatan masalah ini lebih bersifat akademis, perlu kiranya terlebih dahulu diberikan gambaran singkat tentang situasi sosiolinguistik kebahasaan di Indonesia. Sudah sama dimaklumi bahwa di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, terdapat tidak kurang dari 400 buah bahasa daerah yang masih tetap berfungsi komunikatif di seluruh Indonesia. Di antara bahasa daerah ini, ada sejumlah bahasa daerah yang mempunyai jumlah penutur yang cukup besar seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Bali, Madura, Bugis dan Makassar. Bahasa-bahasa daerah tersebut ini bahkan memiliki tradisi tulis serta mempunyai nilai kesejarahan yang berkaitan erat dengan sejarah sosial budaya dan politik penuturnya di masa lampau.

Kenyataan sosiolinguistik lain yang tampak ialah bahwa perkembangan bahasa Indonesia sendiri dalam fungsinya yang komunikatif telah memungkinkan munculnya berbagai-bagai (*variety*) yang digunakan baik untuk memperoleh rasa keintiman, maupun sebaliknya untuk memperoleh kesan keterpisahan (*exclusive*). Ada ragam bahasa Indonesia yang menampakkan ciri lokal (dialek), dan ada ragam bahasa yang menampakkan kedudukan sosial seseorang (sosiolek). Pembicaraan tentang ragam ini memerlukan waktu lama karena dalam setiap bahasa itu terdapat banyak sekali ragam, dan ragam inilah oleh sosiolinguistik dianggap sebagai penggunaan bahasa dalam kenyataan yang sesungguhnya. Bahasa baku pun dianggap sebagai salah satu ragam yakni ragam baku.

Pembicaraan tentang disiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia, pada hemat penulis harus dikaitkan dengan kedua kenyataan sosiolinguistik kebahasaan di Indonesia.

- a. Disiplin yang dilihat dalam kaitan penggunaan bahasa Indonesia di tengah-tengah penggunaan bahasa daerah. Kapan kita harus berbahasa Indonesia, dan kapan kita wajar berbahasa daerah perlu diketahui secara pasti oleh seluruh bangsa Indonesia. Penegakkan disiplin ini hanya dapat berlangsung bilamana kita mengetahui dengan pasti batas-batas antara keduanya.
- b. Disiplin yang dilihat dalam kaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia (ragam) baku. Kapan kita harus menggunakan bahasa baku, dan kapan kita wajar menggunakan bahasa nonbaku (sosiolek, dialek, dan sebagainya) perlu pula diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia.

Untuk menegakkan disiplin nasional dalam penggunaan bahasa Indonesia yang berkaitan dengan butir a di atas, baiklah di sini kami kutipkan hasil seminar Politik Bahasa Nasional (Bahasa dan Sastra No. 1, 1975) sebagai berikut:

"Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa seperti Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis, Makassar dan Batak berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga masyarakat daerah. Di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah dasar di satu daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (3) alat pengembangan dan pendukung kebudayaan daerah"

Kutipan ini cukup jelas memberikan pengarahan kapan seharusnya bahasa Indonesia digunakan, dan kapan kita berada dalam kewajiban untuk menggunakan bahasa daerah. Dengan mengindahkannya, niscayalah salah satu aspek dalam disiplin nasional berbahasa Indonesia akan terpenuhi.

Aspek disiplin yang kedua, yang berkaitan dengan butir b adalah aspek yang lebih rumit karena peningkatan disiplin penggunaan bahasa Indonesia di sini dikaitkan pula dengan peningkatan mutu penggunaan bahasa itu sendiri.

Akan hal ini, Bapak Menteri P dan K, Dr. Daoed Joesoef (1980) telah memberikan pengarahan sebagai berikut. Masalah disiplin di dalam penggunaan bahasa Indonesia pada dasarnya menyangkut sikap terhadap bahasa Indonesia. Disiplin penggunaan bahasa Indonesia dapat diukur atas ketaatan kepada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baku dan atas dasar penggunaan kata-kata atau ungkapan-ungkapan bahasa asing di dalam kalimat bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar menurut adanya ketaatan yang relatif tinggi terhadap kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan tata cara sosial budaya bangsa kita. Disiplin di dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar juga ditandai oleh penggunaan bahasa Indonesia tanpa kata-kata atau ungkapan-ungkapan bahasa asing yang sebenarnya tidak diperlukan.

Mutu bahasa Indonesia yang digunakan dapat diukur atas dasar ketepatan pilihan kata dan bentuk kalimat dengan kaidah bahasa Indonesia baku, dan ketepatan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang mendahului dan/atau mengiringinya. Ketepatan pilihan kata dan bentuk kalimat dapat diukur atas dasar apakah kata dan bentuk kalimat yang dipilih itu dengan setepat-tepatnya dapat mengungkapkan pesan dan isi pikiran yang rumit dan hubungan isi pikiran yang abstrak.

Di sini jelas bahwa kehendak untuk melaksanakan disiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu pula dibarengi pengetahuan yang memadai tentang kaidah-kaidah bahasa baku. Usaha untuk mempe-

lajari bahkan mendalami kaidah-kaidah baku sangat diperlukan karena hanya dengan demikian kita dapat menghindari diri dari kebiasaan-kebiasaan penggunaan bahasa ragam nonbaku seperti dialek dan sosiolek rendah.

Ragam baku adalah ragam bahasa yang dikodifikasi. Ragam ini bersumber dari pemakaian bahasa oleh para penjaga gerbang kebahasaan (*language gatekeepers*) (Stewar, 1968). Termasuk dalam kategori penjaga gerbang ini adalah para ahli bahasa, guru bahasa, penulis, wartawan, dan sebagainya. Oleh karena itu, ragam bahasa ini mempunyai jangkauan nasional terlebih-lebih setelah dibukukan dalam bentuk-bentuk pedoman ejaan, kamus umum, tata bahasa, contoh teks dan lain-lain, dan sekaligus memperoleh kekuatan otoritas.

### Langkah-langkah Konkret

Kenyataan yang amat menggembirakan yakni adanya semangat untuk mendorong disiplin dalam penggunaan bahasa nasional kita telah meluas di seluruh penjuru tanah air. Kritikan-kritikan terhadap penggunaan bahasa Indonesia nonbaku dalam peristiwa kebahasaan yang seharusnya penggunaan bahasa baku sudah cukup sering kita dengar baik secara langsung, maupun melalui media-media massa. Begitu pula halnya dengan penggunaan bahasa daerah oleh kelompok-kelompok penutur bahasa daerah tertentu, di tempat yang sewajarnya bahasa Indonesia digunakan, misalnya dalam situasi pertuturan yang dihadiri pula oleh orang-orang bukan penutur bahasa daerah tersebut.

Kritikan-kritikan terhadap rendahnya penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada umumnya mengarah kepada guru sebagai terminal terakhir. Pada gilirannya, guru, tanpa memasalahkan jaminan kesejahteraan misalnya, meneruskan kritik ini pada materi pengajaran itu sendiri.

Sebagai sebuah bahasa yang berkembang, terlalu banyak masalah kebahasaan yang muncul baik dalam aspek tata bahasa lebih-lebih dalam aspek kosa kata bahasa ini. Masalah ini dirasakan bukan hanya oleh orang awam tetapi oleh mereka yang termasuk dalam golongan penjaga pintu kebahasaan itu sendiri. Kecenderungan untuk tetap menggunakan bahasa daerah masing-masing mungkin dapat dianggap sebagai ketidakdisiplinan hanyalah bila dihubungkan dengan situasi pertuturan yang sewajarnya menggunakan bahasa nasional. Begitu pula halnya dengan penggunaan bahasa asing. Akan tetapi, pencampuradukan dua unsur tersebut dalam penggunaan bahasa Indonesia mungkin dapat dianggap sebagai kecenderungan penggunaan ragam-ragam baru, baik yang bersifat ragam lokal maupun yang bersifat ragam sosial.

Langkah-langkah konkret dalam hubungan dengan hal yang terakhir inilah diperlukan. Bagaimana seorang guru dapat memberikan bimbingan yang tepat kepada muridnya, dan bagaimana seorang wartawan menulis

dengan tepat untuk pembacanya serta lain-lain penjaga pintu kebahasaan kepada objeknya masing-masing memerlukan pegangan yang memadai. Sebagai sebuah bahasa nasional di negara yang sedang berkembang ini, peranan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa amat berarti. Lembaga inilah yang menjadi pemimpin dari seluruh penjaga pintu kebahasaan, mereka yang masih sering mempertunjukkan ketidaksepehamannya antara satu dengan yang lainnya. Sumber yang diperoleh dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memiliki wibawa nasional yang sangat berperanan dalam menentukan pilihan bentuk kebahasaan termasuk ke dalam ragam baku atautkah ragam sosial/lokal.

Hingga kini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah melakukan langkah-langkah yang amat berarti dalam bidang riset dan penulisan hasil riset. Langkah-langkah ini jelas masih bersifat teoritis. Para guru bahasa dan para penjaga pintu kebahasaan lainnya sangat memerlukan tulisan-tulisan yang bersifat praktis sebagai pedoman dalam penggunaan bahasa baik dan benar dalam arti baku secara nasional. Hingga saat ini barulah *Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, dan *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang dapat diperoleh secara meluas. Isinya pun jelas jauh dari kemampuan memenuhi kebutuhan dalam bidangnya masing-masing. *Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan* memuat contoh-contoh yang amat terbatas begitu pula halnya *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di samping kekurangan-kekurangan teknis pencetakannya, juga terdapat banyak sekali ejaan di dalamnya yang tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip pedoman penulisan istilah.

Kamus istilah yang sudah cukup banyak jumlahnya jelas belum dapat diperoleh umum secara gampang. Masalah lain yang tampak adalah kurangnya usaha untuk menggunakan kata-kata dari unsur bahasa daerah. Kalau pun ada mungkin hanya dari bahasa Jawa dan Sunda. Adalah juga langkah-langkah konkret yang diperlukan memasukkan ke dalamnya istilah-istilah yang dipungut dari bahasa-bahasa daerah lain. Jika istilah politik dan pemerintahan banyak diambil dari bahasa Jawa/Jawa-Kuno/Sanskerta, kami kira akan lebih kayalah bahasa Indonesia ini kalau istilah-istilah kemaritiman diperkaya dengan sumber dari bahasa Bugis/Makassar yang penuturnya telah dikenal. Istilah masakan diperkaya dengan kosa kata bahasa Minang, istilah fauna/flora diperkaya dengan kosa kata dari bahasa-bahasa di Kalimantan, Irian Jaya dan lain-lain.

Kalau seluruh bahasa daerah di Indonesia merasa telah menyumbangkan sesuatu ke dalam perkembangan bahasa Indonesia kami yakin rasa memiliki bahasa nasional ini semakin besar pula di kalangan bekas penutur bahasa-bahasa daerah. Ini penting terutama bila waktunya penggunaan bahasa

Indonesia sudah demikian luas dan diterima baik untuk kepentingan praktis maupun sebagai lambang kebanggaan.

Kami percaya kebinekaan dalam dunia kebahasaan di Indonesia makin hari semakin berkurang. Kita akan menuju kepada kesatuan bahasa yakni sebuah bahasa nasional yang kaya, yang menguntungkan dalam penggunaan praktis dan memberi rasa kebanggaan yang tinggi. Sejalan dengan rasa kebanggaan yang bersifat nasional ini, akan muncullah pula rasa keintiman dalam penggunaannya.

Rasa keintiman dalam penggunaan bahasa Indonesia perlu diberi tanah persemaian yang subur. Situasi psikologi yang mendukung perlu diciptakan. Situasi seperti ini perlu disulut secara nasional dan di sini pulalah peranan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sangat menentukan. Api yang disulut oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ini dikobarkan pula di daerah-daerah, di pusat-pusat pengembangan bahasa yang ada di universitas-universitas/perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Penciptaan keintiman nasional, salah satu fungsi sosiolinguistik penggunaan bahasa Indonesia tidak akan tercapai tanpa memberikan langkah-langkah konkret pula. Bahasa Indonesia tidak akan mampu mengambil alih peranan situasi keintiman yang sudah berakar lama dalam kehidupan bahasa daerah kecuali bahasa ini mampu mengambil alih peranan-peranan yang telah lama dilakukan oleh bahasa-bahasa daerah. Sebagai contoh penyiaran cerita wayang melalui TVRI secara nasional hanya akan menumbuhkan keintiman di kalangan penutur bahasa Jawa, kalau wayang itu tidak menggunakan bahasa Indonesia. Ia tidak akan terasa dimiliki oleh penutur bahasa lain. Di sini diperlukan langkah-langkah yang betul-betul berani mencoba demi tujuan tercapainya keintiman yang dimaksud.

## Penutup

Makalah ini ditulis dengan suatu pemikiran bahwa peserta kongres ini terdiri dari berbagai-bagai ahli dari berbagai-bagai disiplin. Oleh karena itu, uraian yang dikemukakan di sini lebih bersifat umum. Namun, tidaklah tertutup kesempatan untuk membicarakan kasus-kasus khusus yang berhubungan dengan disiplin tidaknya seorang penutur bahasa Indonesia. Hal ini penting, oleh karena disiplin dalam pemakaian bahasa Indonesia, bahasa nasional kita, tidak bisa dipisahkan dari usaha pembinaan disiplin nasional secara umum.

Para penutur bahasa Indonesia yang berada dalam ruang seminar ini adalah kelompok kecil, masyarakat intelektual, yang menghayati makna sosiosemantis maupun makna khusus kata disiplin penggunaan bahasa Indo-

nesia secara luas dengan jalan mendahulukan peningkatan disiplin penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi kelompok ini, untuk kemudian menjadi penutur masyarakat awam.

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup dan berkembang. Oleh karena itu, diperlukan usaha pembinaan di dalam perkembangannya secara terus-menerus. Hal ini bukanlah tugas dan kewajiban para ahli bahasa dan bahasawan semata-mata, melainkan tugas dan kewajiban seluruh bangsa Indonesia. Dalam hubungan ini, diperlukan disiplin penggunaan bahasa daerah di tempat yang sewajarnya, serta disiplin penggunaan bahasa Indonesia baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi resmi.

Pada gilirannya ini, perlu pula dihimbau Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk dengan segera menerbitkan dan menyebarkan bahan-bahan penuntun bahasa Indonesia baku khususnya dalam bentuk tata bahasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahasa dan Sastra* (Majalah) No. 1, 1975. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, Indonesia.
- Dinnen, Francis P. 1976. *An Introduction to General Linguistics*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Guralnik, David B. (Ed.). 1972. *Webster's New World Dictionary of the American Language*. New York: World Publishing Times Mirror.
- Halim, Amran. 1976. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia" dalam *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Nasional.
- , 1980. "Bahasa Indonesia Baku" dalam majalah *Analisis Kebudayaan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Joesoef, Daoed. 1980. "Mutu dan Disiplin Penggunaan Bahasa Indonesia" dalam majalah *Analisis Kebudayaan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Stewart, William A. 1968. "A Sociolinguistics Typology for Describing National Multilingualism" dalam *Reading in The Sociology of Language*. Mouton The Hague.

## ANGKA STATISTIK SEBAGAI INDIKATOR MASALAH KEBAHASAAN: DENGAN MENAMPILKAN PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI KASUS KHUSUS

**Husen Abas**

Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin  
Ujung Pandang

### Pendahuluan

Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983 menggariskan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar. Di samping itu, pada saat yang bersamaan, pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional. Dalam konteks pembinaan dan pengembangan bahasa nasional itu, pembinaan bahasa daerah menampakkan eksistensinya.

Fungsi utama suatu bahasa (nasional atau daerah) ialah sebagai alat komunikasi. Di samping itu, bahasa juga merupakan sebagian dari kekayaan budaya masyarakat yang mempergunakan bahasa itu. Bahasa, dengan demikian, merupakan suatu nilai (*value*) dan norma (*norm*) budaya.

Kepulauan Nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, besar dan kecil, didiami oleh banyak bangsa (*ethnic groups*). Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya bahasanya sendiri. Akibatnya terdapat kurang lebih 400 bahasa daerah di Indonesia yang di samping berfungsi sebagai alat komunikasi intra-suku (*intra ethnic communication*), juga berfungsi sebagai sarana

penunjang bahasa Indonesia seperti telah disebutkan di atas dan sarana pendukung kebudayaan daerah. Eksistensi bahasa daerah dijamin oleh Bab XV, Pasal 36, UUD 1945. Statusnya sebagai norma etnik (*ethnic norm*) dijamin oleh GBHN, terutama bahasa-bahasa daerah yang memiliki sistem penulisan sendiri, tradisi kesusasteraan tertulis, dan pendukung/penutur yang jumlahnya cukup besar.

Salah satu bahasa daerah yang terdapat di daerah Riau dan Kepulauan sekitarnya telah berkembang menjadi bahasa nasional. Bahasa daerah itu mula-mula dipergunakan sebagai alat komunikasi intra-etnik, kemudian meningkat fungsinya sebagai alat komunikasi inter-etnik (*lingua franca*) dan akhirnya diresmikan menjadi bahasa nasional. Penerimaan bahasa Melayu secara sukarela oleh suku-suku bangsa lainnya yang jumlahnya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah suku bangsa Melayu (misalnya suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda, dan lain-lain) merupakan suatu proses kristalisasi kebudayaan yang menakjubkan. Norma kebudayaan yang didukung oleh kelompok etnik yang jumlah anggotanya jauh lebih besar menyingkirkan diri untuk memberikan tempat kepada norma kebudayaan lain yang didukung oleh kelompok etnik yang jumlah anggotanya jauh lebih sedikit. Norma kebudayaan yang demikian ini disebut oleh Isman (1977) sebagai norma-supra etnik (*supra-ethnic norm*) yang secara alamiah diterima oleh seluruh kelompok etnik lainnya sebagai norma kebudayaan milik bersama. Dengan demikian norma kebudayaan itu memiliki daya ikat yang kuat dan memberikan identitas baru yang bersifat nasional.

Proses kristalisasi kebudayaan di atas dalam jangka waktu yang relatif singkat (kurang lebih 60 tahun, jika pemberian status sebagai bahasa resmi kedua di dalam tahun 1865 dijadikan titik pangkal, dan kurang lebih 20 tahun jika titik pangkalnya adalah bangkitnya kesadaran nasional yang dinyatakan dalam bentuk organisasi untuk pertama kalinya di dalam tahun 1908) telah dialami oleh bahasa Melayu yang mengkristal menjadi bahasa Indonesia yang dimanifestasikan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Ahli-ahli bahasa sedunia sangat kagum terhadap proses ini.

### **Keadaan Kebahasaan sebagai Masalah Masyarakat**

Mulai dekade kedua tahun tujuh puluhan bahasa tidak lagi dianggap sebagai alat komunikasi belaka, tetapi juga sudah dipergunakan sebagai salah satu indeks 'kehidupan layak lahiriah' (*physical quality of life*) suatu bangsa sebab Andrew B. Gonzalez (1979 : 5) telah mengemukakan bahwa pembangunan bangsa secara menyeluruh tidak hanya mencakup kemajuan-kemajuan material yang dapat dinyatakan di dalam angka-angka (GNP), tetapi juga harus mencakup kemajuan-kemajuan yang tidak dapat ditakar dengan uang

yang merupakan bahagian dari kesejahteraan manusia dalam bentuk mutu kehidupan yang memadai dan layak.

The Overseas Development Council, suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat khusus untuk menangani masalah pembangunan dunia, telah mengusulkan suatu indeks kehidupan layak lahiriah (PQLI) yang mencakup, di samping GNP, juga harapan kehidupan berlanjut (*life expectancy*) pada usia 1 tahun, kematian bayi (*infant mortality*), dan melek aksara (*literacy*). Sementara itu, The Development Academy of the Philip-pines telah pula mengemukakan kesempatan belajar (*learning*) sebagai salah satu indikator kehidupan yang layak bagi manusia yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kesejahteraan masyarakat (Mangahas, 1976).

Erat hubungannya dengan kesempatan belajar yang dikemukakan oleh DAP dengan melek huruf yang diketengahkan oleh ODC adalah bahasa. Oleh sebab itu, faktor bahasa ini penting sekali perannya di dalam pembangunan sosial secara menyeluruh suatu bangsa.

Sebagaimana kita ketahui pembangunan sosial yang menyeluruh merupakan masalah yang sangat kompleks. Ada satu hal yang sangat diperlukan untuk berhasilnya pembangunan sosial itu, yaitu mutlaknya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebab penguasaan terhadap hal itu dapat mempercepat laju pembangunan. Untuk tiba pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan yang dimaksud kesempatan belajar harus terbuka lebar bagi anak-anak warga negara suatu negara.

Sebagaimana sudah diterangkan di depan, Indonesia memiliki rakyat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Tiap-tiap suku mempunyai bahasanya sendiri. Dengan demikian, bangsa Indonesia memiliki masyarakat yang multi-etnik dan multi-bahasa. Di samping adanya bahasa nasional (bahasa Indonesia), terdapat pula banyak bahasa daerah. Akibatnya keadaan kebahasaan lebih banyak bersifat heterogen dari pada homogen, terutama di daerah-daerah di luar pulau Jawa. Pulau Sulawesi yang terbagi menjadi empat propinsi daerah tingkat satu dapat dijadikan contoh sebagai kawasan yang memiliki keadaan kebahasaan yang sangat heterogen. Keadaan kebahasaan yang demikian ini lebih banyak merupakan masalah masyarakat dari pada merupakan masalah individu dan keadaan ini dapat menjadi faktor yang berpengaruh di dalam pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Adalah wajar apabila bahasa sebagai salah satu masalah sosial dari suatu bangsa yang sedang membangun yang merupakan indikator dari keadaan kebahasaan (*language welfare*) menjadi perhatian utama masyarakat bersangkutan.

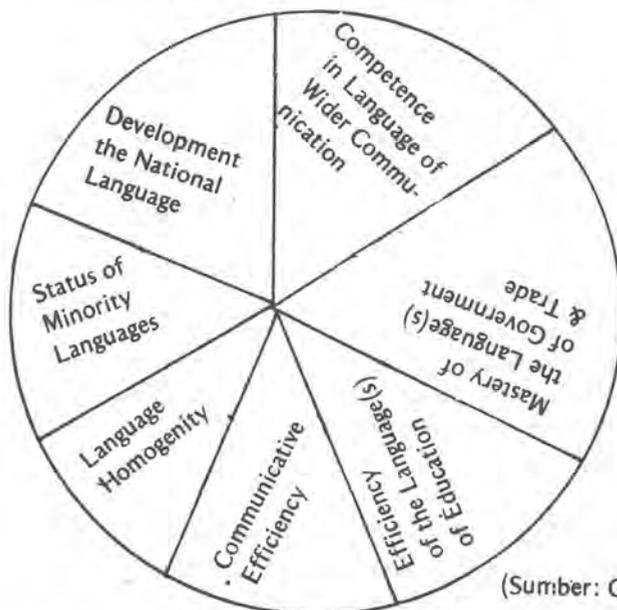
Di samping situasi kebahasaan homogen/heterogen (*language homogeneity*) sebagai salah satu indikator masalah kebahasaan di suatu kawasan atau

daerah seperti disebutkan di atas, Gonzalez mengemukakan enam indikator lainnya. Dengan demikian terdapat tujuh indikator kebahasaan, yaitu:

- a. keadaan kebahasaan yang homogen atau heterogen di suatu daerah atau negara,
- b. kedudukan atau status bahasa-bahasa yang mempunyai jumlah penutur yang sedikit,
- c. pembinaan dan pengembangan bahasa nasional,
- d. kompetensi anggota masyarakat di dalam mempergunakan bahasa yang berkedudukan sebagai bahasa komunikasi luas,
- e. penguasaan yang baik dari anggota masyarakat terhadap bahasa-bahasa yang dipergunakan di dalam pemerintahan dan perdagangan,
- f. dayaguna bahasa-bahasa pengantar yang dipergunakan pada semua jenjang lembaga pendidikan,
- g. dayaguna komunikasi massa (Gonzalez, 1979).

Ketujuh indikator keadaan kebahasaan yang merupakan masalah masyarakat (*social concern*) ditempatkan oleh Gonzalez pada suatu diagram sebagaimana tertera di bawah ini:

DIAGRAM  
INDIKATOR-INDIKATOR KEADAAN KEBAHASAAN  
SEBAGAI MASALAH SOSIAL



(Sumber: Gonzalez, 1979)

Untuk mengetahui indeks keadaan kebahasaan secara menyeluruh ('overall index of language welfare') suatu daerah atau negara, setiap indikator sebagaimana tertera di atas diberi nilai 1 sampai 5. Untuk Indonesia indeks keadaan kebahasaan secara menyeluruh adalah 3,17 menurut Gonzalez. Angka ini diperoleh setelah memberikan nilai kepada tiap-tiap indikator sebagai berikut: nilai 2 kepada indikator 1; nilai 5 kepada indikator 2; nilai 4 kepada indikator 3; nilai 3 kepada indikator 4; nilai 5 kepada indikator 5; nilai 3 kepada indikator 6; dan nilai 4 kepada indikator 7.

Jika kita menerapkan sistem penilaian Gonzalez ini untuk mendapatkan indeks keadaan kebahasaan secara menyeluruh dari Pulau Sulawesi, kita akan mendapatkan angka 2,7. Angka ini didapat jika kita berikan nilai 4 kepada indikator 1; nilai 3 kepada indikator 2; nilai 4 kepada indikator 3; nilai 2 kepada indikator 4; nilai 3 kepada indikator 5; nilai 3 kepada indikator 6; dan nilai 3 kepada indikator 7. Indeks ini cukup rendah jika kita bandingkan dengan indeks untuk Indonesia secara keseluruhan. (Menurut Tabel Overall Index of Language Welfare dari Gonzalez, angka indeks tertinggi adalah 4,86 yang dicapai oleh 3 negara di kawasan Pasifik yaitu Jepang, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, sedang angka indeks yang paling rendah adalah 1,3 yang diberikan kepada Papua New Guinea).

Suatu daerah, kawasan, ataupun negara indeks keadaan kebahasaannya dapat ditentukan melalui proses seperti disebutkan di atas. Indeks keadaan kebahasaan ini perlu diketahui oleh para ahli bahasa dan pejabat yang berwenang di bidang kebahasaan guna dipergunakan sebagai salah satu landasan kebijaksanaan baik untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek di dalam mengatasi suatu masalah kebahasaan ataupun merencanakan pembinaan dan pengembangan suatu bahasa, sebab semakin rendah indeks itu, semakin rawan keadaan kebahasaan suatu daerah, kawasan, ataupun negara.

Untuk Indonesia, nilai indikator no. 1 masih tetap akan rendah untuk masa yang akan datang, tetapi nilai-nilai untuk indikator-indikator 3, 4, 6 dan 7 akan beranjak naik, dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama indikator-indikator itu akan mencapai nilai maksimum. Dengan demikian, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi pemerintah, sarana pengembangan kebudayaan, sarana pendidikan dan pengajaran, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta sarana komunikasi luas untuk kawasan Asia Tenggara akan menjadi semakin mantap dan kuat.

### **Sensus Penduduk sebagai Indikator Masalah Kebahasaan**

Sensus penduduk yang diselenggarakan di dalam tahun 1971 menunjukkan bahwa seluruh penduduk adalah 118.367.850 orang. Dari jumlah seluruh

penduduk ini, 48.275.879 orang adalah penutur bahasa Indonesia. Tabel 1 yang tertera di bawah ini memuat hasil sensus penduduk tahun 1971 selengkapnya yang berhubungan dengan jumlah penutur bahasa Indonesia, di kota dan pedesaan, dari empat pulau yang besar dan pulau-pulau lainnya yang kecil.

Pulau Sumatera pada tahun 1971 memiliki jumlah penduduk 20.801.177 orang. 13.151.237 orang di antaranya atau 63,22% merupakan penutur bahasa Indonesia. Mereka ini berdiam di kota sebanyak 3.056.744 orang, dan berdiam di pedesaan sebanyak 10.094.493 orang.

TABEL 1  
PENUTUR BAHASA INDONESIA DALAM TAHUN 1971

| Pulau                  | Penutur Bahasa Indonesia |            |            | Jumlah<br>Seluruh<br>Penduduk | PBI   |
|------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------------|-------|
|                        | Ko                       | Pedesaan   | Jumlah     |                               |       |
| Sumatera               | 3.056.744                | 10.094.493 | 13.151.237 | 20.801.177                    | 63.22 |
| Jawa                   | 925.596                  | 15.976.532 | 25.301.128 | 76.029.636                    | 33.28 |
| Kalimantan             | 774.009                  | 1.950.762  | 2.724.771  | 5.152.572                     | 52.68 |
| Sulawesi               | 925.291                  | 2.998.164  | 3.923.455  | 8.525.364                     | 46.02 |
| Pulau-pulau<br>lainnya | 624.206                  | 2.551.082  | 3.175.288  | 1.859.102                     | 40.40 |
| Jumlah                 | 14.705.846               | 33.570.033 | 48.275.879 | 118.367.850                   | 40.78 |

Catatan:tan:

PBI = Penutur Bahasa Indonesia

Pulau-pulau lainnya = Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Kepulauan Maluku, dan Irian Jaya.

(Sumber: Biro Pusat Statistik, Seri E. Jakarta)

Pulau Jawa mempunyai penduduk sebanyak 76.029.636 orang dan 33,28% dari jumlah ini (25.301.128 orang) adalah penutur bahasa Indonesia. Dari jumlah penutur bahasa Indonesia itu, 9.325.596 orang berdiam di kota dan 15.975.532 orang berdiam di desa.

Terdapat 2.724.711 orang atau 52,88% penutur bahasa Indonesia dari jumlah seluruh penduduk pulau Kalimantan yang banyaknya 5.152.571 orang di antara penutur bahasa Indonesia itu 774.009 orang tinggal di kota dan 1.950.762 orang tinggal di pedesaan. Pulau Sulawesi mempunyai penduduk sebanyak 8.525.364 orang di dalam tahun 1971. Dari jumlah seluruh penduduk ini, 3.923.455 orang atau 46,02% merupakan penutur bahasa Indonesia yang terbagi menjadi dua, yaitu 925.291 orang berdiam di kota dan 2.998.164 orang berdiam di desa-desa.

Tabel 1 lebih lanjut memberikan jumlah penutur bahasa Indonesia di pulau-pulau lainnya di Indonesia yaitu 3.175.288 orang. Jumlah ini merupakan 40,40% dari jumlah seluruh penduduk pulau-pulau tersebut yang besarnya 7.859.102 orang. Penutur bahasa Indonesia itu, 624.206 orang di antaranya berdiam di pedesaan.

Tabel 2 memuat proyeksi jumlah seluruh penduduk dan penutur bahasa Indonesia untuk tahun-tahun 1981, 1991, 2001 dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan kumpulan pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia. Proyeksi yang dibuat oleh penulis (Abas, 1978) itu menunjukkan bahwa jumlah seluruh penduduk Indonesia di dalam tahun 1981 adalah 149.633.710 orang, 49,66% daripadanya (74.308.946 orang) merupakan penutur bahasa Indonesia; jumlah seluruh penduduk Indonesia di dalam tahun 1991 adalah 189.346.603 orang dan dari jumlah ini 59,47% atau 112.621.128 orang merupakan penutur bahasa Indonesia; dan jumlah seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2001 adalah 239.851.645 orang dan 165.540.614 orang di antaranya atau 69,01% merupakan penutur bahasa Indonesia.

TABEL 2  
PROYEKSI JUMLAH PENUTUR BAHASA INDONESIA  
UNTUK TAHUN-TAHUN 1981, 1991 DAN 2001

| Pulau            | 1971       | 1981       | 1991        | 2001        |
|------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Jumlah untuk PBI | 13.151.273 | 21.206.312 | 33.437.405  | 48.025.637  |
| Seluruh JSP      | 20.801.177 | 27.792.618 | 37.133.941  | 49.614.959  |
| Sumatera %       | 63,22      | 76,32      | 90,04       | 96,79       |
| Jumlah untuk PBI | 25.301.128 | 37.700.334 | 55.468.147  | 81.945.586  |
| Seluruh JSP      | 76.029.636 | 93.959.656 | 116.118.103 | 143.385.162 |
| Jawa %           | 33,27      | 40,12      | 47,76       | 57,10       |

| Pulau                                                       | 1971                               | 1981                               | 1991                                | 2001                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Jumlah untuk PBI<br>Seluruh JSP<br>Kalimantan %             | 2.724.771<br>5.152.571<br>52,88    | 4.299.312<br>6.705.937<br>64,11    | 6.783.717<br>8.727.603<br>77,72     | 10.561.946<br>11.385.749<br>92,98   |
| Jumlah untuk PBI<br>Seluruh JSP<br>Sulawesi %               | 3.923.455<br>8.525.364<br>46,02%   | 6.190.668<br>11.095.540<br>55,79   | 9.611.522<br>14.440.559<br>66,55    | 14.143.574<br>18.794.016<br>75,25   |
| Jumlah untuk PBI<br>Seluruh JSP<br>Pulau-pulau<br>lainnya % | 3.175.288<br>7.859.102<br>40,40    | 4.912.320<br>10.079.959<br>48,73   | 7.330.337<br>12.928.397<br>56,69    | 10.863.871<br>16.581.759<br>65,61   |
| Jumlah untuk PBI<br>Seluruh JSP<br>Indonesia %              | 48.275.879<br>118.367.850<br>40,78 | 74.308.946<br>149.633.710<br>49,66 | 112.621.128<br>189.348.603<br>59,47 | 165.540.614<br>239.851.645<br>69,01 |

Catatan:

PBI = Penutur Bahasa Indonesia

JSP = Jumlah Seluruh Penduduk

(Sumber: Biro Pusat Statistik, Seri E. Jakarta)

Dari Tabel 2 di atas dapat pula diketahui bahwa proyeksi jumlah seluruh penduduk Pulau Sulawesi untuk tahun 1981 adalah 11.095.540 orang, 6.190.668 orang (55,79%) di antaranya adalah penutur bahasa Indonesia; untuk tahun 1991 jumlah seluruhnya adalah 14.440.559 orang, 9.611.522 (66,55%) di antaranya adalah penutur bahasa Indonesia; dan untuk tahun 2001 jumlah seluruhnya menjadi 18.794.016 orang dan jumlah penutur bahasa Indonesianya menjadi 14.143.574 orang atau 75,25%.

Dari proyeksi jumlah seluruh penduduk Pulau Sulawesi untuk tahun-tahun 1981, 1991, dan 2001 seperti disebutkan di atas, penduduk Propinsi Sulawesi Selatan diproyeksikan berjumlah 6.741.521, 8.773.916, dan 11.419.027 orang untuk masing-masing tahun. Selanjutnya jumlah penutur bahasa Indonesia untuk tahun-tahun yang disebutkan itu, diproyeksikan masing-masing berjumlah 2.903.941, 4.582.018, dan 7.229.792 orang. Jumlah-jumlah ini memberikan presentase sebesar 43,07%, 52,22%, dan 63,31%.

Tabel 3 di bawah ini akan memperjelas situasi yang digambarkan di atas itu.

**TABEL 3**  
**PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK DAN PENUTUR BAHASA INDONESIA**  
**PROPINSI SULAWESI SELATAN**

| Propinsi |     | 1991      | 1971      | 1981      | 2001       |
|----------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|
| Sulawesi | PBI | 4.582.016 | 1.840.428 | 2.903.941 | 7.229.792  |
| Selatan  | JSP | 8.773.916 | 5.179.911 | 6.741.521 | 11.419.027 |
|          | %   | 52,22     | 39,53     | 43,07     | 63,31      |

Sumber: Biro Pusat Statistik, Seri E, Jakarta.

Sebagaimana diketahui, di dalam tahun 1980 yang lalu telah diselenggarakan sensus penduduk di seluruh Indonesia. Sayang sekali laporan lengkap sensus penduduk itu belum disusun. Namun, penulis memperoleh data tentang jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Selatan dan banyaknya penutur bahasa Indonesia yang berdiam di Propinsi ini dari kantod Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Selatan yang berhasil diolah berdasarkan sensus penduduk 1980.

Menurut sensus 1980 jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Selatan adalah 6.059.564 orang. Dari jumlah itu, terdapat sejumlah 2.535.801 orang penutur bahasa Indonesia, atau 41,87% dari jumlah seluruh penduduk. Di bawah ini hasil sensus penduduk 1971 dan 1980 bersama-sama dengan proyeksi jumlah penduduk dan penutur bahasa Indonesia untuk tahun 1981 ditampilkan guna melihat sampai di mana ketepatan proyeksi kependudukan yang dilakukan itu.

Hasil Sensus Penduduk 1971:

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Jumlah PBI              | : | 1.840.428 |
| Jumlah Seluruh Penduduk | : | 5.179.911 |
| % PBI                   | : | 39,53%    |

Hasil Sensus Penduduk 1980:

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Jumlah Seluruh Penduduk | : | 2.535.801 |
| Jumlah Seluruh Penduduk | : | 6.059.564 |
| % PBI                   | : | 41.87%    |

Proyeksi untuk tahun 1981:

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Jumlah PBI              | : | 2.903.941 |
| Jumlah Seluruh Penduduk | : | 6.741.521 |
| % PBI                   | : | 43,07%    |

Andaikata sensus penduduk diselenggarakan di dalam tahun 1981 dan bukan di dalam tahun 1980, seperti yang telah berlangsung, jumlah PBI hasil sensus dan hasil proyeksi tidak akan terlalu berbeda besar. Demikian juga halnya dengan jumlah seluruh penduduk hasil sensus dan jumlah seluruh penduduk hasil proyeksi. Dari angka-angka yang ditulis di atas, kita melihat bahwa perbedaan antara jumlah penutur bahasa Indonesia hasil proyeksi untuk tahun 1981 dengan jumlah penutur bahasa Indonesia hasil sensus 1980 adalah 368.140 orang, sedangkan jumlah seluruh penduduk hasil proyeksi untuk tahun 1981 berbeda sebanyak 681.957 orang dengan jumlah seluruh penduduk hasil sensus 1980. Kedua perbedaan itu tampaknya agak terlalu besar untuk jangka waktu satu tahun. Namun, perbedaan-perbedaan itu masih berbeda dalam batas-batas toleransi statistik.

Berangkat dari asumsi bahwa proyeksi kebahasaan yang telah dilakukan itu mempunyai derajat ketepatan marginal (atau secara negatif dikatakan mempunyai derajat ketidaktepatan yang masih dapat ditoleransi), di bawah ini dimuat Tabel 4 yang berisi proyeksi tahun berapa ketika suatu propinsi memiliki penduduk 100% merupakan penutur bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan kata lain, jumlah seluruh penduduk sama dengan jumlah penutur bahasa Indonesia.

Proyeksi itu menunjukkan bahwa Metropolitan Jakarta Raya sejak tahun 1981 yang lalu telah memiliki penduduk yang seluruhnya merupakan penutur bahasa Indonesia.

TABEL 4  
TAHUN KETIKA TIAP-TIAP PROPINSI  
AKAN MEMPUNYAI PENDUDUK 100%  
PENUTUR BAHASA INDONESIA

| Propinsi                    | Tahun Ketika Penduduk<br>100% PBI |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Metropolitan Jakarta Raya   | 1981                              |
| Irian Jaya (Daerah Pesisir) | 1981                              |
| Riau                        | 1991                              |
| Jambi                       | 1991                              |
| Sumatera Selatan            | 1991                              |
| Sulawesi Utara              | 1991                              |
| Maluku                      | 1991                              |
| Sumatera Utara              | 2001                              |
| Sumatera Barat              | 2001                              |

| Propinsi                   | Tahun ketika<br>Penduduk 100% PBI |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Bengkulu                   | 2001                              |
| Kalimantan Timur           | 2001                              |
| Sulawesi Tengah            | 2001                              |
| Daerah Istimewa Aceh       | 2011                              |
| Lampung                    | 2011                              |
| Kalimantan Barat           | 2011                              |
| Kalimantan Tengah          | 2011                              |
| Kalimantan Selatan         | 2011                              |
| Nusa Tenggara Timur        | 2011                              |
| Sulawesi Tenggara          | 2021                              |
| Jawa Barat                 | 2031                              |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 2031                              |
| Sulawesi Selatan           | 2031                              |
| Jawa Tengah                | 2041                              |
| Jawa Timur                 | 2041                              |
| Bali                       | 2041                              |
| Nusa Tenggara Barat        | 2041                              |
| Timor Timur                | *)                                |

\*) belum ada data.

(Sumber: Biro Pusat Statistik, Seri E. Jakarta)

Demikian pula halnya dengan daerah pesisir Irian Jaya, sedangkan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat baru pada tahun 2041 yang akan datang seluruh penduduknya merupakan penutur bahasa Indonesia. Propinsi-propinsi lainnya di antara kedua tahun itu.

Untuk pulau Sulawesi yang mempunyai empat propinsi, tahun-tahun ketika keempat propinsi itu akan mempunyai penduduk yang 100% penutur bahasa Indonesia berbeda-beda. Propinsi Sulawesi Utara yang paling lebih dahulu memiliki penduduk yang seluruhnya merupakan penutur bahasa Indonesia, yaitu pada tahun 1991. Kemudian disusul oleh Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2001, oleh Propinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021, dan terakhir oleh Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2031.

Implikasi proyeksi kebahasaan berdasarkan sensus penduduk yang telah diutarakan di atas ialah pendeteksian yang dini dan pengenalan kita pada masalah kebahasaan yang akan muncul. Dengan demikian, para ahli

bahasa dan pejabat yang berwenang di bidang kebahasaan dapat mempersiapkan segala sesuatunya guna mengatasi masalah itu atau sedapat-dapatnya memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh masalah kebahasaan tersebut.

### Pengembangan Bahasa Indonesia

Dalam rangka memantapkan kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, pengembangan bahasa Indonesia mutlak harus dilaksanakan secara sadar, terarah, dan berencana. Pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dalam konteks pembangunan nasional. Arah pengembangan itu ialah menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi pemerintahan yang efektif, sebagai sarana pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang lebih daripada mada, dan sebagai sarana pendidikan dan pengajaran yang serba guna. Terciptanya atribut-atribut kesaranaan bahasa Indonesia tersebut tidak hanya melalui proses alamiah yang merupakan anugerah Tuhan, tetapi lebih banyak melalui proses perencanaan yang merupakan hasil pemikiran para ahli bahasa sendiri.

Pada bahagian depan makalah ini telah disebutkan bahwa Gonzalez memberikan angka 3,7 kepada indeks keadaan kebahasaan secara menyeluruh (*overall index of language welfare*) dari bahasa Indonesia. Dari ketujuh indikator masalah kebahasaan, baru dua indikator yang mencapai nilai maksimum, yakni indikator mengenai kedudukan atau status bahasa-bahasa yang jumlah penuturnya hanya sedikit (*minority language*) dan indikator mengenai penguasaan yang baik dari anggota masyarakat terhadap bahasa-bahasa yang dipergunakan di dalam pemerintahan dan perdagangan. Dua indikator lainnya, yaitu indikator no. 3 (pembinaan dan pengembangan bahasa nasional) dan indikator no. 7 (dayaguna komunikasi massa) bernilai 4, sedangkan indikator-indikator no. 4 dan no. 6 mendapat nilai 3; dan nilai 2 diberikan kepada indikator no. 1, yaitu keadaan kebahasaan yang homogen atau heterogen di suatu daerah atau negara.

Untuk mengembangkan bahasa Indonesia agar dapat mencapai atau sedikit-dikitnya mendekati angka 5 sebagai indeks keadaan kebahasaan secara menyeluruh, nilai indikator no. 1 mutlak harus ditingkatkan secara spektakuler. Demikian pula halnya dengan nilai-nilai untuk indikator-indikator no. 4 dan no. 6 perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Untuk indikator-indikator no. 3 dan no. 7 peningkatannya dilakukan dengan menggalakkan pemakaian bahasa Indonesia di dalam seminar-seminar dan simposium-simposium ilmiah yang bertaraf internasional dan menyebarkan tulisan-tulisan ilmiah populer ke pelosok-pelosok tanah air secara berkala.

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia guna menjadi sarana yang berdayaguna untuk menyukseskan pembangunan nasional, makalah ini akan membicarakan lebih lanjut tentang indikator-indikator no. 1, no. 4, dan no. 6.

### **Keadaan Kebahasaan yang Homogen atau Heterogen di Suatu Daerah atau Negara**

Sudah disebutkan di depan bahwa nilai suatu indikator terletak antara angka 1 dan 5 sesuai dengan keadaan kebahasaan negara atau daerah yang bersangkutan. Apabila negara atau daerah itu mempunyai banyak kelompok etnik yang memiliki bahasanya masing-masing, nilai indikatornya adalah 1. Nilai 2 diberikan kepada suatu negara atau daerah yang mempunyai kelompok etnik yang memiliki bahasanya sendiri-sendiri, tetapi satu atau dua kelompok etnik itu menonjol dari yang lain-lainnya. Terjadi semacam perlombaan untuk menjadi kelompok etnik yang dominan. Jika di dalam negara itu terdapat suatu kelompok etnik yang merupakan separuh dari jumlah seluruh penduduk, nilai indikatornya adalah 3; apabila kelompok etniknya merupakan tiga perempat dari seluruh penduduk, nilai indikatornya adalah 4. Nilai 5 dicapai oleh indikator no. 1 itu apabila seluruh penduduk suatu negara atau daerah terdiri hanya satu etnik saja yang memiliki bahasanya sendiri.

Gonzalez memberikan nilai 2 kepada indikator ini yang sebenarnya tidak begitu sesuai lagi dengan keadaan kebahasaan sekarang di Indonesia. Pada saat ini, Indonesia sepatutnya mendapat nilai 4 untuk indikator no. 1. Dan pada tahun dua ribuan yang akan datang nilai indikator tersebut akan menjadi 5, sesuai dengan proyeksi kependudukan yang dimuat pada Tabel 4. Keadaan kebahasaan pada waktu itu di Indonesia akan menjadi homogen, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia menjadi mantap. Peranan dan fungsi bahasa daerah menjadi semakin kecil dan sempit. Keadaan ini dapat merupakan suatu masalah.

### **Kompetensi Anggota Masyarakat di dalam Mempergunakan Bahasa yang Berkedudukan sebagai Bahasa Komunikasi Luas untuk Hubungan Internasional dan untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Indikator ini memiliki hubungan yang sangat penting dengan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sosial dan kebahasaan pada khususnya, di mana untuk hubungan perdagangan internasional dan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling mutakhir mempergunakan sarana bahasa komunikasi luas (*language of wider communi-*

*cation*). Kompetensi di dalam bahasa komunikasi luas sangat bermanfaat di dalam perdagangan dan perundingan internasional, seminar/simposium ilmiah antar bangsa. Nilai yang diberikan oleh Gonzalez untuk indikator no. 4 ini adalah 3. Deskripsi indikasinya adalah suatu golongan elit yang minoritas memiliki penguasaan suatu bahasa komunikasi luas secara pasif dan aktif yang memadai untuk mengadakan hubungan-hubungan internasional dan untuk mengerti secara positif literatur ilmiah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penguasaan anggota masyarakat terhadap bahasa komunikasi luas bahasa Inggris, misalnya) di dalam permulaan tahun 80-an sekarang ini jauh lebih baik dan meluas jika dibandingkan dengan deskripsi indikasi di atas. Nilai indikator ini, dengan demikian, haruslah paling sedikitnya 4 kalau bukan 5 sebab deskripsi indikasi untuk nilai 4 adalah sejumlah kecil kader-kader yang memiliki pendidikan baik anggota berbagai kelompok etnik mempunyai kompetensi yang aktif dan pasif di dalam suatu bahasa komunikasi luas yang bertindak sebagai penerjemah di dalam hubungan internasional dan penyebaran pengetahuan tentang ilmu dan teknologi yang tertulis di dalam bahasa komunikasi luas itu.

Deskripsi indikasi untuk nilai 5 hampir sama dengan untuk nilai 4. Hanya jumlah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi aktif dan pasif di dalam bahasa komunikasi luas itu jauh lebih besar.

Implikasi indikator ini ialah tetap diperlukannya bahasa komunikasi luas oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Bahasa komunikasi luas itu dapat berupa bahasa Perancis atau bahasa Inggris. Bahasa Melayu (bahasa Indonesia di Indonesia, bahasa Malaysia di Malaysia, bahasa Kebangsaan di Singapore, dan bahasa Melayu di Brunei) untuk mengadakan hubungan-hubungan antarbangsa di kawasan Asia Tenggara sudah dapat digolongkan ke dalam kategori bahasa komunikasi luas. Kelemahannya hanyalah bahasa Melayu belum dipergunakan secara luas di dalam tulisan-tulisan ilmiah dan teknologi.

### **Dayaguna Bahasa Pengantar yang Dipergunakan pada Semua Jenjang Lembaga Pendidikan**

Di dalam hal penentuan bahasa pengantar di semua jenjang lembaga pendidikan di Indonesia ketentuannya sudah ada, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa daerah dapat dipergunakan pada dua tahun yang pertama sebagai bahasa bantu guna memperkuat pengertian anak didik. Akan tetapi, kenyataan yang ada, bahasa Indonesia telah dipergunakan dari TK sampai di PT. Seharusnya nilai untuk indikator ini adalah 5 dan bukannya 3 sebagaimana yang diberikan oleh Gonzalez. Hal ini sesuai dengan deskripsi yang dituntut,

yaitu adanya suatu bahasa yang dimengerti dan dipergunakan oleh hampir semua orang yang juga dipergunakan sebagai bahasa untuk buku-buku dan penerbitan lainnya dan sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan.

Di dalam hal pembinaan dan pengembangan bahasa nasional, Indonesia lebih maju jika dibandingkan, misalnya, dengan Pilipina. Meskipun demikian, Gonzalez memberikan nilai 4 kepada indikator ini. Sesuai dengan tuntutan nilai 5 yang bunyinya adalah bahasa nasional dipergunakan sebagai bahasa pengantar di dalam tulisan-tulisan ilmiah terutama di bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, wajar apabila indikator ini mendapat nilai 5.

## Penutup

Identifikasi masalah kebahasaan melalui indeks keadaan kebahasaan secara menyeluruh sebagaimana telah dikemukakan di depan, dapat memberikan gambaran yang nyata tentang masalah kebahasaan yang dihadapi oleh suatu negara, daerah, ataupun kawasan. Dengan mengetahui masalahnya, suatu tindakan yang tepat dan terarah untuk mengatasinya dapat diambil.

Masalah kebahasaan yang mungkin timbul dapat pula didedikasikan sedini mungkin melalui proyeksi kebahasaan yang mendasarkan diri pada sensus penduduk. Proyeksi jumlah penutur bahasa Indonesia di dalam tahun 2000-an, seperti yang dimuat dalam Tabel 4, memberikan petunjuk kepada para ahli bahasa dan pejabat yang berwenang tentang nasib bahasa daerah yang banyak jumlahnya itu sebab paling lambat di dalam tahun 2041 yang akan datang seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya diperkirakan berkisar 350 juta orang semuanya akan menjadi penutur bahasa Indonesia. Lalu bagaimana nasib bahasa daerah? Pertanyaan ini dapat dijawab oleh para ahli bahasa dan perencana bahasa. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sedikitnya telah mulai menjawab pertanyaan tersebut dengan menyelenggarakan penelitian-penelitian kebahasaan di daerah-daerah. Serangkaian penelitian tentang bahasa daerah, baik yang memiliki jumlah penutur yang kecil maupun yang memiliki jumlah penutur yang besar, telah dilakukan dan laporan-laporan hasil penelitian itu telah diterbitkan.

Seperti diterangkan di depan, bahasa Melayu (yaitu: bahasa Indonesia di Indonesia, bahasa Melayu di Brunei dan bahasa Kebangsaan di Singapore) memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi bahasa komunikasi luas (*language of wider communication*) di kawasan Asia Tenggara, menggantikan bahasa Inggris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Husen. 1978. "Bahasa Indonesia as Unifying Language of Wider Communication: A Historical and Sociolinguistics Perspective" Disertasi. Manila: Ateneo-PNC Consortium for a Ph.D. in Linguistics.
- , 1980. "Tempat dan Peranan Kajian Bahasa di dalam Kajian Wilayah Asia Pasifik: Suatu Tinjauan Sociolinguistik". Makalah disampaikan pada Seminar Ilmiah Terbatas; "Indonesia dan Perkembangan Asia-Pasifik", 19-21 Mei 1980. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
- , 1982. "Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu Pengetahuan Modern dan Komunikasi Luas di Kawasan Asia Tenggara: Suatu Justifikasi Statistik. Dalam *Pelangi Bahasa*, suntingan Harimurti Kridalaksana dan Anton M. Moeliono. Jakarta: Bhratara.
- Biro Pusat Statistik. Seri E. 1975. *Sensus Penduduk 1971*. 27 jilid. Jakarta: BPS
- Fishman, Joshua A. (Ed.). 1974. *Advanced in Language Planning*. The Hague: Mouton.
- Gonzalez, Andrew B., FSC 1979. "Language and Social Development In the Pasific Area". Makalah *The XIVth Pasific Congres*, Khabarovsk, mimeo-graphic.
- Halim, Amran. (Ed.) 1976. *Politik Bahasa Nasional*. 2 jilid. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Isman, Jakob. 1977. "The Role of the National Language in Fostering National Identities in Indonesia". *Forum Pendidikan* 3.1
- Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, 1982, "Laporan Sementara Sensus Penduduk 1980 untuk Propinsi Sulawesi Selatan".
- Kridalaksana, Harimurti. 1974. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Ende: Nusa Indah.
- , dan Anton M. Moeliono (Ed.) 1982. *Pelangi Bahasa*. Jakarta: Bhratara.

- Mangahas, Mahar. 1976. "The Measurement of the Philippines National Welfare". Dalam *Measuring Philippines Development*, Mahar Mangahas (Ed.).
- Moeliono, Anton M. 1971. "Bahasa Indonesia dan Pembakuannya". Dalam *Seminar Bahasa Indonesia 1968*, suntingan Harimurti Kridalaksana dan Djoko Kentjono. Ende: Nusa Indah.
- Omar, Asmah, Haji (Ed.) 1975. *Essays on Malaysian Linguistics*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Rubin, Joan dan Bjorn H. Jernudd, (Ed.) 1971. *Can Language be Planned? Sociolinguistics Theory and Practice for Developing Nations*. Honolulu: University Press of Hawaii.

## REAKSI SUBJEKTIF TERHADAP BAHASA INDONESIA BAKU DAN NONBAKU: SEBUAH PENGKAJIAN SIKAP BAHASA

Asim Gunarwan  
Universitas Indonesia

### Pendahuluan

Satu hal yang menarik dari usaha-usaha perencanaan bahasa di negara-negara lain adalah adanya kecenderungan bahwa ketidakberhasilan usaha-usaha itu disebabkan ketidakberterimaan apa yang direncanakan itu oleh bagian masyarakat yang berpengaruh atau yang dominan. Di Israel, misalnya, usaha pembakuan lafal dengan menetapkan lafal bahasa Ibrani ragam *Sephardi* sebagai lafal baku mengalami kegagalan karena golongan yang berpengaruh di negara itu, yaitu golongan Ashkenazi, kaum imigran Yahudi dari Eropa, tidak menerimanya. Demikian pula, Irlandia tidak berhasil menghidupkan kembali bahasa Irlandia karena golongan yang dominan di negara itu, yaitu golongan yang bukan petani, lebih suka berbahasa Inggris dan sudah puas dengan kedudukan bahasa Irlandia sebagai bahasa seremonial belaka.

Yang juga menarik dari usaha-usaha perencanaan bahasa adalah langkahnya evaluasi terhadap pelaksanaannya. Dalam hal pembakuan bahasa, evaluasi itu bahkan merupakan masalah tersendiri: adalah sulit untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilannya secara tepat. Sulitnya pengukuran itu antara lain karena pembakuan bahasa tidak disertai dengan pemerian mendetil mengenai sarasannya dan tidak pula diberi kerangka acuan waktu bilamana hasilnya kira-kira akan tercapai. Hal ini memang sukar sekali dilakukan karena masalah-masalah dalam pembakuan bahasa dapat kita katakan termasuk masalah-masalah yang menurut Rittel dan Webber (1973), seperti di-

kutip Rubin (183:338), adalah "masalah-masalah kejam" ("*Wicked problems*"), yaitu masalah-masalah yang kompleks, sukar dirumuskan, dan sukar dipecahkan. Satu ciri lain "masalah-kejam" itu ialah bahwa ia tidak mengenal aturan berhenti. Apalagi pembakuan itu sendiri memang suatu proses yang tidak pernah berhenti. Menurut Amran Halim (1979:29), pembakuan itu "berlangsung terus menerus selama bahasa yang bersangkutan tetap digunakan oleh masyarakat yang hidup tumbuh, dan berkembang sedemikian rupa, sehingga sebenarnya tidak dapat dikatakan dengan pasti di mana pangkal dan di mana ujungnya".

Makalah ini adalah laporan mengenai penelitian kecil yang tujuannya adalah mengevaluasi kira-kira sampai seberapa jauh usaha pembakuan bahasa Indonesia berterima oleh masyarakat. Khususnya penelitian itu bertujuan mencari informasi bagaimana *sikap* sebagian masyarakat mahasiswa, sebagai calon bagian masyarakat yang berpengaruh, terhadap bahasa Indonesia baku. Informasi mengenai sikap bahasa itu setidaknya-tidaknya mempunyai arti penting apabila ia dikaitkan dengan keberterimaan di atas; orang atau kelompok masyarakat sukar diharapkan mau menerima sesuatu kalau mereka mempunyai sikap negatif terhadapnya. Apa yang terjadi di Kepulauan Fro di Atlantik Utara adalah contoh yang jelas. Sebagian besar penduduk kepulauan itu tidak mau menerima dipakainya dialek selatan sebagai wahana sesuatu yang serius karena mereka mempunyai sikap negatif terhadap dialek itu, yang mereka anggap sebagai "bahasa orang selatan yang terbelakang" (Ferguson, 1983:39). Akhirnya mereka berhasil dengan gemilang mengembangkan bahasa baku mereka setelah mereka memilih dialek tengah, yang mereka asosiasikan dengan hal-hal yang positif, sebagai dasar pembakuan itu.

## Metode

Cara yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik "samaran berbanding" (*matched guise*) yang pernah dipakai oleh Lambert dan kawan-kawan (1960). Teknik ini mirip dengan teknik diferensial semantik yang dikemukakan oleh Osgood, Suci, dan Tannenbaum. Bedanya adalah bahwa apabila pada teknik Osgood dkk. itu yang ditelaah adalah reaksi subjek terhadap kata-kata lepas, pada teknik Lambert dkk. itu yang ditelaah adalah reaksi subjek terhadap bahasa.

Lambert memakai teknik tersamar itu untuk menjelaskan dasar sosio-psikologis pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Secara singkat, teori belajar bahasa yang dikemukakan Lambert mengatakan bahwa agar seseorang berhasil dalam belajar bahasa kedua atau bahasa asing, secara psikologis ia harus siap mengambil berbagai aspek tingkah laku yang merupakan ciri-ciri anggota kelompok linguistik-kultural yang lain itu. Kecenderungan etnosentrisnya dan sikapnya terhadap anggota kelompok yang lain itu, menurut

Lambert, ikut menentukan seberapa jauh orang yang belajar bahasa kedua atau bahasa asing itu akan berhasil (Gardner dan Lambert 1972:3). Sikap itu, dalam kaitannya dengan tujuan belajar bahasa, dapat berupa sikap instrumental dan sikap integratif, yang masing-masing dapat positif atau negatif. Menurut Lambert lagi, dalam menentukan keberhasilan belajar bahasa asing instrumental kurang efektif daripada sikap integratif.

Teknik Lambert itu, seperti mula-mula diterapkan, menggunakan beberapa dwibahasawan yang dapat berbicara dalam dua bahasa yang bersangkutan dengan baik dan lancar. Masing-masing dari dwibahasawan yang akan menyamar sebagai dua orang yang berbeda itu diminta berbicara dua kali, pertama dalam bahasa yang satu dan kemudian dalam bahasa yang lain. Kedua wacana itu direkam dan sejumlah subjek kemudian diminta mendengarkan hasil rekaman itu. Kepada subjek dijelaskan bahwa mereka diminta menilai kepribadian atau ciri-ciri "orang-orang yang suaranya telah mereka dengarkan itu dengan menggunakan skala penilaian, seperti kalau kita mengukur makna konotatif kata-kata menggunakan teknik Osgood dkk., atau kalau kita mengukur sikap efektif dengan menggunakan teknik Likert. Inilah kuncinya: subjek tidak diberitahu, dan diusahakan jangan sampai mereka mendapat kesan bahwa untuk setiap pasang wacana mereka sebenarnya telah mendengarkan dua orang yang berbeda.

Penalaran mengapa untuk satu samaran dipakai seorang dwibahasawan dengan dua wacana (dalam dua bahasa), dan mengapa kedua wacana itu diusahakan agar isinya sepadan, adalah agar diperoleh jumlah maksimal faktor yang sama. Karena faktor-faktor yang lain sama, yang berbeda tinggal variabel independennya, yaitu masing-masing dari kedua bahasa yang dipakai. Dengan demikian, perbedaan yang terdapat dalam variabel dependennya, yaitu nilai pada skala penilaian, dapat dikatakan hanyalah sebagai akibat pengaruh bahasa yang dipakai.

Dengan berkembangnya sosiolinguistik, teknik Lambert yang mula-mula dipakai dalam pengkajian pengajaran bahasa itu, kemudian dipakai untuk mengukur reaksi subjek terhadap bahasa, dialek, gaya bahasa, dan bahasa berakson dengan kerangka teori antardisiplin itu. Di dalam penelitian ini, seperti disebutkan di atas dipakai teknik Lambert itu untuk mengukur sikap bahasa dalam kaitannya dengan usaha pembakuan bahasa Indonesia. Alasan mengapa dipilih teknik ini, dan mengapa tidak dipakai cara menanyakan langsung melalui kuesioner adalah bahwa teknik Lambert itu dianggap lebih baik karena pada dasarnya teknik itu memancing jawaban secara tidak langsung sehingga dapat diharapkan bahwa jawaban itu lebih sah. Kalau responden atau subjek ditanya langsung, ada kemungkinan mereka memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemungkinan ini menjadi lebih besar kalau yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang menyang-

kut diri subjek dengan sesuatu yang bersifat nasional, seperti bahasa Indonesia baku itu.

### Pelaksanaan

a. **Instrumen Penelitian.** Agak berbeda dengan penelitian yang menggunakan teknik Lambert yang asli, yang hanya memakai wacana lisan sebagai stimulasinya, penelitian ini menggunakan dua macam wacana, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Stimulasi dalam bentuk wacana tulis itu dimaksudkan sebagai bahan latihan bagi subjek untuk mengerjakan eksperimen dengan stimulasi lisan nantinya. Dengan demikian, penekanannya adalah pada stimulasi dalam bentuk wacana lisan itu.

Masing-masing dari wacana itu, baik yang tulisan maupun yang lisan, terdiri dari dua versi yang isinya kira-kira sama, yang satu dalam bahasa Indonesia baku (BIB) dan yang lain dalam bahasa Indonesia nonbaku (BIN). Di dalam penelitian ini tidak dipakai kelompok pembandingan (*control group*), tetapi kebakuan dan ketidakbakuan versi-versi itu telah dikonfirmasi oleh beberapa ahli bahasa Indonesia.

Wacana tulis yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari satu paragraf dan diangkat dari sebuah buku astrologi. Dengan sengaja dipilih topik mengenai pengaruh bintang terhadap kehidupan manusia agar subjek mengira bahwa eksperimen ini telah mengenai sifat-sifat atau ciri-ciri seseorang seperti dikisahkan kepada mereka. Versi BIB dan versi BIN wacana tulis kira-kira sama panjang.

Wacana lisan terdiri dari dua topik. Wacana topik pertama, mengenai angin puyuh, dibawakan oleh pria dan diangkat dari sebuah artikel dalam sebuah jurnal internasional. Perubahan-perubahan dibuat sedemikian rupa sehingga kesan "luar negeri" tidak ada. Versi BIB dan versi BIN untuk topik ini kira-kira juga sama panjang. Wacana topik kedua mengenai baik-buruknya bersalin di rumah. Wacana ini diangkat dari sebuah buku mengenai kesehatan itu, dan dibawakan oleh wanita. Versi BIB dan versi BIN ini kira-kira juga sama panjang.

Wacana tulis tersebut di atas dimuat dalam lembar jawaban yang diberikan kepada subjek. Wacana lisannya direkam, dan agar wacana ini terdengar wajar, kedua orang yang diminta membawakannya diminta berlatih lebih dulu sebelum suara mereka direkam. Diusahakan agar nada dan kecepatan berbicara mereka dalam membawakan kedua versi topik masing-masing itu sama. Urutan stimulasi lisan ini adalah

- a) topik pertama versi 1 (dalam BIB, dibawakan pria),
- b) topik kedua versi 2 (dalam BIN, dibawakan wanita),
- c) topik pertama versi 2 (dalam BIN, dibawakan pria), dan
- d) topik kedua versi 1 (dalam BIB, dibawakan wanita).

Untuk mengecek apakah subjek dapat membedakan bahasa baku dari bahasa nonbaku, setelah mengerjakan eksperimen mereka diberi tes yang terdiri dari 20 kalimat, 5 di antaranya adalah kalimat baku. Yang harus mereka lakukan di sini adalah membutuhkan tanda cek di depan kalimat-kalimat baku. Kepada subjek juga ditanyakan apakah mereka mengetahui apa yang disebut teknik Lambert atau *matched quise* itu. Mereka diminta menjawab pertanyaan itu dengan jawaban "ya" atau jawaban "tidak".

b. **Subjek.** Subjek atau penilai di dalam penelitian ini adalah 82 orang mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan mayoritas mereka adalah wanita. Sebenarnya ada 86 orang yang ikut di dalam eksperimen ini sehingga lembar jawaban yang masuk berjumlah 86. Dari 86 lembar jawaban itu 2 tidak dihitung karena yang mengisi adalah mahasiswa Jepang yang bahasa Indonesianya belum terlalu baik, 1 tidak dihitung karena yang mengisi sudah tahu teknik Lambert itu (dari kuliah sosiolinguistik), dan 1 lagi tidak dihitung karena sebagian besar skala penilaian tidak diisi. Ke-82 subjek itu dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: kelompok 1 (K1), yang terdiri dari mahasiswa baru (semester ke-1), berjumlah 36 orang; kelompok 2 (K2), yang terdiri dari mahasiswa semester ke-3, berjumlah 27 orang; dan kelompok 3 (K3) berjumlah 19 orang dan terdiri dari mahasiswa semester ke-5, ke-7, dan ke-9. K1 terdiri dari mahasiswa seksi Inggris, Jepang, dan Arab, dan jurusan Indonesia dan K2 dan K3 terdiri dari mahasiswa seksi Inggris, Jepang, dan Arab. Maksud pengelompokan itu ialah untuk mengetahui apakah ada perbedaan pola penilaian di antara ketiganya.

Jumlah subjek di atas tidak mewakili populasi, yaitu semua mahasiswa Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, apalagi populasi dalam arti yang lebih luas, yaitu semua mahasiswa Universitas Indonesia. Namun, hal itu tidak berarti bahwa kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari data yang diperoleh dari jawaban ke-82 orang itu tidak perlu diperhatikan, apalagi kalau kita ingat bahwa untuk pengkajian-pengkajian model Lambert ini jumlah subjek atau penilai cenderung tidak besar. Dalam pengkajian El-Dash dan Tucker (1975), misalnya, subjek berjumlah 82 orang. Seterusnya dapat kita catat bahwa di dalam pengkajian Elyan dkk. (1978) subjek berjumlah 76 orang. Gould (1977) 91 orang; dan Fraser (1973) 50 orang. Di dalam pengkajian Gardner dan Lambert di Filipina, yang terkenal dengan nama *Philippine Study* itu, jumlah subjek "hanya" 103 orang saja.

c. **Prosedur & Eksperimen.** Eksperimen diberikan pada jam kuliah dan memakan waktu kira-kira 45 menit. Kepada subjek mula-mula dijelaskan bahwa tujuan eksperimen itu ialah menilai kepribadian orang. Kemudian mereka diberi penjelasan bagaimana mengerjakan eksperimen itu. Penjelasan diberikan secara lisan berdasarkan petunjuk tertulis yang dibagikan kepada mereka. Setelah penjelasan diberikan, subjek diminta mengerjakan eksperimen bagian

pertama, yaitu menilai "orang-orang" yang telah menulis dua paragraf itu, yang seperti disebutkan di atas yang pertama dalam BIN dan yang berikutnya dalam BIB. Isi kedua paragraf itu diberitahukan lebih dulu agar subjek dapat memusatkan perhatian kepada bahasanya saja. Setelah semua subjek selesai dengan penilaian mereka untuk bagian pertama ini, mereka diminta mengerjakan eksperimen bagian kedua, yang urutannya adalah seperti disebutkan pada butir c) di atas. Isi tiap-tiap warna diberitahukan kepada subjek sebelum wacana yang bersangkutan diperdengarkan. Eksperimen ini diakhiri dengan subjek mengerjakan tes kecil yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah mereka dapat membedakan kalimat baku dari kalimat nonbaku.

d. **Analisis.** Yang pertama-tama dilihat pada setiap lembar jawaban adalah beberapa kesalahan dibuat oleh subjek yang bersangkutan pada tes kalimat baku itu. Hal ini dimaksudkan untuk memilih-milih lembar jawaban lebih jauh. Subjek yang "tidak lulus" dalam tes ini tidak akan dihitung, dalam arti lembar jawabannya tidak akan diikutsertakan karena ia dianggap tidak dapat membedakan bahasa baku dari bahasa nonbaku. Langkah selanjutnya ialah menstabilasikan jawaban tiap-tiap subjek yang berupa angka-angka penilaian itu ke dalam lembar tabulasi. Angka rata-rata penilaian tes tiap-tiap ciri (*trait*) pada enam skala penilaian itu merupakan data mentah dalam penelitian ini. Analisis dibuat atas dasar rata-rata penilaian itu. Untuk mengukur signifikansi dipakai pengujian -- t (*t--test*).

### Hasil Penelitian

a. **Tes Kalimat Baku.** Dari hasil tes kecil yang dimaksudkan untuk memilih subjek yang tidak dapat membedakan kalimat baku dari kalimat nonbaku itu ternyata bahwa 4 orang membuat 1 kesalahan (jumlah kesalahan terkecil) dan 1 orang membuat 8 kesalahan (jumlah kesalahan terbesar). Perinciannya adalah 13 orang membuat 2 kesalahan, 17 orang 3 kesalahan, 20 orang 4 kesalahan, 13 orang 5 kesalahan, 6 orang 6 kesalahan, dan 3 orang membuat 7 kesalahan. Jumlah kalimat yang diteskan adalah 20 buah. Kalau nilai batas lulus kita tentukan 60 (atau betul 12), berarti semua subjek lulus dari tes kecil itu, dan dengan demikian dapat kita simpulkan ke-82 subjek itu dapat membedakan, dalam tingkat yang berbeda-beda, mana yang kalimat baku dan mana yang bukan. Berdasarkan hal itu, semua data dari ke-82 lembar jawaban itu diolah seluruhnya.

Adalah menarik bahwa pada umumnya subjek mengira bahwa kalimat-kalimat

*Seperti Bapak ketahui, bahwa penyakit ini disebabkan virus. Meskipun ia sudah kaya, tapi ia belum merasa kaya.*

*Bagi mereka yang tertarik, dipersilahkan datang.*

*Kami tidak bisa merubah kebiasaan jelek ini.*

*Menurut Prof. Hasan, maka reboisasi perlu segera dilaksanakan.*

adalah kalimat-kalimat baku. Kalau kecenderungan ini terdapat pula pada masyarakat yang lebih luas, terutama pada bagian masyarakat yang dominan, berarti bahwa para perencana bahasa harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengalahkan bentuk-bentuk yang menyaingi padanan bakunya itu.

**b. Stereotipe.** Stereotipe dapat kita katakan sebagai gambaran atau nosi yang dapat bersifat tetap yang dimiliki oleh banyak orang mengenai orang sebagai anggota suatu kelompok atau mengenai kelompok itu sendiri. Menurut Gardner dan Lambert (1972:98), ada dua cara orang memperoleh stereotipe itu. Pertama, ia dapat memperolehnya dari pengalaman langsung dengan kelompok itu. Kedua, ia dapat memperolehnya secara tidak langsung, yaitu sikap yang ia peroleh dari sikap orang-orang penting di lingkungan sosialnya terhadap kelompok itu. Orang-orang penting itu sendiri mungkin memperolehnya sikap itu dari pengalaman langsung mereka dengan kelompok itu atau mungkin juga memperoleh sikap itu dari pengalaman tidak langsung atau kalau langsung intensitasnya rendah, dengan kelompok tersebut.

Pada dasarnya stereotipe itulah yang dipancing dengan menggunakan teknik Lambert itu. Pada penelitian ini, misalnya, subjek secara tidak langsung diminta untuk menggambarkan stereotipe mereka terhadap orang atau orang-orang yang biasanya menggunakan bahasa Indonesia baku (BIB) dan orang atau orang-orang yang biasanya menggunakan bahasa nonbaku (BIN). Akan tetapi, kalau kita bandingkan kedua stereotipe itu, berhubungan dengan keterbatasan ruang dan waktu, dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu mencari informasi mengenai usaha pembakuan, kita lihat saja bagaimana stereotipe subjek terhadap kedua penutur baku dalam eksperimen ini, yang sekaligus mencerminkan stereotipe subjek terhadap orang-orang yang biasanya menggunakan BIB itu. Stereotipe ini dapat kita baca pada Tabel 1, 2, dan 3 berikut ini.

TABEL 1  
ANGKA RATA-RATA PENILAIAN TERHADAP PENULISAN  
WACANA BIB DAN URUTAN CIRI-CIRINYA

| Kelompok<br>Ciri     | K1         | K2       | K3       | K1+K2+<br>K3 |
|----------------------|------------|----------|----------|--------------|
| (1) Kepandaian       | 5.80[3]    | 5.62[4]  | 5.00[1½] | 5.47[3]      |
| (2) Kesopanan        | 5.87[1]    | 6.00[1]  | 5.05[5]  | 5.64[2]      |
| (3) Pendidikan       | 5.65[5] 6/ | 5.14[9]  | 5.15[4]  | 5.31[6]      |
| (4) Kedudukan Sosial | 5.18[9]    | 5.37[7]  | 4.73[8]  | 5.09[8]      |
| (5) Kemenarikan Hati | 5.37[8]    | 5.25[9]  | 4.63[9]  | 5.08[9]      |
| (6) Kewibawaan       | 5.75[4]    | 5.55[5]  | 4.88[6]  | 5.39[5]      |
| (7) Kejujuran        | 4.93[11]   | 5.11[10] | 4.52[10] | 4.85[10]     |
| (8) Kepercayaan Diri | 5.65[5/6]  | 5.44[6]  | 4.78[7]  | 5.29[6]      |
| (9) Rasa Humor       | 3.78[12]   | 3.62[12] | 3.83[12] | 3.74[12]     |
| (10) Kemarahan       | 3.12[10]   | 4.74[11] | 4.42[11] | 4.76[11]     |
| (11) Ketenangan      | 5.84[2]    | 5.74[3]  | 5.38[3]  | 5.65[1]      |
| (12) Kepemimpinan    | 5.56[1]    | 5.81[2]  | 5.00[½]  | 5.45[45]     |

TABEL 2  
ANGKA RATA-RATA PENILAIAN SUBJEK TERHADAP  
PEMBAWA WACANA BIB TOPIK I URUTAN CIRI-CIRINYA

| Kelompok<br>Ciri     | K1        | K2           | K3         | K1+K2+K3   |
|----------------------|-----------|--------------|------------|------------|
| (1) Kepandaian       | 5.55 [2]  | 5.14 [2]     | 5.31 [2]   | 5.37 [2]   |
| (2) Kesopanan        | 5.83 [1]  | 5.59 [1]     | 5.42 [1]   | 5.61 [1]   |
| (3) Pendidikan       | 5.41 [¾]  | 4.85 [4/5]   | 5.10 [4/5] | 5.12 [3]   |
| (4) Kedudukan Sosial | 5.11 [8]  | 4.88 [5]     | 4.83 [9]   | 4.94 [8/9] |
| (5) Kemenarikan Hati | 5.08 [9]  | 4.51 [10/11] | 4.94 [7/8] | 4.84 [10]  |
| (6) Kewibawaan       | 5.27 [6]  | 4.85 [6/7]   | 5.05 [6]   | 5.05 [4/5] |
| (7) Kejujuran        | 5.00 [10] | 4.96 [4]     | 5.10 [4/5] | 5.02 [7]   |
| (8) Kepercayaan Diri | 5.36 [5]  | 4.66 [9]     | 5.22 [3]   | 5.08 [6]   |
| (9) Rasa Humor       | 3.77 [12] | 3.29 [12]    | 3.61 [12]  | 3.55 [12]  |
| (10) Keramahan       | 4.83 [11] | 4.51 [10/11] | 4.63 ½[11] | 1.65 [11]  |
| (11) Ketenangan      | 5.16 [7]  | 4.74 [8]     | 4.94 [7/8] | 4.94 [8/9] |
| (12) Kepemimpinan    | 5.41 [¾]  | 5.03 [3]     | 4.73 [10]  | 5.05 [4/5] |

TABEL 3  
 ANGKA RATA-RATA PENILAIAN SUBJEK TERHADAP  
 PEMBAWA WACANA BIB TOPIK 2 DAN URUTAN CIRI-CIRINYA

| Kelompok<br>Ciri     | K1        | K2         | K3         | K1+K2+K3     |
|----------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| (1) Kepandaian       | 5.11 [3]  | 5.29 [5]   | 5.21 [2/3] | 5.20 [3]     |
| (2) Kesopanan        | 5.52 [1]  | 5.48 [1]   | 5.52 [1]   | 5.50 [1]     |
| (3) Pendidikan       | 5.47 [2]  | 5.40 [2/3] | 5.21 [2/3] | 5.36 [2]     |
| (4) Kedudukan Sosial | 4.77 [8]  | 4.81 [8]   | 4.73 [11]  | 4.77 [10/11] |
| (5) Kemenarikan Hati | 4.82 [10] | 4.62 [10]  | 4.89 [10]  | 4.77 [10/11] |
| (6) Kewibawaan       | 4.83 [9]  | 4.70 [9]   | 5.00 [7]   | 4.84 [8]     |
| (7) Kejujuran        | 4.68 [11] | 5.34 [4]   | 4.94 [8/9] | 4.98 [6]     |
| (8) Kepercayaan Diri | 5.02 [4]  | 5.40 [2/3] | 5.10 [5]   | 5.17 [4]     |
| (9) Rasa Humor       | 4.11 [12] | 3.59 [12]  | 3.94 [12]  | 3.88 [12]    |
| (10) Keramahan       | 4.94 [5]  | 4.70 [11]  | 4.94 [8/9] | 4.86 [9]     |
| (11) Ketenangan      | 4.88 [7]  | 4.96 [7]   | 5.05 [6]   | 4.96 [7]     |
| (12) Kepemimpinan    | 4.88 [7]  | 4.96 [7]   | 5.05 [6]   | 4.96 [7]     |

Dilihat secara keseluruhan, angka-angka di dalam ketiga tabel di atas menunjukkan kecenderungan positif sehingga dapat kita katakan bahwa stereotipe subjek terhadap pemakai BIB cenderung positif. Nilai tengah skala penilaian adalah 4 dan sebagian besar angka-angka itu di atas 5. Perkecualan yang taat asas adalah angka untuk rasa humor; kecuali pada K1 Tabel 3, semua angka untuk butir penilaian ini adalah di bawah 4. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa subjek cenderung menstereotipekan pemakai BIB sebagai "orang yang tidak mempunyai rasa humor tinggi".

Angka-angka di dalam tabel-tabel itu dapat juga menunjukkan profil umum pemakai BIB. Profil ini dapat kita gambarkan dengan membuat urutan-urutan kedua belas ciri itu menurut angka masing-masing untuk setiap kelompok subjek dan untuk semua subjek. Seperti kita harapkan dari nilai rata-rata rasa humor yang rendah itu, ciri *rasa humor* itu pun menduduki titik terendah pada profil itu. Yang juga menarik adalah bahwa kecuali pada K1 (kelompok mahasiswa baru), ciri *keramahan* juga menduduki titik yang tinggi pada profil yang cenderung positif itu.

Stereotipe mengenai kejujuran pemakai BIB, yang mencerminkan stereotipe subjek terhadap orang-orang yang biasanya menggunakan BIB, tidak begitu seragam. Namun, tampak ada kecenderungan bahwa kejujuran tidak menempati tempat yang tinggi pada profil itu: dari 12 angka yang menunjuk-

kan urutan di dalam tabel-tabel di atas, 8 menduduki tempat rendah pada profilnya.

Implikasi lebih ialah jauh dari angka-angka di dalam ketiga tabel di atas dapat kita tarik sendiri-sendiri. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa secara umum hasil eksperimen dengan menggunakan stimulasi wacana tulis sebanding dengan hasil eksperimen dengan menggunakan stimulasi wacana lisan. Karena itu hasil eksperimen dengan wacana tulis itu dipakai sepenuhnya dalam analisis ini. Berbeda dengan statusnya semula, yaitu sekedar sebagai bahan latihan sebelum subjek eksperimen berikutnya, wacana tulis itu disamakan statusnya dengan wacana lisan.

c. **Sikap Bahasa.** Sikap subjek secara keseluruhan terhadap BIB dapat dibaca dari ketiga tabel di atas. Dengan nilai tengah 4, semua ciri, kecuali ciri *rasa humor*, mempunyai nilai rata-rata di atas 4, yang berarti bahwa sikap mereka terhadap BIB itu berbeda dengan di daerah positif. Masalahnya adalah berapa derajat kepositifan itu. Pertanyaan ini perlu dijawab pertama karena angka-angka di dalam tabel itu angka-angka relatif, tidak mempunyai nilai absolut, dan kedua karena ada variabel independen lain, yaitu BIN, yang juga perlu kita perhitungkan.

Satu hal yang menghambat pembakuan adalah anggapan bahwa semua bentuk bahasa yang ada adalah sama saja, dan anggapan itu menurut Moeliono (1875:4) tercermin pada pendirian "asal orang mengerti". Untuk mengetahui bagaimana sikap subjek terhadap BIB dibandingkan dengan sikap mereka terhadap BIN, kita perlu membandingkan angka rata-rata tiap-tiap ciri yang diperoleh dari stimulasi BIN. Karena tujuan kita adalah mengetahui perbandingan antara sikap terhadap BIB dan sikap terhadap BIN secara umum, di dalam hal ini subjek tidak dikelompokkan seperti pada bagian terdahulu melainkan dijadikan satu saja. Perbandingan itu terlihat pada Tabel 4 berikut ini. Di situ angka rata-rata ciri *kepandaian* untuk variabel BIN sebesar 3,79 itu, misalnya, diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai ciri *kepandaian* untuk semua wacana dalam BIN, dan kemudian jumlah itu dibagi dengan tiga kali jumlah subjek yang memberikan penilaian

TABEL 4  
PERBANDINGAN ANGKA RATA-RATA PENILAIAN SEMUA SUBJEK  
TERHADAP WACANA DALAM BIN DAN  
TERHADAP WACANA DALAM BIB

| Ciri \ Ragam         | BIN  | BIB  | Perbedaan |
|----------------------|------|------|-----------|
| (1) Kepandaian       | 3.79 | 5.34 | + 1.55    |
| (2) Kesopanan        | 4.03 | 5.58 | + 1.55    |
| (3) Pendidikan       | 3.48 | 5.26 | + 1.78    |
| (4) Kedudukan Sosial | 3.66 | 4.93 | + 1.27    |
| (5) Kemenarikan Hati | 3.77 | 4.89 | + 1.12    |
| (6) Kewibawaan       | 3.34 | 5.09 | + 1.75    |
| (7) Kejujuran        | 4.66 | 4.95 | + 0.29    |
| (8) Kepercayaan Diri | 4.25 | 5.18 | + 0.93    |
| (9) Rasa Humor       | 4.28 | 3.72 | - 0.56    |
| (10) Keramahan       | 4.37 | 4.75 | + 0.38    |
| (11) Ketenangan      | 3.99 | 5.20 | + 1.21    |
| (12) Kepemimpinan    | 3.22 | 5.15 | + 1.83    |

Penilaian subjek terhadap BIB, dalam hubungannya dengan BIN, ciri pada dasarnya adalah perbedaan antara angka untuk BIB dan angka untuk BIN. Perbedaan dengan nilai positif berarti pemakai BIB dinilai lebih positif daripada pemakai BIN untuk ciri yang bersangkutan. Sebaliknya, perbedaan dengan nilai negatif berarti bahwa pemakai BIB dinilai kurang daripada pemakai BIN untuk ciri yang bersangkutan.

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat kita katakan bahwa kecuali untuk *rasa humor*, pemakai BIB dinilai lebih daripada pemakai BIN. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum BIB dinilai lebih positif daripada BIN. Untuk *pendidikan* dan *kepemimpinan* pemakai BIB dinilai hampir 2 jenjang di atas pemakai BIN, sedangkan *rasa humor*, yang pertama dinilai kira-kira ½ jenjang di bawah yang kedua. Pengujian-t atas perbedaan angka rata-rata itu menghasilkan nilai  $t = 6.02$ . Dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) = 22,  $t = 6.02$  itu diasosiasikan dengan  $p < 0.01$  (sangat signifikan). Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa *derajat kepositifan sikap subjek terhadap BIB adalah sangat signifikan*.

## Penutup

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memonitor keberterimaan pembakuan bahasa Indonesia oleh masyarakat, khususnya sebagian masyarakat mahasiswa. Informasi yang diperoleh mungkin bukan barang baru, tetapi

bagaimanapun, informasi seperti itu sekali-sekali perlu dicari melalui penelitian. Adalah Richard Noss yang mengatakan bahwa perubahan dalam kebijaksanaan bahasa atau pelaksanaannya seluruhnya didasarkan pada hasil penelitian. Bahkan kalau hasil penelitian itu hanyalah mengkonfirmasi kebijaksanaan yang sudah ada, konfirmasi itu sendiri merupakan nilai tersendiri (Noss, 1967:69).

Menggembirakan bahwa terbukti terdapat sikap positif terhadap BIB dari sebagian masyarakat yang kelak akan menjadi bagian masyarakat yang ikut berpengaruh itu. Menurut asumsi Labov (1967), perubahan sikap bahasa cenderung, mendahului perubahan bahasa. Dalam hal ini kita dapat berharap bahwa adanya sikap yang itu akan mendorong masyarakat mahasiswa untuk lebih bergairah menggunakan BIB – sesuai dengan situasinya. Akan tetapi, dalam perencanaan bahasa tidak jarang kita temui harapan tinggal harapan. Sikap baik memang penting, tetapi bukanlah faktor satu-satunya yang menentukan keberhasilannya. Apalagi sikap itu sendiri, sebagai kesiapan mental dan saraf, dapat menurun kalau tidak dibina terus.

Salah satu cara pembinaan sikap yang secara tidak langsung adalah dengan tetap menjaga agar stereotipe positif tetap positif (dan akan lebih baik lagi kalau ditingkatkan) dan mengubah gambaran negatif menjadi positif. Di atas dikatakan bahwa ciri *kejujuran* cenderung menempati titik rendah pada profil pemakai BIB. Gambaran ini, kalau benar demikian, saya kira akan berubah membaik sesuai dengan berhasilnya pemerintahan kita seperti sedang diusahakan oleh pemerintah dewasa ini. Agaknya memang terlalu lemah kaitannya, tetapi bukanlah suatu hal yang sama sekali tidak mungkin bahwa pemerintahan yang bersih ikut membantu keberhasilan pembakuan bahasa Indonesia.

Satu hal lain yang ikut menentukan keberhasilan pembakuan adalah tersedianya kesempatan untuk mempelajari bentuk baku yang menjadi sasaran pembakuan, dan juga tersedianya kesempatan untuk mengalahkan bentuk nonbaku yang merupakan saingannya. Strategi yang otomatis dipilih untuk itu adalah, di samping upaya penyebaran kepada masyarakat umum, memperkenalkan bentuk baku di sekolah, dan di negara kita dimulai di SD dengan penalaran bahwa bahasa baku akan tumbuh bersama tumbuhnya anak-anak kita. Strategi ini memang baik, tetapi sebaiknya ada upaya lain yang bersifat darurat karena tanpa ini strategi itu dapat mengakibatkan apa yang oleh Haugen (1966:85) disebut *social confusion*.

Upaya darurat itu saya kira dapat dilakukan dengan mengintensifkan pengajaran bahasa Indonesia terutama di perguruan tinggi, serta memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa untuk mengenal bentuk-bentuk baku. Satu cara ialah dengan menyediakan publikasi dalam BIB seluas-luasnya, diperkuat dengan pemakaian BIB seluas-luasnya oleh dosen-

dosen di dalam situasi yang menuntut dipakainya BIB. Untuk yang terakhir itu jelas diperlukan penataran. Untuk Pancasila ada P-4 antara lain karena ia mempunyai kedudukan penting sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia baku juga mempunyai fungsi pemersatu, seperti dikatakan oleh Garvin dan Mathiot (1960), dan karenanya seharusnya ada penataran untuk itu. Penataran, atau sekurang-kurangnya penyuluhan yang lebih intensif, perlu juga diberikan kepada pengasuh dan kerabat kerja surat kabar, majalah, dan media massa yang lain. Pendekatan dan caranya perlu dipikirkan agar tidak timbul sikap negatif: orang yang dibuat malu karena kebiasaan berbahasanya, kalau Halliday (1968:169), sebagai manusia akan menderita luka yang mendasar.

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia baku perlu mendapat prioritas karena sukar kita bayangkan pengembangan pengetahuan dan teknologi modern akan berhasil baik tanpa bahasa Indonesia baku berhasil dikembangkan dan dikuasai secara luas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Cobarrubias, Juan dan Joshua K. Fishman, ed. 1983. *Progress in Language Planning: International Perspectives*. Berlin: Mouton.
- d'Anglejan, Alison dan G. Richard Tucker. 1973. "Sociolinguistics Correlates of Speech Styles in Quebec". Dalam Shuly, Roger W. dan Fasold, Ralph W. (ed).
- El-Dash, Linda dan G. Richard Tucker. 1975. "Subjective Reactions to Various Speech Styles in Egypt". Dalam *Linguistics* 166, 33–54.
- Elyan, Olwen dkk. 1979. "RP-accented Female Speech: The Voice Androgyny?" Dalam *Sociolinguistics Patterns in British English*. Peter Trudgill (ed.). London: Edward Arnold.
- Ferguson, Charles A. 1983. "Language Planning and Language Change" Dalam *Cobarrubias*, Juan dan Joshua A. Fishman (ed.).
- Fishman, Joshua A. (ed.). 1968. *Readings in the Sociology of Language*. The Hague: Mouton.
- Fraser, Bruce. 1973. "Some 'Unexpected' Reactions to Various American – English Dialects". Dalam Shuly, Roger W. dan Ralph W. Fasold (ed.).
- Gardner, Robert C. dan Wallace E. Lambert. 1972. *Attitudes and Motivation in Second-Language Learning*. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers.
- Garvin, Paul L. dan Madeleine Mathior. 1960. "The Urbanization of the Guaraní Language". Dalam Wallace, A.F.C. (ed.), *Men and Culture*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Gould, Philip. 1977. "Indonesian Learners Attitudes Towards Speakers of English". Dalam *RELC Journal*, Vol. 8, Non. 2, December, 68–84.
- Halim, Amran. 1978. "Sikap Bahasa dan Pelaksanaan Kebijakan Bahasa

- Nasional". Makalah disampaikan pada Kongres Bahasa Indonesia III. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1979. "Faktor-faktor Sosial Budaya dalam Pembakuan Bahasa Indonesia". Dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Tahun V, No. 6.
- Halliday, M.A.K. 1968. "The Uses and Use of Language". Dalam Fishman, Joshua A.
- Haugen, Einar. 1966. "Linguistics and Language Planning". Dalam *Sociolinguistics*. William Bright (ed.). The Hague: Mouton.
- Labov, William. 1966. *The Social Stratification of English in New York City*. Washington D.C.: Center for Applied Linguistics.
- Moeliono, Anton M. 1975. "Ciri-ciri Bahasa Indonesia yang Baku". Dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra* Tahun I, No. 3, 2-6.
- Noss, Richard. 1967. *Higher Education and Development in South-East Asia*, Vol. III, Part 2, Paris: Unesco.
- Ray, Punya Sloka. 1968. "Language Standardization." Dalam Joshua Fishman A. (ed.).
- Rubin, Joan. 1983. "Evaluation Status Planning". Dalam *Cobarrubias*, Juan dan Joshua A. Fishman (ed.).
- Shuly, Roger W. dan Ralph W. Fasold (ed.). 1973. *Language Attitudes: Current Trends and Prospects*. Washington D.C.: Georgetown University Press.
- Morag, Shelomo. 1959. "Planned and Unplanned Development in Modern Israeli Hebrew". Dalam *Lingua* 8, 242-263.

## **PERANAN KORAN-KORAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA**

**Sayuti Kurnia**  
IKIP Jakarta

### **Pendahuluan**

Peristiwa Sumpah Pemuda 55 tahun yang lalu mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sehingga ia mampu menjadi tali pengikat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang teguh. Dalam proses perjuangan mewujudkan bahasa persatuan tersebut, bahkan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia selanjutnya, sejarah mencatat bahwa koran-koran Indonesia banyak memberikan andilnya sekali pun dalam peranan yang terakhir ini bahasa koran tiada luput dari kekurangan-kekurangannya.

Sejak awal munculnya koran-koran Indonesia, baik bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia telah dipilih oleh koran atau surat kabar Indonesia sebagai lambang komunikasi. Pilihan ini terjadi tiada lain karena surat kabar terikat pada prinsip aktualitas, periodisitas, publisitas, dan universalitas dalam pekerjaannya. Terutama dalam hubungannya dengan publik pembaca, yakni bagaimana agar surat kabar dapat tersebar seluas-luasnya (publisitas) dan dengan demikian dapat mencapai pemasaran yang luas pula (komersialisitas). Hal ini hanyalah mungkin bila koran menggunakan bahasa yang paling luas dipakai dalam seluruh negeri, yakni bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia.

Hampir bersamaan waktunya dengan pembukaan sekolah-sekolah di Hindia Belanda pada tahun 1804-an — mula-mula di Jawa guna memenuhi kebutuhan akan pegawai negeri Hindia Belanda dan lama-kelamaan diperluas

dengan pengajaran bagi rakyat — di negeri kita telah terbit pula koran-koran yang dapat dimengerti oleh penduduk (baik yang berbahasa Belanda, Melayu dan bahasa Jawa). Dapat disebutkan misalnya tiga jenis koran berikut:

- a. koran-koran yang berbahasa Belanda, tapi banyak menyuarakan dan memberikan simpati pada nasib bahasa Indonesia, seperti *Nieuws Bode*, *De Jawa Bode*, *Soerabaiasch Handelsblad*, *De Oost Post*, *Padangsche Handelsblad*;
- b. koran-koran yang berbahasa Melayu, seperti *Soerat Chabar Betawie*, *Slomporet Malayoe*, *Bintang Timoer*, *Pelita Ketjil*, *Pertja Barat*, *Mataharie Tjahaja Moelja*;
- c. koran-koran yang berbahasa Jawa, seperti *Bromartani*, *Retno Doemilah*.

Kedua peristiwa ini (dibukanya sekolah-sekolah dan terbitnya koran-koran di Indonesia) penting artinya bagi perjuangan dan penentuan nasib bangsa kita nantinya karena hal-berikut.

- a. Segolongan kaum cendekia kita yang paham bahasa Belanda mempunyai bahan bacaan yang sama dengan bangsa Belanda. Dengan demikian, perkembangan di bidang politik, sosial ekonomi dan sebagainya yang dibawakan koran-koran itu dapat mengubah pandangan dan cara berpikir kaum intelektual bangsa kita dalam menghadapi penjajah.
- b. Dengan adanya koran-koran yang berbahasa Melayu, pengembangan bahasa Melayu semakin merata di kalangan bangsa kita, dan selanjutnya ia menjadi tali pengikat dan penghubung dalam mempersatukan jiwa bangsa kita.

Wartawan Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan surat kabar *Retno Doemilah*, misalnya, berusaha menyadarkan bangsa kita dengan menyajikan tulisan-tulisan yang dapat menggugah harga diri, perasaan senasib sepenanggungan dan kepercayaan pada diri sendiri, memupuk rasa tanggung jawab sosial bangsa kita yang berpendidikan, serta menanamkan pengertian dan cara-cara organisasi modern.

Dengan demikian, interelasi antarpembakuan sekolah-sekolah yang dapat mencerdaskan bangsa kita di satu pihak, dengan pembentukan pendapat umum lewat bahasa dan koran-koran di pihak lain, pada kenyataannya telah melahirkan cara-cara perjuangan dan pergerakan nasional bangsa kita menghadapi penjajah di kemudian hari, seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1912) dan lain-lain. Perjuangan surat kabar dalam pergerakan nasional ini semakin nyata lagi pada abad ke-20.

### **Koran Tertua yang Berbahasa Melayu**

Untuk mengetahui surat kabar Indonesia makalah yang pertama kali

menggunakan bahasa "pribumi" alias bahasa Melayu (yang kemudian dibaptiskan menjadi dasar bahasa Indonesia pada peristiwa Sumpah Pemuda), agaknya tidaklah sesulit menerka teka-teki mana dulu ayam atau telur sebab pembuktiannya dapat dilakukan dengan penelitian yang cermat.

Tjokrosisworo (1958:133) dalam bukunya *Sekilas Perjuangan Surat Kabar* menyebutkan ada 3 koran tertua di Indonesia, yakni *Bromartani* yang terbit di Surakarta (29 Maret 1855); *Soerat Chabar Bahasa Melajoe* yang terbit di Surabaya (12 Januari 1856); dan *Soerat Chabar Betawie* yang terbit di Batavia (3 April 1856).

Dari pengamatan penulis terhadap koran-koran tua di Museum Pusat Jakarta, pendapat Tjokrosisworo agaknya benar, Surat Kabar *Bromartani* memang tergolong surat kabar tertua di Indonesia, tapi bukan berbahasa Jawa dengan tulisan aksara Jawa pula, sedangkan koran yang pertama yang terbit di Indonesia ialah *Bataviasche Nouvelles* tanggal 8 Juli 1744 di Batavia dengan memakai bahasa Belanda sebagai lambang komunikasinya.

Dengan demikian, surat kabar berbahasa Melayu yang tertua ialah *Soerat Chabar Melajoe*. Di Museum Pusat koran ini hanya ada terbitan nomor 2 (tanggal 12 Januari 1856) dan seterusnya, sedangkan nomor 1 tidak penulis jumpai. Formatnya kuarto, terdiri dari 4 halaman dan tiap halaman terbagi dalam 2 kolom. Diterbitkan oleh E. Foechie di Surabaya. Isinya menyajikan pengumuman redaksi, pengumuman pemerintah, rubrik kabar-kabar, pengumuman lelang dan iklan. Mengenai bahasa Melayu yang dipakai koran ini dapat ditelaah berita berikut:

#### Chabar di Soerabalja, 8 Janoeari 1856

Pada hari Rebo ada Soldadoe Walanda djaga di pendjagaan besar dan toesoek orang prampoen Djawa. Dari sebab lekas dapet obat, mangka itu orang tinggal hidoep. Dari sebabnya orang misi tida taoe, mangka itoe soldadoe soeda dipegang.

Berita di atas tidak saja gaya jurnalistiknya buruk, juga memakai bahasa Melayu pasar yang kurang baik tata bahasanya jika dikaji menurut ukuran sekarang. Penulisan bahasa jelas masih berdasarkan perekaman lafal atau ucapan, tidak berpegang pada aturan ejaan, misalnya *soldadoe*, *dapet*, *prampoean*, *mangka*, *misi*, *taoe*, *soeda*, *dipedjagaan*, *walanda*. Padahal seharusnya ditulis *serldadoe*, *dapat*, *perempoean*, *maka*, *masih*, *tahoe*, *soedah*, *dipendjagaan*, *Belanda*.

Kira-kira setengah abad kemudian pemakaian bahasa Melayu dalam koran-koran tampak telah semakin baik, yakni menggunakan bahasa Melayu modern. Hal ini dapat kita telaah dalam surat kabar *Soenting Melajoe*, sebuah koran tertua dalam kelompok surat kabar yang terbit permulaan abad ke-20.

Koran ini merupakan surat kabar mingguan pertama yang ditujukan untuk kaum wanita. *Soenting Melajoe* berbentuk tabloid, terdiri dari 4 halaman dan tiap halaman terbagi 2 kolom. Pemimpin redaksi Datoe Soetan Maharadja, dan diterbitkan hari Sabtu.

Di Museum penulis tidak menemukan nomor pertamanya, yang ada *Soenting Melajoe* mulai terbitan nomor 3 tahun 1 tanggal 20 Juli 1912 dan seterusnya. Isi koran ini banyak mengandung segi-segi pendidikan dan nasihat bagi kaum wanita dan pelajar. Di dalamnya banyak dijumpai artikel-artikel kewanitaan, bentuk-bentuk sastra lama seperti syair, gurindam, pantun, cerita bersambung, ruang berita dan iklan. Mengenai bahasa surat kabar ini dapat ditelaah petikan berita *Soenting Melajoe* nomor 3, tanggal 20 Juli 1912 berikut:

#### Perbagai khabar

Padang, pada 20 Juli 1912

Satoe kreta jang sedang di naiki oleh doea orang nona Tjina dan seorang anak ketjil sesampainja ditepi kali moeara, koedanja terkejut menghempah masoek kebatang air moeara; hingga kedoeanja nona dan seorang anak ketjil toeroet masoek kedalam batang air itoe. Oentoenglah ada banjak orang menoeoeng hingga tiadalah koerang soeatoe apa2 kepada penoempangnja.

Tampaklah bahasa dalam surat kabar ini menggunakan bahasa Melayu modern dialek Minangkabau yang cukup baik, yang hampir tidak ada bedanya dengan bahasa Indonesia sekarang sekalipun di sana sini kita jumpai juga cacat-cacat ejaan.

Sejak bahasa Indonesia dibaptiskan menjadi bahasa persatuan surat kabar — yang sebelumnya gigih memperjuangkan, mempertahankan, dan memperkokoh pemakaian bahasa Melayu itu — menggunakan bahasa Indonesia sebagai lambang komunikasinya. Koran-koran senantiasa turut mengikuti dan mengembangkan bahasa Indonesia yang terus berkembang itu.

#### Penyerapan Unsur-unsur Bahasa Asing

Surat kabar sebagai alat jurnalistik senantiasa melakukan pencatatan berbagai peristiwa sehari-hari yang hidup di masyarakat, dalam rangka fungsi utamanya menyampaikan informasi atau penerangan. Namun, dalam hal menyampaikan informasi tersebut para wartawan acap kali merasakan bahwa bahasa Indonesia masih jauh daripada cukup untuk menguraikan berbagai persoalan ataupun melukiskan suatu peristiwa dan kemajuan-kemajuan yang

terjadi di masyarakat. Pada umumnya, karena kesederhanaan bahasa Indonesia, istilah-istilah internasional di bidang teknologi, industri, sains, dan lain-lain kurang mampu dilukiskan oleh bahasa Indonesia. Padahal istilah-istilah baru tersebut setiap harinya selalu membanjiri redaksi surat kabar.

Agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dalam gerak langkah kemajuan dunia internasional, terpaksa dalam menimba dan menyerap istilah-istilah bahasa asing dan bahasa daerah ke dalam kosa kata bahasa Indonesia, koran-koran memakai bahasanya "sendiri", yaitu bahasa Indonesia surat kabar yang mempunyai coraknya sendiri: bahasa spontan, bahasa yang hidup di masyarakat, sederhana, dan mudah dalam melukiskan berbagai peristiwa di dunia.

Penerimaan unsur-unsur bahasa asing dan bahasa daerah yang turut memperkaya kosakata bahasa Indonesia itu dapat melalui sastrawan, pimpinan nasional atau pejabat-pejabat, pengumuman-pengumuman resmi dan mass media seperti radio, televisi, film, dan surat kabar. Akan tetapi, dalam menimba dan menyerap istilah-istilah asing tersebut wartawan masih sering melakukannya dengan serampangan dan mengabaikan kaidah-kaidah peristilahan dan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Hal ini dapat dipahami karena sistem kerja surat kabar yang ingin serba cepat menyebabkan wartawan kurang mempunyai cukup waktu meneliti bahasanya. Akibatnya tidak jarang terjadi pemakaian istilah-istilah asing yang campur-baur yang kurang tepat dalam bahasa Indonesia yang cukup membingungkan masyarakat pembaca. Misalnya berita berikut: 1) ... *sebuah joint venture asuransi lahir*, 2) *Simposium negara2 non aligned mengenai penerangan ....* 3) ... *gara2 target the big two pada PON VII...* 4) ... *follow upnya setelah training ....* 5) *asal semuanya terang2an lho, jangan main back-street*, 6) *Kontrak-kontrak pembelian garment oleh Australia*, 7) ... *tiba giliran Elly Kasim jadi pengusaha cassette ....*

Pemakaian istilah-istilah bahasa asing itu sebenarnya dapat dengan mudah dicerna maknanya oleh pembaca seandainya wartawan bertindak lebih bijak dan cermat dengan cara menuliskan penjelasannya atau maksudnya dalam bahasa Indonesia di belakang istilah-istilah asing itu dalam tanda kurung. Umpamanya, *joint venture* (usaha patungan), *the big two* (dua besar), *follow upnya* (kelanjutannya), dan *backstreet* (main belakang, serong), dan lain-lain.

Sumbangan surat kabar dalam menimba dan mengembangkan bahasa Indonesia tentunya akan lebih positif lagi jika wartawan lebih teliti dan seyogyanya mengindahkan kaidah-kaidah penyerapan istilah-istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapan tersebut antara lain dapat dilakukan dengan cara berikut.

a. Mengindonesiakan istilah-istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dengan

- mencari terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau sinonimnya. Seperti *tourist* (wisatawan, pelancong); *assembling* (perakitan), *pavilyun* (anjungan); *non aligned* (nonblok); LNG (gas alam yang dicairkan); dan lain-lain.
- Menyesuaikan penulisannya dengan sistem ejaan bahasa Indonesia, umpamanya: *revolution* (revolusi; *cassette* (kaset); *tourist* (turis); dan sebagainya.
  - Menyerap dan menuliskannya ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana adanya (karena cocok dengan sistem ejaan bahasa Indonesia), seperti radio, piano, pilot.
  - Meminjam sistem penulisan bahasa asing itu sendiri (untuk sementara), sementara belum ditemukan cara penulisannya dalam bahasa Indonesia, misalnya jalan *by pass*, dan sebagainya.

Beberapa istilah asing itu telah lazim diindonesiakan dalam koran-koran Indonesia seperti juga istilah *efektif*, *efisiensi*, *devaluasi*, *manipulasi*, *kudeta*, atau *fusi*, tapi sifat latah dan ingin pamer agaknya telah mendorong sebagian "kuli-kuli tinta" menulis istilah-istilah asing dengan cara serampangan dalam pemberitaan.

### Penyerapan Unsur-unsur Bahasa Daerah

Serupa halnya dengan unsur-unsur bahasa asing, pengaruh bahasa daerah terhadap perkembangan bahasa Indonesia cukup pesat pula berkat peranan pers Indonesia, terutama koran-koran daerah dan surat kabar edisi nasional. Hal ini disebabkan surat kabar sebagai cermin masyarakat selalu menggunakan bahasa yang hidup di masyarakat sehingga banyak perbendaharaan kata dan ungkapan-ungkapan bahasa daerah yang ditimbanya.

Perbendaharaan bahasa daerah yang diindonesiakan koran-koran tersebut pada umumnya dapat digolongkan 2 macam. Pertama, kata-kata dari bahasa daerah yang benar-benar baru dipopulerkan sebagai bahasa Indonesia umum dengan cara menyesuaikan dengan kaidah-kaidah kata dan istilah bahasa Indonesia. (Tapi sayang dalam hal ini jarang wartawan yang mau memberikan tambahan makna atau sinonim di belakang kata-kata itu dalam wujud bahasa Indonesia). Kedua, kata-kata, istilah atau ungkapan bahasa daerah yang sudah ada dalam bahasa Indonesia terus dipelihara pemakaiannya oleh koran-koran.

Dalam hal ini unsur bahasa daerah masing-masing sedapat mungkin dipertahankan, tetapi sistem ejaannya sudah disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia sehingga kalimat-kalimat dalam berita surat kabar itu terasa segar dan hidup. Umpamanya kata *nanar* dalam kalimat berita ... *Chuk Wilbur yang nanar ....* Kata ini lebih terasa hidup daripada kata *sempoyongan* atau *terhuyung-huyung*. Berita ... *bencana alam di Belawan 1 April*

1976 akibat angin puting beliung. (Mimbar Umum), lebih mengena bagi masyarakat Medan daripada kata *topan* atau *angin ribut* sebab ungkapan *angin puting beliung* hidup di masyarakat Melayu (Sumatra) dan maknanya khusus yakni angin yang bertiup berputar-putar ke atas dengan derasnya, sedangkan kata *tali air* dalam berita *Camat Sidikalang Drs. J.C. Purba baru-baru ini telah turun ke lapangan meninjau tali air*, amat serasi nilai rasa bahasanya daripada kata *saluran air*.

Surat kabar di Jawa juga merasa lebih "sreg" untuk menggunakan kata-kata atau istilah-istilah bahasa Sunda atau pun bahasa Jawa dalam pemberitaan. Misalnya, 1) *Pagi itu sekitar jam 08.00 kakek Paiman selesai babuang di tepi sawah*; 2) *Sekeluarga meninggal setelah makan nasi leye*. Kata *babuang* (Sunda) berarti buang air besar, sedang *nasi leye* (Jawa) adalah nasi gaplek yang beracun.

Demikian pula jika surat kabar *Haluan* (Padang) menulis kata-kata daerah dalam berita-berita berikut: 1) ... *dengan dibangunnya jalan korong Tanjung Pinang dengan Tapakis*; 2) *Bupati Solok juga telah menjanjikan akan menambah lagi bantuan untuk pembangunan titian babui dimaksud*; 3) *Akan tetapi, baru sampai di tengah2 sungai, air tiba-tiba mahondoh dengan deras*. Mengapa wartawan lebih suka menggunakan kata *titian babui* daripada *jembatan*, memilih *mahondoh* daripada *meluap* serta memakai *jalan korong* daripada *jalan kecil* tiada lain karena kata-kata bahasa daerah tersebut sudah mendarah daging di masyarakatnya.

Akan halnya bahasa Betawi, pengaruhnya juga telah menyebar demikian luas di wilayah tanah air. Kosakata dan gaya bahasa Betawi acapkali dipakai oleh koran-koran lokal, daerah dan nasional karena pemakaian kata bahasa tersebut dalam surat kabar benar-benar mendukung situasi dan nilai peristiwa yang dikandung peristiwa itu. Misalnya berita-berita berikut: 1) ... *dan tanpa banyak cincong lalu JT membacok kepala D. Simpatupang*. *Cincong* berarti berbuat tanpa pikir panjang; 2) ... *Jusuf Meruk yang diketahuhi pasti apa maunya, sempat melakukan gebrakan-gebrakan meja*. Gaya kalimat ini terasa Betawinya, misalnya dialek kata yang sudah di Indonesiakan *apa maunya* berasal dari *ape maunye*, sedangkan kata *gebrakan* ternyata lebih hidup atau cocok mewakili situasinya, yakni tiruan bunyi (onotopie) benda yang dipukul; (dibandingkan memakai kata *memukul* dan sebagainya).

Pemakaian kata-kata, istilah atau ungkapan baru asal bahasa daerah tersebut dinilai sebagian orang mungkin kurang bersifat keindonesiaan. Namun, pada kenyataannya – berkat peranan koran-koran – unsur bahasa daerah tersebut populer dan diterima oleh masyarakat pemakai bahasa Indonesia. Ini berarti masyarakat mengakui kehadiran unsur-unsur bahasa daerah itu sebagai unsur bahasa Indonesia.

Sekarang seyogyanyalah menjadi tugas para ahli bahasa dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk mempertimbangkan, mengolah dan bila mungkin menerimanya sebagai kosakata bahasa Indonesia yang resmi dan baku.

### Susunan Kalimat

Dari uraian di atas jelaslah, seperti dikemukakan Mochtar Lubis, surat kabar merupakan salah satu alat terbaik untuk menyiarkan istilah-istilah baru, baik yang memperkaya perbendaharaan kata-kata yang baik maupun dalam arti yang buruk (Seminar Bahasa Indonesia 1972, halaman 69).

Pengertian buruk di sini akan bertambah rumit lagi bila wartawan kurang menguasai norma-norma tata bahasa dalam menyusun kalimat-kalimat suatu berita sebab bagaimana mungkin orang dapat memakai kata-kata atau istilah-istilah yang tepat dalam konteksnya bila ia kurang menguasai cara-cara menyusun kalimat yang baik dan benar. Oleh karena itu, penyusunan kalimat merupakan hal yang prinsipal pula dalam pemberitaan surat kabar.

Seberapa jauh surat kabar telah mematuhi tata bahasa Indonesia dapat ditelaah susunan kalimat berita-berita koran-koran berikut ini.

- a. *Diantara jarak 28 km dari kampung Tanjung menuju Balaikarangan itu jalannya sama sekali dibangun baru dengan menebas hutan daratan tinggi. Karena sebelumnya memang tidak pernah ada jalan.*  
(*Harian Akcaya*, 2 April 1876)
- b. *Lalu lintas agak terganggu dengan banyaknya mobil2 pengantar sekolah setelah mengedrop anak tidak segera berangkat. Lebih2 sekolah Karangturi dimana lalu lintasnya ramai sekali*  
(*Suara Merdeka*, 9 April 1976)
- c. *M. Darwis, selaku pemuka masyarakat Tj. Pisang menyatakan bahwa dengan dibangunnya jalan Tj. Pisang dengan Tapakis Lubuk Alung tsb berarti memperlancar roda perekonomian rakyat, yang mana selama ini rakyat Tj. Pisang kalau kepasar berjalan kaki kira2 sejauh 6 km.*  
(*Harian*, 10 April 1976)
- d. *Menurut Gubsu Marah Halim, menyatakan bhw dilihat perkembangan/kemajuan pembangunan saat ini yang dilakukan oleh Orde Baru,*

*dibanding dengan 8 tahun sebelumnya menunjukkan tendensi yang meningkat terus.*

*(Mimbar Umum, 8 April 1976)*

- e. *Dalam rangka untuk peningkatan KB di wilayah Jakarta Timur, oleh petugas penerangan KB Walikota JT telah diadakan peninjauan kedaerah pedalaman dalam wilayah JT.*

*(Pos Kota, 13 April 1976)*

Salah satu ciri bahasa jurnalistik adalah memiliki kalimat baik, yaitu kalimat yang terpendek. Maksudnya bahasa surat kabar itu harus dibuat sedemikian rupa, sederhana, singkat, padat dan jelas, di samping memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa dalam melakukan berbagai peristiwa.

Agaknya berita-berita berbagai koran di atas belum memenuhi persyaratan tersebut. Pembaca akan lebih jelas menangkap maknanya bila berita-berita itu disederhanakan dan diperbaiki sebagai berikut:

- a. *Jalan pada jarak 28 km dari kampung Tanjung menuju Balaikarangan, pembangunannya baru dimulai dengan menebas hutan di dataran tinggi. Sebelumnya di kampung itu tidak ada jalan.*
- b. *Banyaknya mobil pengantar anak sekolah menyebabkan lalu lintas di kota Semarang agak terganggu, karena setelah mobil-mobil itu men-drop anak-anak mereka tidak segera berangkat. Kemacetan sering terjadi, lebih-lebih di sekolah Karangturi yang lalu lintasnya ramai sekali.*
- c. *M. Darwis, pemuka masyarakat Tanjung Pisang, menyatakan bahwa dengan dibangunnya jalan Tanjung Pisang dengan Tapakis Lubuk Alung tersebut berarti memperlancar roda perekonomian rakyat. Selama ini kalau rakyat Tanjung Pisang ke pasar mereka berjalan kaki kira-kira sejauh 6 km.*
- d. *Gubernur Marah Halim menyatakan bahwa kemajuan pembangunan yang dicapai pemerintah Orde Baru saat ini menunjukkan tendensi meningkat dibandingkan dengan 8 tahun sebelumnya.*
- e. *Petugas-petugas KB Jakarta Timur meninjau daerah-daerah pedalaman di wilayahnya, guna meningkatkan program keluarga berencana.*

## Upaya Penertiban dan Pembinaan

Surat kabar banyak memberikan sumbangan dalam pengembangan bahasa Indonesia, tetapi hal itu acapkali masih dilakukan dengan kurang teliti dan cermat. Gejala-gejala yang masih memprihatinkan dalam pemakaian bahasa Indonesia tercermin dalam hal-hal berikut: 1) pemakaian singkatan dan akronim yang tidak berdisiplin; 2) penulisan ejaan yang kurang benar; 3) penyerapan istilah dan kata yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia; pemotongan bagian-bagian kata (apostrop); 4) susunan kalimat yang kurang baik; dan 5) pengaruh bahasa dan dialek daerah dalam kalimat masih terasa di sana sini.

Surat kabar sebagai salah satu media komunikasi massa diproduksi secara massal dan penyebarannya dapat menjangkau pembaca yang luas. Oleh karena itu, surat kabar dapat menjadi alat yang efektif dalam turut memajukan usaha pengembangan bahasa Indonesia.

Koran memiliki posisi dominan dalam hubungan dengan masyarakat. Ia merupakan alat yang ampuh, yang dapat membentuk opini umum, dapat mempengaruhi masyarakat pembaca, baik dengan hal-hal yang negatif maupun positif.

Dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, pastilah surat kabar dapat memberikan pengaruh yang positif bila koran dapat mendidik masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dapat berperan sebagai *watch dog* dalam mengawal pemakaian bahasa Indonesia dari kerusakan.

Masalahnya bagaimana orang dapat memanfaatkan surat kabar secara efisien dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Agaknya hal itu haruslah dimulai oleh para wartawan atau orang koran sendiri.

Patut diakui koran memang berperan dalam mengembangkan istilah-istilah baru dalam gerak kemajuan dunia internasional di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan sebagainya. Dalam usaha mengindonesiakan istilah-istilah baru ke dalam bahasa Indonesia, beberapa surat kabar telah memainkan peranan penting, dengan cara menghadirkan rubrik semacam kamus dalam korannya sehingga baik orang pers sendiri maupun masyarakat pembaca dapat memahami istilah-istilah atau kata-kata baru yang disiarkan surat kabar. Dapat disebutkan di antaranya *Kompas* yang menyetengahkan ruang "Kamus Pembaca" tahun 1968, lalu diganti "Santun Bahasa" setahun kemudian, dan sekarang muncul "Bahasa Kita" yang menyajikan pendapat pembaca tentang masalah kebahasaan.

Demikian pula *Sinar Harapan* menyediakan rubrik "Kamus Pembaca" pula, *Harian Waspada* dengan "Kamus Waspada" dan *Buana Minggu* menampilkan kolom "Perbendaharaan Bahasa Kita"

Upaya-upaya surat kabar membina dan mengembangkan bahasa Indo-

nesia itu sebenarnya dapat terus dilakukan dengan berpedoman pada buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah* yang disusun secara resmi oleh Departemen P dan K.

Pembinaan dan gerakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dapat dilakukan oleh koran-koran melalui kegiatan redaksionalnya, misalnya sebagai berikut.

- a. Setiap redaksi surat kabar seyogianya menyediakan "buku petunjuk" mengenai cara-cara menuliskan bahasa Indonesia yang benar dalam pemberitaan yang harus diketahui dan dikuasai oleh para wartawannya sehingga akan terdapat keseragaman dalam pemakaian bahasa Indonesia di dalam surat kabar.
- b. Setiap desk yang bertugas mengedit dan menulis kembali (*me-rewrite*) tulisan-tulisan wartawan, seyogianya pula dapat meneliti penggunaan bahasa Indonesia jurnalistik wartawan dan memperbaikinya, sebelum tulisan itu naik cetak.
- c. Secara periodik ada baiknya bila seluruh anggota redaksi dan wartawan dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan soal-soal kebahasaIndonesiaan dalam surat kabarnya sebagai langkah introspeksi.
- d. Setiap koran seyogianya dapat membuka rubrik tetap semacam perkamus-an atau "bina bahasa" yang di dalamnya dapat diterangkan mengenai istilah dan kata-kata baru serta masalah bahasa Indonesia lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- e. Para ahli bahasa diharapkan sumbangannya untuk terus-menerus meneliti bahasa surat kabar (mengoreksi, membahas, kesalahan, dan lain-lain) melalui tulisan-tulisan populer di koran-koran sehingga masyarakat pembaca dan orang pers dapat menarik pelajaran daripadanya.
- f. Perlu adanya kerja sama yang baik dan teratur antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan pers dan instansi-instansi lain pemerintah maupun swasta yang tugasnya bersangkutan-paut dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar senantiasa tercipta kesatubahasaan dalam pelaksanaan dan terhindari segala kesalahpahaman yang mungkin ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rosihan, 1974. *Ikhwal Jurnalistik*. Jakarta: PWI Pusat.
- Ali, Lukman, Editor. 1967. *Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Baru Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Alisjahbana, Sutan Takdir, 1956. *Sejarah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Ensiklopedia Indonesia*. 1953. Bandung: Van Hoeve.
- Harahap, Parada. 1952. *Ilmu Pers*. Jakarta: Akademi Wartawan.
- Hakim, A.A. 1970. *Kritis Mengupas Surat kabar*. Jakarta: Cipta Loka.
- Hoeta Soehoet, A.M. 1970. *Hubungan Saling Pengaruh Antara Pers dan Masyarakat*. Jakarta: PTP Press.
- , 1970. *Asal Mula Surat kabar*. Jakarta: PTP Press.
- Mess, C.A. 1953. *Tatabahasa Indonesia*. Bandung: G. Kolf & Co.
- Oey Hong Lie. 1965. *Publisistik Film*. Jakarta: Ichtar.
- Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*. 1975. Departemen P dan K.
- Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. 1975. Departemen P dan K.
- Schramm, Wilbur. 1963. *The Process and Effect of Mass Communication*. Urbana, New York: University Illinois.
- Singgih, Amin. 1973. *Bahasa Bangsa Indonesia*. Jakarta: Harapan Masa.
- Slametmulyana, 1966. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Jembatan.
- , 1964. *Semantik*. Jakarta
- , 1959. *Kaidah Bahasa Indonesia I, II*. Jakarta: Jembatan.
- Tair, M.A. 1969. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Taman Nusa.
- Tjokrosisworo, Sudarjo, 1958. *Sekilas Perjuangan Surat kabar*. Jakarta: SPG.
- Usman, Zuber. 1960. *Kedudukan Bangsa dan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

## DAFTAR MAJALAH DAN SURAT KABAR

- Akcaya*, April 1976.  
*Berita Buana*, Maret dan Juni 1974, Maret dan Juni 1976.  
-----, Juni 1978.  
*Bromartani*, Tahun 1855.  
*Haluan*, April 1976.  
*Kompas*, April 1968, Mei dan Juni 1974, April 1976.  
*Medan Bahasa*, Nomor 7 dan 8, tahun 1954.  
*Merdeka*, April 1976.  
*Mimbar Umum*, April 1976.  
*Pelita*, Maret 1976.  
*Pos Kota*, April 1976.  
*Pos Sore.*, April 1976.  
*Publisistik*, Nomor 2 dan 3, tahun 1975.  
*Sinar Harapan*, Februari 1976.  
*Sinar Pagi*, April 1976.  
*Soenting Melajoe*, 1912.  
*Soerat Chabar Bahasa Melajoe*, 1856.  
*Suara karya*, 1976.  
*Suara Merdeka*, April 1976.  
*Waspada*, April 1976.  
*Angkatan Bersenjata*, Oktober 1978.  
*Berita Buana*, Oktober 1978.  
*Buana Minggu*, 1983.

## **PEMANFAATAN POTENSI UNGKAPAN BAHASA DAERAH DALAM RANGKA PEMANTAPAN FUNGSI BAHASA INDONESIA**

**Suwito**

Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret

### **Pendahuluan**

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bahasa daerah yang dipakai sebagai alat perhubungan dan dipelihara oleh masyarakat pemakainya dipelihara juga oleh negara sebagai bagian kebudayaan nasional yang hidup, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Tap MPR No. II/MPR/1983) menggariskan bahwa pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu identitas nasional. Mengingat pula putusan-putusan Kongres Bahasa Indonesia yang terdahulu dan rumusan beberapa kali Seminar Bahasa Indonesia yang pernah diadakan yang hampir selalu menyebut peranan bahasa daerah, sudah selayaknyalah kiranya kita memperhitungkan potensi bahasa daerah sebagai salah satu sarana mengembangkan bahasa Indonesia.

Di dalam makalah ini akan dicoba memberikan uraian sedikit tentang potensi ungkapan bahasa daerah Jawa, terutama dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi massa.

### **1. Penyerapan Kata-kata Daerah ke dalam Bahasa Indonesia**

Pada waktu ini tidak sedikit kata-kata daerah Jawa yang terserap ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapan demikian ada yang sekedar sebagai penambahan bentuk dengan sedikit perluasan makna yang sebenarnya telah

ada padanannya di dalam bahasa Indonesia sendiri, tetapi ada pula yang merupakan konsep baru yang memang belum ada "wadah"-nya di dalam kosakata bahasa Indonesia. Kata-kata seperti *gampang*, *rampung*, *ngomong*, *empuk*, *enteng*, *joget*, dan *bareng* merupakan beberapa kategori pertama sebab di dalam bahasa Indonesia telah terdapat kata-kata padanannya seperti *mudah*, *selesai*, *bicara*, *lunak*, *ringan*, *tari* dan *serta* yang mempunyai arti lebih kurang sama. Akan tetapi, kata-kata seperti *pamrih*, *ampuh*, *betah*, *krasan*, *tanggung*, *tanggon*, *trengginas*, dan *cespleng* mungkin termasuk kategori kedua. Kata-kata tersebut belum ada padanannya di dalam bahasa Indonesia sehingga munculnya kata-kata seperti itu merupakan perbendaharaan baru dalam khazanah kosakata bahasa Indonesia.

Di antara kata-kata yang termasuk kategori kedua terdapat kata-kata dengan arti sebenarnya (referensial), dan ada pula yang bermakna kias (metaforik). Kata-kata yang mengandung makna kias di samping makna sebenarnya dapat merupakan salah satu jenis ungkapan.

## 2. Pengertian dan Beberapa Jenis Ungkapan Bahasa Daerah

Ungkapan ialah kata atau kelompok kata yang khusus untuk menyatakan suatu maksud dengan arti kiasan (Poerwadarminta, 1976:1129). Batasan itu menegaskan bahwa berdasarkan jumlah unsurnya ungkapan dapat dibedakan menjadi dua macam yakni: (a) berwujud kata dan (b) berwujud kelompok kata, sedangkan syarat semantik yang harus dipenuhi ialah adanya makna kias.

### a. Ungkapan Bahasa Daerah yang Berwujud Kata

**kiprah** : a) (makna referensial): tari gagasan yang penuh gerak dinamik.

b) (makna metaforik): gerak dinamik.

Contoh: *Dalam mengikuti kiprahnya pembangunan setiap warga masyarakat hendaknya turut berperan serta.*

**gandung** : a) jatuh cinta.

b) sangat mencintai, sangat menginginkan.

Contoh: *Bangsa yang sedang gandrung pembangunan harus sanggup mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.*

**pamong** : a) pengasuh anak.

b) berjiwa pengasuh.

Contoh: *Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang di dalam dirinya terdapat jiwa pamong bukan jiwa otokrat.*

- angker** : a) tempat yang menakutkan.  
b) bersikap menakutkan.  
Contoh: *Dengan muka angker orang itu menjawab sekenanya.*
- badut** : a) pelawak murahan.  
b) usaha murahan untuk mencari untung (yang tidak wajar)  
Contoh: *Dalam zaman serba sulit biasanya muncul badut-badut politik dan badut-badut ekonomi.*
- benggol** : a) uang logam pecahan yang paling besar dengan nilai 2,5 sen.  
b) pimpinan (dalam arti negatif).  
Contoh: *Setelah benggol-benggol tertangkap peristiwa-peristiwa kejahatan terasa menurun tajam.*
- mbeber** : a) membentangi kain.  
b) menguraikan panjang lebar.  
Contoh: *Ia harus membeberkan segala persoalannya supaya tidak menjadi salah paham.*
- ajang** : a) tempat makan.  
b) tempat terjadinya peristiwa.  
Contoh: *Kawasan itu sekarang menjadi ajang persengketaan negara-negara raksasa.*
- antek** : a) budak.  
b) pengikut setia (dalam arti negatif).  
Contoh: *Meskipun pimpinannya telah terbunuh, banyak antek-anteknya yang masih meneruskan tindak kejahatan.*
- tuntas** : a) diperas sampai habis airnya.  
b) diselesaikan sampai tidak ada persoalan lagi.  
Contoh: *Masalah penyelewengan itu akan dilacak sampai tuntas.*

#### b. Ungkapan Bahasa Daerah yang Berwujud Kelompok Kata

- a) Berwujud Kata Majemuk yang Mengandung Makna Rangkap (Tembung Saroja)

*tedeng aling-aling      iguh pratikel*

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <i>tumpang tindih</i>    | <i>pahit getir</i>   |
| <i>jamak lumrah</i>      | <i>tambal sulam</i>  |
| <i>jarah rayah</i>       | <i>napak tilas</i>   |
| <i>bobot timbang</i>     | <i>sayuk rukun</i>   |
| <i>luwes kewes</i>       | <i>salah tingkah</i> |
| <i>andap asor</i>        | <i>sambat sebut</i>  |
| <i>sanak kadang</i>      | <i>candak cekel</i>  |
| <i>sangga sengkuyung</i> | <i>bot repot</i>     |
| <i>bagas waras</i>       | <i>ewuh pekewuh</i>  |
| <i>ujar kaul</i>         | <i>rasa rumangsa</i> |
| <i>nyampar nyandung</i>  | <i>guyup rukun</i>   |

Beberapa contoh pemakaian "tembung seroja" tersebut di dalam bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut.

- Tanpa tedeng aling-aling (secara terang-terangan)* ia mengemukakan maksudnya itu kepada yang hadir dalam rapat itu.
- Sudah *jamak lumrahnya (selayaknya)* setiap perjuangan minta pengorbanan.
- Perilakunya sangat menyenangkan. Sopan santun dan selalu *andap asor* terhadap yang lebih tua (*hormat, rendah hati*).
- Kami sebagai orang tua hanya mendoakan, *bobot timbang (pertimbangan akhir)* terserah kepadamu.
- Pembangunan yang hanya bersifat *tambal sulam (tidak mendasar dan tidak terencana)* tidak begitu bermanfaat bagi rakyat.
- Sebagai akhir kegiatan diadakan acara *napak tilas (menelusuri kembali)* perjalanan gerilya Panglima Besar Sudirman.
- Orang tua itu telah banyak mengalami *pahit getirnya (susah dan beratnya)* perjuangan menentang penjajahan.
- Gerombolan itu kemudian melakukan perampokan dan *menjarah rayah (merampas beramai-ramai dengan paksa)* milik penduduk.

b) Berwujud Kata Majemuk dengan Unsur Unit (Tembung Camboran Wutuh)

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <i>cekak aos</i>      | <i>gantung kepuh</i>             |
| <i>tepa selira</i>    | <i>jaga baya</i>                 |
| <i>tapa brata</i>     | <i>mas picis</i>                 |
| <i>tadah udan</i>     | <i>pala wija</i>                 |
| <i>gaga rancah</i>    | <i>tumpang sari</i>              |
| <i>nunggak semi</i>   | <i>sendal pancing</i>            |
| <i>sandang pangan</i> | <i>uba rampe, dan sebagainya</i> |

Beberapa contoh pemakaian "tembang camboran wutuh" di dalam bahasa Indonesia misalnya sebagai berikut.

- (a) Pada dasarnya kita lebih menyukai keterangan yang *cekak aos* (*singkat berisi dan mengenai sasaran persoalannya*) dan tegas.
- (b) Segala *uba rampe* (*peralatan yang diperlukan*) telah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya sehingga pelaksanaan upacara itu tidak banyak mengalami kesulitan.
- (c) Salah satu cara pengamalan Pancasila tercermin dalam sikap *tepa selira* dan selalu *mawas diri* (*tidak melakukan sesuatu karena apabila perlakuan itu ditujukan kepada dirinya ia juga tidak mau*).
- (d) Masyarakat yang rukun, tenteram, dan ingin maju ialah masyarakat yang di antara warganya terhadap sikap *silih asih*, *silih asah*, dan *silih asuh* (*saling mengasihi, saling mendidik, dan saling tenggang rasa*).
- (e) Koperasi dengan sistem *candak kulak* (*memberikan pinjaman dengan bunga rendah dan mengembalikannya dengan cara mengangsur, dengan barang tanggungan seringan-ringannya*) dimaksudkan untuk membantu pengusaha kecil yang masih sangat lemah.

c) Berwujud Sejenis Pepatah atau Kata-kata Arif (Bebasan)

*Rawe-rawe rantas, malang-malang putung*  
*Sepi ing pamrih rame ing gawe*  
*Ing ngarsa sung tulada*  
*Ing madya mangun karsa*  
*Tut wuri handayani*  
*Adigang adigung adiguna*  
*Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti*  
*Rumangsa melu handarbeni*  
*Bisa rumangsa lan aja rumangsa bisa*

Beberapa contoh pemakaian "bebasan" dalam bahasa Indonesia misalnya.

- (a) Setiap pejuang selalu menyadari bahwa apa yang dilakukannya penuh hambatan dan rintangan. Oleh sebab itu, semboyan *rawe-rawe rantas, malang-malang putung* (*segala hambatan dan rintangan akan dihadapi dan diselesaikan dengan segala kemampuan*) harus selalu tertanam jiwanya.
- (b) Hanya dengan rasa pengabdian yang tinggi dan sikap *sepi ing pamrih rame ing gawe* (*bekerja keras dengan tidak mengutamakan keuntungan pribadi*) pekerjaan besar itu akan berhasil baik..
- (c) Ki Hajar Dewantara melukiskan pamong yang baik ialah pamong yang dalam perilakunya menunjukkan sifat-sifat *ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* (*jika di depan ia memberi*

*contoh yang baik, jika di tengah sanggup mendorong kemauan dan selalu mengawasi asuhannya dari belakang dengan penuh kebijaksanaan).*

- (d) Hendaknya kita selalu menghindari sikap *adigang, adigung, adiguna (merasa dirinya lebih berkuasa, lebih tinggi dan lebih berguna dari orang lain)* apabila kita menghendaki keserasian hidup di dalam masyarakat.
- (e) Bangsa yang mempunyai keyakinan *sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti (betapa pun hebatnya pertentangan akan dapat diselesaikan dengan cara pendekatan yang tepat dan bijaksana)* tidak pernah berputus asa dalam mengusahakan perdamaian.
- (f) Ketahanan nasional hanya akan berhasil apabila setiap warga negara benar-benar telah *rumangsa melu handarbeni (merasa turut memiliki secara sadar)* negeri ini.
- (g) Orang yang *bisa rumangsa (dapat merasakan kekurangannya)* lebih bijaksana daripada orang yang *rumangsa bisa*.

#### **d. Komunikasi Massa dan Faktor-faktor yang Perlu Diperhitungkan**

Komunikasi massa merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menitikberatkan perhatiannya kepada orang banyak. Dengan demikian, komunikasi massa termasuk salah satu jenis komunikasi sosial. Sesuai dengan sifat sosialnya, komunikasi massa bertujuan menyampaikan pikiran, harapan, dan pengalaman kepada orang banyak dan mengharapkan apa yang disampaikan itu diterima oleh mereka dan kemudian tumbuh menjadi milik bersama (Susanto, 1976:135). Tujuan akhir komunikasi massa ialah untuk mengubah sikap dan perilaku massa sebagai komunikan sesuai dengan pikiran, harapan, dan pengalaman komunikator. Jadi, arti komunikasi massa terletak justru pada akibat yang terjadi setelah komunikasi itu dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya komunikasi massa dapat dilakukan dengan dua cara, yakni langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung terjadi apabila komunikator berhadapan langsung dengan massa sebagai komunikan. Antara kedua pihak dapat saling berinteraksi dan berdialog sehingga terjadi komunikasi dua arah, sedangkan komunikasi tak langsung terjadi apabila antara komunikator dan komunikan tidak dapat langsung berhadapan, tetapi dilakukan dengan perantara atau media (misalnya media massa: surat kabar, majalah; radio; teve; dan sebagainya). Komunikasi tak langsung lebih cenderung bersifat satu arah.

Baik dilaksanakan secara langsung maupun tak langsung, massa sebagai komunikan dapat *menerima* dan dapat pula *menolak* terhadap apa yang dikomunikasikan oleh komunikator. Apakah massa menerima atau menolaknya, tidak dapat dipaksakan. Yang dapat dilakukan oleh komunikator hanyalah mencari cara yang sebaik-baiknya agar apa yang disampaikan itu dapat di-

terima oleh massa. Satu hal yang tidak dapat diabaikan dalam hubungan ini ialah usaha agar pesan yang disampaikan itu *dapat dimengerti* oleh mereka. Untuk tujuan itu beberapa faktor perlu diperhitungkan antara lain ialah:

- (a) norma-norma sosial dan nilai-nilai kultural yang melatarbelakangi kehidupan masyarakatnya;
- (b) momen-momen situasional ketika komunikasi itu berlangsung;
- (c) pemilihan bahasa sesuai dengan faktor (a) dan (b).

#### e) Bahasa Indonesia sebagai Sarana Komunikasi Massa

Bahasa Indonesia dipakai di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari daerah-daerah yang mempunyai latar belakang sosial, budaya, dan kebahasaan yang berbeda-beda. Latar belakang demikian akan turut menentukan taraf daya tangkap dan daya reaksi massa terhadap apa yang dikomunikasikan di daerah itu. Keadaan semacam itu menuntut setiap sarana komunikasi yang dipergunakan di daerah-daerah mampu melengkap diri dengan unsur-unsur kebahasaan yang hidup di daerah itu agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan ditanggapi secara baik.

Sebagai sarana komunikasi massa, bahasa Indonesia tidak luput dari "tuntutan melengkapi diri" semacam itu sebab dalam kenyataannya belum semua konsep yang ada di dalam bahasa-bahasa daerah dapat tertampung secara tepat di dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Pemantapan potensi unsur-unsur bahasa daerah untuk melengkapi bahasa Indonesia merupakan wujud nyata peranan bahasa daerah dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia seperti dimaksud dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Tap MPR No. II/MPR/1983). Unsur-unsur semacam itu berwujud kata, mungkin kelompok kata, baik yang merupakan kata lugas maupun yang mempunyai makna kias.

Pada waktu ini kata-kata daerah seperti *sandang, prihatin, manunggal, tedeng aling-aling, tambal sulam, napak tilas, tumpang tindih, tata krama, uba rampe, tepa selira*, dan sebagainya pemakaiannya tidak lagi terbatas di daerah dan oleh penutur bahasa Jawa, tetapi telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kata-kata itu telah menjadi milik bersama dan merupakan sebagian dari khasanah perbendaharaan bahasa Indonesia sebagai salah satu (ciri) identitas nasional.

Dipergunakan perbendaharaan bahasa daerah di dalam bahasa Indonesia terasa sangat diperlukan apabila kalimat itu menghendaki hadirnya *nilai rasa* yang pengungkapannya belum ada padanannya yang tepat di dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata *sreg* 'sesuai' dalam kalimat seperti *Peraturan itu masih dirasakan kurang sreg oleh penduduk*, nilai rasanya tidak sama dengan kalimat *Peraturan itu masih dirasakan kurang sesuai oleh penduduk* meskipun arti kedua kata itu lebih kurang sama. Demikian pula pemakaian

kata *cekak aos* 'singkat berisi' dan *ces pleng* 'tepat mengena' dalam kalimat *Jawabnya cekak aos tetapi benar-benar ces pleng* atau kata *gentayangan* 'berkelana' dalam kalimat *Meskipun telah dinyatakan terlarang, anggota organisasi itu masih ada yang gentayangan mencari pengaruh*, nilai rasanya berbeda dengan kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata padanannya dalam bahasa Indonesia.

#### f) Pemanfaatan Potensi Ungkapan Bahasa Daerah di dalam Bahasa Indonesia

Pemanfaatan potensi ungkapan bahasa daerah untuk memperoleh daya komunikasi yang lebih efektif dan nilai rasa yang lebih mengena mungkin dapat dirasakan dalam beberapa contoh pasangan kalimat sebagai berikut.

##### Kalimat Berisi Ungkapan Kata Bahasa Daerah

*Dandanannya* sangat mencolok sehingga menarik perhatian banyak orang.

*Kemanunggalan* ABRI-rakyat merupakan faktor penting dalam menciptakan stabilitas nasional.

Ia harus *membeberkan* segala persoalannya untuk menghindari salah paham.

Kedaaan kesehatan rakyat di daerah itu masih *memprihatinkan*.

*Sandang pangan, dan papan* yang merupakan kebutuhan pokok rakyat selalu mendapat perhatian pemerintah.

Seorang kepala daerah harus *tanggap* terhadap gejolak masyarakat di daerahnya.

Akan minta lagi sudah *sungkan* karena telah banyak bantuan yang diberikannya.

##### Kalimat Berisi Padanannya Dalam Bahasa Indonesia

*Cara berpakaian*nya dan *cara berhias*nya sangat mencolok sehingga menarik banyak orang.

*Kesatuan Jiwa* ABRI-rakyat merupakan faktor penting dalam menciptakan stabilitas nasional.

Ia harus *menguraikan dengan panjang lebar* segala persoalannya untuk menghindari salah paham.

Kedaaan kesehatan rakyat di daerah itu masih *perlu mendapat perhatian*.

*Pakaian, makanan, dan tempat tinggal* yang merupakan kebutuhan pokok rakyat selalu mendapat perhatian pemerintah.

Seorang kepala daerah harus cepat *menerima* dan *memberi jawaban* terhadap gejolak masyarakat di daerahnya.

Akan minta lagi sudah *berat rasanya* karena telah banyak bantuan yang diberikannya.

**(b) Tembung Saroja**

Sudah *jamak lumrahnya* orang tua menanggung akibat kenakalan anaknya.

*Tanpa tedeng aling-aling* ia mengemukakan hal itu kepada istrinya.

Penggunaan kata "nggodhog wedang" (merebus minuman) merupakan penggunaan yang sudah *salah kaprah* dalam bahasa Jawa.

Pembangunan hendaknya tidak dilakukan hanya dengan *tambal sulam*, tetapi harus terencana dan menyeluruh.

*Napak tilas* medan perjuangan pendahulu-pendahulu kita sangat berguna untuk pembinaan generasi muda.

Pemakaian istilah itu masih terasa adanya *tumpang tindih*.

Kita mempunyai cukup banyak peninggalan budaya yang *adi luhung*.

**(e) Tembung Camboran Wutuh**

Segala *uba rampe* untuk keperluan itu telah siap semuanya, tinggal menunggu saat pelaksanaannya.

Di kampung itu ia ditunjuk sebagai *jaga baya*.

Sikap *tepa selira* merupakan salah satu ujud pengamalan Pancasila.

Sudah *merupakan suatu yang semestinya*, orang tua menanggung akibat anaknya.

*Dengan terang-terangan* ia mengemukakan hal itu kepada istrinya.

Penggunaan kata "nggodhog wedang" (merebus minuman) merupakan penggunaan yang *sebenarnya salah tetapi umum dipakai* dalam bahasa Jawa.

Pembangunan hendaknya tidak dilakukan hanya dengan *mengganti* yang telah rusak dan tidak merata, tetapi harus terencana dan menyeluruh.

*Menelusuri kembali* medan perjuangan pendahulu-pendahulu kita sangat berguna untuk pembinaan generasi muda.

Pemakaian istilah itu masih terasa *belum ada kepastian*.

Kita mempunyai cukup banyak peninggalan budaya yang *indah dan tinggi nilainya*.

Segala *peralatan yang diperlukan* untuk keperluan itu telah siap semuanya, tinggal menunggu saat pelaksanaannya.

Di kampung itu ia ditunjuk sebagai *petugas keamanan*.

Sikap *mengukur dengan diri sendiri* merupakan salah satu ujud pengamalan Pancasila.

Pada musim kemarau para petani dianjurkan menanam *pala wija*.

Sebagian besar lahan di daerah itu merupakan sawah *tadah hujan*.

Negara kita sering digambarkan sebagai negara yang *gemah ripah, loh jinawi, tata tentrem, karta raharja*.

Sebagai *tumpang sari* tanaman tembakau biasanya ditanam cabe.

Pakaiannya tinggal *gantung kepuh* karena yang lain tidak sempat diselamatkan dari kobaran api.

#### (d) Bebasan

Setiap perjuangan menuntut pengorbanan. Memang *jer basuki mawa beya*.

Dalam zaman yang serba cepat seperti sekarang ini bukan waktunya lagi kita bekerja *alon-alon waton kelakon*.

Pekerjaan ini tidak akan selesai andai-kata tidak ada kegotong-royongan masyarakat. Sebenarnya *rukun agawe santosa*.

Selama ini ia selalu *sluman slumun slamet*.

Jiwa pejuang pembangunan haruslah jiwa yang *sepi ing pamrih rame ing gawe*.

*Tandangnya seperti banteng ketaton* setelah diketahui salah seorang anak buahnya tertembak.

Pada musim kemarau para petani dianjurkan menanam *tanaman yang tidak membutuhkan banyak air*.

Sebagian besar lahan di daerah itu merupakan sawah *yang hanya dapat ditanami pada musim hujan*.

Negara kita sering digambarkan sebagai negara yang *subur, makmur, aman, dan sejahtera*.

Sebagai *selingan di antara* tanaman tembakau biasanya ditanam cabe.

Pakaiannya tinggal *satu-satunya yang* lain tidak sempat diselamatkan dari kobaran api.

Setiap perjuangan menuntut pengorbanan. Memang *untuk kemudian diperlukan biaya*.

Dalam zaman yang serba cepat seperti sekarang bekerja *biar lambat asal selamat (dapat tercapai maksudnya)*.

Pekerjaan ini tidak akan selesai andai-kata tidak ada kegotong-royongan masyarakat. Sebenarnya *persatuan dan kesatuan itu pangkal kekuatan*.

Selama ini ia selalu terlepas dari *bahaya yang mengancamnya*.

Jiwa pejuang pembangunan haruslah jiwa yang *suka bekerja keras tanpa menghendaki imbalan yang tidak semestinya*.

*Sepak terjangnya seperti banteng terluka* setelah diketahui salah seorang anak buahnya tertembak.

### g) Penutup

Bahasa terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat pemakainya, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan bahasa tidak secepat perkembangan masyarakat. Akibat langsung dari kenyataan itu ialah tidak semua konsep baru yang timbul sebagai hasil perkembangan masyarakat dapat tertampung di dalam bahasa. Menghadapi kenyataan demikian telah banyak usaha dilakukan untuk mengatasinya. Sebagian ada yang cenderung mengambil unsur-unsur bahasa asing sebagai jalan pintas. Namun, kesulitan baru segera muncul, karena tidak semua perbendaharaan bahasa asing mampu menampung konsep-konsep yang diperlukan oleh sesuatu bahasa tertentu, sebab latar belakang sosio-kulturalnya kadang-kadang jauh berbeda. Dalam keadaan seperti itu maka alternatif lain yang dapat ditempuh ialah memanfaatkan unsur-unsur bahasa daerah, yang sebagai bagian dari milik budaya sendiri tidak terlampaui asing dan diperkirakan lebih cocok sebagai sarana penunjang pengembangan bahasa.

Bahasa Indonesia tidak luput dari keadaan seperti itu terutama dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi massa sebab fungsi semacam itu menuntut bahasa Indonesia dapat menjangkau sebanyak-banyaknya massa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Sejalan dengan fungsi dan misi yang dibawanya, salah satu cara yang dapat ditempuh untuk "berbenah diri" ialah dengan memanfaatkan potensi unsur-unsur bahasa daerah (termasuk ungkapan-ungkapan) yang relevan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi massa. Dengan pembenahan diri demikian diharapkan pesan yang disampaikan akan dapat diterima dan dipahami lebih baik sehingga tujuan akhir dari komunikasi itu dapat tercapai.

Namun, perlu disarankan bahwa pemanfaatan unsur-unsur bahasa daerah itu harus tidak berhenti dan terbatas di suatu daerah tertentu saja. Unsur-unsur yang ternyata potensial dan relevan dengan fungsinya sebagai penunjang sarana komunikasi massa hendaknya dapat disebarluaskan sehingga akhirnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi milik bersama dan dapat dipahami secara baik di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hubungan ini peranan media massa benar-benar sangat menentukan. Tanpa bantuan media massa hampir tidak mungkin unsur-unsur semacam itu dapat memasyarakat.

Dalam makalah ini hanya dikemukakan kemungkinan pemanfaatan potensi ungkapan bahasa daerah Jawa dalam menunjang usaha pemantapan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi massa. Namun, kami percaya bahwa bahasa-bahasa daerah lain pun cukup mempunyai bahan yang telah, sedang, dan akan dapat disumbangkan untuk keperluan itu. Apabila semuanya telah tersebar luas dan menjadi milik kita bersama, tidak mustahil bahasa

Indonesia dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi massa akan lebih mantap dan dapat mencapai hasil seperti yang kita harapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abukusno. 1983. *Pepak Basa Jawa*. Surabaya: Penerbit Ekspres.
- Harmoko. 1983. "Menghadapi Kongres Bahasa Indonesia IV." Dalam *Kompas*, 5 Agustus, 1983.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1939. *Baoesastra Djawa*. Groningen: J.B. Wolters.
- Susanto, A.S. 1976. *Filsafat Komunikasi*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Suwito, 1983. *Pengantar Awal Sociolinguistik, Teori dan Problema*. Henery Offset.
- 1983. "Senepan, sebagai Bahan pengajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar". Dalam Seminar Penulisan Bahan Pengajaran Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Yogyakarta.
- Tim Pembinaan Penataran P4 Pegawai Republik Indonesia 1980. Undang-Undang Dasar 1945.
- 1983. *Garis-Garis Besar Haluan Negara*. Jakarta.

## PEMBAKUAN DALAM BIDANG ONOMASTIK KHUSUSNYA DALAM PENAMAAN KESATUAN GEOGRAFIS

Panuti Sujiman  
Universitas Indonesia

### Pendahuluan

Nama-nama geografis merupakan unsur yang sangat penting dalam komunikasi. Hampir tidak mungkin kita bergerak di bidang sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan, administrasi negara, ekonomi, dan banyak bidang lainnya tanpa mengacu kepada suatu nama geografis. Dalam produksi kartografi nama menjelaskan lokasi dan melukiskan ciri fisik atau ciri budaya, serta mengungkapkan sifat wilayah yang diacunya. Namun, memungkinkan kita menarik kesimpulan tentang sifat geografis tempat tersebut.

Dewasa ini telah digunakan pelbagai teknik yang canggih di bidang kartografi; Bakosurtanal, misalnya, memiliki peralatan yang boleh jadi paling modern di Asia Tenggara. Namun, lebih penting daripada teknik dan teknologi yang digunakan ialah ketepatan dan pembakuan dalam penetapan nama kesatuan geografis. Perubahan dan penambahan nama terjadi terus-menerus: nama yang lama dianggap tidak sesuai lagi karena alasan sejarah, daerah pemukiman baru dibuka dan memerlukan nama, kota mengalami perluasan dan memperoleh identitas baru. "Ditemukannya" kesatuan geografis yang baru harus diberi nama pula. Juga keputusan pemerintah untuk mengubah ejaan berpengaruh terhadap nama geografis; peta dan *gazette* menjadi ketinggalan zaman.

Ketidakteraturan nama ini barang tentu menyulitkan komunikasi, sedangkan perubahan atau penggantian nama yang sewenang-wenang dilihat dari segi waktu, prosedur, dan cara melibatkan biaya yang tidak kecil.

## Pembakuan di Tingkat Internasional

Sungguhnya sudah sejak lebih dari satu abad yang lalu para ahli geografi dan kartografi berusaha menangani masalah tersebut. Pada tahun 1871 Konferensi Geografi Internasional yang pertama di Antwerp menyetujui suatu rekomendasi kepada negara-negara yang menggunakan abjad Romawi untuk menerima ejaan toponimi seperti yang berlaku di negara yang bersangkutan tanpa perubahan. Walaupun sejak itu di dalam setiap konferensinya para ahli geografi, kartografi dan onomastik mengemukakan gagasan yang senada, pelaksanaan gagasan tersebut tersendat-sendat. Hal ini antara lain disebabkan komplikasi politik, perang, dan tiadanya koordinasi antara disiplin ilmu yang berkepentingan.

Selepas Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih persoalan tersebut. Dalam empat konferensi internasional yang diadakan berturut-turut di Geneva (1967), di London (1972), di Athena (1977), dan di Geneva (1982) pembicaraan yang terpusat pada pembakuan dihadiri para pakar dari berbagai disiplin, termasuk ahli bahasa dan sejarawan. Untuk kesekian kalinya diserukan agar menerima nama yang secara resmi telah ditetapkan dalam negara yang bersangkutan, termasuk kekhususan dalam ejaannya. Konferensi Geneva yang pertama juga memutuskan membentuk Kelompok Pakar tentang Nama-nama Geografis dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Group of Experts on Geographical Names*) yang anggotanya dipilih dari pelbagai wilayah linguistik di dunia. Kelompok ini menampung saran dan bertugas sebagai badan penghubung dalam pertukaran pengalaman negara anggotanya.

Yang dimaksud dengan membakukan nama geografis ialah memberikan satu nama untuk satu kesatuan geografis, serta juga ejaan yang tunggal yang diresmikan negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, menetapkan nama-geografi yang bentuknya secara linguistik dapat dibenarkan. Namun, pembakuan secara internasional dengan sendirinya harus didahului oleh pembakuan pada taraf nasional. Oleh sebab itu, negara anggota PBB dianjurkan mencari kesepakatan pada tingkat nasional lebih dahulu tentang ejaan nama-nama geografis ini.

## Situasi di Indonesia

Sudah umum diketahui bahwa di wilayah negara kita terdapat beratus-ratus bahasa daerah yang telah lebih dahulu berfungsi sebagai alat komunikasi daripada bahasa Indonesia. Lain daripada itu, dalam perjalanan sejarah bangsa kita terjadi percampuran yang terus-menerus dan simultan antara pelbagai ras serta kebudayaan dan bahasanya. Tidak mengherankan bahwa pertemuan dan

asimilasi kebudayaan serta bahasa ini mengakibatkan sifat tak mantap pada nama-nama kesatuan geografis. Pengertian kekuasaan nyata dampaknya dalam perubahan nama seperti *Holandia – Kotabaru – Sukarnapura – Jayapura* – Nama diubah untuk menghormati penguasa semasa; ada kalanya juga diganti dengan memperhatikan bahasa penguasa semasa, seperti *Bogor – Buitenzorg*. Dalam perjalanan sejarah ada daerah pemukiman yang punah, dan dengan punahnya itu namanya pun lenyap, seperti *Sriwijaya – Majapahit*; sebaliknya muncul daerah pemukiman baru, dan kedatangan penduduk baru (transmigran) ini membawa nama yang baru untuk daerah pemukiman itu, seperti *Umbulharjo* di Lampung.

Di samping pergeseran kekuasaan, bencana alam seperti banjir, taufan, atau wabah dapat juga menjadi sebab keadaan yang tidak mantap ini. Perubahan semacam itu dulu dicatat dalam peta atau khsanah nama geografis lainnya, tetapi secara insidental peristiwa alam itu disebut-sebut di dalam karya sastra atau di dalam *folklore*.

Semula tidak ada usaha membakukan nama kesatuan geografis karena tidak terasa keperluannya. Pada umumnya orang bepergian tidak terlalu jauh, dan – kecuali nama tempat yang penting seperti pusat perdagangan, tempat berziarah – dengan demikian nama geografis tidak terlalu penting dalam hidupnya. Pembakuan mulai dipikirkan setelah orang mulai membuat peta, dan dalam arti yang modern kegiatan ini dimulai setelah penjajah berkuasa di Indonesia. Mereka mengadakan *survei* dalam kawasan yang baru diperolehnya untuk mengetahui dengan tepat keadaan dan kekayaan jajahannya. Pembuat *survei* ini adalah orang-orang yang tidak paham bahasa setempat; banyak nama yang asing bagi telinga mereka, dilafalkannya sesuai dengan lafal bahasa mereka, seperti lafal *Salatiga, Solo*. Ejaannya pun berasosiasi dengan ejaan mereka, seperti *Denpasar, Molukken, Billiton, Celebes*. Apakah *Florida* di daerah Banten merupakan bentuk korup *Pulo Rida* atau sebaliknya, masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Dengan alasan penyesuaian ejaan itu pula, ada hipotesis yang menyatakan bahwa *Dumai* dan *Rumbai* sesungguhnya ejaan yang keinggrisan dari *Damai* dan *Rambai*. Kekacauan ini meningkat karena para pelaksana survei ini mengeja nama kesatuan geografis dengan caranya sendiri, misalnya *Djokjakarta – Djogdjakarta*.

Kekacauan dalam penyebutan dan ejaan nama geografis yang disebabkan salah dengar atau kekurangcermatan para pembuat survei yang tidak paham bahasa setempat dan kekurangan serta ketidakkonsistenan dalam ortografi Belanda/Inggris itu, terwarisi setelah Indonesia merdeka. Meskipun ejaan Van Ophusen, ejaan Suwandi, dan kemudian Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan menunjang keseragaman dalam melambangkan fonem Indonesia, belum ada sistem yang baku untuk kebanyakan bahasa daerah.

Sementara itu tak dapat dimungkiri bahwa daerah besar sahamnya dalam penamaan kesatuan geografis. Hal ini masih akan dibicarakan lebih lanjut. Di samping nama geografis yang bertahan sepanjang masa, seperti (pulau) *Bangka*, (gunung) *Una-una*, (sungai) *Kapuas*, (kota) *Semarang*, nama yang korup bentuknya seperti *Billiton – Belitung*, *Krakatau – Rakata*, dan nama yang berubah sejalan dengan sejarah seperti *Batavia – Jakarta*, *Bukittingi – Fort de Kock – Bukittinggi*, terdapat nama terjemahan, seperti *Kleine Sunda Eilanden – Kepulauan Sunda Kecil*, *Teluk Penyus – Schildpaddenbaai – Teluk Penyus*, dan nama kesatuan geografis yang ditetapkan secara unilatera seperti *Samudera Indonesia*, *Irian Barat*.

Terdorong oleh kebutuhan akan pembangunan dan perkembangan daerah yang cepat, pemerintah melaksanakan proyek-proyek raksasa yang dalam perencanaannya memerlukan peta yang cermat dan data statistik maupun demografis yang tepat. Tiada bakunya nama-nama tersebut menyebabkan kesulitan dalam pembuatan peta, menyulitkan ahli statistik, petugas sensus serta petugas instansi lainnya. Hal ini mengakibatkan kelambatan dan kekeliruan yang tak perlu terjadi.

### Permasalahan Pembakuan

Dalam makalah ini diketengahkan beberapa masalah yang dihadapi dalam pembakuan nama geografis, sedapat-dapat disertai kupasan atau saran. Namun, tidak akan disajikan jalan keluar yang pasti atau kata putus karena wewenang itu tidak ada pada penulis makalah ini. Badan yang berwenang memberikan kata putus dalam persoalan nama geografis, termasuk saran yang diajukan, dan akan dibicarakan kemudian.

Masalah pembakuan nama geografis dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu yang berkaitan dengan hal-hal berikut.

#### 1. Wewenang

Dari uraian di atas, jelas perlu adanya suatu badan nasional yang berwenang membakukan nama kesatuan geografis. Badan ini seyogianya beranggotakan wakil-wakil dari bidang administrasi pemerintahan, bidang survei dan pemetaan, bidang bahasa, dan bidang-bidang lain yang relevan. Ahli-ahli ini seyogianya diangkat oleh pimpinan tertinggi dalam instansinya, sebagai jaminan bahwa suara mereka mewakili instansinya. Dengan demikian, badan ini dapat beroperasi secara efisien. Badan ini hendaknya bekerja berlandaskan kebijakan, prosedur, dan prinsip-prinsip yang tertulis; ini untuk menjaga agar keputusan yang diambilnya tepat asas dan mengikuti norma yang objektif. Dalam pelaksanaan tugasnya, badan ini mempertimbangkan pula efek tindak-

annya terhadap badan-badan pemerintahan, organisasi swasta, dan badan-badan lain. Badan ini berlaku sebagai penasihat dalam pembakuan nama geografis — termasuk pembakuan ortografisnya. Dalam mengambil keputusan hendaklah mengindahkan kepentingan badan dan organisasi tersebut di atas, tetapi dengan mendahulukan kepentingan negara. Keperluan akan badan semacam itu sudah lama dirasakan, dan pada tahun 1970 Bakosurtanal secara resmi telah mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Panitia Nasional tentang Nama-nama Geografi. Namun, usul itu belum memperoleh tanggapan. Perlu dijelaskan bahwa badan atau panitia tersebut menetapkan atau memutuskan perubahan nama atau ortografinya, tetapi wewenang mengumumkannya dapat saja ada pada pihak(-pihak) lain.

## 2. Fisiografi

Sebelum membakukan penamaan kesatuan geografis, lebih dahulu harus dibakukan istilah-istilah fisiografinya. Batasan yang jelas dan tegas dari setiap istilah mengurangi hambatan dalam komunikasi. Misalnya, perbedaan antara bukit dan gunung, tidak nyata, sehingga seringkali dipertukarkan pemakaiannya. Masalah kedua yang timbul ialah bagaimana menetapkan jangkauan fisik suatu kesatuan geografis, misalnya di mana batas suatu pegunungan atau sebuah teluk. Namun, yang dibakukan nanti harus mengacu ke suatu kesatuan geografis yang batas-batasnya dinyatakan dengan jelas dan eksplisit: suatu hal yang seringkali tidak mudah. Terutama pada kesatuan geografis yang berkaitan dengan aliran air, seringkali terjadi bahwa bagian-bagiannya mempunyai nama sendiri, tanpa nama keseluruhan. Penduduk setempat hanya memberi nama kepada bagian-bagian yang mereka kenali saja karena bagian-bagian yang lain maupun keseluruhan sungai itu tidak penting dalam kehidupan mereka. Namun, nama keseluruhan ini boleh jadi perlu ada dalam perkembangan negara kita, misalnya dalam hubungannya dengan proyek-proyek yang menyangkut dasar sungai. Sebaliknya, suatu kesatuan geografis yang besar atau luas mungkin hanya memiliki nama keseluruhan, sedangkan dalam hubungannya dengan pembagian wilayah sebaiknya ada nama sendiri untuk tiap bagiannya. Dalam hal ini harus diperhatikan adanya sistem tertentu dalam penamaan bagian-bagian itu.

## 3. Aspek Kedaerahan

Banyak nama yang menampakkan ciri kedaerahan baik dalam pelafalan maupun ejaannya. Misalnya, *Pameungpeuk*, *Rappang*, *Lhokkruiet*. Lain daripada itu, dalam nama kesatuan geografi tidak jarang terdapat unsur generik yang berasal dari bahasa daerah, seperti *wai* untuk sungai, *situ* untuk telaga,

*thok* untuk teluk. Unsur generik dari bahasa daerah yang dipakai dalam penamaan kesatuan geografis cukup banyak dan karenanya tak dapat diabaikan. Seperti dapat diperiksa dalam lampiran (data berdasarkan Petunjuk Pengumpulan Nama-nama Geografi susunan Bakosurtanal), terdapat 69 istilah daerah untuk sungai atau ciri-ciri air, 59 istilah untuk gunung atau bukit, 43 istilah untuk kampung atau desa, 13 istilah untuk tanjung, 9 untuk pulau, 11 untuk danau, 9 untuk teluk, dan 9 untuk rawa. Istilah serta ejaan daerah seyogianya dipertahankan. Dalam hal ejaan bahasa daerah itu belum dibakukan, dicari kesepakatan bagaimana mengatasinya. Glosari istilah yang memuat istilah-istilah yang dibakukan dengan batasannya secara eksplisit, pelbagai istilah yang dipakai untuk mengacu ke hal yang sama, serta menjelaskan istilah/unsur generik daerah yang dipakai dalam penamaan, akan sangat bermanfaat. Nama setempat boleh jadi berbeda dengan nama resmi suatu tempat atau kesatuan geografis lainnya. Untuk menghindarkan kekacauan yang berkepanjangan, hendaknya diusahakan agar nama yang dibakukan secara nasional diterima penduduk setempat. Dalam menentukan caranya, harus diperhatikan dan dipertimbangkan cara berpikir penduduk, wibawa pemerintah setempat, maupun tingkat pendidikan formal warganya. Biasanya penduduk mau menerima perubahan yang masuk akal.

#### 4. Kebijakan

Pembakuan nama lebih sering berarti memilih di antara beberapa nama daripada mencarikan nama yang baru bagi suatu kesatuan geografis. Lebih dahulu harus ditetapkan asas panduan kerja badan/panitia pembakuan itu. Bagaimana, misalnya, memilih satu di antara sekian buah nama yang sama-sama berterima. Sejauh mana harus dipertimbangkan penggunaan setempat, bukti historis, penggunaan dalam penerbitan atau kartografi. Masalah lain ialah duplikasi nama, yaitu penggunaan nama yang sama untuk kesatuan geografis yang berbeda; misalnya, *Kampung Melayu* ialah nama wilayah di Jakarta, tetapi juga di kota(-kota) lain. Keadaan semacam ini dapat membingungkan, dan karenanya harus ditiadakan atau dikurangi terutama jika kesatuan geografis itu berdekatan letaknya atau sering diacu. Akhirnya harus ditetapkan juga kebijakan tentang kriteria yang akan dipakai untuk menentukan apakah nama perlu diganti atau sebaiknya dipertahankan.

#### 5. Linguistik

Masalah utama ialah membakukan ejaan nama geografis. Nama daerahnya, seperti telah disebutkan di atas, sebaiknya dipertahankan ejaan daerahnya. Dalam hal ejaan bahasa daerah itu belum dibakukan, diberi ke-

sepakatan bagaimana mengatasinya, dengan memperhatikan dan berpedoman kepada Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. Konsonan atau vokal rangkap, misalnya, sangat jarang dalam bahasa Indonesia; namun, terdapat dalam nama geografi dari bahasa setempat, misalnya *Rappang*, *Pabbiring* (Sulawesi Selatan), *Sasaksaat*, *Ciseeng* (Jawa Barat). Apakah penggunaan lambang *eu* untuk nama-nama Sunda *Leuwiliang*, *Pameungpeuk*, dan nama-nama Aceh *Lhokseumawe*, *Peureula* akan dibakukan, terpulang kepada panitia pembakuan nanti. Nama Indonesia, terutama yang makna unsur-unsurnya masih dapat ditelusuri, sebaiknya dieja sesuai dengan EYD; misalnya *Tanjungperiuk* (bukan *Tanjungpriok*), *Sungaigerong* (bukan *Sungei-gerong*). EYD mengatur penulisan nama kesatuan geografis, yaitu "huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi", misalnya *Asia Tenggara*, *Banyuwangi*, *Terusan Suez*. Akan tetapi masih banyak lagi yang tidak diatur di dalamnya. Kebanyakan nama geografis mengandung unsur generik seperti bukit, kali, yang menyatakan sifat/ciri-ciri kesatuan geografis itu. Pada beberapa nama unsur generik ini dapat ditinggalkan, pada beberapa lainnya hal ini tidak pernah terjadi. Dalam perkembangannya, nama yang mengandung unsur generik, tidak selalu mengacu ke kesatuan geografis yang dinyatakan unsur generik tersebut. *Muaratewe*, misalnya, bukan nama (bagian) sungai, melainkan nama tempat pemukiman. *Muara* di situ kehilangan makna generiknya. Karena penamaan sesuatu dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi, keadaan yang membingungkan ini harus dicarikan penyelesaian. Mungkin tidak dalam ujaran, tetapi sekurang-kurangnya dalam tulisan dan pemetaan harus jelas, apakah suatu nama mengacu ke kesatuan geografi yang dinyatakan oleh unsur generiknya atau tidak. Dr. I Made Sandy menyarankan agar membedakan penulisan nama tempat geografis dan nama ciri fisiografis, yaitu dengan merangkaikan unsur generik dengan unsur spesifik dalam nama tempat geografis, dan memisahkan kedua unsur tersebut dalam penulisan nama ciri fisiografis:

*Kalianget* dan *Kali Brantas*

*Cirebon* dan *Ci Liwung*

*Bukittinggi* dan *Bukit Barisan*

Unsur generik yang berasal dari bahasa daerah, tidak diterjemahkan, melainkan dianggap sebagai kesatuan geografis tertentu. Jika sebuah nama geografis berunsur dua nama geografis, sebaiknya digunakan tanda hubung, seperti dalam *Kabupaten Sangihe-Talaud*, *Sawahlunto-Sijunjung*, *Ogan-Komering Ulu*. Tanda hubung seyogianya juga digunakan dalam hal nama spesifiknya merupakan gabungan kata, seperti *Kabupaten Lima-puluh-kota*; ini memudahkan pembacaan dan pemahaman. Unsur pelengkap nama yang menyatakan arah, bagian, atau yang ada kosokbalinya dituliskan terpisah, seperti:

*Nusatenggara Barat, Kalimantan Selatan  
Sumatra Tengah, Lematang Ilir, Ogan-Komering Ulu  
Kepulauan Sunda Kecil, Kebayoran Lama.*

## Kesimpulan

Penamaan kesatuan geografis dimaksudkan untuk melancarkan komunikasi, pengalihan informasi tentang ciri-ciri geografis bumi ini. Nama-nama geografis yang terdapat dalam peta dari berbagai edisi berbeda-beda dan sering tidak taat asas, tidak seragam, bahkan juga terdapat dalam dokumen atau peta yang sama. Keragaman nama dan perubahan nama yang terus-menerus dan sewenang-wenang diadakan, mengakibatkan biaya penelitian, kompliksi dan produksi yang tinggi dan tak terduga.

Akibat kekacauan ini bukan hanya dirasakan oleh pakar geografi/kartografi, pejabat pemerintahan dalam negeri maupun hubungan luar negeri nama kesatuan geografi merupakan salah satu unsur identifikasi yang penting dalam dokumen pemerintahan dan hukum, melainkan juga oleh masyarakat dan individu. Dewasa ini orang ada peluang untuk mengacu, mengenali, bahkan mengunjungi bagian bumi yang tidak pernah didengar atau terpikir oleh nenek-moyangnya. Untuk memenuhi keperluan yang mendesak ini, banyak badan resmi dan swasta menyusun daftar nama untuk keperluan sendiri. Tindakan temporer semacam itu tidak dapat dihindari, tetapi usaha yang tidak terkoordinasi itu makin menyulitkan pembakuan secara nasional.

Makin cepat ditetapkan prosedur yang tepat, makin mudah dan cepat pula keseragaman dan pembakuan di bidang onomastik ini tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Douglas, F.W. 1938. "Malay Place Names of Hindu Origin". *JMBRAS* 16.1, hlm. 150–152.
- I Made Sandy. 1982. "Geographic Names Indonesia" (sic). Kertas ceramah pada Pilot Course in Toponymy, Cisarua.
- Krom, N.N. 1941. "De Naam Sumatra". *BKI*, hal. 5–25.
- Ormeling, F.J. 1982. "Some General Remarks on Names". Kertas ceramah pada Pilot Course in Toponymy, Cisarua.
- Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). 1982. *Petunjuk Pengumpulan Nama-nama Geografi dari Peta Skala 1 : 50.000*.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1979. *Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*. Seri Penyuluhan 9.
- , 1977. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*.
- , 1976. *Pedoman Ejaan Bahasa Daerah Bali, Jawa, dan Sunda Yang Disempurnakan*.
- "Report of the United Nations Group of Experts on Geographical Names on the Work of Its Eighth Session" Kertas kerja UNGEGN pada Konferensi IV Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Standardisasi Nama Geografis. Geneva. 1982.

## SINGKATAN PENTING

## (1) Gunung

A. Adian (Tapanuli)  
 Bl. Bulu Sulawesi  
 BN. Buntu (Sulawesi)  
 BR. Bur (Gayo)  
 BT. Bukit  
 BU. Buku (Halmahera)  
 D. Doro (Sumbawa, Flores)  
 D. Dede (Timor)  
 DO. Deleng (Tapanuli, Aceh)  
 Dg. Dolok (Tapanuli, Aceh)  
 DL. Delong (Tapanuli, Aceh)  
 F. Fude (Buru)  
 FA. Fatu (Timor, Flores)  
 FFN. Foho (Timor, Flores)  
 G. Gunung  
 GE. Gle (Aceh)  
 GG. Gunong (Aceh)  
 GM. Gumuk (Jawa Tengah)  
 GO. Golo (Flores)  
 GR. Geger (Jawa Tengah)  
 GS. Gosong (Sulawesi)  
 H. Hol (Timor)  
 HH. Huhun (Wetar)  
 HL. Hili (Nias)  
 HT. Hatu (Ceram)  
 IR. Igir (Jawa)  
 M. Munduk (Bali, Lombok)  
 MB. Mbotu (Flores)  
 MG. Moncong (Sulawesi)  
 N. Ngga (Ian)  
 NF. Nuaf (Timor)  
 NG. Ngalau  
 OT. Olet (Sumbawa)  
 PD. Padang (Kalimantan)  
 PG. Pematang (Sumatera)  
 PJ. Poco (Flores)  
 PK. Puntuk (Jawa Timur)

PL. Palindi (Sumba)  
 S. Sampar (Sumbawa)  
 T. Tor (Tapanuli)  
 TB. Tubu (Timor, Flores)  
 TD. Tandulu (Timor, Sumba)  
 TE. Tinetan, Tintane (Ceram)  
 TJ. Cot (Aceh)  
 TK. Tangkit (Lampung)  
 TN. Tintin (Kalimantan)  
 TR. Taruik (Timor)  
 TT. Tutu (Sulawesi)  
 U. Uker (Ceram)  
 UK. Uruk (Sulawesi Tengah)  
 UL. Ulate (Ceram)  
 UR. Unter (Sumbawa)  
 W. Wagir (Jawa Tengah)  
 WL. Wolo (Flores)

## (2) Pulau

B. Busung  
 GL. Gili (Lombok, Flores)  
 GS. Gosong (Kalimantan)  
 J. Jef, Jus, (Irian)  
 MI. Mios (Irian)  
 NH. Nuha (Sulawesi, Sumba)  
 NS. Nusa, Nus  
 P. Pulau  
 T. Tokong (Riau)

## (3) Tanjung

B. Batu  
 BK. Buku (Timor)  
 Ng. Ngalu  
 Nn. Nunu (Wetar)  
 Tb. Tubun (P. Tanimbar)  
 Td. Tando (Sulawesi)

- Te. Tongge (Sulawesi)  
 Tg. Tanjung, Tanjong  
 Tn. Tutun (Irian, P. Wetar)  
 To. Tano (Sumbawa)  
 Tr. Ture (Nias)  
 U. Ujung  
 W. Wutun (Timor, Flores)
- (4) Kali**
- A. Air  
 Ak. Air, Aek (Sumatera Tengah)  
 Ake (Halmahera)  
 Al. Alue, Alur (Aceh)  
 Ar. Arul, Arosan (Aceh)
- B. Bah (Sumatera Selatan)
- Bi. Binanga (Sulawesi)  
 Bl. Balang (Sulawesi)  
 Br. Brang (Sumbawa)  
 Bt. Batang (Sumatera)  
 D. Jol (Timor)  
 Dj. Jene (Sulawesi)  
 Dr. Jar (Pantar)
- C. Ger (Irian)  
 I. Ia (Aceh)  
 ID. Idano (Nias)  
 J. Jeh (Bali)  
 Jr. Jer (Irian, P. Babar)  
 K. Kali  
 Ka. Kuala (Aceh, Halmahera)  
 Kd. Kedang (Kalimantan)  
 Kk. Kokok (Lombok)  
 Ko. Kokkar (Sumbawa)  
 Kr. Krueng (Aceh)  
 L. La, Le (Aceh)  
 La. Lawe (Aceh)  
 Lb. Lubuk (Kalimantan)  
 Le. Lae (Aceh)  
 Leb. Lebak (Sumatera)
- Lh. Lahat (Sulawesi)  
 Li. Liu (Kalimantan)  
 Lk. Loku (Sumba)  
 Ln. Luan (Aceh)  
 Lo. Lao (Tapanuli)  
 Lu. Luku (Sumba)  
 Lw. Lowo (Flores)  
 Mo. Mota (Timor)  
 Mt. Meta (Wetar)  
 N. Noe (Timor)  
 Ng. Nanga (Sumbawa)  
 Ni. Nguai (Halmahera)  
 NI. Noil (Timor, Flores)  
 Nn. Nanga (Flores)  
 Ol. Oil (Timor)  
 Pk. Pangkung (Bali)  
 Png. Pangung (Kalimantan)  
 Ps. Paisu (Halmahera)  
 Pt. Parit (Kalimantan)  
 S. Sungae (Aceh)  
 Se. Sunge (Sumbawa)  
 Si. Sungai  
 Sl. Selat (Kalimantan)  
 So. Salo (Sulawesi)  
 Su. Suak (Aceh)  
 Sv. (Irian, P. Selaru)  
 Tj. Curah (Jawa Timur)  
 Tk. Tukad (Bali)  
 Tu. Tulung (Palembang)  
 U. U (Timor)  
 W. Waj (Sulawesi)  
 Wa. Wa (Buru)  
 We. Wae (Ceram)  
 Wh. Weuih (Aceh)  
 Wi. Wai (Lampung, Sumba)  
 Wj. Weje (Irian, P. Selaru)  
 Wn. Waijan (Ceram)  
 Wo. Wajo (Sulawesi, Sula)  
 Wr. Weri (Irian, P. Selaru)

**(5) Telaga**

- Bg. Balang (Sulawesi)
- Da. Danau
- Kb. Kobak
- Kn. Kenohon (Kalimantan)
- Lp. Lopa (Halmahera)
- Lt. Laut (Aceh)
- R. Ranau
- St. Setu, Situ (Jawa Barat)
- T. Telaga
- Ts. Tasik (Sumatera Tengah)
- Wk. Waduk

**(6) Rawa**

- Ba. Balong
- D. Debu (Timor)
- Kl. Kolam (Timor)
- Lb. Lebak
- Lr. Lura (Sulawesi)
- P. Paji
- R. Rawah, Rawah
- RW. Rawang (Palembang, Riau)
- Tr. Telar (Jawa Barat)

**(7) Teluk**

- Ao. Ajiko (Halmahera)
- Dj. Jiko (P. P. Sula)
- Lg. Legon (Jawa)
- Lab. (Labuhan)
- Lhk. Lhok (Aceh)
- Lm. Lempong
- Lo. Loho (Flores)
- Sk. Solok
- TI. Teluk

**(8) Kuala**

- Ka. Kuala
- M. Muarah

## MENUJU TATA BAHASA NORMATIF

Soepomo Poedjosoedarmo  
IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta

### Pendahuluan: Keluhan

Keluhan para mahasiswa asing terutama dari Eropa, Amerika, dan Australia pada waktu mempelajari bahasa Indonesia ialah bahwa seolah-olah bahasa Indonesia tidak mempunyai kodifikasi gramatika yang mantap. Segala sesuatu terasa agak kendor dan lentur. Apa-apa diperbolehkan. Peraturan tidak dapat diformulasikan dengan sederhana. Kalau dilaksanakan dengan pernyataan yang sederhana, segera akan ternyata bahwa banyak sekali para penutur "asli" di Indonesia tidak mematuhi.

Bersamaan dengan itu bahasa Indonesia juga dibebani dasanama atau sinonim yang berlebihan. Suatu pengertian dapat dinyatakan dengan berbagai-bagai bentuk dan berbagai-bagai cara. Perbedaan arti antara bentuk-bentuk dan cara-cara itu tidak mudah dikenali. Kadang-kadang terasa bersamaan benar. Sebagai akibatnya, dari sudut penuturan secara aktif para mahasiswa asing itu selalu dihantui oleh perasaan ragu-ragu apakah bentuk yang akan mereka pilih untuk bertutur itu betul-betul bentuk yang seharusnya ditampilkan. Dari sudut pemahaman, mereka sering lalu kurang dapat menangkap nuansa kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan dengan setepat-tepatnya.

Kesan semacam ini terjadi baik pada mereka yang mempelajari melalui pendekatan *audio-lingual* maupun pendekatan *grammartranslation*. Yang mempelajari melalui pendekatan dengar-ucap tertegun atas kelonggaran-kelonggarannya, sedangkan yang mempelajari melalui pendekatan gramatika-terjemah bingung karena ketidakajekannya (ketidakkonsistennya).

Kesan para mahasiswa itu kiranya tidak terlalu salah. Tebaran kontinum ragam bahasa formal ke ragam bahasa informal di dalam bahasa Indonesia memang cukup luas dengan perbedaan yang cukup besar. Percampurannya pun cukup baur dan sukar dipilah-pisahkan.

Kesan serupa tentunya juga dialami oleh anak-anak kita sendiri di dalam prosesnya menguasai bahasa Indonesia itu. Kita mengenal dua klasifikasi anak: mereka yang beruntung dapat membedakan antara bahasa yang benar dan yang informal, dan mereka yang tidak dapat. Mereka yang mampu biasanya telah beruntung memperoleh pembeberan dengan intensitas dan frekuensi cukup tinggi akan berbagai ragam bahasa, telah beruntung memperoleh kesempatan untuk berpraktik berbicara dengan berbagai ragam, telah memperoleh kesempatan ditanggapi dan dikoreksi serta diberi penjelasan seperlunya. Mereka yang malang tidak dapat membedakan antara kedua ragam itu tidak pula beruntung memperoleh kesempatan seperti tersebut. Kemampuan kebahasaan golongan anak yang malang ini tidak melebihi tingkat-tingkat pengenalan serta penerapan tingkat pertama (Soepomo, 1983). Mereka tidak mampu menguasai tingkat pemahaman secara baik, dan sebagai akibatnya sering membuat penilaian serta sikap kebahasaan yang tidak mengena. Mereka mengira sudah mahir berbahasa, padahal sebetulnya masih belum pandai membedakan antara bahasa yang baik dan yang kurang baik. Jika kenyataan seperti ini masih juga terjadi sesudah anak menyelesaikan pendidikannya di SD, pada waktu batas masa peka untuk itu berakhir, anak itu akan merugi untuk selama-lamanya. Sulit sekali bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan yang baru sesudah masa peka dilalui.

Kiranya perlu sekali para pengajar bahasa Indonesia dan para pendidik pada umumnya diberitahu tentang hal ini. Mereka perlu diberi pedoman tentang klasifikasi yang ada pada rentangan tata bahasa kita agar pada waktunya dapat menolong anak didik dengan lebih baik.

Untuk kepentingan itu para pembina bahasa Indonesia perlu terlebih dahulu mengadakan pemahaman-pemahaman. Kita perlu berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu ketenangan kita.

Untuk itulah makalah ini disajikan. Melalui karangan ini saya berusaha mengajukan saran-saran kepada para analis bahasa Indonesia agar pada akhirnya dapat diciptakan buku tata bahasa normatif yang sifatnya lengkap. Selama ini kita dekati persoalan tata bahasa ini dengan pendekatan-pendekatan analisis yang sifatnya struktural, generatif-transformational dan traditional. Analisis- analisis ini mempunyai persamaan, yaitu membenahi bahasa langsung pada tubuhnya saja. Upaya memahami suatu objek dengan hanya membenahi objeknya saja tentu tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan. Upaya itu hanya akan menghasilkan pengenalan-pengenalan yang kurang mendalam.

Penemuan dari analisis tidak akan dapat menjawab pertanyaan yang mempertanyakan alasan mengapa bahasa itu justru berbentuk seperti apa adanya dan bersusunan seperti yang kita kenal. Jika pertanyaan semacam ini tidak dapat dijawab, menghakimi suatu bentuk sebagai bahasa yang baik dan bentuk lain sebagai bahasa yang kurang baik sebetulnya kurang mempunyai dasar yang kokoh.

Untuk mengusahakan pemahaman yang mendalam, perlu diusahakan pembenahan tambahan. Analisis-*analisis* yang sifatnya komparatif historis, yang sifatnya kontradiktif semantik, dan yang sifatnya kontekstual perlu diusahakan. Penelitian yang sifatnya komparatif historis dapat menjawab mengapa bahasa kita berbentuk dan bersusunan seperti yang ada sekarang ini. Penelitian yang bersifat kontradiktif semantik dapat menjawab keragu-ruguan yang ada pada berbagai dasanama dan berbagai komponen. Penelitian kontekstual diharapkan mampu menjelaskan hal-hal yang tidak referensial.

### Penelitian Komparatif Historis

Dewasa ini telah kita kenal jenis penelitian komparatif historis seperti yang dijalankan oleh Dempwolff (1933, 1937, 1938) dan Dyen (1965) yang bertujuan melacak bentuk proto dan klasifikasi bahasa-bahasa serumpun. Untuk kepentingan pembuatan buku tata bahasa normatif yang akan menjadi pedoman para guru bahasa dan para editor sebetulnya bukan jenis penelitian itulah yang terpenting. Yang rasanya amat penting untuk kita lakukan di sini ialah model penelitian yang dirintis oleh Lehmann (1973) dan diikuti oleh Gloria P. (1976) dan Soepomo (1982). Dengan berasumsi bahwa di dalam setiap bahasa gramatika mempunyai tugas yang sama dan juga komponen pokok yang sama, lambat laun kita akan dapat mengetahui mengapa di berbagai bahasa gramatika itu lalu menunjukkan variasi yang bermacam-macam.

Apakah tugas gramatika itu? Gramatika atau tata bahasa ialah aturan kerja yang diikuti dan dipakai oleh komponen bahasa dalam menjalankan tugasnya sebagai sarana komunikasi dan sarana ekspresi dengan cara sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan sebaik-baiknya ialah dengan cara yang sepadat-padatnya (*mentes*) dan sejelas-jelasnya. Jadi, melalui gramatika diharapkan bahwa penutur mampu menyampaikan suatu pesan dengan sejelas-jelasnya tanpa adanya keragu-ruguan dalam ujaran yang sesingkat-singkatnya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, tata bahasa menggunakan tiga buah komponen pokok:

- a. butir (kata, kata tugas, imbuhan),
- b. struktur (urutan butir),
- c. ciri suprasegmental (khususnya intonasi).

Tata bahasa paling tidak mencakup tugas penggandengan dan penandaan. Dalam menjalankan tugas penandaan ini antara butir dan struktur boleh

dikatakan bersifat komplementer. Jika penandaan sudah dapat dilaksanakan oleh struktur, imbuhan atau butir yang lain tidak diperlukan lagi. Sebaliknya, apabila butir dipakai, biasanya struktur lalu menjadi nonaktif. Dengan kata lain, struktur agak longgar atau mempunyai kebebasan yang lebih luas.

Jika butir tidak ada dan urutan agak bebas, tugas penandaan dijalankan melalui oleh intonasi. Bahasa seperti ini biasanya kurang mampu menyampaikan pesan-pesan secara jelas di dalam bahasa yang tertulis. Bahasa pidgin dan kreola tingkat awal biasanya mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Ke-komplementeran antara butir dan struktur ini amat menolong bagi upaya pemahaman bentuk dan susunan gramatika suatu bahasa. Misalnya, sekarang kita dapat memahami mengapa bahasa Jerman mempunyai sistem kasus. Kasus nominatif, datif, dan akusatif diperlukan karena di dalam bahasa Jerman dimungkinkan adanya frasa benda (subyek, objek langsung dan objek tidak langsung) berjejer bersama tanpa tersela oleh frasa kerja atau predikat. Jika tidak ada tanda khusus seperti kasus nominatif, datif, dan akusatif itu, orang akan menjadi bingung mana yang berfungsi sebagai subjek, mana yang berfungsi sebagai objek datif dan mana yang berfungsi sebagai objek akusatif. Bahasa Tagalog dan bahasa-bahasa di Philippina dan di Sulawesi Utara juga mengizinkan ketiga frasa benda itu berjejer bersama tanpa sela-selaan suatu predikat. Untuk menandai hubungan antara komponen kalimat terpenting itu, bahasa-bahasa itu menggunakan imbuhan-imbuhan yang terperinci yang ditempelkan pada kata kerjanya yang biasanya terletak di awal kalimat dan juga partikel-partikel penanda fokus yang cukup jelas. Sebaliknya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang tidak mengizinkan frasa bendanya berjejer tiga tanpa sela-selaan predikat atau frasa kerja tidak memerlukan sistem kasus atau imbuhan kata kerja yang rumit serta partikel yang banyak. Apabila di masa lampau bahasa Inggris memiliki sistem kasus atau bahasa Indonesia mempunyai sistem imbuhan kata kerja yang kompleks serta partikel penanda yang banyak, sekarang ini semuanya itu tinggallah peninggalan-peninggalan saja. Kalau dibiarkan, hal-hal itu pun akan ditanggalkan juga oleh sistem tata bahasanya.

Dalam hal ini yang menarik untuk dicatat ialah bahwa penandaan itu tidak hanya ditampilkan apabila ketiga frasa benda itu berjejer bersama. Bahkan, pada waktu sendirian pun penandaan itu dipakai juga. Dengan kata lain, ada kekonsistenan atau keajekan penggunaan tanda-tanda itu. Jadi, apa yang disebut itu jelas bukanlah terbatas kepada pemakaian dalam kalimat per kalimat, melainkan di dalam sistem secara keseluruhan. Hal itu perlu ditekankan di sini mengingat di Indonesia ini ada gerakan pemakaian sistem yang kurang menyeluruh, melainkan dengan penilaian gejala per gejala. Sebagai contoh di dalam bahasa Jerman kasus juga dipakai walaupun kalimat itu hanya memuat sebuah frasa benda:

- (Nominatif) *Das ist ein amerikanischer Schriftsteller.*  
 (Akusatif) *Ich kenne einen amerikanischen Schriftsteller.*  
 (Datif) *Er spricht mit einem amerikanischen Schriftsteller.*

Berikut ialah contoh kalimat yang menggunakan tiga buah frasa benda di dalamnya:

- Jerman : *Gestern habe ich einige Kleider für das Kinder gekauft.*  
 Inggris : *Yesterday I bought some clothes for the child.*  
 Tagalog : *Bumili ako ng damit para sa bata kahapon.*  
 (fokus pada pelaku).  
*Ibinili ko ng damit ang bata kahapon*  
 (fokus pada penerima).  
 Indonesia : *Kemarin saya membelikan beberapa pakaian untuk anak itu.*  
*Kemarin saya membelikan anak itu beberapa pakaian.*  
*Kemarin saya membeli beberapa pakaian untuk anak itu.*

Bahasa Jerman terutama memerlukan kasus karena urutan frasa benda itu di dalam kalimat dapat bermacam-macam. Pokok kalimat (nominatif) dapat berada di awal kalimat, di tengah atau di bagian akhir. Demikian juga yang lain-lain. Dengan kata lain, urutan itu longgar sekali.

*Ich gab der Mutter Brot* 'Saya memberi ibu roti'

(Nom) (Dat) (Ak)

*Der Mutter gab ich Brot*

(Dat) (Nom) (Ak)

*Brot gab ich der Mutter*

(Ak) (Nom) (Dat)

*Gestern gab ich der Mutter Brot* 'Kemarin saya memberi ibu roti.'

*Gestern habe ich der Mutter Brot gegeben* 'Kemarin saya memberi ibu roti.'

*Ich sehe Mutter in der Küche* 'Saya melihat ibu di dapur.'

*Mutter sehe ich in der Küche*

*In der Küche sehe ich Mutter.*

Dalam kalimat berikut subjek terdapat di belakang:

*Drei grosse Dialektgruppen unterscheidet man: die niederdeutsche, die mittelduetsche und die oberdeutsche Gruppe.*

'Orang membedakan tiga grup dialek: grup dialek Niederdeutsche, Mitteldeutsche dan Oberdeutsche.' Dalam kalimat itu *man* berada di belakang,

Kita tidak tahu mana yang dahulu, sistem kasusnya atau kelonggaran urutan butirnya. Akan tetapi, tampaknya di antara kelonggaran urutan butir dan adanya sistem kasus itu saling tunjang-menunjang.

Dari hal-hal di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa komponen gramatika seperti subjek, objek langsung, objek tidak langsung, dan predikat merupakan komponen amat penting bagi kalimat. Mereka memerlukan tanda-tanda khusus agar orang dapat mengenali kedudukannya dan eksistensinya di dalam kalimat. Tanda ini dapat berupa butir kebahasaan seperti imbuhan, partikel, atau kata tugas, dapat pula berupa posisi di dalam urutan penyebutannya. Dalam tugas penandaan ini antara butir dan struktur tampaknya bersifat saling mengisi (komplementar). Tugas penandaan ini di dalam tata bahasa berjalan konsisten. Jika ada penyimpangan, tentunya penyimpangan itu dapat dijelaskan dengan penjelasan yang sifatnya bukan gramatikal, melainkan kontekstual. Semuanya ini terjadi demi prinsip kejelasan dan kementesan tutur.

Berdasarkan penemuan semacam ini lambat laun kita akan menjadi tahu mengapa bahasa kita bertingkah seperti yang ada pada sistemnya. Mengapa suatu bahasa mempunyai sistem kasus. Mengapa suatu bahasa menjadi bersifat aglutinatif, dengan menggunakan banyak imbuhan pada kata-katanya. Mengapa bahasa mempunyai partikel-partikel penanda yang banyak. Mengapa, misalnya, partikel yang digunakan di dalam bahasa Jawa Kuna sekarang banyak tidak dipakai lagi. Mengapa di dalam bahasa Indonesia akhiran *-kan* dan *-i* sering tidak dipakai. Mengapa di dalam bahasa Indonesia *itu* sering digunakan di dalam kalimat yang predikatnya berbentuk bukan kata kerja. Mengapa kata *oleh* dipakai untuk mengawali pelaku di dalam konstruksi pasif. Mengapa *dengan* dipakai untuk mengawali frasa keterangan cara. Mengapa kata sandang diperlukan, dan lain-lain.

Tentang struktur urutan butir, Lehmann (1973) dan Gloria (1976) telah menyampaikan hipotesisnya. Lehmann berpendapat bahwa ada prinsip yang mendasari pola struktur sintaksis. Dia mencatat bahwa bahasa yang memiliki struktur VO secara konsisten biasanya menempatkan pensifat (*qualifier*) kalimat pertanyaan atau pengingkaran di depan kata kerjanya. Bahasa-bahasa yang memiliki urutan VO secara ajek biasanya menempatkan pensifat itu di belakang kata kerjanya. Gloria melanjutkan pendapat Lehmann dengan menyatakan seperti berikut:

"agar prinsip itu dinyatakan kembali sebagai berikut: Setiap unsur kalimat (misalnya subjek, kata kerja, komplemen dan afiks-afiks yang menunjukkan peran subjek dan komplemen) biasanya terletak persis di sebelah unsur kalimat lain yang mempunyai hubungan arti yang paling dekat...."

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Lehmann dan Gloria P. ini kita lalu dapat memahami mengapa bahasa Indonesia mempunyai hukum struktur DM (yang diterangkan berada di depan dan yang menerangkan berada di

belakang). Lagi-lagi, jika ada penyimpangan di dalam hal ini konteks sejarah atau konteks lain barangkali dapat dipakai untuk memahaminya. Bahasa Indonesia mempunyai hukum DM karena bahasa Indonesia mempunyai struktur VO.

Lambat laun kita akan dapat memahami hal-hal yang banyak, yang oleh para ahli bahasa terdahulu diharamkan. Berdasarkan penemuan-penemuan ini, lambat laun kenyataan bahwa bahasa Indonesia mengandung konstruksi pasif yang berfrekuensi tinggi juga dapat dimengerti. Dari pengamatan yang belum mendalam konstruksi pasif dengan *di-* dan *ter-* ini berfrekuensi jauh lebih tinggi daripada yang ada pada bahasa Inggris atau bahasa Jerman karena kata ganti orang ketiga tidak begitu eksplisit (semuanya *ia* atau *-nya*) dan bahwa bahasa Indonesia mempunyai akhiran *-kan* dan *-i* pada sistemnya. Akhiran ini mampu menunjukkan jenis hubungan yang ada antara kata kerja dengan komplemen yang akan ditaruhkan di dalam kedudukan subjek. (Soepomo, 1982)

Pada gilirannya, persoalan keeratan antara komponen yang membentuk frasa, terutama frasa benda, juga akan dapat kita pahami. Di dalam bahasa Jerman frasa yang mendekati kata majemuk dan kata majemuk itu sendiri dituliskan menjadi satu. Saya kira hal ini juga demi kejelasan. Seandainya frasa benda subjek, objek datif, dan objek akusatif itu berjajar bersamaan dan semuanya berbentuk frasa yang berkepanjangan, sulitlah bagi pembaca untuk mengenali mana yang diterangkan dan mana yang menerangkan. Oleh karena itu, di dalam bahasa Jerman sering kita jumpai kata yang bentuknya panjang sekali. Contoh:

*Fernsrechtteilnehmervenzeichnis* 'buku telepon'

*Milchmadchenrechnung* '(perhitungan gadis pemerah susu)  
'penilaian yang naif'

*Donaudampfschiffahrtsgesellschaft* 'maskapai pelayaran kapal api  
sungai Donau'

Di dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa lain di Indonesia sebelah barat tidak ada urgensi untuk itu. Kadang-kadang kata majemuk pun masih ditulis di dalam tulisan yang terpisah.

Secara singkat penelitian semacam ini kiranya mempunyai hari depan yang baik, terutama bagi mereka yang ingin memahami betul hakikat suatu bahasa. Dengan sepintas dapat dikatakan bahwa hakikat kebahasaan dalam bidang struktur dan butir dapat diungkapkan dengan baik. Dengan pemahaman semacam ini, dan dengan memegang teguh prinsip kehematan, kejelasan, dan keajekan, tata bahasa normatif dapat disajikan dengan lebih mantap.

Tentu saja tidak semua hal dapat diungkapkan dengan model penelitian semacam ini. Seperti kenyataan bahwa bahasa Indonesia mempunyai dasa-

nama yang berlebihan kiranya harus diungkapkan dengan teknik penelitian yang lain.

### Penelitian Kontrastif Semantik

Hal kedua yang perlu sekali kita kerjakan agar kita dapat memahami bahasa Indonesia dengan lebih baik dan dapat menulis tata bahasa normatif yang lebih komprehensif ialah penelitian model kontrastif semantik serupa yang dikerjakan oleh Fillmore (1971). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sinonim yang berlebihan yang ada di dalam bahasa Indonesia, baik pada jajaran kata maupun unsur bahasa yang lain (tata kalimat dan tata bunyi). Jadi, model penelitian yang dipelopori oleh Fillmore itu seharusnya kita perluas ke jajaran bahasa yang lain. Dasar penelitian ini ialah asumsi bahwa semua bentuk yang dipertahankan di dalam bahasa ada artinya. Apabila tidak bentuk itu tentu dikeluarkan dari sistem. Mungkin saja arti itu menunjuk ke komponen semantik yang sifatnya penting, tetapi mungkin juga hanya menunjuk kepada variasi penggunaan dialek, undausuk, atau ragam. Semua ini akan menjadi jelas apabila dengan cermat kita teliti sinonim-sinonim itu.

Sinonim yang dapat kita teliti tidak hanya yang berupa perbedaan butir seperti *sebab, karena, berkat, gara-gara, atau jika, kalau, jikalau, bila, apabila, bilamana, misalnya, andaikata, seandainya, dan andaikata*, tetapi juga yang berupa kelengkapan atau keberadaan sesuatu seperti apa artinya jika kata tugas *oleh, dengan, yang* dipakai dan apa artinya jika tidak:

*Dimarahi ayah vs. Dimarahi oleh ayah*

*Berjalan pelan-pelan vs. Berjalan dengan pelan-pelan*

*Negara adil vs. negara yang adil*

atau kelengkapan wacana seperti terdapat pada tutur ringkas dan tutur lengkap. Apa artinya bila wacana itu dikatakan dengan lengkap dan apa pula artinya jika di dalamnya terdapat penanggalan-penanggalan. Dalam hal tata bunyi sekarang ini misalnya Gloria Poedjosoedarmo, sedang meneliti arti variasi penyempitan dan pelonggaran *pharynx* dalam bahasa Jawa.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa penelitian ini bertujuan memahami arti dan bentuk variasi yang ada di dalam bahasa. Variasi itu dapat meliputi variasi butir, variasi kelengkapan bentuk, dan variasi di bidang struktur. Dalam hal butir kita ingin memahami perbedaan yang ada pada arti dan bentuk berbagai bahasa yang dipakai di dalam masyarakat, berbagai dialek yang dipakai di dalam masyarakat, berbagai ragam dan tingkat tutur yang dipakai di dalam masyarakat, berbagai tipe wacana yang terpakai, berbagai tipe kalimat, berbagai bentuk yang terpakai di dalam satu tipe kalimat, berbagai kata, berbagai imbuhan dan berbagai bunyi yang dipakai di dalam ma-

syarakat. Dalam hal kelengkapan kita ingin memahami arti dan bentuk berbagai klasifikasi kelengkapan (lengkap, berlebihan, ringkas, dan kosong tanpa bentuk). Dari antaranya kita juga ingin memahami arti hal-hal yang sifatnya *mentes* (padat) dan berongga. Dalam hal struktur kita ingin mengetahui perbedaan yang ada antara struktur yang biasa, yang terbalik, dan yang berbentuk ulang.

Dari penelitian semacam ini diharapkan bahwa kita akan mengetahui arti penggunaan bahasa asing, bahasa daerah, bahasa Indonesia sendiri, penggunaan bentuk klasik, dialek Jakarta, dialek Jawa, Batak, dialek Cina, ragam santai, ragam baku, ragam sastra, arti berbagai genre seperti prosa, puisi, dialog, arti kalimat perintah dengan menggunakan bentuk kata kerja saja, dengan menggunakan bentuk konstruksi pasif, dengan tambahan kata-kata seperti *silakan*, *tolong*, arti pilihan kata seperti *setelah*, *sesudah*, *sehabis*, *sesuai*, arti imbuhan seperti *di-*, *ter-*, dan *ke-*, arti bunyi dengan berbagai cara artikulasi. Dalam hal kelengkapan, keberadaan dan kementesan, diharapkan bahwa kita akan dapat memperbedakan arti suatu konsep yang tertulis dalam satu kata, satu kata majemuk, satu frasa, satu kalimat yang mengandung rapatan-rapatan, satu kalimat majemuk bertingkat atau bahkan dalam beberapa kalimat. Kita juga akan dapat mengenali ujut wacana lengkap yang baik dan kurang baik. Wacana yang baik mempunyai koherensi yang baik, sedangkan yang tidak baik mempunyai koherensi yang kurang baik. Kita juga akan dapat membedakan wujud serta arti wacana yang lengkap dengan yang ringkas serta yang bergondok (yang berlebihan tak ada gunanya). Dalam hal struktur akan dapat kita kenali bentuk serta arti susunan yang tergolong biasa, yang terbalik dan yang berulang-ulang.

Dari penelitian semacam ini komponen bahasa yang standar dapat dikenali dan dapat dibedakan dengan yang tidak standar. Masing-masing dasa-nama dapat dibeda-bedakan satu dengan yang lain, serta hal-hal yang mempengaruhi perbedaannya dapat juga diidentifikasi.

### Penelitian Kontekstual

Orang tidak dapat memahami suatu objek tanpa memeriksa konteks-konteks yang mempengaruhi adanya objek itu. Dalam hal bahasa paling tidak kita kenal dua macam konteks: a) konteks gramatika (linguistik), dan b) konteks ekstragramatika (sosial atau sosiolinguistik).

Konteks gramatika penting kita ketahui agar unsur bahasa seperti bunyi, imbuhan, kata, dan klausa dapat kita pahami dengan baik. Konteks gramatika berwujud kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana.

Konteks ekstralinguistik atau sosiolinguistik penting kita ketahui agar

kita dapat memahami variasi bahasa seperti idiolek, dialek, ragam, undausuk genre, dan alih kode.

Dalam bahasa kita ketahui bahwa suatu butir bahasa atau suatu variasi bahasa sering memiliki arti yang lebih dari sebuah apabila butir bahasa atau variasi bahasa itu berdiri sendiri. Akan tetapi, dengan konteks arti yang sebenarnya lalu menjadi tertentu.

Sebetulnya konteks gramatika telah banyak diperhatikan orang, termasuk ahli-ahli kita sendiri. Akan tetapi, untuk ketelitian yang mendalam, halnya masih perlu dibenahi dengan lebih baik dan menyeluruh.

Pada waktu meneliti suatu unsur bahasa atau kelas unsur bahasa, seperti kata benda, kata sifat, kata penghubung, kata sandang, kata penunjuk, atau kata depan, perlu selalu kita pertanyakan relasi-relasi yang biasanya dijalin oleh kata-kata itu. Sekali lagi, relasi ini dapat bersifat penggandengan atau penandaan. Oleh karena itu, pertanyaan seperti apa yang biasanya digandeng atau ditandai oleh kata yang sedang kita periksa itu perlu senantiasa dipertanyakan karena masing-masing kelas kata itu mempunyai relasi sendiri-sendiri. Dari sudut pandangan lain perlu dipertanyakan jajaran tata kalimat dan kelas tata kalimat mana yang biasanya diabdikan oleh hal yang sedang kita periksa, dan kelas tata kalimat mana yang biasanya mengabdikan kepada hal yang sedang kita periksa itu. Cara-cara semacam ini terutama penting untuk membenahi bahasa Indonesia, yang kelas katanya sulit dibedakan dengan hanya melihat bentuknya saja.

Ada hal lain yang perlu diingat, yaitu bahwa konteks gramatika tidaklah selalu berupa jajaran gramatika yang ada di atas jajaran gramatika butir yang sedang kita teliti. Kadang-kadang dapat juga hal itu terdapat pada jajaran di atasnya lagi. Misalnya, apabila kita sedang memeriksa sebuah imbuhan, memang pertama-tama kita perhatikan kelas kata yang barangkali diabdinya. Akan tetapi, dalam hal ini kita perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya frasa atau klausa yang mungkin diabdikan oleh imbuhan itu. Selanjutnya, mungkin saja konteks itu tidak terdapat di dalam kalimat yang mana, melainkan di dalam kalimat yang jauh mendahuluinya. Kata penunjuk *itu*, *tadi*, *tersebut*, *demikian*, menunjuk hal-hal yang termuat di dalam kalimat yang baru saja mendahuluinya atau bahkan yang terletak agak jauh sebelumnya.

Konteks ekstralinguistik atau sosiolinguistik telah mulai banyak dibenahi oleh para sosiolinguis. Jadi, cara-caranya sudah agak banyak kita ketahui. Tujuannya ialah mengidentifikasi konteks-konteks yang mempengaruhi bentuk bahasa dalam jajaran variasi bahasa. Dalam jajaran ini ada kebersamaan kejadian di antara beberapa "variabel linguistik." (Gumperz dan Hymes, 1972). Jadi jelasnya, karena pengaruh konteks tertentu, unsur bunyi lalu berbentuk tertentu, unsur leksikon berbentuk tertentu, dan barangkali unsur sintaktik juga berbentuk tertentu. Dari penelitian semacam ini, sekarang kita

telah dapat mengenali beberapa konteks dan pengaruhnya terhadap beberapa variasi bahasa. Bersamaan dengan itu kita kenali juga arti macam-macam variasi bahasa itu (Soepomo P, 1979). Pribadi si penutur, sebagai konteks, mempengaruhi bentuk idiolek. Asal dari mana penutur datang mempengaruhi bentuk dialek. Ada dialek geografi yang ditentukan oleh asal daerah dari mana si penutur datang. Ada juga dialek sosial yang ditentukan oleh asal kelas masyarakat yang si penutur biasanya diidentifikasi. Ada dialek umur yang ditentukan oleh grup umur si penutur. Ada dialek jenis kelamin yang ditentukan oleh jenis kelamin si penutur. Ada lagi dialek etnik yang ditentukan oleh ras si penutur. Ada lagi dialek profesi yang ditentukan oleh profesi si penutur. Ada lagi dialek idiologi yang ditentukan oleh aliran idiologi atau agama yang dipeluk oleh si penutur.

Di samping idiolek dan dialek sudah juga dikenali adanya ragam yang perbedaan bentuknya ditentukan oleh suasana yang ditimbulkan oleh situasi bicara. Kemudian variasi undausuk yang adanya dipengaruhi oleh pengertian si penutur tentang derajat relasi pribadinya dengan orang yang diajak berbicara.

Konteks-konteks lain yang perlu diperiksa dengan lebih mendalam adalah sarana bicara, urutan bicara, topik yang dibahas, *mood* (citarasa hati), dan norma bicara. Lambat laun hal-hal ini tentu akan menjadi jelas.

Antara penelitian kontrasitif semantik dan penelitian kontekstual sebetulnya dapat dijalin kerja sama yang amat bagus. Penemuan-penemuannya dapat saling bantu-membantu. Penelitian kontrasitif semantik bermula dengan mengumpulkan bentuk dasanama dan kemudian melaju mengenali arti serta konteks yang mempengaruhinya, sedangkan penelitian sosiolinguistik kontekstual dalam hal ini bermula pada konteks dan melaju mengenali variasi bentuk-bentuknya.

### Peran Ahli Ilmu Lain

Hasil penelitian para ahli bahasa dengan model historis komparatif, kontrasitif-semantik dan kontekstual tentu akan membantu banyak sekali upaya pembuatan tata bahasa normatif. Akan tetapi, waktu tercapainya hasil yang memuaskan tentu agak panjang. Ada jalan pintas yang kiranya dapat ditempuh, yaitu dengan selalu berkonsultasi dengan ahli ilmu pengetahuan di bidang lain. Konsultasi dengan para ahli ilmu matematika, dengan ahli ilmu fisika, ahli hukum, ahli filsafat, dan lain-lain perlu digalakkan karena bukanlah ahli-ahli itu juga selalu mencari kejelasan dan kementesan ekspresi? Bukan saja karena waktu untuk penganalisisan seperti tersebut di atas memakan waktu, tetapi sering ada juga hal-hal yang terlewatkan dalam penelitian

itu yang nyatanya penting bagi tata bahasa yang akan dipakai sebagai pedoman itu. Dalam hal gaya dan keluwesan bahasa barangkali para ahli ilmu lain itu sering perlu diberitahu. Akan tetapi, dalam ekspresi yang jelas, tetapi mentes mereka itu seringkali memiliki hal-hal yang tidak dipikirkan oleh para ahli bahasa.

Oleh karena itu, disarankan di sini agar kerja sama antara para ahli bahasa dan ahli ilmu pengetahuan lain digalakkan demi tercapainya tata bahasa normatif yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fishman, Joshua A. 1975. *Sociolinguistics A Brief Introduction*. Massachusetts: Newbury House Pub. Inc.
- Garvin, Paul. L., dan Madeleine Mathiot. 1972. "The Urbanization Of the Guarani Language: A Problem in Language and Culture". Dalam *Readings in the Sociology of Language*. Joshua A. Fishman (Ed). The Hague: Mouton & Co.
- Hudson, R.A. 1981. *Sociolinguistics*. London: Cambridge University Press.
- Stewart, William A. 1972. "A Sociolinguistics Typology for Describing National Multilingualism". Dalam *Readings in the Sociology of Language*. Joshua A. Fishman (Ed). The Hague: Mouton & Co.
- Trudgill, Peter. 1974. *Sociolinguistics*. Middlesex: Pinguin Books Ltd.
- Weinreich, Uriel. 1968. *Language in Contact*. The Hague: Mouton & Co.

## **USAHA-USAHA PEMANTAPAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI PENDIDIKAN FORMAL TINGKAT DASAR DAN MENENGAH**

**Dardji Darmodihardjo**

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

### **Pendahuluan**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanallahu wata'ala, karena atas rahmat dan ridonya, pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam ruang ini untuk mengikuti perkuliahan yang ada hubungannya dengan masalah bahasa Indonesia.

Sebagaimana termuat dalam edaran umum Kongres Bahasa Indonesia IV yang disiapkan oleh penyelenggara, kongres ini bertujuan untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan Nasional. Pembicaraan dalam kongres ini diarahkan kepada masalah bahasa dan sastra Indonesia dalam hubungan pelaksanaan pembangunan nasional serta ditinjau dari segi komunikasi massa dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pokok pembicaraan menyangkut kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi pemerintahan, sarana pengembangan kebudayaan, sarana pendidikan dan pengajaran termasuk pelaksanaan wajib belajar, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Dalam makalah ini kami ingin mengemukakan usaha-usaha yang sudah dan sedang dilakukan dalam memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional melalui pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Usaha-usaha ini menyangkut pemantapan bahasa

Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran.

Ada tiga kalimat kunci yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dijadikan pedoman dalam usaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional melalui pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Ketiga kalimat itu adalah sebagai berikut.

- a. Pendidikan dan Pengajaran bahasa Indonesia ditingkatkan dan diperluas sehingga mencapai masyarakat luas.
- b. Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar.
- c. Pembicaraan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas nasional.

Ketiga kalimat di atas terdapat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983, yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan nasional selama masa pembangunan lima tahun yang akan datang, kalimat pertama diperluas menjadi "Pendidikan dan Pengajaran bahasa Indonesia perlu makin ditingkatkan dan diperluas sehingga mencakup semua lembaga pendidikan dan menjangkau masyarakat luas". Kalimat kedua tidak mendapat perubahan, sedangkan kalimat ketiga mendapat perubahan menjadi "Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu sarana identitas nasional."

Ketiga kalimat kunci di atas kami kemukakan oleh karena pada dasarnya program dan pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan formal tingkat dasar dan menengah itu merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar yang telah ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara itu.

Uraian ini kami sampaikan dengan maksud untuk memberikan gambaran kepada peserta kongres tentang usaha-usaha yang sudah dan sedang dilakukan dalam memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional di bidang pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Menjadi harapan kami kiranya uraian ini akan berguna sebagai masukan bagi diskusi-diskusi yang akan berlangsung selama kongres ini.

Uraian ini kami sajikan selanjutnya dalam urutan pokok-pokok sebagai berikut.

- a. Penempatan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lingkung-

an pendidikan formal tingkat dasar dan menengah.

- b. Program pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah dalam lingkungan pendidikan formal tingkat menengah.
- c. Beberapa masalah yang dihadapi.
- d. Alternatif pemecahan masalah yang dilaksanakan.
- e. Beberapa kesimpulan dan saran.

## 1. Penempatan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di Lingkungan Pendidikan Formal Tingkat Dasar dan Menengah

### a. Penempatan Bahasa Indonesia

Penempatan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada semua jenis dan tingkat sekolah di seluruh Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Undang-Undang ini telah diterima Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Januari 1954, disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954, dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954 Lembaran Negara No. 38 tahun 1954. Bab IV, Pasal 5 Undang-undang No. 4 tahun 1950 itu menyatakan, "Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah di seluruh Republik Indonesia". Kemudian Pasal 2 mengemukakan "Di Taman Kanak-kanak dan tiga kelas yang terendah di sekolah rendah bahasa daerah dipergunakan sebagai bahasa pengantar". Dalam penjelasan Bab IV, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1950 itu dikemukakan bahwa di taman kanak-kanak dan kelas 1 sampai kelas III sekolah dasar bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar<sup>1</sup>. Maksudnya supaya anak-anak yang masih kecil itu mendapat hasil pendidikan yang sebaik-baiknya. Untuk daerah-daerah seperti ini di kelas I sampai kelas III sekolah dasar bahasa Indonesia diberikan sebagai mata pelajaran wajib (*Verplicht leervak*). Pelajaran itu diberikan sedemikian rupa sehingga pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai kelas IV tidak mengalami kesulitan lagi, sedangkan pada daerah-daerah yang bahasa daerahnya tidak jauh berbeda dari bahasa Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar sejak kelas terendah.

### b. Memantapkan Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia

Adanya ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan tingkat sekolah sejak kelas-kelas permulaan sekolah rendah menunjukkan bahwa usaha-usaha dalam rangka memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional melalui pendidikan formal tingkat dasar dan menengah sudah dilakukan sejak dini. Ketentuan bahwa

pada kelas-kelas terendah sekolah dasar di daerah-daerah tertentu bahasa boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam rangka mempercepat anak-anak mampu mengikuti pelajaran dalam bahasa pengantar bahasa Indonesia sejak kelas IV memberikan kemungkinan kepada guru untuk menggunakan bahasa daerah sebagai alat bantu mempercepat anak-anak menguasai bahasa Indonesia.

Dalam kurikulum sekolah dasar sebelum kurikulum 1975 terdapat dua jenis program pengajaran bahasa Indonesia, yaitu program pengajaran bahasa Indonesia untuk SD yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sejak kelas I, dan program pengajaran bahasa Indonesia untuk SD yang sejak kelas IV. Kurikulum SD 1975 tidak lagi memberikan program pengajaran yang berbeda walaupun pada sekolah-sekolah di daerah tertentu untuk membantu siswa dalam mengatasi kesukaran yang dihadapinya, pada kelas-kelas I sampai kelas III guru boleh menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar.

Sekolah dan kelas adalah lingkungan bahasa yang terbaik dalam merembeskan kemampuan menggunakan bahasa (Stubes, 1976:12). Sepanjang hari dalam kehidupan di sekolah siswa berhadapan dengan bahasa itu, dengan bahasa lisan dari guru atau teman-temannya dan dengan tertulis dari buku pelajaran atau buku bacaan. Pada umumnya kegiatan belajar mengajar di sekolah, paling kurang sampai masa dewasa ini, mengajar tidak dapat dilepaskan dari bicara. Sebagaimana diungkapkan oleh Flanders (1970:12), kira-kira 70% dari waktu yang tersedia di kelas cenderung dihabiskan guru untuk berbicara. Dapat dibayangkan jumlah waktu yang diperoleh anak-anak untuk bergaul dengan bahasa Indonesia bila di sekolah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar sejak kelas I.

Pada umumnya bagi anak-anak Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa kedua; semakin disadari bahwa faktor umur merupakan faktor penting dalam belajar bahasa kedua. Semakin muda umur si anak semakin mudah dan cepat ia belajar bahasa itu. Pada masa sebelum umur sekolah, anak-anak dapat belajar bahasa kedua dengan keadaan yang hampir sama dengan ia belajar bahasa ibunya/bahasa pertamanya. Mereka dapat mempelajari bahasa kedua itu dengan taraf kecepatan dan ketepatan yang sama dengan cara mereka belajar bahasa ibu/bahasa pertamanya. Tidak ada teknik mengajar yang khusus diperlukan untuk mengajarkan bahasa ini kepada anak-anak pada umur ini kecuali membawa ke dalam situasi perbuatan berbahasa yang serasi dan tepat yang menggunakan bahasa kedua itu sebagai media komunikasi (Lado, 1964: 57). Dalam hubungan ini, ketentuan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan tingkat sekolah di seluruh Indonesia merupakan usaha yang sangat penting bagi pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional. Ketentuan bahwa

bahasa daerah boleh digunakan guru sebagai bahasa pengantar di kelas I sampai kelas III sekolah dasar dalam rangka mempercepat anak-anak menguasai bahasa Indonesia merupakan pemanfaatan bahasa daerah dalam rangka memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

## 2. Program Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah-sekolah dalam Lingkungan Pendidikan Formal Tingkat Dasar dan Menengah

Di samping penempatan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, usaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional dilakukan pula dengan menjadikan sebagai salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum semua jenis dan tingkat sekolah di seluruh Indonesia.

Berbeda dengan program pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum sebelumnya, program pengajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum sekolah dasar yang berlaku sekarang (Kurikulum 1975), tidak lagi dibedakan untuk sekolah dasar berbahasa pengantar bahasa Indonesia sejak kelas I dan program untuk sekolah dasar berbahasa pengantar bahasa Indonesia sejak kelas IV. Program bahasa Indonesia untuk semua sekolah dasar di seluruh Indonesia berlaku sama. Hanya dalam melaksanakan program itu pada daerah-daerah tertentu, bila guru memandang perlu, ia dapat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas I sampai kelas III dalam usahanya mencari cara yang terbaik menyampaikan pelajaran kepada murid-murid. Dengan jalan seperti itu, semua siswa sekolah dasar di seluruh Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam belajar bahasa Indonesia, baik dalam waktu yang disediakan maupun dalam hal materi pelajaran yang diterimanya.

Dalam kurikulum sekolah dasar 1975, waktu yang disediakan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia 8 jam pelajaran dalam satu minggu sejak kelas I sampai kelas IV. Pelajaran bahasa daerah, bagi daerah-daerah yang memerlukan pelajaran itu, merupakan bagian dari pelajaran bahasa Indonesia. Untuk ini disediakan waktu sebanyak 2 jam pelajaran dalam seminggu di luar waktu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dalam kurikulum lama (Kurikulum Sekolah Dasar 1968), untuk program bahasa Indonesia bagi sekolah dasar yang berbahasa pengantar bahasa Indonesia sejak kelas I sampai kelas IV tersedia waktu 8 jam pelajaran seminggu mulai kelas I sampai kelas IV. Untuk program bahasa Indonesia bagi sekolah dasar yang berbahasa pengantar bahasa daerah sejak kelas I sampai kelas III, pada kelas I dan kelas II belum diajarkan bahasa Indonesia, dan untuk kelas III sampai kelas IV bahasa Indonesia diajarkan selama 6 jam pelajaran seminggu. Dengan demikian, kesempatan belajar bahasa Indonesia untuk sekolah-sekolah yang berbahasa pe-

ngantar bahasa daerah di kelas I sampai kelas III lebih kecil bila dibandingkan dengan kesempatan belajar bahasa Indonesia yang diperoleh siswa pada sekolah-sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Indonesia sejak kelas I. Materi pelajaran bahasa Indonesia yang diterima oleh siswa pada sekolah-sekolah yang berbahasa pengantar di kelas I sampai kelas III itu pun tentu lebih kecil dibandingkan dengan materi yang diterima siswa pada sekolah-sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Indonesia sejak kelas I.

Di sekolah-sekolah menengah, program pengajaran bahasa Indonesia menurut kurikulum baru yang dewasa ini terpakai (Kurikulum 1975), jumlah jam pelajaran yang disediakan bervariasi sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas yang dijadikan landasan penyusunan kurikulum ini.

Di SMP, selama kelas I dan kelas II disediakan waktu 5 jam pelajaran seminggu, sedangkan di kelas III tersedia 4 jam pelajaran seminggu. Di SMA sesuai dengan jurusannya, jatah waktu ini juga berbeda-beda. Di SMA-IPA selama kelas I tersedia waktu 4 jam pelajaran seminggu, sedangkan di kelas II dan III tersedia 3 jam pelajaran seminggu. Di SMA-IPS selama kelas I dan II tersedia waktu 3 jam pelajaran seminggu, dan di kelas III tersedia 4 jam seminggu. Di SMA bahasa Indonesia kelas I dan II tersedia waktu 6 jam pelajaran seminggu dan di kelas III 7 jam pelajaran seminggu.

Di sekolah-sekolah menengah kejuruan jatah waktu yang disediakan juga bervariasi (Stubbs, 1976:12). Di SPG sejak kelas I sampai kelas III tersedia waktu rata-rata 4 jam pelajaran seminggu. SGO dari kelas I sampai kelas III menyediakan waktu 2 jam pelajaran seminggu. SPGLB menyediakan sejak kelas I dan II selama 2 jam pelajaran seminggu.

Di sekolah-sekolah menengah kejuruan lain (SMTK, SMPS, SMIK, STM, STM Pembangunan, SMTP, SMKK, SMM, SMSR, SMKI, dan SMT) tersedia rata-rata 2 jam pelajaran seminggu sejak kelas I sampai kelas III atau kelas IV, sedangkan di SMEA sejak kelas I sampai kelas III tersedia waktu 3 jam pelajaran seminggu.

Program yang baik saja belum akan menjadi jaminan tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan sebagaimana telah ditetapkan dalam kurikulum bila komponen-komponen yang berperan dalam pelaksanaannya tidak diperhitungkan dan diadakan sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan itu, selama masa pembangunan lima tahun ke III telah pula dilakukan usaha-usaha pengadaan dan peningkatan mutu guru, buku teks, alat pelajaran, buku-buku pegangan guru, buku-buku pelengkap, dan buku bacaan/perpustakaan.

### **Beberapa Masalah yang Dihadapi**

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara, tujuan pembangunan di bidang pendidikan dan generasi muda diperinci sebagai berikut (Flanders, 1970:12).

- a. Meningkatkan mutu pendidikan agar sistem pendidikan menghasilkan manusia yang mempunyai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, terampil, berbudi pekerti tinggi, berpribadi kuat dan mempunyai semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang tebal sehingga dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
- b. Meningkatkan kesempatan belajar yang dikaitkan dengan aspek pemerataan.
- c. Meningkatkan relevansi agar sistem pendidikan mampu menghasilkan tenaga pembangunan yang sesuai dengan proses pembangunan nasional baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
- d. Mempersiapkan generasi muda sebagai penerus perjuangan dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan kepemimpinan, kesegaran jasmani dan daya kreasi, patriotisme dan idealisme dan kepribadian serta budi pekerti luhur.
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan untuk menjamin terlaksananya tujuan pembangunan pendidikan dan pengembangan nasional secara keseluruhan.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan belajar telah menghasilkan penambahan gedung sekolah baru yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, penambahan ruang kelas baru pada sekolah-sekolah yang sudah ada, dan perbaikan terhadap gedung-gedung sekolah yang memerlukan perbaikan. Usaha ini sekaligus diiringi dengan penambahan tenaga baru, buku-buku teks, alat pelajaran, buku pegangan guru, buku bacaan dan buku perpustakaan.

Mengingat luasnya daerah Indonesia, besarnya jumlah anak umur sekolah, dan terbatasnya dana dan kemampuan untuk dapat sekaligus menyediakan segala sesuatunya yang diperlukan, masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan pada umumnya, pengajaran bahasa Indonesia khususnya masih berkisar pada kekurangan guru, buku pelajaran, alat pelajaran, buku pegangan guru, buku bacaan, dan buku-buku perpustakaan, baik dalam mutu maupun dalam jumlah.

Di dalam hal guru, masalah yang dihadapi bertalian dengan akibat pembaharuan kurikulum dan program pengajaran, sedangkan dalam jumlah bertalian dengan kemampuan kita mengadakan dan mengangkat guru baru. Pembaharuan kurikulum dan program pengajaran selalu berakibat perlunya usaha penyesuaian pengetahuan dan keterampilan guru melaksanakan program baru itu. Hal ini memerlukan waktu sebab menyesuaikan pengetahuan dan keterampilan guru untuk dapat melaksanakan program itu dengan baik tidak dapat terjadi begitu saja. Diperlukan usaha-usaha yang terencana dan terus

menerus. Dalam hal itu pengadaan dan pengangkatan tenaga guru baru kita terbentur kepada kemampuan lembaga-lembaga pendidikan guru yang ada untuk menghasilkan lebih banyak calon guru sebanyak yang kita perlukan dan dana yang tersedia untuk mengangkat guru-guru baru sebanyak yang kita perlukan. Demikian pula yang kita hadapi dalam hal pengadaan buku-buku teks, buku pegangan guru, alat pelajaran, buku bacaan dan buku perpustakaan. Semuanya kita laksanakan secara bertahap, sejalan dengan sistem pembangunan nasional yang telah digariskan.

Walaupun masalah-masalah yang kita hadapi itu, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, sudah banyak yang dapat diatasi, secara keseluruhan dan sesuai dengan sistem pelaksanaan pengajaran yang baik, kita masih belum lepas dari masalah-masalah itu. Secara bertahap masalah demi masalah akan kita pecahkan sebagaimana mestinya.

### 3. Alternatif Pemecahan Masalah yang Dilaksanakan

Untuk menutupi kekurangan jumlah guru, baik untuk menutupi kekurangan guru yang ada sebelumnya maupun sebagai akibat dari pembangunan sekolah-sekolah baru, penambahan ruang belajar pada sekolah-sekolah yang sudah ada atau pemekaran sekolah-sekolah kelas jauh menjadi filial atau sekolah yang berdiri sendiri, selama Pelita III telah dan sedang dilaksanakan pengangkatan guru baru sebanyak berikut ini.

- a. Pendidikan Dasar: SD sebanyak 105.000 orang, TKK 12.000 orang dan SLB sebanyak 1.400 orang. Sebagian besar dari mereka adalah guru kelas. Oleh karena itu, mereka sekaligus adalah guru-guru bahasa Indonesia baru untuk pendidikan dasar.
- b. Pendidikan Menengah Pertama: SMP 73.600 orang, SMTP Kejuruan 4.200 orang. Sebagian dari mereka juga adalah guru bahasa Indonesia.
- c. Pendidikan Menengah Atas: SMA 31.700 orang, SMTA Kejuruan 8.200 orang, SPG 1.100 orang, dan SGO 600 orang. Sebagian dari mereka adalah juga guru bahasa Indonesia.

Dilihat dari segi jumlah, penambahan guru ini cukup besar. Namun, bila diingat bahwa penambahan jumlah guru ini sejalan dengan penambahan jumlah sekolah, maka dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada sekarang, jumlah guru ini masih harus ditingkatkan. Walaupun demikian, perluasan jumlah sekolah dan guru bahasa selama Pelita III ini dapat dipandang sekaligus sebagai usaha peningkatan dan perluasan pengajaran bahasa Indonesia sebagaimana yang diminta Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Sebagaimana dikemukakan di atas, sebagai akibat dari pembaharuan

kurikulum dan program pengajaran, guru-guru yang sudah ada pada saat pembaharuan itu dilakukan perlu menyesuaikan pengetahuan dan keterampilan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi pelaksanaan kurikulum dan program baru itu. Mungkin saja terjadi sebagai akibat dari pembaharuan kurikulum itu ada kualitasnya tidak lagi serasi dengan tugas-tugasnya yang baru. Di samping itu, untuk memenuhi kekurangan guru sebagai akibat dari pembangunan sekolah-sekolah baru, jumlah calon yang telah tersedia tidak lagi memenuhi keperluan, kita terpaksa mengadakan guru dengan program darurat. Oleh karena sifatnya sebagai program darurat, terbuka kemungkinan bahwa kualitasnya tidak memenuhi standar sebagaimana yang telah ditentukan. Di sini kita berhadapan dengan kurang serasinya mutu guru baru yang kita angkat untuk sekolah-sekolah yang baru didirikan, terutama untuk sekolah menengah. Bahkan pernah kita mengangkat tamatan STM untuk guru bidang studi tertentu dengan hanya memberi mereka pengetahuan keguruan dan kependidikan dalam waktu yang relatif singkat untuk menanggulangi masalah ini kita memilih alternatif pemecahan melalui penataran guru. Menyadari bahwa kita masih perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru agar lebih serasi bagi keperluan pelaksanaan program pengajaran sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk lembaga-lembaga baru di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang khusus diberi tugas di bidang penataran ini, yaitu Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Moral Pancasila, Teknologi, dan Kejuruan. Di samping Pusat-pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis dan bidang studi ini didirikan pula Balai Penataran Guru.

Pusat Pengembangan Penataran Guru, salah satu di antaranya adalah Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa diberi tugas antara lain untuk:

- a. merencanakan program pengembangan guru,
- b. melaksanakan penataran sesuai dengan keperluan,
- c. melaksanakan penilaian program dan pelaksanaan penataran,
- d. mengembangkan dan meningkatkan cara penyajian dan materi penataran.

Mengingat pentingnya penataran ini dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusannya No. 0161/U/1980 tanggal 12 Mei 1980 telah menetapkan pedoman penataran dalam sistem penataran terpadu pada pendidikan formal tingkat dasar dan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan menugaskan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyelenggarakan penataran kependidikan pada pendidikan formal tingkat dasar dan menengah itu sesuai dengan pedoman penataran tersebut. Dengan

demikian, penataran guru, termasuk guru bahasa Indonesia, merupakan usaha yang terpadu dalam peningkatan mutu guru.

Dalam hal pengadaan buku teks, pemerintah melalui Tim Penulisan Buku yang khusus dibentuk untuk itu, mengadakan buku teks utama untuk tiap bidang studi. Buku ini, melalui proyek pengadaan buku pelajaran, dibagikan ke sekolah-sekolah untuk digunakan sebagai buku pegangan pokok. Dengan demikian, untuk di seluruh Indonesia, tiap sekolah yang sejenis menggunakan buku pegangan pokok yang sama. Di samping itu, untuk buku-buku teks pelengkap, buku bacaan dan buku perpustakaan, pemerintah membeli buku-buku yang sesuai di pasaran secara bertahap dan dibagi-bagi ke sekolah-sekolah untuk digunakan sebagaimana mestinya. Demikian pula halnya dengan alat-alat pelajaran lain yang diperlukan.

Khusus untuk pengajaran bahasa Indonesia, dalam rangka mempertinggi mutu pelaksanaan pengajaran sehingga diharapkan dapat dicapai hasil sebagaimana yang telah digariskan, di samping buku-buku pelajaran pokok dan buku pegangan guru/petunjuk guru yang diadakan melalui berbagai proyek pengadaan buku pemerintah, secara bertahap telah pula dibeli dan dikirimkan ke sekolah-sekolah buku-buku pelengkap, buku-buku bacaan dan buku-buku sastra. Untuk sekolah dasar sebagaimana disebutkan di atas, di samping buku-buku itu telah pula diadakan alat-alat pelajaran bahasa, terutama alat-alat pelajaran untuk pelajaran membaca dan menulis permulaan (Lado, 1964:57).

### **Beberapa Kesimpulan dan Saran**

Sebelum menutup uraian ini kami ingin menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut.

Dalam usaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional melalui pendidikan formal tingkat dasar dan menengah, penempatan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan mata pelajaran untuk semua jenis dan tingkat sekolah merupakan langkah yang sangat penting.

Penempatan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Bab IV Pasal 5 ayat 1 dan 2. Bahwa guru boleh menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada tiga kelas terendah di sekolah dasar bukan saja memberikan kemungkinan kepada guru untuk memilih cara mengajar yang serasi dengan murid yang dihadapinya dalam usaha mencapai hasil pendidikan yang sebaik-baiknya, tetapi juga sekaligus dapat sebagai sumbangan bahasa daerah dalam mempercepat anak-anak menguasai bahasa Indonesia.

Sekolah dan kelas adalah lingkungan bahasa yang terbaik dalam me-

rembeskan kemampuan menggunakan bahasa karena dalam kehidupan di sekolah anak-anak selalu berada dalam kontak pemakaian bahasa.

Pada umumnya sebelum menguasai bahasa Indonesia anak-anak Indonesia sudah menguasai bahasa ibunya. Semakin disadari bahwa faktor umur memegang peranan penting dalam belajar bahasa yang bukan bahasa ibu. Semakin muda umur anak mulai belajar bahasa itu, semakin mudah dan cepat ia menguasai bahasa itu. Anak itu akan mempelajari bahasa itu dalam suasana yang hampir sama dengan ia belajar bahasa ibunya. Mereka akan mempelajari bahasa itu dengan taraf kecepatan dan ketepatan yang hampir sama dengan cara belajar bahasa ibunya. Sehubungan dengan itu, penempatan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan mata pelajaran sejak kelas permulaan sekolah dasar berarti memberi kesempatan kepada anak berada dalam kontak pemakaian bahasa Indonesia yang sesungguhnya pada waktu umur mereka masih muda. Usaha ini sekaligus merupakan usaha yang sangat penting dalam memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional.

Ketentuan bahwa bahasa Indonesia boleh dipakai sebagai bahasa pengantar di taman kanak-kanak dan tiga kelas rendah sekolah dasar di samping memungkinkan guru memilih teknik mengajar yang lebih serasi dengan situasi kelas yang dihadapinya, sekaligus juga berarti pemanfaatan bahasa daerah dalam usaha mempercepat anak-anak menguasai bahasa Indonesia.

Usaha-usaha mempertinggi mutu program, pelaksanaan program, dan hasil pengajaran bahasa Indonesia pada pendidikan formal tingkat dasar dan menengah dalam hubungan pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional telah dan sedang dilakukan sebagai berikut:

- a. pembaharuan kurikulum dan program pengajaran bahasa;
- b. perluasan dan pemerataan penyebaran sekolah di daerah-daerah;
- c. peningkatan jumlah dan mutu guru;
- d. pengadaan buku pelajaran utama dan buku pegangan guru;
- e. pengadaan buku-buku bacaan dan buku-buku perpustakaan;
- f. pengadaan alat-alat pelajaran;
- g. peningkatan mutu proses belajar mengajar.

Sesuai dengan pola pembangunan nasional dan kemampuan dana dan tenaga yang tersedia usaha-usaha perluasan dan peningkatan mutu program dan pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia dalam berbagai aspeknya itu dilakukan secara bertahap dan berencana.

Untuk membantu terlaksananya usaha-usaha perluasan dan peningkatan mutu program dan pelaksanaan pengajaran bahasa di bidang pendidikan tingkat dasar dan menengah disarankan para ahli bahasa dan pengajaran bahasa serta masyarakat pada umumnya untuk memberikan partisipasi yang

lebih aktif, terutama dalam pengadaan dan peningkatan mutu berbagai jenis buku dan alat pelajaran bahasa Indonesia yang diperlukan sebagai pelaksanaan pengajaran di sekolah-sekolah, seperti buku pelajaran pelengkap, buku pegangan guru, buku-buku bacaan dan buku perpustakaan, berbagai jenis buku latihan, buku tata bahasa dan kamus serta alat-alat bantu pelajaran. Kelengkapan buku-buku dan alat-alat pelajaran seperti itu dewasa ini sangat dirasakan sehingga usaha-usaha melengkapi sekolah-sekolah dengan buku-buku dan alat-alat pelajaran yang bermutu tinggi banyak mengalami kelambatan.

Demikian sedikit uraian yang dapat kami sampaikan kepada Saudara sekalian, kami percaya bahwa semua hal yang baru saja kami sampaikan sudah Saudara ketahui sehingga uraian ini pada hakikatnya hanya merupakan penyegaran kembali.

Sebelum kami mengakhiri ceramah ini, perlu kami uraikan bahwa betapa penting peranan bahasa Indonesia dalam proses penyampaian pendidikan dan betapa berat tugas sebagai pendidik untuk mengemban tugas yang mulia ini. Hal ini sangat dirasakan terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti di negara kita ini, yang masih kekurangan sarana dan prasarana, tenaga kependidikan. Namun, kami percaya bahwa karena dedikasi yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang besar pada profesi dan demi keberhasilan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya demi tercapainya kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Saudara tetap mempunyai semangat yang tinggi untuk menyukseskan Bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional melalui pendidikan.

Atas dasar itulah saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Terima kasih.

Catatan:

1. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950, Bab IV, Pasal 5, ayat 2.
2. Kurikulum SPG 1976.
3. Rencana Pembangunan Lima Tahun III 1979/1980–1983/1984.
4. Angka-angka yang dicantumkan di sini dikumpulkan dari laporan proyek-proyek yang menangani masalah itu sampai akhir 1982. Angka-angka ini mungkin telah berubah sesuai dengan kemajuan pelaksanaan kegiatan proyek sehingga sudah mendekati rencana yang tercantum dalam buku *Replita II*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Flanders, N. 1970. *Analyzing Teaching Behaviour*. London: Addison Wesley.
- Lado, Robert. 1964. *Language Teaching: A Scientific Approach*. New York: McGraw-Hill Inc.
- Stubbs, Michael. 1976. *Language Schools and Classroom*. London: Mathuen & Co. Ltd.

## POTENSI KOSAKATA BAHASA JAWA UNTUK MEMPERKAYA KOSAKATA BAHASA INDONESIA

Sarjana Hadiatmaja  
FPBS IKIP Yogyakarta

### Pendahuluan

Politik Bahasa Nasional yang merupakan kerangka dasar kebijaksanaan bahasa nasional telah memberikan perumusan secara jelas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, kedudukan dan fungsi bahasa daerah, dan kedudukan dan fungsi bahasa asing di Indonesia. Dengan kerangka dasar kebijaksanaan bahasa nasional itu, maka hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah merupakan hubungan bagi-fungsi sehingga keduanya dapat hidup seiring berdampingan dengan tidak saling memberikan pengaruh negatif yang mendasar, bahkan keduanya dapat saling memberi dan menerima dalam proses perkembangan masing-masing untuk dapat menempati fungsinya selaras dengan perkembangan sosial lingkungannya. Hal ini berarti bahwa dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak mematikan kehidupan bahasa daerah, sebaliknya dengan kedudukan fungsi bahasa daerah tidak mengganggu usaha pembakuan bahasa Indonesia.

Di dalam kesimpulan seminar politik bahasa nasional tahun 1975, antara lain disebutkan:

Di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi (1) pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (3) alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah. (Halim, 1976b:146)

Dalam memenuhi fungsinya yang pertama, yaitu sebagai pendukung bahasa nasional, telah dibicarakan pada seminar-seminar yang terdahulu, dan telah banyak para ahli yang menyinggung peranan bahasa daerah dalam memberikan sumbangannya terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Beberapa di antara mereka antara lain mengemukakan:

Di Indonesia terdapat sejumlah bahasa Nusantara penting yang masing-masing dituturkan oleh satu juta orang lebih. Bahasa tersebut mempunyai daya hidup dan masih tetap berfungsi sebagai alat perhubungan antarwarga masyarakat bahasa itu. Bahasa itu pun masih dapat memperkaya bahasa Indonesia, terutama dalam perluasan kosakata dan bentuk kata. (Anton M. Moeliono, dalam Halim, ed. 1976b:32)

... perkembangan bahasa Indonesia seperti yang kita miliki sekarang telah dimungkinkan oleh adanya tingkat toleransi kebahasaan yang tinggi, dan sebagai akibatnya menyerap berbagai unsur fonologi, sintaksis, dan kosa kata dari bahasa-bahasa daerah terutama bahasa Jawa, ... (Halim, 1976a:17)

... dalam perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern, sering juga bahasa Indonesia dapat memakai kata-kata daerah untuk nama-nama benda dan perbuatan, baik dalam hubungan memperkaya dengan pengertian-pengertian kebudayaan tradisi maupun dalam penyesuaian-nya akan dunia modern. (S. Takdir Alisjahbana, dalam Halim, ed. 1976a:44)

Dalam seminar-seminar sebelumnya itu baru disinggung saja sebagai pernyataan atau pengakuan akan peranan bahasa daerah sebagai pendukung bahasa nasional, tetapi belum membahas sampai seberapa jauh peranannya itu. Tulisan ini bertujuan untuk membicarakan yang lebih mendetil agar dapat diketahui dengan jelas sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa bahasa Jawa memiliki potensi untuk diserap ke dalam bahasa Indonesia, dan bagaimana proses penyerapannya. Kalau di dalam kamus yang kita miliki sekarang baru beberapa bahasa daerah yang masuk, yaitu bahasa Jakarta, Jawa, Minangkabau, Palembang, dan Sunda, ini pun tidak berarti bahwa hanya bahasa daerah itu yang terserap ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini mungkin kebetulan penyusunnya (W.J.S. Poerwadarminta) adalah orang Jawa, dan bahan-bahan yang dipergunakan adalah bahasa tulis yang dikarang oleh pengarang daerah tersebut. Masalah ini saya kemukakan di sini untuk mendorong kita semua bahwa masalah leksikografi perlu penggarapan secara besar-besaran yang melibatkan orang-orang dari berbagai daerah dan berbagai bidang keahlian. Untuk meringkas pembicaraan istilah bahasa Indonesia disingkat BI, dan bahasa Jawa disingkat BJ.

#### **Kebakuan Kata-kata Serapan dari Bahasa Jawa**

Sampai sekarang kita belum memiliki kriteria yang terperinci mengenai

pembakuan kata-kata serapan dari bahasa daerah pada umumnya, dan dari BJ khususnya. Khusus mengenai peristilahan BI bersumber dari kosakata bahasa serumpun dikatakan sebagai berikut:

Kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah yang dengan tepat dapat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang dimaksudkan, maka hendaknya dicari istilah dalam bahasa serumpun (yang memiliki pengertian itu).

Misalnya: *timbel* (Jawa) *lead* (Inggris)  
*gambut* (Banjar) *peat* (Inggris)  
*nyeri* (Sunda) *pain* (Inggris)

(Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1977:12)

Dalam kehidupan sehari-hari, dan terutama dalam bidang pendidikan, untuk menetapkan kebakuan kata-kata serapan, baik yang berasal dari bahasa daerah maupun yang berasal dari bahasa asing kita menggunakan acuan kamus umum. Untuk BI kita telah memiliki *Kamus Umum Bahasa Indonesia* karangan W.J.S. Poerwadarminta, yang selanjutnya disingkat KUBI. KUBI ini telah diolah kembali oleh suatu tim, yaitu staf Bidang Perkamusan dan Peristilah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen P. dan K., tahun 1972 sampai tahun 1974, yang kemudian diterbitkan oleh Balai Pustaka sebagai cetakan kelima tahun 1976, dan dicetak ulang lagi tahun 1982, dalam halaman petunjuk mengenai perbendaharaan kata dikatakan:

Kata-kata yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing, apabila sudah lazim atau kerap terdapat dalam bacaan umum, dicantumkan juga dalam kamus ini dengan tiada diberi tanda asal-usulnya.

... huruf kependekan seperti A (Arab), J. (Jakarta), M (Minangkabau), Skr (Sansekerta) dan sebagainya yang dipakai dalam kamus ini, sekadar untuk petunjuk bahwa kata-kata itu "pada umumnya" belum menjadi kata Indonesia umum. (W.J.S. Poerwadarminta, 1982:7)

Berdasarkan kutipan itu, jelaslah bahwa kata-kata yang berasal dari bahasa daerah termasuk BJ, bila sudah lazim dipakai dalam buku-buku bacaan umum, dicantumkan dalam KUBI tanpa tanda, yang berarti kata-kata itu sudah sepenuhnya menjadi perbendaharaan kata BI. Kata-kata BJ yang 20 tahun sebelum kamus itu direvisi masih diberi tanda *DJw* pada terbitan sesudah direvisi ada yang telah dihilangkan, berarti dalam kurun waktu itu telah terjadi perkembangan, sebagai contoh:

aba II (= aba-aba): kata-kata perintah (di gerak badan, berbaris dsb, spt siap! maju jalan!)

balap: pacuan; misalnya *sepeda balap*, *kuda balap*; membalap: berlari kencang-kencang; berlumba;

balapan: 1 pacuan; perlumbaan; 2. tempat pacu.

bengkong (bengkong) I: bengkok; — bengkang-bengkong.

Kata-kata BJ yang dianggap belum menjadi kata Indonesia umum,

dalam KUBI cetakan kelima edisi 1982 diberi tanda huruf kependekan JW, sebagai contoh:

*angker* Jw: berpusaka; berpenghuni orang halus (Hantu dsb).

*bakul* II Jw: (perempuan) pedagang kecil.

Secara teoritis kebakuan yang didasarkan pada acuan KUBI itu dapat dipertanggungjawabkan, tetapi apabila kita hanya berpegang teguh pada tanda-tanda yang terdapat dalam KUBI itu, kita akan tertipu karena dalam kenyataan bahasa yang hidup sehari-hari, dan bahasa yang dipergunakan dalam buku-buku bacaan, baik buku bacaan dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, maupun sastra, untuk kata-kata yang bertanda itu banyak yang sudah menjadi kata-kata yang sangat umum dipakai. Sebagai contoh di sini saya ambil buku bahan penataran P4 edisi pertama tahun 1978, yang di dalamnya terdapat kata-kata *ampuh* (*keampuhan*), *emban* (*mengemban*), *prihatin*, *luwes*, *tameng*, *tatanan*, *tuntunan*, *wenang*, *wewenang*, dan *kewenangan*, yang dalam KUBI masih bertanda Jw. Bahkan untuk kata *tatanan* bertanda Jw +, yang berarti dianggap kata-kata yang sudah mati, sedangkan kenyataannya justru dipakai untuk pengertian (definisi) *orde baru*. Karena buku itu dipakai sebagai bahan penataran untuk pegawai negeri seluruh Indonesia, cukup meyakinkan bahwa tidak ada pegawai negeri kita dari daerah mana pun yang tidak memakai kata-kata itu. Di samping itu, terdapat juga kata *tuntas* yang belum masuk dalam kamus, tetapi sudah umum dipakai. Hal ini menunjukkan bahwa kamus itu sudah sangat jauh ketinggalan perkembangan.

Ketimpangan ini memang dapat dipahami karena pada waktu KUBI itu direvisi sudah memakan waktu 2 tahun, sampai terbit sudah menjadi 4 tahun, dan dicetak ulang 1982 sudah menjadi 10 tahun sehingga KUBI itu makin ketinggalan dengan perkembangan BI yang sangat pesat.

Perkembangan BI yang begitu pesat itu pun merupakan hal yang wajar sebagai konsekuensi untuk memenuhi kebutuhan BI dalam berbagai fungsinya, baik sebagai bahasa nasional yang meliputi berbagai aspek sosial dan kebudayaan maupun sebagai bahasa negara. Benarlah kiranya apa yang pernah dikemukakan oleh S. Wojowasito waktu 8 tahun yang lalu sebagai berikut:

Semua profesi yang memerlukan pengetahuan teknis, yang amat menentukan mata pencaharian seseorang, hampir seluruhnya harus dicapai dengan bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia betul-betul mempunyai posisi H. Tetapi bahasa Jawa dengan posisi sebagai bahasa L dapat mengalihkan segala kekayaan sastranya yang diakui oleh seluruh dunia tinggi nilai-nilai kebudayaannya itu kepada bahasa Indonesia dengan *konsekuensi* kebahasaan bagi bahasa Indonesia, misalnya disebabkan oleh adanya istilah-istilah yang khas Jawa. Hal yang sama dapat berlaku pula bagi bahasa-bahasa daerah yang lain.

(S. Wojowasito, dalam Halim ed. 1976b:73)

Jika kita mengalihkan pandangan ke bidang sastra, misalnya pada prosa lirik *Pengakuan Pariyem* karangan Linus Suryadi, kita akan menjadi lebih ngeri lagi karena kita dihadapkan kepada kenyataan pengungkapan makna baik yang merupakan keharusan karena istilah khas Jawa, maupun masalah diksi yang bertumpu pada nuansa-nuansa makna dan gaya bahasa. Dalam buku itu beratus-ratus kata Jawa yang dipakai, dan bagi penggemar sastra kiranya tidak dapat menolak sebuah karya sastra seperti *Pengakuan Pariyem* ini, baik dipandang dari seni sastra maupun sebagai karya sastra yang sanggup mengungkapkan gejala sosial, kehidupan kebudayaan, dan pandangan hidup yang diwarnai oleh kultur Jawa. Hal ini tidak berarti bahwa saya ingin memaksakan agar kata-kata itu seluruhnya diterima ke dalam kosakata BI, tetapi setidaknya menjadi bahan pemikiran kita dalam memberikan batasan penerimaan kosakata BJ, dan bahasa daerah lainnya ke dalam kosakata BI.

#### **Potensi Kosakata Bahasa Jawa dalam Proses Perkembangan Bahasa Indonesia**

Tadi telah dikatakan bahwa BJ sebagai bahasa L memiliki kekayaan sastra yang mengandung nilai-nilai kebudayaan yang tinggi yang dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap pengembangan kebudayaan nasional. Dengan mengalihkan kekayaan budaya itu kepada BI, mengandung konsekuensi kebahasaan bagi BI antara lain dalam penerimaan istilah-istilah khusus pengungkapan makna konsep unsur kebudayaan yang terserap. Di samping potensi pengungkapan makna konsep itu sendiri, BJ juga memiliki ciri khusus dalam hal kekayaan lambang pengungkapan makna konsep yang terperinci atau mendetil. BJ juga memiliki sinonim kata yang bertingkat-tingkat nilainya. Kesemuanya itu merupakan ciri khusus BJ yang merupakan potensi kuat untuk memberikan sumbangan terhadap BI yang terus membangun dirinya menjadi bahasa yang mampu berfungsi sebagai bahasa nasional untuk mewadahi kekayaan budaya yang bineka tunggal ika. Hal ini pun sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Syarif Thajeb) pada pembakuan Sanggar Kerja Politik Bahasa Nasional di Jakarta tahun 1976 sebagai berikut:

Hubungan timbal balik antara masalah bahasa dan sastra disebabkan oleh kenyataan bahwa sastra, baik sebagai unsur kebudayaan yang hidup maupun sebagai sarana ekspresi perasaan dan nilai-nilai kehidupan kemanusiaan, mempergunakan bahasa sebagai sarana. Selain daripada itu, di dalam perkembangan dan sejarah bahasa Indonesia kita melihat kenyataan bahwa para sastrawan telah memberikan sumbangan yang besar sekali kepada bahasa Indonesia melalui karya sastra yang dihasilkan mereka. Dengan kata lain, karya sastra telah memperkaya bahasa Indonesia bukan saja di dalam kosakata dan struktur bahasanya tetapi

juga di dalam peningkatan daya ekspresi bahasa Indonesia itu. (Syarif Thajeb, 1976:6)

Secara garis besar potensi penyerapan kosakata BJ ke dalam kosakata BI itu dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

### 1. Peninjauan dari Segi Bentuk

BJ memiliki kekayaan lambang untuk pengungkapan makna konsep, proses, keadaan atau sifat dengan menggunakan bentuk kata tunggal, baik sebagai kata dasar maupun kata jadian, yaitu bentuk yang lebih singkat daripada BI yang menggunakan bentuk kata majemuk atau frasa. Kesingkatan bentuk itu memberikan kelonggaran dan kemudahan bagi pembicara, penulis atau sastrawan dalam memilih kata yang sesuai dengan nuansa perasaan yang tersirat dalam ekspresi penulis atau pengarang.

|           |                    |                                                 |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Misalnya: | <i>bakul</i>       | = pedagang kecil                                |
|           | <i>bengawan</i>    | = sungai besar                                  |
|           | <i>bobrok</i>      | = rusak sama sekali                             |
|           | <i>galengan</i>    | = pematang sawah                                |
|           | <i>gandrung</i>    | = sangat rindu (kasih); sangat ingin akan       |
|           | <i>mengganyang</i> | = 1. memakan mentah-mentah<br>2. mengikis habis |
|           | <i>gaplek</i>      | = ubi kayu kering                               |
|           | <i>kerasan</i>     | = betah tinggal di suatu tempat                 |
|           | <i>regol</i>       | = pintu gerbang                                 |

Di samping bentuk kata sebagai bentuk singkat sebagai pengganti bentuk kata majemuk atau frasa, dalam proses penyerapan kata-kata BJ ada gejala pemakaian bentuk kata berawalan *ke-* yang mempunyai padanan dengan bentuk kata berawalan *ter-* dalam BI, tetapi penyerapan itu tidak hanya semata-mata awalnya saja, melainkan penerimaan secara keseluruhan dengan bentuk dasarnya sehingga dalam BI seolah-olah merupakan bentuk dasar.

|           |                   |                                                                                       |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Misalnya: | <i>kejeblos</i>   | = 1. terperosok; 2. termasuk ke dalam perangkap                                       |
|           | <i>kejengkang</i> | = terjatuh terlentang                                                                 |
|           | <i>kepergok</i>   | = terjumpa, kedatangan                                                                |
|           | <i>kepeleset</i>  | = tergelincir, terpeleset                                                             |
|           | <i>kepulesan</i>  | = tertidur nyenyak                                                                    |
|           | <i>kesasar</i>    | = tersesat, salah jalan                                                               |
|           | <i>kesusu</i>     | = tergesa-gesa                                                                        |
|           | <i>kewalahan</i>  | = tidak sanggup melawan (mengerjakan) karena teramat banyak yang dilawan (dikerjakan) |

## 2. Peninjauan dari Segi Makna

Makna kata sangat erat hubungannya dengan sistem kultur masyarakat bahasa itu. Dengan kata lain, makna kata tergantung dari kesepakatan atau kebiasaan masyarakat bahasa yang bersangkutan. Suatu konsep, proses, keadaan atau sifat diberi lambang-lambang secara arbitrer, tetapi selaras dengan kultur masyarakatnya. Makin kaya kebudayaan suatu masyarakat bahasa, makin kaya pula kosakata yang khusus. BJ adalah bahasa daerah yang termasuk dalam kategori itu. Di samping itu, BJ juga memiliki sistem lambang dengan deferensiasi yang lebih menjilmet (merenik) daripada BI.

Dengan demikian, apabila BI dalam perkembangannya menerima unsur-unsur kebudayaan yang didukung oleh BJ, dengan sendirinya akan kena pengaruh dua hal tersebut. Secara garis besar penyerapan kosakata BJ ke dalam BI ditinjau dari segi makna dapat dibagi atas dua kategori itu yakni (1) kata-kata yang merupakan pengungkapan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang belum terdapat dalam BI, dan (2) kata-kata yang mengungkapkan makna yang memiliki nuansa yang lebih kecil.

### a. Kosakata Baru yang Belum Terdapat dalam BI

Kosakata baru yang belum terdapat dalam BI yang diserap dari BJ sebagai pengungkapan makna khusus dapat digolong-golongkan berdasarkan berbagai aspek, antara lain sebagai berikut.

#### a) Bidang pertanian, peternakan, perindustrian, dan perdagangan

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Misalnya: <i>kekar</i> (keker) | = kerap dan padat (anyaman, tenunan dsb).        |
| <i>kelor</i>                   | = pohon merunggai (daunnya dapat untuk obat dsb) |
| <i>padi saga</i>               | = padi huma                                      |
| <i>paceklik</i>                | = musim kekurangan makanan                       |
| <i>karang kitri</i>            | = pohon buah-buahan                              |
| <i>belantik</i>                | = perantara jual beli ternak                     |

#### b) Bangunan, alat rumah tangga, dan pakaian

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Misalnya: <i>joglo</i>      | = nama gaya bangunan rumah Jawa |
| <i>amben</i>                | = balai-balai                   |
| <i>blangkon</i>             | = ketu udeng                    |
| <i>timbang</i>              | = sebangsa gesper               |
| <i>babrangan (babrakan)</i> | = para-para                     |
| <i>gebyok</i>               | = dinding terbuat dari papan    |

#### c) Adat istiadat

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Misalnya: <i>among-among</i> | = selamatan hari kelahiran |
| <i>metri desa</i>            | = selamatan sehabis panen  |

*ruwatan* = upacara membebaskan orang dari nasib buruk yang akan menimpa

d) Kesenian

Misalnya: *sampur* = selendang, selampai  
*sondor* = sebai  
*pesinden* = penyanyi dalam kerawitan  
*kerawitan* = seni suara gamelan  
*belencong* = sebangsa lampu besar (digantungkan di muka kelir)  
*cempala* = sekerat kayu alat pemukul kotak wayang  
*keprak* = sebangsa bunyi-bunyian dalam permainan wayang  
*wayang purwa* = wayang kulit

b. Kata-kata Baru Karena Nuansa Makna

BJ memiliki sistem lambang yang mendetil sehingga dapat mengungkapkan nuansa yang sehalus-halusnya, antara lain sebagai berikut.

a) Nuansa wujud

Misalnya: *beluluk* = numbang (putik buah kelapa)  
*cengkir* = buah kelapa muda (sudah berisi air tetapi belum berisi kelapa)  
*degan* = buah kelapa muda

b) Nuansa keadaan

Misalnya: *cedak* = dekat  
*cedek* = dekat sekali

c) Nuansa gerak atau tindakan

Misalnya: *alon (alon-alon)* = perlahan-lahan, lambat-lambat  
*rindik* = perlahan-lahan, lambat-lambat  
*(di)jiwit* = (di)cubit  
*(di)cethot/cetet* = (di)cubit (pahanya)

d) Nuansa sikap

Misalnya: *dodok* = jongkok  
*berlaku dodok* = berjalan jongkok  
*jengkeng, menjengkeng /manjeker/* = berjengket

3. Peninjauan dari Segi Nilai Kata

BJ mempunyai sistem ketakziman yang rumit. Untuk menyatakan ketakziman dalam bahasa, BJ menggunakan sinonim kata yang memiliki nilai kata yang berbeda, yaitu rendah, madya, dan tinggi. Dalam karangan ter-

utama dalam bidang sastra ketakziman pada BJ ini juga berpengaruh, khususnya dalam karangan-karangan yang merefleksikan kultur Jawa. Dalam dunia sastra hal ini terdapat dalam prosa lirik *Pengakuan Pariyem* karangan Linus Suryadi, dan dalam seni pentas ketoprak versi BI oleh *Ketoprak Sapta Mandala* Kodam VII Dipoengoro.

Misalnya: *dalem* = rumah (nilai tinggi)  
*kanjeng* = paduka (tuan)  
*kowe* = engkau (nilai rendah)  
*sampean* = tuan (nilai tinggi)  
*rawuh* = datang (nilai tinggi untuk persona ke-2/3)  
*sowan* = menghadap (nilai tinggi untuk persona pertama)  
*sare* = tidur (nilai tinggi untuk persona ke-2/3)

Di samping itu, untuk menyatakan ketakziman sering juga dipergunakan kata sapaan yang bernilai tinggi.

Misalnya: *kangmas* = kakanda  
*rama* = ayahanda

#### 4. Peninjauan dari Segi Gaya Bahasa

Setiap pembicara, penulis atau pengarang (sastrawan) memiliki gaya berbicara, gaya ekspresi karya tulisnya sendiri-sendiri. Gaya bahasa merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap pengarang. Gaya bahasa seorang pengarang sangat dipengaruhi oleh watak pribadi, dan latar belakang kehidupan yang mengelilinginya. Dengan demikian, gaya seorang pengarang yang mempunyai latar belakang bahasa ibu suatu daerah tertentu tentu dipengaruhi oleh lingkungan yang membentuk pribadi pengarang itu.

Dengan adanya gaya bahasa yang dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan itu, bagi pengarang-pengarang yang berbahasa ibu bahasa Jawa tentu memberikan kemungkinan masuknya kata-kata BJ, istilah, ungkapan, dan sebagainya ke dalam karangannya dalam BI. Tentang pemasukkan kata-kata BJ ini ke dalam BI terutama dalam karya sastra sangat erat hubungannya dengan diksi. Pengarang dihadapkan pada dua kata yang mempunyai arti yang sama, tetapi mempunyai nuansa rasa yang berbeda. Sebagai contoh di sini akan saya sajikan dua pasangan kata-kata BJ dengan kata-kata BI semacam pasangan sinonim yang mempunyai makna denotasi yang sama, tetapi bagi pengarang cenderung memilih kata-kata yang berasal dari BJ karena bagi pengarang seperti Linus Suryadi, misalnya, di samping faktor ritme dan lirik, juga faktor nuansa rasa.

Misalnya: *bocah* vs *anak*  
*amben* vs *balai-balai*

|               |    |               |
|---------------|----|---------------|
| <i>cilik</i>  | vs | <i>kecil</i>  |
| <i>alit</i>   | vs | <i>kecil</i>  |
| <i>kangen</i> | vs | <i>rindu</i>  |
| <i>kali</i>   | vs | <i>sungai</i> |
| <i>gede</i>   | vs | <i>besar</i>  |



Di samping masalah diksi juga mengenai gaya bahasa yang lain, seperti perulangan kata, pertentangan atau perlawanan.

Misalnya: O, Allah, mana ada toleransi lelaki rela *bojanya nyindhen*. Sedang biasanya *kelon* malam-malam *jebul* malah *meladeni* ki dalang. Mulut mangap *centha-centhe* santai di dalam *jagad pergelaran* di dalam *jagad pasamuwan Jagad* pawestri dan *jagad pesindhen*. Ibarat kucing dan anjing tak bisa *rujuk* tak bisa *gathuk*. Ibarat minyak dan air tak bisa lebur tak bisa akur selalu *kerah - congkrah* selalu bersimpang jalan (Linus Suryadi, 1981:61-62)

## 5. Peninjauan dari Segi Lain-lain

Dalam bagian ini akan dikemukakan dua hal, yaitu pertama masalah posisi [e] pada suku kata akhir tertutup. Kelihatannya hal ini sudah memasuki bidang fonologi, tetapi pengaruh ini sudah sejauh mana perlu diteliti. Mula-mula pemakaian kata-kata seperti: *luwes*, (1) pantes, menarik; 2. tidak kaku), *mandeg* (terhenti), *banter* (cepat), dan *santer* (keras) sudah terbiasa dalam pemakaian sehari-hari. Lama-kelamaan gejala ini akan meluas, dan dengan demikian akan menjadi membeku. Jika demikian, apakah akhiran *-kan* yang diucapkan [ken] juga akan membeku?

Kedua masalah penyerapan kata, frasa, dan ungkapan-ungkapan BJ seperti: *Ing ngarsa sung tulada*

*Ing madya mangun karsa*

*Tut wuri handayani*

tampaknya juga sudah disenangi oleh bangsa Indonesia. Hampir semua bangsa Indonesia yang pernah ditatar P4 tahu hal ini, dan berusaha memahaminya dan menghayati maknanya.

BJ memang kaya akan kata-kata mutiara semacam itu yang barangkali ada baiknya untuk dipikirkan kemungkinan dipergunakan juga. Misalnya: *bobot*, *bibit*, *bebet* (keseimbangan pangkat, keturunan, dan martabat dalam pemilihan calon isteri)

*Manunggaling kawula lan Gusti* (persatuan dan kesatuan antara makhluk dengan Tuhannya)

## Kesimpulan

1. Bahasa-bahasa daerah sebagai pendukung bahasa nasional memiliki potensi untuk memperluas kosakata, bentuk kata, dan unsur fonologi bahasa Indonesia.
2. Khusus untuk bahasa Jawa banyak karya-karya tulis yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kemampuannya itu.
3. Kebakuan kata-kata serapan berasal dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia perlu dimantapkan lagi karena perkembangan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lisan maupun bahasa tulis menunjukkan laju yang begitu cepat daripada kebakuan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
4. Potensi kosakata Jawa untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia terutama pada kekayaan pengungkapan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang merupakan ciri khusus yang terdapat pada kebudayaan Jawa yang tinggi nilainya.
5. Potensi lainnya adalah adanya deferensiasi yang mendetil sehingga nuansa yang sekecil-kecilnya dan yang halus dapat ditampungnya, adanya sistem ketakziman dan sebagainya.
6. Perkembangan yang pesat masuknya kata-kata Jawa ke dalam bahasa Indonesia ditunjang oleh karya-karya tulis baik yang bernilai sastra maupun yang bukan sastra.

## Penutup

Sebagai penutup saya ingin mengemukakan bahwa segala sesuatu yang digelarkan dalam kertas kerja ini masih bersifat permulaan karena belum didukung oleh data-data yang lengkap dari berbagai sumber bacaan dan media lainnya, analisis yang masih sederhana, dan organisasi penyajian yang belum terperinci. Bagaimanapun kecilnya tulisan ini, saya berharap ada juga manfaatnya, dan mengharapkan tanggapan dari sidang ini. Dengan tulisan yang bersifat permulaan ini saya juga berharap akan ada yang mengembangkannya berupa penelitian, dan seterusnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Amran. Editor. 1976a. *Politik Bahasa Nasional*. Jilid I. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , Editor. 1976b. *Politik Bahasa Nasional*. Jilid II. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kodiran. 1980. "Kebudayaan Jawa" dalam Koentjaraningrat. Editor. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan. Cetakan kelima.
- Panggabean, M. dkk. 1978. *Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*. Jakarta: Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia. Edisi pertama.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1954. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Djakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P dan K. Cetakan kedua.
- , 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Jaya. Cetakan kelima.
- Rendra, W.S. 1981. *Empat Kumpulan Sajak*. Jakarta: Pustaka Jaya. Cetakan ketiga.
- Sjarif Thajeb. 1976. *Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Sanggar Kerja Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Mulyono, Sri. 1982. *Wayang, Asal-usul, Filsafat dan Masa Depan*. Jakarta: PT. Gunung Agung. Cetakan ketiga.
- , 1983. *Simbolisme dan Mistikisme dalam Wayang Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jakarta: Gunung Agung. Cetakan kedua.
- Suryadi, Linus. 1981. *Pengakuan Pariyem*. Jakarta: Sinar Harapan. Cetakan pertama.

## PEMANFAATAN CELAH MORFOLOGIS DALAM PENGEMBANGAN BAHASA<sup>1</sup>

Soenjono Dardjowidjojo  
Universitas Katolik Atma Jaya

### Pengantar

Kalau kita teliti secara *njelimet* pembentukan kata kerja dan kata benda dalam bahasa Indonesia, kita akan segera mengetahui bahwa ada bentuk-bentukan morfologis yang secara logika harusnya ada, tetapi karena satu dan lain hal nyatanya tidak terdapat dalam bahasa kita. Dengan demikian, kita tidak mempunyai kata-kata seperti (A) \**berjalani*, \**ketidur*, \**melukisan*, \**mempersukarkan*, dan (B) \**merestukan*, \**mengharapi*, \**memperbaik*, \**mempersukarkan*, \**berdatangi*, \**berdasarkan*, \**terselesai*, dan \**terpenuhi* meskipun kita memiliki kata-kata seperti *berjalan*, *ketiduran*, *melukis*, *mempersukar*, *merestui*, *mengharap(kan)*, *memperbaiki*, *mempersukarkan*, *berdatangan*, *berdasarkan*, *terselesaikan*, dan *terpenuhi*. Semua kata ini adalah kata kerja.

Keadaan yang sama juga kita temukan untuk kata benda. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata-kata seperti (B) \**pemenangan*, \**pencobaan*, \**keberontakan*, dan \**pemintaan*. Kata-kata yang ada adalah *kemenangan*, *pencobaan*, dan *permintaan*.

Kalau kita teliti secara saksama celah-celah (*gaps*) morfologis ini, akan kita dapati bahwa kata-kata yang bertanda \*pada (A) dan (B) di atas harus dibedakan dari kata-kata pada kelompok (C) di bawah ini: ?\**mencantik*, ?\**mencantikkan*, ?\**mempersedikit*, ?\**berbis* (ke sekolah), ?\**kegranatan*, ?\**tanyaan*, ?\**pendagangan*, dan ?\**keseakanan*. Seperti kita lihat dari simbol

yang dipakai, yakni tanda ?, "kata-kata" itu paling-paling hanya kita *tolerate*.

Dalam makalah ini akan saya tunjukkan bahwa ketiga kelompok ini mempunyai kendala yang berbeda-beda. Kelompok A, yang sekarang saya namakan Tolakan Satu, TOL<sub>1</sub>, dikendala secara paradigmatis; kelompok B, dengan nama TOL<sub>2</sub>, terdiri dari bentuk-bentuk yang penempatan paradigmatisnya keliru; dan kelompok C, dengan nama TOL<sub>3</sub>, mempunyai kendala yang sifatnya morfemik.

Pada bagian akhir dari makalah ini akan saya tunjukkan pula bahwa pembagian ini mempunyai remifikasi yang penting, terutama dari segi pengembangan bahasa kita.

## Pembentukan Kategori Sintaktik

### 1. Macam-macam Akar Kata

Ada dua macam akar kata yang dipakai untuk membentuk kata kerja dan kata benda dalam bahasa Indonesia: (i) akar kata yang tidak memerlukan imbuhan dan, karena, memiliki kategori sintaktik dan arti yang taktergantungan (*independent*). Inilah yang dinamakan akar bebas. Misalnya, *mandi, pergi, meja, dan darat*; dan (ii) akar kata yang bisa mempunyai kategori sintaktik dan arti hanya setelah dibubuhi imbuhan-imbuhan tertentu<sup>2</sup>. Inilah yang dinamakan akar terikat. Misalnya, *aju, alih, selenggara, dan temu*. Bentuk-bentuk itu tidak pernah kita dapati dalam konstruksi sintaktik mana pun, dan paling-paling yang dapat kita katakan mengenai artinya ialah bahwa mereka berkaitan dengan pengajuan, pengalihan, penyelenggaraan, dan penemuan sesuatu (dalam bahasa Inggris Verb+ing).

Untuk tujuan tertentu dalam makalah ini, saya akan memfokuskan adanya fitur sintaktik tertentu pada tiap akar bebas. Akar bebas akan mempunyai fitur /+verbal/ atau /-verbal/<sup>4</sup>. Sebuah akar bebas akan bertanda /+verbal/ apabila memenuhi salah satu dari dua syarat berikut: (1) dapat dipakai dalam suatu posisi pada suatu kalimat tempat akar bebas ini dengan imbuhan awalnya, bila ada, juga bisa dipakai, atau (2) dapat dipakai sebagai kata kerja dalam kalimat perintah. Syarat pertama jelas merujuk pada kemungkinan pemakaian akar bebas itu pada gaya bahasa informasi yang pemakaian awalan, dalam kebanyakan hal, bukanlah suatu keharusan. Dengan demikian, akar kata seperti *mandi, lari, dan duduk* akan ditandai /+verbal/ dengan arti yang taktergantungan. Sebaliknya, *meja, dapat, dan telur* akan diberi fitur /-verbal/ dengan artinya masing-masing. Akan tetapi, ada akar bebas yang memiliki kedua fitur itu. Akar kata seperti *jalan* dan *telepon* memenuhi kedua syarat di atas, tetapi kata-kata itu juga mengandung /-verbal/. Hal itu terbukti dengan dapat dipakainya akar itu dalam posisi nominal.

Perlu dicatat di sini bahwa pemberian fitur sintaktik pada akar kata tidak harus berarti bahwa akar itu tidak berubah masuk ke kategori sintaktik yang lain dengan memakai imbuhan tertentu meskipun dalam beberapa hal memang benar bahwa suatu akar kata hanya dapat masuk ke dalam satu kategori.

## 2. Pembentukan Kata Kerja

Berdasarkan atas macam-macam akar kata yang baru saja saya sajikan, pada dasarnya hanya ada dua macam bentuk kata kerja dalam bahasa Indonesia: (1) bentuk yang dapat berdiri sendiri sebagai kata kerja tanpa imbuhan, yang akan saya singkat dengan simbol  $K_1$ , dan (2) bentuk yang dapat atau harus berimbuhan untuk memikul fungsi kata kerja, yang saya singkat dengan simbol  $K_2$ .  $K_2$  dibagi lagi menjadi tiga kelompok yang lebih kecil:  $K_{2a}$  yang terdiri dari kata kerja yang kata dasarnya adalah akar bebas, tetapi memerlukan imbuhan;  $K_{2b}$  yang terdiri dari kata kerja yang kata dasarnya juga akar bebas, tetapi dapat memakai imbuhan; dan  $K_{2c}$  yang terdiri dari kata kerja yang kata dasarnya adalah akar terikat dan karenanya harus memakai imbuhan<sup>5</sup>.

$K_1$  datang, tiba, percaya, mengerti

$K_{2a}$  mendarat, bertelur, melebar, membajak

$K_{2b}$  berjalan, menilpun, berlari, membeli

$K_{2c}$  mengajukan, mengalihkan, menyelenggarakan, bertemu

Kecuali *tiba* dan *mengerti*, semua kata kerja pada  $K_1$  dapat diberi imbuhan untuk menjadi kata kerja yang lain. Sepanjang pengetahuan saya, *tiba* adalah satu-satunya kata dalam bahasa Indonesia yang tidak dapat dibubuhi awalan apa pun, baik verbal maupun nominal. Kecuali dalam bentuk pasif dengan awalan *di-*, kata kerja *mengerti*, yang secara historis mungkin diturunkan dari kata dasar *erti* dengan imbuhan *meN-*, tidak dapat dibubuhi imbuhan verbal meskipun ia dapat memiliki status nominal dengan imbuhan tertentu.

### a. Imbuhan Verbal dengan Kombinasinya

Seperti kita ketahui, imbuhan-imbuhan yang diperlukan untuk membentuk kata kerja adalah awalan *meN-* (dengan bentuk pasifnya *di-*), *(mem)peR-*, *beR-*, dan *teR-*, dan akhiran *-kan*, *-i*, serta kadang-kadang *-an*.

Awalan *meN-*, *(mem)peR-*, dan *teR-* dapat bergabung dengan akhiran *-kan* dan *-i*, sedangkan *beR-* dapat dengan *-kan* dan *-an*.

### b. Kata Kerja dengan *meN-*

Karena *meN-* dapat bergabung hanya dengan akar kata saja, dengan

akar dan akhiran *-kan*, atau dengan akar dan akhiran *-i*, dan ketiga set ini dapat berinterseksi, kita mempunyai tujuh subset: (1)  $M_1$  yang terdiri dari *meN+akar+O*. Contoh: *menganiaya*, *mendukung*; (2)  $M_2$  yang terdiri dari *meN-akar+kan*. Contoh: *mengamankan*, *membubarkan*; (3)  $M_3$  yang terdiri dari *meN-akar+i*. Contoh: *mengobati*, *mewarnai*; (4)  $M_5$  yang terdiri dari *meN+akar+i*. Contoh: *membohong*, *membohongi*, *menampar*, *menampari*; (6)  $M_6$  yang terdiri dari *meN+akar+ $\begin{bmatrix} \text{kan} \\ i \end{bmatrix}$* . Contoh: *menjalankan*, *menjalani*, *menerangkan*, *menerangi*; dan (7)  $M_7$  yang terdiri dari *meN+akar+ $\begin{bmatrix} \text{kan} \\ i \end{bmatrix}$* . Contoh: *menurun*, *menurunkan*, *menuruni*, *menawar*, *menawarkan*, *menawari*.

Dari analisis kasar yang telah saya capai saat ini ada 1425 akar kata<sup>8</sup> yang termasuk dalam kata kerja M. Dari jumlah ini  $M_2$  dan  $M_4$  mencakup 50%, sedangkan  $M_3$  dan  $M_5$  kurang dari 15%. Keanggotaan dalam masing-masing subset diatur secara leksikal dan tiap kata mempunyai arti tersendiri dengan beberapa pengecualian, misalnya *melepas*, dan *melepaskan* yang artinya hanyalah satu.

Dengan pembagian di atas maka kita ketahui sekarang bahwa penolakan terhadap bentuk-bentuk seperti *\*merestukan* dan *\*mengharapi* di (B) pada Bagian Pengantar didasarkan atas kenyataan bahwa akar kata *restu* dan *harap* telah ditempatkan pada paradigma yang salah. Akar-akar itu seharusnya masing-masing ditempatkan pada  $M_3$  dan  $M_4$ , dan bukan pada  $M_2$  dan  $M_3$ . Kalau penempatan ini benar, akan kita dapati kata-kata *merestui* dan *mengharap(kan)* yang memang terdapat dalam bahasa kita.

### c. Kata Kerja dengan (mem)peR-

Tidak seperti halnya dengan kata kerja yang dengan *meN-*, kata kerja yang dibentuk (mem)peR- tidak dapat bercampur dengan *+i* atau  $\pm \begin{bmatrix} \text{kan} \\ i \end{bmatrix}$ . Karena itu, hanya ada lima subset saja: (1)  $P_1$  yang terdiri dari (mem)peR+akar+\$. Contoh: *mempercepat*, *memperbanyak*;  $P_2$  yang terdiri dari (mem)peR+akar+kan. Contoh: *memperbandingkan*, *memperkenalkan*; (3)  $P_3$  yang terdiri dari (mem)peR+akar+i. Contoh: *mempersenjatai*, *memperlengkapi*; (4)  $P_4$  yang terdiri dari (mem)peR+akar+ $\begin{bmatrix} \text{kan} \\ i \end{bmatrix}$ . Contoh: *memperingatkan*, *memperingati*.

Selaras dengan penemuan Roolvink mengenai kata kerja (mem)peR- yang dipakai dalam teks Melayu klasik memang tidak banyak kata kerja yang termasuk dalam kelompok ini. Sampai saat ini saya temukan 90 akar kata yang jelas masuk kategori itu, dan ada sekitar 40 akar kata lain yang statusnya harus dipertanyakan. Jumlah anggota masing-masing subset ini

juga jauh berbeda dari yang satu ke yang lain dengan  $P_1$  dan  $P_2$  masing-masing mencakup lebih dari 45%, sedangkan  $P_4$  dan  $P_5$  masing-masing hanya 1%. *Istri* dan *ingat*, misalnya, adalah satu-satunya akar yang masing-masing dapat dipakai di  $P_4$  dan  $P_5$ .

Dari uraian di atas tampak bahwa  $(mem)/peR-$  tidak dapat bergabung dengan  $\pm i$  atau pun  $\pm \left[ \begin{smallmatrix} kan \\ i \end{smallmatrix} \right]$ . Dengan kata lain, dalam bahasa Indonesia tidak ada kata kerja yang dibentuk dengan formula  $(mem)/peR+X_j+\phi$  versus  $(mem)/peR+X_j+i$  di mana  $X$  adalah akar kata dan subskrip  $j$  menyatakan bahwa akar-akar yang bersangkutan adalah sama. Dalam bahasa kita tidak ada pula kata kerja yang dibentuk dengan mempertentangkan formula  $(mem)peR+X_j+\phi$  versus  $(mem)peR+X_j+i$ .

Karena dalam kenyataan ada kata kerja  $(mem)/peR-$  yang dibentuk dengan formula  $(mem)/peR+X_p+\phi$  dan formula  $(mem) peR+X_j+i$  seperti terbukti adanya kata-kata *memperbesar* dan *memperlengkapi*, hanya ada satu kesimpulan yang kita tarik: penolakan kata-kata seperti *\*memperbaiki* dan *\*mempermudah* pada B di bagian Pengantar makalah ini disebabkan oleh kesalahan penempatan paradigmatis. Akar kata *baik* dan *mudah* masing-masing hanya dapat masuk ke kelompok  $P_3$  dan  $P_1$ , dan bukan  $P_1$  dan  $P_3$ . Dengan demikian, yang kita temukan dalam bahasa kita adalah kata kerja *memperbaiki* dan *mempermudah*.

#### d. Kata Kerja dengan $beR-$

Set yang berawalan  $beR-$  mempunyai celah paradigmatis yang paling banyak. Meskipun awalan  $beR-$  dapat bergabung dengan dua akhiran, yakni,  $-kan$  dan  $-an$ , interseksi ketiga imbuhan ini hanya menghasilkan tiga subset saja: (1)  $B_1$  yang terdiri dari  $beR+akar+\phi$ . Contoh: *bersua*, *bergegas*; (2)  $B_2$  yang terdiri dari  $beR+akar+kan$ . Contoh: *berdasar(kan)*, *bermandi(kan)*; dan (3)  $B_3$  yang terdiri dari  $beR+akar+an$ . Contoh: *berjatuhan*, *beterbangan*.

Keanggotaan dalam subset itu sangat tidak seimbang. Sampai saat ini saya temukan 700 akar kata<sup>10</sup> untuk  $B_1$ , tetapi hanya 8 untuk  $B_2$  dan 4 untuk  $B_3$ <sup>11</sup>. Karena kombinasi antara  $beR-$ , di satu pihak, dengan  $-kan$ ,  $-i$ , dan  $-an$ , di pihak lain, seharusnya menghasilkan sembilan subset, terdapatlah enam celah paradigmatis di sini: (a)  $beR+akar+kan$ , (b)  $beR+akar+i$ , (c)  $beR+akar+an$ , (d)  $beR+akar+\left[ \begin{smallmatrix} kan \\ i \end{smallmatrix} \right]$ , (e)  $beR+akar+\left[ \begin{smallmatrix} kan \\ i \end{smallmatrix} \right]$ , dan (f)  $beR+akar+an$ .

Kalau sekarang kita lihat kembali bentuk *\*berdatang* dan *\*berdasarkan* di B pada bagian Pengantar dan mengaitkannya dengan subset B dan celah-celah (a–f) di atas, kita jadi tahu bahwa penolakan terhadap bentuk-bentuk itu tentulah berdasarkan pada kesalahan penempatan paradigmatis. Akan tetapi, kalau sekarang kita ambil bentuk *\*berjalani* di A pada bagian Pengantar

tar akan kita ketahui bahwa bentuk-bentuk itu kita tolak bukan karena kesalahan penempatan, tetapi karena dalam bahasa Indonesia tidak ada paradigma yang membolehkan *beR-* bercampur dengan *-i*

#### e. Kata Kerja dengan *teR-*

Set untuk kata kerja yang dibentuk dengan *teR-* juga mempunyai celah-celah paradigmatis. Dalam bahasa kita hanya ada lima subset untuk kelompok ini: (1)  $T_1$  yang terdiri dari *teR+akar+ $\phi$* . Contoh: *tertudur*, *terkejut*; (2)  $T_2$  yang terdiri dari *teR+akar+kan*. Contoh: *terselesaikan*, *tersembuhkan*; (3)  $T_3$  yang terdiri dari *teR+akar+i*. Contoh: *teratasi*, *terobati*; (4)  $T_4$  yang terdiri dari *teR+akar+kan*. Contoh: *terlempar(kan)*, *terpikir(kan)*; dan (5)  $T_5$  yang terdiri dari *teR+akar+i*. Contoh: *terluka(i)*, *ternoda(i)*.

Meskipun jumlah anggota untuk kelompok itu belum dapat dengan agak pasti ditentukan, kelihatannya  $T_1$ ,  $T_2$ , dan  $T_4$  mempunyai jumlah anggota yang paling banyak, sedangkan  $T_5$  yang paling sedikit. Karena  $T$  pada umumnya dapat dianggap sebagai *counterpart* bentuk pasif untuk kata kerja dalam kelompok  $M$ , maka terdapatnya jumlah yang besar di  $T_2$  dan  $T_4$  yang selaras dengan jumlah di  $M_2$  dan  $M_4$  barangkali bukanlah suatu kebetulan saja.

Dua subset jelas tidak ada dalam kelompok  $T$  ini, yakni (a) kata kerja yang berakhiran  $+ \begin{bmatrix} \text{kan} \\ i \end{bmatrix}$  dan (b) kata kerja yang berakhiran  $\pm \begin{bmatrix} \text{kan} \\ i \end{bmatrix}$ . Dengan demikian, dalam bahasa kita tidak ada kata kerja yang tipenya adalah *teR+X<sub>j</sub>+kan* versus *teR+X<sub>j</sub>+i* dan *teR+X<sub>j</sub>+ $\phi$*  versus *teR+X<sub>j</sub>+kan* versus *teR+X<sub>j</sub>+i*. Dengan memperhatikan celah-celah itu dan subset  $T_1-5$  kita sekarang dapat melihat bahwa penolakan terhadap bentuk *\*terselesai* dan *terpenuhi* pada  $B$  di bagian Pengantar adalah soal kesalahan penempatan paradigmatis.

#### f. Kata Kerja dengan *ke-*an

Tidak seperti halnya dengan *beR-* yang dapat berkolokasi dengan *-kan* dan *-an*, *ke-* hanya dapat bergabung dengan *-an*, dan dalam hal ini *-an* adalah wajib. Beberapa contohnya adalah *kehujan-an*, *kejatuhan-an*, dan *kecuri-an*.

Ada kira-kira 45 akar kata dalam bahasa kita yang termasuk kelompok itu. Beberapa dari anggota di kelompok itu membolehkan adanya objek, sedangkan beberapa lainnya melarang adanya objek<sup>12</sup>.

Karena *ke-* harus berkolokasi dengan *-an*, kita tahu sekarang bahwa ditolaknya bentuk *\*ketidur* pada  $A$  di bagian Pengantar adalah karena kendala paradigmatis.

### 3. Pembentukan Kata Benda

Berdasarkan pada macam-macam akar kata yang dipostulasikan di bagian Pembentukan Kategori Sintaktik, maka kata benda dalam bahasa Indonesia juga terdiri dari dua bentuk: (1) bentuk yang dapat berdiri sendiri tanpa imbuhan, dan (2) bentuk yang harus berimbuhan untuk menjadi kata benda atau untuk berpindah ke subkategori kata benda lainnya.

Sementara kita ketahui bahwa kata benda pada kelompok (i) dapat juga diberi imbuhan untuk menjadi kata benda lainnya, banyak kelompok itu yang tidak dapat berimbuhan. Jadi, bentuk-bentuk seperti *darat*, yang fiturnya /-verbal/, dapat diubah menjadi kata benda lain seperti *pendaratan* dan *daratan*. Sebaliknya, bentuk-bentuk *meja* dan *kursi* tidak dapat mengalami proses nominalisasi afiksional. Dalam bahasa kita tidak ada bentuk-bentuk seperti *\*mejaan*, *\*kemejaan*, *\*pemejaan* atau *permejaan*. Kita juga tidak mempunyai kata-kata *\*kekursian*, *\*pengursian*, ataupun *\*perkursian*.

Kata benda yang tergolong pada nomor (ii) harus dibagi menjadi dua subkelompok: (a)  $BD_{2a}$  yang kata dasarnya adalah akar bebas, dan (b)  $BD_{2b}$  yang kata dasarnya adalah akar terikat. Kata benda yang termasuk kelompok (i) kita beri label  $BD_1$ . Contoh:

- $BD_1$     *meja, rumah, taman, sayembara*  
 $BD_{2a}$    *pembeli, kehutanan, lukisan, percobaan*  
 $BD_{2b}$    *anjuran, penyelenggaraan, peralihan, pertemuan*

Perlu dicatat di sini bahwa beberapa akar terikat dapat dijadikan kata kerja, tetapi tidak dapat dijadikan kata benda. Misalnya, akar terikat *sua* dapat menjadi kata kerja *bersua*, tetapi tidak dapat menjadi kata benda *\*suaan*, *\*kesuaan*, *\*penyuaan*, ataupun *\*persuaan*.

#### a. Imbuhan Nominal dan Kombinasinya

Sebagai kita ketahui ada tiga awalan dan satu akhiran untuk membentuk kata benda: *ke-*, *peN-*, *peR-*, dan *-an*. Sebuah kata benda dapat dibentuk dengan memakai salah satu dari imbuhan itu secara sendiri-sendiri dan secara campuran.

#### b. Kata Benda yang Dibentuk dengan *ke-*, *peN-*, *peR-*, dan *-an* Secara Sendiri-sendiri

*Ke-* sebagai formatif nominal sangat tidak produktif. Hanya ada tiga kata dalam bahasa kita: *ketua*, *kekasih*, dan *kehendak*. Awalan *peR-* juga samasekali tidak produktif. Dalam bahasa kita hanya ada satu kata yang masih umum dipakai, yakni *pertapa*.

Sebaliknya, awalan *peN-* sangat produktif. Kata benda yang dibentuk dengan awalan ini boleh dikatakan tidak terbatas meskipun kita harus segera

mencatat bahwa bentuk-bentuk yang *nyeleweng* seperti *tengkulak*, dan bukan *\*pengkulak*, terdapat dalam bahasa kita.

Pembentukan kata benda dengan *-an* juga sangat produktif. Sekali lagi kita juga harus waspada di sini karena keproduktifannya bukan tidak terbatas. Meskipun "apa yang dilakukan seseorang" umumnya bisa dinyatakan dengan formula *akar+an* sehingga terciptalah kata-kata seperti *lukisan* dari kata *melukis*, kita menolak atau meragukan bentuk-bentuk seperti *?\*tanyaan* dan *?\*serahan* yang seharusnya dapat diturunkan dari kata kerja *menanyakan* dan *menyerahkan*.

#### c. Kata Benda dengan ke-an Versus peN-an Versus peR-an

Kelompok *ke-an*, *peN-an*, dan *peR-an* berinterseksi, tetapi hanya menghasilkan enam subset: (1)  $BB_1$  yang terdiri dari *ke+akar+an*. Contoh: *kebencian*, *kekejaman*; (2)  $BB_2$  yang terdiri dari *peN+akar+an*. Contoh: pengumuman, penderitaan; (3)  $BB_3$  yang terdiri dari *peR+akar+an*. Contoh: *pertanyaan*, *perlawanan*; (4)  $BB_4$  yang terdiri dari *ke+akar+an* versus *peN+akar+an*. Contoh: *kebebasan*, *pembebasan*, *kebersihan*; (5)  $BB_5$  yang terdiri dari *peN+akar+an* versus *peR+akar+an*. Contoh: *pengembangan*, *perkembangan*, *pembedaan*, *perbedaan*; dan (6)  $BB_6$  yang terdiri dari *ke+akar+an* versus *peN+akar+an*. Contoh: *kesediaan*, *penyediaan*, *persediaan*.

Kita lihat dari kelompok-kelompok di atas bahwa bahasa Indonesia tidak mengizinkan adanya kontras antara *ke+X<sub>j</sub>+an* versus *peR+X<sub>j</sub>+an*. Orang dapat membantah di sini dengan mengatakan bahwa dalam bahasa kita ada pasangan seperti *kelakuan* dan *perlakuan* (tanpa ada *\*penglakuan* atau *pelakuan*), tetapi anggota kedua dari pasangan itu harus kita tolak karena awalan *peR-* pada *perlakuan* adalah bagian dari kata dasar. *Perlakuan* diturunkan dari kata kerja *memperlakukan*, dan *-an* ditambahkan setelah imbuhan *meN-kan* dihilangkan.

Kalau sekarang kita perhatikan bentuk-bentuk *\*pemasangan*, *\*percobaan*, *\*keberontakan*, dan *\*pemintaan* yang telah kita tolak di (B) pada bagian Pengantar, dapat kita ketahui bahwa bentuk-bentuk itu kita tolak karena kesalahan penempatan paradigmanya. Akar kata *menang*, *coba*, *berontak*, dan *minta* seharusnya masing-masing pada  $BB_2$ ,  $BB_2$ ,  $BB_1$ , dan  $BB_2$ .

#### d. Kata Benda dengan ke-an Versus peN-an Versus peR-an Versus -an

Kalau keenam subset di atas dan subset kosongnya kita sajikan dalam diagram Venn, dan pada diagram tersebut kita tumpangkan set P, Q, dan R yang masing-masing mewakili kata benda yang dibentuk hanya dengan *-an* saja, secara teoritis harus didapatkan tujuh subset yang baru. Lihat diagram di bawah ini.

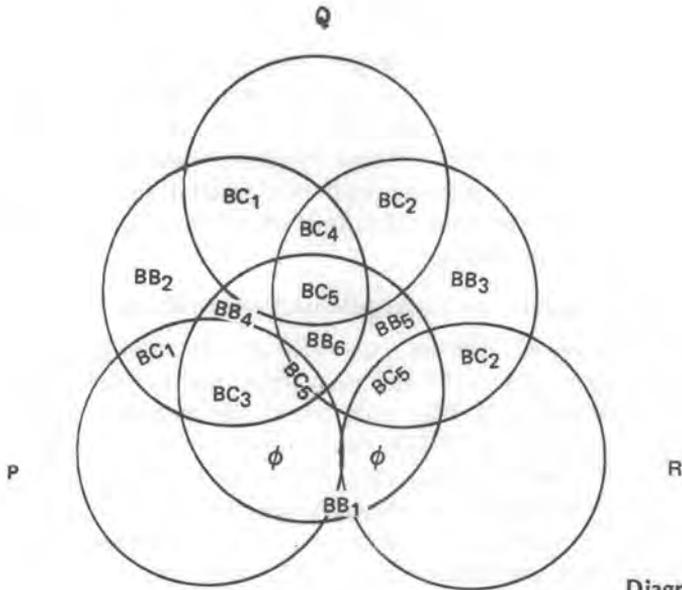


Diagram 1

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa hanya ada lima subset yang dapat timbul: (1)  $BC_1$  yang terdiri dari *peN+akar+an* versus *akar+an*. Contoh: *pemilihan* versus *pilihan*; (2)  $BC_2$  yang terdiri dari *peR+akar+an* versus *akar+an*; (3)  $BC_3$  yang terdiri dari *ke+akar+an* versus *peN+akar+an* versus *akar+an*. Contoh: *kebangunan*, *pembangunan*, *bangunan*; (4)  $BC_4$  yang terdiri dari *peN+akar+an* versus *peR+akar+an* versus *akar+an*. Contoh: *pemecahan*, *perpecahan*, *pecahan*; (5)  $BC_5$  yang terdiri dari *peN+akar+an* versus *peR+akar+an* versus *akar+an*. Contoh: *penyatuan*, *persatuan*, *kesatuan*.

Dari subset-subset di atas kita lihat bahwa dalam bahasa Indonesia tidak kita temukan kontras-kontras (a) *ke+X<sub>j</sub>+an* versus *X<sub>j</sub>+an*, dan (b) *keX<sub>j</sub>+an* versus *peR+X<sub>j</sub>+an* versus *peR+X<sub>j</sub>+an* versus *X<sub>j</sub>+an*. Keanggotaan kalimat subset di atas juga berbeda-beda, dengan  $BC_3$  mempunyai jumlah anggota yang tersedikit.

### Ringkasan

Ringkasan umum mengenai kemungkinan afiksasional untuk kata benda agak sederhana: kita mempunyai imbuhan *ke-*, *peN-*, *peR-*, dan *-an* yang secara individual dapat dipakai untuk membentuk kata benda. Apabila mereka berkombinasi, akan terdapatlah *ke-an*, *peN-an*, dan *peR-an* seperti telah disajikan di bagian 3c dan 3d. Keruwetan timbul apabila kombinasi ini saling dikontraskan.

Kemungkinan-kemungkinan afiksasional untuk kata kerja lebih ruwet. Hal itu dapat dilihat pada diagram 2 di bawah ini.

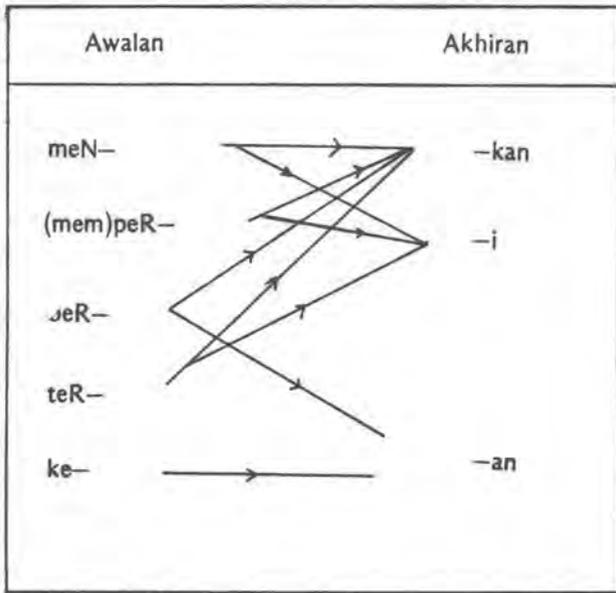


Diagram 2

Sementara kita akui bahwa diagram 2 dapat memberikan informasi, seperti (a) semua awalan kecuali *ke-* dapat berkombinasi dengan *-kan*; (b) *meN-*, *(mem)peR-*, dan *teR-* dapat bergabung dengan *-i*; (c) *jeR-* dan *ke-* dapat bercampur dengan *-an*, atau secara negatif kita katakan bahwa (i) *meN-*, *(mem)peR-*, dan *teR-* tidak dapat bergabung dengan *-an*, (ii) *jeR-* tidak dapat bergabung dengan *-i*, dan (iii) *ke-* tidak dapat berakhiran *-kan* atau *-i*. Diagram itu tidak menyatakan apakah kombinasi-kombinasi itu wajib (*obligatory*) atau manasuka (*optional*). Karena itu, celah-

celah paradigmatis yang terdapat pada kata kerja sebenarnya terdiri dari celah-celah yang dibicarakan di bagian 2a–2b ditambah dengan celah-celah pada (i–iii) di atas.

### Ruang Lingkup TOL<sub>1</sub>, TOL<sub>2</sub>, dan TOL<sub>3</sub>

Seperti dinyatakan pada bagian Pembentukan Kategori Sintaktik tiga bentuk tolok TOL<sub>1</sub>, TOL<sub>2</sub>, dan TOL<sub>3</sub> harus dibedakan satu sama lain. TOL<sub>1</sub> kita tolak karena dalam bahasa kita tidak ada paradigma yang dapat menampungnya. TOL<sub>2</sub> kita tolak hanya karena kesalahan pemilihan paradigma belaka. TOL<sub>3</sub> ditolak, atau paling tidak dipertanyakan, karena pengkondisian morfemik (*morphemic conditioning*).

Bahwa pembedaan ini masih dapat dilihat dari kenyataan bahwa ketiga tolok ini membentuk suatu hierarki dalam tingkat keberterimaan mereka (*degree of acceptability*). Berikut adalah argumentasinya.

Kita ketahui bahwa dalam pembentukan kata kerja dan kata benda ada subset-subset yang kosong. Set B adalah salah satu contohnya. Pada B kita ketahui bahwa awalan *beR-* dapat berakhiran *-kan* atau *-an*, tetapi tidak dapat berakhiran *-i*. Karena penutur Indonesia dari mana pun di republik ini belum pernah diekspose pada kombinasi *beR-i*, logislah kalau mereka berperasaan bahwa bentuk-bentuk seperti *\*berjalani*, *\*bermalami*, dan *\*berdiam* sangat asing. Ramalan saya dalam hal ini ialah bahwa bentuk-bentuk yang sekarang ini tidak mempunyai paradigam morfologis tidak akan bisa dikembangkan, baik pada bahasa Indonesia kontemporer; maupun bahasa Indonesia yang akan datang.

Penolakan intuitif yang sama juga dilakukan pada bentuk-bentuk pada (i) sampai (iii) di atas. Sebagai contoh, meskipun *-an* dipakai sebagai unsur pembentukan kata kerja, akhiran ini tidak dapat bergabung dengan *meN-*, *(mem)peR-*, atau *teR-*. Karena itu, mustahillah kita dapat menerima bentuk-bentuk seperti *\*melukiskan* dan *\*mempersukar* seperti yang disajikan pada bagian Pengantar, baik dalam bahasa Indonesia sekarang maupun masa depan.

Sebaliknya, bentuk-bentuk pada TOL<sub>2</sub> kita tolak bukan karena paradigma morfologisnya tidak ada dalam bahasa kita, melainkan karena pemilihan akar kata dengan campuran imbuhan tidak lumrah. Marilah kita ambil dua contoh saja untuk menjelaskan apa yang kita maksud: *\*merestukan* dan *\*terpenuhi*. Dari set M yang telah kita gambarkan kita ingat bahwa dalam kelompok ini ada paradigma yang mengizinkan pembentukan kata kerja dengan memakai formula *meN+akar+kan* seperti terbukti dengan adanya kata-kata *menyelesaikan*, *membenarkan*, dan sebagainya. Dengan demikian, jelaslah bahwa penolakan terhadap *\*merestukan* bukan disebabkan

oleh tidak adanya formula, tetapi oleh kesalahan penempatan akar kata *restu* dalam kelompok M.

Argumentasi yang sama juga dapat diterapkan pada bentuk *\*terpenuhi-kan*. Tidak ada celah paradigmatis dalam bahasa Indonesia yang mencegah pembentukan kata kerja dengan memakai formula *teR+akar+kan* seperti terbukti dengan adanya kata-kata *terselesaikan*, *terpecahkan*, dan sebagainya. Karena itu, paradigmanya ada; hanya saja akar kata *peruh* bukanlah akar yang "punya izin" untuk masuk menjadi anggota subset ini.

Bukti lain menunjang pembelaan antara TOL<sub>1</sub> dan TOL<sub>2</sub> berkaitan dengan batas-batas regional. Bahasa Indonesia terkenal dengan banyaknya dialek sehingga ada ahli bahasa yang berpendapat bahwa deskripsi bahasa ini tidak dapat dilakukan tanpa suatu daftar variasi yang bersifat regional. Untuk menghindari, atau mengurangi, kecurigaan regionalisme itu, saya adakan suatu survei informal di antara 23 orang Indonesia yang waktu itu belajar di Universitas Hawaii: 3 dari Aceh, 2 dari Bali, 4 dari Jakarta, 1 dari Palembang, 4 dari Sunda, dan 1 dari Manado. Dalam angket ini saya masukkan bentuk-bentuk dari TOL<sub>1</sub> seperti *\*berjalani*, *\*bermalami*, *\*melukiskan*, *\*mempersatukan*, dan bentuk-bentuk TOL<sub>2</sub> seperti *\*memperbanyak*, *\*memperbanyak* bersama-sama dengan bentuk yang lumrah *berjalan*, *bermalam*, *melukis*, *mempersukar*, dan *memperbanyak*. Orang-orang itu ditanya apakah mereka memakai bentuk-bentuk ini dalam ujaran mereka.

Hasil dari angket ini tidak hanya mendukung pembedaan kami, tetapi juga mungkin malah memberikan jawaban atas adanya variasi bahasa. Seperti kita harapkan, semua responden mengaku memakai kata-kata *berjalan*, *bermalam*, *melukis*, *mempersukar*, dan *memperbanyak*, tetapi semua juga menolak bentuk-bentuk yang ada pada TOL<sub>1</sub>. Mengenai TOL<sub>2</sub>, hampir semua menolak pemakaian bentuk-bentuk ini. Hanya ada satu responden yang mengaku memakai bentuk *\*memperbanyak*, dan hanya ada dua orang yang memakai *\*memperbanyak*. Karena kedua orang yang terakhir ini berbeda dengan enam orang lain dalam kelompok sukunya sendiri, kesimpulan kita ialah bahwa pemakaian kata-kata ini lebih bersifat idiolektal dan bukan regional.

Yang sangat menarik dari analisis di atas ialah korelasinya dengan bentuk-bentuk yang ada dalam kamus. Poerwadarminta dan Zain mempunyai entri untuk bentuk-bentuk di TOL<sub>1</sub>. Zain memasukkan *\*memperbanyak*, tetapi dia tidak memasukkan *\*memperbanyak*, sedangkan Echols dan Shadily dan Poerwadarminta memasukkan kedua-duanya. Karena entri dalam kamus tentunya berdasarkan pada data tertulis yang memang ditemukan, absennya TOL<sub>1</sub> dan ketidaksepakatan antara Zain dan Echols, Shadily, dan

Poerwadarminta mengenai TOL<sub>2</sub> harus diartikan bahwa TOL<sub>1</sub> dan TOL<sub>2</sub> tidak mempunyai pijakan yang sama.

Kalau jaringan analisis kita ini kita *jembreg* lebih luas lagi, mungkin kita malah akan bisa sedikit memberikan pelita mengenai perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia mempunyai leluhur yang sama, tetapi ada perbedaan-perbedaan tertentu yang khas. Di samping logat dan pemakaian bentuk-bentuk leksikal, kedua bahasa ini sering berbeda dalam proses-proses morfologisnya. Dalam kaitannya dengan TOL<sub>1</sub> kedua bahasa ini menolak *meN-* / (*mem*)*peR-* / *teR+akar+an*. Kita tentunya mengharapkan bahasa Malaysia menolak pula *beR+akar+i* karena formula ini tidak didapati pada bahasa Indonesia. Akan tetapi, kalau saya memahami tulisan Hassan dengan benar, penutur Malaysia tampaknya menerima bentuk semacam ini. Menurut tulisan Hassan (hlm. 109) afiks 340 (*beR-* bisa berkolokasi dengan afiks 200 [*-i* kita]). Selaras dengan aturan ini maka kita dapati (hlm. 199) kata-kata seperti *berbahasi*, *berbantu*, dan *berdugai* (hlm. 203). Kalau kita tidak salah mengerti dengan cara membaca apendiks yang diajukan Hassan<sup>13</sup>, juga kita temukan bentuk-bentuk yang sama sekali asing dalam bahasa kita. Sebagai aturan umum dalam fonologi bahasa Indonesia, akhiran *-i* tidak dapat bergabung dengan akar kata yang berakhir dengan bunyi *-i*. Akan tetapi, dalam apendiks Hassan kita temukan *cari* (hlm. 201), *ganti* (hlm. 203), dan *janji* (hlm. 207) yang berkolokasi dengan akhiran *-i* sehingga termungkinkanlah bentuk-bentuk *mencarii*, *menggantii*, *menjanjii*.

Dalam surat pribadinya mengenai hal di atas kepada saya, Hassan menyatakan bahwa pernyataannya pada halaman 109 itu terlalu umum dan bentuk-bentuk yang termasuk TOL<sub>1</sub> juga ditolak di Malaysia. Dengan demikian, kita ketahui bahwa penolakan terhadap TOL<sub>1</sub> melintasi batas kenegaraan.

Dukungan terhadap pemisahan antara TOL<sub>1</sub> dengan TOL<sub>2</sub> dapat lebih lanjut dilihat pada akar kata yang termasuk TOL<sub>2</sub> di Indonesia dan Malaysia. Kedua bahasa ini memang memiliki imbuhan-imbuhan yang sama, tetapi akar kata yang dikenai imbuhan-imbuhan ini sering berbeda. Bahasa Malaysia, misalnya, membolehkan akar kata seperti *soal*, *besar*, dan *keluar* (Hassan, hlm. 99) untuk dibubuhi akhiran *-i*, sedangkan bahasa Indonesia memilih *-kan*. Karena itu, *soali*, *besari*, dan *keluari* diterima penutur Malaysia, tetapi ditolak oleh penutur Indonesia. Saya tidak yakin apakah *soalkan*, *besarkan*, dan *keluarkan*, yang diterima oleh penutur Indonesia, sebaliknya ditolak oleh penutur Malaysia.

Bahasa Malaysia membolehkan akar kata *jatuh*, *sudah*, dan *hampir* untuk berkolokasi dengan (*mem*)*peR-* sehingga terciptalah kata kerja *mem-*

*perjauh*, *mempersudah*, dan *memperhampir* (Hassan, hlm. 94). Bahasa Indonesia juga memiliki imbuhan (*mem*)*peR*— serta akar-akar di atas, tetapi kolokasi kedua elemen ini tidak dimungkinkan.

Dari data di atas dan survei yang kita lakukan terhadap 23 penutur Indonesia yang telah kita sebutkan sebelumnya tampaklah keseragaman penolakan terhadap  $TOL_2$  lebih terbatas pada kebersatuan bangsa Indonesia sebagai pemakai dan pembina bahasa kita. Di luar batas kebangsaan kita tampaknya ada ketidakseragaman yang lebih besar.

Marilah sekarang kita pertimbangkan bentuk-bentuk yang termasuk  $TOL_3$ . Kalau kita lihat anggota  $TOL_3$  seperti ?\**mencantik*, ?\**pendagangan*, dan ?\**kegranatan* seperti tertera pada bagian Pengantar, kita akan berkata bahwa bentuk-bentuk ini memang rasanya "aneh". Akan tetapi, keanehan ini rasanya berbeda dengan keanehan waktu menanggapi bentuk-bentuk  $TOL_2$ . Rasakan saja, misalnya kedua kalimat ini (1) *Sadikun meluasi* ( $TOL_2$ ) *kota ini*, dan (2) *Sadikun mencantikkan* ( $TOL_3$ ) *kota ini*. Secara intuitif sangat mungkinlah bahwa kita sebagai penutur asli akan mengoreksi kalimat 1 dengan menggantikan *meluasi* dengan *meluaskan*. Akan tetapi, mungkin sekali bahwa kita akan diam saja tatkala mendengar kalimat (2) meskipun ada sedikit tanda tanya dalam benak kita. Tidak mustahil bahwa bentuk-bentuk di  $TOL_3$  ini mula-mula kita tolak, tetapi lama-lama merayap menuju ke tingkat yang *tolerate* dan bahkan dapat pula ke tingkat yang dapat diterima segera setelah kita dapat membayangkan dalam situasi-situasi apa kata-kata itu mungkin dipakai. Hal ini umumnya ditemukan pada penulis yang kreatif yang membutuhkan suatu kata yang tepat, tetapi tidak klise.

Kalau perasaan kita ini benar, lalu mengapa kita paling tidak meragukan keberterimaan bentuk-bentuk itu? Meskipun penjelasan yang tuntas saya akui belum ada, tetapi saya percaya bahwa ada dua faktor yang menyebabkan hal itu: (1) analogi linguistik, dan (2) persaingan konstruksional. Marilah kita ambil bentuk yang ada di bagian Pengantar.

Bentuk-bentuk seperti ?\**mencantik* dalam bahasa Indonesia ada aturan umum yang dipakai untuk mengubah kata kerja keadaan (*a state verb*) menjadi kata kerja proses (*a process verb*), yakni, dengan menambahkan *meN*— pada akar kata tertentu. Misalnya, *melebar*, *meluas*, dan *mengecil*. Karena *cantik* termasuk kategori sintaktik yang sama dan mempunyai fitur-fitur sintatik yang selaras dengan *lebar*, sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak ?\**mencantik*. Jadi, dalam hal ini penolakan atau keraguan kita terhadap kata ini semata-mata berdasarkan pengkondisian morfemik belaka.

Penjelasan mengenai penolakan atau keraguan ini barangkali berdasarkan kenyataan bahwa proses inkoatif ini dalam bahasa Indonesia bersaing dengan konstruksi lain yang lebih umum. Bentuk *jadi+akar kata* adalah be-

gitu umum sehingga bisa diterapkan pada akar mana pun. Dengan demikian, kita temukan *jadi lebar*, *jadi luas*, dan *jadi cantik*.

Kecenderungan untuk membiarkan bentuk-bentuk seperti ?\**mencantikkan* juga berdasar analogi. Ada aturan umum dalam bahasa kita yang membolehkan kita membentuk kata kerja kausatif dari kata kerja proses dengan menambahkan *-kan*: *melebarkan*, *mengecilkan*, dan sebagainya. Jadi, seharusnya bentuk ?\**mencantikkan* harus diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk paralel lainnya.

Penjelasan keraguan kita sekali lagi dapat ditelusuri pada adanya persaingan konstruksional yang lebih umum. Konstruksi saingan yang berbentuk *bikin/buat + X + akar* seperti *bikin Jakarta cantik*, *bikin dia kaya* adalah lebih terasa *sreg* daripada ?\**mencantikkan Jakarta* dan ?\**mengayakan dia*.

Mengenai bentuk nominal seperti ?\**pendagangan*, kita tidak seratus persen menolak karena adanya kecenderungan dalam bahasa kita untuk menerima bentuk *peN-an* apabila ada kata kerja transitif yang merupakan kata kerja perbuatan (*action verb*). Kita mempunyai *pembelian* dan *pembicaraan* yang dibentuk dari kata kerja perbuatan *membeli* *membicarakan*. Karena kita memiliki kata kerja perbuatan *mendagangkan* (di samping proses *berdagang* dengan *perdagangan*-nya), sebenarnya ?\**pendagangan* hanyalah mengikuti aturan belaka. Keragu-raguan kita mungkin karena semantik *perdagangan* mencakup baik kesibukan berdagang maupun perbuatan mendagangkan itu sendiri.

Keraguan atau tolakan terhadap bentuk-bentuk seperti ?\**memper sedikit*, ?\**berbis* (ke sekolah), dan ?\**kegranatan* dapat pula dijelaskan melalui analogi dan persaingan konstruksional seperti digambarkan di atas. Satu hal yang tetap masih belum terjelaskan ialah mengapa dalam suatu set hanya akar-akar tertentu yang dapat dikombinasikan sedangkan yang lain tidak. Mengapa, misalnya, *bersepeda ke sekolah* dan *memperbaiki citra* terasa lumrah, sedangkan, ?\**berbis ke sekolah* dan ?\**memperjeleki citra* sangat aneh.

### Celah Morfologis dan Pengembangan Ilmu

Kalau kita ikuti perkembangan bahasa sesuai dengan klasifikasi Ferguson atau Haugen, bahasa Indonesia sebagai unsur penyumbang dalam pembangunan bangsa sudah meninggalkan fase seleksi dan fase penulisan. Kita sekarang berada pada fase modernisasi, tetapi pada waktu yang sama juga masih menangani kodifikasi dalam modernisasi dapat mengandung dua faktor yang saling bertentangan. Di satu pihak, kodifikasi: mengharapkan penutur bahasa untuk tidak menyimpang dari norma-norma yang secara konvensional telah disetujui bersama. Di pihak lain, modernisasi mendorong

penutur bahasa untuk mengembangkan bahasanya secara kreatif. Dengan kata lain, suatu bahasa bisa berkembang hanya apabila pemakainya mempunyai kebebasan untuk memanipulasi elemen-elemen yang ada di dalam bahasa itu, tetapi pada waktu yang sama dia juga tahu sampai sejauh mana dia bisa "bermain-main" dengan elemen-elemen itu tadi. Sebaliknya, pengelola bahasa terpaksa harus berdiri di atas rel yang sempit karena dia, di satu pihak, tidak dapat bertindak hanya sebagai pengamat dan penyampai deskriptif saja, tetapi di pihak lain dia tidak boleh terjerumus ke kubu preskriptif yang hanya akan mematikan daya kreativitas penutur bahasa itu saja.

Di antara polarisasi ini perlu kita memiliki suatu pendataan ataupun penganalisaan yang mendalam mengenai kodrat bahasa itu sendiri, yang saya maksud tentunya bahasa Indonesia.

Kalau pembangunan nasional berlandaskan, antara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri sedikit banyak berlandaskan pula sesuatu yang lain, yakni, bahasa.

Sebagian orang berpendapat bahwa pengembangan bahasa untuk mengembangkan ilmu adalah sangat sederhana, yakni dengan menambah kosa kata saja, dan dalam kebanyakan hal penambahan kosa kata ini sering berbentuk ekstrim. Di satu pihak ada orang yang secara gegabah memungut kata-kata asing untuk menggantikan kata-kata asli yang ada dan lumrah dipakai supaya kedengaran terdidik, dan di pihak lain ada orang yang bersusah payah mengganti kata-kata yang sudah terlanjur populer dengan kata-kata asli, hanya karena kata-kata yang sudah populer ini berasal dari Barat. Kadang-kadang yang terjadi ialah kata Barat ini diganti dengan kata Jawa Kuno, kata Jawa Kuno ini berasal dari bahasa Sansekerta – dan kita ketahui bahasa Sansekerta termasuk bahasa Barat pula!

Saya tidak menolak penambahan kosa kata sebagai prasarana untuk meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu pengetahuan dalam arti yang sebenarnya. Peminjaman dari bahasa daerah maupun bahasa asing adalah hal yang lumrah di mana pun juga. Saya hanya ingin menekankan dalam makalah ini bahwa di samping peminjaman ada cara-cara lain yang bisa memperkaya bahasa kita untuk lebih mantap berfungsi sebagai bahasa ilmu. Di samping proses akronimisasi yang diperlukan untuk kepadatan bentuk dan ekonomi, proses penyingkatan sintaksis yang tak perlu (*redundant*), penghapusan imbuhan-imbuhan tertentu dalam situasi dan untuk tujuan yang tertentu pula, saya kira penelahaan terhadap unsur-unsur gramatik yang lain seperti yang dipaparkan dalam makalah ini perlu pula diperhatikan.

Dari pembicaraan di bagian Pengantar sampai dengan bagian Ruang Lingkup TOL<sub>1</sub>, TOL<sub>2</sub>, TOL<sub>3</sub> kita ketahui bahwa TOL<sub>1</sub>, TOL<sub>2</sub>, dan TOL<sub>3</sub> memiliki tingkat keberterimaan yang berbeda-beda. Batas antara TOL<sub>1</sub>

dengan  $TOL_2$  dan  $TOL_3$  tampaknya sangat jelas:  $TOL_1$  tidak akan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan apa pun. Sebaliknya  $TOL_2$  dan  $TOL_3$  mempunyai potensi untuk dimanfaatkan, terutama celah-celah yang bersifat nominal.

Bahasa ilmu tidak selalu selaras dengan bahasa sehari-hari. Ilmu mempunyai "bahasa-dalam" (jargon) yang hanya dimengerti oleh orang-orang dalam ilmu itu sendiri. Bentuk-bentuk "bahasa-dalam" ini kadang-kadang harus diciptakan dan diberi definisi yang tepat. Dalam menciptakan bentuk-bentuk "bahasa-dalam" inilah  $TOL_2$  dan  $TOL_3$  bisa ikut mengambil peranan, dan telah dilakukan oleh sementara orang meskipun barangkali tidak dengan kesadaran mutlak. Dalam usahanya mencari istilah yang artinya sama dengan *silence* dan *pause* dalam linguistik, misalnya, Effendy (hlm. 27) telah menciptakan istilah *hentian* dan *senyapan*. Orang awam mungkin sekali akan menolak bentuk-bentuk ini, dan ini terlihat juga dengan tidak dicantumkannya kedua kata ini pada kamus mana pun. Dalam *Daftar Istilah Fisika* yang ditulis oleh H. Johannes dkk. kita temukan istilah *percepatan (sudut) angular acceleration*, *perbesaran (sumbu) axial magnification*, dan *kehantaran (elektrik) electrical conductivity* dan sebagainya. *Perbesaran* dan *kehantaran* tidak terdapat di Okamus dan *percepatan* terdapat di Poerwadarminta. Namun, orang di luar ilmu fisika barangkali akan berpikir dua kali sebelum dia dapat membayangkan kapan *percepatan* ini dipbkai.

Celah dalam  $TOL_3$  juga sudah mulai banyak diisi. Waktu orang mencari-cari istilah yang mengungkapkan *to question* (dalam kontrasnya dengan *to ask* orang menciptakan *mempertanyakan* yang sesuai dengan hukum (mem)peR-kan yang ada meskipun kata ini tidak terdapat di kamus saat ini. Pemakaian istilah *pelambatan (neutron) the slowing down of neutrons*, *peluruhan disintegration*, dan *pengutuban (melingkar) circular polarization* dalam ilmu fisika hanyalah merupakan pengikutan logika dari kodrat kata kerja transitif yang umumnya membolehkan pembentukan kata benda perbuatan (*action nominals*). Perlu dicatat bahwa ketiga kata di atas juga tidak terdapat pada kamus.

Dunia pers dan pengarang tentunya memanfaatkan celah-celah morfologis ini, baik untuk rasa seni, keunikan, maupun ekonominya. Mula-mula saya agak "berontak" waktu membaca kalimat *Dia betul-betul mengherani keuletan Nyi Ontosoroh*, tetapi setelah saya rasa-rasakan, enak juga!

#### CATATAN

1. Sebagian dari tulisan ini merupakan saduran dari tulisan saya yang berjudul "Morphological Caps in Indonesia" untuk memperingati ulang tahun ke-70 Hans Kaehler. *GAVA': Studies in Austronesian Language*

*anges and Cultures*, Rainer Carle dkk (Edt.) Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1982.

2. Dasar penggolongan saya berbeda dengan Verhaar sehingga saya tidak menganggap akar seperti *baca* termasuk akar terikat. Bagi saya *baca* adalah akar bebas.
3. Berbeda dengan Rose, saya percaya bahwa hanya akar yang pada nomor (2) lah yang tak berkategori. Bentuk seperti *tanam* (Rose, hlm. 27) harus dianggap sebagai akar bebas dan mempunyai kategori sintaktik/+verbal/.
4. Fitur /-verbal/ mencakup kategori-kategori sintaktik yang lain yang tidak penting dalam makalah ini.
5. Lihat Dardjowidjojo 1981 mengapa pembagiannya seperti ini.
6. Saya sadar bahwa bentuk-bentuk seperti *ketemu* dan *kebakar* kadang-kadang dipakai, tetapi saya kira ini pengaruh dari bahasa lain.
7. Tanda + dan ± masing-masing berarti wajib dan manusuka.
8. Semua angka di sini harus dianggap sementara meskipun saya kira persentasenya tidak akan berubah banyak.
9. Banyak bentuk yang ditemukan Roolvink di teks Melayu klasik tidak dapat kita terima sekarang; *perjanjikan*, *pertakuti*, *perboroskan* dan sebagainya.
10. Karena *beR-* yang diikuti akar kata benda berarti milik, B<sub>1</sub> sebenarnya tidak terbatas.
11. Kata-kata seperti *berhalangan* dan *beranggapan* tidak termasuk B<sub>3</sub> karena mereka dibentuk dari *beR-* dan akar yang sudah dibubuhi *-an*.
12. Lihat Dardjowidjojo 1978 untuk lebih lengkapnya.
13. Hassa tidak mendesain apendiksnya dengan jelas sehingga tidak mustahil orang bisa salah baca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dardjowidjojo, Soenjono, 1971. "The *meN-*, *meN-kan*, and *meN-i* Verbs in Indonesian." *Philippine Journal of Linguistics*. Vol. 2 No. 2, 1971.
- , 1977 "Sekitar Masalah Awalan *beR-*." *Bahasa dan Sastra*, Vol. III, No. 1, 1977.
- , 1978. "The Semantic Structures of the Adeversative *ke-an* Verbs in Indonesian." S. Udin, Edt. *Spectrum: Essays Presented to St. Takdir Alisjahbana on His Seventieth Birthday*. Jakarta: Dian Rakyat.
- , 1978. "Nominal Derivation in Indonesian." *Pacific Linguistics*, C 61, 1978.
- , 1975. "Some Problems in the Theory of Generative Morphology: A case in Verbal Formation in Indonesia". *Pacific Linguistics*. C, 1975.
- Effendy, S. 1975. "Beberapa Masalah Sintaksis: Kalimat, Pola Dasar, dan Peragamannya". *Pengajaran Bahasa dan Sastra*, Vol. 1, No. 3, 1975.
- Hassan, Abdullah. 1974. *The Morphology of Malay*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Johannes, H. dkk. 1979. *Daftar Istilah Fisika*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Roolvink, R. 1965. "The Passive-Active *per- /ber- /per- /memper-* Correspondence in Malay". *Lingua*, Vol. 15, 1965.
- Rose, James H. 1970. "Relational Variation and Limited Productivity in Some Indonesian and English Verbal Derivations". Phd Dissertation, Universitas Michigan, 1970.
- Verhaar, John W.M. 1978. "Some Notes on the Verbal Passive in Indonesian". *Nusa: Linguistic Studies in Indonesian and Language of Indonesia*, Vol. 6, 1978.

## VOKAL DALAM BAHASA INDONESIA SALAH SATU ASPEK PEMBAKUAN LAFAL

**B. Karno Ekowardo**  
IKIP Semarang

### Pengantar

Menurut Edaran Umum (hal. 2–3) Kongres Bahasa Indonesia IV ini bertujuan memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi pemerintahan, sarana pengembangan kebudayaan, sarana pendidikan dan pengajaran, termasuk pelaksanaan wajib belajar, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Kemantapan itu antara lain ditentukan oleh tingkat penguasaan Bahasa Indonesia oleh masyarakat penuturnya, terutama oleh bangsa Indonesia sendiri.

Dalam kenyataannya, penguasaan bahasa tidak mutlak, tetapi merupakan serentetan jenjang penguasaan bahasa baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Jenjang penguasaan bahasa secara kuantitatif ditentukan atas dasar penguasaan unsur bahasa yang dapat dihitung seperti kata dan jenis kalimat. Jenjang penguasaan bahasa secara kualitatif dapat diukur atas dasar ketepatan dan kefasihan berbahasa, ketepatan bentuk dan pilihan kata atau gabungan kata, ketepatan bentuk dan pilihan struktur kalimat, dan luasnya penguasaan medan dan nuansa makna (Halim, 1982:2).

Ketepatan dalam berbahasa dalam berbagai aspeknya itu baru akan terwujud apabila berbagai aspek bahasa Indonesia itu sendiri sudah mantap, dalam arti telah ada pembakuan dalam berbagai aspek bahasa Indonesia. Selama pembakuan belum dilakukan, ketidaktepatan pasti terjadi.

Salah satu aspek yang sampai sekarang belum dibakukan adalah lafal (Badudu, 1981:109). Memang harus diakui bahwa lafal adalah aspek yang paling sulit dibakukan, mengingat situasi kedwibahasaan yang melatarbelakangi pemakaian bahasa Indonesia, yakni pemakai bahasa Indonesia adalah juga pertama-tama pemakai bahasa daerah yang merupakan bahasa ibunya masing-masing sehingga lafal bahasa Indonesia diwarnai oleh lafal bahasa-bahasa daerah.

Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa bidang lafal sama sekali tidak dapat dibakukan. Kalau yang dimaksud adalah aspek ciri-ciri prosodi (Samsuri, 1978:122) dapatlah diterima bahwa hal itu sangat sulit atau bahkan mustahil dilakukan. Akan tetapi, pembakuan lafal yang berkenaan dengan aspek konsonan dan vokal pasti dapat dilakukan.

Salah satu gerakan ke arah pembakuan lafal telah dirintis oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa melalui siarannya di TVRI tahun yang lalu yang naskahnya kemudian dibukukan oleh pembawa acara (Badudu, 1981). Dalam siaran itu telah diadakan pilihan lafal baku tentang kata.

#### 1. Bervokal a

- a. Vokal a tidak boleh digantikan (dilafalkan) dengan [e]; misalnya, *memuaskan*, *harap*, *malam*, *dalam*, tidak boleh dilafalkan sebagai [memuaskən], [harəp], [maləm], [daləm].
- b. Tidak boleh ditambahkan [h] di depan a dan pada akhir kata seperti pada bahasa Sunda; misalnya, *ayam*, *utang*, *buaya*, *tiang*, *gua*, *rapi*, *musna*, tidak boleh dilafalkan sebagai [hayam], [hutang], [buhaya], [tihang], [guha], [rapih], dan [musnah].

#### 2. Bervokal [ə]

- a. Tidak boleh dilafalkan sebagai bervokal [e] seperti pada bahasa Batak dan Toraja (Sa'dang); misalnya, *ke mana* tidak boleh dilafalkan sebagai [ke mana].
- b. Tidak boleh dilafalkan sebagai [o] seperti pada bahasa Gorontalo; misalnya, *keterangan*, *penerangan*, *berteman* tidak boleh dilafalkan sebagai [kotoran], [penorajan], [bortoman].

3. Berkonsonan t; t tidak boleh dilafalkan dengan menekuk ujung lidah ke atas mendekati langit-langit keras seperti pada orang Bali dan Aceh; misalnya *batuk* tidak dilafalkan sebagai /batU?/.

4. Berkonsonan [k] dan [ʔ]; dalam ejaan Bahasa Indonesia kedua konsonan itu ditulis dengan *k*.

- a. Pada akhir suku kata yang berasal dari bahasa Melayu dilafalkan sebagai

[?], tetapi jika mendapat akhiran dilafalkan sebagai /k/; misalnya, masuk [masU?] – masukan [masukn].

- b. Pada kata-kata yang berasal dari Bahasa Arab, yang dalam ejaan Van Ophuysen dinyatakan dengan ' , dilafalkan dengan [?]; misalnya, *makmur*, *maklum*, *rakyat* lafalnya [ma?mUr], [ma?lUm], [ra?yat].
  - c. Pada sejumlah kata pungut *k* dilafalkan sebagai [k] ; misalnya, *takdir*, *maksud*, *akbar* (dari bahasa Arab), *teknik*, *praktik* (dari Barat), *paksa*, *laksana*, *seksama* (Sansekerta).
5. Konsonan /h/ yang terletak di antara dua vokal yang sama harus dilafalkan dengan jelas, misalnya *mahal*, *pohon*, *luhur*, *leher*, tetapi yang terletak di antara dua vokal yang berbeda dilafalkan dengan lemah, hampir-hampir tidak kedengaran, misalnya, *tahun*, *tahu*, *lihat*. Kaidah itu tak berlaku untuk kata pungut, misalnya, *mahir*, *lahir*, *kohir*, *sehat*, *kohesi*. Kata-kata ini dilafalkan dengan /h/ yang jelas. Selain itu pernah juga disiarkan lafal kata singkatan (Badudu, 1981:162).

Pada kesempatan ini kami membatasi diri hanya pada masalah lafal vokal saja karena mengenai aspek ini, di luar yang sudah pernah disiarkan itu, masih terdapat masalah yang cukup mendasar untuk dibahas dalam rangka mencari ketepatan lafal kata dalam bahasa Indonesia, yakni sebagai berikut.

- a. Apakah lafal vokal dalam suku terbuka dalam kata-kata bahasa Indonesia sama dengan dalam suku tertutup?
- b. Apakah lafal setiap vokal dalam suku tertutup sama saja meskipun sama-sama pada posisi akhir kata atau sama-sama pada awal kata? Apakah lafal setiap vokal dalam suku tertutup di awal kata sama dengan yang ada pada akhir kata?
- c. Apakah lafal setiap vokal dalam kata dasar tetap sama apabila terdapat sufiks tertentu?

### Bunyi, Fonem, dan Huruf Vokal Bahasa Indonesia

Dalam penyelesaian masalah akan digunakan prinsip pendekatan fonetik artikulatorik berdasarkan pendengaran terhadap pemakaian bahasa Indonesia ragam resmi. Namun, dalam beberapa hal penentuan lafal baku tidaklah mudah sebab – lepas dari pengaruh lafal bahasa daerah – lafal dalam bahasa Indonesia resmi pun beragam juga sehingga di sini hanya dapat disuguhkan alternatif yang penentuannya terserah kepada kongres nasional ini.

Di dalam fonetik dikenal apa yang dinamakan vokal sendi (*cardinal vowels*), yakni seperangkat vokal yang terturun di dalam diagram (biasanya

disebut segi empat vokal) berdasarkan sistem artikulasinya, yakni berdasarkan (a) bagian lidah yang berperan dalam menghasilkan bunyi vokal (lidah depan, tengah, belakang), (b) ketinggian bagian lidah itu (tinggi, sedang, rendah), dan (c) sikap bibir dalam membentuk lubang dan sempit lebarnya lubang itu (bundar, tak bundar, sempit, sedang, lebar).

Atas dasar itu, dalam bahasa Indonesia terdapat seperangkat bunyi vokal atas dasar artikulasinya tersistemkan ke dalam diagram berikut.

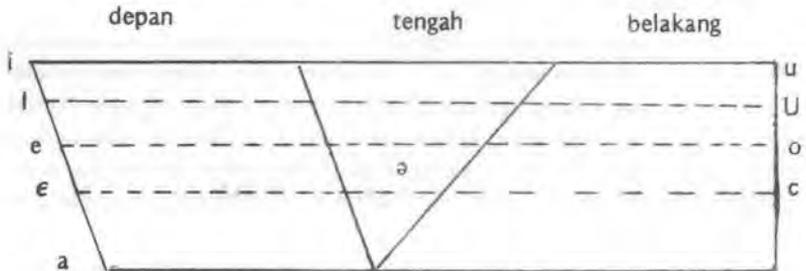


Diagram ini menggambarkan bahwa bunyi-bunyi [i, I, e, ε, a] diucapkan dengan lidah bagian-depan dalam posisi tinggi yang disertai bibir membuka sempit tak bundar yang berturut-turut merendah disertai sikap bibir tak bundar makin melebar (dalam pengucapan [i] paling tinggi, [a] paling rendah). Sebaliknya, bunyi-bunyi [u, U, o, ɔ, ʊ] diucapkan dengan lidah bagian belakang dalam posisi tinggi yang berturut-turut merendah disertai bibir membuka sempit yang berturut-turut makin lebar [u] ke [o]. Bunyi [ə] diucapkan dengan lidah tengah dalam posisi sedang disertai sikap bibir netral.

Contoh.

- a) *tari* [tari], *taring* [tarɪŋ], *sore* [sore], *goreng* [goreŋ], *tempe* [tempe], dan *tempel* [tempel]  
 b) *guru* [guru] – *gurun* [gurUn]  
*toko* [toko] – *tokoh* [tokɔh]  
*aki* [aki] – *hati* [hati]  
 c) *emas* [emas] – *sere* [sere]

Secara fonemis ke-11 bunyi bahasa itu dapat diklaskan ke dalam enam fonem, yakni (1) /i/ yang meliputi bunyi [i] dan [I], (2) /e/ yang meliputi bunyi [e] dan [ε], (3) /a/ yang meliputi bunyi [a] dan [ʌ], (4) /u/ yang meliputi bunyi [u] dan [U], (5) /o/ yang meliputi bunyi [o] dan [ɔ], dan (6) /ə/. Keenam fonem itu di dalam ejaan bahasa Indonesia hanya ditulis dengan lima huruf, yakni, *a e. a' u*, dan *o*.

Pengiklasan bunyi-bunyi bahasa itu ke dalam enam fonem didasarkan kepada adanya oposisi semantis antara kata-kata yang mengandung bunyi-bunyi bahasa tersebut; misalnya, antara *seret* [sɛrət], *seret* [sɛrɛt], dan *sorot* [sɔrɔt]; *sore* [sɔrɛ] dan *sere* [sɛrɛ]; *gali* [gali] dan *geli* [geli]; *tuli* [tuli] dan *tali* [tali]; *bibi* [bibi], *babu* [babu], *bubu* dan *bobo* [bobo]; *guru* [guru] dan *garu* [garu].

Bahwa pasangan bunyi [i] dan [ɪ], [u] dan [ʊ], [e] dan [ɛ], serta [o] dan [ɔ] masing-masing termasuk satu fonem, ternyata dari distribusinya yang komplementer (Samsuri, 1978:132), seperti terdapat pada *tari* [tari] dan *taring* [tarɪŋ], *guru* [guru] dan *gurun* [gurʊn], *toko* [toko] dan *tokoh* [tɔkɔh], *tempe* [tempe] dan *tempel* [tempɛl]. Oposisi pasangan kata itu masing-masing disebabkan oleh kehadiran konsonan pada akhir kata kedua pada masing-masing pasangan, sedangkan variasi vokal itu terjadi karena terbuka dan tertutupnya suku akhir tempat vokal itu berada.

Dalam pemakaian bahasa, variasi lafal fonem vokal itu banyak terjadi. Misalnya, ada orang yang mengucapkan [tarɪŋ], ada yang juga mengucapkan [tarɪŋ]—ada yang mengucapkan [gurʊn], ada juga yang [gurʊn]; ada yang mengucapkan [tempe], ada pula yang mengucapkan [tempe]; ada yang mengucapkan [seri], ada yang mengucapkan [seri], ada yang mengucapkan [fonetik]. Variasi lafal yang terjadi bukan hanya yang berupa variasi alofonemis (Verhaar, 1977:40) semacam itu, yakni variasi di dalam batas fonem, melainkan juga variasi yang keluar dari batas fonem, berupa variasi bebas (Verhaar, 1977:46–47), seperti pada [telʊr] dan [tɔlɔr]; [dalam] dan [daləm]; [diɪŋtəkən] dan [diɪŋtəkən]; [mɔkɪn] dan [mɔŋkɪn].

Variasi lafal itu terjadi karena (1) bagi penutur bahasa yang pertamanya disadari adalah beban fungsional bunyi bahasa, yakni bunyi bahasa itu menimbulkan perbedaan makna kata atau tidak, sedangkan variasi bunyi kurang mendapatkan perhatian; (2) kata-kata bahasa Indonesia pada prinsipnya ditulis secara fonemis; bahkan ejaan fonemis yang berlaku pun kurang sempurna, (misalnya untuk fonem /e/ dan /ɛ/ dipakai satu huruf yang sama, yakni e) sehingga variasi lafal mudah terjadi. Di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* karangan Poerwadarminta, yang diperbaiki oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1976), hanya dibubuhkan satu tanda aksen (˘) di atas huruf e yang dimaksudkan untuk memberi petunjuk cara melafalkan kata bersangkutan. Tentu saja pemberian satu macam tanda untuk dua alofon fonem /e/ yang berbeda tidak selalu dapat membantu kamus sebab untuk [e] dan [ɛ] sama saja tandanya. Contohnya, untuk *agen* dan *agenda* yang seharusnya dibaca [aɟɛn] dan [aɟɛnda] atau [aɟɛnda] (?) diberikan transkripsi dengan tanda yang sama, yakni *agen* dan *agenda*; begitu juga halnya dengan kata *elektro*, *elektron*, *elok*, dan sebagainya tidak digunakan petunjuk yang

berbeda, yakni (élektro), (élekttron), (élok). Persoalan yang sama sebenarnya juga terjadi pada huruf vokal *i*, *u*, dan *o* karena tanpa pembedaan tanda baca akan timbul kesulitan apakah huruf itu dibaca /i/ atau /i/, /u/ atau /U/, dan /o/ atau /o/. Kesulitan itu tidak hanya terdapat pada cara melafalkan (membaca) fonem/huruf vokal pada suku tertutup, tetapi juga pada suku terbuka, seperti apakah lafalnya [elektro] atau [elektro], [elɔʔ] atau [elɔʔ] [seri] atau [seri]. (3) Variasi lafal dapat juga terjadi karena penutur bahasa sukar melepaskan kebiasaan lafal bahasa ibunya (bahasa daerah), atau (4) karena kaidah baku yang dapat dipakai sebagai pedoman melafalkan kata belum ada. Oleh karena itu, untuk memperoleh ketepatan dalam melafalkan kata perlu adanya kaidah yang dapat dipakai sebagai pegangan kita bersama.

### Kaidah Lafal

Bunyi bahasa mempunyai kecenderungan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya (Samsuri, 1978:131). Secara otomatis jika berkombinasi dengan (didahului) konsonan [k, X<sup>1</sup>, g, n, ŋ, h] vokal [a] akan berujud [ɒ] diucapkan dengan lidah belakang); jika didahului oleh konsonan lain yang artikulatornya ujung lidah, vokal [a] akan berupa [a] (a depan), dan jika didahului konsonan yang dihasilkan dengan artikulator lidah tengah vokal [a] akan berupa [ɔ] tengah. Begitu juga posisi lidah akan berbeda apabila vokal /a/ itu berada pada posisi terbuka dan posisi tertutup (diikuti konsonan dalam suku kata). Meskipun terdapat perbedaan lafal, perbedaan itu tidak sampai menimbulkan kemiripan dengan fonem vokal lain sehingga tidak ada masalah tentang pelafalan fonem/huruf vokal *a*. Hal ini juga terjadi pada pelafalan fonem /ə/. Fonem /a/ dan /ə/ dapat berada pada suku terbuka atau tertutup tanpa menimbulkan masalah lafal. Jika ada masalah lafal, itu semata-mata karena (1) pengaruh kebiasaan lafal bahasa daerah seperti yang dikemukakan pada bagian pengantar makalah ini; (2) dalam ejaan bahasa Indonesia, tidak dibedakan huruf untuk fonem /e/ dan /ə/. Yang terakhir ini sebenarnya dapat teratasi jika orang mau mencari kata yang bersangkutan di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* karangan Poerwadarminta meskipun masalah lafal [e] dan [ə] tidak terpecahkan dengan menggunakan kamus itu.

Pada vokal /i/, /u/, /e/, dan /o/ terdapat masalah lafal karena (1) lafal vokal-vokal itu pada suku terbuka dan pada suku tertutup pada sejumlah kata sama saja, sedangkan pada sejumlah kata yang lain berbeda; (2) pada suku tertutup sejumlah kata lafal vokal /i/ mirip dengan /e/, lafal vokal /u/ mirip dengan /o/, yakni diucapkan dengan kerendahan lidah hampir mende-

<sup>1</sup>Dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dilambangkan dengan *kh*.

kati posisi waktu mengucapkan vokal /e/ dan /o/; masing-masing dilambangkan dengan [I] dan [U]; (3) lafal vokal-vokal itu pada suku akhir tertutup pada sebagian kata sama dengan lafal pada suku bukan akhir tertutup, sedangkan pada sebagian kata yang lain berbeda; (4) oleh adanya sufik *-i* dan *-an*, lafal vokal pada suku akhir tertutup bentuk dasar menjadi berbeda.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa vokal /i, u, e, o/ pada suku terbuka dilafalkan sebagai [i, u, e, o].

Contoh.

*Ini* [ini], *itu* [itu]; *bibi* [bibi], *iri* [iri]; *ufo* [ufo], *uhu* [uhu]; *duku* [duku], *buku* [buku]; *biru* [biru], *bau* [bau]; *enak* [ena?], *elok* [elo?], *pena* [pena]; *sore* [sore] *ide* [ide]; *otomat* [otomat], *odorono* [odorono]; *bola* [bola], *tobat* [tobat], *toko* [toko]; *saldo* [saldo], *sado* [sado].

Untuk kesederhanaan kaidah, kata-kata seperti *seri*, *elektris*, *esok*, *pori-pori*, *Oktober*, sebaiknya tidak dilafalkan sebagai [ɛlektris], [ɛso?], [pori-pori] [ɔktɔbɛr], melainkan sebagai [elektris], [ɛso?], [pori-pori], [ɔktɔbɛr].

Kekecualian terjadi pada /e/ dan /o/ yang terdapat pada suku terbuka yang langsung terdapat di depan suku tertutup yang mengandung bunyi [ɛ] dan [ɔ]; vokal /e/ dan /o/ itu dilafalkan sebagai /ɛ/ dan /ɔ/ juga.

Vokal /e/ dan /o/ yang terdapat pada suku tertutup dilafalkan sebagai /ɛ/ dan /ɔ/. Misalnya, *eh* [ɛh], *ekspor* [ɛksɔr], *ember* [ɛmbɛr], *es* [ɛs], *teh* [tɛh], *kenek* [kɛnɛ?], *tokek* [toke?], *jengkel* [jɛnkɛl], *semen* [sɛmɛn], *bertengger* [bɛrtɛnggɛr], *beres* [bɛrɛs], *deret* [dɛrɛt], *serentet* [sɛrɛntɛt]. *oksidasi* [ɔksidasi], *Oktober* [ɔktɔbɛr], *hom* [bɔm], *oncom* [ɔncɔm], *rontok* [rɔntɔk], *pokok* [pɔkɔ?], *balok* [balɔ?], *momok* [mɔmɔ?], *perampok* [pɛrɔmpɔk], *rok* [rɔk], *sok* [sɔ?], *kolesom* [kɔlesɔm], *pengayom* [pɛngɔyɔm].

Atas dasar itu kata *pohon* dan *mohon* harus dilafalkan sebagai [pɔhɔn] dan [mɔhɔn], bukan [pohon] dan [mohon].

Penyimpangan terjadi pada kata seru *oh* [oh], yang tidak dilafalkan sebagai [ɔh], karena kata seru mengacu kepada bunyinya. Selain itu, kata *tempe* merupakan kekecualian juga. Kekecualian ini timbul karena suku berikutnya berupa suku bervokal /e/ tanpa ditutup konsonan. Jika ditutup konsonan, /e/ pada suku di depannya dilafalkan sebagai [ɛ], seperti pada *tempel* [tempɛl].

Di luar kondisi seperti itu sebaiknya /e/ pada suku tertutup dilafalkan sebagai [ɛ]. Jadi *tempo*, *tembok*, *tenda*, *tenggang*, *agenda*, dan *legenda* dan sebagainya dilafalkan sebagai [tempo], [tɛmbɔ?], [tɛnda], [tɛngan], [la-gɛnda], dan sebagainya agar diperoleh kesederhanaan kaidah.

Kata *dos* biasanya dilafalkan sebagai [dos], hampir tidak pernah se-

bagai [dɔs]. Akan tetapi, ini dapat dipersoalkan. Jika /o/ pada suku akhir tertutup pada kata-kata *dialog*, *monolog*, *prolog*, *katalog*, *not* (yang dipungut dengan cara menghilangkan satu huruf o pada suku akhir dari ejaan kata aslinya), /o/ dilafalkan sebagai [ɔ], yakni [dialɔk], [monolɔk], [prolɔk], [katalɔk], [not], mengapa kata *dos* tidak dilafalkan juga sebagai /dɔs/.

Tentang lafal kata pungut yang ditulis dengan menghilangkan salah satu huruf vokal dubel dari kata asalnya atau dengan cara menghilangkan satu huruf vokal penutup (biasanya *e* dari bahasa Inggris) memang masih perlu dikaidahkan, yakni salah satu dari dua kemungkinan ini.

- a. dilafalkan seperti kata bahasa asalnya, misalnya *dos* [dUs], *dialog* [dia-lUk], *monolog* [monolUk], *prolog* [pro-lUk], *katalog* [katalUk], *not* [nUt], *morfem* [morflm], *fonem* [fonlm], *grafem* [graflm], *sistem* [sistlm], *atmosfer* [atmosflr], *stratosfer* [stratosflr]; atau
- b. dilafalkan seperti kata Indonesia yang lain, yakni [dɔs], [dialɔk], [monolɔk], [prolɔk], [katalɔk], [not], [mɔrfem], [fonem], [frafem], sistem], [atmcsfer], [stratosfer].

Khusus kata *sistem* perlu dipertimbangkan juga bahwa akhir-akhir ini ada yang melafalkan secara bahasa Inggris, yakni [sistem] meskipun sebelumnya biasa dilafalkan seperti kata Belanda dan ditulis juga *sistim*. Ejaannya sudah dibakukan, yakni dipilih *sistem*, tetapi lafalnya belum sehingga masalahnya menjadi rumit, setelah di dalam Pedoman Ejaan dimasukkan kata bahasa sumbernya, bukan hanya yang bahasa Belanda (*systeme*), tetapi juga yang bahasa Inggris (*system*).

Pada prinsipnya vokal /i/ pada suku tertutup dilafalkan dengan lidah lebih rendah dari [i] pada suku terbuka, yakni sebagai [ɪ], yang lafalnya menyimpang, yakni /i/ dilafalkan sebagai [ɪ], cukup banyak. Bahkan dalam posisi suku kata bukan akhir, jika suku kata itu ditutup konsonan /n, m, ŋ, ŋ/, lafal /i/ pada suku tertutup itu ialah sebagai [ɪ], kecuali kata-kata yang berasal dari Barat lafalnya [i]. Contoh:

#### a. Pada Suku Akhir Tertutup

*mendidih* [mendidɪh], *ditagih* [ditagɪh], *diraih* [diraɪh]; *kubik* [kubɪk], *adik* [adɪʔ], *pekik* [pekɪʔ], *pelik* [peɪʔ], *baik* [baɪk], *naik* [naɪk], *munafik* [munafɪk], *taufik* [taʊfɪk]; *mobil* [mobɪl], *labil* [labɪl], *cicil* [cɪcɪl], *andil* [andɪl], *dim* [dɪm], *rahim* [rahɪm], *hakim* [hakɪm], *lalim* [lalɪm]; *ambin* [ambɪn], *cincin* [cɪncɪn], *jin* [jɪn], *lain* [laɪn]; *tabib* [tabɪb], *kadip* [kadɪp], *gip* [gɪp], *wajib* [waɪɪb]; *bibir* [bɪbɪr], *kincir* [kɪncɪr], *kincir* [kɪncɪr], *pandir* [pandɪr], *musafir* [musafɪr]; *habis* [habɪs], *karcis* [karcɪs], *kudis* [kudɪs], *Omanggis* [mangɪs]; *orbit*

[orbIt], *buncit* [buncIt], *gigit* [gigIt], *kait* [kaIt]; *arif* [arIf]

Yang menyimpang (/i/ pada suku akhir tertutup dilafalkan sebagai [i]); lebih, *cih*, *sedih*, *pedih*, *pipih*, *kasih*, *bersih*, *putih*; *jijik* [jiji?], *bisik* [bisi?]; *cantik*, *tragik*, *pedagogik*, *klik*, *dinamit*, *mimik*, *panik*, *piknik*, *klinik*, *lirik*, *asyik*, *kritik*; huruf k dilafalkan [k];

*kecil*, *usil*, *pensil*;

*licin*, *abidin*, (*akronim atas biaya dinas*), *bonbin*;

*tante gir* [tantegir] (=tante girang);

*jip*, *prinsip*;

*tragis*, *meringis*, *pesimis*, *optimis*, *dinamis*, *remis*, *manis*, *teknis*, *tropis*, *grafis*, *sofis*, *krisis*, *persis*, *matematis*, *otomatis*, *dramatis*, *organis*, *filosofis*, *magis*, *politis*, dan kata-kata lain yang menyatakan sifat; *kredit*, *mencicit*, *pailit*, *dinamit*, *enternit*, *sipit*, *sit*.

#### b: Pada Suku Tertutup yang Bukan Suku Akhir

a) /i/ yang ditutup dengan konsonan [m, n, ñ, ŋ] dilafalkan sebagai [i].

Contoh:

*imbangan*, *imbang*, *imbauan*, *imbuhan*, *impas*, *impian*, *imbas*; *timbul*, *timbang*, *timpang*, *simpul*, *simpan*, *rimba*, *bimbang*, *simpang*, *rimbun*, *bimbing*, *simbul*, *himpun*, *timba*, *indah*, *Injil*, *indra*, *individu*, *injak*, *induk*, *indung*;

*binatang*, *cinta*, *dinda*, *minta*, *pintu*, *pintal*, *pindah*, *merintih*, *rintik-rintik*, *rintis*, *sinting*, *tinta*, *tinju*, *tinja*, *Ingggris*, *ingkar*, *ingsut*, *bingkai*, *bingkis*, *hinggap*, *jingga*, *kongkong*, *linggis*, *minggu*, *meninggal*, *pinggul*, *pinggang*, *ringgit*, *ringkas*, *ringkik*, *ringkus*, *singkat*, *singkir*, *tinggal*, *tinggi*, *tingkah*, *tingkat*;

b) Pada kata-kata pungut /i/ yang ditutup dengan konsonan [m, n, ñ, ŋ] dilafalkan sebagai [I].

Contoh:

*imperialis*, *impor*, *imperatif*, *improduktif*; *infantri*, *infeksi*, *infiltrasi*, *influenza*, *informasi*, *inspeksi*, *instruktur*, *insinyur*, *inspirasi*, *instalasi*, *insting*, *instruksi*, *instrumen*, *integral*, *intelek*, *intensif*, *inten* [inten], *internat*, *internasional*, *interpretasi*, *intransitif*, *intervensi*, *invalid*, *injeksi*.

Akan tetapi, tidak semua kata pungut memiliki lafal seperti pada b). Kata-kata pungut itu dilafalkan seperti kata Indonesia asli, seperti pada a). Contoh: *implikasi*, *indikasi*, *insan*, *intim*, *intrik*, *Indian*. Kebanyakan dilafalkan seperti b).

c. /i/ yang tidak ditutup dengan konsonan [m, n, ñ, ŋ] dilafalkan sebagai [ɪ]. Contoh: *Ibnu, ihtiar, hikmat, ilmu, irjen, istirahat, istimewa, istiadat, siskamling, fitnah*. Kaidah lafal /u/ sama seperti /i/, yakni seperti berikut.

a) Pada suku tertutup /u/ dilafalkan sebagai /U/, kecuali beberapa kata /u/ dilafalkan sebagai /U/.

Contoh:

*dituduh* [ditudUh], *acuh* [acUh], *batuk* [batUʔ], *lauk* [laUʔ], *kabul* [kabUl], *tanggul* [tangUl], *umum* [umUm], *kagum* [kagUm], *sabun* [sabUn], *racun* [racUn], *hidup* [hidUp], *gugup* [gugUp], *kabur* [kabUr], *hancur* [hancUr], *arus* [arUs], *ratus* [ratUs], *kabut* [kabUt], *badut* [badUt];

Perkecualian: (/u/ dilafalkan sebagai [u])

*huh, tujuh, sepuluh, penuh, sibuk, busuk, kikuk, bonus, buruk, dentum, parfum, mumur, bagus, rakus, kaktus, kamus, lurus, hus, kritikus, tipus, sus, khusus, infus, HUT, pruf, struktur.*

b) Pada suku yang bukan akhir /u/ yang ditutup dengan konsonan [m, n, n, n] dilafalkan sebagai /u/, tetapi jika konsonan penutup itu konsonan penutup itu konsonan lainnya, dilafalkan sebagai /U/.

Contoh:

*umbi* [umbi], *umbut* [umbUt], *umpan* [umpan], *tumpang* [tumpang], *tumpul* [tumpul], *sumbat* [sumbat], *sumbang* [sumbɲ], *undi* [undi], *undur* [undur], *unggul* [ungUl], *hunjam* [hunjam].

Yang lafalnya /U/ ialah *ultima* [Ultima], *ultimatum* [Ultimatum], *ultra* [Ultra], *urbanisasi* [Urbanisasi].

Yang dibicarakan itu adalah lafal vokal pada bentuk dasar. Jika bentuk dasar itu mendapat akhiran *-i* atau *-an*, lafal vokal /i/ dan /u/ pada suku tertutup pada akhir bentuk dasar itu bukan [ɪ] dan [U], melainkan [i] dan [u] sebab konsonan penutup suku akhir bentuk dasar itu sekarang berpadu dengan akhiran *-i* atau *-an* sehingga suku-kedua bentuk berakhiran itu menjadi terbuka. Contoh: *asin* [asɪn], *asinan* [asinan], *diasini* [diasini], *akhir* [aXɪr], *akhrian* [aXɪran], *diakhiri* [diaXɪri], *hidup* [hidUp], *kehidupan* [kehidupan], *dihidupi* [dihidupi], *minum* [minUm], *minuman* [minuman], *diminum* [diminum].

Akhiran *-i* tidak mengubah lafal vokal /e/ dan /o/ yang terdapat pada suku akhir tertutup pada suku terbuka atau tertutup yang langsung di depannya. Lafalnya adalah [e] dan [ɔ].

Contoh:

*beres* [beres], *memberesi* [memberesi]  
*tetek* [teteʔ], *meneteki* [meneteʔi]

*kotor* [kɔtɔr], *mengotori* [mənɔtɔri]  
*tokoh* [tɔkɔh], *menokohi* [mənɔkɔhi]

Lafal sebagai [məjɔtɔri], [mənɔkɔhi], [məmberesi], dan [mənete?i] tidak pernah kami dengar. Akan tetapi, jika kata itu berakhiran *-an*, lafal [e] dan [ɛ] serta [o] dan [ɔ] sama-sama hidup dalam masyarakat, yakni

*keberesan* [kəberesan] atau [kaberesan]

*ketetekan* [ketete?an] atau [kctete?an]

*kotoran* [kotoran] atau [kɔtɔran]

*pertokohan* [pərtokohan] atau [pɛrtɔkɔhan]

Kedua cara pelafalan itu sama-sama berasal. Pelafalan dengan [e] dan [o] berdasar pada kaidah lafal /i/ dan /u/, sedangkan lafal [ɛ] dan [ɔ] dilakukan berdasar pada kaidah lafal /e/ dan /o/ pada kata berakhiran *-i*. Mana yang akan dipilih sebagai kaidah lafal yang baku terserah kepada kongres, hanya saja perlu dipertimbangkan bahwa pelafalan /e/ dan /o/ dengan [ɛ] dan [ɔ] pada suku akhir tertutup dan suku terbuka atau tertutup di depannya mengikuti kaidah yang lebih sederhana.

### Kesimpulan dan Saran

Fonem atau huruf vokal bahasa Indonesia tidak selalu sama lafalnya. Hanya pada kata-kata yang suku-sukunya terbuka lambang untuk fonem, huruf, dan bunyi atau lafalnya sama, kecuali untuk *e* dan *o*. Pada kata-kata yang mengandung suku tertutup lambang fonem, huruf, dan bunyi atau lafalnya tidak selalu sama. Lafal fonem atau huruf vokal pada suku tertutup itu pun tidak seragam meskipun dapat dikaidahkan. Posisi suku tertutup itu pada akhir kata atau bukan akhir kata pun berperan dalam cara pelafalan kata. Begitu adanya akhiran *-i* dan *-an*. Oleh karena itu, fonem/huruf vokal dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembakuan lafal.

Langkah yang dapat ditempuh pertama-tama ialah menentukan pelafalan fonem/huruf yang dianggap baku. Dengan kata lain, kaidah lafal baku perlu ditentukan. Selanjutnya, karena lambang bunyi dan huruf vokal pada suku terbuka sama, kecuali untuk *e* dan *o*, untuk tiap-tiap kata yang mengandung suku tertutup perlu diberikan transkripsi lafalnya di dalam kamus bahasa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, Yus. 1981. *Membina Bahasa Indonesia Baku*. Bandung: Pustaka Prima.
- Halim, Amran. 1982. "Pengajaran Bahasa dalam Hubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa", *Seminar Pengajaran Bahasa*. Jakarta.
- Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1977. "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan", *Pengajaran Bahasa dan Sastra*. No. IV. 1976.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Samsuri. 1978. *Analisis Bahasa*. Jakarta: Erlangga.
- Verhaar, J.W.M. 1977. *Pengantar Linguistik*. Jilid I. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

## **NONKALIMAT DI DALAM RAGAM TULIS ILMIAH BAHASA INDONESIA: SEBUAH STUDI KASUS**

**Yayah B. Lumintintang**

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

### **Pendahuluan**

Makalah ini menyajikan sebuah studi kasus yang datanya diambil dari hasil penelitian yang diperoleh pada tahun 1981. Hasil penelitian itu adalah sebuah deskripsi tentang ciri-ciri pola kalimat dasar bahasa Indonesia ragam tulis fungsional, yaitu ragam tulis ilmiah dan ragam tulis ilmiah populer (Lumintintang, 1981).

Penelitian yang telah dilakukan itu bertolak dari hipotesis bahwa bahasa Indonesia ragam tulis fungsional mempunyai ciri-ciri khas dalam hubungan dengan pola kalimat dasarnya yang membedakannya dari bahasa Indonesia ragam tulis ilmiah populer, dan sebaliknya.

Pendekatan penelitian itu adalah pendekatan sosiolinguistik deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran tentang hubungan ciri-ciri pola kalimat dasar bahasa Indonesia ragam tulis ilmiah dan ragam ilmiah populer serta jenis bidang ilmu dan settingnya (tempat terbitnya).

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik lapangan linguistik struktural dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data, yakni dengan mempelajari artikel-artikel (karya tulis ilmiah dan ilmiah populer) di dalam bahan pustaka yang telah ditentukan sebagai sampel. Sampel itu diolah dengan pencatatan dan analisis kalimat demi kalimat yang terdapat di dalamnya.

Populasi penelitian itu adalah bahasa Indonesia ragam tulis fungsional yang terdapat di dalam karya tulis ilmiah dan ilmiah populer bidang ilmu

pengetahuan alam (IPA) dan ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang terbit pada tahun 1970–1980. Karya tulis itu berupa disertasi, skripsi, diktat, dan makalah; buku teks, majalah; dan buletin. Jumlah populasi yang diperoleh didasarkan atas jumlah populasi yang diperoleh selama kegiatan survei (2 minggu) berlangsung di berbagai instansi, lembaga, dan universitas yang terdapat di Jakarta, Bandung, dan Bogor.

Sampel penelitian dilakukan secara acak bertingkat dengan melalui tiga tahap, yakni berdasarkan jenis publikasinya, tahun terbitnya, dan karya tulisnya. Sampel yang telah terpilih secara acak itu lalu diteliti kembali dengan memperhatikan latar belakang penulis, seting (tempat terbitnya/dimuat), tahun terbit, dan topik tulisan sebagai variabel.

Berdasarkan sampel acak serta pertimbangan variabel itu, diperoleh kartu data sebanyak 5.457 buah, yang terdiri dari 2.263 kartu data ragam ilmiah IPS, dan 767 kartu data ragam ilmiah populer IPS. Jumlah-jumlah itu diperoleh dari sampel karya tulis yang mewakili bidang IPA dan IPS atas dasar sampel teks dengan cara mengambil setengah halaman teks bagian pendahuluan, setengah halaman teks bagian analisis, dan setengah halaman teks bagian kesimpulan.

Setelah dilakukan analisis data, diperoleh 619 kartu (11,34%) yang berisi data nonkalimat.

Dengan bertolak dari adanya kartu nonkalimat itulah dikembangkan hipotesis baru untuk tujuan penulisan makalah ini. Hipotesis itu adalah bahwa sebagian ragam tulis ilmiah bahasa Indonesia tidak memenuhi syarat minimum ragam tulis baku.

Sehubungan dengan penulisan makalah ini, kartu data yang dipergunakan adalah kartu data ragam tulis ilmiah IPA dan IPS saja dengan pertimbangan bahwa baik ciri-ciri linguistik maupun ciri-ciri nonlinguistiknya lebih ketat jika dibandingkan dengan ciri-ciri linguistik dan nonlinguistik ragam tulis ilmiah populer. Selain itu, data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari karya tulis yang terbit pada tahun 1975–1980 saja dengan pertimbangan bahwa pada sekitar tahun itu para penulisnya mestinya telah mengindahkan kaidah-kaidah yang tercantum di dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*.

### Ragam Bahasa

Di dalam kehidupan sosial dan kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik secara lisan maupun secara tertulis, dipergunakan berbagai bahasa daerah, termasuk dialeknya, dan bahasa asing. Bahkan, dalam situasi tertentu, seperti dalam keluarga perkawinan campuran, dipergunakan bahasa campuran, yaitu campuran antara bahasa Indonesia dan salah satu atau kedua bahasa

ibu pasangan perkawinan campuran itu (Lumintintang, 1980). Dalam situasi kebahasaan seperti itu timbul berbagai ragam atau variasi bahasa, sesuai dengan keperluannya, baik secara lisan maupun secara tertulis, yang disebabkan oleh latar belakang sosial, budaya, dan bahasa para pemakainya itu.

Yang dimaksud dengan ragam atau variasi bahasa adalah bentuk bahasa yang ditandai oleh ciri-ciri linguistik tertentu, seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis, serta ciri-ciri nonlinguistik tertentu seperti lokasi penggunaannya, lingkungan sosial pemakainya, dan lingkungan keprofesional pemakai bahasa yang bersangkutan.

Menurut Dittmar (1978) dan Halim (1979), ada empat buah ragam bahasa yang menyangkut ragam tulis dan ragam lisan, yang salah satu di antaranya adalah ragam fungsional, yang kadang-kadang disebut juga ragam profesional. Yang dimaksudkan Halim dengan ragam fungsional atau ragam profesional itu adalah ragam atau variasi bahasa yang dihubungkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya, yang di dalam penggunaannya dihubungkan dengan tingkat keseriusan sehingga di dalam kenyataannya, antara lain, menjelma sebagai bahasa teknis keprofesional, seperti bahasa di dalam bidang keilmuan. Misalnya, bidang ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu hukum, linguistik, dan ilmu administrasi, yang dipergunakan sebagai data dalam makalah ini.

Seperti halnya dengan ragam-ragam bahasa yang lain, ragam bahasa fungsional dapat dibagi menjadi ragam lisan dan ragam tulis yang pada dasarnya terdiri dari ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku, menurut Halim (1981:4), adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Sehubungan dengan bahasa Indonesia, ragam baku merupakan hasil pembakuan resmi dengan norma dan kaidahnya yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk pedoman, kamus, dan tata bahasa.

Sehubungan dengan ragam lisan dan ragam tulis bahasa Indonesia, tidak jarang diduga orang bahwa kedua-duanya memiliki kaidah yang sepenuhnya sama, padahal di dalam kenyataannya tidaklah demikian. Ragam lisan terikat oleh ruang dan waktu sehingga di dalam penggunaannya, dengan pertimbangan ciri-ciri nonlinguistiknya, kelengkapan ciri-ciri linguistiknya tidak dituntut sepenuhnya. Lain halnya dengan ragam tulis. Ragam tulis baku tidak terikat oleh ruang dan waktu sehingga di dalam penggunaannya kelengkapan ciri-ciri linguistiknya dituntut sepenuhnya. Ciri-ciri linguistik yang dituntut itu dalam bidang fonologi ragam lisan, misalnya adanya variasi penggunaan fonem seperti pada kata-kata *fihak* dan *pihak*: *ujud* dan *wujud*, yang dalam ragam tulis tampak di dalam bidang ejaannya, yaitu penggunaan huruf yang tetap tetapi mencerminkan variasi fonem sehingga ejaan yang

baku adalah *pihak* dan *wujud*.

Johannes (1978:2–3) mengemukakan pendapatnya tentang gaya bahasa keilmuan yang pada dasarnya sama pengertiannya dengan ragam bahasa fungsional baku. Ia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ragam tulis fungsional baku adalah ragam tulis yang ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Bahasanya resmi; bukan bahasa pergaulan.
- 2) Sifatnya formal dan objektif.
- 3) Nadanya tidak emosional.
- 4) Keindahan bahasanya tetap diperhatikan.
- 5) Kemubaziran dihindari.
- 6) Isinya lengkap, bayan, ringkas, meyakinkan, dan tepat.

Ia menyatakan juga bahwa yang dimaksud dengan ragam ilmiah adalah karangan yang mengandung hasil penyelidikan ilmiah, baik yang baru maupun yang telah berabad-abad dilakukan.

Moeliono (1981:215) mengemukakan bahwa ragam bahasa baku menggunakan istilah keilmuan dan teknis yang tidak ada padanannya di dalam ragam subbaku. Ia menyatakan pula bahwa perbedaan antara ragam baku dan subbaku dapat dilihat dari empat segi, yakni 1) segi fonologi, 2) segi morfologi, 3) segi sintaksis, dan 4) segi leksikonnya.

Berdasarkan konsepsi para ahli bahasa itu, ragam tulis ilmiah di dalam makalah ini dianggap ditandai oleh dua jenis ciri, yakni ciri linguistik dan ciri nonlinguistik. Ciri linguistiknya adalah sebagai berikut.

1. Kalimatnya lengkap dan eksplisit secara sintaksis.
2. Kata-kata yang dipergunakan adalah kata-kata baku dan kata-kata yang berupa istilah keilmuan dan teknis.

Ciri nonlinguistiknya adalah sebagai berikut.

1. Isi karangan bersifat keilmuan dan menyangkut masalah pengetahuan dan teknologi.
2. Pembaca sarannya sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dasar keilmuan dan teknologi, terutama pembaca yang berkecimpung di dalam bidang ilmu dan teknologi yang sama atau berkaitan dengan bidang dan teknologi yang digarap oleh penulis.
3. Sistematika, format, dan kelengkapan tulisan, seperti daftar pustaka, mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama atau dilazimkan.

### Kalimat

Sehubungan dengan kalimat ragam tulis baku bahasa Indonesia, beberapa ahli bahasa mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Alisjahbana (1977:57) menyatakan bahwa yang disebut kalimat adalah

"satuan bentuk bahasa terkecil yang mengucapkan suatu pikiran yang lengkap". Poerwadarminta (1967:23) mengemukakan bahwa yang disebut kalimat adalah "kesatuan bentuk ketatabahasaan yang menyampaikan pikiran, perasaan, dan hasrat". Mees (1969:28) mengemukakan bahwa kalimat adalah "Susunan kata-kata secara teratur, yang menyatakan buah pikiran seorang dengan cukup jelasnya yang mengetahui bahasanya". Pernyataan yang dikemukakan oleh ketiga ahli bahasa itu tidak dijadikan titik tolak dalam rumusan kalimat dalam makalah ini karena rumusan mereka terlalu umum sehingga tidak memperlihatkan ciri-ciri sintaksis minimum pola kalimat dasar.

Bloomfield (1933:153-164) menyatakan bahwa kalimat adalah sebuah konstruksi ketatabahasaan yang lebih besar dan lebih luas. Demikian pula pada dasarnya pernyataan Hockett (1958:199). Ia menyatakan bahwa kalimat adalah bentuk gramatikal yang tidak merupakan bagian konstruksi gramatikal lainnya. Pernyataan kedua ahli bahasa di atas dapat dipergunakan sebagai titik tolak rumusan kalimat dalam makalah ini karena rumusan mereka memiliki syarat minimum pola kalimat dasar.

Berdasarkan konsepsi Hockett dan Blomfield, untuk kepentingan penulisan makalah ini, yang dimaksud dengan kalimat dapat ditinjau dari segi kelengkapan unsur sintaksisnya; sebuah kalimat, minimum, harus mengandung unsur yang berfungsi subjek dan unsur yang berfungsi sebagai predikat (bandingkan, Lyons, 1975:171); misalnya, kalimat *Kategori tipe ditiadakan*. (S. Prt. 1975:5); kalimat yang memenuhi syarat minimum itu dapat diperluas dengan unsur sintaksis lainnya, seperti unsur yang berfungsi sebagai objek atau keterangan. Dalam kalimat *Perubahan kecil saja dapat menimbulkan ketegangan sosial* (Obk. Pert. 1977:25) baik subjek maupun predikat juga dapat diperluas lagi dengan keterangan, yaitu keterangan subjek dan keterangan predikat, sehingga menjadi, misalnya, *Perubahan kecil saja dalam kebijaksanaan itu dapat menimbulkan ketegangan sosial* atau *Perubahan kecil saja dapat menimbulkan ketegangan sosial yang rawan*.

Keterangan predikat dapat berupa komplemen, keterangan waktu, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan alat, keterangan kuantitas, keterangan syarat, keterangan sebab dan akibat, keterangan perihal, yang masing-masing, dalam kalimat majemuk bertingkat, dapat berupa anak kalimat. Misalnya, dalam *Penyosohan dilakukan dua kali agar beras benar-benar bersih*. (Gbh. Pert. 1977:102); *agar beras benar-benar bersih* merupakan anak kalimat keterangan tujuan.

### Nonkalimat di dalam Ragam Tulis Ilmiah Bahasa Indonesia

Dengan bertolak dari konsep-konsep tentang kalimat ragam tulis yang dikemukakan di atas, berdasarkan hasil analisis data, terbukti bahwa di dalam

ragam tulis ilmiah bahasa Indonesia terdapat pernyataan-pernyataan yang tidak memenuhi syarat kalimat Indonesia baku karena pernyataan itu tidak mengandung kelengkapan unsur kalimatnya. Dengan demikian, pernyataan-pernyataan itu merupakan nonkalimat dan tidak tergolong ke dalam ragam tulis baku bahasa Indonesia. Nonkalimat merupakan pernyataan yang ditandai oleh salah satu atau lebih ciri-ciri sebagai berikut:

1. tidak mengandung unsur yang berfungsi sebagai subjek;
2. tidak mengandung unsur yang berfungsi sebagai predikat;
3. berupa anak kalimat pengganti unsur yang berfungsi sebagai keterangan predikat, yang ditandai oleh kata-kata hubung *sehingga, sebab, karena, agar, supaya, meskipun, walaupun, bila, dan apabila*;
4. Berupa unsur yang hanya berfungsi sebagai keterangan penjelas atau keterangan tambahan;
5. merupakan ungkapan preposisi, yaitu pernyataan yang dimulai dengan preposisi seperti *mengenai, bagi, dalam, dengan, dan untuk*;
6. dimulai dengan kata hubung setara *dan, atau, tetapi, dan sedangkan*.

#### 1. Pernyataan yang Tidak Mengandung Unsur Subjek

Pernyataan yang tidak mengandung unsur yang berfungsi sebagai subjek kalimat tampak seperti di dalam contoh data berikut.

- 1) *Dengan demikian akan membantu para karyawan riset tehniksi dan peminat lain terutama mahasiswa dalam melaksanakan tugasnya* (S). Mmj. 1975: 4)

Pernyataan di atas tidak mengandung unsur yang berfungsi sebagai subjek. Oleh karena itu, ia tergolong ke dalam nonkalimat. Dalam ragam tulis baku kalimat itu dapat berbentuk sebagai berikut.

*Dengan demikian, hal itu akan membantu para karyawan riset, tehniksi, dan peminat yang lain, terutama mahasiswa, dalam melaksanakan tugasnya.*

Demikian pula halnya dengan contoh data nomor 2) dan nomor 3) berikut ini. Kedua-duanya merupakan nonkalimat karena tidak mengandung unsur yang berfungsi sebagai subjek.

- 2) *Oleh karena itu disebut racun bagi reaktor dan efeknya disebut efek peracunan.* (RPH. Fak. 1976:23)

Pernyataan di atas dalam kalimat ragam tulis baku berbentuk sebagai berikut.

*Oleh karena itu, ia disebut racun bagi reaktor dan efeknya disebut efek peracunan.*

- 3) *Akan tetapi pada umumnya lebih banyak atau lebih suka bermusyawarah*

*dengan para pemimpin informil desa (community leaders) untuk pengembangan desanya. (MAS, Sos. 1977:104)*

Pernyataan di atas dalam kalimat ragam tulis baku berbentuk sebagai berikut.

*Akan tetapi, pada umumnya, mereka lebih banyak atau lebih suka bermusyawarah dengan para pemimpin informal desa (community leaders) mengenai pengembangan desanya.*

## 2. Pernyataan yang Tidak Mengandung Unsur Predikat

Pernyataan yang tidak mengandung unsur predikat tampak di dalam data contoh berikut.

1) *Di samping itu pula Jakarta yang merupakan pusat dari pemerintahan di mana seluruh lembaga-lembaga pemerintahan diibukota. (RD. Sos. 1979: 2)*

Dari kalimat data di atas mungkin dapat diturunkan dua makna sebagai berikut.

a. Penggunaan kata tugas *yang* di depan unsur yang diduga sebagai predikat berlebihan sehingga pernyataan itu dalam kalimat ragam tulis baku dapat berbentuk sebagai berikut.

*Di samping itu, Jakarta juga merupakan pusat pemerintahan, tempat kedudukan seluruh lembaga pemerintahan di ibu kota.*

b. Pernyataan di dalam contoh data di atas memang hanya merupakan pernyataan yang berfungsi sebagai subjek yang mendapat perluasan. Jika demikian halnya, dalam ragam tulis baku pernyataan itu dapat dituliskan sebagai berikut.

*Di samping itu, Jakarta, yang merupakan pusat pemerintahan, tempat kedudukan seluruh lembaga pemerintahan di ibu kota, juga adalah kota terbesar di Indonesia.*

2) *Tertinggi di tipe TI sedang yang terendah pada tipe NE (Mas. Sos. 1977: 74)*

Data di atas juga merupakan pernyataan nonkalimat karena tidak memenuhi syarat minimum sintaksis; pernyataan itu tidak mengandung unsur yang berfungsi sebagai predikat. Kalimat data itu dapat diubah menjadi kalimat ragam tulis baku sebagai berikut.

*Yang tertinggi terdapat pada Tipe TI, sedangkan yang terendah terdapat pada Tipe NE.*

## 3. Pernyataan Berupa Anak Kalimat Pengganti Predikat

Pernyataan yang berupa anak kalimat yang berfungsi sebagai pengganti keterangan predikat ditandai oleh penggunaan kata hubung *sehingga, sebab,*

*karena, agar, supaya, bila, apabila, meskipun, dan walaupun.* Pernyataan itu tampak seperti pada contoh data berikut.

1) *Sehingga keyakinan tersebut cukup kuat untuk tetap mendorongnya berusaha menurut garis baru.* (ES. Ek. 1976:54)

Pernyataan di atas berupa anak kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri dan terikat pada induk kalimatnya. Oleh karena itu, pernyataan di atas tidak tergolong ke dalam kalimat ragam tulis baku karena tidak memiliki induk kalimat. Di dalam kalimat majemuk bertingkat anak kalimat itu dapat mendahului atau mengiringi induk kalimatnya. Pernyataan di atas dalam kalimat baku dapat berbentuk seperti berikut.

*Kita perlu memberi penyuluhan mengenai keyakinan hidup sehingga keyakinan itu cukup kuat untuk tetap mendorongnya agar berusaha menurut garis baru.*

Demikian pula halnya dengan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam contoh data nomor 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), dan 9) berikut ini. Semuanya hanya berfungsi sebagai unsur anak kalimat.

2) *Sebab tahap seleksi untuk sporulasi telah selesai* (TR. Fsk. 1980:36)

Pernyataan itu dalam kalimat baku dapat berbentuk sebagai berikut.

*Tahap berikutnya dapat dimulai sebab tahap seleksi untuk sporulasi telah selesai.*

3) *Karena teknologi yang diperoleh dari luar belum tentu dapat diterapkan di negara kita* (Sj. 1975:18)

Pernyataan di atas dalam kalimat baku dapat berbentuk sebagai berikut.

*Teknologi sendiri perlu dikembangkan karena teknologi yang diperoleh dari luar belum tentu dapat diterapkan di negara kita.*

4) *Agar usaha menyelamatkan mutu ikan sardine kaleng sampai ke konsumen dapat terjamin.* (Ti. Perik. 1978:52)

Pernyataan di atas dalam kalimat baku dapat berbentuk sebagai berikut.

*Kita perlu menjaga agar menyelamatkan mutu ikan sardine kaleng dapat terjamin sehingga sampai kepada konsumen.*

5) *Supaya semua bayi sejak lahir sampai umur 6 tahun dapat diawasi kesehatannya dan diberi pencegahan jangan sampai sakit* (AA. Doku. 1976:1)

Pernyataan di atas dalam kalimat baku dapat berbentuk sebagai berikut.

*Pemeriharaan kesehatan bayi perlu ditingkatkan supaya semua bayi sejak lahir sampai berumur 6 tahun dapat diawasi kesehatannya dan diberi pencegahan jangan sampai sakit.*

6) *Meskipun peningkatan mutu para dosen dan karyawan adalah jelas tidak identik dengan pengembangan Fakultas.* (SD. DKG. 1980:1)

Pernyataan di atas dalam kalimat baku dapat berbentuk sebagai berikut.

*Mutu dosen dan pegawai perlu ditingkatkan meskipun peningkatan mutu para dosen dan karyawan jelas tidak identik dengan pengembangan fakultas.*

- 7) *Walaupun penggunaan wewenang untuk mengambil keputusan dalam memecahkan masalah tertentu sebagian terbesar berada di tangan bawahan.* (M. Peg. 1976:23)

Pernyataan di atas dalam kalimat baku dapat berbentuk sebagai berikut.  
*Tanggung jawab terakhir berada di tangan atasan walaupun penggunaan wewenang pengambilan keputusan pemecahan masalah sebagian terbesar berada di tangan bawahan.*

- 8) *Bila masalah berfikir untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah di dalam usahanya menemukan kebenaran.* (SS. HK. 1977:158)

Pernyataan di atas dalam kalimat baku dapat berbentuk sebagai berikut.  
*Dia dapat dikatakan berhasil bila masalah berpikir untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah di dalam usahanya menemukan kebenaran.*

- 9) *Apabila kita membuka lembaran sejarah masa silam dan memperhatikan kejadian-kejadian di masa kini.* (SD. Ag. 1976:207)

Pernyataan di atas dalam kalimat ragam tulis baku dapat dituliskan sebagai berikut.

*Kita dapat melihat persamaan ciri peristiwa tertentu apabila kita membuka lembaran sejarah masa silam dan memperhatikan kejadian-kejadian pada masa kini.*

#### 4. Pernyataan yang Berupa Unsur Keterangan Penjelas/Keterangan Tambahan

Pernyataan yang berupa unsur yang berfungsi sebagai keterangan penjelas atau keterangan tambahan tampak pada contoh data berikut.

- 1) *Sesuai kondisi lahannya yang berkadar kapur tinggi sehingga kurang baik untuk pertanian.* (Ptj. Prt. 1979:8)

Pernyataan di atas merupakan unsur yang berfungsi sebagai keterangan kalimat. Sesuai dengan fungsinya, sebagai keterangan, dalam ragam tulis baku unsur itu tidak dapat berdiri sendiri, ia terikat kepada unsur-unsur lain yang berfungsi sebagai subjek dan predikat kalimat. Dengan demikian, pernyataan itu tergolong ke dalam nonkalimat. Pernyataan dalam contoh data itu dapat diubah menjadi bentuk tulis baku sebagai berikut.

*Daerah itu tidak akan dikembangkan sebagai daerah pertanian sesuai dengan kondisi lahannya yang berkadar kapur tinggi sehingga kurang baik untuk pertanian.*

Demikian pula halnya dengan contoh data yang tertera dalam nomor 2) dan 3) berikut. Keduanya merupakan nonkalimat karena hanya merupakan unsur yang berfungsi sebagai keterangan penjelas atau keterangan tambahan saja. Dengan kata lain, pernyataan itu tidak memenuhi syarat minimum sintaksis.

2) *Terutama terkonsentrasikan pada mulut-mulut sungai Cimanuk.* (SH. Sdj. 1979:6)

Pernyataan di atas dalam kalimat baku dapat berbentuk sebagai berikut.  
*Pengedukan lumpur itu terutama terkonsentrasi pada mulut-mulut Sungai Cimanuk.*

3) *Baik bila kita berada di restoran, dipasar terminal bis, dan tempat-tempat umum lainnya.* (Peg. KSL. 1978:5)

Pernyataan itu dalam kalimat baku dapat berbentuk sebagai berikut.  
*Kita perlu berhati-hati, baik bila kita berada di restoran, di pasar, di terminal bus maupun di tempat-tempat umum lainnya.*

## 5. Pernyataan yang Berupa Ungkapan Preposisi

Pernyataan yang merupakan ungkapan preposisi adalah pernyataan yang didahului oleh kata depan (preposisi) seperti *dengan*, *mengenai*, *untuk*, dan *bagi*. Pernyataan itu tampak pada contoh data berikut.

1) *Dengan penambahan  $Na_2CO_3$  akan menghambat proses pengendapan dalam thickener.* (EF. Kein. 1979:22)

Dari contoh data di atas dapat diturunkan tiga makna sebagai berikut.

a. Penggunaan preposisi *dengan* yang mendahului unsur yang diduga sebagai subjek berlebihan sehingga pernyataan itu dalam ragam tulis baku mestinya berbentuk sebagai berikut.

*Penambahan  $Na_2CO_3$  akan menghambat proses pengendapan dalam thickener.*

b. Ungkapan preposisi *dengan penambahan  $Na_2CO_3$*  bertindak sebagai keterangan alat. Jika demikian, kalimat itu dapat diubah sedemikian rupa sehingga pernyataan itu menjadi kalimat ragam tulis baku sebagai berikut.

*Dengan penambahan  $Na_2CO_3$  proses pengendapan dalam thickener akan terhambat.*

c. Penggunaan preposisi *dengan* dalam contoh data mengakibatkan pernyataan itu menjadi nonkalimat karena tidak mengandung unsur yang berfungsi sebagai subjek. Dalam kalimat baku tulis pernyataan itu dapat berbentuk sebagai berikut.

*Dengan penambahan  $Na_2CO_3$ , hasil percobaan itu akan menghambat proses pengendapan dalam thickener.*

Dalam pula halnya dengan contoh data yang tertera pada nomor 2), 3), 4), dan 5) berikut; semuanya merupakan nonkalimat.

2) *Bagi seorang peneliti, sebagai pedoman perbandingan, perlu berhubungan dengan yang telah dilakukan sebelumnya.* (Sj. Mj. 1975:1-2)

Pernyataan di atas dalam kalimat baku dapat diturunkan menjadi dua bentuk sebagai berikut.

- a. *Seorang peneliti, sebagai pedoman perbandingan perlu memperhatikan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.*
- b. *Bagi seorang peneliti, sebagai pedoman perbandingan, kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya perlu diperhatikan.*

3) *Dalam membicarakan perkembangan industri polimer di Indonesia terbatas pada industri polimer yang menggunakan bahan mentah kayu.* (KS. Hut. 1980:1)

Pernyataan di atas dalam kalimat ragam tulis baku dapat berbentuk sebagai berikut.

*Pembicaraan mengenai perkembangan industri polimer di Indonesia terbatas pada industri polimer yang menggunakan bahan mentah kayu.*

4) *Mengenai jumlah warga desa yang memiliki perabotan berupa meja/kursi tamu di desa pantai lebih besar dari pada di desa pedalaman.* (AS. Sos. 1977:74)

Pernyataan di atas dalam kalimat ragam tulis baku dapat diturunkan menjadi dua bentuk sebagai berikut.

- a. *Jumlah warga desa yang memiliki perabotan berupa meja dan kursi tamu yang tinggal di desa lebih besar daripada yang tinggal di pedalaman.*
- b. *Sehubungan dengan warga desa yang memiliki perabotan berupa meja dan atau kursi tamu, jumlah warga yang tinggal di desa lebih besar daripada yang tinggal di pedalaman.*

5) *Untuk membiarkan kota tumbuh tanpa batas adalah kurang bijaksana.* (PN. Sos. 1978:60)

Pernyataan di atas dalam kalimat baku berbentuk sebagai berikut.

*Membiarkan kota tumbuh tanpa batas kurang bijaksana.*

## 6. Pernyataan yang Dimulai dengan Kata Hubung Setara

Pernyataan yang dimulai dengan kata hubung setara *dan*, *atau*, *tetapi/tapi*, dan *sedang/sedangkan* tampak dalam contoh data sebagai berikut.

1) *Dan unit-unit yang kecil tersebut, lebih mudah untuk dibawa, didaerah-daerah yang sukar dicapai.* (IT. Fsk. 1980:17)

Pernyataan di atas dimulai atau didahului oleh kata *dan* yang berfungsi sebagai kata hubung intrakalimat. Sesuai dengan fungsinya dalam kalimat,

kata hubung adalah kata yang menghubungkan dua bentuk yang setara dan sejenis di dalam sebuah kalimat. Dalam contoh data di atas kata hubung *dan* berfungsi sebagai penghubung kalimat majemuk setara rapatan. Dengan demikian, pernyataan contoh data di atas merupakan bagian kalimat majemuk setara. Oleh karena itu, pernyataan itu merupakan nonkalimat. Dalam kalimat baku tulis pernyataan itu dapat berbentuk sebagai berikut.

*Unit-unit itu kecil dan lebih mudah dibawa di daerah-daerah yang sukar dicapai.*

2) *Atau pada waktu bertutur dengan ragam bahasa formal tiba-tiba diselipkannya ragam bahasa informal.*

Pernyataan di atas juga merupakan nonkalimat karena pernyataan itu merupakan bagian kalimat majemuk setara rapatan. Dalam kalimat tulis baku dapat berbentuk sebagai berikut.

*Orang itu cenderung menggunakan kata-kata asing atau pada waktu bertutur dengan ragam formal tiba-tiba diselipkannya ragam bahasa informal.*

3) *Sedang yang disebut pasar Batu Ceper adalah pasar desa yang terletak di seberang pasar Tanah Tinggi.* (P. Sos. 1978:75)

Pernyataan di atas adalah nonkalimat karena merupakan bagian kalimat majemuk setara berlawanan yang terikat kepada pernyataan sebelumnya yang berfungsi sebagai bagian kalimat majemuk setara itu. Dalam kalimat ragam tulis baku ia dapat berbentuk sebagai berikut.

*Pasar Blok M terletak di Jakarta Selatan, sedangkan yang disebut pasar Batu Ceper adalah pasar yang terletak di seberang pasar Tanah Tinggi.*

4) *Tetapi, sekarang ini jumlah ilmuwan yang bekerja menyendiri semakin berkurang.* (SSD. Sos. 1978:64)

Pernyataan di atas merupakan nonkalimat. Dalam kalimat ragam tulis baku dapat diturunkan dua makna berikut.

a. Pernyataan itu merupakan bagian kalimat majemuk setara berlawanan yang dihubungkan oleh ungkapan penghubung intrakalimat *tetapi* sehingga dalam ragam tulis baku ia dapat berbentuk sebagai berikut.

*Kita memerlukan ilmuwan yang mampu bekerja sendiri, tetapi sekarang ini jumlah ilmuwan yang bekerja sendiri semakin berkurang.*

b. Pernyataan itu merupakan kalimat yang dihubungkan oleh ungkapan penghubung antarkalimat *akan tetapi*. Sesuai dengan fungsinya sebagai ungkapan penghubung antarkalimat, ungkapan penghubung *akan tetapi* tidak dipakai di tengah kalimat atau pada awal paragraf baru sehingga dalam ragam tulis baku pernyataan itu dapat berbentuk sebagai berikut.

*... Akan tetapi, sekarang ini jumlah ilmuwan yang bekerja sendiri semakin berkurang.*

## Penutup

Berdasarkan data yang dianalisis itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian ragam tulis ilmiah bahasa Indonesia merupakan pencampurbauran ragam lisan dan ragam tulis bahasa Indonesia. Sebagai akibatnya, sebagian ragam tulis bahasa Indonesia tidak memenuhi syarat ragam tulis baku. Ketidakbakuannya itu disebabkan oleh ketidaklengkapan syarat minimum sintaksis bahasa Indonesia baku tulis.

Di samping ketidaklengkapan syarat minimum sintaksis, terdapat pula ketidaktepatan penggunaan ejaan seperti penulisan dengan kata depan *di* dan *ke*, yang masih dituliskan serangkaian dengan kata yang mengikutinya, penggunaan huruf kapital sehubungan dengan jenis sesuatu dan sesuatu yang dianggap penting, istilah atau kata-kata asing yang tidak digarisbawahi, penggunaan tanda baca, terutama tanda koma sebelum unsur-unsur kalimat langsung, serta bentuk dan pilihan kata.

Hal-hal yang dikemukakan di atas memberikan kesan yang kuat bahwa para penulis kita memerlukan latihan menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S.T. 1977. *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Bloomfield, L. 1953. *Language*. New York: Holt-Rinehart and Winston.
- Dittmar, Norbert. 1976. *Sociolinguistics: A Critical Survey of Theory and Application*. London: Edward Arnold Ltd.
- Halim, Amran. 1979. "Faktor Sosial Budaya dalam Pembakuan Bahasa Indonesia". Pidato Dies Natalis XIX. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- , 1981. "Bahasa Indonesia Baku". Kertas Kerja dalam Pertemuan Bahasa dan Sastra dalam rangka Peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda ke-53. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Hockett, Ch. F. 1958. *A Course in Modern Linguistics*. New York: The Mac-Millan and Co.
- Johannes, H. 1978. "Gaya Bahasa Keilmuan". Kertas Kerja Kongres Bahasa Indonesia III. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Keraf, Gorys. 1977. *Komposisi*. Ende-Flores: Nusa Indah.
- , 1978. *Tatabahasa Indonesia*. Cetakan VI. Ende-Flores: Nusa Indah.
- Lumintang, Yayah B. 1980. "Pola Pemakaian Bahasa Perkawinan Campuran Jawa-Sunda di DKI Jaya". Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1981. "Bahasa Indonesia: Pola Kalimat Ragam Tulis Fungsional". Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Lyons, C.A. 1969. *Tatabahasa dan Kalimat*. Kuala Lumpur: Singapura University of Malaya Press.
- Moeliono, A.M. "Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa". Disertasi Jakarta: Universitas Indonesia.

- Poerwadarminta, W.J.S. 1967. *ABC Karang Mengarang*. Yogya: UP Indonesia.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1976. "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan". Dalam *Pengajaran Bahasa Sastra*. Thn. I. No. 4.

## PENGINDONESIAAN ISTILAH OLAHRAGA (Kasus Majalah Sportif)

Asvi Warman Adam

LRKN (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

### Pendahuluan

Mulai tahun ini, 9 September dijadikan "Hari Olahraga Nasional". Penetapan tersebut memperlihatkan kemantapan tekad pemerintah untuk menggalakkan bidang ini di tanah air. Sebelumnya telah sering didengung-dengungkan semboyan "memasyarakatkan olahraga dan ...."

Apabila olahraga telah berhasil tersebar luas, pelbagai persoalan pun akan menanti. Antara lain menyangkut peristilahan dalam sektor ini. Jenis olahraga yang beredar di Indonesia kebanyakan berasal dari mancanegara. Oleh karena itu, istilah-istilahnya pun masih dalam bahasa asing.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sebagai lembaga yang berwenang, telah mencoba mengumpulkan dan mengindonesiakan istilah-istilah olahraga tersebut yang kebanyakan bersumber dari bahasa Inggris. Bekerja sama dengan KONI Pusat, badan ini telah menggarap sebuah kamus olahraga. Secara perorangan pun, Drs. A. Banta dari Bidang Perkamusan dan Peristilahan pada instansi yang sama telah menyusun *Daftar Istilah Olahraga* (Juni, 1981). Pihak swasta juga tak mau ketinggalan. Ratas WS bersama empat rekannya menerbitkan *Kamus Lengkap Olahraga* yang ternyata "belum lengkap" (Desember, 1979). Di samping itu, ketiga gubahan tersebut masih memiliki berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Ternyata pula pada pedoman yang dikeluarkan Pusat Bahasa terlihat haluan untuk menunda pengindonesiaan istilah olahraga yang berasal dari

bahasa asing ini. Istilah itu dicomot utuh dan dilafalkan seperti dalam bahasa aslinya, misalnya *shuttle cock* (PUPI, 1975:26). Hal ini disebabkan istilah tersebut mungkin bersifat internasional atau belum diketemukan padanannya dalam bahasa Indonesia (Soekesi dkk, 1978:43). *Bridge, smach, hook, back-hand, hockey*, dan *outside* termasuk dalam golongan di atas.

Sementara itu kalangan pers sebagai salah satu pihak yang berkepentingan terhadap "komoditi" istilah tersebut untuk dipasarkan kepada para pembaca, jelas tak sabar menunggu. Setiap hari, minggu, dan bulan, artikel dan laporan olahraga mesti terbit. Oleh karena itu, timbullah persoalan, istilah apa dan bagaimana yang akan dipakai?

*Sportif* sebagai salah satu majalah olahraga nasional telah mencoba mencari jalan ke luar dari kesulitan ini dengan melakukan berbagai ikhtiar. Berbagai upaya sudah dilaksanakan seperti menghubungi Pusat Bahasa dan mengundang Anton Moeliono dan A. Latief untuk berbincang-bincang mengenai "bahasa olahraga" di depan wartawan *Sportif* dan Siwo PWI Jaya, Desember 1981. Materi ceramah tak tertulis tersebut ditambah beberapa kamus olahraga yang ada (dalam bahasa Inggris) dipergunakan sebagai bekal dalam menanggulangi masalah ini.

Tulisan ini menggambarkan tindakan yang dilakukan dalam mengindonesiakan istilah olahraga selama kami jadi pengelola majalah tersebut (1981 sampai dengan medio 1983). Sebelumnya beberapa gagasan diketengahkan di sini secara eklektis sebagai latar belakang teoritis mendukung penyajian makalah ini.

### Pentingnya Pengalihan Istilah

Olahraga dewasa ini tidak saja bersifat nasional, tetapi juga sudah mencakup kegiatan antarbangsa. Suatu cabang olahraga dimainkan di suatu negara, dipertandingkan pula di kawasan dan benua lain. Selain itu, juga ada pertarungan olahraga sejangat, misalnya olimpiade yang tahun 1984 mendatang akan diselenggarakan di Los Angeles, AS.

Dalam rubrik olahraga di surat kabar di Indonesia tentulah peristiwa akbar seperti olimpiade LA itu tak lepas dari jangkauan liputan. Selain mengiriskan reporter ke sana, pengasuh media massa di tanah air niscaya sibuk mengindonesiakan reportase pesta olahraga dunia itu dari kantor berita/media massa asing.

Sebagai telah diungkapkan di atas, teks yang diterjemahkan atau dijadikan sumber itu umumnya dalam bahasa Inggris dan, tentunya, dipenuhi istilah yang terdapat dalam bahasa asing tersebut. Di sini terjadilah kontak bahasa karena dua bahasa (unsur bahasa) dipergunakan silih berganti oleh pemakai yang sama (Wienreich, 1967:1). Risiko dari kontak bahasa adalah

timbulnya interferensi, yaitu penggunaan unsur bahasa lain oleh bahasawan yang bilingual secara individual dalam suatu bahasa, ciri-ciri bahasa lain itu masih kentara (Kridalaksana, 1982:66). Penggunaan istilah *shuttle cock* tadi dalam reportase bulutangkis kiranya dapat dipandang sebagai gejala interferensi.

### Ciri-ciri Istilah

Istilah adalah "kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu" (Kridalaksana, 1982:67), sedangkan pengertian kata dapat dijelaskan dengan mengutip Bloomfield seperti dilakukan Soekesi dkk. (1978:31) sebagai berikut. Kata merupakan satu morfem bebas yang dapat digunakan untuk membangun sebuah kalimat. Jadi, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kata-kata adalah satuan terkecil dari suatu ujaran atau kalimat yang berupa morfem bebas atau bentuk kompleks'. Perbendaharaan kata suatu bahasa disebut leksikon, kata sifatnya adalah leksikal.

Sebagai suatu unsur bahasa, istilah memiliki dua dimensi, yaitu ungkapan istilah dan makna istilah. Berikut ini akan diterangkan ciri-ciri istilah, yang membedakannya dari unsur bahasa yang lain (Kridalaksana, 1978:53).

1. Dari dimensi makna
  - a. Hubungan antara ungkapan dan makna tetap tegas (monosemantis).
  - b. Istilah itu secara gramatikal bersifat "mandiri" alias *bebas konteks*. Maksudnya, makna tidak bergantung dari konteks kalimat.
  - c. Makna dapat dinyatakan dengan definisi atau rumus dalam bidang yang bersangkutan.
2. Dari dimensi ungkapan
  - a. Istilah itu dapat berupa kata benda, kata kerja, atau kata sifat.
  - b. Bangun istilah sepadan dengan kata tunggal, misalnya *raket*; kata majemuk, misalnya *tendangan penjur*; kata bersambungan, misalnya *kejuaraan*; kata ulang, misalnya *gonta-ganti (home and away)*; fras misalnya *pemusatan latihan nasional*.

Istilah selalu berkembang dari waktu ke waktu. Unsur ini termasuk dalam sistem terbuka (*liste ouverte*) (Martinet, 1970:19–20). Kebutuhan baru timbul setiap saat, dan ketika itu pula dibutuhkan rujukan atau penamaan terhadap tindakan/gagasan tersebut. Ketika pertandingan beladiri masih dilakukan dengan pukulan/tendangan langsung belum dikenal istilah *pelindung rasa (body protector)*. Tatkala dianggap perlu alat semacam itu untuk melindungi tubuh sesama atlet yang berlaga, diciptakanlah sarana tersebut sekaligus dengan namanya.

Sebaliknya dikenal pula *sistem tertutup/terbatas (liste fermee)* yang

terdiri dari morfem terikat (prefiks = awalan, infiks = sisipan, dan sufiks = akhiran) dan seperangkat kaidah gramatikal (Soekesi, 1978:1). Unsur sistem tertutup ini berjumlah batas, sedangkan elemen sistem terbuka tidak terhingga banyaknya karena kata/istilah itu senantiasa berkembang dari masa ke masa sekalipun ada pejabat yang alergi terhadap istilah tersebut.

### Neologi

Neologi adalah munculnya suatu unsur leksikal baru dalam suatu bahasa. Timbulnya unsur leksikal baru itu diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan sosial dan cara berpikir masyarakat (Guilbert, 1975:15). Selanjutnya Guilbert menyetengahkan proses pembentukan unsur leksikal baru itu yang terdiri dua periode:

- a. tahap produksi, saat penciptaan suatu unsur leksikal baru;
- b. tahap penerimaan, unsur leksikal baru itu telah diterima dan digunakan oleh masyarakat.

Selain dari neologi yang berasal dari bahasa sendiri, juga ada neologi pinjaman. Maksudnya, unsur leksikal baru itu timbul melalui peminjaman — tanpa bunga — dari bahasa daerah atau bahasa asing. Alasan "berhutang" itu adalah:

- (a) tidak adanya kata dalam bahasa sendiri yang merujuk kepada konsep/barang yang dimaksud;
- (b) kata/istilah dalam bahasa sendiri dirasa kurang klop dan kurang mantap;
- (c) penolakan dari kelompok masyarakat tertentu terhadap istilah/kata dalam bahasa sendiri yang diciptakan kemudian karena mereka — merasa cocok — terlanjur menerima istilah asing yang diperkenalkan lebih dulu. (Guilbert, 1975:93–95).

Linguis lain, Hockett (1958:404–405) membedakan dua motivasi peminjam kosakata tersebut.

#### (a) Motifasi Pengisian Kebutuhan

Setiap kali timbul hal baru dalam masyarakat, anggota masyarakat perlu mencari kata baru yang mengacu kepada hal tersebut. Bila suatu masyarakat bahasa menerima hasil kebudayaan bangsa lain, tidak saja barang/paham saja yang diperoleh juga sekaligus nama barang tersebut.

#### (b) Motifasi Prestise

Jika suatu bangsa lain dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju, modern, hebat, menakjubkan, orang pun mencoba mengidentifikasi dirinya termasuk warga bangsa asing tersebut, misalnya dengan memakai istilah "cas-cis-cus" itu.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa alasan (a) Guilbert sejalan dengan (a) Hockett. Begitu pula (b) Hockett senada dengan (b) dan (c) Guilbert.

Mirip dengan proses pembentukan leksikal (dalam bahasa sendiri), proses neologi pinjaman juga terdiri dari dua tahap berikut ini:

**a. Xenisme**

Sebuah kata asing pertama kali masuk dalam bahasa sendiri dengan mempertahankan bentuk dan maknanya, misalnya *baseball*.

**b. Peregrinisme**

Kata yang berasal dari bahasa asing itu telah diterima baik benda maupun konsepnya. Contoh: raket (*racket*).

### Prosedur Pembentukan Istilah

Menurut Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI) ada 7 langkah yang dapat diambil secara berurutan dalam membentuk istilah. Langkah itu terdiri dari enam pilihan dan diakhiri dengan penetapan yang terbaik dari enam kemungkinan tersebut dengan prioritas pada urutan yang lebih awal. Keenam kemungkinan itu berturut-turut adalah (1) kata yang lazim dalam bahasa Indonesia (3) kata dalam bahasa serumpun (4) kata tak lazim dalam bahasa serumpun (5) kata dalam bahasa Inggris dan (6) kata dalam bahasa asing lain. Dalam memilih istilah yang berasal dari bahasa Indonesia atau bahasa serumpun ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu ungkapan tersebut (a) paling singkat, (b) maknanya tidak menyimpang, (c) tidak berkonotasi buruk, dan (d) sedap didengar).

Dalam pembentukan istilah olahraga di Indonesia yang lazim dilakukan adalah langkah kelima yaitu memungut dari bahasa Inggris. Langkah ini dapat diajarkan sebagai berikut: penyerapan tanpa perubahan, penyerapan dengan penyesuaian ejaan dan lafal, serta penerjemahan. Sehubungan dengan itu, dituntut pula empat syarat pada ungkapan asing tersebut yaitu (a) lebih cocok (b) lebih singkat (c) memudahkan pengalihan antarbahasa, dan (d) memudahkan kesepakatan.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa tidak ada istilah olahraga yang diciptakan dari bahasa Indonesia dan/atau bahasa serumpun. Ambillah contoh *tekong* dalam *sepaktakrau*. Sebutan itu mengacu pada pemain yang menduduki posisi terdepan dalam regu sepaktakrau. Di belakangnya, pada kiri dan kanan terdapat 2 atlet lagi yang disebut *apit kiri* dan *apit kanan*. Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia gubahan Poerwadarminta (1976:1034) kata *tekong* itu dikatakan berasal dari bahasa Cina yang berarti 'nakhoda (pada jung)'. Makna kata tersebut kiranya sejalan dengan posisi dan fungsi pemain ini. Mungkin yang jadi masalah, benarkah istilah itu berasal dari

bahasa Cina? Bukan dari bahasa Malaysia? Atau dari bahasa Melayu Riau atau Makasar/Bugis (di negara kita, selain dari DKI, propinsi yang unggul dalam cabang olahraga ini adalah Riau dan Sulawesi Selatan). Ini bila jadi "PR" bagi linguist diakronis.

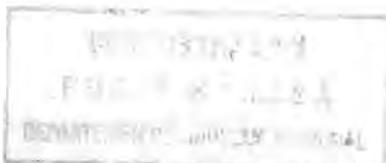
### Pembentukan Istilah Olahraga di Majalah Sportif

Uraian berikut ini berupa laporan dari kegiatan yang telah dilakukan, yang sedang dikerjakan serta yang belum terlaksana di majalah *Sportif*. Untuk memudahkan penjelasan, istilah itu dikelompokkan atas lima bagian: (1) nama cabang olahraga, (2) sebutan atlet atau posisi atlet, (3) alat/arena pertandingan, (4) istilah teknis (gerakan dalam pertandingan), 5) dan lain-lain.

#### 1. Nama Cabang Olahraga

Kami telah membaca "membakukan" nama semua cabang olahraga yang pernah dilaporkan di majalah *Sportif*. Ikhtiar ini tidak berhasil 100% karena ada istilah yang sulit diterjemahkan atau diserap dengan perubahan lafal/ejaan, misalnya *bridge*. Di bawah ini dapat Anda baca daftar cabang olahraga tersebut.

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1) dayung                  |                          |
| 2) selam                   |                          |
| 3) layar                   |                          |
| 4) selancar                | Olahraga perairan/bahari |
| 5) selancar angin          |                          |
| 6) ski air                 |                          |
| 7) terjun payung           |                          |
| 8) terbang layang          |                          |
| 9) aeromodelling           | Olahraga dirgantara      |
| 10) layang gantung/gantole |                          |
| 11) radiokontrol           |                          |
| 12) karate                 |                          |
| 13) silat                  |                          |
| 14) judo                   |                          |
| 15) kempo                  | Olahraga beladiri        |
| 16) taekwondo              |                          |
| 17) gulat                  |                          |
| 18) tinju                  |                          |
| 19) catur                  |                          |
| 29) bridge                 | Olahraga "otak"          |



- |                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 21) sepakbola                       |                                                                    |
| 22) bolavoli                        |                                                                    |
| 23) bolabasket                      | Olahraga regu                                                      |
| 24) hoki                            |                                                                    |
| 25) tenismeja                       |                                                                    |
| 26) tenis                           |                                                                    |
| 27) bulutangkis                     |                                                                    |
| 28) sepaktakrau                     |                                                                    |
| 29) drumband                        | Olahraga regu                                                      |
| 30) softball                        |                                                                    |
| 31) baseball                        |                                                                    |
| 32) tembak                          |                                                                    |
| 33) panah                           |                                                                    |
| 34) anggar                          | Olahraga sasaran                                                   |
| 35) bilyar                          |                                                                    |
| 36) boling                          |                                                                    |
| 37) golf                            |                                                                    |
| 38) atletik (lari, lompat, lembar)  |                                                                    |
| 39) sepaturoda                      |                                                                    |
| 40) senam                           | Olahraga rekor (tercepat, tertinggi, terjauh, terbanyak, terberat) |
| 41) binaraga/angkatbesi/angkatberat |                                                                    |
| 42) balapsepeda                     |                                                                    |
| 43) renang/loncatindah/poloair      |                                                                    |
| 44) berkuda                         |                                                                    |
| 45) balapmobil                      |                                                                    |
| 46) balapmotor                      | Olahraga sarana/olahraga mekanik                                   |
| 47) motorcross                      |                                                                    |
| 48) reli                            |                                                                    |

Pembagian cabang olahraga itu lebih bersifat praktis dengan perhitungan olahraga segolongan akan banyak memiliki istilah serupa. Klasifikasi ini tidaklah terlalu ketat, masih ada kemungkinan pembagian yang lain. Diakui pula bahwa pembedaan ini masih mengandung hal yang masih dapat dipersempikan.

Terlepas dari masalah tersebut, yang jelas hampir semua cabang itu telah berhasil diindonesiakan, diterjemahkan atau diserap dengan penyesuaian ejaan atau lafal. Yang masih dipertahankan utuh adalah *softball*, *baseball*, *golf*, *bridge*, dan *drumband*. Hal itu disebabkan belum ditemukannya istilah Indonesiannya yang tepat. Tahukah Anda padanan yang cocok untuk *bridge*? Olahraga itu sendiri seperti *baseball* atau *softball* belum populer di masyarakat. Begitu pula *golf*, yang dimainkan segelintir elite. *Drumband* yang digan-

drungi siswi-siswi Tarakanita dan Al Azhar itu masih dieja dengan lafal asing.

Alasan lain bagi kami untuk tidak memprioritaskan pengindonesiaan istilah itu sederhana saja. Kata-kata tersebut relatif tidak sering muncul dalam rubrik olahraga dibandingkan dengan sepakbola, bolavoli atau tenis, misalnya.

Istilah *volley*, *hockey*, *rally* diserap dengan menyesuaikan ejaannya menjadi voli, hoki, dan reli. Konsonan *d* pada *bilyard* dicopot, tetapi *t* pada *start* tetap dipertahankan agar tidak menimbulkan keracuan dengan *start* 'bintang' (*finish* telah diubah jadi finis).

Yang menarik adalah sebuah turnamen olahraga internasional — cuma diikuti 4 negara — di Jakarta Maret 1983. Bukan karena nama-nama besar di seputar kejuaraan itu (memperebutkan piala Presiden Soeharto, Ketua Panitia Penyelenggara Menteri Pariwisata dan Postel, penggunting pita Ny. Tien Soeharto, dan penutupan turnamen oleh Menteri Kordinator Polkam). Bukan pula karena paling sedikit dua bintang film ikut bertarung yaitu Vivi Sumanti dan Cok Simbara. Yang menjadi berita, tak kurang dari Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, A. Tahir telah mencanangkan sebuah nama untuk olahraga yang selama ini disebut *bowling*. Istilah yang diperkenalkan adalah *bola gelinding* yang disingkat *boling*. Apa anehnya *bowling* berubah jadi *boling*? Keunikannya adalah proses penciptaan istilah itu melalui penerjemahan dan kemudian langsung diikuti dengan akronimisasi!

Dalam ceramah bulan Desember 1981, Anton Moeliono telah mengusulkan nama *bola pancang* atau *bola pin* untuk olahraga ini (dalam Kamus Inggris—Indonesia Echols—Shadily, 1975:77' selain *bola pancang* juga dipakai istilah *bola guling*). Usulan yang diajukan tampaknya kurang mendapat sambutan. Begitu pula dengan rencana kami untuk menghilangkan *w* dalam istilah *bowling* sehingga hanya ditulis *boling* karena *w* tidak dilafalkan orang Indonesia. Tiba-tiba sekarang istilah *boling* itu jadi diterima; apakah karena yang menciptakannya Pak Menteri? Bukan itu alasannya, menurut hemat kami. *Boling* adalah singkatan dari *bola gelinding*. *Bola gelinding* sedap terdengar oleh telinga dan absah. Alhasil, perpaduan antara kesedapan dan-mode ini membuat istilah *boling* berhasil masuk khasanah leksikon olahraga nasional.

Istilah *sepakbola* ditulis serangkai, karena gabungan kata itu dianggap satu kata seperti halnya *mata hari* telah ditulis *matahari* (PUEBIYD, 1975: 21). Begitu pula dengan *bulutangkis*, *bolabasket*. Menurut hemat kami perangkaian ini tidak merusak pen "sistem" an istilah, misalnya dengan menampilkan rumus bola + x (basket, voli, keranjang, gelinding, ...) yang kedua unsurnya (bola dan x) ditulis terpisah. Masing-masing cabang olahraga telah menjadi suatu kesatuan yang utuh sehingga namanya pun ditulis serangkai.

## 2. Sebutan Atlet dan Posisi Atlet

Atlet yang menggeluti suatu jenis olahraga disebut dengan menambah-

kan prefiks *pe* di depan cabang olahraga tersebut misalnya *petenis*, *pelari*, *petinju*, untuk istilah yang terdiri dari dua suku kata, prosedur ini terterima. Akan tetapi, proses ini kurang "lancar" untuk istilah yang lebih dari dua suku kata seperti *peselancarangin*. *Pebolabasket* kurang pas di telinga. Lagi pula *pe* seyogyanya mengalami persengauan bila ditaruh di depan kata yang diawali dengan konsonan *p*, misalnya *pembina*, *pembantu*, *pembuat* (bukan *pebuat*). Itulah sebabnya masih dipakai istilah atlet atau pemain (*atlet selancarangin*, *pemain sepakbola*). Kemungkinan lain ialah memakai sufiks *wan/wati*, misalnya *binaragawan*, *anggarwati*. Bukanlah istilah yang terakhir ini (*anggarwati*) elok di mata dan sedap di telinga.

Untuk olahraga beladiri impor (Jepang dan Korea) dipakai imbuhan/istilah yang berasal dari negara aslinya seperti *karateka*, *Judoka*, *Khensi* (*kempo*), dan *taekwondoin*. Kami kurang menganjurkan pemakaian istilah *pejudo*.

Di tengah lapangan atlet itu mempunyai sebutan tersendiri sesuai dengan posisi dan tugasnya. Pada sepakbola, misalnya, terdapat *kiper* alias *penjaga gawang*, *penyerang*, dan *gelandang*. Apakah istilah *back* masih dipertahankan ejaannya atau ditulis *bek*? Kami sendiri mengusulkan istilah *belakang*, misalnya *kiri-belakang* sebagai pengganti *back kiri*. Bukankah selama ini telah terterima istilah *kiri luar* dan *kiri dalam*. Dalam *softball/baseball*, istilah *pitcher* dan *catcher* belum ditemukan padanannya dan agaknya tidak mudah ditemukan. Pada cabang bolavoli, *tosser* telah dialihkan menjadi *pengumpan*.

### 3. Lapangan dan Alat

Tidak dijumpai kesulitan dalam mengalihkan istilah tempat pertandingan (mungkin karena jumlah istilahnya juga terbatas). Kita kenal *ring*, *lapangan*, *sirkuit*, *kolam*, *arena*, *gelanggang*, *velodrom*, *lintasan* (sepatoroda), dan lain-lainnya. Yang agak merepotkan adalah peristilahan untuk alat yang dipakai dalam permainan/olahraga tersebut. Untuk bulutangkis, tenis dipakai *raket*, tetapi untuk tenismeja masih dipergunakan *bat*. Pada pegolf tentunya memiliki *club*, yakni seperangkat *stick* 'tongkat pemukul' — yang harganya jutaan rupiah.

Istilah yang lebih sering muncul adalah *shuttle cock* pada olahraga —satu-satunya— yang menjadi kebanggaan kita pada tingkat dunia. Pernah dipakai *kok*, tapi kurang klop. Maestro bulutangkis Rudi Hartono dalam serial petunjuk teknisnya di majalah *Sportif* tanpa ragu-ragu telah memakai *bola* untuk mengacu kepada benda tersebut. Kami sendiri menganjurkan pemakaian istilah *bulu*. Bukankah pada permainan bulutangkis yang dipukul dan ditangkis adalah bulu?

#### 4. Istilah Teknis

Kategori inilah yang paling banyak ditemui, yang sebagian besar masih dalam bahasa asing. Yang telah diindonesiakan misalnya *smes* (*smash*). Istilah teknis dalam golf umumnya belum dialihkan, seperti *handicap*, *putting*, dan *green*. Pada cabang sepakbola pun belum semua istilah diterjemahkan, seperti seuntai gerakan: *passing*, *moving*, *dribbling*, (*giring*), *shooting* (*tembak*), *heading* (*sundul*), *tackling*. Terhadap istilah semacam ini ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan, antara lain, tetap dipertahankan utuh lafal dan ejaan, atau dijelaskan dengan parafrasa. Lalu *off-side*, apa pula itu? Anda mungkin tahu maksudnya, tapi apa istilah Indonesianya.

Dalam hal ini bagaimana garis haluan (*policy*) majalah *Sportif*? Prioritas diberikan kepada olahraga populer atau yang sepatutnya populer. Istilah pada cabang-cabang olahraga itulah yang perlu digarap terlebih dahulu.

#### 5. Lain-lain

Selain dari pemain dan wasit ada lagi unsur yang aktif dalam suatu pertandingan yakni *supporter*. Jika diterjemahkan *pendukung*, agaknya kurang mantap, dialihkan *penyorak* terlalu berlebihan. Jalan ke luarnya ialah dengan mengindonesiakan istilah itu dengan *suporter*.

Pihak lain yang juga berperan dalam olahraga adalah *team manager*. Istilah *tim manajer* atau *tim manager* seperti yang sering dipakai di media masa jelaslah menyalahi kaidah bahasa Indonesia (Hukum DM). Ungkapan yang tepat ialah *manajer tim* atau *manajer regu*. Untuk cabang sepakbola yang barisan pemainnya disebut *kesebelasan*, tidak cocoklah istilah *manajer regu sepakbola*. Kami lebih cenderung mengalihkan *team manager* tersebut dengan kata *manager* saja.

Masih ada lagi orang di belakang layar yang pantas ditampilkan, yaitu *coach* dan *trainer*. Bagi orang awam mungkin kedua istilah itu sama saja artinya. Sesungguhnya sebagian komponen makna kedua kata tersebut berbeda; *coach* adalah *pelatih teknis* sedangkan *trainer* lebih tepat disebut *pelatih fisik*.

Pada wacana di atas telah disinggung tentang nuansa makna. Kasus serupa juga terlihat pada sederetan istilah: *kejuaraan*, *kejurnas*, *kejurda*, *pekan olahraga*, *turnamen*, *eksebis*, *kejuaraan terbuka* (*open*), *grand prix*, *tour* (*tour de Jawa*), *pesta olahraga* (*games*), *olimpiade*, *Piala Ibu Anu* (*Lady Anus' Cup*), *pertandingan*, *permainan*, *eliminasi*, *sekian besar*.

Sekarang timbul pertanyaan, siapa yang paling "menentukan" dalam sebuah pertandingan? Tak lain dari *pemimpin pertandingan* atau *wasit* atau *juri*. Dalam sepakbola, seorang *wasit* didampingi oleh dua orang *hakim garis*. Apakah istilah hakim garis ini sudah tepat, apakah tidak lebih baik *wasit bantu*?

Padanan yang tepat untuk *rubber set* dan *straight set* belum kami

temukan. Sebaliknya, *runner-up* yang sudah jelas *juara II*, masih sering muncul dalam bahasa aslinya.

Yang patut dicatat juga adalah penemuan (kembali) istilah *peringkat*. Kata yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Poerwadarminta (1976: 739) telah "disalib" itu dibangkitkan kembali. Dalam catur, penggunaan istilah ini tepat sekali, artinya tidak harus selalu sama dengan nomor. Misalnya, Utut Adiyana dalam sebuah turnamen internasional berhasil menduduki *peringkat* kedua. Tidak berarti ini identik dengan "nomor dua". Sering terjadi dalam olahraga tersebut, pemain yang berbeda pada suatu *peringkat* terdiri dari beberapa orang. Penentuan urutan juara di antara atlet catur yang memperoleh *nilai (point)* sama itu dilakukan dengan perhitungan Solkoff atau Sonneborn Berger.

### Kesimpulan

Pembentukan istilah olahraga, yang antara lain dijalankan dengan penjeremahan atau penyerapan istilah, sudah waktunya untuk dilaksanakan dengan lebih giat dan terarah. Kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Menpora, KONI, dan mediamasa yang terlibat langsung dalam "pemasaran" istilah olahraga ini perlu ditumbuhkan atau dijalin lebih erat lagi.

Proses penciptaan istilah olahraga itu dikerjakan secara bertahap. Prioritas diberikan terlebih dahulu pada cabang yang sudah populer, seperti sepakbola, bulutangkis, dan bolavoli. Setelah itu, menyusul jenis olahraga yang sepatutnya populer, sesuai dengan kondisi geografis tanahair kita, yaitu olahraga bahari. Permainan tingkat tinggi seperti golf tidak usahlah segera digarap. Meski kita sadari kenyataan bahwa keberhasilan suatu istilah menyelusup dalam suatu masyarakat tergantung dari sikap dan penerimaan kelompok pemakai bahasa itu sendiri. Jika segelintir elite yang berjalan hilir-mudik di padang golf lebih senang memakai istilah asing, apa gunanya istilah cabang olahraga ini diindonesiakan. Dengan dilandasi semacam semangat "nasionalisme" kebijakan serupa kita lakukan terhadap olahraga beladiri impor (Jepang dan Korea). Justru *silat* yang kita utamakan penanganannya.

Dari karangan di atas terlihat jelas bahwa upaya pembentukan istilah olahraga Indonesia, yang merupakan bagian kecil dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa nasional, tidaklah berjalan dengan gampang. Perjuangan kalangan pers itu hanya berhasil jika dibantu dan disokong oleh semua pihak. "Pembangunan" dan "perawatan" bahasa Indonesia bukan hanya tugas dan tanggungjawab Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, melainkan kewajiban semua lembaga dan golongan. Seluruh lapisan masyarakat seyogianya diajak berpartisipasi dalam mengukuhkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai "Tuan di negeri sendiri".

## DAFTAR PUSTAKA

- Banta, A. 1981. *Daftar Istilah Olahraga*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Bloomfield, Leonard. 1961. *Language*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Echols, John M dan Hassan Shadily. 1977. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Gullbert, Luis. 1975. *La Creativitas Lexicale*. Paris: Larousse.
- Hockett, Charles F. 1958. *A Course in Modern Linguistics*. New Delhi: India Offset Press.
- Kridalaksana, Harimurti. 1978. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Ende: Nusa Indah.
- , 1982. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Mertinet, Andre. 1970. *Elements de Linguistique Generale*. Paris: Librairie Armand Colin.
- Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1975. *Pedoman Umum Ejaan Indonesia yang Disempurnakan*.
- , 1975. *Pedoman Pembentukan Istilah*. Jakarta.
- Ratal, Ws dkk. *Kamus Lengkap Olahraga*. Jakarta: CV Baru.
- Weinreich, Uriel. 1976. *Languages in Contact*. The Hague: Mouton.

## **KAMUS BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA PEMBAKUAN BAHASA SERTA SUMBER ACUAN PENGGUNAAN BAHASA YANG BAIK DAN BENAR**

**Adi Sunaryo**

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

### **Pendahuluan**

#### **Latar Belakang dan Masalah**

Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dan pendukung kebudayaan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi (Sunaryo, 1981; Slametmulyana, 1966). Perkembangan ilmu dan teknologi memungkinkan munculnya gagasan-gagasan baru beserta konsep-konsep pendukungnya sehingga terdapat pula kemungkinan munculnya kata/istilah baru dalam khazanah bahasa. Penambahan kosakata baru dalam khazanah bahasa itu menunjukkan bahwa bahasa itu mengalami perkembangan. Perkembangan ini dapat berupa dua kemungkinan, yaitu perkembangan yang menuju ke arah pemantapan kaidah, fungsi, dan kedudukan bahasa, atau mungkin justru sebaliknya. Sehubungan dengan itu, dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa, kebijaksanaan bahasa yang berencana, terarah, dan terperinci mengenai keseluruhan masalah kebahasaan perlu diadakan (Halim, 1976). Wujud kebijaksanaan bahasa ini bermacam-macam. Dalam kaitannya dengan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, pemerintah – dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan – telah mengeluarkan dua buah buku pedoman, yaitu *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (1975). Usaha lain, antara lain, ialah siaran pembinaan bahasa Indonesia melalui radio dan

televisi yang diselenggarakan oleh Direktorat Radio dan Direktorat Televisi bekerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Usaha ini memberikan dampak positif terhadap pembinaan bahasa Indonesia dengan sasaran utama masyarakat pemakai bahasa Indonesia. Sejalan dengan itu, usaha pengembangan bahasa Indonesia juga telah dilakukan, terutama dalam bidang peristilahan Indonesia, yaitu dengan menggali dan memanfaatkan unsur-unsur bahasa daerah dan bahasa asing yang telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia guna mengungkapkan konsep-konsep baru yang muncul yang tidak/belum tertampung dalam konsep makna yang dimiliki oleh kosakata bahasa Indonesia. Dengan demikian, kata-kata baru yang mendukung konsep-konsep baru itu akan memperkaya khazanah bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia dapat lebih mampu melangkah mengikuti laju perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan bahasa Indonesia ini patut kita sambut dengan rasa bangga. Namun, kita harus pula memikirkan langkah-langkah apa yang dapat kita tempuh guna melestarikan hasil swadaya bahasa ini. Salah satu usaha kebijaksanaan bahasa yang dapat kita lakukan dalam hal ini ialah mengodifikasikan unsur-unsur bahasa itu. Kodifikasi ini dapat menyangkut dua aspek yang penting, yaitu (1) bahasa menurut situasi pemakai dan pemakaiannya, dan (2) bahasa menurut strukturnya sebagai suatu sistem komunikasi. Kodifikasi yang pertama akan menghasilkan sejumlah ragam bahasa dan gaya bahasa, sedangkan kodifikasi yang kedua akan menghasilkan tata bahasa dan kosakata yang baku (Moeliono dalam Halim, 1976:29). Hasil kodifikasi kosakata yang baku, antara lain, dapat berupa kamus yang berisikan kosakata yang dianggap baku dengan contoh-contoh kalimat dalam bahasa yang baik dan benar. Kamus yang serupa ini dapat membantu pemakai bahasa yang ingin meningkatkan pemahaman serta kemampuannya dalam berbahasa dengan baik dan benar. Bahkan, bukan hanya dalam berbahasa, melainkan juga dalam pemilihan kata serta bentuk kata yang tepat untuk sebuah struktur kalimat yang baik benar. Selain itu, kamus dapat pula dipakai sebagai sumber acuan bagi suatu disiplin ilmu untuk mencari konsep-konsep makna yang tepat yang diperlukan dalam pembentukan istilah yang sejalan dengan arus perkembangan ilmu dan teknologi.

Pemakai bahasa dapat membuka-buka kamus untuk mencari konsep makna kata yang tepat untuk suatu konsep istilah dari bahasa lain. Dari sudut ini, kemungkinan sebuah kata dapat mengalami perkembangan makna sehingga memperkaya khazanah bahasa itu dengan konsep-konsep baru yang semula tidak ada menjadi ada atau semula tidak dipergunakan oleh masyarakat pemakainya menjadi muncul kembali dalam pemakaian bahasa. Dengan demikian, kamus yang seperti itu dapat dipakai sebagai sarana dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa serta dapat dipakai sebagai sumber acuan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar.

Masalah yang kita hadapi sehubungan dengan kenyataan yang saya kemukakan itu ialah kamus-kamus bahasa Indonesia. Adakah kemungkinan kamus bahasa Indonesia berperan sebagai sarana pembakuan bahasa serta sumber acuan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kamus bahasa Indonesia yang bagaimana yang dapat dianggap baik.

### Tujuan

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 dinyatakan bahwa bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. Sesuai dengan pernyataan itu, kodifikasi kosakata yang dipergunakan dalam situasi resmi akan memberikan panduan bagi pemakai bahasa Indonesia yang ingin meningkatkan kemampuan dan kesanggupannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam hal ini, ruang lingkup yang perlu digarap ialah bahasa Indonesia baku ragam tulis nasional karena bahasa Indonesia ragam tulis tidak terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, ragam tulis ini mencerminkan penggunaan/pemakaian bahasa Indonesia bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, kodifikasi bahasa Indonesia tulis ragam baku nasional, yang berupa kamus bahasa Indonesia baku, ini dapat berfungsi sebagai sarana dalam usaha pembakuan bahasa Indonesia serta sumber acuan bagi masyarakat pemakai bahasa Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sebagai sarana penunjang dalam usaha pembangunan nasional.

Atas dasar penalaran seperti yang telah saya kemukakan tadi serta sesuai dengan tema Kongres Bahasa Indonesia IV, yaitu dengan bahasa Indonesia kita sukseskan pembangunan nasional, penulisan kertas kerja ini bertujuan mengungkapkan fungsi dan peranan kamus bahasa Indonesia baku dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia serta peranan kamus bahasa Indonesia baku di dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional. Selain itu, di dalam kertas kerja ini, diusahakan pula memberikan gambaran mengenai wujud kamus yang baik untuk bahasa Indonesia sebagai salah satu perwujudan kebijaksanaan bahasa yang tertuang di dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

### Fungsi dan Peranan Kamus

Kamus bukanlah sekedar sebuah buku, tetapi merupakan hasil kodifikasi bahasa yang menyangkut segala aspek leksikal (Zgusta, 1971). Kamus bahasa Indonesia berfungsi sebagai petunjuk bagi masyarakat pemakai bahasa Indonesia untuk mengetahui seluk-beluk bahasa Indonesia dan sumber acuan yang dipakai sebagai pola anutan pemakaiannya, baik dalam segi ejaan, bentuk dan makna kata, serta struktur kalimat. Seberapa jauh fungsi itu dapat dipenuhi oleh sebuah kamus sangat tergantung pada tujuan dan sumber

data penyusunan kamus, yaitu untuk apa dan untuk siapa kamus itu disusun serta sumber data yang bagaimana yang dipilih sebagai masukan.

Dalam penentuan sumber data ini, ragam bahasa yang dipilih perlu mendapat pertimbangan sebelum kegiatan penyusunan dilaksanakan. Oleh karena itu, perencanaan yang mantap perlu dibuat karena hal ini akan menentukan mutu dan kegunaan kamus yang akan disusunnya. Dengan demikian, peranannya pun akan tampak di dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa. Begitu pula mengenai kamus bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia yang baik akan memberikan sumbangan yang positif dalam usaha pembinaan, pengembangan, dan pembakuan bahasa Indonesia yang sekaligus dapat menunjang pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu, kamus bahasa Indonesia perlu memiliki syarat-syarat sebagai berikut.

1. Entri yang dibuat di dalam kamus bahasa Indonesia adalah kosakata bahasa Indonesia yang memiliki ciri-ciri kebakuan.
2. Label-label, seperti label kelas kata, pembedangan kata, dan label-label lain yang dapat menunjang usaha pembinaan, pengembangan, dan pembakuan bahasa perlu diberikan pada setiap entri.
3. Batasan yang diberikan untuk setiap entri harus dapat memberikan kejelasan makna.
4. Batasan terhadap entri yang dimuat harus memiliki kesejajaran kategori gramatikal dengan entri yang diberi batasan.
5. Batasan yang dimuat harus menunjukkan ketepatan makna serta kecermatan bahasa.
6. Batasan entri harus dapat menggantikan kedudukan entri di dalam contoh pemakaian tanpa mengganggu struktur yang ada.
7. Contoh-contoh kalimat harus dapat mendukung makna entri. Hal ini berarti bahwa makna entri itu sudah dapat diketahui dari struktur yang ada.
8. Kaidah-kaidah ejaan harus diterapkan dalam penyusunan kamus sejauh tidak mengganggu kejelasan di dalam penyajiannya.
9. Kaidah-kaidah gramatikal harus mendapat perhatian dalam penyusunan kamus.
10. Petunjuk pemakaian kamus perlu dibuatkan sebagai pengantar dalam menggunakan kamus.

Berkaitan dengan kebijaksanaan bahasa yang dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983, Bab IV tentang Pola Umum Pelita IV mengenai Kebudayaan, yaitu "pembinaan dan pengembangan bahasa dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar", maka entri dan contoh-contoh

kalimat dalam kamus bahasa Indonesia harus mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan demikian, data masukan kamus dan contoh-contoh pemakaiannya dalam kalimat harus diambilkan dari sumber data pilihan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Kamus bahasa Indonesia yang baik, sebaiknya dapat berfungsi sebagai:

- 1) buku petunjuk mengenai cara-cara penulisan penyukuan kata;
- 2) buku petunjuk mengenai makna kata;
- 3) buku petunjuk mengenai pelafalan kata;
- 4) buku tata bahasa sederhana;
- 5) buku petunjuk mengenai pemakaian kata dalam kalimat dan pemakaian kata pada tingkat, bidang, daerah, tertentu;
- 6) buku sumber data yang dapat dipilih untuk dimanfaatkan;
- 7) kamus sinonim dan antonim;
- 8) kamus frasa, ungkapan, dan peribahasa;
- 9) kamus istilah; dan
- 10) buku sumber ilmu pengetahuan sederhana (Adiwimarta *et.al.*, 1978).

Oleh karena itu, kamus bahasa Indonesia harus berisikan informasi kebahasaan yang lengkap dengan disertai informasi yang berkaitan dengan etimologi, gramatikal, bidang pemakaian, dan informasi lain yang masih dipandang perlu untuk ditampilkan sebagai kelengkapan informasi. Kamus semacam ini memang ideal sekali. Namun, dalam perkembangan perkamusan di Indonesia dewasa ini, kamus yang dirancang dapat memiliki fungsi serta kelengkapan informasi yang semacam itu masih belum dapat diwujudkan karena penyusunannya memerlukan waktu yang cukup lama, pengarahannya tenaga yang terampil, penyediaan sarana dan prasarana yang cukup, serta penyediaan dana yang tidak sedikit jumlahnya.

### Kamus Bahasa Indonesia Baku

Tradisi perkamusan di Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang menunjukkan keadaan yang berbeda dengan tradisi perkamusan di negara-negara maju. Negara-negara maju, seperti Amerika memiliki *An American Dictionary of The English Language*; Belanda memiliki *van Dale Grootwoordenboek der Nederlandse Taal*; Prancis memiliki *Gand Larousse*. Kamus-kamus itu merupakan kamus standar atau kamus "besar" yang dapat dipakai sebagai sumber penyusunan bagi kamus-kamus lain yang lebih kecil (Kridalaksana, 1976).

Indonesia, masih belum memiliki kamus "besar seperti itu. Kita baru memiliki kamus-kamus yang sifatnya terbatas dengan gaya penampilan serta teknik penyusunan yang berbeda-beda. Misalnya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* susunan W.J.S. Poerwadarminta (1976) berbeda teknik penyajian-

nya dengan kamus-kamus lain, seperti *Kamus Bahasa Indonesia* susunan E. St. Harahap (1951), *Kamus Moderen Bahasa Indonesia* susunan Sutan Muhamad (tanpa tahun), *Kamus Populer* susunan Habeyb (1973), dan *Kamus Internasional* susunan Raliby (1976). Hal ini dapat dipahami karena kemungkinan besar (1) dasar motivasi penyusunannya berbeda dan (2) latar belakang pengalaman serta kecermatan berpikir yang dimiliki oleh setiap penyusun kamus itu tidak sama sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda pula. Sebagai contoh, perhatikan kutipan berikut yang memperlihatkan keragaman itu.

(1) *Kamus Bahasa Indonesia*

Oleh: E. St. Harahap

cabai, I. lih. *lada*, *lombok* dan *lada cina* sem. rempah-rempah yang pedas.

cabai, II, nama sebangsa burung.

(2) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

Oleh: W.J.S. Poerwadarminta

cabai: (1) *lada* (*lombok*) sb. *capsicum*; — merah (*besar*), *lombok* biasa, *capsicum annum* LINN; — rawit, cabai yang kecil-kecil, pedas sekali (disebut juga; *lada* burung, *lada* cili), *Capsicum frutescens* LINN; *mendapat* — rawit, mendapat celan keras; *kecil-kecil* — rawit; meskipun kecil, tetapi sangat pemberani; *siapa makan —, ialah berasa* (kepedasan) *Pr*, 1 *siapa yang berbuat curang, akan merasai akibatnya*; 2 *siapa merasa tersindir, ialah yang berbuat sebagai yang disindirkan itu*.

Kamus, apabila dilihat dari segi bahasa yang dipergunakan di dalamnya, dapat dikelompokkan menjadi tiga macam (Adiwimarta *et.al.*, 1978).

- (1) **Kamus dwibahasa**, yaitu kamus yang menggunakan dua bahasa, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia (atau sebaliknya), bahasa Belanda dan bahasa Indonesia atau bahasa Prancis atau bahasa Inggris (atau sebaliknya). Dengan demikian, antara bahasa sasaran dan bahasa yang digunakan dalam batasan serta penjelasan terhadap bahasa sasaran berbeda (tidak dalam satu bahasa).
- (2) **Kamus multibahasa**, yaitu kamus yang menggunakan tiga bahasa atau lebih, misalnya Indonesia–Prancis–Inggris, Indonesia–Arab–Inggris.

Pada kesempatan ini, saya ingin membatasi pembicaraan pada kamus eka-bahasa, yaitu kamus ekabahasa bahasa Indonesia. Salah satu jenis kamus eka-bahasa bahasa Indonesia ialah *Kamus Bahasa Indonesia Baku (standar)*. Kamus ini memuat kosakata yang dianggap baku dalam bahasa Indonesia. Begitu pula contoh-contoh kalimat yang dipilihnya sebagai contoh pemakaian

yang mendukung makna entri harus memiliki ciri-ciri kebakuan bahasa. Dengan kata lain, sumber data dan bentuk kata yang dipilih serta struktur kalimat yang dipilih sebagai contoh pemakaian entri diambil dari bahasa Indonesia tulis ragam baku nasional, bukan ragam baku regional. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kamus bahasa Indonesia baku adalah salah satu perwujudan harapan bangsa Indonesia yang dituangkan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 Bab IV tentang Pola Umum Pelita IV mengenai Kebudayaan, yaitu "pembinaan dan pengembangan bahasa dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar". Selain itu, bahasa Indonesia tulis ragam baku nasional tidak terikat oleh ruang dan waktu sehingga pemakaiannya sangat luas. Hal ini dapat terjadi karena bahasa Indonesia baku memiliki sifat kemandirian yang dinamis, yang berupa kaidah atau aturan yang tetap. Namun, kemandirian itu cukup terbuka untuk perubahan yang bersistem di bidang kosakata dan peristilahan serta perkembangan berjenis ragam dan gaya dalam bidang kalimat dan makna (Moellono dalam Halim, 1976:29). Hal ini berarti bahwa hasil kodifikasi yang berupa kamus bahasa Indonesia baku dapat berfungsi sebagai sarana penunjang dalam usaha swadaya bahasa. Konsep-konsep baru yang muncul di dalam pemakaian bahasa Indonesia dapat dicarikan padanan maknanya secara tepat di dalam kamus. Dengan demikian, berarti bahwa kamus bahasa Indonesia baku ikut berperan di dalam usaha bahasa Indonesia membenahi serta mengembangkan dirinya sebagai sarana komunikasi di dalam kancah kemajuan ilmu dan teknologi pada masa kini dan masa yang akan datang.

Bahasa Indonesia baku apabila kita perhatikan ternyata memiliki ciri-ciri kelengkapan, yaitu perwujudan struktur yang lengkap baik yang menyangkut masalah bentuk kata maupun yang menyangkut masalah kalimat. Hal ini berarti bahwa unsur-unsur pembentuk kata ataupun unsur-unsur pembangun kalimat harus lengkap sesuai dengan pola struktur yang dituntut oleh kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Ciri-ciri itu saja masih belum cukup menandai kebakuan bahasa. Penggunaan ejaan yang tepat dan benar sesuai dengan aturan ejaan yang berlaku ikut pula menandai ciri-ciri kebakuan bahasa.

Kodifikasi terhadap unsur-unsur bahasa tulis ragam baku nasional ini, yang dalam perwujudannya berupa kamus bahasa Indonesia baku, merupakan realisasi usaha pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sendiri sebagai sarana komunikasi bagi segenap bahasa Indonesia. Hal ini sejalan dengan rumusan kebijaksanaan bahasa dalam *Politik Bahasa Nasional* (Halim, Editor, 1976; Slametmuljana, 1966) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Gagasan ini ditunjang pula oleh semangat Sumpah Pemuda

28 Oktober 1928. Dengan demikian, ditinjau dari segi kaitan yang kuat antara hasil kodifikasi bahasa yang berupa kamus bahasa Indonesia baku dan kebijaksanaan nasional mengenai bahasa, kamus bahasa Indonesia baku memiliki peranan yang penting sekali dalam usaha pembakuan bahasa. Di samping itu, sebagaimana kamus-kamus yang lain, kamus bahasa Indonesia baku berperan pula sebagai sahabat yang paling setia yang selalu setia membantu kita tanpa pamrih apabila kita mengharapakan bantuannya. Kemungkinan besar kita akan memperoleh bantuan yang berarti dalam memecahkan kesulitan kebahasaan yang kita hadapi, asalkan kita memperlakukannya sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Dalam hal ini, masalah yang saya maksudkan adalah masalah kebahasaan yang berkaitan dengan kosakata bahasa Indonesia baku dan ragam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuatu yang baik tentu belum benar dan sesuatu yang benar belum tentu baik. Situasi dan kondisi ikut berperan dalam menentukan apakah sesuatu itu memang betul-betul baik dan benar. Begitu pula mengenai pemakaian bahasa. Kalimat yang baik belum tentu benar karena baik dari segi bahasa belum tentu baik dari segi situasi pemakaian tertentu. Situasi dan kondisi lingkungan tempat berlangsungnya suatu komunikasi sangat menentukan ragam bahasa yang mana yang akan digunakan. Namun, dalam kamus bahasa Indonesia baku, kalimat-kalimat baku ragam lisan tidak dipilih sebagai contoh-contoh pemakaian entri dalam kalimat.

Hal ini yang perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan kamus bahasa Indonesia baku ialah masalah teknik penyusunan definisi yang menyangkut masalah makna yang harus sesuai dengan kategori gramatikal kata yang diberi batasan. Sebuah entri yang berkategori verba harus diberi batasan yang sejajar, yaitu verba pula. Jadi, kalau entrinya berkategori nomina, batasannya harus terdiri dari frasa nomina. Jika entrinya berkategori adjektiva, batasannya harus berupa frasa adjektiva. Dengan demikian, antara entri dan batasan harus selalu terdapat kesejajaran sehingga apabila batasan itu dicobakan sebagai pengganti entri yang diberi batasan di dalam contoh kalimat pemakaian entri itu tidak akan mengganggu struktur kalimatnya. Bertalian dengan hal ini, ketekunan dan kecermatan berpikir harus dimiliki oleh setiap leksikograf.

Kamus bahasa Indonesia baku harus memuat segala aspek kebahasaan dan informasi kebahasaan yang selengkap-lengkapnyanya. Label-label yang menyangkut masalah kelas kata, pembedangan kata, dan label-label lain yang berfungsi melengkapi informasi kebahasaan perlu tercantum di dalam kamus pada setiap entrinya. Dengan demikian, kamus ini akan dapat memberikan jalan keluar bagi pemakai kamus dalam memecahkan masalah kebahasaan yang dihadapinya. Hal ini berarti bahwa kamus bahasa Indonesia baku dapat

dijadikan sumber acuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi masyarakat pemakai bahasa Indonesia.

### **Kesimpulan**

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, kebijaksanaan bahasa yang berencana, terarah, dan terperinci mengenai keseluruhan masalah kebahasaan perlu diadakan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV Pasal 36 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 Bab IV tentang Pola Umum Pelita IV mengenai Kebudayaan. Salah satu perwujudan kebijaksanaan bahasa ini ialah kamus bahasa Indonesia baku. Kamus ini merupakan kodifikasi bahasa Indonesia tulis ragam baku nasional sehingga dapat berfungsi sebagai buku acuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sebagai sarana pembakuan bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai sarana, kamus bahasa Indonesia bermanfaat sebagai sarana penunjang dalam swadaya bahasa. Kamus bahasa Indonesia berperan sebagai penunjang usaha bahasa Indonesia dalam membenahi dan mengembangkan dirinya sebagai sarana komunikasi di dalam kancah perkembangan ilmu dan teknologi pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, kamus bahasa Indonesia baku berperan pula sebagai sarana penunjang keberhasilan pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwimarta, Sri Sukesi. *et.al.* 1978. *Tata Istilah Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Badan Penerbit Almanak RI/BPALDA. 1983. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1983*. Jakarta: Badan Penerbit Almanak RI/BPALDA.
- Halim, Amran (Editor). 1976. *Politik Bahasa Nasional* Jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1980. "Bahasa Indonesia Baku" Kertas Kerja pada Pertemuan Bahasa dan Sastra, Jakarta 2-3 Oktober 1980. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Harahap, E. St. 1951. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-19. Bandung: G. Kalhof & Co.
- Kridalaksana, Harimurti. 1975. "Kamus Besar Bahasa Indonesia: Fungsinya dalam Pengembangan Bahasa Indonesia" dalam *Bahasa dan Sastra* Tahun I Nomor 1. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Moeliono, Anton M. 1976. "Ciri-ciri Bahasa Indonesia yang Baku" dalam *Politik Bahasa Nasional*, Halim (Editor). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1975. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- , 1975. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

- Raliby, Oesman. 1976. *Kamus Internasional*. Jakarta: CV Bulan Bintang.
- Slametmuljana. 1966. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Penerbit Djembatan.
- Sunaryo, Adi. 1981. "Kamus Bahasa Indonesia Standar dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia" dalam *Dewan Bahasa*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Zain, Sutan Muhammad. Tanpa Tahun. *Kamus Moderen Bahasa Indonesia*. Tanpa kota penerbit: Jaya Dharma.
- Zgusta, Ladislav. 1971. *Manual of Lexicography*. Prague: Academia.

## **BEBERAPA PERMASALAHAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA ILMIAH KEDOKTERAN**

**Ahmad W. Pratiknya dan Soemiat Ahmad Muhammad**  
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

### **Pendahuluan**

Sebagaimana tersirat dalam judul, pengkajian penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah kedokteran ini lebih bersifat mengungkap permasalahan yang terjadi sehari-hari di dunia kedokteran. Dengan demikian, kajian akan lebih menitikberatkan pada penemutunjukan permasalahan yang dihadapi, ragam permasalahan yang ada, dan beberapa pilihan yang dapat ditempuh bagi pengembangan bahasa ilmiah kedokteran Indonesia. Pengertian bidang kedokteran di sini, di samping meliputi bidang kedokteran (umum) manusia, mencakup pula bidang kedokteran gigi, kedokteran hewan dan peternakan. Di samping itu, sesuai dengan kandungan ilmu yang ada, dalam pengkajian ini akan terlihat pula persinggungannya dengan bidang lain, seperti biologi, psikologi, bioantropologi, farmasi, dan kimia.

Kajian ini tidak akan mencakup semua aspek penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah, tetapi lebih menitikberatkan pada masalah tata nama dan tata istilah. Struktur kalimat dan gaya bahasa keilmuan walaupun bukan tidak penting, tidak ikut dikaji secara khusus dalam tulisan ini. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa masalah tata nama dan tata istilah merupakan masalah yang cukup mendesak untuk dicarikan pemecahan di dunia ilmiah kedokteran Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam kajian ini mungkin ditemukan tinjauan kesepihakan dan pertimbangan elon walaupun hal itu sejauh mungkin sudah

penulis hindari. Kekurangan tersebut terjadi karena penulis termasuk awam di bidang bahasa Indonesia, dan juga karena kesempitan 'kacamata' pembahasan penulis sebagai 'orang dalam' kedokteran.

### Landasan Berpijak

Sebelum dilakukan eksplorasi berbagai permasalahan yang menyangkut penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah kedokteran, akan dikemukakan beberapa pokok pikiran yang dijadikan landasan pengkajian ini. Landasan berpijak ini perlu diketengahkan, di samping untuk membatasi luas pengkajian, juga untuk mengetahui arah pengkajian dan agar diperoleh hasil kajian yang bayan dan konsisten.

Pokok pikiran pertama ialah yang menyangkut fungsi bahasa sebagai bahasa ilmiah. Dalam fungsinya sebagai sarana keilmuan, dapat dipaparkan adanya dua fungsi bahasa, yaitu sebagai alat penalaran mantiki dan sebagai alat komunikasi keilmuan. Peran pertama menggambarkan proses kegiatan keilmuan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan (seperti penalaran deduksi, penalaran induksi, dan perampatan), sementara peran kedua menggambarkan proses komunikasi antara ilmuwan dengan orang lain.

Walaupun dapat dibedakan adanya dua peran tersebut, bahasa ilmiah mempunyai ciri yang sama, yaitu di samping (a) harus memenuhi kaidah-kaidah umum bahasa, juga harus memenuhi syarat lain seperti (b) gaya bahasa keilmuan, dan (c) kecermatan, kejelasan, serta ketepatan penggunaan kata untuk mengungkapkan perwujudan, konsep, atau pengertian tertentu. Ciri yang terakhir ini amat berkaitan dengan tata nama dan tata istilah. Tata nama dan tata istilah yang dimaksud, di samping memungkinkan adanya penyanderaan yang jelas dan tepat suatu perwujudan atau pengertian, juga jangan sampai mempunyai makna ganda.

Pokok pikiran kedua ialah yang menyangkut kenyataan telah adanya pembakuan internasional mengenai tata nama dan tata istilah bidang ilmu dasar kedokteran tertentu, antara lain zoologi, anatomi, embriologi, histologi, parasitologi, bakteriologi, dan virologi. Sementara untuk bidang ilmu kedokteran lain, walaupun belum diadakan pembakuan, secara tidak langsung mengikuti tata nama dan tata istilah yang sudah dibakukan tersebut. Termasuk pada hal yang terakhir ini ialah tata nama penyakit dan tata istilah klinis.

Dalam pembakuan internasional tersebut perlu dicatat adanya beberapa hal berikut.

- (a) Tata nama umumnya menggunakan kata-kata Latin dan kata dari bahasa lain (biasanya bahasa Yunani) yang dilatinkan atau diperlukan sebagai kata Latin.
- (b) Tata nama tersebut mengenal bentuk deklinasi yang juga mengikuti aturan deklinasi bahasa Latin.

- (c) Hasil penamaan atau peristilahan selalu diusahakan memenuhi ciri-ciri: pendek (sederhana), informasi, dan deskriptif.

Pokok pikiran ketiga itulah yang menyangkut peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Walaupun telah lama diketahui potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah, dan telah cukup banyak pula upaya mengaktualkan potensi tersebut, masih sering dikeluhkan adanya kesulitan oleh sebagian ilmuwan bidang ilmiah tertentu dalam mengekspresikan karya ilmiahnya dalam bahasa Indonesia yang utuh. Misalnya, keluhan di bidang sintaksis yang kadang-kadang dikemukakan oleh mereka yang berkecimpung di bidang ilmu kuantitatif (matematika dan statistika). Sementara itu dalam hal tata nama dan tata istilah, hampir dikeluhkan kesulitannya oleh semua bidang keilmuan, dan yang paling dirasakan oleh mereka yang berkecimpung di bidang kedokteran.

Dihubungkan dengan tema pokok kajian ini, pokok pikiran ketiga tersebut berkaitan dengan makna kesegaran 'pengindonesiaan' bahasa ilmiah kedokteran di Indonesia. Sementara pokok pikiran pertama dan kedua mengingatkan kaidah-kaidah yang perlu dipertimbangkan dalam pengalihbahasaan tersebut agar bahasa ilmiah kedokteran Indonesia tetap memenuhi ciri bahasa ilmiah, yang di samping memadai sebagai alat penalaran mantik juga digunakan sebagai media komunikasi dengan dunia luar.

### **Pokok-Pokok Permasalahan**

Ilmu kedokteran yang berkembang di Indonesia hampir seutuhnya merupakan pengimporan dari budaya Barat. Dalam proses pengalihilmuan tersebut tidak terhindarkan adanya proses lain, yaitu pengalihbahasaan. Permasalahan yang timbul ialah apakah taraf perkembangan bahasa Indonesia sudah cukup memadai untuk mengkespresikan jalan pikiran masyarakat tempat asal ilmu tersebut? Walaupun sudah diakui kepesatan perkembangan bahasa Indonesia selama ini, merupakan kenyataan pula bahwa untuk memenuhi fungsinya sebagai bahasa ilmiah yang utuh, masih banyak upaya yang harus ditempuh.

Dengan pesatnya perkembangan ilmu kedokteran (dalam berbagai bidangnya) pada kurun waktu akhir ini, serta tersedianya sarana komunikasi ilmiah antarbangsa yang memadai, maka proses pengalihilmuan berlangsung makin intensif. Kenyataan intensifnya proses pengalihilmuan kedokteran tersebut di satu pihak dan kenyataan belum tuntasnya perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah di lain pihak, menimbulkan berbagai persoalan di bidang bahasa ilmiah kedokteran di Indonesia.

Persoalan yang muncul ialah berapa keanekaragaman cara atau macam pengalihbahasaan tersebut, terutama yang menyangkut tata nama dan tata

istilah. Pusat pendidikan kedokteran di satu tempat mengembangkan atau menganut cara pengalihbahasaan tertentu yang berbeda dengan pusat pendidikan kedokteran di tempat lain. Dengan demikian, tata nama dan tata istilah yang digunakan di pusat kedokteran yang satu berbeda dengan pusat pendidikan kedokteran lainnya. Satu pusat cenderung untuk menggunakan istilah dan penamaan Latin, pusat yang lain cenderung melakukan penerjemahan, sementara pusat lainnya lagi melakukan penyerapan dengan perubahan ejaan dan lafal istilah aslinya. Kerancuan itu makin nyata terlihat karena penerjemahan atau penyerapan istilah kedokteran tersebut tidak menggunakan kaidah yang sama atau baku.

Kenyataan lain yang makin memperparah kerancuan tersebut ialah bahwa kubu perbedaan tidak hanya terbatas antarpusat pendidikan kedokteran saja, tetapi sudah berkembang antardisiplin ilmu walaupun dalam satu atau pusat pendidikan. Tidak sedikit kejadian seorang mahasiswa atau dosen dari satu kubu lebih sulit memahami istilah yang digunakan oleh kubu lain daripada istilah aslinya dalam bahasa asing atau bahasa Latin.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan pertama, yaitu dalam hal tata nama dan tata istilah, jalan manakah yang harus dipilih dalam proses pengalihbahasaan ilmu kedokteran ke dalam bahasa Indonesia.

- Apakah dengan memungut saja istilah aslinya secara utuh atau dengan sedikit modifikasi?
- Apakah dengan melakukan penerjemahan ke dalam kata-kata Indonesia atau kata-kata dari bahasa daerah?
- Apakah dengan melakukan penyerapan disertai perubahan ejaan atau perubahan lain?
- Apakah dengan ketiga macam cara di atas (campuran)?

Di atas telah dikemukakan bahwa tata nama dan tata istilah kedokteran telah mengalami pembakuan internasional. Dalam pembakuan tersebut, di samping digunakan kata-kata Latin (atau kata lain yang dilatinkan, atau diperlakukan sebagai kata Latin), juga digunakan kaidah-kaidah deklansi bahasa Latin. Deklansi adalah perubahan lafal dan ejaan kata benda atau kata sifat sehubungan dengan statusnya. Persoalan deklansi inilah yang merupakan hal yang cukup sulit pemecahannya dalam rangka pengalihbahasaan tersebut mengingat dalam bahasa Indonesia tidak dikenal bentuk deklansi.

Nama-nama dan istilah-istilah kedokteran pada umumnya mengikuti salah satu dari empat macam bentuk dasar berikut:

- satu kata benda (*substantivum*),
- satu kata benda dalam bentuk nominatif (*nominativus*) diikuti kata benda lain dalam bentuk genitif (*genitivus*),
- satu kata benda diikuti oleh satu kata sifat (*adiectivum*),



Contoh:

- cornu cutaneum* : *cornu* (tanduk) yang berasal dari *cutis* (kulit)  
*scabies crustosa* : *scabies* (jenis penyakit kulit) yang penuh dengan *crusta*  
*processus pterygoideus* : *processus* (tonjolan) yang menyerupai *pteryx* (sayap)

Selain dari kata benda, kata sifat juga dapat berasal dari kata-kerja (verbum), contoh:

- ulcus rodens* : *ulcus* (luka lama yang terinfeksi) yang bentuknya menyerupai bekas pengeratan, *rodens* berasal dari kata *rodo* yang berarti mengerat.

Kata benda juga dapat berasal dari kata sifat, kata kerja, atau kata benda lainnya. Kata benda yang berasal dari kata sifat biasanya disusun dengan menambah akhiran *tas* atau *itas* sementara yang berasal dari kata benda lainnya biasanya disusun dengan menambah akhiran *ismus*. Contoh:

- (a) dari kata sifat  
*sterilitas*, berasal dari kata *sterilis*  
*immunitas*, berasal dari kata *immunis*
- (b) dari kata kerja  
*collapsus*, berasal dari kata *collabor*  
*receptum*, berasal dari kata *recipere*  
*dolor*, berasal dari kata *dolere*
- (c) dari kata benda lain  
*meningismus*, berasal dari kata *meningiutis*  
*atavismus*, berasal dari kata *atavus*  
*mutismus*, berasal dari kata *mutus*

Dari uraian di atas dapat dirangkum pokok permasalahan kedua, yaitu bagaimanakah pengalihbahasaan istilah dan tata nama kedokteran ke dalam bahasa Indonesia, sehubungan dengan bentuk-bentuk deklinasi yang ada? Apakah tetap menggunakan kaidah deklinasi bahasa Latin, ataukah tidak? Permasalahan ini menjadi cukup menonjol mengingat dalam bahasa Indonesia tidak dikenal aturan deklinasi seperti dalam bahasa Latin.

Pokok permasalahan berikutnya ialah yang menyangkut lapangan penggunaan bahasa ilmiah kedokteran. Perbedaan lapangan ini akan membawa konsekuensi dalam cara penyuguhan bentuk-bentuk istilah dan nama kedokteran yang digunakan. Berbagai lapangan yang dimaksud ialah sebagai berikut.

- (a) Karya ilmiah resmi, seperti skripsi, tesis, disertasi.  
 (b) Karya ilmiah yang dikomunikasikan (dalam majalah ilmiah atau pertemuan ilmiah) dengan bangsa lain.

- (c) Karya ilmiah yang dikomunikasikan (dalam majalah ilmiah atau pertemuan ilmiah) di dalam negeri.
- (d) Tata nama dan tata istilah yang digunakan dalam bidang pendidikan kedokteran.
- (e) Tata nama dan tata istilah yang digunakan dalam bidang lain, seperti dalam praktik klinik kedokteran di rumah sakit dan di tempat lain.

### Beberapa Pilihan Alih Bahasa Tata Nama dan Tata Istilah Kedokteran ke dalam Bahasa Indonesia

Ilmu kedokteran yang semula berkembang di seputar Romawi, Yunani, dan Mesir, kemudian menyebar ke seluruh pelosok dunia. Demikian pula pusat-pusat pengembangan ilmu kedokteran juga makin menyebar, termasuk di dalamnya penemuan hal-hal baru yang memerlukan penamaan dan pengistilahan. Dengan makin sedikitnya peneliti yang menguasai bahasa Latin, apalagi ada bangsa yang memang enggan menggunakan bahasa Latin, tidak semua nama dan istilah kedokteran yang berkembang sekarang menggunakan kata-kata Latin. Kenyataan ini banyak dijumpai pada istilah klinis dan istilah dalam cabang ilmu kedokteran yang berkembang lebih mutakhir. Kata-kata yang digunakan biasanya berasal dari bahasa si penemu.

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan pertama dan kedua di atas, berikut ini diajukan beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan dalam pengalihbahasaan tata nama dan tata istilah kedokteran ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai bahan pertimbangan, dari masing-masing pilihan dikemukakan pula segi keunggulan dan kelemahannya. Sebagai bahan tolok ukur, hal-hal berikut perlu diperhatikan.

- (a) Sejauh mana istilah yang dihasilkan memenuhi kaidah-kaidah peristilahan ilmiah, khususnya kaidah peristilahan kedokteran, seperti singkat (sederhana), tepat, tidak bermakna ganda, informatif, dan deskriptif.
- (b) Sejauh mana istilah yang dihasilkan dapat dipergunakan dalam forum komunikasi ilmiah, termasuk komunikasi ilmiah antarbangsa.
- (c) Sejauh mana istilah yang dihasilkan sesuai dengan kaidah umum bahasa Indonesia, termasuk kemudahan bagi masyarakat ilmiah kita untuk mempergunakannya (menulis dan melafalkan).

#### 1. Tata Nama

Tata nama kedokteran umumnya dipergunakan untuk suatu bangunan anatomi, organisme (hewan, parasit, mikrobia), kimia, penyakit, atau alat kedokteran. Nama bangunan anatomi, organisme, dan kimia hampir semua berupa kata Latin. Nama penyakit dan peralatan kedokteran di samping kata Latin juga ada yang menggunakan kata lain. Berikut ini disuguhkan beberapa pilihan alih bahasa tata nama kedokteran ke dalam bahasa Indonesia.

### 1.1 Pemungutan Tanpa Perubahan (Pencangkakan)

Pada pengalihbahasaan tata nama ini, nama asli diambil seutuhnya tanpa perubahan sedikit pun, baik mengenai lafal, ejaan maupun deklinasinya. Dengan demikian, kata yang digunakan ialah kata-kata Latin lengkap dengan bentuk deklinasinya.

**Keunggulan :** Mudah untuk komunikasi antarbangsa,  
Memenuhi kaidah peristilahan kedokteran, seperti singkat, tepat, informatif, dan deskriptif.

**Kelemahan :** Dibutuhkan penguasaan kaidah-kaidah pokok bahasa Latin, termasuk pengenalan kata benda dan kata sifat dan bentuk deklinasinya.

Kesulitan dalam penulisan maupun pelafalannya.

Kaidah bahasa Indonesianya menjadi tidak utuh sepenuhnya.

Contoh:

(keterangan singkatan: *S*-substantivum, *A*-adjectivum, *M*-masculinum, *F*-femininum, *N*-neutrum, *T*-tunggal, *J*-jamak, *n*-nominativus, *g*-genitivus).

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>ganglion mesenterium superius</i> | <i>ganglia mesenterica superiora</i> |
| (S/N/T/n) (A/N/T/n) (A/N/T/n)        | (S/N/J/n) (A/N/J/n) (A/N/J/n)        |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>plexus mesentericus superior</i> | <i>plexus mesenterici superiores</i> |
| (S/M/T/n) (A/M/T/n) (A/M/T/n)       | (S/M/J/n) (A/M/J/n) (A/M/J/n)        |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <i>Streptococcus viridans</i> | <i>Streptococci viridantes</i> |
| (S/M/T/n) (A/M/T/n)           | (S/M/J/n) (A/M/J/n)            |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <i>emphysema pulmonum</i> | <i>corrhosis hepatis</i> |
| (S/F/T/n) (A/M/J/g)       | (S/F/T/n) (A/N/T/g)      |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <i>hyperemesis gravidarum</i> | <i>carcinoma pancreatis</i> |
| (S/F/T/n) (A/F/J/g)           | (S/F/T/n) (A/N/T/g)         |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <i>salicylas methylicus</i> | <i>dioxydum carbonicum</i> |
| (S/M/T/n) (A/M/T/n)         | (S/N/T/n) (A/N/T/n)        |

Catatan:

Beberapa suku kata, seperti *thy*, *pte*, *rho*, dan sebagainya tidak dikenal dalam bahasa Indonesia sehingga pelafalan/pengejaannya sukar.

Huruf *c*, yang dalam bahasa Indonesia hanya ada satu macam pelafalan, pada kata Latin tergantung vokal yang mengikutinya (misal: *carcinoma*, *cicatrix*, *centrum*).

### 1.2 Pemungutan dengan Perubahan Deklinasi

Pada pengalihbahasaan ini kata benda nominatif dijumpai seutuhnya, sementara deklinasi kata berikutnya ditiadakan (perubahan ejaan karena deklinasinya ditiadakan).



*radang selaput lendir bola mata yang disertai proses pendarahan*

1

2

*carcinoma* = tumor ganas yang mengenai sel-sel yang tersusun berderet-deret yang membatasi permukaan atau rongga

Contoh kata yang sulit diterjemahkan:

*streptococcus viridans*

*prostata*

*raspatorium*

*morula, blastula, gastrula*

*pronephros, mesonephros, metanephros*

*trophospongium*

#### 1.4 Penyerapan Tanpa Perubahan Deklinasi

Pada alih bahasa ini, nama asli diserap seutuhnya (termasuk deklinasinya) sehingga pelafalannya sama, hanya penulisannya atau pengejaannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia menurut lafal yang ada (suatu proses transkripsi). Dengan demikian, pelafalannya seperti halnya pada 1.1 tetapi pengejaannya menurut kaidah bahasa Indonesia.

Keunggulan: Mudah dibaca dan mudah ditulis.

Singkat.

Kelemahan: Nama menjadi kurang informatif dan deskriptif serta dapat bermakna ganda.

Tidak dapat digunakan dalam forum komunikasi antar-bangsa. Kaidah deklinasi bahasa Latin masih harus dikuasai.

Contoh:

*plexus mesentericus*----- *pleksus mesenterikus*

*emphysema pulmonum*----- *emfisema pulmonum*

*cirrhosis hepatis*----- *sirosis hepatis*

*carcinoma coli*----- *karsinoma koli*

*hygroma colli*----- *higroma koli*

*dioxydum carbonicum*----- *dioksidum karbonikum*

*staphylococcus saureus* ----- *stafilokokus aureus*

Catatan:

Hasil serepan *koli* di atas menunjukkan contoh yang bermakna ganda, pada karsinoma *koli* berarti kanker *usus besar*, sementara pada higroma *koli* berarti tumor sejenis jaringan pada *leher*.

## 1.5 Penyerapan dengan Perubahan Deklinasi

Pada alih bahasa ini, lafal yang terjadi akibat deklinasi ditiadakan, sementara pengejaannya disesuaikan dengan lafal tersebut berdasar kaidah bahasa Indonesia. Dengan demikian, prosesnya ialah suatu transkripsi kata Latin tanpa deklinasi.

Keunggulan sama dengan 1.4, sementara kelemahannya lebih sedikit daripada 1.4 karena tidak diperlukan pengetahuan bahasa Latin. Pilihan penyerapan ini ada dua kemungkinan, yaitu yang tanpa deklinasi kata kedua saja atau baik kata pertama maupun kata kedua tanpa deklinasi.

Contoh:

|                                |                           |                         |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <i>vesica urinaria</i> -----   | <i>vesika urinar</i>      | <i>visik urinar</i>     |
| <i>emphysema pulmonum</i> ---  | <i>emfisema pulmo</i>     | <i>emfisem pulmo</i>    |
| <i>carcinoma hepatis</i> ----- | <i>karsinoma hepar</i>    | <i>karsinom hepar</i>   |
| <i>dioxydum carbonicum</i> --- | <i>dioksidum karbonik</i> | <i>dioksid karbonik</i> |

Dalam proses transkripsi yang dilakukan pada 1.4 dan 1.5 di atas sebenarnya masih dijumpai persoalan, yaitu apakah proses transkripsi dilakukan pada nama Latin yang lazim dipakai (telah dibakukan), ataukah pada asal kata nama Latin tersebut (yang berasal dari bahasa Latin).

Contoh:

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>karkinoma</i> (Yunani)-----  | <i>carcinoma</i> (Latin); hasil transkripsinya karkinom ataukah karsinom?    |
| <i>koliakos</i> (Yunani)-----   | <i>celiacus</i> (Latin); hasil transkripsinya keliakus ataukah seliakus?     |
| <i>enkephalos</i> (Yunani)----- | <i>encephalon</i> (Latin); hasil transkripsinya enkefalon ataukah ensefalon? |

Menurut hemat penulis, karena yang telah dibakukan ialah ejaan yang tersebut dalam kata Latin, proses transkripsi dilakukan pada kata tersebut, dan bukan kata asalnya. Pendapat tersebut dilandasi pula pertimbangan bahwa bagi kebanyakan orang makin sulit untuk mengetahui atau mencari asal kata Latin yang telah dibakukan tersebut.

## 1.6 Cara Campuran

Cara campuran ini ialah cara alih bahasa tata nama dengan menggunakan lebih dari satu cara seperti tersebut 1.1 sampai dengan 1.5. Walaupun sebenarnya cara ini merupakan cara yang paling besar kelemahannya, dalam praktik sering dijumpai. Contoh:

*musculus flexor hallucis longus* menjadi

*otot fleksor haluks longus*

(A3) (A4) (A5) (A1)

*dens molaris* menjadi *gigi molar*

(A3) (A5)

*dens caninus* menjadi *gigi kanin*; karena dapat disalahartikan menjadi

(A3) (A5)

*gigi anjing*, bukan bentuk A5 yang digunakan melainkan A4, sehingga menjadi *gigi kaninus*

rinitis vasomotorica menjadi *radang selaput lendir*

(A3)

*hidung vasomotorika*

(A4)

## 1.7 Penyerapan Nama Selain Kata Latin

Pada alih bahasa tata nama ini, kecenderungan yang ada ialah melakukan terjemahan atau penyerapan nama asli (asing), ataupun campuran keduanya. Contoh:

*serum sickness* ----- *penyakit serum*

*hernial opening* ----- *pintu hernia*

*scanning* ----- ..... *skaning*

*anxiety* ----- *ansietas*

*general proprioceptive fibers* ----- *serabut-serabut proprioseptif umum*

## 2. Tata Istilah

Sedikit berbeda dengan tata nama, pada tata istilah kedokteran sering dijumpai istilah yang bukan kata Latin. Dengan demikian, proses pengalih-bahasa istilah bukan Latin akan banyak dijumpai.

Tata istilah kedokteran, sesuai dengan kaidah peristilahan umumnya, biasanya berkaitan dengan (1) sifat, (2) proses (3) keadaan. Namun, dalam peristilahan kedokteran dicakup pula makna (4) suatu tindakan, atau (5) penamaan yang bukan nama asli.

Contoh:

- (1) *intermittens, translucens, recurrens* (Latin)  
*synthetic, therapeutic, viable, rampant caries* (Inggris)
- (2) *propliferatio, strangulatio, flecio, invaginatio* (Latin)  
*chelate, erossing-over, blockade degradation* (Inggris)
- (3) *hypertrophia, ankylosis, ischemia, arhythmia* (Latin)  
*heat stroke, depletion, dropping head* (Inggris)
- (4) *thyroedectomy, herniotomia, incisio, parcusio* (Latin)

*banding technique, labelling, trial, preparing* (Inggris)

- (5) *circulation, kinesihsio, manstruatio, tremor, in situ, spasmus, mutismus, systema cardiovasculare* (Latin)  
*cardiac output, lower motoneuron, resistance vessels, shunt, releasing factor, pin point pupils* (Inggris).

Bentuk-bentuk pengalihbahasaan tata istilah kedokteran pada prinsipnya sama dengan tata nama, demikian pula keunggulan dan kelemahan masing-masing bentuk. Perbedaan yang ada hanya menyangkut bahasa asal kata istilah kedokteran yang akan dialihbahasakan. Berbeda dengan tata nama kedokteran, dalam tata istilah kedokteran banyak dijumpai kata yang bukan Latin.

Mengingat pertimbangan tersebut, berikut ini akan disajikan contoh penjumlahan, penerjemahan, atau penyerapan istilah kedokteran dengan menggunakan sistematika seperti pada tata nama, dengan sekaligus menunjukkan contoh kata Latin dan kata bukan Latin.

## 2.1 Pemungutan Tanpa Perubahan (Pencangkakan)

Contoh:

Latin: *flexio, retentio, proliferatio, enucleatio*

Bukan Latin: *fasting test, crossing over, heat stroke, curatief, dyspnee d'effort, deja vu, Darmsteifung*

## 2.2 Pemungutan dengan Perubahan

Contoh:

Latin: *flexio*————— *flexi*  
*ischemia*————— *ischemi*  
*systema respiratoria*————— *system respiratori*  
*hyperpirexia*————— *hyperpyrexi*  
*proliferatio*————— ?

Bukan Latin:

*gerontologie*————— *gerontologi*  
*cretinisme*————— *cretinis*  
*postsynaptic*————— *postsynap*  
*presbyopie*————— *presbyop*  
*coma hepaticque*————— *coma hepaticq*  
*amylose cardiaque*————— *amylose cardiaq*

## 2.3 Penerjemahan

Contoh:

Latin: *ossificatio*————— 'penulangan'

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>chondrificatio</i> -----            | 'penulangrawanan'<br>(?, kurang enak)                                             |
| <i>ablatio</i> -----                   | ?                                                                                 |
| <i>prostatectomia</i> -----            | 'operasi pengambilan<br>kelenjar kelamin'<br><i>prostat (?)</i>                   |
| <i>haemodialysis</i> -----             | 'pencucian darah'                                                                 |
| Bukan Latin:                           |                                                                                   |
| <i>cardiac output</i> -----            | 'curah darah'                                                                     |
| <i>clearance</i> -----                 | 'banyaknya (volume) darah yang<br>dibersihkan dari suatu zat per<br>satuan waktu' |
| <i>mechanotherapie</i> -----           | 'pengobatan secara mekanis'                                                       |
| <i>medicinaal</i> -----                | 'dengan menggunakan obat'                                                         |
| <i>encephalopathie hepatiche</i> ----- | 'gejala gangguan fungsional otak<br>akibat gangguan fungsi hati'                  |

## 2.4 Penyerapan Tanpa Perubahan

Contoh:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Latin: <i>hypertrophia</i> ----- | <i>hipertrofia</i> |
| <i>malocclusio</i> -----         | <i>maloklusio</i>  |
| <i>ankylosis</i> -----           | <i>ankilosis</i>   |

Bukan Latin:

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <i>blockade</i> -----               | <i>blokade</i>              |
| <i>electroencephalography</i> ----- | <i>elektroensefalografi</i> |
| <i>crepitatie</i> -----             | <i>krepitasi</i>            |

## 2.5 Penyerapan dengan Perubahan Deklinasi

Contoh:

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Latin: <i>hyperplasia</i> -----      | <i>hiperplasi</i>                              |
| <i>systema cardiovasculaxe</i> ----- | <i>sistem kardiovaskular</i>                   |
| <i>chondrificatio</i> -----          | <i>kondrifikasi</i> (bandingkan dengan<br>2.3) |

Bukan Latin:

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <i>chelate</i> -----         | <i>kelasi</i>               |
| <i>depletion</i> -----       | <i>delesi</i>               |
| <i>degradation</i> -----     | <i>degradasi</i>            |
| <i>presbyopie</i> -----      | <i>presbiop</i>             |
| <i>encephalopathie</i> ----- | <i>ensefalopati hepatic</i> |

## 2.6 Campuran

Contoh:

|        |                                  |                            |
|--------|----------------------------------|----------------------------|
| Latin: | <i>systema cardiovasculare</i> → | <i>sistem cor-vasa</i>     |
|        |                                  | (2.5) (2.2)                |
|        | <i>enucleatio bulbi</i> →        | <i>enukleasi bola mata</i> |
|        |                                  | (B.5) (B.3)                |

Bukan Latin:

|  |                                 |                               |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
|  | <i>packed-cel transfusion</i> → | <i>transfusi butir darah</i>  |
|  |                                 | (2.5) (2.3)                   |
|  | <i>hematome extra-dural</i> →   | <i>perdarahan ekstradural</i> |
|  |                                 | (B.3) (B.4)                   |

### Sebuah Gagasan Awal

Setelah beberapa kemungkinan proses alihbahasa tata nama dan tata istilah kedokteran diajukan, dan telah dikemukakan pula keunggulan dan kelemahan masing-masing sampailah kita pada pertanyaan: cara manakah yang paling tepat untuk kita pilih? Jawaban atas pertanyaan ini dapat diberikan secara memadai *hanya* oleh suatu forum yang melibatkan pihak yang berkompetensi di bidang bahasa Indonesia dan pihak yang berkompeten di bidang kedokteran.

Berikut ini diajukan suatu gagasan awal yang mungkin dapat digunakan sebagai "prajawaban" untuk pertanyaan di atas. Disebut prajawaban karena pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menyusun gagasan tersebut hanya berasal dari pihak kedokteran saja, dan juga hanya dari salah satu "kubu" saja. Dengan demikian, penyempurnaan gagasan masih diperlukan oleh suatu forum yang lebih representatif.

Langkah awal yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas ialah mengkaji apakah model alihbahasa nama dan istilah kedokteran tersebut harus menurut satu cara ataukah dapat lebih dari satu cara? Haruskah penggunaannya seragam untuk berbagai lapangan ataukah dimungkinkan adanya perbedaan?

Hal yang paling ideal, dengan sendirinya, ialah proses pengalihbahasaan tersebut hanya menggunakan satu cara saja, dan berlaku untuk berbagai lapangan penggunaan bahasa ilmiah kedokteran di Indonesia. Akan tetapi, kemungkinan besar hal yang ideal tersebut untuk saat ini sukar dilakukan mengingat: (a) tidak ada satu pun cara yang terlepas dari kelemahan pokok apabila digunakan untuk semua lapangan; dan (b) sifat kelemahan dan keunggulan tersebut berbeda antar satu lapangan dengan lapangan yang lain.

Dengan landasan pertimbangan tersebut, kiranya dapat dipilih satu cara yang paling memadai, dilihat dari sudut pengembangan bahasa Indonesia, untuk dijadikan cara yang baku. Namun, perlu pula dipilih cara lain

yang juga akan dipergunakan pada lapangan tertentu agar fungsi pokok bahasa sebagai alat komunikasi dapat dipenuhi dengan baik. Dengan demikian, di samping adanya satu cara yang baku, juga dimungkinkan adanya perbedaan tertentu dalam menggunakan nama dan istilah kedokteran pada lapangan yang berbeda.

Menurut hemat penulis, atas dasar tolok ukur yang telah diajukan tadi, model yang paling memadai ialah cara penyerapan dengan perubahan (penilaian bentuk) deklinasi (1.5 dan 2.5). Adapun cara lain yang dipergunakan untuk papangan tertentu ialah penjumlahan seutuhnya untuk tata nama (1.1) dan penjumlahan dengan perubahan (peniadaan bentuk) deklinasi untuk tata istilah.

Dihubungkan dengan berbagai lapangan penggunaan yang ada, penerapan gagasan di atas dalam praktik adalah sebagai berikut.

- (1) Untuk keperluan karya ilmiah yang dikomunikasikan di dalam negeri, bidang pendidikan, dan praktik klinik kedokteran, baik untuk nama maupun peristilahan, digunakan cara penyerapan dengan perubahan deklinasi (cara 1.5 dan 2.5). Dengan lapangan yang luas tersebut, serapan nama dan istilah kedokteran tersebut di samping memasyarakatkan juga cepat menyatu dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, dalam waktu yang tidak terlalu lama, diharapkan penggunaan bahasa Indonesia yang utuh dapat dilakukan dalam mengekspresikan karya ilmiah kedokteran.
- (2) Untuk keperluan komunikasi ilmiah antarbangsa, berdasar atas penekanan fungsi komunikasinya, diusulkan pegangan berikut. Tata nama; pemungutan penuh (1.1)  
Tata istilah: digunakan istilah dari bahasa pengantar, atau bentuk pemungutan dengan perubahan (2.2). Di samping karena telah adanya pembakuan internasional untuk sebagian besar nama dan istilah kedokteran Latin, pendapat di atas diajukan karena pada kenyataannya kata Latinlah yang paling "komunikatif" bagi semua bangsa.
- (3) Untuk keperluan karya ilmiah resmi (skripsi, tesis, atau disertasi), diusulkan pegangan sebagai berikut.  
Tata nama: bentuk penyerapan dengan perubahan deklinasi *disertai* bentuk pemungutan penuh (1.5 dan 1.1).  
Tata Istilah: bentuk penyerapan dengan perubahan deklinasi *disertai* bentuk pemungutan dengan perubahan deklinasi (2.5 dan B.2).  
Bentuk 1.1 dan 1.2 di atas ialah yang berasal dari kata Latin, dan dalam praktik penulisannya dapat diletakkan dalam kurung setelah disebut 1.5 atau 2.5.

## Penutup

Pada penghujung kajian ini perkenankanlah penulis mengajukan dua hal yang dirasa penting untuk diperhatikan sehubungan dengan upaya pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah, khususnya di bidang kedokteran.

Pertama, perlu segera diupayakan secara lebih nyata adanya *pembakuan* tata nama dan tata istilah kedokteran dalam bahasa Indonesia agar kerancuan penggunaan nama dan istilah kedokteran yang ada dapat diakhiri. Diibaratkan suatu penyakit, betapapun parah kerancuan tersebut kiranya masih tersembuhkan apabila pembakuan telah dilakukan. Penundaan atau sikap mengabaikan pentingnya pembakuan tersebut mengakibatkan keadaan yang lebih parah dan mungkin tak tersembuhkan lagi.

Usaha ke arah pembakuan sebenarnya telah lama dikerjakan (pembentukan komisi istilah, termasuk istilah kedokteran, telah dirintis sejak awal kemerdekaan, dan yang telah beberapa kali dilakukan pergantian anggota), tetapi pembakuan itu sendiri tidak kunjung ada. Tanpa mengurangi jerih payah yang telah dihasilkan komisi, kiranya perlu dilakukan peninjauan kembali upaya pembakuan istilah tersebut, baik yang menyangkut organisasi, tata kerja, dan masalah lain yang menghambat terlaksananya upaya tersebut.

Kedua, bagi para penulis di bidang kedokteran, perlunya dipegang sejauh mungkin asas konsisten dalam penggunaan nama atau istilah kedokteran yang dipakai. Hal tersebut makin dirasakan kepentingannya dalam keadaan belum adanya pembakuan tata nama dan tata istilah seperti sekarang ini. Sekali suatu cara penulisan nama dan istilah kedokteran dipakai, cara itu pula yang terus digunakan. Ketidakkonsistenan ini masih sering terlihat pada karya ilmiah kita, baik dalam bentuk tesis, dalam majalah ilmiah, maupun dalam buku kedokteran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Engelbregt. 1982. *Latijnsch Voordenboek*. Groningen: J.B. Wolters.
- Johannes, H. 1912. "Ejaan yang Disempurnakan dan Pengembangan Istilah-istilah Ilmiah". Seminar Bahasa Indonesia. Jakarta.
- , 1979. *Gaya Bahasa Keilmuan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- , 1982. *Membina Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa yang Ilmiah, Indah, dan Lincah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nasution. A.H. 1972. "Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Ilmu Pengetahuan". Seminar Bahasa Indonesia. Jakarta.
- Parlemuter, L. dan A. Cenac. 1977. *Dictionnaire Practique de Medecine Clinique*. Paris: Masson.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1975. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta.
- , 1975. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta.
- , 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta.
- Radiopoetro. 1983. "Perihal Nama-nama Penyakit". Naskah tidak dipublikasi. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran UGM.
- Sorensen, E. dan Hoeg, L. 1962. *Terminologi Anatomica*. Kopenhagen: Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busck.
- Wharf, B.E. 1956. *Language, Thought and Reality*. New York: Technology Press of M.I.T. and John and Sons Inc.
- Wielen, V.D. 1951. *Latijn*. Groningen: J.B. Wolters.

## **MENGAJI PEMBAKUAN BAHASA INDONESIA**

**Ramelan**

**IKIP Semarang**

### **Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Penetapan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara**

Dalam memperinci Hari Sumpah Pemuda ke-55 ini, bangsa Indonesia wajib menundukkan kepala dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita telah memiliki bahasa nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Kita mengetahui bahwa tidak semua rakyat di dunia ini, setelah memperoleh kemerdekaannya, dengan mudah mencapai kata sepakat untuk menentukan bahasa nasional mereka. Abad ke-20 ini memang ditandai dengan munculnya negara-negara atau bangsa-bangsa baru, tetapi sehubungan dengan itu tidak jarang timbul pula masalah penentuan bahasa nasional. Bahasa nasional perlu mereka tentukan karena ia merupakan identitas bangsa. Sayangnya, hal ini tidak selamanya merupakan hal yang mudah dilakukan karena adanya prasangka atau kekhawatiran pada kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat itu sendiri, kalau-kalau kelompok yang satu akan mendominasi kelompok yang lain. Kadang-kadang terjadi pertentangan sengit, bahkan mungkin pula menyebabkan benturan fisik, yang dapat membahayakan persatuan nasional, seperti yang pernah kita dengar terjadi di Filipina, Srilangka, India, dan negara-negara baru di benua Afrika. Ini hanya karena tidak adanya kesepakatan di antara mereka sendiri mengenai bahasa yang mana yang akan dijadikan bahasa nasional. Untung saja hal seperti itu tidak terjadi pada bangsa Indonesia, karena demikian kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, esok harinya UUD disahkan dengan suara bulat,

nesia". Dengan demikian, dan sejak saat itu bahasa Indonesia (BI) secara resmi menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia yang semakin lama kita harapkan akan menjadi semakin mantap.

Proses penetapan BI sebagai bahasa nasional memang berjalan dengan lancar, dan bagi kita semua hal itu bukanlah hal yang aneh. Apa yang terjadi pada tahun 1945 itu sebenarnya hanyalah akibat logis atau realisasi saja dari apa yang terjadi sebelumnya, yakni tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa bersejarah ini kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda, yang mengikrarkan bahwa bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa proses kelahiran bahasa nasional kita agak berbeda jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara-negara lain. Bahasa nasional kita ditentukan jauh-jauh sebelum negara kita lahir, yakni pada tahun 1928, dan baru 17 tahun kemudian berdirilah negara kita dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kenyataan bahwa bangsa Indonesia dengan mudah menentukan bahasa nasionalnya menunjukkan betapa tingginya semangat persatuan dan semangat kebangsaan kita meskipun kita terdiri dari suku-suku bangsa yang berbeda dan mempunyai bahasa dan kebudayaan yang berlainan pula. Wakil-wakil dari berbagai-bagai suku bangsa ini secara aklamasi menerima BI sebagai bahasa persatuan, dan mereka tidak berebut untuk menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa nasional. Kepentingan pribadi dan golongan disingkirkan demi persatuan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang bersama-sama mau mereka tegakkan. Karena itu, sudah sepantasnyalah apabila kita sebagai generasi penerus melanjutkan dan bahkan meningkatkan semangat persatuan ini agar tujuan nasional kita seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dapat segera terwujud.

Dengan ditetapkannya BI sebagai bahasa negara, sesuai dengan bunyi pasal 36 UUD kita, ia merupakan satu-satunya bahasa resmi negara kita untuk dipakai dalam pemerintahan, administrasi, hukum, sekolah, dan peristiwa-peristiwa formal lainnya. Undang-Undang Pokok Pendidikan No. 4 Th. 1950 jo. No. 12 Th. 1954 juga menyebutkan bahwa BI dipakai sebagai bahasa pengantar di semua tingkat sekolah, sedangkan bahasa daerah boleh dipakai di TK dan ketiga kelas terbawah di SD. Ini semua berarti bahwa BI dipakai secara luas dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari secara resmi, di samping bahasa daerah (BD), yang memang masih terus dipakai dalam keluarga dan di daerah masing-masing. Dengan demikian, orang Indonesia pada umumnya adalah dwibahasawan: dalam lingkungan keluarga sehari-hari ia biasanya menggunakan BD, tetapi di luar itu seperti di sekolah, kantor, atau situasi resmi lainnya ia menggunakan BI.

## Penggunaan Bahasa Indonesia Secara Baik, Benar, dan Baku

Mengingat BI telah ditetapkan sebagai satu-satunya bahasa negara yang dipakai secara resmi dalam pemerintahan, tentunya semua warga negara Indonesia wajib menguasainya dan menggunakannya dengan baik. Tidak dibenarkan, misalnya, orang menggunakan BI dengan mencampuradukkannya dengan kata-kata bahasa asing seperti bahasa Belanda, Inggris, dan Perancis, hanya supaya kedengarannya mentereng.

Mungkin ia kedengaran gagah, tetapi arus komunikasi tidak menemui sasaran karena tidak semua pendengarnya dapat memahami maksudnya. Demikian pula mencampuradukkannya dengan kata-kata BD-pun tidak benar karena mungkin saja tidak semua yang mendengarkannya dapat memahami BD yang dipakai itu. Tidak hanya kata-kata yang tidak boleh dicampuradukkan, tetapi juga ucapannya. Misalnya, akan janggal kedengarannya apabila kalimat-kalimat dalam BI diucapkan dengan lafal dan lagu bahasa asing atau BD, demikian pula apabila kata-kata BI disusun menurut pola atau kaidah bahasa lain. Kalau banyak sekali terjadi pemerkosaan penggunaan BI, jelas hal itu akan mengganggu komunikasi dan menjadikan BI semakin tidak karuan tanpa kaidah-kaidah yang jelas. Ini akan merugikan proses pembakuannya padahal BI diharapkan menjadi alat komunikasi yang efektif di seluruh wilayah tanah air yang luas ini, dan untuk itu ia perlu pembakuan dengan kaidah-kaidah yang jelas.

Seperti diketahui setiap bahasa itu mempunyai unsur-unsur dan kaidah-kaidahnya sendiri, dan setiap pemakai bahasa diwajibkan menaati ketentuan itu untuk kelancaran komunikasi dan menghindarkan kesalahfahaman. BI harus dipakai sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam BI sendiri untuk dapat disebut bahasa yang baku. Jadi, penggunaan BI secara baik, benar, dan baku ialah penggunaan BI yang sesuai dengan kaidah-kaidah BI itu sendiri, dan bukan kaidah-kaidah bahasa lainnya.

Pemakaian BI secara baik dan benar ini juga merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978 dan TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, yang menyatakan bahwa "pembinaan dan pengembangan BI dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar". Maksud ketetapan ini ialah bahwa BI perlu dibina dan dikembangkan. Jadi, tidak boleh dibiarkan tumbuh sendiri tanpa arah, dengan menyerahkan penggunaan sepenuhnya kepada para pemakai bahasa saja. Sebagai bahasa yang hidup, BI perlu berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakatnya, tetapi perkembangannya ini harus diarahkan sesuai dengan kebijaksanaan yang dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia seperti tercermin pada ketetapan MPR itu. Sekali kebijakan dasar itu telah ditetapkan, adalah tugas pemerintah, dalam hal ini Departemen P dan K, yang wewenangnya diserahkan pada Pusat Pembinaan dan Pengem-

bangun Bahasa, untuk penjabaran operasionalnya. Kemudian adalah juga tugas seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan MPR itu sebaik-baiknya secara konsekuen, termasuk kebijakan-kebijakan yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

Pertanyaannya sekarang ialah apakah ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kalau belum, penyimpangan-penyimpangan apa yang terjadi selama ini. Persoalan lain yang perlu pembahasan juga adalah bagaimana mengatasi masalah itu, dan sehubungan dengan itu usaha-usaha apa yang perlu kiranya dilakukan untuk melaksanakan ketetapan MPR Th. 1983, yakni mewajibkan penggunaan BI secara baik, benar, dan baku.

### Penyimpangan-penyimpangan dan Cara Pemecahannya Hubungan Kebijakan Bahasa dan Disiplin Nasional

Kebijakan dasar tentang penggunaan BI seperti yang ditetapkan oleh MPR dalam tahun 1983 untuk Repelita IV ini sama dengan yang ditetapkan dalam tahun 1978 untuk Repelita III, yakni seperti telah disampaikan di muka. "Pembinaan dan Pengembangan BI dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar". Dari kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa harapan agar warga negara Indonesia memakai BI secara baik dan benar itu tampaknya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara tuntas. Oleh karena itu, kebijakan dasar yang lama masih perlu dilanjutkan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi.

Untuk penggunaan BI secara baik dan benar, yakni sesuai dengan kaidah-kaidah BI yang baku, diperlukan kesadaran disiplin yang tinggi. Seperti diketahui, akhir-akhir ini terdengar banyak keluhan tentang kemerosotan disiplin nasional yang terjadi di hampir semua segi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, disiplin nasional dipandang perlu untuk makin ditingkatkan, dan karenanya dimasukkan ke dalam GBHN. Pemakaian BI yang belum baik dan benar itu saya kira dapat digolongkan juga sebagai bagian dari kemerosotan disiplin karena pemakai bahasa gagal atau tidak menaati aturan-aturan yang ada pada BI. Mereka sangat mungkin mengetahui adanya kaidah-kaidah bahasa itu, tetapi enggan melaksanakannya. Kalau pendapat ini betul, usaha-usaha untuk mendorong pemakaian BI secara baik dan benar dapat pula disebut sebagai usaha untuk ikut serta meningkatkan disiplin nasional itu.

Marilah kini kita lihat bagaimana pemakaian BI sehari-hari di masyarakat luas. Sepintas lalu tampaknya BI sudah dipakai secara baik oleh masyarakat, termasuk para pemimpin, kaum cendekiawan/terpelajar, dan rakyat pada umumnya. Namun, bila diperhatikan dengan lebih seksama, akan kelihatan bahwa tidak jarang terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan dari penggunaan BI yang baik, baku yang menyangkut ucapan, tata bahasa, mau-

pun kosakata. Beberapa contoh penyimpangan dalam ketiga unsur bahasa ini akan disampaikan berikut ini.

### Penyimpangan dalam hal Ucapan

Dalam segi ucapan sering kita dengar kata-kata BI yang diucapkan dengan lafal BD, yang meskipun mungkin tidak mengganggu arus komunikasi, tetapi kedengarannya "janggal" juga untuk ahli bahasa, terutama guru-guru BI. Misalnya, kata-kata dapat, tetap, mantap, sangat, akan, datang, dan kata kerja (KK) yang berakhiran *-kan*, sering diucapkan dengan vokal *pepet* atau *schwa* pada suku kata yang terakhir; kalau ditulis tentunya harus digunakan huruf *e*, jadi

- (1) *dapet, tetep, mantep, sanget, aken, dateng, KK -en.*

Ini merupakan pengaruh bahasa Jawa, yang memang mempunyai vokal *pepet* pada suku akhir kata-kata seperti *mantep, sanget, saged, rapet, dateng, adem, ayem, karem, pager, tales, sabet, seger, dicatet, pantes*, dan *pegel*. Akan tetapi, dalam BI pada umumnya tidak terdapat bunyi vokal *pepet* pada suku kata terakhir seperti itu hingga mestinya kata-kata itu harus diucapkan dengan vokal *a*. Buktinya kata-kata BI lainnya yang tidak mempunyai padanannya dalam bahasa Jawa, tetap diucapkan dengan vokal *a*, dan bukannya dengan vokal *pepet*, misalnya

- (2) *bukan, rapat, perekat, sehat, hakekat, demam, tumbang, lambat, minat.*

BI pada dasarnya bahasa Melayu tidak mempunyai vokal *pepet* pada suku kata terakhir, dan sebagai gantinya digunakan vokal *a*. Ini tidak berarti bahwa vokal *pepet* tidak dipakai dalam BI karena kenyataan menunjukkan bahwa terdapat juga pemakaian vokal tersebut pada suku kata yang posisinya bukan pada akhir kata, misalnya

- (3) *sekarang, melekat, semangat, genderang, lekas, belum, dan jelas.*

Masalahnya sekarang ialah bahwa penggunaan vokal *pepet* pada suku kata akhir tersebut sudah sangat lama berlangsung, mungkin sejak tahun dua puluhan, sedangkan pemakaiannya sudah sangat luas. Akibatnya, ucapan demikian sudah merupakan kebiasaan yang mendarah daging, terutama pada pemakai-pemakai BI tertentu, termasuk pemuka-pemuka/pemimpin-pemimpin masyarakat hingga mungkin sukar sekali diubah. Karena pemimpin itu merupakan panutan masyarakat, ucapan demikian banyak juga ditiru. Andai-kata ucapan demikian makin meluas, kini justru timbul pertanyaan tentang mana ucapan yang baku, *datang* atau *dateng*, *akan* atau *aken* dan seterusnya karena pembakuan itu harus berdasarkan pemakaian dengan frekuensi yang tinggi.

Tentunya ada juga pengaruh ucapan dari bahasa-bahasa daerah lain,

dan sebagai contoh dapat disampaikan, misalnya, dari bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda tidak terdapat kata-kata yang berakhir pada bunyi vokal yang terbuka seperti *sama*, *kata*, dan *kota*. Jadi, setiap kata tentu berakhir dengan konsonan. Oleh sebab itu, kata-kata dengan bunyi vokal terbuka dalam B1 selalu diucapkan oleh orang Indonesia yang bahasa ibunya (B<sub>1</sub>) bahasa Sunda dengan akhiran konsonan letupan glotal /ʔ/ seperti konsonan terakhir pada kata-kata tampak dan tidak. Ini adalah suatu gejala yang biasa terdapat pada orang yang belajar atau berbicara dalam bahasa lain (B<sub>2</sub>) di luar bahasa ibunya, yakni menggunakan unsur bahasanya sendiri jika berbicara dalam B<sub>2</sub> itu. Hal ini terutama terjadi apabila ia mulai belajar bahasa itu pada usia dewasa. Kecenderungan mentransfer kebiasaan lamanya ke dalam bahasa baru itu sering disebut transfer atau pemindahan kebiasaan. Selama kebiasaan lamanya itu sama dengan sistem bahasa yang dipelajari (B<sub>2</sub>) hal itu tidak merupakan masalah karena tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Dalam hal ini pemindahan kebiasaan ini disebut transfer positif. Sebaliknya, apabila pemindahan kebiasaan itu menimbulkan arti yang berbeda, pemindahan kebiasaan ini dinamai transfer negatif. Misalnya orang dari Jawa Barat akan mengucapkan ketiga contoh kata di atas: *sama*, *kata*, dan *kota* dengan menambahkan bunyi letupan glotal sehingga ucapannya menjadi /samaʔ/, /kataʔ/, dan /kotaʔ/, dan jika ditulis dengan ejaan biasa akan menjadi

(4) *samak, katak, kotak.*

Dalam hal ini jelas bahwa arti yang dikemukakan akan berubah. Transfer negatif seperti inilah yang perlu dihindari dan diperhatikan karena akan menimbulkan salah tafsir. Salah ucap ini perlu dibetulkan dan disesuaikan dengan ucapan yang baik dan benar agar fungsi komunikasi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya salah paham,

Ada lagi pengaruh ucapan dari bahasa daerah lain, yakni bahasa Batak, yang seperti halnya pengaruh bahasa Jawa tidak terlalu mengganggu arus komunikasi, tetapi terasa agak "aneh" juga kedengarannya. Kalau orang Jawa suka menggunakan bunyi vokal pepet, terutama pada suku kata akhir, orang Batak justru suka mengganti bunyi vokal pepet dengan vokal /e/ untuk menyesuaikan bunyi dengan sistem bunyinya sendiri. Jadi, kata

(5) *perlu, terlalu, sekian*

akan diucapkan berturut-turut menjadi /pérlu/, /térla:lu/, /sé kian/.

Mungkin ucapan itu tidak menimbulkan salah tafsir, hanya saja kedengarannya agak "aneh" karena bunyi vokal pepet diucapkan dengan bunyi vokal /e/ yang lebih ke depan dan tinggi. Kesan aneh itu disebabkan juga oleh penekanan bunyi vokal kedua dari belakang (*penultimate syllable*), dan bunyi /i/ yang kedengarannya lebih bersuara (voiced) dan lebih ke belakang seperti *dark* -1 bahasa Inggris /ɪ/. Apabila pendengar dapat menangkap isi pesan, keanehan ucapan itu tidak usah dianggap serius, dan karenanya

dapat ditoleransi. Akan tetapi, apabila hal itu menimbulkan salah tangkap, penyimpangan ucapan yang baku itu perlu diluruskan. Mungkin saja orang Jakarta yang mendengar ucapan /perlu/ mengartikannya sebagai 'per kepunyaanmu'; ucapan /terla:lu/ mungkin saja ditafsirkan sebagai 'orang yang bernama Ter berlalu'; ucapan /sekian/ mempunyai arti tertentu dalam bahasa Tionghoa. Mungkin salah tafsir atau ketakasan (*ambiguity*) arti ini dapat saja dihindari dengan memperhatikan konteks. Akan tetapi, sayangnya konteks itu tidak selamanya jelas hingga kurang memberi pemecahan. Oleh karena itu, bagaimanapun juga ucapan yang baik dan baku itu lebih banyak mengandung segi positif daripada negatifnya.

Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa ucapan yang baik dan baku itu amat penting artinya, dan oleh karena itu perlu diusahakan dengan sungguh-sungguh. Ucapan yang baik dimaksudkan agar fungsi komunikasi berjalan lancar tanpa ada kemungkinan salah tafsir, dan selain itu tidak menimbulkan kesan ucapan yang aneh pada pendengarnya. Soalnya sekarang ialah ucapan manakah yang dapat dianggap baik dan baku sehingga dapat dipakai sebagai panduan atau pedoman bagi siapa saja yang mau belajar dan berbicara dalam BI. Pengadaan panduan seperti ini dirasakan amat mendesak, mengingat dewasa ini BI makin banyak dipelajari di negara-negara asing seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Mereka yang belajar ini memerlukan pedoman yang jelas mengenai kaidah-kaidah BI, termasuk kaidah yang menyangkut ucapan. Saya kira Pusat Bahasa perlu memikirkan hal ini lebih lanjut.

Saya pernah membaca buku tentang BI yang dipakai di luar negeri (Soebardi, 1973), yang menurut pendapat saya terdapat hal-hal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya, ada kontras antara /f/ dan /v/: yang satu tidak bersuara, sedangkan yang lain bersuara; padahal dalam kenyataan tidak ada perbedaan ucapan antara keduanya meskipun tulisannya berbeda; misalnya dalam *variabel* dan *motivasi*, /v/ diucapkan seperti /f/ dalam *fajar*. Konsonan-konsonan /n, s, z, r/ disebut *apicodental*, yang berarti diucapkan dengan menempelkan ujung lidah pada gigi, padahal nyatanya alveolar; vokal rangkap /au/ dan /ai/ diucapkan /au/ dan /aɪ/, sedangkan banyak orang Indonesia yang mengucapkan /ɔ/ dan /ɛɪ/.

Berbicara tentang ucapan yang baik dan baku, saya mendukung pendapat bahwa ucapan demikian itu adalah ucapan yang tidak mengandung atau mengungkapkan secara mencolok pengaruh dari sistem bunyi bahasa lain, apakah itu BD atau bahasa asing sehingga tidak menyulitkan pendengarnya untuk memahami isi pesan. Ucapan demikian biasanya dimiliki oleh orang-orang yang berkepentingan dengan pembakuan BI, seperti ahli bahasa, guru BI, penyiar radio/teve, dan sastrawan. Sehubungan dengan hal itu, mungkin langkah yang dapat ditempuh ialah merekam ucapan mereka yang

diambil secara acak dari berbagai tempat di Indonesia, dan kemudian menganalisisnya. Hasil pemerriannya didasarkan atas frekuensi pemakaian yang tinggi. Seandainya pemakaian ucapan *datang* misalnya menunjukkan frekuensi yang tinggi, dan bukan *dateng*, ucapan itu harus dianggap sebagai baku dan kemudian pula sebaliknya. Dengan demikian, hasil analisisnya benar-benar berdasarkan pengamatan/pemakaian BI secara nyata.

### Penyimpangan dalam Hal Tata Bahasa

Selain ucapan yang baik dan benar, perlu juga diusahakan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar pula, yang sesuai dengan kaidah-kaidah BI. Sering terjadi orang menggunakan kaidah-kaidah bahasa lain dalam menyusun kata menjadi frasa atau kalimat dalam BI. Akibatnya tentu saja kalimat atau ungkapan itu aneh, yang kadang-kadang maksudnya sukar dimengerti. Perhatikan contoh-contoh berikut ini.

- (6) *Saudaranya bapak saya*
- (7) *Saudara dari (pada) bapak saya*
- (8) *Bolehnya bekerja lama sekali*
- (9) *Ia membeli mobil yang mana habis dicat.*

Dalam ilmu bahasa dikenal apa yang disebut dengan istilah tanda atau alat sintaksis, yakni alat yang dipakai untuk menyusun kata-kata menjadi konstruksi sintaksis yang bermakna, seperti urutan kata, kata/morfem tugas (*functor*), infleksi, derivasi, dan prosodi. Setiap bahasa mempunyai alat sintaksisnya sendiri yang mungkin sama, tetapi seringkali berbeda dengan yang dipakai oleh bahasa lain. Karena itu, dalam menggunakan suatu bahasa, seharusnya dipakai pula alat sintaksis yang lazim dipakai dalam bahasa tersebut dan bukan bahasa lain. Ini dimaksudkan untuk melancarkan komunikasi dan menghindari salah paham. Bagi orang yang belajar bahasa lain, bahasa atau bahasa-bahasa yang telah dikuasai sebelumnya akan mempengaruhi penggunaan bahasa yang baru dipelajari itu. Misalnya, pernah orang yang bahasa ibunya bahasa Jawa (BJ) dan kemudian pernah belajar bahasa Belanda, dan mungkin juga bahasa Inggris, sering menunjukkan kesalahan atau penyimpangan dalam menggunakan BI yang disebabkan oleh pengaruh bahasa-bahasa itu. Semakin baik atau mendalam ia menguasai bahasa-bahasa itu, semakin besar pengaruhnya. Banyak orang tua kita yang telah lama menguasai bahasa Belanda akan mengucapkan /maxəlan/ untuk magelang, /proxram/ untuk program. *Ini hari* untuk *hari ini*, yang jelas merupakan pengaruh dari bahasa asing itu.

Pada contoh no (6) di atas sebagai *saudaranya bapak saya*, akhiran *-nya* di sini dipakai sebagai petunjuk *milik*. Sebenarnya hal itu tidak diperlukan dalam BI karena arti struktural ini, yakni yang menunjukkan pemilikan

dalam BI, cukup ditandai dengan susunan kata saja: *apa yang dimiliki* diikuti oleh *yang memiliki*. Jadi, seharusnya cukup *saudara ayah saya*. Sebaliknya, dalam bahasa Jawa pemilikan ditandai tidak hanya dengan urutan kata, tetapi juga dengan akhiran *-e* yang ditambahkan pada *apa yang dimiliki* dan diikuti dengan memilikinya. Jadi, *sedulure bapakku*. Penggunaan alat sintaksis untuk menunjukkan pemilikan ini, yakni akhiran *-e* dalam BJ, bersifat wajib karena tanpa itu arti pemilikan tidak dinyatakan, sedangkan gabungan kata-kata *\*sedulure bapakku* tidak merupakan bentuk yang bermakna. Akhiran *-e* dalam BJ mempunyai padanan *-nya* dalam BI sehingga secara analogi frasa BJ *sedulure bapakku* akan menjadi *saudaranya bapak saya* dalam BI. Akan tetapi, harus diingat bahwa penggunaan akhiran *-nya* dalam BI di sini tidak perlu dan bersifat berlebihan (*redundant*) dan tidak sesuai dengan BI yang baku. Bahkan mungkin pemakaian *-nya* di situ akan menimbulkan arti lain, yakni seseorang mempunyai saudara, dan ia bapak saya. Karena kalimat itu akan membingungkan atau taksa, sebaiknya akhiran *-nya* dihilangkan kalau maksudnya pemilikan.

Adakalanya untuk menyatakan pemilikan, orang seringkali menggunakan kata tugas *dari* atau *daripada* seperti pada contoh (7) *Saudara dari(pada) bapak saya*. Ini banyak dilakukan dalam pidato-pidato, yang resmi ataupun tidak, dan juga dalam tulisan seperti di majalah dan surat kabar. Di sini pun kata *dari* atau *dari pada* sebenarnya tidak diperlukan karena seperti telah disampaikan di atas, dalam hal ini BI hanya menggunakan urutan kata saja sebagai alat sintaksisnya. Penyimpangan dari BI yang baku di sini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menguasai atau pernah belajar bahasa Belanda atau Inggris. Dalam kedua bahasa ini hubungan pemilikan biasanya dinyatakan dengan kata tugas tertentu, yakni dalam bahasa Belanda *van*, dan bahasa Inggris *of*. Jadi, penggunaan *dari(pada)* di sini merupakan transfer negatif dari bahasa asing. Sebaiknya diingat bahwa pemakaian kata tugas di sini bersifat berlebihan dan tidak sesuai dengan kaidah BI yang baku, dan karena itu seyogyanya juga dihindari. Apalagi jika diingat bahwa kata *dari* dalam BI menunjukkan tempat hingga penggunaannya dapat menimbulkan ketaksaan atau kesalahpahaman, misalnya frasa *bus dari kantor* dapat berarti 'bus milik kantor' atau *bus yang datang dari kantor*. Mengenai kata tugas *dari pada* dapat dikatakan bahwa kata itu dalam BI biasanya tidak pernah dipakai untuk menunjukkan arti pemilikan atau hubungan yang lain; kata itu lazimnya dipergunakan untuk menyatakan perbandingan seperti *la lebih baik daripada saya*. Akan tetapi, seandainya kelak ternyata bahwa pemakaian kata tugas itu berdasarkan penelitian/pengamatan — menjadi meluas dan diterima oleh sebagian besar pemakai BI, memang tidak ada jalan lain kecuali menerimanya juga sebagai salah satu kaidah BI yang baku.

Pada contoh no. (8), *Bolehnya bekerja lama sekali*, tampak adanya

pengaruh dari BJ. Pendengar yang bahasa ibunya BJ dapat dengan mudah memahami maksud kalimat itu meskipun ada penyimpangan dari kaidah BI yang baku sebab kalimat itu merupakan terjemahan harfiah dari kalimat Bj *Oleh nyambut suwe banget*. Kata *oleh* dalam BI *boleh*, jadi *olehe* tentunya diterjemahkan dengan '*bolehnya*'. Akan tetapi, kata tugas BJ *olehe*, yang mungkin dapat dinamai alat nominalisasi karena mengubah kata kerja *nyambutgawe* menjadi kata benda dan di sini berfungsi sebagai subjek kalimat, tidak dikenal dalam BI dan mungkin bahasa daerah yang lain. Akibatnya, orang dengan latar belakang bahasa daerah lain mungkin juga tidak akan dapat menangkap maksud kalimat (8) tersebut. Jadi, fungsi komunikasi bahasa di sini terganggu dan tidak memenuhi sasaran hingga sebaiknya kalimat seperti itu dihindari saja karena merupakan penyimpangan dari BI yang baku.

Masih ada lagi contoh penggunaan alat sintaksis yang sering dipakai oleh sementara orang, baik dalam pidato maupun tulisan. Kita sering mendengar orang membuat kalimat seperti contoh No. (9) *Ia membeli mobil yang mana habis dicat*. Di sini dipakai kata *yang mana*, yang biasanya dalam BI dipakai sebagai kata tanya, tetapi di sini dipakai sebagai kata penghubung pengganti kata benda. Menurut kaidah BI yang benar, kata penghubung yang dipakai di sini seharusnya cukup hanya *yang* saja, tidak perlu diikuti dengan kata *mana*. Kata *yang mana* dalam BI pada dasarnya adalah kata tugas yang dipakai untuk kata tanya saja seperti pada kalimat tanya *Yang mana adikmu?*, dan tidak pernah sebagai kata penghubung seperti pada (9). Karena kata *yang mana* hanya dikenal sebagai kata tanya, mungkin saja kalimat yang menggunakan kata itu sebagai kata penghubung ditafsirkan sebagai kalimat pertanyaan. Mendengar kalimat seperti pada (9) akan menjadikan orang yang mendengarnya tertegun dan meraba-raba maksudnya, apalagi kalau ada jeda di muka kata penghubung itu; *Ia membeli mobil / yang mana habis dicat*. Ini mengakibatkan komunikasi tidak efektif, yang mungkin pula mengakibatkan salah tafsir. Karena itu, penggunaan *yang mana* sebagai kata penghubung sebaiknya dihindari saja.

Di sini tidak jelas asal-usul penggunaan kata *yang mana* sebagai kata ganti penghubung ini. Mungkin saja kata ini berasal dari kata bahasa Inggris *which* yang selain dipakai sebagai kata tanya seperti *which is your brother?*, juga dipakai sebagai kata ganti penghubung, misalnya *This is the table which I bought yesterday*. Andaikata dugaan ini benar, masih juga belum jelas mengapa dalam BI orang sampai perlu mengganti *yang* dengan *yang mana* sebagai kata ganti penghubung.

Meskipun belum umum, rupanya sekarang ada kecenderungan pemakaian kata-kata penghubung dalam BI yang didahului oleh kata depan, yang barangkali merupakan pengaruh bahasa Inggris, seperti *on which* atau

to whom dan sebagainya, misalnya

- (10) *Sekarang acaranya diskusi, setelah mandi kita akan istirahat.*  
 (11) *Hormatilah orang tuamu, kepada siapa hidupmu sekarang bergantung.*

BI sebetulnya tidak mengenal kata penghubung seperti itu, dan sebagai gantinya dipakai bentuk kalimat yang terpisah, misalnya

- (12) *Sekarang acaranya diskusi. Setelah itu, kita akan istirahat.*  
 (13) *Hormatilah orang tuamu. Hidupmu sekarang bergantung kepada mereka.*

Tentunya masih dapat disampaikan bentuk-bentuk sintaksis lain yang menyimpang dari kaidah-kaidah BI baku, baik yang disebabkan oleh pengaruh bahasa daerah maupun bahasa asing, tetapi contoh-contoh di atas kiranya cukup untuk menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan itu. Penyajian di atas sebenarnya dimaksudkan untuk mengimbau agar sebaiknya bentuk-bentuk sintaksis yang tidak sesuai dengan kaidah BI baku seperti contoh-contoh di atas dihindari saja agar maksud pesan dapat dipahami dengan mudah dan jelas. Untuk kepastiannya perlu dilakukan penelitian untuk menentukan kaidah-kaidah tata bahasa BI mana yang baku berdasarkan frekuensi yang tinggi. Sumber datanya diambilkan dari informasi atau model seperti telah disampaikan di bagian terdahulu, baik yang lisan maupun yang tertulis. Tentu saja kaidah-kaidah tata bahasa ini harus pula disertai dengan penjelasan tentang penggunaannya dalam situasi yang sesuai karena "mengetahui bahasa itu berarti mampu menggunakannya secara efektif di dalam situasi-situasi sosial" (Cunningsworth, 1983).

### Penyimpangan dalam Hal Kosakata

Seperti dalam hal bunyi dan tata bahasa, sering pula terjadi penyimpangan dalam hal kosakata. Penggunaan BI yang baik dan baku sebenarnya menghendaki pemakai bahasa hanya memakai kata-kata yang memang termasuk ke dalam perbendaharaan kata bahasa itu saja. Mungkin ada kata yang merupakan serapan dari bahasa lain, tetapi dapat saja dipakai asal telah diterima atau dinaturalisasikan ke dalam bahasa itu. Memang kadang-kadang orang terpaksa menggunakan kata yang berasal dari bahasa lain untuk memenuhi kebutuhan (*need-filling motive*), misalnya

- (14) *radio, teve, mobil, mesin, dan setasiun.*

Ini dapat saja dibenarkan karena kata-kata itu sudah lama dan secara luas dipakai sehingga merupakan bagian dari kosakata BI. Yang dianggap sebagai penyimpangan ialah apabila orang menggunakan kata-kata yang berasal dari bahasa lain, sedangkan BI sendiri sebenarnya mempunyai kata-kata itu dalam perbendaharaannya. Ini mungkin terjadi karena adanya dorongan prestise,

yakni supaya kedegaran ilmiah atau terpelajar, dan mungkin karena alasan lain.

Pada suatu rapat kerja ada seorang pembicara yang terlalu banyak menggunakan kata-kata atau ungkapan-ungkapan bahasa Inggris. Kata-kata bahasa Inggris yang dipakai di sela-sela kalimat BI itu misalnya *consistent*, *constraint*, *ambiguous*, *jeopardize*, *adequate*, *social responsibility*, *gentlemen agreement*, dan *final draft*, sedangkan sebenarnya kalau mau mencari ada saja kata-kata atau ungkapan-ungkapan BI yang kurang lebih sama artinya. Karena tidak semua orang menguasai bahasa asing ini dengan baik, jelas mereka ini menjumpai banyak kesulitan dalam mengikuti pembicaraannya. Akibatnya arus komunikasi tidak berjalan dengan lancar sebab isi pesan tidak sepenuhnya dapat ditangkap secara lengkap. Penggunaan BI seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan tentang penggunaan BI yang baik, benar, dan baku, dan karenanya harus dihindari, apalagi fungsi BI sebagai alat komunikasi tidak berjalan dengan sebaik-baiknya.

Ada lagi situasi lain, orang mencampuradukkan bahasa Belanda dengan BI. Misalnya, ibu-ibu suka mengobrol kata-kata, frasa-frasa, bahkan kalimat bahasa Belanda meskipun dalam percakapan itu pada dasarnya mereka menggunakan BI. Di antara mereka ada masalah karena mereka dapat mengerti maksud masing-masing. Mereka tahu apa yang dimaksud, misalnya dengan *toevallig*, *eigenlijk*, *vroeg of laat*, *dat is onzin*, *zo onverschillig*, dan *ik zal maar eerst voorschieten*. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak mengalami zaman belajar bahasa Belanda seperti ibu-ibu itu, suasana seperti tidak mengenakan. Mereka merasa seperti terlemparkan dari lingkungan percakapan, yang dapat menimbulkan rasa terasing dan rasa kejengkelan. Padahal maksud ibu-ibu yang menyelipkan kata-kata bahasa Belanda ke dalam BI tadi bukan demikian. Barangkali mereka hanya ingin bernostalgia saja atau mungkin ingin menunjukkan kelebihan diri karena pada zaman penjajah dulu hanya golongan elite saja yang menguasai bahasa Belanda, dan mereka termasuk ke dalamnya.

Apa pun sebabnya seharusnya mereka menyadari bahwa sekarang ini kita telah menjadi bangsa yang merdeka dan mempunyai BI sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Mereka harus ikut menjunjung tinggi bahasa nasional dan memupuk rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa sendiri. imbauan ini tentunya juga ditujukan kepada siapa saja yang merasa menjadi warga negara Indonesia. Di samping itu, kita juga harus mawas diri karena pemakaian suatu bahasa dalam lingkungan yang juga terdapat orang lain yang tidak menguasai bahasa itu akan menimbulkan rasa tidak enak pada yang bersangkutan. Singkatnya; pemakaian BI yang baik dan baku perlu digalakkan di dalam masyarakat, terutama di kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih suka menyelipkan kata-kata bahasa asing ke dalam pembicaraan mereka.

Imbauan yang sama juga ditujukan kepada masyarakat di daerah, yang karena satu dan lain hal menyelipkan kata-kata bahasa daerah ke dalam BI. Mungkin untuk menunjukkan rasa hormat pada yang diajak berbicara kata-kata BJ disisipkan ke dalam kalimat BI karena dalam bahasa daerah itu dikenal adanya tingkat-tingkat bahasa (unggah-ungguh) seperti *ngoko* dan *krama*, yang pemakaiannya bergantung pada status pembicaraan atau lawan bicara. Misalnya, pada atasannya orang akan bertanya *Kapan Bapak kondur (pulang) ke Semarang; Saya ingin sowan (menghadap) di ndalem (rumah) Bapak nanti*. Jelas ini merupakan penyimpangan dari BI yang baik dan baku karena adanya penggunaan kata-kata yang tidak termasuk ke dalam perbendaharaan kata BI. Ini merupakan pelanggaran terhadap ketertiban atau disiplin penggunaan BI yang baik dan benar.

Sering juga terjadi penyelipan kata bahasa daerah (Jawa) ke dalam BI yang terjadi di atas panggung atau layar teve, yang mungkin dimaksudkan untuk melawak. Akan tetapi, karena pendengarnya mempunyai latar belakang bahasa yang berbeda-beda, sebaiknya hal itu tidak dilakukan karena maksudnya tidak jelas, dan mungkin akan ditiru orang lain. Misalnya, *Orang saya tidak punya uang, Iha kok disuruh nonton*. Kalimat ini akan janggal dan sukar dimengerti oleh orang yang tidak tahu BJ. Akan tetapi, orang yang tahu BJ akan memahami maksudnya karena kata orang di sini merupakan terjemahan harfiah dari kata *wong*, yang memang sukar sekali dicari padanannya dalam BI. Mungkin kalimat di atas dapat diubah *Memang kenyataannya saya tidak mempunyai uang, mengapa disuruh menonton!*

Kata-kata bahasa daerah yang sudah umum dan secara luas dipakai, seperti *bisa* dan *mesti* yang dipakai secara bervariasi dengan *dapat* dan *harus*, boleh saja dipakai secara bebas. Demikian pula kata *tanpa* yang lebih ekonomis daripada tidak dengan karena ternyata telah banyak dipakai dalam BI. Untuk kata-kata lainnya yang mungkin agak sering dipakai tetapi belum jelas frekuensi pemakaiannya, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut.

Sekarang ini untuk pegangan pemakaian kosakata sedikitnya kita telah memiliki kamus karangan Purwodarminto, yang dapat dipakai sebagai buku acuan. Tentunya kamus itu perlu direvisi sewaktu-waktu, sesuai dengan perkembangan bahasa, misalnya setiap 15—20 tahun, untuk mengetahui kosakata mana yang mungkin diterima ke dalam perbendaharaan kata BI, atau mungkin yang hilang dari peredaran. Tinggal lagi kita menanti adanya buku acuan untuk ucapan dan tata bahasa yang sebaiknya disusun atas dasar penelitian BI seperti telah disampaikan di atas. Dengan demikian, lengkaplah pedoman kita mengenai penggunaan BI yang baik, benar, dan baku seperti yang diamanatkan di dalam GBHN. Dengan adanya acuan yang tertulis untuk BI baku yang menyangkut ketiga komponen bahasa itu, pembakuan bahasa nasional akan lebih mantap karena "syarat yang penting untuk pembakuan ialah bahasa baku itu harus tertulis" (Haugen, 1974).

## Usaha-usaha Pembakuan Bahasa Indonesia Peningkatan Usaha Pembakuan

Apabila kita memiliki pedoman yang jelas dan mantap untuk pembakuan BI, tinggal lagi meningkatkan usaha-usaha pembakuannya melalui berbagai cara. Pedoman yang berbentuk bahan cetak dan bahan rekaman untuk ucapan itu dikirimkan ke unsur-unsur strategis yang ada di sekolah, kantor, penerbitan, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu. Buku pedoman itu hendaknya dipakai sebagai buku teks utama di sekolah-sekolah, terutama di jurusan BI Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, tempat mahasiswa dididik untuk menjadi guru BI di sekolah-sekolah. Mereka inilah yang merupakan unsur paling strategis dalam penyebarluasan pemakaian BI yang baku karena setelah lulus mereka akan ditempatkan di berbagai-bagai tempat di seluruh Indonesia. Kalau sudah terbiasa menggunakan BI yang baku, pastilah mereka akan mengajarkannya kepada murid-murid ini tidak akan memakainya dalam lingkungan masing-masing sehingga penggunaan BI yang baku ini akan menjadi semakin luas dan mantap. Dengan demikian, diharapkan bahwa masyarakat luas pada akhirnya akan terpengaruh pula oleh pemakaian bahasa yang baku itu.

Peranan media massa juga amat besar. Karena itu andaikata para sastrawan, wartawan, dan redaksi dapat selalu memperhatikan kaidah-kaidah BI yang baku itu, penggunaannya akan makin memasyarakat. Kita tahu betapa luasnya jangkauan koran dan majalah yang sekarang diterbitkan di negara kita, apalagi dengan adanya gerakan koran masuk desa. Apabila pembaca selalu dihadapkan (*exposed*) pada BI yang baik dan baku, proses internasionalisasi bahasa itu akan menjadi semakin baik.

Di samping itu, perlu ditekankan adanya disiplin pemakaian BI — se-tidak-tidaknya pada diri sendiri — sesuai dengan pedoman yang ada karena tanpa kesadaran ini sulit dibayangkan apa yang tercantum dalam GBHN mengenai penggunaan BI secara baik dan benar itu dapat dilaksanakan. Pemimpin-pemimpin masyarakat, termasuk guru, sastrawan, bahasawan, wartawan, pimpinan kantor/instansi pemerintah dan swasta, dan lain-lainnya perlu memberikan teladan yang baik dalam hal ini. Anjuran tanpa teladan yang baik rasanya tidak akan memberikan hasil yang diharapkan.

Apa yang sampai sekarang dilakukan di TVRI mengenai penerangan tentang penggunaan BI yang baik, benar, dan baku perlu diteruskan. Usaha supaya terus dilakukan, untuk memikirkan adanya variasi dalam hal materi penyajian, metode penyampaian, dan orangnya yang menyajikan. Kesemuanya ini dimaksudkan agar pendengar tidak lekas bosan dan selalu akan menyempatkan diri untuk mengikuti acara tersebut. Bahkan disesuaikan dengan hal-hal yang aktual dan praktis, misalnya yang bertautan dengan kebutuhan.

menulis surat di kantor, membuat laporan, atau menyusun pidato. Metode penyampaian tidak selalu dengan ceramah tunggal dari pembawa acara, melainkan perlu terus diusahakan cara lain yang lebih menarik, misalnya dengan dialog, diskusi panel, kunjungan pada sastrawan, ahli bahasa, atau mungkin guru BI yang mengajar di kelas dan sebagainya. Orang itu mempunyai langgam dan cara yang berbeda-beda dalam menerangkan, yang mengandung segi-segi positif dan negatif. Kalau yang menyampaikan acara berganti-ganti, mereka dapat saling menetralisasi kekurangan-kekurangan yang ada pada masing-masing pembawa acara.

Barangkali perlu pula dipikirkan kemungkinan adanya pendengar yang sebenarnya berminat, tetapi karena satu dan lain hal tidak sempat mengikuti acara tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya bahan itu dikirimkan saja ke harian atau majalah untuk pemuatannya agar dapat dibaca secara lebih luas termasuk oleh mereka yang tidak dapat menyaksikan acara di teve. Dalam hal ini penanggung jawab penerbitannya perlu didekati untuk diharapkan kerja samanya ikut membantu penyebarluasan penggunaan BI baku.

Khusus untuk keperluan penggunaan BI di kantor-kantor atau instansi yang memerlukan BI dalam korespondensi, membuat laporan atau menyusun pidato-pidato sambutan, dapat dipikirkan kemungkinan penyelenggaraan kursus tentang penggunaan BI untuk maksud tersebut. Pelaksanaannya tentunya dilakukan oleh ahli BI, mungkin yang ada di Pusat Bahasa atau jurusan-jurusan BI di perguruan tinggi yang ada di daerah.

Mungkin dapat dipikirkan pula kemungkinan pendirian cabang atau perwakilan Pusat Bahasa di daerah-daerah untuk menangani masalah kebahasaan. Tugas yang menyangkut masalah kebahasaan ini sangat luas serta kompleks, dan kiranya sulit dilakukan dengan baik oleh satu lembaga yang hanya terdapat di Jakarta saja. Dengan adanya cabang kantor itu di daerah-daerah, pembinaan dan pengembangan BI akan dapat diharapkan berjalan lebih merata dan menjangkau seluruh pelosok tanah air.

### **Sikap Terhadap Bahasa Indonesia Baku**

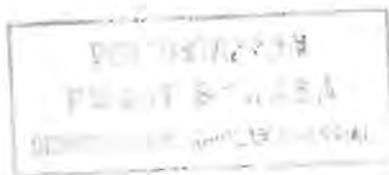
Pertanyaan yang berhubungan dengan pembakuan ini ialah bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap BI yang dibakukan. Saya kira kita harus menanamkan rasa disiplin yang tinggi dalam menggunakan BI sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dibakukan berdasarkan penelitian seperti yang telah tersebut di atas. Namun, di samping itu sikap kita juga harus terbuka terhadap adanya variasi yang mungkin timbul yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor.

Bahasa memang tidak statis, tetapi dinamis. Pada setiap bahasa yang hidup pasti ada kecenderungan untuk beragam atau bervariasi sehingga memungkinkan timbulnya pemakaian lebih dari satu unsur bahasa, misalnya

variasi dalam hal ucapan (*pohon pohon*), variasi dalam hal konstruksi gramatikal (*tembak-tembakan, tembak-menembak*), atau variasi dalam hal kosakata (*konsisten, taat asas*). Pada satu waktu pemakaian keduanya mungkin seimbang (*in equilibrium*) tetapi suatu saat, karena adanya persaingan pemakaian, yang satu mendesak yang lain dan menjadikannya hilang dari peredaran. Memang harus diakui bahwa tidak ada bahasa di dunia ini yang digunakan secara seragam benar oleh semua pemakai bahasa. Selalu akan ada variasi yang disebabkan oleh latar belakang kedaerahan yang berbeda, dan kecenderungan individu yang tidak sama (*idiosyncrasy*). Namun, harus diakui bahwa di samping perbedaan-perbedaan itu pasti ada sifat-sifat inti bahasa yang sama (*common core*) sehingga memungkinkan adanya saling pemahaman (*mutual intelligibility*) antara para pemakai bahasa.

Oleh karena itulah, sebaiknya kita bersikap, baik preskriptif maupun deskriptif. Di satu pihak kita bersikap preskriptif karena dengan penuh disiplin kita menggunakan BI sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dibakukan, bukannya semau kita sendiri. Akan tetapi, di lain pihak kita juga bersikap deskriptif, yakni terbuka terhadap adanya variasi dalam pemakaian bahasa. Mungkin terjadi bahwa apa yang pada suatu waktu dianggap salah dan tidak baku akan menjadi lumrah dan diterima oleh masyarakat pemakai bahasa. Inilah sebabnya, seperti telah disampaikan di atas, perlu dilakukan penelitian pada saat-saat tertentu untuk mencatat adanya perubahan-perubahan yang terjadi selama kurun waktu itu.

Dengan demikian, BI akan terus lestari dipakai sebagai bahasa yang baku, tetapi juga yang dinamis sepanjang masa sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia.



### DAFTAR PUSTAKA

- Cunningsworth, Alen. 1983. "What does it mean to Learn a Language?: Some Perspectives on the Future". Dalam *English Teaching Forum*. Vol. XXI No. 4 October 1983.
- Francis, W. Nelson. 1958. *The Structure of American English*. The Ronald Press Company. USA.
- Haugen, E. 1974. "Dialect, Language, Nation". Dalam *Sociolinguistics*. JB Pride (Ed). Penguin Books. Australia Ltd.
- Rockett, CF. 1960. *A Course in Modern Linguistics*. New York: The Mac Millan Company.
- Ketetapan MPR Republik Indonesia No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Bidang Kebudayaan.
- Nida, Eugene A. 1963. *Morphology. The Descriptive Analysis of Words*. The University of Michigan. USA.
- Samsuri, 1981. *Analisis Bahasa. Memahami Bahasa Secara Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soebardi, S. 1973. *Learn Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kanisius-Bhratara.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-undang Pokok Pendidikan No. 4 Th. 1950 dan No. 12 Th. 1954.

## **BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA KARTUN (Sebuah Studi Pendahuluan)**

**I Dewa Putu Wijana**

Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada

### **Pendahuluan**

Di dalam politik bahasa nasional secara jelas dikatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia, alat pemer-satu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan, kebudayaan, dan kesukuannya ke dalam satu masyarakat nasional Indonesia, serta alat perhubungan antar suku, antar daerah dan budaya. Selain itu, dikatakan pula bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara yang berfungsi sebagai bahasa resmi pemerintahan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Halim, 1980:17). Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia tersebut sekarang ini semakin dirasakan peranannya di dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara sehingga kemantapan eksistensinya wajib senantiasa ditingkatkan. Mengingat betapa pentingnya fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia ini, segala macam upaya yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan kebahasaan dan kegiatan-kegiatan lain yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap perkembangan bahasa Indonesia telah dilakukan di dalam berbagai kesempatan oleh semua pihak yang merasa berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan bahasa Indonesia. Bukti lain menunjukkan bahwa

kegiatan-kegiatan kebahasaan dari tahun ke tahun tetap menempati posisi yang pertama bila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kegiatan lain di dalam usaha membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1981, *passim*).

Membina dan mengembangkan suatu bahasa adalah tugas yang maha-berat. Di dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia khususnya, segala aspek yang mungkin menimbulkan hambatan bagi perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia yang positif disingkirkan. Dalam pada itu semua bentuk ragam pekaian bahasa harus dideskripsikan secara jelas sehingga strategi dan kebijaksanaan yang kita gariskan dapat dijalankan secara tepat dan efektif. Hanya dengan cara demikianlah apa yang kita bina dan kembangkan dapat dirasakan faedah dan manfaatnya secara luas oleh semua pihak pemakai bahasa Indonesia. Berdasarkan sudut pandang inilah dalam makalah ini penulis akan membicarakan salah satu jenis pemakaian bahasa Indonesia, yakni pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa kartun, sebagai salah satu register yang belum pernah diungkapkan oleh para ahli bahasa. Pembicaraan akan lebih banyak dipusatkan pada potensi bahasa Indonesia sebagai media penyampai di dalam membentuk atau menyusun kalimat-kalimat atau dialog-dialog yang akrab dan penuh humor di dalam usaha mengundang senyum dan tawa para pembacanya. Dengan penelitian ini diharapkan nantinya dapat diungkapkan aspek-aspek kebahasaan yang biasa atau sering dimanfaatkan oleh para kartunis di dalam mengkreasi buah karyanya. Dengan demikian, para ahli bahasa, khususnya para pembina dan pengembang bahasa, secara bijak dapat menggali, memilih, dan menyebarkan bentuk-bentuk kebahasaan tertentu sehingga secara tidak langsung ikut meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil ciptaan mereka. Dalam hubungan ini para pembina dan pengembang bahasa harus dapat menerapkan strategi yang sedemikian rupa sehingga dapat menjelmakan kondisi pemakaian yang memungkinkan untuk difungsikan sebagai sumber inspirasi yang tak kering-keringnya bagi pemenuhan kebutuhan daya kreasi para kartunis. Sebagai studi pendahuluan, semoga penelitian ini dapat membuka cakrawala bagi penelitian penggunaan bahasa Indonesia dalam kartun secara lebih mendalam dan penelitian bahasa humor sebagai sistemnya yang lebih luas ataupun penelitian terhadap pemakaian bahasa pada beberapa ragam lain yang selama ini jarang atau belum mendapat perhatian.

Kartun sebagai salah satu jenis humor dewasa ini telah berkembang dengan pesat terlebih-lebih pada saat sekarang kegemaran membaca telah menjadi bagian dari kehidupan modern dan perkembangan media cetak mengalami kemajuan yang menggembirakan. Beberapa surat kabar dan majalah merasa perlu menyajikan kartun-kartun, di samping artikel-artikel atau berita-berita lain sebagai selingan agar para pembaca tidak senantiasa berada dalam

keseriusan dan ketegangan saja. Selain sebagai penyaji humor, fungsi kartun yang lebih esensial adalah sebagai sarana kritik sosial. Sebuah kartun sering juga dipergunakan untuk mengungkapkan kepincangan-kepincangan masyarakat dan kejadian-kejadian lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan rencana, hasil dan pemerataan hasil pembangunan yang telah dijalankan selama ini. Fungsi kartun sebagai sarana kritik hanya dapat diwujudkan secara efektif jika didukung oleh media penyampai yang baik serta keterampilan para kartunis di dalam memanfaatkan media itu. Media penyampai kartun adalah bahasa Indonesia. Jadi, dalam hal ini kondisi pemakaian bahasa Indonesia yang baik harus tercipta dan para kartunis harus peka dan secara kreatif memanfaatkan kondisi itu.

Kartun yang dijadikan pokok pembicaraan dalam makalah ini adalah kartun yang berupa gambar-gambar yang menampilkan gambar-gambar berunsur humor yang kebanyakan berfungsi sebagai *stopper* atau ilustrasi dalam surat kabar atau majalah (PT Tiara Indonesia, 1983:38). Dalam hubungan ini dibedakan secara tegas dengan *karikatur* yang menampilkan wajah-wajah orang atau tokoh yang dilebih-lebihkan. Kartun yang banyak berkembang sekarang ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, *kartun tanpa kata*, yakni kartun yang menampilkan gambar-gambar yang memutarbalikkan logika semata-mata. Misalnya, kartun yang menggambarkan orang membawa tabung berbentuk hewan ke dokter hewan (kartun 1), orang menutup mulut orang di layar televisi (kartun 2), seorang anak belajar di bawah sinar lampu di tiang listrik (kartun 3), dan seorang terkejut karena alat tulisnya dijadikan jarum jam (kartun 4). Kedua, *kartun dengan kata*, yakni kartun-kartun yang mempergunakan unsur-unsur kebahasaan, seperti kata, frasa, kalimat, atau dialog. Di dalam membicarakan dan menertawakan peristiwa peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat sekitarnya. Dari kedua jenis kartun tersebut, jenis kartun yang terakhirlah yang kerap kali memanfaatkan aspek-aspek kebahasaan di dalam menyajikan humor-humor dan kritik-kritik kepada pembacanya. Unsur-unsur kebahasaan yang dimanfaatkan bermacam-macam jenisnya dan cara pemanfaatannya pun beragam-ragam bentuknya, yang kesemuanya itu patut diperhatikan oleh para ahli bahasa. Dengan perhatian itu, diharapkan para kartunis tidak hanya terdorong untuk menciptakan *kartun-kartun tanpa kata*, tetapi dapat pula menghasilkan *kartun-kartun dengan kata* dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak lagi kelihatan sebagai bahasa yang mati dalam arti tidak dapat dipergunakan untuk menciptakan kreasi-kreasi yang serupa. Peningkatan kualitas dan kuantitas *kartun dengan kata* sangat penting karena kartun ini lebih berfungsi sebagai sarana kritik sosial bila dibandingkan dengan *kartun tanpa kata* yang melulu memutarbalikkan logika. *Kartun dengan kata* lebih memungkinkan dijadikan sebagai alat kontrol sosial terhadap apa yang telah kita laksanakan dan kita capai sekarang ini.

## Metode Penelitian dan Sumber Data

Penelitian terhadap pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa kartun ini dilakukan secara sederhana. Pertama-tama semua kartun yang didapatkan dari surat kabar dan majalah terbitan Jakarta dan Yogyakarta dikumpulkan. Dari sekian banyak kartun yang terkumpul kemudian dipilih kartun-kartun yang memanfaatkan aspek-aspek kebahasaan, sedangkan *kartun tanpa kata* dan *kartun dengan kata* yang tidak memanfaatkan aspek kebahasaan dikesampingkan. Dengan metode ini diharapkan dapat diungkapkan aspek-aspek kebahasaan yang sering atau biasa dimanfaatkan para kartunis berdasarkan tingkat-tingkat kepotensialannya.

Kartun-kartun yang dipergunakan sebagai data diambil dari berbagai sumber, yakni:

1. majalah *Armi*, No. 01, Juli, 1983
2. majalah *Asah Otak*, No. 448, 16 Maret 1982
3. majalah *Asah Otak*, No. 449, 22 Maret 1982
4. majalah *Asah Otak*, No. 450, 30 Maret 1982
5. majalah *Asah Otak*, No. 451, 6 April 1982
6. majalah *Asah Otak*, No. 452, 13 April 1983
7. majalah *Buana*, 02, Oktober, 1982
8. majalah *Detektif & Romatika*, 0850, 20 Mei 1982
9. majalah *Gatot Kaca*, No. 10, Th. 14, 20 Mei 1983
10. majalah *Humor*, No. 037, 1 Oktober 1981
11. majalah *Intisari*, No. 236, Maret 1983
12. majalah *Kriminalitas dan Pencegahannya*, No. 0157, Medio Oktober 1980
13. majalah *Metro*, No. 3, April 1983
14. majalah *Stop*, No. 144, 5 Mei 1973
15. majalah *Stop*, No. 153, 7 Juli 1973
16. majalah *Stop*, No. 392, 30 Juli 1977
17. majalah *Sport Otak*, 16 Maret 1982, dan
18. majalah *Variasari*, No. 05, Oktober 1982.

## Aspek-aspek Kebahasaan yang Sering Dimanfaatkan Di Dalam Kartun

Setelah semua data yang diperoleh diteliti, dapatlah diketahui aspek-aspek kebahasaan yang sering atau biasa dimanfaatkan dan dikreasikan oleh para kartunis di dalam menciptakan karya-karyanya. Dari data yang terkumpul juga dapat dilihat cara-cara pemanfaatannya yang beraneka ragam bentuknya. Aspek-aspek kebahasaan itu adalah polisemi, idiom, peribahasa, homonim, ragam percakapan, pertalian makna frasa, bentuk-bentuk setara, dan akronim.

### a. Polisemi

Polisemi adalah ciri fundamental setiap bahasa (Ulmann, 1970:159) yang dapat tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor. Lebih-lebih bagi bahasa Indonesia yang mempunyai wilayah yang cukup luas dan penutur yang beraneka ragam latar belakang budaya dan suku, polisemi tentu akan berkembang dengan pesat. Sebuah kata tertentu akan memungkinkan menimbulkan bermacam-macam arti jika dipergunakan dalam situasi atau konteks pemakaian yang berbeda-beda. Kata *kaki* berarti 'anggota badan yang menopang tubuh' pada kalimat *Ja duduk lalu meluruskan kakinya*, 'bagian tungkai kaki yang di bawah sekali' pada kalimat *Kakinya terpijak pada duri*, 'bagian suatu benda yang jadi penopang' pada frasa *kaki meja*, *kaki dian*, dan sebagainya, 'bagian yang ada di bawah' pada frasa *kaki bukit*, *kaki gunung*, dan banyak lagi arti yang lain (Poerwadarminta, 1976:435).

Polisemi yang banyak ditemui pada kata-kata bahasa Indonesia ternyata sering dimanfaatkan oleh para kartunis di dalam menciptakan karya-karyanya. Kata *melamar* di dalam bahasa Indonesia mempunyai dua arti, yakni 'meminang' dan 'mencari pekerjaan', dan akan anehlah jika seorang laki-laki meminang gadis dengan menunjukkan STTB, surat berkelakuan baik, dan surat tidak terlibat G30S kepada calon mertuanya (kartun 5). Kata *duduk* dalam konteks *duduk di perguruan tinggi* bermakna 'kuliah' dan tidak ada hubungannya dengan pengertian 'meletakkan tubuh bertumpu pada pantat'. Oleh karena itu, kita akan tertawa atau setidak-tidaknya tersenyum jika mendengar dialog direktur dengan seorang pelamar kerja berikut.

Direktur : "Saudara pernah duduk di bangku perguruan tinggi...?"

Pelamar : "Pernah..., soalnya ketika itu saya jadi tukang sapu perguruan tinggi." (kartun 6)

Kesucian dan kemurahan cinta didasarkan atas ketulusan hati yang tidak dapat dipersamakan dengan kemurnian mas atau benda-benda yang lain yang kadarnya tidak dapat diukur dengan cara dan alat tertentu. Pemanfaatan polisemi kata *suci* dan *murni* dapat dilihat dalam kartun (7) yang dialognya sebagai berikut:

Pemuda : "Cintaku *suci* dan *murni*."

Gadis : "Kasih contohnya, biar aku tes di laboratorium kadar kemurniannya."

Karena mendengar betapa muluknya rayuan sang pemuda, dalam kartun yang lain kekasih terpaksa mengidentikkan kata *padam* 'tidak akan reda dalam arti terus setia' dengan pengertian *padam* 'tidak menyala karena aliran listrik terputus'. Untuk ini lihat dialog berikut.

Pemuda : "Percayalah, Welly! Cinta abang kepadamu tidak akan pernah *padam*."

Gadis : "Ah, bohong! PLN aja yang bonafid, sekali-sekali masih suka ada padamnya." (kartun 8)

Cara menyajikan humor-humor dengan kata yang berpolisemi ada bermacam-macam. Seorang kartunis kadang-kadang menampilkan pembatas suatu frasa terlebih dahulu, kemudian kesemuanya disimpangkan sehingga tidak berlangsung dengan baik. Kata *naik* dalam konteks *naik Garuda* atau *naik Merpati* sangat jauh bedanya dengan *naik* dalam konteks *naik haji* yang terlihat dalam dialog berikut:

Petugas lapangan : "Ke Mekah *naik* apa Pak... Garuda atawa Mer-  
udara  
pati?"

Jemaah haji : "Ah, masa nggak tau... *naik haji*." (kartun 9)

Kadang-kadang suatu kata ditampilkan dahulu kemudian dibatasi dengan pembatas (*modifier*) tertentu sehingga pengertiannya lebih mengkhusus dan menyimpang dari maksudnya semula. Misalnya, kata *kerja* dalam konteks *sudah kerja* artinya 'sudah mempunyai pekerjaan' dan akan menyimpang jika hadir bersama pembatasnya dalam bentuk *kerja bakti*. Untuk ini lihat dialog berikut.

Bapak : "Kamu boleh kawin kalau *sudah kerja*."

Anak : "Saya sudah kerja kok Pak.... Minggu kemarin justru saya  
*kerja bakti*." (kartun 10)

Kata yang berpolisemi kadang-kadang dipakai oleh seorang tokoh kartun untuk memperolok-olok lawan bicaranya, dan setelah lawan bicara terpancing oleh bualannya barulah kata itu dilengkapi konteksnya. Hal ini dapat dilihat dalam dialog kartun (11) berikut.

+ "Saya nggak sombong..... Pak Jendral itu dulu cuma *sekelas* dengan saya.

- "Kalo ngomong yang bener!"

+ "Waktu sama-sama *naik KA Senja*." (kartun 11)

Kartun yang berpolisemi di dalam kartun kadang-kadang tidak dimanfaatkan dengan bentuk dialog, tetapi dengan secara langsung menyimpangkan makna kiasannya dengan makna yang sebenarnya di dalam gambar sehingga melanggar pengertian yang umum. Bentuk *surat kawat* yang secara umum berarti 'telegram' digambarkan secara harfiah dengan 'surat yang berisi gulungan-gulungan kawat', seperti terlihat dalam kartun (12). Kartun yang memanfaatkan polisemi kata di dalam menyajikan humor sangat banyak ditemui. Untuk lebih lengkapnya lihat kartun (13), (14), (15), (16) dan (17) yang memanfaatkan polisemi kata *keras-keras, jalan, basah, memeras* dan *dalang*.

## b. Idiom

Beberapa kata yang berpolisemi dapat membentuk bentuk-bentuk ke-

bahasa yang bentuknya tetap dan artinya tidak ditafsirkan dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang membentuknya. Bentuk-bentuk yang demikian itu lazim disebut dengan idiom (Chockett, 1958:171-173). Oleh karena itulah, bentuk *mata sapi* 'telur goreng' artinya sangat berlainan dengan historis atau diakronik ada hubungan semantis dengan unsur-unsur pembentuk itu, hanya saja dalam pemakaian sehari-hari hubungan itu hampir tak terasa. Oleh para kartunis idiom sering dimanfaatkan di dalam menciptakan kartun-kartun dengan cara mengartikannya dengan arti bagian-bagiannya. Oleh karena itulah, kita akan tersenyum jika seorang dokter mata mengucapkan, "*Mata saudara agak mata duitan.*" sewaktu memeriksa pasiennya (lihat kartun 18). Idiom *mata duitan* artinya 'orang yang selalu memikirkan uang', dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyakit mata yang diderita pasiennya. Idiom *menyingsingkan lengan baju* yang artinya 'mulai bekerja' sama sekali jauh berbeda jika ditafsirkan dari unsur-unsur pembentuknya. Oleh karena itulah, kita akan melihat komunikasi yang terputus bila kita perhatikan dialog berikut ini.

Pidato radio : "Marilah kita singsingkan lengan baju."

Anak : "Wah, lha baju saya tanpa lengan itu." (kartun 19)

Idiom *kaki lima* dalam *pedagang kaki lima* artinya 'trotoar' dan tidak berkaitan dengan jumlah kaki yang dimiliki oleh seorang pedagang. Pemanfaatan idiom *kaki lima* dapat dilihat dalam ujaran kartun (20) berikut.

+ "Katanya kau di kota jadi pedagang *kaki lima*... Kok kakimu tetap saja seperti dulu...." (kartun 20)

Idiom *sampai mati* dalam kalimat *Walau sampai mati cintaku tidak akan putus* berarti 'cinta itu benar-benar murni' dan tidak ada kaitannya dengan pengertian 'ajal', dan jika diartikan demikian, akan menimbulkan kejanggalan. Untuk ini dapat dilihat dalam dialog kartun berikut.

Pemuda : "Walau *sampai mati* tidak akan kuputus cintaku Dik...!"

Gadis : "Kalau kau mati belum kauputus... berarti aku main cinta di kuburan." (kartun 21)

### c. Peribahasa

Peribahasa adalah salah satu karya sastra lama yang bentuknya sangat sederhana, yakni berupa kalimat-kalimat yang tetap bentuknya dan artinya mengandung kiasan (Notosudirdjo, 1979:9). Sebagai kalimat-kalimat yang mengandung kiasan, tentu saja tidak akan tepat jika diartikan secara lugas. Peribahan-peribahasa di dalam bahasa Indonesia yang cukup banyak jumlahnya (tidak kurang dari 3.000, periksa Pamuncak (1961) sebenarnya banyak di antaranya berpotensi untuk dihidupkan kembali sehingga dapat dipergunakan sebagai inspirasi yang cukup segar di dalam pembuatan dialog-dialog kartun. Hal ini dianjurkan karena dari sekian banyak data hanya beberapa saja

yang memanfaatkan peribahasa sebagai bahan humornya. Kartun (22) dan (23) memanfaatkan peribahasa yang sudah sangat terkenal *Sorga itu di telapak kaki ibu* sebagai bahan humor dengan menampilkan anak kecil yang secara lugas mengartikannya. Untuk itu lihat ucapan anak itu dalam dua buah kalimat berikut.

Sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu.... Hati-hati Bu... keinjak tai ayam... kasian, dong sorganya. (kartun 22)

Coba angkat kakinya, Bu!" Tomi ingin melihat *sorga di bawah telapak kaki Ibu*. (kartun 23)

Seorang kartunis selain sebagai penyaji humor juga sebagai pembawa atau penyampai isi hati nurani masyarakat lingkungannya. Jadi, seorang kartunis juga harus mampu menyampaikan kepincangan-kepincangan, pergeseran, dan perubahan nilai-nilai sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakatnya lewat hasil karyanya. Misalnya, untuk mengungkapkan betapa tercelanya perbuatan korupsi, kadang-kadang kartunis menafsirkan secara agak bebas arti peribahasa *Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari*. Dengan tafsiran itu diharapkan para koruptor sedikit merasa gentar dan tidak lagi, atau paling tidak akan mengurangi perbuatan terkutuk itu. Untuk itu lihat dialog guru dan murid berikut.

Guru : "*Panas setahun pasti terhapus hujan sehari... apa artinya, Dul?!*"

Murid : Artinya... korupsi bertahun-tahun pasti dihapus dengan hukuman mati sekali! (kartun 24)

Peribahasa *Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh* oleh seorang kartunis dipecah menjadi dua bagian yang masing-masing bagiannya diucapkan oleh dua orang penyandang cacat bekerja sama mengendarai sepeda. Tokoh tak berkaki mengucapkan *Bersatu kita teguh* dan tokoh tak bertangan mengucapkan *Bercerai kita runtuh*. Secara logis memang kalau mereka tidak berpegang teguh pada peribahasa tersebut, sepeda yang mereka kendari akan runtuh (kartun 25). Contoh pemanfaatan peribahasa yang lain adalah kartun (26) yang memanfaatkan peribahasa *Sedia payung sebelum hujan*.

#### d. Homonim

Homonim adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai bentuk yang sama. Kata-kata yang berhomonim ada yang semula bentuknya memang kebetulan sama dan ada pula yang kehomonimannya disebabkan oleh beberapa peristiwa kebahasaan, seperti masuknya kata asing, masuknya kata daerah, afiksasi, penyingkatan, dan gejala bahasa (Wijana, 1981). Bentuk-bentuk yang berhomonim di dalam bahasa Indonesia tidak kurang dari 1.000 jumlahnya, dan ini pun tidak banyak dimanfaatkan oleh para kartunis di

dalam menciptakan humor-humor di dalam kartunnya. Dari data yang terkumpul ditemukan beberapa kartun yang memanfaatkan homonim. Kata *emas* 'jenis logam mulia' karena pengucapan bunyi pepet pada posisi semacam itu lemah maka akan berhomonim dengan kata *mas* yang bermakna 'kakak laki-laki' yang dipungut dari bahasa Jawa. Adanya perbedaan arti di antara kedua kata tersebut dimanfaatkan untuk membentuk dialog kartun (27) berikut ini.

Penjahat : "Di mana kau simpan *mas* dan permatamu?"

Ibu : Mas saya Mas Sastro lagi ke Solo, mata saya lha ini! (kartun 27)

Salah satu anggota pasangan homonim itu kadang-kadang diambilkan dari nama kota. Kata *solo* dalam *gitaris solo* artinya 'tunggal' akan berhomonim dengan kata *Solo* 'nama kota di Jawa Tengah' dan kata *kuningan* 'nama sejenis logam' akan berhomonim dengan kata *Kuningan* 'nama sebuah tempat di kota Jakarta'. Adapun pemanfaatannya dapat dilihat dalam dialog kartun (28) dan (29) berikut.

+ "Saya ini pemain gitar *solo*."

- "Kebetulan saya orang *Solo*... coba hibur saya dengan lagu-lagu daerah *Solo*." (kartun 28)

+ "He... kau orang Kuningan, ya?"

- "Bukan... bukan kuningan... tembaga." (kartun 29)

Pemanfaatan homonim yang menarik adalah pemanfaatan homonim *krawang* yang tergabung dalam frasa *goyang krawang* dengan mengidentikkan dengan kata *Krawang* 'nama sebuah kota di Jawa Barat' dan kata *goyang* sebagai hasil bumi yang dihasilkan oleh kata itu sehingga frasa yang dibentuknya sejajar dengan frasa *salak bali*, *beras delanggu*, *mangga probolinggo*, dan sebagainya untuk ini dapat dilihat dialog kartun (30) berikut.

Guru : "Coba siapa tahu kota *Krawang* menghasilkan apa?"

Murid : "Menghasilkan goyang, Pak." (kartun 30)

Bentuk-bentuk homonim yang dimanfaatkan di dalam menampilkan humor tidak selamanya berupa homonim penuh, tetapi kadang-kadang hanya homonim sebagian saja. Misalnya, pemanfaatan unsur *temu* di dalam *temukarya* 'sejenis lokakarya atau seminar' dan *temulawak* '*curcuma Xanthorrhiza*'. Di dalam sebuah kartun digambarkan seorang peserta temukarya keheran-heranan melihat dua tanda penunjuk jalan pada dinding gedung yang satu bertuliskan *Temukarya Psikiatri* dan yang satu lagi bertuliskan *Temulawak Sedaa...p!* (kartun 31)

#### e. Ragam Percakapan

Kartun sebagai media penyaji humor umumnya mempergunakan

kalimat-kalimat atau dialog-dialog yang sederhana sehingga amanat yang hendak disuguhkannya dapat diterima secara mudah dan santai oleh pembacanya. Ragam bahasa yang dipakainya adalah ragam bahasa percakapan yang biasa kita dengarkan di dalam pergaulan sehari-hari pada situasi-situasi yang tidak resmi. Adanya pemakaian bentuk kata tutur, seperti *keinjak*, *kasian* (kartun 22), *dikit*, *kasih* (kartun 33); pemakaian kata seru *wah*, *la* (kartun 19), *dong* (kartun 22), *kok* (kartun 20); pemakaian kalimat bahasa percakapan ... *sekali-sekali masih suka ada padamnya* (kartun 8), *Wah, la baju saya tanpa lengan itu* (kartun 19), *Lho... orang mau pergi jadi dalang*, dan *kok siang hari bolong...?* (kartun 17) yang kesemuanya adalah ciri-ciri formal dari ragam tutur (lihat Kridalaksana (1981), Poedjosoedarmo (1978), Poerwadarminta (1979), dan Wijana (1982a).

Bentuk-bentuk kebahasaan ragam percakapan sering dimanfaatkan oleh para kartunis di dalam mencipta kartun-kartunnya. Di dalam percakapan sehari-hari kalimat *Ini ada telepon* artinya 'ada orang yang menelepon'. Kalimat semacam ini secara kebetulan ambigu dengan pengertian 'ada (sebuah) telepon'. Oleh karena itulah, seorang majikan sangat terkejut melihat pembantunya menyerahkan sebuah telepon yang terputus kabel atau salurannya sambil mengucapkan "Ini ada telpon buat tuan..." (kartun 32). Kalimat *Saya minta tambah dikit lemburannya* di dalam bahasa percakapan harus diartikan 'saya meminta tambahan upah hasil melembur'. Jadi, akan menimbulkan kelucuan jika ditafsirkan lemburannya yang diperpanjang, seperti yang terjadi dalam dialog kartun (33) berikut:

Buruh : "Kasihannya saya Pak Agan, *saya minta dikit lemburannya* karena saya kerja membatat rumputnya lebat sekali dari pagi hingga pagi lagi! He, he, he, he, he,.... he."

Juragan : "Ya gua... kasih tambah lembur lima tahun lagi. (kartun 33)

Kata-kata panggilan kekerabatan seperti *kakang*, *ibu*, dan *abang* di dalam percakapan atau situasi-situasi santai sering diucapkan *kang*, *bu*, dan *bang*. Selain kata-kata panggilan kekerabatan, kata-kata yang menyatakan nama orang pun sering disingkat ucapannya. Orang yang bernama *Arsat* sering dipanggil *Sat* dan orang yang bernama *Rika* sering dipanggil *Rik* saja. Kata panggilan *kang* jika diikuti dengan kata *guru* menjadi *kang guru* 'kakak guru' yang secara kebetulan bentuknya sama dengan *kangguru*. 'nama sejenis binatang yang hidup di Australia', dimanfaatkan oleh seorang kartunis dengan menampilkan tokoh-tokoh *kangguru* untuk menyindir nasib pahit para guru di Indonesia. Dalam kartun ini seekor *kangguru* mengucapkan kalimat *Mari kita berdoa untuk perbaikan nasib rekan-rekan kita "Kangguru" di Indonesia* (kartun 35). Frasa *Abang Arsat* dan *Ibu Rika* di dalam bahasa percakapan akan diucapkan *Bang Sat* dan *Bu Rik* yang secara kebetulan juga sama dengan kata *bangsat* dan *burik* yang berarti 'kutu busuk atau orang jahat' dan 'bopeng'. Peman-

faatan penyingkatan kata panggilan itu dapat dilihat dalam kartun (34) yang dialognya sebagai berikut.

- + "Bu guru kami namanya Rika biasa dipanggil *burik* saja!"
- "Abang kami namanya Arsat biasanya kami panggil *bangsat*!"  
(kartun 35)

#### f. Pertalian Makna Frasa

Pertemuan unsur-unsur pembentuk frasa sering menimbulkan keambiguan. Di dalam kartun pemanfaatan ada bermacam-macam caranya. Suatu frasa tertentu mula-mula didefinisikan secara kurang tepat kemudian dianalogikan dengan frasa-frasa lain yang pembatasnya sama. Untuk ini lihat dialog kartun (37) berikut.

- + "Jalan raya adalah jalan yang terbuat dari aspal!"
- "Hari raya adalah hari yang terbuat dari aspal?" (kartun 36)

Walaupun secara umum jalan raya terbuat dari aspal, tidaklah tepat jika ditafsirkan seperti itu. Hendaknya frasa itu diartikan dengan 'jalan yang besar'. Suatu frasa mula-mula didefinisikan secara tepat kemudian dianalogikan dengan bentuk-bentuk lain yang tidak dapat diperlakukan semacam itu, misalnya pada kartun (37) berikut.

- + "Kalau kita mengangkat anak, anak itu namanya *anak angkat*."
- "Kalau kita mengangkat presiden kita, namanya *presiden angkat*."  
(kartun 37)

Istilah *anak angkat* memang lazim, tetapi *presiden angkat* amat janggal mendengarannya. Selain itu, frasa mula-mula diartikan secara tepat kemudian frasa yang lain didefinisikan secara sembarangan. Untuk itu dapat dilihat dalam dialog kartun (38) berikut.

- + "Pasar malam adalah pasar yang diselenggarakan malam hari."
- "Pasar Senen adalah pasar yang tiap hari Senin banyak copetnya, ya?" (kartun 38)

#### g. Bentuk-bentuk Setara

Bentuk-bentuk setara, yakni bentuk-bentuk yang mempunyai nilai yang sama, tetapi maknanya sedikit berbeda karena salah satu unsurnya berbeda, kadang-kadang dimanfaatkan oleh seorang kartunis untuk menciptakan humor dalam dialog sebuah kartun. Bentuk yang dimanfaatkan adalah *tuna netra* dan *tuna harta* dengan cara menampilkan seorang peminta-minta dan seorang nyonya. Untuk ini dapat dilihat dialog kartun berikut.

- Pengemis : "Kasihannya nyah, *tuna netra*."
- Nyonya : "Sorry pak!! Hari ini saya *tuna harta*." (kartun 39)

## h. Akronim

Akronim-akronim yang cukup banyak jumlahnya di dalam bahasa Indonesia sebenarnya cukup memungkinkan bila dimanfaatkan oleh seorang kartunis di dalam membuat humor-humor di dalam kartun yang diciptakannya karena tidak sedikit di antaranya mempunyai kesamaan-kesamaan bentuk dengan kata-kata lain sehingga mudah disimpang-simpangkan dari konteksnya. Dari sekian banyak data hanya satu saja yang memanfaatkan akronim. Akronim yang dimanfaatkan adalah *siskamling* 'sistem keamanan lingkungan' yang sedang digalakkan oleh seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat di seluruh kawasan Indonesia di dalam menanggulangi segala bentuk tindak kejahatan. *Siskamling* di dalam kartun yang dijadikan data tidak diartikan dengan arti yang semestinya, tetapi diberi arti yang sangat jauh berbeda sehingga kita merasa geli mendengarnya. Untuk lebih jelasnya marilah kita dengarkan jerit tangis seorang anak gembala karena kambingnya dicuri oleh seorang maling di bawah ini:

Hoa... HUUU *siskamling*... uuu *siskamling*!!

Tolong uuu... tolong *siskamling*

Tolong... *sisa kambing saya dibawa*... wa... maling!! (kartun 40)

## Potensi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Kartun

Dilihat dari bentuk-bentuk yang sering dimanfaatkan di dalam proses penciptaan kartun dan kondisi pemakaian bahasa Indonesia sekarang ini serta kekayaan bahasa yang secara potensial memungkinkan untuk dihidupkan dan dikembangkan lagi, bahasa Indonesia sebenarnya cukup berpotensi jika dipergunakan sebagai bahasa kartun. Polisemi kata, idiom, peribahasa, bentuk ragam percakapan, ambiguitas hubungan unsur pembentuk frasa, homonim, dan akronim, serta bentuk-bentuk setara yang diakibatkan adanya proses pembentukan kata baru, yang kesemuanya itu merupakan pencerminan luasnya pemakaian bahasa Indonesia dan cara berpikir masyarakat Indonesia adalah sumber kekayaan yang tak ternilai harganya jika dimanfaatkan secara maksimal oleh para kartunis di dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kartun-kartunnya.

## Kesimpulan

Kartun adalah salah satu bentuk seni humor yang banyak memanfaatkan aspek-aspek kebahasaan di dalam usaha memancing senyum dan tawa para pembacanya. Aspek-aspek kebahasaan yang banyak dimanfaatkan adalah polisemi, idiom, peribahasa, homonim, ragam percakapan, pertalian makna frasa, bentuk-bentuk setara, dan akronim. Pada kenyataannya, dari aspek-aspek ini, hanya polisemi dan idiomlah yang banyak dimanfaatkan, sedangkan

aspek-aspek lainnya belum dimanfaatkan sepenuhnya. Kartun yang juga berfungsi sebagai perekam seluruh kejadian dan keresahan, serta pergeseran nilai budaya di dalam upaya masyarakatnya pada masa sekarang ini sangat diperlukan kehadirannya sebagai alat kontrol sosial di dalam upaya mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan. Perkembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitasnya hanya dapat diwujudkan jika telah memanfaatkan aspek-aspek kebahasaan tersebut secara maksimal. Hal ini akan tercapai jika para kartunis melihat perkembangan aspek-aspek kebahasaan tersebut di dalam pemakaian sehari-hari, dan para ahli bahasa, khususnya pembina dan pengembang bahasa menggali dan menyebarluaskan bentuk-bentuk baru dari aspek itu. Dengan demikian, kondisi pemakaian bahasa Indonesia yang senantiasa dapat memenuhi kebutuhan proses kreativitas para kartunis pun terwujudlah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chockett, Charles F. 1958. *A Course in Modern Linguistics*. New York: The Macmillan Company.
- Halim, Amran. 1980. "Fungsi Politik Bahasa Nasional". *Dalam Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kridalaksana, Harimurti. 1981. "Bahasa Baku". *Dalam Majalah Pembinaan Bahasa Indonesia*, No. 1 Jilid II. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Poedjosoedarmo, Soepomo. 1978. "Tutur Ringkas Bahasa Indonesia". *Dalam Bahasa dan Sastra* Th. 4. No. 1. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Notosudirdjo, Suwardi. 1979. *Pengetahuan Bahasa Indonesia Baru*. Cetakan ke-1. Jakarta: Mutiara.
- Pamuntjak, K. St. et. al. 1961. *Peribahasa*. Cetakan ke-8, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-5. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- , 1979. *Bahasa Indonesia untuk Karang-Mengarang*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: UP Indonesia.
- PT Tiara Indonesia, 1983. "Wajah Kita dalam Kartun". *Dalam Majalah Fokus* No. 29, Th. 1. Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Cetakan ke-1. Jakarta.
- Ulmann, Stephen. 1970. *Semantics, An Introduction to The Science of Meaning*. Basil Blackwell: Oxford.

- Wijana, i Dewa Putu. 1982. "Sebab-sebab Terbentuknya Homonim dalam Bahasa Indonesia". Makalah Seminar Masyarakat Linguistik, 28 s.d. 1 Maret 1982. Surakarta.
- , 1982. "Kata Tutur dalam Bahasa Indonesia". Makalah Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia IV se-Jawa Tengah dan DIY.

## **SITUASI KEBAKUAN BAHASA INDONESIA: Sebuah Neraca antara Keharuan dan Kenyataan**

**Suardi Sapani**  
IKIP Bandung

### **Pengantar**

Setiap kali ada kesempatan merenung tentang bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, perasaan pertama yang seyogianya menjalar dalam sanubari kita ialah rasa syukur ke hadirat Yang Maha Pengasih atas karunia yang telah dilimpahkan-Nya bagi bahasa nasional kita itu. Munculnya perasaan itu bukan saja karena bahasa Indonesia telah berkembang makin sempurna sebagai bahasa modern, tetapi terutama karena jasanya yang amat besar bagi bangsa dan negara kita.

Jasa-jasa besar itu, misalnya, adalah sebagai berikut.

1. Mempersatukan rakyat Indonesia dari berbagai suku bangsa, yang tadinya agak merasa asing satu dengan yang lain karena sulit berhubungan, menjadi sebuah bangsa yang bersatu.
2. Membantu pemerintah dalam menjalankan tugas yang diembannya.
3. Mencerdaskan bangsa melalui pendidikan.
4. Melancarkan roda pembangunan.
5. Memberikan kepada kita identitas sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dan berkepribadian.

Rasa syukur ini akan bertambah lagi bila kita menengok ke luar, ke negara-negara berkembang lain yang dekat atau yang jauh dari kita. Namun, hasil-hasil yang telah dicapai ini janganlah membuat kita lupa akan kekurangan-kekurangan yang masih ada. Makalah ini mencoba membuat semacam ne-

raca untuk melihat kekurangan-kekurangan itu, khusus dari sudut pembakuan bahasa.

Tujuan utama pembahasan ini adalah memberikan imbauan untuk memelihara dan meningkatkan apa-apa yang sudah dicapai, dan mengejar apa-apa yang belum tercapai. Semuanya ini dalam rangka memelihara dan meningkatkan peranan bahasa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur.

Uraian pada bagian Bahasa Baku dan Pembakuan Bahasa dimaksudkan sebagai landasan teori untuk uraian-uraian selanjutnya.

## Bahasa Baku dan Pembakuan Bahasa

### Bahasa Baku

Dunia kita ini kaya dengan bahasa, mulai dari bahasa yang berpendukung jutaan sampai kepada yang berpendukung ribuan, bahkan hanya ratusan. Di antara yang berpendukung jutaan, misalnya bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, Cina, dan Indonesia.

Kebanyakan orang menganggap bahwa masing-masing bahasa tersebut satu adanya. Artinya, hanya ada satu bahasa Inggris, satu bahasa Perancis, satu bahasa Indonesia, dan seterusnya. Anggapan umum ini amat keliru karena masing-masing bahasa itu sesungguhnya beragam atau bervariasi, baik variasi karena daerah pemakainya (dialek), maupun variasi karena pemakaiannya (register). Dalam hubungan ini, bahasa baku/standar adalah salah satu variasi yang sengaja diciptakan untuk menjadi ukuran/model bahasa yang benar. Dengan demikian, dapat dipahami bila dikatakan bahwa salah satu fungsi bahasa standar/baku itu ialah menjaga agar variasi-variasi lain tidak terlalu jauh satu dengan yang lainnya. Begitu juga halnya dengan bahasa baku Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *bahasa baku* (bahasa standar) ialah variasi bahasa suatu bahasa hasil proses pembakuan (standarisasi) untuk dijadikan ukuran/standar/model bahasa yang baik dan benar bagi pemakai bahasa tersebut. Dalam hubungan ini variasi-variasi yang lain disebut variasi nonstandar.

### Proses Pembakuan Bahasa

Pembakuan bahasa (standarisasi bahasa) merupakan suatu bentuk intervensi masyarakat pemakai bahasa terhadap bahasanya melalui suatu lembaga bahasa yang resmi bertugas untuk itu, yang di negara kita tidak lain Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dengan proses tertentu.

Adapun proses pembakuan bahasa itu lazimnya melalui tahap-tahap berikut.

- a. **Seleksi**, yakni memilih di antara bahasa-bahasa dan variasi-variasi bahasa yang akan dijadikan bahasa baku. Pemilihan ini melalui berbagai pertimbangan, seperti penyebaran, kedudukan, dan latar belakang sejarah.
- b. **Kodifikasi**, yakni penyusunan kumpulan-kumpulan norma yang akan dijadikan acuan bagi bahasa itu untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, yang meliputi semua bidang bahasa. Karena itu, kodifikasi ini akan menghasilkan tata bahasa normatif, kamus normatif, lafal normatif, biasanya digabung dalam kamus, dan ortografi/ejaan normatif.
- c. **Peningkatan Fungsi dan Penggunaan**. Sesuai dengan tujuan pembentukan bahasa baku dan untuk memantapkan pemakaiannya, kodifikasi diikuti dengan peningkatan fungsi dan penggunaan bahasa itu, misalnya dengan mengharuskan penggunaannya di lembaga-lembaga negara, dalam pemerintahan, dalam pertemuan-pertemuan resmi, dalam pendidikan, dalam tulisan-tulisan ilmiah, dan dalam sastra.
- d. **Penerimaan oleh Masyarakat Pemakainya**. Apa-apa yang telah ditetapkan bagi bahasa baku ini harus diterima oleh masyarakat bahasa itu. Ini merupakan syarat utama bagi bahasa yang hidup. Biasanya sebuah bahasa baku berfungsi sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi.

### Kriteria Bahasa Baku

Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebuah bahasa atau variasi bahasa untuk dapat disebut sebagai sebuah bahasa baku/standar. Kriteria ini meliputi 3 hal, yakni sebagai berikut.

#### a. Keadaan Intrinsiknya

##### a) *Berkestabilan Fleksibel (Flexible Stability)*

- (a) Kestabilan (stabilitas) itu ditandai dengan adanya kodifikasi yang menyangkut semua bidang bahasa itu, yaitu adanya tata bahasa normatif, kamus normatif, lafal normatif, dan ejaan normatif,
- (b) Sifat fleksibel dimaksudkan untuk memungkinkan terjadinya modifikasi terkendali sehubungan dengan perkembangan dan perubahan budaya.

##### b) *Berkemampuan Intelektualisasi (intellectualization)*

Intelektualisasi di sini maksudnya daya unguhnya tajam, mampu mengungkapkan sesuatu dengan jelas, mendetail, tidak ambigu, dan sebagainya. Intelektualisasi bahasa ini terutama amat diperlukan dalam penggunaan bahasa sebagai bahasa ilmu.

#### b. Fungsinya

##### a) *Mempersatukan (Unifying Function)*

- (a) Menghubungkan para penutur dialek-dialek bahasa, yang berbeda-beda, menjadi satu masyarakat bahasa yang tunggal.
  - (b) Menjadi komponen pemersatu bagi suatu bangsa.
- b) Memisah dan Membedakan (Separatist Function)*
- (a) Mampu menunjukkan kemandiriannya sehingga tidak dipandang sebagai bawahan atau bagian bahasa lain, terutama terhadap bahasa yang serumpun.
  - (b) Menjadi simbol identitas yang kuat bagi suatu bangsa.
- c) Sebagai Simbol Prestise (Prestige Function)*
- Memiliki bahasa baku yang terpelihara baik, sejajar dengan bahasa-bahasa lain, haruslah memberikan rasa kagum bangsa lain. Ini berarti suatu simbol prestise atau kebanggaan nasional bagi bangsa itu di tengah-tengah bangsa lain.
- d) Sebagai Kerangka Acuan (Frame-of-Reference Function)*
- Dengan memiliki kodifikasi yang normatif, bahasa baku itu harus dapat menjadikan dirinya sebagai kerangka acuan atau contoh bahasa yang baik dan benar.
- c. Sikap Para Penuturnya**
- a) Adanya Loyalitas Bahasa*
- (a) Loyalitas/kesetiaan yang muncul dalam bentuk kemauan untuk menggunakan bahasa tersebut dalam setiap kesempatan yang diperlukan dan bila perlu mempertahankannya dari pengaruh luar yang dapat merusak. Contoh loyalitas bahasa yang tinggi diperlihatkan oleh orang-orang Israel dengan slogan mereka yang terkenal, "Hebrew, speak Hebrew."
  - (b) Istilah ini berasal dari Uriel Weireich yang merumuskannya sebagai suatu keadaan kejiwaan penutur yang menganggap bahasanya sebagai suatu benda yang bernilai tinggi yang harus dipelihara, dipertahankan, dan dijaga dari hal-hal yang dapat merusaknya.
- b) Adanya Rasa Bangga*
- (a) Rasa bangga memiliki bahasa tersebut yang tumbuh dalam diri masing-masing penuturnya.
  - (b) Jauh dari perasaan rendah diri atau malu memiliki dan menggunakannya.
- c) Adanya Kesadaran akan Norma-norma Bahasa*
- (a) Kesadaran ini berhubungan dengan kodifikasi bahasa, yakni sadar bahwa bahasa itu mempunyai norma-norma mengenai mana yang

benar dan mana yang salah.

- (b) Kesadaran ini dilanjutkan dengan kemauan untuk menggunakan yang baik dan benar yang sudah ditetapkan itu dan menjauhi yang salah, apa lagi yang dapat mengacaukan dan merusak.

Demikianlah, dengan terpenuhinya ketiga kelompok kriteria di atas lengkaplah kehadiran sebuah bahasa baku.

### **Bahasa Atribut Bahasa Baku**

Dalam usaha membuat tipologi sosiolinguistik terhadap suatu situasi keanekarbahasaan (multilingual), William Stewart (1972) mengemukakan adanya 7 tipe bahasa. Di antara ketujuh tipe bahasa ini, bahasa bakulah yang paling sempurna karena memiliki semua atribut yang ditetapkan dalam membuat tipologi. Dengan demikian, kehadiran sebuah bahasa baku dapat pula diketahui dari sudut atribut-atribut tersebut.

Adapun atribut-atribut yang harus dimiliki bahasa baku itu ialah sebagai berikut.

**a. Baku (Standardized)**

Baku di sini ditekankan kepada kodifikasi dan penerimaan oleh para penuturnya.

**b. Otonom (Autonom)**

Otonomi di sini maksudnya tidak tergantung dan tidak saling tergantung dengan bahasa lain. Hidup dan berkembangnya menurut kemauan sendiri, tidak ditentukan oleh bahasa lain.

**c. Berkualitas Sejarah (Historicity)**

Artinya sistem bahasa ini tumbuh secara normal melalui waktu dan berakar pada tradisi bangsa atau suku bangsa tertentu. Sebagai perbandingan, bahasa yang tidak memiliki atribut ini misalnya bahasa buatan, seperti bahasa Esperanto.

**d. Berkemampuan Hidup (Vitality)**

Artinya memiliki masyarakat penutur yang potensial dan tidak terasing. Contoh bahasa yang tidak punya vitalitas ialah bahasa-bahasa klasik yang sudah mati, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Yunani Kuno, dan Kawi.

### **Situasi Kebakuan Bahasa Indonesia (Sebuah Neraca dan Himbauan)**

Dengan menggunakan uraian pada bagian b sebagai landasan teori atau kerangka acuan, berikut ini penulis akan mencoba mengadakan tinjauan singkat terhadap situasi kebakuan bahasa Indonesia sampai saat ini: apa yang

sudah dicapai, apa yang belum. Data yang digunakan hanyalah hasil pengamatan umum, tetapi kebenarannya sudah menjadi pendapat umum.

### Proses Pembakuan Bahasa Indonesia

Apakah bahasa Indonesia sudah mempunyai variasi bahasa baku? Terlepas dari bagaimana tingkat kebakuannya, dapat kita jawab: sudah. Ini dapat kita ketahui antara lain dari.

- a) adanya sebutan "bahasa Indonesia baku" atau "bahasa Indonesia yang baik dan benar"
  - b) adanya acara Pembinaan Bahasa Indonesia di televisi, tanpa adanya bahasa Indonesia baku tidak mungkin diselenggarakan acara ini;
  - c) diberlakukannya EYD yang merupakan salah satu komponen bahasa baku;
  - d) diangkatnya *Kamus Umum Bahasa Indonesia* menjadi kamus utama/baku.
- Pertanyaan berikut ialah bagaimana proses pembakuan bahasa Indonesia itu? Dengan menggunakan uraian pada subbagian Proses Pembakuan Bahasa sebagai acuan, marilah kita adakan sebuah tinjauan singkat.

#### a. Seleksi

Adakah usaha pembakuan bahasa Indonesia yang sudah dijalankan itu dimulai dengan seleksi?

Walaupun orang luar tidak mungkin mengetahui semua yang dilakukan oleh lembaga yang bertugas mengadakan pembakuan itu, dari apa yang dapat diamati dapat disimpulkan bahwa tahap ini memang dikerjakan dengan baik dengan melibatkan banyak ahli. Dengan menganalisa hasilnya, kelihatan bahwa pilihan jatuh pada variasi bahasa orang-orang terpelajar yang dianggap mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bahasa tulis dalam buku-buku pelajaran dan ilmu pengetahuan yang terpelihara bahasanya, bahasa yang dipergunakan dan diajarkan di sekolah-sekolah. Suatu pilihan yang oleh para ahli dianggap tepat.

#### b. Kodifikasi

Kodifikasi apa saja yang sudah dilaksanakan? Tampaknya kodifikasi sudah diusahakan terhadap semua bidang. Namun, yang membuahkan hasil kongkrit yang final baru meliputi

- a) ortografi, dengan dihasilkannya ejaan normatif berupa EYD;
- b) kosa kata, dengan dihasilkannya *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (KUBI) — berupa peningkatan kamus Poerwadarminta —, dan dikeluarkannya *Pedoman Pembentukan Istilah*;
- c) lafal, yang dikaitkan kepada kamus.

Bidang tata bahasa belum menghasilkan produk final berupa tata bahasa standar/baku, yang disebut juga tata bahasa normatif.

### c. Peningkatan Fungsi dan Penggunaan

Tampaknya tahap ini telah dilaksanakan dengan menempatkan kedudukan variasi standar bahasa Indonesia di atas segala macam variasi non-standar. Hal itu mengharuskan (walaupun tanpa sanksi seperti bila seseorang melanggar undang-undang) penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap kesempatan yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia baku, seperti urusan pemerintahan, urusan resmi, dan dalam pendidikan.

### d. Penerimaan oleh Masyarakat

Tahap ini pun berjalan dengan baik. Hasil-hasil kodifikasi yang disebar-kan ke masyarakat diterima dan dijalankan sejauh kemampuan masing-masing. Pelaksanaan tahap ini amat ditentukan oleh pendidikan.

## Tingkat Pemenuhan Kriteria Bahasa Baku pada Bahasa Indonesia Baku

Adakah bahasa Indonesia baku memenuhi semua kriteria yang ditetapkan? Bila ada, bagaimana keadaannya?

### a. Kriteria-kriteria tentang Keadaan Intrinsik

#### a) *Adanya Stabilitas Fleksibel*

Tingkat kestabilan bahasa Indonesia baku (yang ditandai oleh kodifikasi semua bidang bahasa) belum terpenuhi semuanya (lihat uraian pada subbagian Proses Pembakuan Bahasa Indonesia: Kodifikasi). Yang belum ialah kodifikasi tata bahasa. Dilihat dari segi jumlah, kelihatannya kodifikasi yang belum hanya 1:3. Namun, justru yang satu ini merupakan bidang kunci karena tata bahasalah yang mengatur bagaimana harusnya bahasa itu. Ibarat lalu lintas, apakah yang akan terjadi di jalan raya bila para pemakai jalan tidak diberi aturan-aturan yang jelas, seragam, dan menyeluruh. Yang paling merasakan ketiadaan tata bahasa baku/normatif ini ialah guru-guru bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Mereka membekali diri dengan tata bahasa lama yang dalam beberapa hal membingungkan karena tak sesuai dengan perkembangan baru yang umum di masyarakat, sedangkan tata bahasa baru umumnya ditulis menurut "selera" penulisnya masing-masing. Jelas situasi ini membahayakan atau setidaknya-tidaknya membingungkan. Adanya siaran Pembinaan Bahasa Indonesia di televisi mungkin dimaksudkan untuk memberikan kodifikasi tata bahasa, tetapi ini tidak memadai dan fragmen-taris. Yang diperlukan ialah tata bahasa standar atau normatif. Karena

tata bahasa baku/normatif belum ada, kita tak dapat berbicara sepenuhnya tentang fleksibilitasnya, tetapi dari kenyataan yang ada sekarang, kodifikasi bahasa Indonesia cukup fleksibel. Misalnya, adanya *Pedoman Pembentukan Istilah* merupakan pintu terbuka bagi pemasukan istilah-istilah asing yang memang diperlukan.

**b) Adanya Kemampuan Intelektualisasi**

Kriteria ini terasa makin terpenuhi, terutama dalam memenuhi kebutuhan peristilahan dan pengungkapan di bidang lain. Sekarang sudah banyak diciptakan istilah, ungkapan, dan sebagainya untuk mengungkapkan suatu hal secara lebih cermat.

**b. Kriteria-kriteria tentang Fungsi**

**a) Mempersatukan**

Kriteria ini sepenuhnya telah dilaksanakan oleh bahasa Indonesia sejak diangkat sebagai bahasa nasional.

**b) Memisah dan Membedakan**

Kriteria ini pun telah dijalankan dengan baik. Sebagai contoh, walaupun bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sekarang dapat dirasakan bahwa ia bukan lagi bahasa Melayu.

**c) Menjadi Simbol Prestise**

Kriteria ini pun amat dirasakan oleh bangsa Indonesia dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kita di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia. Apa lagi bila diingat bahwa kita masih tergolong negara merdeka yang relatif masih muda.

**d) Menjadi Kerangka Acuan**

Bahasa Indonesia baku memang telah berfungsi sebagai kerangka acuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hanya dalam pelaksanaan agak terganggu oleh belum lengkapnya kodifikasi bahasa Indonesia dari sudut tata bahasa, dan juga oleh tingkat pendidikan umumnya bangsa Indonesia.

**c. Kriteria-kriteria tentang Sikap Para Penutur**

**a) Adanya Loyalitas Bahasa**

Dalam semangat tak dapat diragukan bahwa seluruh bangsa Indonesia loyal/setia terhadap bahasa nasionalnya. Namun, dalam praktik masih banyak kita temui penyimpangan. Pada hal yang kita perlukan adalah perbuatan, bukan janji-janji di hati dan di mulut. Kita harus ingat bahwa *sikap dinilai dari perbuatan*, bukan dari niat yang kebenarannya

sudah diukur. Loyalitas bahasa ini dapat kita bagi atas dua tingkat berikut.

- (a) (Sebagai langkah pertama) Kesiediaan, dalam perbuatan, untuk hanya menggunakan bahasa Indonesia pada situasi-situasi yang menuntut penggunaannya.
- (b) Kesiediaan, dalam perbuatan, untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bahkan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan.

Beberapa contoh penyimpangan loyalitas dalam praktik.

- (a) Tidak menggunakan bahasa Indonesia baku, bahkan tidak menggunakan bahasa Indonesia di kantor-kantor pada jam kerja kendatipun di situ sering ada tulisan "Gunakanlah bahasa Indonesia".
- (b) Tidak jarang guru menggunakan bahasa daerah atau mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah di kelas dengan murid atau di kantor dengan kolega.
- (c) Tidak jarang pejabat berpidato dan berceramah dengan sengaja menggunakan kata-kata asing yang sudah ada bahasa Indonesiannya, yang sebenarnya lebih tepat bila hanya menggunakan bahasa Indonesia. "Gengsi" barangkali alasannya. Namun, ini suatu pertanda kurangnya loyalitas.
- (d) Penulisan papan nama dengan menggunakan bahasa asing, apalagi bahasa Indonesia campur asing.

Bila diteliti, contoh ini dapat ditambah lebih banyak lagi, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tertulis.

Suatu contoh peningkatan loyalitas telah diperlihatkan oleh koran-koran dan majalah-majalah terkemuka kita dalam menggunakan bahasa Indonesia baku.

#### *b) Adanya Rasa Bangga*

Sikap ini muncul dalam dua bentuk berikut.

- (a) Bangsa memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia (baku). Sikap ini agaknya sudah dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia, tetapi dalam kenyataan, kebanggaan menggunakan bahasa asing masih sering mengalahkan kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
- (b) Tidak merasa rendah diri atau malu menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi-situasi tertentu. Perasaan inilah yang sering menyebabkan kita dalam berkomunikasi dengan orang asing di negeri kita memaksakan diri menggunakan bahasa orang asing itu daripada memaksa mereka menggunakan bahasa kita. Mung-

kin dalam hal ini ada perasaan malu dikatakan "ketinggalan zaman". Bila demikian halnya, jelas ini bukan pertanda adanya rasa bangga akan bahasa sendiri.

(c) *Adanya Kesadaran akan Adanya Norma-norma Bahasa*

Maksudnya adalah sadar bahwa bahasa Indonesia itu mempunyai norma atau kaidah mengenai bagaimana seharusnya berbahasa Indonesia itu. Kesadaran ini akan muncul dalam bentuk menggunakan yang baik dan benar, menjauhi yang salah dan merusak. Bila tidak tahu akan norma itu, ia akan mempelajarinya. Berdasarkan pengamatan kejadian sehari-hari, keadaan sikap yang paling penting ini tidak jauh berbeda dari dua sikap yang sebelumnya. Ini tidak lain karena ketiga sikap ini saling berhubungan.

### Atribut Kebakuan Bahasa Indonesia

Atribut maksudnya ialah kelengkapan sebuah bahasa baku, di samping harus melalui proses dan memenuhi kriteria-kriteria. Marilah kita tinjau bagaimana atribut kebakuan bahasa Indonesia.

a. **Baku/Standar**

Untuk menjadi bahasa baku, tentu saja dituntut bahasa itu harus baku. Mengenai pemilikan atribut I ini oleh bahasa Indonesia dapat dilihat pada uraian-uraian subbagian Proses Pembakuan Bahasa Indonesia dan Tingkat Pemenuhan Kriteria Bahasa Baku pada Bahasa Indonesia Baku.

b. **Otonom**

Tidak dapat disangkal bahwa bahasa Indonesia mempunyai otonomi yang penuh. Artinya hidup dan berkembangnya bahasa Indonesia menurut kemauan sendiri/penuturnya, tidak ada pendiktean.

c. **Berkualitas Sejarah**

Atribut ini pun dimiliki oleh bahasa Indonesia karena ia tumbuh secara normal melalui waktu, dari dan di dalam masyarakat Indonesia sendiri.

**SKALA PENILAIAN  
SITUASI KEBAKUAN BAHASA INDONESIA**

| Komponen                 | Skala Nilai |   |   |   |   | Bobot     | Skor       |
|--------------------------|-------------|---|---|---|---|-----------|------------|
|                          | 5           | 4 | 3 | 2 | 1 |           |            |
| <b>Proses Pembakuan</b>  |             |   |   |   |   |           |            |
| 1. Seleksi               | v           |   |   |   |   | 2         | 10         |
| 2. Kodifikasi            |             |   | v |   |   | 4         | 12         |
| 3. Peningkatan Fungsi    |             | v |   |   |   | 3         | 12         |
| 4. Penerimaan            |             | v |   |   |   | 2         | 8          |
| <b>Kriteria Kebakuan</b> |             |   |   |   |   |           |            |
| 1. Keadaan Instrinsik    |             |   |   |   |   |           |            |
| a. Stabilitas Fleksibel  |             |   | v |   |   | 4         | 12         |
| b. Intelektualisasi      |             | v |   |   |   | 2         | 8          |
| 2. Fungsi                |             |   |   |   |   |           |            |
| a. Mempersatukan         | v           |   |   |   |   | 2         | 10         |
| b. Membedakan            |             | v |   |   |   | 1         | 4          |
| c. Simbol Prestise       |             | v |   |   |   | 1         | 4          |
| d. Kerangka Acuan        |             |   | v |   |   | 3         | 9          |
| 3. Sikap Penutur         |             |   |   |   |   |           |            |
| a. Loyal                 |             |   |   | v |   | 2         | 4          |
| b. Bangga                |             |   |   | v |   | 2         | 4          |
| c. Sadar akan Norma      |             |   |   | v |   | 4         | 8          |
| <b>Atribut Kebakuan</b>  |             |   |   |   |   |           |            |
| 1. Baku                  |             |   | v |   |   | 4         | 12         |
| 2. Otonom                |             | v |   |   |   | 1         | 4          |
| 3. Berkualitas Sejarah   | v           |   |   |   |   | 1         | 5          |
| 4. Vitalitas             | v           |   |   |   |   | 2         | 10         |
| <b>Jumlah</b>            |             |   |   |   |   | <b>40</b> | <b>136</b> |

**Keterangan:** 5 = Baik sekali  
 4 = Baik  
 3 = Sedang/Masih kurang  
 2 = Kurang  
 1 = Kurang sekali

$$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Jumlah Bobot}} = \frac{136}{40} = 3,4$$

Hasil yang didapat ialah 3,4 = Baik Plus

Dari hasil percobaan menilai ini didapat kesimpulan rata-rata, yaitu situasi pembakuan/kebakuan bahasa Indonesia sudah baik bila dinilai secara keseluruhan. Namun, bila diperhatikan nilai tiap komponen ternyata masih banyak yang perlu minta perhatian kita.

- a. Bila batas nilai kurang dimulai dari angka 2 ke bawah, yang memerlukan perhatian serius ialah: sikap penutur, yang meliputi loyalitas, kebanggaan, dan kesadaran akan norma-norma bahasa.
- b. Bila batas nilai kurang itu dimulai dari angka 3 ke bawah, yang memerlukan perhatian serius ialah sikap penutur bahasa, kodifikasi, stabilisasi bahasa, fungsi sebagai kerangka Acuan, kebakuan (yang semuanya mengarah kepada satu hal, yaitu kodifikasi, khususnya kodifikasi tata bahasa).

Penulis cenderung mengambil patokan kedua ini.

### Kesimpulan

Dari uraian/tinjauan dan usaha pembuatan nilai pada bagian terdahulu dapat kita ambil beberapa kesimpulan.

Sebuah bahasa baku mempunyai proses pembakuan, kriteria kebakuan, dan atribut kebakuan. Ketiga hal itu dapat dipakai sebagai pengukur situasi kebakuan suatu bahasa.

Dari hasil pembahasan dan penilaian secara umum ternyata bahwa dalam banyak hal situasi kebakuan bahasa Indonesia sudah berada dalam keadaan yang baik sekali.

Keadaan yang masih memerlukan perhatian serius ialah penumbuhan sikap para pemakai bahasa Indonesia baku, yang meliputi loyalitas terhadap bahasa, kebanggaan dalam bentuk tindakan, kesadaran akan norma-norma bahasa, dan hal-hal yang berhubungan dengan kodifikasi (khususnya kodifikasi tata bahasa) yang menjadi inti dari suatu kodifikasi.

Sudah saatnya untuk melaksanakan kodifikasi tata bahasa yang akan menghasilkan *tata bahasa normatif* bahasa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dempwolff, Otto. 1983. *Vergleichende Lautlehre Des Austronesischen Wortschatzes*. Band I. Berlin.
- , 1937. *Vergleichende Lautlehre Des Austronesischen Wortschatzes*. Band II. Berlin.
- , 1938. *Vergleichende Lautlehre Des Austronesischen Wortschatzes*. Band III. Berlin.
- Dyen, Isidore. 1965. "A Lexicostatistical Classification of the Austronesia Languages". Dalam *IJAL*. Indiana Univ.
- Gumperz dan Hymes. (Ed). 1972. *Direction in Sociolinguistics*. Winston: Holt Rinehart.
- Fillmore, C.J. dan D.T. Langendoen. (Ed). 1971. *Studies in Linguistic Semantics*. Winston: Holt Rinehart.
- Lehmann, W.P. 1973. "A Structural Principle of Languages and Its Implication". Dalam *Language*, Vol. 49.
- Nasoetion, A.H. 1979. "Bilangan dan Namanya dalam Bahasa Indonesia". Dalam *Bahasa dan Sastra*, Tahun V, Nomor 5, 1979. Jakarta.
- Poedjosoedarmo, Gloria. 1976. "Hipotesis Perkembangan Sintaksis Bahasa Jawa." Dalam *Bahasa dan Sastra*, Tahun II, Nomor 4, 1976. Jakarta.

## **MENUJU KE PENDIDIKAN BAHASA YANG KOMUNIKATIF**

**A.M. Slamet Soewandi**  
IKIP Sanata Dharma

### **Pendahuluan**

Peta bahasa di Indonesia memberitahukan kepada kita jumlah bahasa yang ada di Indonesia. Dari 480 bahasa yang berhasil dipetakan, hampir separuhnya terdapat di Irian Jaya (Nababan, 1980:209). Adapun jumlah penuturnya terentang antara 100 dan 50 juta orang penutur (bahasa Jawa) (Nababan, 1979:15). Data sensus penduduk Indonesia akan menambah variabel jenis penutur: proporsi umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, dan sebagainya. Dari bahasa yang sebanyak itu, satu di antaranya diangkat sebagai bahasa nasional dan sekaligus sebagai bahasa resmi, yakni bahasa Indonesia (BI). Setiap bahasa itu mempunyai fungsi dan kedudukan sendiri-sendiri. Sebagai bahasa hidup, bahasa itu memiliki variasi sesuai dengan variasi komunikasi yang didukungnya. Jadi, dapat dibayangkan betapa kompleksnya masalah pengajaran bahasa di Indonesia. Di satu pihak bahasa Indonesia harus dikembangkan sehingga menjangkau penutur siapa saja dalam segala aspek kehidupannya. Di pihak lain bahasa daerah itu pun harus dipertahankan hak hidupnya, bukan hanya sejauh dapat membangun pengembangan bahasa nasional, melainkan juga karena menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup (Halim, 1975:142).

Permasalahannya menjadi tambah sulit karena bahasa selalu berkembang sejalan dengan perkembangan penuturnya. Sebagai wadah pemikiran, keinginan, dan ungkapan perasaan penuturnya, mau tidak mau bahasa harus memperkaya diri. Dalam memperkaya diri, bahasa ternyata tidak lepas dari pengaruh. Pengaruh dapat berasal dari bahasa yang sudah lama bersentuhan,

tetapi dapat pula berasal dari bahasa asing. Wujud pengaruhnya pun dapat bermacam-macam: sistem bunyi, sistem gramatikal, atau pun kosa katanya. Tentu saja semua itu harus diperhitungkan dalam pendidikan bahasa.

Dari pendahuluan di atas kiranya beberapa hal perlu diuraikan lebih jauh, yakni (1) situasi kebahasaan di Indonesia dan implikasinya terhadap pengajaran bahasa Indonesia, (2) fungsi dan kedudukan setiap bahasa (daerah, nasional), (3) tujuan pengajaran bahasa yang diharapkan, dan (4) alternatif pendekatan yang kiranya perlu dipertimbangkan.

### Situasi Kebahasaan dan Implikasinya terhadap Pengajaran Bahasa Indonesia

Bahwa masyarakat bahasa di Indonesia sebagian terbesar bukan masyarakat ekabahasaan, kiranya mudah dipahami. Dari data kebahasaan tersebut pada pendahuluan tampak jelas bahwa masyarakat bahasa di Indonesia ialah masyarakat dwibahasawan, bahkan ada pula yang multibahasawan. Hal ini berarti bahwa penutur Indonesia dapat berbahasa lebih dari satu meskipun kadang-kadang terjadi penguasaan atas bahasa-bahasa itu tidak sama kuatnya. Bahkan, kalau kita mengikuti pendapat Weinreich, yang memasukkan penguasaan dua varietas dari satu dialek sebagai dwibahasawan (Weinreich, 1968:1), maka tidak ada satu pun penutur Indonesia yang bukan dwibahasawan. Salah satu jenis varietas ialah adanya perbedaan ragam penuturan: ragam ilmiah, ragam sastra, ragam struktur, ragam jurnalistik (Poerwadarminta, 1967:14-15). Setiap ragam tersebut memiliki ciri kebahasaan. Misalnya, ragam tutur memiliki ciri kosa kata tertentu: *dong, deh, sih, nih*. Di samping itu, ragam penutur memiliki ciri bentuk kata yang tidak lengkap (*situ, sini, gitu, gini, ngapain, tapi*); kalimatnya tidak lengkap unsur-unsurnya; dan memiliki juga ciri ucapan yang tidak baku (*dengen, dapet, aken, pegang, dan sebagainya*). Ciri itu bertolak belakang dengan ciri ragam ilmiah.

Persoalan yang timbul karena penguasaan kedua ragam itu ialah bahwa dalam tindak tutur seseorang kedua ragam itu kadang-kadang bercampur, yang satu masuk kepenggunaan ragam yang lain. Hal ini juga terjadi apabila penutur itu menguasai dua dialek dari satu bahasa yang sama atau menguasai dua bahasa. Dialek atau bahasa-bahasa itu saling mempengaruhi. Pengaruhnya dapat positif dan dapat negatif. Pengaruh yang positif dapat memperkaya varietas, dialek, atau bahasa yang satu, misalnya memperkaya kosakata, sistem bunyi, sistem pembentukan kata, frasa, kalimat. Akan tetapi, pengaruh yang negatif menimbulkan gangguan terhadap varietas, dialek, atau bahasa yang dimasuki. Hal inilah yang terjadi dalam pengajaran bahasa Indonesia. Karena BI memiliki juga keragaman, pada waktu berbahasa Indonesia dengan ragam tertentu, masuklah ciri ragam yang lain. Karena BI dipergunakan oleh penutur yang dilikat oleh batas regional tertentu, muncullah BI-BI dialek, yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi, tetapi sekaligus mempenga-

ruhi BI baku. Karena BI dipergunakan oleh penutur yang diikat oleh status sosial tertentu, muncullah sosiolek-sosiolek BI, yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi, dan sekaligus memasuki penggunaan BI baku.

Dari persentuhannya dengan bahasa daerah yang juga beragam seperti BI, maka BI baku mendapat tantangan yang makin berat. Hal ini disebabkan oleh penutur Indonesia itu memiliki kedua bahasa itu sekaligus. Hal ini berarti bahwa penutur itu sudah memiliki dua kebiasaan. Dalam tindak tutur kedua kebiasaan itu hampir tidak mungkin dipisahkan. Ada hukum transfer: kebiasaan yang satu mempengaruhi kebiasaan yang lain. Karena itu, bukan barang yang mustahil jika dalam tindak tutur seseorang kebiasaan itu saling mengganggu. Kenyataan seperti ini perlu diperhitungkan dalam pengajaran BI. Gangguan seperti ini tampak jelas justru pada saat sedang dalam proses belajar bahasa kedua (BI), karena orang itu sedang berusaha menguasai bahasa kedua, tetapi ia sendiri sudah memiliki kebiasaan berbahasa yang dibawanya sejak ia dapat berkomunikasi dengan lingkungan terdekatnya, yaitu ibu, bapak, saudara-saudaranya. Kebiasaan yang ditransfer mencakupi segala aspek kebahasaan dan kebudayaan. Karena aspek kebahasaan itu ditandai oleh bentuk, arti dan distribusi (pemakaian), setiap aspek yang ditransfer juga meliputi bentuk arti, dan distribusinya. Bukan tidak mungkin pelajar yang berbahasa pertama bahasa Makassar pada waktu berbahasa Indonesia akan membuat kalimat: *Tadi malam ada yang pencuri masuk di kebun*, karena dalam bahasa Makassar awalan *pa-* yang berfungsi agentif sering mendapat tambahan morfem baku *tau (tu)* yang artinya 'orang' untuk mempertegas keagentifan awalan *pa-*. Inilah contohnya dalam bahasa Makassar: *Bajikna natena tau panumpang* 'Untung tak ada penumpang', *Niak tau palukkak naballaki* 'Ada pencuri yang dilindunginya' (Prawansa, 1981:252).

Pelajar yang berbahasa pertama bahasa Sunda bukan tidak mungkin membuat kalimat Indonesia: *Saya melewati anak yang ketabrak oplet*. Karena dalam bahasa Sunda ada bentuk *ngaliwat* 'melalui' sebagai kata kerja transitif (Rusyana, 1975:106). Pelajar yang berbahasa pertama bahasa Jawa akan membuat kalimat-kalimat bahasa Indonesia: *Saya dengan Tri berangkat jam 9* (dari kalimat BJ *Aku karo Tri mangkat jam 9*). *Ayah berkata dengan saya* (dari BJ *Bapak ngendiko karo aku*). *Saya diajak ke pasar dengan ibuku* (dari BJ *Aku diajak menyang pasar karo ibuku*). *Amir baik dengan adiknya* (dari BJ *Amir apik karo adine*). *Saya berbelanja dengan Tono* (dari BJ *Aku blanja karo Tono*) (Soepomo, 1977/78:41). Contoh seperti ini dapat diperbanyak dengan bahasa daerah yang lain. Semua itu menunjukkan bahwa bagaimanapun bahasa daerah harus masuk perhitungan dalam pengajaran bahasa Indonesia.

### Fungsi dan Kedudukan Setiap Bahasa

Dilihat dari sudut lain, adanya dua bahasa yang saling bersentuhan dapat menimbulkan (i) hilangnya salah satu bahasa, (ii) tetap bertahannya dua bahasa itu, dan (iii) bercampurnya kedua bahasa itu. Ketiga kemungkinan ini sudah dilihat oleh Soepomo. Dalam makalahnya, "Problems of Indonesian" (Soepomo, 1981:153) disebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia dapat diklasifikasikan atas tiga kelompok, yaitu bahasa daerah yang penuturnya sedikit (beberapa ribu orang saja), bahasa daerah yang sebenarnya dialek bahasa Melayu, dan bahasa daerah yang penuturnya banyak. Contoh kelompok pertama adalah bahasa Asmat dan Dani di Irian Jaya; kelompok kedua, bahasa Melayu Banjar, Manado, dan Kupang; contoh kelompok ketiga, bahasa Sunda, Jawa, Bali, Bugis, dan Aceh (Soepomo, 1977/78:157).

Hilangnya bahasa daerah karena bersentuhan dengan bahasa nasional membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah bahwa bahasa nasional (BI) benar-benar dapat menjangkau daerah pemakaian yang luas dan dapat menggantikan kedudukan bahasa daerah tersebut. Dilihat dari sudut tujuan pengajaran bahasa nasional, hal ini sangat menggembirakan, karena dengan demikian salah satu fungsi BI sebagai lambang kebanggaan kebangsaan sudah tercapai (Halim, 1976:4-5). Dilihat dari proses pemerolehan bahasa, bahasa daerah, kelompok ini tidak menimbulkan problem belajar. Tetapi, ada sesuatu yang hilang bersama hilangnya bahasa daerah itu. Penutur bahasa tersebut mengalami kekosongan kultural yang sebenarnya tidak diinginkan. Karena itu, timbul krisis identitas yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri mereka. Mereka senantiasa akan merasa bahwa ada sesuatu yang salah pada pihak mereka, padahal kebudayaan mereka tidak dapat digantikan oleh kebudayaan lain. Tentu saja hal ini tidak kita inginkan. Pembangunan bangsa Indonesia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan identitas kehidupan kesukuan mereka. Kehidupan kesukuan tidak perlu dipertentangkan dengan kehidupan kebangsaan. Kedua bentuk kehidupan itu saling menjiwai. Kehidupan bernegara menyangkut kehidupan superstruktural pelbagai suku yang telah diikat menjadi satu bangsa (Slametmuljana, tanpa tahun). Jadi, satu hal sudah pasti bahwa kehidupan superstruktural yang antara lain berupa kehidupan bahasa perlu diberi wadah. Inilah kiranya yang menjiwai Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945.

Jika kedua bahasa tetap bertahan, ada dua kemungkinan yang timbul: (i) kedua bahasa itu mempertahankan identitas masing-masing dan mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama; (ii) kedua bahasa itu mempunyai identitas masing-masing, tetapi fungsi dan kedudukannya berbeda. Kemungkinan yang pertama menyebabkan keadaan kedwibahasaan, tetapi tidak bersifat diglosik. Keadaan seperti ini terjadi di Belgia. Dalam hal ini, bahasa

Belanda dan bahasa Perancis memiliki fungsi dan kedudukan yang sama. Kita untung bahwa keadaan kebahasaan di Indonesia tidak seperti yang terjadi di Belgia itu. Hal ini berarti bahwa bahasa-bahasa daerah yang berupa dialek-bahasa Melayu tidak menyaingi kedudukan dan fungsi BI. Sebagai dialek bahasa tersebut memiliki fungsi pengikat bagi anggotanya, sebagai alat komunikasi kelompok, dan sebagai identitas kelompok. Keadaan ini memang menghambat tersebarnya jangkauan bahasa nasional, tetapi bukankah kita sepakat untuk mendirikan bangsa berdasarkan kenyataan sosial dan regional? Jika ini diacukan kepada pendidikan bahasa Indonesia yang komunikatif, selayaknya kenyataan itu harus diperhitungkan dalam kebijaksanaan pengajaran bahasa nasional.

Keadaan yang mirip juga terjadi apabila bahasa-bahasa daerah yang pendukungnya besar bersentuhan dengan bahasa nasional. Keduanya dapat (i) berpisah sesuai dengan fungsinya masing-masing dan (ii) bercampur karena unsur bahasa yang satu memperkaya unsur bahasa yang lain.

Kemungkinan pertama menimbulkan keadaan diglosik karena setiap bahasa mempunyai tempat pemakaiannya sendiri. Bahasa Jawa, misalnya, dipergunakan di dalam lingkungan keluarga. Meskipun di beberapa tempat terjadi komunikasi dengan dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Jawa) dalam suatu tindak tutur (Nababan, 1980:211), bahasa Jawa masih merupakan medium yang komunikatif dalam pergaulan antaranggota dalam keluarga, antarteman dalam profesi, lebih-lebih dalam suasana informal, dan dengan topik keluarga. Namun, ada kecenderungan bahwa orang-orang muda Jawa tidak lagi menguasai tingkat tutur dalam bahasa Jawa. Yang menarik ialah laporan penelitian Soepomo tentang pemerolehan bahasa Jawa dari pelajar-pelajar suku Jawa.

Dengan mengambil populasi pelajar di Yogyakarta, Soepomo mencatat adanya gejala yang menarik, yakni bahwa bahasa Jawa mereka amat banyak dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Tulisan mereka yang terdapat di dalam majalah *Mekarsari* dan *Djakalodhang* (keduanya majalah berbahasa Jawa) banyak dipengaruhi oleh pola struktural dan idiom bahasa Indonesia. Begitu pula, kebanyakan para masyarakat terdidik tidak begitu senang jika harus memberikan sambutan dalam bahasa Jawa karena mereka biasanya tidak fasih lagi menggunakan bahasa Jawa. Hal ini disebabkan, oleh masa belajar bahasa Jawa yang formal baru terjadi setelah mereka belajar bahasa Indonesia (formal). Pemerolehan bahasa Jawa yang formal baru terjadi setelah mereka memperoleh bahasa Jawa informal dan bahasa Indonesia formal. Sementara itu, ada kecenderungan sikap bahasa yang mengarah pada pandangan bahwa bahasa Indonesia lebih tinggi dalam arti mencerminkan sikap hidup yang maju, modern, sedang bahasa Jawa dipandang lebih rendah dalam arti mencerminkan kehidupan yang tradisional saja.

Bercampurnya bahasa daerah yang besar dengan bahasa Indonesia membawa keuntungan, tetapi sekaligus juga membawa persoalan. Karena pendukung bahasa daerah itu mewakili sebagai terbesar dari penduduk Indonesia, maka jika bahasa itu bercampur akan menjadi kayalah bahasa Indonesia. Dengan demikian, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dapat terwujud karena rintangan kultural dapat dihindari. Kekayaan bahasa Indonesia tidak hanya terbatas pada khazanah kosa kata, melainkan juga sistem bunyi, gramatikal, dan kebudayaannya. Hal ini menguntungkan dilihat dari cita-cita pembangunan kebangsaan. Namun, bukan tidak ada persoalan yang timbul karena percampuran itu, yakni terjadinya *balast* yang tidak perlu, yang akhirnya juga menyebabkan timbulnya salah komunikasi. Misalnya saja, muncul kata kembar: *dapat-bisa, biji-nilai, perlu-butuh, lembu-sapi, seperti-kaya*. Di samping itu, kenyataan bahwa setiap bahasa memiliki sistem sendiri tidak memungkinkan untuk begitu saja bercampur. Penelitian tentang interferensi dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia banyak memberikan informasi bahwa bahasa itu berbeda. Dengan demikian usaha untuk mencampurkan bahasa daerah itu dengan bahasa Indonesia kiranya akan mengalami banyak kegagalan. Informasi tentang adanya perbedaan itu secara tidak langsung juga menyarankan bagaimana pengajaran bahasa Indonesia harus dilaksanakan.

#### Tujuan Pengajaran Bahasa Indonesia yang Diharapkan

Seperti diketahui, bahasa Indonesia memiliki empat fungsi: sebagai (1) lambang kebanggaan, (2) lambang identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4) alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya (Halim, 1976:4). Ini merupakan kenyataan, tetapi sekaligus merupakan harapan. Maksudnya bahwa keempat fungsi itu masih harus ditanamkan kepada mereka yang sedang mengalami proses belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan mengisyaratkan bahwa bahasa Indonesia harus dianggap sebagai bahasa yang statusnya lebih tinggi daripada bahasa daerah. Hal ini berarti bahwa di dalam masyarakat di Indonesia harus diciptakan suasana diglosik, yaitu bahasa yang satu memiliki peranan yang berbeda dengan bahasa yang lain. Dalam hal ini, harus kita akui bahwa fungsi itu belum tercapai sepenuhnya. Di samping masih terdapat contoh pemakaian bahasa asing dalam komunikasi, juga contoh pemakaian bahasa Indonesia yang ceroboh di dalam komunikasi resmi. Ada kecenderungan yang baik, memang, bahwa orang, lebih-lebih generasi muda, lebih suka mempergunakan bahasa Indonesia pada komunikasi mereka, tetapi itu masih jauh dari harapan bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan. Boleh dikatakan bahwa penggunaan ba-

hasa Indonesia masih pada taraf asal menggunakan, belum sampai pada taraf menggunakan dengan baik dan benar.

Berbicara tentang bahasa sebagai alat komunikasi, sebenarnya harus berbicara tentang hakikat komunikasi itu sendiri. Komunikasi dapat dilaksanakan, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Keduanya saling melengkapi, bahkan berjalan seiring. Komunikasi verbal dengan ungkapan *tidak* ternyata diikuti oleh gerakan nonverbal berupa gelengan kepala. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam pengajaran bahasa Indonesia yang komunikatif jenis nonverbal itu harus diidentifikasi juga untuk kepentingan rumusan tujuan pengajaran bahasa. Sejauh ini, perhatian pada jenis komunikasi non-verbal belum mendapat tempat dalam pengajaran bahasa Indonesia.

Laswell menemukan adanya tujuh komponen komunikasi, yang diformulasikan sebagai *Who/says what/with what purpose/ by what means / to whom/ in what situation/ with what effect/* (Soewito, 1980:4). Jadi, dalam tindakan komunikasi, *seseorang* mengatakan *sesuatu* dengan *tujuan* tertentu dengan *alat* tertentu kepada *seseorang lain* dalam *situasi* tertentu dengan *efek* tertentu. Bahkan, Heymes berhasil menemukan adanya enam belas komponen komunikasi yang ia ringkas menjadi delapan komponen dalam bektuk akronim *SPEAKING*, yang komponen S mencakup *setting* dan *scene* yang mengacu pada komponen tempat, waktu, dan situasi; P (*participants*) mengacu pada orang-orang yang terlibat dalam tindak komunikasi; komponen ini memiliki variabel umur, jenis kelamin, lokasi, keadaan sosial ekonominya, pendidikan, pekerjaan, organisasi, suku, agama, dan keturunan; komponen E (*ends*) mengacu pada tujuan, dan hasilnya; komponen A (*act sequence*) mengacu pada bagaimana komunikasi itu dilaksanakan dan apa yang dikomunikasikan; komponen K (*key*) mengacu pada cara, semangat, dan tone, yaitu suatu tindakan dilaksanakan; komponen I (*instruments*) mengacu pada penggunaan saluran komunikasi dan penggunaan varitas bahasa; komponen N (*norms*) mengacu pada kaidah interaksi dan interpretasi; komponen G (*genres*) mengacu pada kategori-kategori, misalnya puisi, doa, surat, kutukan, teka-teki, cerita, peribahasa, dan pidato (Bell, 1976:75–81).

Baik Laswell maupun Hymes memberi tahu kita tentang kenyataan komunikasi. Kenyataan ini berimplikasi bahwa dalam berkomunikasi orang harus memperhatikan hal-hal berikut.

- a. *Setting komunikasi*. Tempat, waktu, dan situasi yang berbeda menuntut perbedaan varietas bahasa. Pemakaian bahasa Indonesia di tempat ibadat berbeda dengan pemakaiannya di dalam pesta; waktu senggang menuntut varietas yang berbeda dengan waktu kerja; situasi resmi menuntut varitas yang berbeda dengan situasi tidak resmi.
- b. *Participants komunikasi*. Siapa orang yang menjadi lawan bicaranya:

anak-anak, pemuda, orang tua; laki-laki, perempuan; buruh, pegawai; pegawai atasannya, teman, bawahannya, buta huruf, terdidik; suku Jawa, Bali, Sunda, Batak, Makassar, Bugis, Cina? Perbedaan itu semua menuntut perbedaan varietas; mungkin perbedaan bentuk kata, susunan kata, gaya bahasa.

- c. *Ends komunikasi*. Apa tujuan yang hendak diinginkan, dan apa harapannya terhadap tujuan yang dikomunikasikan; sekadar menyampaikan informasi atau berharap mempengaruhi? Bahasa surat kabar berbeda dengan bahasa sastra, berbeda pula dengan bahasa pengetahuan, karena tujuan yang ingin dicapai berbeda.
- d. *Act sequence*. Apa yang hendak dikomunikasikan: pikiran, perasaan, keinginan, keluhan, makian? Bagaimana komunikasi itu dilangsungkan: lisan, tertulis?
- e. *Key*. Bagaimana komunikasi itu berlangsung: santai, akrab, resmi, ada jarak, lama tidak bertemu, jujur, ada sesuatu yang harus disembunyikan?
- f. *Instruments*. Saluran apa yang dipilih: verbal, nonverbal, verbal-nonverbal; varietas apa yang dipilih: dialek, sosiolek, fungsiolek, baku?
- g. *Norms*. Dalam suatu peristiwa bahasa, bagaimana suatu komunikasi harus dibuka, bagaimana menjaga supaya komunikasi tetap berlangsung dan bagaimana menyelesaikan suatu komunikasi. Di sini penting sekali peranan komponen para-linguistik, dan pseudolinguistik supaya peristiwa komunikasi dapat berjalan dengan semestinya.
- h. *Genres*. Bentuk apa yang mesti dipilih: dengan puisi, doa, surat resmi, surat pribadi, cerita, peribahasa, pidato, laporan, tanya jawab, diskusi, ceramah?

Itulah kenyataan komunikasi yang harus diperhitungkan dalam pengajaran bahasa. Tentu saja tidak dimaksudkan mengajarkan bahasa Indonesia secara monoton. Tepat sekali tujuan pengajaran yang sudah digariskan, yaitu penguasaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, sesuai dengan tuntutan lingkungan penggunaannya; benar, sesuai dengan tuntutan kaidah ragam bahasa yang digunakan (Halim, 1983:7). Tujuan pengajaran bahasa seperti tersebut di atas ini secara implisit menyarankan adanya penguasaan tentang variasi-variasi bahasa Indonesia, baik variasi yang bersifat geografis, sosial,

maupun fungsional. Inilah pengajaran komunikatif yang seharusnya dituju oleh pengajaran bahasa Indonesia. Meminjam istilah Nababan, janganlah pengajaran bahasa hanya sampai pada kemampuan tata bahasa (*usage*), melainkan harus sampai pada kemampuan komunikatif. Janganlah hanya sampai pada kemampuan membentuk satuan-satuan bahasa (kata, frasa, dan kalimat) sesuai dengan aturan tata bahasa, melainkan haruslah sampai pada kemampuan untuk memilih dan menggunakan satuan-satuan bahasa itu sesuai dengan aturan penggunaan bahasa (*use*) dalam keadaan sosiolinguistik tertentu (Nababan, 1979:15). Belajar suatu bahasa haruslah berarti

learning the rules of use as well as the rules of the formal linguistic system. Until a learner knows how to use the resources of a grammar to send meaningful messages in real life situations. He must know what variety to use in what situations, how to vary the style according to whom he is addressing, when to speak or remain silent, when and what kind of gestures are required to go with what speech (Cripser dan Widdowson dalam Allen, 1975:156–157).

Jika tujuan pengajaran bahasa seperti itu diterima, tidak cukup kita hanya menyediakan satu bahan pengajaran, satu buku pegangan, satu buku tata bahasa, memakai satu metode pengajaran, berlangsung dalam satu lokasi, dan penekanan pada satu varitas. Jika hanya ini yang dikerjakan, maka tidak lagi komunikatif tujuan pengajaran bahasa, berarti kehidupan kebahasaan yang real tidak menjadi kenyataan dalam pendidikan bahasa. Kesan sepintas menunjukkan, bahwa buku-buku pengajaran bahasa Indonesia yang sekarang ada bersifat monoton. Maka sudah saatnya kita memikirkan lagi apa-apa yang sudah kita kerjakan, jika fungsi bahasa Indonesia seperti yang dinyatakan hendak dijadikan kenyataan.

### Alternatif Pendekatan

Uraian di atas memperlihatkan kenyataan sebagai berikut.

- (1) Keadaan kebahasaan di Indonesia ini sangat bervariasi. Ada bahasa daerah dan ada bahasa nasional. Jumlah bahasa daerah sangat banyak. Setiap bahasa memiliki sistem dan varitas sendiri-sendiri. Salah satu alternatif pendekatan pengajaran yang dianggap sesuai ialah pendekatan kontrastif. Dengan pendekatan ini diketahui deskripsi setiap bahasa, kemudian dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Dari perbandingan yang diperoleh dapat diketahui persamaan dan perbedaan kedua bahasa itu. Dengan asumsi bahwa perbedaan yang besar menimbulkan persoalan belajar bahasa, maka dapat dibuat hirarki kesulitan. Dengan pendekatan ini, bahan dapat di-*graded*. Tentu saja pendekatan seperti

ini membawa konsekuensi bahwa bahan atau buku pelajaran harus disusun sedemikian rupa sehingga tercermin tingkat kesukaran belajar bahasa. Jika pendekatan ini yang dipilih, maka diperlukan usaha besar-besaran untuk mendatakan bahasa daerah tersebut. Data seperti ini kemudian dimanfaatkan oleh ahli kontrastif dan ahli penyusun buku pelajaran. Dengan pendekatan ini anak tidak perlu tercerabut dari akar kebudayaan daerahnya, tetapi justru dengan berpijak dari kebiasaan daerah ia dapat sedikit demi sedikit menguasai bahasa Indonesia.

Dengan cara yang sama setiap varitas dalam suatu bahasa dideskripsikan, kemudian diperbandingkan. Misalnya, varitas bahasa yang berhubungan dengan pemakaian bahasa (ragam), masing-masing diperbandingkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Hasilnya sangat bermanfaat untuk penyusunan bahan pengajaran karena dengan dasar ciri varitas tersebut dapat dengan mudah disusun pemakaian bahasa sesuai dengan varitasnya. Efek positif dari penyajian seperti ini ialah bahwa anak tahu kapan suatu varitas dipergunakan. Dengan perkataan lain, anak dapat "*empan papan*" (tahu tempat) pada waktu berbahasa.

- (2) Proses perolehan bahasa berbeda antara anak-anak dan orang dewasa berbeda pula antara belajar bahasa pertama dan belajar bahasa Indonesia (bahasa kedua). Kenyataan ini menyarankan bahwa metode yang dipergunakan pun hendaknya berbeda. Murid-murid SD dan SMTP, misalnya, masih dapat dilatih secara *drill*, sedangkan murid SMTA, apalagi mahasiswa, sudah merasa malu dengan teknik seperti itu. Bagi anak-anak, membuat "kesalahan" bahasa belum perlu kita kategorikan sebagai ketidakmampuan berbahasa, sedangkan bagi orang dewasa hal ini memperlihatkan ketidakmampuan mereka dalam berbahasa.

Dilihat dari tujuannya, penguasaan bahasa pada anak-anak (SD, SMTP) masih terbatas pada tujuan komunikasi secara umum, sedangkan penguasaan bahasa pada orang dewasa (SMTA, PT) sudah mengarah ke spesialisasi. Dengan perkataan lain, tujuan pengajaran bahasa pada kelompok pertama masih pada penguasaan *usage* (kemampuan tata bahasa), sedangkan tujuan pengajaran bahasa pada kelompok kedua sudah pada penguasaan *use*-nya (kemampuan komunikatifnya). Karena spesialisasi bersifat khusus, tujuan untuk setiap spesialisasi juga bersifat khusus pula. Konkretnya, pengajaran bahasa untuk mahasiswa kedokteran akan berbeda dengan pengajaran bahasa untuk mahasiswa hukum, teknik, pertanian, atau sosial. Untuk mengetahui secara tepat apa tujuan pengajaran bahasa pada kelompok kedua dan bagaimana

mendesain pengajarannya, Mackay dan Mountford (dalam Mackay dan Mountford, 1978:10) menunjuk empat komponen, yakni komponen sosiologis, linguistik, psikologis, dan pedagogis. Komponen sosiologis berguna untuk mengetahui tipe pelajar dan jenis penggunaan bahasa yang akan diajarkan. Dengan instrumen tertentu dapat diketahui: umur mereka, pengetahuan bahasa sebelumnya, kebutuhan yang diperlukan. Komponen linguistik berguna untuk mengetahui isi bahasa yang dipergunakan oleh pelajar. Yang diidentifikasi bukan hanya sistem bahasanya, melainkan ciri komunikatif dari penggunaan bahasa, misalnya mengidentifikasi bagaimana penggunaan bahasa dalam mendefinisikan, memerikan, menjelaskan, mengklasifikasikan, membuat deduksi, merumuskan hipotesis. Komponen psikologis berguna untuk mengetahui bagaimana aktivitas kejiwaan mereka. Karena tekanan pengajarannya komunikasi, pengajarannya harus dimulai dengan memanfaatkan apa yang sudah diketahui dari bahasa pertamanya. Karena itu, bagaimanapun pendekatan kontrastif sangat bermanfaat. Komponen pedagogis berguna untuk pengurutan bahan dari yang mudah ke yang sukar, dari lingkungan terdekat lalu menjauh, dari yang konkret menuju ke yang abstrak.

- (3) Komunikasi adalah peristiwa bahasa yang berlangsung secara timbal-balik, antarpersona, dalam konteks waktu, tempat, situasi, dalam keadaan jiwa tertentu, dengan tujuan tertentu, dan bahan komunikasi tertentu. Kenyataan komunikasi sebagai suatu tindak bahasa menyarankan bahwa pendekatan pengajaran bahasa hendaknya bersifat dialogal: anak dirangsang untuk menggunakan bahasa. Hal ini menyarankan pula bahwa pengajaran bahasa hendaknya lebih ditekankan pada penguasaan keterampilan berbahasa. Yang masih banyak terjadi dalam pengajaran bahasa adalah bahwa aktivitas bahasa di kelas masih dikuasai oleh guru, anak pasif mendengarkan dan mencatat. Keadaan seperti ini diperburuk pula oleh kenyataan dalam keluarga dan masyarakat. Di dalam kedua lingkungan itu anak-anak diperlakukan sebagai objek. Di rumah mereka disuruh mendengarkan, menerima, mengerjakan apa yang diinginkan oleh orang tua, bahkan pula oleh saudara tuanya, di masyarakat mereka juga disuruh diam saja.

Pengajaran bahasa dengan tujuan komunikatif mau tidak mau harus memperhatikan faktor dan hambatan itu. Karena itu bahan yang bersifat *content* harus dibuat sedemikian rupa sehingga terintegrasi dalam keterampilan berbahasa. Kalau pendekatan seperti ini diterima, konsekuensinya harus diterima pula kenyataan adanya variasi bahasa. Dengan demikian, variasi itu harus pula diwujudkan di dalam pengajaran atau bahan pengajaran. Hal inilah makna tujuan pengajaran bahasa pada penguasaan bahasa yang baik dan benar; kaidah yang dipergunakan sesuai dengan tuntutan lingkungan penggunaannya.

- (4) Berbahasa itu pada hakikatnya mengandung sifat kreatif. Kenyataan ini juga menyarankan bahwa titik perhatian pengajaran bahasa harus pada kesempatan sebanyak-banyaknya bagi murid untuk menggunakan bahasa. Guru *tut wuri handayani*. Menerima kenyataan ini berarti menerima juga kenyataan bahwa pemerolehan bahasa dalam proses belajar itu selalu berkembang. Perkembangan pemerolehan ini menunjukkan juga kenyataan adanya tahap penguasaan dan keadaan "kurang". Keadaan kurang dalam penguasaan bahasa harus disifati secara positif. Jangan sampai guru menghadapi kesalahan seperti itu, lalu bertindak seperti hakim. Kalau itu yang dilakukan, unsur kreativitas menjadi beku dan hilanglah sifat dialogal sehingga tidak lagi sampai pada tujuan komunikasi.

### Penutup

Makalah ini kiranya dapat ditutup dengan menyampaikan siratan pikiran sebagai berikut.

- (1) Keadaan kedwibahasaan di Indonesia harus dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa Indonesia.
- (2) Pendidikan kedwibahasaan bernilai positif: kebudayaan kesukuan tetap terjamin hak hidupnya, tetapi juga dapat memupuk kehidupan bernegara. Dari sudut kecerdasan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka yang dwibahasawan menunjukkan inteligensi yang lebih tinggi daripada yang ekabahasawan.
- (3) Pendekatan pengajaran bahasa yang bersifat komunikatif perlu ditekankan dalam pengajaran bahasa Indonesia.
- (4) Dengan menerima pendekatan yang komunikatif, pengajaran bahasa hendaknya mengolah atau memanfaatkan komponen komunikasi.
- (5) Supaya tujuan komunikasi tercapai maka pelaksanaan pengajaran yang bersifat dialogal mutlak diperlukan.
- (6) Supaya keadaan kedwibahasaan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, pendekatan kontrasitif berguna dalam mendeteksi problem belajar bahasa.
- (7) Karena yang akan dijangkau oleh pengajaran bahasa Indonesia itu berbeda-beda umurnya dan faktornya yang lain, maka tujuan pengajaran bahasa harus makin mengarah ke penggunaan bahasa yang khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bell, Roger T., 1976. *Sociolinguistics: Goals, Approaches and Problems*. London: B.T. Batsford, Ltd.
- Criper, C. dan H.G. Widdowson, 1975. "Sociolinguistics and Language Teaching". Dalam J.P. Allen dan Pit Corder (ed.). *Papers in Applied Linguistics*, Vol. 2. London: Oxford University Press.
- Halim, Amran, 1975. "Fungsi Politik Bahasa Nasional". Dalam *Budaja Djaja*, No. 82, Tahun VIII.
- , 1976. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia". Dalam *Bahasa dan Sastra*, Tahun I, No. 5.
- , 1983. "Dasar Kebijaksanaan Pemilihan Bahan Pengajaran Bahasa untuk Sekolah Dasar". Dalam *Seminar Penulisan Bahan Pengajaran Bahasa*. Yogyakarta.
- Mackay, R. dan A.J. Mountford. 1978. "The Teaching of English for Special Purpose: Theory and Practice". Dalam Ronald Mackay dan Allan Mountford (ed.). *English for Specific Purpose*. London: Longman Group Ltd.
- Nababan, P.W.J. 1979. "Sosiolinguistik Selayang Pandang". Dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra*, Tahun V, No. 1.
- , 1980. "Proficiency Profiles: A Study in Bilingualism and Bilinguality in Indonesia". Dalam Lim Kiat Boey (ed.). *Bilingual Education*. Singapore: RELC.
- Parawansa, P. 1981. *Kajian Interferensi Morfologi pada Dwibahasawan Anak Murid SD di Daerah Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan*, Malang.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1967. *Bahasa Indonesia untuk Karang-Mengarang*. Jogjakarta: U.P. Indonesia.

- Rusyana, Yus. 1975. *Interferensi Morfologi pada Penggunaan Bahasa Indonesia oleh Anak-anak yang Berbahasa Pertama Bahasa Sunda Murid SD di Daerah Propinsi Jawa Barat*. Jakarta.
- Samsuri. 1973. "Kegunaan Linguistik bagi Pengajaran Bahasa". Dalam *Seminar Pengajaran Bahasa Daerah*. Yogyakarta.
- Slametmulyana. Tanpa Tahun. "Politik Bahasa Nasional". (stensilan).
- Soepomo. Tanpa Tahun. "Language Acquisition in Java". (stensilan).
- , 1978. *Interferensi Gramatikal Bahasa Jawa dalam Pemakaian Bahasa Indonesia Murid Sekolah Dasar*. Yogyakarta.
- , 1981. "Problems of Indonesian". Dalam Amran Halim (ed.), *Bahasa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta.
- Suwito, Umar. 1980. *Komunikasi dalam Pendidikan*. Bamedik IKIP Yogyakarta.
- Weinreich, Uriel. 1968. *Languages in Contact*. The Hague: Mouton.

## **SIKAP POSITIF SEBAGAI SARANA MEMANFAATKAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA**

**Mukidi Adisumarto**  
IKIP Yogyakarta

### **Pengantar**

Sikap adalah kegiatan kognisi, afeksasi, dan kecenderungan beraksi seseorang yang sifatnya relatif tetap. Kecenderungan tersebut menuju ke suatu objek, perseorangan, atau suatu lembaga. Sumber sikap itu adalah kebudayaan, kekeluargaan, dan pribadi.

Bahasa adalah lembaga masyarakat. Timbulnya bahasa, berkembang, dan matinya bahasa tergantung pada masyarakat pemakainya. Bahasa pun, antara lain, berfungsi sebagai alat, yaitu secara individual merupakan pembantu proses berpikir dan secara sosial merupakan alat interaksi atau alat komunikasi sosial. Bahasa sebagai alat bergantung pada manusia pemakainya. Apakah alat itu serbaguna sepenuhnya bergantung pada pemilik dan pemakai serta pemakaiannya. Dengan kata lain, kesempurnaan dan kemandirian bahasa sepenuhnya bergantung pada manusia pemakainya.

Pemakai bahasa dikatakan bersifat positif apabila derajat kecenderungannya bertindak berskala tinggi atau kuat terhadap bahasanya. Tindakannya berdasarkan rasa kebanggaan, rasa kesetiaan, rasa hormat, dan rasa sadarnya. Selama sikap terhadap bahasa Indonesia bagi pemakainya belum positif, tak dapat dikatakan ada kemandirian kedudukan atau fungsinya. Kemandirian sangat bergantung pada sikap positif sehingga usaha pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia seyogianya dirintis dari pembentukan sikap

penutur bahasa Indonesia. Tekniknya adalah menanamkan rasa bangga terhadap bahasanya, rasa setia, rasa hormat dan kesadaran.

Ketidakadaannya sikap positif tampak dalam pengembangan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dewasa ini. Ciri pengembangan itu, antara lain, adalah kenyataan bahwa sekarang masih banyak orang Indonesia belum dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar (Halim, *Pikiran Rakyat*, 26-10-1981); fungsi bahasa Indonesia baru berhasil secara mendarat dan belum berhasil dalam fungsi kultural. ... ialah bahasa sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan (Alisyahbana, *Pikiran Rakyat*, 26-10-1981); belum berhasilnya fungsi kultural itu akan menyebabkan penyempitan cakrawala kecendikiaan lulusan perguruan tinggi, apabila mahasiswanya tidak menguasai salah satu bahasa asing modern (bahasa Inggris) agar mampu menyerap isi buku teks dan literatur berbahasa asing (Andi Hakim Nasution, *Kompas*, 28-10-1981); kebiasaan penggunaan kata-kata asing dalam ujaran bahasa Indonesia menjadi petunjuk bahwa penutur terpengaruh oleh nilai-nilai kebudayaan asing. ... nilai-nilai budaya lama akan ditinggalkan, tetapi nilai budaya baru belum tersedia sehingga tindak semacam itu akan dapat menggeser nilai-nilai budaya nasional (Toety Norhady dkk., *Kompas*, 28-10-1981); bahasa Indonesia sebenarnya tidak miskin kata-kata, tetapi masih kekurangan istilah ilmu pengetahuan dan teknologi modern. ... oleh karena itu, para ahli perlu menemukan istilah-istilah baru yang dapat diterapkan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan (Johannes, *Kedaulatan Rakyat*, 22 September 1983).

Berdasarkan pernyataan tersebut paling sedikit dengan merujuk permasalahan yang negatif: (1) perlu berbenah diri agar dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar; (2) meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu pengetahuan; (3) meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kebudayaan; (4) menghindarkan diri dalam penggunaan kata-kata asing bila ternyata ada persediaan kata-katanya dalam bahasa Indonesia; (5) perlunya istilah ilmu pengetahuan dan teknologi modern agar bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa modern.

Faktor penyebab permasalahan tersebut mungkin kompleks, tetapi tinjauan ini hanya akan memberikan analisis dari satu dugaan, yaitu belum adanya sikap mental pemakai bahasa Indonesia secara positif. Untuk maksud tersebut, berturut-turut akan dibahas (1) bahasa dan ragam bahasa; (2) ragam bahasa baku; (3) usaha peningkatan fungsi bahasa Indonesia; (4) pembinaan sikap mental penutur bahasa Indonesia; (5) kesimpulan dan penutup.

### **Bahasa dan Ragam Bahasa**

Pengertian bahasa itu luas karena pada hakikatnya setiap tuturan manusia yang bersifat simbolis itu adalah bahasa. Tiap tuturan merupakan

realisasi pengungkapan gagasan atau batin tentang konsep suatu hal atau pengalaman batin. Pengalaman dan kehidupan batin manusia itu berbeda-beda. Perbedaan pengalaman dan kehidupan rohaninya akan mempengaruhi jenis konsep yang dihasilkan sehingga ia juga mempengaruhi struktur bahasa yang dihasilkan. Selain itu, tiap orang mempunyai gaya bertutur dan kebiasaan berbahasa bersifat individual.

Keseluruhan berbahasa dan gaya individual akan membentuk *idiolek*. Tiap orang membentuk satu idiolek. Sekelompok penutur suatu bahasa yang memiliki cara bertutur relatif sama akhirnya akan membentuk *dialek*. Corak dialek suatu kelompok masyarakat atau kelompok masyarakat bahasa dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor geografis dan faktor sosial sehingga ada dialek geografis dan dialek sosial.

Dialek geografis merujuk asal penutur suatu bahasa, sedangkan dialek sosial merujuk ciri penggunaan bahasa. Dialek geografis tampak dari jenis lafal, sedangkan dialek sosial tampak dari kedudukan, martabat, pendidikan, kekayaan, atau kebangsawanan pemakainya. Dengan kata lain, bahasa yang dihasilkan seseorang itu merupakan pencerminan pribadi atau bayangan mental spiritualnya. Demikian juga bahasa kelompok sosial mencerminkan mentalistik kelompoknya sehingga bahasa suatu bangsa juga mencerminkan kedalaman kehidupan kerohanian bangsa itu. Dengan kata lain, bahasa Indonesia itu mencerminkan kehidupan kerohanian bangsa Indonesia.

Kalau konsepsi, ekstensi, dan intensi kehidupan batin dan pengalaman anggota-anggota masyarakat bahasa Indonesia itu bervariasi, maka bahasa yang dihasilkan pun akan bervariasi pula. Akibat variasi inilah, bahasanya menjadi beragam. Dasar timbulnya keragaman ini karena faktor pemakai bahasa atau manusia penuturnya dan faktor pemakaian bahasa atau register bahasa.

Pemakai bahasa bersifat individual yang ditandu oleh dialek. Pemakaian bahasa ditandai adanya faktor: bidang atau masalah yang dituturkan, ragam lisan atau ragam tulis, gaya bahasa resmi atau ragam gaya bahasa harian, keakraban, jarak antara penutur dengan lawan bicaranya. Itulah sebabnya, seorang pemakai bahasa kalau akan berbicara atau menulis selalu memperhatikan dan mempertimbangkan lawan berbicara atau yang dikirim surat. Pertimbangan itu terutama untuk menetapkan ragam dan gaya bahasa yang akan digunakan. Dalam pemilihan gaya bahasa, orang selalu memperhitungkan jarak antara pribadi penutur dengan yang diajak bertutur. Jarak antara orang yang satu dengan yang lain itu sifatnya relatif tetap. Bagi orang Indonesia, jarak itu sangat menentukan hubungan sosial.

Citra bahwa bahasa itu hanya seragam, yaitu bahasa baku, merupakan hal yang bertentangan dengan kenyataan. Karena luasnya anggapan seakan-akan penggunaan bahasa itu terbatas pada ragam baku saja, kadang-kadang

menyebabkan orang menjadi kikuk kalau berbicara di hadapan atau dihadiri oleh seorang yang berpredikat ahli bahasa Indonesia. Bayangan takut keliru atau takut salah, malu ditertawakan itu kadang-kadang dapat membunuh keberanian orang berbicara dengan bahasa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bahasa Indonesia. Kejadian semacam itu menandakan seakan-akan ada jurang antara bahasa masyarakat awam dengan masyarakat khusus. Padahal, masalahnya mungkin karena belum jelas arti batasan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Faktor apa sajakah penyebab timbulnya keragaman bahasa itu? Penggunaan bahasa dengan baik dan benar diartikan pemakaian suatu ragam bahasa yang serasi dengan sarasanya dan didukung oleh penerapan kaidah bahasa yang berlaku secara tepat. Bahasa dikatakan sesuai dan serasi pada sasaran apabila ragam itu berpaduan dengan jenis dan bidang permasalahan yang menjadi pokok pembicaraan. Keserasian ditentukan oleh faktor pemakaian bahasa dan pemakaian bahasa atau register.

*Pertama*, dari segi pemakaian bahasa, orang membedakan antara bahasa dengan dialek. Bahasa dipandang berkedudukan lebih unggul, berwibawa, dan didukung oleh penerapan kaidah tata bahasa secara benar dan sadar, konsisten dan konsekuen. Ragam bahasa berstatus dialek apabila relatif bebas, dan dipandang hanya merupakan subbahasa. Oleh karena itu, satu bahasa dapat terdiri atas beberapa dialek. Pengertian bahasa mempunyai konotasi makna bahasa baku, bahasa teratur, bahasa cerdas, dan sebagainya. Suatu bahasa mungkin berasal dari dialek, tetapi setelah mendapat persetujuan, berkedudukan sebagai bahasa, dialek itu akan dilengkapi dan diperketat sistem pemakaiannya.

*Kedua*, dari segi pemakaian bahasa yang juga disebut register, merupakan sumber terjadinya variasi bahasa karena dimensi bidang wacana atau *field*, ragam atau *mode*, dan gaya atau *style*. Bidang wacana mengacu ke wilayah operasi kegiatan bahasa dan sifat keseluruhan berlangsungnya kegiatan berbahasa. Misalnya, bahasa dalam bidang politik berbeda dengan bahasa dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan alam, agama, pertahanan dan sebagainya. Tiap bidang ditandai dengan hadirnya atau pemilihan idiom-idiom maupun istilah-istilah tertentu juga.

Ragam wacana itu mengacu ke bentuk bahasa lisan atautkah bahasa tertulis? Bahasa lisan itu umumnya lebih longgar dan kalau ada kesalahan ucap, segera dapat diralat. Lagi pula, situasi yang menyertainya membantu memperjelas penangkapan makna tuturannya. Berbeda dengan bahasa tulis, karena dicabut dari situasi sebenarnya, maka diperlukan bentuk bahasa secara formal agar tidak mudah menimbulkan salah tafsir bagi lawan bicaranya. Peranan situasi digantikan dengan kata-kata yang ikut mendukung bentuk kalimatnya. Adapun salah satu ragam bahasa tulis yang tergolong

sangat terkenal ialah *sastra*.

Gaya wacana itu mengacu ke jarak antara pembicara dengan lawan bicaranya. Berdasarkan jarak karena perbedaan status sosial, maka timbul gaya bahasa resmi dan gaya bahasa sehari-hari. Derajat keakrabannya akan melahirkan gaya bahasa hormat dan gaya biasa/netral.

Tiap dimensi register itu terdiri atas beberapa subdimensi. Gabungan subdimensi tersebut membentuk aneka ragam corak bahasa yang secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua jenis tingkat bahasa, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Perbedaan tingkat tersebut disebut *diglosia*. Diglosia itu seperti adanya *bahasa dalam* pada bahasa Melayu dengan bahasa biasa atau *unggah-ungguh krama ngoko* (halus dan bahasa biasa) pada bahasa Jawa. Diglosia ini erat kaitannya dengan nilai rasa bahasa. Bahasa resmi ataupun bahasa baku itu umumnya berpolakan variasi diglosia tinggi. Diglosia rendah digunakan dalam suasana santai, bahasa sehari-hari, bersifat kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari.

Diglosia tinggi itu, misalnya, dipakai pada waktu menyampaikan khotbah di masjid atau di gereja, surat-menyurat resmi, pidato politik di DPR, kuliah, mengajar di kelas, siaran berita, tajuk rencana surat kabar, menulis cerita dalam majalah atau surat kabar, bahasa pada lembar peragaan atau *caption*, menulis puisi. Latar belakang pemakai diglosia tinggi ini, antara lain, berpendidikan sehingga tata bahasanya teratur, pemilihan kata tepat dan kena, pemakaian peristilahan sesuai dengan bidangnya, penampilan idiom menghidupkan bahasanya.

Pemakaian diglosia rendah, misalnya, pada waktu memberi perintah kepada pembantu rumah tangga, pelayan, pekerja kasar, atau anggota keluarganya. Demikian juga pada waktu orang berbicara secara santai, berbicara dengan teman sebaya usianya, rekan sepekerjaan, pangkat setingkat. Kadang-kadang bahasa itu terlihat juga pada iklan siaran niaga, sastra rakyat, kesenian rakyat.

Bertitik tolak pada adanya diglosia, maka dapat dipastikan bahwa bahasa itu tidak hanya seragam. Hal itu memberikan isyarat bahwa ketika seseorang berbicara kepada seseorang itu wajib memperhatikan hubungan pribadinya, sopan santun, hormat-menghormati, tenggang rasa. Sifat menghormati ini sesuai dengan watak bangsa kita selalu merendahkan diri, tetapi tidak rendah diri.

## Ragam Bahasa Baku

### a. *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia*

Sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928, butir ketiga dan Undang-Undang

Dasar 1945, Bab XV, Pasal 26, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Setiap kedudukan itu mempunyai fungsi yang bersifat komplementer.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai fungsi (1) sebagai lambang kebanggaan nasional, yaitu mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, sumber kebanggaan bangsa, mencerminkan rasa harga diri bangsa, serta filsafat hidup bangsa; (2) sebagai lambang identitas nasional, yang wajib dijunjung tinggi di samping bendera, lagu kebangsaan, dan negara kita; (3) sebagai alat pemersatu bangsa; (4) sebagai alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi (1) sebagai bahasa resmi kenegaraan, dipakai dalam segala kegiatan kenegaraan, baik lisan maupun tertulis; (2) sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai di perguruan tinggi; (3) sebagai alat perhubungan tingkat nasional, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan; (4) sebagai alat pengembangan kebudayaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional beserta fungsinya dapat dinilai sudah memadai. Misalnya, sebagai lambang kebanggaan, identitas bangsa, alat pemersatu bangsa, dan alat komunikasi antardaerah, kiranya sudah sesuai dengan kenyataannya. Secara nasional, secara politis, semuanya telah berfungsi. Yang perlu dipikirkan ialah bagaimana pemeliharaan dan penghayatan sampai ke tingkat pengamalannya oleh warga Indonesia dewasa ini.

Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara beserta fungsinya sudah berjalan, tetapi memerlukan penelaahan lebih jauh dan mendalam. Dikatakan sudah berfungsi, kenyataannya segala kegiatan kenegaraan, pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, alat komunikasi nasional, pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, semuanya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Yang perlu dipikirkan ialah apakah penggunaan atau penerapan fungsi sudah memadai dengan tuntutananya?

Jawab pertanyaan itulah yang diharapkan. Andaikata jawabnya positif, kiranya tak ada masalah lagi. Tetapi, seperti hal-hal yang tercantum pada bagian pengantar makalah ini, kiranya jawabnya harus lain, yaitu masih negatif. Alasannya, bahasa negara berarti juga bahasa suatu bangsa pada daerah teritorial tertentu dalam upayanya mengurus kehidupan bangsanya. Padahal, kehidupan bangsa sedang berkembang, berjuang terus untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Akibatnya, kemantapan dalam kehidupan rohani masih jauh dari harapan. Sifat belum mantap tersebut tercermin dalam mengkristalisasikan diri atau sedang dalam masa peralihan. Tetapi, kita

yakin bahwa pada suatu momentum tertentu akan tercapai eksistensi kemantapannya. Namun, bagaimanapun juga kemantapan bidang bahasa selalu ditentukan oleh kemantapan kehidupan rohani, terutama sikap batin, tata pikir, tata rasa, dan tata laku.

Kenyataan dalam kegiatan kenegaraan itu, misalnya, tampak pada ucapan bahasa Indonesia oleh para pemimpin formal atau pejabat resmi yang membacakan pidatonya. Walaupun tidak menghayati, kita yakin bahwa naskah yang dibaca itu dieja dengan betul, tetapi ucapannya lain, yaitu lebih bersifat dialektis. Hal semacam ini dapat dinilai bahwa orang berhadapan dengan contoh yang kurang tepat. Akibatnya gaya tersebut ditiru karena datang dari orang yang berwibawa, berkarisma atau dari anutan orang awam. Padahal, kasus tersebut menunjukkan hadirnya contoh bahasa Indonesia yang baik, tetapi kurang benar, walaupun hanya karena lafal bahasanya yang menyimpang dari kaidah umum bahasa Indonesia.

Kenyataan lain, bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa pengantar di lembaga pendidikan, tetapi dipandang masih belum memenuhi fungsi ilmiahnya. Akibatnya, masih diperlukan penguasaan bahasa asing modern untuk memenuhi keperluan ini. Andakata bahasa Indonesia telah lengkap dengan istilah ilmiah, sepadan dijadikan alat menerjemahkan ataupun mengungkapkan konsep dan gagasan musykil, pelik dengan cermat dan teliti, maka penguasaan bahasa asing tidak mendominasi kehidupan kebahasaan kita. Oleh karena itu, bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan kebahasaan, yaitu mendewasakan bahasa Indonesia sehingga benar-benar bersifat ilmiah dan mampu berswatantra tanpa dominasi bahasa asing.

Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan tingkat nasional serta alat pengembangan kebudayaan dapat dikatakan sejalan dengan mengilmiahkan bahasa Indonesia. Hanya ada sedikit perbedaan pada pengembangan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan berprinsip pada wawasan budaya daerah sehingga penyempurnaannya memerlukan bantuan dan dukungan unsur-unsur bahasa daerah. Tepatlah kalau kebijakan yang tertera dalam politik bahasa nasional itu diterapkan secara tepat, keberadaan bahasa Indonesia akan kukuh dan mantap kedudukan atau fungsinya.

Pengertian bahasa Indonesia yang disebutkan di sini mengandung pengertian bahasa Indonesia ragam baku saja, ragam bahasa yang mempunyai ciri dan syarat tertentu seperti yang akan diuraikan berikut ini.

#### b. *Ciri dan Syarat Ragam Bahasa Baku*

Dari beberapa fungsi bahasa Indonesia itu hanya sebagian saja yang dapat diterima sebagai bahasa Indonesia baku karena bahasa baku itu adalah salah satu ragam bahasa yang diangkat berdasarkan ciri (1) proses pemilih-

an kosakata, tata istilah, idiom, sistem ejaan yang dinilai serbaguna dan bertepatan. Ciri ini menuntut agar pemakainya selalu teliti dalam pemilihannya; (2) pengkodifikasian bentuk, suatu pembatasan penggunaan sistem tata bahasa yang mantap dan kamus memuat semua kosakata, serta pedoman ejaan, kamus istilah. Ciri ini menuntut agar pemakainya selalu berpolakan tata bahasa yang disahkan serta kamus umum sebagai sumber memilih kata, penggunaan istilah, serta ejaan yang digunakan benar; (3) pemekaran atau elaborasi fungsi, yaitu bahasa Indonesia yang dapat mencakup fungsi bahasa secara luas, bahasa makin berkembang dengan rujukan makna secara teliti; (4) keberterimaan oleh anggota masyarakat bahasa, sehingga apa yang sudah diundangkan itu diterima dan digunakannya. Apabila sudah ditetapkan pemakainya wajib menaati dan menggunakannya.

Ciri tersebut memerlukan deskripsi penerapannya, yaitu (1) lafal yang digunakan tidak menunjukkan aksent dialek atau bahasa daerah; (2) mengikuti sistem ejaan yang telah dibakukan, misalnya menerapkan EYD secara teratur dan konsekuen; (3) bahasanya didasari pola bentuk seperti yang termuat dalam buku tata bahasa yang baku; (4) pemilihan kosa kata nya dari sumber kamus yang telah dibakukan; (5) penggunaan tata istilah yang sesuai dengan bidangnya dan yang sudah bersifat resmi seperti termuat dalam kamus istilah; (6) penggunaan gaya bahasa resmi, sopan, dan hormat.

Adapun syarat bahasa baku itu (1) ragam bahasa yang berwibawa dan mantap atau telah bersifat standar; (2) memiliki keswatantraan bukan bawahan bahasa lain; (3) secara historis telah lama adanya, terbukti dari karya-karya yang dihasilkan; (4) pemakainya besar sehingga kemungkinan bertahan-hidupnya terjamin. Syarat ini semuanya terpenuhi pada bahasa Indonesia.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, timbul kesan seakan-akan bahasa baku bahasa Indonesia seperti yang diajarkan di sekolah dan yang harus diteladani dalam segala kegiatan berbahasa. Padahal, fungsi bahasa Indonesia baku hanya dipakai dalam (1) ragam lisan; pada waktu berceramah atau berkhotbah, kuliah, berbicara di depan umum, serta berbicara dengan orang yang baru dikenal atau orang yang dihormati; (2) ragam tertulis; pada waktu surat-menyurat, korespondensi dinas, perundang-undangan, pengumuman resmi, karangan ilmiah, menyusun laporan resmi.

Adapun yang dapat dijadikan anutan adalah bahasa Indonesia pada siaran berita dari televisi atau radio, pidato kenegaraan, tajuk rencana surat kabar, gaya bahasa pengarang termasyhur, gaya bahasa para pemimpin, rohaniwan, ilmuwan, guru, dan sebagainya.

### **Usaha Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia**

Fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai

bahasa negara, dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu fungsi mendatar dan fungsi vertikal. Fungsi mendatar sebagai alat pemersatu bangsa, bahasa daerah, tanah air, budaya daerah menjadi budaya nasional. Fungsi vertikalnya sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi modern, termasuk penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan khalayak umum, bahasa pengantar, penulisan buku ilmiah. Walaupun semuanya telah berjalan, secara jujur harus diakui bahwa masalah itu belum berhasil secara memuaskan.

Fungsi vertikal ini dapat digolongkan fungsi kultural yang menjadi konsep sumber kemajuan bangsa. Selama fungsi kultural bahasa Indonesia belum sempurna, politik bahasa nasional belum berperan penuh sehingga dominasi bahasa asing akan berlanjut, terutama pada tataran pendidikan tinggi. Dengan kata lain, fungsi vertikal bahasa Indonesia belum membudaya, belum berakar dari lubuk batin yang paling dalam, sehingga belum mewarnai bentuk perilaku berbahasa pada umumnya. Kita seakan-akan hanya melihat akibat tetapi belum tahu sebabnya.

Adapun sebab-musabab masih mengambangnyanya kedudukan atau fungsinya mungkin terjadi secara individual atau secara kolektif, karena sikap mengganggalkan sesuatu yang kecil. Misalnya, ucapan yang salah dan enggan memperbaiki atau mengubahnya atau suatu ciri kecongkakan atau kebanggaan. Mungkin juga seseorang salah menemukan istilah atau kata dalam bahasa Indonesia, lalunya ditempuh jalan pintas dengan menggunakan kata asing.

Sikap mental negatif terhadap keberadaan dan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu kiranya hanya dapat diatasi dengan mengubah sikapnya ke positif. Dengan kata lain, harus diadakan perubahan sikap, yaitu melalui pendidikan. Yang perlu ditanamkan ialah sikap mental terhadap bahasa dengan: (1) menanamkan rasa bangga sehingga benar-benar bahasa Indonesia merupakan kebanggaan baginya, alat menampilkan diri dalam hidupnya; (2) menanamkan rasa setia terhadap bahasa Indonesia, ada usaha mempertahankan kedudukan dan fungsinya; (3) menanamkan rasa hormat, jauh dari sikap meremehkan hal kecil, dan sanggup meletakkan dan menerapkan kaidah bahasa setepat mungkin; (4) menanamkan rasa sadar akan pentingnya bahasa Indonesia sehingga apabila ia melakukan pelanggaran kaidah, ia mau memperbaikinya; (5) menanamkan rasa disiplin berbahasa.

Pandangan di atas merupakan cara atau usaha individu yang keluar dari dalam batinnya. Sekarang bagaimanakah pengaruh lingkungan atau masyarakat sekitar? Secara horisontal, memang tak mungkin berhasil apabila masyarakat sekeliling dan situasi tidak membantu. Misalnya, dalam keluarga, kalau orang tua dan anggota keluarga lain tidak ikut mengusahakan tercapainya tujuan,

niscaya tak akan berhasil. Demikian juga di sekolah, bagaimanapun guru bahasa Indonesia berusaha keras jika guru bidang studi lain tidak mendukungnya, mustahil usaha guru Bahasa Indonesia berhasil secara maksimal. Pendek kata, karena usaha pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu bersifat nasional, harus dilakukan secara nasional pula.

Secara horisontal tak akan sempurna apabila tak disertai usaha secara vertikal. Karena dalam diri manusia itu ada dorongan meniru, memiliki rasa kagum, serta menghormati atasan, golongan pemuka masyarakat, dan pejabat negara perlu memberikan teladan yang sebaik-baiknya. Contoh yang kurang pada tempatnya, terutama pelafalan bahasa, bentuk kata yang eliptik, kata-kata asing yang disengaja untuk menunjukkan tingkat intelektual akan mempengaruhi dan mudah ditiru oleh orang awam atau bawahan.

Dengan mengingat pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa itu juga harus bersifat ilmiah, maka selain bersifat *individual* psikologis dan *sosial* psikologis, juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut. Pertama, melengkapi istilah yang bersifat ilmiah dan budaya. Sifat ilmiah dapat dilengkapi dengan istilah asing yang secara tepat diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sifat budaya dapat diambilkan dari istilah bahasa daerah yang dipandang tepat. Dengan demikian, ada pemanfaatan bahasa daerah dan modernisasi dari bahasa asing. Istilah teknologi kebanyakan datang dari luar, tetapi tidak mustahil dalam perbendaharaan kita telah tersedia. Kedua, agar bangsa Indonesia dapat mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi, buku dalam bahasa asing juga dianggap perlu sebaiknya segera diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh suatu tim ahli. Dengan demikian perlu ada tim penerjemah tingkat nasional didampingi dewan penerbit tingkat nasional. Ketiga, kegiatan penulisan hasil riset dan hasil proyek penulisan buku teks ilmiah dalam bahasa Indonesia segera diterbitkan dan diedarkan ke seluruh kalangan yang memerlukan. Keempat, semua itu juga masih perlu didukung adanya perubahan sikap mental secara integral, yaitu kebiasaan masyarakat tutur yang membudaya ini diubah menjadi masyarakat baca tulis.

### Pembinaan Sikap Mental Penutur Bahasa Indonesia

Sikap mental erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab, dan tanggung jawab itu tampak dari perilaku yang berpolakan adanya kesatuan kata dengan perbuatan. Hal ini mencerminkan kehidupan batin. Oleh karena itu, untuk menilai apakah seseorang telah memiliki sikap batin positif, atau sebaliknya akan tampak dari perilaku.

Dengan memperhatikan bahwa sikap mental bersifat individual dan untuk mengetahui hal itu dapat digunakan cara berintrospeksi atau mengajukan pertanyaan yang harus dijawab sendiri. Pertanyaan itu, misalnya:

(1) Apakah saya telah yakin bahwa bahasa Indonesia itu merupakan kebanggaan nasional, mencerminkan nilai sosial budaya? Apakah saya bangga kalau saya mampu berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau apakah saya lebih bangga kalau saya menguasai bahasa Inggris? (2) Apakah saya telah benar-benar menjunjung lambang identitas nasional yang berupa bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan bahasa nasional? Apakah saya sudah mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris? (3) Apakah dengan menggunakan bahasa Indonesia saya sudah merasa tak ada perbedaan antara bahasa dan budaya daerah yang berlainan sehingga kesatuan Indonesia benar-benar telah terwujud? (4) Apakah saya telah memfungsikan bahasa Indonesia sebagai alat mengungkapkan perasaan, seni sastra, seni drama, baik lisan maupun tertulis? (5) Apakah bahasa Indonesia telah saya gunakan dalam segala upacara yang saya ikuti? Apakah pengumuman pemerintah dan dokumen lainnya telah menggunakan bahasa Indonesia? Demikian juga apakah pidato telah sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? (6) Apakah bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan telah menggunakan bahasa Indonesia? (7) Apakah semua masalah nasional telah diungkapkan dengan bahasa Indonesia? Demikian juga apakah perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya telah sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia? (8) Apakah pengembangan ilmu pengetahuan teknologi modern, penerjemahan buku-buku sudah dapat sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia sehingga tak selalu bergantung pada bahasa asing?

Demikian sekadar pancingan dan kontrol terhadap diri kita masing-masing yang sudah merasa ahli. Apabila kita sudah merasa berada dalam skala sikap positif, kita wajib meningkatkannya lagi, sedangkan bagi yang merasa kurang perlu menutupi kekurangannya.

## Simpulan

Bahasa Indonesia baku mempunyai ciri tertentu, yaitu telah melalui proses pemilihan, pengkodifikasian bentuk, pemekaran fungsi, dan keberterimaan oleh masyarakat pemakainya. Syarat penentuannya antara lain memilih ragam bahasa yang berwibawa, memiliki sifat swatantra, dan jumlah pemakainya besar.

Usaha peningkatan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dilakukan secara individual, sosial, dan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Secara individual dengan menanamkan sikap mental positif dan mendisiplinkan diri. Secara sosial, perlu adanya suasana yang dapat mendorong terseenggaranya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Secara ilmiah, dengan melengkapi kekurangan, menerjemahkan, dan mengubah mental masyarakat tutur ke masyarakat baca tulis.

Pembinaan sikap mental penutur bahasa Indonesia perlu didorong dan diingatkan guna membentuk sikap positif. Caranya dapat melalui introspeksi, menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chaplin, J.P. 1979. *Dictionary of Psychology*, New York 10017, USA.
- Halim, Amran. 1976. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia". Dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra*, Th. I Nomor 5. Jakarta: PPBSID.
- Hudson, R.A. 1980. *Sociolinguistics*. London: Cambridge University Press.
- Krech, David dkk. 1962. *Individual in Society*. Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha.
- Kridalaksana, Harimurti. 1975. "Beberapa Ciri Bahasa Indonesia Standar". Dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra*, Th. I Nomor 1 – 1975. Jakarta: PPBSID.
- Surat kabar:*
- Pikiran Rakyat* (Bandung), 26 Oktober 1981.
- Kompas* (Jakarta), 28 Oktober 1981.
- Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta), 22 September 1983.

## **KETERAMPILAN MEMBACA PERSEPTIF: BAHAN EKSPERIMENTAL PENGAJARAN MEMBACA CEPAT BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH**

**Zaini Machmud**  
**IKIP Malang**

### **Pendahuluan**

Makalah ini secara singkat akan menguraikan berbagai aspek bahan pengajaran membaca cepat, atau membaca perseptif yang mulai tahun ini secara eksperimental akan dipakai oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, dalam usaha pengajaran membaca bagi para siswa berbakat di beberapa sekolah menengah di Jakarta dan Cianjur, serta para siswa SMP dan SMA di sekolah-sekolah PPSP. Bahan pengajaran ini, yang telah dikembangkan dalam bentuk modul, mempunyai tujuan agar siswa dapat mempertinggi kecepatan membaca bahan bacaan dalam bahasa Indonesia, dengan tingkat pemahaman dan retensi yang lebih tinggi pula. Tingkat kecepatan membaca yang dibutuhkan oleh siswa pada dasarnya berbeda-beda bergantung pada berbagai macam tujuan membaca yang secara sadar ataupun tidak sadar ditentukan oleh pembaca sendiri, serta bergantung pada macam bahan bacaan yang dibacanya. Yang menjadi pikiran dasar dalam pengembangan bahan pengajaran membaca reseptif ini adalah bahwa melewati pengajaran dan latihan yang tepat kebanyakan siswa dapat mempertinggi kecepatan membaca sampai dua atau tiga kali kecepatan yang dikuasainya, dengan kenaikan sesuai dengan pemahaman, serta keasyikan membaca. Di samping itu, pembaca yang telah berhasil mengatasi kebiasaan membaca yang tidak tepat

dapat mengembangkan sendiri daya belajar dan dengan begitu menaikkan kepuasan inteletiknya.

Pada dasarnya dengan kemampuan membaca perseptif, pembaca diharapkan dapat mengembangkan faktor yang kerap kali dilupakan, yaitu apa yang biasa disebut persepsi langsung (*Instantaneous perception*). Prinsip Gestalt yang disebut *closure* ini, antara lain, menyatakan bahwa otak atau pikiran kita mampu memperoleh arti/makna sebuah stimulus visual secara utuh walaupun stimulus tersebut kadang-kadang tidak terlihat secara utuh. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini bahwa kebanyakan di antara kita secara mudah dapat mengidentifikasi atau membaca frasa di bawah ini, walaupun kira-kira sepertiga dari jumlah huruf tidak tertulis:

U.d.ng-u...ang D.s.r 19.5

Pikiran kita dapat mengisi huruf-huruf yang hilang tanpa mengalami kesukaran yang terlalu banyak.

Prinsip mengenal kembali bentuk keseluruhan jika hanya sebagian saja dari bentuk tersebut yang terlihat diterapkan dalam prinsip pengajaran membaca reseptif. Pembaca diharapkan dapat mengenal apa yang dibaca dengan hanya melihat sebagian dari padanya, dan dengan begitu dapat mempertinggi kecepatan membaca. Dengan kata lain, diharapkan bahwa pembaca perseptif dapat menyerap pemahaman maksimal setelah secara sadar memberikan perhatian visual pada sebagian kecil yang dibacanya. Sebagaimana disinggung di atas, hal ini tentunya sangat bergantung pada bagian dari bahan yang dibaca, pengenalan pembaca terhadap bahan, atau isi bahan bacaan tersebut.

Karena modul pengajaran membaca perseptif merupakan bahan eksperimen, di samping bahan lain yang telah dikembangkan, maka setelah dilaksanakan uji coba di lapangan perlu kelak diadakan evaluasi guna kepentingan perbaikan dan revisinya.

### Keterampilan Membaca Perseptif

Membaca adalah keterampilan yang sangat penting karena hampir semua kegiatan sehari-hari di dunia modern ini bergantung pada membaca. Kalau seseorang tidak dapat membaca secara efisien, ia akan mendapat halangan atau kesukaran hampir dalam segala aspek kerja serta belajarnya. Ia akan merugi karena sebagian besar waktu yang dipakai untuk membaca hilang tanpa hasil yang memadai. Kalau sedang membaca, ia akan cepat merasa lelah dan akhirnya dapat lebih cepat berkecil hati dibandingkan dengan orang yang dapat membaca dengan efisien.

Membaca adalah berpikir. Kalau seorang siswa, misalnya, harus bekerja keras membaca halaman demi halaman, membaca kembali, serta membagi-bagi alur gagasan dalam halaman-halaman tersebut secara tidak benar, maka

cara berpikir dan menciptakan gagasan serta mengaturnya akan mengalami kesulitan yang serius. Tidak hanya di lingkungan pendidikan membaca itu sangat penting. Di dunia bisnis dan industri pun pada umumnya diperlukan keterampilan membaca yang tinggi!

Jelas bahwa seorang profesional—guru, menteri, dokter, hakim, dan sebagainya— harus membaca berbagai macam bahan bacaan dari buku, surat kabar, majalah profesional, buletin dan lain-lain, dengan tujuan agar dapat mengikuti kemajuan yang terus bertambah di bidangnya. Dalam dunia perusahaan, perpajakan, perbankan dan lain-lainnya, juga sangat diperlukan keterampilan membaca agar seseorang itu tidak ketinggalan zaman dan dapat melaksanakan kewajiban dalam pekerjaannya. Memperbaiki atau meningkatkan keterampilan membaca tidak hanya diperlukan selama seseorang itu belajar di sekolah, tetapi akan membantunya dalam perbaikan dan pengembangan karier dalam kehidupannya kelak.

Seorang pembaca, misalnya seorang anak berbakat, selalu dapat dilatih atau berlatih untuk menjadi pembaca yang baik. Apa yang akan diajarkan dalam program pengembangan keterampilan membaca bukanlah *remedial reading* atau membaca untuk perbaikan bagi siswa yang memerlukan kegiatan korektif.

Kalau siswa dapat membaca dengan efisien, ia akan dapat menyelesaikan tugas kelasnya dengan lebih cepat dan lebih baik daripada seorang pembaca yang lambat. Siswa tersebut dapat membaca dengan lebih cepat dan dengan pemahaman yang lebih tinggi dari bahan bacaannya. Cara berpikirnya tidak terus-menerus dihambat oleh cara membaca yang salah, yaitu dengan membaca kata demi kata, dan/atau dengan membaca kembali berulang-ulang. Siswa tersebut tahu apa yang dicarinya, dan dapat memusatkan perhatiannya pada bahan ajaran dengan lebih baik. Seorang pembaca yang efisien akan merasakan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan membaca. Ia suka membaca sehingga kegiatan ini merupakan rekreasi dan hiburan baginya yang dapat dinikmati di mana saja, setiap saat.

### Tujuan Membaca

Tujuan membaca yang sangat penting, antara lain, adalah

- a. mampu menjawab berbagai macam pertanyaan yang spesifik;
- b. mendapatkan kesan umum ataupun previu sebuah pokok bahasan yang luas;
- c. mempelajari secara mendalam sebuah pokok bahasan tertentu;
- d. mendapatkan kesenangan atau kegembiraan;
- e. memperluas pandangan tentang dunia pada umumnya.

## Jenis Membaca

Jenis membaca bagi siswa bergantung pada apa yang dicarinya, yaitu tujuan atau alasan membaca. Misalnya, membaca surat pribadi berlainan dengan membaca buku pelajaran IPA. Cara orang membaca surat kabar tidak sama dengan membaca buku sastra. Pada dasarnya ada tiga jenis pokok dalam membaca.

### 1) *Membaca Saring (Skimming)*

Jenis membaca ini memerlukan kecepatan tinggi, dengan tujuan dapat menangkap gagasan umum dan pokok bahasan utama atau menyaring butir-butir tertentu.

### 2) *Membaca Telaah*

Membaca telaah ini bertujuan

- memahami semua aspek yang relevan termasuk butir-butir yang ada dalam bacaan;
- memahami organisasi atau susunan bahan bacaan;
- menilai pengetahuan penulis dan sikapnya guna melihat apakah ia objektif atau emosional, jujur atau penuh prasangka;
- mencari dan memahami, baik arti yang tersirat maupun yang tersurat.

### 3) *Membaca Hiburan*

Dengan membaca jenis ini pada dasarnya seseorang tidak mencari atau mempelajari pengetahuan, tetapi untuk menghibur dirinya.

## Latihan Keterampilan Membaca

Anak berbakat akan banyak mendapatkan keuntungan dari latihan perbaikan cara membaca. Ada beberapa hal yang dapat mendorong siswa untuk belajar dengan baik:

- adanya keinginan membaca yang besar, baik di dalam maupun di luar kelas;
- adanya bahan bacaan yang menarik di sekolah;
- teknik membaca yang benar, yang dapat dilatihkan (membaca frasa demi frasa, tanpa vokalisasi dan konsentrasi yang baik);
- kecenderungan menguasai kosakata;
- mempunyai tujuan membaca yang jelas;
- mengidentifikasi diri dengan bahan bacaan;
- adanya asosiasi bahwa membaca itu berguna dan menyenangkan;
- adanya ketertarikan orang tua terhadap kegiatan membaca.

Terhadap yang terakhir ini mungkin kita tidak dapat mengambil langkah yang terlalu langsung, tetapi kiranya dapat dikembangkan dalam pembinaan keterampilan dan kebiasaan membaca yang baik.

Marilah kita telaah cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau menambah mutu aspek 1 – 8 di atas.

- 1) Dengan menciptakan membaca insentif untuk membantu siswa meningkatkan kemauan membaca di dalam kelas, kita telah mendorong mereka agar suka membaca di luar kelas. Pelatihan yang diberikan dengan modul diharapkan dapat membantu para siswa.
- 2) Perlu diusahakan agar tersedia buku yang cukup menarik di sekolah misalnya, buku cerita/novel dan buku ilmu pengetahuan.
- 3) Kebiasaan membaca yang kurang baik dapat dikoreksi dengan pelatihan teknik membaca yang cukup banyak. Jika siswa menyadari mengapa ia tidak dapat membaca secara efisien, ia dapat mencari cara dan teknik membaca yang lebih baik.
- 4) Penggunaan kosakata dapat diperluas dengan berbagai macam pelatihan, yang tidak selalu dihubungkan secara langsung dengan penggunaan kamus, tetapi dengan cara menangkap arti dari konteks atau dengan membagi kata tersebut menjadi berbagai unit yang berarti.
- 5) Banyak pembaca yang tidak tahu tujuan membaca, bahkan ada yang tidak tahu tujuan membaca. Pelatihan yang diberikan dalam model AB tujuannya agar selalu dikaitkan dengan cara siswa membaca dan bahan apa yang mereka baca.
- 6) Bahan bacaan yang diharapkan dapat mendorong siswa belajar secara kognitif dan menghayati secara efektif apa yang dibaca hendaknya menarik bagi siswa, yaitu bahan yang dapat mengidentifikasi dirinya, dan bacaan "masa kini".
- 7) Siswa perlu digalakkan membaca bahan-bahan khusus, yaitu bacaan yang menarik sesuai dengan taraf kognitif serta efektif siswa tersebut.

Modul keterampilan membaca diharapkan dapat membantu siswa/AB mengembangkan dirinya menjadi pembaca yang lebih baik. Tujuannya ialah mempertinggi kecepatan membaca, tetapi selalu dihubungkan dengan isi bacaan yang bernilai, menajamkan dan memperluas pemahaman, mengembangkan keterampilan, mengorganisasikan apa yang dibaca, dan menaikkan kemampuan membaca kritis siswa.

### **Membaca Secara Efisien**

Pelatihan membaca yang mendayagunakan bahan sajian dalam modul diharapkan dapat secara optimal membantu siswa AB menjadi pembaca yang

efisien. Yang dimaksud dengan membaca secara efisien adalah jika pada waktu membaca seorang pembaca melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- (a) membaca dengan diam tanpa vokalisasi;
- (b) membaca dengan kecepatan sesuai dengan tujuan membaca, apa yang dibaca, dan mengapa ia membaca;
- (c) mata "meluncur" secara berirama/teratur pada baris-baris di halaman buku, tanpa menggerakkan kepala ke kiri dan atau ke kanan;
- (d) mata tidak mengadakan regresi, kecuali kalau siswa menghendakinya;
- (e) merespon "gagasan" atau ide yang tertulis, bukan *kata-kata* yang dibacanya.

Untuk mencapai keterampilan di atas diperlukan pelatihan ketekunan serta kemauan yang luas untuk *mengubah kebiasaan lama*.

### Membaca Kritis

Membaca bahan secara kritis adalah kegiatan membaca untuk mencapai pemahaman kreatif-kritis, yaitu memahami bahan dalam bahasa tulisan dengan menggunakan daya pikir secara kritis (*critical thinking*), bukan hanya mendapatkan fakta. Apa yang terjadi pada pembaca sebagai hasil pemahaman fakta tersebut adalah apa yang disebut *critical reading*. Membaca kritis-kreatif memerlukan intelegensi, sensitivitas, bakat analitik, dan sedikit skeptisisme.

Untuk menajamkan cara membaca kreatif-kritis, siswa AB harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Setiap pembaca sampai pada taraf tertentu mempunyai daya kreatif dan kritis walaupun ia tidak tahu tentang hal ini.
2. Walaupun semua siswa membaca buku yang sama, setiap siswa membaca buku dengan cara yang berbeda, bergantung pada siapa dia.
3. Kecuali kalau siswa telah memahami dirinya, ia akan mendapat kesukaran menilai orang lain.
4. Membaca kreatif-kritis kadang-kadang merupakan tugas yang berat.
5. Seorang pembaca harus mau memahami pendapat orang lain kalau ia ingin menjadi pembaca kritis.
6. Jika siswa banyak membaca, lebih banyak kemungkinannya menjadi pembaca kreatif-kritis.
7. Kuriositas adalah dasar bagi kegiatan belajar.
8. Banyak masalah besar tidak pernah dapat dipecahkan.
9. Pembaca kreatif-kritis tidak hanya membaca baris-baris yang ada.
10. Membaca untuk pelarian atau untuk menyetujui kurang bersifat kreatif-kritis.
11. Dogmatisme adalah musuh membaca kreatif-kritis.

12. Kebenaran itu sukar ditunjukkan dengan tepat.
13. Kebebasan tidak identik dengan kekerasan kepala.

Seorang pembaca kreatif-kritis mau mengekspresikan perasaan, interpretasi, pandangan, dan responnya terhadap apa yang dibacanya. Ia tidak ragu-ragu menyampaikan kritik positifnya, dan selalu bertanya "Mengapa?" Kalau ia membaca novel ia akan berpikir dan melangkah jauh melebihi peran yang ada; ia bertanya, "Apakah perjalanan dirinya sesuai atau tidak pandangan penulis, dan mengapa?"

Seorang pembaca kreatif-kritis sadar bahwa sebuah buku mempunyai nilai kalau ada doa orang yang bergayut—penulis dan pembaca. Ia sadar bahwa "Banyak buku yang baik dirusak oleh pembaca yang buruk". Ia tahu bahwa intelegensi, emosi, sikap, sensitivitas, dan pengalamannya sebelum membaca memberi "warna" apa yang ia baca.

Setelah membaca, seorang pembaca kreatif-kritis akan bertanya:

1. Siapa yang menulis buku ini?
2. Apakah ia mempunyai kualifikasi dalam menulis buku ini?
3. Apa yang ia katakan?
4. Apa yang ia maksudkan?
5. Apa motifnya?
6. Orang yang seperti apa dia?
7. Apakah ini fakta?
8. Apakah ini opini?
9. Apakah ini interpretasi?
10. Mengapa penulis memilih gaya dan nada seperti itu?
11. Buku apa ini?
12. Apakah saya mempercayainya? Mengapa?
13. Apakah ada harga/nilainya untuk dibaca?
14. Apakah menarik? Mengapa? Mengapa tidak?
15. Bagaimana cara penulis berkomunikasi dengan pembaca?

Dengan mengajukan pertanyaan tersebut pembaca dapat menentukan sikap sebagai pembaca kreatif-kritis.

### **Keterampilan Memanfaatkan Perpustakaan**

Seiring dengan keterampilan membaca, siswa AB diberi pengetahuan dan keterampilan menggunakan perpustakaan dalam kegiatan belajar, dan merupakan kegiatan yang integral dari pendidikan siswa di sekolah.

Dalam pembahasan keterampilan tersebut perlu ditekankan di sini bahwa seorang siswa tidak begitu saja dapat memanfaatkan berbagai macam fasili-

tas yang tersedia di perpustakaan karena pendayagunaan fasilitas tersebut memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Untuk itu modul keterampilan memanfaatkan perpustakaan pada dasarnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- (a) berbagai macam bahan yang tersimpan di dalam perpustakaan, yaitu (1) buku, (2) bahan referensi, dan (3) priodikal;
- (b) macam ruangan yang biasanya terdapat dalam perpustakaan;
- (c) prosedur peminjaman buku, yang mensyaratkan pengetahuan tentang (1) katalog kartu, (2) klasifikasi bahan/buku menurut sistem Dewey, (3) cara menggunakan kartu perpustakaan;
- (d) berbagai macam buku referensi, misalnya: (1) ensiklopedi, (2) buku tahunan, (3) kamus, (4) atlas, (5) bibliografi, dan (6) berbagai macam referensi umum;
- (e) latihan keterampilan memanfaatkan perpustakaan.

### Latihan Dalam Modul

#### *Berbagai Jenis Latihan dalam Modul Keterampilan Membaca*

Dalam modul keterampilan terdapat berbagai macam latihan membaca:

- (a) latihan memperluas pandangan periferal;
- (b) latihan mengenal kembali bentuk (huruf, kata dan frasa) dengan cepat;
- (c) latihan fiksasi fokus bersama-sama dengan gerakan mata vertikal;
- (d) latihan fiksasi fokus + gerakan mata horisontal;
- (e) latihan membaca dengan pola gerak yang telah dikuasai;
- (f) latihan membaca saring, yang terdiri atas:
  - (a) memberi lokasi informasi
  - (b) mendapatkan kesan umum
  - (c) mencari arti kata dalam kamus

#### *Latihan dalam Modul Keterampilan Memanfaatkan Perpustakaan*

Dalam modul ini terdapat latihan sebagai berikut:

- (a) latihan katalog kartu;
- (b) latihan memperluas pokok bahasan untuk mencari kartu yang mengandung pokok bahasan yang diinginkan;
- (c) latihan bahan referensi (masih belum tersusun secara lengkap);
- (d) latihan survei buku teks.

### Penutup

Telah diuraikan dalam makalah ini bahan pengajaran membaca perseptif dengan berbagai aspeknya yang sangat diperlukan bagi setiap orang

yang ingin menaikkan kemampuan membaca dengan pemahaman yang tinggi. Bahan latihan yang disajikan untuk keperluan ini didasarkan atas pemikiran bahwa orang dapat mengembangkan kemampuan membaca yang efisien jika ia berlatih untuk itu, dengan bahan dan metode yang memanfaatkan prinsip bahwa otak manusia dapat "melihat" objek secara utuh, walaupun hanya sebagian saja dari objek tersebut yang secara visual dapat ditangkap oleh indra. Hal ini dapat lebih dimungkinkan jika objek tersebut sudah dikenal sebelumnya.

Ada berbagai tingkatan kecepatan membaca perseptif yang dilatihkan, bergantung pada tujuan dan jenis membaca serta jenis bahan yang dibaca. Dalam latihan membaca perseptif, pembaca menanamkan kebiasaan membaca frasa demi frasa, bukan kata demi kata ataupun huruf demi huruf, dengan tujuan agar mata dapat bergerak dengan cepat secara berirama, tanpa terjadinya regresi atau vokalisasi. Diharapkan bahwa dengan latihan yang dirancang dan dikembangkan khusus untuk menaikkan kemauan membaca perseptif ini pembaca dapat membaca bahan-bahan bacaan dengan efisien, yaitu dengan kecepatan yang tinggi dan pemahaman serta retensi isi bacaan yang cukup baik.

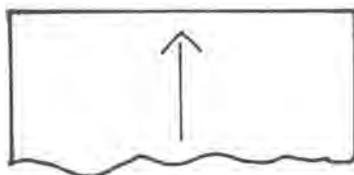
## DAFTAR PUSTAKA

- Bloom, B.S. e.t. 1956. *Taxonomy of Educational Objectives*, New York: David Mc.Kay.
- Crow, L and A. Crow. 1963. *How to Study*, New York: Macmillan Publishing Co. Inc.
- Maslow, A.H. 1968. *Toward a Psychology Being*. New York: Van Nostrand.
- Terffinger, D.J. 1980. *Encouraging Creative Learning for Gifted and Talented, A Handbook of Methods and Techniques*. Ventura: Ventura Country Superintendent of Schools Office.

## LAMPIRAN 1

## CONTOH LATIHAN

Ambillah sebuah kartu putih ukuran kartu nama. Gambarlah sebuah panah dengan pucuknya di tengah-tengah pinggir atas seperti gambar berikut:



Gunakanlah kartu tersebut, yaitu kartu panduan, untuk latihan ini, dengan cara sebagai berikut:

1. Tutuplah daftar angka dengan kartu panduan!
2. Letakkan panah pada tengah-tengah lajur pada angka!
3. Fokuskan pandanganmu pada titik pucuk panah (titik fokus) dan gerakkan kartu ke bawah agar angka-angka satu per satu akan kelihatan. Mulailah dengan latihan (a), kemudian (b), (c), (d) dan (e).
4. Baca angka tersebut secepat mungkin tanpa vokalisasi, dengan mata tertuju pada titik fokus.

| (a) | (b)   | (c)   | (d)     | (e)     |
|-----|-------|-------|---------|---------|
| 0   | 0     | 0     | 0       | 0       |
| 105 | 93054 | 23081 | 2840716 | 9270182 |
| 308 | 73982 | 35086 | 9320428 | 6380542 |
| 904 | 49033 | 93062 | 3750284 | 3820937 |
| 602 | 52048 | 56061 | 7390715 | 7380921 |
| 707 | 17208 | 75083 | 4720917 | 3720741 |
| 809 | 88021 | 38062 | 4280553 | 9400473 |
| 908 | 36017 | 13042 | 3890287 | 3720795 |
| 403 | 61065 | 28093 | 8160349 | 2910405 |
| 504 | 15076 | 73018 | 2710082 | 9380718 |
| 107 | 87053 | 29055 | 1230456 | 3820753 |

Membaca dengan angka seperti di atas agak sukar karena tidak ada konteks yang membantu kamu berpikir. Akan tetapi, latihan ini sangat berguna untuk mengembangkan kebiasaan memusatkan mata pada titik sentral dan untuk melatih pandangan periferal dan melihat apa yang di sebelah kanan titik fokus tersebut. Ulangi latihan ini dengan kecepatan gerak karto yang makin lama makin tinggi (dari 5 sampai 3 detik).

## LAMPIRAN 2

## CONTOH LATIHAN

Untuk latihan ini letakkan jari-jarimu untuk menutup frasa di bawah ini, dengan jari tengah di antara kedua kata. Dengan melihat pucuk jari tengah, gerakkan tanganmu ke bawah sehingga kata-kata tersebut dapat kamu baca, frasa demi frasa, dengan mata terpusat pada titik di atas jari tengah, serta mengikuti gerak jarimu ke bawah.

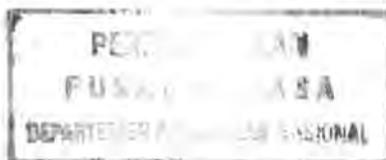
|                |                        |
|----------------|------------------------|
| hari itu       | para peserta           |
| satu kali      | oleh pekerja           |
| tidak perlu    | asal daerah            |
| satu kali      | untuk anakmu           |
| anak kita      | juga begitu            |
| ban mobil      | perlu sekali           |
| tiga sendok    | sekarang juga          |
| paling tidak   | kemarin dulu           |
| amat penting   | sehari penuh           |
| kurang jelas   | peranan penting        |
| merah tua      | kepada penderita       |
| untuk ibu      | lingkungan hidupku     |
| kertas tebal   | menginginkan pelayanan |
| para dokter    | pengambilan keputusan  |
| saat itu       | posisi strategis       |
| sistem rujukan | kesehatan nasional     |

## LAMPIRAN 3

## CONTOH LATIHAN

Latihan di bawah ini agak berbeda dengan latihan sebelumnya, yaitu kamu harus membaca kalimat yang tersedia frasa demi frasa. Bacalah bacaan di bawah ini dengan mata bergerak dari kiri ke kanan, dan bacalah setiap frasa dalam sekilas pandang. Gerakkan pandangan matamu dengan lancar dan dengan irama yang teratur.

- a. (Bagian dari latihan ini) (sama dengan yang lain)  
 (dalam modul ini) (tetapi) (frasa-frasanya diatur)  
 (tidak dari atas) (ke bawah) (tetapi dari kiri)  
 (ke kanan) (seperti dalam tulisan biasa)  
 (Hendaknya) (kamu usahakan benar-benar) (agar matamu)  
 (bergerak dengan teratur) (dari kiri ke kanan)  
 (Latihan ini) (hendaknya dikerjakan) (dengan rajin)
- b. Sebenarnya fasilitas pelayanan medik di jalur Pemerintah  
 termasuk fasilitas ABRI lebih lengkap dari pada jalur partikelir  
 ya peralatannya ya tenaga ahlinya jadi kecenderungan memilih pelayanan  
 di jalan partikelir nampaknya lebih berdasar alasan non-medik murni misalnya jadwal pelayanan  
 yang bisa diatur ruang tunggu dan perawatan yang lebih nyaman  
 pendekatan yang lebih informatif dan komunikatif pilihan obat akibat gemerlapnya promosi produsen



## HAMBATAN AFEKTIF DALAM PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA BAKU

Susilo Supardo  
FPBS IKIP Yogyakarta

### Latar Belakang dan Masalah

Bahasa Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV Pasal 36 adalah bahasa negara. Dengan demikian, bahasa ini berkedudukan sebagai bahasa resmi dan berfungsi sebagai bahasa pengantar di dalam hubungan resmi dan kenegaraan. Sebagai bahasa pemersatu segenap rakyat Indonesia bahasa ini berfungsi sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, kehadirannya sebagai medium komunikasi bangsa Indonesia bahasa ini berkedudukan dan berfungsi sebagai bahasa nasional.

Proses sejarah telah menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang diangkat dari satu bahasa yang tidak berasal dari satu kelompok etnik yang dominan, melainkan satu bahasa yang telah populer di antara bangsa itu, yaitu *lingua franca* di kawasan Nusantara. Bahasa yang telah populer ini tidak lain adalah bahasa Melayu (Vreeland, 1975:84).

Sebagai *lingua franca*, bahasa Melayu sangat berperan di dalam hubungan antara para pedagang dan pelaut, terutama di Kepulauan Nusantara dan Asia (Richard, 1872:9). Bahasa ini tentulah ragam yang komunikatif dengan struktur dan kosakata yang tidak formal dan dapat digunakan dengan mudah oleh pemakainya. Ciri lain yang ada pada bahasa ini adalah frekuensi pemakaiannya yang tinggi di dalam hubungan informasi. Anggapan selanjutnya, *lingua franca* ini tidak lebih dari ragam *basilek Melayu* atau yang terkenal dengan Melayu Pasar (*Bazar Malay*). Dapatlah dikatakan bahwa pada saatnya *lingua franca* semacam ini lebih merupakan semacam kode yang kurang diwarnai oleh ikatan norma gramatikal yang harus ada pada kode yang berlaku

pada situasi formal. Inilah rupanya yang dapat dikategorikan sebagai *restricted code* (Trudgill, 1974:51).

Dengan menilik asumsi di atas dalam perkembangan selanjutnya orang merasa perlu memiliki medium komunikasi untuk situasi yang lebih formal dan dikaitkan dengan tingkah laku berbahasa. Dari sinilah pada hakikatnya kehadiran suatu variasi bahasa Melayu *lingua franca* diperlukan sebagai semacam variasi baku.

Sejarah mencatat bahwa bahasa Melayu dialek Riau, salah satu variasi bahasa Melayu, terpilih sebagai dialek baku di antara dialek baku di antara dialek Melayu yang ada. Kesadaran akan perlunya bahasa yang seragam inilah yang telah membuahkan konsensus bangsa sehingga dialek ini diberi tempat sebagai bahasa nasional dan menjadi bahasa Indonesia. Dalam perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri timbul berbagai variasi, tetapi ada satu variasi yang dianggap baku. Variasi lain tetap hidup sebagai bahasa Indonesia tan-baku dalam wujud dialek regional dan dialek yang masih hidup sekarang.

Bahasa Indonesia baku bukanlah suatu dialek regional seperti bahasa Melayu Riau, melainkan suatu variasi bahasa yang dipergunakan untuk keperluan resmi, yaitu dalam

1. komunikasi resmi;
2. wacana ilmiah;
3. khotbah, ceramah dan kuliah;
4. bercakap-cakap dengan orang yang dihormati.

Beberapa ciri leksikal dan gramatikal yang menandai bahasa Indonesia baku adalah

1. penggunaan konjungsi seperti *bahwa* dan *karena* secara eksplisit dan konsisten;
2. penggunaan fungsi gramatikal (subjek, predikat, dan objek) secara eksplisit dan konsisten;
3. penggunaan awalan seperti *ber-*, *me-* secara konsisten;
4. penggunaan secara konsisten pola frasa verbal Aspek + Agens + V, misalnya:  
*Surat ini sudah saya baca* (nonstandar: *Surat ini sudah baca*);
5. terbatasnya jumlah unsur leksikal dan gramatikal dari dialek regional dan bahasa daerah yang masih dianggap asing.

Ciri seperti dikemukakan di atas lebih banyak menandai ragam tulis daripada ragam tulisan. Pada umumnya ragam lisan di samping mempunyai ciri leksikal dan gramatikal juga mempunyai ciri paralinguistik dan fonologis (Kridalaksana, 1978:98-99).

Demikianlah pemerian variasi bahasa baku Indonesia yang serba formal

dan terpelihara strukturnya. Dengan ruang lingkup pemakaiannya yang terbatas, bahasa baku menjadi salah satu bentuk *elaborated code* (Trudgill, 1974:51).

### Pendidikan Bahasa Indonesia

Betapa pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ternyata dari isyarat yang tersurat di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978. Dalam pembangunan di bidang Kebudayaan dinyatakan bahwa: "Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar"

Pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia pada dasarnya sejalan dengan jiwa Ketetapan MPR yang merupakan Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut. Hal ini ternyata dari tujuan pengajaran bahasa Indonesia menurut Kurikulum 1975. Tujuan pengajaran bahasa Indonesia mencakup dua hal: (1) menjadikan anak didik kita manusia susila Indonesia yang memiliki kepercayaan akan dasar filsafat negaranya, secara *kebanggaan atas bahasa dan sastra nasionalnya* (garis bawah dari penulis), dan (2) memberi anak didik kita penguasaan atas pemakaian bahasa Indonesia (Halim, 1979:4).

Dengan memperhatikan butir tujuan pengajaran di atas dapat dikatakan bahwa yang lebih dipentingkan atau diutamakan adalah sikap positif (*rasa bangga*) terhadap bahasa dan sastra nasionalnya. Dalam hal ini, segi afektif lebih dahulu harus dihadirkan daripada segi psikomotorik atau keterampilan. Hal ini benar oleh karena setiap anak didik sebagai warga negara harus menjunjung tinggi bahasa nasionalnya. Aspek demikian ini merupakan lingkup *pendidikan bahasa* sebagai sarana pembentukan sikap berbahasa dan sikap terhadap bahasa nasional, sedangkan membawa anak didik terampil menggunakan bahasa berada pada kawasan pengajaran bahasa.

Pendidikan dan pengajaran bahasa lebih banyak berlangsung dalam situasi formal, yakni di sekolah. Proses belajar-mengajar dibatasi oleh ruang, waktu, dan situasi tertentu serta materi yang dibahas pun sangat terbatas. Dengan kata lain, proses internalisasi bahasa dan pembinaan sikap bahasa berlangsung dalam ruang dan waktu yang kurang longgar. Selain itu, ragam bahasa sebagai bahan bahasan adalah ragam standar, sesuai dengan kondisi proses belajar-mengajar dan situasi sekolah yang formal. Siswa sebagai konsumen, sekalipun sebagai warga negara, kurang mendapat kesempatan mempelajari ragam lain yang berfungsi di dalam situasi yang tidak formal.

Pendidikan dan pengajaran bahasa yang berhasil, baik dalam menanamkan sikap yang positif maupun memberikan keterampilan berbahasa didukung oleh berbagai faktor atau teknik antara lain:

1. tidak menanamkan secara eksplisit rumusan kaidah bahasa Indonesia;
2. rumusan kaidah bahasa Indonesia secara implisit tersirat dalam kalimat

- latihan dan konteks tutur;
3. menyiapkan latihan yang memungkinkan siswa mengaplikasikan pengertian kaidah penemuannya sendiri;
  4. menampilkan data tutur yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia untuk ditata kembali (Oka, 1974:141).

Apabila hal di atas dapat dilakukan, dunia pendidikan bahasa Indonesia berharap anak didik akan kurang merasakan situasi pendidikan bahasa yang sangat mengikat yang pada gilirannya akan menghapus motivasi untuk belajar lebih lanjut. Ketiadaan motivasi semacam ini sangat tidak menguntungkan baik bagi proses belajar-mengajar maupun hasil belajar yang dituju. Jika pada suatu ketika terjadi akibat yang negatif bagi pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia khususnya bahasa Indonesia baku, hal ini berarti kita menghadapi salah satu kondisi yang tidak menunjang pemantapan bahasa baku dan pembinaannya. Akibat yang lebih lanjut adalah ketiadaan kesempatan yang kondusif untuk menanamkan penghargaan terhadap bahasa baku sebagai salah satu variasi yang secara pedagogis diperlukan sebagai landasan dalam pengajaran yang lebih tinggi dan komunikasi di dalam situasi tertentu yang menuntut adanya tertib sikap dan tertib bahasa yang kerap kali saling berkorelasi (Kridalaksana, 1978:98–99).

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi merupakan bahasa kedua yang dipelajari sesudah bahasa ibu. Hanya anak-anak di beberapa daerah saja yang mempunyai kebiasaan berbahasa Indonesia seperti di daerah Riau, Medan, atau Banjarmasin. Anak-anak telah memiliki pola-pola berbahasa tertentu, yakni pola bahasa ibu mereka. Dengan demikian, kadangkala terjadi semacam interferensi di dalam proses belajar bahasa kedua dan ini merupakan salah satu kesukaran. Yang sudah pasti adalah penguasaan atas bahasa ibu atau bahasa pertama akan jauh lebih baik, tetapi akan menampilkan suatu variasi yang besar dalam taraf penguasaan bahasa kedua, dalam hal ini bahasa Indonesia (Schuman, 1975:1).

Kesukaran seperti ini masih juga bertambah apabila dalam proses pendidikan bahasa nasional masih diwarnai oleh berbagai faktor yang kurang menguntungkan, seperti metode pengajaran yang tidak tepat, taraf kecerdasan yang kurang pada anak didik, bakat dan sejumlah variabel afektif seperti sikap, motivasi, dan emosi yang negatif. Yang terakhir untuk yang acapkali menjadi penghambat di dalam melaksanakan pendidikan bahasa Indonesia, khususnya pendidikan bahasa baku.

Pendidikan bahasa Indonesia yang berhasil baik dalam proses dan hasil belajarnya dipandang sebagai suatu prestasi yang sangat ideal. Kebanyakan pembina bidang studi bahasa Indonesia senantiasa menyuarakan kesan yang kurang menggembarakan tentang tugas mereka itu. Padahal, sesungguhnya

mimbar yang sekarang ditangani merupakan pilihan mereka sendiri yang seharusnya sesuai dengan panggilan hidupnya.

Dalam hubungannya dengan apa yang tersebut di atas kesukaran proses pembinaan bahasa Indonesia dilingkup pendidikan formal ini menjadi bertambah lagi karena ketiadaan dukungan guru bidang studi lain. Tidak sedikit di antara mereka berasumsi bahwa bahasa yang baik adalah bahasa yang komunikatif dan tidaklah merupakan suatu kewajiban untuk menggunakan bahasa baku. Realita yang demikian ini terjadi sekalipun di dalam ruang lingkup dan situasi yang sifatnya formal, khususnya di dalam proses belajar-mengajar. Dengan demikian, terjadilah semacam antagonisme antara pendidikan bahasa Indonesia dan berbagai hal di luarnya. Keberadaan pendidikan bahasa Indonesia yang formal sifatnya ini masih juga berhadapan dengan situasi bahasa di luar kelas. Perkembangan pemakaian dialek yang cukup luas, khususnya dialek Jakarta dan kadang-kadang basilek Melayu seperti bahasa yang digunakan oleh dunia dagang, dalam hal ini pedagang keturunan Cina, ikut pula menjadi pendorong ke arah penyimpangan pola baku.

Himpitan terhadap pendidikan bahasa Indonesia telah berjalan dan masih sedang berjalan. Situasi dan fenomena seperti ini akan terus berjalan selama komponen yang terlihat belum dapat mengelakkan diri.

### **Hambatan dalam Mewujudkan Sikap Positif terhadap Bahasa Indonesia**

Apabila proses pendidikan bahasa Indonesia telah memunculkan berbagai kesukaran yang menghambat pelaksanaan dan keberhasilannya, pada lingkup lain kita dapat mencatat kehadiran hambatan afektif. Hambatan semacam ini dapat berasal dari berbagai hal, tetapi yang jelas sumbernya adalah subjek belajar bawasa.

Ketidakberhasilan subjek belajar dalam menguasai bahasa Indonesia baku pertama kali ditandai oleh ketiadaan motivasi untuk belajar bahasa tersebut. Semua menyadari, dan tentu subjek belajar itu sendiri, bahwa seseorang hanya akak berhasil di dalam proses belajarnya apabila ia memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi tidak lain adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakak. Tindakan untuk secara sungguh-sungguh mempelajari bahasa Indonesia tentu didasari atas motivasi dan pandangan subjek belajar tentang bahasa yang dipelajarinya. Pandangan yang positif berupa apresiasi yang tinggi merupakan pertanda adanya motivasi. Sebaliknya pandangan yang negatif tidak memungkinkan adanya motivasi dan tindakan yang nyata dalam proses belajar subjek tersebut.

Sesungguhnya jika diingat kehadiran bahasa nasional seperti bahasa Indonesia merupakan fakta sejarah yang sangat penting baik bagi bangsa pemiliknya maupun bahasa itu sendiri. Betapa eratnya hubungan bangsa

dan bahasa nasionalnya terwujud dalam bentuk kesejajaran antara bawasa dan rasa setia bahasa di satu pihak dengan bangsa dan rasa kebanggaan di pihak lain. Sebenarnya hubungan yang erat demikian antara kedua hal tersebut harus dipertahankan (Weinreich, 1964:99).

Rupanya wujud nyata yang dialami bangsa dan bahasa Indonesia hanya berlangsung secara sungguh-sungguh pada masa perjuangan fisik atau pada saat kita menghadapi tantangan dari luar. Pada masa sesudah itu atau pada kesempatan yang tanpa tantangan dari luar, nilai-nilai tentang bahasa kita menjadi berubah ke arah yang tidak diharapkan.

Jika harus dipertanyakan nilai yang bagaimana yang ada pada subjek belajar terhadap bahasa Indonesia, maka jawabnya harus dicari dari suatu mata rantai yang bersambung secara kokoh hampir seperti sarang laba-laba.

1. Pertama kebanyakan orang atau pelajar khususnya di sekolah lanjutan tingkat atas dan seterusnya beranggapan bahwa bahasa Indonesia khususnya ragam baku tidak perlu dipelajari lagi karena mereka telah memiliki kemampuan yang cukup untuk berkomunikasi.
2. Pendapat di atas membangkitkan penilaian yang lain, yakni suatu prinsip bahwa mempelajari bahasa Indonesia secara formal yang menerus adalah suatu pemborosan waktu dan tenaga, sehingga akan lebih baik apabila kesempatan yang ada digunakan untuk mempelajari pengetahuan yang lain. Hal ini didasarkan pula atas realita bahwa penguasaan bahasa Indonesia mereka sudah cukup untuk mencerna ilmu pengetahuan di luar bidang studi bahasa.
3. Dari pendapat yang kedua muncullah anggapan bahwa bahasa Indonesia baku tidak lebih dari suatu bahasa elite yang hanya berlaku dalam forum resmi yang sangat terbatas, di luar forum itu tidak perlu orang berkomunikasi dengan bahasa baku.
4. Lebih lanjut seseorang akan memandang bahasa Indonesia baku sebagai bahasa yang penuh kaidah, norma, dan ikatan sehingga orang itu hampir tidak memiliki kebebasan di dalam mengekspresikan isi hatinya. Padahal, orang itu akan lebih mudah mengutarakan gagasannya dengan bahasa yang dapat digunakannya dengan segera. Dalam hal ini, seseorang itu beranggapan bahwa bahasa baku kurang praktis.
5. Bertolak dari anggapan di atas orang kemudian cenderung mengatakan bahwa bahasa baku adalah bahasa yang tidak wajar dan tidak lebih dari bahasa buatan, sehingga tidak akan dapat bertahan selamanya.
6. Bahasa Indonesia baku tidak menjadi keharusan untuk dipelajari karena dalam kenyataannya mempelajari bahasa Indonesia di sekolah lanjutan dan perguruan tinggi sifatnya tidak menambah (*tidak aditif*) baik dalam bidang pengetahuan dan lebih-lebih status. Menurut anggapan ini, menguasai bahasa baku dengan baik dan mantap atau tidak, tidak akan

menentukan status dan peran sebab kedua hal yang terakhir ini ditentukan oleh kemampuan bidangnya. Pendapat ini dikuatkan oleh kenyataan yang terlibat sehari-hari. Tokoh-tokoh kemasyarakatan dan pejabat masih dapat berperan tanpa penguasaan bahasa Indonesia yang sempurna.

7. Kebalikan pendapat di bawah no. 6, adalah: tanpa penguasaan bahasa Indonesia tidak akan mengurangi status dan peran seseorang, atau dengan kata lain *tidak substraktif*. Sebenarnya anggapan ini dan anggapan sebelumnya memang bertalian erat. Bangsa Indonesia adalah bangsa dwibahasa (*bilingual*). Jika seseorang dengan bahasa ibu tertentu mempelajari bahasa Indonesia dengan sempurna (dalam situasi belajar formal) ia tidak akan mendapat tambahan sesuatu baik status maupun peran. Menurut anggapan ini, bahasa Indonesia lebih banyak diperoleh lewat situasi belajar informal (pergaulan antarkawan dari daerah yang berlainan, radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya). Sebaliknya, penutur asli suatu bahasa ibu tertentu tidak akan merasa dirugikan atau berkurang statusnya baik apabila ia belajar atau tidak belajar bahasa Indonesia, khususnya variasi baku.
8. Suatu akibat dari penilaian tentang bahasa Indonesia yang demikian itu adalah simpulan yang sangat menyedihkan dan memang merupakan suatu kenyataan. Kenyataan itu adalah kebijakan kita sendiri yang belum menempatkan penguasaan bahasa Indonesia sebagai prasyarat untuk suatu status tertentu, kenaikan pangkat, dan peran yang lain, yang dibuktikan dengan kemampuan lisan dan tertulis secara resmi. Inilah rupanya salah satu di antara sekian penyebab timbulnya sikap negatif terhadap bahasa Indonesia pada umumnya dan khususnya terhadap bahasa baku.
9. Sebagai akibat lebih lanjut adalah realisasi dalam diri mereka berupa ketiadaan rasa setia bahasa. Sikap demikian sangat merugikan kedudukan dan pemantapan bahasa nasional khususnya variasi baku.
10. Khusus di lingkungan pendidikan sendiri masih terdapat penilaian yang merugikan atas bidang studi bahasa Indonesia. Pada umumnya status bidang studi bahasa Indonesia tidak diakui seperti ketentuan yang berlaku, sehingga bidang studi yang lain seperti matematika mendapat penilaian yang lebih tinggi. Hal ini sangat memberikan akibat yang negatif bagi motivasi belajar bahasa Indonesia.

Pada dasarnya kehadiran berbagai penilaian yang negatif dan menjadikan hambatan terhadap usaha mewujudkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia sedikit banyak berasal dari bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang telah lama dikenal dan digunakan di dalam komuni-

kasi khususnya komunikasi informal. Sekurang-kurangnya sejak tahun 1928 bangsa Indonesia mengenal bahasa ini yang berdasarkan bahasa Melayu.

Bangsa yang muda seperti bangsa Indonesia secara serta-merta lahir dengan bahasa nasional yang siap untuk berfungsi di negara merdeka. Mereka merasa bahwa bahasa Indonesia telah merupakan gejala yang biasa, ada beserta mereka, tidak menampilkan suatu hal yang mengagumkan. Sebenarnya bahasa Indonesia telah memperlihatkan kesanggupan yang mengagumkan terbukti dari kemampuannya untuk berfungsi di berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ilmu pengetahuan. Karena keterlibatan bahasa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan inilah perhatian dan kekaguman terhadap bahasa Indonesia menjadi pudar.

Bahasa Indonesia berdampingan dengan dialek-dialek Melayu yang masih berfungsi sekalipun bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa resmi berada di atas dialek-dialek tersebut. Kemiripan struktur dan lexis bahasa Indonesia dengan dialek Melayu menyebabkan orang mudah menetralisasi batas antara kedua bahasa itu. Dengan demikian, komunikasi dapat terjadi lewat bahasa Indonesia dan dialek Melayu yang pada umumnya masih dipahami orang.

Di antara dialek Melayu, dialek Melayu Jakarta mendapat tempat yang terkemuka karena dua faktor: (1) dialek ini merupakan dialek yang berstruktur lebih sederhana daripada bahasa Indonesia dengan unsur lexis yang cukup ekspresif, (2) dialek Jakarta adalah dialek regional yang berada pada status sebagai dialek ibu kota negara. Dengan tidak disadari dialek ini menjadi tipe ideal dialek Melayu yang cenderung untuk dijadikan model berbahasa. Di luar kedua faktor tersebut masih ada hal yang menguntungkan bagi dialek ini, yakni tepat digunakan dalam situasi informal. Kelonggaran dalam hal struktur dan lexis menjadikan dialek Jakarta suatu tempat pembebasan dari ikatan variasi baku dan sebagai bahasa *slang* Indonesia (Tanner, 1967:129).

Oleh karena dialek yang demikian ini tidak jarang kedudukan bahasa Indonesia menjadi agak tergeser di dalam arus komunikasi. Peristiwa kebahasaan seperti ini memang akan selalu terjadi apabila kedua bahasa berasal dari sumber yang sama dengan kadar kemiripan yang tinggi.

Hal lain yang dapat memberikan kesempatan kepada kurang berfungsi bahasa baku adalah keluwesan bahasa Indonesia. Patut diakui bahwa bahasa mana pun harus berkembang selama pendukung bahasa itu masih ada dan pasti berkembang kebudayaannya. Akan tetapi, perkembangan itu tidak selamanya tanpa kendali sehingga harus menjadi bahasa yang tidak terpelihara. Untuk mencegah hal semacam itu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah menentukan pedomannya. Apa yang terjadi di luar lingkup formal pada umumnya adalah penggunaan konstruksi dan istilah yang tidak terarah. Hal semacam ini terjadi sebagai akibat kebutuhan yang mende-

sak akan media pengungkap konsep tertentu. Penutur bahasa Indonesia, terutama yang kurang menaruh perhatian kepada ketentuan dalam pembinaan bahasa dengan inisiatifnya sendiri mencari istilah tertentu sebagai pengungkap konsep.

Jika usaha menelusuri hambatan efektif diteruskan kita akan lebih banyak memperoleh faktor pendukung di luar subjek belajar bahasa Indonesia. Hingga saat ini telah kita lihat bahwa kondisi bahasa Indonesia juga membuka kemungkinan untuk kehadiran sikap yang demikian.

Dengan menunjuk kembali butir no. 7 yang menyinggung sebagian besar keadaan subjek belajar bahasa baku. Mereka pada umumnya dididik di tengah-tengah masyarakat dwibahasa. Anggota masyarakat Indonesia dan orang tua subjek belajar adalah dwibahasawan yang pada banyak kesempatan menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi, sedangkan kesempatan lain menggunakan bahasa Indonesia.

Apabila diperhatikan baik-baik kondisi kedwibahasaan mereka, sebagian besar di antara mereka termasuk dwibahasawan gabung, yakni dwibahasawan yang cenderung mengaburkan batas diri struktural antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia, khususnya bahasa baku. Sebagai akibatnya, berlanjut dengan kecenderungan meniadakan ciri struktural bahasa yang pertama ke dalam bahasa yang kedua dan sebaliknya. Pada umumnya tidak banyak warga masyarakat yang tergolong dwibahasawan sejajar, yakni mereka yang mampu menarik garis pemisah antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Keadaan seperti ini mengakibatkan sikap yang kurang mendukung kehadiran bahasa baku yang harus dibedakan dari bahasa yang merupakan campuran unsur bahasa daerah dan bahasa Indonesia.

Kondisi seperti di atas menciptakan lingkungan pendidikan bagi subjek belajar bahasa Indonesia. Ditinjau dari segi tugas pendidikan bahasa Indonesia mempertahankan keutuhan struktur bahasa Indonesia adalah suatu keharusan. Lingkungan belajar yang demikian kurang baik pengaruhnya bagi pembentukan sikap terhadap bahasa Indonesia.

## Penutup

Dengan memperhatikan apa yang telah dibicarakan di muka dapatlah pembicaraan ini diakhiri dengan mencoba menarik beberapa kesimpulan.

1. Pendidikan bahasa Indonesia sampai saat ini masih mengalami hambatan baik kesukaran di dalam proses belajar-mengajar secara teknis, maupun berupa hambatan afektif.
2. Hambatan afektif berupa sikap yang negatif terhadap bahasa baku dapat diringkas menjadi dua penilaian:
  - (a) mempelajari bahasa baku tidak aditif atau tidak menambah status dan peran;

- (b) mempelajari bahasa baku tidak pula substraktif, artinya tidak akan mengurangi status dan peran seseorang.
3. Kesempatan terbuka bagi kehadiran sikap yang tidak positif terhadap bahasa Indonesia sendiri yang secara faktual telah lama ada dan sebagai bahasa yang berdasarkan bahasa Melayu. Bahasa ini tidak menampilkan hal-hal yang mengagumkan. Hal ini memudahkan perhatian dan kekaguman.
  4. Saingan yang berat dari dialek Jakarta yang lebih sederhana strukturnya dan lexis yang cukup ekspresif.
  5. Keluwesan bahasa Indonesia memungkinkan kecerobohan di dalam menerima unsur dari bahasa lain.
  6. Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah masyarakat dwibahasa. Kecenderungan untuk pemindahan struktur bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya mengaburkan batas kedua bahasa dan mengecilkan peranan bahasa baku yang harus dibedakan dari bahasa campuran unsur daerah dan bahasa Indonesia.

### Saran

Untuk mengembalikan citra yang baik dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia perlu diambil beberapa kebijakan sebagai berikut.

1. Metode pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia haruslah realistis. Dalam menyajikan materi harus ditampilkan pendekatan yang integratif serta variasi bahasa yang ada, baik variasi formal maupun informal. Subjek belajar harus diberi kesempatan menggunakan variasi bahasa sesuai dengan situasinya.
2. Sebaiknya lebih banyak ditunjukkan kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam semua bidang.
3. Bahasa Indonesia hendaknya ditetapkan sebagai prasyarat untuk jenjang kepangkatan, jabatan, atau peran lain secara resmi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Amran. 1979. *Pembinaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kridalaksana, Harimurti. 1978. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Ende: Nusa Indah.
- Oka, I.G. Ngurah. 1974. *Problematik Bahasa dan Pengajaran Bahasa Indonesia*, Malang: IKIP Malang.
- Richard, L. 1872. *Cours Theorique et Pratique de la Langue Commerciale de l'Archipel d'Asie*. Bordeause: Feret & Fils.
- Schuman, J. 1975. Affective Factors and the Problems of Age Second Language Acquisition, *Language Learning* Vol. 25 No. 2 (Dec).
- Tanner, N. 1967. "Speech and Society Among the Indonesian Elite". *Sociolinguistics*. Penguin Middlesex.
- Trudgill, P. 1974. *Sociolinguistics*. London: Penguin.
- Vreeland, N. 1975. *Area Handbook for Indonesia*. Washington: Foreign Area Studies of The American University.
- Weinreich, U. 1964. *Language in Contact*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

## SIAPKAH KHASANAH PROSA MUTAKHIR KITA MENGISI "HUMANIORA MASUK KURIKULUM"

Satyagraha Hoerip  
PT Sinar Kasih

Pada awal jabatannya selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Doktor Nugroho Notosusanto mencanangkan bahwa humaniora itu penting dan perlu diajarkan kepada para siswa dan mahasiswa kita. Adapun yang ada di bawah label humaniora ini, di antaranya disebutkannya filsafat, ilmu sejarah, bahasa, dan kesusastraan. Pokoknya ilmu-ilmu sosial yang memberikan titik berat pada manusia dan perikemanusiaan. Masyarakat mendapat kesan bahwa hal itu oleh Menteri yang baru akan dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional kita sehingga berkat sistem pendidikan itu nanti manusia-manusia Indonesia yang akan datang akan lebih manusiawi (lagi).

Memang benar, setelah kira-kira lima bulan berlaku, Menteri agaknya semakin-makin kesibukannya sehingga bukan saja belum sempat mengumumkan pembaharuan sistem pendidikan kita, melainkan juga tidak kedengaran lagi—dalam pidato-pidatonya belakangan ini—menyinggung-nyinggung masalah humaniora. Walaupun begitu—walaupun hanya di kalangan sempit, yakni para sastrawan, penerbit dan kaum pencinta sastra yang tak seberapa jumlahnya itu—keinginan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru untuk ber-"humaniora-humaniora" itu tak urung telah mendapat sambutan yang positif. Hal ini dapat kita mengerti sebab mereka tentunya membayangkan bahwa tak seberapa lama lagi di Indonesia pun akan banyaklah buku-buku humaniora—termasuk yang kesusastraan.

Teristimewa para sastrawan, sudah lama mereka amat prihatin melihat kenyataan di masyarakat bahwa sudah semakin meningkat dengan pesat jum-

lah bangsanya yang dapat membaca dan berbahasa Indonesia dengan baik. Namun, kenaikan jumlah terjualnya buku kesusastraan masihlah jauh dari itu. Nama mereka terkenal di masyarakat bukan terutama karena buah karya mereka itu telah dibaca luas, melainkan lebih karena dimuati di majalah atau surat kabar—dalam resensi atau lainnya.

Betapapun halnya, niat Menteri buat memasukkan humaniora itu ke dalam sistem pendidikan kita yang baru nanti, terbukti ada saja yang menyambutnya dengan baik. Bahkan konsumen pendidikan sendiri pun ada saja yang gembira dengan canangan Menteri Nugroho itu. Mereka membayangkan bahwa dengan itu pendidikan kita nanti akan lebih mengusahakan padunya pikiran dan perasaan manusia dalam ia menjelajahi kebenaran sambil menghayati keindahan—dengan tetap kreatif. Mereka berharap bahwa dengan humaniora itu nanti, "Pengalaman-pengalaman penting yang dituangkan kembali oleh seniman dan pemikir terkemuka perlu dihayati setiap calon orang terpelajar agar ia menyadari bahwa yang dicapai dan diciptakan oleh kemanusiaan selama ini bukan hanya berupa peperangan, perburuan, penyiksaan dan teror" (Damono, 1983:5).

Di sinilah kita perlu membulatkan tekad bahwa gerakan melaksanakan "Humaniora Masuk Kurikulum" pada tahap pertumbuhan pembangunan kita sekarang ini bukan saja harus mulai disiapkan dengan matang—setelah dipelajari segala seginya dalam kaitan dengan kemungkinan hambatan masing-masing—melainkan juga sudah merupakan tugas nasional yang mendesak.

Tahun 1972–1973 dahulu, bersama-sama Arifin C. Noer, penulis ini berkesempatan mengikuti suatu program pada the University of Iowa, Iowa City. Para peserta program tersebut ialah sejumlah sastrawan dari negaranegara Asia, Eropa (Timur dan Barat), Amerika Latin dan Afrika, yang ditempatkan di gedung megah seperti hotel bernama Mayflower Building. Di gedung itu ternyata banyak juga tinggal para mahasiswa, baik dari Amerika sendiri maupun yang berkebangsaan lain. Yang menarik sekali ialah bahwa para mahasiswa itu—apa pun studi mereka—sebelum mengambil gelar sarjana muda ternyata terlebih dulu harus lulus mata kuliah sastra Amerika. Ketentuan ini berlaku pula bagi para mahasiswa asing. Ketentuan ini ternyata penulis jumpai lagi, tatkala tahun 1982 penulis diundang ke Ohio University di kota kecil Athens. Semua mahasiswa dari jurusan apa pun dan berkebangsaan apa saja pun, sebelum ujian sarjana muda harus lebih dahulu lulus mata kuliah yang sama: Sastra Amerika, dalam hal itu Amerika Serikat. Akibatnya, biarpun dia dari Mexico, Malaysia atau Ethiopia, atau India, ada yang berhari-hari di perpustakaan "hanya" untuk memilih-milih, mana novel karangan sastrawan Amerika Serikat yang agak tipis dan relatif mudah buat menuliskan te-lah terhadapnya. Di antara mereka ada yang sulit untuk menjatuhkan pilihan.

Keharusan seperti itu, menempuh ujian kesusastraan sebelum mengambil gelar sarjana muda, agaknya perlu juga dilaksanakan di Indonesia. Sebab, jikalau sampai dibangku SMA atau yang sederajat mata pelajaran Sastra masih diberikan—walaupun sangat kurang efektif dan oleh karena itu sangat perlu diperbaiki—mengapakah sesudah di perguruan tinggi—terkecuali di fakultas sastra—hal itu dihapuskan? Akibatnya, para pejabat kita yang dahulu di awal tahun 50-an pernah mempelajari karya Pramudya Ananta Tur, Takdir Alisyahbana, dan sempat menjadi pencinta majalah *Kisah*, umpamanya, sesudah menjadi mahasiswa dan buat seterusnya lalu spontan cerai dengan dunia kesusastraan.

Apakah hal itu tidak menyedihkan kita sebagai bangsa yang "berkebudayaan tinggi"? Apakah kita tidak tergerak untuk berkemampuan mencetak barisan intelektual, yang tangguh di dunia keilmuan masing-masing, tetapi dalam pada itu juga tahu dan menikmati karya sastra Indonesia (dan bangsa-bangsa lain), seperti halnya Prof. Dr. Bambang Hidayat dari rumah bintang di Lembang; Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasution Rektor ITB; Dr. Taufik Abdullah dari LIPI; Dr. Masri Singarimbun di Yogya dan sejumlah kecil sarjana kita yang lain?

Hal di atas perlu diperbincangkan di sidang kita sekarang. Sungguhpun pengajaran sastra itu tidak pernah dimaksudkan untuk melahirkan sastrawan baru, untuk mencetak setiap murid menjadi pengarang, usaha terpadu mengajak para pelajar/mahasiswa agar punya minat kepada dan penghargaan terhadap keindahan sastra, tentu merupakan tujuan yang mulia dari sistem pendidikan yang ber-humaniora, yakni menghindarkan "menjadikan manusia seakan-akan hanya satu dimensi, yaitu dimensi dalam bidang ilmu saja. Padahal, manusia yang utuh bukan yang ahli dalam bidang ilmu saja, tetapi juga harus punya pengetahuan lain, yaitu tentang moral, seni dan sebagainya" (Suriasumantri, 1983:16).

Begitulah, akan segera tampak pada kita bahwa—khususnya di bidang sastra—ada tiga komponen yang perlu dijelajahi dengan tekun bilamana kita memang bersepakat melaksanakan "Humaniora Masuk Kurikulum" ini. *Pertama*, khasanah kesusastraan kita sendiri, istimewa yang biasa disebut sebagai Sastra Indonesia Mutakhir, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif apakah patut dan memenuhi syarat? Baik yang buat diajarkan di sekolah-sekolah menengah maupun di tingkat perguruan tinggi sebelum sarjana muda? *Kedua*, bagaimanakah dengan persediaan buku-bukunya? Apakah jumlah judul atau jumlah eksemplarnya cukup memadai? *Ketiga*, apakah cukup jumlah gurunya atau jumlah buku pegangan mengajar untuk bisa dipergunakan oleh para guru tersebut? *Keempat*, rangsangan apakah yang perlu dikobarkan guna memasyarakatkan kecintaan pada sastra itu, di luar yang diajarkan di sekolah; yaitu agar tercipta kondisi yang baik dan menunjang

dilaksanakannya "Sastra Masuk Kurikulum"? *Keempat*, buah masalah itu agaknya meminta pemikiran kita.

Mengenai masalah yang keempat yakni "rangsangan apakah yang perlu dikobarkan guna memasyarakatkan kecintaan pada sastra" itu agaknya menjadi kurang relevan buat dibahas berkepanjangan di sini. Mengapa? Sebab pada kenyataannya kita memang sudah mengetahui banyak cara hingga pihak swasta juga sudah banyak melakukannya. Misalkan, perlu bagi perlombaan, hadiah besar ataupun kecil-kecilan saja, sudah bertahun-tahun kita laksanakan. Dengan Kesenian Jakarta, umpamanya, dengan gigihnya pernah membuka lomba tahunan menulis roman, mengarang drama dan menulis esai dan kritik. Upaya menggugah kreativitas itu memang tidak seberapa berhasil kalau ditilik dari kualitas para naskah pemenang itu sendiri. Akan tetapi, jika diukur dari kegiatan buat merangsang kreativitas nyatalah bahwa merupakan usaha maraton yang tetap harus dipertahankan keajekannya. Kreativitas yang ada di masyarakat perlu ditampilkan. Sayang, tak selalu bisa disusuli dengan penerbitannya sebagai buku. Namun, usaha itu tetap harus dipertahankan terus. Karena sekali terjadi krisis kreativitas, apalagi jika sampai sama sekali tandus barang tentu ekornya akan amat fatal bagi kelanjutan eksistensi kita sendiri sebagai bangsa yang berkebudayaan. Di sinilah, mengingat upaya menggairahkan kreativitas ini memang masih bersahutsahatan, maka tak usahlah kiranya untuk dibicarakan berkepanjangan. Lalu, bagaimana dengan ketiga buah masalah yang lain?

Untuk sementara, masalah yang pertama sebaiknya kita sisihkan dulu; dan mari kita mencoba menelaah dua masalah yang tersebut belakangan yakni apakah jumlah judul buku sastra berikut jumlah eksemplarnya mencukupi keperluan sekolah? Berikutnya, apakah kita mempunyai "divisi guru sastra Indonesia" yang memadai keperluan di sekolah dan perguruan tinggi kita? Hal lain, yang menyangkut buku pegangan buat para guru tersebut, apakah sudah mencukupi? Sekiranya belum, apa sajakah yang harus kita dahulukan?

Dalam tahun-tahun terakhir ini, perkembangan perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum boleh dipastikan mengalami kemajuan yang berarti. Berarti baik dalam hal jumlahnya dan dalam hal jumlah judul buku koleksi masing-masing. Kenyataan seperti ini belum pernah dialami Indonesia, biar di zaman Belanda sebelum Perang Dunia II sekalipun. Dapat dikatakan bahwa jumlah judul buku sastra masih tetap sedikit masih tetap kalah banyak dari buku-buku anak-anak ataupun yang lain. Walau demikian, menurut beberapa orang pustakawan yang mengikuti seminar di Yogyakarta (tanggal 22-24 September 1983 yang baru saja lalu), jumlah pembaca buku sastra cenderung meningkat dibanding dengan angka-angka di tahun-tahun sebelumnya. Khususnya roman hiburan—yang ditilik dari bentuknya yang sama-sama fiksi sering dikelirukan "sebagai" karya sastra juga—amat digemari, baik oleh ibu-

ibu rumah tangga maupun oleh anak-anak muda. Dari kelompok itu sebagian kecil adalah pembaca setia dari novel karangan Mochtar Lubis, Y.B. Mangunwijaya, Nh. Dini, Iwan Simatupang dan Putu Wijaya. Orang-orang yang sama itu mereka perhatikan merupakan pembaca pula dari buku kumpulan cerita pendek, yang sekarang ini memang sudah mulai mengembang jumlahnya (Hasil wawancara dengan anggota Ikatan Pustakawak Indonesia, 23 September 1983).

Sungguhpun sangat perlu untuk diadakan penelitian khusus, gejala di atas barangkali cukup mengatakan kepada kita bahwa di masyarakat kita sekarang telah ada kondisi membaca karya sastra yang lebih baik daripada di masa-masa silam.

Para pustakawan itu waktu saya mintai jawaban-spekulatif mereka—mengenai kenaikan jumlah pembaca sastra itu—antara lain ada yang mengemukakan (a) tersedianya buku tersebut di perpustakaan yang mereka asuh; (b) karena judul lain di perpustakaan itu sudah banyak yang telah dibaca oleh orang-orang tersebut; (c) mungkin karena pernah membaca ulasan atas novel atau antologi cerita pendek itu di koran atau majalah; atau (d) karena memang menggemari kesusastraan dan sudah mengenal nama para sastrawan itu. Penelitian atas "manfaat perpustakaan" serupa itu agaknya perlu digalakkan, jika kita sebentar lagi sampai betul-betul melaksanakan "Sastra Masuk Kurikulum"—baik di SD, SLTP, SMTA, maupun tingkat perguruan tinggi. Di sinilah sumbangan para pustakawan—hal yang belum banyak kita sadari—dapat kita manfaatkan.

Jika asumsi sejumlah kecil pustakawan itu dapat kita pakai buat melakukan semacam generalisasi, kita boleh jadi akan terpanggil buat mengisikan lebih banyak lagi buku sastra, baik di perpustakaan maupun yang khusus untuk sekolah. *Availability* buku sastra dalam raihan tangan calon pembacanya, sangat membantu meningkatkan jumlah pembaca sastra. Begitulah keyakinan penulis ini, meski tentu saja masih harus dibuktikan. Hal itu akan berpengaruh bukan hanya kepada siswa yang lain, kepada para mahasiswa semata-mata, tetapi juga kepada guru dan para mahaguru mereka, khususnya yang bertugas mengajarkak kesusastraan. Kemudahan seperti itu—mengingat besarnya anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Pelita III yang lalu dan mudah-mudahan begitu pulalah dalam Pelita IV yang akan datang—agaknya bisa dimungkinkan. Perwujudannya agaknya juga tidak terlampau sulit, mengingat bahwa para penerbit kita pun tentunya akak beramai-ramai menyambutnya, asalkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah siap dengan gagasan menterianya untuk membuat "Humaniora, dalam hal ini, Sastra Masuk Kurikulum".

Sehubungan dengan hal tersebut, yang mungkin masih dianggap gawat ialah pengadaan buku pegangan bagi para guru/mahaguru sastra itu. Dalam

tulisannya, "Mengajarkak Sastra Prosa Indonesia di SMA" yang berupa teks ceramah di depan guru-guru bahasa Indonesia SMA se-DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki, 16 Juni 1971, (Rosidi, 1973:74-76) sudah mampu menyebutkan 32 judul buku. Di antaranya ialah karangan Ajip Rosidi sendiri beberapa buah, susunan H.B. Jassin juga beberapa buah, dan yang lain adalah karangan Prof. Dr. A. Teeuw, Drs. M.S. Hutagalung, dan Dr. Boen S. Oemarjati.

Sekarang ini, 12 tahun kemudian, sudah tentu bahwa daftar itu mungkin semakin panjang sehingga guru sastra Indonesia yang serius hendak meningkatkan apresiasi sastra murid-murid mereka barang tentu takkan lagi kesulitan mendapatkan buku pegangan yang baik. Lebih lagi jika mereka rajin melakukan telaah atau perbandingan sendiri, dapat diramalkan bahwa mereka akan menemukan panorama-sastra yang sungguh-sungguh indah dan memikat; juga telaah terhadapnya. Namun, sudah tentu, diskusi, penataran ataupun "kumpul-kumpul" lain yang bertujuan meningkatkan pengetahuan mereka, bakal tetap perlu diadakan dengan ajek. Singkat kata, bukan hanya jumlah guru sastra dan jumlah buku pegangan buat mereka dapat "dijamin" bahwa tak akan banyak hambatan, bahkan juga soal jumlah judul buku sastra berikut oplahnya agaknya tak seberapa perlu kita khawatirkan.

Terbawa oleh pergaulan atau jenis pekerjaannya, penulis ini sebenarnya cukup akrab dengan sajak dan dengan sejumlah penyair. Akan tetapi, harus diakui bahwa minat utamanya adalah kepada prosa, teristimewa lagi kepada cerita pendek-cerita pendek Indonesia. Memang, tidak banyak novel Indonesia mutakhir yang setamat dia bacai lalu dia tuliskan ulasannya, tetapi hal itu lebih karena minatnya yang ajek terhadap cerpen Indonesia selama ini—dari pada oleh hal lain. Khususnya ketika ia menyiapkan pelaksanaan impian lamanya, yaitu untuk menyusun suatu antologi besar meliputi "100 cerpen 11 sastrawan", berbulan-bulan matanya terseok-seok menyusupi belantara huruf-huruf cerpen Indonesia itu; dari berbagai macam majalah dan dari pelbagai kurun waktu pula.

Dari pengamatannya yang hangat itu, dapat ia yakini bahwa khasanah prosa Indonesia mutakhir sungguh-sungguh mengasyikkan—untuk tidak mengatakak dengan "memiliki cukup banyak karya yang bermutu sastranya di taraf antarbangsa". Mudah-mudahan benar bukan lantaran *chauvinisme* jika dia membanggakan buah karya sejumlah sastrawan Indonesia seperti Mochtar Lubis, Umar Kayam, Pramudya Ananta Tur, Mohammad Diponegoro I Nh. Dini, dan Subagio Sastrowardo; o. Sebaliknya, bukanlah karena iri hatinya jika ia pun terpaksa mengatakan pendapatnya bahwa—pada hematnya—belum banyak pengarang putri Indonesia yang patut diandalkan kemampuan karya prosa mereka. Jumlah pengarang putri memang banyak, baik yang menulis puisi maupun prosa. Akan tetapi, dengan segala hormat perlu diakui

bahwa masih amat sulit untuk menemukan "yang sastra" dari antara sebanyak itu buah karya mereka itu. Di sini kita sepakat dengan kesimpulan Prihatmi (1970:90):

... Meskipun kebanyakan kadar sastra pengarang wanita Indonesia hanya berkisar antara sedang dan cukup, melihat karya-karya Nh. Dini, Titis Basino, S. Rukiah, Hamidah, kita menjadi agak lega. Menonjol kedudukan Nh. Dini: secara pelan-pelan tetap mengalirkan karya-karya yang matang dan bernilai" (Prihatmi, 1977:90).

Cerpen Nh. Dini berjudul "Penanggungjawab Candi" (Hoerip, 1979: 30-38) umpamanya, tak kalah dengan novelnya yang paling terhormat itu, Pada Sebuah Kapal (1973), asalkan kita juga sanggup mengakui bahwasanya cerita pendek itu adalah pula seni sastra yang berdaulat, yang mandiri, dan bukan sekadar hasil di tengah jalan sementara seseorang belum menghasilkan novel tebal. Tentang cerpen ini seorang asing yang habis membacanya serta-merta berkeinginan menerjemahkannya ke dalam bahasa ibunya dan kemudian memuatnya di sebuah majalah yang terhormat di negaranya, Malaysia.

Berikut, masih ada 3-4 cerpen Indonesia lain yang ditulis oleh pengarang wanita lain. Satu dari mereka tentunya ialah "Jakarta", karangan (Alm.) Totilawati Tjitrawasita yang aslinya adalah dalam bahasa Jawa. Lembut sekali pengarangnya "menyindir" berubahnya tindak-tanduk dan sikap batin anak-anak desa, tertentu, yang karena liku-liku perjalanan hidupnya lewat revolusi fisik sampai kepada kedudukan yang tinggi di ibukota kita ini, lalu lupa daratan termasuk terhadap kakak-sepupunya sendiri sekalipun. Padahal, kakak-sepupunya itulah yang semasa kecil mereka dahulu mengobati kudisnya—pada sekujur tubuh—dengan amat telatennya. Tidak ada ejekan di situ. Tidak ada nada dendam. Bahkan, kehalusan, kemesraan seorang orang desa yang dibakar rindu kepada adik sepupunya yang yatim-piatu, yang dulu dia asuh dengan penuh kasih dan kini sudah menjadi seseorang pembesar republik ini; meski pada akhirnya orang desa itu ternyata ditolak halus karena adik sepupu itu nanti malamnya akan sibuk resepsi dan mustahil bisa menerima kedatangannya di rumahnya. Totilawati dalam cerpen ini rasanya mencapai taraf adiknya. Oleh sebab itu, karya ini pantas sekali untuk diperkenalkan—dan dihayati—oleh banyak orang Indonesia, tua-muda.

Dalam pada itu, karya para sastrawan pria sungguh banyak yang patut kita telaah, kita hayati dan kemudian kita kenangkan (Membedakan pengarang wanita dan pria seperti ini, sebenarnya bukan hal yang menggembirakan), baik yang berbentuk novel maupun yang berbentuk cerita pendek. Karya yang bagus dari mereka itu bukan hanya terdapat pada awal tahun-tahun 50-an sampai 60-an, melainkan juga sampai akhir-akhir ini. Memang benar, jumlah majalah yang memuat karya sastra sekarang ini tidaklah sebanyak di zaman tahun 50-an dulu, tetapi cerpen di *Horison* dan *Kompas*

*Minggu* belakangan ini sungguh menggembirakan hati kita dari segi mutunya. Dua pengarang muda yang menonjol yang muncul di kedua media itu tentulah Gumbiro Seno Adji dan Pamusuk Eneste. Di satu pihak mereka memang masih meneruskan gaya cerita lama, dalam arti menghirup kehidupan sekeliling untuk menjadi bahan olahan cerpen masing-masing. Namun, di pihak lain keunikan mereka mengolah bahan-bahan itu juga patut dicatat secara khusus yang menggembirakan bahwa estafet kepengarangan masih bersambung di Indonesia, sementara sebagian penulis "tua" juga masih menulis terus. Yang terpenting di sini tentu saja Mochtar Lubis, yang novel mutakhirnya masih saja indah dan sanggup menggigit (Baca *Harimau! Harimau!* dan *Maut dan Cinta*), sedangkan di antara sekian banyak cerpen yang pernah ditulisnya tidak sedikit yang mengharukan, mengesankan ataupun mengagumkan. Misalnya saja "Nasionalis Nomor Satu", "Kuli Kontrak" dan "Rumah Jati", dalam kumpulannya *Kuli Kontrak* (1982) ataupun yang lama-lama yang dimuatkan di *Kisah* dulu. Bagaimana Mochtar Lubis secara lihai mengusung dan menyelipkan "amanat" dan sindirannya terhadap realitas di masyarakat ke dalam novelnya, dapat kita temukan dalam *Harimau! Harimau!* (1979) dan *Maut dan Cinta*-nya (1979). Ini pulalah yang pada hemat penulis mendorong kita mesti memasukkan buku-buku Mochtar Lubis ke dalam koleksi segala rupa perpustakaan kita, baik yang umum maupun yang untuk sekolah-sekolah dan fakultas.

Sejumlah pengarang prosa yang lain juga pantas untuk ditelaah, dinikmati, dan dikenangkan buah karya mereka: Gerson Poyk, A.A. Navis, Nugroho Notosusanto, Idrus Ismail, Danarto, Budi Darma, Chairul Harun, Iwan Simatupang dan amat banyak lagi. Asalkan jeli sajalah mata batin kita sudah tentu akan banyak "mutiara-mutiara" spiritual-intelektual yang dapat kita tuai dari ladang prosa Indonesia mutakhir. Asalkan tebal saja tekad kita buat melaksanakan "Sastra Masuk Kurikulum", maka kerja itu pastilah dapat dicapai tidak seberapa lama lagi. Khasanah sastra Indonesia, sejak mana saja sampai yang mutakhir ini memang cukup kaya akan hasil-hasil yang dapat diwariskan ke anak-cucu sebagai karya-karya indah.

Pada hakikatnya, mencantumkan secara sadar kesusastraan ke dalam kurikulum sekolah kita, bukan sesuatu yang terlampau susah. Apalagi karena dari waktu ke waktu senantiasa ada saja karya baru yang dihasilkan, dan ada saja nama pengarang baru yang muncul mengorbit (menggantikan pengarang terdahulu yang mulai menyirna?).

Jika ditilik lebih teliti lagi, akan tampak bahwa dari mayoritas karya sastra kita terpancarlah kesaksian sastrawan kita terhadap apa yang terpajang di sekeliling, serta sedikit banyak juga sikap hidup masing-masing. Oleh karena itu, sambil melontarkan ide-ide baru yang mungkin masih asing buat sebagian besar warga masyarakat kita sendiri, kesusastraan mutakhir akan ada

saja yang dikemukakannya yang menyangkut perkembangan di tanah air. Tidak selalu jelas atau blak-blakan, tetapi selalu ada. Karena itu, buat menariknya, perlu juga murid dan mahasiswa disiapkan. Masih perlu disadarkan agaknya bahwa seni, termasuk sastra itu, perlu dimiliki oleh setiap manusia, sembarang orang, terutama kaum terpelajar/ilmuwan. Karena itu, kiranya kita pun pantas buat menjawab "Siapakah khasanah prosa mutakhir kita mengisi pelaksanaan 'Konsep Humaniora?'" hanya dengan satu jawab saja, dan itu ialah "Siap!".

## DAFTAR PUSTAKA

- Damono, Sapardi Djoko. "Ilmu Budaya Dasar dalam Perguruan Tinggi Kita". *Optimis*, Mei 1983.
- Hoerip, Satyagraha. 1979. *Cerita Pendek Indonesia*. Jilid III. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Prihatmi, Th. Sri Rahaya. 1977. *Pengarang-pengarang Wanita Indonesia*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Rosidi, Ajip. 1973. "Mengajarkan Sastra Prosa Indonesia di SMA". Dalam *Pembinaan Minat Baca, Apresiasi dan Penelitian Sastra*. Cetakan I. Jakarta: Panitia Tahun Buku Internasional DKI Jakarta.
- Suriasumantri, Jujun S. "Pendekatan Berpikir dan Humaniora Harus Dimulai Sejak Anak Masuk Sekolah". *Optimis*, Mei 1983.

## **PENGAJARAN BAHASA INDONESIA UNTUK SEKOLAH KEJURUAN**

**M. Suratman M.**

Pusat Pengembangan Penataran Guru Kejuruan

### **Pendahuluan**

Pendidikan harus mampu menanggapi dan mengikuti setiap perubahan yang terjadi dalam usaha pembangunan. Arus lajunya pembangunan menuntut tersedianya tenaga yang terampil, terdidik, terlatih, kreatif, serta produktif dalam jumlah yang memadai sesuai dengan permintaan dan persyaratan dunia industri dan usaha.

Bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam mewujudkan tersedianya calon tenaga kerja yang cekatan melaksanakan tugasnya di lapangan pekerjaan. Hal itu karena bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat dalam berkomunikasi antara guru dengan siswa, antara ilmu pentetahuan dengan siswa, dan antara siswa dengan berbagai kegiatan di lapangan pekerjaan setelah mereka bekerja kelak. Pengajaran bahasa Indonesia untuk sekolah kejuruan yang telah dilaksanakan disusun berdasarkan gagasan yang diilhami oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1978. Menurut GBHN itu, arah pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia ditingkatkan dan diperluas sehingga mencapai masyarakat luas (Ketetapan MPR tahun 1978).

**Lembaga yang Berhubungan dengan Peningkatan Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Sekolah Kejuruan**

Pusat Pengembangan Penataran Guru Kejuruan yang disingkat PPPGK ialah unit Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan yang bekerja sama de-

ngan Pemerintah Australia atas nama *Rencana Colombo (Colombo-Plan)*. Lembaga itu bernama *Indonesia-Australian Technical Education Project*. Tujuan lembaga tersebut ialah meningkatkan mutu sekolah kejuruan di Indonesia agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta memenuhi persyaratan yang diharapkan oleh lapangan industri dan usaha. *Indonesia-Australian Technical Education Project* mulai aktif melaksanakan tugasnya sejak Juli 1982. Tenaga ahli dari negara tersebut bertindak selaku penasihat (advisor) terhadap tenaga Indonesia yang telah dipilih oleh PPPGK dari sekolah kejuruan seluruh Indonesia yang dianggap mampu mengelola sekolah Kejuruan.

Pusat Pengembangan Penataran Guru Kejuruan yang beralamat Jalan Suaka Margasatwa, Jakarta Selatan, terdiri atas beberapa instalasi mata pelajaran dan instalasi jurusan. Instalasi itu ialah Instalasi Bahasa Indonesia, Instalasi Bahasa Inggris, Instalasi Matematika, Instalasi Akuntansi, Instalasi Perkantoran, Instalasi Perniagaan, Instalasi Tata Boga, Instalasi Tata Busana, Instalasi Tata Rias, Instalasi Pekerjaan Sosial, dan Instalasi Industri Kerajinan. Instalasi tersebut bertugas menatar guru sekolah kejuruan seluruh Indonesia, menyelenggarakan Program Diploma III untuk calon guru sekolah kejuruan, dan mengelola pengajaran sekolah kejuruan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Mahasiswa Program Diploma III diperoleh dari tamatan sekolah kejuruan seluruh Indonesia rangking pertama sampai ketiga tiap propinsi setelah diseleksi oleh kantor wilayah masing-masing. Mereka dididik selama tiga tahun, yaitu tiap semester ganjil belajar di kampus dan tiap semester genap praktek mengajar di sekolah latihan yang telah ditentukan.

### **Kemampuan Siswa Sekolah Kejuruan Berbahasa Indonesia**

Tiap awal semester PPPGK menerima kiriman calon mahasiswa baru dari kantor wilayah seluruh Indonesia untuk beberapa jurusan. Untuk mengetahui kemampuan berbahasa Indonesia yang dimiliki oleh para siswa tamatan sekolah kejuruan, Instalasi Bahasa Indonesia PPPGK tiap awal semester memberi tes awal (*pre-test*) kepada calon mahasiswa Program Diploma III, yang hasilnya sebagai berikut ini.

#### **1. Angkatan Pertama (Januari 1982)**

- a) Jurusan Akuntansi nilai rata-rata 54,5,
- b) Jurusan Perkantoran nilai rata-rata 52,
- c) Jurusan Perniagaan nilai rata-rata 50,
- d) Jurusan Tata Boga nilai rata-rata 51,
- e) Jurusan Tata Busana nilai rata-rata 50.

## 2. Angkatan Kedua (Juli 1982)

- a) Jurusan Akuntansi nilai rata-rata 55,5,
- b) Jurusan Perkantoran nilai rata-rata 55,
- c) Jurusan Perniagaan nilai rata-rata 50,
- d) Jurusan Tata Boga nilai rata-rata 54,5,
- e) Jurusan Tata Busana nilai rata-rata 51.

## 3. Angkatan Ketiga (Januari 1983)

- a) Jurusan Akuntansi nilai rata-rata 55,4,
- b) Jurusan Perkantoran nilai rata-rata 58,
- c) Jurusan Perniagaan nilai rata-rata 51,
- d) Jurusan Tata Boga nilai rata-rata 58,
- e) Jurusan Tata Busana nilai rata-rata 56.

## 4. Angkatan Keempat (Juli 1983)

- a) Jurusan Akuntansi nilai rata-rata 54,5,
- b) Jurusan Perkantoran nilai rata-rata 54,
- c) Jurusan Perniagaan nilai rata-rata 52,5,
- d) Jurusan Tata Boga nilai rata-rata 58,5,
- e) Jurusan Tata Busana nilai rata-rata 54,5.

Selain mengadakan tes awal secara tertulis, pada hari pertemuan pertama mahasiswa disuruh berbicara di depan kelas satu per satu dengan topik memperkenalkan diri disertai menceritakan riwayat hidup mereka masing-masing. Mahasiswa angkatan pertama hingga angkatan keempat umumnya memiliki kemampuan berbahasa Indonesia lisan kurang baik. Tata bahasa yang dipergunakan tidak benar, lafal yang diucapkan tidak benar, cara menentukan pilihan kata tidak tepat, dan cara menyampaikan maksud berliku-liku sehingga sukar dipahami orang lain.

Dalam tahun 1982 para ahli dari Australia bersama tenaga Indonesia mengadakan survei ke sekolah-sekolah kejuruan seluruh Indonesia guna sejauh mana kemampuan para siswa terhadap pelajaran yang dituntut di sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 1976, baik pelajaran teori maupun praktek kejuruan. Hasil survei mereka menunjukkan bahwa para siswa sekolah kejuruan di Indonesia umumnya kurang menguasai pelajaran yang diberikan di sekolah baik yang bersifat teori maupun praktek kejuruan. Kemampuan berbahasa Indonesia lisan dan tertulis sangat rendah. Setelah para ahli dari negara tetangga mengolah data lebih lanjut, mereka mengambil kesimpulan bahwa kurang berhasilnya para siswa sekolah kejuruan menguasai pelajaran di sekolah karena mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan

baik. Oleh karena itu, mereka mengalami kesukaran dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru di sekolah serta sukar memahami isi pelajaran yang mereka baca di buku pelajaran.

Dalam melakukan survei, para ahli juga mengadakan wawancara dengan para siswa. Hasil wawancara mereka menunjukkan bahwa para siswa sekolah kejuruan di Indonesia kurang menghargai serta menjunjung tinggi bahasa nasionalnya. Hal itu ternyata ketika para pewawancara menyampaikan pertanyaan kepada para pelajar, mereka sebagian menjawab dengan mempergunakan bahasa Inggris, sebagian tidak menjawab, dan siswa yang menjawab dengan mempergunakan bahasa Indonesia tidak ada. Oleh karena itu, para ahli tersebut berpendapat, bahwa peningkatan mutu sekolah kejuruan di Indonesia harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan para siswa dalam berbahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia yang semula 3 jam pelajaran per minggu harus ditambah sehingga jadi 8 jam pelajaran untuk tiap minggu. Materi pelajaran bahasa Indonesia harus dilengkapi dengan pokok bahasan yang dapat menunjang vak kejuruan dan hal-hal tentang keterampilan berbahasa yang dapat memenuhi harapan serta persyaratan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan.

### **Gagasan Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Sekolah Kejuruan**

Bahasa Indonesia di sekolah kejuruan atau di sekolah lain memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar-mengajar. Guru yang mengajar memerlukan penguasaan bahasa Indonesia dengan baik dan jelas agar pembicaraannya mudah dipahami oleh anak didik. Untuk dapat mempelajari bermacam-macam ilmu pengetahuan dari buku pun memerlukan penguasaan bahasa yang luas. Dalam dunia industri dan usaha, bahasa Indonesia sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan para karyawan dalam menunaikan tugasnya. Komunikasi di kantor-kantor, baik secara lisan maupun tertulis memerlukan kemampuan serta penguasaan bahasa Indonesia yang baik.

Menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983, digariskan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar dan bahwa pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu identitas nasional.

Bertitik tolak dari GBHN tahun 1983 itu dan beberapa aspek yang dibutuhkan oleh sekolah kejuruan guna mempersiapkan anak didik yang sesuai dengan kebutuhan serta persyaratan dunia industri dan usaha, disusun program pengajarak bahasa Indonesia untuk sekolah kejuruan. Tujuan umum pengajaran bahasa Indonesia itu ialah siswa memahami dan menguasai peng-

gunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang kejuruannya, memiliki kesadaran dan kebanggaan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional patut dijunjung tinggi, dipelihara, dan dikembangkan.

Agar dapat mencapai tujuan itu, maka pokok bahasan yang pertamanya harus disajikan ialah Sejarah Pertumbuhan Bahasa Indonesia, dimulai zaman Kerajaan Sriwijaya sampai Kongres Bahasa Indonesia IV. Hal-hal yang berhubungan dengan sejarah perjuangan dan keagungan bangsa Indonesia harus ditekankan agar anak didik menghayati dan mengidentifikasi sikap pribadi serta keagungan bangsa Indonesia pada zaman keemasan. Misalnya, peranan bahasa Melayu dalam undang-undang pelayaran, kedudukan bahasa Melayu menurut hasil penelitian para ahli dari Eropa, dan peranan bahasa Indonesia dalam membina *Wawasan Nusantara* guna mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang kuat.

Faktor kedua yang perlu disajikan kepada anak didik ialah penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan yang digariskan dalam GBHN tahun 1983 dan yang selalu dianjurkan oleh para pembina bahasa melalui RRI serta TVRI. Penyajian tata bahasa sebaiknya tidak hanya sekadar agar siswa tahu sebagai pengetahuan, tetapi harus ditekankan kepada pemakaiannya baik secara lisan maupun tertulis dalam situasi yang cocok. Menurut Kridalaksana (Effendi, 1975:15) bahasa standar atau bahasa baku adalah bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi resmi, wacana teknis yakni dalam laporan resmi dan karangan ilmiah pembicaraan di depan umum, serta pembicaraan dengan orang yang dihormati. Anak didik harus diberi penghayatan dan latihan-latihan tentang penggunaan bahasa Indonesia baku. Pemakaian bahasa baku yang harus ditekankan kepada siswa meliputi tata ejaan, pemilihan kata, tata bentuk kata, dan penyusunan kalimat. Tata ejaan yang harus diperhatikan ialah pemakaian huruf, penulisan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan kata serapan. Siswa harus dibiasakan mengucapkan lafal nasional yang baku dan guru harus mengadakan pengawasan kepada siswa agar berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta konsekuen dan konsisten. Guru yang mengajarkan vak lain serta para karyawan sekolah harus diajak berpartisipasi terhadap pembinaan bahasa Indonesia kepada para siswa. Guru yang mengajarkan bahasa Indonesia berperan sebagai pembina dan pusat penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar di sekolah itu. Kepala sekolah harus bertindak sebagai cermin anggota keluarga sekolah; yang terdiri atas guru-guru, para karyawan, dan para anak didik.

Latihan yang dapat diberikan kepada para siswa untuk membiasakan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar beraneka ragam, di antaranya membetulkan kesalahan pemakaian bahasa yang disediakan oleh guru sebagai

kertas komunikasi, membetulkan kesalahan pemakaian bahasa yang terdapat dalam surat kabar atau majalah, membetulkan kesalahan pemakaian bahasa yang diucapkan oleh pembaca berita melalui RRI atau TVRI, membetulkan kesalahan pemakaian bahasa yang terdapat pada papan nama toko atau perusahaan, dan ada kalanya guru memberi tugas kepada siswa secara berkelompok agar menanyakan secara tertulis kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tentang kesalahan pemakaian bahasa yang sering diucapkan oleh masyarakat. Untuk sekolah yang masyarakatnya memiliki pesawat radio atau televisi, guru mewajibkan kepada anak didiknya agar mengikuti pembinaan bahasa Indonesia melalui RRI atau TVRI.

Agar anak didik terampil berbahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan, guru dapat melatih siswa melaporkan data yang telah dikumpulkan secara lisan di depan kelas, praktik wawancara dengan kawan, praktik menerima tamu di kelas, praktik bertamu di kelas, membacakan pengumuman di depan kelas, dan lain sebagainya.

Kesusastraan Indonesia disertai apresiasi sastra sangat perlu dihidangkan untuk sekolah kejuruan. Dikatakan demikian karena kesusastraan yang disertai apresiasi sastra dapat membentuk kualitas kepribadian suatu bangsa yang tinggi dan berguna untuk menghadapi hal-hal yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan diberi pokok bawasan apresiasi sastra, anak didik akan memiliki rasa cinta serta tanggung jawab terhadap bahasa nasionalnya, berperasaan halus, peka terhadap rangsang yang diterima, penalarannya dapat berkembang secara wajar, dan terampil menciptakan sesuatu yang baru yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk mempersiapkan siswa ke dunia industri dan usaha, materi yang keempat, yaitu pokok bahasan yang sifatnya menunjang vak kejuruan dan yang berfungsi sebagai alat komunikasi lisan maupun tertulis di lapangan pekerjaan. Pokok bahasan yang dapat menunjang vak kejuruan ialah perbendaharaan kata. Oleh karena itu, perbendaharaan kata yang diberikan kepada siswa harus berisi istilah yang sifatnya umum dan istilah kejuruan. Perbendaharaan kata yang bersifat kejuruan harus disesuaikan dengan jenis sekolah kejuruan masing-masing. Sekolah kejuruan kerumahtanggaan harus mendapat istilah kerumahtanggaan, misalnya *graha, gizi, desain, menu, warung hidup, apotek hidup, balita, mode, merias, dan empat sehat lima sempurna*. Sekolah kejuruan sosial harus diberi hidangan istilah tentang kemasyarakatan, misalnya *patembayan, paguyuban, primitif, solidaritas, kompetisi, persaingan, akomodasi, toleransi, bromocorah, minoritas, ekologi, dan urban*. Perbendaharaan kata yang perlu disajikan bagi sekolah kejuruan industri ialah yang berhubungan dengan industri atau kerajinan, misalnya *seni, budaya, seni pahat, seni rupa, seni ukir, menatah, menyungging, lestari, mode, motif, dan mengukir*. Sekolah kejuruan ekonomi harus diberi hidangan perbendaharaan

kata yang berhubungan dengan ekonomi, misalnya *ekspor, impor, modal tetap, modal lancar, bea, premi, debet, kredit, moneter, inflasi, devaluasi, pendapatan per kapita, promosi, eks gudang, pajak pusat, pajak daerah, dan rabat*. Sekolah kejuruan pertanian harus mendapat istilah pertanian, misalnya *gadu, lahan, bibit unggul, VUTM, varietas, minapadi, subak, drainase, tadah hujan, persemaian, tumpang sari, reboisasi, penghijauan, peremajaan, tambak, dan perikanan payau*. Sekolah kejuruan teknologi harus mendapat istilah yang berhubungan dengan teknologi, misalnya *tenaga uap, tenaga kuda, tenaga air, daya serap, kapasitas, kristal, daya tahan, dan tanur peng-iring*.

Siswa harus dilatih menerapkan istilah kejuruan dalam kalimat sebagai alat komunikasi yang bersifat kelembagaak atau yang berupa gagasan. Komunikasi yang pertama maksudnya menerapkan kata atau istilah dalam kalimat surat-menyurat resmi. Hal yang berupa gagasan maksudnya menerapkan kata atau istilah dalam kalimat yang isinya merupakan pendapat terhadap sesuatu atau kritik membangun. Untuk itu, anak didik atau siswa perlu mendapat pokok bahasan *kalimat niaga*. Yang dimaksud dengan kalimat niaga bukan berarti kalimat yang dipergunakan oleh para pedagang di pasar yang tidak memperhatikan tata bahasa, tetapi menerapkan kata atau istilah ke dalam kalimat sebagai alat komunikasi. Membuat kalimat niaga bukan menggunakan kata dalam kalimat agar jelas maknanya, melainkan kalimat yang persyaratannya: bahasa yang dipergunakan harus baik dan benar, isinya mudah dipahami, dan mempunyai tendensi tertentu. Misalnya membuat kalimat niaga dengan mempergunakan istilah *produksi, peremajaan, urbanisasi, bahasa nasional, bibit unggul, korting, dan kaum remaja*.

- a) Kami harap Saudara mengirimkan daftar harga terbaru untuk bermacam-macam tekstil *produksi* dalam segera kepada kami, selambat-lambatnya akhir bulan ini.
- b) Untuk meningkatkan ekspor kopra masa yang akan datang, perlu diadakan *peremajaan* tanaman kelapa.
- c) Jika pemerintah membuka lapangan pekerjaan di luar kota, maka arus *urbanisasi* dapat berkurang.
- d) Bangsa yang berjiwa agung mesti menghormati serta menjunjung tinggi *bahasa nasional*, lagu kebangsaan, dan bendera kebangsaan mereka.
- e) Agar hasil pertanian padi meningkat, pemerintah menganjurkan kepada para petani agar menanam *bibit unggul* dan memberi penjelasan tentang cara memberantas hama tanaman padi.
- f) Jika Saudara memesan kain batik kepada kami paling sedikit sepuluh kodi untuk tiap jenis, kami akan memberi *korting* 10%.

- g) Kenakalan *kaum remaja* tidak mutlak disebabkan oleh kesalahan guru di sekolah, tetapi lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya memegang peranan penting.
- h) Pembangunan waduk air di Indonesia sangat bermanfaat untuk meningkatkan hasil *pertanian* padi karena dapat mengairi lahan yang semula sawah tadah hujan.

Pokok bahasan yang dapat memperlancar penggunaan istilah kejuruan serta kemampuan siswa untuk berbahasa Indonesia kejuruan dengan baik dan benar, yaitu membaca keilmuan, mendengarkan pembicaraan orang lain, merangkum masalah dalam teks, mencari pokok pikiran utama dalam paragraf, menceritakan kembali masalah yang telah didengar atau telah dibaca secara tertulis, dan mengarang bersifat keilmuan. Agar siswa terampil berkomunikasi secara lisan dengan mempergunakan bahasa Indonesia umum atau kejuruan secara baik dan benar, maka harus diberi pokok bahasan yang dapat memperlancar bahasa lisan, yaitu wawancara, berdiskusi, membaca teknis, berpidato, praktik melayani tamu dalam situasi resmi, praktek bertamu secara resmi di depan kelas, memimpin rapat, membacakan pengumuman, dan melakukan tugas juru acara. Adapun pokok bahasan yang perlu dihidangkan agar anak didik terampil berkomunikasi tertulis secara resmi ialah membuat notulen dalam rapat, dikte, membuat surat undangan rapat, membuat teks pengumuman, membuat acara rapat dalam hal tertentu, membuat rencana untuk suatu acara pertemuan, membuat teks pidato, membuat surat lamaran pekerjaan, membuat surat jawaban lamaran pekerjaan, membuat surat perjanjian, membuat usul resmi, membuat surat izin tidak masuk bekerja atau cuti, dan membuat laporan yang bersifat resmi.

### Ajakan

Memindahkan tanaman yang telah tumbuh subur dari suatu tempat ke tempat lain lebih sukar daripada menanam yang baru. Demikian pula mental seseorang yang telah biasa terhadap sesuatu lebih sukar diubah ke arah cita-cita yang baru daripada mendidik anak yang masih putih bersih. Pada tahun 1912, ketika Ki Hajar Dewantara masih bernama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat mengajak rakyat Indonesia agar bersatu dalam gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan, kaum bangsawan yang sudah merasa hidup tenteram dalam alam penjajahan menolak ajakan itu. Gerakan politik yang disertai pengorbanan harta benda, jasa, dan martabat, berakhir dengan hukuman pengasingan terhadap tiga tokoh gerakan tersebut. Raden Mas Soewardi Soeryaningrat diasingkan ke Negeri Belanda, Setia Boedi diasingkan ke Suriname, dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo diasingkan ke Pulau Buru. Setelah

Raden Mas Soewardi Soeryaningrat pulang dari pengasingan, beliau tidak mau mengajak kaum bangsawan yang sudah memiliki sikap mental patuh kepada penjajah, tetapi berganti siasat. Pada 3 Juli 1922 beliau secara resmi menyemaikan anak-anak *putra bumi* yang masih polos agar tumbuh menjadi manusia Indonesia yang *berjiwa nasionalis sejati* dalam wadah yang disebut *Taman Indria*.

Kiranya jelaslah bahwa pelaksanaan tugas pendidikan yang berupa gosok-menggosok, asah-asuh dan asih, serta tambal sulam tidak mungkin dapat dilaksanakan jika hanya berupa konsep dengan tangan hampa, tetapi harus disertai dengan pembiayaan yang memadai, pengorbanan rasa serta karsa, dan kesatupaduan antara lembaga pemerintah yang satu dengan yang lain. Lembaga pendidikan yang bertindak selaku tuan rumah, dari tingkat teratas hingga tenaga-tenaga pelaksana di lapangan harus bergerak searah demi terlaksananya pembaharuan yang bersifat tambal sulam itu.

Lembaga pendidikan yang sangat menunjang, memperkuat, dan memberi lampu penerang terhadap langkah untuk menuju cita-cita tersebut ialah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Lembaga tersebut telah berjasa melaksanakan *tugas nasional*; membina rakyat Indonesia agar berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, menyusun kamus umum yang baku, dan menyusun kamus istilah yang mencakup berbagai ilmu pengetahuan. Semangat para pembina yang menyala-nyala sejak Amin Singgih hingga S. Effendi patut dipuji. Usaha itu akan lebih cepat mencapai sasaran sesuai dengan GBHN tahun 1983 jika departemen yang lain serta para pemimpin masyarakat menaruh partisipasi terhadap usaha pembinaan bahasa nasional bangsa Indonesia. Akhirnya, penulis menyerukan ajakan agar segenap lapisan masyarakat Indonesia meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia secara sadar sesuai dengan jiwa *Sumpah Pemuda*, dengan jalan menghayati dan mengamalkan GBHN tahun 1983 tentang bahasa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1976. *Ketetapan MPR tahun 1978*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 1983. *Ketetapan MPR No. II/MPR/1983*. Jakarta.
- Direktorat Menengah Kejuruan. 1982. *Kurikulum SMEA 1976*. Jakarta.
- . 1975. *Kurikulum STM 1975*. Jakarta.
- . 1979. *Kurikulum SMKK 1976*. Jakarta.
- . 1979. *Kurikulum SMPS 1976*. Jakarta.
- . 1979. *Kurikulum SMTK 1976*. Jakarta.
- . 1982. *Kurikulum SMIK 1976*. Jakarta.
- Effendi, S. 1975. *Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Hakim, Lukman. 1983. *Penataran Penulisan Soal Tes Prestasi Belajar*. Jakarta: BP3K.
- Halim, Amran. 1979. *Pembinaan Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Indonesian-Australian Technical Education Project. 1983. *Survey into Industrial Needs Industries in Indonesia*. Jakarta: PPPGK.
- SSP., Pranata. 1959. *Ki Hadjar Dewantara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Suratman M. 1982. *Bahasa Indonesia Kejuruan*. Jakarta: PPPGK.
- . 1983. *Penataran dalam Jabatan Guru Sekolah Kejuruan*. Jakarta: PPPGK.

## **PEMANFAATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT PEDESAAN BAGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA**

Sunardji  
PPBS IKIP Semarang

### **Pendahuluan**

#### **Latar Belakang**

Penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar dinyatakan wajib bagi bangsa Indonesia (*Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983). Walaupun demikian, tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri masih merupakan masalah yang rumit. Kerumitan itu di antaranya terletak pada proses pembakuannya yang berlangsung terus-menerus karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia (Halim, 1979:96). Faktor yang memainkan peranan penting dalam proses itu adalah faktor sosial budaya yang menyangkut kepentingan segenap lapisan masyarakat Indonesia. Proses itu memerlukan dukungan sosial budaya yang besar dari pejabat pemerintah, pemimpin kemasyarakatan, guru, pengusaha, pengaruh media massa (Halim, 1979:96–97). Pendukung proses itu kiranya masih perlu ditambah lagi dari mereka yang berperan langsung dalam kancah pembangunan ialah mereka yang tinggal di pedesaan.

Dalam rangka pembangunan untuk meningkatkan perikehidupan masyarakat pedesaan, pembangunan dalam bidang apa pun, dunia usaha

tidak pernah dapat ditinggalkan. Dunia usaha itu, misalnya dunia perdagangan dan pertokoan, adalah penunjang untuk pembangunan itu. Mereka yang terlibat dalam kegiatan dunia usaha itu mutlak menggunakan alat berkomunikasi dalam bentuk surat-menyurat dan dalam bentuk komunikasi yang lain. Pemakaian bahasa Indonesia bagi keperluan berkomunikasi itu memerlukan sikap sosial budaya yang positif demi keberhasilan pembangunan untuk meningkatkan perikehidupan dan kebudayaan (Halim, 1979:97).

Pengembangan perikehidupan dan kebudayaan masyarakat pedesaan dapat dilacak dari butir-butir Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) IV. Semua sektor pembangunan dalam Repelita IV terarah kepada usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Rumusan tentang pembangunan bagi masyarakat pedesaan termaktub secara eksplisit pada sektor ekonomi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosial dan budaya, politik, aparatur pemerintah, hukum, penerangan media massa, dan hubungan luar negeri. Hal itu berarti bahwa masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang paling berkepentingan bagi keberhasilan pembangunan pada tahapan dewasa ini.

Berhubung dengan kepentingan masyarakat pedesaan bagi berhasilnya pembangunan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Satu di antaranya ialah perihal konsep atau gagasan yang diperlukan untuk menggerakkan dinamika pembangunan. Konsep atau gagasan itu tentulah terungkap dalam bentuk pemakaian bahasa, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia yang lazim digunakan untuk mengungkapkan konsep dan gagasan untuk keperluan pembangunan, yang juga diprogramkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ialah bahasa Indonesia yang baku. Adapun pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat PPBI) yang diprogramkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu pada hakekatnya ialah tindakan untuk memasyarakatkan konsep dan gagasan pembangunan; konsep dan gagasan itu berfungsi pula untuk kepentingan mendasari modernisasi kehidupan masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai kehidupan masyarakat yang modern itu, konsep dan gagasan pembangunan dengan bahasa Indonesia baku harus dikomunikasikan.

Komunikasi timbal-balik antara pemerintah dan warga masyarakat pedesaan adalah komunikasi yang "saling menyesuaikan". Yang dimaksud ialah (1) pihak pemerintah menjabarkan rencana dan tatalaksana pembangunan yang tertulis dalam bahasa Indonesia baku ke dalam bahasa yang sengaja disesuaikan dengan kompetensi kebahasaan warga masyarakat pedesaan pada umumnya, dan (2) warga masyarakat pedesaan mencoba mencerna dan mengembangkan konsep-konsep tentang pembangunan yang menggunakan bahasa nasional itu. Sebagai contoh: beberapa istilah tentang teknologi dan pemerintahan dikembangkan oleh pemerintah dalam bahasa nasional; warga

masyarakat pedesaan berusaha mendapatkan pengertian mengenai istilah tentang teknologi dan pemerintahan (misalnya yang menyangkut soal-soal politik, ekonomi, keuangan, sosial, hukum, pendidikan) melalui penjelasan atau melalui terjemahan. Meskipun demikian, istilah itu sendiri tetap dibiarkan dalam bentuknya dalam bahasa nasional oleh warga masyarakat pedesaan. Istilah *pemilu*, *parpol*, *Golkar*, *ipeda*, *puskesmas*, *PKK*, *bimas*, *TRI*, *hansip*, *BP3*, *PMK*, *siskamling*, *LMD*, *LKMD*, *LSD*, *balita*, *ASI*, *KIK*, *KMKP*, dan sebagainya tetap dipakai oleh warga masyarakat pedesaan sebagaimana adanya dalam bahasa nasional. Dengan menggunakan istilah itu terdapat dinamika sosial yang mengarah kepada pemakaian unsur kebahasaan untuk pengembangan laras bahasa ragam tinggi. Dinamika sosial itu kiranya akan lebih jelas diterangkan dengan menelaah pemakaian bahasa oleh warga masyarakat pedesaan itu melalui pendekatan *sociolinguistics settings* mengenai adanya perubahan (*change*) dan pertimbangan (*evaluation*) dalam pemakaian bahasa (Ferguson dalam Fishman, ed., 1979:9–29).

Studi yang melakukan telaah tentang situasi kebahasaan di Indonesia melalui penelitian sosiolinguistik telah menghimpun sejumlah informasi faktual. Sejumlah informasi faktual itu pada umumnya cenderung untuk disebut sebagai jawaban atas permasalahan ontologi tentang pemakaian bahasa. Di antaranya ialah inventarisasi faktor sosial budaya yang mempunyai peranan penting dalam pembakuan bahasa Indonesia. Di samping itu, penelitian dalam bidang dialektologi, struktur bahasa daerah Nusantara, kiranya sudah cukup banyak menghasilkan informasi tentang unsur kebahasaan tertentu pada pemerian bahasa yang diteliti. Hasil penelitian itu dapat diketahui dari lampiran Pidato Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, Soeharto, di depan Rapat Paripurna pada tanggal 1 Maret 1983.

Setelah diperoleh inventarisasi faktor sosial budaya yang berperan dalam pembakuan bahasa dan setelah diperoleh informasi tentang unsur kebahasaan tertentu pada pemerian bahasa Nusantara, penelitian lebih lanjut untuk mencari jalan yang efektif bagi PPBI masih diperlukan dan justru ditingkatkan.

### Permasalahan

Permasalahan ontologi telah banyak diungkapkan. Oleh karena itu, permasalahan dari segi yang lain kiranya dapat dikemukakan. Jawabnya diharapkan dapat dipakai sebagai masukan untuk dipertimbangkan dalam menyusun butir kenastitian (*policy*) lebih lanjut. Permasalahan yang kiranya perlu ditampilkan ialah permasalahan epistemologi sesudah diperoleh seperangkat jawab atas permasalahan ontologi mengenai beberapa aspek kebahasaan di Indonesia.

Permasalahan epistemologi itu antara lain dimaksudkan untuk dapat

dirujukkan kepada teori perencana bahasa tentang *elaboration and propagation* dalam rangka *cultivation* (Anwar, 1972:287–298). Satu di antaranya ialah yang bersangkutan paut dengan peranan lembaga kemasyarakatak di pedesaan yaitu dengan cara bagaimanakah lembaga kemasyarakatak di pedesaan sebagai pemilik potensi sosial budaya daqat dimanfaatkan untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara?

### Tujuan Pembahasan

Pembahasan ini bertujuan mencoba melihat kemungkinan adanya (1) jalan pemanfaatan lembaga kemasyarakatan di pedesaan Indonesia untuk kepentingan PPBI dan (2) aspek kebahasaan tertentu yang dapat dilaksanakan dalam rangka PPBI.

### Pendekatan

Dari jumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk menghampiri pembahasan ini, dipilih satu pendekatan yang bertolak dari posisi ide keprofesian yang berciri kependidikan bahasa. Posisi ide keprofesian itu dalam hal ini mengarahkan pandangan kepada peranan pendidikan bahasa sebagai salah satu kegiatan untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan di Indonesia. Pendekatan yang dimaksud ialah pendekatan profesional.

### Pengadaptasian Beberapa Acuan Teoretis

#### Strategi Perencanaan Bahasa

Perencanaan bahasa sebagai tindakan yang disengaja untuk mengadakan perubahan bahasa (lisan atau tertulis) mempunyai orientasi untuk menuju terciptanya situasi pemakaian bahasa yang lebih baik pada masa yang akan datang (Rubin, 1971:xvi). Penciptaan situasi itu sama maksudnya dengan pembangunan bahasa (*language cultivation*) yang mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dengan sasaran untuk menghasilkan pedoman pemakaian bahasa yang normatif (perihal ejaannya, fonologinya, tata bahasanya, kosakatanya, dan gaya bahasanya) (Anwar, 1972:287). Dalam perencanaan bahasa itu ada beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan sebagai variabel yang saling bertautan, misalnya variabel ekonomi, sosial, politik, demografi, dan variabel psikologi. Di samping itu, terlihat pula pelbagai disiplin yang daqat digunakan untuk mempertajad permasalahan kebahasaan yang dihadapi. Faktor yang berhubungan dengan nilai juga tercakup dalam perencanaan bahasa itu.

Dengan memperhatikan butir komponen yang terlibat dalam perencanaan bahasa, kiranya dapat pula dirumuskan bahwa perencanaan bahasa berusaha membuat prediksi tentang bentuk masyarakat bawasa yang dikehendaki. Hal itu kiranya sama maknanya dengan pernyataan bahwa perencanaan bahasa adalah tindakan untuk menuju ke muara tempat bertemunya pelbagai konsep dari aneka disiplin untuk dikomunikasikan dalam rangka membentuk masyarakat baru dengan nilai baru.

### Masyarakat Indonesia Baru dengan Nilai-nilai Baru

Dalam rangka pembakuan bahasa Indonesia, dukungan masyarakat adalah faktor yang sangat penting (Halim, 1979:92–95). Masyarakat pendukung pembakuan bahasa ialah masyarakat yang berkepentingan meningkatkan taraf hidupnya menjadi masyarakat yang lebih modern, yaitu masyarakat yang mempunyai hasrat untuk mengembangkan nilai budaya modern dan sekaligus mempunyai itikad mengembangkan ragad bahasa tinggi.

Nilai budaya modern ialah nilai yang masih idaman. Nilai idaman itu tidak sama dengan nilai yang sudah ada, sebab nilai lama yang sudah ada itu pada waktu ini ada yang sudah tidak sesuai dengan situasi. Ketidaksesuaian dengan situasi itu adalah karena adanya pergeseran kebudayaan yang mengalami perkembangan. Perkembangan yang menggeser nilai tradisional itu diakibatkan oleh lahirnya kebudayaan industri yang memberikan nilai tinggi kepada ilmu dan teknologi. Dengan ilmu dan teknologi yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan nilai baru itu, masyarakat Indonesia semakin mampu menyingkap tabir rahasia alam dan menemukan kaidah-kaidah atau hukum alam.

Pergeseran nilai dari nilai tradisional kepada nilai budaya baru ada kalanya menimbulkan eksek yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem nilai ideal yang selaras dengan upaya penyelesaian program pembangunan. Sistem nilai budaya yang ideal dan yang selaras dengan penyelesaian program pembangunan itu disarankan oleh Prof. Dr. Koentjaraningrat yang pada pokoknya ialah sebagai berikut.

Pada unsur kebudayaan Indonesia yang lama terdapat nilai yang tetap masih cocok dengan kepentingan untuk menyelesaikan program pembangunan, yakni (1) nilai gotong royong, yang meliputi tenggang rasa terhadap sesama manusia dan sikap toleran terhadap golongan lain, (2) konsep menjaga keselarasan dengan alam, dan (3) konsep ikhtiar dalam hidup. Nilai-nilai itu dalam usaha kebudayaan perlu dikembangkan atau dihidupkan lagi. Selanjutnya, pada unsur kebudayaan yang baru terdapat nilai yang berbeda dengan

nilai dalam gotong royong ialah (1) sikap lebih 'menghargai individu, yang mencakupi penghargaan kepada kemajuan individual, sikap tidak bergantung pada orang lain, dan sikap berani bertanggung jawab sendiri, (2) konsep disiplin nurani tanpa pengawasan, (3) hasrat ingin menguasai alam, (4) orientasi ke masa depan dengan memberikan nilai tinggi kepada kecermatan berencana, hemat, dan (5) orientasi aktif terhadap hidup. Pembudayaan nilai-nilai itu dilakukan dengan pemberian contoh dari atas, kampanye, sistem perangsang dan antiperangsang, dan dengan cara-cara pengasuhan (pendidikan) anak (Koentjaraningrat, 1981/1982:8-14).

Jika melalui repelita demi repelita masyarakat pedesaan diusahakan peningkatan hidupnya menjadi masyarakat industri, maka hal itu kiranya berarti bahwa pergeseran nilai budaya akak terjadi pada masyarakat pedesaan. Dalam usaha pembudayaan nilai, yang dilakukan dengan menjaga kelestarian nilai tradisional yang masih relevan dengan kepentingan pembangunan dan dengan pengembangan nilai baru yang dapat dipadukan dengan nilai lama, masyarakat pedesaan adalah yang paling banyak terlibat atau dilibatkan. Proses keterlibatan masyarakat pedesaan dalam rangka membudayakan nilai ideal itu adalah proses yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan bahasa; bahasa Indonesia berperan penting dalam proses pembudayaan nilai ideal itu. PPBI dapatlah kiranya memainkan peranan yang penting di dalam kancah pembangunan masyarakat pedesaan yang sedang mengalami pergeseran nilai budaya untuk mencapai modernisasi.

Peranan PPBI dalam rangka menunjang tercapainya modernisasi bagi masyarakat pedesaan ialah dengan jalan mengoperasikan bahasa yang bertaraf modern. Bahasa yang modern ialah bahasa yang coraknya antara lain (1) bertaraf sederajat secara fungsional dengan bahasa lain yang lazim disebut bahasa terkembang yang sudah mantap, (2) termasuk keluarga bahasa di dunia yang memungkinkan penerjemahan timbal balik di dalam berjenis ragam wacana atau satuan teks tuturan yang beruntun, (3) dapat dipakai untuk keperluan komunikasi di bidang kehidupan seperti industri, perniagaan, teknologi, dan pendidikan lanjutan (Moeliono, 1981:24-32).

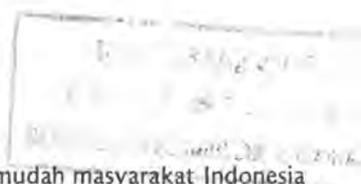
Ditilik dari kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia termasuk bahasa yang sudah memiliki atribut yang disyaratkan untuk dimiliki oleh bangsa yang modern. Dengan mengandalkan kepada yustifikasi statistik, telah disusun ramalan bahwa bangsa Indonesia dengan atributnya itu kelak pada tahun 2041 sudah memiliki satu-satunya bahasa yang digunakan dalam kesempatan apa pun untuk berkomunikasi. Yustifikasi statistik itu memperhitungkan perkembangan pemakaian bahasa Indonesia yang mengalami peningkatan dari 40,78% pada tahun 1971 menjadi 49,66% pada tahun 1981, kemudian menjadi 59,47% pada tahun 1991. Selanjutnya, pada tahun 2001 pemakaian bahasa Indonesia di Indonesia sudah menjadi 69,01% (Husen

Abbas dalam Kridalaksana dkk., ed., 1982:227–278). Ramalan itu kiranya dapat memadu kegiatan PPBI berdasarkan perencanaan bahasa yang dapat disalurkan melalui lembaga pendidikan formal atau melalui lembaga kemasyarakatan di luar jalur pendidikan formal.

Meskipun ramalan itu membesarkan hati, PPBI yang diarahkan untuk mencapai situasi pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk lembaga pendidikan nonformal bukanlah pekerjaan yang ringan. Kendalanya terletak pada situasi kebahasaan yang nyata dewasa ini, yaitu situasi ganda bahasa (*Multilingual*). Jika kegiatan PPBI dapat dipandang sebagai salah satu langkah operasional bagi usaha pembudayaan nilai baru yang ideal bagi pembangunan, maka kegiatan dalam rangka perencanaan bahasa dapat ditempuh dengan pemberian contoh dari atas, dengan kampanye, dan dengan cara pengasuhan (pendidikan).

Pemberian contoh dari atas dan kampanye dalam rangka PPBI diarahkan untuk menuju tercapainya kemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara mantap jika penjabaran Politik Bahasa Nasional yang beracuan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan rumusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara konseptual. Jika rumusan yang disusun secara konseptual dapat dibuat bagi pengoperasian PPBI, maka langkah yang mempunyai arti politik yang berdaya guna ialah memasukkan bahasa Indonesia sebagai unsur yang vital dalam Wawasan Nusantara. Dengan menempatkan bahasa Indonesia di dalam ranah Wawasan Nusantara, maka bahasa Indonesia akan menjadi salah satu sarana bagi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai (1) satu kesatuan politik, (2) satu kesatuan sosial budaya, (3) satu kesatuan ekonomi, dan (4) satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai yang disebutkan itu, hal itu telah ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab II E (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983).

Jika bahasa Indonesia sudah menempati ranah Wawasan Nusantara secara eksplisit, maka siapa saja yang berposisi sebagai pemimpin masyarakat di Indonesia akan lebih merasa berkewajiban untuk memantapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Suatu contoh konkret tentang keberhasilan pemimpin masyarakat dalam membina dan mengembangkan bahasa nasional (padahal pada saat Wawasan Nusantara belum dirumuskan secara sistematis) ialah ketika Presiden Republik Indonesia meminta agar frase *Mobiele Brigade* (yang disebut *Mobrig*) diganti susunannya menjadi *Brigade Mobil* (yang disingkat *Brigmob*) pada 14 November 1961. Alasannya ialah karena frase *Mobiele Brigade* tidak sesuai susunannya dengan



kepribadian bahasa nasional. Dengan cepat dan mudah masyarakat Indonesia pada waktu itu segera menerima kampanye Presiden itu dan menggunakannya serta mengembangkannya (Tjokronegoro 1968: xix-xx).

Jalur pengasuhan (pendidikan) anak sudah jelas keefektifannya. Dari lembaga pendidikan formal telah dilancarkan Kurikulum Sekolah Dasar 1975, begitu pula untuk SMTP dan SMTA. Menurut kurikulum yang dibakukan, pengajaran bahasa Indonesia sudah dimulai sejak anak-anak Indonesia duduk di bangku kelas satu sekolah dasar. Pelaksanaan Kurikulum 1975 membawa dampak yang positif ke dalam lingkungan keluarga *batih* (*nuclear family*) (menurut konsep antropologi kebudayaan) sehingga bahasa Indonesia makin menjadi bahasa keluarga. Setelah kurikulum 1975 diterapkan dalam beberapa tahun akademi, "keasingan" bahasa Indonesia bagi lapisan generasi muda dewasa ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Apakah bahasa Indonesia dewasa ini berkedudukan sebagai bahasa asing atau bahasa kedua (menurut konsep yang biasa dianut oleh ilmuwan bidang bahasa), kiranya diperlukan rumusan yang definitif. Berhubung dengan adanya faktor budaya yang baru sebagai hasil positif pembangunan nasional di bidang PPBI, apakah belum cukup pemburhanan atau pemberian alasan untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai *bahasa utama* di Indonesia? Jika kedudukan bahasa Indonesia dapat ditetapkan sebagai bahasa utama, maka kelempangan jalan untuk melakukan PPBI dalam rangka menerapkan Wawasan Nusantara kiranya beroleh tanda-tanda atau isyarat yang menggembirakan.

Demikianlah, kiranya dari pembicaraan dalam paragraf yang telah disebutkan itu diperoleh simpul bagi keperluan PPBI, yaitu (1) PPBI perlu dikembangkan dengan teknik yang lebih sempurna dengan model berupa hasil-hasil PPBI yang sudah dicapai selama ini, (2) PPBI berperan penting untuk turut serta memasyarakatkan nilai ideal untuk pembangunan, dan (3) demi keberhasilan yang lebih baik dalam PPBI, bahasa Indonesia perlu diusahakan untuk memperoleh kedudukan yang eksplisit sebagai salah satu komponen dalam Wawasan Nusantara. Perlu ditambahkan bahwa medan PPBI yang perlu mendapat perhatian yang lebih baik ialah lembaga kemasyarakatan tingkat pedesaan.

Penerapan simpul-simpul itu bagi PPBI melalui lembaga kemasyarakatan pedesaan bukan pekerjaan yang ringan, tetapi diasumsikan pula bukanlah suatu pekerjaan yang sia-sia. Asumsi itu beracuan kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang relevan dengan langkah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

## Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Pedesaan

### Pelembagaan Masyarakat Desa Menurut Hukum

Arah perkembangan dan kemajuan masyarakat pedesaan sudah diatur dengan Undang-undang Nomor 5/1979. Dengan undang-undang itu kesatuan masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terorganisasi dalam pemerintahan di bawah camat secara langsung. Kesatuan masyarakat itu dibedakan menjadi (1) desa, dan (2) kelurahan. Perbedaan itu berkaitan dengan hak penyelenggaraan rumah tangga pemerintahan dalam ikatannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia; desa mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri, sedangkan kelurahan tidak mempunyai hak itu. Walaupun demikian, baik desa maupun kelurahan adalah organisasi kesatuan masyarakat yang secara hukum langsung di bawah camat.

Dalam rangka PPBI kedua jenis kesatuan masyarakat itu dipandang sebagai sasaran yang dikenai tindakan pembinaan dan pengembangan sistem nilai budaya baru bagi kepentingan modernisasi. Kedua jenis kesatuan masyarakat itulah yang diprogramkan untuk memiliki kompetensi tentang konsep Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Bagi warga desa atau warga kelurahan, keduanya tidak bebas dari keterlibatannya dalam situasi demi situasi resmi jika mereka melakukan komunikasi dengan instansi pemerintah untuk menyelesaikan hak dan kewajiban mereka. Dalam situasi resmi itulah berlangsung komunikasi dalam bahasa Indonesia baku, misalnya jika mereka mengurus soal-soal yang berhubungan dengan kartu tanda penduduk, Ipeda, Sensus, dan pemilihan umum.

Keperansertaan tiap warga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan dikelola lewat pelaksanaan pemerintahan desa. Pengelolaan warga masyarakat desa/kelurahan dilaksanakan dengan pengarahannya yang diatur dengan undang-undang. Pengaturan dengan undang-undang itu diarahkan untuk menciptakan keseragaman kedudukan pemerintahan desa dengan tetap mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku. Tujuan lebih lanjut ialah agar pemerintahan desa semakin mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan agar penyelenggara administrasi pemerintahan yang makin luas itu semakin efektif.

Pengelolaan pemerintahan desa dan kelurahan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 itu berbeda secara asasi dengan pengelolaan berdasarkan *Indlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) (Stbl. 1906 Nomor 83) dan *Indlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) (Stbl. 1938 No. 490 jos Stbl. 1938 No. 681). IGO dan IGOB tidak mendorong masyarakat pedesaan untuk tumbuh dan maju secara dinamis sehingga tidak ada usaha

untuk mencapai keseragaman. Ketidakseragaman pengelolaan pemerintahan desa itu justru menjadi kendala dalam pembinaan dan pengendalian yang intensif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bentuk dan susunan pemerintahan desa diarahkan dan diseragamkan sehingga diharapkan dicapai corak yang bersifat nasional. Dengan demikian, antara lain, dimaksudkan agar komunikasi dua arah antara warga masyarakat dan pemerintahan dapat berlangsung dengan menerapkan demokrasi Pancasila secara nyata di seluruh negeri. Keseragaman itu dapat terlihat dari tumbuhnya aspirasi warga desa melalui wadah yang menurut hukum disebut Lembaga Musyawarah Desa, yang selanjutnya berkembang pula dengan adanya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Corak nasional yang diharapkan dapat diciptakan itu, antara lain, dapat dilihat dari pembentukan dan pengembangan organisasi para ibu, organisasi para remaja, dan organisasi yang lain yang bersifat kreatif. Di samping itu, organisasi yang lain yang bersifat keagamaan dan adat tetap masih dimungkinkan untuk berdiri dan dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, menurut undang-undang yang berlaku, di setiap desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bercorak nasional di samping dapat pula dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bercorak lokal.

Bagi PPBI, pelembagaan masyarakat desa menurut undang-undang itu dapat diambil manfaatnya. Baik PPBI, maupun pembentukan lembaga kemasyarakatan pedesaan itu, keduanya mempunyai persamaan arah dan tujuan, yaitu memperkuat ketahanan nasional.

### **Kemungkinan Peran Lembaga Kemasyarakatan Pedesaan dalam PPBI**

Baik kesatuan masyarakat yang ada di desa maupun yang ada di kelurahan, mereka akan selalu memusyawarahkan keputusan desa atau keputusan kelurahan yang ada sangkut-pautnya dengan kenastitian Pemerintahan Pusat, pemerintah daerah, maupun hal-ikhwal tentang kerumahtanggaan sendiri. Yang berperan serta dalam musyawarah itu ialah kepala dusun, pemimpin lembaga kemasyarakatan, dan pemuka masyarakat desa yang bersangkutan. Apa pun keputusan yang diambil diharuskan untuk tidak menyimpang dari kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap hal yang dimusyawarahkan adalah penjabaran kenastitian pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat. Bagi PPBI ini berarti bahwa istilah atau konsep yang dibahas dalam musyawarah adalah istilah atau konsep yang sudah dihasilkan oleh lembaga tinggi negara

Sendi utama pelaksanaan pemerintahan daerah/kelurahan adalah berjawa gotong-royong (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979). Jawa gotong-royong ialah jiwa yang memungkinkan terjadinya bentuk kerja sama yang spontan dan mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara

warga desa dan atau antarwarga *desa dengan* pemerintah untuk memenuhi kebutuhan yang insidental atau yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Berhubungan dengan adanya kemungkinan untuk selalu bermusyawarah di kalangan lembaga kemasyarakatan pedesaan, kiranya dapatlah diatur program PPBI yang dilaksanakan lewat lembaga kemasyarakatan pedesaan. Baik melalui penjabaran kenastitian pemerintah, maupun melalui forum permusyawaratan mengenai kerumahtanggaan desa, PPBI dapat dilaksanakan. Adapun kesempatan untuk melakukan kegiatan PPBI itu dapat pula kiranya diprogramkan bersamaan dengan kesempatan pada (1) pemberian penerangan dan penyuluhan, (2) peningkatan keterampilan, (3) peningkatan kemampuan penalaran, (4) bakti sosial, (5) ujian saringan calon aparat pemerintah, dan (6) kegiatan yang lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program pembangunan. Melalui LMD, LKMD, dan lembaga pedesaan yang lain kegiatan berkomunikasi verbal dalam bentuk musyawarah dapat berperan besar dalam rangka PPBI ini.

Pengembangan peran lembaga kemasyarakatan pedesaan bagi kepentingan PPBI dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme kerja kelembagaan dengan menambahkan butir-butir kelembagaan dalam tata kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Dengan menggali lebih dalam lagi arti dan makna konsep-konsep di dalam undang-undang itu, kiranya peran lembaga kemasyarakatan pedesaan bagi kepentingan PPBI masih dimungkinkan untuk digali terus.

#### **Aspek Kebahasaan yang Dibina dan Dikembangkan Melalui Lembaga Kemasyarakatan Pedesaan**

Jika lembaga kemasyarakatan pedesaan sudah dapat diidentifikasi perannya dalam PPBI, maka kegiatan PPBI melalui lembaga kemasyarakatan pedesaan dapat diprogramkan. Lembaga kemasyarakatan pedesaan pada hakikatnya termasuk lembaga pendidikan luar sekolah. Karena itu, syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga kemasyarakatan pedesaan kiranya sama saja dengan syarat untuk lembaga pendidikan nonformal. Jika PPBI dioperasikan melalui lembaga kemasyarakatan pedesaan, maka syarat perencanaan bahasa yang beracuan kepada teori sosiolinguistik tentang peranan faktor sosial budaya dapat ditetapkan.

Setelah syarat perencanaan bahasa yang beracuan kepada teori sosiolinguistik terpenuhi, maka langkah berikut ialah merumuskan tujuan PPBI lewat lembaga kemasyarakatan pedesaan itu. Tujuan yang dimaksud misalnya adalah agar setiap warga masyarakat di pedesaan dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ide yang tercakup dalam

pengertian *berkomunikasi* ini meliputi dua jenis kompetensi, yaitu (1) kompetensi memilih unsur bahasa yang tepat untuk kepentingan melahirkan gagasan yang setepat-tepatnya dalam *linguistik context* tertentu, dan (2) kompetensi untuk membuat keputusan tentang pemakaian anasir kebahasaan yang bagaimanakah yang sesuai dengan situasi sehingga gagasan yang dilahirkannya memenuhi syarat untuk *communicative situation* (Widdowson, 1978:4–10). Tercapainya tujuan itu berarti terciptanya kelompok goyuban bahasa yang terampil berbahasa.

Untuk mencapai tujuan itu perlu diketahui pula berbagai kendala yang mungkin menghambat upaya pencapaian tujuan itu. Di antaranya ialah adanya realitas bahwa pada umumnya perangkat lembaga k/masyarakat di pedesaan itu belum "menguasai" bahasa nasional. Oleh sebab itu, hal demikian itu perlu dipertimbangkan sebelum program PPBI lewat lembaga itu dilaksanakan. Kendala yang lain terletak pada langkanya sarana fisik yang dapat menunjang kelancaran PPBI. Di samping itu, terdapat kendala yang bersumber pada sikap. Akan tetapi, kendala itu kiranya dapat diatasi apabila kekuatan politik yang berbobot nasional untuk modal PPBI terwujud, misalnya dengan jalan menetapkan bahasa Indonesia sebagai unsur yang penting dalam Wawasan Nusantara. Upaya untuk mengatasi kendala itu pun juga tidak mungkin dilepaskan dari tujuan PPBI itu sendiri.

Berhubung dengan tujuan PPBI lewat lembaga kemasyarakatak adalah untuk mencapai dua kompetensi, yang masing-masing ada kaitannya dengan *linguistics context* dan dengan *communicative situation*, maka tekanan kriteria pencapaiannya adalah pada *pengembangan kosa kata/istilah* dan *ketetapan pemakaiannya*. Jika aspek kebahasaan itu dihubungkan dengan ide Prof. Dr. Anton M. Moeliono tentang pemodernan kata (Moeliono, 1981:24–32), maka PPBI lewat lembaga kemasyarakatak pedesaan pada hakekatnya adalah kegiatan untuk sosialisasi aspek kebahasaan yang diprogramkan pemoderannya. Upaya sosialisasi itu adalah upaya PPBI yang menggunakan pendekatan komunikatif. Pemekaran kosa kata/istilah dan ketepatan pemakaiannya dalam lingkungan warga masyarakat pedesaan adalah sosialisasi konsep pembangunan yang memenuhi harapan. Dalam hubungan ini, kamus istilah (di samping kamus umum) memegang peranan penting. Di samping itu, dengan pendekatan profesional dapat dikemukakan bahwa setiap warga masyarakat perlu dipikirkan kosa kata atau istilah yang manakah yang perlu dimiliki sesuai dengan profesinya atau profesi yang diinginkannya. Selain itu, setelah seleksi kosa kata atau istilah dilaksanakan, tahapan berikut ialah penyusunan modul atau paket dengan metode penyampaian yang tertentu dengan target atau terminal tertentu.

Jika sosialisasi kosa kata dan ketepatan pemakaiannya sudah mencapai terminal yang telah ditetapkan, maka kompetensi yang diperoleh kiranya dapat dikembangkan lagi untuk keperluan mengungkapkan ide-ide yang khas terdapat dalam kebudayaan daerah asal. Pengembangan nama sesuatu hal dan konsep kultural yang bersumber pada pusaka-budaya asli, kemungkinan pengembangan norma tradisional yang masih dapat dihidupkan lagi dalam kehidupan yang menerapkan nilai baru (yang ideal). Tidaklah mustahil bahwa para warga masyarakat pedesaan akan memiliki potensi sebagai pembahan yang penting artinya bagi pembangunan bidang bahasa.

Di bawah ini akan dicoba dibuat simpulan dari apa yang telah dikemukakan pada paragraf-paragraf sebelumnya.

### Simpulan dan Saran

Terhadap permasalahan epistemologi tentang bagaimana usaha meningkatkan kualitas dan hasil PPBI, di bawah ini dicoba untuk dibuat saran sebagai berikut.

Dengan memanfaatkan lembaga kemasyarakatan pedesaan bagi kepentingan PPBI, kiranya upaya untuk meningkatkan modernisasi kehidupan masyarakat Indonesia (sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia) melalui sosialisasi kosa kata dan istilah dalam ilmu dan teknologi memperoleh penunjang yang dapat diandalkan. Lembaga kemasyarakatan pedesaan itu ialah (1) lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, misalnya Lembaga Musyawarah Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dan lembaga-lembaga yang secara organik menjadi unsur atau perangkat pemerintahan desa, dan (2) lembaga tradisional yang dibentuk berdasarkan aspirasi warga masyarakat pedesaan, yang bersifat adat, keagamaan, dan yang pembentukannya diizinkan oleh pemerintah. Di samping itu, lembaga kemasyarakatan pedesaan dapat juga dimanfaatkan untuk mengembangkan ragam laras bahasa.

Dengan memanfaatkan lembaga kemasyarakatan pedesaan bagi kepentingan PPBI, setidaknya-didaknya diperoleh dua manfaat, yaitu (1) pembangunan nasional di bidang kebudayaan, khususnya untuk sektor kebahasaan, berlangsung secara efektif dan efisien, dan (2) kompetensi warga masyarakat dalam bidang kebahasaan dapat meningkatkan bertambahnya masukan berupa anasir kebahasaan untuk keperluan PPBI, misalnya untuk pembakuan bahasa, untuk pengembangan kosa kata baru, dan untuk apresiasi sastra.

Saran yang kiranya dapat disampaikan berkenaan dengan pemanfaatan lembaga kemasyarakatan pedesaan bagi PPBI ialah sebagai berikut.

Bahasa Indonesia perlu ditetapkan kedudukannya sebagai komponen yang dinyatakan secara eksplisit dalam Wawasan Nusantara.

Perlu ada usaha kreatif dengan jalan mengembangkan konsep yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bagi kepentingan PPBI sehingga mekanisme pemanfaatan lembaga kemasyarakatan pedesaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, misalnya, di tiap desa/kelurahan dimungkinkan pemberian bimbingan dan penyuluhan tentang pemakaian bahasa Indonesia baku bagi kepentingan komunikasi resmi dan tentang penggunaan kata/istilah untuk ilmu dan teknologi di segala bidang secara praktis.

## DAFTAR PUSTAKA

- , *Pengkajian Bahasa Repelita IV* (stensil). 1983. Jakarta: Ditjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moeliono, Anton, M. 1981, "Pemodernan Bahasa Indonesia". Dalam majalah *Analisis Kebudayaan* Tahun I Nomor 3. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anwar, S. Dil. ed., 1972. *The Ecology of Language*. California: Stanford University Press.
- Fishman, Joshua A. ed., 1972. *Language Planning Processes*. The Hague: Mouton Publishers.
- , *Garis-Garis Besar Haluan Negara* (Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983). Jakarta: Departemen Penerangan.
- Halim, Amran. 1979. *Pembinaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

## **MEMANTAPKAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

I Gusti Ngurah Oka  
A. Syukur Ghazali  
PPBS—IKIP Malang

### **Pendahuluan**

Sejak berdirinya negara kita, Negara Republik Indonesia, bahasa Indonesia (BI) telah memiliki kedudukan dan fungsi sebagai sarana pendidikan dan pengajaran. Kedudukan dan fungsi ini akan tetap kita pertahankan di masa-masa yang akan datang selama kita bertekad menghayati keluhuran makna Sumpah Pemuda 1928 dan Bab XV, Pasal 36, Undang-Undang Dasar 1945, yang diikuti dengan tekad mengamalkan jiwa dan semangatnya dengan panduan GBHN yang dituangkan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983. Kedua jenis tekad ini agaknya tidak perlu diragukan adanya pada segenap bangsa Indonesia, lebih-lebih lagi pada kalangan karyawan pembina BI, walaupun kadarnya berbeda-beda. Namun, terlepas dari keragaman tingkat kadar kedua jenis tekad tersebut di atas, agaknya tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa seluruh bangsa Indonesia akan menyepakati BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu kedudukan dan fungsinya.

Kedudukan dan fungsi BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran dalam perjalanannya sampai dengan sekarang relatif telah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang cukup memadai. Penggunaan BI (1) sebagai bahasa pengantar pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, (2) sebagai

bahasa paham dalam keseluruhan proses kegiatan belajar, dan (3) sebagai bahasa pengungkap perkembangan diri hasil pendidikan adalah tiga kenyataan penting dari banyak kenyataan tentang kedudukan dan fungsi BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran. Dalam ketiga kenyataan ini, BI telah menampilkan diri serta memainkan peranannya sebagai sarana pendidikan dan pengajaran dengan kemampuan yang relatif cukup memadai. Walaupun demikian, harus diakui pula bahwa masih banyak pula kekurangan dan kelemahannya, lebih-lebih lagi kalau dibandingkan dengan bahasa yang sudah mantap kedudukan dan fungsinya sebagai sarana pendidikan dan pengajaran, seperti halnya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Rusia, dan bahasa-bahasa lain yang telah terbina dengan baik. Masih dipergunakannya bahasa daerah sebagai sarana pengantar di kelas-kelas permulaan pada lembaga pendidikan daerah di luar kota, kurang baiknya kebanyakan kemampuan siswa menggunakan BI sebagai bahasa paham dalam menyimak dan membaca, dan belum berhasilnya kebanyakan siswa menggunakan BI yang baik dan benar sebagai bahasa pengungkap adalah beberapa kenyataan yang secara langsung menandai bahwa kedudukan dan fungsi BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran belum mantap keadaannya. Berhadapan dengan kenyataan yang demikian ini, di hadapan kita terbentang suatu tantangan untuk mengembangkan usaha dan upaya yang tepat guna dan berdaya guna memantapkan kedudukan dan fungsi BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran. Masalahnya sekarang, apakah yang patut kita lakukan? Beberapa pokok pikiran yang diperkirakan mampu menjawab masalah inilah yang disajikan dalam bagian-bagian uraian selanjutnya.

### **Pola Kebijakan Nasional Pemantapan Kedudukan dan Fungsi BI sebagai Sarana Pendidikan dan Pengajaran**

Seminar Politik Bahasa Nasional yang berlangsung di Jakarta dari tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1975 telah berhasil merumuskan sebuah kebijaksanaan nasional untuk menangani keseluruhan jaringan masalah kebahasaan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara kita. Kebijakan nasional ini lebih dikenal dengan nama Politik Bahasa Nasional. Pengertian dasarnya dirumuskan sebagai berikut.

Politik bahasa nasional ialah kebijaksanaan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan. Masalah kebahasaan di Indonesia merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah pemakaian dan pemanfaatan bahasa-bahasa asing tertentu di Indonesia. Pengolahan keseluruhan masalah bahasa ini memerlukan adanya satu kebijaksanaan nasional

yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pengolahan masalah bahasa ini benar-benar berencana, terarah, dan menyeluruh. (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1975:34).

Berlandaskan pengertian dasar tentang Politik Bahasa Nasional seperti ter kutip di atas, khusus mengenai BI dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, fungsinya adalah sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, (4) alat perhubungan antar budaya antar daerah, (5) bahasa resmi kenegaraan, (6) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, (7) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan (8) bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Seminar Politik Bahasa Nasional telah merumuskan pula kebijakan pembinaan dan pengembangan BI. Di dalam kebijakan ini digariskan macam-macam usaha dan kegiatan untuk memelihara dan mengembangkan BI dan pengajarannya sehingga BI dapat mempertahankan kedudukannya serta memenuhi fungsinya seperti yang dipaparkan di muka. Termasuk ke dalam usaha dan kegiatan yang digariskan adalah (1) usaha pembakuan BI dengan tujuan agar tercapai pemakaian BI yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasi, dan (2) usaha pengembangan pengajaran BI agar penutur BI memiliki keterampilan yang baik dalam menggunakan BI sebagai alat komunikasi, pengetahuan yang sah tentang BI, dan sikap positif terhadap BI (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1975:6-9).

Pengertian dasar serta pokok pikiran tentang pembinaan dan pengembangan BI hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 tampaknya disepakati oleh pemerintah. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertugas menangani masalah kebahasaan di negara kita telah banyak sekali melaksanakan pembinaan dan pengembangan BI dengan acuan Keputusan Seminar Politik Bahasa Nasional 1975. Hasil-hasil yang dicapainya pun cukup baik. Termasuk ke dalamnya antara lain (1) penetapan kaidah yang berupa aturan dan pegangan yang tepat di bidang ejaan, kosa kata, tata bahasa, dan peristilahan, (2) beberapa pembakuan lafal sebagai pegangan bagi para guru, penyiar televisi dan radio, serta masyarakat umum, (3) kodifikasi BI menurut situasi pemakai dan pemakaiannya, (4) kodifikasi BI menurut strukturnya, (5) sarana pembakuan, seperti pedoman umum ejaan dan pedoman pembentukan istilah, (6) kerja sama dengan berbagai pihak dalam membakukan BI, dan (7) beberapa usaha peningkatan mutu pengajaran BI.

Hasil yang selama ini telah dicapai dalam pelaksanaan dan pengembangan BI pada dasarnya telah diambil alih oleh karyawan pembina pendidikan

dan pengajaran di negara kita. Hasil ini dimanfaatkannya untuk memantapkan kedudukan dan fungsi BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran, baik sebagai bahasa pengantar pendidikan maupun sebagai bahasa pemaham dan pengungkap pengalaman dan hasil proses belajar. Dalam pemanfaatannya, ada semacam kecenderungan beranekaragamnya cara yang ditempuhnya. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang membuat kekeliruan. Gejala yang terakhir ini misalnya dapat diamati pada (1) adanya sementara anggapan bahwa bahasa daerah merupakan lawan atau "musuh" BI, atau setidaknya tidaknya mempertentangkan BI dengan bahasa daerah, (2) usaha menekankan atau membesarkan pengaruh buruk dari bahasa daerah tertentu, (3) usaha secara berlebihan memasukkan kata dan istilah bahasa daerah tertentu ke dalam BI dengan menggeser kata/istilah BI yang sudah ada, (4) kecenderungan "mendewa-dewakan" bahasa asing tertentu sebagai sumber untuk memperkaya kosa kata BI, dan (5) kecenderungan menampilkan bentukan-bentukan kata, istilah, dan ungkapan-ungkapan dengan analogi membuta. Terjadinya gejala kurang baik demikian ini disebabkan oleh berbagai faktor. Selera perseorangan, minat dan perhatian yang memusat ke satu arah saja, dominasi kelompok etnis tertentu, dan kedangkalan pemahaman adalah beberapa faktor penyebabnya. Jika ditelusur lebih jauh lagi, penyebab utamanya ialah kenyataan belum adanya pola kebijaksanaan nasional pemantapan kedudukan dan fungsi BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran. Hadirnya pola kebijakan nasional kebahasaan tersebut amat diperlukan dalam menangani masalah kebahasaan yang timbul, memperbaiki ketetapan yang tidak tepat dan kurang memuaskan, dan mampu mengadaptasikan bahasa nasional kita kepada keperluan budaya dan sosial baru sehingga pemakainya dapat menggunakan secara bertepatan guna dan berhasil guna.

Pola kebijakan nasional kebahasaan yang diinginkan adalah pola:

- (a) yang dapat menangani masalah kebahasaan yang timbul secara terancang, terarah, menyeluruh, dan bersifat semesta;
- (b) yang mendorong ke arah terciptanya bahasa yang ideal (Tauli dalam Fishman, 1974:59–60), yang mempunyai ciri:
  - (1) mampu menjalankan tugas sebagai alat komunikasi secara efektif dan efisien, artinya mampu menyampaikan informasi dengan tepat dan juga berbagai konotasi makna;
  - (2) ekonomis sehingga memberikan kemudahan bagi penutur dan pendengarnya;
  - (3) mempunyai bentuk estetis;
  - (4) mempunyai keluwesan sehingga dapat dipergunakan untuk mengekspresikan makna-makna baru;

- (c) yang memiliki kejelasan tujuan, prinsip, metode dan taktik yang cukup mampu menyikapi dan menangani masalah-masalah kebahasaan.

Pola kebijakan nasional semacam inilah yang perlu segera disusun dan kemudian dimasyarakatkan.

Pembinaan dan pengembangan bahasa nasional yang bertujuan memantapkan kedudukan dan fungsi BI dapat dilakukan melalui beberapa jalur. Garvin (dalam Rubin dan Shuy, 1973:103) menyebutkan ada tiga jalur, yakni (1) melalui kerja linguistik teoritis, (2) kegiatan kesastraan, dan (3) pendidikan bahasa di sekolah. Di antara ketiga jalur yang disebutkan di atas, jalur pendidikan bahasa melalui lembaga pendidikan dianggap sebagai saluran yang amat strategis untuk mewujudkan pembinaan dan pengembangan bahasa nasional yang bertujuan untuk memantapkan kedudukan dan fungsi BI. Demikian pentingnya lembaga pendidikan untuk tugas tersebut sehingga Bonifacio P. Sibayan (dalam Fishman, 1974:228) dalam tulisannya tentang kebijakan nasional kebahasaan di Filipina mengatakan bahwa *"The main agency for setting patterns of language use in Philippines is the school. This is probably true in most parts of the world so that schools became very important"*.

Sehubungan dengan penyusunan pola kebijakan nasional kebahasaan yang bertujuan memantapkan kedudukan dan fungsi BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran perlu terlebih dahulu dilakukan beberapa hal yang disarankan oleh Bright (1966:14-15), yaitu:

- (1) memerikan dengan jelas dan lengkap pengenalan atau penanda (indikator) bahasa resmi dan bahasa nasional;
- (2) menegaskan varietas bahasa yang sesuai dipakai di lembaga pendidikan yang bertingkat-tingkat;
- (3) menetapkan sikap yang harus diambil terhadap bahasa resmi dan bahasa nasional yang diharuskan dipakai, begitu juga sikap terhadap varietas bahasa yang tidak disarankan dipakai. Penetapan sikap ini penting untuk mewujudkan tercapainya sikap positif terhadap bahasa resmi dan bahasa nasional;
- (4) menetapkan pola dukungan warga di luar sekolah terhadap perlu adanya varietas bahasa khusus dunia pendidikan; dan
- (5) merencanakan pola atau sistem penulisan yang hendak dikembangkan atau dibakukan.

Di samping beberapa hal yang telah disampaikan di atas, yang juga perlu diperhatikan dalam penyusunan pola kebijakan nasional kebahasaan, khususnya yang akak diberlakukan di lembaga pendidikan adalah bahwa pola kebijakan itu akan melibatkan sejumlah sikap, kreativitas, kehendak, impian, harapan, dan wawasan orang banyak. Oleh karena itu, ada baiknya jika suara-

suara dan kemauan orang banyak itu dipertimbangkan pula di dalam penyusunan pola kebijakan nasional kebahasaan, khususnya pola kebijakan nasional yang kemudian hendak diterapkan di lembaga pendidikan untuk memantapkan kedudukan dan fungsi BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran.

### Beberapa Tindakan Taktis

Pola kebijakan nasional pemantapan kedudukan dan fungsi BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran seperti yang dimaksudkan di muka pada dasarnya adalah sebuah strategi yang menggariskan serta memandu kita mengembangkan serta melaksanakan tindakan yang mendasar sifatnya dalam memantapkan kedudukan dan fungsi BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran. Sebagai sebuah strategi, tentunya kita harapkan ketentuan-ketentuannya tidak mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang kurang baik. Jika di dalamnya terdapat kesalahan, maka akibat buruknya bukan hanya kita yang mengalaminya. Generasi di belakang kita akan mewarisi hal-hal yang kurang baik dalam keadaan yang jauh lebih parah. Untuk memperbaikinya, dibutuhkan waktu yang sangat panjang dan tenaga serta dana yang berlipat-lipat. Beban tugas kita bukan sekedar membetulkan hal-hal yang salah dalam pola kebijakan itu, atautkah menggantinya dengan pola kebijakan yang baru. Lebih daripada itu, kita harus melaksanakan "program pemutihan" untuk membersihkan pengaruh buruk yang sudah kandung berkembang di satu pihak, dan melaksanakan pola kebijakan baru yang telah diperbaiki atau diganti di pihak lain. Oleh karena itu, kurang pada tempatnyalah kalau kita mengharapkan hadirnya pola kebijakan nasional pemantapan kedudukan dan fungsi BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran itu dalam waktu yang singkat. Lebih tepat kalau kita berikan waktu yang patut kepada perancang untuk menghasilkan sebuah pola kebijakan nasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sambil menunggu kehadiran pola kebijakan nasional yang mapan, ada beberapa tindakan taktis yang dapat segera kita laksanakan untuk memantapkan kedudukan dan fungsi BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran. Termasuk ke dalamnya adalah jenis-jenis tindakan yang disarankan berikut.

#### a. *Memantapkan BI sebagai Bahasa Pengantar Pendidikan*

Bahasa memiliki fungsi umum utama, seperti dikemukakan oleh Joyce O. Hertzler yang dikutip oleh Valter Tauli (dalam Fishman, 1974:49), yaitu, sebagai alat identifikasi, kategorisasi, persepsi, berpikir, kegiatan kreatif, teknologi, mengingat-ingat, dan menyampaikan, menumbuhkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam batas ruang dan waktu, meraba-raba sesuatu yang abstrak dan supernatural, serta sebagai instrumen dasar tingkah-laku sosial.

Untuk memenuhi fungsinya sebagai bahasa pengantar, BI dipergunakan untuk mengembangkan suatu keterampilan performansi tertentu dalam diri subjek didik. Keterampilan performansi yang diharapkan adalah mampu menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi yang dikemukakan Hertzler di atas.

Sebagai bahasa pengantar pendidikan, BI digunakan oleh (1) tenaga kependidikan (guru dan dosen) dalam melaksanakan dharma pendidikan dan pengajaran di lapangan, misalnya, menyajikan pelajaran, memandu kegiatan belajar, dan mengukur hasil belajar, dan (2) oleh karyawan pengada bahan pelajaran yang dikenal sebagai penulis buku pelajaran, serta (3) oleh pejabat administratif pemerintah dalam menyampaikan sejumlah kebijakan dan kebijaksanaan pendidikan. Dalam kenyataan pemakaian BI, masih kita dapati belum dipergunakannya BI yang baik dan benar sebagai pengantar pendidikan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, terutama pada lembaga pendidikan tingkat dasar di kelas-kelas permulaan, khususnya di daerah yang jauh dari kota.

Dalam rangka usaha mewujudkan pematapan kedudukan dan fungsi BI sebagai bahasa pengantar pendidikan, disarankan dilakukan sejumlah tindakan taktis yang diperkirakan dapat menyelesaikan persoalan di atas, meskipun dalam kurun waktu yang relatif lama. Adapun tindakan taktis yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.

- (1) Merintis strategi pengajaran yang lebih banyak menekankan terbentuknya keterampilan berbahasa pada kelas-kelas permulaan pendidikan tingkat dasar, dan secara berangsur-angsur disajikan pengetahuan kebahasaan. Belajar dari pengalaman pengajaran bahasa di negara-negara Arab (Salih J. Al-Toma, dalam Fishman, 1974:291), pada tiga tahun pertama tingkat dasar diberikan kemampuan bercakap-cakap, memo-risasi (resitasi), imlak (dikte), membaca, mengarang, dan tata bahasa.
- (2) Merintis dihasilkannya tata bahasa pedagogik yang diharapkan membantu anak didik menguasai kaidah-kaidah bahasa, dan yang terutama adalah menerapkan kaidah bahasa tersebut untuk memahami dan mengungkapkan suatu uraian baik lisan maupun tulisan. Penulisan tata bahasa pedagogik yang baik tidak mempercayakan penulisannya kepada inspirasi seorang penulis saja, melainkan sebaiknya menggunakan lebih dari satu acuan.
- (3) Mewajibkan tenaga kependidikan dan para penulis buku pelajaran untuk menggunakan BI yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar pendidikan. Ketetapan ini sebaiknya diwujudkan melalui semacam instruksi yang pelaksanaannya diawasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- (4) Menetapkan kemampuan menggunakan BI yang baik dan benar sebagai persyaratan: (a) penerimaan tenaga kependidikan, (b) kenaikan pangkat, (3) penunjukan jabatan, (d) penerimaan penghargaan, misalnya pengangkatan sebagai guru teladan, (e) penugasan belajar kembali dalam usaha peningkatan kemampuan melalui *in-service training*, misalnya, pengiriman ke luar negeri, dan (f) pengangkatan sebagai penulis buku pelajaran, serta (g) pengesahan buku pelajaran bahasa yang ditulis oleh seorang penulis
- (5) Menugasi jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia pada semua IKIP dan FKG di seluruh Indonesia untuk melaksanakan dharma pendidikan tinggi yang ke tiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat, dengan jalan melaksanakan penataran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya penggunaan BI sebagai bahasa pengantar pendidikan.
- (6) Memanfaatkan media massa seperti film, TV, radio, dan surat kabar, khususnya dalam siaran atau rubrik pembinaan BI agar menampilkan model BI yang baik dan benar.
- (7) Menjadikan proses pengangkatan tenaga pendidikan dari suatu daerah ke daerah lain sebagai suatu upaya peningkatan kuantitas penggunaan BI yang baik dan benar, baik oleh tenaga kependidikan itu sendiri maupun oleh subjek didik. Pengalaman ini dipetik dari keberhasilan Propinsi Timor Timur yang dalam waktu relatif singkat telah berhasil menyebarkan pemakaian BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran. Salah satu penunjang keberhasilan pemantapan kedudukan dan fungsi BI sebagai sarana pendidikan dan pengajaran di sana adalah berkat diangkatnya guru, khususnya guru BI, dari luar daerah (hasil penelitian Basennang Saliwangi dkk., 1983).

*b. Memantapkan BI sebagai Bahasa Pemaham dan Pengungkap Pendidikan*

Sebagai bahasa pemaham, BI dipergunakan oleh siswa/mahasiswa untuk memahami sebuah paparan pendidikan melalui kegiatan menyimak dan membaca. Sebagai bahasa pengungkap, mereka menggunakan BI untuk mengungkapkan pengalaman dan hasil belajarnya melalui kegiatan berbicara dan menulis. Baik dalam kegiatan yang pertama maupun yang kedua, khususnya kegiatan yang kedua, banyak kita lihat kekurangmampuan siswa/mahasiswa dalam menggunakan BI yang baik dan benar. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa siswa/mahasiswa belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menangkap paparan lisan dan tulis, begitu pula kemampuan mengungkapkan pengalaman dan hasil belajarnya dengan BI yang baik dan benar.

Tentunya kondisi yang kurang menggembirakan itu tak dapat kita biarkan begitu saja. Perlu dicari dan dicoba sejumlah kemungkinan untuk meningkatkan kemampuan siswa/mahasiswa dalam mengungkapkan hasil belajar dan pengalaman mereka dengan BI yang baik dan benar.

Dalam makalah ini diajukan beberapa tindakan taktis yang dapat dicoba dimanfaatkan untuk menangani masalah di atas. Adapun tindakan taktis yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.

- (1) Mendayagunakan strategi pengajaran Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) sebab dengan strategi ini akan lebih banyaklah kesempatan siswa/mahasiswa berlatih mengungkapkan hasil belajar dan pengalamannya melalui BI yang baik dan benar. Melalui pendayagunaan strategi ini guru dapat berperan sebagai fasilitator dan motivator, dan juga bisa mewujudkan saran Corder (1977:346) yakni *Teacher as 'pedagogical grammar*.
- (2) Lebih memvariasikan metode dan teknik mengajar, misalnya mengembangkan bahan pelajaran yang disusun khusus dengan menggunakan sistem penahapan 'terbimbing dan terkontrol' (*guided* dan *controlled*) sehingga kemampuan mengungkapkan pengalaman dan hasil belajar dapat dirancang secara bertahap.
- (3) Mengembangkan "model" BI yang baik dan benar untuk kemudian dimasyarakatkan.
- (4) Merancang secara tepat-cermat semacam cerdas-cermat, tetapi penilaiannya ditekankan pada penggunaan BI yang baik dan benar sebagai media pengungkap pikiran.
- (5) Menjadikan kemampuan mengungkapkan pikiran dengan BI yang baik dan benar sebagai kriteria penentuan mahasiswa teladan atau siswa teladan.
- (6) Mengembangkan secara "saling-silang" pada siaran TVRI dengan menambahkan kriteria kemampuan mengungkapkan pendapat dengan BI yang baik dan benar sebagai salah satu pertimbangan.
- (7) Menjadikan penggunaan BI yang baik dan benar sebagai kriteria pemuatan artikel di media massa.
- (8) Merangsang muncul karya budaya yang ditulis dalam BI yang baik dan benar, seperti penulisan karya ilmiah remaja, hendaknya juga menjadikan pemakaian BI yang baik dan benar sebagai bahan pertimbangan.

## Penutup

Di depan telah disebutkan bahwa pola kebijaksanaan nasional kebahasaan ini menyangkut hajat orang banyak. Oleh karena itu, pada akhir makalah ini perlu kita simak dan dalam sejumlah pertanyaan yang tertuju pada kita semua. Pertanyaan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- (1) Apakah kita mempunyai niat yang mantap dan tekad yang mapan untuk menyusun pola kebijakan nasional kebahasaan agar masalah kebahasaan yang muncul tidak semakin parah?
- (2) Adakah rancangan dan program yang bertujuan menghasilkan pola kebijakan nasional kebahasaan?
- (3) Tersediakah tenaga yang berkemampuan menciptakan pola kebijakan nasional itu?
- (4) Sudahkah faktor penunjang, pelancar, dan pengaman kita pikirkan agar terbentuknya pola kebijakan nasional itu bisa tercapai?

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, S. Takdir. 1976. "Politik Bahasa Nasional dan Pengembangan Bahasa Nasional". Dalam Halim, Amran. 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Basennang Saliwangi, dkk. 1983. *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Timor Timur*. Malang: Proyek Penelitian Bahasa Indonesia dan Daerah Jawa Timur.
- Burhan, Jazir. 1976. "Politik Bahasa Nasional dan Pengajaran Bahasa". Dalam Amran Halim (ed.) *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Corder, S. Pit. 1977. *Introducing Applied Linguistics*. Middlesex: Penguin Books.
- Fishman, Joshua A. (ed.) 1974. *Advances in Language Planning*. The Hague: Mouton.
- Gorman, T.P. 1973. "Language Allocation and Language Planning in a Developing Nation". Dalam Rubin, Joan dan Roger Shuy. 1973. *Language Planning: Current Issues and Research*. Washington D.C.: Georgetown University School of Languages and Linguistics.
- Halim, Amran, Ed. 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Halim, Amran. 1976. *Fungsi Politik Bahasa Nasional*. Dalam Halim, Amran. Ed. 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Jernudd, Bjorn H. 1973. "Language Planning as a type of Language Treatment". Dalam Rubin, Joan dan Roger Shuy, Ed. 1973. *Language Planning: Current Issues and Research*. Washington D.C.: Georgetown University Press.

- Neustupny, J.V. 1974. "Basic Types of Treatment of Language Planning". Dalam Fishman, J.A. Ed. 1974. *Advances in Language Planning*. The Hague: Mouton.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1975. *Hasil Rumusan Seminar Politik Bahasa Nasional*. Jakarta.
- Rubin, Joan dan Roger Shuy. 1973. *Language Planning: Current Issues and Research*. Washington D.C.: Georgetown University School of Linguistics and Language.
- Tauli, Valter. 1974. The Theory of Language Planning. Dalam Fishman, J.A. 1974. *Advances in Language Planning*. The Hague: Mouton.

## **UPAYA MEMANTAPKAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DI PERGURUAN TINGGI**

**Kunardi Hardjoprawiro**

Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret

### **Pengantar**

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia (Halim, 1979:53). Di dalam fungsinya sebagai bahasa pengantar, tentunya dituntut pemakaiannya secara mantap. Dengan demikian, di perguruan tinggi setiap dosen pun dituntut agar mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini perlu disadari oleh setiap dosen, baik dosen Bahasa Indonesia maupun dosen non-Bahasa Indonesia karena bagaimanapun mereka merupakan model pemakaian bahasa Indonesia, baik di ruang kuliah maupun di luar ruang kuliah.

Kertas kerja ini membahas sampai di mana bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi. Sehubungan dengan itu, perlu lah dicari jawaban atas pertanyaan berikut ini.

1. Sudahkah setiap dosen menggunakan bahasa Indonesia?
2. Sudahkah bahasa Indonesia digunakan secara mantap?
3. Apakah yang menjadi hambatan dalam penggunaannya?
4. Upaya apakah yang dapat ditempuh untuk memantapkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar?

Dasar pembahasan ialah hasil pengamatan saya pada penyajian kuliah di beberapa fakultas di Universitas Sebelas Maret (UNS).

### Penggunaan Bahasa Indonesia di Lingkungan Kampus

Junus (1965:139) dalam penelitiannya tentang penggunaan bahasa Indonesia oleh murid SLTP dan SLTA di Malang menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia hanya digunakan pada waktu jam-jam duduk di kelas. Hal itu pun hanya dilakukan secara pasif. Di luar pelajaran mereka menggunakan bahasa setempat, yakni bahasa Jawa, yang membuktikan betapa kuatnya pemakaian bahasa Jawa pada waktu itu.

Sampai saat ini keadaannya masih serupa. Di lingkungan sekolah di kotamadya Surakarta pun bahasa Indonesia hanyalah merupakan bahasa pengantar pelajaran di kelas. Di luar kelas murid dan bahkan guru dengan asyiknya menggunakan bahasa Jawa. Lucunya, ketika di kelas berapi-api mengajar dengan menggunakan bahasa Indonesia, di luar kelas guru dengan mudahnya beralih menggunakan bahasa Jawa. Di kantor dan ruang guru yang terdengar adalah pemakaian bahasa Jawa.

Di daerah Surakarta keadaan demikian merupakan hal yang wajar. Di samping kuatnya penggunaan bahasa Jawa juga disebabkan oleh belum adanya kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam suasana resmi. Kesadaran dirilah yang dapat menuntun seseorang untuk selalu menggunakan bahasa nasional dalam suasana demikian. Di dalam masyarakat yang heterogen, tempat bertemu berbagai suku, penggunaan bahasa Indonesia mutlak tidak boleh tidak. Tetapi, di dalam masyarakat Surakarta yang homogen ini bahasa Jawa tetap memegang peranan penting. Orang-orang non-Jawa pun rupanya tersedot untuk berupaya menggunakan bahasa daerah ini.

Di UNS keadaannya juga tidak berbeda, bahasa Indonesia memang digunakan sebagai bahasa pengantar kuliah, tetapi di luar ruang kuliah bahasa Jawalah yang dipakai, baik oleh mahasiswa maupun dosen. Kalaupun digunakan bahasa Indonesia, yang muncul adalah bahasa "gado-gado".

Bahasa gado-gado sering pula digunakan dalam perkuliahan. Dengan kenyataan ini ada kesan dosen memakai bahasa Indonesia secara santai. Pengaruh bahasa Jawa seperti tampak pada lafal dan pemakaian kosakata sering terdapat dalam bahasa dosen waktu menyajikan bahan kuliahnya.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sudah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam perkuliahan tetapi kualitas penggunaannya kiranya perlu mendapatkan perhatian. Pasal-pasal berikut ini akan membicarakan bagaimana seharusnya bahasa dosen, bagaimana upaya untuk memantapkannya, dan hambatan-hambatan apa yang dijumpai dalam pemantapan itu.

### Dosen Bahasa Indonesia dan Dosen Non-Bahasa Indonesia

Perbedaan dosen Bahasa Indonesia dan dosen non-Bahasa Indonesia

terletak pada penggunaan bahasa Indonesia. Dosen Bahasa Indonesia mampu menggunakan bahasa itu dengan baik dan benar. Di mana saja, baik di ruang kuliah maupun di luar ruang kuliah ia mampu menjalankan tugas dan peranannya sebagai model pemakaian bahasa Indonesia. Karena kemampuannya ini, ia selalu siap menjadi tempat bertanya.

Di dalam suasana resmi dosen Bahasa Indonesia dituntut untuk selalu berbahasa Indonesia secara tertib, baik dalam pemakaian bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Kalimatnya harus gramatikal dan tidak boleh memunculkan kontaminasi. Ia pun harus menghindari pemakaian lafal bahasa daerahnya. Lafal bahasa Jawa dalam kata-kata seperti: *(m)Bandung*, *(n)Demak*, dan *(m)Bali* tentulah tidak boleh ditampilkan oleh dosen Bahasa Indonesia. Demikian juga pemakaian unsur-unsur bahasa Jawa seperti *lo*, *kok*, *la*, dan *to* dalam kalimat

1. *Lo*, saya *kok* ndak dibilangi, *to*?
2. *La*, saya nggak ngerti *kok*.

Kalimat kontaminasi seperti:

1. Bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk.
2. Untuk yang bersalah akan dituntut di muka hakim.
3. Untuk mengatasi hal itu adalah dengan jalan penghijauan.
4. Kepada anak-anak supaya berkumpul di muka kelas.

juga tidak boleh digunakan. Dosen Bahasa Indonesia tidak hanya menghindari penggunaan lafal dan unsur kedaerahan serta kontaminasi, melainkan harus dapat pula menemukan kesalahan seperti itu dalam pemakaian bahasa orang lain dan harus dapat pula menjelaskan mengapa salah dan sekaligus dapat memperbaikinya.

Dosen non-Bahasa Indonesia kebanyakan tidak memperhatikan hal-hal di atas. Kebanyakan mereka sudah merasa puas apabila mahasiswanya dapat memahami apa yang dikuliahkannya. Mereka lebih banyak berbahasa asal dapat dimengerti. Mereka tidak mempersoalkan apakah bahasanya sudah baku atau belum. Mereka lebih banyak berbahasa seadanya.

Keseadaannya tampak pula dalam pemakaian ejaan pada tulisan di papan tulis atau pada diktat-diktatnya. Penyimpangan yang dilakukannya dalam penerapan EYD berkisar pada kecenderungan untuk

- (a) mengacaukan di dan ke sebagai awalan dan sebagai kata depan,
- (b) selalu memisahkan pun dengan kata di depannya,
- (c) meniadakan tanda hubung (-) pada perulangan kata,
- (d) menggunakan tanda angka dua (2) dalam perulangan,
- (e) memisahkan suku kata semanya,
- (f) selalu menggunakan tanda titik pada singkatak kata,
- (g) menuliskan singkatan kata semanya,

dan masih banyak lagi kesalahan yang mestinya tidak perlu terjadi kalau orang mau mempelajari buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*.

Dosen IPA dan Matematika masih sering pula melafalkan *c*, *j*, dan *y* menurut lafal lama (Ejaan Soewandi) sehingga sering terdengar ucapan: segitiga *ABC* [abese], sepuluh *cc* [sese], dan garis *y* [Ëi]. Ucapan [abese], [cece], dan [ye] rupanya masih asing dan dianggap lucu oleh mereka.

Dapat dikatakan bahwa mereka melakukan kesalahan itu tanpa menyadari kesalahannya. Sebagai sarana komunikasi belajar-mengajar bahasa Indonesia digunakan semata-mata asal dapat dimengerti. Mereka tidak peduli bahasanya memenuhi ketentuan kaidah atau tidak. Yang penting mahasiswa dapat memahami keterangannya.

Kedua ini tentu saja berpengaruh besar kepada mahasiswanya dalam pemakaian bahasa Indonesia. Kebiasaan yang keliru itu akan ditiru oleh mahasiswanya. Yang jelas tampak ialah pemakaian bahasa gado-gado yang dibiarkan hidup subur di ruang-ruang kuliah. Malahan pemakaian bahasa demikian rupanya sering menyegarkan suasana.

Kedua berbahasa seperti ini berlangsung terus dan berlarut-larut tanpa ada kontrol apalagi perbaikan. Sanksi memang tidak ada karena tidak ada peraturan dalam perkuliahan yang khusus mengatur pemakaian bahasa pengantar. Dorongan untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar tidak ada baik pada diri dosen maupun pada diri mahasiswa. Mahasiswa baru berusaha berbahasa secara tertib kalau sedang mengikuti kuliah Bahasa Indonesia, demikian pengakuan salah seorang teman dosen pemberi kuliah Bahasa Indonesia. Itu pun hanya terjadi di fakultas yang memprogramkan mata kuliah Bahasa Indonesia.

Di UNS hanya beberapa fakultas yang mencantumkan mata kuliah Bahasa Indonesia dalam program studi mahasiswa. FKIP dan fakultas sastra memprogramkan mata kuliah ini dalam dua semester, sedangkan fakultas teknik, fakultas ekonomi, dan fisipol memprogramkan dalam satu semester. Sementara itu, tiga fakultas lainnya ternyata tidak memprogramkan mata kuliah Bahasa Indonesia. Malahan ada sebuah fakultas yang dekannya menyatakan tegas (1981) bahwa fakultasnya tidak membutuhkan pelajaran Bahasa Indonesia bagi mahasiswanya karena di samping tidak ada waktu menurut anggapannya mahasiswanya sudah mampu berbahasa Indonesia.

Pihak yang menolak hadirnya mata kuliah Bahasa Indonesia di fakultasnya ini boleh jadi tidak menyadari bahwa belajar bahasa Indonesia tidak hanya sekadar untuk dapat berbahasa Indonesia, melainkan untuk dapat memakainya sebagai sarana berpikir ilmiah. Penalaran yang baik hanya dapat dimiliki dan dilakukan oleh mereka yang bahasanya bagus baik lisan maupun tulis. Di dalam diskusi ilmiah hanya mereka yang berani tampil dan berbekal-

kan bahasa yang bagus yang mampu tampil di mimbar pembicaraan. Demikian juga di dalam seminar hanya mereka yang cakap menulis atau mampu merumuskan gagasannya secara tertulis yang berhasil maju sebagai referator:

Perlu diingat pula bahwa mampu tidaknya mahasiswa menyesuaikan dirinya dengan pendidikan tinggi, antara lain juga disebabkan oleh penggunaan bahasa. Oleh karena itu, saya setuju sekali kalau komposisi Bahasa Indonesia menjadi salah satu mata ujian pada ujian saringan masuk perguruan tinggi seperti yang diusulkan oleh Nasoetion (Sinar Harapan, 11 Juli 1983:VI). Berkomposisi atau menengarang pada dasarnya praktik berpikir logis dan sistematis. Penentuak topik, penjabarannya menjadi ide pokok, dan pengembangannya masing-masing menjadi paragraf pada dasarnya adalah melakukan penalaran secara tertulis dengan menggunakan bahasa sebagai sarannya.

Apabila di antara dosen masih ada pikiran bahwa bahasa Indonesia hanya merupakan sarana komunikasi biasa dan tidak ada kaitannya dengan berpikir dan bernalar ilmiah, maka di samping mereka sudah merasa puas dengan berbahasa asal dapat dimengerti mereka tidak memahami fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi ilmiah baik secara lisan maupun secara tertulis. Apabila dosen berpikir demikian, mereka tidak akan pernah berhasil menuangkan gagasannya dalam karya ilmiah sebab karya ilmiah menuntut pengungkapan secara *jelas, tegas, dan lengkap*. Apabila orang belum menguasai bahasa baku, maka ketidakjelasan, ketidaktegasan, dan ketidaklengkapan itu akan tampak pada kalimatnya yang cenderung bermakna ganda, bertele-tele, dan kekurangan unsur (subjek atau predikat).

## Upaya Memantapkan Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar dan Hambatannya

### a. Upaya

Pemakaian bahasa Indonesia seadanya atau asal dapat dimengerti disebabkan oleh tiadanya kemauan untuk menjadikan diri pemakai bahasa yang baik dan benar. Seandainya ada rangsangan untuk ini, misalnya penguasaan bahasa Indonesia dijadikan salah satu faktor yang menentukan di dalam pengembangan ketenagaan seperti kenaikan pangkat (Halim, 1979:53), pasti ada upaya setiap dosen untuk menatar diri atau mengikuti penataran agar dirinya mampu berbahasa Indonesia. Syukurlah, di dalam ujian dinas untuk kenaikan golongan, yakni dari golongan I ke golongan II dan seterusnya sampai ke golongan IV, Bahasa Indonesia sudah diujikan. Sekalipun belum semua pegawai terlibat di dalamnya, ini sudah merupakan kemajuan. Diharapkan perkembangan selanjutnya untuk semua kenaikan pangkat—tidak hanya kenaikan pangkat golongan—penguasaan bahasa Indonesia merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Dengan demikian, selalu ada upaya untuk me-

mantapkan penggunaan bahasa Indonesia.

Menatar diri dapat dilakukan dengan mempelajari buku, seperti: *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, *Inilah Bahasa Indonesia yang Benar* (Jus Badudu), dan buku-buku dan brosur-brosur terbitan Pusat Bahasa. Buku-buku pedoman ejaan, pedoman istilah, dan kamus adalah teman dosen waktu mengerjakan karya tulis atau membuat persiapan-persiapan. Kesalahan ejaan, penulisan istilah, dan pemakaian kata-kata dalam karangan disebabkan oleh penulis karangan itu tidak mau menggunakan buku-buku itu. Apabila orang mau memanfaatkan buku-buku itu, niscaya ia akan terhindar dari kesalahan.

Di samping menatar diri dosen juga dapat mengikuti penataran/penyuluhan bahasa Indonesia seperti yang pernah diselenggarakan oleh UNS dari tanggal 29 September sampai dengan 2 Oktober 1982. Sayang, karena terbatasnya anggaran, setiap tahun hanya dapat diselenggarakan sekali dan itu pun setiap fakultas hanya dapat mengirimkan lima orang dosen. Kalau penataran semacam ini sering dilakukan, misalnya dua atau tiga kali setahun, kiranya kemampuan berbahasa Indonesia segenap dosen UNS akan dapat ditingkatkan.

Penataran menulis buku juga pernah diselenggarakan di UNS. Beberapa orang dosen yang sudah dapat mempersiapkan naskah diktat/bukunya diberi pengarahannya. Dari naskah itu dapat dilihat betapa belum dikuasanya ejaan, pengalimatan, dan pengalineaan oleh penulis. Hadirnya penyunting untuk membenahi naskah-naskah itu mutlak diperlukan. Namun, kalau kesalahannya cukup parah, tentunya yang bersangkutan harus dibawa dulu pada penguasaan bahasa Indonesia.

Seseorang yang berminat menghasilkan karya tulis baik berupa artikel, makalah, maupun buku tentunya tidak boleh cepat merasa bosan. Ia harus selalu berupaya memperbaiki bahasanya. Untuk mencapai kesempurnaan, ia harus selalu belajar. Kebosanan bagaimanapun merupakan tanda kegagalan.

Adapun kemampuan berbahasa yang perlu dibina dan ditingkatkan meliputi persoalan lafal, ejaan, tata kata dan istilah, tata kalimat, tata alinea, dan wacana. Di dalam upaya pemantapan demikian sedapat-dapatnya diusahakan agar pengaruh bahasa Jawa yang berlebih-lebihan (lafal dan *unggah-ungguh*) dihindarkan. Tujuan penyuluhan ialah agar tercapai kemantapan pemakaian bahasa Indonesia baik lisan maupun tulis dalam upaya untuk menggalakkan pemakaian bahasa itu sebagai bahasa pengantar, sarana berdiskusi, dan sarana berkarya ilmiah.

Di UNS sekarang sedang digalakkan penulisan modul untuk melengkapi sarana belajar mahasiswa agar lebih cepat dapat menyelesaikan studi dan meningkatkan prestasinya. Dalam hubungan ini, tentulah faktor bahasa Indonesia sangat berperan. Oleh karena itu, sangatlah ideal apabila penye-

lenggara penulisan modul tidak alpa membentuk tim penyunting untuk memperbaiki modul yang akan diterbitkan. Sebelum memulai tugasnya, para penulis hendaknya diberi pengarahan oleh tim penyunting tentang bagaimana menggunakan ragam bahasa ilmu. Bagaimanapun pengarahan ini akan memperjelas pekerjaan tim penyunting.

#### b. Hambatan

Penguasaan bahasa Indonesia oleh modulis, penulis karya ilmiah, dan dosen pada umumnya akan berpengaruh besar pada pelaksanaan tugasnya sebagai pengajar. Dosen akan lebih berhati-hati baik dalam pemakaian bahasa lisan maupun tulis. Mereka akan berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Dengan demikian kesaran akan perlunya berbahasa dengan baik dan benar akan terbangkitkan.

Membangkitkan kesadaran berbahasa dengan baik dan benar tentulah tidak mudah. Perjalanannya akan terbentur pada berbagai hambatan, yaitu (1) minat dosen, (2) tenaga penyuluh, (3) materi penyuluhan, dan (4) anggaran penyuluhan.

#### (1) *Minat Dosen*

Di dalam kehidupan kampus diharapkan setiap dosen memiliki daya kemampuan bersaing. Tambahan lagi, karena ilmu pengetahuan senantiasa berkembang maju, setiap dosen harus mampu mengajarkan. Penyesuaian diri dengan kemajuan dalam bidang ilmu sebagai disiplin yang dipegangnya menuntut mereka untuk (a) banyak membaca, (b) banyak berdiskusi, dan (c) banyak menulis.

Karena ketidakpuasannya dengan apa yang dimilikinya sekarang, setiap dosen hendaknya tertantang pula untuk dapat menciptakan hal-hal baru. Melalui membaca kreatif diharapkan pembaca dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan, wawasan, dan sikap baru yang berbeda dengan sebelumnya (Oka, 1976:7). Penemuan baru ini selanjutnya disampaikan kepada pihak lain dalam forum pengajaran di kelas, diskusi/seminar, atau karya ilmiah berupa artikel, makalah, atau buku. Semua ini memerlukan bahasa sebagai sarannya.

Apabila dosen tetap tinggal diam, tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu, maka siapa pun akan sulit membangkitkan minatnya untuk mengatasi kekurangannya. Penyuluhan bahasa Indonesia, menurut pendapatnya, tidak perlu karena di samping mahasiswanya sudah dapat memahami apa yang disajikannya ia pun sudah puas dengan apa yang dimilikinya sekarang.

Penyuluhan bahasa akan mendapat tempat subur di antara mereka yang berhasrat maju. Dalam hal ini, prakarsa tidak selalu datang dari penyuluh,

melainkan karena desakan kebutuhan, beberapa orang dosen justru mengundang penyuluh untuk menatar mereka dalam hal penggunaan bahasa baku.

### (2) *Tenaga Penyuluh*

Setiap dosen jurusan Sastra Indonesia diharapkan merupakan tenaga-tenaga yang berkemampuan tinggi dalam bidang penyuluhan bahasa ini. Mereka merupakan satu tim yang siap pakai dan siap bertugas kapan saja tenaganya diminta. Namun, berhubung dengan tugas pokoknya di fakultas dan tugas sampingannya kadang-kadang mereka menjumpai kesulitan menentukan pilihan antara melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan tugas-tugas penyuluhan. Keduanya sama pentingnya. Akhirnya penyuluhan dimenangkan karena tugas ini tidak setiap hari dilakukan.

Tim penyuluh dari Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra UNS dalam beberapa tahun belakangan ini melayani permintaan penyuluhan baik yang datang dari dalam maupun dari UNS, antara lain dari Pemda Kodya Surakarta, Pemda Kabupaten Sukoharjo, dan guru-guru Bahasa Indonesia se Kodya Surarkatas Untuk melaksanakan penyuluhan demikian tentu saja Jurusan harus pandai-pandai mengatur waktu. Waktu penyuluhan hendaknya tidak dijatuhkan justru pada masa-masa dosen harus memenuhi frekuensi perkuliahannya. Awal atau akhir semester kiranya ideal untuk melaksanakannya.

Hal lain yang perlu diperhatikan mengenai tenaga penyuluh ini ialah kemampuan penyuluh dalam menyajikan materi penyuluhan. Diharapkan penyuluh dapat menyajikan secara menarik dan sistematis. Bagaimanapun ini merupakan kunci sukses. Tanpa ada kunci ini kita akan sulit membangkitkan selera mereka.

### (3) *Materi Penyuluhan*

Penyuluhan bahasa Indonesia dalam rangka memantapkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pengajaran di perguruan tinggi, tentulah harus diberikan sepraktis-praktisnya. Masalah lafal dan ejaan kiranya merupakan masalah pertama yang perlu disajikan. Kebiasaan dosen melafalkan kata bahasa Indonesia dengan lafal bahasa Jawa itulah yang perlu diubah.

EYD sudah berusia 11 tahun, tetapi ternyata orang belum dapat menggunakannya secara mantap. Masalah ini merupakan hal mendesak berikutnya yang perlu disajikan. Sesudah ini baru masalah peristilahan, pengalimatan, pengalineaan, dan wacana. Untuk tujuan penyusunan karya ilmiah tentu saja masalah komposisi perlu diberikan.

Hal-hal yang menyangkut sastra (bahasa dalam sastra), misalnya, tidak

perlu diberikan. Lebih baik disajikan materi praktis yang gampang dicerna daripada materi yang terlalu luas tetapi cepat dilupakan. Biasanya yang menarik justru masalah kalimat rancu dan pembentukan kata dan istilah baru termasuk kata dan istilah serapan. Pemberian banyak contoh yang disertai dengan penjelasan gamblang mengenai sebab-sebab kesalahan dan bagaimana memperbaikinya akan selalu menarik minat. Sebagai penyuluh kita akan merasa bangga apabila pesuluh ternyata jeli dalam menemukan kesalahan dalam pemakaian bahasa, baik yang diucapkan (misalnya oleh penyiar) maupun yang tertulis (misalnya berita dan artikel surat kabar).

#### (4) *Anggaran Penyuluhan*

Penyuluhan di luar kampus tidak menjadi masalah dalam hal penyediaan anggaran karena biasanya hal ini bergantung pada pemerintah daerah. Bupati Sukoharjo, Gatot Amrih, S.H. dalam sambutannya mengantarkan penyuluhan bahasa Indonesia baru-baru ini menyatakan bahwa anggaran penyuluhan semacam ini akan dimasukkan dalam DIP Pemda setiap tahun mengingat urgensinya. Oleh karena itu, diharapkannya agar setiap tahun dapat diselenggarakan penyuluhan bahasa Indonesia.

Di UNS jumlah dosen dan anggaran yang disediakan tidak sesuai. Anggaran dari UNS tiap tahun hanya cukup untuk menyuluh 50 orang tenaga edukatif. Belum dapat diketahui kapan ratusan dosen lainnya mendapat giliran. Seyogianya anggaran disiapkan demikian rupa sehingga penyuluhan dapat diselenggarakan lebih dari sekali tiap tahun.

#### **Simpulan**

Bahasa Indonesia sudah digunakan di perguruan tinggi sebagai bahasa pengantar di ruang kuliah. Namun, di luar ruang kuliah bahasa itu tidak digunakan lagi. Baik dosen maupun mahasiswa menggunakan bahasa Jawa. Sebagai bahasa pengantar dalam kuliah, diskusi, dan penulisan karya ilmiah bahasa Indonesia belum digunakan secara mantap. Hal ini terlihat pada pemakaian lafal dan kosa kata bahasa Jawa, kesalahan ejaan, adanya kerancuan kalimat, dan kesalahan dalam pengalineaan.

Untuk memantapkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, dosen hendaknya membaca buku tentang ejaan, istilah, pemakaian bahasa, dan kamus. Mereka hendaknya juga mengikuti penyuluhan bahasa Indonesia.

Dalam upaya membangkitkan kesadaran berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita terbentur pada kurangnya minat dosen, terbatasnya tenaga penyuluh, materi penyuluhan yang terlalu luas, dan tidak tersedianya anggaran yang cukup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Amran. 1979. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia". Dalam *Pembinaan Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Junus, Umar. 1965. "Data-data dari Pemakaian Bahasa Indonesia oleh Beberapa Murid Sekolah Lanjutan Pertama dan Atas di Malang". Dalam *Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Kedua*. Jakarta: Penerbit Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia Departemen Urusan Research Nasional.
- Nasoetion, Andi Hakim. 1983. "Masalah Penjurusan di SMTA Umum Mengapa Tidak Sesuai dengan Namanya". *Sinar Harapan*, 11 Juni 1983. Jakarta.
- Oka, I Gusti Ngurah. 1976. "Membaca Kreatif: Sebuah Tinjauan Pendahuluan". Dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra Tahun II Nomor 2*

## **PEMBINAAN KEMAMPUAN BERBICARA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI ILMIAH BAGI MAHASISWA**

Maidar Arsjad  
PPBS IKIP Jakarta

### **Pendahuluan**

Kemampuan berbicara merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang perlu dimiliki oleh seseorang, terutama mahasiswa sebagai calon ilmuwan. Kemampuan ini bukanlah kemampuan yang diwariskan secara turun-temurun, walaupun pada dasarnya secara alamiah manusia itu dapat berbicara. Namun, kemampuan berbicara secara formal, memerlukan latihan dan pengarahan yang intensif.

Dari kenyataan berbahasa, seseorang lebih banyak berkomunikasi secara lisan dibandingkan dengan cara lain. Lebih dari separuh waktu kita gunakan untuk berbicara dan mendengarkan, dan selebihnya barulah untuk menulis dan membaca. Akan tetapi, pelajaran kemampuan berbicara ini kurang mendapat perhatian dan pembinaan, khususnya di sekolah menengah atas. Kebanyakan pengajaran bahasa dititikberatkan pada pengetahuan kebahasaannya. Padahal, semua kemampuan itu seharusnya dibina sekaligus.

Memang, setiap orang sebagai anggota masyarakat secara alamiah dapat berbicara. Akan tetapi, jika seseorang disuruh berbicara secara formal atau dalam situasi yang resmi, sering timbul rasa gugup sehingga gagasan yang dikemukakan menjadi tidak teratur dan akhirnya bahasanya pun menjadi tidak teratur. Bahkan, lebih parah lagi, ada yang tidak berani berbicara sama sekali. Anggapan bahwa setiap orang dengan sendirinya dapat berbicara, telah menyebabkan pembinaan kemampuan berbicara ini sering diabaikan.

Berdasarkan pengalaman selama mengajar di perguruan tinggi dan juga keluhan dari pengajar yang lain, pembicara menyimpulkan kemampuan berbicara mahasiswa masih jauh dari sempurna. Hal ini terlihat dari cara mereka mengemukakan pendapat, misalnya bertanya di dalam kelas, berdiskusi, berpidato, berceramah dan berseminar. Bahkan ada yang tidak berani berbicara.

Kalau kita kaitkan dengan Kurikulum 1975, seharusnya para lulusan SMA sudah memiliki kemampuan yang memadai dalam berbicara, sesuai dengan tujuan yang tercantum di dalam kurikulum tersebut. Ditambah lagi bermacam-macam kegiatan kemampuan berbicara tercantum di dalam silabus, dengan penekanan pada aspek kebahasaan dan nonkebahasaan, seperti dalam kegiatan bercakap-cakap, tanya jawab, berdiskusi, berpidato bahkan sampai pada kegiatan seminar. Namun, kenyataannya, jangankan lulusan SMA, mereka yang sudah menjadi mahasiswa pun masih kurang mampu mengemukakan pendapat secara formal dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan pengajaran kemampuan berbicara di SMA, ternyata titik berat pengajaran itu hanya sampai pada pengetahuan kemampuan berbicara. Guru-guru bahasa Indonesia di SMA umumnya menyatakan, mereka kurang mempunyai waktu untuk melatih kemampuan berbicara siswa, mengingat jumlah siswa yang terlalu banyak dan waktu sangat terbatas (Bambang S., 1982:1). Kemampuan berbicara ini memerlukan latihan secara individual. Hal inilah yang menyebabkan para lulusan SMA sebagai calon mahasiswa belum memiliki kemampuan yang memadai dalam berbicara. Padahal, kemampuan ini sangat penting bagi mahasiswa sebagai calon ilmuwan. Berdasarkan uraian di atas timbullah masalah: *Bagaimana cara membina dan meningkatkan kemampuan berbicara mahasiswa, terutama sebagai sarana komunikasi ilmiah?*

### **Bahasa sebagai Sarana Komunikasi Ilmiah**

Kemampuan berbahasa telah memungkinkan manusia memikirkan suatu masalah secara terus-menerus. Dengan bahasa manusia dapat mengomunikasikan apa yang sedang dipikirkannya dan dapat pula mengekspresikan sikap dan perasaannya.

Berpikir ilmiah merupakan kegiatan berpikir yang sistematis dan teratur, berdasarkan prosedur tertentu. Bahasa merupakan sarana untuk berpikir. Manusia dapat berpikir dengan baik karena memiliki bahasa. Jadi, bahasa merupakan sarana berpikir yang pertama dan mungkin yang utama. Bahkan, keunikan manusia sebetulnya bukan terletak pada kemampuannya berpikir, tetapi terletak pada kemampuannya berbahasa (Suriasumantri, 1981). Tanpa bahasa tidak mungkin manusia berpikir secara sistematis, teratur, dan berlanjut.

Bahasa memungkinkan pula manusia berpikir secara rumit dan abstrak.

Dalam hal ini, objek faktual ditransformasikan menjadi simbol bahasa yang bersifat abstrak. Manusia dapat berpikir mengenai objek tertentu walaupun objek itu secara faktual kelihatan. Hal ini telah memungkinkan manusia berpikir secara berlanjut. Transformasi objek faktual menjadi simbol abstrak diwujudkan dengan perbendaharaan kata-kata, yang akhirnya dapat mengungkapkan jalan pikiran dan ekspresi perasaan.

Sebagai sarana komunikasi ilmiah, bahasa mempunyai beberapa kekurangan. Kekurangan ini disebabkan karena sifatnya yang multifungsi yakni sebagai sarana komunikasi emotif, efektif, dan simbolik (Suriasumantri, 1981). Dalam komunikasi ilmiah yang pada hakekatnya bersifat objektif, bahasa sebagai sarannya harus bebas dari aspek emotif dan afektif atau pemakainya harus berusaha menekannya seminimal mungkin. Dalam kenyataannya syarat ini sulit terpenuhi karena pada hakekatnya kekurangan itu bersumber pada manusia yang tidak terlepas dari unsur emotif dan afektif (Karibin, 1983).

Komunikasi ilmiah bertujuan menyampaikan informasi yang berupa ilmu. Penyampaian informasi ini harus ditunjang oleh pemakaian bahasa yang bebas nilai, bebas dari unsur emotif dan afektif. Pilihan kata harus tepat, kalimat informatif dan komunikatif, hubungan antara bagian dengan bagian harus logis. Dengan kata lain, harus digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

### **Peranan Kemampuan Berbicara bagi Mahasiswa**

Setiap perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yang terdiri atas darma pendidikan, darma penelitian, dan darma pengabdian masyarakat. Pelaksanaannya sering menuntut keterampilan mahasiswa untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis.

Dalam proses belajar-mengajar, mahasiswa dituntut kemampuannya mengemukakan pendapat secara lisan. Misalnya, dalam bertanya di kelas atau berdiskusi memecahkan masalah yang berhubungan dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Begitu pula dalam mengembangkan ilmu yang diperolehnya. Supaya mendapat tanggapan dari pihak lain, sering pula diadakan seminar akademik, yang melibatkan tidak hanya mahasiswa, tetapi juga pihak lain yang ada hubungannya dengan disiplin ilmu tersebut. Baik diskusi ilmiah atau seminar akademik, menuntut keterampilan mahasiswa mengemukakan pendapat yang didukung oleh argumentasi yang kuat, untuk meyakinkan orang lain. Argumentasi yang kuat harus pula ditunjang oleh pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cara berbicara harus pula jelas dan sistematis, supaya informasi yang disampaikan efektif.

Demikian pula halnya dengan darma penelitian, yang berusaha membantu mahasiswa mengembangkan daya pikir dan daya ciptanya serta mem-

berikan kemungkinan penerawangan akal mahasiswa ke cakrawala yang lebih luas. Kegiatan ini sering disertai seminar akademik, diskusi ilmiah, atau ceramah ilmiah.

Dalam metode berpikir ilmiah, ada lima tahap yang harus dilalui, yaitu:

- (1) tahap pengenalan masalah;
- (2) tahap perumusan masalah;
- (3) tahap perumusan hipotesis;
- (4) tahap pengumpulan data dan analisis data; dan
- (5) tahap verifikasi. (Dewey, 1964)

Pada tahap tertentu, mahasiswa harus berdiskusi secara ilmiah dalam menemukan dan memecahkan masalah. Begitu juga dalam mengkomunikasikan hasil penemuannya, selain mahasiswa dituntut membuat laporan secara ilmiah dalam bentuk tertulis, mahasiswa juga harus mengkomunikasikan hasil penemuannya secara lisan dalam bentuk seminar untuk memperoleh masukan dan pengakuan dari pihak lain.

Kegiatan sehubungan dengan darma pengabdian kepada masyarakat yang berusaha meningkatkan kesadaran dan kepekaan sosial di kalangan sivitas akademika, menuntut mahasiswa langsung berkomunikasi dengan masyarakat, misalnya dengan berpidato, berceramah, memberikan penyuluhan atau penataran. Selain dari harus menguasai masalahnya, mahasiswa harus pula terampil menyampaikan dan menyesuaikan bahasanya dengan masyarakat pendengarnya. Kehendaknya bahasa yang digunakan bersifat informatif dan komunikatif.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa kemampuan berbicara itu sangat penting bagi mahasiswa sebagai sivitas akademika dan sebagai calon ilmuwan.

### Berbicara Merupakan Komunikasi Dua Arah

Kemampuan berbicara bukanlah kemampuan yang berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan kemampuan yang lain. Kegiatan berbicara berhubungan erat dengan kegiatan mendengarkan. Berbicara dan mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi dua arah. Keefektifan berbicara juga ditentukan oleh sikap pendengarnya.

Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pendengar menerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan penempatan persandian ( *juncture*). Jika dilakukan dengan tatap muka, ditambah lagi dengan gerak tangan dan mimik,

Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat

menyampaikan pikiran secara efektif, sebaiknya pembicara memahami isi pembicaraannya. Seorang pembicara berbicara karena ingin pikirannya dimiliki oleh orang lain. Karena itu, si pembicara ingin disimak, ingin didengar. Seorang pembicara yang merasa tidak didengarkan, tentulah merasa tidak senang dan hal ini dapat membuat seluruh kegiatannya gagal. Hendaknya pendengar bersedia memahami dan menanggapi apa yang didengarnya sehingga timbul hubungan timbal balik yang aktif. Usaha menjadikan kegiatan berbicara ini menjadi aktivitas yang hidup, tidak dapat terlepas dari persyaratan adanya pendengar yang baik.

Berhasil tidaknya kegiatan ini sangat bergantung pada pokok persoalan yang dipilih. Seorang pembicara harus memiliki dan menyajikan pokok persoalannya sedemikian rupa sehingga bukan hanya pembicara yang tertarik, tetapi juga pendengar. Oleh karena itu, si pembicara harus mempertimbangkan matang-matang pokok pembicaraan yang dipilihnya. Dalam memilih pokok pembicaraan, si pembicara harus pula mempertimbangkan siapa pendengarnya dan menyesuaikan pokok pembicaraannya dengan pendengarnya. Ia tidak boleh memilih pokok pembicaraan yang sama sekali tidak sesuai dengan pendengarnya, sehingga akhirnya pendengar merasa tidak tertarik.

Begitu juga dalam pemakaian bahasa. Faktor ini juga harus diperhatikan. Seorang pembicara harus memperhitungkan siapa pendengarnya dan menyesuaikan bahasanya dengan pendengar tersebut, baik diksi maupun struktur kalimatnya.

### **Komponen Kemampuan Berbicara**

Seorang pembicara harus memperhatikan komponen penting yang mendukung keefektifan berbicara. Komponen ini dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu yang menyangkut aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Yang termasuk aspek kebahasaan antara lain sebagai berikut.

- (1) Ketepatan pengucapan. Si pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar.
- (2) Penempatan tekanan, nada, sendi dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan nada, sendi, dan durasi ini merupakan daya tarik tersendiri. Bahkan, kadang-kadang merupakan faktor penentu. Walaupun masalahnya kurang menarik, cara penyampaiannya yang menarik, akan menyebabkan masalahnya menjadi menarik.
- (3) Pilihan kata (diksi) sebaiknya tepat, jelas, dan bervariasi.
- (4) Ketepatan sasaran pembicaraan. Ini menyangkut pemakaian kalimat.

Pembicaraan yang menggunakan kalimat efektif akan lebih mudah ditangkap pendengarnya.

Aspek nonkebahasaan menyangkut hal berikut.

- (1) Sikap yang wajar tenang, dan tidak kaku. Pembicara yang tidak tenang dan kaku, tentu menimbulkan kesan yang tidak baik (kurang menarik). Kesan pertama ini sangat penting untuk menjalin kesinambungan perhatian pendengar.
- (2) Pandangan harus diarahkan pada lawan bicara. Supaya pembicara dan pendengar betul-betul terlibat dalam kegiatan ini, pandangan si pembicara sangat membantu. Hal ini sering diabaikan. Pandangan yang hanya tertuju pada satu arah, menyebabkan pendengar merasa kurang diperhatikan. Akibatnya pendengar kurang memperhatikan atau bersikap acuh tidak acuh.
- (3) Kesediaan menghargai pendapat orang lain. Sikap keterbukaan hendaknya dipupuk, artinya si pembicara bersedia mendengarkan pendapat orang lain, bersedia menerima kritik dan bersedia mengubah pendapatnya kalau ternyata keliru, tetapi juga berani mempertahankan pendapatnya.
- (4) Gerak-gerak dan mimik yang tepat. Unsur-unsur keefektifan di atas harus pula didukung oleh gerak dan mimik yang tepat sehingga dapat membantu memperjelas pokok pembicaraan.
- (5) Kenyaringan suara juga sangat menentukan. Tingkat kenyaringan ini tentu disesuaikan dengan jumlah pendengar, situasi, tempat, dan akustik.

#### **Pedoman Penilaian Kemampuan Berbicara**

Untuk menghindari kebiasaan yang hanya berdasarkan kesan umum, di bawah ini diberikan pedoman penilaian kegiatan berbicara. Mengingat kemampuan berbicara ini memerlukan pelatihan dan pembimbingan, penilaian hendaknya tidak hanya mengukur dan menilai satu kegiatan saja, tetapi berfungsi memperbaiki prestasi kegiatan berikutnya. Penilaian ini juga berpedoman pada kedua aspek, yaitu aspek bahasa dan nonbahasa.

#### **Aspek Bahasa**

- (1) Pengucapan vokal

- (2) Pengucapan konsonan
- (3) Penempatan tekanan
- (4) Penempatan persendian
- (5) Penggunaan nada dan irama
- (6) Pilihan kata
- (7) Pilihan ungkapan
- (8) Variasi kata
- (9) Artikulasi

#### Aspek Nonbahasa

- (1) Keberanian dan semangat
- (2) Kelincahan dan keramahan
- (3) Keterampilan dan ketertiban
- (4) Kelancaran
- (5) Kenyaringan/kejelasan suara
- (6) Penalaran dan
- (7) Penguasaan topik

#### Pembinaan Kemampuan Berbicara

Pemanfaatan bermacam-macam teknik dalam satu mata kuliah akan lebih berhasil daripada hanya menggunakan satu teknik dari awal sampai akhir. Keaktifan mahasiswa harus dirangsang dan dikaitkan dengan materi yang diajarkan serta dijaga relevansinya dengan tujuan yang hendak dicapai. Menyuruh mahasiswa hanya mendengarkan tanpa banyak mendapat pemahaman, serta tanpa mengecek apakah yang disajikan sudah dipahami, akan menimbulkan keraguan apakah proses belajar-mengajar telah terjadi.

Ber macam cara dapat diterapkan untuk mengaktifkan mahasiswa dalam berbicara. Misalnya, melalui diskusi kelompok, ceramah atau pidato. Namun, sebelum langkah ini ditempuh, tentu mahasiswa harus dibekali dulu, bagaimana cara berdiskusi, berseminar, berceramah, dan sebagainya serta bagaimana mempersiapkannya.

Mengingat kemampuan berbicara mahasiswa masih jauh dari memadai, seperti telah diutarakan sebelumnya, pembinaan kemampuan berbicara pada tahap permulaan, lebih baik ditekankan pada latihan komponen dasar yang mendukung keefektifan berbicara, baik yang menyangkut faktor kebahasaan maupun yang nonkebahasaan. Jadi, pembinaan ditekankan pada kemampuan berbicara itu sendiri.

Latihan permulaan ini harus pula dilakukan secara bertahap. Jangan menuntut semua unsur dalam kedua aspek itu sekaligus pada tahap permulaan atau memberikan nilai berdasarkan kesan umum. Latihan pertama mung-

kin hanya ditekankan pada faktor keberanian, sikap, dan lafal. Setelah ini dikuasai, latihan berikutnya ditambah dengan unsur-unsur lain, misalnya, penempatan tekanan, pandangan mata, gerak-gerik atau mimik, dengan syarat unsur-unsur yang sudah dilatihkan tetap mendapat perhatian. Demikianlah, dengan latihan berulang-ulang kali, disertai pengarahannya dan pembimbingan yang intensif, diharapkan semua komponen dalam kemampuan berbicara dapat dikuasai oleh mahasiswa.

Setelah mahasiswa memiliki kemampuan yang memadai dalam berbicara, barulah kemampuan berkomunikasi secara ilmiah dilatih. Mahasiswa diberi pengarahannya bagaimana cara berdiskusi ilmiah, berseminar atau berceramah ilmiah, serta bagaimana cara mempersiapkannya. Dalam hal ini tentu mahasiswa harus sudah memiliki kemampuan menyusun laporan ilmiah secara tertulis karena komunikasi ilmiah seringkali dipersiapkan secara tertulis. Di samping itu, mahasiswa juga kita latih menggunakan bahasa ilmiah, yang pada hakikatnya harus bersifat objektif, tanpa mengandung unsur emotif dan afektif. Tentu hal ini memerlukan pelatihan dan pembimbingan yang intensif.

Pembicara berpendapat, untuk latihan permulaan, untuk melatih kemampuan berbicara mahasiswa, lebih efektif kalau diterapkan diskusi kelompok. Mengingat pada umumnya jumlah mahasiswa pada satu kelas cukup banyak, maka untuk melibatkan setiap individu, diskusi kelompok lebih tepat. Selain untuk mencapai efektivitas berbicara, diskusi kelompok juga dapat menghilangkan kejenuhan yang diakibatkan oleh suasana yang terus-menerus sama dalam mata kuliah lain sehingga secara tidak langsung hal ini dapat menumbuhkan motivasi.

Diskusi kelompok dapat pula memancing kreativitas berpikir mahasiswa. Mahasiswa melaksanakan aktivitas yang berbeda sehingga mereka lebih bergairah dan tidak bosan. Hal ini memungkinkan mereka mempelajari materi yang diberikan secara bersungguh-sungguh. Melalui diskusi mereka dapat menganalisis dan mengaplikasikan materi yang sedang diajarkan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, berbicara dalam kelompok jauh lebih ringan dibandingkan dengan berbicara secara individu. Waktu berbicara jauh lebih singkat, dan perhatian pendengar tidak hanya tertuju kepada satu individu, tetapi terbagi kepada semua anggota. Anggota yang pasif dapat dirangsang oleh moderator sehingga tidak terjadi kekosongan.

Dengan diskusi kelompok dapat pula diciptakan iklim yang memudahkan penerimaan bahan pelajaran serta dapat meningkatkan taraf berpikir mahasiswa. Diskusi kelompok juga memungkinkan mahasiswa memiliki pengalaman yang luas dan beraneka ragam, karena pengetahuan yang didapat dari diskusi, mungkin tidak diperoleh dari membaca atau mendengarkan. Dengan diskusi kita pun dapat belajar, cara orang lain berpikir dan memecah-

kan masalah. Selain itu, gagasan atau ide yang dikemukakan mendapat penilaian dari orang lain. Peserta diskusi dapat menguji argumentasi yang mendasari gagasan sendiri atau gagasan orang lain. Peserta dapat bertukar pikiran secara konstruktif dan kolektif untuk menganalisa data yang fundamental. Dengan demikian, diskusi merupakan wadah keunggulan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, pada tahap permulaan belajar berbicara, pilihan terhadap diskusi kelompok ini sangat tepat dan efektif. Hal ini telah terbukti selama pembicara mengasuh mata kuliah Kemampuan Berbicara di Jurusan Bahasa Indonesia IKIP Jakarta. Hasilnya, sudah pernah pula didemonstrasikan pada kegiatan presentasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis IKIP Jakarta, 1983 (Arsjad, 1983). Selanjutnya akan dikemukakan bagaimana cara membina kemampuan berbicara mahasiswa melalui diskusi kelompok.

### Persiapan Sebuah Diskusi

Sebaiknya setiap kelompok jumlahnya jangan terlalu besar, cukup 7 atau 9 orang. Dengan demikian, pembagian kesempatan berbicara bagi setiap individu akan lebih merata. Dalam pembentukan kelompok ini hendaknya juga diperhatikan individu yang membentuknya. Jangan hendaknya satu kelompok harus terdiri atas orang-orang yang belum bisa mengemukakan pendapat dan sebaliknya satu kelompok terdiri atas orang-orang yang suka berbicara. Dalam hal ini dosen dapat memberikan bantuan.

Salah satu anggota kelompok ditunjuk (dipilih) menjadi pimpinan diskusi (moderator). Barulah kemudian dilanjutkan dengan:

- (1) memilih topik yang akan didiskusikan. Harus diingat topik jangan terlalu luas, menarik untuk didiskusikan, mengandung konflik, dan merupakan masalah bersama;
- (2) mencari informasi yang dibutuhkan (data). Data ini sebaiknya dicatat dalam kartu informasi dan disesuaikan dengan pokok pembicaraan.

### Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Sebuah Diskusi

Sukses tidaknya sebuah diskusi sangat tergantung kepada kepemimpinan seorang moderator. Moderator bukanlah sekadar pemimpin biasa seperti lazimnya, tetapi ia bertindak sebagai penuntun dan pengendali diskusi. Tugasnya antara lain:

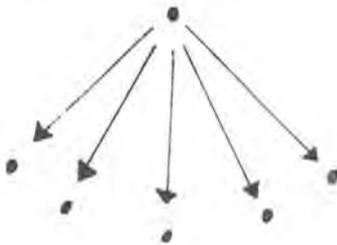
- (1) menjelaskan tujuan dan maksud diskusi. Hal ini penting sekali sebagai pengarahan kepada anggota;
- (2) menjamin kelangsungan diskusi secara teratur dan tertib;
- (3) memberikan stimula, anjuran, ajakan agar setiap anggota betul-betul mengambil bagian dalam diskusi tersebut;

- (4) mengumpulkan dan merumuskan setiap pembicaraan dan kemudian membuat kesimpulan atas kesepakatan bersama.

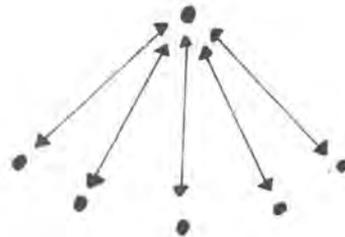
Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas di atas, seorang moderator dituntut agar:

- (1) berkepribadian;
- (2) memiliki sensitivitas (cepat mengerti dan merasakan);
- (3) bersimpati kepada orang lain;
- (4) tidak memihak;
- (5) mempunyai perasaan humor;
- (6) mempunyai intelegensi yang tinggi dan mampu mengambil keputusan;
- (7) berbakat dalam menjiwai sesuatu, berbakat berbicara dan berbakat mendengarkan;
- (8) bersikap ramah, sopan, dan terbuka.

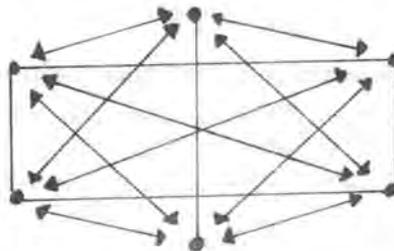
Hubungan antara pimpinan diskusi dengan anggotanya dapat digambarkan sebagai berikut.



Anggota hanya sebagai pendengar



Pimpinan bertanya dan anggota menjawab



Hubungan timbal balik atau interaksi yang hidup terjadi antara anggota dan pimpinan

Dinamika dan aktivitas diskusi terletak di tangan para peserta. Sebab itu, peranan dan tugas peserta diskusi sangat diharapkan untuk kelancaran diskusi. Untuk dapat menjadi peserta yang baik haruslah diperhatikan hal-hal berikut:

- (1) menguasai masalah yang didiskusikan. Hal ini dapat dicapai dengan giat melengkapi data dari bermacam sumber. Penguasaan masalah dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian;
- (2) mendengarkan pembicaraan dengan penuh perhatian;
- (3) menunjukkan solidaritas dan partisipasi yang tinggi. Sikap emosional dan prasangka yang tidak baik terhadap pembicara harus dihindari;
- (4) dapat menangkap gagasan utama dan memahami gagasan penunjang;
- (5) dapat meminta pendapat dan informasi sebanyak-banyaknya;
- (6) mengajukan pertanyaan dan dapat meminta dasar pendirian orang lain;
- (7) mengajukan keberatan dengan mengemukakan argumen yang kuat;
- (8) mengajukan pendapat yang didukung oleh argumen yang kuat.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa peserta diskusi bertungsi sebagai pembicara dan pendengar. Untuk dapat menjadi pembicara yang baik, harus pula diperhatikan hal-hal berikut.

- (1) pendengar akan lebih terangsang apabila pembicara mengerti betul apa yang sedang dibicarakannya;
- (2) pendengar akan lebih terangsang apabila pembicara sopan, hormat, dan melihatikan rasa persaudaraannya;
- (3) pembicara dapat mengemukakan contoh, angka, data, dan lain-lain untuk memperkuat argomennya;
- (4) berbicara harus terang dan jelas;
- (5) dalam memberikan tanggapan, harus ditunjang oleh argumentasi yang kuat. Komentar yang terlalu berlebihan dihindari agar tidak-menyinggung perasaan orang lain;
- (6) berbicara dimulai kalau sudah dipersilakan.

Tentu saja ada hal-hal yang menghambat jalannya diskusi, misalnya:

- (1) sikap agresif dan reaksioner;
- (2) sikap tertutup dan tidak mau berbicara;
- (3) sikap suka berbicara berbelit-belit;
- (4) sikap acuh tak acuh, angkuh dan sombong.

Hal ini tentu dapat diatasi oleh pimpinan diskusi yang cakap atau setidaknya hambatan itu dapat diperkecil.

### Cara Melaksanakan Diskusi Kelompok

Setelah dosen memberikan pengarahan tentang cara berdiskusi, sekelompok mahasiswa disuruh berdiskusi selama 15 menit atau 10 menit, dengan topik yang mereka pilih sendiri. Kelompok lain berperan sebagai pengamat dan memberikan komentar berdasarkan pedoman penilaian yang menekankan aspek kebahasaan dan nonkebahasaan. Setiap kelompok dapat mengamati salah seorang anggota (peserta) diskusi.

Selesai berdiskusi, para pengamat menyampaikan komentarnya kepada anggota yang diamati. Hal ini dapat dilaksanakan, misalnya setiap anggota diskusi langsung berdiskusi lagi dengan kelompok pengamatnya tentang bagaimana cara mengemukakan pendapat. Hal ini sungguh merupakan umpan balik yang berharga bagi peserta diskusi untuk meningkatkan kemampuannya berbicara. Setelah mendengarkan komentar dari para pengamat, diskusi dapat diulang kembali. Di sini pengamat dapat melihat perubahan para anggota diskusi dalam mengemukakan pendapatnya karena telah mendapat umpan balik dari para pengamat. Latihan yang berulang-ulang, dengan memberikan umpan balik baik dari dosen atau mahasiswa lain, tentu dapat meningkatkan kemampuan berbicara mahasiswa sehingga hal ini dapat menunjang kemampuan berbicara lebih lanjut atau berbicara ilmiah.

Ketua

•

•

•

•

•

•

•

---



---



---



---



---



---

Pengamat

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Dh. 1977. *Diskusi sebagai Alat untuk Memecahkan Masalah*. Bandung: FIP IKIP Bandung.
- Ametemben, N.A. 1977. *Diskusi Suatu Metode Mengajar Berpikir Reflektif & Inovatif*. Bandung: FIP IKIP Bandung.
- Maidar, Arsjad. 1983. *Pembinaan Kemampuan Berbicara Mahasiswa IKIP sebagai Calon Guru: Sebuah Demonstrasi*. IKIP Jakarta.
- Bambang S. 1982. "Pelaksanaan Pengajaran Kemampuan Berbicara di SMA DKI". Dalam *Makalah IKIP Jakarta*.
- Baird, A. Craig. 1950. *Argumentation, Discussion, and Debate*. New York: Mc. Graw-Hill Book Company & Inc.
- Dewey, John. 1971. *How We Think*. Chicago: Henry Regnery Company.
- Karibin, Sabarti Akhadiyah M. 1983. *Pengarahan Materi Pengajaran Bahasa Indonesia, Lokasi Sekolah dan Jenis Kelamin, terhadap Kemampuan Penalaran Ilmiah Siswa SMP*. Disertasi, Jakarta: FPS IKIP Jakarta.
- Keraf, Gorys. 1980. *Komposisi*. Ende: Nusa Indah.
- Mackey, William Francis. 1967. *Language Teaching Analysis*. Bloomington: Indiana University Press.
- Mc Crimmon, James M. 1967. *Writing with a Purpose*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Martin, Harold dan Richard M. Okmoun. 1963. *The Logic and Rhetoric of Exposition*. New York: Holt Rebehart and Winston.
- Oka, I Gusti Ngurah. 1976. *Retorik (Sebuah Tinjauan Pengantar)*. Bandung: Terate.
- Parera, Y. Daniel. 1977. *Belajar Mengutarakan Pendapat*. Jakarta: Erlangga.
- Stemerding, A.H.S. 1977. *Teknik Rapat dan Diskusi Kelompok*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Suriasumantri, Jujun S. 1981. *Bahasa sebagai Komunikasi Ilmiah*. Jakarta: IKIP.
- Taylor, H.M. dan Mears A.G. *Rapat, Diskusi, Konperensi, dan Mendirikan Organisasi*. Terjemahan Anas Sidik. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tarigan, Henry Guntur. 1981. *Berbicara*. Bandung: IKIP Bandung.

## **APRESIASI PUISI ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA: Suatu Sarana Pembinaan Watak Anak**

Sumardi

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

### **Pendahuluan**

Anak-anak generasi tahun 50-an boleh merasa beruntung karena pada masa kanak-kanak, mereka hidup dalam suasana yang kaya dengan pertunjukan seni tradisional yang banyak menawarkan nilai-nilai luhur. Anak-anak Yogyakarta, misalnya, pada sekitar tahun 60-an dapat menikmati pertunjukan wayang kulit kapan saja mereka mau. Banyak di antara mereka yang mengidentifikasi kelak kalau besar ingin menjadi tokoh seperti Kresna yang arif bijaksana, atau seperti Gatotkaca yang cekatan, *tregginas* (gesit), berani, dan selalu bersedia berkorban untuk membela kebenaran, atau seperti Prabu Puntadewa yang berbudi luhur.

Waktu berjalan. Anak-anak generasi tahun 70-an mengalami suasana kehidupan yang lain. Mereka telah memasuki zaman elektronika yang salah satu cirinya adalah serba massa dan serba cepat. Anak-anak pada tahun 80-an tidak dapat berlama-lama mengidentifikasi tokoh seperti yang dilakukan anak-anak pada tahun 50-an dan 60-an. Anak-anak pada tahun 50-an dan 60-an dapat berlama-lama mengidentifikasi tokoh Gatotkaca sehingga identifikasi itu begitu kuat dan mampu memberikan pengaruh positif dalam pembentukan watak anak. Sebaliknya, anak-anak pada tahun 80-an ini hanya dapat mengidentifikasi tokoh semacam Gatotkaca, misalnya tokoh Mighty Man — tokoh film serial karton yang pada bulan Oktober 1983 ini masih diputar oleh TVRI pusat—dalam waktu sebulan dua bulan sehingga identifikasi

itu lemah dan dangkal. Identifikasi tokoh yang lemah semacam ini tentu saja mengakibatkan pengaruh positif yang dapat disumbangkan bagi pembentukan watak anak tidak besar. Di samping tantangan seperti yang telah disinggung di muka, anak-anak tahun 80-an (terutama anak-anak kota besar seperti Jakarta) masih menghadapi tantangan-tantangan lain, seperti (a) orang tua yang terlalu sibuk sehingga anak-anak mengalami kegersangan perhatian, (b) pengaruh negatif lingkungan sehingga anak-anak yang "lugu" tersisih dari pergaulan sesamanya, (c) fasilitas materi yang lebih dari cukup yang bila ditambah tantangan pertama, yaitu kegersangan perhatian orang tua, dapat mendorong anak-anak untuk terseret ke lingkungan yang tidak terpuji.

Dari uraian keterbatasan suasana apresiatif seni dan tantangan berat yang dihadapi anak-anak yang telah diuraikan di atas, kita didorong untuk mencari beberapa kemungkinan jalan ke luar yang dapat ditempuh anak-anak dalam rangka menyambut hari depannya.

Salah satu kemungkinan itu adalah menumbuhkan kebiasaan membaca pada anak-anak.

Dewasa ini sudah menjadi obsesi umum masyarakat bahwa mereka ingin putra-putri mereka dapat menempuh pendidikan tinggi. Obsesi ini baik-baik saja. Namun, kadang-kadang ada di antara mereka yang lupa melakukan persiapan sedini mungkin. Persiapan itu adalah menumbuhkan kebiasaan membaca putra-putri mereka sedari kanak-kanak.

Bila putra-putri ini tidak memiliki kebiasaan dan kesenangan membaca sedari kecil, maka kelak kalau mereka menjadi sarjana/intelektual adalah tidak lebih dari sekadar seorang intelektual yang hanya mau membaca buku ilmiah yang spesialisasinya. Seorang intelektual yang hanya membaca buku ilmiah biasanya orang yang *kering dan tegar* pikirannya. Seorang intelek sejati juga senang pada bacaan di luar bidang studinya, misalnya bacaan sastra.

Sehubungan dengan kebiasaan membaca para intelektual ini, Pater J. Drost S.J. (Direktur SMA Kanisius Jakarta) pernah berseloroh; "Tolok ukur dalam menentukan mutu dan kadar intelektualitas seseorang ialah jumlah cerita detektif yang dibacanya".

Kembali kepada masalah menumbuhkan suasana apresiatif seni dan kebiasaan membaca anak-anak, maka karya sastra (dalam hal ini cerita atau novel anak-anak dan puisi anak-anak) memiliki peluang besar untuk menjadi menu anak-anak. Peluang besar ini antara lain dimungkinkan oleh (a) bacaan atau karya sastra relatif mudah diperoleh, (b) karya sastra bersifat demokratis, artinya bila anak-anak merasa tidak cocok dengan suatu karya sastra, karya sastra itu boleh dilempar dan ganti pilih yang lain, (c) karya sastra menawarkan kepuasan intelektual dan kepuasan batin kepada anak-anak.

Basis utama penumbuhan kebiasaan membaca karya sastra anak-anak adalah keluarga bukan sekolah. Mengapa? Oleh karena keterbatasan waktu

sekolah, maka terbatas pula kesempatan guru untuk memberikan dorongan dan bimbingan membaca karya sastra kepada anak-anak.

Oleh karena ada beberapa perbedaan teknis dalam pembimbingan membaca atau mengapresiasi cerita anak dan puisi anak, maka supaya pembicaraan dapat lebih renik makalah ini membatasi diri pada apresiasi puisi anak di lingkungan keluarga.

### Keluwesan dan Kelebihan Puisi

Sebagai sarana untuk mengasah dan meningkatkan ketajaman naluri keindahan, sebagai sarana untuk membina watak, serta sebagai sarana untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, puisi memiliki beberapa keluwesan dan kelebihan.

Pertama, puisi yang relatif lebih pendek dari cerita atau novel anak itu mudah dihafalkan dan dimanfaatkan oleh anak-anak untuk berekspresi, misalnya dalam bentuk deklamasi. Deklamasi ini dapat menjadi sarana yang menarik bagi anak-anak untuk memperlihatkan kemampuan ekspresinya baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, misalnya pada malam kesenian hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia di kawasan tempat tinggal mereka.

Kedua, puisi memiliki unsur-unsur yang sangat menonjol, misalnya unsur musikalitas yang dibangun oleh rima dan irama, yang mampu memberi kepuasan naluri keindahan anak-anak. Unsur musikalitas ini kurang menonjol, kalau tidak boleh dikatakan tidak ada, pada cerita atau novel anak. Sebagai contoh kita perhatikan rima dan irama sajak berikut ini.

### AYAHKU

dia orang kecil  
jabatannya pun kecil  
tetapi dia orang besar  
*besar dalam pandanganku*  
*presiden dalam perasaanku*  
ayahku tidak kaya harta  
kekayaannya ialah cita-cita  
*dia minyak, dia obor*  
*dia jalan, dia jenjang*  
kami tinggal memanfaatkannya  
ayahku presiden  
*dalam hatiku*  
*dalam hati kami*

(Eddy Juniaman, kelas 5 SD, Puisiku Duniaku)

Perhatikan kemerduan rima dan keindahan irama terutama pada kata-kata yang berhuruf miring *besar dalam pandanganku/presiden dalam perasaanmu* dan *dalam hatiku/dalam hati kami*. Perhatikan pula keindahan dan kekuatan daya tanjak irama pada larik-larik *dia minyak, dia obor/dia jalan, dia jenjang*.

Ketiga, banyak puisi anak-anak yang ditulis oleh anak-anak. Hal ini menjadikan "dunia puisi" yang tercipta "pas" (cocok, tepat) dengan dunia anak-anak. Akibat lebih lanjut, kecocokan dunia puisi dengan dunia anak-anak menjadikan puisi itu menarik, mudah akrab, dan cocok bagi anak-anak. Hal semacam ini tidak ada pada cerita atau novel anak-anak.

Orang dewasa yang sudah lama meninggalkan dunia anak-anak tidak mudah menciptakan dunia anak-anak imajiner dalam karya mereka yang mendekati dunia anak-anak. Orang dewasa cenderung, secara tidak sadar, menggunakan ukuran-ukuran dan selera kedewasaannya dalam melihat dunia anak-anak. Baik itu dunia imajiner maupun dunia realita. Akibatnya, banyak novel anak-anak yang tidak cocok, tidak menarik, bahkan terasa asing bagi anak-anak. Kecenderungan semacam ini juga terjadi kalau puisi anak-anak ditulis oleh orang dewasa. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dalam khasanah puisi anak-anak banyak tersedia puisi anak-anak yang bagus, yang cocok, dan menarik bagi anak-anak, serta dapat memberikan sumbangan positif bagi pembinaan watak anak-anak. Masalahnya bagi orang tua adalah tinggal bagaimana dapat menjaring puisi anak-anak yang bagus di antara ribuan puisi anak-anak yang tidak bagus. (Di bagian belakang akan diuraikan pedoman memilih puisi anak-anak yang bagus).

### Tujuan dan Manfaat Apresiasi Puisi

- Ada dua buah tujuan apresiasi puisi bagi anak-anak, yaitu
- (a) agar anak-anak memperoleh *kesenangan* dari membaca, mendeklamasikan dan mendengarkan puisi sehingga tumbuh keinginan menikmati puisi sebagai salah satu kebutuhan hidup atau makanan rohaninya;
  - (b) agar anak-anak memperoleh *kesadaran* yang lebih baik terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan sekitarnya sehingga mereka bersikap terbuka, rendah hati, peka perasaan dan pikiran kritisnya terhadap tingkah laku pribadi, orang lain, serta masalah-masalah kehidupan sekitarnya. (Sumardi, 1983, lihat juga Effendi, 1982).

Kedua tujuan ini bertumpu pada sifat dasar puisi, yaitu bahwa puisi mengandung aspek *dulce* atau *kesenangan* dan *utile* atau *kegunaan*. (Kedua istilah ini berasal dari Horaco, lihat Wellek, 1976: 29–30).

Apabila anak-anak setiap hari menikmati puisi (boleh berupa kegiatan membaca, mendeklamasikan, atau mendengarkan) memperoleh kesenangan,

maka lama-kelamaan akan tumbuh dalam dirinya dorongan menikmati puisi sebagai salah satu kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan tumbuhnya kebiasaan menikmati puisi ini, maka kebiasaan membaca dalam arti yang lebih luas juga akan turut berkembang.

Kesenangan itu dapat diperoleh anak-anak dalam menikmati puisi karena penikmatan itu mampu menampung atau menyalurkan beberapa naluri anak, seperti naluri keindahan (terpuaskan antara lain oleh unsur musikalitas dan ungkapan-ungkapan yang bagus), naluri ekspresi (terpuaskan pada waktu membaca atau mendeklamasikan puisi), dan naluri ingin tahu (terpuaskan oleh pembukaan rahasia yang berkembang sejalan dengan plot puisi (Lihat Elkins, 1981:189–190).

Begitu pula kegunaan atau manfaat menikmati puisi akan mampu teraih oleh anak yang telah terlatih menikmati puisi. (Bandingkanlah dengan gaya antipasi yang tinggi pada pemain silat atau bulu tangkis yang dapat mereka miliki berkat banyak berlatih).

Dari latihan menikmati puisi berulang-ulang itu, anak-anak akan dapat memetik beberapa manfaat, seperti kepekaan rasa keindahannya akan meningkat.

Kegunaan yang lain, misalnya amanat atau pesan puisi yang berhasil *direbut* anak akan merupakan makanan rohani yang bergizi tinggi yang akan mampu memberikan kepuasan batin dan meningkatkan kepekaan perasaan dan pikiran kritisnya terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan sekelilingnya.

Di sini dengan sengaja digunakan istilah *direbut* untuk menyiratkan aktivitas aktif anak dalam memperoleh pesan puisi itu. Aktivitas aktif ini akan memberikan kepuasan batin yang lebih besar daripada kepuasan batin aktivitas pasif. (Bandingkanlah kepuasan batin kalau anak memiliki sesuatu dari hasil keringatnya sendiri dengan memiliki sesuatu dari pemberian orang lain).

Puisi diciptakan pengarangnya ketika pribadinya dalam totalitas yang utuh, ketika mata hati, pikiran, dan emosinya dalam perimbangan yang harmonis, serta dalam konsentrasi yang tinggi. Oleh karena itu, puisi yang diciptakannya merefleksikan pengalaman batin yang padat dan utuh. Anak yang berhasil merebut pesan puisi yang diciptakan pengarangnya dalam kondisi batin semacam itu akan memperoleh pesan yang amat berharga perkembangan kehidupan batinnya.

Sudah barang tentu tidak semua puisi anak bermutu tinggi dan menyampaikan pesan yang baik. Di sinilah peranan orang tua untuk menyediakan puisi yang memenuhi syarat bagi putra-putrinya.

### Memilih Puisi

Ada beberapa pedoman praktis yang dapat dipakai orang tua dalam me-

milih puisi anak yang baik yang cocok bagi putra-putrinya. Beberapa pedoman praktis itu antara lain seperti berikut.

(1) Puisi yang sesuai untuk dinikmati oleh seorang anak terutama adalah puisi yang ditulis oleh anak yang sebaya dengan anak yang akan menikmati puisi itu. Pengamatan terhadap khasanah puisi anak-anak Indonesia memperlihatkan bahwa puisi anak yang ditulis oleh orang dewasa cenderung memperlihatkan "dunia lebih". Artinya puisi itu mengandung ide dan ungkapan-ungkapan yang terlalu tinggi atau terlalu jauh dari dunia anak-anak. Bandingkanlah dua buah puisi berikut ini. Keduanya menampilkan objek yang tidak begitu jauh berbeda. Kedua puisi itu antara lain menyentuh alam. Puisi yang pertama ditulis seorang anak, yaitu Omi Intan Naomi, dan puisi yang kedua ditulis oleh penyair dewasa, yaitu Leon Agusta.

### PELANGI

Kau jangan merasa iri  
 bila melihat pakaianku belang sepertimu  
 ini hanya perca yang dijahit mama  
 ketika ulang tahunku.

(Zaman No. 13/IV, 19 Desember 1982)

### BUAT BONEKA BARUKU

Wahai awan kapas putih  
 Hinggaplah turun ke bumi  
 Biar kupintal menjadi sutera  
 Buat gaun boneka baruku

Wahai bintang Venus yang mungil  
 Turunlah datang padaku  
 Biar kupetik nyala sinarmu  
 Buat mata boneka baruku

Wahai langit terhampar biru  
 Merendahlah dekat ke bumi  
 Biar kuambil warna *birumu*  
 Buat selimut boneka baruku

(*Berkemah dengan Putri Bangau*, Balai Pustaka, 1981)

Kita bandingkan kedua puisi ini dari beberapa segi. Dari segi bahasa, misalnya, puisi pertama memperlihatkan kesederhanaan bahasa anak, sedangkan bahasa puisi kedua untuk ukuran anak terasa terlalu kompleks, terbata-bata, tidak lancar, seperti yang terlihat pada paralelisme larik kedua dari setiap bait *Hinggaplah turun ke bumi/Turunlah datang padaku/Merendahkan dekat ke bumi*. Di samping itu, imajinasi seorang anak akan lebih potensial untuk membayangkan tokoh Gatotkaca yang mampu terbang daripada *warna biru (langit) buat selimut boneka baruku*.

Dari perbandingan sekilas kedua puisi ini terbukti bahwa puisi anak yang ditulis oleh orang dewasa cenderung memperlihatkan "dunia lebih" seperti yang telah disinggung di muka. Di samping itu, ada kelemahan yang lebih memperlihatkan lagi. Sering terjadi anak-anak mendeklamasikan puisi dewasa seperti yang terlihat pada acara anak-anak di televisi. Pernah terjadi seorang anak mendeklamasikan puisi "Diponegoro" karya Chairil Anwar. Apa akibatnya? Anak itu tidak lebih dari sekedar memverbalkan kata-kata tanpa berhasil membawakan jiwa, nada dan suasana, serta pesan puisi "Diponegoro" itu. Memang tidak mudah bagi anak-anak untuk menangkap makna ungkapan *dan bara kagum menjadi api* yang terkandung dalam puisi "Diponegoro" itu.

(2) Terutama pada tahap awal apresiasi, pilihlah puisi yang mengandung tema yang aktual atau tema yang menjadi perhatian khusus anak-anak, misalnya untuk anak perempuan tema-tema yang berbicara tentang bunga atau binatang akan lebih cocok daripada tema-tema yang berbicara tentang peperangan. Kita perhatikan puisi berikut ini.

#### DOA UNTUK TEMAN-TEMANKU DI GALUNGGUNG

Tuhan

beri mereka semangat untuk selalu mengingat-Mu  
 beri mereka lampu untuk menerangi jalan ke rumah-Mu  
 beri mereka tempat sedikit saja untuk bertamu di kamar-Mu  
 dan terimalah duka mereka.

(Rini Yulianti, Kelas 6 SD, *Sinar Harapan*, 27 Oktober 1982)

Puisi ini sangat tepat, misalnya, dideklamasikan anak ketika bencana Gunung Galunggung sedang terjadi dan menjadi berita hangat di media massa. Pemilihan aktualitas tema ini tidak ada kaitannya dengan kualitas puisi, tetapi berkaitan dengan *kemudahan* anak menghidupkan kembali imajinasi, nada, dan suasana, serta pesan puisi itu.

(3) Di samping itu, pada tahap awal apresiasi puisi pilihlah puisi yang mengandung latar (*setting*) atau suasana lingkungan yang akrab dengan anak. Suasana lingkungan ini baik yang menyangkut objek, latar, maupun yang menyangkut ungkapan. Untuk anak-anak kita, ungkapan seputih kapas terasa lebih akrab daripada ungkapan seputih salju.

Berikut ini sebuah contoh puisi yang harus kita perhitungkan latar atau suasana lingkungannya.

### DESAKU

Desaku indah

tetumbuhan menghijau di ladang  
pohon-pohon rindang bersemi  
tempat burung pada bernyanyi

Desaku pun permai, damai  
*sepermai anak gembala*  
*menyenandungkan sulungnya*  
*sambil bertumpu di atas kerbau*  
pulang masuk kandang  
karena hari tlah petang.

(Puri, SD, *Suara Karya*, 10 April 1983)

Untuk tahap awal apresiasi puisi, puisi "Desaku" ini sulit dihayati anak-anak kota. Mereka asing dengan kosakata *kandang* dan ungkapan *sepermai anak gembala menyenangkan sulungnya sambil bertumpu di atas kerbau*. Sejalan dengan prinsip pengayaan berjenjang dalam pendidikan, maka setelah anak memiliki dasar-dasar apresiasi puisi dapat dipikirkan puisi-puisi yang memungkinkan mereka memperluas wawasannya.

(4) Di samping ketiga pedoman yang telah dikemukakan di muka, ada pedoman utama, yakni kualitas puisi. Orang tua hendaklah memilihkan putra-putrinya puisi yang bermutu, yang berbobot. Persoalan selanjutnya adalah tinggal bagaimana ciri-ciri puisi yang berbobot itu. Ada banyak ciri-ciri puisi yang berbobot itu. Berikut ini beberapa di antaranya.

#### b. *Imajinasi yang Sederhana*

Kesederhanaan imajinasi puisi anak hendaknya diukur sesuai dengan imajinasi atau daya bayang anak. Bagaimana pun juga, imajinasi anak lebih

sederhana daripada imajinasi orang dewasa. Berikut ini dapat dibandingkan tingkat imajinasi dua buah puisi yang keduanya sengaja diambil dari rubrik anak-anak.

### SAJAK

*Rindu terpendam dalam tumpukan batu  
yang barangkali tiada kan terbuka walau seabad lagi  
hingga pada mukaku jerawat bercanda.*

Akh, sakuku penuh debu  
hingga tak kuasa duduk pada sepasang meja kursimu  
yang terhias kelebatan pot-pot puisi  
sampai tertumpah-tumpah kehabisan wadah.

(Tuti Ningsih, "Eska Kecil" *Suara Karya*, 26 Februari 1983)

### BINTANG

Bila malam tlah datang  
Terlihat bintang bertaburan  
Menghias langit nan biru

*Oh ... bintang  
Maukah kau turun sekarang  
Akan kubawa kau pulang  
Kupersembahkan pada mama*

(Sri Suyatmi, Kelas 6 SD, *Gatotkaca*, 20 Januari 1983)

Imajinasi atau pembayangan "sajak" ini cukup kompleks, terutama pembayangan larik-larik yang berhuruf miring *Rindu terpendam dalam tumpukan batu/yang barangkali tiada kan terbuka walau seabad lagi/hingga pada mukaku jerawat bercanda*. Kesederhanaan imajinasi tidak berarti menolak gambaran yang abstrak atau yang fantastis sebagaimana petikan puisi "Bintang" ini: *bintang/Maukah kau turun sekarang/Akan kubawa kau pulang/Kupersembahkan pada mama*.

Dilihat dari perbandingan imajinasi kedua puisi ini, maka terlihat bahwa puisi yang kedua yang imajinasinya lebih sederhana daripada imajinasi puisi yang pertama lebih cocok untuk bahan apresiasi anak.

c. *Ungkapan yang Sederhana dan Wajar*

Kesederhanaan dan kewajaran ungkapan adalah salah satu syarat puisi anak yang penting. Perhatikan kesederhanaan dan kewajaran ungkapan puisi Irmawanti berikut ini.

### SAJAK CINTA

Ibu  
ayah  
aku cinta padamu

(LH, Irmawanti, *Suara Karya*, 2 April 1983)

Sebaliknya, ungkapan-ungkapan puisi "Bunga Mawar" berikut ini terasa kurang wajar karena adanya pemaksaan, yaitu dengan mengorbankan struktur bahasa sehingga struktur itu tidak jalan, demi rima akhir.

### BUNGA MAWAR

Bunga mawar yang cantik  
Kenapa warnamu merah menarik  
Bunga mawar yang semerbak  
Kenapa wajahmu begitu semarak.

Dulu warnaku pudar dan lusuh  
Dulu wajahku muram dan pucat  
Kemudian datanglah seekor burung  
Yang teramat sayang kepadaku.

Dia hinggap di dahanku berduri  
Ingin memeluk erat sekali  
*Hingga dadanya ditembus duri*  
Darahnya tetes ke rumpunku di bum/  
Merah darahnya diserap uratku  
Akar-akarko menghisapnya kembali.

Sejak itulah *warnaku merah semerbak*  
Sejak itulah wajahku jadi semarak.

(Leon Agusta, *Berkemah dengan Putri Bangau*)

Puisi "Bunga Mawar" adalah puisi naratif dalam bentuk dialog yang menggunakan pusat kisah orang pertama. Dilihat dari segi pusat kisah ini, frasa *hingga dadanya ditembus duri* terasa janggal, karena yang menembus dada burung itu adalah *aku* mawar. Frasa ini baru jalan kalau strukturnya diubah misalnya menjadi *hingga dadanya tertembus duriku*. Di samping itu, ungkapan *warnaku merah semerbak* juga terasa tidak wajar, ada pemaksaan demi rima akhir.

Dari perbandingan dua buah puisi ini terbukti bahwa ungkapan yang sederhana serta wajar merupakan salah satu tuntutan puisi anak yang baik.

#### d. *Ide Sederhana dan Sesuai dengan Dunia Anak-anak*

Walaupun sebuah puisi ditulis oleh seorang anak atau dipublikasi di dalam bentuk rubrik anak belumlah menjadi jaminan bahwa ide atau konsepsi-konsepsi yang terkandung dalam puisi itu sesuai dengan anak. Ada puisi anak yang mengandung ide atau konsepsi yang sudah menjadi stereotip umum sehingga terasa kabur dan menjadikan puisi itu kurang berbobot. Puisi berikut ini adalah salah satu contohnya.

### GURU

Engkaulah  
yang mengajar  
hingga aku bisa  
menulis dan membaca  
puisi.

Engkaulah  
yang memiliki  
tugas maha berat  
*mempersiapkan*  
*manusia-manusia*  
*untuk terjun*  
*di masyarakat*

....

(Evelyn Ridhan Avenina Ratih, kelas 6 SD, *Suara Karya*,  
30 April 1983)

"Mempersiapkan manusia-manusia untuk terjun di masyarakat" tidak lebih dari sekadar ungkapan yang sudah terlalu umum, klise, dan kabur maknanya. Ungkapan-ungkapan semacam ini dapat memperlemah puisi anak.

e. *Keutuhan Puisi*

Keutuhan atau kebulatan puisi merupakan salah satu syarat utama sebuah puisi yang baik. Keutuhan itu dapat terganggu oleh bermacam-macam sebab, misalnya adanya penyimpangan atau degresi. Penyimpangan itu dapat terjadi oleh pergeseran objek atau pergantian sudut pandang yang tidak disadari oleh pengarang. Berikut ini sebuah contoh puisi yang mengandung pergeseran objek yang tidak disadari oleh pengarangnya.

TASKU

Tiap pagi kau bersamaku  
Tersandang di bahu  
Terasa berat di pundakku  
Tapi lembut di hatiku.

Kupandang kau dengan haru  
Kasihanku melihatmu  
Sisi-sisimu yang mulai berlubang  
Karena sesak muatan.

*Begitu besar jasmu  
Bagi mereka  
Yang ingin pandai.*

Bangga rasa hatiku  
Bila kubawa dirimu  
Karena semua kan tahu  
Itulah pelajar  
Harapan bangsa.

(Anawati, SD Muh. Teluk Tiram Laut, Banjarmasin, *Zamari*,  
No. 26/III/, 21 Maret 1982)

Adanya larik "Bagi mereka" pada bait ketiga menjadikan pertanyaan larik ketiga ini mengandung makna bahwa tas itu lebih dari sebuah atau pernyataan ini ditujukan kepada semua tas. Padahal, dialog pada bait pertama, kedua, dan keempat hanya terjadi antara si aku dengan sebuah tas, yakni tasnya. Pergeseran objek semacam ini jelas menjadikan puisi "Tasku" lemah.

f. *Penalaran Jernih*

Kejernihan penalaran merupakan salah satu syarat utama sebuah puisi

yang berbobot. Berikut ini sebuah contoh puisi yang penalarannya tidak jernih.

### GEMBALA

Aku ini anak gembala  
Siang pergi pulang petang  
Membawa sekelompok *domba*  
Hati riang tiada terbayang.

Padang rumput luas menghijau  
*Kambing* makan dengan lahapnya  
Aku tiup seruling bambu  
Kunyanayakan lagu bahagia.

(Surti Handayani, kelas 5 SD, *Gatotkaca*, 20 Maret 1982)

Kisahnyanya sama, latarnya sama, tokohnya sama, yaitu si Aku. Namun, pada bait pertama yang digembalakan oleh si Aku adalah *domba* dan pada bait kedua berubah menjadi *kambing*. Tidak masuk akal, bukan?

Demikianlah beberapa ciri puisi yang baik. Ciri-ciri yang lain seperti: tidak mengandung pernyataan yang bombastis, tidak bersifat prosais, dan original tidak mengandung unsur plagiat, belum diuraikan secara renik di sini. Sebuah puisi dapat dikategorikan baik kalau mengandung ciri yang baik sebanyak mungkin dan memperlihatkan ciri kelemahan sesedikit mungkin atau bahkan tidak mengandung kelemahan sama sekali.

Dengan beberapa pedoman praktis yang telah diuraikan di muka para orang tua relatif dapat terbantu untuk memilih puisi yang baik, yang cocok, dan yang mampu memberikan pengaruh kejiwaan yang positif bagi putra-putrinya.

### Membina Suasana Apresiatif

Apabila orang tua sudah berhasil menyediakan puisi yang baik boleh dikatakan bahwa pembinaan suasana apresiasi puisi di lingkungan keluarga sudah setengah berhasil. Dalam suasana apresiatif inilah terbuka kemungkinan anak akan menikmati puisi sebagai bagian dari kebutuhan rohaninya. Seribu satu jalan menuju ke Roma. Begitu pula kalau sudah tersedia banyak puisi yang baik, maka banyak akal, dan banyak kemungkinan untuk mendorong anak-anak menikmati puisi. Beberapa cara itu misalnya seperti berikut.

Di kota-kota besar seperti Jakarta mulai ada kebiasaan murid-murid memberikan hadiah atau kado kepada bapak atau ibu guru pada hari ulang

tahunnya. Nah, inilah kesempatan emas bagi orang tua untuk melibatkan putranya dengan apresiasi puisi. Bentuk pelibatan itu misalnya dengan cara meminta si anak menulis puisi atau mengutip puisi karya anak lain untuk disertakan pada kado itu. Dalam proses pemilihan puisi yang akan dikutip, orang tua dapat mengajak putranya berdiskusi atau mendeklamasikan puisi pilihannya. Puisi yang dapat dikutip itu misalnya puisi berikut ini.

### RANGKAIAN PUISI UNTUK IBU GURU

Ibu guru, matahari bersinar  
tapi tak secerah pagi ini.

Andai Ibu tahu, bunga melati mekar  
sama seperti cita-cita Ibu  
yang semua dicurahkan, untuk kami.

Bu guru, terimalah kata dari muridmu  
Selamat ulang tahun, dan  
saya selalu berdoa untuk Ibu guru.

(Herti Utami, kelas 5 SDN Kadipaten I, Bojonegoro, Jawa Timur,  
*Suara Karya*, 22 Januari 1983)

Di samping kegiatan yang pertama, ada kegiatan lain yang dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga. Bila di dalam suatu keluarga ada lebih dari seorang anak, maka naluri persaingan mereka dapat dirangsang secara positif misalnya melalui lomba deklamasi mini. Acara ini dapat dilakukan ketika seluruh keluarga sedang berkumpul bersantai, misalnya pada hari Minggu. Hadiah-hadiah kecil seperti permen dapat menyemarakkan lomba mini ini.

Demikianlah dua buah kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyuburkan suasana apresiasi puisi anak di lingkungan keluarga. Bentuk-bentuk kegiatan apresiasi yang lain dapat dicari sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing keluarga.

### Penutup

Suasana apresiasi puisi di dalam keluarga yang subur akan memberikan kemungkinan yang besar bagi anak-anak untuk menikmati puisi. Anak-anak yang memperoleh kesenangan dalam menikmati puisi akan selalu mencari puisi sebagai kebutuhan rohaninya dan hal ini dapat menumbuhkan kebiasaan membaca dalam arti yang luas.

Anak yang memiliki kebiasaan membaca, kebiasaan menikmati puisi dan menikmati karya seni yang lain memiliki potensi untuk menjadi intelektual yang berwawasan luas, peka perasaan dan pikirannya terhadap kehidupan dirinya, orang lain, dan masalah-masalah sekelilingnya.

Mudah-mudahan salah seorang di antara anak itu adalah putra kita, cucu kita, atau keponakan kita.  
Semoga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, S. 1982. *Bimbingan Apresiasi Puisi*, Cet. ke-3, Jakarta: Tangga Mutiara Alam.
- Elkins, Deborah. 1981. *Teaching Literature, Design for Cognitive Development*. Cet. ke-9, Ohio: A Bell & Howell.
- Sumardi. 1983. "Pengajaran Apresiasi Puisi di Sekolah Dasar, Beberapa Kemungkinan", makalah *Seminar Penulisan Bahan Pengajaran Bahasa di Yogyakarta, 30 Mei—4 Juni 1983* yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Agusta, Leon. 1981. *Berkemah dengan Putri Bangau*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Budianta, Eka dan Susiana Darmawi (Ed.). 1978. *Puisiku Duniaku*. Jakarta: Indira.

## LAMPIRAN

## PUISI ANAK

## A. Pendidikan

## 1. IBU

Ibu  
tahukah engkau  
bahwa hari ini saya kecewa sekali  
tadi, ibu guru tidak memanggilku  
sebagai juara kelas.

Ibu  
tahukah engkau  
bahwa aku bersedih  
dan, air mataku  
jatuh keras sekali  
seperti air hujan  
yang turun semalam.

Ibu  
aku berjanji  
akan menebus semua itu  
tahun depan.

(VM. Lindawati, *Sinar Harapan*, 29 Juli 1981)

## 2. SELAMAT BERPISAH BU GURU

Selamat berpisah kuucapkan  
kepada Bu Guru yang pindah

Terima kasih Bu Guru  
atas jasamu  
selama membimbingku  
waktu lalu

Kuucapkan selamat berpisah

Kepada Bu Guru yang pindah  
 Ada kenangan yang indah  
 Darimu Bu Guru  
 Ketika kau memberiku hadiah

(Evelyn Ridha Averina Ratih, *Suara Karya*, 26 September 1981)

### 3. PEMBAGIAN RAPOR

Hari ini rapor dibagikan  
 Hatiku dag-dig-dug tidak keruan  
 Bagaimana nilai prestasiku tahun ini?  
 Burukkah?  
 Baikkah?

Acara pun memuncak — aku dipanggil guru.  
 Layaknya kucing hendak menerkam tikus  
 Lalu aku pun maju  
 Tangan gemetar, keringat keluar  
 Kuintip rapor pelan-pelan  
 Oh Tuhan, ingin rasanya aku pingsan  
 Dua buah angka merah tersenyum padaku

(Leny Mediawati, *Puisiku Duniaku*)

### 4. DOA

Tuhan  
 berikan aku mimpi malam ini  
 tentang matematika  
 yang diujikan besok pagi

(Zul Irwan, SDN 06 Medan, *Zaman* No. 41/III, 5 Juli 1981)

## B. Religius

### 1. PUASA

I  
 Ibu! Ibu!  
 Benarkah mulut anakmu nanti harum di surga?

## II

Buah kurma  
 menyambut salam  
 seperti di Makkah  
 Aku jadi teringat cerita Ayah  
 tentang Rasul Allah  
 yang selalu berbuka puasa  
 dengan buah kurma dan air putih saja

## III

Yang pasti kata guruku  
 Kita ikut merasakan penderitaan fakir miskin  
 Kita menolak kesenangan berlebihan  
 Puasa mengajar diri kita melawan segala cobaan

(Nuniek Putri Arimurti, *Sinar Harapan*, Rabu 29 Juli 1981)

## 2. BULAN PUASA

Bulan puasa  
 Engkau adalah guru bijaksana  
 Mengajarkan berbuka kebajikan  
 Mengajarkan kenal penderitaan si miskin  
 Yang hidupnya kekurangan dan sering lapar

Bulan puasa  
 Engkau adalah guru bijaksana  
 Yang diciptakan Tuhan untuk  
 Orang-orang beriman

(Sheila Melati Talulembang, SD Kedaung Kaliangke 07, Jakarta Barat,  
*Sinar Harapan*, Rabu 29 Juli 1981)

## 3. DOA UNTUK TEMAN-TEMAN DI GALUNGGUNG

Tuhan  
 beri mereka semangat untuk selalu mengingat-Mu  
 beri mereka lampu untuk menerangi jalan ke rumah-Mu  
 beri mereka tempat sedikit saja untuk bertamu di kamar-Mu  
 dan terimalah duka mereka  
 Amin.

(Rini Yulianti, SD Inpres Awah 3, Rangkasbitung, *Sinar Harapan*,  
 27 Oktober 1982)

#### 4. DOA KAKAKKU

sebelum tidur malam  
 kulihat Thom kakakku  
 berdoa lama sekali  
 dan tiba-tiba saja  
 aku ingat kelakuanku yang jelek  
 terhadap Mama  
 karena ia tak punya uang  
 untuk membelikan "game watch"  
 ah.  
 Thom tentu sedang berdoa untukku  
 ketika kutanya  
 dia mengangguk sambil tersenyum  
 dan aku memutuskan  
 untuk segera meminta maaf kepada Mama .

(Lie Giok Hwa, *Zaman* No. 28/III, 4 April 1982)

#### C. Sosial

##### 1. DI TROTOAR JALAN ANU

Terik matahari membakar kepalaku  
 dahaga tak lagi dapat kubendung  
 tiba-tiba seorang anak kecil datang  
 dengan muka pucat  
 lalu kutanya  
 berilah aku uang untuk sekadar beli es  
 dari pagi aku belum makan dan minum  
 lalu kuberikan uangku kepadanya  
 karena kata Pak Guru  
 orang yang memikirkan kepedihan orang lain  
 akan dipikirkan oleh Tuhan

(Nunung Magfur Susan, SD Pujut I Batang, *Suara Karya*, 26 Juni 1982)

##### 2. PELANGI

Kau jangan merasa iri  
 bila melihat pakaianku belang sepertimu

ini hanya perca yang dijahit Mama  
ketika ulang tahunku

(Omi Intan Naomi, *Zaman* No. 13/IV, 19 Desember 1982)

#### D. Lingkungan Hidup

##### 1. ANGREKKU SAYANG

anggrekku kini sedang berbunga  
baunya harum ke mana-mana  
semua yang melihatnya akan tergoda

datanglah adikku merengek-rengok  
minta dipetikkan bunga itu  
aku sedih tapi aku kasihan pada adikku

sebab aku tak tega melihat adikku menangis  
lalu kupetikkan satu  
bunga itu seperti orang yang menangis  
hatiku sangat pilu melihatnya

oh, bunga anggrekku  
maafkanlah daku ini  
karena kesalahanku memetikmu  
demi adikku yang kusayang dan  
daku pun sayang padamu

(Mimin Ulfah Amini, SD Leuwunggajah, Ciledug, Cirebon, *Bobo*,  
No. 1/XI, 11 April 1981)

##### 2. TAMAN BUNGA DAN BURUNG PIPIT

bunga-bunga itu menangis  
jika aku tengah menyiraminya  
burung-burung pipit itu menangis  
jika induknya tengah mengurusnya

aneka macam bunga tumbuh  
di halaman rumahku  
mawar, anggrek, melati

suplir, samarinda dan gandasoli  
 mereka dan burung-burung pipit itu  
 menyanyi untuk di hatiku  
 setiap pagi

aku sempat berduka  
 ketika pipit yang bersarang  
 di pohon mangga  
 ditembak mati seorang tetangga  
 yang nakal  
 aku sempat melihat ketika  
 burung itu menggelepar  
 di tanah

persetan dengan tetanggaku itu!  
 ia bangga dan tertawa  
 sedang hatiku menangis

bunga-bunga itu menangis  
 jika aku lupa menyiraminya  
 anak-anak pipit juga menangis  
 ketika semalaman kedinginan  
 semua membutuhkan perhatian  
 dan kasih sayang  
 seperti juga manusia

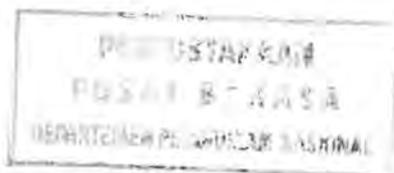
(Evelyn Avenina Ratih, SD, Siliwangi, Garut, *Sinar Harapan*,  
 6 Januari 1982)

## E. Keluarga

### 1. AYAHKU

dia orang kecil  
 jabatannya pun kecil  
 tetapi dia orang besar  
 besar dalam pandanganku  
 presiden dalam perasaanku

ayahku tidak kaya harta  
 kekayaannya ialah cita-cita



dia minyak, dia obor  
 dia jalan, dia jenjang  
 kami tinggal memanfaatkannya

ayahku presiden  
 dalam hatiku  
 dalam hati kami

(Eddy Juniaman, kelas 6 SD, *Puisiku Duniaku*)

## 2. MAMA

(buat mama tercinta)

Mama ....

Kau kuanggap wanita yang paling mulia  
 Paling mulia dari seluruh wanita di dunia  
 Wanita yang lembut ... selembut kain sutera -

....

Mama ....

maafkan aku

Bila;

aku suka membantah perkataanmu

Mama ....

kau suka menjewer kupingku  
 karena,  
 aku sering mengganggu adik

Mama ....

Lewat bisikan sajak ini  
 aku hanya dapat berkata  
 "maafkan aku Mama"

(Vibien Sudono, Pekalongan, *Suara Karya*, 9 Juni 1977)

## 3. HARI INI

Tuhan,  
 hari ini ada piring terbang di rumahku  
 ah,

ternyata  
 orang-orang tua pun masih suka bertengkar  
 seperti aku dengan adikku  
 Tuhan,  
 kenapa tidak Kau ciptakan piring kaca  
 yang anti pecah  
 agar tak mengundang bahaya  
 bila ibu mulai menerbangkannya?

(Sisilia Lilies S., K.H. Mustain 45 Tuban, *Zaman* No. 39/II, 21 Juni 1981)

## F. Kepahlawanan

### 1. WARISAN SEORANG PEJUANG

Kain sarung usang  
 Baju hitam komprang  
 Bambu runcing  
 Dan sebilah pedang  
 Dan satu lagi  
 Bendera merah putih Sang Saka  
 Yang telah tua termakan usia

Itu hartaku  
 Warisan orang tuaku  
 Bukan sawah  
 Bukan ladang  
 Bukan rumah yang besar  
 Tetapi adalah semangat juang yang besar  
 Dan sebuah sejarah  
 Dalam merebut kemerdekaan

(Dinar Pramesti, SD Pandeyan I kelas VI, Tasik Madu, Karang Anyar,  
 Surakarta, *Suara Karya*, 22 Agustus 1981)

### 2. PAHLAWAN

Di antara tebaran peluru  
 Dalam genggamannya  
 Ia gagah menyerbu

Sepucuk bambu runcing di tangan  
 Siap untuk mematuk lawan  
 Engkau berjuang sekuat tenaga  
 Jiwa melayang engkaupun rela

(Mintardjo, kelas VI SDN Dengok I, Playen, Yogyakarta, *Gatotkaca*,  
 No. 21/XII, 5 November 1981)

## G. Kejiwaan

### 1. BINGUNG

Ada sepotong roti  
 yang dengan tidak sengaja  
 terkena air olehku  
 dan kini roti itu basah  
 aku ingin memakannya  
 tetapi ....  
 tentu rasanya tidak enak  
 ada dua godaan hatiku yang sedang  
 berantam, bertempur  
 yang satu berkata:  
 'buang saja roti keparat itu  
 kan rasanya sudah tidak enak'  
 tapi yang satunya berkata lain:  
 'makan saja roti itu, kan sayang  
 kalau dibuang'  
 terus saja godaan hatiku berantem  
 yang mana aku harus pilih?  
 selama berpikir aku pusing  
 bingung ....  
 dan akhirnya aku pilih jalan keluar sendiri  
 roti itu tetap kutaruh di piring  
 kutunggu sampai basi dan roti itu akan  
 menjadi makanan semut-semut

(Anita Marta, 11 tahun, *Puisiku Duniaku*)

### 2. KENAPA AKU NANGIS?

Ibu bilang aku cengeng

Ayah bilang aku cengeng  
Mereka tak tahu  
Kenapa aku nangis  
Bukuku dirusak kucing

(Susi Sudiarto, kelas 3 SD, *Puisiku Duniaku*)

## MASALAH PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DI DAERAH DWIBAHASA DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA

H. Sappena Mustarim

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Barat

### Pendahuluan

Dalam *Pedoman Khusus Bidang Studi Bahasa Kurikulum 1975* telah dicantumkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat dwibahasa. Kondisi ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas. Pada kenyataannya pengaruh kedwibahasaan yang menimbulkan masalah dalam pengajaran bahasa Indonesia ini lebih banyak dijumpai di tingkat sekolah dasar daripada di tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Oleh karena itu, masalah pengajaran bahasa Indonesia yang akan dibicarakan dalam kertas kerja ini dititikberatkan pada masalah pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, dalam hal ini khususnya di wilayah Jawa Barat.

Masalah pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar sangat perlu segera dicari jalan pemecahannya sebab seperti dikemukakan Halim (1983), pemilihan bahan pengajaran dan pengajaran bahasa yang efisien pada tingkat pendidikan dasar merupakan sarana atau jalur pembinaan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, yang sangat menentukan.

Sebetulnya sudah sejak sebelum perang masalah pengajaran bahasa di daerah dwibahasa ini menjadi bahan pembicaraan dan telaahan, baik oleh para ahli bahasa, pengajar bahasa, maupun peminat bahasa. Umumnya para

ahli dan para peneliti beranggapan bahwa timbulnya masalah tersebut disebabkan oleh tidak diperhitungkannya latar belakang bahasa ibu dan latar belakang sosiokultural yang beragam dari murid sekolah dasar dalam menentukan bahan pelajaran dan metode penyampaiannya (Rusyana, 1975; Broto 1980; dan Nurdin Yatim, 1983).

Kertas kerja ini dibuat dengan harapan kongres dapat memberikan masukan, jalan keluar manakah yang paling efektif dan paling efisien yang dapat dilaksanakan di daerah dwibahasa untuk memecahkan masalah pengajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar tersebut. Sebagai bahan pemikiran, dalam kertas kerja ini dikemukakan

- (1) pendapat dan hasil penelitian para ahli tentang masalah pengajaran bahasa Indonesia di Jawa Barat;
- (2) alternatif pemecahan yang telah dilaksanakan di Jawa Barat; dan
- (3) saran yang dianggap dapat menghilangkan masalah tersebut.

#### **Kesukaran yang Dihadapi Anak dalam Pengajaran Bahasa Indonesia**

Walaupun bahasa Indonesia dan kebanyakan bahasa daerah berada pada satu rumpun bahasa dan karenanya dalam beberapa segi kebahasaannya terdapat persamaan, tidak dapat disangkal terdapat pula beberapa perbedaan. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya kesukaran bagi anak sekolah dasar yang mempelajari bahasa Indonesia yang pada saat masuk sekolah telah menguasai bahasa daerah sebagai bahasa ibu.

Anak yang berusia lima tahun pada umumnya telah menguasai semua pola suatu bahasa yang diajarkan kepadanya secara alamiah sejak ia sanggup menanggapi peristiwa berbahasa di lingkungan keluarganya. Bila pada usia tujuh tahun—ketika ia masuk sekolah dasar—langsung belajar bahasa Indonesia, maka bahasa itu akan diterimanya sebagai bahasa kedua. Dalam mempelajari bahasa kedua ia akan menghadapi beberapa kesukaran hampir pada setiap bidang kebahasaan: fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik.

Di wilayah Jawa Barat yang menjadi bahasa ibu anak-anak pada usia tujuh tahun pada umumnya bukan bahasa Indonesia. Kira-kira 90% dari mereka telah mahir berbahasa Sunda sebagai bahasa ibunya.

Dalam bidang fonologi, bahasa Sunda mempunyai perbedaan jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Demikian juga dalam hal lagam bicara yang termasuk pada bidang suprasegmental. Perbedaan ini sedikit banyak akan menimbulkan kesukaran bagi anak bila dituntut untuk mengucapkan kata atau kalimat bahasa Indonesia dengan lagam baku.

Suku kata terbuka pada akhir kata bahasa Indonesia akan diucapkan dengan glotal (ʔ) atau (h).

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <i>ini budi</i>     | 'ini' budi'       |
| <i>ini ibu budi</i> | 'ini' 'ibu' budi' |
| akan diucapkan      |                   |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <i>itu sepeda</i> | 'ituh sapedah |
| akan diucapkan    |               |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <i>hatinya riang</i> | hatinah riang |
| akan diucapkan       |               |

Suara konsonan *k* pada suku akhir bahasa Indonesia sering tidak diucapkan secara jelas bila kebetulan padanannya dalam bahasa Sunda ditulis tanpa *k*.

|                |      |
|----------------|------|
| <i>bapak</i>   |      |
| akan diucapkan | bapa |

|                |     |
|----------------|-----|
| <i>adik</i>    |     |
| akan diucapkan | adi |

Sebaliknya, konsonan *k* pada suku akhir bahasa Indonesia yang seharusnya diucapkan dengan glotas ( ) akan diucapkan dengan jelas bila kata tersebut dikenalnya.

|                |       |
|----------------|-------|
| <i>nenek</i>   |       |
| akan diucapkan | nenek |

|                |       |
|----------------|-------|
| <i>tidak</i>   |       |
| akan diucapkan | tidak |

Pengucapan diftong yang ada pada bahasa Indonesia merupakan kesulitan khusus bagi anak-anak yang berbahasa ibu bahasa Sunda. Bila anak-anak tersebut melihat huruf demi huruf, mungkin ia akan mengucapkan sesuai dengan huruf yang tampak. Bila guru memberi contoh ucapannya, maka akan timbul pula kesukaran bagi anak-anak tersebut. Anak-anak Sunda merasa asing dengan bunyi diftong ( $a^i$ ) dan ( $a^u$ ).

|                |          |      |         |
|----------------|----------|------|---------|
| <i>pakaian</i> |          |      |         |
| akan diucapkan | paka'ian | atau | pakejan |

|                |         |      |        |
|----------------|---------|------|--------|
| <i>pandai</i>  |         |      |        |
| akan diucapkan | panda'i | atau | pandej |

|                |                |      |               |
|----------------|----------------|------|---------------|
| <i>bangau</i>  |                |      |               |
| akan diucapkan | <i>baŋa'u</i>  | atau | <i>baŋow</i>  |
| <i>kerbau</i>  |                |      |               |
| akan diucapkan | <i>kaɾba'u</i> | atau | <i>kaɾbow</i> |

Selanjutnya, akan tampak pula kesukaran anak dalam hal lagam bicara atau intonasi. Intonasi dalam bahasa Sunda—yang amat kentara—pada pengucapan kata terakhir, yakni keajegan pola 13.2 # (pelan, tinggi, panjang, sedang, dan senyap) seperti pada contoh di bawah ini.

|   |              |               |                  |   |
|---|--------------|---------------|------------------|---|
|   | <i>ibu</i>   | <i>pandai</i> | <i>memasak</i>   |   |
| # | 1 2          | 2 2           | 1 3 . 2          | # |
|   | <i>iwana</i> | <i>duduk</i>  | <i>di lanrai</i> |   |
| # | 1 2          | 2 2           | 1 3 . 2          | # |

Pada bidang morfologi Rusyana (1975) telah banyak memberi contoh kesalahan anak-anak Sunda dalam berbahasa Indonesia. Kesalahan itu disebabkan sistem morfologi Sunda sering mempengaruhi pembentukan kata dalam bahasa Indonesia.

Contoh:

- (1) Kayu itu *dibelahan*.
- (2) Setelah bersih pakaiannya lalu *dijemurkan*.
- (3) Saya masuk lagi terus *menuliskan* pekerjaan rumah.
- (4) Sudah *anakan* lalu disapuh.
- (5) Adik saya *loloncatan*.
- (6) Anak itu *ketiduran*.

Kalimat (1) seharusnya berbunyi:

(1) a Kayu-kayu itu dibelah.

(1) b Kayu itu dibelah-belah.

Timbulnya kata jadian *dibelahan* karena dalam bahasa Sunda terdapat kata jadian *dibeulahan* 'dibelah-belah, dibelah beberapa kali'.

Kalimat (2) seharusnya:

(2) a Setelah bersih pakaiannya itu dijemur.

Kata jadian *dijemurkan* yang diucapkan anak tersebut disebabkan dalam bahasa Sunda ada kata *dipokeun* 'dijemur'.

Kalimat (3) seharusnya:

(3) a Saya masuk lagi lalu menulis pekerjaan rumah

Karena dalam bahasa Sunda ada kata jadian *nuliskeun* 'menulis sesuatu', maka anak itu mengucapkan *menuliskan* yang tidak tepat bila digunakan pada kalimat (3).

Kalimat (4) seharusnya:

(4) a Setelah beranak lalu disapih.

Kata *beranak* bila diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda menjadi *anakan*. Pembentukan kata jadian dengan mengimbuhkan akhiran *-an* pada pokok kata, yang biasa terjadi pada bahasa Sunda, rupa-rupanya terbawa waktu anak tersebut berbahasa Indonesia.

Kalimat (5) seharusnya:

(5) a Adik saya berloncat-loncatan

*Dwipurwa...-an* dalam bahasa Sunda merupakan konstruksi yang lazim seperti pada kata *luluncatan* 'berloncat-loncatan', tetapi konstruksi tersebut terasa janggal bila dipergunakan dalam bahasa Indonesia.

Kalimat (6) seharusnya:

(6) a Anak itu tertidur

*Ketiduran* yang diucapkan anak tersebut terpengaruh oleh kata jadian *kesarean* 'tertidur' yang ada dalam bahasa Sunda.

Pada bidang sintaksis kekisruhan dalam struktur kalimat Indonesia sering dibuat anak-anak di Jawa Barat. Seperti pada bidang-bidang lain hal itu disebabkan pengaruh dari kaidah bahasa Sunda kepada pemakaian bahasa Indonesia.

Kalimat *Surat itu telah dibaca oleh saya* sering terungkap untuk kalimat yang sebenarnya harus *Surat itu telah saya baca*. Kalimat pertama tentu saja sejalan dengan struktur bahasa Sunda *Eta surat geus dibaca ku kuring*.

Demikian pula kalimat *Dipukul olehnya anjing itu* sejalan dengan pola *Diteunggeul ku manehna eta anjing teh*. Pada kalimat baku bahasa Indonesia seharusnya kalimat tersebut *Dipukulnya anjing itu*.

Kalimat *Oleh saya buku itu diambil* benar-benar merupakan alihan pola kalimat bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia. Seorang anak di Jawa Barat sering mengucapkan kalimat tersebut untuk menerjemahkan kalimat bahasa Sunda *Ku kuring eta buku teh dicokot*. Pola kalimat *Saya ambil buku itu* bagi anak-anak sekolah dasar merupakan hal yang asing.

Memang cukup banyak kalimat bahasa Indonesia yang dibuat anak-anak di Jawa Barat dengan berpolakan kalimat bahasa Sunda. Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh kalimat yang sering diucapkan (dengan tanda huruf a), pola kalimat bahasa Sunda (dengan tanda huruf b), dan kalimat

baku dalam bahasa Indonesia (dengan tanda huruf *c*).

- (1)a Ia itu anak pedagang  
 (1)b *Manehna teh anak padagang.*  
 (1)c Ia anak pedagang.
- (2)a Lebih baik jalan kaki, dekat ini.  
 (2)b *Mending leumpang, deukeut jeuh.*  
 (2)c Lebih baik kita berjalan kaki, (karena tempat itu) tidak terlalu jauh (dari sini).
- (3)a Saya mencari Maman ke sana ke mari.  
 (3)b *Abdi neangan Maman ka ditu ka dieu.*  
 (3)c Saya mencari Maman ke mana-mana.
- (4)a Aku menunggu Nani, tetapi tak datang saja.  
 (4)b *Kuring ngadagoan Nani, tapi teu datang bae.*  
 (4)c Aku menantikan kedatangan Nani, tapi ia tak kunjung tiba.
- (5)a Baju saya ada yang curi.  
 (5)b *Baju kuring aya nu maling.*  
 (5)c Baju saya dicuri orang.

Dengan memperhatikan kesalahan seperti yang telah dilaksanakan di atas, baik dalam pengucapan dan pembentukan kata jadian, maupun pada pembuatan susunan kalimat, maka jelaslah terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi anak-anak di Jawa Barat di dalam menerima pelajaran bahasa Indonesia. Bila saat ini sering dikemukakan bahwa pelajaran bahasa Indonesia di sekolah bertujuan agar murid mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, kiranya para perencana bahasa atau para penyusun pelajaran bahasa Indonesia seyogianya memperhatikan kesukaran-murid dalam mempelajari bahasa tersebut. Perhatian itu ditujukan pada saat murid mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah dasar, saat kepekaan mereka masih tinggi. Bila tidak demikian maka kesukaran yang mengakibatkan kesalahan berbahasa Indonesia sejak anak-anak akak terus berlangsung. Memperbaiki kesalahan pada tahap kemudian akan lebih sukar bila dibandingkan dengan penanggulangan pada tahap dini.

#### Beberapa Pendapat dan Cara dalam Pemecahan Masalah

Ada beberapa teori yang dikemukakan para ahli bahasa yang isinya berkaitan dengan kesukaran anak dalam mempelajari sesuatu bahasa. Teori yang masih bersifat umum tersebut ditunjang lagi oleh beberapa hasil penelitian

mengenai kesukaran yang dialami anak-anak dalam mempelajari bahasa kedua, yaitu yang dilakukan Broto dan Rusyana. Kedua orang tersebut memilih lapangan penelitian di wilayah Jawa Barat yang sebagian besar penduduknya—termasuk anak-anak—menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibunya.

Lado (1979) mengemukakan tahap-tahap belajar berbahasa yang dialami anak-anak ialah (1) mencoba-coba; (2) konfigurasi total (gestal); dan (3) komprehensif.

Sejalan dengan pendapat Lado di atas, Pei (1971) mengemukakan pendapat, seorang anak yang berusia lima tahun sudah menguasai pola bahasanya, betapa pun pola bahasa tersebut terbilang ruwet bagi orang asing.

Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan, anak Sunda yang baru di kelas satu sekolah dasar sudah menguasai bahasa Sunda sebagai bahasa ibunya sehingga bagi mereka bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua.

Rusyana (1975) mengemukakan bahwa dalam menyusun bahan pelajaran bahasa Indonesia hendaknya dipertimbangkan apa yang mungkin timbul bagi murid yang berbahasa Sunda, di samping dipertimbangkan pula apa yang merupakan kemudahannya. Hal yang dapat menimbulkan masalah perlu diatasi dengan memberikan pelajaran dan latihan yang sesuai dengan keperluan itu. Dengan demikian, perbedaan latar belakang bahasa murid dipertimbangkan dalam pengajaran bahasa Indonesia. Sementara itu, Broto (1980) mengajukan saran agar dalam penyelenggaraan pengajaran bahasa Indonesia hendaknya menerapkan pendekatan linguistik kontrastif. Kata-kata atau kalimat bahasa Indonesia yang dikenalkan guru kepada murid dibandingkan dengan bahasa daerah secara lisan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa bahan yang disajikan secara kontrastif lisan dengan lisan tersebut termasuk latihan mendengarkan. Latihan ini akan berguna bagi murid dalam menganalisis kata atau kalimat bahasa Indonesia sehingga murid dapat memahami dengan jalan mencari dan menemukan sendiri.

Dalam kertas kerja yang disampaikan pada seminar Penulisan Bahan Pengajaran Bahasa, Halim (1983) menyatakan bahwa masyarakat bahasa daerah, dan bahasa asing memiliki hubungan dan saling mempengaruhi. Adanya hal tersebut merupakan faktor yang harus diperhitungkan sebagai dasar kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta peningkatan mutu pengajaran bahasa. Selain itu, disebutkan pula bahwa pemilihan bahan pengajaran bahasa Indonesia dilakukan dengan memperhitungkan latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan atau latar belakang bahasa ibu murid.

Keseluruhan pendapat yang telah dikemukakan di atas sejalan dengan konsepsi pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Konsepsi ini telah dituangkan dalam *Pedoman Khusus Bidang Studi Bahasa*

sebagai berikut.

- (1) Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat dwi-bahasa. Sebagian besar masyarakat kita menguasai dua bahasa, yaitu bahasa daerah sebagai bahasa pertama (ibu) dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Kondisi ini besar pengaruhnya.
- (2) Seperti kita sadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat dwi-bahasa, ada satu usaha yang digerakkan oleh ahli bahasa kita untuk melancarkan metode "Struktural Analitik Sintetik". Metode ini akan memperkenalkan lebih dahulu *struktur totalitas*, kemudian *dianalisis untuk mendapatkan bagian-bagian yang berfungsi*. Setelah mengenal bagian-bagian itu, maka *dikembalikan lagi bagian-bagian tadi menjadi struktur totalitas seperti* pengamatan semula, yang kita sebut mensintesa.
- (3) Walaupun demikian, alangkah baiknya bagi seorang guru-pengajar bahasa itu tetap dan perlu mempelajari beberapa metode pengajaran bahasa yang pernah diterapkan untuk bahasa Indonesia sebagai perbendaharaan pengetahuan guna memberikan kemampuan baginya mengajar bahasa dengan variasi. Apalagi pengajaran bahasa Indonesia meliputi bermacam-macam kegiatan berbahasa, yang setiap kegiatan berbahasa itu mengait unsur-unsur ilmu bahasa. Tidak dapat pula diabaikan betapa besarnya pengaruh bahasa ibu (daerah) dalam pergaulan masyarakat Indonesia, dan membawa pengaruh pula bagi anak didik. Ini berarti pula struktur bahasa daerah dan dialek itu akan mempengaruhi juga struktur bahasa Indonesia bagi anak didik.

Dengan menyimak teori, pendapat, dan ketentuan di atas jelaslah kiranya bahwa pengajaran bahasa Indonesia untuk anak-anak sekolah dasar yang berbahasa ibu bahasa Sunda perlu memperhatikan faktor dan latar belakang bahasa ibu tersebut. Bahan yang disajikan harus mampu menekan (bahkan menghilangkan) kesukaran-kesukaran yang timbul. Salah satu di antaranya untuk mencapai tersebut ialah harus adanya buku-buku pelajaran bahasa Indonesia yang menunjang ke arah itu. Sebetulnya buku-buku semacam itu pernah ada dan pernah dipergunakan, yaitu *Tjepat dan Moedah* dan *Mahir Berbahasa Nasional*.

Buku *Tjepat dan Moedah* karangan Soeria di Radja dan R.I. Adiwidjaja yang dipergunakan di sekolah dasar Jawa Barat pada tahun-tahun sebelum perang sampai menjelang penyerahan kedaulatan mengandung beberapa pokok pikiran yang memperhatikan kesukaran murid dalam mempelajari bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Para pengarangnya tahu benar kesukaran yang

akan dihadapi anak-anak yang berbahasa ibu bahasa Sunda. Dengan demikian, kesalahan yang mungkin timbul telah diusahakan agar jangan sampai terjadi, yakni dengan cara memberi peringatan secara dini.

Peringatan itu berupa keterangan atau penjelasan bagaimana perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda.

Dalam bidang morfologi, pengarang memberi peringatan kepada murid agar jangan membuat kesalahan. Umpamanya, kata-kata yang memakai awalan *ber-* atau *meN-* tidak boleh ditambahi awalan *di-*.

Tidak boleh mengucapkan *diberdirikan*, tetapi harus *didirikan*.

Tidak boleh mengucapkan *dimencuri*, tetapi harus *dicuri*.

Tidak boleh mengucapkan *dimenulis*, tetapi harus *ditulis*.

Dalam bidang sintaksis, pengarang menulis kalimat yang benar, terjemahannya dalam bahasa Sunda, dan kalimat yang salah, contohnya:

*Saya tanyakan* = Ku kuring ditanyakeun, bukan *Ditanyakan oleh saya*.

*Saya tulis* = Ku kuring ditulis, bukan *Ditulis oleh saya*.

*Saya tanya* = Ku kuring ditanya, bukan *Ditanya oleh saya*.

Pada tahun 1973 terbit buku *Mahir Berbahasa Nasional* karangan Muh. Kasim dkk. yang dikhususkan untuk sekolah dasar di Jawa Barat. Hampir sama dengan buku *Tjepat dan Moedah*, pada buku tersebut banyak terdapat bahan pelajaran yang membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda, contohnya:

#### Bahasa Indonesia

Musang itu *mencuri* ayam.

Ada *maling* mencuri kambing.

Pak Asik menyimpan *gabah* di gudang.

Anak-anak bermain-main di *bangsal*.

*Sepatah* pun Tono tidak berkata.

Ayah *menepuk-nepuk* pundak Tono.

Sudah *kaubaca* buku ini?

Pisau ini jangan *kaupinjamkan*.

#### Bahasa Sunda

Eta careuh *maling* hayam.

Aya *bangsat* maling embe.

Pa Asik neundeun *bangsal* di dang.

Barudak arulin di *elos*.

Tono teu ngomong *sakemek-kemek* acan.

Apa *nepakan* tak-tak Tono.

Ieu buku *geus dibaca ku maneh?*

Ieu peso *diijeumkeun* ku maneh.

## Simpulan dan Saran

Pengajaran bahasa Indonesia diadakan pada setiap jenjang persekolahan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Betapa pentingnya sehingga pada *Pokok-pokok Pikiran Pembaharuan Pendidikan Nasional* (1979)—yang sampai saat ini mungkin terus digodok—terdapat subpokok pikiran yang menyatakan bahwa "penguasaan bahasa Indonesia secara baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya harus merupakan salah satu persyaratan dasar bagi calon mahasiswa dan calon pegawai, terutama pegawai negeri". Bila subpokok pikiran tersebut dijadikan kebijakan, maka akan terasa makin pentingnya pengajaran bahasa Indonesia itu harus diselenggarakan sebaik-baiknya agar setiap warga negara berkemampuan seperti yang disyaratkan tadi.

Usaha pemerintah memang tidak sedikit. Pada tahun 1975 diberlakukan kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Di tingkat sekolah dasar pengajaran bahasa Indonesia diadakan pada tiap kelas, dari kelas I sampai kelas VI, masing-masing delapan jam per minggu. Lima tahun sebelum kurikulum 1975 lahir, tepatnya pada tanggal 1 April 1970, keluar keputusan pimpinan Subproyek Pusat Pendidikan Kurikulum Sekolah Dasar tentang Pembentukan Regu Penyusun Buku Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar. Sejak itulah buku-buku pelajaran bahasa Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai buku paket, disusun dengan menggunakan metode SAS. Paket buku tersebut telah disebarluaskan ke sekolah dasar di seluruh tanah air, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semula direncanakan bahwa paket buku tersebut akan dipergunakan di daerah-daerah yang berbahasa daerahnya dekat sekali dengan bahasa Indonesia. Rencana ini dibuat bersama-sama dengan rencana pembuatan buku-buku khusus untuk Jawa, Sunda, Madura, dan Bali, yakni daerah-daerah yang dianggap mempunyai bahasa daerah yang masih dipelihara oleh masyarakatnya dan mempunyai kaidah-kaidah yang berjauhan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Di daerah-daerah itu, menurut rencana, pelajaran bahasa Indonesia diberikan di kelas I dan II masing-masing dua jam pelajaran per minggu dengan menggunakan buku yang disusun tersendiri, sedangkan di kelas III dan IV akan menggunakan buku yang disusun oleh daerah yang bersangkutan. Ternyata buku yang khusus untuk kelas I dan II bagi daerah Jawa, Sunda, dan lain-lain itu tidak jadi dilaksanakan karena tidak dimasukkan ke dalam Daftar Isian Proyek (DIP), dan karena itu tidak ada biaya (Broto, 1980:26).

Dengan informasi itu jelaslah bahwa pemerintah pun sejak lama telah memahami kesulitan yang ada di daerah Jawa, Sunda, Madura, dan Bali, dalam menyelenggarakan pengajaran bahasa Indonesia bila menggunakan buku-buku paket yang diseragamkan di seluruh tanah air. Kemudian setelah ternyata hanya buku paket itu yang diajarkan, maka kesulitan itu benar-benar

terjadi. Hal ini telah dikemukakan oleh para peneliti (Rusyana, 1975, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1976/1977 dan 1977/1978; Broto, 1980). Sehubungan dengan itu, saran yang dapat dikemukakan pada kertas kerja ini ialah sebagai berikut.

- (1) Penelitian tentang hasil penggunaan buku paket pengajaran bahasa Indonesia perlu diselenggarakan di daerah, terutama di daerah yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Penelitian itu sebaiknya dihubungkan pula dengan pelaksanaan kurikulum 1975. Dengan penelitian tersebut diharapkan agar Pemerintah mendapat masukan dalam merevisi kurikulum 1975 dan penyusunan buku paket berikutnya yang lebih sesuai dengan keperluan.
- (2) Pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di sekolah dasar berdasarkan pendekatan linguistik kontrastif merupakan salah satu alternatif yang harus dipertimbangkan pelaksanaannya. Rencana pemerintah yang akan menyusun buku-buku tersendiri untuk digunakan di daerah-daerah tertentu sebaiknya diteruskan sampai tahap pelaksanaannya dengan memperhatikan pendekatan linguistik kontrastif.
- (3) Sesuai dengan kebijakan nasional tentang bahasa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, dan penjelasannya, serta sesuai pula dengan perkembangan poleksosbud dewasa ini, sewajarnya apabila Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mulai sekarang mempertimbangkan kemungkinan didirikannya Balai Penelitian Bahasa di tempat lain di samping Yogyakarta, Singaraja dan Ujung Pandang, misalnya di (1) Bandung untuk meneliti dan mengembangkan bahasa dan sastra di daerah Jawa Barat, terutama bahasa dan sastra Sunda (pemukainya lebih dari 20 juta jiwa); (2) di Padang atau di Bukittinggi, untuk bahasa-bahasa daerah di Sumatera; (3) di Banjarmasin untuk bahasa-bahasa daerah di Kalimantan (Maman Sumantri, 1978). Dengan didirikannya Balai Penelitian Bahasa di tempat tersebut, termasuk di Bandung, maka masalah pengajaran Bahasa Indonesia di daerah pun akan dapat teratasi. Diharapkan agar balai tersebut akan dapat berfungsi, bukan saja pada pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra, tetapi juga pada bidang pengajarak bahasa, termasuk pengajaran bahasa Indonesia di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Broto, A.S. 1980. *Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Kedua di Sekolah Dasar berdasarkan Pendekatan Linguistik Kontrastif*. Jakarta: Bintang Bulan.
- Burhan, Jazir. 1983. "Evaluasi terhadap Bahan Pengajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar". Kertas kerja pada *Seminar Penulisan Bahan Pengajaran Bahasa* di Yogyakarta, 30 Mei—4 Juni 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1983. *Bahasa Indonesia: Pelajaran Bahasa*, Jilid 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 4B, 5A, 5B, 6A, dan 6B. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadijaja, Tardjan. 1957s *Asas-asas Pendidikan Bahasa Ibu*. Bandung: Ganaco NV.
- Halim, Amran (Ed.). 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- . 1976. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia". Dalam Amran Halim (Ed.). *Politik Bahasa Nasional*, Jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- . 1983. "Dasar Kebijaksanaan Pemilihan Bahan Pengajaran Bahasa untuk Sekolah Dasar". Kertas kerja pada *Seminar Penulisan Bahan Pengajaran Bahasa* di Yogyakarta 130 Mei—4 Juni 1983.
- Kasim, Muh., dks 1963. *Mahir Berbahasa Nasional*. Bandung: PT Sanggabuwana.
- Kurikulum Sekolah Dasar 1975: Garis-garis Besar Program Pengajaran Buku II D Bidang Studi Bahasa Indonesia*. 1978. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Lado, Robert. 1978. *Language Teaching: A Scientific Approach*. New Delhi: Tata Mc Graw-Hill Publishing.
- Oka, I Gusti Ngurah. 1976. "Pembinaan Pengajaran Bahasa Indonesia". Dalam Amran Halim (Ed.). *Politik Bahasa Nasional*, Jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pei, Mario. 1971. *Kisah daripada Bahasa*. Terjemahan Nugroho Notosusanto dari *The Story of Language*. Jakarta: Bhatara.
- Pokok-pokok Pikiran Pembaharuan Pendidikan Nasional*. 1979. Jakarta: Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rusyana, Yus. 1975. *Interferensi Morfologi pada Penggunaan Bahasa Indonesia oleh Anak-anak yang Berbahasa Pertama Bahasa Sunda Murid SD di Jawa Barat*. Disertasi.
- Soewargana, Oejeng. 1969. *Pendidikan Prasarana dari Semua Sarana Pembelajaran*. Bandung: Ganaco NV.
- Yatim, Nurdin. 1983. "Kaitan Sosiolinguistik Kultural dalam Penyediaan Bahan Pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar: Kasus Murid Berlatar Belakang Sosiokultural Makassar". Kertas kerja pada *Seminar Penulisan Bahan Pengajaran Bahasa* di Yogyakarta, 30 Mei—4 Juni 1983.

## **USAHA MENINGKATKAN PROSES BELAJAR MENGAJAR SASTRA INDONESIA**

Nani Tuloli

FKIP Universitas Sam Ratulangi, Gorontalo

### **Pengajaran Sastra**

Pendidikan dan pengajaran selalu menyangkut manusia. Ada manusia yang dididik dan diajar atau biasa dikenal dengan subjek didik, di satu pihak ada pula manusia yang mendidik dan mengajar. Interaksi antara keduanya itu bisa terwujud dengan adanya bahan yang dididikkan atau diajarkan, sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia yang dididik. Proses yang terjadi antara kedua kutub dengan menggunakan bahan itulah yang disebut proses belajar-mengajar.

Pada kesempatan ini saya akan meninjau bagaimana proses belajar-mengajar dalam sastra Indonesia, serta beberapa kemungkinan usaha penyempurnaannya. Proses belajar-mengajar sastra sangat penting dibicarakan mengingat hal berikut.

- (1) Sampai kini belum banyak yang membicarakan pengajaran sastra itu secara tuntas, padahal kita memerlukan landasan yang edukatif dalam melaksanakan pengajaran sastra itu.
- (2) Pengajaran sastra menjadi penting apabila dihubungkan dengan pembinaan dan pendidikan humaniora.
- (3) Pengajaran sastra lebih memperjelas pengajaran bahasa karena pengajaran sastra selalu dikaitkan dengan pengajaran bahasa Indonesia.

Dalam kurikulum pengajaran apresiasi sastra masih berada dalam ruang lingkup pengajaran bahasa.

(4) Sastra, menurut Jassin (1976:6), mengungkapkan penghayatan manusia yang paling dalam, dalam berbagai dimensi waktu dan di mana saja. Di mana pun manusia berada, sastra tetap menjadi unsur yang sangat menarik dan mengasyikkan. Sastra sebagai hasil kesenian mencakupi pengalaman bangsa dan suku bangsa dalam sejarah dan masyarakat, berisi apa yang pernah dipikirkan dan dirasakan sehingga dapat dipergunakan untuk menambah kearifan dan kebijaksanaan dalam kehidupan manusia.

(5) Sastra mampu membuat manusia lebih bijaksana, lebih mencintai hidup dan kehidupan ini serta lebih mendekatkan manusia kepada manusia lain bahkan kepada Tuhannya. Seni sastra mampu memanusiawikan manusia, mengembalikan manusia dari sikap nonhuman kepada sikap human (Suhariato, 1981:18).

Dari pertimbangan yang ditinjau dari berbagai segi itu, dapat dimengerti bahwa masalah pengajaran sastra bukan sekadar memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai pengaruh positif terhadap kehidupan manusia. Anak didik akan lebih dekat dengan kehidupannya, masyarakatnya dan kebudayaannya apabila mereka dapat menghayati isi dan hakikat yang terkandung dalam karya sastra.

Sebagai satu segi dari pengajaran secara keseluruhan di lembaga pendidikan, yang tidak dapat dilepaskan dari pengajaran lainnya, maka pengajaran sastra mempunyai berbagai permasalahan dalam proses belajar-mengajar di sekolah. Untuk lebih meningkatkan proses dan mutu pengajaran sastra perlu dipikirkan bagaimana perencanaan mengajarkannya, bagaimana kompetensi guru yang mengajarnya, dan bagaimana sistem penilaian atau ujian terhadap pengajaran sastra itu.

### Permasalahan Pengajaran Sastra di Indonesia

Dalam berbagai seminar tentang bahasa dan sastra telah banyak diemukakan orang permasalahan yang berhubungan dengan pengajaran sastra dan bahasa. Boen S. Oemarjati (Halim, 1979, no. 3:3—4) memajukan sekurang-kurangnya ada tiga masalah pengajaran apresiasi sastra di sekolah lanjutan atas.

1. Pengajaran Apresiasi Sastra merupakan bagian dari pengajaran bahasa Indonesia. Selain itu, materi pengajaran lebih menekankan hapalan istilah dan pengertian sastra serta pengenalan sejarah sastra dalam jalur

kronologi semata daripada mengakrabkan diri dengan karya sastra itu sendiri sembari mendalami makna sejarah bagi perkembangan sastra.

2. Beban pengajaran seorang guru bahasa Indonesia menjadi semakin membentuk lingkaran setan karena tuntutan pengajaran bahasa tidaklah sama dengan tuntutan pengajaran sastra.  
Jika yang pertama lebih mengarah pada keterampilan, maka yang kedua mensyaratkan keakraban yang berlapang dada dalam rengkuhan pengetahuan yang melampaui batas-batas kebahasaan.
3. Pilihan materi pengajaran dihadapkan dengan kenyataan yang menantang kebijaksanaan pendidikan yang digariskan. Artinya penambahan ragam sastra yang terjadi dalam masyarakat berkecepatan jauh lebih tinggi kemungkinan-kemungkinan penyesuaian kurikulum pendidikan yang sudah sarat dengan berbagai hambatan.

Permasalahan itu masih dapat diperluas dengan memperhatikan kompleksnya pengajaran sastra. Pengajaran sastra bukan hanya memberikan teori, sejarah dan kritik sastra. Akan tetapi, yang utama adalah mendekatkan karya sastra itu kepada siswa sehingga mereka di samping dapat menikmati karya sastra, menghargai karya sastra, tapi juga dapat mendorong pertumbuhan dan penciptaan karya sastra itu baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Buku-buku pengajaran sastra yang memenuhi kebutuhan di atas sekarang ini belum banyak pula. Penerbitan buku sastra belum menjangkau seluruh siswa yang membutuhkannya, bahkan dapat dikatakan masih banyak sekolah yang sangat miskin dengan bahan pengajaran sastra. Pada lain pihak belum pula tersusun buku pelajaran sastra untuk siswa yang bisa dijadikan pedoman bagaimana mempelajari sastra. Yang ada sekarang ialah buku pengantar sastra yang berisi teori-teori tentang sastra (Sumardjo, dalam Halim, 1979, No. 2:2). Buku-buku itu pun menurut pengalaman guru sastra belum sesuai dengan tuntutan kurikulum. Teori yang ada di dalamnya boleh dikatakan belum tuntas bila dilihat dari perkembangan teori sastra dan perkembangan karya sastra. Susunannya belum didasarkan pada prinsip-prinsip mengajarkan sastra yang baik, cara penerimaan siswa erat hubungannya dengan proses belajar-mengajar di sekolah.

Akibat dari belum tersebarnya secara merata buku-buku yang berhubungan dengan pengajaran sastra, serta belum adanya buku pedoman dan pegangan pengajaran sastra yang memadai, maka sering guru sastra menempuh cara yang tidak menguntungkan pengajaran sastra. Antara lain, mengganti jam pelajaran sastra dengan pelajaran bahasa atau pelajaran lain, atau mengajarkan sastra dengan buku yang sudah ketinggalan zaman, bahkan ada yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

## Perencanaan Pengajaran Sastra

Seperti juga pengajaran yang lainnya, pengajaran sastra memerlukan perencanaannya. Perencanaan itu dapat dibuat dalam dua ruang lingkup, yaitu (1) perencanaan pengajaran sastra di dalam kelas, dan (2) perencanaan pengajaran pendukung di luar kelas. Setiap ruang lingkup itu memerlukan pula tahapan kegiatan.

### 1. *Perencanaan Pengajaran Sastra di dalam Kelas*

Perencanaan di dalam kelas memerlukan pengkajian kurikulum dan berbagai persiapan yang mendukung program belajar-mengajar di kelas. Pengkajian kurikulum itu diperlukan agar pelaksanaan pengajaran itu sesuai dengan yang sudah digariskan Pemerintah yang menyangkut kebijaksanaan pengajaran sastra dan untuk apa sastra itu diajarkan kepada siswa. Siswa sebagai manusia yang akan dibentuk sebagai manusia Indonesia seutuhnya, tentu saja harus diarahkan dengan cara yang sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Di sini sastra itu selalu dikaitkan dengan kepentingan nasional, kepentingan pertumbuhan anak, dan kepentingan kebudayaan yang harus dimiliki dan diteruskan oleh siswa kelak. Oleh karena itu, guru harus mengetahui tujuan apa yang telah dituangkan dalam kurikulum sekolah tentang pengajaran sastra untuk tiap sekolah.

Kita mengenal ada tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional. Tujuan instruksional dibagi lagi atas tujuan instruksional umum (TIU sekarang TUP = tujuan umum pengajaran) dan tujuan instruksional khusus (TIK sekarang TKP = tujuan khusus pengajaran). Kecuali tujuan instruksional khusus maka yang lainnya sudah dapat diketahui dalam kurikulum. Sekarang tugas guru ialah mengelola tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus, dengan menentukan pengalaman apa yang perlu dilalui siswa dalam belajar siswa serta indikator-indikator apa yang tampak pada tingkah laku siswa untuk mengetahui berhasil tidaknya pengajaran sastra itu.

Untuk menentukan tujuan pengajaran sastra guru dapat juga menimba dari buku-buku apresiasi sastra. Misalnya, secara umum Effendi (1982:7) mengemukakan bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli cipta sastra dengan sungguh-sungguh hingga timbul pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Jadi, pengajaran sastra hendaklah dapat menumbuhkan kemauan siswa agar mereka bisa menghargai, merasai, dan mengerti isi karya sastra itu. Apabila kepekaan terhadap karya sastra itu telah tumbuh dan siswa sudah merasakan ada daya tarik terhadap karya sastra, maka kita selanjutnya mengharapkan mereka dapat menganalisis, membicarakan dan bahkan menciptakan karya sastra itu. Brahim (Ali, 1967:229) merumuskan tujuan pengajaran ialah menanamkan

rasa cinta sastra, sehingga siswa setelah dewasa akan mempunyai kegemaran, kemampuan penanggapan dan penilaian terhadap hasil-hasil sastra. Dalam hal ini, akan tumbuh berbagai indikator seperti watak, sikap yang baik terhadap sastra, senang dan mau menikmati yang bernilai seni.

Tujuan lain seperti dikemukakan oleh Moody (1977) bahwa pengajaran sastra itu akan mencakup empat aspek, yaitu: (1) menunjang kemampuan berbahasa, (2) meningkatkan pengetahuan berbudaya, (3) mengembangkan rasa karsa, dan (4) membentuk watak dan sikap yang baik.

Barangkali dengan mengkaji semua tujuan yang disebutkan di atas kita dapat merumuskan indikator yang menjadi patokan keberhasilan pengajaran sastra. Antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Ada perubahan sikap siswa dari tidak senang membaca karya sastra ke senang membaca karya sastra.
- 2) Ada usaha siswa untuk menikmati dengan penuh pengertian terhadap karya sastra yang dibacanya.
- 3) Siswa senang mengeluarkan pendapatnya tentang karya sastra yang dibacanya, baik secara tertulis maupun secara lisan.
- 4) Siswa gemar mencari dan mengumpulkan karya sastra.
- 5) Siswa menyenangi kegiatan perlombaan sastra, baik secara aktif maupun secara pasif.
- 6) Siswa dapat memetik nilai-nilai positif yang terdapat pada karya sastra, sehingga ia sering mengungkapkannya dalam pembicaraan ataupun diskusi sastra.
- 7) Siswa berkeinginan menciptakan karya sastra.

Di dalam perencanaan pengajaran sastra perlu pula diputuskan bahan yang akan diajarkan. Bahkan itu hendaklah disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan hendaklah sesuai dengan penjabarannya pada setiap tingkat, semester dan pertemuan. Bahan pelajaran sastra tentu saja menyangkut: (1) karya-karya sastra (prosa, puisi, dan drama), (2) teori-teori sastra, (3) kritik sastra, (4) sejarah sastra. Mungkin pula dapat diberikan tersendiri bahan yang menyangkut kepengarangan sastra di Indonesia.

Untuk menentukan perencanaan bahan pengajaran sastra dapat dikemukakan prinsip pemilihan bahan sebagai berikut.

- 1) Bahan pengajaran sastra hendaklah disesuaikan dengan tingkat kemajuan siswa, tujuan instruksional yang hendak dicapai dan kelompok umur. Hal ini memerlukan pengkajian karya sastra berdasarkan tingkat kesulitan yang akan dihadapi siswa membaca karya sastra itu. Untuk melihat tingkat kesulitan itu dapat dipertimbangkan dari segi tema, bahasa, gaya, alur karya sastra itu. Prinsip ini dikenal dengan prinsip relevansi.

2) Prinsip kedua ialah realistik, yang dapat dilihat kebenarannya dalam kenyataan. Karya sastra yang realistik bagi siswa ialah yang paling dekat dengan mereka. Oleh sebab itu, kita mulai mengajarkan sastra dengan yang baru saja mereka kenal dan banyak beredar dalam kehidupan mereka. Bahan itu harus dapat dan mudah dipakai dan diperoleh oleh guru dan siswa sehingga haruslah ada tersedia di perpustakaan atau di toko-toko buku.

3) Bahan pengajaran itu hendaklah menarik dan bervariasi. Bahan yang menarik ialah bahan yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis siswa yang sedang tumbuh. Variasi bahan juga dapat menarik bagi siswa. Variasi bahan pengajaran sastra dapat ditinjau dari segi ragam karya sastra, bahasa yang dipergunakan dalam wacana, tema, topik, dan bentuknya.

4) Bahan itu hendaklah memberikan suatu pengalaman baru bagi siswa. Hal ini berarti bahwa bahan sastra itu hendaklah berisi pengalaman yang akan memperkaya pengalaman hidup anak dan tidak semata-mata dititikberatkan pada bahasanya saja. Mungkin suatu karya yang kompleks dan bermutu tinggi akan lebih banyak memberikan pengalaman yang baru bagi siswa.

5) Bahan yang diberikan hendaklah disesuaikan pula dengan pendekatan yang dipakai guru dalam mengajar. Mengajar puisi barangkali memerlukan pendekatan yang berbeda dengan mengajarkan prosa dan drama. Menyamakan saja pendekatan yang dipakai pada setiap jenis karya sastra akan menimbulkan pemaksaan, baik pada bahan itu maupun kepada siswa yang mempelajari bahan itu. Situasi dalam kelas juga turut menentukan perbedaan pendekatan penyajian.

6) Bahan pengajaran sastra hendaklah pula mengundang kreativitas siswa, meningkatkan daya citranya. Karya sastra yang seolah-olah mendeskripsi sesuatu barangkali kurang memberikan kesempatan bagi siswa untuk membayangkan sesuatu. Akan tetapi, karya sastra yang alurnya memberikan permasalahan yang memerlukan pemecahan akan lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk membayangkan sesuatu.

Untuk lebih mendekatkan siswa dengan karya sastra biasanya dianjurkan agar bahan itu merupakan keputusan bersama antara guru dengan siswa. Siswa dapat diikutsertakan memilih bahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan cara ini bahan itu akan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Teori sastra yang diberikan hendaklah dapat memberi jawaban apa sastra itu sebenarnya, apa hakikat dan fungsi sastra, bagaimana cara penjenisan sastra, peragaman sastra, struktur karya sastra. Sejarah sastra

membicarakan perkembangan sastra dari dulu sampai sekarang (Pradopo, 1982:1). Sejarah sastra itu hendaklah pula dapat memberikan perbandingan karya sastra setiap periode.

Setiap pelaksanaan pengajaran menuntut perencanaan metode yang akan memberikan seperangkat alternatif pengalaman belajar bagi siswa. Pemilihan metode pada umumnya disesuaikan dengan karakteristik siswa, kondisi bahan, volume kelas, dan terutama tujuan yang hendak dicapai.

Pengajaran sastra seperti telah diutarakan sebelumnya lebih menitik-beratkan pada usaha bagaimana agar siswa menyenangi karya sastra, menikmati, serta dapat memahami isinya. Dengan demikian, metode yang diperlukan pun adalah metode yang mendukung sasaran itu. Untuk mencermahkan suatu karya sastra agak kurang tepat dan tidak dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengakrabkan diri dengan karya sastra. Cara yang paling tepat ialah mengaktifkan siswa untuk membaca, menelaah, membicarakan, dan menganalisis karya sastra itu. Siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memahami sendiri dan menghayati sendiri bagaimana isi, keindahan, dan unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra.

Untuk mengaktifkan siswa dapat ditempuh beberapa alternatif.

1) Memperkenalkan kepada siswa unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra, kemudian siswa berdasarkan pengetahuan itu mencarinya dalam karya sastra. Mula-mula guru memberikan penjelasan tentang berbagai unsur itu, tetapi tidak perlu mempergunakan waktu yang lama. Sebagian besar waktu diperuntuk bagi siswa mencari unsur-unsur itu. Guru telah menyiapkan sebelumnya ragam karya sastra yang akan dibicarakan. Siswa bisa membahasnya secara individual ataupun secara kelompok. Tugas guru selanjutnya adalah memberikan petunjuk, rangsangan apabila ada hal-hal yang menyulitkan siswa.

2) Cara lain ialah kita bertitik tolak dari karya sastra, lalu sedikit demi sedikit mulai menerapkan teori sastra. Kepada siswa diperkenalkan atau diberikan kesempatan mendengar rekaman karya sastra, atau membaca karya sastra. Mereka akan menemukan berbagai masalah dalam karya sastra itu. Pada tahap berikutnya siswa diberi kesempatan mendiskusikan atau menanyakan kepada guru berbagai aspek sastra yang mereka temukan dalam karya sastra itu. Pada saat itulah guru mulai menjelaskan berbagai unsur karya sastra secara teoritis. Karena siswa telah mempunyai pengetahuan yang nyata dari karya sastra, maka untuk menjelaskan secara teoritis sudah mudah dengan meminjam atau berlandaskan kepada apa yang sudah diketahui siswa itu. Menurut pengalaman yang sangat terbatas, cara ini menarik bagi siswa, dan memudahkan mereka memahami karya sastra, teori sastra maupun sejarah sastra.

3) Cara ketiga ialah menyuruh siswa membaca karya sastra tertentu di perpustakaan atau di rumah yang akan dibicarakan pada pertemuan berikutnya. Beberapa petunjuk singkat dapat diberikan sebelumnya untuk mengarahkan pikiran, dan penelaahan siswa. Pada saat pelaksanaan pengajaran di kelas siswa disuruh mengisahkan kembali bagian-bagian tertentu yang dianggapnya penting dalam karya sastra itu. Bahkan, kalau dapat diikuti dengan diskusi antara siswa. Cara ini bukan saja mengajak siswa untuk merekonstruksi kembali karya sastra itu dalam pikirannya dan dengan caranya sendiri, tetapi juga memberi kesempatan kepadanya menyerap sendiri hal-hal yang penting dalam karya itu. Sifat kritis siswa dapat ditumbuhkan dengan cara ini. Ia akan bisa menarik kesimpulan sendiri hal-hal yang dipesankan dalam karya sastra itu, seperti pesan budaya, kemasyarakatan, kehidupan individu, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan sesama manusia, bahkan manusia dengan penciptanya. Ia juga bahkan lebih jauh akan dapat menentukan sendiri bagaimana bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra itu, gaya pengarangnya dan barangkali keunggulan karya sastra itu.

Ketiga cara itu didasarkan pada usaha mengembangkan cara belajar siswa terhadap sastra berdasarkan kreativitasnya sendiri. Dengan cara ini, siswa akan mengalami keterlibatan secara intelektual, emosional, dan secara fisik. Siswa yang belajar menjadi pusat kegiatan belajar-mengajar. Dengan adanya keaktifan siswa dalam belajar sastra itu, maka akan muncul kemauan yang terus-menerus dalam diri siswa untuk menggauli karya sastra tanpa ada paksaan dari luar. Untuk mendukung cara belajar siswa secara aktif itu perlu diperhatikan prinsip sebagai berikut.

- 1) setiap kegiatan belajar siswa hendaklah diarahkan kepada usaha meningkatkan minat siswa terhadap sastra;
- 2) memupuk keberanian dan keinginan siswa untuk memilih bersama-sama dengan guru materi karya sastra yang akan dibicarakan;
- 3) menimbulkan kepercayaan pada siswa bahwa dengan kreativitas yang tinggi ia dapat menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, seperti menganalisis karya sastra dan menginterpretasi karya sastra;
- 4) mengembangkan rasa ingin tahu siswa terhadap berbagai hal mengenai sastra, seperti unsur karya sastra, latar belakang, aspek sosio budaya, dan kepengarangan;
- 5) menciptakan situasi bebas belajar sehingga siswa tidak merasa dipaksa untuk mempelajari atau mengapresiasi karya sastra.

Ber macam cara yang dapat ditempuh untuk menyajikan pengajaran sastra, seperti membacakan karya sastra, memberi tugas, mendiskusikan, bertanya jawab, memvisualisasikan, mendemonstrasikan, dan mendeklamasikan.

## 2. *Perencanaan Pengajaran Pendukung di Luar Kelas*

Usaha mendekatkan karya sastra kepada anak tidak dapat hanya didasarkan kepada hasil yang akan diperoleh dari dalam kelas. Mengggauli karya sastra secara intensif harus didukung oleh berbagai usaha di luar kelas. Hal ini memerlukan penggunaan berbagai media dan sarana. Antara lain yang dapat dikembangkan adalah:

- 1) mengadakan diskusi sastra antar sekolah;
- 2) mengadakan lomba mengarang dan membaca hasil karya;
- 3) menyiapkan buletin karya sastra para siswa;
- 4) membaca karya sastra di perpustakaan umum;
- 5) membacakan karya sastra siswa pada malam sastra baik dalam lingkungan sekolah sendiri ataupun dengan sekolah lain;
- 6) membacakan karya sastra siswa melalui RRI;
- 7) membacakan karya sastra pada setiap kegiatan atau upacara;
- 8) menulis ulasan tentang sastra yang biasa dimuat pada surat kabar, majalah, atau buletin sekolah.

Dengan adanya perencanaan kegiatan yang mendukung kegiatan pengajaran ini di luar kelas, maka akan ada kesinambungan apresiasi sastra di dalam kelas dengan di luar kelas. Apabila hal ini akan berjalan lancar dan telah menjadi kebiasaan, besar kemungkinan siswa akan dapat mencintai sastra walaupun mereka telah keluar dari sekolah. Kegiatan di atas mengundang keinginan siswa untuk mencari atau menciptakan sendiri karya sastra. Apalagi, kalau guru berusaha membangkitkan semangatnya dengan memberikan pujian atau membicarakan di dalam kelas hasil kegiatan mereka yang dilaksanakan di luar jam sekolah itu.

### **Kompetensi Guru Sastra**

Secara umum setiap dilaksanakan pengajaran menuntut beberapa kemampuan dari guru pelaksanaanya. Kemampuan itu, antara lain:

- 1) kemampuan mendorong siswa untuk meningkatkan kegairahan belajarnya secara aktif;
- 2) kemampuan menemukan yang baru dalam proses belajar-mengajar;
- 3) kemampuan menahan diri sehingga tidak memaksakan sesuatu kepada siswa;
- 4) memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai irama, tingkat dan kemampuan masing-masing;
- 5) kemampuan menggunakan berbagai strategi belajar-mengajar, berbagai media dan alat pelajaran dan sumber belajar.

Kemampuan di atas hendaklah pula ada pada guru sastra.

Yang menjadi masalah sekarang belum ada guru sastra yang khusus, tetapi pada umumnya guru bahasa merangkap guru sastra. Walaupun kedua bidang studi itu sangat erat hubungannya, tujuan pengajaran sastra berbeda dengan tujuan pengajaran bahasa. Perbedaan bahan, perbedaan cara penyajian, dan perbedaan cara evaluasi turut pula dipertimbangkan antara pengajaran bahasa dengan pengajaran sastra. Oleh sebab itu, dibutuhkan guru sastra yang profesional sebab guru sastra bukan hanya mengetahui teori sastra saja dan sejarah sastra, tetapi juga mengetahui banyak tentang karya sastra.

Salah satu kompetensi seorang guru sastra ialah kecintaannya terhadap karya sastra. Indikator yang menunjukkan kecintaan terhadap karya sastra itu ialah penyediaan waktu yang banyak untuk membaca karya sastra, baik yang berbentuk puisi, prosa, maupun drama. Untuk itu, ia harus mempunyai pula kemampuan membaca yang baik dan tekun. Ia hendaklah menjadi tipe guru pembaca yang baik. Tanpa kemampuan membaca yang baik dan tekun, karya sastra itu tidak mungkin dapat menjadi milik rohaninya yang kelak akan dapat dipindahkan lagi dalam bentuk pengajaran kepada siswanya. Karya sastra tidak dapat dimengerti seperti karya tulis biasa karena terdapat perpaduan antara berbagai unsur pikiran, perasaan, gaya, teknik, dan pengalaman pengarang di dalamnya. Seorang guru yang gemar membaca akan menimbulkan pengaruh positif kepada siswanya. Ia akan berwibawa terhadap siswanya dan dapat memberikan motivasi bagaimana cara mempelajari karya sastra yang baik. Keteladanan guru sastra sebagai pembaca dan yang kelak akan ditiru oleh siswanya, merupakan faktor yang amat penting dalam pengajaran sastra.

Seorang guru akan dipandang berwibawa karena pengetahuannya yang kaya, dan bukan sekadar menyebut nama buku dan pengarangnya tetapi mengetahui isi cerita, jalan cerita, serta berbagai keunggulan yang ada pada karya yang disebutkannya. Dengan pengetahuannya yang kaya itu, maka ia akan berpengaruh terhadap siswanya, dan hal ini akan menimbulkan kepercayaan pada diri siswa terhadap guru itu. Siswa akan menjadi lebih akrab dengan gurunya, demikian pula dengan karya sastra. (Lihat Oemarjati dalam Halim, 1979, no. 3:8-9). Siswa mau mempelajari sesuatu apabila ia yakin bahwa guru yang mengajarkannya itu menguasai apa yang diajarkannya, di satu pihak ia akan yakin bahwa apa yang dipelajarinya itu adalah hal yang penting.

Guru sastra hendaklah pula dapat menahan diri untuk tidak memaksakan cara, atau proses belajar-mengajar tertentu kepada siswanya. Menggunakan cara ceramah dan mengikat siswa untuk mendengarkan uraian tentang karya sastra merupakan hal yang membosankan apabila guru itu tidak dapat menarik siswa. Telah dikatakan sebelumnya bahwa siswa dapat diikuti serta-

kan menentukan bahan dan memilih strategi belajar yang baik menurut siswa. Menikmati karya sastra sebagai tujuan utama apresiasi sastra, hanya dapat dicapai apabila ada kebebasan siswa mempelajarinya. Di sini yang dibutuhkan ialah bagaimana guru bisa merangsang siswa agar mencintai sastra, menyenangi membaca sastra.

Sastra mampu membuat manusia lebih bijaksana, lebih mencintai hidup dan kehidupan serta mendekatkan manusia kepada sesama manusia juga kepada penciptanya. Sastra mampu memanusiaawikan manusia, mengembalikan dari sikap *nonhuman* kepada sikap *human* (Suhariato, 1981:18). Guru sastra dalam hubungan ini hendaklah mampu mengangkat aspek-aspek kemanusiaan dalam sastra itu dan ditanamkan kepada siswa. Guru, di samping mempunyai pengetahuan tentang sastra, tetapi pula memerlukan pengetahuan yang luas tentang kemanusiaan dan kemasyarakatan. Pengetahuan itu dibutuhkan guru sastra untuk memberikan penjelasan kepada siswa aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan yang ada dalam karya sastra. Pengalaman yang ada dalam karya sastra itu sebaiknya dihayati siswa dan menjadi pengalamannya pula. Dalam hal ini, pengajaran sastra akan dapat disamakan dengan pemberian pengalaman yang terdapat dalam sastra itu kepada siswanya. Pengalaman itu dapat dinikmati melalui membaca, penjelasan guru, mendengar pembacaan karya sastra, dan menonton pementasan.

Pengajaran sastra dapat juga dimasukkan pada usaha mengukuhkan sikap etis dan moralitas serta nilai-nilai budaya. Motivasi belajar di sekolah terutama membimbing siswa agar mereka yakin akan kebutuhan budaya sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat. Guru memegang peranan penting untuk menginsyafkan siswa bahwa membaca karya sastra itu akan memperkaya batin mereka dengan berbagai nilai budaya, etika, dan moral. Melalui membaca dan menikmati sastra, siswa dapat memperdalam pengetahuannya tentang berbagai kebutuhan yang diperlukannya dalam kehidupannya sehingga ia akan lebih berkembang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa-bangsa yang berbudaya (Rusyana, 1982:14). Pengetahuan yang diperoleh dari sastra adalah pengetahuan tentang kehidupan kebudayaan sendiri (Oemarjati dalam Halim, 1978, no. 6:31). Peranan guru sastra adalah membimbing siswa untuk merenungkan persoalan yang berguna dalam hidup siswa sebagai anggota masyarakat dengan mengambil unsur-unsur yang ada dalam karya sastra.

Dengan memperhatikan kerumitan yang dihadapi guru sastra dalam mengajarkan sastra, maka sangat baik kalau dibina guru-guru sastra yang profesional. Guru sastra harus lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca karya sastra, mengikuti berbagai kegiatan sastra, mengikuti perkembangan sastra, di samping memperdalam ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang kemanusiaan dan kemasyarakatan.

## Ujian Sastra

Ujian merupakan tradisi dari setiap penyelesaian kegiatan mengajar. Ujian, diadakan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar-mengajar, menentukan taraf pencapaian tujuan pendidikan dan proses pengembangan suatu ilmu dalam interaksi belajar-mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Melalui ujian akan dapat diketahui: (1) status kecakapan siswa, (2) hasil belajar siswa sebagai akibat kegiatan belajarnya, (3) pertumbuhan dan perkembangan siswa.

Menguji pengajaran sastra dengan menitikberatkan teori sastra saja rasanya tidak cocok lagi. Demikian pula ujian yang hanya menanyakan hal-hal yang bersifat hapalan, seperti nama pengarang, angkatan dan tahun terbitan perlu dipikirkan kembali. Sesuai dengan tujuan pengajaran sastra, yaitu mendekatkan karya sastra, menggauli karya sastra, mengakrabkan karya sastra, dan menikmati karya sastra, maka sebaiknya ujian pun dapat menguji aspek itu pada diri siswa.

Dalam hal ujian sastra ini Moody (Wardani, 1981:28) mengemukakan empat tingkat ujian sastra.

- 1) Tingkat ujian informasi, menanyakan pengetahuan dasar untuk memahami sastra;
- 2) Tingkat konsep, menanyakan persepsi tentang sastra, yaitu bagaimana unsur sebuah karya sastra dikategorikan;
- 3) Tingkat prespektif, menanyakan pandangan tentang sastra;
- 4) Tingkat apresiasi, menanyakan kesastraan dan kebahasaan (Mengapa ditulis seperti itu? Apa pengaruh kata atau adegan ini?)

Pada garis besarnya ada tiga wilayah yang diuji dalam pengajaran sastra. Wilayah pertama ialah pengetahuan fakta. Yang ditanyakan ialah tentang pengarang, perwatakan, situasi historis dan sebagainya. Sasaran ujian ini, adalah mendorong siswa agar lebih banyak membaca dan memahami karya sastra. Wilayah kedua adalah pemahaman teks. Ujian tentang pemahaman teks menyangkut pengidentifikasian gaya bahasa, penentuan tema, dan pengembangan perwatakan. Siswa diharapkan dapat menganalisis karya sastra. Wilayah ketiga ialah ekspresi individual. Hal ini melibatkan dua aspek utama, yaitu (1) penguasaan bahasa yang dipakai pengarang, kosakata sastra dan bahasa impersonal, (2) kemampuan menyintesis dan mengorganisasikan pengamatannya terhadap karya sastra. Ujian ini memberikan kemungkinan kepada siswa untuk mengeluarkan gagasan baru yang dapat dikritik dan ditafsirkan. Dengan cara ini, akan dapat diketahui apakah seorang siswa telah mengalami perkembangan dalam mengapresiasi karya sastra atau belum.

## Simpulan dan Saran

Pengajaran sastra sebenarnya sangat kompleks sehingga diperlukan cara pengelolaan pelaksanaan sesuai dengan hakikat sastra itu sendiri. Pengajaran sastra yang selalu ditumpangkan saja pada pengajaran bahasa ada baiknya, tetapi ada buruknya. Baiknya pengajaran sastra dan memberikan keuntungan kepada pengajaran bahasa, tetapi buruknya pelaksanaan pengajaran sastra itu tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan. Kemungkinan pengajaran sastra hanya dianggap sampingan dari pengajaran bahasa. Keburukan yang lain ialah kita selalu tidak sempat mengukur apakah tujuan untuk mengakrabkan siswa dengan sastra itu tercapai atau tidak karena tugas guru bahasa menjadi lebih berat bebannya. Ada dua kemungkinan yang timbul dengan penggabungan guru bahasa yang sekaligus juga guru sastra. Pertama, kalau guru itu lebih menyukai bahasa, pengajaran sastra akan terbengkalai. Kedua, kalau guru lebih menyukai sastra, pengajaran bahasa akan pula terlalaikan. Karena itu, lebih baik kalau guru sastra memang khusus sebagai pengajar sastra yang profesional.

Ada keluhan bahwa karya sastra yang telah banyak dihasilkan oleh pengarang belum sampai ke sekolah. Ada sekolah yang mempunyai banyak karya sastra, tetapi ada pula yang sangat miskin karya sastranya. Untuk mendekatkan karya sastra kepada siswa, setiap sekolah hendaklah melengkapi perpustakaanannya dengan karya sastra baik yang lama maupun yang baru diciptakan.

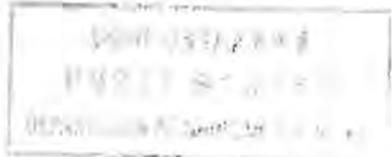
Sekolah juga boleh mengisi keputukaannya dengan karya guru atau siswa. Untuk itu, kita membutuhkan pembinaan calon sastrawan baik yang ada di sekolah maupun pengarang daerah. Sebenarnya sastra lisan bisa dialihkan ke dalam bahasa Indonesia, bahkan dapat dijadikan tema untuk menciptakan karya sastra tulis. Dengan adanya karya sastra nasional dan karya sastra daerah di sekolah, akan lebih luas lagi wawasan pengetahuan siswa tentang sastra.

Di samping karya sastra yang masih kurang di sekolah-sekolah, ternyata pula buku penuntun pengajaran sastra masih langka. Kebanyakan guru sastra masih berpegang pada buku-buku teori sastra yang lama sehingga tidak bisa menjangkau perkembangan teori sastra dan juga periode sastra yang terbaru. Penyediaan buku teori sastra dan penuntun pengajaran sastra perlu dijadikan satu kebijaksanaan dalam menyempurnakan pengajaran sastra di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brahim. 1967. "Pengajaran Kesusastraan Indonesia". Dalam Lukman Ali (Ed.), *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Tjermin Manusia Indonesia Baru*. Jakarta: Gunung Agung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Institusi Pendidikan Tinggi: 1982/1983. *Program Akta Mengajar V B*.
- Ujian Bahasa Indonesia I dan II*
  - Evaluasi Hasil Belajar*
  - Konsep CBSA dan Berbagai Strategi B – M*
  - Pengembangan Kurikulum dan Sistem Instruksional*
  - Pendidikan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Kompetensi (PTKBBK)*.
- Djoko Pradopo, Rachmat. 1982. *Apresiasi Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Gani, Rizanur. 1981. *Pengajaran Apresiasi Puisi*. Jakarta: P3G.
- Hasjim, Nafron. "Apresiasi Sastra di Lingkungan Sekolah". Dalam Ahmad Jayusman. 1983. *Majalah Pembinaan Bahasa Indonesia*. No. 1. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Hutagalung, M.S. "Peranan dan Kedudukan Pengajaran Sastra dalam Pengembangan Sastra". Dalam S.W. Rujjati Mulyadi. 1975. *Pengajaran Bahasa dan Sastra* No. 3. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Jassin, H.B. 1976. *Sastra Indonesia sebagai Warga Sastra Dunia*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Karim, Mariana. Tanpa Tahun. *Pemilihan Bahan Pengajaran*. Jakarta: P3G.
- Oemarjati, Boen S. "Pengajaran Sastra Indonesia dan Pembinaan Apresiasi Sastra". Dalam Amran Halim. 1978. *Pengajaran Bahasa dan Sastra* No. 6. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- . "Pengajaran Apresiasi Sastra di Sekolah Lanjutan Atas: Keakraban Guru-Murid dengan Karya Sastra". Dalam Amran Halim, 1979. *Pengajaran Bahasa dan Sastra*. No. 3. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Rusyana, Yus. 1982. *Metode Pengajaran Sastra*. Bandung: Gunung Larang.
- Situmorang, B.P. 1980. *Puisi dan Metodologi Pengajarannya*. Flores: Nusa Indah.
- Suharianto, S. 1980. *Teori dan Apresiasi Puisi*. Semarang: Eka Marwasa.
- . 1981. *Pengantar Apresiasi Puisi*. Semarang: Widya Duta.
- Sumardjo, Jakob. "Sebuah Saran tentang Model Buku Apresiasi Sastra di Sekolah Lanjutan Atas". Dalam Amran Halim, 1979. *Pengajaran Bahasa dan Sastra*. No. 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Waluyo, Herman. "Pengajaran Sastra di SMTA". Dalam Ahmad Jayusman. 1983. *Majalah Pembinaan Bahasa Indonesia*. No. 1. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Wardani, Ig.A.K. 1979. *Pengajaran Sastra*. Jakarta: P3G.
- . 1981. *Pengajaran Apresiasi Prosa*. Jakarta: P3G.
- Widdowson, H.G. 1979. *Stylistics and The Teaching of Literature*. London: Longman Group Limited.



## KEPUTUSAN KONGRES BAHASA IV

### Pendahuluan

Kongres Bahasa Indonesia IV berlangsung dari hari Senin tanggal 21 November 1983 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 November 1983 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dan diikuti oleh tokoh-tokoh lembaga pemerintahan, departemen dan nondepartemen, organisasi profesi, guru, mahasiswa, para ilmuwan yang mewakili pelbagai bidang ilmu dan teknologi, serta peminat lain dari dalam dan luar negeri. Dengan memperhatikan pidato pengarah dalam peresmian pembukaan Kongres Bahasa Indonesia IV oleh Menteri Nugroho Notosusanto, pada tanggal 21 November 1983, serta setelah mendengarkan makalah-makalah yang disajikan dan dibahas secara seksama baik di dalam sidang-sidang lengkap maupun di dalam sidang-sidang kelompok, Kongres Bahasa Indonesia IV mengambil keputusan yang berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut dalam hubungan dengan masalah-masalah dalam bidang bahasa, pengajaran bahasa, dan pembinaan bahasa dalam kaitannya dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, yaitu:

1. sarana komunikasi pemerintahan dan kemasyarakatan;
2. sarana pengembangan kebudayaan;
3. sarana pendidikan dan pengajaran, termasuk wajib belajar; serta
4. sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut.

### 1. Bidang Bahasa

#### a. Kesimpulan Umum

Apabila dilihat dari saat lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa

nasional pada tahun 1928 sampai dengan saat perkembangannya dewasa ini, bahasa Indonesia telah mengalami perubahan dan kemajuan yang pesat. Fungsi bahasa Indonesia telah makin mantap, tidak hanya sebagai alat komunikasi sosial dan administratif tetapi juga sebagai alat komunikasi ilmu dan keagamaan. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia telah memiliki poros inti yang cukup besar dan cukup terpadu, yang memungkinkan manusia dari satu latar belakang bahasa di tanah air berkomunikasi dengan manusia dari latar belakang bahasa yang lain. Sebagai alat penyebar ilmu, bahasa Indonesia telah dapat pula menjalankan fungsinya dengan baik, yang terbukti dengan makin banyaknya buku ilmu pengetahuan tingkat tinggi yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Sebagai alat pengungkap rasa dan ilmu yang tumbuh dan terus berkembang, bahasa Indonesia tentu saja tidak terhindar dari sentuhan dan pengaruh masyarakat yang memahaminya, baik berupa perubahan nilai dan struktur maupun berupa tingkah laku sosial lainnya. Pada satu pihak, hubungan timbal balik antara bahasa sebagai alat pengungkap dengan alam sekitarnya dan fenomena sosial sebagai isinya menambah kekayaan linguistik bahasa Indonesia yang merupakan milik kita bersama. Pada pihak lain, persentuhan ini menimbulkan pula keanekaragaman. Tanpa pembinaan yang hati-hati dan seksama, tidak mustahil sebagian ragam-ragam itu menyimpang terlalu jauh dari poros inti bahasa kita.

Selaras dengan ragam yang menyimpang itu, terdapatlah cukup banyak pemakai bahasa Indonesia yang belum dapat mempergunakan bahasa itu dengan baik dan benar. Termasuk di antara mereka adalah para mahasiswa dan pengajar di perguruan tinggi, para cendekiawan, dan para pemimpin yang menduduki jabatan yang berpengaruh. Hal ini tampak, antara lain, pada:

- a) pemakaian kalimat, tanda baca, dan pengelompokan wacana yang tidak mengungkapkan jalan pikiran yang jernih, logis, dan sistematis;
- b) pemakaian istilah asing untuk menggantikan kosa kata yang telah ada, yang memiliki ciri-ciri semantik yang sama, dan yang telah umum dipakai;
- c) pemakaian istilah teknis yang tidak seragam dalam ilmu pengetahuan;
- d) pengucapan kata yang menyimpang dari kaidah yang dianggap baku;
- e) pengejaan kata atau frase yang tidak taat asas.

## b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

- a) Perlu segera disusun tata bahasa baku bahasa Indonesia sebagai tata bahasa acuan yang lengkap dengan memperhatikan berbagai ragam bahasa Indonesia, baik ragam tulis maupun ragam lisan.
- b) Perlu segera disusun kamus besar bahasa Indonesia yang memuat tidak hanya bentuk-bentuk leksikon tetapi juga lafal yang dianggap baku, kategori sintaktik setiap kata, dan batasan serta contoh pemakaian yang lebih lengkap. Jika mungkin, kamus ini perlu dilengkapi dengan gambar dan keterangan mengenai asal kata.
- c) Perlu dipergiat penulisan kamus bahasa daerah yang merupakan sumber untuk memperkaya bahasa nasional.
- d) Perlu digiatkan penulisan dan penerjemahan buku-buku yang bermanfaat bagi pelbagai bidang.
- e) Lembaga-lembaga pemerintah (departemen dan nondepartemen) dan instansi-instansi swasta yang berkecimpung dalam bidang ilmu pengetahuan dihimbau agar mengadakan kerja sama untuk menyelaraskan istilah-istilah ilmu pengetahuan. Pembentukan dan penyeragaman istilah serta tata nama hendaknya dibuat dengan kerangka pemerian bahwa istilah-istilah itu perlu memenuhi selera naluri para pemakainya sehingga dapat benar-benar diterima dan dipakai. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditugaskan mengkoordinasikan kerja sama itu dan menyebarkan hasilnya.
- f) Sikap hati-hati dalam memilih unsur-unsur dari bahasa lain, terutama bahasa asing, perlu ditingkatkan.
- g) Semua mahasiswa harus mendapat latihan keterampilan menulis karya ilmiah dalam bahasa Indonesia.
- h) Perlu ditetapkan pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam huruf Latin bahasa Indonesia.

## 2. Pengajaran Bahasa

### a. Kesimpulan Umum

Tujuan umum pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan adalah memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jika ditinjau dari sudut penutur bahasa Indonesia, tujuan umum pengajaran bahasa Indonesia adalah:

- a) tercapainya pemakaian bahasa Indonesia baku yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasi, yaitu pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar;

- b) tercapainya pemilikan keterampilan yang baik dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan pengetahuan yang sah;
- c) tercapainya sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yaitu sikap yang erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab, yang tampak dari perilaku sehari-hari.

Sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia serta sesuai dengan pokok-pokok kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, fungsi bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional ialah (1) sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, (2) sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan jenjang lembaga pendidikan, (3) sebagai bahasa penalaran, dan (4) sebagai bahasa pengungkap pengembangan diri hasil pendidikan.

Sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, bahasa Indonesia yang diajarkan adalah:

- a) bahasa dengan ciri serta syarat ragam bahasa baku, baik ragam lisan maupun ragam tulis;
- b) bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa kebudayaan, yang berfungsi sebagai bahasa modern.

Sebagai bahasa pengantar, penalaran, dan pengungkap pengembangan diri, bahasa Indonesia yang dipakai di lembaga pendidikan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) mempunyai kemampuan menjalankan tugas sebagai alat komunikasi yang efektif dan efisien, yaitu mempunyai kemampuan menyampaikan informasi secara tepat dengan berbagai konotasi;
- b) mempunyai bentuk estetik;
- c) mempunyai keluwesan sehingga dapat dipergunakan untuk mengekspresikan makna-makna baru;
- d) mempunyai ragam yang sesuai dengan jenjang lembaga pendidikan.

Keadaan kebahasaan di Indonesia yang sangat majemuk dengan adanya bahasa-bahasa daerah yang banyak, yang tersebar di seluruh tanah air, belum dimanfaatkan dalam pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia.

Dalam pengajaran bahasa Indonesia belum diperhatikan sifat komunikatif bahasa dengan memanfaatkan berbagai komponen komunikasi, baik sebagai bahasa yang dipakai dalam proses pengajaran

maupun sebagai hasil pengajaran itu sendiri.

Pengajaran sastra di sekolah bagian yang tidak terpisahkan dari pengajaran bahasa belum mencapai tujuan yang sesuai dengan fungsinya sebagai pengembang wawasan nilai kehidupan dan kebudayaan.

Pola kebijaksanaan nasional mengenai pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran pada dasarnya adalah sebuah strategi yang memandu pendidik bahasa Indonesia di dalam mengembangkan tindakan yang mendasar dalam memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran.

#### b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

- a) Dengan memperkuat keputusan Kongres Bahasa Indonesia III, diusulkan agar mutu pengajaran bahasa Indonesia di semua jenis dan jenjang pendidikan ditingkatkan dengan berbagai macam upaya, seperti (a) peningkatan kemampuan guru bahasa Indonesia, (b) pengembangan bahan pelajaran yang sesuai dengan fungsi komunikatif dan integratif bahasa, kebudayaan, serta penalaran, dan (c) pemberian pengalaman belajar kepada siswa untuk memperoleh keterampilan dalam proses belajar bahasa Indonesia.
- b) Dengan tujuan memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran, pola kebijaksanaan nasional kebahasaan harus disusun. Dengan pola ini perlu dilakukan berbagai tindakan taktis yang terdiri dari (a) penentuan strategi pengajaran guna membentuk keterampilan berbahasa yang secara berangsur-angsur diikuti dengan sajian pengetahuan kebahasaan pada tingkat-tingkat lanjut pada pendidikan dasar dan menengah, (b) pengembangan tata bahasa panutan, (c) penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar, (d) pemantapan kemampuan berbahasa Indonesia sebagai persyaratan untuk berbagai macam kenaikan tingkat/pangkat, dan (e) pemanfaatan media massa sebagai model penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- c) Pengajaran sastra Indonesia harus lebih ditekankan agar dapat membantu terlaksananya unsur humaniora dalam kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan.
- d) Bahan pelajaran bahasa Indonesia perlu mencakup latihan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam rangka mengimbangi laju perkembangan karya ilmiah, pengajaran membaca cepat perlu dikembangkan secara khusus.

- e) Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia hendaklah memanfaatkan organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan pada tingkat pedesaan dengan tujuan agar (a) pembangunan nasional di bidang kebudayaan, khususnya sektor kebahasaan, berlangsung secara efektif dan efisien dan (b) kemampuan warga masyarakat dalam bidang kebahasaan dapat meningkat.
- f) Pembinaan apresiasi sastra perlu dilaksanakan sedini mungkin mulai dari tingkat prasekolah sampai ke perguruan tinggi dan di lingkungan keluarga.
- g) Di samping pengajaran bahasa Indonesia yang ditujukan kepada kemampuan berbahasa secara umum di sekolah dasar dan menengah, perlu dikembangkan bahasa pengajaran bahasa yang diperlukan bagi bidang-bidang khusus. *bahan*
- h) Pendidikan dalam suasana kedwibahasaan yang strategisnya bertujuan menjamin hak hidup bahasa dan kebudayaan daerah hendaknya mempunyai nilai positif.
- i) Di dalam kurikulum lembaga pendidikan tinggi hendaknya dimasukkan program pendidikan bahasa Indonesia.
- j) Hasil penelitian kebahasaan dan pengajaran bahasa hendaklah disebarluaskan dan dimanfaatkan.
- k) Pelaksanaan wajib belajar perlu dimanfaatkan untuk menyukseskan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

### 3. Pembinaan Bahasa

#### a. Kesimpulan Umum

Pembangunan nasional kita pada hakikatnya adalah usaha mengadakan perubahan dalam segala segi kehidupan bangsa Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan nasional itu akan banyak tergantung pada kemampuan bahasa Indonesia memenuhi fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di samping kemampuan bangsa kita memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Kenyataan yang dihadapi oleh para pembina bahasa ialah pemakaian bahasa Indonesia di dalam masyarakat, khususnya di lembaga-lembaga, badan-badan, dan organisasi-organisasi yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan bangsa dan negara, belum mengembirakan.

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam ilmu, seperti ilmu hukum dan ilmu administrasi, banyak yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Karena bahasa keilmuan itu harus bermakna tunggal,

pemakaian bahasa Indonesia harus terus diperbaiki dan usaha pembakuannya ditingkatkan.

Media massa merupakan salah satu sarana yang penting untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa karena media massa mempunyai pengaruh yang luas di dalam masyarakat. Kenyataan juga menunjukkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun secara lisan, masih memiliki kelemahan. Kecenderungan menghilangkan kata-kata dalam media cetak, misalnya, sering mengakibatkan makna kalimat menyimpang atau hilang sama sekali. Di samping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih ada pemakaian unsur-unsur bahasa daerah atau bahasa asing yang tidak perlu.

Penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi sehari-hari oleh masyarakat menunjukkan peningkatan yang pesat dan jumlah orang yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama semakin meningkat. Namun, tingkat kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar masih perlu mendapat perhatian para pendidik dan pemakai bahasa Indonesia.

#### b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

- a) Penggunaan bahasa Indonesia dalam semua bidang, terutama bidang hukum dan perundang-undangan, perlu segera digarap secara sungguh-sungguh, bertahap, dan terpadu karena hukum yang dimengerti oleh setiap anggota masyarakat akan lebih menjamin terlaksananya pembangunan nasional secara mantap, lancar, dan tertib.
- b) Semua aparat pemerintah, terutama yang secara langsung terlibat dalam perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan hukum, harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang memadai sehingga hukum/undang-undang yang dihasilkan dan yang harus dilaksanakan itu mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.
- c) Semua petugas pemerintahan, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti lurah, guru, juru penerangan, penyiar RRI/TVRI, dan staf redaksi media cetak, harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu cara yang perlu segera ditempuh ialah bahwa setiap departemen, lembaga nondepartemen, dan organisasi swasta merencanakan kegiatan kebahasaan sedemikian rupa sehingga setiap petugas atau anggota dalam badan itu sekurang-kurangnya memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kebutuhannya.

dalam melaksanakan tugas pembangunan.

- d) Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah yang memungkinkan terciptanya suasana atau iklim kebahasaan sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi utama di negara Republik Indonesia. Kata atau istilah asing yang tidak perlu, terutama dalam bidang dunia usaha (nama badan usaha, iklan, dan papan pengumuman untuk masyarakat luas), harus segera diusahakan pengantiannya dengan kata/atau istilah bahasa Indonesia. Dalam kaitan itu, kerja sama yang terpadu antara berbagai instansi (Departemen Kehakiman, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan departemen lain, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga masyarakat) sangat diperlukan.
- e) Generasi muda perlu dibekali dengan sikap dan disiplin berbahasa yang dapat dibanggakan.
- f) Guna menunjang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa yang dilakukan oleh berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, perlu direncanakan penugasan para ahli bahasa atau pemanfaatan ahli bahasa secara maksimum pada berbagai sektor pembangunan.
- g) Usaha pembinaan bahasa Indonesia secara lebih intensif perlu dilakukan dan diberi prioritas pertama di daerah-daerah yang tingkat keahliannya berbahasa Indonesia masih rendah.
- h) Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa perlu dimantapkan. Salah satu cara yang mudah ialah menghindari, sekuat tenaga, kekurangannya mengurangi, pemakaian kata-kata asing dan bahasa daerah dalam hal atau peristiwa yang bersifat nasional.
- i) Kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu ditingkatkan terus, terutama dalam Bulan Bahasa (bulan Oktober setiap tahun).
- j) Kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia para guru, terutama guru bahasa Indonesia, perlu ditingkatkan terus, di samping usaha meningkatkan mutu pengajaran bahasa Indonesia.
- k) Buku-buku yang diterbitkan — baik yang asli maupun yang terjemahan —, surat kabar dan majalah yang diedarkan, serta bahan koleksi perpustakaan hendaklah diusahakan agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- l) Usaha pembinaan bahasa Indonesia perlu direncanakan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga sikap dinamika dan disiplin berbahasa yang baik serta keterampilan berbahasa Indonesia para pemakai bahasa dari seluruh lapisan masyarakat dapat ditingkatkan secara

mantap. Guna memungkinkan tercapainya tujuan itu, jalur-jalur formal, nonformal, dan informal perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, usaha memasyarakatkan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, dan kamus bahasa Indonesia baku perlu dilakukan dengan cara yang lebih baik agar buku-buku pedoman dan buku-buku acuan itu dapat mencapai dan dijangkau masyarakat luas.

- m) Unsur-unsur bahasa daerah merupakan potensi yang penting dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dalam hubungan ini, pemanfaatan unsur-unsur bahasa daerah yang dimaksudkan untuk memperkaya bahasa Indonesia itu hendaklah dilakukan secara lebih cermat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri maupun terhadap perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Keampuhan bahasa Indonesia sebagai lambang pemersatu bangsa harus tetap terjamin dan ketahanan nasional tidak boleh terganggu karena banyaknya unsur bahasa daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia.
- n) Hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia yang telah dicapai oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditunjang dengan instruksi pelaksanaan pada setiap departemen, lembaga, dan organisasi.
- o) Kongres Bahasa Indonesia IV memperkuat keputusan Kongres Bahasa Indonesia III agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan kedudukannya menjadi lembaga nondepartemen supaya wibawa dan ruang geraknya dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia lebih berdaya guna.
- p) Kongres mengusulkan agar bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam konsep Wawasan Nusantara karena bahasa Indonesia merupakan unsur utama kebudayaan nasional dan sekaligus berfungsi sebagai sarana komunikasi utama dan pemersatu dalam kehidupan bangsa dan negara.
- q) Dalam sensus penduduk Indonesia yang akan datang perlu diperoleh data kebahasaan yang sah dan lengkap. Data yang demikian diperlukan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.
- r) Kongres menugaskan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk memonitor pelaksanaan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia

IV dan melaporkan hasilnya kepada Kongres Bahasa Indonesia V yang akan datang.

- s) Ketentuan mengenai lalu lintas buku dan barang cetakan lain yang tertulis dalam bahasa Indonesia, terutama di kawasan ASEAN, perlu ditinjau kembali.

**SAMBUTAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN  
OLAHRAGA PADA UPACARA PENUTUPAN  
KONGRES BAHASA INDONESIA IV DI  
JAKARTA PADA TANGGAL 26 NOPEMBER 1983**

Saudara Ketua Panitia Penyelenggara Kongres,  
Para peserta Kongres,  
Hadirin yang saya hormati,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya Kongres Bahasa Indonesia IV ini telah berlangsung dengan lancar dan menghasilkan kesimpulan, usul, dan saran mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Menurut pandangan saya, kesimpulan, usul, dan saran itu memperlihatkan bahwa tujuan kongres ini telah tercapai sesuai dengan harapan kita bersama.

Hasil yang telah dicapai itu merupakan bahan ramuan bagi pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional komunikasi nasional maupun sebagai sarana perjuangan. Tentu saja, bahan ramuan itu perlu diolah lebih lanjut melalui saluran kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan sedemikian rupa sehingga kesimpulan, usul, dan saran itu menjadi program tindak lanjut yang operasional dalam bentuk rancangan dan program kerja yang sejalan dan serasi dengan garis kebijaksanaan pembangunan kita, sesuai Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. II/MPR/1983). Di dalam pengolahan bahan ramuan itu berbagai faktor seperti faktor politik, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor ekonomi harus diperhitungkan. Di samping itu, tentu saja ber-

bagai segi kebahasaan Indonesia itu sendiri dan keadaan kebahasaan di Indonesia dapat dikembangkan dengan menyerap, apabila perlu, unsur-unsur bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

Tugas kita, terutama tugas para peserta Kongres Bahasa Indonesia IV ini, tidak berakhir dengan berakhirnya Kongres ini. Di samping mengolah kesimpulan, usul dan saran kongres itu melalui saluran kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan — seperti saya kemukakan tadi —, kita sendiri-sendiri, sebagai pribadi, sebagai guru, sebagai manusia profesional, dan sebagai anggota organisasi profesi berkewajiban pula melaksanakan isi kesimpulan, usul, dan saran itu di dalam lingkungan kita masing-masing. Kita masing-masing harus melakukan berbagai usaha sesuai dengan kemampuan dan gaya kita sendiri-sendiri. Sebagai ayah atau ibu, kita berkewajiban berusaha membina bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu penggunaannya di lingkungan keluarga kita, di lingkungan pergaulan kita, dan di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Sebagai guru, pengarang, dokter, atau apa pun profesi kita, kita berkewajiban melakukan berbagai usaha demi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di kalangan teman seprofesi dan orang lain yang berhubungan dengan profesi kita. Guru, misalnya, melaksanakan usaha itu di kalangan guru dan murid, dokter melaksanakannya di kalangan dokter sendiri dan pasiennya, dan pengarang membina bahasa Indonesia di kalangan pembaca karyanya dan di kalangan pengarang sendiri. Sebagai anggota organisasi profesi, pembinaan bahasa Indonesia kita lakukan melalui saluran yang terdapat di dalam organisasi kita. Dengan demikian, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia kita lakukan melalui saluran formal, saluran nonformal, dan saluran informal. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di dalam segenap lapisan masyarakat dan oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita bekerja keras, berusaha dengan kesungguhan hati, dan berjuang tanpa mengenal lelah demi pengejawantahan ikrar yang ketiga Sumpah Pemuda 1928, yaitu *"Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia"*.

Hasil yang Saudara-saudara capai di dalam kongres ini merupakan bahan masukan yang amat berharga bagi pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bahasa Indonesia harus menjadi sarana komunikasi nasional dan sarana pembangunan yang mantap supaya pelaksanaan pembangunan kita dalam segala bidang menjadi mantap pula. Dengan pelaksanaan pembangunan nasional kita secara mantap selama Repelita IV, yang akan mulai pada tahun depan, dan Repelita V, kita benar-benar dapat mengharapkan kesiapan kita bertolak landas dalam masa Repelita VI dan kita bergerak ke arah masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.

Seperti saya kemukakan di dalam penyajian makalah saya pada hari Selasa yang lalu, pemuda dengan jiwa dan semangat kepeloporannya perlu dan harus kita ikut sertakan secara penuh di dalam usaha kita membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa hasil kongres ini harus pula diolah sebagai bahan masukan bagi penyusunan program kepemudaan, kemahasiswaan, kesiswaan, dan kepramukaan. Bahkan masukan itu harus diolah sedemikian rupa sehingga ia memungkinkan tersusunnya program yang sesuai dengan tingkat perkembangan, umur, dan perhatian generasi muda, mulai dari tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi.

Kesimpulan, usul, dan saran yang dihasilkan di dalam kongres ini juga merupakan bahan masukan yang amat berharga bagi Kongres Pemuda yang insya Allah akan diselenggarakan pada tahun depan. Kongres Pemuda itu akan membahas berbagai masalah penting yang tidak hanya menyangkut kepentingan pemuda tetapi juga mencakup kepentingan berbagai segi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya — termasuk masalah bahasa nasional kita —, dan ketahanan nasional. Masalah bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, bahasa kenegaraan, dan bahasa komunikasi pembangunan nasional kita akan dibahas dalam hubungannya dengan berbagai segi pembangunan nasional kita itu. Oleh karena itu, hasil Kongres Bahasa Indonesia IV ini berkaitan erat sekali dengan hasil yang diharapkan dari Kongres Pemuda itu.

Para peserta Kongres Bahasa Indonesia IV,  
 Hadirin yang saya hormati,

Atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara-saudara atas segala sumbangan pemikiran yang telah Saudara-saudara berikan kepada negara dan bangsa kita melalui keikutsertaan Saudara-saudara di dalam Kongres Bahasa Indonesia IV ini. Saya juga menyatakan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia Penyelenggara dan semua pihak yang telah memungkinkan Kongres ini diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan usaha kita selanjutnya diberkahi oleh Allah Yang Mahakuasa dan kita diberi-Nya kekuatan lahir dan batin serta petunjuk di dalam pelaksanaan usaha kita membina dan mengembangkan bahasa Indonesia selanjutnya sesuai dengan harapan Kongres Bahasa Indonesia IV ini.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya nyatakan bahwa Kongres Bahasa Indonesia IV ini ditutup dengan resmi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga,

dr. Abdul Gafur

## KONGRES BAHASA INDONESIA IV JAKARTA, 21 – 26 NOVEMBER 1983

### SUSUNAN PANITIA

#### I. Pengarah

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Penerangan
3. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

#### II. Penasihat

Prof. Dr. Haryati Soebadio,  
Direktur Jenderal Kebudayaan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

#### III. Penyelenggara

- Ketua** : Prof. Dr. Amran Halim  
Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Wakil Ketua** : A. Latief, M.A.,  
Kepala Bidang Pengembangan  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Sekretaris** : I. Maman Sumantri,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- II. Dra. Sri Sukesri Adiwimarta,  
Kepala Bidang Perkamusan dan Peristilahan  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

III. Ny. S. Wahyudin,  
Kepala Subbagian Urusan Dalam pada  
Bagian Tata Usaha  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

**Bendaharawan** : Jusnan Junus,  
Bendaharawan Proyek Pengembangan Bahasa dan  
Sastra Indonesia dan Daerah

**Anggota** : 1. Drs. S. Effendi,  
Kepala Bidang Bahasa  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
(Persidangan)

2. Dra. Sri Timur Suratman,  
Kepala Bidang Sastra  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
(Akomodasi)

3. Drs. Hans Lapoliwa, M.Phil.,  
Bidang Pengembangan  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
(Pendaftaran Peserta)

4. Dra. Yayah B. Lumintaintang,  
Bidang Bahasa  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
(Kertas Kerja)

5. Drs. Lukman Hakim,  
Bidang Pengembangan  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
(Humas dan Protokol)

6. Dra. Ipon Sukarsih Purawijaya,  
Bidang Pengembangan  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
(Pameran)

7. Drs. Koentamadi,  
Bidang Bahasa  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
(Dokumentasi)

8. Drs. Hasjmi Dini,  
Kepala Subbagian Kepegawaian pada  
Bagian Tata Usaha  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
(Logistik)

Jakarta, 5 September 1983

Kepala Pusat Pembinaan dan  
Pengembangan Bahasa,

Prof. Dr. Amran Halim

**KONGRES BAHASA INDONESIA IV  
JAKARTA, 21 – 26 NOVEMBER 1983**

**SEKSI-SEKSI  
PANITIA PENYELENGGARA KBI IV**

**I. Kertas Kerja**

1. Prof. Dr. Amran Halim
2. Drs. S. Effendi
3. Dra. Sri Timur Suratman
4. Dra. Sri Sukesri Adiwimarta
5. Sdr. A. Latief, MA
6. Dra. Yayah B. Lumintaintang
7. Drs. Koentamadi
8. Drs. Farid Hadi
9. Drs. Hans Lapoliwa, M.Phil.
10. Drs. Hasan Alwi
11. Drs. Lukman Hakim
12. Drs. Nafroon Hasjim
13. Drs. Adi Sunaryo

**II. Pendaftaran Peserta**

1. Drs. Hans Lapoliwa, M.Phil.
2. Suhadi

**III. Persidangan**

- Drs. S. Effendi

**IV. Akomodasi**

Dra. Sri Timur Suratman

**V. Humas dan Protokol**

1. Drs. Lukman Hakim
2. Dra. Djoemariam

**VI. Pameran**

1. Dra. Ipon Sukarsih Purawidjaja
2. Dra. Udiati Widiastuti

**VII. Dokumentasi**

1. Drs. Koentamadi
2. Suprpto

**VIII. Logistik**

1. Drs. Hasjmi Dini
2. Arman

Jakarta, 19 September 1983

**KONGRES BAHASA INDONESIA IV  
JAKARTA, 21 – 26 NOPEMBER 1983**

**SEKRETARIAT  
PANITIA PENYELENGGARA**

**A. Koordinator:**

1. Maman Sumantri (Sekretaris I)
2. Dra. Sri Sukesi Adiwimarta (Sekretaris II)
3. Ny. S. Wahyudin (Sekretaris III)

**B. Urusan-urusan**

**I. Surat-menyurat, Edaran, dan Undangan**

1. Dra. Hariyanti E.Y.
2. Ny. Kasmini
3. Samiyati
4. Siti Sapurah
5. Radi bin Sabiin
6. Achmad Lesteluhu
7. Cipto Digiarto
8. Setiowati Djuwitaningsih
9. Rukijo
10. Dedeh Ipah Syaripah

**II. Pengetikan dan Peggandaan (Reproduksi)**

1. M. Nurhanadi
2. Suwandā

3. Sulasdi
4. Djamari
5. Suprpto
6. Kartiyah
7. Warku
8. Erwin Subagio
9. Sunarto Rudy

### III. Perlengkapan dan Angkutan

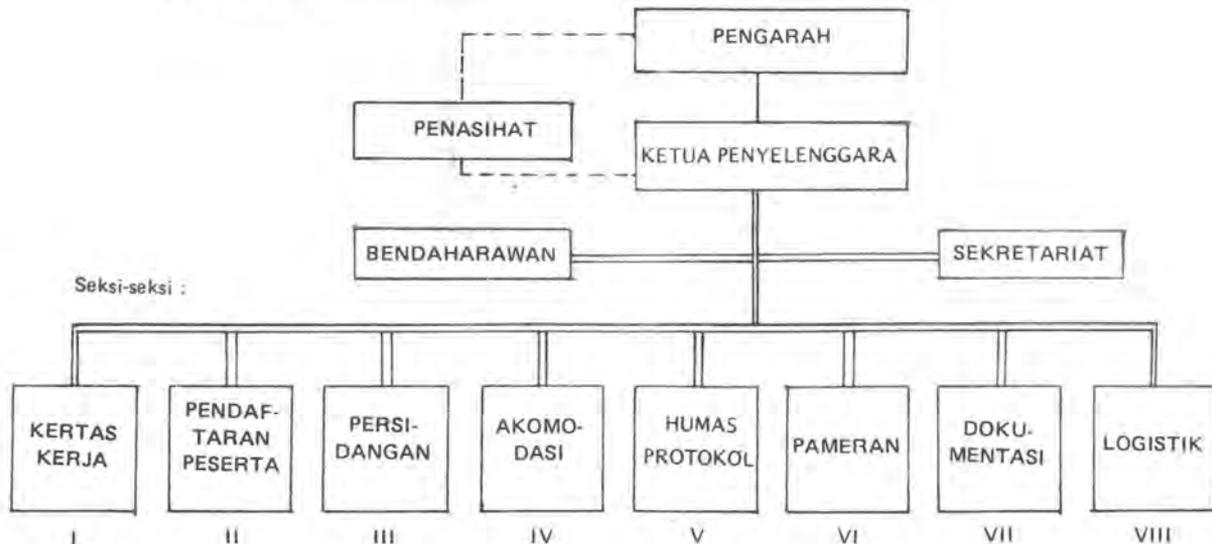
1. Drs. E. Asmad
2. Sartono
3. Suyitno

### IV. Dokumentasi dan Laporan

1. Warkim Harnaedi
2. Nasim
3. Sumiyati H.S.
4. Ibrahim Abubakar

Jakarta, 19 September 1983

**BAGAN  
SUSUNAN ORGANISASI PANITIA  
KONGRES BAHASA INDONESIA IV  
Jakarta, 21 – 26 Nopember 1983**

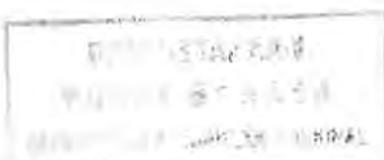


- - - hubungan konsultatif
- hubungan direktif
- == hubungan direktif dan koordinatif

## DAFTAR PESERTA KONGRES BAHASA INDONESIA IV

| No. | N a m a               | A l a m a t                                                                                              |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dra. A.A. Kalangie    | Ketua Bidang Pendidikan PB IPI<br>Fakultas Sastra UI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                        |
| 2.  | Aaltje Tallei         | Mahasiswa FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                 |
| 3.  | A.A. Ngurah Iswana    | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                  |
| 4.  | Drs. A. Agoes Sriyono | Public Relation<br>Wisma Metropolitan Lantai 18<br>Jalan Jenderal Sudirman 29<br>Jakarta Selatan         |
| 5.  | A.A. Putra            | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                  |
| 6.  | Drs. A. Banta         | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur    |
| 7.  | Drs. Achmad Nuryani   | Ketua Umum Pengurus Besar<br>Persatuan Pengarang RI<br>Jalan Tembok 27A<br>Menteng Raya<br>Jakarta Pusat |

| No. | N a m a                   | A l a m a t                                                                                                                            |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Abdul Aziz                | Guru SMA Negeri 7<br>Jalan Merdeka Timur 14<br>Jakarta Pusat                                                                           |
| 9.  | Drs. Abdul Aziz           | Dosen FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                                                   |
| 10. | Drs. Abdul Chaer          | Dosen FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                                                   |
| 11. | Drs. Abdul Gaffar Ruskhan | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                  |
| 12. | Abdul Hadi W.M.           | Balai Pustaka<br>Jalan Dr. Wahidin 1<br>Jakarta Pusat                                                                                  |
| 13. | Drs. Abdulhayi            | Dosen FPBS IKIP Yogyakarta<br>Karangmalang<br>Yogyakarta                                                                               |
| 14. | Drs. Abdullah Hasanah     | Kepala Seksi Evaluasi<br>Bidang Pengendalian<br>Program PPPG Bahasa<br>Jalan Gardu<br>Srengseng Sawah, Pasar Minggu<br>Jakarta Selatan |
| 15. | Abdullah Nordin           | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                                                              |



| No. | N a m a                           | A l a m a t                                                                                           |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Drs. Abdullah Payapo              | FPBS Surabaya<br>Jalan Ketintang<br>Surabaya                                                          |
| 17. | Abdullah Sani Yahaya              | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                             |
| 18. | Abdul Madjid Afandi<br>Notosewoyo | Dosen/Pembantu Dekan I<br>FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                              |
| 19. | Drs. Abdul Razak Zaidan           | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 20. | Ab. Rahman Ismail                 | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                             |
| 21. | Drs. Abud Prawirasumantri         | Dosen FPBS IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi 229<br>Bandung                                             |
| 22. | Adi Sautini                       | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                               |
| 23. | Drs. A. Djunaidi, M.Sc.           | Dosen FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                  |

| No. | N a m a                    | A l a m a t                                                               |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 24. | Dra. Adwityani             | Balai Pustaka<br>Jalan Dr. Wahidin 1<br>Jakarta Pusat                     |
| 25. | Ny. Agoes Soenarso         | Supervisor PPIA<br>Jalan Pramuka 30<br>Jakarta Timur                      |
| 26. | Agung Artini Mataram       | Staf Pengajar FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                           |
| 27. | Drs. Agus Suriamiharja     | Dosen FPBS IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi 229<br>Bandung                 |
| 28. | Dr. Agustiar Syahnur, M.A. | FPBS IKIP Padang<br>Air Tawar<br>Padang                                   |
| 29. | Ahmad Ab. Hamid            | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia |
| 30. | Ahmad Garantjang           | Fakultas Keguruan<br>Universitas Tadulako<br>Kampus Bumi Bahari<br>Palu   |
| 31. | Drs. Ahmad HP              | Dosen FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                      |
| 32. | Ahmad Nurdin, S.H.         | Ahli Peneliti Madya<br>Jalan Veteran 7<br>Jakarta Pusat                   |

| No. | N a m a                         | A l a m a t                                                                                      |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33. | Ahmad Razali                    | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                        |
| 34. | Ainon Mohamad                   | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Petia Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                       |
| 35. | Drs. Akhlan Husen               | Dosen FPBS IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi 229<br>Bandung                                        |
| 36. | Drs. Alam Sutawijaya            | Dosen FPBS IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi 229<br>Bandung                                        |
| 37. | AleI Adam                       | Kepala Bagian Tata Usaha PPPG<br>Jalan Gardu<br>Srengseng Sawah, Pasar Minggu<br>Jakarta Selatan |
| 38. | Drs. Alexander Subekti<br>Hakim | Ketua YPTM<br>Jalan Awab No. 4<br>Jatinegara<br>Jakarta Timur                                    |
| 39. | Alit Saputra                    | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                          |
| 40. | Dra. Alma Evita Almanar         | Asisten Redaktur ILDEP<br>Jalan Tebet Barat Dalam III/24<br>Jakarta Selatan                      |

| No. | N a m a                | A l a m a t                                                                                               |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41. | Dr. Alwi Dahlan M.     | Asisten Menteri Negara<br>Kependudukan dan Lingkungan<br>Hidup<br>Jalan Merdeka Barat 15<br>Jakarta Pusat |
| 42. | Drs. A. Marzuki        | Dosen Fakultas Sastra<br>Universitas Pajajaran<br>Jalan Dipati Ukur 35<br>Bandung                         |
| 44. | Alimuddin              | Dosen FPBS IKIP Malang<br>Kamp                                                                            |
| 43. | Prof. Dr. A. Mattulada | Rektor Universitas Tadulako<br>Kampus Bumi Bahari<br>Palu                                                 |
| 44. | Alimuddin              | Dosen FPBS IKIP Malang<br>Jalan Semarang 5<br>Malang                                                      |
| 45. | Drs. Amir Fuady        | Kampus Pabelan<br>Makamhaji<br>Kotak Pos 82<br>Surakarta                                                  |
| 46. | Amir Hamzah, B.A.      | Pensiunan Dosen B5 Australia<br>Kompleks Thayyitah<br>Srengseng, Kebun Jeruk<br>Jakarta Barat             |
| 47. | Drs. A. Murad          | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur     |

| No. | N a m a               | A l a m a t                                                                                                                |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48. | Anak Agung Putu Jene  | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                                    |
| 49. | Dra. Anita K. Rustapa | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur                      |
| 50. | Anne-Marie Hussein    | Jalan Teuku Umar 50<br>Jakarta Pusat                                                                                       |
| 51. | Anwar Ali Akbar       | Ketua HPBI DKI Jakarta<br>Kantor Wilayah Departemen<br>Pendidikan dan Kebudayaan<br>Jalan Gatot Subroto<br>Jakarta Selatan |
| 52. | dr. A. Prayitno       | Rumah Sakit TNI AL<br>Jalan Bendungan Hilir<br>Jakarta Selatan                                                             |
| 53. | Arbak Othman, M.A.    | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                                                  |
| 54. | Arfan Abdullah        | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                                                  |
| 55. | Arfissalam            | Guru SMA 55<br>Jalan Minyak Raya<br>Duren Tiga<br>Jakarta Selatan                                                          |

| No. | N a m a                | A l a m a t                                                                                           |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56. | Drs. Ariani Isnamurti  | Penerbit Bhratara Karya Aksara<br>Jalan Rawabali II/5<br>Kawasan Industri Pulogadung<br>Jakarta Timur |
| 57. | Arifin Said            | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                             |
| 58. | Ariyanto               | Fakultas Sastra<br>Universitas Gajah Mada<br>Bulaksumur, Yogyakarta                                   |
| 59. | Aryo                   | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                               |
| 60. | Drs. A. Sardju S.M.    | FKIP Universitas Negeri<br>Sebelas Maret<br>Makamhaji<br>Kotak Pos 82<br>Surakarta                    |
| 61. | Prof. Dr. A.S. Broto   | FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                        |
| 62. | Drs. Asdi S. Dipodjojo | Dosen FPBS IKIP Yogyakarta<br>Karangmalang<br>Yogyakarta                                              |
| 63. | Ashah Samah            | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                             |

| No. | N a m a             | A l a m a t                                                                                           |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64. | Dra. Asni Ayub      | FPBS IKIP Padang<br>Air Tawar<br>Padang                                                               |
| 65. | Asraf H. Wahab      | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                             |
| 66. | Drs. A.T. Effendi   | Guru SMA Perguruan Ksatria<br>Jalan Percetakan Negara D 232<br>Jakarta Pusat                          |
| 67. | Dra. Atidjah Hamid  | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 68. | Dra. Atika Sya'rani | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 69. | Awang Sariyan       | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                             |
| 70. | Ir. St. A. Wartono  | Ketua Umum BAKOM PKB<br>Jakarta                                                                       |
| 71. | H. Azkarmin Zaini   | Wartawan Kompas<br>Jalan Palmerah Selatan 26<br>Jakarta Barat                                         |
| 72. | Dr. Azhar M. Simin  | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                             |

| No. | N a m a                   | A l a m a t                                                               |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 73. | Azimah Saidar             | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia |
|     | <b>B</b>                  |                                                                           |
| 74. | H. Bachtiar S. Yamil      | Pegawai Departemen Luar Negeri<br>Jalan Taman Pejambon 6<br>Jakarta Pusat |
| 75. | Drs. Badri Nawar          | Universitas Lampung<br>Lampung                                            |
| 76. | Bahrin Samad              | Jalan Pertanian III/54<br>Pasar Minggu<br>Jakarta Selatan                 |
| 77. | Bagiasa                   | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar   |
| 78. | Bambang Rismadi Hartono   | Pimpinan Inter Mission<br>Language Center<br>Hegarmanah 36<br>Bandung     |
| 79. | Bambang S.P.              | Wartawan Kompas<br>Jalan Palmerah Selatan 26<br>Jakarta Barat             |
| 80. | Drs. Basuki Suhardi, M.A. | Fakultas Sastra<br>Universitas Indonesia<br>Rawamangun, Jakarta Timur     |

| No. | N a m a                        | A l a m a t                                                                            |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 81. | Berthold Damshauser, M.A.      | Jalan Kalibata Utara 15<br>Pasar Minggu<br>Jakarta Selatan                             |
| 82. | Berthy D.S. Toreh              | Mahasiswa FPBS IKIP Manado<br>Kampus IKIP<br>Manado                                    |
| 83. | Dra. Betty S. Poernomo Soetowo | Laboratorium Bahasa<br>Pusdiklatbangtel<br>Jalan Gegerkalong Hilir<br>Bandung          |
| 84. | Binny Buchari                  | Reporter Harian<br>The Jakarta Post<br>Jalan Palmerah Selatan No. 15<br>Jakarta Barat  |
| 85. | Dr. Bistok A. Siahaan          | Lektor Kepala IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                |
| 86. | B.N. Marbun, S.H.              | Kepala Bagian Publikasi LPPM<br>Jalan Menteng Raya 9<br>Jakarta Pusat                  |
| 87. | Drs. B. Rahmanto               | Dosen IKIP Sanata Dharma<br>Mrican<br>Tromolpos 29<br>Yogyakarta                       |
| 88. | Drs. Buchari Mudahar           | Staf Pengajar pada Fakultas<br>Sastra Universitas Andalas<br>Jalan Situjuh 1<br>Padang |

| No. | N a m a                  | A l a m a t                                                                                           |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89. | Budiasa                  | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                               |
| 90. | Dra. Ny. Busnewan Jasin  | Dosen Bahasa Indonesia<br>IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                   |
| 91. | Drs. Bustaman Hamid M.P. | FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                        |
| 92. | Drs. Bustaman Mustafa    | Dosen FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                  |
|     | C                        |                                                                                                       |
| 93. | Drs. Caca Sudarsa        | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 94. | Cit Romlah Mohamad       | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                             |
| 95. | Dra. Cormentya S.        | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
|     | D                        |                                                                                                       |
| 96. | Dadiarta                 | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                               |

| No.  | N a m a               | A l a m a t                                                                                        |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97.  | Dameria Nainggolan    | Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 98.  | Dandan Supratman      | Mahasiswa FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                           |
| 99.  | Drs. Dasuki A. Gani   | Dekan FKSS IKIP Muhammadiyah<br>Jalan Limau II Blok B<br>Kebayoran Baru<br>Jakarta Selatan         |
| 100. | Datin Azizah Mokhzani | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                          |
| 101. | Drs. Dendy Sugono     | Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 102. | Dewaki Kramadibrata   | Staf Pengajar FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                    |
| 103. | Dr. D.F. Walker       | Institut Theologie Alkitabiah<br>Hangtuh 8,<br>Medan                                               |
| 104. | Dian Pertiwi          | HPBI<br>Jalan Cisadane No. 44<br>Cikini, Jakarta Pusat                                             |

| No.  | N a m a                            | A l a m a t                                                                                                   |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105. | Dien Kasim                         | Guru SMA Negeri 21<br>Jalan Kelurahan Kayu Putih<br>Pulo Mas, Jakarta Timur                                   |
| 106. | Drs. Djantera Kawi                 | Dekan FKIP<br>Universitas Lambung Mangkurat<br>Jalan Veteran 268<br>Banjarmasin                               |
| 107. | Djoko Kentjono, M.A.               | Pengajar FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                                    |
| 108. | Djumingan Kusumo<br>Prayitno, B.A. | Kepala Seksi Kurikulum<br>Bidang Bina PPPG<br>Jalan Gardu<br>Srengseng Sawah, Pasar Minggu<br>Jakarta Selatan |
| 109. | Drs. Dominicus Doko Wadu           | Dosen Fakultas Nongelar<br>Teknologi<br>Universitas Palangkaraya<br>Jalan Tanjung Nyahu<br>Palangkaraya       |
| 110. | E<br>Dr. Edmund A. Anderson        | Staf Pengajar Regional<br>Language Center (RELC)<br>30 Orange Grove Road<br>Singapore 1025<br>Singapore       |
| 111. | Dra. Edwina Satmoko                | Pengajar SMEA Budhaya<br>Jalan Matraman Raya 119<br>Jakarta Timur                                             |

| No.  | N a m a                       | A l a m a t                                                                                           |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112. | Ellin Sjamsuri                | Dosen FPBS IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi 229<br>Bandung                                             |
| 113. | En. Zainal Abidin Abu B.      | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                             |
| 114. | Drs. E. Toto Supradjorto D.S. | Guru SMA Kanisius<br>Jalan Menteng Raya 64 – 68<br>Jakarta Pusat                                      |
| 115. | E.W. Silangen S.              | Peserta S-3<br>Fakultas Sastra UI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                        |
| 116. | F<br>Dra. Farida Dahlan       | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 117. | Prof. Dr. Farid M. Onn        | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                             |
| 118. | Dra. Felicia N. Utorodewo     | Pengajar FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                            |

| No.  | N a m a                       | A l a m a t                                                                                                         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | G                             |                                                                                                                     |
| 119. | Drs. Gatot Susilo Sumowijoyo  | Taman Dewi Sartika 9<br>Ketintang<br>Surabaya                                                                       |
| 120. | Dr. Geraldine Y.P. Manoppo W. | Jalan Setiabudi I/<br>Jalan E No. 14<br>Jakarta Selatan                                                             |
| 121. | Ny. Gloria C. Kismadi         | Dean of Studies PPIA<br>Jalan Pramuka 30<br>Jakarta Timur                                                           |
| 122. | Goenawan Mohamad              | Pemimpin Redaksi<br>Majalah Berita Mingguan Tempo<br>Pusat Perdagangan Senen<br>Blok II Lantai III<br>Jakarta Pusat |
| 123. | Gunarta                       | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                             |
| 124. | Dr. Gorys Keraf               | Dosen FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                                             |
| 125. | Gusti Made Puja               | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                             |

| No.  | N a m a                     | A l a m a t                                                                                              |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>H</b>                    |                                                                                                          |
| 126. | Drs. Haliparni Rasyad       | Dosen FPBS IKIP Padang<br>Air Tawar<br>Padang                                                            |
| 127. | Tuan Haji Hamdan A. Rahman  | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur<br>Malaysia                              |
| 128. | Hargo Saputro               | Wakil Pimpinan<br>Redaksi Majalah KORPRI<br>Jalan Kramat IV No. 4, 6<br>Jakarta Pusat                    |
| 129. | Drs. Hari Mulyono           | FPBS IKIP Semarang<br>Jalan Kelud Utara III<br>Semarang                                                  |
| 130. | Drs. Harimurti Kridalaksana | Dosen FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                                  |
| 131. | H. Haris, S.H.              | Ketua Pengkajian Bahasa Hukum<br>Departemen Kehakiman<br>Jalan Mayjen Sutoyo<br>Cililitan, Jakarta Timur |
| 132. | Dra. Hartini Supadi         | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur    |
| 133. | Hj. Hasan Ali               | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                                |

| No.  | N a m a                    | A l a m a t                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134. | Dra. Henny Th. L. Ticoalu  | Dosen Fakultas Sastra<br>Universitas Sam Ratulangi<br>Kleak<br>Manado                                                                                         |
| 135. | Henri Chambert Loir        | EFEO<br>Gudang Peluru A55, Jakarta                                                                                                                            |
| 136. | Ir. Herman Johannes        | Guru Besar<br>Universitas Gajah Mada<br>Yogyakarta                                                                                                            |
| 137. | Drs. Herman Y. Waluyo M.P. | Kompleks Makam Haji<br>Kotak Pos 82<br>Surakarta                                                                                                              |
| 138. | Ny. Hetty A. Wahid, S.H.   | Sekretaris Pengkajian Bahasa<br>Hukum, Departemen Kehakiman<br>Jalan Mayjen Soetoyo<br>Cililitan<br>Jakarta Timur                                             |
| 139. | H.I.Q. Galelano            | PP HSBI Wartawan Harian Pelita<br>Tebet Timur Dalam VIII S No. 9<br>Rt. 005 Rw. 09<br>Kelurahan Tebet Timur<br>Kecamatan Tebet<br>Jakarta Selatan             |
| 140. | Dra. H.I. Roeswoto         | Pendidikan Luar Sekolah Pemuda<br>dan Olahraga<br>Direktorat Pendidikan Masyarakat<br>Kepala Seksi Pengembangan<br>Jalan Kramat Raya No. 114<br>Jakarta Pusat |

| No.  | N a m a                  | A l a m a t                                                             |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 141. | H.M. Victor Matondang    | Kompleks MPR<br>Jalan Kamboja A 162<br>Cilandak, Jakarta Selatan        |
| 142. | Ny. H. Hurip             | Pengajar PPIA<br>Jalan Pramuka 30<br>Jakarta Timur                      |
| 143. | I<br>I Andri Hartono     | Penerjemah/Dokter<br>Puskesmas Patuk<br>Gunung Kidul<br>Yogyakarta      |
| 144. | Ida Ayu Putu Kartini     | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 145. | Ida Bagus Dharma Palgane | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 146. | Ida Bagus Anom Putra     | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 147. | Ida Gede Seneng          | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |

| No.  | N a m a                       | A l a m a t                                                             |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 148. | Drs. Idrus                    | Siaran Luar Negeri RRI<br>Jalan Merdeka Barat 4 – 5<br>Jakarta Pusat    |
| 149. | I.G.A. Wiadnyana              | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 150. | IGMK Putrayasa                | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 151. | I.G.N. Ardana                 | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 152. | I Guru Ayu Anam Sri Bhagawati | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 153. | I Gusti Ayu Sundari           | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 154. | I Gusti Ketut Adyana          | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |

| No.  | N a m a               | A l a m a t                                                             |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 155. | I Gusti Purnawati     | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 156. | I Gusti Ngurah Bagus  | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 157. | I Gusti Ngurah Bagus  | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 158. | I Ketut Asa K         | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 159. | I Ketut Pangan Wijana | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 160. | I Ketut Budiawan      | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 161. | I Komang Bagiana      | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |

| No.  | N a m a                | A l a m a t                                                                                           |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161. | Ilyas Effendi          | HPBI Jakarta<br>Jalan Cikini Raya 73<br>Jakarta Pusat                                                 |
| 162. | I Made Sumendra        | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                               |
| 163. | I Made Sumendra        | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                               |
| 164. | I Made Tekek           | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                               |
| 165. | Dra. Imas Siti Masitoh | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 166. | Im Young Ho            | Jalan Bantu ZV/4<br>Jakarta                                                                           |
| 167. | I Nengah Sukartha      | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                               |

| No.  | N a m a                     | A l a m a t                                                                                   |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 168. | Dra. Inny Chikmatin Haryono | FSUI<br>Rawamangun<br>Jakarta Timur                                                           |
| 169. | I Nyoman Peteg              | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                       |
| 170. | I Nyoman Suaka              | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                       |
| 171. | Ny. Irene Siregar           | Guru PPIA<br>Jalan Pramuka 30<br>Jakarta Timur                                                |
| 172. | H. Ismail Daulay            | Kepala Bagian Penerbitan<br>PT. Mutiara<br>Jalan Pulo Kambing<br>Pulo Gadung<br>Jakarta Timur |
| 173. | Ismail B. Said              | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                     |
| 174. | Isti Penny Koentamadi       | Guru SMA Santa Ursula I<br>Jalan Pos 2<br>Jakarta Pusat                                       |

| No.  | N a m a           | A l a m a t                                                             |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 175. | I Wayan Lemesnawa | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 176. | I Wayan Sulaga    | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 177. | I Wayan Witra     | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 178. | I Wayan Bawa      | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 179. | I Wayan Pathisme  | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 180. | I Wayan Sakra     | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 181. | I Wayan Suda      | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |

| No.  | N a m a                 | A l a m a t                                                                            |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 182. | Drs. Iyo Mulyono        | Dosen FPBS IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi 229<br>Bandung                              |
| 183. | J<br>Drs. Jabrohim      | IKIP Muhammadiyah<br>Jalan Kapas No. 6<br>Yogyakarta                                   |
| 184. | Jafar Haruna            | Guru SMA Negeri I<br>Jalan G. Bawakaraeng 35<br>Ujung Pandang                          |
| 185. | Drs. Jamaluddin H.      | Dekan STIA Lampung<br>Jalan Gajah Mada<br>Kotabaru<br>Bandar Lampung<br>Tanjung Karang |
| 186. | Janto Arnold Lalamentik | Bank Indonesia<br>Jalan M.H. Thamrin<br>Jakarta Pusat                                  |
| 187. | Jasmin Hayati           | Guru SMP 136<br>Jakarta Pusat                                                          |
| 188. | Sdr. Jazamuddin B.      | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia              |

| No.  | N a m a                            | A l a m a t                                                                                       |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189. | Drs. Jazir Burhan                  | Kepala PPPGB<br>Jalan Gardu<br>Srengseng Sawah, Pasar Minggu<br>Jakarta Selatan                   |
| 190. | Dra. Jenny T. Hardjatno            | Staf Pengajar FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                   |
| 191. | Johamar                            | Guru Bahasa Inggris/Indonesia<br>Jalan Pramuka 30<br>Jakarta Timur                                |
| 192. | Drs. Johannes F. Pattiasina, M.Sc. | Kepala Balai Penelitian Bahasa<br>Kompleks Benteng<br>Ujung Pandang                               |
| 193. | Drs. Johannes Kalamper             | Pengurus KNPI<br>Daerah Tingkat I<br>Kalimantan Tengah<br>Jalan Cilik Riwut Km. 1<br>Palangkaraya |
| 194. | John M. Mcglynn                    | Penerjemah<br>Jalan Danau Maninjau<br>Bendungan Hilir                                             |
| 195. | Josefina Mantik Kumaat             | Staf Pengajar FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                   |
| 196. | Dr. J.S. Badudu                    | Dekan Fakultas Sastra<br>Universitas Padjadjaran<br>Jalan Dipati Ukur 37<br>Bandung               |

| No.  | N a m a                   | A l a m a t                                                                                               |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197. | Juana Sadeli              | Guru SMA Perguruan Rakyat<br>Jalan Jenderal Sudirman<br>(belakang Rumah Sakit Jakarta)<br>Jakarta Selatan |
| 198. | Dra. Juliana A.S.         | Dosen Fakultas Sastra<br>Universitas Negeri<br>Sebelas Maret<br>Jalan Urip Sumodiharjo 122<br>Surakarta   |
| 199. | Junayah H.M.              | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur     |
| 200. | Dra. Juniar Z. Adji M.P.  | Dosen FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                      |
| 201. | Drs. Juwarlan Purwodijoyo | Dosen FKS IKIP Veteran<br>Sukoharjo<br>Solo                                                               |
| 202. | Drs. J. Tamalla           | Kanwil Depdikbud<br>Propinsi Maluku                                                                       |
| 203. | K<br>K. Ahmad B.A.        | Kepala Bidang Pengendalian PPPG<br>Jalan Gardu<br>Srengseng Sawah, Pasar Minggu<br>Jakarta Selatan        |

| No.  | N a m a                 | A l a m a t                                                               |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 204. | Kaharudin               | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar   |
| 205. | Kailani Hasan           | Mahasiswa FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                  |
| 206. | Ny. Karmadevi Christian | Dosen Universitas Lampung<br>Gedong Meneng<br>Bandar Lampung              |
| 207. | Drs. Karna Yudibrata    | Dosen FPBS IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi 229<br>Bandung                 |
| 208. | Karyana                 | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar   |
| 209. | Drs. H. Kasim Kardana   | Dosen FPBS IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi 229<br>Bandung                 |
| 210. | Ketut Linggih           | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar   |
| 211. | Khalid M. Hussain       | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia |

| No.  | N a m a                  | A l a m a t                                                                                        |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212. | Dr. Khulijah Salleh      | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                          |
| 213. | K. Londo                 | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                            |
| 214. | Koesnadi Hardjosumantri  | Sesmeneg PPLH<br>Jalan Merdeka Barat 15<br>Jakarta Pusat                                           |
| 215. | Koesto Wongsodidjojo     | Pensiunan Pejabat Dinas<br>Luar Negeri<br>Flat Deplu Apt. 413<br>Kebayoran Baru<br>Jakarta Selatan |
| 216. | Koshiro Kitagawa         | Jalan Matraman Raya 6<br>Jakarta Pusat                                                             |
| 217. | K.T. Soedarto            | President Director<br>Matahari Advertising<br>Jalan Letjen S. Parman 78<br>Slipi, Jakarta Barat    |
| 218. | Dra. Kun Zachrun Istanti | Fakultas Sastra<br>Universitas Gajah Mada<br>Bulaksumur, Yogyakarta                                |
| 219. | Kusumo Trinerwati        | Mahasiswa Indah C2<br>Jatiwaringin<br>Jakarta Timur                                                |

| No.  | N a m a                               | A l a m a t                                                                                                   |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220. | <p><b>L</b><br/>Laniwati Budisana</p> | <p>Mahasiswa<br/>Jalan Balai Pustaka Timur 6<br/>Rawamangun, Jakarta Timur</p>                                |
| 221. | Letkol Inf. Dr. L. Arif Budiman       | <p>Kabag III/Khusus<br/>Sekretariat Umum Hankam<br/>Departemen Hankam<br/>Merdeka Barat<br/>Jakarta Pusat</p> |
| 222. | Leo A. Apituley                       | <p>Dosen FPBS IKIP Manado<br/>Kampus IKIP<br/>Kleak<br/>Manado</p>                                            |
| 223. | Leonardus Mardiwarsito                | <p>Pensiunan Dosen<br/>Jalan Cisadane No. 41<br/>Jakarta Pusat</p>                                            |
| 224. | Drs. Lesmanesya                       | <p>Fakultas Sastra<br/>Universitas Padjadjaran<br/>Jalan Dipati Ukur 35<br/>Bandung</p>                       |
| 225. | Dr. Liaw Yook Fang                    | <p>Universitas Nasional<br/>Singapura, Kent Ridge<br/>Singapura 0511<br/>Singapura</p>                        |
| 226. | Drs. Liberty P. Sihombing, M.A        | <p>Dosen FSUI<br/>Rawamangun, Jakarta Timur</p>                                                               |

| No.  | N a m a                               | A l a m a t                                                                                       |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 227. | Dra. Liska Prasetya S.<br>Djajadinata | Dosen Akademi Anestesi<br>Departemen Kesehatan RI<br>Jalan Kimia No. 22 – 24<br>Jakarta Pusat     |
| 228. | Lita Pamela Kawira                    | Pengajar FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                        |
| 229. | Drs. Livain Lubis                     | Kepala Pusat Pengembangan<br>Wilayah LPPM–UNPAD<br>Dosen UNPAD<br>Jalan Dipati Ukur 35<br>Bandung |
| 230. | Drs. L. Sihotang                      | Dosen Universitas Advent Indonesia<br>Pos Cipaganti<br>Bandung                                    |
| 231. | Lucy R. Montolalu                     | Pengajar FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                        |
| 232. | Drs. Lukman Ali                       | Atase Kebudayaan Kedutaan<br>Besar Indonesia<br>Malaysia, Kuala Lumpur                            |
| 233. | M<br>Made Astiti Maram                | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                           |
| 234. | Prof. Madya Abdul Hamid<br>Mahmood    | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                         |

| No.  | N a m a                           | A l a m a t                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 235. | Prof. Madya Hj. Amat Jahari Muain | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                                                   |
| 236. | Prof. Madya Dr. Nik Safiah Karim  | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                                                   |
| 237. | Magdalena F. Kadir                | Guru PPIA<br>Jalan Pramuka 30<br>Jakarta Pusat                                                                              |
| 238. | Prof. Mahadi, S.H.                | Sekretaris Pembakuan Istilah<br>Hukum Batinkumas<br>Departemen Kehakiman<br>Jalan Mayjen Sutoyo<br>Cililitan, Jakarta Timur |
| 239. | Majalah <i>Gadis</i>              | Staf Redaksi Majalah <i>Gadis</i><br>Jalan H. Rasuna Said<br>Blok B, Kav. 32 – 33<br>Jakarta Selatan                        |
| 240. | Mansoer Pateda                    | Sekretaris Program D<br>FKIP Universitas Sam Ratulangi<br>Kompleks Jambura<br>Gorontalo                                     |
| 241. | Drs. Marah Rusmali                | Dosen FPBS IKIP Padang<br>Air Tawar, Padang                                                                                 |
| 242. | Marcus Purwadi, B.A.              | Guru SMA Don Bosco<br>Jalan Mangga Besar 135<br>Jakarta Pusat                                                               |

| No.  | N a m a                | A l a m a t                                                                                           |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 243. | Mardi                  | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                               |
| 244. | Dra. Maria Indra Rukmi | Staf Pengajar FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                       |
| 245. | Maria Matildis Banda   | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                               |
| 246. | Maria Theresia Rika    | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                               |
| 247. | Mariamah, B.A.         | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 248. | Dra. Marida L. Siregar | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 249. | Drs. Marjusman Maksan  | Dosen FPBS IKIP Padang<br>Air Tawar<br>Padang                                                         |
| 250. | Martha E. Siswanto     | Mahasiswa FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                           |

| No.  | N a m a                            | A l a m a t                                                                                           |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 251. | Drs. Marwoto M.S.                  | FKIP<br>Universitas Negeri<br>Sebelas Maret<br>Makamhaji<br>Kotak Pos 82<br>Surakarta                 |
| 252. | Masao Yamaguchi                    | Mahasiswa Universitas<br>Gajah Mada                                                                   |
| 253. | Drs. M. Asfandi Adul               | Dosen FKIP<br>Universitas Lambung Mangkurat<br>Jalan Veteran 268<br>Banjarmasin                       |
| 254. | Mas Haryadi                        | FPBS IKIP Surabaya<br>Ketintang Timur<br>Surabaya                                                     |
| 255. | Prof. Dr. Maurits M.<br>Simatupang | Dosen FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                               |
| 256. | Drs. Mbiyo Saleh                   | FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                        |
| 257. | Drs. M. Djasmin Nasution           | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 258. | Melani Hardjosudiro                | Asisten Redaktur ILDEP<br>Jalan Tebet Barat Dalam III/21<br>Jakarta Selatan                           |

| No.  | N a m a                         | A l a m a t                                                                                                                           |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 259. | Drs. M.E. Suhendar, Dipl.       | Dosen FPBS IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi 229<br>Bandung                                                                             |
| 260. | Meyuki Maeda                    | Atase Embassy of Japan<br>Jalan M.H. Thamrin 24<br>Jakarta Pusat                                                                      |
| 261. | Dr. M. Fakri Gaffar             | FKIP IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi 229<br>Bandung                                                                                   |
| 262. | Dra. Minto Rahayu               | Staf Edukatif PEDC<br>Jalan Gegerkalong Hilir<br>Kotak Pos 365<br>Bandung                                                             |
| 263. | Miss Petrina Williams           | Jalan Deresan 3<br>Yogyakarta                                                                                                         |
| 264. | M. Lamsari                      | Ketua Satuan Tugas<br>Koordinasi Pembinaan<br>Perpustakaan Sekolah<br>Propinsi Sumatera Selatan<br>Jalan Kapten A. Rivai<br>Palembang |
| 265. | Dra. Moeharti S. Moeiman        | Asisten Redaktur ILDEP<br>Jalan Tebet Barat Dalam III/21<br>Jakarta Selatan                                                           |
| 266. | Drs. Mohamad Daud B.<br>Mohamad | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                                                             |

| No.  | N a m a                     | A l a m a t                                                                                                    |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 267. | Mohammad Maloto             | Guru SMA 38<br>Jalan Raya Depok<br>Pasar Minggu, Jakarta Selatan                                               |
| 268. | Mohamad Noor Ishak          | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                                      |
| 269. | Mohamad Waluyo              | Mahasiswa FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                       |
| 270. | Drs. H. Mohammad Zaid       | Ketua Jurusan Bahasa dan<br>Sastra Indonesia<br>IKIP Muhammadiyah<br>Jalan Limau II, Blok B<br>Jakarta Selatan |
| 271. | Mokhtar H. Omar             | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                                      |
| 272. | Prof. Drs. M. Ramlan        | Fakultas Sastra<br>Universitas Gadjah Mada<br>Bulaksumur, Yogyakarta                                           |
| 273. | M. Sali Haji Thaha          | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                                      |
| 274. | Dra. Mubasiroh Julistyowati | Dosen Universitas Wijayakusuma<br>Jalan Dukuh Kupang XXV<br>Surabaya                                           |

| No.  | N a m a                  | A l a m a t                                                                                  |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 275. | Dr. Muhadjir             | Dosen FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                      |
| 276. | Muh. Aslan               | Dekan Fakultas Sastra<br>Universitas Muhammadiyah<br>Jalan Kapas No. 6<br>Semaki, Yogyakarta |
| 277. | Drs. Mujiyono W.         | Fakultas Keguruan<br>Universitas Jambi<br>Jalan Diponegoro 16<br>Jambi                       |
| 278. | Mukti U.S.               | Dosen FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                         |
| 279. | Muliadi                  | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                      |
| 280. | Dra. Multamia, M.A.      | Dosen FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                      |
| 281. | Drs. Munadi Padmadiwiria | Pengajar FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                   |
| 282. | Drs. Mursal Esten        | Dosen FPBS IKIP Padang/<br>Kepala Taman Budaya Padang<br>Kompleks Air Tawar<br>Padang        |

| No.  | N a m a                  | A l a m a t                                                                         |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 283. | Murtini S. Pendit        | Yayasan Idhayi<br>Jalan A. Rahman Saleh 26<br>Jakarta Pusat                         |
| 284. | Muslim Nurdin            | Dosen FPBS IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi 229<br>Bandung                           |
| 285. | M. Toyib Usman           | Dosen FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                |
| 286. | Ny, M. Yamilah           | Dosen IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                     |
| 287. | N<br>Drs, Nanang Sunardi | Dosen IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                     |
| 288. | Nangsari Ahmad           | Dosen FKIP UNSRI<br>Jalan Sri Jayanegara<br>Bukit Besar<br>Palembang                |
| 289. | Nani Kustiani            | Fakultas Sastra<br>Universitas Gadjah Mada<br>Bulaksumur, Yogyakarta                |
| 290. | Naning Pranoto           | Redaktur Pelaksana Majalah Halo<br>Jalan Setiabudi Tengah No. 21<br>Jakarta Selatan |

| No.  | N a m a                | A l a m a t                                                                               |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 291. | Naraini Ab. Hamid      | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                 |
| 292. | Drs. Nasir Ahmad       | Kepala SMA 32<br>Jalan Komplekn Sekretariat Negara<br>Cidodol Baru<br>Jakarta Selatan     |
| 293. | Naziaton Harun         | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                 |
| 294. | Negiwiti               | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                   |
| 295. | Dra. Nelly Hassan      | Pengajar Fakultas Ekonomi<br>Universitas Krisnadwipayana<br>Jatiwaringin<br>Jakarta Timur |
| 296. | Prof. Dr. Ngurah Bagus | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                   |
| 297. | Dr. Nik Abdul Aziz     | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                 |

| No.  | N a m a                  | A l a m a t                                                                                                                           |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 298. | Ni Ketut Sukiani         | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                                               |
| 299. | Ni Putu N. Widarsini     | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                                               |
| 300. | Ni Wayan Loh             | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                                               |
| 301. | Prof. Drs. Noer Toegiman | IKIP Karangmalang<br>Yogyakarta                                                                                                       |
| 302. | Dra. Noerzisri A. Nazar  | UPPU ITB<br>Lembang, Bandung                                                                                                          |
| 303. | Drs. Noor Indones        | Tutor Belajar Jarak Jauh<br>Program Diploma II<br>Kanwil Depdikbud<br>Propinsi Sumatera Selatan<br>Jalan Kapten A. Rivai<br>Palembang |
| 304. | Drs. M. Rasjid Mulkan    | FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                                                        |
| 305. | Drs. Nurbaiti Jamalus    | Guru SPGN I<br>Jalan Setiabudi<br>Jakarta Selatan                                                                                     |

| No.  | N a m a                 | A l a m a t                                                                                     |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 306. | Ir. Nurcahya Darma K.   | Staf Perencanaan Diklat<br>Bina Marga<br>Jalan Wijaya I/63<br>Kebayoran Baru<br>Jakarta Selatan |
| 307. | Nurdin, B.B.A           | Guru SMPN 30<br>Jalan Anggrek<br>Jakarta Utara                                                  |
| 308. | Nur Faris Lc.           | Dosen FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                            |
| 309. | Ny. Nurlela Adnan, M.A. | Dosen IKIP Jakarta<br>FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                            |
| 310. | Nurlena Basir           | Dosen FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                            |
| 311. | Nyoman Astawa           | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                         |
| 312. | Nyoman Darma Putra      | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                         |
| 313. | H. Oesman Rahman        | Manggala BP-7<br>Taman Pejambon 2<br>Jakarta Pusat                                              |

| No.      | N a m a                    | A l a m a t                                                                                                             |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314.     | Oka Tulis                  | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                                 |
| 315.     | Olbers E. Ch. Wuwungan     | Pendeta Merdeka Timur 10<br>Jakarta Pusat                                                                               |
| 316.     | Drs. Osra M. Akbar         | Sektor Selatan A-11/48<br>Darussalam<br>Banda Aceh                                                                      |
| 317.     | Letkol Laut Otiah Nahraeni | Kepala Mimbar Bahasa Indonesia<br>Lemsa Hankam Farmasi<br>Bendungan Hilir<br>Jakarta Selatan                            |
| <b>P</b> |                            |                                                                                                                         |
| 318.     | Pamusuk Eneste             | Editor PT. Gramedia<br>Jalan Palmerah Selatan 22<br>Lantai IV<br>Jakarta Barat                                          |
| 319.     | Dra. Partini Sardjono      | Dosen Fakultas Sastra<br>Universitas Padjadjaran<br>Jalan Dipati Ukur 35<br>Bandung                                     |
| 320.     | Drs. Paul Permadi P.       | Kepala Bidang Pengelolaan<br>Teknis dan Jasa Informasi<br>Perpustakaan Nasional<br>Jalan Imam Bonjol 1<br>Jakarta Pusat |

| No.  | N a m a                    | A l a m a t                                                                            |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 321. | Drs. Paulus Yos Adi Riyadi | Dosen Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias 13<br>Denpasar, Bali        |
| 322. | P. Basuki Cokrodiyo        | Guru Percetakan Negara VII No. 6<br>Jakarta Pusat                                      |
| 323. | Dra. Peraturen Sukapiring  | Dosen Fakultas Keguruan<br>Universitas Sumatera Utara<br>Jalan Universitas 19<br>Medan |
| 324. | Phillipus Ateng Winarno    | Wartawan Suara Karya<br>Jalan Bangka II No. 2<br>Jakarta Selatan                       |
| 325. | Pius Caro                  | Wartawan Kompas<br>Jalan Palmerah Selatan 26<br>Jakarta Barat                          |
| 326. | Drs. Poerwadi              | Dosen FKIP<br>Universitas Sebelas Maret<br>Makamhaji<br>Kotak Pos 82<br>Surakarta      |
| 327. | Priyana                    | Dosen FMIPA<br>Universitas Gadjah Mada<br>Sekip Unit III<br>Yogyakarta                 |
| 328. | Pudentia Tetty Karnadi     | Pengajar SPG Budhaya<br>Jalan Matraman Raya 119<br>Jakarta Timur                       |

| No.  | N a m a                 | A l a m a t                                                             |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 329. | Pujiarta                | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 330. | Purana                  | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 331. | Purwa                   | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 332. | Putra Anayana           | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 333. | Putri Sri               | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 334. | Putu Sri Hindrawati     | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 335. | R<br>Drs. Rachmat Hamam | Dosen IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                         |

| No.  | N a m a                  | A l a m a t                                                                                         |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 336. | Rahayu Sudiarti          | Mahasiswa FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                         |
| 337. | Ir. Rahayu Yusuf         | Lektor Kepala<br>Fakultas Pertanian<br>Universitas Padjadjaran<br>Bukit Dago Utara<br>Bandung       |
| 338. | Rai Teges                | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                             |
| 339. | Ny. Raminah Baribin      | Dosen FPBS IKIP Semarang<br>Jalan Kelud Utara III<br>Semarang                                       |
| 340. | R.M. Darmawan            | Kepala Bidang Penyelenggara PPPG<br>Jalan Gardu<br>Srengseng Sawah, Pasar Minggu<br>Jakarta Selatan |
| 341. | Rasina Ramli, B.A.       | Dosen Lembaga Bahasa<br>IAIN Jakarta<br>Ciputat Raya, Jakarta Selatan                               |
| 342. | Ir. Ratna Sri Hudioetomo | Staf Pengajar IPB<br>Fakultas MIPA<br>Jalan Raya Padjadjaran<br>Bandung                             |
| 343. | Dra. Ratna Indriani H.   | Pembantu Pimpinan<br>Balai Penelitian Bahasa<br>Jalan I Dewa Nyoman Oka 34<br>Yogyakarta            |

| No.  | N a m a                       | A l a m a t                                                                            |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 344. | R. Azhari                     | Asrenjian/Kabag Taksa<br>Sesko ABRI Bagian Laut<br>Kebayoran Lama<br>Jakarta Selatan   |
| 345. | Drs. M. Ridwan Ismail         | Dosen Fakultas Keguruan<br>Universitas Syiah Kuala<br>Darussalam<br>Banda Aceh         |
| 346. | Hjh. Ridzuan                  | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia              |
| 347. | Dra. Rishad Masjhur Tamimi S. | Staf Pengajar<br>Universitas Nasional<br>Jalan Sawo Manila, Pejaten<br>Jakarta Selatan |
| 348. | Rita Sri Hastuti              | Fakultas Sastra UI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                        |
| 349. | Drs. R.M. Arif                | FKIP UNSRI<br>Jalan Sri Jayanegara<br>Bukit Besar<br>Palembang                         |
| 350. | Dra. Romlah Suhadi            | Guru SMAN II Cirebon<br>d.a. Sukamulus 44<br>Cibenyng<br>Bandung                       |

| No.  | N a m a                       | A l a m a t                                                                                                |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 351. | Rosa J. Mamangkey             | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                    |
| 352. | Dra. Rosmid Rosa              | Dosen FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                       |
| 353. | Ruth Bachtum                  | Fakultas Sastra UI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                            |
| 354. | Dr. Rustam Amir Effendi, M.A. | Dosen Fakultas Sastra<br>Universitas Sumatera Utara<br>Jalan Universitas 19<br>Medan                       |
| 355. | Rusni Zulharman               | Guru SMA Negeri 7<br>Jalan Medan Merdeka Timur 14<br>Jakarta Pusat                                         |
| 356. | Ruwiyanto<br>S                | Alumni IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                           |
| 357. | Dr. Sabarti Akhadiah          | Dosen IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                            |
| 358. | Drs. H. Sabaruddin Ahmad      | Rektor Bidang Kemahasiswaan<br>dan Alumni<br>Universitas Muhammadiyah<br>Jalan Gedung Arca No. 53<br>Medan |

| No.  | N a m a                       | A l a m a t                                                                                           |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 359. | Drs. Safari                   | Pusat Pengujian Balitbangdikbud<br>Jalan Jenderal Sudirman<br>Kotak Pos 297<br>Senayan, Jakarta Pusat |
| 360. | Drs. Said Mursalin            | Dosen FPBS IKIP Ujung Pandang<br>Gunungsari Baru<br>Ujung Pandang                                     |
| 361. | Saksono Priyanto, B.A.        | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 362. | Dra. Ny. Sakura R.            | Dosen IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                       |
| 363. | Salverda R.                   | Dosen Seksi Belanda<br>Fakultas Sastra UI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                |
| 364. | Drs. Sanawi Latief            | Kepala Seksi Ketenagaan PPPG<br>Jalan Gardu<br>Srengseng Sawah, Pasar Minggu<br>Jakarta Selatan       |
| 365. | Puan Saodah Abdullah          | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                             |
| 366. | Dra. Saodah Nasution Elgersma | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |

| No.  | N a m a                               | A l a m a t                                                                |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 367. | Saputra                               | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar    |
| 368. | Sariamin Ismail                       | Jalan Cempedak<br>Rumah HOP No. 1<br>Pekanbaru                             |
| 369. | Dra. Sari Nadjamuddin                 | Dosen IKIP Manado<br>Jalan Santo Yusuf No. 21<br>Manado                    |
| 370. | Dra. Sartini                          | Universitas Sebelas Maret<br>Jalan Urip Sumoharjo 122<br>Surakarta         |
| 371. | Savitri Elias                         | Staf Pengajar FSUI<br>PO Box 001<br>Jatinegara, Jakarta Timur              |
| 372. | Prof. S. Baroroh Baried               | Dosen Fakultas Sastra<br>Universitas Gadjah Mada<br>Bulaksumur, Yogyakarta |
| 373. | Ny. S. Chotimah Widodo<br>Santodipuro | Anggota HPI<br>d.a. Cisadane IIB<br>Jakarta Pusat                          |
| 374. | Seriwati                              | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar    |

| No.  | N a m a                  | A l a m a t                                                                            |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 375. | Dra. Setyawati Supadnomo | Penerjemah<br>Jalan Dwijaya III/1A<br>Radio Dalam<br>Kebayoran Baru<br>Jakarta Selatan |
| 376. | En. Shaari Abdullah      | Persatuan Lingusitik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia              |
| 377. | Shri Krishna Siregar     | Dosen Fakultas Hukum<br>Universitas Muhammadiyah<br>Kebayoran Baru<br>Jakarta Selatan  |
| 378. | Sibagia                  | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                |
| 379. | Simpem                   | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                |
| 380. | Dra. Siti Aisyah Sunjari | Dosen ASMI<br>Jalan Pacuan Kuda 1 – 5<br>Pulo Mas, Jakarta Timur                       |
| 381. | Siti Chamdiah S.         | Jalan Kusen Raya No. 1<br>Kampung Ambon<br>Jakarta Timur                               |

| No.  | N a m a                        | A l a m a t                                                                                                          |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 382. | Dra. Siti Salamah Arifin       | Fakultas Keguruan<br>Universitas Sriwijaya<br>Jalan Sri Jayanegara<br>Bukit Besar, Palembang                         |
| 383. | Dra. Siti Sundari Tjitrosubono | Pembantu Dekan Bidang Akademik<br>Fakultas Sastra<br>Universitas Gadjah Mada<br>Bulaksumur, Yogyakarta               |
| 384. | Siti Wantini, B.A.             | Kasi Kurikulum PPPG Tertulis<br>Jalan dr. Cipto No. 9<br>Bandung                                                     |
| 385. | Dra. Siti Zahra Yundiafi       | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur                |
| 386. | Dr. Siti Zaharah S.            | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                              |
| 387. | Sjafril Salim                  | Staf Asisten Menteri Negara<br>Kependudukan dan<br>Lingkungan Hidup<br>Jalan Medan Merdeka Barat 15<br>Jakarta Pusat |
| 388. | Drs. Sjamsul Bahri             | Kepala Subbagian<br>Urudan Dalam PPPG<br>Srengseng Sawah, Pasar Minggu<br>Jakarta Selatan                            |

| No.  | N a m a                             | A l a m a t                                                                                        |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 389. | Drs. Slamet Riyadi Ali              | Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 390. | Slamet Sukirnantio                  | Sekretaris Umum BAKOM PKB<br>DKI Jakarta                                                           |
| 391. | Drs. Soediro Sutoto                 | Fakultas Sastra<br>Universitas Sebelas Maret<br>Jalan Urip Sumoharjo 122<br>Surakarta              |
| 392. | Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja | Rektor Universitas Tujuh Belas Agustus<br>Jalan Teuku Cik Ditiro<br>Jakarta Pusat                  |
| 393. | Drs. Soegianto                      | Dosen Fakultas Sastra<br>Universitas Jember<br>Kampus Tegalboto<br>Jember                          |
| 394. | Dra. Ny. Soemarto D.M.E.            | Direktur Laboratorium Bahasa<br>Universitas Airlangga<br>Jalan Airlangga No. 6C<br>Surabaya        |
| 395. | Drs. Soemarto, M.Sc.                | PRI/Dosen<br>IKIP Semarang<br>Jalan Kelud Utara III<br>Semarang                                    |

| No.  | N a m a                | A l a m a t                                                                                                                    |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 396. | Drs. Soemartono        | Kepala Subdirektorat Pembantu<br>Media Pendidikan Direktorat<br>Sarana Pendidikan<br>Jalan Hang Lekir II/16<br>Jakarta Selatan |
| 397. | Drs. Soenarko          | Dosen IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                                                |
| 398. | Soeprapto S.           | Reporter/Penyiar<br>Suara Amerika<br>d.a. USIS<br>Jalan Medan Merdeka Selatan 4<br>Jakarta Pusat                               |
| 399. | Drs. Soepyadi          | Lektor Kepala/Dosen<br>FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                          |
| 400. | Drs. S.R.H. Sitanggang | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur                          |
| 401. | Dra. Sofia Manan       | Dosen Bahasa Indonesia<br>FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                       |
| 402. | Sofyan Hadi            | IAIN Sjarif Hidayatullah<br>Ciputat, Jakarta Selatan                                                                           |
| 403. | Srie Redjeki           | Pondok Kopi<br>Blok F II/6, Klender<br>Jakarta Timur                                                                           |

| No.  | N a m a                        | A l a m a t                                                                                                          |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404. | Dra. Sri Nardiati              | Balai Penelitian Bahasa<br>Jalan IDewa Nyoman Oka 34<br>Yogyakarta                                                   |
| 405. | Sriharti                       | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                              |
| 406. | Sri Sayekti                    | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur                |
| 407. | Sri Suhita                     | Guru STM Negeri 3<br>Jalan Kebon Sereh VII<br>Jatinegara, Jakarta Timur                                              |
| 408. | Ny. Sri Utami Soewarno         | Guru SMA Kanisius<br>Jalan Menteng Raya 64 – 68<br>Jakarta Pusat                                                     |
| 409. | Sri Wirati                     | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                              |
| 410. | Dr. Sri Wulan Rujianti Mulyadi | Kepala Pusat Dokumentasi Sastra<br>H.B. Jassin<br>d.a. Taman Ismail Marzuki<br>Jalan Cikini Raya 73<br>Jakarta Pusat |

| No.  | N a m a                       | A l a m a t                                                                 |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 411. | Drs. S.S. Nasution            | Sekretaris HPI<br>Jalan Cikini Raya 73<br>Jakarta Pusat                     |
| 412. | Stephanus Erman Bala          | Pengajar SPG Budhaya<br>Jalan Matraman Raya 119<br>Jakarta Pusat            |
| 413. | St. Sularto                   | Wartawan Harian <i>Kompas</i><br>Jalan Palmerah Selatan 26<br>Jakarta Barat |
| 414. | Subagio S. Waluyo             | Mahasiswa IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                         |
| 415. | Drs. Subantari Rachmat Aziz   | Dosen IAIN<br>Bandung                                                       |
| 416. | Suciati                       | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar     |
| 417. | Dr. Sudaryono                 | Dosen Fakultas Sastra<br>Universitas Gadjah Mada<br>Bulaksumur, Yogyakarta  |
| 418. | Sudiari                       | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar     |
| 419. | Dra. Ny. H. Suhartini Hartono | Dosen IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                             |

| No.  | N a m a                     | A l a m a t                                                                                          |
|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 420. | Dra. Sukamti Suratidjo      | Dosen Fakultas Sastra<br>Universitas Gadjah Mada<br>Bulaksumur<br>Yogyakarta                         |
| 421. | Sukanadi                    | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                              |
| 422. | Prof. Dr. Sulastin Sutrisno | Dekan Fakultas Sastra<br>Universitas Gadjah Mada<br>Bulaksumur<br>Yogyakarta                         |
| 423. | Sunarti                     | Dosen FPBS IKIP Semarang<br>Jalan Kelud Utara III<br>Semarang                                        |
| 424. | Dra. Sunarti                | Pengawas pada Kanwil<br>Departemen Pendidikan dan<br>Kebudayaan<br>Jalan S. Parman 16<br>Banjarmasin |
| 425. | Sunihati                    | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                              |

| No.  | N a m a            | A l a m a t                                                                                           |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 426. | Suparsa            | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                               |
| 427. | Suptarto H.S.      | Wartawan<br>Jalan Tanah Abang II/35<br>Jakarta Pusat                                                  |
| 428. | Suparwa            | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                               |
| 429. | Sutarto            | Guru SMP Negeri 67<br>Jalan Minangkabau Dalam<br>Jakarta Selatan                                      |
| 430. | Drs. Sutoko        | Dosen Fakultas Sastra<br>Universitas Jember<br>Jember                                                 |
| 431. | Sutrimah           | Guru SMA Negeri 10<br>Jalan Mangga Besar XIII<br>Jakarta Pusat                                        |
| 432. | Suryati Syam, B.A. | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 433. | Suyadi             | Dosen IKIP Jakarta<br>Jalan Danau Hijau Daun W/21<br>Cawang Kaveling<br>Jakarta Timur                 |

| No.  | N a m a              | A l a m a t                                                                        |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 434. | Suyati Suwarso       | Dosen FSUI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                            |
| 435. | Drs. Suyitno         | FKIP Universitas Negeri<br>Sebelas Maret<br>Makamhaji<br>Kotak Pos 82<br>Surakarta |
| 436. | Dr. Syahrudin Kaseng | IKIP Ujung Pandang<br>Gunungsari Baru<br>Ujung Pandang                             |
| 437. | Syahrul R.           | FPBS IKIP Padang<br>Air Tawar Padang<br>Padang                                     |
| 438. | Drs. Syamsuddin Udin | FPBS IKIP Padang<br>Air Tawar<br>Padang                                            |
| 439. | Syukur A. Ghazali    | Dosen FPBS IKIP<br>Jalan Semarang 5<br>Malang                                      |
| 440. | Drs. Swandono        | FKIP Universitas Negeri<br>Sebelas Maret<br>Makamhaji<br>Kotak Pos 82<br>Surakarta |

| No.  | N a m a                       | A l a m a t                                                                                                                 |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>T</b>                      |                                                                                                                             |
| 441. | Sdr. Tajuddin H. Abdul Rahman | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                                                   |
| 442. | Tama                          | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                                     |
| 443. | Prof. Dr. T.A. Ridwan         | Dekan Fakultas Sastra<br>Universitas Sumatera Utara<br>Jalan Universitas 19<br>Medan                                        |
| 444. | Ny. T. Efida Arifudin         | Ibu Rumah Tangga<br>KS Tubun IIB/8<br>Jakarta Barat                                                                         |
| 445. | Dra. T. Fatimah Djajasudarma  | Dosen Fakultas Sastra<br>Universitas Padjajaran<br>Jalan Dipati Ukur 35<br>Bandung                                          |
| 446. | Thodos Th. Siahaan, S.H.      | Sekretaris Pembakuan Istilah<br>Hukum Batinkumas<br>Departemen Kehakiman<br>Jalan Mayjen Sutoyo<br>Cililitan, Jakarta Timur |
| 447. | Dra. Threes Y. Kumanireng     | Dosen FKIP<br>Universitas Nusa Cendana<br>Jalan Diponegoro<br>Ende, Flores                                                  |

| No.  | N a m a                   | A l a m a t                                                                 |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 448. | Tito Wasito               | Dosen Fakultas Sastra UI<br>Rawamangun, Jakarta Timur                       |
| 449. | Dra. Tjut Rahma M.A. Gani | Dosen IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                             |
| 450. | Tjut Zahara Idris         | Wakil SMEA Negeri I<br>Pelita III<br>Jalan By Pass Kav. 98<br>Jakarta Timur |
| 451. | Ton Ibrahim               | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia   |
| 452. | Tri Warti                 | Guru SMA Negeri 10<br>Jalan Mangga Besar XIII<br>Jakarta Pusat              |
| 453. | T.R. Tinambunan           | Dosen FPBS IKIP<br>Jalan Merbau No. 38A<br>Medan                            |
| 454. | U<br>Ucu Wahyu            | Dosen FPBS IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi 229<br>Bandung                   |
| 455. | Drs. Ukun Suryaman        | Jalan Bukit Dago Selatan 52<br>Bandung                                      |
| 456. | Drs. U. Undang Misdan     | Dosen FPBS IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi No. 229<br>Bandung               |

| No.  | N a m a                            | A l a m a t                                                                                                      |
|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 457. | <p>V</p> <p>V.J. Hartono</p>       | <p>Guru</p> <p>Jalan Mangga Besar 135</p> <p>Jakarta Pusat</p>                                                   |
| 458. | <p>W</p> <p>Dr. W.A.L. Stokhof</p> | <p>Co-Manager/Wakil KITLV</p> <p>d.a. Jalan Tebet Barat Dalam II/21</p> <p>Jakarta Selatan</p>                   |
| 459. | <p>Dr. Walter B. Sidjabat</p>      | <p>Editor in Chief</p> <p>Penerbit Sinar Harapan</p> <p>Jalan Dewi Sartika 136D</p> <p>Cawang, Jakarta Timur</p> |
| 460. | <p>Wayan Sudana</p>                | <p>Fakultas Sastra</p> <p>Universitas Udayana</p> <p>Jalan Nias No. 13</p> <p>Denpasar</p>                       |
| 461. | <p>Dra. Wedhawati</p>              | <p>Balai Penelitian Bahasa</p> <p>Jalan I Dewa Nyoman Oka 34</p> <p>Yogyakarta</p>                               |
| 462. | <p>dr. Widyanto</p>                | <p>Staf RSPAD</p> <p>Jalan Abdul Rahman Saleh No. 2</p> <p>Jakarta Pusat</p>                                     |
| 463. | <p>Widyawati</p>                   | <p>Harian SINAR HARAPAN</p> <p>Jalan Dewi Sartika 154D</p> <p>Jakarta Timur</p>                                  |
| 464. | <p>Drs. Widjono HS.</p>            | <p>Guru/Dosen SLK IKIP Jakarta</p> <p>Rawamangun, Jakarta Timur</p>                                              |

| No.  | N a m a                | A l a m a t                                                                                                                                                                         |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 465. | Willie Koen            | Editor Kepala Penerbit<br>TIRA PUSTAKA<br>Jalan Cemara Raya Kav. 10D<br>Jakapermai, Bekasi                                                                                          |
| 466. | Drs. Winarno Hami Seno | Kepala Subdirektorat Monitor<br>dan Penyesuaian Pelaksana Teknis<br>Pendidikan Menengah Umum<br>Direktorat Pendidikan<br>Menengah Umum<br>Jalan Hang Lekir II/16<br>Jakarta Selatan |
| 467. | Wirawan                | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                                                                                             |
| 468. | Wisaksono Noeradi      | Ketua Dewan Eksekutif<br>(Perhumas)<br>Jalan Kebon Sirih 52<br>Jakarta Pusat                                                                                                        |
| 469. | Wuryaningsih Suhadi    | STPN<br>Jalan Teuku Umar 4A<br>Jakarta Pusat                                                                                                                                        |
| 470. | Y<br>Yasnur Asri       | FPBS IKIP Padang<br>Air Tawar<br>Padang                                                                                                                                             |
| 471. | Yetty Kusniyati Hadish | Dosen FPBS IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi 229<br>Bandung                                                                                                                           |

| No.  | N a m a                 | A l a m a t                                                                                             |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 472. | Yeni Suciani            | Mahasiswa Universitas Nasional<br>d.a. Jalan Utan Kayu No. 29<br>Gang Jeruk Rt. 011/06<br>Jakarta Timur |
| 473. | Drs. Y. Karmin          | Dosen IKIP Sanata Dharma<br>Yogyakarta                                                                  |
| 474. | Yoshihiro Sihata        | Mahasiswa UNAS<br>Jakarta                                                                               |
| 475. | Drs. Yoyo Mulyana       | Dosen FPBS IKIP Bandung<br>Jalan Setiabudi 229<br>Bandung                                               |
| 476. | Drs. Yudiono K.S., S.U. | Dosen Universitas Diponegoro<br>Jalan Hayam Wuruk 4<br>Semarang                                         |
| 477. | Yusnidar Effendy        | Mahasiswa IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                                     |
| 478. | Yusuf A. Puar           | Pengarang<br>Jalan Merpati VI No. 21<br>Jakarta Selatan                                                 |
| 479. | Dra. Yuslina Kasim      | FPBS IKIP Padang<br>Air Tawar<br>Padang                                                                 |
| 480. | Yusta                   | Fakultas Sastra<br>Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar                                 |

| No.  | N a m a                    | A l a m a t                                                                                           |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 481. | Yusof Abdullah             | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                             |
|      | Z                          |                                                                                                       |
| 482. | Zainal Abidin Bakar        | Persatuan Linguistik Malaysia<br>Peti Surat 803<br>Kuala Lumpur, Malaysia                             |
| 483. | Drs. Zainal Abidin Gaffar  | Dosen FKIP UNSRI<br>Jalan Sri Jayanegara<br>Bukit Besar<br>Palembang                                  |
| 484. | Drs. Zainal Abidin Gani    | Dosen FKIP UNSRI<br>Jalan Sri Jayanegara<br>Bukit Besar<br>Palembang                                  |
| 485. | Drs. Zainal Arifin         | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |
| 486. | Zainatoen Djnoeriay Enna-T | Staf Pengajar UNAS<br>Jalan Sawo Manila<br>Pejaten, Jakarta Selatan                                   |
| 487. | Drs. Zainuddin Amir        | Dosen FPBS IKIP<br>Ujung Pandang                                                                      |
| 488. | Zainuddin Taha             | Dosen FPBS IKIP<br>Ujung Pandang<br>Gunungsari Baru<br>Ujung Pandang                                  |

| No.  | Nama                 | Alamat                                                                                                |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 489. | Dra. Zaniar Rahman   | Dosen IKIP Jakarta<br>FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                  |
| 490. | Zulfahnur Z. Firdaus | Dosen IKIP Jakarta<br>FPBS IKIP Jakarta<br>Rawamangun, Jakarta Timur                                  |
| 491. | Drs. Zulkarnain      | Pusat Pembinaan dan<br>Pengembangan Bahasa<br>Jalan Daksinapati Barat IV<br>Rawamangun, Jakarta Timur |

